PaninBank

LAPORAN TAHUNAN

2020

ANNUAL REPORT

Sustainable Profit

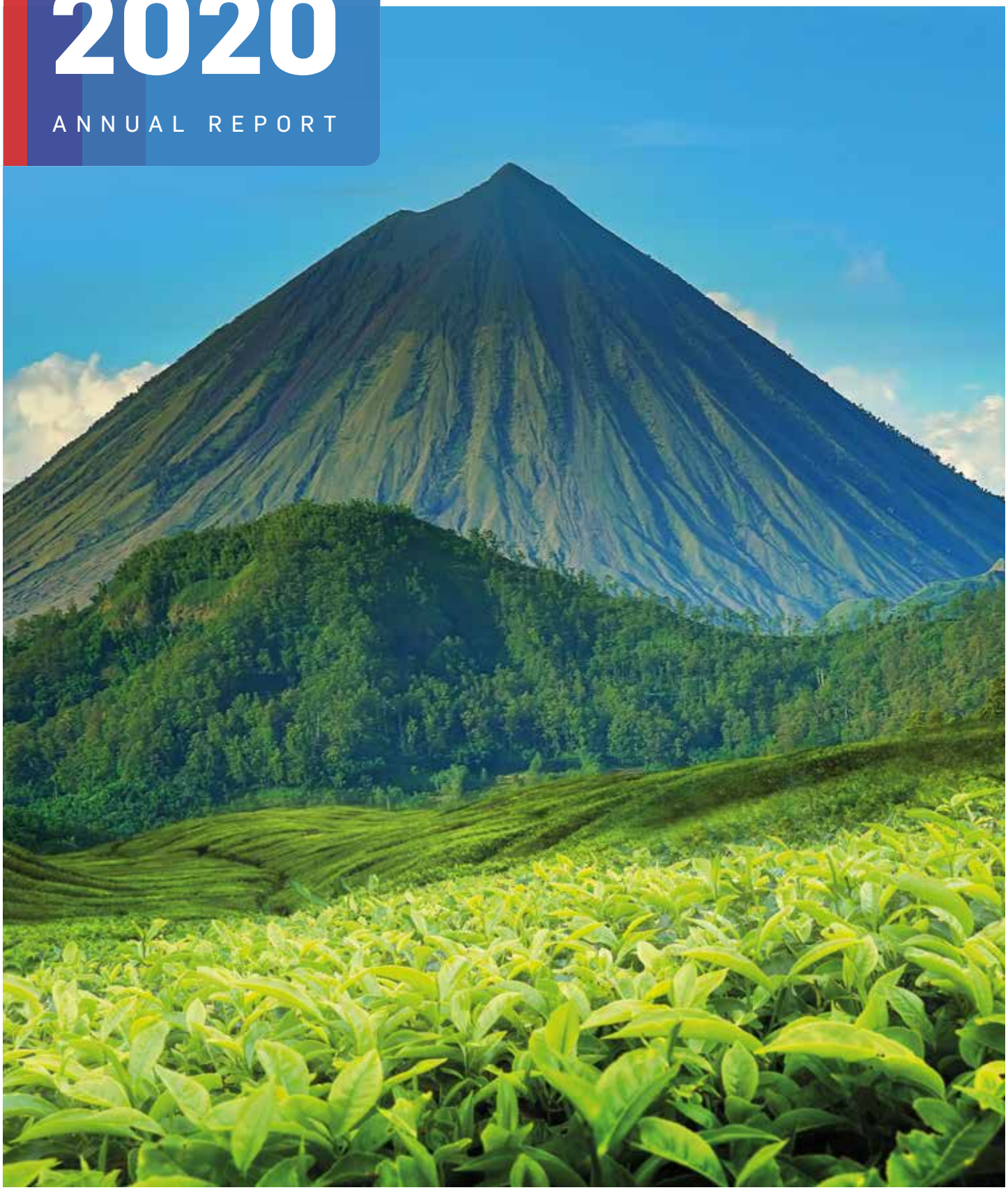

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", "PaninBank", dan "Bank" yang didefinisikan sebagai PT Bank Pan Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan perbankan yang beroperasi di Indonesia. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Pan Indonesia Tbk secara umum.

Disclaimer

This annual report contains financial conditions, operation results, policies, projections, plans, strategies, as well as the Company's objectives, which are classified as forward-looking. Statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Company", "PaninBank" and "Bank" hereinafter referred to PT Bank Pan Indonesia Tbk, as the banking company operating in Indonesia. The word "we" is at times used to simply refer to PT Bank Pan Indonesia Tbk in general.

Sustainable Profit

PaninBank didirikan pada tahun 1971 dari penggabungan beberapa bank, dan kemudian berkembang di tengah *booming* ekonomi minyak di Indonesia pada tahun 1970-an.

Kami semakin kuat pada tahun 1980-an bersamaan dengan keberhasilan diversifikasi Indonesia ke ekspor nonmigas.

Kami benar-benar diuji pada tahun 1990-an sebagai satu-satunya bank di antara sepuluh bank terbesar di Indonesia yang selamat dari Krisis Keuangan Asia tanpa dana talangan dari pemerintah.

Kami terus tumbuh dengan kokoh di tahun 2000-an, dan membuktikan ketahanan kami sekali lagi di tengah krisis keuangan global tahun 2008.

Kami tetap solid selama pandemi COVID-19, dan menunjukkan pengelolaan perbankan yang hati-hati yang menghasilkan modal dasar yang baik dan pertumbuhan yang stabil hingga ke akhir tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, kami merayakan 50 tahun PaninBank dengan pencapaian laba yang berkelanjutan, tumbuh bersama perokonomian dan masyarakat Indonesia, ditunjang keunggulan dari *Relationship Banking* dan pengembangan kapabilitas *Digital Banking*.

PaninBank was established in 1971 out of the mergers of several banks, and forged ahead amid Indonesia's booming, oil-driven economy of the 1970s.

We were strengthened in the 1980s alongside Indonesia's successful diversification into non-oil exports.

We were thoroughly tested in the 1990s as the only bank among the ten largest banks in Indonesia that had survived the Asian Financial Crisis without a government bailout.

We continued to grow robustly in the 2000s, and proved our resilience once again amid the global financial turmoil of 2008.

We remained solid during the COVID-19 pandemic, and demonstrated prudent banking management that produced sound capital base and steady growth through to year-end 2020.

As we enter 2021, we celebrated 50 years of PaninBank with **sustainable profit**, alongside the growth of Indonesia's economy and people, supported by our proven Relationship Banking and continuing development of Digital Banking capabilities.

Daftar Isi

Table of Contents

1 Sustainable Profit

04 **Ikhtisar Kinerja**
Performance Highlights

4 Kesinambungan Tema
Continuity of Theme

5 Ikhtisar Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

6 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

10 Peristiwa Penting
Event Highlights

16 Penghargaan
Awards

18 **Laporan Manajemen**
Management Report

18 Pesan Pendiri PaninBank dan PaninGroup
Message from the Founder of PaninBank and PaninGroup

22 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

30 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

49 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Pan Indonesia Tbk
Statement of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Bank Pan Indonesia Tbk

50 **Profil Perusahaan**
Company Profile

52 Sekilas Perusahaan
Company at A Glance

54 Informasi Umum
General Information

55 Jejak Langkah
Milestones

58 Bidang Usaha
Line of Business

64 Struktur Organisasi
Organizational Structure

66 Visi, Misi dan Strategi
Vision, Mission and Strategy

68 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

74 Profil Direksi
Board of Directors Profile

84 Manajemen Perusahaan
Company Management

85 Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information

87 Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Instrumen Keuangan
Subsidiaries, Associate Entities and Financial Instruments

90 Wilayah Operasional
Operations Area

92 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

93 Struktur Pemegang Saham
Shareholders Structure

94 Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

94 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

96 Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
Institutions and/or Capital Market Support

97 Informasi pada *Website* Perusahaan
Information on the Company Website

98 **Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Analysis and Discussion

100 Perekonomian dan Industri Perbankan
Economy and Banking Industry

111 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha dan Informasi Segmen Usaha
Operations Review per Business Segment

112 Perbankan Ritel
Retail Banking

122 Perbankan Komersial
Commercial Banking

126 Perbankan Korporasi
Corporate Banking

130 Institutional Banking & BUMN
Institutional and State-Owned Enterprise Banking

134 Perbankan Internasional
International Banking

138 Tresuri
Treasury

160 Tinjauan Kinerja Keuangan
Overview of Financial Performance

222 Teknologi informasi
Information Technology

226 Sumber Daya Manusia
Human Resources

234 **Tata Kelola Perusahaan**
Good Corporate Governance

236 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

251 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

264 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

280 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under the Board of Commissioners

304 Direksi
Board of Directors

330 Komite-Komite di Bawah Direksi
Committees Under the Board of Directors

342 Kebijakan Keberagaman dan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity and Succession Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

348 Kebijakan Remunerasi PaninBank
PaninBank Remuneration Policy

352 Fungsi Kepatuhan
Compliance Functions

364 Audit Internal
Internal Audit

373 Audit Eksternal
External Audit

375 Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Risk Management Including Internal Control System

300 Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur
Assessment on Candidate for Commissioners and Directors

390 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

393 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

399 Budaya Perusahaan
Corporate Culture

399 Perlindungan Nasabah
Custo'mer Protection

401 Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

404 Pakta Integritas Perseroan
Company Integrity Pact

404 Komitmen Anti Korupsi
Anti-Corruption Commitment

405 Penanganan Keluhan Pelanggan
Customer Complaints Handling

406 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

409 Permasalahan Hukum
Legal Cases

411 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Disclosure and Company Data

418 Rencana Strategis Perseroan
Company's Strategic Plans

420 Pengungkapan Aspek Lainnya
Disclosure of Other Aspects

423 Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi
Integrated Governance and Integrated Risk Management

446 Manajemen Risiko
Risk Management

494 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Corporate Social Responsibility

497 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Governance

499 Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia
Commitment and Policy on Social Responsibility related to Human Rights

500 Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil
Commitment and policy on Social Responsibility related to Fair Operations

500 Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup
Commitment and Policy on Social Responsibility related to the Environment

503 Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Commitment and Policy on Social Responsibility related to Employment, Occupational Health and Safety

504 Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Commitment and Policy on Social Responsibility related to Community Development

507 Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Nasabah
Commitment and Policy on Social Responsibility related to the Customer

510 Jaringan Kantor
Office Network

522 Laporan Keuangan
Financial Statements

Kesinambungan Tema

Continuity of Theme

2016

2017

2018

2019

2020

Sustainable Profit

PaninBank didirikan pada tahun 1971 dari penggabungan beberapa bank, dan kemudian berkembang di tengah *booming* ekonomi minyak di Indonesia pada tahun 1970-an.

Kami semakin kuat pada tahun 1980-an bersamaan dengan keberhasilan diversifikasi Indonesia ke ekspor nonmigas.

Kami benar-benar diuji pada tahun 1990-an sebagai satu-satunya bank di antara sepuluh bank terbesar di Indonesia yang selamat dari Krisis Keuangan Asia tanpa dana talangan dari pemerintah.

Kami terus tumbuh dengan kokoh di tahun 2000-an, dan membuktikan ketahanan kami sekali lagi di tengah krisis keuangan global tahun 2008.

Kami tetap solid selama pandemi COVID-19, dan menunjukkan pengelolaan perbankan yang hati-hati yang menghasilkan modal dasar yang baik dan pertumbuhan yang stabil hingga ke akhir tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, kami merayakan 50 tahun PaninBank dengan pencapaian laba yang berkelanjutan, tumbuh bersama perokonomian dan masyarakat Indonesia, ditunjang keunggulan dari *Relationship Banking* dan pengembangan kapabilitas *Digital Banking*.

PaninBank was established in 1971 out of the mergers of several banks, and forged ahead amid Indonesia's booming, oil-driven economy of the 1970s.

We were strengthened in the 1980s alongside Indonesia's successful diversification into non-oil exports.

We were thoroughly tested in the 1990s as the only bank among the ten largest banks in Indonesia that had survived the Asian Financial Crisis without a government bailout.

We continued to grow robustly in the 2000s, and proved our resilience once again amid the global financial turmoil of 2008.

We remained solid during the COVID-19 pandemic, and demonstrated prudent banking management that produced sound capital base and steady growth through to year-end 2020.

As we enter 2021, we celebrated 50 years of PaninBank with sustainable profit, alongside the growth of Indonesia's economy and people, supported by our proven Relationship Banking and continuing development of Digital Banking capabilities.

Ikhtisar Kinerja 2020

2020 Performance Highlights

Jumlah Aset
Total Assets

Rp218,1
Triliun | Trillion

Aset PaninBank tahun 2020 tumbuh 3,21% menjadi Rp218,1 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp211,3 triliun.

PaninBank's assets in 2020 grew by 3.21% to Rp211.3 trillion from 2019 which amounted to 211.3 trillion.

Ekuitas
Equity

Rp47,46
Triliun | Trillion

Ekuitas tumbuh 6,79% menjadi Rp47,46 triliun pada tahun 2020 dari sebesar Rp44,44 triliun pada 2019.

Equity grew 6.79% to Rp47.46 trillion in 2020 from Rp44.44 trillion in 2019.

Dana Pihak Ketiga (DPK)
Third Party Funds

Rp143,0
Triliun | Trillion

Dana Pihak Ketiga (DPK) PaninBank tahun 2020 meningkat sebesar 8,85% dari posisi tahun 2019 Rp131,4 triliun menjadi Rp143,0 triliun.

PaninBank's Third Party Funds (DPK) in 2020 increased by 8.85% from the 2019 position of Rp131.4 trillion to Rp143.0 trillion.

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Income for the Current Year

Rp3,12
Triliun | Trillion

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan nasional akibat COVID-19, PaninBank tetap berhasil mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp3,12 triliun pada tahun 2020.

Amidst various challenges confronted by the national banking industry due to COVID-19, PaninBank still managed to record a net income for the year of Rp3.12 trillion in 2020.

Net *Non-Performing Loan* (NPL)

0,06%

NPL Net PaninBank tahun 2020 sebesar 0,66%, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 1,12%.

PaninBank's Net NPL in 2020 was 0.66%, decrease from 2019 which was 1.12%.

***Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

29,58%

Rasio kecukupan modal (CAR) tahun 2020 secara konsolidasi tercatat sebesar 29,58%, sementara secara individual Bank sebesar 29,55%. Sementara itu, permodalan Bank juga tercatat lebih solid dibandingkan dengan bank umum lainnya dengan nilai rata-rata CAR 23,89%.

Consolidated Capital Adequacy Ratio ("CAR") for 2020 was at 29.58%, while on the Bank alone basis was stood at 29.55%. On the other hand, the Bank's capital was also recorded to be more solid compared to other commercial banks with an average CAR value of 23.89%.

507 **Kantor Cabang**
Office

CallPanin
1500 678 (PSTN)
+6221-251 5555 (IDD)

Untuk informasi lebih lanjut, pengaduan serta pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor tersebut.

For further information, complaints and other services, please contact this numbers.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Seluruh angka dalam grafik dan tabel menggunakan notasi Indonesia
Numerical notation in all graphs and tables are in Indonesian

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of financial Position

(dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah)

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Aset						**Assets**
Kas	1.871	1.339	1.193	1.169	1.434	Cash
Giro pada Bank Indonesia dan Bank-bank Lain	2.381	9.014	9.199	10.496	10.249	Demand Deposits with Bank Indonesia & Others Bank
Giro pada Bank Lain - Bersih	2.038	848	829	920	1.336	Demand Deposits with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih	8.450	4.159	4.649	5.706	12.528	Placement in BI & Others Bank - Net
Efek-efek - Bersih	43.062	17.901	12.288	32.166	21.373w	Securities - Net
Tagihan Derivatif - Pihak Ketiga	3	38	67	8	13	Derivative Receivables - Third Party
Kredit - Bersih	116.110	136.725	137.386	128.652	125.049	Loans - Net
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	671	695	736	1.140	1.287	Factoring Receivables - Net
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga	17.258	11.682	13.150	7.934	4.187	Securities Purchased with Agreements to Resell - Third Parties
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	433	741	1.436	2.786	1.660	Finance Lease Receivables - Third Party
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	7.176	9.846	9.387	6.971	5.055	Consumer Financing Receivables - Net
Tagihan Akseptasi	2.496	2.578	2.408	2.272	1.797	Acceptances Receivable
Penyertaan dalam Bentuk Saham - Bersih	661	753	565	585	562	Investment in Shares of Stock - Net
Biaya Dibayar Dimuka	70	135	139	124	104	Prepaid Expenses
Aset Tetap - Bersih	10.326	10.313	10.261	9.688	9.852	Fixed Assets - Net
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	0	0	0	168	0	Non-Current Assets Held for Sale
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	101	31	126	343	335	Deferred Tax Assets - Net
Aset Tak Berwujud	214	145	120	138	130	Intangible Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	0	0	0	0	0	Investment in Associates
Aset Lain-lain - Bersih	4.746	4.344	3.265	2.276	2.224	Other Assets - Net
Jumlah Aset - Bersih	**218.067**	**211.287**	**207.204**	**213.542**	**199.175**	**Total Assets - Net**

(dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah)

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Liabilitas dan Ekuitas						**Liabilities and Equity**
Liabilitas Segera	203	175	288	499	256	Liabilities Payable Immediately
Simpanan dari Nasabah	143.029	131.403	137.694	145.671	142.654	Deposits
Simpanan dari Bank Lain	1.374	3.865	555	3.632	1.718	Deposits from other Banks
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	2.518	4.910	0	8.138	1.607	Securities Sold under the Agreements to repurchase - Third Party
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	3	38	66	9	24	Derivatives Payable - Third Party
Liabilitas Akseptasi	2.506	2.583	2.412	2.276	1.802	Acceptance Payables
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	11.513	11.494	11.541	4.849	5.961	Securities Issued - Net
Pinjaman yang Diterima - Pihak Ketiga	3.094	5.645	4.748	4.480	3.269	Borrowings - Third Party
Utang Pajak	109	274	310	164	252	Taxes Payable

(dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah)

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.168	876	893	1.062	859	Post-Employment Benefits Obligation
Liabilitas Pajak Tangguhan	0	0	0	0	0	Deferred Tax Liabilities
Beban yang Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	1.302	1.797	2.170	1.991	2.077	Accrued Expenses and Other Liabilities
Obligasi Subordinasi - Bersih	3.788	3.785	5.780	4.482	4.495	Subordinated Bonds - Net
Modal Pinjaman	0	0	0	0	0	Borrowed Equity
Jumlah Liabilitas	170.607	166.845	166.457	177.253	164.974	Total Liabilities
Modal Saham	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	Capital Stock
Agio Saham	3.441	3.444	3.444	3.444	3.444	Additional Paid-In Capital
Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak Non Pengendali	(268)	(141)	(118)	(29)	(51)	Difference in Value of Equity Transactions with Non-Controlling Interest
Komponen Ekuitas Lainnya	9.652	7.777	7.449	6.710	6.784	Other Equity Components
Saldo Laba	28.991	27.886	24.562	21.448	19.029	Retained Earnings
Kepentingan Non Pengendali	3.237	3.067	3.001	2.307	2.586	Non-Controlling Interest
Jumlah Ekuitas	47.460	44.442	40.747	36.289	34.201	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**218.067**	**211.287**	**207.204**	**213.542**	**199.175**	**Total Liabilities and Equity**

Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian
Consolidated Statements of Comprehensive Income

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In billion Rupiah unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Pendapatan bunga	16.185	17.725	17.212	17.483	17.447	Interest Revenues
Beban Bunga	(7.378)	(8.756)	(8.248)	(8.832)	(9.004)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga Bersih	8.807	8.969	8.964	8.651	8.443	Interest Revenues - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	3.277	1.912	2.407	1.546	1.295	Other Operating Revenue
Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan Nilai	(2.683)	(1.599)	(1.948)	(2.562)	(2.007)	Reversal of Provision (Provision) for Impairment Losses
Beban Operasional Lainnya	(5.476)	(4.866)	(5.048)	(4.736)	(4.524)	Other Operating Expenses
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(4.881)	(4.553)	(4.589)	(5.752)	(5.236)	Other Operating Expenses - Net
Laba Operasional	3.926	4.416	4.375	2.899	3.207	Income from Operations
Pendapatan Non Operasional - Bersih	146	179	198	65	99	Non-Operating Revenues - Net
Laba (Rugi) sebelum beban pajak	4.072	4.596	4.573	2.963	3.306	Income (Loss) Before Tax Expenses
(Beban) Manfaat Pajak	(948)	(1.097)	(1.386)	(955)	(788)	Tax Benefit (Expense)
Laba Bersih Periode Berjalan	3.124	3.498	3.187	2.008	2.518	Net Income for the Year
- Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.103	3.317	3.113	2.412	2.405	Attributable to Equity Holders of the Parent Entity
- Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	21	181	75	(404)	113	Attributable to Non-Controlling Interest
Laba Bersih	**3.124**	**3.498**	**3.187**	**2.008**	**2.518**	**Net Income**
Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain	1.821	346	750	(58)	870	Other Comprehensive Income (Losses)
Jumlah Laba Komprehensif	**4.945**	**3.844**	**3.937**	**1.950**	**3.388**	**Total Comprehensive Income**
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat						Total Comprehensive Income
- Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.950	3.658	3.854	2.344	3.264	Attributable to Equity Holders of the Parent Entity
- Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	(4,5)	186	83	(394)	124	Attributable to Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif	**4.945**	**3.844**	**3.937**	**1.950**	**3.388**	**Total Comprehensive Income**
Laba (Rugi) Bersih per Saham (dalam Satuan Penuh)	**128,83**	**137,70**	**129,22**	**100,15**	**99,86**	**Earnings Per Share** (In Full Rupiah Amount)

Rasio Keuangan
Financial Ratios

(%) Kecuali disebutkan lain | (%) Unless otherwise stated

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Permodalan						Equity
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29,58	23,41	23,33	21,99	20,49	CAR with Credit, Operational Risks
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	27,04	20,81	20,13	19,15	18,54	CAR with Credit, Operational and Market Risks
Aktiva Tetap terhadap Modal	21,33	23,38	24,73	26,52	29,08	Fixed Assets to Capital
Aset Produktif						Productive Assets
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Nonproduktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Nonproduktif	2,07	2,51	2,35	1,97	2,04	Productive and Non-Productive Non-Performing Assets to Total Productive and Non-Productive Assets
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	1,93	2,43	2,49	2,11	2,16	Non-Performing Productive Assets to Total Productive Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	2,99	2,22	2,21	1,84	1,84	Impairment Losses to Productive Assets
NPL-*Gross*	3,01	3,02	3,04	2,84	2,81	Gross Non-Performing Loan (NPL)
NPL-*Nett*	0,66	1,12	0,91	0,77	0,82	Net Non-Performing Loan (NPL)
Profitabilitas						Profitability
Imbal Hasil Aset (ROA)	1,91	2,08	2,16	1,61	1,69	Return on Assets (ROA)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	7,66	8,90	9,23	7,49	8,29	Return on Equity (ROE)
Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	4,62	4,83	4,84	4,68	5,03	Net Interest Margin (NIM)
BOPO	79,54	77,96	78,27	85,04	83,02	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	245,82	130,61				Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	147,07	129,52	132,25			Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	1,43	1,66	1,54	0,94	1,26	Income (Loss) to Total Assets Ratio
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Ekuitas	6,58	7,87	7,82	5,53	7,36	Income (Loss) to Total Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	78,24	78,97	80,33	83,01	82,83	Liabilities to Total Assets Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	359,47	375,43	408,51	488,45	482,37	Liabilities to Equity Ratio
Likuiditas (Bank Saja)						**Liquidity (Bank Only)**
Loan to Deposit Ratio (LDR)	83,26	107,92	104,15	96,28	94,37	Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio Dana Murah (CASA)	39,44	37,15	36,96	35,05	39,10	Current Account Saving Account (CASA)
Kepatuhan						**Compliance**
Persentase Pelanggaran BMPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Percentage of LLL Violation
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Third Parties
Persentase Pelanggaran BMPK			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Percentage of LLL Excess**
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Third Parties
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah	3,09	6,01	6,51	6,51	6,54	Minimum Reserve Requirements Rupiah
Giro Wajib Minimum Utama Valuta Asing	4,00	8,02	8,03	8,09	8,63	Minimum Reserve Requirements Foreign
Posisi Devisa Neto	2,21	0,77	1,19	0,56	1,06	Net Open Position
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Bunga	19,30	19,74	18,52	11,49	14,43	Income (Loss) to Interest Revenues
Rasio Laba (Rugi) terhadap Total Pendapatan	15,93	17,65	16,08	10,52	13,36	Income (Loss) to Total Revenues
Jumlah Saham Beredar (dalam jutaan)	24.088	24.088	24.088	24.088	24.088	Outstanding Share (in million)

Lain-Lain
Others

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Jumlah Karyawan	7.845	8.191	11.351	11.844	13.379	Number of Employees
Jumlah Kantor	507	523	550	562	565	Number of Offices
Jumlah ATM	866	935	964	967	981	Number of ATMs

IKHTISAR OPERASIONAL
Operational Highlights

(dalam Rp miliar | In billion Rupiah)

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Pendanaan						**Fund Raised**
Produk Simpanan	143.029	131.403	137.694	145.671	142.654	Deposit Product
Giro	11.791	9.913	9.964	9.731	10.413	Demand
Tabungan	44.623	38.904	40.921	41.325	43.714	Saving
Deposito Berjangka	86.615	82.586	86.809	94.615	88.527	Time Deposit
Simpanan di Bank lain	1.373	3.865	555	3.632	1.718	Interbank Placement
Kewajiban Repo	2.518	4.910	0	8.138	1.607	Securities Sold with Agreement to Repurchase
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	11.513	11.494	11.541	4.849	5.961	Securities Issued - Net
Pinjaman yang Diterima - Pihak Ketiga	3.094	5.645	4.748	4.480	3.269	Borrowings - Third Parties
Obligasi Subordinasi	3.788	3.785	5.780	4.482	4.495	Subordinated Bonds
Total Pendanaan	**165.315**	**161.102**	**160.318**	**171.251**	**159.704**	**Total Funding**

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Harga dan Volume Transaksi Saham per Triwulan di BEI
Price and Volume of Share Transactions per Quarter at IDX

Triwulan Quarter	Harga Saham Stock Price (Rp)			Volume Perdagangan Trading Volume ('000 Unit)	Jumlah Saham Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar Saham | Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
				2020		
Q1	1.400	615	690	315.946	24.087.645.998	16.447.975.738.620
Q2	860	650	815	259.034	24.087.645.998	19.427.681.488.370
Q3	900	715	740	613.326	24.087.645.998	17.639.858.038.520
Q4	1.190	735	1.065	601.117	24.087.645.998	25.387.092.987.870
				2019		
Q1	1.670	1.040	1.440	747.101	24.087.645.998	34.686.210.237.120
Q2	1.470	1.105	1.300	287.504	24.087.645.998	31.313.939.797.400
Q3	1.535	1.240	1.335	843.226	24.087.645.998	32.157.007.407.330
Q4	1.360	1.145	1.335	200.028	24.087.645.998	32.157.007.407.330

Peristiwa Penting

Event Highlights

Januari | January

Launching Savings Bond Ritel (SBR) Seri SBR009
PaninBank dalam acara *launching* masa penawaran Savings Bond Ritel (SBR) Seri SBR009 yang diselenggarakan oleh DJPPR Kemenkeu pada tanggal 27 Januari 2020.

Launching of Retail Savings Bond (SBR) Series SBR009
PaninBank in the launching of the Retail Savings Bond (SBR) Series SBR009 organized by the DJPPR, Ministry of Finance on Janury 27, 2020.

Februari | February

PaninPeduli Donor Darah KCU Sangaji
Kegiatan PaninPeduli donor darah KCU Sangaji yang berlangsung tanggal 17 Februari 2021.

PaninPeduli Blood Donation at KCU Sangaji
The activity of PaninPeduli blood donation at KCU Sangaji which took place on February 17, 2021.

Launching Sukuk Ritel 012
PaninBank dalam acara launching masa penawaran Sukuk Ritel SR012 yang diselenggarakan oleh DJPPR Kemenkeu pada tanggal 29 Februari 2020.

Launching of Retail Sukuk 012
PaninBank in the launching of the SR012 Retail Sukuk offering period held by the Ministry of Finance's DJPPR on February 29, 2020.

PaninBank mengadakan rapat kerja bersama.

PaninBank held a joint working meeting.

Infobank Satisfaction, Loyalty & Engagement Awards 2020
PaninBank menerima 4 (empat) penghargaan dari Infobank yang bekerja sama dengan Marketing Research Indonesia pada tanggal 20 Februari 2020.

Infobank Satisfaction, Loyalty & Engagement Awards 2020
PaninBank received 4 (four) awards from Infobank in collaboration with Marketing Research Indonesia on February 20, 2020.

Maret | March

Peluncuran Panin Super Bonanza 2020
Bapak Herwidayatmo bersama Ibu Roosniati Salihin mengadakan *press conference* peluncuran program tabungan berhadiah Panin Super Bonanza 2020.

Launch of the Panin Super Bonanza 2020
Mr. Herwidayatmo together with Mrs. Roosniati Salihin held a press conference for launch of the Panin Super Bonanza 2020 savings program.

April | April

Donasi PaninBank melalui PaninPeduli untuk Bluebird
PaninBank melalui PaninPeduli menyerahkan donasi untuk Tim Bluebird pada 17 April 2020 bertempat di kantor pusat Bluebird Jakarta.

PaninBank Donation through PaninPeduli for Bluebird
PaninBank through PaninPeduli handed over donations to the Bluebird Team on April 17, 2020 at the Bluebird Jakarta head office.

Mei | May

Donasi PaninBank melalui PaninPeduli di Kota Padang
PaninBank KCU Padang menyerahkan donasi berupa paket sembako dan *faceshield* ke 3 lembaga sosial di kota Padang, yaitu Himpunan Bersatu Teguh (HBT), Himpunan Tjinta Teman (HTT) dan Perkumpulan Sosial Katolik dan Pemakaman (PSKP St. Yusuf Padang). Selanjutnya seluruh bantuan akan didistribusikan langsung oleh ketiga lembaga tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

PaninBank Donation through PaninPeduli in Padang
PaninBank KCU Padang handed over donations of food packages and faceshields to 3 social institutions in Padang, namely Himpunan Bersatu Teguh (HBT), Himpunan Tjinta Teman (HTT) and the Catholic Social Association and Cemeteries (PSKP St. Yusuf Padang). Furthermore, all aid will be distributed directly through three social Institutions to those in need.

PaninBank melalu PaninPeduli mendonasikan 250 Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta.

PaninBank through PaninPeduli donated 250 Personal Protective Equipment (PPE) for medical personnel of Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta.

Donasi PaninBank melalui PaninPeduli untuk Petugas PMI dan Tenaga Medis
PaninBank mendonasikan 1.000 pasang APD untuk PMI. Bantuan diserahkan oleh Direktur Kepatuhan PaninBank, Bpk. Antonius Ketut dan diterima oleh Ketua Umum PMI Pusat, Bapak H.M Jusuf Kalla, di Kantor PMI Pusat pada 20 Mei 2020.

PaninBank Donation through PaninPeduli for PMI Officers and Medical Personnel
PaninBank donated 1,000 pairs of Personal Protective Equipment (PPE) for PMI. The assistance was handed over by the Compliance Director of PaninBank, Mr. Antonius Ketut and received by the Chairman of PMI Pusat, Mr. H.M Jusuf Kalla, at the PMI Central Office on May 20, 2020.

Mei | May

Donasi PaninBank melalui PaninPeduli untuk RSUD Bendan Pekalongan
PaninBank menyerahkan donasi 4.000 *Surgical Face Masker* kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Pekalongan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Sub Branch Manager Pekalongan, Bapak Michael Laloy.

PaninBank Donation through PaninPeduli for Bendan Pekalongan Regional Hospital
PaninBank handed over a donation of 4,000 Surgical Face Masks to the Regional General Hospital at Bendan Pekalongan. This assistance was given directly by the Sub Branch Manager of Pekalongan, Mr. Michael Laloy.

PaninPeduli Kota Yogyakarta
PaninBank Yogyakarta membagikan 500 paket Sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kantor-kantor Cabang PaninBank Yogyakarta.

PaninPeduli for Yogyakarta
PaninBank Yogyakarta distributed 500 food packages to communities around PaninBank Yogyakarta Branch offices.

Juni | June

PaninBank menyelenggarakan RUPS Tahunan bertempat di Gedung Kantor Pusat PaninBank.

PaninBank held the Annual GMS at the PaninBank Head Office Building.

Sebagai mitra distribusi, PaninBank menghadiri dan turut berpatisipasi dalam acara *virtual launching* masa penawaran ORI017 yang diselenggarakan oleh DJPPR Kemenkeu RI.

As a distribution partner, PaninBank attended and participated in the virtual launching of the ORI017 offering period organized by DJPPR of the Ministry of Finance.

Kantor Cabang PaninBank Padang melalui PaninPeduli membagikan lebih dari 3.000 *face shield* kepada nasabah perorangan, lembaga pendidikan, puskesmas, rumah ibadah, tempat usaha nasabah, instansi, dan lembaga sosial lainnya yang tersebar di kota Padang.

PaninBank Padang Branch Office through PaninPeduli distributed more than 3,000 face shields to individual customers, educational institutions, health centers, houses of worship, customers' places of business, agencies and other social institutions spread across the city of Padang.

Juli | July

Kegiatan Penanaman Pohon Trembesi oleh Green Officer PaninBank Pekanbaru bersama Kepala desa Panadau Jaya dan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, Riau yang dilakukan pada tanggal pada tanggal 26 Juli 2021.

The Trembesi Tree Planting Activity by the Green Officer of PaninBank Pekanbaru with Head of Panadau Jaya Village and Students of UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, which was held on July 26, 2021.

Agustus | August

Herwidayatmo, Presiden Direktur PaninBank diundang oleh CNBC menjadi narasumber pada acara *talkshow Money Talks Power Lunch*, mengenai Resesi Mengintai Lampu Kuning Profitabilitas Bank.

Herwidayatmo, President Director of PaninBank was invited by CNBC as a guest speaker at the Money Talks Power Lunch talk show, about Recession Stalking the Yellow Light of Bank Profitability.

PaninBank sebagai mitra distribusi Kemenkeu menghadiri dan turut berpatisipasi dalam acara *virtual launching* masa penawaran Sukuk Ritel seri013 yang diselenggarakan oleh DJPPR Kemenkeu pada hari Jumat, 28 Agustus 2020.

PaninBank as the Ministry of Finance's distribution partner attended and participated in the virtual launching of the Retail Sukuk offering period series013 organized by the Ministry of Finance's DJPPR on Friday, August 28, 2020.

PaninBank menghadiri dan turut berpatisipasi dalam acara *virtual launching* masa penawaran ORI018 yang diselenggarakan oleh DJPPR Kemenkeu RI.

PaninBank attended and participated in the virtual launching of the ORI018 offering period organized by DJPPR of the Ministry of Finance.

PaninBank berpartisipasi dalam acara *Capital Market Summit & Expo* (CMSE) 2020 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Kegiatan yang dilaksanakan secara *online* selama 6 hari berturut-turut ini mencakup kegiatan pameran bagi para *stakeholders* pasar modal, seminar, dan kegiatan edukasi serta sosialisasi pasar modal.

PaninBank participated in the 2020 Capital Market Summit & Expo (CMSE) organized by the Financial Services Authority (OJK) together with the Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), and PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). The activity, which was carried out online for 6 consecutive days, includes exhibition activities for capital market stakeholders, seminars, as well as educational and capital market socialization activities.

September | September

PaninBank mendukung kegiatan Webinar Gerakan Pakai Masker dengan Tema "Gotong Royong Lewati Krisis, Mengkapitalisasi Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi."

PaninBank supports the Webinar on Wear Mask Movement with the theme of "Gotong Royong Through Crisis, Capitalizing Social Solidarity in the Midst of a Pandemic."

September | September

Pada ajang "Penghargaan Economic Review - Indonesia Finance Award III 2020", PaninBank yang diwakili oleh Bapak Jasman Ginting selaku Corporate Secretary menerima penghargaan "The Big 3 Public Company for Bank (BUKU 4)" dengan skor: (A) Platinum Award (Very excellent)

At the "Economic Review Award - Indonesia Finance Award III 2020", PaninBank represented by Mr. Jasman Ginting as Corporate Secretary received the award "The Big 3 Public Company for Bank (BUKU 4)" with a score of: (A) Platinum Award (Very excellent).

Panin Mengajar
PaninBank mengadakan kegiatan Panin Mengajar dengan materi "Personal Branding" yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada hari Kamis, 10 September 2020. Kegiatan ini diorganisir oleh Yayasan Karya Salemba Empat.

PaninBank held a Panin Teaching activity with the material "Personal Branding" which was carried out online through the zoom meeting application on Thursday, September 10, 2020. This activity organized by Karya Salemba Empat Foundation.

November | November

Launching ST007
PaninBank dalam acara *launching* masa penawaran Green Sukuk Ritel ST007 yang diselenggarakan oleh DJPPR Kemenkeu pada 4 November 2020.

Launching ST007
PaninBank in the launching of the ST007 Retail Green Sukuk offering period organized by DJPPR of the Ministry of Finance on November 4, 2020.

Kunjungan Kerja Direktur Network Distribution ke Jawa Timur
Direktur Network Distribution, Bapak Haryono Wongsonegoro dan tim melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang PaninBank di Jawa Timur pada tanggal 16-19 November 2020.

Network and Distribution Director Visit to East Java
PaninBank Network and Distribution Director, Mr. Haryono Wongsonegoro and team visit to the East Java Branch Office (KC) on November 16-19, 2020.

Desember | December

Bapak Mu'min Ali Gunawan memperoleh Penghargaan Top 10 Most Outstanding People dari Infobank dan The Asian Post pada tanggal 26 November 2020.

Mr. Mu'min Ali Gunawan received the "Top 10 Most Outstanding People" award from Infobank and The Asian Post on November 26, 2020.

Penghargaan PaninBank sebagai Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik Bank BUKU 3 dan 4 pada tanggal 3 Desember 2020 dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTB1) 2020 secara virtual kepada Bapak Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operation dan IT PaninBank.

PaninBank awarded as the Best Participant in the BI-RTGS System and BI-SSSS for Bank BUKU 3 and 4 on December 3, 2020 in a series of virtual Bank Indonesia Annual Meeting (PTB1) 2020 events to Mr. Suwito Tjokrorahardjo, PaninBank's Director of Operations and IT.

Penghargaan
Awards

Februari | February

Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award V 2020
3rd - The Best Corporate Secretary & Corporate Communication Award V 2020
Category Public Company (Bank); Sektor BUKU 4 (Rank 3rd)

Economic Review

Piagam Penghargaan PMI
Kegiatan donor darah dengan menghimpun 474 kantong labu darah.
Blood Donations, collecting 474 blood pumpkin bags.

Palang Merah Indonesia

Infobank Satisfaction, Loyalty & Engagement Awards 2020
- Peringkat I Kategori Loyalty Index 2020;
- Peringkat II Kategori SLE Index 2020;
- Peringkat II Kategori Satisfaction Index 2020; dan
- Peringkat III Kategori Satisfaction Index 2020 Fisik
- Rank I 2020 Loyalty Index Category;
- Rank II in the SLE Index 2020 Category;
- Rank II Category Satisfaction Index 2020; and
- Rank III for the 2020 Physical Satisfaction Index Category organized

Marketing Research Indonesia

Oktober | October

Indonesia Finance Award III 2020
The Big 3 Public Company for Bank (BUKU 4); Score (A) Platinum Award (Very excellent) Financial Zoominar & Indonesia Finance Award III 2020.

Economic Review

November | November

SimPel Award 2020
Bank Perkembangan SimPel Terbaik Kategori Bank Umum
The Best SimPel Development Commercial Bank Category

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

November | November

Indonesia Information Technology Award - III - 2020
The BiG 7 IT for Public Company
Platinum Award
(Score A – Very Excellent)
Category: Bank - BUKU 4

Economic Review

Penghargaan Top 10 Most Outstanding People
Bapak Mu'min Ali Gunawan menerima penghargaan dalam acara Membangun Manusia Indonesia yang Sehat, Humanis, Profesional, dan Berintegritas
Mr. Mu'min Ali Gunawan awarded in the event of Building a Healthy Indonesian Human, Humanist, Professional, and Integrity

Infobank dan The Asian Post

Desember | December

Bank Indonesia Award 2020
Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik Bank BUKU 3 dan 4.
Participant of The Best BI-RTGS and BI-SSSS - Bank BUKU 3 dan 4

Bank Indonesia

Bank Indonesia Award 2020 – Tingkat Provinsi Riau
- Penukaran Kolektif UPK 75 Terbanyak - *Tier* 2 Juara 1
- Realisasi Penarikan Sesuai Proyeksi - Juara 1
- Petugas Kliring Teladan – Juara 3

Bank Indonesia

Operational Excellence Award III 2020
3rd – The Best Indonesia Operational Excellence Award
Category: Bank Swasta BUKU 4 - Public Company;
Score: A - Platinum Award (Very Excellent).

Economic Review – Indonesia

ATM Bersama
The Most Transaction Growth Members Meeting ATM Bersama Tahun 2020.

Artajasa - ATM Bersama

Pesan Pendiri PaninBank dan PaninGroup

Message from the Founder of PaninBank and PaninGroup

Tahun 2021 Merupakan Tahun Emas, 50 Tahun Berdirinya PaninBank.

2021 is a Golden Year, Marking the 50th Anniversary of PaninBank.

Salam Sejahtera,

Perkenankan saya menggunakan kesempatan ini untuk mensyukuri rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pemangku kepentingan serta para nasabah yang telah bersama kami selama lima dasawarsa.

Tahun 2021 PaninBank memasuki usia 50 tahun berkiprah dalam industri perbankan nasional. Kami melayani nasabah dengan sepenuh hati, berkomitmen dan saling percaya sehingga memberikan hasil yang sangat baik.

Saat ini, PaninBank dan Panin Group telah menjadi salah satu konglomerasi keuangan dan memberikan sumbangsih yang berarti dan berperan serta dalam industri keuangan serta perekonomian nasional.

PaninBank memiliki struktur pemodalan yang kuat dan kinerja keuangan yang sangat baik selama lima dekade di tengah tantangan perekonomian yang terus bergejolak sejalan dengan kondisi pasar. PaninBank dapat melewati beberapa krisis yang terjadi seperti krisis multidimensi tahun 1998. PaninBank tidak memerlukan rekapitalisasi dari Pemerintah melalui bantuan likuiditas. Pertumbuhan kinerja PaninBank terus berkembang dari tahun ke tahun secara berkesinambungan. Semua ini terjadi karena pengelolaan yang berhati-hati, dinamis dan strategis.

Pada tahun 2020, PaninBank berhasil mencatat laba bersih lebih dari Rp3 trilliun dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) konsolidasi sebesar 29,58%. Ekuitas pemegang saham dapat ditingkatkan menjadi Rp47,46 triliun.

Greetings,

Allow me to use this occasion to express how fortunate to have had the blessings of God Almighty and the support of our loyal customers and other stakeholders over the past five decades.

In 2021, we celebrate our 50th year of service in the national banking sector, serving customers with dedication, commitment, and fostering mutual trust that combines to produce excellent results.

PaninBank and PaninGroup have evolved into the financial conglomerate we see today and that continue to contribute not only to the financial industry but also to the national economy.

During the last fifty years, amidst the ups and downs of the economy and market conditions, PaninBank has continued to maintain a robust capital structure and excellent financial performance. PaninBank has survived a number of crises, including the multi-dimensional crisis of 1998, without having to rely on government bail-out through recapitalisation. Through the years, PaninBank has continued to deliver sustainable growth and performance, relying on prudent, dynamic and strategic management.

In 2020, PaninBank succeeded in posting a net profit of more than Rp3 trillion, maintaining sound capitalisation with a consolidated Capital Adequacy Ratio of 29.58%, and growing shareholder equity to Rp47.46 trillion.

Mu'min Ali Gunawan

Pendiri | Founder of
PaninBank & PaninGroup

Semua pencapaian ini dihasilkan pada tahun yang penuh tantangan dimana pandemi COVID-19 telah mengganggu perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia bertindak cepat meminimalkan dampak COVID-19 terhadap keselamatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa dengan berbagai tahapan program yang berkesinambungan. Adapun program stimulus fiskal, stimulus moneter, serta kebijakan pelonggaran perkreditan perbankan dilaksanakan secara terkoordinasi sehingga mampu menekan kontraksi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 pada tingkat 2,04%.

All this has been achieved in a year full of challenges. The COVID-19 pandemic has disrupted the world's economy, including Indonesia. The Indonesian government acted swiftly to minimize the impact from COVID-19 on public health, economic growth, and the nation's prosperity through a variety of measures. Fiscal stimuli, monetary stimuli, and banking credit relaxation policy were instigated in a coordinated manner and were instrumental in arresting the contraction of the national economy to 2.04% for the full-year 2020.

Di masa pandemi COVID-19, adanya pembatasan interaksi fisik antara manusia menyebabkan berbagai bentuk transaksi ekonomi dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital menjadi faktor penting dari sisi konektivitas untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat di masa *new normal*. COVID-19 telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan ke arah *contactless payment* yang lebih aman. Era ekonomi digital membuka peluang inovasi sistem pembayaran seluas-luasnya dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *platform e-commerce* dan instrumen digital lainnya. Hal ini terlihat dari data Bank Indonesia (BI) di mana nilai transaksi elektronik akhir tahun 2020 mencapai lebih dari Rp200 triliun atau tumbuh sekitar 38%.

With the COVID-19 pandemic necessitating restrictions on direct human physical interactions, various forms of economic transactions have had to be carried out remotely or online by utilizing digital technology. This digital technology has become an important factor in terms of connectivity to ensure the survival of society in the new normal era. COVID-19 has changed the pattern of people's payment transaction behavior towards a more secure, contactless payment. The digital economy era opens up opportunities for innovations in payment systems, as more and more people in Indonesia take to e-commerce platforms and other digital instruments. Data from Bank Indonesia (BI) shows the value of electronic transactions by year-end 2020 to have exceeded Rp200 trillion, representing a growth of approximately 38%.

Kebijakan pembatasan sosial yang digagas Pemerintah juga diberlakukan bersamaan dengan kampanye gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Untuk mendukung gerakan ini, PaninBank turut menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta terus mengingatkan akan bahaya COVID-19 kepada setiap nasabah.

Policies on social restrictions have been carried out, along with the public health campaign to encourage the 3M Campaign–Wearing masks, Washing hands, and Physical Distancing. In support of this campaign, PaninBank joined in exercising strict health protocols and constantly reminded customers as to the dangers from COVID-19.

Mulai awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia menggelar program vaksinasi COVID-19 yang juga dilakukan serentak oleh berbagai negara di dunia. Kita semua berdoa dan berharap badai pandemi segera berlalu. Dengan demikian perekonomian nasional pulih kembali, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia dapat berlanjut dan bertumbuh.

Starting in early 2021, the Indonesian government initiated the COVID-19 vaccination program, along with other countries around the world. We all pray and hope that the pandemic will soon be over, for the good of economic recovery and the resumption of Indonesia's sustained development.

Indonesia diproyeksikan oleh Bank Dunia dan berbagai lembaga keuangan internasional lainnya akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2050 atau bahkan lebih awal. Saya yakin, hal itu dapat dicapai dengan ditunjang oleh sektor perbankan Indonesia yang lebih kokoh lagi di masa depan. PaninBank ingin berperan aktif dalam intermediasi keuangan melalui berbagai inovasi produk, jasa dan layanan terbaik bagi nasabah serta masyarakat luas.

Indonesia is projected by the World Bank and other international financial institutions to become the world's fourth largest economy after China, India and the United States of America by 2050, if not earlier. I am confident that this will be achieved along with the support of a much more solid banking sector in Indonesia in the coming years. PaninBank intends to partake actively in this development by continuing to provide financial intermediary functions through innovative products and services for customers and the general public.

Memasuki ulang tahun ke-50 PaninBank terus mengedepankan peningkatan pelayanan kepada para nasabah. Transformasi perbankan secara digital kini mengalami akselerasi di tengah pandemi COVID-19. Transaksi dan proses pelayanan digital semakin dibutuhkan. Edukasi keuangan digital kepada masyarakat agar produk dan pelayanan bank senantiasa relevan terutama kepada generasi milenial yang merupakan kelompok terbesar masyarakat di Indonesia yang akan menggunakan jasa perbankan. Mereka akan menjadi nasabah utama perbankan nasional. Memasuki usia 50 tahun PaninBank akan melakukan transformasi perbankan secara digital secara berkelanjutan dalam memantapkan visinya menjadi salah satu Bank Komersial dan Ritel terkemuka di Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan staf PaninGroup, khususnya kepada pengurus PaninBank. Mereka telah berbakti dan berkontribusi selama ini. Juga kepada mereka yang telah purnabakti turut menorehkan dedikasi melalui tenaga dan pikiran bagi kemajuan PaninBank.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami percaya visi dan misi yang kita pegang teguh, juga kepercayaan yang diberikan oleh para nasabah serta dukungan para pemangku kepentingan akan menjadikan PaninBank melangkah lebih baik lagi menghadapi hari esok.

Entering its 50th year, PaninBank continues to emphasize on the provision of excellent services to customers. The Bank has accelerated its digital transformation during the COVID-19 pandemic, with the ever-increasing need for digital transactions and service processes. These services, as well as digital financial education for the population, will be ever more relevant to our efforts in targeting the millennial generation, the largest population group in Indonesia today, and tomorrow's main banking customers. The Bank's 50th anniversary will be marked by a continuing, bank-wide digital transformation that will carry the Bank forward to its vision as one of the leading Commercial and Retail Banks in Indonesia.

I thank all management and employees of PaninBank who are with us today, and those who have accompanied us in the past, for dedicating their energy and intellect for the progress of PaninBank.

With the grace of God, the continuing support of customers and stakeholders, together with our clear vision and mission, I am optimistic for the brighter future of PaninBank.

Salam Hormat dan Dirgahayu PaninBank
Sincerely yours,

Mu'min Ali Gunawan

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Hasil usaha PaninBank pada tahun 2020 patut menerima pujiaan serta apresiasi kita semua. Di bawah tekanan berat dari dampak pandemi COVID-19, PaninBank berhasil mencatat prestasi yang gemilang berkat kerja keras seluruh komponen Bank serta dukungan para pemangku kepentingan.

The operational results of PaninBank in 2020 are worthy of our praise and appreciation. Under heavy pressure from the impact of the COVID-19 pandemic, PaninBank turned in a sterling performance due to the tireless efforts of every sector of the Bank and the support of stakeholders.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

COVID-19 mewarnai kondisi perekonomian Indonesia tahun 2020. Pandemi virus ini telah mendorong dunia ke dalam krisis. Krisis kesehatan bergerak menjadi krisis ekonomi. International Monetary Fund (IMF) menyebut, dampaknya terhadap perekonomian lebih dahsyat dari '*Great Depression*' yang melanda dunia 90 tahun lalu. Perekonomian global, termasuk Indonesia terjebak dalam resesi.

Dalam kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, PT Pan Indonesia Bank Tbk mampu menjaga kinerja keuangannya tetap solid. Laba tumbuh positif dengan dukungan permodalan dan likuiditas yang kuat. Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi dan seluruh jajaran Manajemen yang telah bekerja keras menjawab tantangan.

Melalui laporan tahunan ini, kami perlu menjelaskan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi sepanjang tahun buku 2020. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugas pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memastikan pengelolaan Bank telah dilakukan secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penilaian atas Pengelolaan Bank

Pandemi telah memperlambat kegiatan ekonomi. Perkonomian Indonesia jatuh ke dalam resesi pada triwulan III-2020. Ekonomi berkontraksi 3,49%, melanjutkan pelemahan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 5,32%. Sepanjang tahun 2020, ekonomi berkontraksi 2,07%.

Perlambatan tersebut juga berimbas pada bisnis keuangan dan perbankan. Permintaan kredit melambat sejalan dengan pembatasan aktivitas sosial. Pelaku usaha menunda ekspansi terkait ketidakpastian pengendalian pandemi. Di sisi lain, Bank juga fokus menjaga profil risiko dan kualitas portofolio kredit. Penyaluran kredit bank umum tahun 2020 tercatat turun 2,41% dari tahun sebelumnya.

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi PaninBank pada tahun buku 2020 patut dihargai dan diapresiasi. Bank berhasil mempertahankan kinerja yang positif, baik pada

COVID-19 cast a cloud over the Indonesian economy in 2020 and pushed the world into a crisis. What started as a health issue quickly became an economic one of global proportions. The International Monetary Fund (IMF) noted that the damaging effects on the economy were more devastating than those of the "Great Depression" that engulfed the world 90 years ago. The global economy, including that of Indonesia, fell into recession.

Amid these woeful conditions, PT Pan Indonesia Bank Tbk kept its solid financial performance intact. Profits grew with the support of solid capital and liquidity. The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors and the entire Management of The Bank for having worked so hard in responding to the challenge.

Through this Annual Report, we wish to give a summation of the oversight of the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors throughout the 2020 financial year. For Sustainability Finance in 2020, the Board of Commissioners discharged its duties and supervised the implementation of the Bank's Business Plan and Action Plan. The Board of Commissioners assures that the Board of Directors has complied with all prevailing laws and regulations. Furthermore, we also assure that the management of the Bank has been undertaken professionally, and in line with the interests of shareholders and other stakeholders.

Assessment of the Management of the Bank

The pandemic slowed economic activities to the point that the Indonesian economy fell into recession in 3Q 2020. The economy contracted by 3.49% in that quarter, following a contraction of 5.32% in the previous quarter. In the full year 2020, the economy contracted by 2.07%.

This contraction particularly impacted the finance and banking sector, where credit demand slowed in tandem with the social lockdown. With businesses postponing expansion due to uncertainties around the handling of the pandemic, banks focused more on managing their risk profiles while safeguarding the quality of their credit portfolios. The aggregate credit disbursement of commercial banks in 2020 declined by 2.41% from that of the previous year.

The Board of Commissioners considers the performance of the Board of Directors in 2020 to be worthy of our praise and appreciation. The Bank achieved positive results, preserving

aspek profitabilitas, daya saing yang kuat di setiap segmen bisnis, kualitas aset kredit, maupun permodalan. Dibanding proyeksi rencana bisnis, kinerja Bank secara umum memang belum sesuai ekspektasi, terutama penyaluran kredit. Namun, hal itu bisa dimaklumi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi-bisnis yang sedang tidak menguntungkan akibat pandemi COVID-19.

its profitability, competitive edge in all business segments, quality loan assets, and robust capital. However, compared to the business plan projection, the performance of the Bank in general was below target, especially in terms of credit disbursement. This was to be expected, given the inconducive business-economic conditions from the COVID-19 pandemic.

Bank berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp3,12 triliun, suatu prestasi yang patut disyukuri selain juga menggarisbawahi kemampuan Bank dalam mencapai *sustainable profit* sebagaimana tema laporan tahunan Bank kali ini. Simpanan nasabah tercatat naik 8,8% ke posisi Rp143,03 triliun. Peningkatan tersebut diikuti dengan perbaikan rasio CASA dari 37,15% menjadi 39,44%.

The Bank posted a net profit of Rp3.12 trillion, an achievement that we all appreciate in addition to underlining the ability of the Bank to maintain its sustainable profit – the theme of our Annual Report this year. Customer deposits increased by 8.8% to Rp143.03 trillion as a result of which the CASA ratio also improved from 37.15% to 39.44%.

Peningkatan kualitas proses pemberian kredit serta adanya dukungan kebijakan relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit mampu menjaga kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*/NPL) bruto secara konsolidasi berada pada level 3,01%, sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,02% sementara secara individual Bank berada pada level 2,93%, lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,02%.

A more rigorous credit approval process and the support of credit relaxation and/or credit restructuring policy enabled the Bank to maintain credit quality. The consolidated gross Non-Performing Loan (NPL) ratio was 3.01%, slightly better than 3.02% in the previous year, whereas the NPL ratio of Bank alone was 2.93%, better than 3.02% in the previous year.

Permodalan merupakan salah satu kekuatan utama Bank. Praktik perbankan yang dilakukan secara konservatif dan hati-hati selama lima dasawarsa, telah memungkinkan Bank untuk bisa bertahan dalam menghadapi berbagai krisis. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) secara konsolidasi tercatat sebesar 29,58%, sementara secara individual Bank sebesar 29,55%. Angka tersebut masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 23,41% dan 24,07%. Permodalan Bank juga lebih tinggi dari bank umum dengan rata-rata CAR 23,89%.

Capitalisation remains one of the Bank's strengths. With conservative and prudent banking practices over the past five decades, the Bank has been resilient against all sorts of crises. The Consolidated Capital Adequacy ratio (CAR) at year-end stood at 29.58%, while that of the Bank alone was 29.55%. These figures were higher than 23.43% and 24.07%, respectively, in 2019. The bank's capitalisation was also higher than the national CAR average of 23.89%.

Selain kinerja keuangan, pada tahun 2020 ini, Direksi juga berhasil meletakkan landasan digital banking dalam rangka menuju era pertumbuhan baru. Implementasi *digital banking* diharapkan akan bisa meningkatkan kualitas layanan, mendorong perluasan basis nasabah serta berkontribusi pada perbaikan CASA.

In addition to financial performance, in 2020, the Board of Directors succeeded in laying the foundations for digital banking as the Bank moves into a new growth era. Implementation of digital banking is expected to enhance the quality of our service, expand our customer base, and contribute to further CASA improvement.

Pengawasan atas Perumusan dan Penerapan Strategi dan Kebijakan Bank

Direksi telah menyusun strategi dan kebijakan pengembangan bisnis secara tahunan yang dituangkan dalam RBB sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada dasarnya, strategi dan kebijakan tersebut sesungguhnya bersumber pada filosofi kebijakan dan strategi utama yang telah dijalankan Bank sejak 50 tahun silam. Filosofi tersebut bermuara pada dua hal, yaitu menjalin hubungan yang erat dengan para nasabah dan menjaga kualitas aset kredit yang pada intinya berasal dari dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada Bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor riil.

Oversight on the Formulation and Implementation of Bank Strategies and Policies

The Board of Directors annually formulates the strategies and policies pertaining to the development of the Bank, which are contained in the Bank Business Plan that is submitted to the Financial Services Authority (OJK). In essence, those strategies and policies are deeply rooted in the core values and philosophy of PaninBank that have prevailed over the past 50 years. This philosophy is two-fold: Forging close ties with customers, and safeguarding the quality of credit assets, which are essentially customer funds that have been entrusted to us to disburse as credit to the real sector.

Dewan Komisaris menilai strategi dan kebijakan tersebut masih selaras dengan upaya pencapaian visi Bank menjadi Bank terkemuka dalam perbankan komersial dan ritel. Dewan Komisaris meyakini kemampuan Manajemen dalam menjalankan strategi tersebut, beserta semua kebijakan yang mendukung pelaksanaan strategi tersebut secara efektif. Hal ini terlihat dari keberhasilan Bank yang mampu mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun.

These values have served the Bank well in the past and continue to be relevant today as we strive to realise our vision of transforming the Bank into a leading force in the Commercial and Retail banking segments. Furthermore, we believe that Management has been able to implement the Bank's strategies, and the policies that support these strategies, effectively – as evidenced by our stable, sustainable growth not only in 2020, but also in previous years.

Pandangan atas Prospek Usaha Bank

Dewan Komisaris memperkirakan, dalam jangka pendek, terutama tahun 2021, profitabilitas Bank masih akan tertekan sejalan dengan pandemi yang belum berakhir. Meski sudah dalam trek pemulihan, permintaan kredit kelihatannya masih akan terbatas. Bank masih akan fokus pada proses restrukturisasi lanjutan dari debitur yang terdampak, sejalan dengan perpanjangan kebijakan relaksasi dari OJK.

Views on the Business Prospects of Bank

The Board of Commissioners estimates that in the short term, at least in 2021, the Bank's profitability will remain under pressure in line with the pandemic that has yet to be contained. Although the economy appears to be in recovery, credit demand is likely to remain weak. The Bank will still have to focus on an extended restructuring process for impacted debtors, in line with the deadline extension of the OJK's relaxation policy.

Bisnis perbankan dalam jangka panjang masih prospektif. Basis pasar industri keuangan dan perbankan di Indonesia masih melimpah. Indonesia memiliki bonus demografi dengan 65,11% penduduknya adalah usia produktif. Transformasi *digital banking* dalam rangka penguatan layanan berbasis digital diharapkan bisa mendorong jumlah nasabah usia produktif, termasuk generasi milenial. Direksi telah menjadikan upaya menjalin hubungan yang baru dan langgeng dengan generasi milenial sebagai salah satu fokus strategi bisnis Bank.

However, the banking business is still prospective over the long term. The market base for the finance and banking sector in Indonesia is huge. Indonesia enjoys a demographic bonus in that 65.11% of its population falls into the productive age. Our transformation to strengthen digital banking services is expected to draw more customers from this market, including millennials, to PaninBank. The Board of Directors has made efforts to forge new and lasting ties with the millennial generation as one of strategic business focuses of the Bank.

Dewan Komisaris mendukung langkah-langkah Direksi dalam membidik nasabah usia produktif, terutama generasi milenial, tentunya tanpa mengabaikan basis nasabah loyal yang sudah ada saat ini. Dewan Komisaris optimis Direksi bisa terus mengembangkan skala bisnis Bank sejalan dengan prospek usaha perbankan yang cerah pada masa yang akan datang.

The Board of Commissioners fully supports the steps taken by the Board of Directors to target productive age customers, especially the millennial generation, without neglecting the Bank's existing, loyal customer base. We are optimistic that the Board of Directors will be able to scale up the business of the Bank as it faces the bright banking business prospects of the future.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Sumber daya manusia dan teknologi informasi merupakan kunci pendorong pertumbuhan Bank di era baru. PaninBank memberi perhatian terhadap pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir Bank fokus pada (i) Pengembangan sebagian besar karyawan PaninBank untuk menjadi *Brand Ambassadors* Bank, dan (ii) Penanaman budaya manajemen risiko yang kuat di seluruh jajaran Bank. Dengan investasi yang signifikan dalam pengembangan layanan perbankan digital, setiap karyawan PaninBank wajib menguasai serta memahami segi pengetahuan produk maupun pengelolaan risiko yang akan menjadi semakin penting di kemudian hari.

Human Resources and Information Technology

Human Resources and Information Technology will be key drivers of growth for the Bank in the new era. PaninBank has always placed a strong emphasis on personnel training and development. The Bank has, in recent years, focused on (i) developing virtually all Paninbankers into effective Brand Ambassadors of the Bank, and (ii) instilling a strong risk-management culture bank-wide. With our significant investments in developing digital banking services, our people need to be aware of, and master, the increasing importance of product knowledge and risk management in the days to come.

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Bank

Dewan Komisaris sangat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* yang merupakan bagian dari tingkat kesehatan bank. Dewan

Assessment on the Implementation of Bank Governance

The Board of Commissioners pays careful attention to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) that is an integral part of the soundness of a bank. The Board of

Komisaris dengan dibantu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Intern terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong Bank mencapai penerapan GCG pada level 1 atau sekurang-kurangnya level 2 dengan tingkat kesehatan bank tergolong "sehat".

Pengelolaan Risiko dan *Internal Control*

Sebagaimana telah disinggung di atas, Bank memiliki struktur pengelolaan risiko serta fungsi *internal control* yang memadai baik dalam mengatasi berbagai tantangan berat yang dihadapi Bank sepanjang tahun 2020 maupun dalam menghadapi berbagai krisis di masa lalu. Pengelolaan risiko, dalam hal mana *internal control* merupakan bagian yang tak terpisahkan, merupakan salah satu landasan yang memungkinkan Bank mampu menjalankan kegiatan perbankan secara sehat selama ini. Keduanya, pengelolaan risiko dan *internal control*, akan semakin diandalkan Bank pada tahun-tahun mendatang saat Bank memasuki era baru yang penuh harapan dengan layanan perbankan digital. Pembahasan lebih rinci perihal struktur beserta penerapan pegelolaan risiko dan *internal control* disajikan pada masing-masing bab di dalam Laporan Tahunan ini.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System*

Dewan Komisaris memandang Direksi perlu lebih mensosialisasikan penggunaan *whistleblowing system* sebagai sistem pengaduan yang dijalankan secara rahasia, aman serta objektif, dan merupakan suatu sarana yang berguna bagi pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya pelanggaran etika kerja ataupun *fraud* dalam kerangka upaya Bank menjalankan kebijakan *Anti-Fraud* dan *Anti-Corruption*.

Bank telah memperkenalkan sistem *whistleblowing* pertama kali pada tahun 2013, dan telah melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan, termasuk kesesuaian dengan ketentuan dalam POJK No. 39/POJK.03/2019. Dewan Komisaris mengharapkan bahwa pelaksanaan kebijakan *whistleblowing system* tersebut dapat dimanfaatkan secara optimum bagi upaya pencegahan pelanggaran yang tidak diinginkan.

Tata Cara dan Frekuensi Penyampaian Saran kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi sebanyak dan sesering yang diperlukan melalui berbagai cara. Namun demi kejelasan pertanggungjawaban, Dewan Komisaris akan menyampaikan sarannya pada kesempatan pertama di setiap Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Apabila permasalahannya sangat mendesak dan tidak bisa menunggu waktu, anggota Dewan Komisaris dimungkinkan untuk menggelar rapat yang mungkin belum terjadwal dengan Direksi atau dengan beberapa Direktur terkait.

Dewan Komisaris juga telah mengatur mekanisme pengawasan dengan penugasan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan

Commissioners, assisted by the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Internal Audit Unit makes every effort to push the Bank to reach level-1 of GCG implementation, or at the very least, level-2, with the predicate of a "sound" bank.

Risk Management and Internal Control

As briefly referred to above, the Bank's Risk Management and Internal Control structures are adequate in meeting some of the biggest challenges that PaninBank has had to face in 2020 and during previous crises. The management of risks, of which Internal Control is an integral part, is one of the cornerstones on which the Bank has relied upon to sustain sound banking operations over the years. Both Risk Management and Internal Control will feature even more prominently in the coming years as we step into the brave new world of full digital banking services - which the Bank has thoroughly prepared for. Details of the structure and mechanism of the Bank's Risk Management and Internal Control systems are presented in their respective sections of this Annual Report.

Views on the Implementation of the Whistleblowing System

The Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors needs to further extoll the use of the Whistleblowing System as a means to file grievances in a confidential, safe and objective manner. Also, as an effective tool for early detection of potential breaches of the Code of Ethics or even the possibility of uncovering fraud within the framework of the Bank's Anti-Fraud and Anti-Corruption policies.

The Bank first introduced the Whistleblowing System in 2013, and has since made improvements and enhancements as needed, including aligning the system with OJK Regulation No. No. 39/POJK.03/2019. The Board of Commissioners expects to have the system optimally utilised in efforts to prevent unwanted misconduct.

Means and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

The Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors as frequently and by any means as needed. However, for the sake of clarity and proper documentation, the Board of Commissioners will do so at the first opportunity in joint meetings with the Board of Directors, unless the matter is so urgent that it cannot wait, in which case the Board of Commissioners will call for an unscheduled meeting with the Board of Directors or with several Directors relevant to the case.

The Board of Commissioners has also arranged a mechanism for oversight by assigning each Commissioner to oversee a

terhadap Direktur Bidang tertentu langsung dan secara rutin mengadakan pertemuan untuk membicarakan permasalahan yang berada di area tugasnya.

Director of a certain portfolio, and to routinely meet to discuss matters that fall under their respective areas.

Keberagaman Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris

Sesuai Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015, tujuan dari komposisi keanggotaan Dewan Komisaris yang beragam adalah untuk meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris sebagai pelaksana pengawasan jalannya perusahaan, serta memastikan kemandirian Dewan Komisaris terhadap pemegang saham pengendali perusahaan.

Saat ini Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan pengalaman sehingga mampu menganalisa permasalahan yang dihadapi Bank dari berbagai sudut pandang guna mengambil keputusan yang matang. Dari aspek kemandirian, 50% dari keanggotaan Dewan Komisaris Bank saat ini merupakan Komisaris Independen, sesuai ketentuan yang berlaku. Bank akan terus mengupayakan peningkatan keberagaman komposisi keanggotaan Dewan Komisaris pada setiap kesempatan di masa depan.

Diversity in the Composition of Members of the Board of Commissioners

Pursuant to the OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the objective of having a diverse membership of the Board of Commissioners is to enhance the Board's effectiveness at oversight, and to ensure the Board's independence from the controlling or majority shareholders.

Currently, the members of the Board of Commissioners of the Bank have a diverse background of knowledge and experience through which they are able to analyse the issues facing the Bank from different points of view before arriving at a well-considered decision. While from the aspect of independence, 50% of the current membership of the Board are Independent Commissioners, meeting the statutory requirement. The Bank will endeavour to increase the diversity of the members of the Board of Commissioners at every opportunity in the future.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sebagaimana telah dijelaskan sepintas di atas, komite-komite di bawah Dewan Komisaris mempunyai peranan penting dalam membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020. Mulai dari pengawasan risiko dan operasional, hingga langkah pengendalian dan evaluasi audit, maupun kajian ulang atas kebijakan dan kinerja usaha, komite-komite Dewan Komisaris ini secara efektif mampu menjadi mata dan telinga Dewan Komisaris, mendayagunakan keahlian mereka untuk mengangkat hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris beserta usulan tindak lanjutnya.

Penilaian atas kinerja mereka dilakukan berdasarkan penilaian atas performa Komite secara kolektif (kolegial), performa masing-masing anggota Komite, dan performa masing-masing Ketua Komite. Pembahasan tentang penilaian ini disajikan pada sub-bab Komite Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola di Laporan Tahunan ini.

Assessment on the Performance of the Committees Under the Board of Commissioners

As briefly stated above, the Committees under the Board of Commissioners played active roles in assisting the Board of Commissioners in our oversight duties in 2020. From risk and operational oversights, to control and audit evaluations, to policies and performance reviews, our Committees have proven themselves effective as the eyes and ears of the Board of Commissioners, lending their expertise to bringing important matters to the attention of the Board of Commissioners and recommending follow-up actions.

Assessments on their performance are carried out in terms of the collegial Committee performance, the Individual Member performance, and the respective Committee Chair performance. Discussions on these assessments are presented in the sub-section on the Board of Commissioners Committees in the section on governance in this Annual Report.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemahaman yang meningkat di antara perusahaan-perusahaan terkemuka dunia perihal isu dan inisiatif ESG (*environmental, social, and governance*), telah mengarah pada penerapan *international best practices* yang baru dalam hal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Kegiatan CSR kini dikaitkan dengan berbagai lingkup yang secara spesifik menaungi kepentingan dari pemangku kepentingan tertentu, seperti misalnya lingkup hak azasi manusia, lingkungan hidup, konsumen dan masyarakat umum, pengembangan masyarakat, dan tidak kalah

Corporate Social Responsibility

A heightened awareness among international companies on ESG (environmental, social, and governance) issues and initiatives has brought forth new international best practices in Corporate Social Responsibility (CSR). The social responsibilities of corporations are now attached to different areas of specific stakeholders interest including human rights, the environment, consumers and the general public, social and

pentingnya, kebijakan keuangan berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan, sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PaninBank menyadari perkembangan ESG ini dan telah mengatur kegiatan CSR sejalan dengan alur-alur kepentingan tersebut di atas. Pengungkapan lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan CSR oleh Bank pada tahun 2020 disajikan dalam bab Tanggung Jawab Sosial pada Laporan Tahunan ini.

community development, and not least of all, sustainability finance in the financial services sector.

PaninBank is aware of this development and has reorganised its CSR activities along these lines of interest. The full scope and practices of the Bank's CSR initiatives are presented in the section on social responsibility in this Annual Report.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Dapat kami laporkan disini bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2020 telah mengangkat Nelson Tampubolon sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Gregory James Terry sebagai Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the resolution of the Bank's Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2020, said AGMS appointed Nelson Tampubolon as President Commissioner and Gregory James Terry as Commissioner. With these appointments, the composition of the Board of Commissioners of the Bank as of the close of the aforementioned AGMS, is as follows:

Jabatan	Nama | Name	Position
Presiden Komisaris - Independen	Nelson Tampubolon	President Commissioner - Independent
Wakil Presiden Komisaris - Independen	Lintang Nugroho	Vice President Commissioner - Independent
Komisaris	Chandra R. Gunawan *)	Commissioner
Komisaris	Johnny *)	Commissioner
Komisaris Independen	Drs. Riyanto	Independent Commissioner
Komisaris	Gregory James Terry	Commissioner

* Berlaku efektif setelah adanya keputusan RUPS mengenai persetujuan perubahan jabatan yang bersangkutan.
Effective upon a resolution of the GMS regarding the approval of the change in position concerned.

Ucapan Terima Kasih

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan segenap karyawan PaninBank atas dedikasi serta upaya yang tidak kenal lelah dalam tahun yang sangat berat bagi semua pihak. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada para nasabah atas kesetiaan mereka yang tiada tara dan kepercayaan yang diberikan kepada Bank. Dewan Komisaris juga menghargai peranan regulator sektor keuangan termasuk pasar modal atas pengawasan yang dijalankan sehingga sektor industri perbankan nasional dapat terus tumbuh sehat guna turut menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, kami menghargai kepercayaan masyarakat umum yang ditunjukkan oleh dukungan dari lingkungan komunitas dimana PaninBank beroperasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi positif terhadap perkembangan PaninBank dari waktu ke waktu.

A Word of Gratitude

The Board of Commissioners extends its highest appreciation to the Board of Directors and employees of PaninBank for their tireless efforts and dedication in what was a challenging year by any measure. We also express our gratitude to our customers for their unmatched loyalty and trust in us. We owe our gratitude as well to the financial and capital market authorities that regulate our industry, without whose regulation we would not enjoy the level playing field that is crucial for a flourishing industry such as ours. Last but not least, we are grateful for the public trust and support displayed by the communities in which we operate. We also thank one and all who have contributed positively over the years to the continuing growth of PaninBank.

Jakarta, Mei 2021 | May 2021

Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dari Kiri ke Kanan
From Left to Right

Gregory James Terry
Komisaris
Commissioner

Johnny
Komisaris
Commissioner

Chandra R. Gunawan
Komisaris
Commissioner

Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner

Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen
Vice President
Commissioner/
Independent Commissioner

Drs. H. Riyanto
Komisaris
Independen
Independent
Commissioner

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Herwidayatmo
Presiden Direktur
President Director

Melalui kombinasi langkah-langkah strategis berupa aksi cepat pengamanan aset pinjaman, upaya pendanaan yang terkoordinasi secara baik, kegiatan tresuri yang ditingkatkan, dan persiapan menuju transformasi perbankan digital, PaninBank tidak hanya berhasil mencatat pertumbuhan yang mengesankan di tahun 2020, namun juga menempatkan Bank secara kokoh guna meraih peluang pertumbuhan yang berkelanjutan pada 'era baru' pasca COVID-19.

Through a combination of strategic steps comprising swift action to safeguard loan assets, well-coordinated funding efforts, increased treasury activities, and preparation towards a digital banking transformation, PaninBank not only achieved impressive growth in 2020, but also positioned itself strongly for sustainable growth opportunities in the 'new era' of post COVID-19.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Pandemi COVID-19 telah memperburuk kinerja seluruh sektor usaha, termasuk perbankan. Kegiatan bisnis terhambat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Prospek ekonomi pun memburuk. Pandemi membuat laju perekonomian sulit diprediksi. Tidak mengherankan, berbagai pelaku usaha termasuk PaninBank terpaksa meninjau ulang rencana bisnisnya.

Kami bersyukur, PT Pan Indonesia Bank Tbk bisa menjaga kinerja keuangan tetap solid di tengah periode yang cukup berat bagi semua industri. Laba bisa dijaga tetap positif pada *bottom line* Rp3 triliun. Hal itu tidak lepas dari sinergi dan kerja keras seluruh unit bisnis, baik perkreditan, tresuri, dan jasa-jasa lainnya. Keberhasilan tersebut menjadi angin segar dan optimisme untuk terus tumbuh dan berkembang. Upaya keras Manajemen beserta seluruh komponen Bank sepanjang tahun 2020 – termasuk dalam hal ini pengawasan oleh Dewan Komisaris – tidak sia-sia dalam mengupayakan pertumbuhan laba yang berkesinambungan bagi Bank, dan lebih penting lagi, meletakkan Bank pada posisi yang *solid* untuk menyongsong peluang pertumbuhan di era *new normal* pasca COVID-19.

Melalui laporan tahunan ini, ijinkan kami untuk menjelaskan hasil kinerja Direksi sepanjang tahun 2020. Direksi berupaya mewujudkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020-2022 yang telah ditetapkan. Beberapa kebijakan diterbitkan sebagai respons atas berbagai tantangan yang muncul seiring memburuknya pandemi dan resesi ekonomi. PaninBank telah memperkuat mitigasi risiko, terutama kredit dan melaksanakan program relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bank juga telah memulai proses transformasi *digital banking* sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Bank dalam peta industri perbankan nasional.

The COVID-19 pandemic has decimated businesses in virtually every industry sector, including banking. Business activities were disrupted due to Large Scale Social Restrictions. Economic prospects worsened. The Pandemic has made economic forecasting virtually impossible. Not surprisingly, many businesses including PaninBank had to review their financial projections.

Nonetheless, we are grateful that PT Pan Indonesia Bank Tbk was able to achieve a solid financial performance amid a torrid time for many industries. Our growth remained positive with a bottom-line result still above Rp3 trillion. We owe this success to the synergy and efforts of all business units, from credit, treasury and various other services. The efforts of Management and all other components of the Bank in 2020 – including in this case the oversight of the Board of Commissioners – were not in vain in securing another year of sustained profitability growth for the Bank. More importantly, solidly positioning the Bank for growth opportunities in the new normal, post COVID-19 era.

Through this Annual Report, we present the performance of the Board of Directors for 2020 in achieving the Bank's Business Plan and Action Plan on Sustainability Finance 2020-2022. Several policies were issued in response to the many challenges that had arisen with the worsening pandemic and economic recession. The Bank strengthened risk mitigation, especially that of risk with the loosening and/or restructuring for loans of debtors impacted by COVID-19 pursuant to the regulation of the Financial Services Authority (OJK). Our preparations for a digital banking transformation also intensified as a strategic step in strengthening the Bank's position within the national banking sector.

TREN MAKRO-EKONOMI PADA TAHUN 2020

Perekonomian dunia mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID-19. Tidak seperti krisis keuangan sebelumnya yang pada umumnya hanya berdampak pada bidang perekonomian dan perdagangan, krisis kali ini berdampak sangat luas dan belum pernah terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Akibat merebaknya pandemi, berbagai usaha terpaksa tutup, menyebabkan terputusnya rantai pasokan, melemahkan perdagangan dunia, melumpuhkan perekonomian negara, serta menekan berbagai sektor industri. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja secara masal pun tidak terelakkan, sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi belanja rumah tangga. Perekonomian dunia pun diperkirakan berkontraksi sekitar 4% pada tahun 2020.

Di Indonesia, dampak COVID-19 yang juga melemahkan belanja rumah tangga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, mengingat bahwa hingga tahun 2019, belanja rumah tangga domestik masih menopang lebih dari 50% pertumbuhan perekonomian nasional.

Pada tahun 2020, perekonomian nasional memasuki resesi ketika pertumbuhan PDB pada kuartal kedua menurun sebesar 5,32%, dilanjuti oleh penurunan PDB sebesar 3,49% pada kuartal ketiga. Namun tren pemulihan ekonomi tercermin dari tingkat pertumbuhan PDB sepanjang tahun 2020, yaitu menurun sebesar 2,07%.

Tren pemulihan perekonomian tersebut dimungkinkan berkat langkah cepat pemerintah menjaga kestabilan ekonomi-makro nasional. Kebijakan stimulus fiskal digulirkan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp523,66 triliun untuk bantuan sosial, subsidi dan insentif pajak.

Dari segi moneter, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian kebijakan *macroprudential,* termasuk kebijakan pelonggaran likuiditas dengan menyuntikkan dana langsung ke pasar uang antarbank dan pasar modal, membeli kembali obligasi pemerintah, serta melakukan transaksi *repo*, *FX swaps,* dan lain sebagainya dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar Rp556 triliun. BI kemudian menurunkan ketentuan Giro Wajib Minimum perbankan sebanyak 300bps yang menambah pasokan uang sejumlah Rp155 triliun pada tahun 2020. BI juga menurunkan tingkat suku bunga acuannya, yaitu BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR), sebanyak lima kali sepanjang tahun 2020, turun dari 5,25% di awal tahun menjadi 3,75% pada akhir tahun 2020.

MACRO-ECONOMIC TRENDS IN 2020

The global economy experienced extreme pressure from the COVID-19 pandemic. Unlike previous financial crises that had mostly affected the economic and trade sectors, this crisis extended beyond anything the world had experienced in recent decades. The pandemic closed businesses, disrupted supply chains, weakened global trade, crippled economies, and created pressure on industries. Massive layoffs then ensued, reducing purchasing power and constricting household consumption. The global economy was estimated to contract by 4% in 2020.

In Indonesia, the impact of COVID-19 on household consumption was significant to the national economy, bearing in mind that up until 2019, domestic household consumption still contributed more than 50% of national economic growth.

In 2020, the Indonesian economy entered a recession when GDP fell by 3.49% in the third quarter, having declined by 5.32% in the previous quarter. However, a trend towards economic recovery could be seen from full-year GDP growth in 2020, which fell by 2.07%.

The recovery trend was made possible by the quick response of the Indonesian government to stabilise macro-economic conditions. A fiscal stimulus package was delivered through National Economic Recovery funds amounting to Rp523.66 trillion for social aid, subsidies, and tax incentives.

On the monetary side, Bank Indonesia (BI) undertook a series of macroprudential policies, including quantitative easing by injecting liquidity directly into the financial and interbank money markets, repurchasing government bonds, entering into repo transactions, FX swaps and others for an aggregate total of approximately Rp556 trillion. Bank Indonesia then reduced the Minimum Statutory Reserve requirement of banks by 300 basis points that released a further Rp155 trillion into the money supply in 2020. The Central Bank also lowered its benchmark interest rate, the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), five times throughout 2020, bringing it down from 5.25% at the start of year to 3.75% by year-end 2020.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan relaksasi kredit, yang memungkinkan sektor perbankan merestrukturisasi kredit bermasalah, awalnya hingga Maret 2021, namun kemudian diperpanjang hingga Maret 2022.

Sektor perbankan memanfaatkan pelonggaran ini guna menguatkan landasannya menghadapi tekanan eksternal yang berat. Kecuali penurunan jumlah agregat baki kredit sebesar 2,4%, yang dapat diatribusikan terhadap lemahnya penyaluran kredit di saat perekonomian dilanda krisis, sejumlah indikator utama sektor perbankan nasional secara rerata menunjukkan tingkat yang tetap sehat pada akhir tahun 2020. Tingkat rerata CAR berada di atas 23%, sedangkan rerata rasio kredit bermasalah adalah sebesar 3,15% (kotor) dan 1,03% (bersih), sekalipun sebagian baki kredit perbankan saat ini berada dalam program restrukturisasi.

Sementara kredit menurun, jumlah simpanan dana pihak ketiga meningkat secara signifikan sebesar 11,1%, jauh melampaui pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 6,5%. Segi positif dari semua ini adalah, apabila perekonomian kembali siap berkembang, sektor perbankan memiliki likuiditas yang memadai guna menopang pemulihan perekonomian dengan menyediakan modal kerja yang sangat dibutuhkan, dengan tingkat suku bunga yang menarik berkat tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang rendah dewasa ini.

MEWUJUDKAN VISI BANK MELALUI SERANGKAIAN STRATEGI YANG MENOPANG PERTUMBUHAN BERKESINAMBUNGAN

Direksi berperan aktif dalam merumuskan dan menerapkan strategi keberlanjutan Bank. Kami terus berkomitmen mewujudkan visi Bank dalam jangka panjang, yaitu **"Menjadikan PaninBank sebagai Bank Terkemuka dalam Perbankan Komersial dan Ritel."** Guna mewujudkan visi tersebut, Direksi menetapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

Strategi Jangka Pendek

Strategi jangka pendek dilakukan sebagai respons langsung terhadap kondisi yang kurang menguntungkan bagi perbankan secara umum akibat pandemi COVID-19, yaitu meningkatnya risiko kredit, menurunnya pendapatan bunga, serta tuntutan percepatan transformasi digital.

Meanwhile, the Financial Services Authority (OJK) issued a ruling policy on credit relaxation, which allowed banks to restructure problem loans arising out of the pandemic, initially until March 2021, but subsequently extended until March 2022.

The banking sector took the opportunity to strengthen its foundation in the face of considerable external pressure. Except for a 2.4% decline in aggregate outstanding loans, which could be attributed to the lack of market viability at the height of the pandemic, the industry average of banking indicators had remained solid as at year-end 2020. The average CAR stood above 23%, while Non-Performing Loans (NPL) ratio stood at 3.15% (Gross) and 1.03% (Net), albeit a portion of these bank loans are currently under the restructuring program.

While credit declined, bank deposits grew significantly by 11.1% during the year, even surpassing the 6.5% growth in 2019. A positive way of looking at this is that, when the market is ready for growth, the banking sector will have more than enough liquidity to follow through on the economic recovery by providing much needed working capital loans at competitive interest rates because of the prevailing low benchmark interest rate of Bank Indonesia.

REALISING THE BANK'S VISION THROUGH A SERIES OF STRATEGIES THAT SUPPORT SUSTAINABLE GROWTH

The Board of Directors played an active role in formulating and implementing the sustainability strategy of the Bank. We remain committed to realising the Bank's Vision over the long term, which is **"To transform PaninBank as a Leading Bank in Commercial and Retail Banking."** In order to realise this Vision, the Board of Directors formulated the short, medium and long-term strategies of the Bank.

Short-Term Strategy

The short-term strategy is an immediate response to conditions that are generally not conducive to the banking sector due to the COVID-19 pandemic, namely the increase in credit risk, decline in interest income, and the pressure to accelerate digital transformation.

Bank mengatasi meningkatnya risiko kredit dengan memantau secara ketat serta menjaga kualitas aset pinjaman, selain juga bekerja sama dengan para debitur yang terdampak COVID-19 dengan memberi peluang dan keringan yang seluas-luasnya bagi penyelamatan kredit mereka. Langkah Bank disambut baik oleh para debitur, dimana sejumlah 12.500 akun kredit senilai Rp27,5 triliun telah direkstrukturisasi hingga akhir tahun 2020, membawa rasio NPL Bank saat itu pada tingkat yang sehat (*manageable)*, yaitu sebesar 3,01% (kotor) dan 0,66% (bersih).

The Bank managed the increasing credit risk by closely monitoring and safeguarding its loan assets, while cooperating with debtors who were impacted by COVID-19 through broad-scale relief and opportunities to manage their credit. This offer was welcomed by debtors, in which a total of 12,500 credit accounts worth Rp27.5 trillion had been restructured as of year-end 2020, bringing the Bank's NPL ratio at the time to a sound level of 3.01% (gross) and 0.66% (net).

Bank menyiasati penurunan pendapatan bunga dengan mengaktifkan kegiatan Tresuri, khususnya Divisi Capital Market, untuk meningkatkan pendapatan non-bunga dari transaksi surat berharga di pasar modal dalam batasan risiko *(risk appetite*) Bank yang telah ditetapkan. Sementara Divisi Currency Trading and Commercial meningkatkan *fee-income* Bank melalui layanan transaksi valuta asing dan transaksi lindung nilai memanfaatkan kebutuhan lindung nilai yang meningkat dalam situasi ketidakpastian. Upaya Tresuri berhasil memperoleh *trading gain* dan *fee income* sebesar Rp1.997,3 miliar, melebihi penurunan pendapatan bunga bersih Bank pada tahun 2020.

The Bank off-set the decline in interested income by intensifying Treasury activities, especially In the Capital Market Division, to increase Non-Interest Income from trading securities on the capital market within the defined risk appetite of the Bank. The Currency Trading and Commercial Division increased fee-income for the Bank through its foreign exchange services and hedging transactions that had increased in the uncertain times. Efforts by Treasury succeeded in securing trading gains and fee income amounting to Rp1,997.3 billion, offsetting the decline in interest income for the Bank in 2020.

Agar tetap bisa melayani kebutuhan perbankan masyarakat dalam skala yang luas, Bank mempercepat transformasi digital mencakup seluruh aspek operasional Bank. Melalui aplikasi perbankan Internet dan *mobile-phone-banking*, Bank mencatat pertumbuhan frekuensi maupun nilai transaksi perbankan yang signifikan melalui kedua media *on-line* tersebut. Sarana perbankan digital *on-line* yang tersedia pada tahun 2020 merupakan hasil penerapan strategi jangka pendek Bank dari segi percepatan digitalisasi, dan berhasil mengisi menurunnya jumlah transaksi perbankan melalui *bank-teller* yang ditinggalkan nasabah sejak pandemi COVID-19.

In order to serve customer needs on a broader scale, the Bank accelerated its digital transformation to cover all aspects of operations. Through the application of the internet and mobile-phone banking, the Bank posted significant growth in both volume and value of banking transactions through these two on-line banking platforms. The digital on-line banking service that was available in 2020 was part of the short term strategy of the Bank in terms of accelerated digitalisation, and succeeded in offsetting the decline in the number of transactions through bank tellers that had been avoided by customers since the beginning of the COVID-19 pandemic.

Strategi Jangka Menengah

Strategi jangka menengah Bank terutama tertuju pada upaya diversifikasi basis nasabah Bank. PaninBank memiliki nasabah yang amat loyal, dimana sebagian besar adalah mereka yang sudah menjadi nasabah sejak awal-awal pendirian Bank. Hal ini menjadikan basis nasabah utama Bank terdiri dari kelompok nasabah berusia 50 tahun ke atas. Bank perlu mengupayakan diversifikasi basis nasabah dalam kurun waktu 2-5 tahun mendatang.

Medium-Term Strategy

The medium-term strategy of the Bank is primarily aimed at efforts to diversify the customer base of the Bank. PaninBank has extremely loyal customers, many having been with the Bank since its founding days. This makes the majority of customers in the age group of 50 and above. The Bank needs to diversify its customer base within the next 2-5 years.

Untuk itu, Direksi telah merumuskan strategi pengembangan basis nasabah dengan (i) mengembangkan produk dan layanan perbankan yang baru serta inovatif sehingga mampu menarik minat calon nasabah berusia muda, termasuk

To this end, the Board of Directors formulated the strategy to expand the customer base by (i) developing new and innovative products and services to appeal to potential customers of a younger age, including the millennial group; (ii) developing

kelompok *millennial*; (ii) mengembangkan *platform* layanan perbankan digital yang mampu menopang produk dan layanan baru tersebut; (iii) berkomunikasi langsung dengan kelompok usia muda melalui berbagai media sosial yang digemari, tentang perubahan dan layanan baru yang terus digulirkan oleh Bank.

Strategi Jangka Panjang

Direksi bersama jajaran manajemen senior Bank juga telah merumuskan strategi pertumbuhan Bank dalam jangka panjang. Strategi ini mencakup lima bidang pokok yang saling terkait antara satu dan lainnya, sehingga penerapan strategi ini secara bersamaan dan terpadu diharapkan akan mampu mewujudkan visi Bank menjadi Bank Terkemuka dalam Perbankan Komersial dan Ritel. Kelima bidang itu adalah:

Sumber Daya Manusia Kompeten. Bank tidak mungkin mewujudkan visinya tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM tidak hanya berlangsung selama bergulirnya transformasi digital tersebut selama beberapa tahun mendatang, namun akan terus dilakukan oleh Bank sebagai *a learning organisation* yang berkelanjutan.

***Platform* Perbankan Digital Menyeluruh.** Bank akan mengembangkan kemampuan perbankan digital secara menyeluruh di semua arsitektur dan infrastruktur pengoperasian serta pelayanan Bank. Pengembangan ini akan mencakup penerapan teknologi informasi mutakhir maupun perkembangannya di bidang *Big Data, Analytics, Robotics & Process Automation,* dan *Artificial Intelligence*.

Diversifikasi Jalur Distribusi. Sekalipun PaninBank akan membuka lembaran baru layanan perbankan digital secara menyeluruh, Bank tidak akan meningggalkan layanan kantor cabang, melainkan akan menyempurnakan *delivery-mix* layanan perbankannya melalui perpaduan jalur distribusi, yaitu mulai dari layanan kantor cabang hingga perbankan digital yang mampu menjangkau nasabah secara efektif serta melayani secara efisisen.

Produk dan Jasa Perbankan Unggulan. Sejalan dengan strategi jangka menengah yang diuraikan di atas, dalam jangka panjang, Bank juga akan mengembangkan atau mempertahankan produk maupun layanan yang paling diminati nasabah dari segi kegunaannya, kemudahan penggunaannya, maupun relevansinya terhadap kebutuhan pasar setiap saat.

digital banking services platforms to support the new and innovative products and services; (iii) communicating directly to the younger generations through their preferred social media on the changes and new offerings of the Bank.

Long-Term Strategy

The Board of Directors together with senior Management have formulated the Bank's growth strategy over the long-term. This strategy covers five inter-related key areas where collective implementation, simultaneously integrated will lead to realising the Bank's Vision of being a Leading Bank in Commercial and Retail Banking. These five areas are as follows:

Competent Human Resources. The Bank would not be able to realise its vision without the support of competent human resources. The development and enhancement of HR competence will not only take place during the Bank's digital transformation over the next several years, but will be undertaken continuously by the Bank as a sustainable 'learning organisation.'

Comprehensive Digital Banking Platform. The Bank will develop its digital banking capabilities in all operational and delivery architectures and infrastructures. The development will comprise applications in the latest information technology and its continuing evolution in the areas of Big Data, Analytics, Robotics & Process Automation, and Artificial Intelligence.

Diversified Delivery Channels. Although PaninBank will open a new chapter of wide-scale digital banking services, it will not abandon branch-banking services. Instead, the Bank will improve the delivery-mix of its banking services by integrating delivery channels from branch-banking to digital services that can reach and serve customers more effectively and efficiently.

Cutting-edge Products and Services. In line with the medium-term strategy described above, the Bank will develop or maintain products and/or services that appeal most to customers based on utility, convenience, and relevance to market needs.

Struktur Pengelolaan Risiko yang Kokoh. Pengoperasian Bank secara andal, sesuai ketentuan yang berlaku, tidak mungkin dilakukan tanpa proses pengendalian risiko yang solid, di mana faktor risiko setiap pengembangan produk dan layanan baru akan ditelaah secara cermat, dikaji ulang oleh komite manajemen maupun pengawasan, dan dimintakan persetujuan Regulator, sebelum dapat diluncurkan ke pasar. Direksi telah menetapkan penguatan perangkat maupun sistem pengelolaan risiko sebagai salah satu bidang strategis utama Bank.

Robust Risk Management Structures. Of no less importance is the establishment of robust Risk Management structures and systems. No reliable banking operation can be undertaken without solid Risk Management coverage, where newly developed products and services are thoroughly assessed for their risk factors, reviewed by the management and oversight committees, and submitted for approval of the Regulator, prior to their launch to market. The Board of Directors has decreed the strengthening of Risk Management structures and systems to be one of the Bank's key strategic areas of operations.

Inisiatif Strategis pada tahun 2021

Memasuki tahun 2021, Bank akan menjalankan kegiatannya secara berhati-hati dalam kondisi yang masih akan dibayang-bayangi oleh COVID-19. Kami telah memutuskan untuk melaksanakan rencana Bank memulai proses transformasi digital secara menyeluruh setelah ulang tahun Bank yang ke-50 pada tanggal 17 Agustus 2021. Pelaksanaan ini akan memakan waktu beberapa tahun, namun peluncurannya pada tahun 2021 merupakan tonggak sejarah bagi Bank dalam upayanya menjadi penyedia jasa layanan Perbankan Komersial dan Ritel yang terkemuka.

Strategic Initiatives in 2021

Entering 2021, the Bank will remain cautious in undertaking its banking activities in conditions that will still be affected by COVID-19. However, the decision has been made to go ahead with the plan to commence a bank-wide digital transformation following our 50th anniversary on August 17, 2021. The undertaking will mark another milestone for the Bank as we forge firmly ahead and closer to becoming the leading provider of Commercial and Retail Banking services.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, jaringan layanan maupun jalur distribusi Bank akan dikembangkan dan ditingkatkan menjadi yang terdepan di semua wilayah operasional Bank yang juga akan dikembangkan ke berbagai penjuru Indonesia. Menandai komitmen Bank yang kuat dalam upaya ini, PaninBank telah menunjuk seorang anggota Direksi baru pada tahun 2020 yang akan khusus menangani bidang pengembangan jaringan dan jalur distribusi Bank.

As part of these efforts, our service network and delivery platforms are being expanded and enhanced to be second-to-none within our banking services footprints that will also be expanded across Indonesia. Marking our strong commitment in this area, the Bank appointed a new Director in 2020 who is fully dedicated to the Bank's network and distribution development portfolio.

Bank juga akan mengembangkan produk dan jasa perbankan yang inovatif, melakukan pemetaan ulang atas seluruh produk dan jasa Bank yang telah ada, seiring dengan progres transformasi digital dan diversifikasi jaringan distribusi. Upaya ini juga menandai perubahan besar Bank dalam mengarah pada kegiatan perbankan yang lebih kreatif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah, Bank maupun masyarakat pemangku kepentingan lainnya.

The Bank will create new, innovative banking products and services, and undertake a full remapping of existing products and services, in tandem with our digital banking and network diversification progress. This will mark a major transformation for the Bank as we move toward more creative aspects of banking to generate greater value for both customers and the Bank.

Melandasi semua itu, Bank akan menguatkan budaya serta rejimen pengelolaan risiko maupun pengendalian internal dalam upayanya menjaga keamanan dan kesehatan Bank.

Underlying all of this, the Risk Management culture and Internal Control regimens will be strengthened bank-wide to achieve our leadership aspiration. We are now aligning this initiative with the goal of realising the Bank's long-term vision.

Peran Aktif Direksi

Direksi telah merancang serta merumuskan berbagai strategi dan kebijakan tersebut di atas – dan bersama jajaran manajemen senior Bank beserta Komite Eksekutif – menerapkannya serta memantau hasilnya terus menerus. Guna memastikan pelaksanaan strategi Bank, Direksi meminta setiap unit operasi untuk membuat *road map* dan panduan pelaksanaan strategi dan kebijakan Bank di masing-masing unit operasi, sesuai arahan Direksi.

KINERJA BANK PADA TAHUN 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa berat bagi perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia; bagi berbagai sektor industri, termasuk perbankan; dan bagi perputaran maupun pembiayaan usaha, termasuk kredit perbankan. Di Indonesia, dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh sektor perbankan terutama dari segi peningkatan risiko kredit, penurunan pendapatan bank, pelemahan likuiditas bank, serta percepatan transformasi digital perbankan.

PaninBank menerapkan berbagai langkah strategis dalam mengatasi keempat dampak COVID-19 tersebut, dengan hasil yang sangat memuaskan. Pertama, penanganan aset pinjaman bermasalah akibat pandemi COVID-19 dilakukan secara cepat dan cermat oleh unit kerja *Special Asset Management* sesuai dengan pelonggaran ketentuan restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, penurunan pendapatan Bank diatasi oleh peningkatan aktivitas Tresuri yang sejak lama merupakan kekuatan Bank yang dapat diandalkan. Ketiga, aspek pelemahan likuiditas teratasi dengan keberhasilan Bank menghimpun Dana Pihak Ketiga dalam jumlah yang siginifikan, jauh melebihi sasaran yang ditetapkan. Dan keempat, PaninBank telah memiliki perangkat perbankan digital di beberapa layanan perbankan ritel, dan bersiap memulai transformasi digital di semua aspek operasional serta layanan Bank pada kuartal ketiga tahun 2021.

Berkat semua langkah strategis tersebut, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2020 PaninBank mampu menjaga tingkat profitabilitas Bank di atas Rp3 triliun seperti halnya pada tahun 2019. Bank mampu memanfaatkan Tresuri dan berbagai kegiatan transaksi perbankan lainnya untuk menghasilkan pendapatan yang mampu menutup turunnya pendapatan bunga dari pinjaman. Berikut ini adalah ulasan pencapaian kinerja Bank sepanjang tahun 2020, ditinjau dari segi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan.

Active Roles of The Board of Directors

The Board of Directors has designed and formulated these strategies and policies and, together with senior Management and the Executive Committees, has implemented them and continuously monitored the results. To ensure the implementation of these strategies, the Board of Directors directed the respective operating units to create road maps and guidance for the execution of the Bank's strategies and policies.

BANK PERFORMANCE IN 2020

2020 was extraordinarily challenging for the economies of many countries around the world, including Indonesia; for many industry sectors, including banking; and for many business turnovers and financing, including bank financing. In Indonesia, the impact of the COVID-19 pandemic was felt specifically in the banking sector in terms of increasing credit risk, declining interest rates, growing concern over liquidity, and accelerating digital banking transformation.

PaninBank initiated several strategic steps in response to these four impacts of COVID-19, with satisfactory results. First, the issue on growing credit risk was dealt swiftly and diligently by the Special Asset Management unit in line with the loosening rules for credit restructuring set by the Financial Services Authority (OJK). Second, declining interest income was offset by increased Treasury activities that have long been relied upon as a strength of the Bank. Third, concern over liquidity was overridden by the success of the Bank in generating Third Party Funds in significant amounts, far exceeding the set target. And fourth, PaninBank implemented several digital products and services in its Retail Banking franchise, and is now ready to rollout digital transformation in all of its banking operations and services in 3Q 2021.

On the back of these strategic steps, and the support of all stakeholders, PaninBank was able to maintain its profitability level above Rp3 trillion as it had achieved in 2019. The Bank succeeded in capitalising on Treasury and various other transactional banking services to generate income to offset declining interest income from loans. The following describes the Bank's performance in 2020, in terms of Operating Performance and Financial Performance.

Kinerja Operasional

Penyaluran kredit Bank secara konsolidasi pada akhir tahun 2020 (setelah dikurangi cadangan kerugian) mencapai Rp116,11 triliun, menurun sebesar 15,1% , atau Rp20,61 triliun, dari Rp136,72 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional akibat dari pandemi COVID-19, terutama pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 ketika pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sepanjang Maret hingga September.

Kegiatan perkreditan Bank lebih tertuju pada membantu para debitur mengevaluasi pinjaman serta opsi penyelamatannya bagi yang terdampak COVID-19, sebelum dilakukan restrukturisasi pinjaman sesuai dengan kebijakan relaksasi kredit OJK yang juga menentukan syarat dan kondisi yang berlaku atas restrukturisasi pinjaman. Hingga akhir tahun 2020, jumlah kredit yang direstruktur terkait COVID-19 mencakup 29,43% dari total baki kredit Bank. Langkah ini memberi peluang bagi para debitur untuk menunda kewajiban pinjaman mereka hingga Maret 2022.

Di sisi pendanaan, segala sesuatunya lebih cerah. Bank berhasil menambah jumlah rekening simpanan, deposito dan giro, mencapai total sebesar Rp143,03 triliun pada akhir tahun 2020, meningkat sebesar 8,9%, atau Rp11,63 triliun, dari Rp131,40 triliun pada tahun 2019. Rasio CASA mencapai 39,44% pada tahun 2020, meningkat dari 37,15% pada tahun 2019.

Operating Performance

Total consolidated credit disbursement by the Bank as at year-end 2020 (less provisioning for loss) amounted to Rp116.11 trillion, a decline of 15.1%, or Rp20.61 trillion, from Rp136.72 trillion in 2019. The decline was mainly due to the weakened national economy due to COVID-19, particularly during 2Q and 3Q of 2020 when the government imposed total lockdown and Large-Scale Social Restrictions throughout March to September.

The credit activities of the Bank were primarily focused on helping debtors evaluate loans and available options for those affected by COVID-19, before settling on the loan restructuring as provided for by the credit relaxation policy of the OJK that had also set the terms and conditions of the restructuring. As at year-end 2020, the total amount of loans that had been restructured due to COVID-19, accounted for 29.43% of the Bank's total credit portfolio. This step provided the opportunity for debtors to forgo their credit obligation until March 2020.

On the funding-side, things were much brighter. The Bank added more savings, term-deposit and current accounts amounting to Rp143.03 trillion by year-end 2020, which was up by 8.9%, or Rp11.63 trillion, from Rp131.40 trillion in 2019. This brought the CASA ratio to 39.44% in 2020, up from 37.15% in 2019

Kinerja Keuangan

Pendapatan Bank dihasilkan dari pendapatan bunga, keuntungan dari penjualan surat berharga dan transaksi valuta asing, serta pendapatan *fee* dan komisi atas transaksi valuta asing, *trade finance* dan berbagai transaksi perbankan lainnya.

Pada tahun 2020, total pendapatan bunga mencapai Rp16,18 triliun, menurun sebesar 8,9%, atau Rp1,54 triliun, dari Rp17,72 triliun pada tahun 2019. Pendapatan bunga bersih mencapai Rp8,80 triliun pada tahun 2020 dibandingkan dengan Rp8,97 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kegiatan perkreditan oleh Bank akibat COVID-19. Namun demikian, pendapatan non-bunga Bank mencapai Rp3,28 triliun, meningkat sebesar 71,5%, atau Rp1,37 triliun, dari Rp1,91 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama ditopang oleh peningkatan kegiatan dan kinerja Treasuri, yang berhasil meraih keuntungan bersih penjualan efek sebesar Rp1,78 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp114,22 miliar pada tahun 2019.

Financial Performance

The Bank's earnings were derived from interest earnings, gains on securities sales and foreign exchange transactions, and fees and commissions collected from foreign exchange transactions, trade finance, and other banking transactions.

In 2020, total interest earnings amounted to Rp16.18 trillion, a decline of 8.9%, or Rp1.54 trillion, from Rp17.2 trillion in 2019. Net interest income was Rp8.80 trillion in 2020 compared with Rp8.97 trillion in 2019. The decline was due to decreasing credit activities during the year under review due to COVID-19. The Bank's total non-interest earnings, however, reached Rp3.28 trillion, an increase of 71.5%, or Rp1.37 trillion, from Rp1.91 trillion in 2019. The increase was largely due to the performance of Treasury, which achieved net gains from the sale of marketable securities totalling Rp1.78 trillion in 2020, compared to Rp144.22 billion in 2019.

Dengan meningkatnya pendapatan, dan biaya operasional yang stabil, Bank mampu mencatat laba bersih sebesar Rp3,12 triliun pada tahun 2020 dibandingkan dengan Rp3,50 triliun pada tahun 2019. Pencapaian laba bersih Bank melanjutkan catatan prestasi Bank yang mengesankan dari segi *sustainable profit* selama bertahun-tahun, bahkan selama beberapa dasawarsa, melewati berbagai masa krisis.

With the increasing earnings and stable operating expenses, the Bank's total profit before tax was Rp3.12 trillion in 2020, compared to Rp3.50 trillion in 2019. The Bank's net profit continued the Bank's excellent record of sustainable profit over the years, through all kinds of crises.

Keberhasilan menjaga tingkat profitabilitas dari tahun ke tahun tidak lepas dari kemampuan Bank mengelola rasio beban operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO) secara optimal. Rasio BOPO pada tahun 2020 mencapai 79,54%, meningkat hanya 1,58% dari rasio BOPO 77,96% pada tahun 2019. Peningkatan yang relatif kecil ini menunjukkan kemampuan mengelola biaya operasional secara disiplin sebagai bagian dari inisiatif Bank menghadapi masa krisis.

The success of maintaining profitability over the years can be attributed to the ability of the Bank to optimise the level of operating cost to operating income (BOPO) ratio. In 2020, the BOPO ratio was 79.54%, increasing slightly from 77.96% in 2019. This showed the Bank's ability to exercise disciplined cost management as part of the initiatives in the face of challenging times.

Dari segi neraca keuangan, total aktiva Bank meningkat sebesar 3,2% menjadi Rp218,1 triliun, total kewajiban naik sebesar 2,3% menjadi Rp170,61 triliun, dan ekuitas bertambah sebesar 6,8% menjadi Rp47,46 triliun pada tahun 2020, yang secara umum, mencerminkan pencapaian yang cukup baik oleh Bank.

On the balance sheet, total assets grew by 3.2% to Rp218.1 trillion, total liabilities rose by 2.3% to Rp170.61 trillion, and shareholders' equity increased by 6.8% to Rp47.46 trillion in 2020, which on balance, showed the relatively good performance of the Bank.

Perbandingan Pencapaian dengan Target 2020

Pandemi COVID-19 membuat hampir semua sasaran usaha tidak berlaku lagi di pertengahan tahun, terutama karena kebanyakan rencana bisnis perusahaan, termasuk RBB PaninBank, sudah ditentukan di akhir tahun 2019 ketika tidak ada yang bisa memperkirakan penyebaran Virus Corona baru. Pada bulan Juni 2020, dengan seijin OJK, Bank melakukan revisi atas target-target usahanya guna menyelaraskan dengan kondisi yang berlaku di pasar. Meskipun demikian, beberapa pencapaian Bank juga tidak memenuhi sasarannya. Pada intinya Bank tidak mencapai sasaran pinjaman, melebihi sasaran simpanan dan melampaui sasaran laba usaha.

Comparison Between Performance and Target in 2020

The COVID-19 pandemic had made most business targets obsolete by mid year, especially since most business plans, including ours, were finalised at year end 2019, before anyone became aware of the novel Corona virus. With OJK approval, we revised the Bank's targets in June 2020 to align with the unfolding conditions. Even then, the revised targets were inaccurate in several areas. The culmination is that the bank did not achieve the target in lending, overshot our target in funding, and comfortably surpassed our profitability target.

MENGHADAPI TANTANGAN DAN KENDALA

Bank telah mengidentifikasi beberapa kendala dalam bentuk potensi risiko yang dihadapi Bank apabila gagal mengatasi beberapa masalah tertentu, yaitu: (i) apabila Bank gagal melakukan transformasi digital, yang dapat menjadi kendala bagi Bank untuk menghadirkan produk dan layanan perbankan yang mampu bersaing di pasar, (ii) apabila Bank gagal mempersiapkan personil dan prosedur operasional secara memadai dalam rangka transformasi digital tersebut, yang dapat menjadi kendala bagi Bank untuk menyediakan produk dan layanan perbankannya secara efektif, (iii) apabila Bank gagal mendiversifikasi basis nasabah utamanya yang saat ini berusia 50 tahun ke atas, yang dapat mengurangi

FACING UP TO CHALLENGES AND OBSTACLES

The Bank identified several obstacles, mainly in the form of potential risks that the Bank may face should certain issues fail to be addressed, including: (i) failure to undertake digital transformation, which would hinder the ability to provide banking products and services that are competitive in the market; (ii) failure to adequately prepare human resources and operating procedures for the transformation, which would hinder our ability to effectively deliver products and services; (iii) failure to diversify the current core customer base of the older generation of 50 years of age and above, which would greatly reduce the number of individual customers within

jumlah nasabah Bank secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang; dan (iv) apabila Bank gagal menciptakan produk dan layanan perbankan yang diminati oleh generasi muda – termasuk kelompok *millennial*, yang dapat menjadi kendala bagi Bank untuk mendiversifikasi basis nasabah utamanya.

Solusi untuk berbagai kendala tersebut di atas adalah, sesuai urutannya: (i) memastikan pihak penyedia sistem maupun arsitektur teknologi informasi (TI) yang ditunjuk Bank adalah yang mampu menyediakan *platform* dan sistem operasi TI yang terbaik dalam kelasnya dengan standar kelas dunia, (ii) memastikan bahwa Bank melatih personilnya dan merancang prosedur kerja secara memadai guna mengatasi tantangan transformasi, (iii) memastikan bahwa Bank mengomunikasikan produk dan layanan perbankan secara lebih kreatif agar lebih diminati oleh generasi muda, melalui semua media sosial yang populer di kalangan generasi muda, dan (iv) memastikan Bank mengembangkan produk dan layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda, namun tetap mempertahankan produk dan layanan perbankan yang memenuhi kebutuhan basis nasabah utama Bank dewasa ini.

Sedangkan untuk menghadapi tantangan dan kendala di depan mata pada tahun 2021 ini, yaitu perihal menjaga kualitas aset produktif Bank di tengah kemungkinan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, Bank telah memperkuat unit SAM untuk memantau aset produktif lebih ketat, melakukan *work-out* pinjaman bermasalah secara intensif dengan para debitur, memperpanjang periode pengembalian pinjaman serta program relaksasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku, dan sejauh mana mungkin, menggantikan pinjaman bermasalah dengan pinjaman baru yang produktif.

Bank akan mampu menghadapi segala tantangan dengan personil yang kompeten dan terlatih; menuai peluang pertumbuhan baru dengan *platform* perbankan digital yang akan segera dimiliki; serta melayani nasabah lebih baik dengan jaringan pelayanan yang lebih luas dan terdiversifikasi. Selain itu, dengan produk serta layanan perbankan yang unggul, yang dikemas dengan dukungan pengelolaan risiko yang matang serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bank akan mampu mengupayakan *sustainable profit* dalam jangka panjang.

MENINGKATKAN PROSPEK USAHA BANK PADA TAHUN 2021

Kami memperkirakan prospek usaha yang lebih baik bagi Bank pada tahun 2021. Hal ini ditunjang oleh pengetahuan tentang bisnis apa yang berpeluang tumbuh bersama COVID-19, dan bisnis apa yang tidak.

the next two decades; and (iv) failure to create new banking products and services that appeal to the younger generation – including the millennials, which would hinder the ability to diversify the Bank's core customer base.

The solutions to those obstacles are, in order of the above: (i) Ensuring that we only deal with established and proven providers of reliable IT architectures and systems in the market, who are able to provide best-in-class IT platforms and operating systems that meet world-class standards; (ii) ensuring that we train our people and design our operating procedures adequately to meet the challenges of transformation; (iii) ensuring that we communicate our products and services more creatively and appealingly to younger generations, using all popular social media, and (iv) ensuring that we develop new banking products and services that are relevant with the needs of the younger generations, while maintaining our current products and services that meet the needs of our core customer base.

As for the very immediate challenges and obstacles that we face in 2021, that of maintaining the quality of our earning assets amid a possible prolonged spread of COVID-19, the Bank has strengthened its SAM unit to monitor earning assets closely, work-out problem loan assets vigorously with debtors, extend loan repayment and relaxation as per regulatory terms, and, to whatever extent possible, replace Non-Performing Loan assets with new, good performing assets.

With highly trained, competent personnel, the Bank can face any challenge. With the imminent introduction of a fully digital banking platform, the Bank can harness new growth opportunities. With broadened and diversified delivery channels, the Bank can better serve customers. And with cutting-edge products and services that are delivered with robust Risk Management and Good Corporate Governance, the Bank will continue to achieve sustainable profit over the long-term.

ELEVATING THE BANK'S BUSINESS PROSPECTS IN 2021

We expect to have better business prospects for the Bank in 2021. This assumption is supported by our knowledge of which business have a chance of growth during COVID-19, and which does not.

Bank akan memanfaatkan hubungan usaha yang sudah lama terbina dengan pengusaha UKM untuk mengembangkan solusi pembiayaan berkolaborasi dengan penyedia *fintech*, misalnya, meningkatkan pengalaman nasabah dengan produk perbankan bernilai tambah yang mengandalkan pelayanan *end-to-end* dan *seamless* dari sinergi beberapa unit bisnis Bank sekaligus.

Dalam hal pendanaan, Bank akan terus mengembangkan produk yang menarik bagi para deposan yang mencari alternatif imbal hasil atas penempatan dana mereka yang lebih menguntungkan daripada apa yang ditawarkan bunga deposito bank dewasa ini. Pada saat yang sama, Bank akan terus mengandalkan transaksi Treasuri dan Pasar Modal yang terbukti menguntungkan bagi Bank selama ini. Peluang usaha masih terbuka lebar bagi layanan perbankan universal yang memiliki reputasi baik seperti halnya PaninBank untuk menembus segmen pasar menengah yang masih muda dan berkembang di Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

MENGELOLA RISIKO DENGAN LANDASAN KOKOH

Merujuk pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 serta Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Risiko oleh Bank Umum, PaninBank telah merumuskan kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah mempertimbangkan skala, cakupan maupun keragaman (*complexities*) bisnis Bank beserta entitas anak lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Panin, sesuai Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pendirian Konglemerasi Keuangan dan Penunjukan Entitas Utama (EU) pada Konglomerasi Keuangan.

Sebagai EU pada Konglomerasi Keuangan Panin (Grup), PaninBank terus mengembangkan ekosistem pengelolaan risiko terpadu yang mencakup Bank beserta semua entitas anak lainnya secara terpadu. Ekosistem tersebut memungkinkan interaksi dan koordinasi di antara para pelaksana pengelolaan risiko di Bank dan masing-masing entitas anak lainnya untuk berdiskusi, mengembangkan serta menerapkan *enterprise-wide risk management framework* yang dikelola bersama oleh Grup. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2019, disempurnakan sepanjang tahun 2020, dan akan diformalisasi oleh PaninBank tahun 2021.

Kerangka kerja pengelolaan risiko tersebut menyamakan standar metodologi maupun metrik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempertimbangkan, mengukur, mengevaluasi, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang kini dilakukan secara seragam oleh Grup dalam mengelola serta memitigasi risiko.

The Bank will capitalise on its excellent relationships with SME customers to develop financing solutions in collaboration, with fintech companies, for instance, and enhance the customer experience with added-value products that rely on seamless, end-to-end services involving several business groups of the Bank simultaneously.

In funding, the Bank will continue to develop products to attract depositors who are looking for better returns than those offered by bank deposits today. At the same time, we will avail ourselves to Treasury and Capital Market transactions that so far have been lucrative for the Bank. The opportunities are quite endless for a universal bank with an impeccable reputation such as PaninBank to penetrate Indonesia's young and growing middle-market segment for many years to come.

IMPLEMENTING ROBUST RISK MANAGEMENT

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter No 34/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management by a Commercial Bank, PaninBank has drafted the policies and procedures for Risk Management that have considered the size, scope and complexities of the business of the Bank as well as those of the PaninBank Financial Conglomerate, pursuant to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2020 of October 16, 2020 on the Establishment of the Financial Conglomerate and the Designation of the Main Entity (ME) in the Financial Conglomerate.

As the ME in the PaninBank Financial Conglomerate (Group), the Bank has developed an integrated Risk Management ecosystem that covers the Bank and its subsidiary entities. The ecosystem provides for the interaction and coordination between the risk managers of the Bank with those of the different subsidiary entities to discuss, develop and implement a shared enterprise Risk Management framework among the Group. This initiative started in 2019 and took real shape in 2020, following which PaninBank intends to formalise it in 2021.

The enterprise Risk Management framework standardises the methodologies and metrics to identify, assess, measure, evaluate, monitor and control potential risks that are now applied uniformly in managing and mitigating risks across the Group.

Uraian lengkap mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan risiko oleh Bank disajikan pada Bab Pengelolaan Risiko di Laporan Tahunan ini.

A full disclosure of the Bank's Risk Management policies and practices are presented in the Chapter on Risk Management in this Annual Report.

MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PaninBank sangat menyadari nilai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pendorong kelanjutan bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh sebab itu, Bank telah mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai batu pijakan kegiatan usahanya, dengan kebijakan Bank yang dirumuskan berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku.

Mengenai perlunya pengawasan yang efektif atas pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh Konglomerasi Keuangan, PaninBank teleh membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi melalui Keputusan Direksi tahun 2019. Dapat kami laporkan bahwa sebagai Entitas Utama, PaninBank mengintegrasikan serta mengoordinasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan Panin.

PaninBank menerapkan GCG di Bank dan entitas anak lainnya pada Konglomerasi Keuangan Panin dengan tujuan utama untuk memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan dengan merealisasikan visi dan misi Konglomerasi, memastikan kepatuhan terhadap semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta peraturan internal maupun Kode Etik Bank.

Uraian lengkap mengenai kebijakan dan praktik tata kelola Bank disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PaninBank is keenly aware of the value of Good Corporate Governance (GCG) as a driver of business continuity and long-term sustainability. As such, the Bank has made the principles of GCG the cornerstones of its business activities, with policies that have been drawn up on the basis of prevailing laws and regulations.

On the need for effective oversight on the Corporate Governance practices of the Financial Conglomerate, PaninBank formed the Integrated Corporate Governance Committee by the Board of Directors' Decree in 2019. We are pleased to report that, as the Main Entity, PaninBank now integrates and coordinates the implementation of Good Corporate Governance across the Panin Financial Conglomerate.

PaninBank implements GCG within the Bank and its subsidiary entities with the primary goal of meeting Stakeholder expectations by achieving the Group's Vision and Mission, ensuring compliance with all prevailing laws and regulations, as well as with the Bank's internal rules and Code of Ethics.

A full disclosure of the Bank's Corporate Governance policies and practices are presented in the Chapter on Corporate Governance of this Annual Report.

EVALUASI KINERJA KOMITE EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh sejumlah Komite Eksekutif, antara lain Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Tata Kelola (KTK). Pada tahun 2020, keempat Komite Eksekutif tersebut telah menunaikan tugasnya masing-masing dengan baik.

KMR menyiapkan strategi maupun rencana kontinjensi baru sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan kondisi eksternal yang abnormal. Komite ini juga memimpin upaya peningkatan dan penguatan kerangka kerja serta penerapan pengelolaan risiko di Bank beserta entitas anak lainnya.

EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE EXECUTIVE COMMITTEES

In discharging its duties, the Board of Directors is assisted by four Executive Committees, namely the Risk Management Committee (RMC), the Asset and Liability Committee (ALCO), the Information Technology Steering Committee (ITSC), and the Governance Committee (GC). In 2020, these Executive Committees performed their duties and responsibilities satisfactorily.

The RMC prepared the new strategy and contingency plan of the Bank's Risk Management in the face of the COVID-19 pandemic caused such abnormal external conditions. The Committee also led the process of enhancing and strengthening the framework and implementation of Risk Management within the Bank and its subsidiary entities.

ALCO mengkaji ulang posisi dan pandangannya terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia dan dunia, yang keduanya telah berubah drastis akibat COVID-19, serta menyesuaikan strategi *Asset and Liability Management* (ALMA) Bank dengan realita baru. Komite ini juga mengubah kebijakan yang telah dianjurkannya di awal tahun untuk mengakomodasi perubahan eksternal yang diakibatkan oleh pandemi.

The ALCO re-evaluated its views and positions on the macro-economic conditions of Indonesia and those of the world, both of which had drastically changed due to COVID-19, and readjusted the Bank's asset and liability management (ALMA) strategy accordingly. The Committee also completely revised the policies that it had recommended for the Bank at the start of the year to accommodate external changes brought on by the pandemic.

KPTI memastikan bahwa *Road Map* Teknologi Informasi (TI) yang telah dirumuskan oleh Bank dalam rangka transformasi digital masih berlaku dengan adanya COVID-19, dan bisa dilanjutkan sesuai rencana. Bank memastikan kemampuan beroperasi dan melayani nasabah secara nomal melalui perangkat teknologi informasi, ketika setengah atau tiga-perempat jumlah karyawannya diharuskan bekerja dari rumah sewaktu-waktu selama tahun 2020.

The ITSC made sure the IT Road Map that the Bank had prepared for its planned digital transformation was still intact despite COVID-19, and could still proceeded as planned. The main consideration with respect to the disruptive effects of COVID-19, was the need to readjust training of personnel from classroom sessions to remote learning. In this context, the ITSC also made sure that the Bank could operate and provide its services normally through on-line media when between a half and three-quarters of its employees would be working from home on any given banking day throughout most of 2020.

KTK mengikuti advis dari Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tingkat Dewan Komisaris mengenai apa yang harus dilakukan Bank untuk menyesuaikan tata kelola dengan kerangka tata kelola terpadu Konglomerasi Keuangan Panin. Selain itu, Komite ini juga membantu Direksi memastikan bahwa GCG benar-benar dilaksanakan oleh Bank dalam masa krisis guna memperkuat ketahanan (*resilience*) Bank terhadap tekanan eksternal.

The Governance Committee (GC) followed advice from the Integrated Governance Committee at the Board of Commissioner level on what needed to be done at the Bank to conform with the Integrated Governance framework of the PaninBank Financial Conglomerate. In addition, the GC also assisted the Board of Directors in making sure that GCG is relied upon even more during times of crisis to strengthen the Bank's resilience against external pressures.

MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PSAK 71

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia PSAK 71, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020, sesungguhnya mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9. PSAK 71 menggantikan aturan PSAK 55 sebelumnya dalam hal pengakuan nilai instrumen keuangan, dan bertujuan untuk memperjelas penyajian klasifikasi serta valuasi instrumen keuangan, termasuk penghapusan nilai aset keuangan.

APPLYING THE PSAK 71 ACCOUNTING STANDARD

The Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK) 71, which became effective on 1 January 2020, is the adoption of the International Financial Reporting Standard (IFRS) 9. The PSAK 71 replaces the previous PSAK 55 standard on the recognition and valuation of financial instruments, and aims to provide better clarity on the classification and valuation of financial instruments, including the impairment of financial assets.

PaninBank mulai mengembangkan metodologi penghitungan nilai instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 pada tahun 2018, dan mulai mensimulasi penerapan PSAK 71 pada tahun 2019, bersamaan dengan pengembangan *database*, sistem, dan infrastruktur terkait yang diperlukan.

PaninBank started to develop the methodology for calculating the value of its financial instruments on the basis of PSAK 71 in 2018, and began simulation of the PSAK 71 treatment in 2019, along with the development of related databases, systems and infrastructure.

Penerapan PSAK 71 oleh Bank mulai tahun 2020 tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk hal-hal sebagaimana diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bank (catatan 2 butir a) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The implementation of PSAK 71 by the Bank in 2020 did not have a material impact on the figures reported in the current or previous years, except for those explained in the Notes to the Consolidated Financial Statements of the Bank (note 2 point a) that is an integral part of this Annual Report.

MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI INFORMASI SERBAGUNA

PaninBank mengembangkan teknologi informasi (TI) sebagai platform serbaguna menyeluruh, yang mampu mendukung semua aspek operasional Bank. Pengembangan kapabilitas TI Bank diarahkan kepada kemampuan Bank menyediakan layanan perbankan digital yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah saat ini dan di masa depan yang masih bisa diperkirakan (*foreseeable future*). TI mendukung sistem pengoperasian Bank, memungkinkan proses penyajian layanan yang superior, memfasilitasi pengembangan produk baru, dan membantu Manajemen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

DEVELOPING ENABLING INFORMATION TECHNOLOGY

PaninBank develops its information technology (IT) as an all-encompassing, enabling platform that supports virtually all aspects of the Bank's operations. Recently, development of the Bank's IT capabilities has been geared towards enabling the Bank to provide digital banking services that can meet the needs of customers today and in the foreseeable future. IT supports the Bank's operational systems, provides superior service processes, facilitates new product developments, and helps Management make well-informed decisions.

MENGEMBANGKAN SDM KOMPETEN

Di hampir setiap kegiatan pengembangan oleh Bank, sumber daya manusia menempati posisi terdepan. Dalam pengembangan pemasaran, operasional, pengelolaan risiko, teknologi informasi, tata kelola perusahaan atau tanggung jawab sosial perusahaan, sumber daya manusia menjadi fokus utama di semua kegiatan pengembangan tersebut. Bank mengupayakan peningkatan kompetensi, keterampilan dan pengetahuan karyawannya dengan serius. Karena SDM yang kompeten merupakan kunci untuk menjadi penyedia jasa Perbankan Komersial dan Ritel yang terkemuka.

Bank akan memiliki SDM yang kompeten dari proses pembelajaran dan pelatihan yang berkelanjutan di PaninBank. Pada tahun 2020, lebih dari 7.340 karyawan Bank mengikuti berbagai program pelatihan dan *refresher course* yang diselenggarakan oleh Bank serta berbagai institusi pendidikan di dalam maupun luar negeri.

DEVELOPING COMPETENT HUMAN RESOURCES

In virtually all development of the Bank's activities, Human Resources takes centre stage. Be it Marketing, Operations, Risk Management, Information Technology, Corporate Governance, or Corporate Social Responsibility, Human Resources are the key focus in these development programs. We take the development of our people's competence, skills and knowledge very seriously. That's because competent Human Resources are critical to being the leading provider of Commercial and Retail Banking services.

The Bank develops its competent Human Resources from the continuous learning process and training at PaninBank. In 2020, more than 7,340 PaninBankers underwent training and refresher courses at the Bank or in various learning institutions at home and abroad.

MENERAPKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG BERDAMPAK POSITIF

Berbagai program Tanggung Jawab Sosial perusahaan terkemuka dunia dewasa ini telah berkembang menjadi kegiatan *social engagement* yang intensif dan memiliki dampak yang kuat terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut. Program tanggung jawab sosial kini dikaitkan dengan, antara lain, kepentingan hak azasi manusia, lingkungan hidup, masyarakat komunitas dan konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi semata-mata berupa donasi sosial atau bantuan sembako bagi korban bencana alam. PaninBank tetap mengulurkan tangan terhadap korban bencana alam dan sebagainya, tetapi apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkemuka dewasa ini adalah program-program yang memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan komunitas atau bahkan aspirasi individu.

IMPLEMENTING IMPACTFUL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Today's Corporate Social Responsibility programs and activities by leading companies throughout the world have become intensified social engagements that leave a powerful impact on the key stakeholders that are associated with the programs. Social Responsibility programs are now attached to, among others, human rights, the environment, the communities and consumers. Gone are the days when Corporate Social Responsibilities are merely represented by social donations or food aid to victims of natural disasters. The Bank is still involved in providing assistance to disasters and such, but what stakeholders demand out of the Social Responsibilities of leading corporations today are programs that have real impact and meaning to community welfare and individual aspirations.

Pada Laporan Tahunan PaninBank 2019, pembahasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah mencakup berbagai aspek hak azasi manusia, lingkungan hidup, pemberdayaan komunitas serta (dalam halnya Bank) nasabah. Dengan berbesar hati, dapat kami laporkan bahwa pembahasan program-program Tanggung Jawab Sosial Bank pada tahun 2020 sudah lebih luas lagi. Uraian lengkap mengenai hal ini disajikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

In our 2019 Annual Report, our discussions on Corporate Social Responsibility touched on these various aspects of human rights, the environment, community empowerment, and (in our case) customers. We are pleased to report that we have expanded the stories of our Corporate Social Responsibility programs in 2020, a full report of which is presented in the Chapter on Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

KOMITMEN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Sejalan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun oleh PaninBank, Bank memiliki komitmen terhadap segala upaya yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang dianut Bank di bidang ESG – *environment, social, and governance* - yang kini menjadi *best practice* yang dianut oleh berbagai perusahaan terkemuka dunia. Pada intinya, ESG mengacu pada pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial masyarakat maupun pelestarian lingkungan alam.

Untuk itu, PaninBank mulai mempertimbangkan aspek pelestarian alam terhadap kebijakan kredit yang diberikan kepada industri yang berpotensi merusak alam. Misalnya, Bank akan meneliti dan memastikan bahwa debitur pertambangan benar-benar mengacu ke hasil studi dan rekomendasi yang tertuang dalam AMDAL terkait kegiatan penambangannya; atau meminta debitur perkebunan kelapa sawit untuk menunjukkan sertifikasi dan keanggotaan di organisasi industri yang berkepentingan terhadap pelestarian alam seperti RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) atau ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

COMMITMENTS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

In line with the Action Plan on Sustainability Finance that has been formulated by PaninBank, the Bank is committed to all efforts that lead to the achievement of sustainable development goals. This is also the policy that has been adopted by the Bank in ESG – environment, social, and governance – that has become best practice for leading global corporations. In essence, ESG refers to the importance of implementing Corporate Governance that also focuses on the aspect of social welfare and environmental preservation.

To that end, PaninBank has begun to consider environmental aspects on credits that are disbursed to industries that may potentially be harmful to the environment. For instance, the Bank will scrutinise and ensure that debtors in the mining sector fully comply with the results and recommendations of the AMDAL assessments on their mining operations; or to require debtors from the palm oil sector to show their certifications and memberships in industry associations that are devoted to environmental protection such as RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) or ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi menyambut hangat kehadiran Haryono Wongsonegoro sebagai anggota terbaru Direksi sejak bulan Juni 2020, yang akan bertanggung jawab atas portofolio pengembangan Jaringan & Distribusi PaninBank, sebagai salah satu aspek utama dalam upaya Bank menjadi yang terkemuka di bidang pelayanan Perbankan Komersial dan Ritel. Kami mendoakan keberhasilan kiprahnya bersama PaninBank.

Dengan penambahan 1 (satu) Direktur, maka komposisi Direksi PaninBank sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors was pleased to welcome Haryono Wongsonegoro as the latest addition to the Board of Directors of PaninBank in June 2020, responsible for the development and expansion of the Bank's Network & Distribution portfolio, which we consider to be one of the key elements in securing PaninBank as a leading provider of Commercial and Retail Banking services. We wish him great success in his endeavours with PaninBank.

With this single addition, the composition of the Board of Directors of the Bank as of December 31, 2020 was as follows:

Direksi
Board of Directors

Dari Kiri ke Kanan
From Left to Right

Antonius Ketut Dwirianto
Direktur
Director

Suwito Tjokrorahardjo
Direktur
Director

Ng Kean Yik
Direktur
Director

Herwidayatmo
Presiden Direktur
President Director

Gunawan Santoso
Direktur
Director

Januar Hardi
Direktur
Director

Hendrawan Danusaputra
Wakil Presiden Direktur
Deputy President Director

Lionto Gunawan
Direktur
Director

Haryono Wongsonegoro
Direktur
Director

Edy Heryanto
Direktur
Director

Jabatan	Nama | Name	Position
Presiden Direktur	Herwidayatmo	President Director
Wakil Presiden Direktur	Hendrawan Danusaputra	Deputy President Director
Direktur	Ng Kean Yik	Director
Direktur	Edy Heryanto	Director
Direktur	Januar Hardi	Director
Direktur	Lionto Gunawan	Director
Direktur	Gunawan Santoso	Director
Direktur	Suwito Tjokrorahardjo	Director
Direktur	Antonius Ketut Dwirianto	Director
Direktur	Haryono Wongsonegoro	Director

Apresiasi Penutup

Atas nama segenap anggota Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas pengarahan dan pengawasan yang diberikan sepanjang tahun 2020. Kami pun berterima kasih kepada segenap Pemangku Kepentingan lainnya atas kepercayaan yang diberikan kepada PaninBank. Penghargaan yang setinggi-tinginya khusus kami sampaikan kepada nasabah yang memercayakan kebutuhan perbankan mereka kepada PaninBank.

Pada kesempatan ini, kami pun berterima kasih kepada pihak otoritas keuangan atas bimbingannya yang memungkinkan Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai mandat yang diberikan. Kami berharap dengan dukungan semua pihak, kinerja PaninBank akan semakin baik serta mampu mempertahankan *sustainable profit* Bank demi kepentingan segenap pemangku kepentingan.

Closing Words of Appreciation

On behalf of the Board of Directors, I am pleased to convey our appreciation to the stakeholders of the Bank, the Board of Commissioners, and all other stakeholders for placing their trust with PaninBank. Our highest gratitude is reserved for the Bank's customers for trusting us to serve their banking needs. We owe a great debt of gratitude to the staff and employees of the Bank for their dedication and professionalism in carrying out their duties and responsibilities.

I would also like to use the occasion to thank the financial authorities for their continuing guidance that has enabled us to discharge our duties as mandated. We hope that with support from all quarters, the performance of PaninBank will be even better and that the Bank will continue to achieve its sustainable profit for the benefit of all stakeholders.

Jakarta, Mei 2021 | May 2021

Herwidayatmo
Presiden Direktur
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Bank Pan Indonesia Tbk

Statement of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Bank Pan Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Bank Pan Indonesia Tbk for the year 2020 has been presented in its entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of such Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2021 | May 2021

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen
Vice President Commissioner/Independent Commissioner

Chandra R. Gunawan*
Komisaris
Commissioner

Johnny*
Komisaris
Commissioner

Drs. H. Riyanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Gregory James Terry
Komisaris
Commissioner

DIREKSI
Board of Directors

Herwidayatmo
Presiden Direktur
President Director

Hendrawan Danusaputra
Wakil Presiden Direktur
Deputy President Director

Edy Heryanto
Direktur
Director

Januar Hardi
Direktur
Director

Haryono Wongsonegoro
Direktur
Director

Gunawan Santoso
Direktur
Director

Ng Kean Yik
Direktur
Director

Lionto Gunawan*
Direktur
Director

Suwito Tjokrorahardjo
Direktur
Director

Antonius Ketut Dwirianto
Direktur
Director

* Berlaku efektif setelah adanya keputusan RUPS mengenai persetujuan perubahan jabatan yang bersangkutan.
Effective upon a resolution of the GMS regarding the approval of the change in position concerned.

Profil Perusahaan

Company Profile

52 **Sekilas Perusahaan**
Company at A Glance

54 **Informasi Umum**
General Information

55 **Jejak Langkah**
Milestones

58 **Bidang Usaha**
Line of Business

64 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

66 **Visi, Misi, dan Strategi**
Vision, Mission, and Strategy

68 **Profil Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Profile

74 **Profil Direksi**
Board of Directors Profile

84 **Manajemen Perusahaan**
Company Management

85 **Informasi Pemegang Saham**
Shareholder Information

87 **Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Instrumen Keuangan**
Subsidiaries, Associate Entities, and Financial Instruments

90 **Wilayah Operasional**
Operations Area

92 **Struktur Grup Perusahaan**
Company Group Structure

93 **Struktur Pemegang Saham**
Shareholders Structure

94 **Kronologis Pencatatan Saham**
Share Listing Chronology

94 **Kronologis Pencatatan Efek Lainnya**
Other Securities Listing Chronology

96 **Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal**
Institutions and/or Capital Market Support

97 **Informasi pada *Website* Perusahaan**
Information on the Company Website

PaninBa

Sekilas Perusahaan

Company at a Glance

PaninBank terus melakukan terobosan dan inovasi untuk memperkokoh posisinya dalam industri perbankan

PaninBank continues to come up with breakthroughs and innovations to strengthen its position in the banking industry.

PT Bank Pan Indonesia Tbk, atau PaninBank atau selanjutnya disebut "Bank" dalam Laporan Tahunan ini, didirikan pada tahun 1971 melalui aksi penggabungan usaha dari 3 (tiga) Bank yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia. Pendirian PaninBank disahkan melalui Akta No. 85 dibuat di hadapan Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam perjalanannya, PaninBank kembali melakukan aksi merger dengan 4 (empat) bank swasta lain, yaitu PT Bank Lingga Harta, Bank Abadi Djaja, Bank Pembangunan Ekonomi dan Bank Pembangunan Sulawesi. Kemudian dalam rangka meningkatkan skala pengembangan usahanya, PaninBank juga telah bekerja sama dengan institusi keuangan internasional Dai-Ichi Kangyo Bank, Jepang, kemudian Credit Lyonnais Perancis, Westpac Banking Corporation Australia yang kemudian diambil alih oleh ANZ Banking Group.

Pada tahun 1982, PaninBank mengambil inisiatif strategis yang sekaligus menjadi sebuah tonggak sejarah baru yaitu melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham: PNBN. Atas aksi korporasi tersebut, PaninBank tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang melantai di bursa saham.

Dalam menjalankan kegiatan perbankan dan operasional sehari-hari, PaninBank selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian sehingga perusahaan mampu melalui seluruh kondisi perekonomian nasional dengan baik termasuk ketika berhadapan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. Saat itu, PaninBank menjadi satu-satunya bank 10 besar yang masuk ke dalam kategori "A" sehingga tidak wajib mengikuti program rekapitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau BLBI. Kemudian pasca krisis, PaninBank berhasil memperoleh peringkat sebagai Bank terbaik di Industri perbankan nasional dari Moody's Investor Services pada 2001.

PT Bank Pan Indonesia Tbk, or PaninBank, hereinafter referred to as "Bank" in this Annual Report, was established in 1971 following the merger of 3 (three) Banks, namely Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja, and Bank Industri and Dagang Indonesia. The establishment of PaninBank was legalized through Deed No. 85 made before Mr. Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora S.H., Notary in Jakarta.

Throughout the course of its history, PaninBank again merged with 4 (four) other private banks, namely PT Bank Lingga Harta, Bank Abadi Djaja, Bank Pembangunan Ekonomi and Bank Pembangunan Sulawesi. Then, in order to increase the scale of its business, PaninBank entered into collaboration with international financial institutions, namely Dai-Ichi Kangyo Bank, Japan, then with Credit Lyonnais France, Westpac Banking Corporation Australia, and the later was acquired by ANZ Banking Group.

In 1982, PaninBank took a strategic initiative which became the Bak's new milestone, namely conducting an initial public offering on the Indonesia Stock Exchange with the code: PNBN. This corporate action made PaninBank the first bank in Indonesia to be listed on the stock exchange.

In carrying out its daily banking activities and operations, PaninBank always upholds the principle of prudence so that the Bank is able to survive the ups and downs of national economic conditions, including the financial crisis that hit Indonesia in 1998. At that time, PaninBank was the only bank among the top 10 banks in Indonesia given the category "A". Hence did not require a bailout under the government's recapitalization program. Post crises Moody's Investor Services named the Bank as the Best Bank in the domestic Banking Industry in 2001.

PaninBank merangkum budaya perusahaan dan nilai- nilai kerja yang positif I CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Berlandaskan nilai-nilai tersebut, perusahaan berharap dapat mencapai visi dan misi yang ditetapkan yaitu Menjadikan PaninBank bank terkemuka dalam Perbankan Komersial dan Ritel.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Pada tahun 1971, PaninBank didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd., yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Pendirian No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 – yang dibuat di hadapan Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh No. J.A. 5/81/24 tanggal 19 April 1972) BNRI tanggal 6 Juni 1972 No. 45, TBNRI No. 210.

Sejalan dengan tercatatnya saham di Bursa Efek Indonesia, nama PaninBank disesuaikan menjadi PT Bank Pan Indonesia Tbk. atau disingkat dengan PT Bank Panin Tbk. Bank berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta PKR No. 45 tgl 4 April 1997 – Not. Benny Kristianto, S.H. di Jakarta (SK Menkeh No. C2-2783. HT.01.04. TH'97 tanggal 17 April 1997 BNRI tanggal 11 Juli 1997 No. 55, TBNRI No. 2740.

PaninBank summarizes the corporate culture and positive work values of I CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect and Excellence). Based on these values, the Bank wishes to achieve its vision and mission, namely To transform PaninBank as a leading bank in Commercial and Retail banking.

INFORMATION ON ADJUSTMENT OF CORPORATE NAME

In 1971 the Bank was established under the name of PT Pan Indonesia Bank Ltd. with the Deed of Establishment No. 85 dated August 17, 1971 – made before Mr. Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora S.H., a Notary in Jakarta (Decree of the Ministry of Law No. J.A. 5/81/24 dated April 18, 1972) BNRI dated June 6, 1972 No. 45, TBNRI No. 210.

In line with the listing of shares on the Indonesia Stock Exchange, the name PaninBank was changed to PT Bank Pan Indonesia Tbk. or abbreviated as PT Bank Panin Tbk. The bank is domiciled in Jakarta in accordance with the Deed of Statement of Meeting Decision No. 45 dated April 4, 1997 - by Benny Kristianto, S.H. in Jakarta (SK Menkeh No. C2-2783. HT.01.04.TH'97 dated April 17, 1997 BNRI dated July 11, 1997 No. 55, TBNRI No. 2740.

Informasi Umum

General Information

Nama Perusahaan **Company Name**	PT Bank Pan Indonesia Tbk (PaninBank)
Informasi Perubahan Nama **Name Change Information**	Pada 17 April 1997 terjadi penyesuaian nama dari PT Pan Indonesia Bank menjadi PT Bank Pan Indonesia Tbk. On April 17, 1997, PT Pan Indonesia Bank changed its name to PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Tanggal Pendirian **Date of Establishment**	17 Agustus 1971 August 17, 1971
Bidang Usaha **Line of Business**	Perbankan Banking
Dasar Hukum Pendirian **Legal Basis of Establishment**	PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 85 Tanggal 17 Agustus 1972, dibuat dihadapan Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank") was established based on Deed No. 85 August 17, 1972, made before Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora S.H., Notary in Jakarta
Modal Dasar **Authorized Capital**	Rp9.600.000.000.000
Modal Ditempatkan Penuh **Fully Issued Capital**	Rp2.408.764.599.800
Nama Bursa Efek dan Tanggal Pencatatan **Name of the Stock Exchange and Date of Listing**	Bursa Efek Indonesia, 28 Oktober 1982 Indonesia Stock Exchange, October 28, 1982
Kode Saham **Ticker Code**	PNBN
ISIN Code **ISIN Code**	ID1000092703
Komposisi Pemegang Saham **Shareholders Composition**	PT Panin Financial Tbk (46,04%) Votraint No. 1103 Pty Limited (38,82%) Publik | Public (15,14%)
Rencana RUPS Tahunan **Annual GMS Plan**	9 Juni 2021 June 9, 2021
Alamat Kantor Pusat **Head Office Addres**	Gedung Bank Panin Pusat Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270, Indonesia Tel. : +62 21 2700545, 5735555 Fax. : +62 21 2700340 E-mail : panin@panin.co.id Situs : www.panin.co.id

Jejak Langkah

Milestones

1971

Pertama kali didirikan pada 17 Agustus 1971 dan merupakan bank pertama di Indonesia yang dibentuk dari aksi merger 3 (tiga) bank, yaitu PT Bank Kemakmuran, PT Bank Industri Djaja Indonesia, serta PT Bank Industri dan Dagang Indonesia.

Established on August 17, 1971 as the first bank in Indonesia to be established from the merger of PT Bank Kemakmuran, PT Bank Industri Djaja Indonesia, and PT Bank Industri & Dagang Indonesia.

1972

Bank tumbuh dan dikenal sebagai bank umum terbesar di Indonesia dan mendapat izin sebagai bank devisa.

Grew to become the largest commercial bank in Indonesia and acquired license as foreign exchange bank.

1973

Berperanan dalam pembentukan 2 (dua) insitusi keuangan non-bank, yaitu Private Development Finance Company of Indonesia Ltd. dan Mutual International Finance Corporation Ltd.

Participated in the establishment of two non-bank financial institutions, namely Private Development Finance Company of Indonesia Ltd. and Mutual International Finance Corporation Ltd.

1974

Bank melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Lingga Harta.

The merger with PT Bank Lingga Harta.

1975

Bank melakukan penggabungan usaha dengan Bank Pembangunan Ekonomi dan Bank Pembangunan Sulawesi.

Ther mergers with Bank Pembangunan Ekonomi and Bank Pembangunan Sulawesi.

1978

Bank menerima bantuan teknis dari Credit Lyonnais, Perancis.

Technical assistance with Credit Lyonnais, France.

1980

Peresmian kantor pusat baru di Senayan, Jakarta.

The opening of new head office in Senayan, Jakarta.

1982

Bekerja sama dengan Credit Lyonnais & Overseas Trust, Bank mendirikan CLIPAN Leasing. Pada tahun ini, Bank mulai memasuki babak baru perbankan modern.

Established CLIPAN Leasing in corporation with Credit Lyonnais & Overseas Trust Bank. This year, the Bank entering modern banking era.

1986

Co-Branding dengan AMEX Gold Card.

Co-Branding with AMEX Gold Card.

1988

Program komputerisasi.

Computerization program.

1989

Untuk pertama kalinya, Bank melakukan pendanaan luar negeri dengan ASEAN Finance Corporation Limited.

The first foreign funding by ASEAN Finance Corporation Limited.

1990

Bank dan Westpac Banking Corporation Australia mendirikan perusahaan patungan bernama Westpac PaninBank.

Established Westpac PaninBank as a joint venture company with Westpac Banking Corporation Australia.

1991

- Bank dipercaya sebagai salah satu bank penyalur pinjaman Bank Dunia untuk AFP
- Bank menerima fasilitas kredit bergulir senilai USD32 juta dari Singapura

- Trusted as one of the World Bank's lending banks for AFP.
- PaninBank received a revolving credit facility of USD32 million from Singapore.

1996

- Bank merayakan HUT perak ke-25 tahun
- Mendapat penghargaan dari Moody's Investors Service, Standard & Poor's, dan Thomson BankWatch & Capital Intelligence

- PaninBank celebrated Silver Anniversary
- Received an award from Moody's Investors Service, Standard & Poor's, and Thomson BankWatch & Capital Intelligence.

1998

- Di tengah masa krisis moneter yang cukup berat, PaninBank menjadi satu-satunya bank yang masuk kategori "A" di antara 10 bank swasta terbesar dan tidak mengikuti program rekapitalisasi oleh pemerintah.
- Bank mendapat penghargaan Bank Domestik Terbaik di Indonesia dari The Global Finance Magazine

- During the monetary crisis, PaninBank was the only bank in "A" Category among 10 largest private banks. Moreover, PaninBank was not included in the Government recapitalization program.
- Awarded as the Best Domestic Bank in Indonesia by The Global Finance Magazine.

Jejak Langkah
Milestones

2001

- 86 ATM baru terpasang
- Pasca krisis, Bank menerima penghargaan dari Moody's Investor Services sebagai Bank terbaik di industri perbankan
- Dilansir sebagai Bank swasta terbesar di Indonesia (bukan milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN)
- Kantor cabang mulai didesain dengan tampilan baru dan modern
- Bank meluncurkan produk baru investasi ritel (Dalink), National Call Centre dan *automated telephone banking*, serta mempromosikan KPR dan KPM.

- Installed 86 new ATMs.
- Best ranked in the banking industry after the crisis by Moody's Investor Services.
- The largest private bank in Indonesia (non Indonesian Bank Restructuring Agency/IBRA).
- Update and modern branch offices.
- Launched New product of retail investment (Dalink), National call center and automated telephone banking, and promoting KPR and KPM.

2002

Bank berhasil mencapai posisi terkemuka di sektor perbankan *consumer* dan jasa.

Achieved a leading position in consumer banking and services.

2003

Bank menerima penghargaan dari Markplus dan Majalah SWA sebagai Bank Publik Terbaik.

Awarded as Best Public Bank by Markplus and SWA Magazine.

2004

- Meluncurkan program CSR Panin Peduli
- Bank bekerja sama dengan MasterCard International mengeluarkan kartu debit Magna Card.

- Launched Panin Peduli CSR program.
- Launched Debit Magna Card in cooperation with International MasterCard.

2006

- Meraih penghargaan sebagai Bank Terbaik untuk Forex Transaction versi Asia Money
- Bank tercatat memiliki 259 kantor cabang.

- Achieved an award as Best Bank for Forex Transaction, Asia Money version.
- Had 259 branches.

2008

Meluncurkan BisnetPanin.

Launched BisnetPanin.

2009

Bank memiliki 389 kantor cabang dan 527 ATM.

Had 389 branches and 527 ATMs.

2010

- Melalui layanan PaninOne, setiap nasabah perorangan dan korporat Bank di seluruh dunia dapat mengakses layanan fasilitas perbankan melalui 18.500 ATM di Indonesia selama 24/7
- Bank meluncurkan I Care
- Bank meluncurkan *core banking* dengan sistem baru.

- With PaninOne service, individual and corporate customers have 24/7 access through 18,500 ATMs in Indonesia.
- Launched I Care.
- Launched core banking with new system.

2011

- Meluncurkan program CSR menghutankan kembali Indonesia
- Menerapkan CBS Teller System.

- Implemented CSR program of reforestation in Indonesia.
- Implemented CBS Teller System

2012

The Asian Banker, Singapura menganugerahi Bank dengan predikat: "*Best Improved Retail Bank in Asia Pacific, Central Asia, Africa and the Gulf Region*", dan "*Best Core Banking Implementation for Small Sized Banks*".

Achieved "Best Improved Retail Bank in Asia Pacific, Central Asia, Africa and the Gulf Region", and "Best Core Banking Implementation for Small Sized Banks" from The Asian Banker, Singapore.

2013

Bank kembali meraih penghargaan di ajang "Bisnis Award 2013" dengan predikat Perusahaan Terbaik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, untuk Sektor Keuangan.

PaninBank was again recognized at the "2013 Business Award" as the Best Listed Company in Indonesia Stock Exchange for the Financial Sector.

2014

Bank menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan memutuskan untuk mengangkat Bapak Herwidayatmo sebagai Presiden Direktur PaninBank menggantikan Bapak Drs. H. Rostian Sjamsudin.

Held the Extraordinary General Meeting of Shareholders to stipulate the appointment of Mr. Herwidayatmo as President Director to replace Drs. H. Rostian Sjamsudin.

2015

- Bank meluncurkan produk baru bernama: "Program Tabungan Super Bonanza 2015 dengan total hadiah mencapai Rp100 miliar"
- Meluncurkan InternetPanin.

- Launched Super Bonanza 2015 Savings Program with total prize of Rp100 billion.
- Launched InternetPanin.

2016

- Bank bergabung dengan jaringan ATM Prima BCA dan menandatangani *Co-Branding* Flazz BCA
- Peluncuran aplikasi MobilePanin

- Joined ATM Prima BCA network and signed Co-Branding Flazz BCA.
- Launched the MobilePanin application

2017

- Bank menandatangani jalinan kesepakatan strategis terkait uang elektronik atau e-money dengan Bank Mandiri
- Bank bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menandatangani kesepakatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik
- Bank meluncurkan produk Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN) Panin dan pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia

- A strategic agreement was signed regarding e-money with Bank Mandiri.
- Signing of Cooperation Agreement on the Utilization of Population Identification Number (NIK), Population Data, and Electronic Identity Card with Dukcapil.
- PaninBank launched RDN Panin at Indonesia Stock Exchange Building (IDX)

2018

Bank menerbitkan obligasi dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp6,802 triliun.

The Company successfully completed the issuance of Bonds and Subordinated Bonds, amounting to Rp6.802 trillion.

2019

PaninBank resmi ditetapkan masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 4 (BUKU 4) sebagaimana ditetapkan melalui Surat OJK No. S-15/PB.33/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Determined as BUKU 4 category bank based on OJK Letter No. S-15/PB.33/2019 dated March 11, 2019.

2020

PaninBank dinobatkan sebagai Bank yang memiliki nasabah paling loyal dalam Survei *Satisfaction, Loyalty & Engagement* (SLE) 2020 yang dilakukan InfoBank bekerja sama dengan Marketing Research Indonesia.

PaninBank has been named as the Bank with the most loyal customers in 2020 Satisfaction, Loyalty & Engagement (SLE) Survey conducted by InfoBank in collaboration with Marketing Research Indonesia.

Bidang Usaha

Line of Business

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar

Sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar Bank, adapun tujuan utama kegiatan usaha Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   a) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut
   b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut
   c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
   d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
   e) Obligasi
   f) Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
   g) Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak

In accordance with the Articles of Association

As stipulated in the Bank's Articles of Association, the main objective of the establishment of PaninBank, is to engage in commercial banking business. To achieve this objectives, the Bank may carry out the following business activities:

1. Collecting funds from the public in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other forms equivalent;
2. Providing credit both medium, long or short term credit and other types that are prevalent in the banking industry;
3. Issuing promissory notes;
4. Purchasing, selling or insuring at its own risk or for the benefit of and at the behest of its customers:
   a. Bill of Exchange including those accepted by the bank with the maturity period no more than the normal trading practice of such bills;
   b. Promissory notes and other with the validity period no more than the normal trading practices of such notes;
   c. Treasury Paper and Government Guarantee;
   d. Bank Indonesia Certificate;
   e. Bonds;
   f. Promissory Notes that can be traded with the maturity period no more than one year;
   g. Other marketable securities with the maturity period of one year.
5. Transferring money, for the benefit of individual and for the benefit of customers;
6. Placing funds at, borrowing funds from, or lending funds for other banks either by using mail, telecommunication media or notes on the performance, cheque or other tools.
7. Accepting payment from the receivables of marketable securities and making calculation with or between the third parties.
8. Providing a place to store valuable goods and securities
9. Providing custody services for the benefit of other party under a contract

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek
11. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Kegiatan Usaha pada Tahun Buku

Seluruh kegiatan usaha yang dijalankan Bank pada tahun buku telah sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum didalam Anggaran Dasar Bank.

PRODUK DAN LAYANAN

Produk

Produk Simpanan

- **Tabungan Panin**
  Tabungan dalam mata uang Rupiah bagi nasabah perorangan dan memberikan banyak keuntungan, seperti program undian berhadiah, *point reward*, dan akses transaksi perbankan yang komplit.

- **Tabungan Junior**
  Tabungan dalam mata uang Rupiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan rentang umur 0 - 18 tahun dan memberikan berbagai macam keuntungan, seperti bebas biaya administrasi setiap bulan dan dilengkapi kartu ATM/ Debit dengan desain yang menarik

10. Undertaking fund placement from customer to other customer in the form of marketable securities having been listed in the stock exchange;
11. Purchasing either all or some part of collateral through a bidding in the event that a debtor fails to meet its obligation to the Bank, with a provision that such purchased collateral shall be disbursed immediately;
12. Conducting factoring activities, credit card business and trustee;
13. Performing foreign exchange activities according to the regulations issued by Bank Indonesia;

Business Activities in the Fiscal Year

All business activities carried out during the year under review are in line with those stipulated in the Company's Articles of Association.

PRODUCTS AND SERVICES

Products

Savings Products

- **Tabungan Panin**
  Savings account in Rupiah for individuals with a variety of benefits including prize drawing, reward points, and complete access to banking transactions.

- **Tabungan Junior**
  Savings account in Rupiah for kids between 0-18 years old offering benefits such as free monthly administration fees and attractively designed ATM/Debit Card's.

Bidang Usaha
Line of Business

- **Tabunganku**
  Tabungan dalam mata uang Rupiah bagi nasabah perorangan dengan keunggulan bebas biaya administrasi bulanan, serta setoran awal yang ringan. TabunganKu adalah produk bersama dengan bank-bank terkemuka di Indonesia.

- **Tabungan Rencana**
  Tabungan dalam mata uang Rupiah bagi nasabah perorangan dalam hal perencanaan dana di waktu yang akan datang (pendidikan, pernikahan, dan pensiun) dengan berbagai keuntungan seperti suku bunga yang kompetitif, gratis perlindungan asuransi jiwa, setoran bulanan tetap yang terjangkau.

- **Simpanan Pan Dollar**
  Rekening simpanan bagi nasabah perorangan dengan pilihan berbagai macam mata uang asing yang lengkap, serta keuntungan lainnya seperti kurs jual beli valuta asing yang kompetitif, fasilitas setor/tarik Bank notes USD tanpa biaya, dan akses transaksi perbankan yang komplit.

- **Tabanas Panin**
  Tabungan dalam mata uang Rupiah bagi nasabah perorangan dengan suku bunga kompetitif, serta menawarkan akses transaksi perbankan yang lengkap.

- **Giro**
  Rekening simpanan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam berbagai pilihan mata uang, yang dilengkapi dengan akses transaksi perbankan yang lengkap, dan kurs jual beli yang bersaing yang dapat membantu kelancaran bisnis nasabah.

- **Deposito**
  Simpanan dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga yang kompetitif bagi nasabah perorangan maupun perusahaan.

Produk Pinjaman

- **Kredit Express Panin**
  Kredit tanpa jaminan yang prosesnya sangat mudah dan cepat, dengan angsuran fleksibel selama 36 bulan, dan suku bunga yang kompetitif.

- **Tabunganku**
  Savings account in Rupiah for individual customers with free monthly administration fee, and low minimum initial deposit. TabunganKu is a saving program organized jointly by several leading banks in Indonesia.

- **Tabungan Rencana**
  Savings in Rupiah currency for individual customers to help plan future finances (education, marriage and retirement) with various benefits such as competitive interest rates, free life insurance protection, affordable fixed monthly deposits.

- **Simpanan Pan Dollar**
  Savings account for individual customers offering variety of Foreign Currencies, as well as other benefits such as competitive exchange rate, free USD Banknotes deposit/ withdraw facility, complete access to banking services.

- **Tabanas Panin**
  Savings account in Rupiah for individual customers giving competitive interest rates and complete access to banking services.

- **Demand Deposit**
  Deposit account for individual and corporate customers in various currencies, complete with full access to banking services, competitive exchange rate facilitating business transaction of customers.

- **Time Deposit**
  Deposits in Rupiah or other foreign currencies with certain time period with competitive interest rates for individual and corporate customers.

Loan Products

- **Kredit Express Panin**
  Personal loan without collateral, featuring easy and quick process with flexible instalments up to 36 months and competitive interest rate.

- **Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**
  Fasilitas kredit bagi nasabah perorangan yang digunakan khusus untuk pembelian/renovasi rumah, ruko, villa, atau apartemen.

- **Kredit Serba Guna**
  Kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dengan persyaratan mudah, dengan pilihan 2 (dua) jenis pinjaman: Rekening Koran atau Angsuran.

- **SMART Panin**
  Small Medium and Retail Trade Panin, pinjaman/pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang tersedia dalam berbagai pilihan: pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, SMART Trade Finance Import dan Export, SMART Trade Service, dan Bank Garansi.

- **Kredit Mikro**
  Fasilitas pinjaman untuk pengembangan usaha kecil atau *home industry* dengan nominal pinjaman tertentu.

- **Credit Card**
  Kartu kredit PaninBank untuk memudahkan nasabah perorangan dalam melakukan berbagai transaksi perbankan di seluruh dunia yang dilengkapi berbagai penawaran dan fasilitas menarik.

- **Kredit Korporasi**
  Fasilitas pinjaman berupa *cash* maupun *non-cash loan* dan layanan perbankan lainnya untuk kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.

- **Kredit Sindikasi**
  Pelayanan pengaturan pembiayaan bersama dengan beberapa bank lain untuk badan usaha berskala besar.

- **Mortgage Loan**
  Loan facility for individual customers to purchase/renovate house, shophouse, villa or apartment.

- **Multipurpose Loan**
  A loan facility with simple requirements offering 2 (two) types of loan: Overdraft Facility or Instalment Loan.

- **SMART Panin**
  Panin's Small Medium and Retail Trade, loan/financing facility for small and medium businesses that is available in these formats: working capital loan, investment loan, SMART Trade Finance Import and Export, SMART Trade Service, and Bank Guarantee.

- **Micro Loan**
  Loan facility for small businesses or home industry with a certain amount of loan.

- **Credit Card**
  PaninBank's Credit Card facilitates individual customers to do banking transaction worldwide with many attracting offers and facilities.

- **Corporation Loan**
  Loan facility in the form of cash and non-cash loan and other banking services for working capital or business investment.

- **Syndicated Loan**
  Financing administration service together with other banks to help financing a large-scale business.

Bidang Usaha
Line of Business

Perbankan Elektronik

- **ATM**
  Layanan perbankan selama 24 jam melalui jaringan elektronik untuk transaksi tunai dan non-tunai dengan menggunakan *Automatic Teller Machine* (ATM)

- **Call Panin**
  Layanan perbankan selama 24 jam melalui jaringan elektronik untuk transaksi non-tunai melalui *Interactive Voice Recorded* (IVR) dengan menggunakan pesawat telepon.

- **Mobile Panin**
  Layanan perbankan 24 jam melalui jaringan elektronik untuk transaksi non-tunai melalui internet dengan menggunakan *handphone*.

- **Internet Panin**
  Layanan perbankan 24 jam melalui jaringan elektronik untuk transaksi non-tunai melalui internet dengan mengakses klik InternetPanin.com.

- **Biznet Panin**
  Layanan perbankan 24 jam melalui jaringan elektronik untuk transaksi non-tunai melalui internet khusus baik bagi nasabah pebisnis perorangan maupun perusahaan dengan mengakses klik www. panbib.com/paninbib.

Electronic Banking

- **ATM**
  24-hour electronic banking service for cash and non-cash transactions through automatic teller machine (ATM).

- **Call Panin**
  24-hour electronic banking service for non-cash transaction through Interactive Voice Recorded (IVR) via telephone.

- **Mobile Panin**
  24-hour electronic banking service for non-cash transaction through short message service (SMS) via mobile phone.

- **Internet Panin**
  24-hour electronic banking service for non-cash transaction through internet by accessing InternetPanin.com.

- **Biznet Panin**
  24-hour electronic banking service for non-cash transaction through internet designed special for individual and corporate business customers by accessing www.panbib.com/paninbib.

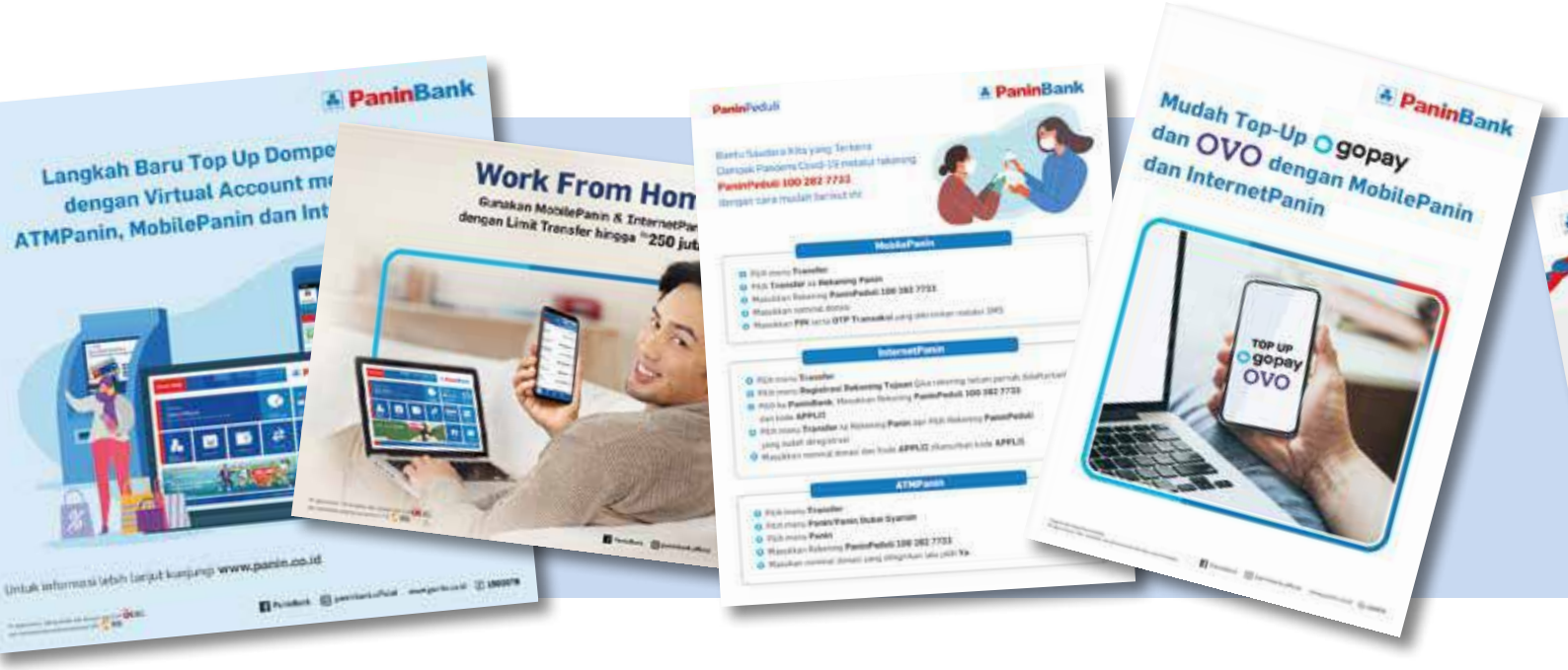

Layanan

- **Cash Management**
  Pelayanan dalam hal pengelolaan transaksi keuangan untuk memudahkan nasabah bisnis dan perusahaan, seperti: fasilitas *supplier payment, auto collection*, dan *payroll processing*.

- **Panin Remittance**
  Layanan pengiriman uang ke seluruh dunia yang cepat dan aman dengan pilihan berbagai macam mata uang asing, serta kurs yang kompetitif.

- **Rekening Dana Nasabah (RDN) Panin**
  Tabungan Rekening Dana Nasabah Panin (RDN Panin) adalah rekening yang ditujukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk penyelesaian transaksi di Pasar Modal. Pembukaan rekening dilakukan melalui Perusahaan Efek yang telah bekerja sama dengan PaninBank.

- **Panin Prioritas**
  Layanan perbankan untuk nasabah-nasabah tertentu yang dilengkapi dengan ruang tunggu dan *teller* khusus.

- **Save Deposit Box (SDB) Panin**
  Layanan penyewaan kotak simpanan untuk surat-surat penting atau barang berharga lainnya pada tempat yang aman dan terlindungi.

Other Services

- **Cash Management**
  Service of cash transaction management for business or corporate customers such as supplier payment, auto collection and payroll processing facilities.

- **Panin Remittance**
  A safe and quick money transfer facility in foreign currencies to all over the world with competitive exchange rates.

- **Rekening Dana Nasabah (RDN) Panin**
  RDN Panin is an account for individual and corporate customers for settlement of transactions in the Capital Market. Account opening is done through a Securities Company that has been working with PaninBank.

- **Panin Prioritas**
  Banking service for distinguished customers offering special facilities such as private lounge and dedicated tellers.

- **Save Deposit Box (SDB) Panin**
  Safe deposit box rental service to keep customer's valuable documents or goods in a safe and secured place.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

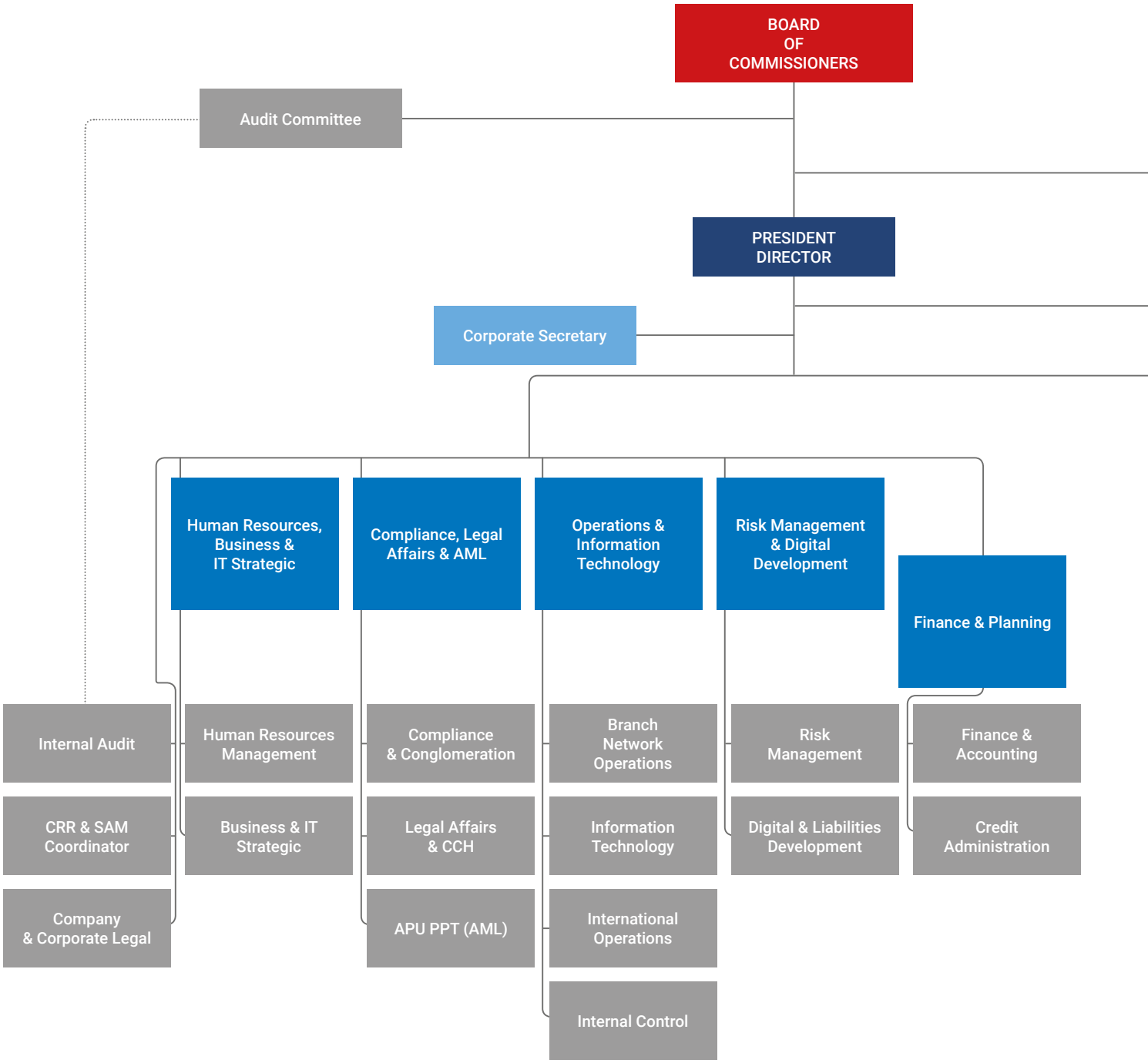

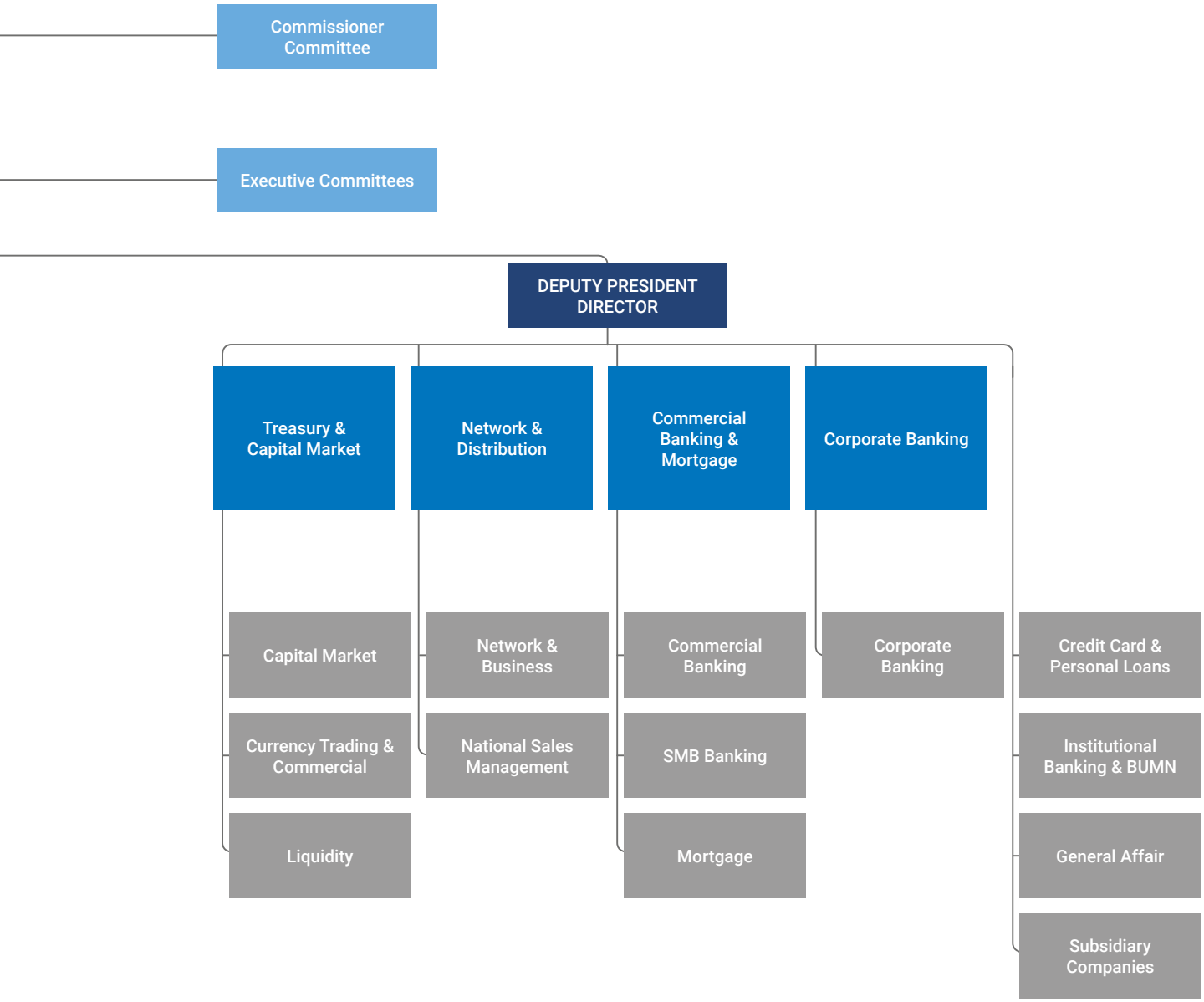

Commissioner Committee:
- Risk Monitoring Committee
- Remuneration & Nomination Committee

Executive Committee:
- Asset & Liability Committee
- Credit Policy Committee
- IT Steering Committee
- Risk Management Committee
- Integrated Risk Management Committee
- Integrated Governance Committee

Visi, Misi, dan Strategi

Vision, Mission, and Strategy

VISI MISI

Vision Mission

Menjadikan PaninBank Bank Terkemuka dalam Perbankan Komersial dan Ritel

To Transform PaninBank as a Leading Bank in Commercial and Retail Banking

Seluruh hal yang tercantum dalam visi dan misi, serta strategi perusahaan telah disepakati dan dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan.

All matters stated in the vision and mission, as well as the company's strategy have been agreed upon and set \in the Company's Long Term Work Plan.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Corporate Value

Bank menerapkan I-CARE sebagai nilai-nilai Perusahaan dalam semua aspek kerja guna mencapai visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

The company implement I-CARE as the Company's values in all aspects of work to achieve PaninBank's vision and mission to move forward.

I CARE

INTEGRITY	COLLABORATION	ACCOUNTABILITY	RESPECT	EXCELLENCE
Jujur, dapat dipercaya, beretika, terbuka, dan bertindak sesuai dengan etos kerja yang baik. Honest, trustworthy, ethical, transparent, and act according to good work ethic.	**Berlaku sebagai satu Panin, kerja sama sebagai satu tim, berbagi visi, nilai, dan tujuan, agar dapat meraih bersama hasil yang terbaik.** Act in unity as Panin, cooperate as one team and share the vision, values, and goals to attain the best results.	**Berhubungan dengan rasa memiliki, tanggung jawab, dan bertindak sesuai peraturan.** Having sense of belonging, responsibility, and act in accordance with the regulations.	**Menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain.** Respect and listen to other people's opinion.	**Performa yang baik, inovasi, belajar, hasrat, percaya diri dan berani, serta keinginan untuk menjadi yang terbaik.** Better performance, innovation, learning, desire, confidence and courage, and willingness to be better.

STRATEGI

Strategy

Nasabah
Fokus pada nasabah, memahami kebutuhan mereka dan memberikan layanan terpadu dan bernilai tambah.

Produk
Mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang inovatif untuk mendukung keberhasilan nasabah.

Distribusi
Membangun kemampuan saluran distribusi *multi-channel* untuk menjangkau nasabah di seluruh Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Customers
To focus on the customers, understand their needs and provide integrated services with added values.

Products
To develop and distribute innovative products to support the success of customer's.

Distribution
To establish a multi-channel distribution network to reach customer's throughout Indonesia and to support regional economic growth.

Efisiensi
Mentransformasi ulang proses pelayanan untuk mempercepat transaksi nasabah dan memberikan pelayanan yang efesien dan kompetitif melalui perkembangan teknologi.

Staf
Mensosialisasikan dan meningkatkan budaya Perusahaan untuk menghargai sepenuhnya pencapaian individu dan terus memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi.

Pemegang Saham
Mendayagunakan ketangguhan-ketangguhan inti dan *franchise value* kami untuk mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Efficiency
To transform business processes, accelerate customer's transaction and provide efficient and competitive services through technology development.

Staff
To socialize and enhance the company culture to fully appreciate individual achievement and continuously motivate the employees to provide better services and improve productivity.

Shareholders
To leverage the foundation of our core business and franchise value and achieve satisfactory performance to increase the shareholders values.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Nelson Tampubolon

Presiden Komisaris - Independen

President Commissioner - Independent

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 66 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 66 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi – Universitas Parahyangan, Bandung (1977) • Arthur D. Little Management Institute, Boston (2004)	**Educational Background** • Bachelor's degree in Economic from Parahyangan University (1977) • Arthur D. Little Management Institute, Boston (2004)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Presiden Komisaris PaninBank berdasarkan Akta BA RUPSLB Nomor 57 tanggal 26 Juni 2020.	**Position History and Legal Basis** Appointed as President Commissioner of PaninBank/ Independent Commissioner pursuant to Deed of Minutes of EGMS Number 57 dated June 26, 2020.
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Komisaris Utama pada PT MNC Kapital Indonesia (2018-2019) • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017) • Anggota Dewan Komisioner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan (2015-2017) • Direktur Direktorat International Bank Indonesia (1982-2012) • Auditor di Kantor Akuntan Swasta, Bandung (1977-1980)	**Work Experience** • President Commissioner of PT MNC Kapital Indonesia (2018 - 2019) • Member of the Financial Services Authority Commissioner Board (2012 - 2017) • Ex officio Board of Commissioners Member OJK at the Deposit Insurance Corporation (2015 - 2017) • Director of the International Directorate, Bank Indonesia (1982 - 2012) • Auditor at Private Accountant Firm, Bandung (1977-1980)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Lintang Nugroho

Vice President Commissioner - Independent

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 64 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 64 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA	**Educational Background** • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris PaninBank sesuai Akta BA RUPSLB Nomor 1 tanggal 1 September 2014.	**Position History and Legal Basis** Appointed as Vice President Commissioner of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of EGMS No. 1 dated September 1, 2014.
Rangkap Jabatan • Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit	**Concurrent Position** • Chairman of the Risk Monitoring Committee • Member of the Audit Committee
Pengalaman Kerja • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014) • Direktur Bisnis PT PNM Persero (2009-2013) • Komisaris dan Direktur PT Bank Shinta Indonesia (2002-2003) • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003) • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia (1999-2000) • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga Tbk pada Februari 1999	**Work Experience** • President Commissioner of PT PNM Ventura Syariah (2009-May 2014) • Business Director of PT PNM Persero (2009-2013) • Commissioner and Director of PT Bank Shinta Indonesia (2002-2003) • President Director of PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003) • Director of Compliance, HR, Operations & IT of PT Bank Tiara Asia (1999-2000) • Head of Operations Division of PT Bank Niaga Tbk on February 1999
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

Chandra R. Gunawan
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 62 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 62 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Sarjana Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat (1979)	**Educational Background** Bachelor of Business Administration, University of San Francisco, United States (1979).
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Komisaris PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPST Nomor 47 tanggal 21 Mei 2018.	**Position History and Legal Basis** Appointed as PaninBank Commissioner pursuant to Deed of Minutes of AGMS Number 47 dated May 21, 2018
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Wakil Presiden Direktur PaninBank (1994-2018) • Direktur PaninBank (1993-1994) • Vice President Chase Manhattan Bank Jakarta (1985-1989) • Crocker National Bank, San Francisco (1980-1981)	**Work Experience** • Vice President Director of PaninBank (1994-2018) • Director of PaninBank (1993-1994) • Vice President of Chase Manhattan Bank, Jakarta (1985-1989) • Crocker National Bank, San Francisco (1980-1981)
Hubungan Afiliasi Memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has affiliated relations with the Board of Directors, and Major Shareholders

Johnny
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 67 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 67 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana Ilmu Keuangan Perbankan, Akademi Bank Nasional (1976) • Sarjana Ekonomi Bidang Manajemen dari Universitas Indonesia (1984)	**Educational Background** • Bachelor of Banking Finance, National Bank Academy (1976) • Bachelor of Economics in Management from the University of Indonesia (1984)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris PaninBank berdasarkan Akta BA RUPSLB Nomor 57 tanggal 26 Juni 2020. Kemudian akan diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Perseroan tanggal 9 Juni 2021.	**Position History and Legal Basis** Appointed as PaninBank's Vice President Commissioner pursuant to Deed of Minutes of EGMS Number 57 dated June 26, 2020. Then will be appointed as Commissioner pursuant to Company's AGMS on June 9, 2021.
Rangkap Jabatan Presiden Komisaris PT Central Omega Resources Tbk	**Concurrent Position** President Commissioner of PT Central Omega Resources Tbk
Pengalaman Kerja • Presiden Komisaris PaninBank (Juni 2007-November 2018) • Direktur Tresuri PaninBank (28 Juni 1991-2007) • Vice President Treasury PaninBank (1985-1991) • Asst. Vice President Treasury (1983-1985) • Manajer Treasury PaninBank (1981-1983)	**Work Experience** • President Commissioner of PaninBank (June 2007-November 2018) • Director of Treasury PaninBank (June 28, 1991-2007) • Vice President Treasury of PaninBank (1985-1991) • Asst. Vice President Treasury of PaninBank (1983-1985) • Treasury Manager of PaninBank (1981-1983)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

Drs. H. Riyanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 75 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 75 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi Bidang Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1971)	**Educational Background** Bachelor of Economics in Accounting from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1971)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen PaninBank sesuai Akta BA RUPSLB Nomor 29 tanggal 24 Juni 2005.	**Position History and Legal Basis** Appointed as Independent Commissioner of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of Extraordinary GMS No. 29 dated June 24, 2005.
Rangkap Jabatan • Ketua Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	**Concurrent Position** • Chairman of the Audit Committee • Member of the Remuneration and Nomination Committee
Pengalaman Kerja • Komisaris PT Bank Mitra Niaga (2001-2007) • Pemeriksa Bank Eksekutif Bank Indonesia (1978-2001) • Kepala Internal Audit PT Petro Kimia Gresik (1975-1978) • Departemen Keuangan (1973-1976)	**Work Experience** • Commissioner of PT Bank Mitra Niaga (2001-2007) • Executive Bank Inspectors of Bank Indonesia (1978-2001) • Head of Internal Audit of PT Petro Kimia Gresik (1975-1978) • Department of Finance (1973-1976)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Gregory James Terry

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Australia	**Citizen** Australian
Domisili Tangerang	**Domiciled** Tangerang
Usia 76 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 76 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Fakultas Hukum - University of Melbourne • Master of Arts dari Tufts University, Chicago	**Educational Background** • Faculty of Law - University of Melbourne • Master of Arts degree from Tufts University, Chicago.
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Komisaris PaninBank berdasarkan Akta BA RUPSLB Nomor 57 tanggal 26 Juni 2020.	**Position History and Legal Basis** Appointed as Commissioner of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of EGMS Number 57 dated June 26, 2020.
Rangkap Jabatan • Advisor di Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners (2018-2020)	**Concurrent Position** • Advisor at Law Firm Oentoeng Suria and Partners (2018-2020)
Pengalaman Kerja • Advisor di Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners (2018-2020). • Pejabat eksekutif di JM Financial Limited (2012-2015) • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia (2006-2009) • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited (2000-2003) • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria (1997-1999) • Country Manager Jardine Fleming Investment Bank (1987-1997) • Diplomat di Departemen Luar Negeri - Australia (1966-1973).	**Work Experience** • Advisor of Oentoeng Suria and Partners Law Office (2018-2020) • Executive Officer at JM Financial Limited (2012-2015) • General Counsel at Morgan Stanley for Asia (2006-2009) • Operations Director at Brierley Investments Limited (2000-2003) • Country Manager of Credit Suisse Bank, Austria (1997-1999) • Country Manager of Jardine Fleming Investment Bank (1987-1997) • Diplomat in the Department of Foreign Affairs - Australia (1966-1973).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Herwidayatmo

Presiden Direktur
President Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 64 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 64 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) • Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada (1992)	**Educational Background** • Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1981) • Master of Business Administration from Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada (1992)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Presiden Direktur PaninBank sesuai Akta BA RUPSLB Nomor 1 tanggal 1 September 2014	**Position History and Legal Basis** Appointed as President Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of Extraordinary GMS Number 1 dated September 1, 2014
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk (Agustus 2009-April 2014) • Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata Tbk (Agustus 2008-Agustus 2009) • Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara, berkedudukan di Washington, DC, USA (November 2004-Oktober 2006) • Ketua Bapepam (Januari 2000-November 2004) • Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi (April 1998-Januari 2000) • Bapepam, Departemen Keuangan RI (1982-1988)	**Work Experience** • Vice President Director of PT Bank Permata Tbk (August 2009-April 2014) • Director of Legal and Compliance of PT Bank Permata Tbk (August 2008-August 2009) • Executive Director of World Bank for Southeast Asia, based in Washington, DC, USA (November 2004-October 2006) • Chairman of Bapepam (January 2000-November 2004) • Deputy Minister of SOE for Restructuring and Privatization (April 1998-January 2000) • Bapepam, Department of Finance of the Republic of Indonesia (1982-1988)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Hendrawan Danusaputra

Wakil Presiden Direktur
Deputy President Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 56 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 56 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Computer Science dari University of Technology, Sydney, Australia (1988)	**Educational Background** Computer Science from University of Technology, Sydney, Australia (1988)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPSLB No. 32 tanggal 13 Desember 2016	**Position History and Legal Basis** Appointed as Deputy President Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of EGMS No. 32 dated December 13, 2016
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Direktur Institutional Banking PaninBank (28 Juni 2007-2016) • Vice President Divisi Internasional PaninBank (1996-2007) • Director-Correspondent Banking, American Express Bank-Jakarta (1994-1996)	**Work Experience** • Director of Institutional Banking of PaninBank (June 28 2007-2016) • Vice President of the International Division of PaninBank (1996-2007) • Director of Correspondent Banking, American Express Bank-Jakarta (1994-1996)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Gunawan Santoso
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 53 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 53 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Sarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989)	**Educational Background** Bachelor of Engineering Faculty from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1989)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 67 tanggal 28 Juni 2007	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of AGMS No. 67 dated June 28, 2007
Rangkap Jabatan Komisaris di PT Verena Multi Finance Tbk	**Concurrent Position** Commissioner of PT Verena Multi Finance Tbk
Pengalaman Kerja • Komisaris di PT Clipan Finance Tbk (2000-2007) • Vice President - Kepala Divisi Treasury PaninBank (1995-2007)	**Work Experience** • Commissioner of PT Clipan Finance Tbk (2000-2007). • Vice President - Head of Treasury Division of PaninBank (1995-2007)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Edy Heryanto

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 58 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 58 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana bidang Keuangan, Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Padang (1986) • Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, Jakarta (1988)	**Educational Background** • Bachelor in Finance from Academy of Finance and Development Banking, Padang (1986) • Education in Banking Cadres, Indonesian Institution of Banking Education, Jakarta (1988)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPST Nomor 51 tanggal 28 Mei 2004	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of AGMS Number 51 dated May 28, 2004
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Vice President dan Pemimpin KCU BankPanin Jakarta Palmerah (1994-2004) • Credit Analyst di Bank Universal (1988-1994)	**Work Experience** • Vice President and Jakarta Palmerah Branch Office Manager (1994-2004) • Credit Analyst of Bank Universal (1988-1994)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Lionto Gunawan
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 53 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 53 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Sarjana Keuangan dari San Francisco State University, Amerika Serikat (1990)	**Educational Background** Bachelor of Finance from San Francisco State University, USA (1990)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPST Nomor 39 tanggal 9 Juni 1997. Diangkat kembali sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPST Nomor 33 tanggal 13 Desember 2016	**Position History and Legal Basis** First appointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of AGMS Number 39 dated June 9, 1997 Reappointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of AGMS Number 33 dated December 13, 2016
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Direktur - ANZ PaninBank (1993-1997) • Manager - Westpac PaninBank (1991-1993)	**Work Experience** • Director - ANZ PaninBank (1993-1997) • Manager - Westpac PaninBank (1991-1993)
Hubungan Afiliasi Memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Affiliated with the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders

Ng Kean Yik

Direktur
Director

Warga Negara Malaysia	**Citizen** Malaysian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 65 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 65 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana bidang Perdagangan dari University of Melbourne, Australia (1977) • Magister bidang Administrasi Bisnis dari University of Melbourne, Australia (1993)	**Educational Background** • Bachelor of Commerce from the University of Melbourne, Australia (1977) • Masters in Business Administration from the University of Melbourne, Australia (1993)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPST Nomor 114 tanggal 30 Juni 2008	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of AGMS Number 114 dated June 30, 2008
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Group Manager Retail Banking PaninBank (2007-2008) • Consumer Banking Head PaninBank (2006-2007) • Pernah menjabat sebagai antara lain Head Portfolio Management, Executive Group Strategy, Chief Auditor, Head Busines Systems di ANZ Bank di Melbourne, Australia dan London (1985-2000)	**Work Experience** • Retail Banking Group Manager of PaninBank (2007-2008) • Consumer Banking Head of PaninBank (2006-2007) • Has served as Head of Portfolio Management, Executive Group Strategy, Chief Auditor, Head of Business Systems at ANZ Bank in Melbourne, Australia and London (1985-2000)
Hubungan Afiliasi Tidak memiiki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Januar Hadi
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 57 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 57 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Fakultas Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1989)	**Educational Background** Faculty of Husbandry/Economics Studies in Husbandry from Bogor Agricultural University (1989)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 32 tanggal 13 Desember 2016	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of EGMS Number 32 dated December 13, 2016
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja Vice President - Head of Corporate Banking Group PaninBank (2003-2016)	**Work Experience** Vice President - Head of Corporate Banking Group of PaninBank (2003-2016)
Hubungan Afiliasi Tidak memiiki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama.	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders

Suwito Tjokrorahardjo

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 56 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 56 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana Ekonomi Pemasaran, Universitas Surabaya (1989) • Magister bidang Ekonomi Pemasaran, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2003)	**Educational Background** • Bachelor of Marketing Economics, University of Surabaya (1989) • Master degree in Economics/Marketing from Pelita Harapan University, Jakarta (2003)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Akta BA RUPST No. 75 tanggal 29 Mei 2015	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of AGMS. Number 75 dated May 29, 2015
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Berkarir di Lippobank dengan posisi di antaranya Pemimpin Cabang, Quality Assets Team Leader, Regional Office Head, Branch Network Group Head, Operations Group Head, dan Marketing Coordinator Jabotabek I (1992-2005) • Trade Department, Citibank (1990-1992)	**Work Experience** • Career in Lippobank with positions including Branch Office Manager, Quality Assets Team Leader, Regional Office Head, Branch Network Group Head, Operations Group Head, and Marketing Coordinator Jabotabek I (1992-2005) • Trade Department, Citibank (1990-1992)
Hubungan Afiliasi Memiiki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama.	**Affiliate Relationship** Affiliated with the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Kepatuhan
Director of Compliance

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Usia 52 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 52 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan • Sarjana bidang Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE) Keuangan dan Perbankan Yogyakarta (1990) • Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan/PDP-LPPI (1992) • Sarjana Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2000) • Magister Hukum Bisnis, Universitas Pelita Harapan (2008) • Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya, Jakarta (2013)	**Educational Background** • Bachelor in Finance from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Yogyakarta, majoring Finance and Banking (1990) • Advanced Education at the Bankers Cadre Banking Institute of Indonesia/PDP-LPPI (1992) • Bachelor of Laws, Sebelas Maret University, Surakarta (2000) • Masters in Business Law, Pelita Harapan University (2008) • Master of Business Law in the Post Graduate Study of Jayabaya University, Jakarta (2013)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank sesuai Akta Berita Acara RUPSLB I No. 08 tanggal 8 September 2009	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of Compliance and Risk Management of PaninBank pursuant to Deed of Minutes of EGMS I No. 08 dated September 8, 2009
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Kepala Biro Compliance PaninBank (2001-2009) • Account Officer dan Branch Manager Bank CIC (1992-1999)	**Work Experience** • Head of Compliance Bureau of PaninBank (2001-2009.) • Account Officer and Branch Manager of Bank CIC (1992-1999)
Hubungan Afiliasi Tidak memiiki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama.	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders.

Haryono Wongsonegoro

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Tangerang	**Domiciled** Tangerang
Usia 56 tahun pada akhir Tahun Buku 2020	**Age** 56 years old at the end of Fiscal Year 2020
Riwayat Pendidikan Magister of Management, Universitas Udayana, Bali (2004)	**Educational Background** Magister of Management, Udayana University, Bali (2004)
Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum Pertama kali diangkat sebagai Direktur PaninBank sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.	**Position History and Legal Basis** Appointed as Director of PaninBank pursuant to the PaninBank Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020.
Rangkap Jabatan -	**Concurrent Position** -
Pengalaman Kerja • Kepala Kantor Wilayah Jakarta, Bank Central Asia (2011-2019) • Kepala Divisi Bisnis Kecil & Menengah (SME) dan Bisnis Komersial (2009-2011) • Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Bank Central Asia (2005-2009) • Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005)	**Work Experience** • Head of Jakarta Regional Office of Bank Central Asia (2011-2019) • Head of Small and Medium Business (SME) and Commercial Business of Bank Central Asia (2009-2011) • Head of Central Java Regional Office of Bank Central Asia (2005-2009) • Head of Main Branch Office of Bank Central Asia (1995-2005)
Hubungan Afiliasi Tidak memiiki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama.	**Affiliate Relationship** Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and Major Shareholders.

Manajemen Perusahaan

Company Management

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Presiden Komisaris
President Commissioner
Nelson Tampubolon

Wakil Presiden Komisaris-Komisaris Independen
Vice President Commissioner-Independent Commissioner
Lintang Nugroho

Komisaris
Commissioner
- Johnny*
- Chandra R. Gunawan*
- Gregory James Terry

Komisaris Independen
Independent Commissioner
Drs. H. Riyanto

Direksi
Board of Directors

Presiden Direktur
President Director
Herwidayatmo

Wakil Presiden Direktur
Deputy President Director
Hendrawan Danusaputra

Direktur
Director
- Edy Heryanto
- Gunawan Santoso
- Lionto Gunawan
- Ng Kean Yik
- Januar Hardi
- Suwito Tjokrorahardjo
- Haryono Wongsonegoro

Direktur Kepatuhan, Legal Affairs dan Anti Pencucian Uang
Compliance, Legal Affairs and Anti Money Laundering Director
Antonius Ketut Dwirianto

Senior Executive Officer
Senior Executive Officer

CFO
Marlina Gunawan

Manajemen Senior
Senior Management

Capital Market
Wirianto

Currency Trading & Commercial
Ester Chandra

Liquidity
Ellin P. Lukman

Group Head of Corporate Banking
Richard Gunawan

Commercial Banking
Sugiono Sutanto Janis

SMB
Effendi Tuhirman

Mortgage
Sugianti Sukamta

Institutional Banking & BUMN
Rudy Sarjana Sugandhi

Credit Card & Personal Loan
Johannes

International Operations
Julian Muhamad

National Sales Management
Welly Widjaja

Finance & Accounting
Bernadeta Deborah

Credit Administration
Halida Nurwastuti

Risk Management
Antoni

Compliance
Wahyu Wardhanakusuma

Human Resources & GA
Yusak Zefanya

Information Teknologi
Husin Hamkaputra

HR Strategic
Boyke Indrasakti Aveanto

Liabilities
Sugiarto Budiman

Branding and Communications
Gabby Lalamentik

Wealth
Deborah Soebekti

E-Banking
Dewi Asnawati

Internal Audit
Herbert Sibuea

Branch Network & Operations Group
- Hartaka Aribowo
- Hasbullah
- Arif Haryoto
- Nina Novita Andries
- Rochyadi Suraatmadja
- Hadirat Syukur Telaumbanua

Business & Corporate Legal
Maria D. Sukerlan

Internal Control
Ferry Sutedja

Corporate Secretary
Jasman Ginting

Komite-Komite
Committees

Komite Audit
Audit Committee
Ketua | Chairman
Nelson Tampubolon

Anggota | Members
- Drs. H. Riyanto
- Lukman Abdullah
- Lintang Nugroho
- Bambang Setyoko

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
Ketua | Chairman
Lintang Nugroho

Anggota | Members
- Chandra R. Gunawan*
- Johnny*
- Gregory James Terry
- Lukman Abdullah
- Usep Ekadaya
- Bambang Setyoko

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
Ketua | Chairman
Drs. H. Riyanto

Anggota | Members
- Nelson Tampubolon
- Johnny
- Yusak Zefanya
- Akijat Lukito

* Berlaku efektif setelah adanya keputusan RUPS mengenai persetujuan perubahan jabatan yang bersangkutan.
Effective upon a resolution of the GMS regarding the approval of the change in position concerned.

Informasi Pemegang Saham

Shareholder Information

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2020
Shareholders Composition as of December 31, 2020

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Total Ownership	Persentase Kepemilikan (%) Percentage (%)
1.	PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	46,04
2.	Votraint No. 1103 Pty Limited	9.349.793.152	38,82
3.	Lainnya (masing-masing kurang dari 5%) Others (each less than 5%)	3.648.781.561	15,14
	Total	**24.087.645.998**	**100,00**

Pemegang Saham Terbesar (Kepemilikan Saham > 5%)
Largest Shareholders (With a Share Ownership above 5%)

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Total Ownership	Persentase Kepemilikan (%) Percentage (%)
1.	PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	46,04
2.	Votraint No. 1103 Pty Limited	9.349.793.152	38,82

Klasifikasi Pemegang Saham berdasarkan Institusi
Shareholder Classification based on Institution

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Orang Number of Persons	Persentase Kepemilikan (%) Percentage (%)	Jumlah Lembar Saham Number of Shares
	Institusi | Institution			
1.	Asing | Foreign	138	42,513	9.999.388.634
2.	Domestik | Domestic	306	54,946	13.235.152.510
	Individual			
1.	Asing | Foreign	48	0,017	4.214.134
2.	Domestik | Domestic	5.159	3,524	848.890.720

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Share Ownership

Tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham PaninBank.

None of the Board of Commissioners owns shares.

Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Total Ownership	Persentase Kepemilikan (%) Percentage (%)
1.	Hendrawan Danusaputra	1.000.000	0,004
2.	Haryono Wongsonegoro	100.000	0,000

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama Bank adalah PT Panin Financial Tbk (46,04%) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi. PT Panin Financial Tbk adalah entitas anak dari PT Paninvest Tbk d/h PT Panin Insurance Tbk (62,48%) beserta dengan Publik (37,52%). Saat ini, PT Panininvest Tbk sendiri merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham Famlee Invesco (18,28%), PT Paninkorp (29,71%) dan Publik sebanyak (52,01%).

Sementara itu, PT Paninkorp adalah entitas anak PT Panin Investment (99,99%), dimana kepemilikan saham Panin Investment merupakan kepemilikan perorangan yakni Gunadi Gunawan (38,15%), Mu'min Ali Gunawan (59,23%), Tidjan Ananto (1,76%), dan Mujadi Koesumo (0,86%).

MAJOR SHAREHOLDERS INFORMATION

The main shareholder of the Bank is PT Panin Financial Tbk (46.04%) which carries out business activities in the field of Providing Business Consulting, Management and Administration Services. PT Panin Financial Tbk is a subsidiary of PT Paninvest Tbk formerly PT Panin Insurance Tbk (62.48%) and the Public (37.52%). Currently, PT Panininvest Tbk is a company with shares of Famlee Invesco (18.28%), PT Paninkorp (29.71%) and the Public (52.01%).

Meanwhile, PT Paninkorp is a subsidiary of PT Panin Investment (99.99%), where Panin Investment's share ownership is an individual ownership, namely Gunadi Gunawan (38.15%), Mu'min Ali Gunawan (59.23%), Tidjan Ananto (1.76%), and Mujadi Koesumo (0.86%).

Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Instrumen Keuangan

Subsidiaries, Associate Entities, and Financial Instruments

Entitas Anak
Subsidiaries

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)	Total Aset Total Assets (Rp miliar | Rp billion)	Status Operasi Operational Status
1.	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Perusahaan Pembiayaan Financing	Wisma Slipi Lantai 6 Jl. Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480	51,49	10.917	Beroperasi Operational
2.	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan Banking	Gedung Panin Life Center Lantai 3 Jl. Letjen S. Parman Kav. 91 Slipi, Jakarta Barat 11420	53,70	11.302	Beroperasi Operational

Entitas Asosiasi
Associate Entities

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)	Total Aset Total Assets (Rp miliar | Rp billion)	Status Operasi Operational Status
1.	PT Verena Multi Finance Tbk	Perusahaan Pembiayaan Financing	Gedung Bank Panin, Lantai 3 Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120	25,06	2.680	Beroperasi Operational
2.	PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Investasi Investment	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Suite 1705 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	29,00	2.966	Beroperasi Operational

Instrumen Keuangan
Financial Instruments

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)	Total Aset Total Assets (Rp miliar | Rp billion)	Status Operasi Operational Status
1.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi Insurance	The City Center Batavia – Tower One Lt. 17 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220	7,76	4.737	Beroperasi Operational
2.	PT FAC Sekuritas Indonesia	Perusahaan Investasi Investment	PaninBank Center Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270	2,50	176	Beroperasi Operational
3.	PT Sarana Kalsel Ventura	Perusahaan Modal Ventura Capital Venture	Jl. Pramuka No. 12A, Banjarmasin	1,04	63	Beroperasi Operational
4.	PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan Banking	ANZ Tower Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.33 A, Jakarta 10220	1,00	19.092	Beroperasi Operational

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Komite-Komite

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Komite-Komite

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	*Workshop/Training/Seminar*	Penyelenggara Organizer	Waktu Date	Tempat Location	Peserta Participants
1.	Webinar Strategi Bank di Era Digital	Indonesian Banking School (IBS),	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members
2.	Intro to Crypto	Institute Banking Indonesia (IBI)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members

Direksi
Board of Directors

Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Date and Venue	Penyelenggara Organizer
Herwidayatmo	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
	Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Terkait Tingkat Kesehatan Bank Regulation and Role of Management (Board of Commissioners and the Board of Directors) Related to Bank Soundness Level	12 Agustus 2020 - Online	LKDI
Lionto Gunawan	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
	Managing Financial Risks and Capturing Financial Oppurtunities in the Crisis Era	8 Oktober 2020 - Webinar	Economic Review
Edy Heryanto	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
Gunawan Santoso	Sosialisasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 Socialization of the 2025 Money Market Development Blueprint	23 Desember 2020 - Jakarta	Bank Indonesia
	Peluncuran & Bedah Buku" Kekuatan Komunikasi" "The Power of Communication" Book Launch & Review	11 Desember 2020 - Jakarta	Bank Indonesia Institute
	Seminar 'Will Vaccine Bring Back Confidence & Growth"	25 November 2020 - Jakarta	OJK dan FWD Asset Management
	Sustainable Finance Awareness	22 September 2020 - Jakarta	LPPI
	Strategi Sektor Perbankan Selama dan Pasca Pandemi COVID-19 Banking Sector Strategy during and after the COVID-19 Pandemic	11 Juli 2020 - Yogyakarta	Univ. Gadjah Mada
	Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19 Finance Industry in the Midst of COVID-19 Pandemic	28 Mei 2020 - Jakarta	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ng Kean Yik	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
Haryono Wongsonegoro	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-5 Training Level-5 Risk Management Certification	8, 10,13 dan 15 Juli 2020 - Jakarta	PT Orbit Mitra Edukasi
	Customer Service: How to Survive the Pandemic	16 Juli 2020 - Jakarta	Service Quality Institute
	Overcoming Uncertainty through Knowledge	6 Oktober 2020 - Jakarta	Indonesia Knowledge Forum
Suwito Tjokrorahardjo	Enhancing Operational Excellence Facing 21st Global Competition In Industry 4.0 Era Through Lean Management	18 Desember 2020 - Zoominar	Economic Review
Antonius Ketut Dwirianto	Webinar "AML CTF On Virtual Asset"	12 November 2020 - Webinar	PPATK
	Sosialisasi Ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Dissemination of Provisions for Short Term Liquidity Loans and Board of Governors' Regulations	14 Desember 2020 - Online	Bank Indonesia

Komite Audit
Audit Committee

No.	*Workshop/Training/Seminar*	Penyelenggara Organizer	Waktu Date	Tempat Location	Peserta Participants
1.	Webinar Strategi Bank di Era Digital	Indonesian Banking School (IBS)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members
2.	Intro to Crypto	Institute Banking Indonesia (IBI)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

No.	*Workshop/Training/Seminar*	Penyelenggara Organizer	Waktu Date	Tempat Location	Peserta Participants
1.	Webinar Strategi Bank di Era Digital	Indonesian Banking School (IBS)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members
2.	Intro to Crypto	Institute Banking Indonesia (IBI)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members

Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee

No.	*Workshop/Training/Seminar*	Penyelenggara Organizer	Waktu Date	Tempat Location	Peserta Participants
1.	Webinar Strategi Bank di Era Digital	Indonesian Banking School (IBS)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members
2.	Intro to Crypto	Institute Banking Indonesia (IBI)	2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Program Sertifikasi Certification Program	Waktu Date	Tempat Venue
Certified Information System Auditor (CISA)	2020	Indonesia
Cyber Security Foundation Professional Certificate	2020	Indonesia

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Workshop/Training/Seminar	Waktu Date	Tempat Venue	Penyelenggara Organizer
Sharing Session and Demo on E-GMS Easy System for Issuers and Registrars	23 Maret 2020	Jakarta	KSEI
Socialization of the 2020 Depositor's Consumer Confidence Index	4 Juni 2020	Jakarta	LPS
Learn more about POJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.	8 Juli 2020	Jakarta	ICSA
Socialization of POJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities	11 Agustus 2020	Jakarta	OJK dan IDX
Challenges and Opportunities for Renewable Energy in the New Normal Era	13 Agustus 2020	Jakarta	IKBI
Managing Financial Risk and Capturing Financial Opportunities in the Crisis Era	8 Oktober 2020	Jakarta	Economic Review
The 2020 Webinar on CSR Forum of Bisnis Indonesia: Creating Impact for Social Sustainability in Pandemic Era	22 Oktober 2020	Jakarta	Bisnis Indonesia
Sustainable Finance Class: Energy Transition and Renewable Energy Financing	4 - 15 Desember 2020	Jakarta	IKBI dan WWF
Enhancing Operational Excellence Facing 21st Global Competition in Industry 4.0 Era Through Lean Management	18 Desember 2020	Jakarta	Economic Review

Wilayah Operasional

Operations Area

Jenis Kantor	Jumlah Total	Type of Office
Kantor Wilayah (Kanwil)	1	Regional Offices
Kantor Cabang (KC)	57	Branch Offices (KC)
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	423	Sub Branch Offices (KCP)
Kantor Kas (KK)	25	Cash Offices(KK)
Kantor Cabang Luar Negeri (KLN)	-	Overseas Branch Offices (KLN)
Perwakilan	1	Representative
Total	507	Total

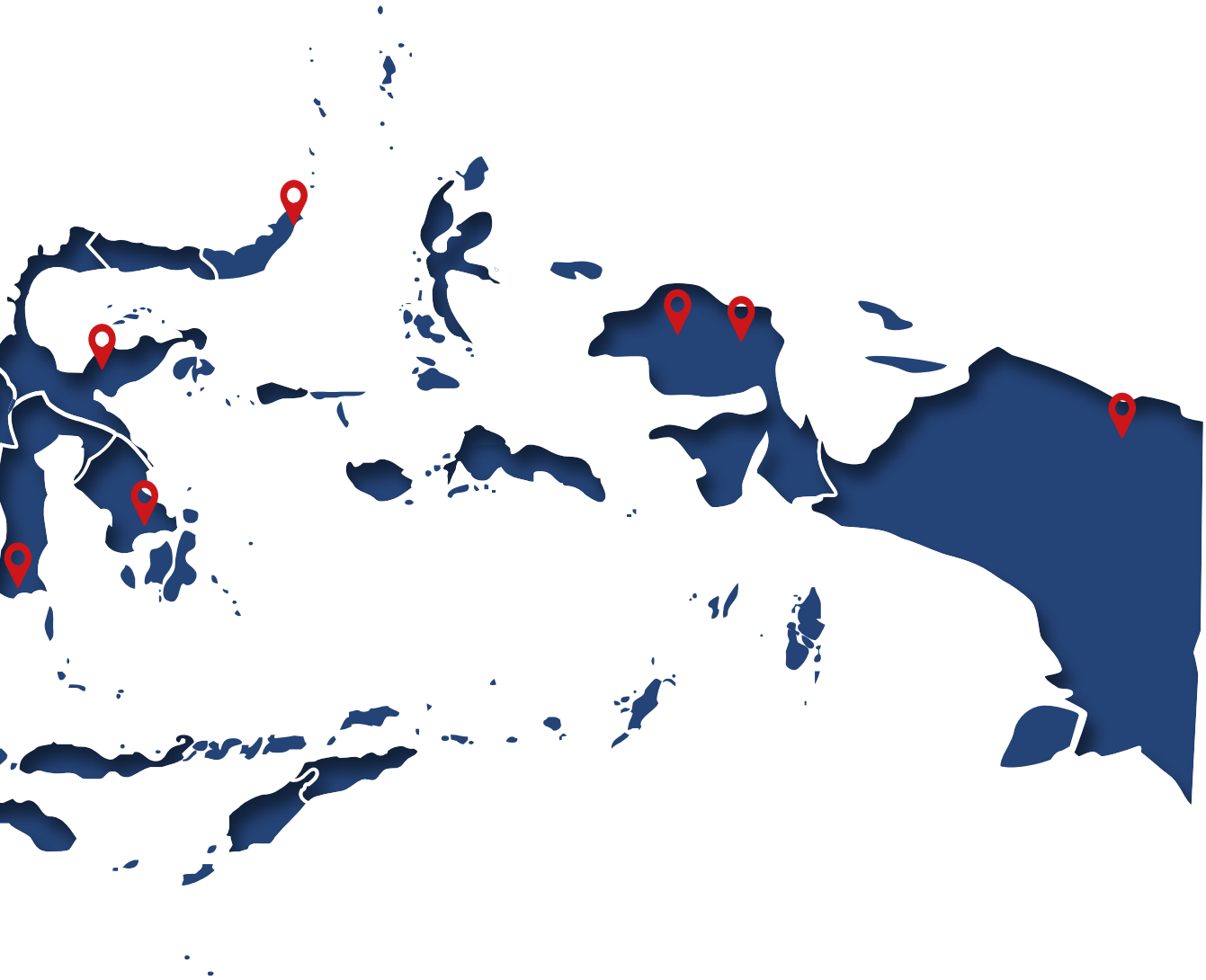

Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

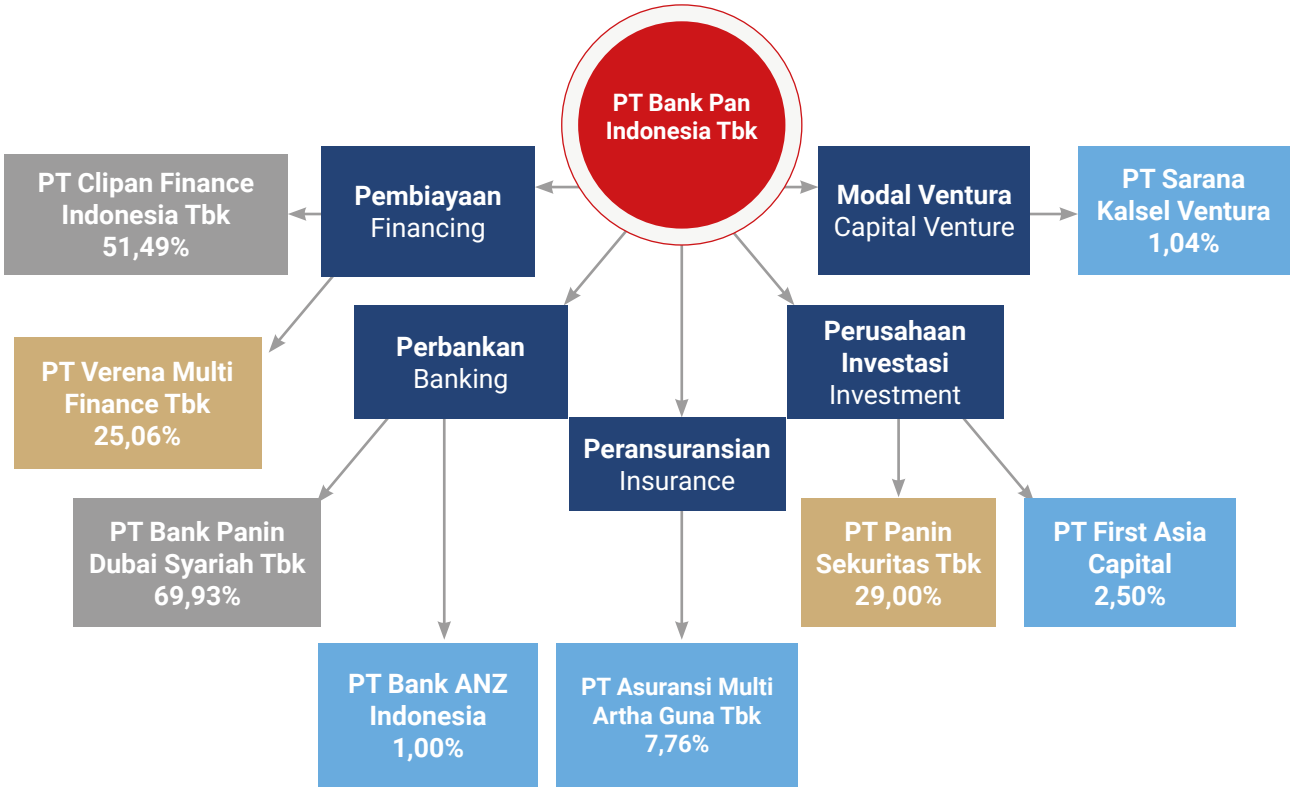

Entitas Anak | Subsidiary
Entitas Asosiasi | Associate Company
Instrumen Keuangan | Financial Instrument

Struktur Pemegang Saham

Shareholders Structure

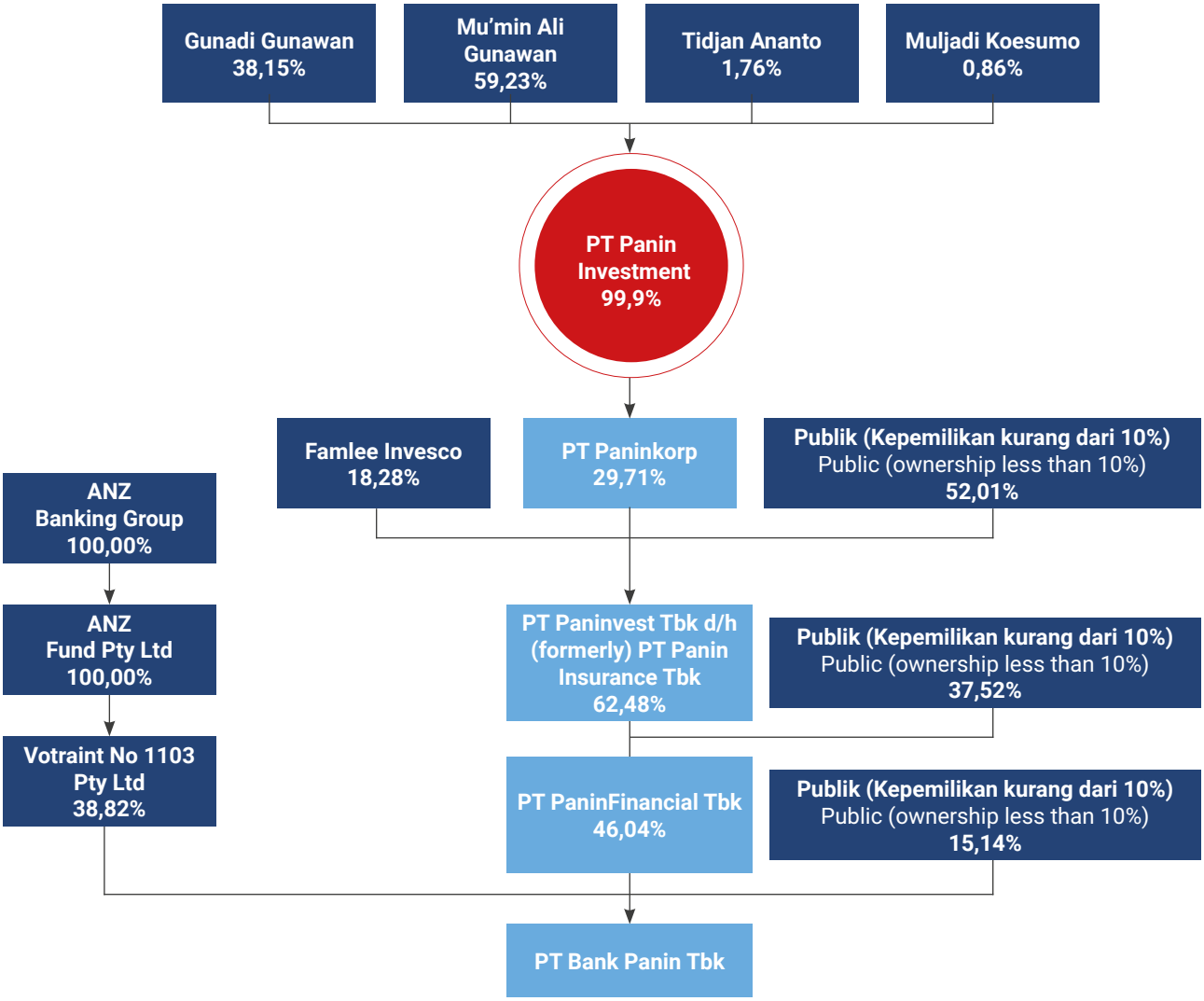

Kronologis Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Tanggal Pencatatan Date of Listing	Aksi Korporasi Corporate Action	Nominal/Saham Nominal/Shares (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) Saham Addition/(Reduction) of Shares	Jumlah Saham Number of Shares	Bursa Stock Exchange
1982	Penawaran Umum Perdana	1.000	1.637.500	1.637.500	BEJ
1983	Penawaran Umum Kedua	1.000	3.162.500	4.800.000	BEJ
1989	Penawaran Terbatas I	1.000	914.655	5.714.655	BEJ
1990	Dividen Saham	1.000	416.305	6.130.960	
1990	Penawaran Terbatas II	1.000	2.614.410	8.745.370	BEJ dan BES
1992	Saham Swap	1.000	24.531.000	33.276.370	BEJ dan BES
1992	Partial Listing	1.000	26.450.480	59.726.850	BEJ dan BES
1992	Partial Listing	1.000	12.096.000	71.822.850	BEJ dan BES
1993	Company Listing	1.000	168.899.000	240.721.850	BEJ dan BES
1995	Penawaran Umum Terbatas III	1.000	60.180.462	300.902.312	BEJ dan BES
1997	Pemecahan Nilai Nominal Saham	500	300.902.312	601.804.624	BEJ dan BES
1997	Penawaran Umum Terbatas IV	500	300.902.312	902.706.936	BEJ dan BES
1998	Penawaran Umum Terbatas V	500	702.105.395	1.604.812.331	BEJ dan BES
1999	Penawaran Umum Terbatas VI	250	1.225.406.221	2.830.218.552	BEJ dan BES
1998-2000	Pelaksanaan Waran Seri I, II, dan III	250	147.764.386	2.977.982.938	BEJ dan BES
1999	Pemecahan Nilai Nominal Saham	100	2.977.753.764	5.955.736.702	BEJ dan BES
2002	Pemecahan Nilai Nominal Saham	100	8.933.605.053	14.889.341.755	BEJ dan BES
2004	Dividen Saham	100	1.176.091.818	16.065.433.573	BEJ dan BES
2006	Penawaran Umum Terbatas VII	100	4.016.358.393	20.081.791.966	BEJ dan BES
2006	Penghapusan Pencatatan	100	(250.000.000)	19.831.791.966	BEJ dan BES
2007	Pelaksanaan Waran Seri IV	100	129.401.418	19.961.193.384	BEI
2008	Pelaksanaan Waran Seri IV	100	124.107.002	20.085.300.386	BEI
2009	Pelaksanaan Waran Seri IV	100	3.752.345.612	23.837.645.998	BEI
	Saham Tidak Dicatatkan			250.000.000	
Jumlah Saham				**24.087.645.998**	

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Uraian Description	Tanggal Efektif Effective Date	Pencatatan pada Bursa Efek Listing on Stock Exchange	Jumlah Obligasi Total Bonds (Rp Juta | Rp Million)	Jatuh Tempo Maturity Date	Jumlah Terutang Outstanding (Rp Juta | Rp Million)	Peringkat Rating		Periode Pemeringkatan Rating Period	Kupon Coupon
						2020	2019		
Obligasi Bank Panin I Tahun 2000 Bonds I Bank Panin Year 2000	28 Desember 1999	15 Maret 2000	500.000	6 Maret 2005	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003 Subordinated Bonds I Bank Panin Year 2003	5 Juni 2003	23 Juni 2003	1.300.000	18 Juni 2008	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Bonds II Bank Panin Year 2007									
Seri A | Series A	7 Juni 2007	20 Juni 2007	50.000	19 Juni 2010	Lunas | Paid	-	-	-	-
Seri B | Series B	7 Juni 2007	20 Juni 2007	1.400.000	19 Juni 2012	Lunas | Paid	-	-	-	-
Seri C | Series C	7 Juni 2007	20 Juni 2007	200.000	19 Juni 2014	Lunas | Paid	-	-	-	-

Uraian Description	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Pencatatan pada Bursa Efek** Listing on Stock Exchange	**Jumlah Obligasi** Total Bonds **(Rp Juta | Rp Million)**	**Jatuh Tempo** Maturity Date	**Jumlah Terutang** Outstanding **(Rp Juta | Rp Million)**	**Peringkat** Rating		**Periode Pemeringkatan** Rating Period	**Kupon** Coupon
						2020	**2019**		
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 Subordinated Bonds Bank Panin II Year 2008	27 Maret 2008	10 April 2008	1.500.000	9 April 2013	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 Bonds Bank Panin III Year 2009	29 September	7 Oktober 2000	800.000	6 Oktober 2015	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 Bonds Bank Panin IV Year 2010	29 Oktober 2010	10 November 201	540.000	9 November 2015	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Year 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	2.460.000	9 November 2017	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Continuous Bonds Bank Panin Phase I Year 2012	12 Desember 2012	21 Desember 2012	1.000.000	20 Desember 2017	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Subodinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Continuous Subordinated Bonds I Bank Panin Phase I Year 2012	12 Desember 2012	21 Desember 2012	2.000.000	20 Desember 2019	Lunas | Paid	-	-	-	-
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 Continuous Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	17 Juni 2016	29 Juni 2016	2.000.000	28 Juni 2021	2.000.000	idAA	idAA	April 2019-April 2020 9,15%	17 Juni 2016
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	17 Juni 2016	29 Juni 2016	100.000	28 Juni 2023	100.000	idA+	idA+	April 2019-April 2020 9,60%	7 Juni 2016
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 Continuous Bonds II Bank Panin Phase II Year 2016	17 Juni 2016	28 Oktober 2016	2.125.000	27 Oktober 2021	idAA	idAA	April 2019-April 2020 8,75%	7 Juni 2016	28 Oktober 2016
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2017	17 Juni 2016	20 Maret 2017	2.400.000	17 Maret 2024	2.400.000	idA+	idA+	April 2019-April 2020 10,25%	17 Juni 2016
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018 Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018	17 Juni 2016	28 Februari 2018	3.900.000	27 Februari 2023	idAA	idAA	April 2019-April 2020 7,60%	7 Juni 2016	28 Februari 2018
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap IV Tahun 2018 Continuous Bonds II Bank Panin Phase IV Year 2018	17 Juni 2016	19 April 2018	1.500.000	18 April 2021	Lunas	-	-	-	-
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	8 Juni 2018	4 Juli 2018	100.000	03 Juli 2023	100.000	idAA	idAA	April 2019-April 2020 8,0%	8 Juni 2018
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	8 Juni 2018	4 Juli 2018	1.302.000	03 Juli 2025	1.302.000	idA+	idA+	April 2019-April 2020 9,50%	8 Juni 2018

Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal

Institutions and/or Capital Market Support

Biro Administrasi Efek | Share Registrar

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930, Indonesia
Tel. : (021) 252 5666
Fax. : (021) 252 5028
E-mail : rsrbae@registra.co.id
Website : www.registra.co.id

Jasa yang Diberikan | Services Provided:
Pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten
Recording and transfer of ownership of issuers' securities
Periode Penugasan | Assignment Period:
Sejak Mei 2016 | Since May 2016
Biaya | Fee : Sesuai kontrak | As contract

Kantor Akuntan Publik | Public Accountant Firm

Imelda & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 308/KM.1/2019
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Tel. : (021) 5081 8000
Fax. : (021) 2992 8200, 2992 8300
E-mail : iddttl@deloitte.com
Website : www.deloitte.com/id

Jasa yang Diberikan | Services Provided:
Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2020
Auditing the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020
Periode Penugasan | Assignment Period: 2020
Biaya | Fee : Sesuai kontrak | As contract

Konsultan Hukum | Legal Consultant

Tumbuan and Partners
Jl. Gandaria Tengah III No. 8, Jakarta
Selatan 12240, Indonesia
Tel. : (021) 720 8172

Jasa yang Diberikan | Services Provided:
Profesi Penunjang Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018
Supporting Professionals for Issuance of Bonds and Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Year 2018
Periode Penugasan | Assignment Period: 2018
Biaya | Fee : Sesuai kontrak | As contract

Pemeringkat Efek | Rating Company

PEFINDO Credit Rating Indonesia
Panin Tower Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19,
Jakarta 10270, Indonesia
Tel. : (021) 7278 2380
Fax. : (021) 7278 2370

Jasa yang Diberikan | Services Provided:
Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang
Issuing ratings for debt securities issuance
Periode Penugasan | Assignment Period:
Sejak tahun 2000 | Since 2000
Biaya | Fee : Sesuai kontrak | As contract

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower 20th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 79,
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
Tel. : (021) 5795 7755,
Fax. : (021) 5795 7750

Jasa yang Diberikan | Services Provided:
Pemeringkatan Perusahaan | Corporte Rating
Periode Penugasan | Assignment Period: 2020
Biaya | Fee : Sesuai kontrak | As contract

Notaris | Notary

Fathiah Helmi, SH.
Graha Irama Lt 6-C
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1,
Setia Budi Jakarta, 12950
Tel. : (021) 5261136
Fax. : (021) 5261136

Jasa yang Diberikan | Services Provided:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Periode Penugasan | Assignment Period: 2020
Biaya | Fee : Sesuai kontrak | As contract

Informasi pada *Website* Perusahaan

Information on the Company Website

Sebagai warga korporasi yang baik, PaninBank senantiasa menyajikan informasi dan berita yang terkini serta faktual pada situs web perusahaan sebagaimana telah diatur POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs *web* www.panin.co.id dan tersedia dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang tersedia pada situs *web* Bank, antara lain:

As a good corporate citizen, PaninBank always provides up-to-date and factual information and news on the Company's website as regulated by POJK No. 8/POJK.04/2015 regarding Website of Issuers or Public Companies. All of this information can be accessed by the public through the website www.panin.co.id and is available in two languages, namely Indonesian and English. The information available on the Bank's website includes:

Profil Perusahaan
Company Profile

Konten | Contents	Link
Informasi Umum: Nama, Alamat, Kontak Kantor Pusat, Perwakilan	https://www.panin.co.id/pages/93/sekilas-panin-bank
Riwayat Singkat	https://www.panin.co.id/fullpage/1164/struktur-organisasi
Struktur Organisasi	https://www.panin.co.id/fullpage/1150/struktur-pemegang-saham
Struktur Kepemilikan	https://www.panin.co.id/fullpage/1152/struktur-entitas-perusahaan
Struktur Grup	https://www.panin.co.id/pages/93/sekilas-panin-bank
Informasi bagi Investor	https://www.panin.co.id/pages/93/sekilas-panin-bank
Prospektus Penawaran Umum	https://www.panin.co.id/download/50/informasi-prospektus
Laporan Tahunan (5 tahun)	https://www.panin.co.id/download/26/laporan-tahunan-
Kode Etik	https://www.panin.co.id/pages/1192/pedoman-gcg
Profil Dewan Komisaris	https://www.panin.co.id/category/52/manajemen
Profil Direksi	https://www.panin.co.id/category/52/manajemen

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Konten | Contents	Link
Piagam/Charter Dewan Komisaris	https://www.panin.co.id/pages/1192/pedoman-gcg
Piagam/Charter Direksi	https://www.panin.co.id/pages/1192/pedoman-gcg
Piagam/Charter Komite Audit	https://www.panin.co.id/pages/1192/pedoman-gcg
Piagam/Charter Komite Nominasi dan Remunerasi	https://www.panin.co.id/pages/1192/pedoman-gcg
Piagam/Charter Audit Internal	https://www.panin.co.id/pages/1192/pedoman-gcg

Kinerja
Performance

Konten | Contents
Laporan Ikhtisar Keuangan
Link
https://www.panin.co.id/pages/1179/ikhtisar-keuangan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Konten | Contents
Kegiatan CSR
Link
https://www.panin.co.id/category/56/kegiatan-csr

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Analysis and Discussion

100 **Perekonomian dan Industri Perbankan**
Economy and Banking Industry

111 **Tinjauan Operasi per Segmen Usaha dan Informasi Segmen Usaha**
Operations Review per Business Segment

112 **Perbankan Ritel**
Retail Banking

122 **Perbankan Komersial**
Commercial Banking

126 **Perbankan Korporasi**
Corporate Banking

130 **Institutional Banking & BUMN**
Institutional and State-Owned Enterprise Banking

134 **Perbankan Internasional**
International Banking

138 **Tresuri**
Treasury

160 **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Overview of Financial Performance

222 **Teknologi informasi**
Information Technology

226 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

Perekonomian dan Industri Perbankan

Economy and Banking Industry

TINJAUAN EKONOMI TAHUN 2020

Ekonomi Global

Sepanjang tahun 2020, perekonomian dunia dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun belum juga terkendali. Pembatasan aktivitas masyarakat menjadi salah satu opsi populer yang diambil oleh para pemangku kebijakan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas, akan tetapi pada sisi lainnya implementasi kebijakan tersebut justru berdampak besar terhadap penurunan produktivitas ekonomi. Akibatnya, pada paruh pertama tahun ini, ekonomi global pun jatuh ke dalam resesi.

Karakteristik COVID-19 berbeda dengan wabah virus-virus sebelumnya, misalnya Ebola Virus Disease (EVD), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Masa inkubasi yang lebih panjang menyebabkan deteksi dini seringkali terlambat dan mempermudah penyebaran.

ECONOMIC REVIEW 2020

Global Economy

Throughout the year 2020, the global economy was filled with uncertainties. The COVID-19 pandemic that had raged since early in the year had not been contained. The restriction of social mobility became the preferred choice among policy makers to contain an even wider spread of the new Corona Virus, although on the flip side, enforcement of such policy had a major impact on the decline of economic activities. As a result of which, in the first half of the year, the global economy fell into a recession.

The characteristics of (SARS-Cov2 virus that caused) COVID-19 was different from previous viral plagues such as the Ebola Virus Disease (EVD), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), or Middle East Respiratory Syndrome (MERS). The longer incubation period of SARS-Cov2 made early detection virtually impossible, aiding the spread of the virus.

Kasus Harian COVID-19 Global
Global Daily Cases of COVID-19

(Ribu Kasus | Thousand Cases)

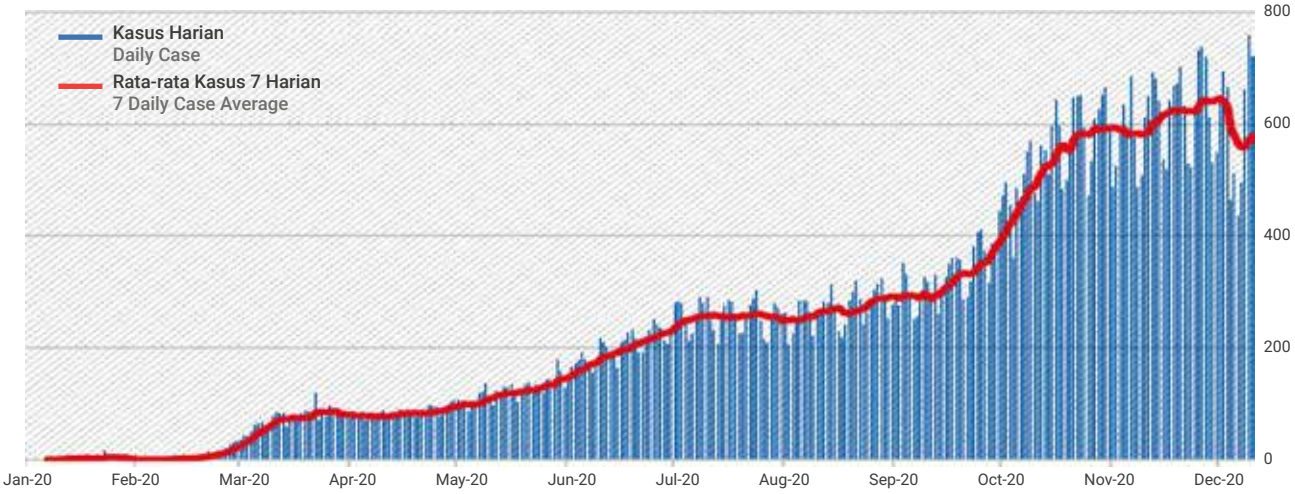

Sumber | Source: ourworldindata.org/John Hopkins University

Banyak negara telah memberlakukan karantina wilayah (*lockdown*) untuk membatasi jangkauan penyebaran virus ini. Awalnya dilakukan serentak pada 10 April 2020 atau tepat sebulan pasca virus ditetapkan sebagai pandemi. Sebelumnya, pada 11 Maret 2020, virus COVID-19 diresmikan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi. Pengumuman dilakukan setelah virus menyebar ke 114 negara dalam jangka waktu hanya tiga bulan dan menginfeksi lebih dari 118 ribu orang. Meski begitu, upaya karantina wilayah tidak cukup kuat untuk membatasi mobilitas virus. Hingga akhir tahun 2020, Data John Hopkins University menunjukkan terdapat sebanyak 83,52 juta kasus infeksi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dengan total kematian mencapai 1,83 juta jiwa atau 2,19% dari total kasus positif terinfeksi.

Karantina wilayah (*lockdown*) telah memperlambat laju perekonomian secara signifikan. Aktivitas sektor ekonomi yang bergantung pada kontak langsung seperti transportasi, pariwisata, perhotelan, dan hiburan, mengalami pukulan berat paska diterapkannya kebijakan tersebut. Tidak hanya itu, sektor manufaktur juga melemah secara substansial, dan perdagangan global anjlok.

Numerous countries had exercised the lockdown policy in an effort to contain the spread of the virus. Initially, this was carried out all at once on April 10, 2020 or precisely one month after the disease had been declared a pandemic. Previously, on March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) officially declared COVID-19 as a global pandemic. The announcement was made after the virus had spread to 114 countries in just three months, infecting more than 118 thousand people. By then, quarantine efforts in many areas were unable to contain the spread of virus, By year-end 2020, data from Johns Hopkins University showed the number of infection cases of COVID-19 around the world had reached 83.52 million cases with total fatalities amounting to 1.83 million lives, which represents a 2.19% fatality rate of the total infection cases.

Lockdowns in many regions had significantly reduced the pace of economy. Economic activities in sectors that rely on direct contacts such as transportation, tourism, hotel and entertainment were hit hard by these lockdowns. Not only that, the manufacturing sector also suffered substantially, while global trade tanked.

JPMorgan Global Composite & Global Manufacturing PMI

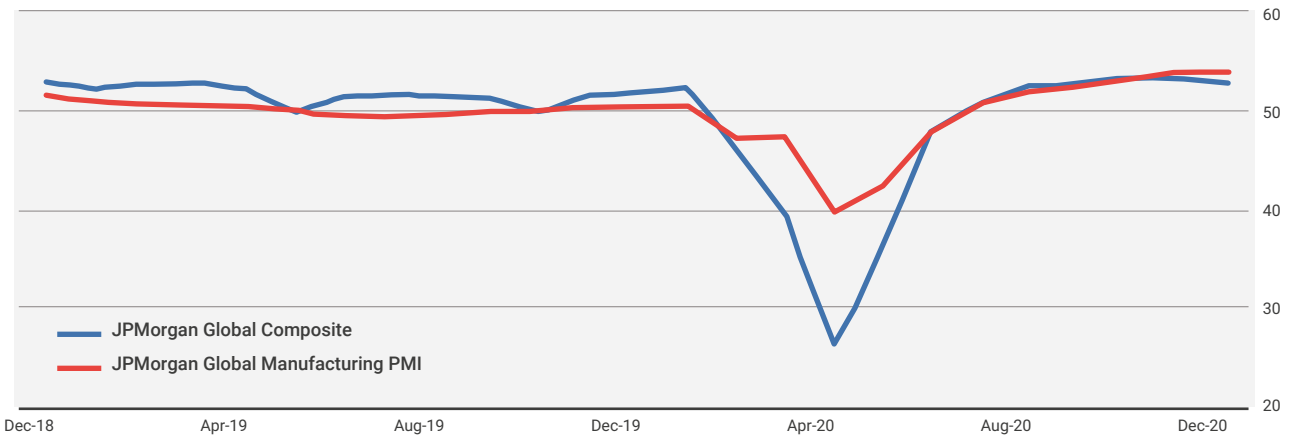

Sumber | Source: Markitt Economics

Keyakinan konsumen dan pelaku bisnis di berbagai negara turut memburuk sejalan dengan penurunan permintaan dan gangguan produksi. Hasil Survei JPMorgan Global Manufacture PMITM dari JPMorgan dan IHS Market anjlok ke level terendah sejak krisis keuangan 2008-2009 pada April 2020. Tingkat produksi dan pesanan baru turun tajam ke level terendah dalam 22 tahun selaras dengan menurunnya tingkat kepercayaan bisnis yang mengalami pukulan cukup berat. Menurut catatan PMI, arus perdagangan internasional terhenti secara tiba-tiba sepanjang tahun ini sehingga tingkat penerimaan pesanan ekspor baru pun mengalami penurunan hingga menyentuh level terendah. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi besar-besaran pada rantai pasokan global, dengan rata-rata penundaan pengiriman *vendor* paling tajam dalam sejarah survei selama 22 tahun terakhir. Namun demikian, sektor manufaktur mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan menjelang akhir tahun 2020 meskipun rantai pasokan global masih belum cukup kuat untuk bangkit dari keterpurukan selaras dengan terjadinya gangguan pengiriman bahan mentah serta penundaan jadwal produksi dan distribusi.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan berjalannya roda ekonomi, berbagai negara menggelontorkan stimulus fiskal dalam bentuk program perlindungan sosial, insentif bagi UMKM, dan keringanan pajak korporasi. Data *Fiscal Monitor Update* - International Monetary Fund (IMF) memperkirakan dukungan fiskal untuk mengatasi dampak COVID-19 secara global hampir mencapai US$14 triliun, dengan rincian US$7,8 triliun dalam bentuk belanja tambahan atau pendapatan yang hilang dan US$6 triliun dalam bentuk suntikan ekuitas, pinjaman, dan penjaminan. Besarnya dukungan fiskal tersebut terjadi ditengah penurunan penerimaan pajak seiring dengan perlambatan ekonomi sehingga berimbas pada defisit fiskal yang diperkirakan mencapai 11,8% dari total produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini.

Consumer confidence and those of businesses in many countries also worsened along with the declining market demand and disrupted production. Survey results of the JPMorgan Global Manufacture PMITM from JPMorgan and IHS Market in April 2020 fell to their lowest levels since the 2008-2009 financial crisis. Levels of production and new order also fell steeply to their lowest in 22 years in line with reeling business confidence from the considerable blow. The PMI survey also showed a sudden halt in international trade throughout the year, with new export orders grinding down to their lowest level ever. The COVID-19 pandemic had caused major disruptions to the global supply chain, showing the average delivery postponement at its highest level in 22 years of recorded history. However, the manufacturing sector had begun to show signs of improvement towards the end of 2020, although the global supply chain had not fully recovered from its decline due to the disrupted flow of raw materials and delays in the schedules of both manufacturing and distribution.

In order to maintain the purchasing power of consumers and keep the economic wheels turning, a number of countries resorted to fiscal stimulus in the form of social safety net programs, incentives for MSME, and reduction of corporate tax. The Fiscal Monitor Update Data of the International Monetary Fund (IMF) estimated that the total amount of global fiscal stimulus related to COVID-19 reached close to US$14 trillion, comprising of US$7.8 trillion in the form of additional expenditures or lost income and US$6 trillion in the form of capital injections on equities, loans and guarantees. The significant amount of fiscal support came amid the decline in tax proceeds due to the slowing economy, which resulted in a fiscal deficit that was estimated to reach 11.8% of total gross domestic product this year

Untuk memenuhi kebutuhan fiskal tersebut, berbagai sumber pembiayaan dioptimalkan baik dari domestik maupun pinjaman yang berasal dari lembaga internasional/multilateral. Bahkan para pemangku kebijakan di beberapa negara, termasuk Indonesia menerapkan sinergi berbagi beban (*burden sharing*) dengan bank sentralnya guna menutup pembiayaan defisit fiskal yang dilakukan melalui mekanisme pembelian surat utang pemerintah oleh bank sentral di pasar primer.

Sementara penanganan dari sisi moneter, bank sentral di berbagai negara menempuh kebijakan moneter akomodatif melalui penurunan suku bunga maupun injeksi likuiditas dalam jumlah besar. Di negara maju dengan tingkat suku bunga kebijakan yang mendekati nol persen, stimulus moneter umumnya ditempuh bank-bank sentral dengan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing/*"QE") ke sektor keuangan, khususnya perbankan. Hal ini diwujudkan melalui program pembelian aset keuangan (*asset purchase program*) dari pasar, baik instrumen obligasi pemerintah, obligasi swasta, maupun sekuritas kredit. Untuk mengatasi guncangan ekonomi yang dipicu oleh COVID-19, data Atlantic Council menyebutkan empat bank sentral utama, yaitu The Federal Reserve AS, Bank of Japan (BoJ), European Central Bank (ECB), dan Bank of England (BoE) telah memperluas program QE hingga US$7,8 triliun untuk mendukung ekonomi serta fungsi pasar keuangan global.

To meet the fiscal need, all other financial sources were optimized whether domestically or through loans from international/multilateral institutions. Policy makers in a number of countries, including Indonesia, even resorted to synergies by sharing the burden with the respective central banks to cover the fiscal deficit spending by way of purchasing government debt securities on the primary market by the central banks.

While on the monetary side, central banks in several countries carried out an accommodating monetary policy by reducing interest rates as well as injecting liquidity in large amounts. In developed countries with near-zero percent interest rates, the monetary stimulus generally took the form of quantitative easing (QE) in the financial sector, mainly in banking. This was done by purchasing assets directly from the capital markets, including government bonds, corporate bonds as well as credit securities. To dampen the economic shock that had been triggered by COVID-19, data from the Atlantic Council showed that four major central banks, namely the U.S. Federal Reserves, Bank of Japan (BoJ), European Central Bank (ECB), and Bank of England (BoE) had expanded their QE programs to a total of US$7.8 trillion to support the economy and global financial markets.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2020
Projections of Global Economic Growth in 2020

(%)

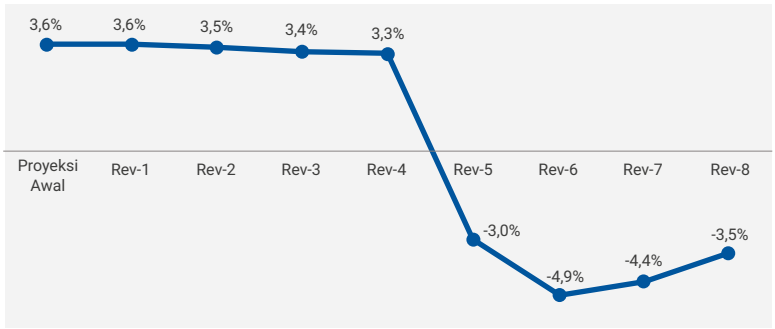

Sumber | Source: WEO IMF

Upaya-upaya tersebut berhasil menunjukkan hasil positif. Seiring berjalannya waktu, perekonomian global mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi sejak triwulan III-2020. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global tahun 2020 berkontraksi 3,5% atau lebih baik dari proyeksi sebelumnya yang berkontraksi 4,4%. Ketidakpastian akibat pandemi membuat prospek ekonomi sulit diprediksi. Akibatnya, IMF merevisi proyeksinya hingga tujuh kali tahun ini. Bahkan, proyeksi yang dirilis pada April 2020 membukukan selisih hingga minus 6,3% dari proyeksi sebelumnya.

These efforts succeeded in generating positive results. In the course of due time, the global economy had begun to show signs of recovery since Q3 2020. The International Monetary Fund (IMF) projected that the global economy would contract by minus 3.5%, better than its earlier projection of minus 4.4%. The uncertainties as a result of COVID-19 had made it difficult to project economic prospects. This had caused the IMF to revise its projections seven times during the year. In fact, the projection that it released in April 2020 was off by minus 6.3% from the previous projection.

Ekonomi Indonesia

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi infeksi COVID-19 pada 2 Maret 2020. Hingga akhir tahun 2020, total pasien terinfeksi di Indonesia tercatat mencapai 743 ribu kasus dengan total kematian mencapai 22 ribu jiwa atau 2,98% dari total kasus.

The Indonesian Economy

Indonesia confirmed its first case of COVID-19 infection on 2 March 2020. As at year-end 2020, the number of infection in Indonesia reached a total of 743,000 cases with 22,000 fatalities, representing a fatality rate of 2.98% of the total number of cases.

Mobilitas Masyarakat berdasarkan Lokasi Selama Pandemi pada Tahun 2020
Community Mobility by Location During the 2020 Pandemic

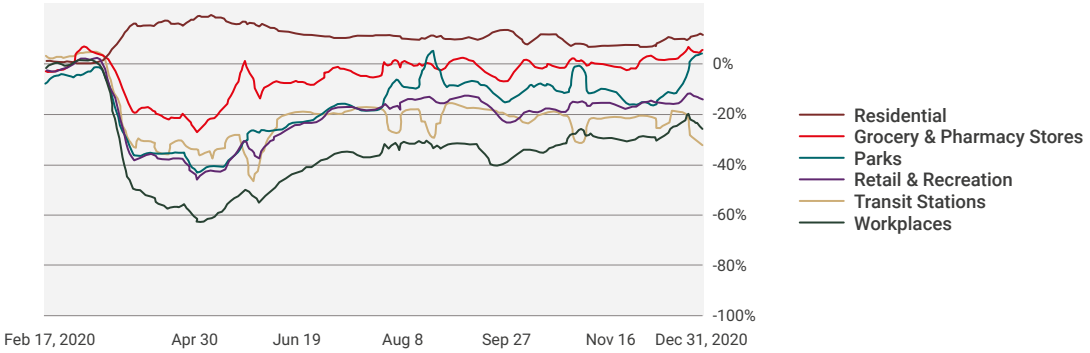

Sumber | Source: ourworldindata.org/Google COVID-19 Community Mobility Trend

Berhadapan dengan situasi tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah untuk turut memberlakukan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, Pemerintah juga secara aktif menggalakkan kampanye Gerakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (*social distancing*). Kebijakan tersebut cukup berhasil menekan mobilitas masyarakat.

Face with the above situation, the government was ultimately forced to adopt a regional lockdown policy or the so-called Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB (Large Scale Social restriction), in addition to the three-M initiatives, the letter M being the Indonesian initial that stands for all three actions of donning facemasks, washing hands, and keeping apart from one another (social distancing). These policies succeeded in restricting social mobility among the general public.

Dua bulan pertama sejak diterapkannya kebijakan PSBB, kinerja ekonomi nasional merosot tajam. Performa sektor ekonomi yang bersinggungan langsung dengan PSBB anjlok hingga dua pertiganya. Tidak bisa ditampik, pembatasan pergerakan aktivitas masyarakat berimbas pada jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang hanya mencapai 640 ribu orang sepanjang April hingga Juli 2020, menurun signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5,44 juta orang. Indikator lainnya juga menunjukkan penurunan tajam, di antaranya rata-rata tingkat hunian kamar hotel hanya terisi 18,79% dari total kapasitas kamar, merosot tajam dibandingkan realisasi April-Juli 2019 yang mencapai 51,61%. Selain itu, jumlah penumpang moda transportasi baik pesawat, kapal laut, maupun kereta api juga mengalami penurunan yang cukup dalam hingga 79,25% menjadi 38,30 juta orang.

During the first two months of the PSBB enforcement, the nation's economic performance declined sharply. Economic sectors that were directly impacted by the PSBB fell by as much as two-thirds of normal level. Undeniably, restrictions on global travellers movement adversely affected the number of foreign tourists coming to Indonesia, which had merely reached 640,000 visitors during the period of April-to-July 2020, a significant decline compared to 5.44 million visitors during the corresponding period on 2019. Indicators of many other industries also showed sharp declines. The average occupancy rate of hotel rooms during the April-July 2020 period was 18.79% of the total available hotel rooms, dropping sharply from 51.61% in the corresponding 2019 period. The total number of passengers in all transportation modes of airplanes, ships and trains declined by 79.25% to 38.30 million passengers.

Kepercayaan bisnis sektor manufaktur dilaporkan anjlok ke level 27,50, terendah sepanjang sejarah survei Purchasing Managers' Index™ (PMI™) Manufaktur Indonesia dari IHS Market. Permintaan pasar yang melemah pada akhirnya

The business confidence in the manufacturing sector was reported to decrease to a level of 27.50, the lowest ever in the surveys of Purchasing Managers' Index™ (PMI™) among Indonesian manufacturers by IHS Market. The weak market

mendorong perusahaan untuk menahan produksi. Sepanjang tahun 2020, sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menabung dan memprioritaskan ketahanan pangan. Perubahan perilaku masyarakat tersebut salah satunya tercermin dari kinerja industri kendaraan bermotor yang cukup terdampak selama pandemi COVID-19. Penjualan mobil dan sepeda motor masing-masing anjlok 84,44% dan 70,76% dari periode April-Juli 2019 menjadi 49,3 ribu unit dan 605,8 ribu unit. Sedikit berbeda, industri semen masih tertolong dari pembelian *bulk* proyek infrastruktur ditengah kelesuan sektor real estat. Volume penjualan semen sepanjang April-Juni 2020 hanya terkoreksi tipis 8,88% menjadi 12,5 juta ton dari periode yang sama tahun 2019.

demand ultimately forced companies to withhold production. Throughout the year 2020, the general public largely refrained from spending and chose savings instead while prioritising on food security. The change in consumer spending is particularly evident in the performance of the automotive sector that was considerably impacted by the COVID-19 pandemic. The sales of cars and motorcycles fell by 84.44% and 70.76% during the period of April-to-July 2020 to 49.3 thousand and 605.8 thousand units, respectively, from the corresponding period in 2019. Slightly different, the cement industry could still rely on the bulk cement purchases of infrastructure projects, insulating it against weaknesses in the realty sector. Total sales volume of cement in the period of April-to-June 2020 experienced only a slight decrease of 8.88% to 12.5 million tons from the corresponding period in 2019.

Pemerintah bersama otoritas moneter dan keuangan menerbitkan berbagai stimulus untuk menekan dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai salah satu langkah dan upaya dalam mendorong percepatan pemulihan kinerja perekonomian nasional dan daerah. Realisasi anggaran program PEN hingga 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp579,78 triliun, atau setara dengan 83,4% dari pagu sejumlah Rp695,2 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memberikan dukungan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda, dukungan UMKM, serta pembiayaan korporasi.

The government together with the monetary and financial services authority had issued a number of stimulus to dampen the impact of the COVID-19 pandemic. To that end, the government undertook an expansive fiscal policy through the National Economic Recovery (NER) program as one of the efforts to accelerate economic recoveries at national and provincial levels. The realised amount for NER as of December 31, 2020 totalled Rp579.78 trillion, accounting for 83.4% of the total budget of Rp695.2 trillion. The funds were allocated for healthcare support, social safety net, sectoral support for state ministries/institutions and provincial governments, MSME assistance, and corporate financing.

Sebagai bagian dari sinergi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) menempuh bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Mengikuti *stance* kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral lainnya, suku bunga acuan BI7DRR diturunkan sebanyak 125 bps hingga menyentuh 3,75%, terendah sepanjang masa. Selain itu, BI juga menerapkan pelonggaran likuiditas (*quantitative easing*) dan tercatat telah menginjeksi likuiditas sebesar Rp726,57 triliun atau 4,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), terbesar di antara *Emerging Markets*. Intervensi valuta asing dalam jumlah besar juga dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dari dampak kepanikan pasar keuangan global pada awal pandemi COVID-19, sehingga Indonesia terhindar dari kemungkinan krisis moneter dan ekonomi. Kebijakan makroprudensial juga dilonggarkan untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit serta pembiayaan dari perbankan.

As part of the synergy in the national economic recovery, Bank Indonesia (BI) undertook a series of monetary policies that are both macroprudential and accommodating. In tandem with the stance taken by other central banks, the benchmark interest rate of BI7DRR was reduced by 125 basis points to 3.75%, the lowest rate ever. In addition, BI also carried out quantitative easing to boost liquidity and injected a total of Rp726.57 trillion, accounting for 4.7% of Gross Domestic Product (GDP), the highest QE of its kind among the Emerging Markets. Intervention in the currency market was also undertaken in large amounts to stabilise the Rupiah exchange rate from the initial global market panic at the start of the COVID-19 pandemic, thus protecting the nation against any potential economic or monetary crises. The macroprudential policies had also been undertaken to support the stability of the financial system and induce disbursement of bank credit and financing.

Kemudian dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional ditengah pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi bagi perbankan dalam bentuk restrukturisasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan bunga sehingga tidak berdampak negatif pada kenaikan

Also to maintain the stability of the financial services sector amid the COVID-19 pandemic, the Financial Services Authority (OJK) gave leeways to the banking sector to restructure credits by deferring payments of the loan principal and interest to avoid an increase of non-performing loans and deterioration

kredit bermasalah dan penurunan permodalan. Sejak pertama kali diluncurkan pada 16 Maret 2020 sampai dengan akhir Desember 2020, program restrukturisasi kredit perbankan dibukukan mencapai Rp971 triliun atau sekitar 18% dari total kredit perbankan yang diberikan kepada 7,6 juta debitur. Restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM tercatat mencapai Rp386,6 triliun yang berasal dari 5,8 juta debitur sementara untuk sektor non-UMKM mencapai Rp584,4 triliun dari 1,8 juta debitur.

of capital. Since its launch on March 16, 2020 until end of December 2020, the banking credit restructuring program had totalled Rp971 trillion in all, accounting for approximately 18% of the total outstanding bank credit, and that which had disbursed to 7.6 million debtors. The restructuring of credit to the MSME sector amounted to Rp386.6 trillion involving some 5.8 million debtors, while that of non-MSM sector amounted to Rp584.4 trillion of 1.8 million debtors.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020
Projections of Indonesia Economic Growth in 2020

(%)

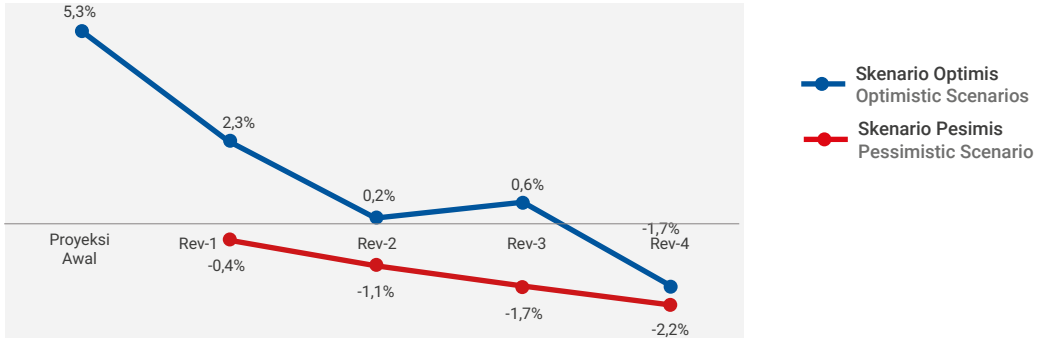

Sumber | Source: Menteri Keuangan/diolah | Minister of Finance/processed

Ditopang oleh implementasi strategi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang tepat, pemerintah berhasil menahan laju pelemahan ekonomi yang lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar minus 2,07% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan laju pertumbuhan negara-negara tetangga.

As a result of its effective strategy in managing both the pandemic and economic recovery, the government was able to prevent the potential of a deeper economic recession. The growth of the national economy in 2020 was minus 2.07% year-over-year, relatively better than those of Indonesia's neighboring countries.

Industri Perbankan dan PaninBank

Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan tingkat pengendalian yang kompleks telah memicu kekhawatiran di pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian yang dihadapi pasar keuangan global pun meningkat. Pada 24 Februari 2020, ketika virus COVID-19 pertama kali dilaporkan menyebar keluar dari China, indeks Dow Jones Industrial Average dan FTSE 100 terkoreksi 3%, kemudian disusul dengan anjloknya harga minyak mentah dunia, sementara harga emas naik ke level tertinggi dalam7 tahun terakhir. Tiga hari kemudian, seluruh indeks bursa di AS jatuh ke level terendah sejak krisis *subprime mortgage* 2008 yang diikuti dengan penurunan indeks bursa di berbagai negara. Secara keseluruhan, bursa saham telah turun lebih dari 30% pada Maret 2020.

Meski dianggap lebih aman dari saham, pasar obligasi secara tak terduga bergerak searah pergerakan saham. Berbagai jenis obligasi dilaporkan sulit diperdagangkan. Tingkat kedalaman pasar tresuri AS yang merupakan ukuran kecukupan likuiditas di pasar, anjlok ke level terendah sejak krisis 2008.

The Banking Industry and PaninBank

The rapid spread of COVID-19 and its complex mitigation had triggered an alarm in financial markets, increasing the uncertainties that faced global financial markets. On February, 24 2020, as the SARS-Cov2 virus of COVID-19 was first reported to have spread outside of China, Dow Jones Industrial Average and FTSE 100 indices were corrected by 3%, followed immediately by the tanking of oil price, and the rise of gold price to a seven-year high. Three days later, the indices of all stock markets in the U.S. had fallen to their lowest levels since the subprime mortgage crisis of 2008, followed by falling indices of stock markets around the world. All told, stock markets had fallen by more than 30% in March 2020 alone.

Despite often considered safer than stocks, the bonds market unexpectedly moved in correlation with the stick market. Various type of bonds were reported to be illiquid in the market. The depth of the U.S. treasury market, often a measure of overall market liquidity, came to its most shallow level since the 2008 crisis.

Ketidakpastian pasar keuangan global mendorong penyesuaian penempatan investasi portofolio global. Penanaman modal di negara berkembang, termasuk Indonesia menurun, dan beralih ke aset yang dianggap aman oleh investor. Akibatnya, transaksi modal dan finansial (TMF) di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat pembalikan aliran modal asing. TMF tercatat minus US$3,1 miliar pada triwulan I-2020. Penyesuaian aliran modal asing ini sempat menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020 yang diikuti dengan peningkatan volatilitas.

Pengalaman krisis moneter 1997 dan regulasi yang terus diperkuat sejak krisis keuangan 2008 membuat industri perbankan Indonesia relatif lebih siap saat pandemi COVID-19 melanda. Sektor perbankan menjadi tumpuan pemerintah untuk menjaga perekonomian dari perlambatan yang lebih dalam. Bank diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit ke sektor korporasi dan rumah tangga demi menjaga agar roda ekonomi tetap bergerak. Bank juga diminta untuk mendukung skema pemerintah yang memberikan pinjaman pendanaan darurat atau likuiditas siaga melalui fasilitas pinjaman. Terkait hal itu, Pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendukung kebutuhan likuiditas perbankan dan kemudahan penyaluran kredit.

Pada tahun 2020, BI telah melakukan QE dengan jumlah mencapai Rp726,6 triliun atau setara 4,68% dari PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp555,77 triliun. Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga acuan BI7DRR sebanyak 5 kali dengan total 125 bps ke level 3,75%, yang merupakan level terendah sepanjang sejarah.

Namun demikian, kebijakan penurunan suku bunga tersebut pada sisi lainnya justru memberikan tekanan tambahan pada margin bunga bank sehingga tingkat profitabilitas bank tertahan selaras dengan terbatasnya ekspansi kredit. Meski mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan otoritas, kemampuan bank dalam menyalurkan kredit menjadi terbatas seiring meningkatnya profil risiko bank. Pandemi COVID-19 telah memicu penurunan pendapatan perusahaan secara signifikan serta berimbas pada pemotongan gaji karyawan dan pemutusan hubungan kerja. Bank harus mempertimbangkan risiko kredit, baik dari salah alokasi kredit maupun kerugian kredit dan mungkin solvabilitas bank itu sendiri. Hingga akhir 2020, posisi kredit bank umum tercatat sebesar Rp5.482 triliun atau turun 2,41% (yoy) dengan tingkat Loan to Deposit Ratio sebesar 82,54%.

Pada tahun ini, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. Aturan tersebut mengizinkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi. Dengan diterapkannya program

The uncertainties in the global financial markets had fuelled a realignment of global investment portfolios. Investments in emerging markets, including Indonesia, declined and shifted to assets that were deemed more secure by investors. As a result of which, the Financial and Capital Transaction on Indonesia's Balance of Payment account posted the reverse flow of foreign capital, amounting to minus US$3.1 billion in Q1 2020. This outflow of capital resulted in the temporary depreciation of the Rupiah to Rp16,575 to the US dollar on 23 March 2020, followed by increased volatility.

The experience of the 1997 monetary crisis and regulations that have been continuously bolstered since the 2008 financial crisis have made the banking sector in Indonesia relatively more resilient when the COVID-19 pandemic struck. In fact, the banking sector was relied upon by the government to be the vanguard of the economy and prevent a deeper recession. Banks were expected to push for credit disbursement to the corporate sector and households to keep the economic wheels turning. Banks were also requested to support government schemes that provide emergency loans or liquidity support through loan facilities. In connection with this, the government and Bank Indonesia issued several policies in support of banking liquidity and ease of credit disbursement.

In 2020, BI undertook QE totalling Rp726.6 trillion or equivalent to 4.68% of GDP. This amount was derived from the lowering of the Mandatory Reserve Requirement by approximately Rp155 trillion and monetary expansion of approximately Rp555.77 trillion. In addition to that, BI also reduced its benchmark BI7DRR interest rate five times by a total of 125 bps to 3.75%, the lowest rate ever in history.

However, the policy of reducing interest rate on the other hand had created additional pressure on bank net interest margin such that the profitability of banks is compromised due to the limited scope for credit expansion. Despite being fully supported by the government and the authorities, the ability of banks to disburse credit is restricted along with the increasing risk profile of the bank. The COVID-19 pandemic has caused massive degradation of corporate revenues and impacted on salary cuts for employees or even job termination. Banks have to consider the credit risk, whether from misallocation of credit or from credit loss or even from the solvency of the banks themselves. As at year-end 2020, the total outstanding credit of commercial banks stood at Rp5,482 trillion, a decline of 2.41% (yoy) with the Loan to Deposit ratio of 82.54%.

In 2020, OJK issued the OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 ton the Stimulus for the National Economy as a Countercyclical Policy on the Impact of the COVID-19 Spread. The regulation allows for the loosening and restructuring on the credit of debtors who are impacted by the pandemic. With the

restrukturisasi tersebut, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) gross perbankan terjaga pada level 3,06%, sementara NPL net sebesar 0,98%. Sebagai perbandingan, NPL *gross* dan net tahun 2019 masing-masing tercatat sebesar 2,53% dan 1,19%. Permodalan bank juga relatif semakin kuat sebagaimana tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencapai 23,89%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 23,40%.

Dalam kondisi tersebut, PaninBank berhasil menjaga kinerja keuangan tetap solid. Sepanjang tahun 2020, Bank lebih berfokus pada upaya menjaga daya tahan bisnis debitur sehingga kinerja fungsi intermediasi bisa lebih berkelanjutan. Permodalan Bank juga terus diperkuat agar kualitas mitigasi risiko semakin meningkat. Kemampuan untuk membukukan laba tetap baik melalui optimalisasi biaya di tengah perlambatan permintaan kredit dan kebijakan kredit yang lebih selektif. Selama 2020, Bank berhasil menjaga laba bersih tetap dalam *bottom line* Rp3 triliun. Laba bersih PaninBank secara individual dibukukan sebesar Rp3,075 triliun. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan OJK, Bank berkomitmen akan membantu nasabah dalam menghadapi pandemi. Sedikitnya 22,55% dari total kredit Bank telah direlaksasi dan direstrukturisasi.

implementation of this restructuring program, the gross non-performing loan (NPL) ratio of banking as a whole was 3.06%, while net NPL was 0.98% in 2020. In comparison, gross and net NPL rstios in 2029 were 2.53% and 1.19%, respectively. Bank capitalisation was also relatively more solid, as reflected by the Capital Adequacy Ratio (CAR) of 23.89%, higher than that of 23.40% in 2019.

Under those conditions, PaninBank succeeded in maintaining a solid financial performance. Throughout the year 2020, the Bank had focused more on efforts to help debtors maintain their business resilience in order for the Bank to continue with its financial intermediation function. The bank's capitalisation had also been strengthened in order to increase its capabilities to mitigate risks. The ability to maintain profitability had remained strong by optimising cost management amid slower credit demand and more selective credit policies. In 2020, the Bank succeeded in earning a net profit and maintaining a bottom line of not less than Rp3 trillion. PaninBank alone posted a net profit of Rp3.075 trillion during the year. In line with the policies of the government and OJK, the Bank is committed to help its customers in facing up to the pandemic. At least 22.5% of the Bank's total outstanding credit had been loosened and restructured.

Indikator Keuangan PaninBank (Individual & Konsolidasian) dan Industri
PaninBank Financial Indicators (Individual & Consolidated) and Industry

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Aset (Rp miliar)						Assets (Rp billion)
PaninBank	201.320	190.252	188.898	196.630	183.715	PaninBank
Konsolidasian	218.067	211.287	207.204	213.542	199.175	Consolidated
Bank Umum	9.177.894	8.562.974	7.913.491	7.387.634	6.729.799	Commercial Bank
Kredit (Rp miliar)						Loan (Rp billion)
PaninBank	113.588	128.776	132.653	124.532	119.323	PaninBank
Konsolidasian	129.893	136.725	137.386	128.652	125.049	Consolidated
Bank Umum	5.481.560	5.616.992	5.294.882	4.737.944	4.377.195	Commercial Bank
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)						Third Party Fund (Rp billion)
PaninBank	136.417	122.749	130.815	138.185	135.770	PaninBank
Konsolidasian	143.030	131.403	137.695	145.671	142.654	Consolidated
Bank Umum	6.665.390	5.998.648	5.630.448	5.289.377	4.836.758	Commercial Bank
CAR (%)						CAR (%)
PaninBank	29,55	24,07	23,49	22,26	20,32	PaninBank
Konsolidasian	29,58	23,41	23,33	21,99	20,49	Consolidated
Bank Umum	23,89	23,40	22,97	23,18	22,93	Commercial Bank
ROA (%)						ROA (%)
PaninBank	2,08	2,09	2,25	1,87	1,68	PaninBank
Konsolidasian	1,91	2,08	2,16	1,61	1,69	Consolidated
Bank Umum	1,59	2,47	2,55	2,45	2,23	Commercial Bank
NIM (%)						NIM (%)
PaninBank	4,46	4,63	4,61	4,49	4,94	PaninBank
Konsolidasian	4,62	4,83	4,84	4,68	5,03	Consolidated
Bank Umum	4,45	4,91	5,14	5,32	5,63	Commercial Bank
LDR (%)						LDR (%)
PaninBank	83,26	107,92	104,15	92,10	90,07	PaninBank
Konsolidasian	90,82	108,38	110,07	96,39	94,37	Consolidated
Bank Umum	82,54	94,43	94,78	90,04	90,70	Commercial Bank
NPL Gross (%)						NPL Gross (%)
PaninBank	2,93	3,02	2,97	2,34	2,85	PaninBank
Konsolidasian	3,01	3,02	3,04	2,84	2,81	Consolidated
Bank Umum	3,06	2,53	2,37	2,59	2,93	Commercial Bank

PROSPEK EKONOMI-BISNIS TAHUN 2021

Kepastian pengendalian pandemi COVID-19 merupakan salah satu kunci utama pemulihan ekonomi tahun 2021. Program vaksinasi secara global yang sudah dimulai pada Desember 2020 diprediksi akan menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan dapat mendorong terbentuknya *herd immunity* sehingga aktivitas konsumsi, produksi, dan perdagangan global dapat kembali pulih. Ditunjang oleh mobilitas masyarakat yang perlahan kembali normal, roda perekonomian pada tahun yang akan datang juga diharapkan dapat segera berakselerasi.

Tanda-tanda pemulihan ekonomi global mulai terlihat pada semester II-2020 dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2021. Pemulihan ekonomi tersebut sebelumnya lebih banyak didorong oleh kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang akomodatif. Mempertimbangkan tren tersebut, IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh 5,2% pada tahun 2021 mendatang.

Perekonomian Indonesia juga menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari sejumlah indikator ekonomi yang berlangsung secara bertahap, diantaranya kontraksi pertumbuhan yang semakin berkurang ditopang oleh realisasi stimulus dan perbaikan kinerja ekspor. Prospek pemulihan global yang membaik berdampak positif pada prospek perdagangan dan harga komoditas dunia yang akan mendukung kinerja ekspor Indonesia.

Ketidakpastian di pasar keuangan global juga diperkirakan menurun seiring berjalannya program vaksinasi dan ekspektasi perbaikan perekonomian dunia. Penurunan ketidakpastian tersebut kembali mendorong masuknya aliran modal pada negara berkembang, termasuk Indonesia sehingga akan berimbas pada penguatan rupiah.

Searah dengan tren global, pemerintah juga masih akan melanjutkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Anggaran Program PEN dinaikan 6,42% menjadi Rp557,29 triliun dengan alokasi lebih banyak untuk program kesehatan terutama vaksinasi serta program prioritas seperti dukungan pariwisata, *food estate* dan pengembangan kawasan industri. Terkait implementasi reformasi struktural, pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) dan menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat mendorong investasi.

Dewasa ini, aktivitas masyarakat juga sudah menuju pada pola dan kebiasaan normal baru seiring dengan berjalannya program vaksinasi. Pemerintah Indonesia telah memulai tahapan vaksinasi pada Januari 2021 dan ditargetkan sebanyak 181,5 juta warga sudah divaksinasi pada akhir 2021. Selain itu,

ECONOMIC AND BUSINESS PROSPECTS IN 2021

The certainty over the handling of COVID-19 pandemic is one of the keys to economic recovery in 2021. The vaccination program that has begun globally since December 2020 is expected to provide a sense of safety among the general public and instil herd immunity such that consumption, production and global trade activities will resume to normal levels. Strengthened further by gradually increasing social mobility, this is expected to accelerate the pace of economy in 2021.

Signs of the improving global economy had been detected since Q2 2020 and are expected to continue through to 2021. This improvement had been mainly attributed to the expansive fiscal policies and accommodative monetary policies. Considering these trends, the IMF projected global economic growth to be 5.23% in 2021.

The Indonesian economy had also shown improvement as reflected by a number of economic indicators that have gradually improved, including the lower rate of economic contraction that was due to the realised stimulus packages and an improving export performance. The prospects of a global recovery will have a positive impact on global trade and on global commodity prices that will boost Indonesia's export performance further.

Uncertainties in global financial markets are also expected to subside along with the continuing vaccination program and projected improvement of the global economy. Lesser market uncertainties will fuel the return of capital to the emerging markets, including Indonesia, resulting in the strengthening of the rupiah.

In line with the global trend, the government will continue with its expansive fiscal policies. The budget for NER Program has been raised by 6.42% to Rp557.29 trillion with more allocation to support the healthcare program, primarily the vaccination program as well as other priority programs such as support for tourism, food production, and the development of industrial estates. In terms of structural reforms, the government has formed the Indonesia Investment Authority (IIA), and prepared the follow-on regulations on the Law on Job Creation otherwise known as the Omnibus Law.

Currently, the social activities of the general public have adopted the behavioural pattern of the New Normal in line with the on-going vaccination program. The Indonesian government has begun with its phased vaccination program in January 2021 and targets to vaccinate a total of 181.5 million

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sebagai pengganti PSBB terlihat lebih efektif dalam menekan rantai penyebaran virus COVID-19.

people by end of 2021. In addition to that, the new policy of Micro Scale Social Restriction that has replaced the previous Large Scale Social Restriction has been deemed more effective in cutting the chain of transmission of COVID-19.

Kondisi likuiditas perbankan dan pasar keuangan diperkirakan tetap longgar, sejalan dengan keberlanjutan kebijakan moneter yang akomodatif. Penurunan suku bunga BI7DRR dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong. Lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan oleh masih tingginya Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga masih akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif melalui pelonggaran ketentuan kredit/pembiayaan di sektor properti dan otomotif untuk mengakselerasi pemulihan intermediasi dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

The liquidity of banking and the financial market is expected to remain loose, in line with the continuing accommodative monetary policy. The lowering of BI7DRR interest rate and flush liquidity will keep interest rate low, although much still needs to be done to lower bank loan interest rate. Lagging decreasing bank loan interest rate is due to the Credit Base Interest Rate of banking that has remained high. Nevertheless, Bank Indonesia will continue with its accommodative macroprudential policies by loosening the terms on credit/financing in the property and automotive sectors to accelerate the resumption of intermediation activities without compromising prudential principles and risk management.

OJK turut berpartisipasi dengan menerbitkan kebijakan stimulus lanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam aspek makroprudensial melalui sektor jasa keuangan. Relaksasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih cepat. Selain perpanjangan program restrukturisasi kredit dan pembiayaan sampai Maret 2022, OJK juga menurunkan bobot risiko kredit, antara lain penurunan bobot risiko ATMR kredit/pembiayaan beragun rumah tinggal, penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan, dan penurunan bobot risiko kredit (ATMR) bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

The OJK also participates by facilitating several policies on follow-on stimulus to enhance economic growth through macroprudential aspects in the financial services sector. This is aimed at accelerating credit growth. In addition to extending the credit restructuring period until March 2022, OJK has also reduced the risk-weighted assets (RWA) factor on credit, including RWAs on property-collateralised credit/financing, reduced RWA on credit to the healthcare sector, and reduced RWAs on credit for motor vehicles.

Dengan adanya sinergi berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan konsumsi diproyeksikan tetap berlanjut namun tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Masih tingginya angka pengangguran dan penurunan pendapatan pekerja menjadi penyebab utama belum pulihnya daya beli masyarakat. Tingkat investasi juga masih akan tertahan dengan mencermati perbaikan konsumsi. Pemerintah memproyeksikan ekonomi nasional akan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% sejalan dengan outlook berbagai lembaga seperti IMF 4,8%, World Bank 4,4%, dan ADB sebesar 4,5%.

The synergies from all of the above policies are expected to accelerate national economic recovery. Improvements in consumption is projected to continue, albeit not as strong as had been expected initially. The high level of unemployment and declining wages continue to be the main factors behind consumers' remaining low purchasing power. The rate of investments will also remain restricted as long as consumption has not improved. The government projects the national economy to grow in the range of 4.5% - 5.3%, in line with projections of the IMF (4.8%), the World Bank (4.4%) and the Asian Development Bank (4.5%).

Meskipun tingkat likuiditas cukup memadai, ekspansi kredit perbankan dinilai masih akan tertahan. Oleh karena itu, Bank tetap mengantisipasi dan memperhitungan potensi efek lanjutan dari pemulihan ekonomi nasional terhadap peningkatan kredit bermasalah. Akan hal tersebut, BI memproyeksikan kredit akan tumbuh pada kisaran 5%-7% pada tahun 2021 mendatang, sementara OJK menargetkan pada kisaran 7,5%±1%.

Although liquidity is deemed to be sufficient, the expansion of bank credit will remain restricted. As such, the Bank continues to anticipate and calculate the potential effects that the continuing national economic recovery will have on the increase in non-performing loans. In this regard, BI has projected credit growth of around 5%-7% in 2021, whole OJK targets a growth of 7.5%, ±1%.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha dan Informasi Segmen Usaha

Operations Review per Business Segment

TINJAUAN SEGMEN BISNIS

Perseroan mengindentifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen bisnis dari Grup. Manajemen meninjau ulang segmen ini secara regular dalam rangka menentukan alokasi sumber daya dan menilai kinerja informasi segmen.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk. Grup melaporkan segmen-segmen sesuai kegiatan usaha berikut:

1. Perbankan
2. Perusahaan Pembiayaan

Sektor perbankan termasuk di dalamnya bank umum konvensional dan bank umum syariah yang dianggap sebagai segmen operasi yang sama oleh pengambil keputusan operasional. Kegiatan usaha bank umum konvensional yang dijalankan PaninBank meliputi perbankan konsumer, perbankan komersial, perbankan korporasi, Institutional Banking & BUMN, dan Tresuri. Bank umum syariah dijalankan oleh Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang mengelola bisnis perbankan secara prinsip syariah.

Terkait segmen usaha perusahaan pembiayaan, Perseroan memiliki entitas anak usaha PT Clipan Finance Indonesia Tbk yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen-segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam satu segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan industri yang sama dan sifat dari jasa yang diberikan adalah sama.

OVERVIEW OF BUSINESS SEGMENT

The Company identifies operating segments from internal reports regarding business components. The Bank's Management reviews each segment on a regular basis to determine the allocation of resources and to assess the segment's performance.

An operating segment is a component of the entity:

a. engaging in business activities which generate revenue and incur expenses (including revenues and expenses related to transactions with other components within the same entity);
b. whose operational results are regularly reviewed by operational decision makers to make determinations concerning the resources allocated to each segment and to assess its performance; and
c. whose financial information can be segregated.

Information used by operational decision makers in terms of resource allocation and performance appraisal is focused on the category of each product. The Group reports its segments according to the following business activities:

1. Banking
2. Finance Companies

The banking sector includes conventional commercial banks and sharia commercial banks which are considered similar operating segments by operational decision makers. The conventional commercial bank business activities conducted by PaninBank include consumer banking, commercial banking, corporate banking, Institutional Banking & BUMN, and Treasury. Sharia commercial banks are managed by Bank Panin Dubai Syariah Tbk, which manages the banking business through Islamic principles.

Regarding the financing company business segment, the Company has a subsidiary, PT Clipan Finance Indonesia Tbk., which carries out financing business activities.

For the purpose of financial statement presentation, the Company combines the operating segments into one single operating segment by taking into account their similar industry and the similar nature of the services provided.

Perbankan Ritel: Mempercepat Mesin Pertumbuhan Bank

Retail Banking: Reviving Up the Bank's Growth Engine

Segmen usaha Perbankan Ritel memainkan peranan kunci dalam transformasi digital di PaninBank untuk mengembangkan kapabilitas perbankan digital dan layanan perbankan transaksi secara menyeluruh sebagai pendorong utama pertumbuhan bisnis perbankan di masa depan.

The Retail Banking business segment plays a key role in the transformation of PaninBank into a provider of fully-fledged digital banking capabilities and transactional services as the main driver of growth in the banking business of the future.

Perbankan Ritel adalah masa depan PaninBank. Segmen usaha ini memainkan peranan kunci dalam pengembangan layanan perbankan digital, yang tidak hanya merupakan masa depan perbankan secara umum, namun telah menjadi sangat relevan di masa pandemi COVID-19.

Transaksi perbankan secara digital semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan pembatasan mobilitas karena protokol kesehatan. Tanpa adanya COVID-19 sekalipun, perkembangan ke arah digitalisasi perbankan merupakan suatu hal yang pasti. COVID-19 hanya mempercepat prosesnya.

PaninBank telah membaca perkembangan ini jauh sebelum COVID-19, dan telah memulai transformasi digital untuk beberapa layanan perbankannya, terutama dalam hal transaksi perbankan.

Segmen usaha Perbankan Ritel menjadi ujung tombak Bank dalam transformasi digital tersebut. Layanan dengan menggunakan media digital seperti *mobile banking*, *Internet banking* dan *on-line banking* lainnya seperti berbelanja dengan Panin Kartu Kredit dari rumah tanpa menggunakan fisik kartu semakin dapat dimanfaatkan oleh nasabah PaninBank. Berbagai kemudahan layanan digital ini mampu meningkatkan frekuensi transaksi nasabah secara signifikan pada tahun 2020, sekaligus penetrasi pasar perbankan ritel oleh PaninBank.

Retail Banking is the future of PaninBank. This business segment is key to the evolution of the digital banking service, which not only constitutes the future of banking in general, but has become considerably relevant in the times of COVID-19.

Consumers today prefer to do their banking transactions through digital means as social mobility is restricted due to health protocols. But even without COVID-19, the trend towards digitalization in banking is inevitable. COVID-19 has only moved the timetable forward.

PaninBank had anticipated this trend long before COVID-19, and had begun to undertake the digitalization of some of its banking services, mainly in transactional banking.

The Retail Banking business segment is thus spearheading this digital transformation effort. Services that use the digital platform such as mobile banking and Internet banking, plus other on-line banking services such as shopping with the Panin Credit Card from home without using the (physical) card itself, have become increasingly available to PaninBank customers. The added convenience of these digital services has significantly increased the frequency of customer transactions in 2020, improving the market penetration of PaninBank in retail banking as well.

Peningkatan yang signifikan juga tercatat dalam transaksi Panin Kartu Kredit, sedemikian rupa sehingga, pada tahun 2020, PaninBank menempatkan bisnis Kartu Kredit dan Personal Loan sebagai unit usaha tersendiri, menandai pertumbuhan usaha Bank yang pesat di segmen perbankan ritel maupun personal.

Fokus dan Strategi di Tahun 2020

Fokus segmen usaha Perbankan Ritel PaninBank pada tahun 2020 ditujukan pada pengembangan yang berkesinambungan di enam unit usaha, yaitu (i) kredit pemilikan rumah, (ii) kartu kredit dan personal loan, (iii) tabungan dan giro, (iv) *wealth management*, (v) perbankan transaksi dan (vi) perbankan digital.

Dengan mengembangkan keenam unit usaha ini, PaninBank terus menembus ke jantung pasar perbankan ritel yang marak di Indonesia. Bank mampu mengembangkan basis nasabah, meningkatkan jumlah dana murah, serta menanamkan Brand PaninBank semakin kuat di benak para nasabah. Berikut adalah fokus dan strategi Bank di masing-masing unit Perbankan Ritel sepanjang tahun 2020.

A significant increase was also noted in the transaction volume of Panin Credit Card, such that, in 2020, PaninBank decided to make Credit Card and Personal Loan into a business unit in its own right, underlining the rapid growth of the Bank's retail and personal banking franchises.

Focus and Strategy in 2020

The focus of the Retail Banking business segment of PaninBank in 2020 was on the continuing development of six business units, namely (i) home mortgage, (ii) credit card and personal loan, (iii) savings and giro, (iv) wealth management, (v) transactional banking, and (vi) digital banking.

By developing these six business units, PaninBank continued to penetrate deep into the heart of Indonesia's fast growing retail banking segment. The Bank succeeded in growing its customer base, increasing low-cost funds, and instilling the PaninBank brand more firmly in the minds of customers. The following narrative describes the focus and strategy of the Bank in the respective business units of the Retail Banking segment in 2020.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Terobosan bagi Pembeli Rumah Pertama

Tawaran KPR PaninBank merupakan suatu terobosan, tertutama bagi mereka yang membeli rumah untuk pertama kali. Hal ini berupa langkah berani Bank menawarkan KPR dengan suku bunga pinjaman tetap selama 10 tahun, yang tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya.

Ada dua faktor yang melandasi strategi ini. Pertama adalah kondisi suku bunga rendah dewasa ini. COVID-19 telah meluluhlantahkan perekonomian sedunia, Dunia usaha memerlukan dukungan modal kerja yang murah, dan inilah yang terjadi di banyak negara di dunia, dengan kebijakan tingkat suku bunga nol persen bahkan negatif. PaninBank berpandangan kondisi suku bunga yang rendah ini masih akan berlanjut cukup lama. Maka itu, Bank menggunakan kesempatan ini untuk berbagi manfaat dengan nasabah.

Faktor kedua lebih nyata. PaninBank menerima informasi dari sektor properti bahwasanya rumah yang paling cepat terjual di pasar properti saat ini adalah rumah yang disebut sebagai 'rumah setapak' – sangat diminati terutama oleh pembeli rumah pertama kali.

PaninBank melihat peluang untuk menggabungkan fenomena tersebut dengan tawaran yang menarik bagi pembeli rumah untuk pertama kalinya, yaitu perasaan nyaman - *peace of mind* – selama 10 tahun.

Ketika ditanyakan pendapatnya atas program tingkat bunga tetap selama 10 tahun ini, seorang pemuda yang baru membina keluarga menjawab setulusnya. "Kita hidup di jaman yang tidak menentu," ujarnya. "Jujur saya katakan, hati ini terenyuh ada bank yang mau menjagai kita selama sepuluh tahun."

KARTU KREDIT DAN *PERSONAL LOAN*: Mengembangkan Momentum Pertumbuhan

Fokus dan strategi usaha Kartu Kredit PaninBank di tahun 2020 mampu mengembangkan momentum pertumbuhan di tengah kondisi yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19.

Secara umum, transaksi penggunaan Panin Kartu Kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama di kategori *food and groceries*, dimana peningkatan transaksi di berbagai segmen pasar mampu menggantikan penurunan di segmen pariwisata seperti perjalanan wisata, penerbangan dan perhotelan. Hal ini tidak lepas dari upaya Bank menambah wacana transaksi perbankan *on-line* antara lain melalui kanal *e-commerce* termasuk melakukan promo belanja yang bekerja sama dengan mitra bisnis *on-line* seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain sebagainya. Sebagai buah hasil upaya ini, Bank

Home Mortgage Loan (HML): Breaking Ground for First-time Homebuyers

PaninBank's home mortgage offering is breaking ground, especially for first-time homebuyers. At the heart of this offering is a bold move by the Bank to offer home mortgages with a fixed interest rate of up to 10 years, which has never been tried in Indonesia.

Two factors underpinned this bold strategy. The first is the low interest rate environment. COVID-19 has decimated the world's economy. Businesses need to be stimulated with low-cost capital, and this is happening in many countries around the world, with the zero or even negative interest rate policies. PaninBank believes that the low interest-rate environment will prevail for the foreseeable future. Hence, the Bank is using this opportunity to pass on the benefits to customers.

The second factor is perhaps more telling. PaninBank has learned from the property sector that the most affordable house in the market today – the very small house that is referred to as 'rumah setapak' or the 'one-foot house' – is the hottest selling item in the property market.

PaninBank saw an opportunity to combine those two factors into a very attractive offer to first-time homebuyers – essentially 10 years of peace-of-mind.

When asked about his opinion on this 10-year fixed interest program, a young man in his mid-twenties, with wife and baby on the way, replied sincerely: "We live in very uncertain times," he said. "We don't know what the future holds for us. It just warms my heart to know that a bank is willing to watch our back for ten years."

CREDIT CARD AND PERSONAL LOAN: Strengthening a Growing Momentum

The focus and strategy of PaninBank's Credit Card business in 2020 succeeded in strengthening a growing momentum despite a year full of challenges from the COVID-19 pandemic.

In general, the number of transactions in the use of Panin Credit Card showed a significant increase, especially in the purchases of food and groceries; while increasing transactions in various other market segments were able to offset decreasing transactions in the tourism segment such as the travel, airline and hotel industries. This success could not be detached from the efforts of the Bank to link the Panin Credit Card to on-line banking features such as e-Commerce, including shopping promotions in cooperation with on-line business partners such as Tokopedia, Shopee, Blibli and

mencatat peningkatan kontribusi transaksi *on-line* dari 37% menjadi 50% di akhir tahun 2020, bahkan sempat menyentuh 61% dari seluruh transaksi perbankan PaninBank.

Sepanjang tahun 2020, fokus kegiatan Panin Kartu Kredit ditujukan pada berbagai pembenahan dan persiapan infrastruktur yang lebih matang. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain adalah (i) menambah serta memperluas kerja sama dengan mitra *e-commerce*, *merchants* serta mitra penyedia barang untuk hadiah program Panin *Reward Point*, (ii) pengembangan sistem dan proses termasuk sistem otomatisasi aplikasi penunjang, sistem *tele-marketing*, mesin pencetakan Kartu Kredit, penerapan PIN transaksi Kartu Kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta peningkatan keamanan dan kerahasiaan data nasabah, (iii) perubahan kebijakan suku bunga kartu kredit serta relaksasi bunga kredit selama pandemi COVID-19 sesuai peraturan Bank Indonesia.

Di sisi *Personal Loan*, sepanjang tahun 2020 kegiatan penyaluran kredit di segmen usaha Perbankan Ritel tidak lepas dari permasalahan yang sama dengan apa yang dihadapi oleh segmen kredit perbankan pada umumnya, yaitu menjaga kualitas aset pinjaman yang terdampak oleh COVID-19.

Untuk itu, sejak April 2020, PaninBank membatasi kegiatan pemasaran *Personal Loan*, yaitu produk Kredit Express Panin (KEP), dan lebih fokus terhadap upaya pemantauan baki pinjaman *Personal Loan* yang ada. Namun demikian, pengetatan pemberian fasilitas KEP mulai dilonggarkan secara perlahan-lahan dengan pemberian fasilitas terbatas menjelang akhir tahun 2020.

TABUNGAN DAN GIRO: Menggalang Dana Masyarakat Berlandaskan Kepercayaan

Sekalipun wabah COVID-19 melumpuhkan berbagai kegiatan usaha, hal ini tidak menciutkan hati personil Paninbank yang bertanggung jawab menggalang Dana Pihak Ketiga (DPK). Mereka mencari cara yang baru serta aman untuk berinteraksi dengan nasabah. Melalui ponsel pintar, media sosial dan konferensi video, para retail bankers PaninBank terus menjalin hubungan yang erat dengan nasabah lama, serta membuka lembaran baru dengan calon nasabah baru.

Akuisisi nasabah baru rekening tabungan maupun giro sepanjang tahun 2020 ditunjang oleh lengkapnya produk pendanaan Bank, yaitu mulai dari (i) rekening tabungan untuk nasabah anak-anak dan pelajar (termasuk dalam dukungan PaninBank terhadap program pemerintah, *One Student One Account*), (ii) rekening tabungan nasabah umum yang telah dikenal luas oleh masyarakat seperti Panin Super Bonanza

others. As a result of these efforts, the Bank realized an increase in the contribution of on-line transactions from 37% to 50% by year-end 2020. At one point, the contribution of on-line transactions reached 61% of all banking transactions of PaninBank.

Throughout 2020, Panin Credit Card focused on a number of initiatives to improve and prepare more robust infrastructures. Some of these initiatives included (i) adding and expanding the cooperation with e-Commerce partners, merchants, and vendors that supply the prizes for Panin Reward Points, (ii) developing systems and processes including supporting applications for the automation system, tele-marketing system, and credit card printing machine, implementing credit card PIN protocols pursuant to Bank Indonesia regulations, as well as enhancing security features and customer data privacy, (iii) changes in credit card interest rates and loosening of credit interest rates throughout the COVID-19 pandemic pursuant to Bank Indonesia regulations.

On the Personal Loan side, throughout 2020 the disbursement of credit in the Retail Banking segment was faced with the same issues as those faced by banking credits in general, which is maintaining the quality of loan assets impacted by COVID-19.

As such, as of April 2020, PaninBank restricted the marketing of Personal Loans, namely the Kredit Express Panin (KEP), and focused more on monitoring existing outstanding Personal Loans. However, the restrictions on disbursing KEP was gradually loosened, and the KEP facility was again disbursed very selectively towards the end of 2020.

SAVINGS AND GIRO: Generating Public Funding Based on Trust

Although the COVID-19 pandemic had paralysed a wide range of businesses, this did not diminish the optimism of the men and women of PaninBank who were responsible for generating Third Party Funds (TPF). They sought new and safe means to interact with customers. Through smartphones, social media networks and video conferencing, the resourceful PaninBank retail bankers kept in close touch with customers, maintaining their excellent bank-client relationships, and opened new dialogues with potential new customers.

The acquisition of new customers for savings and giro accounts throughout 2020 was facilitated by the comprehensive range of the Bank's funding products, starting from (i) savings accounts for minors and students (including the support of PaninBank in the government program, One Student One Account), (ii) savings accounts for the general public that

dan Tabungan Panin MGM (*member-get-member*), (iii) Rekening Dana Nasabah untuk bertransaksi di pasar modal, hingga (iv) rekening giro keperluan bisnis baik untuk nasabah perorangan maupun korporasi.

PaninBank berhasil membukukan jumlah DPK sebesar Rp143,03 triliun di akhir tahun 2020, meningkat sebesar 8,85% dari Rp131,40 triliun pada tahun 2019. Jumlah tersebut merupakan capaian terbesar sepanjang sejarah PaninBank, menggarisbawahi kekuatan Bank dalam menggalang dana simpanan masyarakat berlandaskan kepercayaan yang dibangun selama lima dasawarsa.

Unit Tabungan dan Giro sendiri berhasil membukukan DPK dalam bentuk rekening tabungan dan giro sebesar Rp55,81 triliun di akhir tahun 2020, meningkat sebesar 14,34% dari Rp48,81 triliun pada tahun 2019. Pencapaian ini berkontribusi terhadap pemenuhan strategi unit Tabungan dan Giro, yaitu peningkatan komposisi dana murah CASA (rekening giro dan rekening simpanan) terhadap total DPK Bank yang mencapai 39,02% di akhir tahun 2020 dibandingkan dengan 37,15% pada tahun 2019.

WEALTH MANAGEMENT: Meningkatkan Perlindungan Aset Nasabah di Masa yang Tidak Menentu

Pada tahun 2020, unit Wealth Management PaninBank fokus pada layanan yang mengutamakan perlindungan bagi rasa aman dan kenyamanan nasabah. Perlindungan tersebut mencakup keamanan aset nasabah yang dikelola secara baik serta perlindungan diri atas berbagai penyakit maupun terhadap ancaman COVID-19 melalui produk asuransi yang ditawarkan Bank.

PaninBank meneruskan kerja samanya yang erat dengan berbagai penyedia jasa asuransi, termasuk dengan salah satu anggota Konglomerasi Keuangan Panin, yaitu perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-ichi Life, dan beberapa penyedia jasa asuransi umum seperti Asuransi Multi Artha Guna, Asuransi Sinar Mas, dan Asuransi Buana Independent Indonesia.

Bersama kelompok penyedia jasa asuransi tersebut, unit Wealth Management menyediakan perlindungan asuransi yang lengkap dan menyeluruh mulai dari asuransi jiwa, asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit-linked*), asuransi rawat inap rumah sakit dan perlindungan tehadap penyakit kritis, hingga berbagai jenis asuransi umum yang melindungi aset pribadi maupun perusahaan dari berbagai bencana atau malapetaka.

are widely known such as Panin Super Bonanza and Panin Savings MGM (member-get-member), (iii) The Customer Fund Account for transacting on the capital market, to (iv) the business giro account for corporations and individuals.

PaninBank succeeded in generating TPF totalling Rp143.03 trillion by year-end 2020, increasing by 8.85% from Rp131.40 trillion in 2019. This amount was the largest funding ever achieved in the history of PaninBank, underscoring the strength of the Bank in generating public savings funds on the basis of trust that has been earned across five decades.

The Savings and Giro unit alone was able to book TPF in the form of savings and giro accounts totalling Rp55.81 trillion as at year-end 2020, increasing by 134.34% from Rp48.81 trillion in 2019. This achievement contributed to the vindication of the Savings and Giro unit's strategy in raising the ratio of low-cost CASA (current accounts and savings accounts) to total TPF of the Bank to 39.02% by year-end 2020, up from 37.15% in 2019.

WEALTH MANAGEMENT: Increasing Protection of Customer Assets in Uncertain Times

In 2020, the Wealth Management business unit of PaninBank focused on emphasizing protection that provides a feeling of safety and comfort among customers. This protection covered the safety of customer assets, as well as the personal safety of customers from a variety of illnesses including the threat of COVID-19 through the bancassurance products offered by the Bank.

PaninBank continued its solid cooperation with various insurance service providers, including with a member of the Panin Financial Conglomerate, the life insurance company Panin Dai-ichi Life, and a host of general insurance providers that included Asuransi Multi Artha Guna, Asuransi Sinar Mas, and Asuransi Buana Independent Indonesia.

Along with this group of insurance service providers, the Wealth Management unit provides a comprehensive range of insurance coverage from life insurance, life insurance that is tied to investment (unit-linked), hospital treatment insurance including protection against critical illnesses, to a variety of general insurance covers that protect personal or corporate assets from loss or accident.

Dari segi investasi, PaninBank bekerja sama dengan beberapa manager investasi seperti Panin Asset Management dan Bahana TCW Investment Management juga dengan Panin Sekuritas dalam penawaran produk efek/surat berharga.

Melalui jaringan kerja sama ini, PaninBank menawarkan produk-produk investasi yang beragam, yang menawarkan tingkat pengembalian dengan risiko yang sepadan, sesuai dengan *risk appetite* masing-masing nasabah, mulai dari konservatif hingga agresif. Salah satu prinsip utama yang dianut oleh PaninBank dalam menjalankan bisnis *wealth management* adalah *capital preservation* karena tujuan investasi bagi banyak nasabah tidak semata mengejar keuntungan yang tinggi, tapi bagaimana modal kita bisa dijaga dan dikembangkan secara pelan namun pasti dalam jangka panjang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi dari nasabah, *Wealth Management* menyediakan produk reksadana secara lengkap mulai dari reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham. Bank juga aktif menjadi mitra distribusi dari Kementerian Keuangan dalam menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) secara *on-line* seperti obligasi konvensional (ORI) dan obligasi berbasis syariah (Sukuk).

Untuk menunjang kegiatan itu semua, *Wealth Management* melakukan kolaborasi dengan perusahaan asuransi dan investasi dalam mengadakan pelatihan secara berkala kepada cabang dan memastikan sertifikasi yang dibutuhkan telah terpenuhi.

PERBANKAN TRANSAKSI: Tumbuh Kembang dalam Skala Mengesankan

Layanan *transactional banking* berpeluang menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis perbankan di masa depan. Ketika dunia usaha dilanda ketidakpastian akibat krisis yang bisa datang sewaktu-waktu karena satu dan lain hal, layanan perbankan transaksi yang cepat, mudah serta efisien (dari segi biaya) akan tetap diandalkan nasabah – menghasilkan *fee-income* bagi bank, selain peluang pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Kemajuan teknologi beserta digitalisasi dunia perbankan yang dipercepat turut mendorong pertumbuhan layanan perbankan transaksi dalam skala yang mengesankan – yang mampu menjangkau pelaku usaha di pelosok Nusantara yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan perbankan.

With investments, PaninBank cooperates with a number of investment managers such as Panin Asset Management and Bahana TCW Investment Management, as well as Panin Sekuritas in the offering of securities and various investment products.

Through this partnership network, PaninBank offers a variety of investment products with commensurate risk-and-return that are suited to the different risk appetite of respective customers, from conservative to aggressive. One of the main principles of PaninBank in operating its wealth management business is capital preservation. The bank believes that the goal of investments for many customers is not merely to pursue the highest return, but how to protect the integrity of capital in order for it to grow steadily over the long term.

In response to market demand for investment products, Wealth Management offers a complete range of mutual fund products from fixed-income funds to hybrid funds and equity funds. The Bank is also active as a partner of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in distributing government-issued securities on-line in the offering of conventional bonds (ORI) or Islamic sharia (sukuk) bonds.

To support these activities, Wealth Management also collaborates with the above-mentioned insurance providers and investment firms to train Bank personnel in branch offices and help the Bank in matters of professional certifications.

TRANSACTIONAL BANKING: Growing and Evolving on an Impressive Scale

The transactional banking service has the potential to become the main driver of growth in the future of banking. At times, businesses are overwhelmed by uncertainties that could materialize at any time for one reason or another. Transactional banking services that are quick, convenient and efficient (in terms of cost) will always be relied upon by customers – generating fee income for the bank, in addition to sustaining growth opportunities in the long term.

Technological advances and the digitalization process that has accelerated have induced the evolution and growth of transactional banking services on a truly impressive scale – able to reach businesses and consumers in the far reaches of the nation that were previously untouched by banking services.

Menyadari hal ini, PaninBank memberi perhatian penuh terhadap pengembangan unit layanan Perbankan Transaksi yang pada tahun 2020 semakin diandalkan oleh nasabah. Bank melayani kebutuhan transaksi perbankan para nasabah dari semua segmen perbankan, baik itu korporasi, komersial, institusional maupun konsumen.

Upaya ekspansi dan penetrasi ke berbagai segmen bisnis yang dirintis sejak tahun 2019, mulai membuahkan hasil yang berarti di tahun 2020, dengan meningkatnya transaksi *cash management* dan *payroll service* oleh para nasabah korporasi maupun komersial. Sementara para nasabah ritel semakin akrab dengan berbagai ragam layanan perbankan transaksi elektronik PaninBank seperti *virtual account, auto collection* dan *on-line transfer*.

PaninBank akan terus berupaya mengembangkan layanan perbankan transaksi, ditopang oleh pengembangan layanan perbankan digital secara menyeluruh yang mulai digulirkan tahun 2021 ini. Kemampuan perbankan digital yang menyeluruh akan menempatkan perbankan transaksi sebagai ujung tombak layanan perbankan PaninBank di masa depan.

PERBANKAN DIGITAL: Transformasi Digital Memperluas Cakrawala

Perbankan Ritel PaninBank mencatat evolusi perubahan yang paling mengesankan di bidang perbankan digital, dengan digulirkannya *platform* perbankan digital maupun fitur-fitur teknologi terkini yang silih berganti, Bank mampu meningkatkan *brand awareness* maupun jejak langkahnya (*footprints*) secara signifikan di pasar. Jejak langkah ini mengacu ke seberapa banyak nasabah perbankan ritel melakukan transaksi di *platform* perbankan PaninBank setiap harinya.

Contohnya, seorang nasabah perbankan ritel menggunakan Internet Panin atau Mobile Panin untuk mentransfer dana di pagi hari, kemudian menggunakan Kartu Debit Panin sepanjang hari untuk berbelanja di berbagai toko *online* atau tarik tunai dari ATM bank apapun yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama tanpa dikenakan biaya (berlaku untuk semua rekening PaninBank yang memiliki saldo minimal Rp5 juta).

Di malam hari, nasabah tersebut mungkin menggunakan ponsel cerdasnya untuk memantau saldo Nilai Aset Bersih beberapa reksadana di portofolio investasinya, terhubung langsung dengan *platform* perdagangan on-line PaninBank, serta bisa melakukan berbagai transaksi perbankan 24/7.

Being aware of this, PaninBank paid full attention to the development of its Transactional Banking Services unit that was increasingly relied upon by customers in 2020. The Bank serves the transaction of banking needs of customers from all banking segments, whether corporation, commercial, or retail.

Expansionary efforts and penetration into various business segments that had begun in earnest in 2019, produced results in 2020, with the growing use of the cash management and payroll services by corporate and commercial customers. Retail customers had become increasingly familiar with a variety of electronic transactional banking services of PaninBank such as the virtual account, auto collection and on-line transfers.

PaninBank will continue to develop its transactional banking services and which will receive a major boost from the digital transformation of PaninBank that will be rolled out, starting in 2021. A fully-fledged capability in digital banking will position transactional banking services as the vanguard of PaninBank banking services in the future.

DIGITAL BANKING: Digital Transformation for Broader Horizons

The Retail Banking business segment of PaninBank is experiencing the most exciting evolutionary transformation towards digital banking. With new digital banking platforms and the latest technology features being introduced one after another, the Bank has been able to significantly increase brand awareness and footprints in the market. By footprints, we refer to the number of times our retail customers transact on our banking platforms on any given day.

For instance, a retail customer might use the Internet Panin or Mobile Panin to transfer funds in the morning, then use the Panin Debit Card throughout the day to shop online at various merchants, or withdraw cash from the ATM of any bank that is part of the ATM Bersama network, free of charge (eligible for any PaninBank account with a minimum balance of Rp5 million).

In the evening, the customer might use their smartphone to check the balance of their mutual funds holdings, be connected directly to the on-line trading platform of PaninBank, and carry out any banking transactions 24/7.

Pengembangan yang mengesankan telah dan akan terus digulirkan dalam layanan perbankan ritel PaninBank, meletakkan Bank secara kokoh sebagai bagian dari revolusi transformasi di bidang perbankan digital yang kini tengah bergulir di seluruh dunia, serta mengubah pola perilaku masyarakat dalam caranya mereka menabung, menanamkan modal, mengelola, melakukan transaksi, dan membelanjakan uangnya.

Exciting developments in payment systems have marked and will continue to mark the retail banking services of PaninBank, establishing the Bank firmly as part of the revolutionary digital banking transformation that is happening around the world, and that continues to change how people save, invest, manage, transact, and spend their money.

Fitur-fitur baru dalam layanan perbankan akan semakin bermanfaat bagi nasabah sementara biayanya pun menjadi lebih murah. Ambil contoh, misalnya, layanan uang elektronik (*e-Cash*) PaninBank yang berbasiskan server. Layanan *e-Cash* PaninBank dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi berbayar di berbagai *merchants* tanpa harus membuka rekening di PaninBank. Manfaatnya bak layaknya Kartu Kredit – tanpa fasilitas kreditnya, namun juga tanpa biaya yang mahal.

New banking features will add more benefits to customers while actually reducing costs. PaninBank's server-based electronic money or e-Cash, for instance, allows customers to make payment transactions at merchants without having to open a banking account with PaninBank. Its utility is just like the credit card – without the credit facility, but also without the hefty fees.

Pendekatan PaninBank ke berbagai penyedia jasa layanan fintech menggarisbawahi kesediaan Bank untuk bekerja sama – dari pada berkompetisi – demi kepentingan nasabah, mitra bisnis, dan PaninBank sendiri. Tumbuh dan Berkembang Bersama telah menjadi landasan bisinis Bank sejak 50 tahun silam.

PaninBank's approaches to fintech service providers underscores the Bank's willingness to cooperate – rather than compete – in the best interests of customers, the business partners, and PaninBank itself. Grow and Prosper Together has been the business foundation of the Bank for 50 years.

Seiring dengan langkah Bank menuju pengoperasian perbankan digital secara menyeluruh mulai kuartal ketiga tahun 2021, *platform* perbankan ritel PaninBank akan semakin kokoh di tahun-tahun mendatang. Perubahan ini akan mengangkat skala dan pertumbuhan perbankan ritel PaninBank secara eksponensial, memberi manfaat yang lebih besar lagi bagi nasabah, beserta pemangku kepentingan Bank lainnya.

As the Bank moves forward towards full-fledged digital banking operations starting in third-quarter of 2021, PaninBank's retail banking platform will be even more robust in the years to come. The transformation will increase the scale and growth of PaninBank's retail banking exponentially, delivering much more benefits to customers, and to all other stakeholders of the Bank.

Kinerja Tahun 2020

Pencapaian kinerja sepanjang tahun 2020 telah disampaikan pada pembahasan unit usaha ini di atas.

Performance in 2020

The performances of Retail Banking throughout 2020 have been presented in the discussions of the respective business units above.

Strategi untuk Tahun 2021 dan Seterusnya

Segmen usaha Perbankan Ritel akan tetap menjadi ujung tombak upaya transformasi perbankan digital Bank. Untuk itu, segmen usaha ini akan terus melanjutkan penguatan sistem maupun operasional perbankannya, terutama dalam hal pelaksanaan strategi pengembangan perbankan digital PaninBank.

Strategy for 2021 and Beyond

The Retail Banking segment will remain the spearhead of the Bank's digital banking transformation efforts. With that in mind, this business segment will continue to strengthen its systems and banking operations, especially in the execution of the strategy for the digital banking development of PaninBank.

Digitalisasi menghadirkan banyak tantangan sekaligus peluang bisnis bagi PaninBank untuk terus tumbuh kembang. Berikut ini adalah langkah-langkah strategis Bank dalam upaya transformasi digital mulai tahun 2021 dan seterusnya.

- Perbankan digital PaninBank memungkinkan Bank melakukan distribusi produk layanan tanpa batas untuk memperoleh nasabah baru. Sebaliknya, pelanggan dapat membuka rekening serta melakukan transaksi perbankan secara digital melalui telepon genggam tanpa perlu datang ke kantor cabang.
- Personil Bank dapat membantu nasabah membuka rekening di cabang maupun di luar cabang 24/7, sehingga pembukaan rekening nasabah baru dapat meningkat secara signifikan.
- Mutu pelayanan PaninBank akan semakin baik dengan meningkatnya pengetahuan produk, kegiatan promosi, simulasi dan alat perencanaan keuangan yang dikuasai oleh staf pemasaran PaninBank saat menjelaskan kepada calon nasabah. Nasabah pun akan menikmati program loyalitas yang semakin menarik sehingga aktif bertransaksi serta lebih responsif terhadap penawaran produk baru Bank.
- PaninBank akan memiliki integrasi *seamless* dengan Open API ke perusahaan Fintech, *E-Commerce* dan *platfotrm* digital lainnya guna meningkatkan pengalaman nasabah maupun *branding* PaninBank, sejalan dengan transisi sistem ekonomi maupun keuangan dari era manual analog ke era elektronik digital.
- *Platform* digital PaninBank antara lain mendukung Standar Pembayaran Nasional untuk transaksi digital QRIS baik untuk penerbitan maupun perolehan transaksi domestik dan internasional. Transaksi keuangan melalui pemindaian QRIS jauh lebih efisien dan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran perbankan hanya melalui alat pindai di telepon genggam.
- Layanan *Branch Banking* akan mengetengahkan format yang berbeda, antara lain dengan menyediakan *Virtual Teller Machine* (VTM), CDM, dan perangkat perbankan digital lainnya, dengan konsep cabang masa depan yang fokus pada pelayanan dan pemasaran dengan jumlah *teller* lebih sedikit, namun memiliki jaringan maupun jangkauan yang lebih luas dan efektif.

Digitalisation presents many challenges and concurrently business opportunities for PaninBank to sustain growth. The following are the Bank's strategic steps as it embarks on its digital transformation from 2021 onwards.

- Digital banking will allow PaninBank to undertake unrestrained distribution of products and services, and acquire new customers. Additionally customers can open an account and carry out banking transactions digitally through smartphones without having to go to a branch office.
- Bank personnel can assist customers to open an account in or out of branch office 24/7, with the potential for the Bank to grow its customer base significantly.
- PaninBank will enhance the quality of its services with the increased product knowledge, promotional activities, simulation, and advanced financial planning tools at the disposal of Bank marketing staff when engaging with customers. The customers will benefit from more attractive loyalty programs, inducing them to transact more and be more responsive to the offerings of new products by the Bank.
- PaninBank will have seamless integration through Open API with Fintech, e-Commerce and other digital platform providers. This will enhance the customer experience as well as PaninBank's branding, in conjunction with the transition of the economic and financial systems from manual analog to digital electronic.
- PaninBank's digital platform will support, among others, the National Payment Standard for QRIS digital transactions for both issuing and acquiring domestic and international transactions. Financial transactions using the QRIS scan are far more efficient and convenient for customers to undertake a bank payment transaction just by using the scanning device on their smartphones.
- Branch banking services will feature a new format, including the presence of the Virtual Teller Machine (VTM), CDM, and other digital banking equipment, with the concept of a future branch that focuses on services and marketing with less number of tellers, but with a network and reach that are more broad and effective.

Guna menunjang pemanfaatan *platform* digital tersebut secara maksimal, PaninBank juga terus meningkatkan bisnis Kartu Kredit, yang memiliki program kerja penuh di tahun 2021, yaitu (i) melanjutkan pembenahan yang sudah berjalan, (ii) meningkatkan Program *Loyalty* dengan memberikan lebih banyak pilihan hadiah yang menarik bagi pengguna Panin Kartu Kredit, (iii) mengembangkan *acquiring* bisnis melalui penawaran EDC, (iv) menambah jumlah pemegang Panin Kartu Kredit, dan (v) menjadikan Panin Kartu Kredit pilihan utama untuk pembayaran melalui kerja sama dengan berbagai *merchants*.

Sedangkan untuk *Personal Loan*, penyaluran fasilitas KEP akan lebih difokuskan pada nasabah *existing*. Untuk nasabah baru, akan ditargetkan pada segmen karyawan yang akan merupakan program *bundling* dengan penawaran Panin Kartu Kredit.

To support maximum utility of the digital platform, PaninBank will continue to enhance its Credit Card franchise, which already has a full agenda in 2021, namely (i) continuing with ongoing improvements, (ii) enhancing the Loyalty Program by offering more choices of attractive prizes for Panin Credit Card users, (iii) expanding acquiring businesses through EDC offering, (iv) adding the number of Panin Credit Card holders, and (v) making the Panin Credit Card the preferred choice for payment by engaging more merchants.

Meanwhile, for Personal Loans, disbursement of the KEP facility will focus more on existing customers. For new customers, the target will be set on the employees segment, and packaged together in a bundling program with the offering for the Panin Credit Card.

Perbankan Komersial: Kokoh dari Segi Jumlah

Commercial Banking: Strength in Numbers

Mewakili sekitar 37% dari total baki kredit PaninBank, segmen Perbankan Komersial terus mengandalkan hubungan yang erat serta membangun kepercayaan yang langgeng bersama nasabah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Representing approximately 37% of PaninBank's total credit balance, the Commercial Banking segment continues to rely on close relationships and building lasting trust with customers whose number continues to increase from year to year.

Perbankan Komersial terdiri atas tiga segmen bisnis, yaitu (i) bisnis komersial, dan (ii) bisnis kecil menengah, dan (iii) bisnis mikro, Grup ini mencakup sekitar 37% dari baki kredit keseluruhan PaninBank sebesar kurang lebih Rp122 triliun pada tahun 2020.

Keberhasilan PaninBank di segmen Perbankan Komersial dilandasi oleh hubungan baik yang telah terjalin antara Bank dengan para nasabah selama ini.

Dengan jalinan hubungan yang erat ini, PaninBank berhasil menanamkan rasa saling percaya dengan nasabah segmen Perbankan Komersial yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Bank mampu memanfaatkan kekuatannya secara penuh – baik itu dari segi jumlah nasabah, konsistensi pelayanan, maupun kepercayaan nasabah.

Strategi dan Fokus di Tahun 2020

Bank terus mengandalkan hubungan yang erat dengan nasabah serta membangun kepercayaan yang langgeng bersama nasabah, sebagai batu pijakan strategi bisnis yang dianut Perbankan Komersial.

Kegiatan yang sering dilakukan adalah menyelenggarakan acara temu nasabah (*customer gathering*) secara reguler, sekalipun di masa pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020, kegiatan ini terpaksa ditiadakan untuk sementara.

Commercial Banking comprises three business segments, (i) commercial business, (ii) small and medium business, and (ii) micro business. This banking group accounts for around 37% of PaninBank's total outstanding credit, at approximately Rp122 trillion in 2020.

The success of PaninBank in the Commercial Banking segment is grounded upon the close ties that the Bank has forged with its customers over the decades.

Through these close ties, the Bank has instilled mutual trust with its Commercial Banking customers whose number has continued to grow from one year to another. The Bank has been able to capitalize fully on its strengths – in terms of the size of its customer base, consistency of services, and the trust of customers.

Strategy and Focus in 2020

The Bank continues to rely on its strong relationships and building long-lasting trust with customers as the cornerstones of the business strategy that is adopted by Commercial Banking.

This is applied by regularly organizing customer gathering event, although due to the COVID-19 pandemic since March 2020, these events have had to be postponed for the time being.

Menghadapi pandemi COVID-19, fokus Perbankan Commercial pada tahun 2020 adalah memitigasi risiko dampak pandemi semaksimal mungkin dengan memantau kualitas aset pinjaman nasabah Perbankan Komersial, serta memberi kelonggaran dan/atau restrukturisasi kredit sesuai kebijakan relaksasi kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fokus lainnya dari Grup Perbankan Komersial adalah kelanjutan pelatihan dan pengembangan personil Perbankan Komersial. Pelatihan ini tertutama mencakup pengenalan lebih mendalam atas pengetahuan perkreditan dan *Problem Loan Management*, yang telah menjadi perhatian dan kegiatan utama Bank di tahun 2020 sehubungan dengan pandemi COVID-19.

Kinerja Tahun 2020

Pada akhir tahun 2020, Perbankan Komersial menyalurkan kredit kepada ketiga segmen bisnisnya, dengan total baki kredit di akhir tahun mencapai Rp41,5 triliun, lebih kecil daripada baki kredit sebesar Rp50,5 triliun di tahun 2019.

Perbankan Komersial telah menyesuaikan strategi pertumbuhan bisnisnya sejak tahun 2019, sebagai sikap kehati-hatian atas melambatnya kegiatan perekonomian kala itu. Penurunan ini semakin mendalam di tahun 2020 seiring dengan pandemi COVID-19.

In the face of the COVID-19 pandemic, the focus of Commercial Banking in 2020 was to mitigate as much as possible the risk emanating from the impact of COVID-19, by monitoring the quality of loan assets of Commercial Banking, and providing relief through credit restructuring pursuant to the loosening policy of the Financial Services Authority (OJK).

Another focus of the Commercial Banking Group is on the continuity of training and development of the Group's personnel. This training mainly covers more in-depth understanding and knowledge of credit and credit remedial management, which became a key issue and concern for the Bank in 2020 in relation to the COVID-19 pandemic.

Performance in 2020

Commercial Banking had disbursed credit to its three business segments, with total outstanding credit as at year-end 2020 amounting to Rp41.5 trillion, smaller in total amount than Rp50.5 trillion in 2019.

Commercial Banking had adapted its growth strategy since 2019, as a prudent response to the slowing economy at the time. The economic condition worsened in 2020 due to COVID-19.

Sekalipun dihadapkan oleh kondisi yang kurang menguntungkan hampir di sepanjang tahun 2020 akibat COVID-19, rasio NPL Perbankan Komersial membaik dari 4,09% di tahun 2019 menjadi 3,29% di tahun 2020. Hal ini merupakan bagian dari penerapan kebijakan relaksasi kredit dan *monitoring* serta penagihan yang intensif terhadap debitur-debitur yang menunjukkan penurunan kualitas kredit.

Although faced by worsening conditions throughout 2020 as a result of COVID-19, the NPL ratio of Commercial Banking improved from 4.09% in 2019 to 3.29% in 2020. The improvement was partly due to the credit loosening policy and monitoring, as well as more intensive collection efforts on credits that had shown quality deterioration.

Dari sisi target, Perbankan Komersial membukukan realisasi penyaluran kredit sebesar 86,4% dari target senilai Rp48,05 triliun pada akhir tahun 2020. Berikut adalah uraian sasaran, realisasi, selisih dan pencapaian unit-unit bisnis Perbankan Komersial pada tahun 2020 dan 2019.

In terms of target, by year-end 2020 Commercial Banking had realised 86.4% of the target of Rp48.05 trillion that the Bank had set for credit disbursement during the year. The following describes the targets and realizations of the respective business units of Commercial Banking in 2020 and 2019.

Small Medium Business (SMB). Total baki kredit SMB di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp22,73 triliun, menurun sebesar 16,3% dari Rp27,17 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini tidak terhindarkan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terutama berdampak pada sebagian besar usaha di segmen SMB pada umumnya seperti halnya bisnis restoran, penginapan, perjalanan darat, pariwisata lokal, pedagang eceran, industri barang setengah jadi (*supply chain*) dan lain sebagainya.

Small Medium Business (SMB). The total outstanding credit of the SMB unit as at year-end 2020 amounted to Rp22.73 trillion, a decline of 16.3% from Rp27.17 trillion in 2019. The decline was unavoidable due to the COVID-19 pandemic, which was particularly detrimental to most businesses in the SMB segment such as restaurants, lodgings, land transportation, local tourism, retailers, supply-chain industries and the like.

Sekalipun dihadapkan oleh kondisi yang kurang menguntungkan hampir di sepanjang tahun 2020 akibat COVID-19, rasio NPL unit SMB membaik dari 4,47% di tahun 2019 menjadi 3,58% di tahun 2020.

Although faced with these difficult conditions, virtually throughout 2020 due to COVID-19, the NPL ratio of the SMB unit improved from 4.47% in 2019 to 3.58% in 2020.

Komersial. Dari sisi target, unit bisnis SMB membukukan realisasi penyaluran kredit sebesar 87,3% dari target senilai Rp26,04 triliun pada akhir tahun 2020.

Commercial. In terms of target, the credit disbursement by the SMB business unit accounted for 87.3% of the targeted amount of Rp26.04 trillion as at year-end 2020.

Total baki kredit Komersial di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp18,02 triliun, menurun sebesar 19,7% dari Rp22,44 triliun pada tahun 2019.

The total outstanding credit of the Commercial business unit as at year-end 2020 amounted to Rp18.02 trillion, a decline of 19.7% from Rp22.44 trillion in 2019.

Penurunan ini tidak terhindarkan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terutama berdampak pada sebagian besar usaha di segmen komersial pada umumnya seperti halnya bisnis restoran, penginapan, perjalanan darat, pariwisata lokal, pedagang eceran, industri barang setengah jadi (*supply chain*) dan lain sebagainya.

The decline was unavoidable due to the COVID-19 pandemic, which was equally detrimental to most businesses in the Commercial unit segment in general, such as restaurants, lodging, road travel, local tourism, retail traders, the supply chain industry and so on.

Dari sisi target, unit bisnis Komersial membukukan realisasi penyaluran kredit sebesar 84,3% dari target senilai Rp21,37 triliun pada akhir tahun 2020.

In terms of target, the credit disbursement by the Commercial business unit accounted for 84.3% of the targeted amount of Rp21.37 trillion as at year-end 2020.

Meskipun sepanjang tahun 2020 cukup banyak kredit yang direstrukturisasi akibat COVID-19, rasio NPL unit Commercial membaik dari 3,78% di tahun 2019 menjadi 3,03% di tahun 2020.

Although there was significant credit from the Commercial business unit that had been restructured due to COVID-19, the NPL ratio of the Commercial unit improved from 3.78% in 2019 to 3.03% in 2020.

Mikro. Total baki kredit Mikro di akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp721 miliar, menurun sebesar 19,2% dari Rp892 miliar pada tahun 2019.

Segmen bisnis Mikro sempat menunjukkan tren perbaikan sepanjang kuartal keempat 2019 dan kuartal pertama 2020, dimana Bank berharap dapat memanfaatkan model bisnis yang berhasil dikembangkan untuk segmen ini di sepanjang tahun 2019, yaitu perihal *top-up* kredit bagi nasabah berprestasi baik serta aplikasi *Sales Activity Report* dan *Mobile Collection*.

Namun segmen Mikro juga tidak terhindar dari dampak pandemi COVID-19, sekalipun dari sisi jumlah aset pinjaman, tekanannya tidak seberat yang dirasakan oleh Bank pada segmen Komersial dan SMB.

Maka, cukup dengan didukung oleh pelonggaran dan/atau penundaan pembayaran pokok pinjaman, sementara pembayaran bunga tetap berjalan setiap bulannya, rasio NPL unit binis Mikro melanjutkan perbaikan dari 1,07% pada tahun 2019 menjadi 0,99% pada tahun 2020.

Dari sisi target, unit bisnis Mikro membukukan realisasi penyaluran kredit sebesar 112% dari target senilai Rp642 miliar pada akhir tahun 2020.

Strategi Tahun 2021 dan Selanjutnya

Untuk menghadapi tantangan terkait kondisi perekonomian yang akan masih tertekan di tahun 2021, melalui Perbankan Komersial, PaninBank akan terus meningkatkan penyaluran kredit melalui tawaran skema pembiayaan yang inovatif dan unggul di pasar. Hal ini guna terus menguatkan pertumbuhan usaha maupun ketahanan Bank terhadap tekanan eksternal jangka pendek maupun menengah.

Sedangkan dalam jangka panjang, segmen usaha Perbankan Komersial akan terus mengembangkan kapasitasnya dari segi sumber daya manusia, teknologi dan sistem perbankan, proses dan prosedur kerja, peraturan perbankan, serta tuntutan pasar guna mengatasi segala tantangan dalam memenuhi harapan para nasabah Perbankan Komersial.

Micro. The total outstanding credit of the Micro business unit as at year-end 2020 amounted to Rp721 billion, a decline of 19.2% from Rp892 billion in 2019.

The Micro business unit segment had in fact shown improving trends throughout Q4 2019 and Q1 2020, wherein the Bank was expecting to capitalize on a business model that had been developed and tried for this segment throughout 2019, namely the credit top-up for well-deserving customers and applications for the Sales Activity Report and Mobile Collection.

However, the Micro unit segment was also not immune to the effects of COVID-19, although the pressures were less intense than those felt in the Commercial and SMB business units.

Therefore, with slight adjustments and/or postponement in the repayment of the loan principal, while interest payment continues each month, the NPL ratio of the Micro business unit continued to improve from 1.07% in 2019 to 0.99% in 2020.

In terms of target, the credit disbursement by the Micro business unit accounted for 112% of the targeted amount of Rp642 billion as at year-end 2020.

Strategy for 2021 and Beyond

To face up to the challenges of the economy that is likely to remain under pressure in 2021, through its Commercial banking franchise, PaninBank will continue to disburse credit, offering financing schemes that are both innovative and market-leading. This is to ensure the Bank's continuing growth as well as resilience against external pressures in the short- or medium-term.

For the foreseeable future, the Commercial Banking business segment will increase its capacity in terms of human resources, banking technology and systems, work processes and procedures, banking rules, and meeting market demands, while rising to any challenge that stands in the way of the Bank's efforts to fulfill the expectations of stakeholders.

Perbankan Korporasi:

Tetap Mendukung Pertumbuhan Bisnis Jangka Panjang

Corporate Banking: Continuing to Support Long-term Business Growth

PaninBank terus mendukung nasabah korporasi dengan tetap menyalurkan kredit bagi debitur yang menjalankan bisnis jangka panjang seperti perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur, sementara mengamankan kualitas kredit di sektor-sektor yang rentan terhadap dampak pandemi COVID-19 secara langsung.

PaninBank continues to support corporate customers by channeling loans to debtors who are running long-term businesses such as plantations, mining and infrastructure development, while safeguarding credit quality in sectors that are vulnerable to the direct impact of the COVID-19 pandemic.

Segmen usaha Perbankan Korporasi PaninBank tetap menyalurkan kredit untuk memenuhi kebutuhan nasabah serta terus menjalin hubungan yang baik dengan para debitur korporasi di tengah pandemi COVID-19 yang penuh tantangan dan turut menekan kredit perbankan.

PaninBank terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang para nasabah korporasi dengan tetap menyalurkan kredit, terutama bagi mereka yang menjalankan bisnis untuk jangka panjang seperti perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Pada saat bersamaan, Perbankan Korporasi juga bertindak cepat dalam hal pengamanan kualitas kredit Perbankan Korporasi dengan mengikuti acuan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang ditentukan oleh Regulator. Langkah ini berhasil menjaga tingkat kredit bermasalah di segmen Perbankan Korporasi di bawah ketentuan yang berlaku dan pada batas yang terkendali.

Fokus dan Strategi di Tahun 2020

Pada tahun 2020, segmen usaha Perbankan Korporasi mengandalkan hubungan baiknya dengan para nasabah korporasi untuk berkomunikasi dan mengantisipasi dampak COVID-19 pada kredit-kredit debitur yang diperkirakan rentan

The Corporate Banking business segment of PaninBank continues to disburse credit to meet the needs of customers and forge close ties with corporate debtors amid the COVID-19 pandemic that has caused significant challenges and suppressed banking credit.

PaninBank strives continuously to provide its corporate customers with credit in support of their business growth, especially to companies that are engaged in long-term business projects such as plantations, mining, infrastructure development and the like.

At the same time, Corporate Banking moved quickly to safeguard the quality of its credit assets by following the bank credit restructuring policy set by the Regulator. This move succeeded in maintaining the rate of Non-Performing Loans in the Corporate Banking segment below the statutory requirement and within manageable levels.

Focus and Strategy in 2020

Throughout 2020, the Corporate Banking franchise relied on its close relationship with corporate customers to communicate and anticipate the impact of COVID-19 on the loans of debtors that were vulnerable to the direct impact of

terhadap dampak pandemi secara langsung, teutama sektotr pariwisata (misalnya pehotelan) atau terganggu arus kasnya akibat resesi ekonomi (misalnya distributor besar atau bisnis waralaba).

Bank berupaya mendeteksi masalah lebih dini, sehingga mampu menawarkan solusi yang bisa diterima debitur– termasuk melakukan *refinancing*, *restructuring* atau *realigning* (penyesuaian) jumlah kredit dengan nilai jaminan dalam kondisi pasar yang cepat berubah. Debitur menerima anjuran Bank untuk menjual aset dan menurunkan paparan kreditnya agar mengurangi tekanan terhadap ekuitas debitur. Semua langkah ini dilakukan secara bijak dan bersahabat oleh Bank, sehingga para debitur bisa melihatnya sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi dan bukan sebagai tekanan dari Bank. Dalam kondisi yang serba sulit akibat COVID-19, Bank senantiasa berupaya meringankan beban nasabah, khususnya para debitur.

Kinerja Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perbankan Korporasi dapat membukukan baki kredit sebesar Rp30,5 triliun, menurun sebesar 2,55% dari Rp31,3 triliun pada tahun 2019. Pendapatan bunga dari segmen Perbankan Korporasi mencapai Rp2,8 triliun pada tahun 2020, menurun sebesar 6,66% dari Rp3,0 triliun di tahun 2019. Penurunan ini terutama

the pandemic, especially those in the tourism sector (such as hotels) or compromised in their cash flows due to the economic recession (such as wholesalers and franchisees).

The Bank made efforts to detect problems early, enabling it to offer viable solutions to debtors – including refinancing, restructuring or realigning the amount of loans against their collateral in rapidly changing market conditions. Debtors accepted the Bank's recommendations to dispose of assets to reduce their credit exposure and thereby alleviate pressures on their equities. All of these steps were undertaken wisely and supportively by the Bank, making sure that debtors saw them as solutions and not some form of coercion by the Bank. Throughout the difficult conditions due to COVID-19, the Bank made all efforts to reduce the burden of customers, especially those of debtors.

Performance in 2020

In 2020, Corporate Banking was able to book total outstanding credit of Rp30.5 trillion, a decline of 2.55% from Rp31.3 trillion in 2019. The interest income of the Corporate Banking segment amounted to Rp2.8 trillion in 2020, a decline of 6.66% from Rp3.0 trillion in 2019. The decline was mainly due to the decrease in the amount of outstanding credit, aside from the

disebabkan oleh jumlah baki kredit yang lebih rendah, selain juga akibat penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman seiring dengan penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia sebanyak lima kali sepanjang tahun 2020.

downward adjustment of the lending interest rate following the benchmark interest rate of Bank Indonesia that was lowered five times throughout 2020.

Perbankan Korporasi merealisasikan 84% dari sasaran pemberian kreditnya sebesar Rp36,5 triliun untuk tahun yang dilaporkan. Kerja keras unit SAM sepanjang tahun 2020 mampu menjaga kualitas aset pinjaman Perbankan Korporasi. Hingga akhir tahun 2020, sebesar Rp11,17 triliun kredit Perbankan Korporasi telah masuk dalam program restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 sesuai ketentuan OJK.

Corporate Banking realized 84% of its credit disbursement target Rp36.5 trillion for the year under review. The diligent work of the SAM unit throughout 2020 enabled Corporate Banking to maintain its loan asset quality. As of year-end 2020, Rp11.17 trillion of the corporate banking loan had been entered into the credit restructuring program due to the COVID-19 pandemic pursuant to the terms of OJK.

Penyaluran Kredit ke Berbagai Sektor Industri
Credit Disbursement to Various Industry Sectors

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Sektor Ekonomi	2020	2019	Pertumbuhan Growth (%)	Economic Sector
Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	13.970	14.608	-4,37	Real estate, rental business and corporate services
Industri Pengolahan	7.669	7.375	3,99	Manufacturing Industry
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.942	2.435	-20,25	Accommodation and Food & Beverage Supplies
Perdagangan Besar dan Eceran	1.639	1,575	4,08	Wholesale and Retail
Lainnya	5.299	5.276	0,44	Others
Total	**30.519**	**31.269**	**-2,40**	**Total**

Strategi di Tahun 2021 dan Selanjutnya

Memasuki tahun 2021, tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin menguat sejak kuartal empat 2020. Dimulainya program vaksinasi COVID-19 di awal tahun 2021 juga membawa harapan badai pandemi segera berlalu, disertai pulihnya perekonomian nasional. Bank percaya bahwa sektor korporasi bahkan akan menjadi pendorong pemulihan itu sendiri.

Oleh sebab itu, strategi Perbankan Korporasi di tahun 2021 adalah fokus pada sektor industri yang dapat menopang pemulihan perekonomian nasional pasca COVID-19, seperti sektor industri, transportasi dan logistik, dan lain sebagainya, Bank akan menyalurkan kredit baru ke berbagai sektor pendorong ekonomi tersebut, serta mengikuti jejak langkah-*follow the money trail* - ke rantai pasokan mana saja sektor industri tersebut memutarkan uangnya. Bank juga akan turut berperan aktif dalam mendukung perkembangan infrastruktur di Indonesia melalui penyediaan kredit sindikasi bagi proyek-proyek nasional, seperti pembangunan jalan tol, konstruksi dan proyek kelistrikan. Langkah ini akan ditempuh oleh PaninBank dengan memperhatikan *risk appetite* Bank, posisi likuiditas, permodalan serta pemilihan proyek-proyek yang dibiayai secara cermat dan dapat memperkuat bisnis inti Bank.

Strategy in 2021 and Beyond

Entering 2021, signs of economic recovery have strengthened since 4Q 2020. The start of the COVID-19 vaccination program in early 2021 has also given rise to the hope that the worst of the pandemic has passed, with national economic recovery in sight. The Bank believes that the corporate sector will actually be the impetus behind the recovery itself.

With that in mind, the strategy of Corporate Banking in 2021 is to focus on industry sectors that could support the national economic recovery in the post COVID-19 period, such as the manufacturing industry, transportation and logistics and others. The Bank will disburse new loans to these economic-boosting sectors, and 'follow the money trail' as it were along the supply chain that these sectors circulate their money in. In addition to that, the Bank will also participate actively to support infrastructure development in Indonesia by providing syndication loans to national projects, such as toll road development, construction and electrification projects. These steps will be undertaken by PaninBank by carefully considering the Bank's risk appetite, its capital adequacy, and prioritising on projects that are safe and supportive of the Bank's core business.

Strategi kunci lainnya yang dianut oleh segmen usaha Perbankan Korporasi adalah diversifikasi secara sektoral. Lebih dari 50% baki kredit Perbankan Korporasi di tahun 2020 terdiri dari perusahaan dari 10 sektor usaha yaitu *manufaktur, makanan dan minuman, utilitas, perdagangan besar dan eceran,* konstruksi, layanan kemasyarakatan, transportasi dan logistik, pertambangan, pertanian dan layanan kesehatan. Strategi diversifikasi ini akan dipertahankan di tahun 2021 guna melindungi Bank terhadap kemungkinan kejutan yang dialami oleh satu atau dua sektor. Perbankan Korporasi juga fokus terhadap pemeliharaan kualitas aset produktif dengan memantau kelancaran setiap pinjaman yang diberikan, serta bekerja sama dengan para debitur untuk tetap mengupayakan tingkat kelancaran pinjaman masing-masing.

Selain itu, Perbankan Korporasi akan terus berupaya menyediakan solusi keuangan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi, antara lain melakukan *cross-selling* berbagai produk dan layanan finansial seperti *treasury*, *trade finance*, dan *money market*, serta menawarkan layanan *cash management* dan jasa perbankan non-kredit lainnya dari Perbankan Korporasi.

Perbankan Korporasi juga mempersiapkan personilnya untuk transformasi digital yang akan dimulai Bank pada kuartal ketiga tahun 2021 ini.

Another key strategy that will continue to be adopted by the Corporate Banking franchise is sectoral diversification. More than 50% of the Bank's total outstanding corporate loans in 2020 were to companies in 10 business sectors, namely manufacturing, food and beverage, utilities, wholesale and retail trade, construction, public service, transportation and logistics, mining, agriculture and healthcare services. This diversification strategy will continue in 2021 to protect the Bank from the possibility of shock to one or two sectors. Corporate Banking will also focus on maintaining the quality of its productive loan assets by closely monitoring the collectability status of every credit, and cooperating with debtors to keep their respective loans current.

Aside from that, Corporate Banking will continue to strive to provide financial solutions that comprehensively meet the needs of corporate customers, including through the cross-selling of various financial products and services such as treasury, trade finance, and money markets, as well as cash management and other non-lending banking services from Corporate Banking.

Corporate Banking is also preparing its personnel for the digital transformation that the Bank will begin in 3Q 2021.

Institutional Banking & BUMN:

Segmen Usaha yang Kokoh dan Stabil

Institutional and SOE Banking: A Solid and Stable Franchise

Di tengah pandemi COVID-19, segmen usaha Perbankan Institusional & BUMN lebih mengarahkan kegiatannya pada pemantauan portofolio kredit pada debitur institusi/perusahan besar swasta maupun milik negara yang cenderung lebih tahan terhadap tekanan luar, dan berhasil menjaga rasio NPL 0% pada tahun 2020.

Amid the COVID-19 pandemic, Institutional & SOE Banking focused more on monitoring its credit portfolio with large private and state-owned institutions/corporations that tend to be more resilient towards external pressures, and succeeded in keeping its NPL ratio at 0% in 2020.

PaninBank memiliki segmen usaha Perbankan Institusional dan BUMN (PIB) yang tetap kokoh dan stabil di tengah tekanan pandemi COVID-19. Ditunjang oleh debitur yang terdiri dari institusi/perusahan besar swasta maupun milik negara, menjadikan baki kredit segmen usaha ini cenderung mampu bertahan (*resilient*) terhadap tekanan eksternal.

Salah satu ciri utama kredit Institusional dan BUMN adalah rendahnya rasio NPL karena sifat hakiki dari kegiatan usaha yang dibiayai di segmen ini, yaitu pembiayaan modal kerja di berbagai sektor industri mapan seperti *multi-finance*, perkebunan kelapa sawit, konstruksi & pupuk dan pembiayaan proyek infrastruktur jalan tol yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini terbukti dari keberhasilan segmen usaha PIB mencapai rasio NPL 0% pada tahun 2020.

Meskipun demikian, dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh segmen PIB, terutama dari segi menurunnya permintaan kredit secara signfikan, sehingga pemberian kredit baru relatif sangat kecil selama tahun 2020. Hal ini menyebabkan baki kredit PIB menurun dari sekitar Rp24 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp21 triliun per akhir tahun 2020.

The Institutional and SOE Banking franchise of PaninBank has remained solid and stable amid the pressure of the COVID-19 pandemic. Anchored by debtors comprised of large private and state-owned institutions/corporations, the credit assets of this business segment tend to be more resilient towards external pressures.

A mark that stands out in the credit portfolio of Institutional and SOE Banking (ISB) is the low NPL ratio because of the nature of loans and businesses in this segment, mainly working capital loans extended to various established industry sectors such as multi-finance, oil palm plantation, construction and agriculture, as well as project financing to toll road development that is part of the National Strategic Project (NSP). This was underscored in 2020 with the success of the ISB franchise in keeping its NPL ratio at 0%.

However, the impact of COVID-19 had also been felt in the ISB segment, particularly in terms of the weak credit demand – a factor that featured prominently in the relatively small disbursement of new credit by the Bank to this market segment in 2020. This resulted in the decline of total outstanding credit of ISB from approximately Rp24.0 trillion in 2019 to Rp21.0 trillion as at year-end 2020.

Strategi dan Fokus pada Tahun 2020

Strategi dan fokus usaha segmen PIB tidak lepas dari kondisi eksternal yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Akibatnya, PIB lebih mengarahkan kegiatannya pada pemantauan portofolio kredit untuk melihat sejauh mana pandemi COVID-19 akan mempengaruhi kualitas kredit PIB. Dalam hal ini, PIB menjalin komunikasi yang lebih aktif dengan debitur guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi usaha setiap debitur.

Namun terlepas dari strategi maupun fokus usaha yang khusus mengacu pada penanggulangan dampak COVID-19, keberhasilan segmen PIB menjaga kualitas kreditnya juga ditentukan oleh prinsip kehati-hatian yang telah lama dianut oleh PIB dalam menjalankan usahanya selama ini. Dalam menyalurkan kredit, PIB senantiasa fokus jenis usaha yang mampu memberikan pendapatan bunga secara teratur dalam jangka panjang, selain juga pencairan kredit baru yang berulang kali (*recurring new loans*). Sebagai contoh adalah penyaluran kredit kepada perusahaan pembiayaan yang selama ini memang mengambil porsi terbesar dari baki kredit PIB PaninBank.

Strategy and Focus in 2020

The strategy and focus of the ISB franchise in 2020 were largely confined by the external conditions heavily affected by the COVID-19 pandemic. As a result, ISB focused more on monitoring its credit portfolio to ascertain the extent at which the COVID-19 pandemic would effect the credit quality of ISB. To this end, ISB engaged in more active communications with debtors in order to obtain the latest information on the business conditions of the respective debtors.

Notwithstanding the business strategy and focus that have been mainly confined to monitoring the affects of the pandemic, the success of ISB in maintaining the quality of its earning assets speaks volumes as to the prudent and careful approach of ISB that has long been its hallmark over the years. In disbursing its credit, ISB focuses on businesses that can provide a steady stream of interest income over the long term, and those than can generate recurring new loans. An example of this would be the multi-finance institutions that make up the largest share of the credit portfolio of the Bank's ISB franchise.

Kelompok debitur lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang berkecimpung di bidang pembangunan infrastruktur, sektor industri konstruksi, dan pabrik pupuk. Sedangkan di sektor swasta, kredit disalurkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahan seperti perkebunan kelapa sawit, selain perusahaan pembiayaan tersebut di atas.

Selain pemilihan sektor industri secara cermat dan berhati-hati, PIB juga menerapkan strategi diferensiasi, yaitu berupaya memiliki perbedaan (*unique value proposition*) di antara sesama bank di kelas yang sama. Hal ini diwujudkan antara lain dengan menawarkan produk kredit berjangka pendek yang fleksibel untuk debitur korporasi besar, termasuk BUMN, dengan *pricing* yang kompetitif. Selain itu, PaninBank juga memberlakukan proses pengajuan kredit yang cepat, dengan pemberian kepastian yang cepat pula bagi debitur maupun calon debitur.

Kredit untuk debitur PIB mencakup dua jenis kredit, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada umumnya, kredit modal kerja mendominasi baki kredit PIB, namun belakangan ini, kredit investasi tumbuh lebih pesat, didorong oleh program percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Kinerja di Tahun 2020

Realisasi pencapaian baki kredit PIB pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp21,0 triliun yang sebagian besar disalurkan ke dua segmen debitur utama yaitu BUMN Group dan perusahaan pembiayaan Ditinjau dari sasaran tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp25,6 triliun, pencapaian tersebut adalah 82,0% dari sasaran. Tidak tercapainya sasaran tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan kredit selain juga karena kebijakan Bank untuk tidak mengejar penyaluran kredit baru secara agresif di tengah ketidakpastian sehubungan dengan pandemi COVID-19.

Sedangkan untuk sasaran rasio NPL yang ditetapkan sebesar <0,5% pada tahun 2020, Bank berhasil mencapai 100% sasaran dengan rasio NPL nihil.

Adapun perolehan pendapatan bunga dari segmen PIB pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1,83 triliun, menurun sebesar 9,45% dari Rp2,02 triliun pada tahun 2019. Penurunan pendapatan bunga atas pinjaman PIB disebabkan oleh penyesuaian suku bunga pinjaman tehadap tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang mengalami penurunan sebanyak lima kali sepanjang tahun 2020.

Other debtor groups are the State-owned Enterprises (SOE), especially those that are engaged in infrastructure development, the construction industry, and agriculture (fertilizer). Whereas in the private sector, credits are disbursed to meet the working capital needs of long-term businesses such as oil palm plantations, aside from the multi-finance institutions mentioned above.

In addition to carefully selecting viable industry sectors, ISB also adopts a differentiation strategy, striving to have unique value propositions among its peer banks of the same category. This is manifested, among others, by offering short-term credit with flexible terms to large corporate debtors, including SOEs, with highly competitive pricing. In addition, PaninBank also deploys expedient processing on credit applications, with equally prompt responses to existing debtors and potential new ones.

Credits to ISB debtors are of two types, namely working-capital loans and investment loans. Generally, working-capital loans have dominated the ISB credit portfolio. However, of late, investment loans have grown much faster on account of the government's accelerated infrastructure development program.

Performance in 2020

ISB posted total outstanding loans amounting to Rp21.0 trillion as at year-end 2020, mainly loaned out to the SOE Group and multi-finance institutions. In terms of the 2020 target for total outstanding loans that had been set at Rp25.6 billion, the year's achievement accounted for 82.0% of target. The missed target was due to the weak credit demand in the market as well as a direct result of the Bank's policy not to aggressively pursue new credit disbursement amid the uncertainties from the COVID-19 pandemic.

Meanwhile, in the target for NPL ratio that had been set at below 0.5%, in 2020 the Bank achieved 100% of the target with an NPL ratio of nil.

Interest income on loans in the ISB segment amounted to Rp1.83 trillion in 2020, a decline of 9.45% from Rp2.02 trillion in 2019. The decline in interest income on ISB loans was attributed to the downward adjustment in the Bank's lending rate, which had followed behind Bank Indonesia's benchmark interest rate that was reduced five times throughout 2020.

Strategi di Tahun 2021 dan Selanjutnya

Untuk tahun 2021 dan selanjutnya, strategi usaha PIB terutama adalah tetap bersikap hati-hati dan terus memantau serta menjaga kualitas kredit, mengingat bahwa pandemi COVID-19 tidak akan serta merta menghilang sekalipun program vaksinasi telah digulirkan serentak di banyak negara.

PIB akan meningkatkan layanan dan penyaluran kredit kepada debitur PIB yang memiliki kualitas kredit dan catatan pengembalian pinjaman yang baik. Bank juga akan berupaya untuk mengembangkan portofolio kredit kepada BUMN Strategis, mendorong partisipasi dalam pembiayaan sindikasi untuk meraih peluang *project financing* di berbagai Proyek Strategis Nasional secara selektif

Strategy in 2021 and Beyond

In 2021 and beyond, the business strategy of ISB will still revolve around its careful approach, and continue to monitor and maintain the quality of its credit assets, bearing in mind that COVID-19 will not disappear overnight even if countries around the world have simultaneously embarked on a vaccination program.

ISB will increase its service and credit disbursement to debtors that are proven to have excellent credit ratings and repayment records. The Bank will also endeavor to selectively grow its ISB credit portfolio, lending to strategic SOEs and pursuing syndication loans for project financing opportunities in strategic National Development Projects.

Perbankan Internasional:

Semakin Dapat Diandalkan

International Banking: Increasingly Relied Upon

Perbankan Internasional terus berupaya melayani nasabah loyal maupun nasabah baru dengan penuh perhatian, cermat dan tepat waktu, guna menjaga reputasi PaninBank sebagai penyedia jasa pembiayaan perdagangan serta remitansi internasional yang dapat diandalkan.

International Banking will continue to serve both loyal and new customers with its full attention, diligence and promptness, in order to maintain PaninBank's solid reputation as a reliable provider of international remittance and trade finance services.

Perbankan Internasional menyediakan layanan *remittance*, *trade finance* dan produk inovatif untuk menunjang bisnis internasional yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan bank koresponden baik di dalam maupun luar negeri.

Layanan *remittance* melayani transfer dana ke luar negeri yang tersedia dalam 11 mata uang yaitu USD, EUR, GBP, CNY, SGD, HKD, CAD, CHF, JPY, AUD dan NZD. Layanan *remittance* juga menyediakan layanan transfer *multi-currency* dengan lebih dari 120 mata uang dunia (*exotic currencies*) seperti MYR, KRW, THB, INR, PHP, TWD dan lain sebagainya.

Bank memiliki pengalaman lebih dari 49 tahun sebagai bank devisa dengan reputasi sebagai penyedia layanan *remittance* serta *trade finance* yang unggul dan andal.

Layanan *trade finance* PaninBank menyediakan fasilitas penerbitann *letter-of-credits* (LC) dan Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) termasuk amandemennya, *advising* LC dan SKBDN, negosiasi/*refinancing* LC (*sight*/*usance*/UPAS), serta diskontyo wesel ekspor/SKBDN, PaninBank dapat bertindak sebagai *Confirming Bank* bagi LC yang diterbitkan oleh bank devisa yang baru selain juga menyediakan *Stand-by* LC.

International Banking provides remittance, trade finance and innovative products that support international businesses, meeting customer needs and forging close ties with correspondent banks, both at home and abroad.

The Bank's remittance service provides overseas funds transfers in 11 currencies that comprise USD, EUR, GBP, CNY, SGD, HKD, CAD, CHF, JPY, AUD and NZD. Remittance services also provide multi-currency funds transfers with over 120 world currencies (exotic currencies) such as MYR, KRW, THB, INR, PHP, TWD and many others.

The Bank has more than 49 years of experience operating as a licensed foreign exchange bank with a solid reputation for providing reliable and superior remittance and trade finance products and services.

PaninBank's trade finance services issue trade facility documents such as offshore and domestic letters-of-credit (LC) including their amendments, advising LCs, negotiable/refinancing LCs (sight/usance/UPAS), and discounted export/domestic trade bills. The Bank can also act as the Confirming Bank for LCs issued by newly licensed foreign exchange banks, in addition to providing Stand-by LCs of its own.

Strategi dan Fokus di Tahun 2020

Segmen bisnis Perbankan Internasional berupaya mempertahankan volume transaksi *remittance* maupun *trade finance* sepanjang tahun 2020, walau hal ini sulit dicapai di tengah melemahnya sektor perdagangan secara umum baik global maupun domestik akibat dampak pandemi COVID-19.

Untuk itu, Perbankan Internasional melanjutkan serangkaian inisiatif yang telah digulirkan sejak tahun 2019, diantaranya adalah memasarkan produk-produk inovatif yang telah dikembangkan sebelumnya, melakukan kegiatan promosi yang lebih menarik, serta upaya memperluas basis nasabah melalui sinergi dengan segmen bisnis perbankan lainnya di PaninBank.

Terkait dengan sinergi tersebut, Perbankan Internasional bekerja sama semakin erat dengan segmen-segmen bisnis penggerak, yaitu, perbankan korporasi, perbankan komersial dan perbankan ritel, guna memasarkan produk dan jasa remitansi dan pembiayaan perdagangan secara aktif dan berkelanjutan kepada para nasabah masing-masing segmen bisnis tersebut.

Strategy and Focus in 2020

International Banking strove to maintain the transaction volume of its remittance and trade finance services throughout 2020, although this proved difficult to achieve amid the weakening trade sector in general, both globally and domestically, due to the COVID-19 pandemic.

With these conditions, International Banking continued with the initiatives that had been rolled-out since 2019, including the marketing of innovative products that had been developed previously, engaging in more attractive promotional activities, and making efforts to broaden its customer base through increased synergies with the other banking business segments of PaninBank.

With respect to this increased synergy, International Banking worked closely with the Bank's primary business segments, namely the corporate, commercial and retail banking segments, to market the Bank's remittance, trade finance products, and services more actively and continuously to customers of those respective banking segments.

Melengkapi diversifikasi jenis dan ragam pelayanannya, Perbankan Internasional terus menjaga serta mengembangkan jaringan globalnya dengan menjalin hubungan yang aktif dengan bank-bank korespondensi di luar negeri, selain juga menyambut permintaan bank di luar negeri yang ingin menunjuk PaninBank sebagai bank korespondensi mereka di Indonesia.

Complementing the diversity of its products and services, International Banking continuously maintained and developed its global network by actively engaging with correspondent banks throughout the world, in addition to welcoming offshore banks that are interested in appointing PaninBank as their correspondent bank in Indonesia.

Kinerja di Tahun 2020

Kondisi pasar Perbankan Internasional selama tahun 2020 mengalami perlambatan akibat dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan secara global. Namun Perbankan Internasional PaninBank masih mampu menghasilkan kinerja/kontribusi *fee-based income* yang positif, sekalipun menurun bila dibandingkan dengan hasil setahun sebelumnya.

Performance in 2020

Market conditions throughout 2020 were not conducive for International Banking due to the COVID-19 pandemic, the effects of which had been felt globally. Nonetheless, the International Banking franchise of PaninBank was still able to perform and contribute positively to earning fee-based income for the Bank, albeit in lesser amounts than the previous year.

Dengan melambatnya perdagangan internasional akibat COVID-19, pendapatan dari transaksi ekspor-impor menurun sebesar 9,9%, sedangkan pendapatan atas layanan *remittance* menurun lebih tajam akibat turunnya *cross-border transactions* yang juga sangat terdampak oleh COVID-19. Namun demikian, Perbankan Internasional berhasil mencatatkan pendapatan *fee-based* sebesar Rp62,9 miliar dari kedua layanannya tersebut.

With the slowing of international trade due to COVID-19, income from export-import and other trade-related transactions declined by 9.9%, whereas income from remittance services declined even more steeply as a result of decreasing cross-border transactions that were also significantly adversely affected by COVID-19. Nevertheless, International Banking was able to post fee-based income totaling Rp62.9 billion from its two services.

Bank menganggap penurunan volume transaski remitansi maupun pembiayaan perdagangan ini bukan merupakan suatu tren, melainkan suatu anomali yang disebabkan oleh pandemi global COVID-19. Kegiatan Perbankan Internasional akan kembali meningkat seiring dengan perkiraan pulihnya kegiatan sektor perdagangan dunia pada tahun 2021 dan seterusnya.

The Bank does not consider the declining volume of transaction in remittance services as an ongoing trend, rather as an anomaly brought on by the global COVID-19 pandemic. International banking activities will resume its normal pace with the expected recovery of the global trade sector in 2021 and beyond.

Strategi di Tahun 2021 dan Selanjutnya

Perbankan Internasional akan terus berupaya melayani nasabah loyal maupun nasabah baru dengan penuh perhatian, cermat dan tepat waktu, guna menjaga reputasi Bank sebagai penyedia jasa pembiayaan perdagangan serta remitansi internasional yang dapat diandalkan.

Strategy in the Year 2021 and Beyond

International Banking will continue to serve both loyal and new customers with its full attention, diligence and promptness, in order to maintain the Bank's solid reputation as a reliable provider of international remittance and trade finance services.

Strategi ini akan ditunjang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia di segmen Perbankan Internasional secara terus menerus, yang antara lain dilakukan bekerja sama dengan bank korespondensi di luar negeri (Nostro), dalam lingkup pemberian pelatihan maupun pengkinian (*update*) terkait perkembangan baru di ranah transaksi keuangan internasional.

Selain itu, dalam jangka panjang, bersama segmen-segmen perbankan penggerak lainnya, Perbankan Internasional akan mengkaji kemungkinan mengembangkan produk maupun layanan terpadu, misalnya yang menggabungkan kredit modal kerja dengan layanan *cash management* dan pembiayaan perdagangan sebagai suatu layanan *seamless* dan *end-to-end* dari PaninBank.

This strategy is supported by continuously enhancing the quality of human resources in the International Banking business segment, which among others include the Bank's cooperation with overseas correspondent banks (Nostro) in the scope of personnel training and updating of new developments in international financial transactions.

In addition, over the longer term, together with the Bank's primary banking business segments, International Banking will explore the possibilities in developing integrated banking products and services, such as when working capital loans are combined with cash management and trade finance services to provide a seamless and end-to-end banking service from PaninBank.

Tresuri: Jaring Pengaman Bank di Saat Krisis

Treasury: A Safety Net in Times of Crisis

Pada tahun 2020, Tresuri membukukan total pendapatan non bunga sebesar Rp1.997,3 miliar, meningkat signifikan dari Rp231,7 di tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh fokus usaha yang kuat dan penerapan strategi yang jitu pada kegiatan transaksi pasar modal sepanjang tahun tersebut.

In 2020, Treasury booked Rp1,997.3 billion in Non-Interest Income, a significant increase from Rp231.7 billion the previous year, on the strength of a sharp business focus and accurate strategy applied to capital market transaction activities during the year.

Tresuri PaninBank memiliki tiga fungsi utama, yaitu (i) mengelola tingkat likuiditas Bank, (ii) melayani nasabah dengan produk dan jasa tresuri dan (iii) melakukan transaksi tresuri untuk keuntungan Bank (*proprietary trading*).

Sebagai salah satu Bank yang berperan aktif dalam mendukung pasar uang nasional, Tresuri PaninBank aktif dalam melakukan penerbitan dan memasarkan produk-produk pasar modal, serta selalu siap mendukung pemasaran Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Dalam menjaga tingkat likuiditas Bank, Tresuri memiliki peranan penting dalam memantau risiko likuiditas, risiko pasar, risiko tingkat suku bunga, serta dampaknya terhadap posisi keuangan Bank secara keseluruhan. Berdasarkan pemantauan ini, Tresuri akan melakukan transaksi pasar guna mengamankan posisi keuangan Bank dari risiko kerugian, penurunan nilai, ataupun dari paparan risiko (*open position*) yang berlebihan.

Melalui Tresuri, Bank melayani nasabah dan mitra dalam memenuhi kebutuhan perbankan mereka. Produk Tresuri yang ditawarkan antara lain adalah transaksi valuta asing dan transaksi jual beli surat berharga (obligasi) berpenghasilan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Selain itu, Tresuri juga melayani kebutuhan nasabah akan instrumen lindung nilai guna menjaga nilai aset maupun posisi keuangan nasabah dari risiko perubahan nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga.

The Treasury business segment of PaninBank has three main functions: (i) to manage the Bank's liquidity, (ii) provide treasury products and services to customers, and (iii) undertake proprietary trading for the Bank's interest.

As a bank that plays an active role in supporting Indonesia's money market, PaninBank's Treasury is active in issuing and marketing financial securities, and is always on hand to market government-issued securities.

In managing the Bank's liquidity, Treasury plays an important role in monitoring liquidity risk, market risk, interest rate risk, and their potential impact on the financial position of the Bank as a whole. Based on this monitoring, Treasury will undertake market transactions to safeguard the Bank's financial position from exposures to risk of loss, asset impairment, or excessive open positions.

Through Treasury, the Bank serves its customers and business partners in their market transaction needs. The treasury products that are on offer include transactions on foreign exchange and the trading of marketable securities such as the fixed-income bonds issued by the government or corporations. In addition, Treasury also serves the needs of customers for hedging instruments to safeguard the value of their assets or their financial position from currency-exchange market risk or interest rate risk.

Selanjutnya dalam hal fungsinya yang ketiga di atas, Tresuri berperan aktif melakukan transaksi di pasar modal untuk akun rugi-laba Bank sendiri. Fungsi ini telah lama menjadi salah satu *profit-center* Bank yang dapat diandalkan karena didukung oleh penerapan transaksi pasar yang cermat, pemahaman pasar yang baik, terkendali dan mengacu pada rambu-rambu pembatasan risiko atau *risk appetite* Bank yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, di saat sektor perbankan secara umum mengalami penurunan pendapatan bunga atas pinjaman secara drastis akibat pandemi COVID-19, Tresuri menjalankan fungsi *proprietary trading* dengan sangat baik, dan mampu mempertahankan tradisi PaninBank dalam meraih laba yang berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Struktur Organisasi Tresuri. Dalam menjalankan fungsinya, Tresuri terbagi dalam tiga divisi usaha, yaitu Divisi Likuiditas (DLI), Divisi Capital Market (DCM) dan Divisi Currency Trading and Commercial (DCC).

DLI mengelola likuiditas Bank sekaligus menjadi *profit center* bagi Bank. Tugas penting DLI adalah mengelola Giro Wajib Minimum (GWM) Bank pada Bank Indonesia senantiasa dalam kondisi optimal, selain juga memastikan rasio-rasio likuiditas Bank memenuhi ketentuan yang berlaku setiap saat. Sedangkan sebagai pengelola likuiditas Bank, DLI memanfaatkan peminjaman atau penempatan dana antar bank dan di Bank Indonesia, transaksi repo surat berharga, serta melakukan penyesuaian suku bunga deposito berjangka.

Pada bagian DCM, Tresuri aktif melakukan transaksi pasar modal, membeli dan menjual surat berharga negara; korporasi (institusional maupun sukuk) di pasar sekunder untuk kepentingan nasabah atau Bank sendiri. Transaksi

In its third main function, Treasury actively trades marketable securities on the capital market for its own trading account. This function has long been the mainstay of Treasury as a profit-center of the Bank that is relied upon due to its judicious trading transactions, in-depth understanding of the market, and the disciplined approach to trading within limits set by the Bank's risk appetite at all times. In 2020, at a time when the interest income of the banking sector in general was declining due to COVID-19, Treasury carried out its proprietary trading extremely well and enabled PaninBank to maintain its tradition of achieving sustainable profit from one year to another.

Organisational Structure of Treasury. In carrying out its functions, Treasury is divided into three divisions, namely the Liquidity Division (DLI), Capital Market Division (DCM) and Currency Trading Division (DCC).

DLI manages Bank liquidity while also serving as a profit-center of the Bank. A key responsibility of DLI is to manage and ensure that the Bank's Minimum Reserves Requirement with Bank Indonesia is at an optimum level, and that the Bank meets all statutory liquidity ratios at all times. While in managing the Bank's liquidity, DLI relies on interbank lending and funding, placement with Bank Indonesia, securities trading on the repo market, and adjustments in the interest rate of term deposits.

In the DCM section, Treasury actively trades on the capital market, buying and selling marketable securities issued by the government; corporations (institutions, and Islamic (sukuk) entities, both on behalf of the customer and for the Bank's own

yang dilakukan atas nama nasabah memberikan *fee-income* berupa pendapatan komisi bagi Bank, sedangkan transaksi atas nama Bank sendiri berpeluang memberikan capital gain bagi Bank. Sedemikian aktifnya peran DCM dalam transaksi surat berharga di pasar modal, PaninBank dipandang sebagai salah satu *market maker* yang bisa mendorong perputaran volume transaksi di pasar modal obligasi itu sendiri. Selain itu, PaninBank juga dikenal sebagai *one-stop shopping outlet* yang menawarkan berbagai ragam produk investasi di samping penawaran selisih (*spread*) antara harga jual dan harga beli yang sangat kompetitif.

trading account. Transactions on behalf of customers derive income in the form of commission fees for the Bank, whereas trading for its own account provides the opportunity of capital gains for the Bank. DCM's transactions of marketable securities on the capital market is so active that PaninBank is considered one of the market makers that can generate the volume of trade in the bonds market. PaninBank is also known for its one-stop shopping outlet that offers a variety of investment products, in addition to its extremely competitive spread offering between the selling and buying prices.

DCC sebagai unit usaha Bank tidak berhenti mengikuti pergerakan pasar valas dunia (*global currency market*) yang bergulir terus dari satu belahan dunia ke belahan lainnya. Aktivitas transaksi valuta asing yang dilakukan DCC terutama fokus pada produk konvensional seperti yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Transaksi tersebut antara lain transaksi *spot* dan produk lindung nilai seperti *forward* dan *swap*.

DCC as the business unit of the Bank never sleeps as it monitors the global currency markets from one region of the world to another. The foreign exchange transactions that are carried out by DCC mainly focus on conventional currency exchange products that have been provided over the years. This includes, among others, spot transactions and hedging products such as forward and swap transactions.

DCC melakukan kerja sama dengan Perbankan Institusional dan BUMN untuk memenuhi kebutuhan transaksi valas Badan Usaha Milik Negara khususnya, dengan Perbankan Korporasi untuk merangkul nasabah dari dunia usaha khususnya para eksportir-importir besar, dan dengan Perbankan Komersial untuk melayani nasabah segmen menengah termasuk para pemilik dana perorangan (*high net-worth individuals*) yang memiliki kebutuhan transaksi valas. DCC juga menjalin kerja sama yang erat dengan Perbankan Internasional yang terus mengembangkan jaringan maupun cakupan transaksi valas Bank.

DCC cooperates with Institutional and SOE Banking to meet the needs for foreign-currency exchange of the SOEs in particular, with Corporate Banking to appeal to corporate customers mainly major exporters and importers, and with Commercial Banking to serve middle-segment customers including high net-worth individuals who may have a need for foreign-exchange transactions. DCC also forges close working ties with International Banking, which continues to broaden the network and scope of PaninBank's foreign currency transaction services.

Melalui ketiga divisi ini, Tresuri sejak lama menjadi salah satu kegiatan usaha PaninBank yang paling aktif, dinamis serta senantiasa berpacu menjadi yang terdepan dalam penyediaan jasa transaksi pasar uang dan pasar modal kelas dunia di Indonesia.

Through these three divisions, Treasury has long served as one the most active and dynamic business units of PaninBank, constantly driven to be at the forefront in providing money-market and capital-market products and services of world-class standards in Indonesia.

Strategi dan Fokus 2020

Ditengah perlambatan perekonomian dunia akibat dari perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat dan lain sebagainya, Tresuri menghadapi tantangan yang jauh lebih besar pada tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19 yang praktis melumpuhkan perekonomian dunia. Tresuri terus berupaya mengerahkan segala daya upaya guna (i) mengamankan posisi keuangan Bank, (ii) memaksimalkan keuntungan Bank dari transaksi Tresuri, dan (iii) terus mengupayakan peningkatan *fee-income* dari layanan Tresuri kepada nasabah.

Strategy and Focus in 2020

Amid the slowing global economy due to the trade war between China and the USA and other factors, Treasury had faced an even bigger challenge in 2020 from the COVID-19 pandemic that practically crippled world economy. Treasury continued with its all out efforts to (i) safeguard the liquidity of the Bank, (ii) maximize the profitability of the Bank through Treasury transactions, and (iii) continue to push to increase fee-income from Treasury services to customers.

Atas ketiga fokus tersebut, Bank terus meningkatkan kapasitas Tresuri yang telah dibangun, di antaranya adalah kapasitas dari segi sumber daya manusia yang telah menerima pelatihan pengembangan produk-produk Tresuri baru seperti *Domestic Non Delivery Forward, Cross Currency*

With those three focal points, the Bank continued to strengthen the capacity of Treasury that it had developed, including that of Treasury personnel who underwent training in new treasury products such as Domestic Non Delivery Forward, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Options Contract and

Swap, Interest Rate Swap, Options Contract dan berbagai produk *structured derivatives* yang khusus dirancang untuk memenuni kebutuhan tertentu dari para nasabah.

Dalam hal ini, kapasitas SDM Tresuri juga telah ditingkatkan dengan penambahan jumlah *dealer* untuk menangani transaksi nasabah, pelaksanaan program sertifikasi bagi segenap pelaku Tresuri, serta penguatan aspek pemasaran jasa Tresuri di semua lini usaha Bank, termasuk di setiap kantor cabang utama Bank di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Dari segi *proprietary trading*, Tresuri mengandalkan pengalamannya yang kuat di bidang ini selama puluhan tahun untuk membaca arah pergerakan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga pasar surat berharga, untuk kemudian menentukan saat yang menguntungkan membeli dan menjual surat-surat berharga yang tersedia untuk diperdagangkan. Fokus dan strategi yang jitu yang diterapkan pada kegiatan transaksi pasar modal sepanjang tahun 2020 berhasil menopang pencapain laba usaha Bank tahun 2020.

Pencapaian Tahun 2020

Pada tahun 2020, selain pendapatan bunga bersih, Tresuri berhasil menggalang total pendapatan non bunga sebesar Rp1.997,3 miliar, meningkat secara signifikan dari pencapaian tahun 2019 sebesar Rp231,7 miliar. Jumlah pencapaian tahun 2020 tersebut terdiri dari pendapatan *fee income* atas layanan Tresuri kepada nasabah sebesar Rp213,1 miliar dan *capital gain* atas transaksi pasar modal sebesar Rp1.784,2 miliar.

Peningkatan hasil usaha Tresuri adalah berkat fokus usaha yang kuat yang disertai penerapan strategi usaha secara dislipin dan konsisten, dimana keduanya merupakan landasan yang telah dianut lama oleh segmen usaha Tresuri PaninBank.

Strategi di Tahun 2021 dan Selanjutnya

Menanggapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, sekalipun diharapkan membaik dengan dimulainya program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah sejak awal 2021, Tresuri akan memanfaatkan momentum keberhasilannya di tahun 2020 untuk lebih meningkatkan usahanya di tahun 2021.

Tresuri PaninBank juga akan terus berupaya untuk mengembangkan produk dan perluasan basis nasabah, salah satunya adalah dengan meningkatkan kemitraan dengan BUMN, bank-bank pembangunan daerah, eksportir dan importir, perusahaan sekuritas, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kerja sama itu akan diarahkan untuk melakukan penempatan dan melakukan pinjaman antarbank, *money market loan*, transaksi valas, obligasi dan derivatif, dan produk lindung nilai. Untuk itu, Bank juga terus mengupayakan peningkatan sumber daya manusia Tresuri secara memadai untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.

several structured derivatives products that are customized for customer needs.

In that same regard, the HR capacity of Treasury had also been enhanced by increasing the number of dealers to manage customer transactions, carrying out the certification program for all dealers of Treasury, and strengthening the marketing of treasury products in all Bank business lines, including in every main branch office in key cities across Indonesia.

In terms of proprietary trading, Treasury capitalized on its decades of experience to analyse the movements of interest rates, currency exchange rates, and securities market prices to determine the opportune moment when to buy or sell marketable securities available for trade. A sharp focus and strategy applied to capital market transactions throughout the year that succeeded to buttress the Bank's profitability in 2020.

Performance in 2020

In 2020, in addition to net interest income, the Treasury managed to post total non-interest income amounting to Rp1,997.3 billion, a significant increase from Rp231.7 billion in 2019. This non-interest income comprised of fee income earned on Treasury services to customers amounting to Rp213.1 billion, and gains on capital market transactions amounting to Rp1,784.2 billion.

The increased performance of Treasury was attributed to a strong business focus, coupled with a strategy of disciplined and consistent execution – the two main foundations that have long been relied upon by PaninBank's Treasury business segment.

Strategy in 2021 and Beyond

In response to the COVID-19 pandemic that has continued, although it is expected to subside with the government's vaccination program that began in early 2021, Treasury will build on its momentum of success in 2020 to increase its performance in 2021.

Also, PaninBank's Treasury will continue to strive to expand its product lines and customer base, one of which will be to strengthen its partnership with SOEs, regional development banks, exporters and importers, and insurance companies. These partnerships will focus on increasing funding, interbank lending, money market loans, foreign exchange transactions, bonds and derivatives transactions, and hedging products. To that end, the Bank will also enhance the human resources of Treasury adequately to signal a more promising future.

Entitas Anak, Asosiasi, dan Instrumen Keuangan

Subsidiary, Association, and Financial Instruments

PaninBank memiliki penyertaan di beberapa perusahaan yang menyebar dalam berbagai sektor layanan jasa keuangan, seperti perbankan, pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan asuransi. Berdasarkan klasifikasi Pedoman Standar Akuntansi, per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 2 (dua) entitas anak, 2 (dua) entitas asosiasi, dan 4 (empat) instrumen keuangan. Strategi pengembangan entitas anak dan entitas asosiasi diarahkan untuk membangun kekuatan kompetitif yang prospektif demi menciptakan sinergi yang positif bagi kinerja Perseroan secara konsolidasi.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan tercatat memiliki saham pada 2 (dua) entitas anak, yaitu PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebesar 51,49% dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar 69,93%. Sementara, 2 (dua) entitas asosiasi yang dimiliki adalah PT Panin Sekuritas Tbk sebesar 29,00% dan PT Verena Multi Finance Tbk sebesar 25,06%.

Selain entitas anak dan entitas asosiasi tersebut, Perseroan juga memiliki kepemilikan Instrumen Keuangan pada 4 (empat) perusahaan, yaitu PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebesar 7,76%, PT FAC Sekuritas Indonesia 2,50%, PT Sarana Kal-Sel Ventura 1,04%, dan PT Bank ANZ Indonesia 1,00%.

PaninBank has investments in several companies with businesses in the financial services sector, such as banking, consumer financing, finance leases, and insurance. Based on the Accounting Standards classification, as of December 31, 2020, the Company has 2 (two) subsidiaries, 2 (two) associate entities, and 4 (four) financial instruments. The strategy for the development of subsidiaries and associate entities is directed to build prospective competitive strengths in order to create positive synergies for the Company's consolidated performance.

By the end of 2020, the Company is recorded as having shares ownership in 2 (two) subsidiaries, namely PT Clipan Finance Indonesia Tbk of 51.49%, and PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk of 69.93%. Meanwhile, 2 (two) associated entities are PT Panin Sekuritas Tbk of 29.00% and PT Verena Multi Finance Tbk of 25.06%.

In addition to subsidiaries and associated entities, the Company have financial instruments in 4 (four) companies, namely PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk of 7.76%, PT FAC Sekuritas Indonesia of 2.50%, PT Sarana Kal-Sel Ventura of 1.04%, and PT Bank ANZ Indonesia of 1.00%.

Struktur Kelompok Usaha PaninBank
PaninBank Business Group Structure

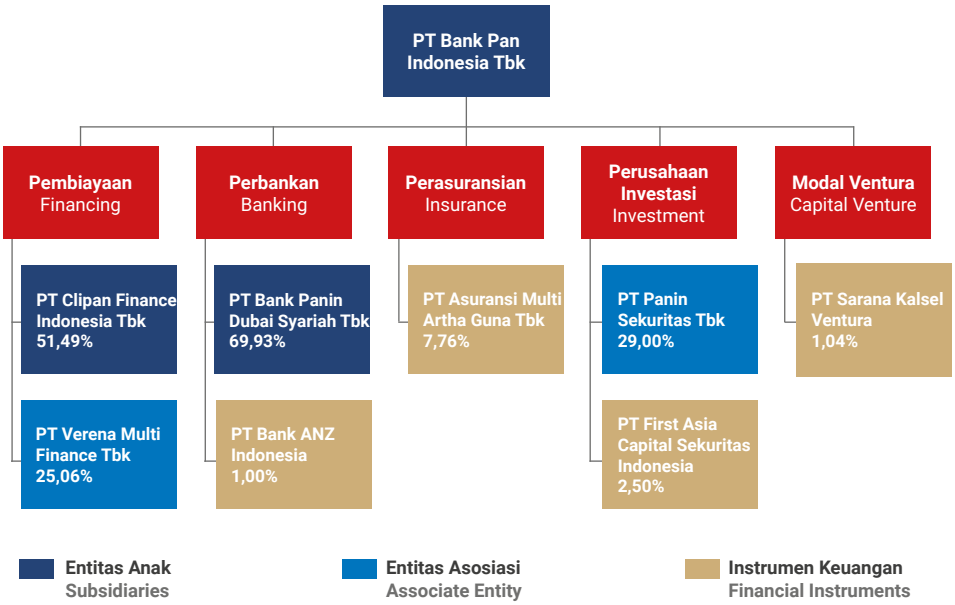

Kelompok Usaha PaninBank
PaninBank Business Group

Entitas Entity	Status Penyertaan Status of Investment	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Penyertaan Year of Inclusion	Penyertaan Investment			Status Operasi Opeation Status	Alamat Address
				Nilai Modal Capital Value (Rp juta | Rp million)	Jumlah Saham Number of Shares (lembar | share)	Porsi Saham Share (%)		
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Entitas Anak Subsidiaries	Perusahaan Pembiayaan Financing	1982	708.361	2.051.421.264	51,49%	Aktif Active	Wisma Slipi Lantai 6 Jl. Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Entitas Anak Subsidiaries	Perbankan Banking	2007	2.707.625	27.142.027.033	69,93%	Aktif Active	Gedung Panin Life Center Lantai 3 Jl. Letjen S. Parman Kav. 91 Slipi, Jakarta Barat 11420
PT Verena Multi Finance Tbk	Entitas Asosiasi Associate Entity	Perusahaan Pembiayaan Financing	2003	154.715	1.425.482.304	25,06%	Aktif Active	Gedung PaninBank Lantai 3 Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120
PT Panin Sekuritas Tbk	Entitas Asosiasi Associate Entity	Perusahaan Investasi Investment	1989	26.560	208.800.000	29,00%	Aktif Active	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Suite 1705 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Instrumen Keuangan Financial Instrument	Perasuransian Insurance	1980	87.688	388.000.000	7,76%	Aktif Active	The City Center Batavia - Tower One Lt. 17 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
PT FAC Sekuritas Indonesia	Instrumen Keuangan Financial Instrument	Perusahaan Investasi Investment	1989	750	750.150	2,50%	Aktif Active	Panin Bank Center Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10270
PT Sarana Kal-Sel Ventura	Instrumen Keuangan Financial Instrument	Perusahaan Modal Ventura Capital Venture	1997	208	207.861	1,04%	Aktif Active	Jl. Pramuka No. 12A, Banjarmasin
PT Bank ANZ Indonesia	Instrumen Keuangan Financial Instrument	Perbankan Banking	1990	16.500	16.500	1,00%	Aktif Active	ANZ Tower Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A, Jakarta 10220

PROFIL DAN KINERJA ENTITAS ANAK

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Alamat
Wisma Slipi Lantai 6
Jl. Letjen S Parman Kav 12, Jakarta Barat 11480
Tel. : (021) 5308005
Fax. : (021) 5308026, 5308027
E-mail : corporate_secretary@clipan.co.id
Website : www.clipan.co.id

Profil Perusahaan

PT Clipan Finance Indonesia Tbk berdiri berdasarkan Akta No. 47 pada 15 Januari 1982, yang dibuat di hadapan Ny. Kartini Muljadi, S.H., seorang notaris di Jakarta, dengan nama PT Clipan Leasing Corporation. Akta tersebut kemudian diubah melalui Akta No. 363 tanggal 29 Juni 1982 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-396.HT.01.01.Th.82 tanggal 2 Agustus 1982. Selain itu, akta pendirian tersebut telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No. 2771 dan 2772 pada 10 Agustus 1982, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 79 tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan 1189.

PROFILE AND PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Address
Wisma Slipi 6th Floor
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat 11480
Tel. : (021) 5308005
Fax. : (021) 5308026, 5308027
E-mail : corporate_secretary@clipan.co.id
Website : www.clipan.co.id

Company Profile

The establishment of PT Clipan Finance Indonesia Tbk is pursuant to Deed No. 47 on January 15, 1982, made before Kartini Muljadi, S.H., a notary public in Jakarta, under the name of PT Clipan Leasing Corporation. The deed was later amended by Deed No. 363 dated June 29, 1982, approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-396.HT.01.01.Th.82 dated August 2, 1982. In addition, the deed of establishment of the Company was registered to the Office of the Registrar of the Jakarta District Court under No. 2771 and 2772 on August 10, 1982 as well as was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 79 dated October 1, 1982, Additional 1189.

Selanjutnya, nama Perusahaan mengalami perubahan menjadi PT Clipan Finance Indonesia berdasarkan Akta Nomor 56 tanggal 17 Mei 1990, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.3418.HT.01.04.TH.90 tanggal 5 Juni 1990. Seiring perubahan menjadi perusahaan terbuka, Perusahaan kembali berganti nama menjadi PT Clipan Finance Indonesia Tbk melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 30 Agustus 1996.

Hereinafter, the Company's name was changed into PT Clipan Finance Indonesia based on Deed No. 56 dated May 17, 1990, which was ratified by Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2.3418.HT.01.04.TH.90 dated June 5, 1990. As it changed to become a publicly company, the Company was renamed to PT Clipan Finance Indonesia Tbk through the resolutions of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 30, 1996.

PaninBank mengambil alih kepemilikan mayoritas dari Credit Lyonnais (Prancis) yang sebelumnya merupakan pemegang saham mayoritas pada awal pendirian, melalui mekanisme penawaran umum perdana pada tahun 1997. Dengan demikian, sebanyak 51,49% saham Perusahaan dimiliki PaninBank sementara sisanya dimiliki oleh investor dan masyarakat.

PaninBank took over the majority of ownership from Credit Lyonnais (France) as the majority shareholder at the beginning of the Company's establishment in Clipan's initial public offering in 1997. Hence, 51.49% of the Company's shares are owned by PaninBank and the remaining of 48.51% owned by investors and the public.

Anggaran dasar Clipan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta No. 12 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan ketentuan anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang 'Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan', Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang 'Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka' dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang 'Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik'. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037457.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019.

The Company's Articles of Association have undergone several changes, including Deed No. 12 dated June 19, 2019 which made before Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., a notary in Jakarta, in order to amend the provisions of the Company's articles of association in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 29/POJK.05/2014 concerning "Business Conduct of Financing Companies", OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning "Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies" and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning "Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies". Amendment to such Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0037457.AH.01.02 of 2019 dated June 19, 2019.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Clipan meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi. Clipan memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1402/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of Clipan's main activity includes investment financing, working capital financing, multipurpose financing, and operating leases. Clipan obtained a financial institution business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree No. 1402/KMK.013/1990 on November 3, 1990.

Clipan berkedudukan di Jakarta dengan 45 kantor cabang dan 75 kantor pemasaran. Rata-rata jumlah karyawannya pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 3.010 karyawan dan 3.288 karyawan.

Clipan is domiciled in Jakarta with 45 branch offices and 75 marketing offices. The average number of employees in 2020 and 2019 was 3,010 employees and 3,288 employees, respectively.

Visi

Visi PT Clipan Finance Indonesia Tbk adalah menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pertumbuhan industri pembiayaan nasional.

Vision

The vision of PT Clipan Finance Indonesia Tbk is to become a leading finance company that promotes added value for stakeholders and plays an active role in the growth of the national finance industry.

Misi

Misi PT Clipan Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang andal dan teknologi terkini.
2. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
3. Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mission

The mission of PT Clipan Finance Indonesia Tbk are as follows:

1. Providing innovative financial products and services supported by reliable human resources and the latest technology.
2. Maintaining and improving sound and sustainable financial performance.
3. Running the company in accordance with the principles of good corporate governance.

Komposisi Pemegang Saham

Hingga tanggal 31 Desember 2020, komposisi pemegang saham PT Clipan Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Shareholder Composition

As of December 31, 2020, shareholders composition of PT Clipan Finance Indonesia Tbk, as follows:

Uraian	Nilai Nominal per Saham Rp250 Value per Share Rp250			Description
	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nominal Nominal Value (Rp)	Persentase Percentage (%)	
Modal Dasar	10.412.000.000	2.603.000.000.000		Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.984.520.457	996.130.114.250		Issued and Fully Paid-in Capital
Pemegang Saham:				Shareholders
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.051.431.264	512.857.816.000	51,49	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk
2. Jahja Anwar (Direktur)	60.000	15.000.000	0,00	2. Jahja Anwar (Director)
3. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD	327.759.425	81.939.856.250	8,23	3. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD
4. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.605.269.768	401.317.442.000	40,28	4. Public (each below 5%)
Jumlah	3.984.520.457	996.130.114.250	100,00	Total
Saham Dalam Portepel	6.427.479.543	1.606.869.885.750		Shares in Porfolio

Susunan Pengurus Perusahaan

Susunan pengurus PT Clipan Finance Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's Management Structure

The management of PT Clipan Finance Indonesia Tbk as of December 31, 2020, as follows:

Dewan Komisaris	Nama | Name	Board of Commissioners
Komisaris Utama	Roosniati Salihin *)	President Commissioner
Komisaris	Mu'min Ali Gunawan	Commissioner
Komisaris Independen	Veronika Lindawati **)	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Lukman Abdullah	Independent Commissioner
Direksi	**Nama | Name**	**Board of Directors**
Direktur Utama	Gita Puspa Kirana Darmawan	President Director
Direktur	Jahja Anwar	Director
Direktur	Engelbert Rorong JR	Director
Direktur	Yimmy Weddianto	Director
Komite Audit	**Nama | Name**	**Audit Committee**
Ketua	Lukman Abdullah	Chairman
Anggota	Sahat Maruli Purba	Member
Anggota	Priskila Gabrielia Ciahaya	Member

*) Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK).

**) Pada tanggal 8 Maret 2021, Ibu Veronika Lindawati efektif mengundurkan diri dari posisi Komisaris Independen, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Anggota Komite Pemantau Resiko PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Pengunduran diri tersebut akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2021.
On March 8, 2021, Mrs. Veronika Lindawati effectively resigned from the position of Independent Commissioner, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, and Member of Risk Monitoring Committee of PT Clipan Finance Indonesia Tbk. The resignation will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2021.

Kinerja Clipan Finance
Clipan Finance Performance

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Aset	10.917	12.117	11.077	-9,90%	9,39%	Assets
Liabilitas	6.172	7.412	6.730	-16,72%	10,13%	Liabilities
Ekuitas	4.745	4.706	4.347	0,84%	8,25%	Equities
Pendapatan Usaha	1.848	2.165	1.934	-14,63%	11,93%	Operational Incomes
Beban Usaha	1.787	1.678	1.522	6,52%	10,28%	Operational Expenses
Laba Sebelum Pajak	61	487	412	-87,56%	18,04%	Profit before Tax
Laba Setelah Pajak	47	362	305	-87,12%	18,50%	Net Profit after tax
Laba Per Saham (Rp penuh)	11,7	90,8	76,6	-87,12%	18,50%	Earning per share (in fully Rp amount)
Rasio Keuangan:						**Financial Ratios:**
Tingkat Pengembalian Aset	0,54%	4,08%	3,81%			Return on Asset (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas	0,98%	7,98%	7,28%			Return on Equity (ROE)
Rasio Lancar	154,61%	220,96%	213,41%			Current Ratio

Aset
Aset PT Clipan Finance Tbk (selanjutnya disebut Clipan) tercatat turun 9,90% pada tahun 2020, yaitu dari Rp12.117 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp10.917 miliar. Realisasi tersebut setara dengan 107,35% dari proyeksi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Penurunan total aset terutama disebabkan oleh turunnya Piutang Sewa Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan Konsumen.

Piutang Sewa Pembiayaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp457 miliar atau turun sebesar 40,60% dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp769 miliar, yang disebabkan produksi untuk Kontrak Sewa Pembiayaan dikategorikan untuk pembiayaan Mesin, Kapal, dan *Heavy Equipment.* Saat ini potensi pasar mengalami penurunan serta karena adanya pelunasan kontrak atau pelunasan dipercepat atas kontrak-kontrak Sewa Guna Usaha.

Piutang Pembiayaan Konsumen turun 25,77% atau Rp2.583 miliar sehingga dibukukan sebesar Rp7.439 miliar pada akhir 2020. Penurunan ini karena berkurangnya produksi baru dan adanya pelunasan kontrak atau pelunasan dipercepat. Pada Tahun 2020 juga terdapat Deposito Berjangka sebesar Rp600 miliar.

Assets
Total assets of PT Clipan Finance Tbk (hereinafter referred to as Clipan) decreased by 9.90% from Rp12,117 billion in 2019 to Rp10,917 billion in 2020. Such realization was equal to 107.35% of the target set by the Company. The decrease in total assets was driven by a decrease in Finance Lease Receivables and Consumer Financing Receivables.

Finance Lease Receivables in 2020 were recorded at Rp457 billion or decreased by 40.60% from last year that were recorded at Rp769 billion, due mainly to a decrease in the production of Finance Lease Contracts categorized for the financing of Machinery, Ships and Heavy Equipment, for which the current market potential has decreased, as well as due to contract settlement or early settlement of lease contracts.

Consumer Financing Receivables decreased by 25.77% or Rp2,583 billion to Rp7,439 billion at the end of 2020. The decrease occurred due to reduced new production and the existence of contract settlement or accelerated settlement. In 2020 there was also a Time Deposit placement of Rp600 billion.

Pembiayaan Clipan
Clipan Financing

(Rp miliar | Rp billion)

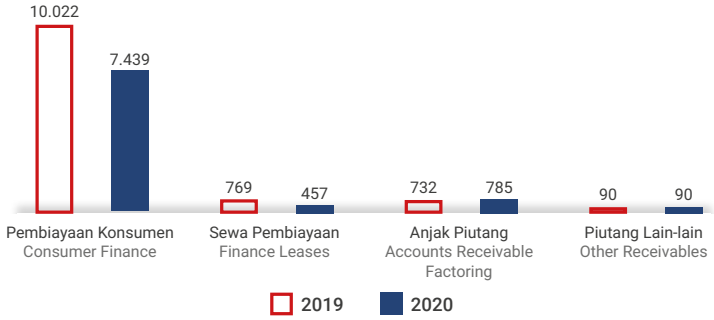

Liabilitas

Per 31 Desember 2020, posisi liabilitas Clipan mengalami penurunan 16,72% sehingga tercatat sebesar Rp6.172 miliar dari Rp7.412 miliar pada tahun sebelumnya. Hal itu terutama didorong oleh penurunan utang bank sebesar 21,44%, yaitu dari Rp4.956 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.894 miliar, yang dikarenakan pembayaran angsuran utang bank lebih banyak dibandingkan pencairan. Utang lain-lain juga turun sebesar 43,90% menjadi Rp164 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp293 miliar, yang disebabkan penurunan atas *supplier payable*.

Liabilities

As of December 31, 2020, Clipan's liability decreased by 16.72% so that it was recorded at Rp6,172 billion from Rp7,412 billion in previous year. This was mainly driven by a 21.44% decrease in bank loans, from Rp4,956 billion in 2019 to Rp3,894 billion, which was caused by the payment of bank loans installments being higher than the loan drawdown. Other payables also decreased by 43.90% to Rp164 billion from the previous year's Rp293 billion, which was due to a decrease in supplier payables.

Ekuitas

Sementara itu, ekuitas naik 0,84% menjadi Rp4.745 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya sebesar Rp4.706 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya saldo laba sebesar 1,08% menjadi sebesar Rp3.363 miliar.

Equity

Meanwhile, Equity increased by 0.84% to Rp4,745 billion in 2020 from Rp4,706 billion previously. This increase was attributable to an increase in retained earnings by 1.08% to Rp3,363 billion.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Asset, Liabilities and Equity

(Rp miliar | Rp billion)

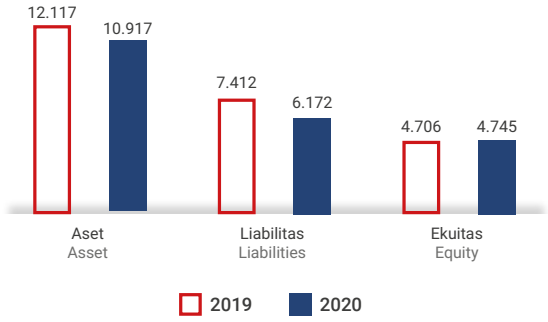

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp1.848 miliar pada tahun 2020, turun 14,63% dari capaian tahun 2019 sebesar Rp2.165 miliar. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya produksi. Namun apabila dibandingkan dengan target, maka realisasi pendapatan usaha pada tahun ini terealisasi 111,12% dari target.

Operating Revenue

The Company's operating revenue was recorded at Rp1,848 billion in 2020, a decrease of 14.63% from the 2019 achievement of Rp2,165 billion. This was in line with declining production. However, compared with the target set, the current year's revenue realization was achieved at 111.12% of the target.

Seiring dengan penurunan portofolio dan pengakuan *interest* serta berkurangnya produksi baru dan adanya pelunasan kontrak atau pelunasan dipercepat sehingga Pendapatan Sewa Pembiayaan dan Pendapatan Pembiayaan Konsumen menurun masing-masing 66,20% dan 11,57%. Pada tahun 2020 Pendapatan Sewa Pembiayaan dan Pendapatan Pembiayaan Konsumen masing-masing tecatat Rp57 miliar dan Rp1.410 miliar. Pendapatan lain-lain juga menurun sebesar 30,54% menjadi sebesar Rp254 miliar yang juga dipengaruhi oleh turunnya produksi perusahaan yang cukup signifikan pada Desember 2020.

Sementara Pendapatan Anjak Piutang dan Pendapatan Bunga meningkat menjadi sebesar Rp95 miliar dan Rp25 miliar pada tahun 2020. Pendapatan dari pembiayaan konsumen berkontribusi 76,32% terhadap total pendapatan Clipan pada tahun 2020.

In line with the declining portfolio and recognition of interest, as well as the decline in new production and due to settlement of the contract or early settlement, Finance Lease Income and Consumer Financing Income decreased by 66.20% and 11.57%, respectively. In 2020, Finance Lease Income and Consumer Financing Income were recorded at Rp57 billion and Rp1,410 billion, respectively. Other income also decreased by 30.54% to Rp254 billion which was also influenced by a significant decrease in the company's production in December 2020.

Meanwhile, Factoring and Interest Income increased to Rp95 billion and Rp25 billion in 2020. Income from consumer financing contributed 76.32% to Clipan's total revenue in 2020.

Pendapatan Clipan
Clipan Revenues

(Rp miliar | Rp billion)

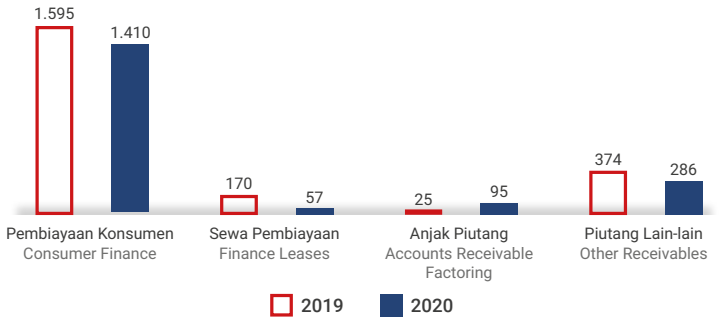

Beban Usaha

Beban usaha tercatat sebesar Rp1.787 miliar pada tahun 2020 atau naik 6,25% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.678 miliar. Realisasi Beban usaha pada tahun 2020 mencapai 106,84% dari proyeksi.

Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan beban usaha yang mengalami kenaikan 45,07% sehingga tercatat sebesar Rp710 miliar, yang merupakan upaya konservatif untuk mengantisipasi piutang bermasalah atas dampak pandemi ini.

Sementara Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya menurun 10,85%, karena terdapat penurunan utang bank dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Umum dan Administrasi juga turun sebesar 12,54%, karena turunnya beban perjalanan dinas, pelatihan teknis, iklan dan administrasi pencatatan efek.

Operating Expenses

Operating expenses amounted to Rp1,787 billion in 2020, an increase of 6.25% from the previous year's of Rp1,678 billion. Realization of operating expenses in 2020 reached 106.84% of the projection.

Impairment Losses on Financial Assets was the largest contributor to the increase in operating expenses, which increased by 45.07% to Rp710 billion, which was a conservative effort to anticipate bad debts due to the impact of the pandemic.

Meanwhile, Interest Expenses and Other Financial Charges decreased by 10.85%, due to the decrease in bank loans compared to last year. General and Administrative Expenses also decreased by 12.54%, due to lower expenses for travelling activities, technical training, advertising and stocks recording administration.

Laba Bersih Sebelum Pajak

Laba bersih sebelum pajak tercatat sebesar Rp61 miliar pada tahun 2020, turun 87,56% dari posisi tahun 2019 yang sebesar Rp487 miliar.

Net Income Before Tax

Net income before tax was recorded at Rp61 billion in 2020, a decrease of 87.56% from the position in 2019 which amounted to Rp487 billion.

Laba Bersih Setelah Pajak

Dipicu oleh penurunan Pendapatan Usaha Perusahaan dan kenaikan Beban Usaha maka Laba Bersih Perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hingga berakhirnya tahun buku 2020, laba bersih setelah pajak tercatat sebesar Rp47 miliar atau turun 81,12% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp362 miliar. Dibandingkan dengan proyeksi, realisasi laba bersih setelah pajak tersebut setara dengan 113,00% dari target.

Net Profit After Tax

Triggered by a decrease in the Company's Operating Revenue and increase in Operating Expenses, the Company's Net Income decreased compared to last year. Until the end of the 2020 financial year, net income after tax was recorded at Rp47 billion, down 81.12% from Rp362 billion in the previous year. Compared to its projections, the net income after tax was equivalent to 113.00% of the target.

Profitabilitas Clipan
Clipan Profitablities

(Rp miliar | Rp billion)

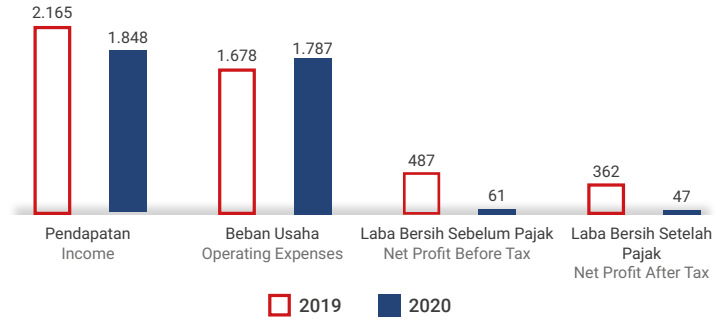

Rasio Keuangan

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) mengalami penurunan menjadi 9,77% pada akhir tahun 2020 dari 10,15% pada tahun sebelumnya. *Return on Asset* (ROA) juga turun dari 4,08% pada akhir 2019 menjadi 0,54% pada akhir 2020.

Return on Equity (ROE) tahun 2020 sebesar 0,98%, turun dari posisi tahun 2019 yang sebesar dari 7,98%. Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perusahaan tercatat sebesar 96,83% pada tahun 2020, naik dari posisi tahun 2019 yang sebesar 76,74%.

Dari sisi kualitas kredit, *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* Perusahaan tercatat 1,97% pada tahun 2019, naik menjadi 2,85% pada 2020 sementara NPL Net 0,89% pada tahun 2020, turun dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar 1,07%.

Financial Ratios

The Net Interest Margin (NIM) ratio decreased to 9.77% at the end of 2020 from 10.15% in the previous year. Return on Assets (ROA) also fell from 4.08% at the end of 2019 to 0.54% by the end of 2020.

The Return on Equity (ROE) in 2020 was 0.98%, down from the 2019 position of 7.98%. The Company's Operating Expenses to Operating Revenue (BOPO) ratio was recorded at 96.83% in 2020, up from the 2019 position of 76.74%.

In terms of credit quality, the Company's Gross Non-Performing Loan (NPL) was recorded at 1.97% in 2019, up to 2.85% in 2020 while Net NPL was 0.89% in 2020, down from the previous year's position of 1.07%.

Langkah Strategis 2020

Clipan menetapkan beberapa kebijakan dan inisiatif strategis yang dijalankan pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

- Menjaga kualitas pembiayaan dan bersikap *prudent* dalam menentukan kebijakan kredit.

Strategic Moves in 2020

Clipan has a number of policies and strategic initiatives carried out in 2020, including the following:

- Maintain the quality of financing and be prudent in determining credit policy.

- Produktivitas dan efisiensi. Inisiatif yang akan dilaksanakan termasuk: *Business Process Improvement*, *outsourcing* bisnis proses yang tidak terkait dengan *core process* Perusahaan, integrasi divisi admin untuk mobil bekas & mobil baru.

Strategi pengembangan bisnis:
- Perusahaan tetap menjaga likuiditas untuk menghadapi perekonomian yang pelik.
- Perusahaan terus meningkatkan proses restrukturisasi untuk menjaga kualitas kredit perusahaan.
- Produktivitas dan efisiensi. Inisiatif yang akan dilaksanakan termasuk: *Business Process Improvement*, *outsourcing* bisnis proses yang tidak terkait dengan *core process* Perusahaan, integrasi divisi admin untuk mobil bekas & mobil baru.

Clipan memiliki strategi usaha yang terarah dan senantiasa berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, ditunjang oleh struktur permodalan yang kuat dan jaringan usaha yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia serta didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan profesional. Kemudian juga didukung dengan sistem teknologi yang canggih dan terintegrasi serta penerapan praktik manajemen risiko yang baik.

Semua hal tersebut merupakan modal dasar keberhasilan Clipan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka. Berhasil melalui krisis moneter tahun 1997, serta krisis global tahun 2008 dan 2012, Clipan telah membuktikan kemampuannya dalam menjalankan usaha sekaligus komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik manajemen risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Penghargaan

Pada tahun 2020, Clipan berhasil meraih penghargaan sebagai Perusahaan Pembiayaan yang berpredikat "Sangat Bagus" selama 10 tahun berturut-turut dari Majalah Infobank.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Alamat
Gedung Panin Life Center
Jl. Letjen S. Parman Kav. 91 Slipi, Jakarta Barat 11420
Tel. : (021) 56956100
Fax. : (021) 56956105
E-mail : corsec@paninbanksyariah.co.id
Website : www.paninbanksyariah.co.id
PBSCall 24 jam (021) 6313700

- Productivity and efficiency. Initiatives to be implemented include: Business Process Improvement, outsourcing of business processes that are not related to the Company's core processes, integration of the admin division for used cars & new cars.

Business development strategies are as follows:
- The Company maintains liquidity to face a complicated economy.
- The Company continues to improve the restructuring process to maintain the quality of the Company's credit.
- Productivity and efficiency. Initiatives that are implemented include: Business Process Improvement, outsourcing of business processes that are not related to the Company's core processes, integration of the admin division for used cars & new cars.

Clipan has a focused business strategy and always based on the principle of prudence, supported by a strong capital structure and business network that spreads throughout Indonesia and is supported by reliable and professional human resources. Then also supported by a sophisticated and integrated technology system and the application of good risk management practices.

All of these things are the basis for the Clipan's success in running its business activities as a leading finance company. Succeeding through the monetary crisis in 1997, as well as the global crisis in 2008 and 2012, Clipan has proven its ability to run a business as well as a strong commitment to implementing risk management practices that are guided by the prudence principle.

Awards

In 2020, Clipan won an award: Financing Company with a "Very Good" predicate for 10 consecutive years from Infobank Magazine.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Address
Gedung Panin Life Center
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 91 Slipi, Jakarta Barat 11420
Tel. : (021) 56956100
Fax. : (021) 56956105
E-mail : corsec@paninbanksyariah.co.id
Website : www.paninbanksyariah.co.id
PBSCall 24 jam (021) 6313700

Profil Bank

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk didirikan sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Panin Dubai Syariah Bank juga sempat mengubah namanya menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya.

Selanjutnya, Panin Dubai Syariah Bank kembali melakukan perubahan nama menjadi PT PaninBank Syariah sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha bank dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Kemudian, terkait dengan perubahan status Bank dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta diubah kembali menjadi PT PaninBank Syariah Tbk.

Pada 2016, nama PT PaninBank Syariah Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk seiring dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008935. AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Perubahan seluruh anggaran dasar Bank terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No. 49, tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., tersebut, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2018, Nomor: AHU-AH.01.03-0127665 dan susunan pengurus Bank terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 42, tanggal 27 Juli 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam *database*

Company Profile

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk was established by Deed No. 12 dated January 8, 1972 from Moeslim Dalidd, a notary in Malang, under the name of PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. This deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. YA5/284/4 dated December 11, 1979. Panin Dubai Syariah Bank has made several changes to its name, successively into PT Bank Bersaudara Djaja, based on Deed of Minutes of Meeting No. 25 dated January 8, 1990, which was made before Indrawati Setiabudhi, S.H., a notary in Malang. Panin Dubai Syariah Bank also briefly changed its name to PT Bank Harfa based on Deed of Minutes of Meeting No. 27 dated March 27, 1997, made before Alfian Yahya, S.H., a notary in Surabaya.

Furthermore, Panin Dubai Syariah Bank re-changed its name to PT Bank Panin Syariah following the changes in the Bank's business activities from initially running conventional banking business activities into handling Islamic banking business activities with the principle of profit-sharing based on Islamic law, based on Deed of Minutes of the Extraordinary GMS No. 1 dated August 3, 2009, made before Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., substitute for Sutjipto, S.H., a notary in Jakarta.

Later on, relating to the change in the Bank's status from previously as a private company to be a public company, based on Deed of the Extraordinary GMS No.71 dated June 19, 2013 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the name of PT Bank Panin Syariah was changed to PT PaninBank Syariah Tbk.

In 2016, the name of PT PaninBank Syariah Tbk was changed to PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk along with the entry of Dubai Islamic Bank PJSC as one of the Controlling Shareholders, based on Deed of Decision of the Extraordinary GMS No. 54 dated April 19, 2016, made before Fathiah Helmi, a notary in Jakarta, effectively since May 11, 2016, pursuant to Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 dated May 11, 2016. The latest amendments to the entire Articles of Association of the Bank as contained in deed No. 49, dated March 22, 2018 made before the Notary Fathiah Helmi, S.H., whose changes have been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated March 28, 2018, Number: AHU-AH.01.03 -0127665 and the latest Bank management composition as contained in Deed Number: 42, dated 27 July 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, and has been received and recorded in the database of the Legal Entity

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2020 Nomor: AHU-AH.01.03-0316445.

Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah diterima OJK, sesuai salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. Mengacu pada pasal 3 Anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP. GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. s-225/ PB.131.2015 tanggal 8 Desember 2015, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Pada tanggal 30 Desember 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan Surat No. S-483/D.04/2013 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 4.750.000.000 lembar saham kepada masyarakat disertai dengan waran sebanyak 950.000.000 waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014.

Setiap pemegang waran seri I berhak membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp110 per saham, yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Apabila Waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah waran yang kadaluarsa sebesar 504.664.744 waran.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Maret 2018, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/ Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH01.03-0229648 tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 23.959.037.851 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.395.903.785.100.

Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia dated 29 July 2020 Number: AHU-AH.01.03-0316445.

Determination of the use of a business license under the new name PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk was received by OJK, according to the copy of OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-29/D.03/2016 dated 26 July 2016. According to article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of activities of the Bank is to carry out business activities in the banking sector with the principle of profit-sharing based on Islamic law.

The Bank received a business license from Bank Indonesia based on the Decree of Bank Indonesia's Governor No. 11/52/ KEP.GBI/DpG/2009 dated October 6, 2009 as a commercial bank based on sharia principles. The Bank commenced its operating as a sharia commercial bank on December 2, 2009. In accordance with Decree of the Financial Services Authority No. S-225/PB.131.2015 on December 8, 2015, the Bank obtained approval to become a foreign exchange bank.

On December 30, 2013, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority with Letter No. S-483/D.04/2013 to conduct a public offering of initial 4,750,000,000 shares to the public, accompanied by 950,000,000 Series I warrants which were granted "Free". These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2014.

Each holder of Warrant Series I can exercise the right to purchase 1 (one) share at Rp110 per share, which could be exercise during the implementation period, starting from July 15, 2014 to July 14, 2017. If the Warrant Series I is not exercised until its expiration date, then the warrants will expire. As of December 31, 2018, a total of 504,664,744 warrants have expired.

The Bank has amended the Articles of Association based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated March 22, 2018, regarding Changes in Issued/Paid-Up Capital concerning the implementation of a Public Offering for additional capital by providing Pre-emptive Rights (HMETD). That such amendment to the Articles of Association has obtained approval or received notification from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH01.03-0229648 dated August 7, 2018. Based on this, the issued and fully paid-up capital amounted to 23,959,037,851 shares, each with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah) or with a total nominal value of Rp2,395,903,785,100.

Pada tanggal 31 Desember 2018, sejumlah 23.714.400.825 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 244.637.026 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 November 2020, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0413420 tanggal 30 November 2020. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 38.813.641.319 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.881.364.131.900.

Pada tanggal 31 Desember 2020, sejumlah 38.425.504.906 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 388.136.413 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Bank berkedudukan di Jakarta dan memiliki 11 kantor cabang. Kantor pusat bank beralamat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend. S. Parman Kav 91, Jakarta. Rata-rata jumlah karyawan Bank sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah 423 dan 468 karyawan.

Visi

Visi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi

Misi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai berikut:

1. Peran aktif Bank dalam bekerja sama dengan Regulator secara profesional mewujudkan PDSB sebagai bank syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan PDSB sebagai Bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui poduk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.

As of 31 December 2018, the Bank's outstanding shares totaling 23,714,400,825 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange, and a total of 244,637,026 shares that belonged to the founders are not listed on the stock exchange.

The Bank has made an Amendment to the Articles of Association based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated November 27, 2020, regarding Changes in Issued/Paid-Up Capital regarding the implementation of a Public Offering for additional capital by providing Pre-emptive Rights (HMETD). The amendment to the Articles of Association has obtained approval or received notification from the Minister of Law and Human Rights, Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0413420 dated November 30, 2020. Based on this, the issued and fully paid-up capital amounted to 38,813,641,319 shares, each with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah) or with a total nominal value of Rp3,881,364,131,900.

As of December 31, 2020, the Bank's outstanding shares totaling 38,425,504,906 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange, and a total of 388,136,413 shares that belonged to the founders are not listed on the stock exchange.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of activities of the Bank is to carry out business activities in the banking sector with the principle of profit-sharing based on Islamic law.

The Bank is domiciled in Jakarta and has 11 branch offices. The Bank's head office is located at Panin Life Center Building, Jl. Letjend. S. Parman Kav 91, Jakarta. The average numbers of employees of the Bank as of December 31, 2020 and December 31, 2019 were 423 and 468 employees, respectively.

Vision

The vision of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk is to become a progressive Islamic Bank in Indonesia that offers comprehensive and innovative financial products and services.

Mission

The missions of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk include:

1. The active role of the Bank in cooperating with Regulators: professionally realizing PDSB as a healthier Sharia Bank with good governance and sustainable growth.
2. Customer perspective: Realizing PDSB as the preferred bank in business development through superior products and services that can compete with other Islamic and conventional bank products.

3. Perspektif SDM/Staf: Mewujudkan PDSB sebagai Bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham: mewujudkan PDSB sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT *Support*: Mewujudkan PDSB sebagai bank yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis Teknologi Informasi (TI) yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

3. HR/Staff Perspective: Realizing PDSB as the Bank of choice for professionals which provide career development opportunities in the Islamic banking industry through the spirit of togetherness and social environment sustainability.
4. Shareholders Perspective: Realizing PDSB as a Sharia Bank that can provide added value to Shareholders through good profitability performance characterized by measurable ROA and ROE.
5. IT Support: Realizing PDSB as a Bank that excels in information-technology-based Sharia services that provide good and quality services for customers.

Komposisi Pemegang Saham

Posisi 31 Desember 2020, komposisi kepemilikan saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah sebagai berikut:

Shareholder Composition

As of December 31, 2020, shareholders composition of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk is, as follows:

Uraian	Nilai Nominal Per Saham Rp100 Value per Share Rp100			Description
	Jumlah Saham Number of Shares	**Jumlah Nominal** Nominal Value (Rp)	**Persentase** Percentage (%)	
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	38.813.641.319	3.881.364.131.900		Subscribed and paid up Capital
Pemegang Saham:				Shareholders
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	27.142.027.033	2.714.202.703.300	69,93	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk
2. Dubai Islamic Bank PJSC	9.742.223.971	974.222.397.100	25,10	2. Dubai Islamic Bank PJSC
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.929.390.315	192.939.031.500	4,97	3. Public (each under 5%)
Jumlah	38.813.641.319	3.881.364.131.900	100,00	Total
Saham Dalam Portepel	186.358.681	18.635.868.100		Treasury Stock

Susunan Pengurus Bank

Pada tanggal 31 Desember 2020 susunan pengurus PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah sebagai berikut:

Bank Management Structure

As of December 31, 2020, the management of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk is as follows:

Dewan Komisaris	**Nama** | Name	**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Adnan Abdus Shakoor Chilwan	President Commissioner
Komisaris Independen	Omar Baginda Pane	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Tantry Soetjipto S	Independent Commissioner
Direksi	**Nama** | Name	**Board of Directors**
Direktur Utama	Bratha	President Director
Direktur	Budi Prakoso	Director
Direktur	Shandra Noraya Laksmi	Director
Dewan Pengawas Syariah	**Nama** | Name	**Syariah Supervisory Board**
Ketua	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Chairman
Anggota	Drs. H. Aminudin Yakub, MA	Member
Komite Audit	**Nama** | Name	**Audit Committee**
Ketua merangkap anggota	Tantry Soetjipto S	Chairman and Member
Anggota	Evi Firmansyah	Member
Anggota	Erick *)	Member

*) Efektif berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 067/SK/DIR/2020 tanggal 16 Juni 2020.
Effective based on the Decree of the Board of Directors number 067/SK/DIR/2020 dated June 16, 2020

Kinerja Bank Panin Dubai Syariah
Bank Panin Dubai Syariah Performance

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Aset	11.302	11.136	8.771	1,49%	26,96%	Assets
Liabilitas	8.186	9.441	7.103	-13,29%	32,93%	Liabilities
Ekuitas	3.116	1.695	1.668	83,86%	1,56%	Equities
Pendapatan Usaha	809	740	674	9,34%	9,78%	Operational Incomes
Beban Usaha	803	721	670	11,41%	7,68%	Operational Expenses
Laba Bersih Sebelum Pajak	7	22	21	-70,44%	3,80%	Profit before Tax
Laba Bersih Setelah Pajak	0	13	21	-99,03%	-36,32%	Net Profit after tax
Laba Per Saham (Rp penuh)	0,00	0,55	1,14	-99,12%	-51,75%	Earning per share (in fully Rp amount)
Rasio Keuangan:						**Financial Ratios:**
Tingkat Pengembalian Aset	0,06%	0,25%	0,26%			Return on Asset (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas	0,01%	1,08%	1,45%			Return on Equity (ROE)
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset produktif	3,34%	3,42%	3,99%			Non- Performing Productive Assets to Total productive Assets

Aset
Aset Bank dibukukan mencapai Rp11.302 miliar pada tahun 2020, tumbuh 1,49% dari posisi 2019 sebesar Rp11.136 miliar. Jumlah Aset Bank tersebut terealisasi 106,15% dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan Aset pada tahun ini didorong oleh kenaikan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah sebesar 3,66% menjadi sebesar Rp7.881 miliar terutama karena naiknya portofolio pembiayaan Musyarakah investasi dan Musyarakah konsumer. Selain itu, kenaikan aset juga dipicu oleh kenaikan Surat Berharga yang Dimiliki sebesar 25,68% menjadi Rp576 miliar dan Aset Tetap sebesar 102,68% menjadi Rp199 miliar.

Pada tahun 2020, penyertaan modal sementara mengalami penurunan 98,47% sehingga dibukukan sebesar Rp937 juta. Hal ini dikarenakan pada tanggal 1 Januari 2020, Bank menetapkan modal sementara sebagai investasi ekuitas pada FVTOCI (*Fair Value Through Other Comprehensive Income*) karena investasi ekuitas mewakili investasi yang bertujuan untuk dimiliki dalam jangka waktu menengah ke panjang untuk tujuan strategis.

Secara komposisi, pembiayaan Bank disumbang dari tiga lini bisnis, yaitu Piutang Murabahah Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah. Adapun segmen bisnis Pembiayaan Musyarakah menjadi kontributor terbesar dengan porsi kontribusi mencapai 93,28% terhadap total pembiayaan.

Asset
The Bank's total assets was recorded at Rp11,302 billion in 2020, growing 1.49% from the 2019 position of Rp11,136 billion. Total Bank Assets was 106.15% of the predetermined target. The increase in assets this year was driven by an increase in Musyarakah Profit Sharing Financing by 3.66% to Rp7,881 billion mainly due to an increase in the Musyarakah investment and Musyarakah consumer financing portfolios. In addition, the increase in assets was also triggered by an increase in Securities Held by 25.68% to Rp576 billion and Fixed Assets by 102.68% to Rp199 billion.

In 2020, equity participation has decreased by 98.47% thus it was recorded at Rp937 million. This happened because on January 1, 2020, the Bank designated its equity participant as an equity investment in FVTOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income) because equity investment represents an investment that aims to be owned in the medium to long-term for strategic purposes.

In terms of composition, the Bank's financing is contributed from three business segments, namely Murabahah Receivables, Mudharabah Financing and Musyarakah Financing. The Musyarakah Financing business segment was the largest contributor with a contribution portion reaching 93.28% of the total financing.

Pembiayaan Panin Dubai Syariah
Panin Dubai Sharia Financing

(%)

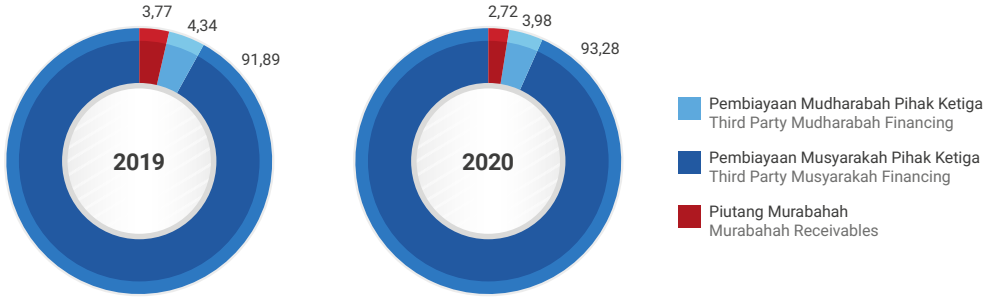

Liabilitas

Liabilitas Bank tercatat sebesar Rp8.186 miliar pada tahun 2020, turun 13,29% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp9.441 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh turunnya Dana Syirkah Temporer sebesar 14,36% menjadi sebesar Rp7.585 miliar, sedangkan Simpanan naik 6,47% menjadi Rp537 miliar.

Liabilities

The Bank's Liabilities was recorded at Rp8,186 billion in 2020, decreased by 13.29% from the previous year's position of Rp9,441 billion. The decline was driven by a 14.36% drop in Temporary Syirkah Funds to Rp7,585 billion, while Deposits rose 6.47% to Rp537 billion.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas Panin Dubai Syariah
Panin Dubai Syariah Asset, Liabilities and Equity

(Rp miliar | Rp billion)

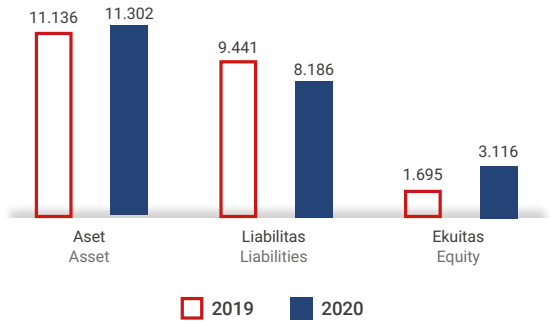

Ekuitas

Pada tahun 2020, ekuitas Bank tercatat Rp3.116 miliar atau tumbuh 83,86% dari posisi 2019 sebesar Rp1.695 miliar. Hal ini dikarenakan adanya penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 38,27% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan atau sebanyak 14.854.603.468 lembar saham dengan nilai nominal Rp100. Modal ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat dari Rp2.396 milar menjadi Rp3.881 miliar.

Equity

In 2020, the Bank's equity was recorded at Rp3,116 billion or grew 83.86% from the 2019 position which amounted to Rp1,695 billion. This was due to the increase in capital following the Pre-emptive Rights (HMETD) amounting to 38.27% of the issued and paid-up capital of the Company or as much as 14,854,603,468 shares with a nominal value of Rp100. The issued and fully paid-up capital of the Bank increased from Rp2,396 billion to Rp3,881 billion.

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha naik 9,34%, yaitu dari Rp740 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp809 miliar di akhir 2020. Realisasi tersebut mencapai 100,66% dari proyeksi tahun 2020.

Revenues

Revenues increased by 9.34%, from Rp740 billion in 2019 to Rp809 billion. The realization reached 100.66% of the 2020 projection.

Kenaikan pendapatan usaha itu dipengaruhi oleh Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib naik 7,93% menjadi Rp715 miliar, yang didorong oleh naiknya Pendapatan dari Piutang Ujrah, Pendapatan dari Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah. Sementara Pendapatan Usaha Lainnya naik 21,44% menjadi Rp94 miliar.

The increase in operating income was influenced by Revenues from Fund Management by the Bank as Mudharib, which rose 7.93% to Rp715 billion, driven by an increase in revenue from Ujrah Receivables, Income from Mudharabah and Musyarakah Profit Sharing. Meanwhile, Other Operating Revenues rose 21.44% to Rp94 billion.

Beban Usaha

Beban usaha tercatat Rp803 miliar pada tahun 2020, naik 11,41% dari tahun sebelumnya sebesar Rp721 miliar. Realisasi tersebut mencapai 101,31% dari proyeksi tahun 2020.

Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer naik 13,15% ke posisi Rp591 miliar karena terjadi kenaikan beban bagi hasil pada deposito berjangka dan bagi hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA).

Beban Usaha Lainnya juga mengalami naik 3,33% ke posisi Rp216 miliar. Sedangkan Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai menurun dari Rp10 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3 miliar pada tahun 2020.

Operating expenses

Operating expenses was recorded at Rp803 billion in 2020, up 11.41% from the previous year which amounted to Rp721 billion. The realization reached 101.31% of the 2020 projection.

Depositors Share on the Revenue Sharing of Temporary Syirkah Funds increased by 13.15% to the position of Rp591 billion due to the increment in profit sharing expenses on time deposits and profit sharing of Mudharabah Interbank Investment Certificate (SIMA).

Other Operating Expenses also increased by 3.33% to the position of Rp216 billion. Meanwhile, Impairment Loss (Recovery) Losses decreased from Rp10 billion in 2019 to Rp3 billion in 2020.

Profitabilitas Panin Dubai Syariah
Panin Dubai Syariah Profitabilities

(Rp miliar | Rp billion)

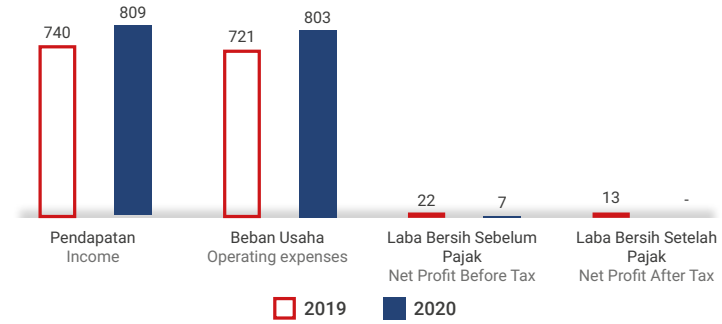

Laba Bersih Sebelum Pajak

Laba Bersih Sebelum Pajak dibukukan sebesar Rp7 miliar pada tahun 2020, turun 70,44% dari posisi tahun 2019 yang sebesar Rp22 miliar.

Net Profit Before Tax

Net Profit Before Tax was recorded at Rp7 billion in 2020, a decrease of 70.44% from the 2019 position of Rp22 billion.

Laba Bersih Setelah Pajak

Naiknya Beban Usaha menekan kinerja Laba Bersih Setelah Pajak sehingga mengalami penurunan hingga 99,03% dari Rp13 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp128 juta pada tahun 2020.

Net Profit After Tax

The increase in Operating Expenses suppressed the performance of Net Profit After Tax, thus it decreased by 99.03% from Rp13 billion in 2019 to Rp128 million in 2020.

Rasio Keuangan

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami peningkatan dari sebesar 14,46% di tahun sebelumnya menjadi 31,42% pada akhir 2020. Hal ini didorong karena terjadinya kenaikan

Financial Ratios

The Capital Adequacy Ratio (CAR) increased from 14.46% in the previous year to 31.42% at the end of 2020. This was driven by an increase in the issued and fully paid-capital of the

Modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari semula Rp2.396 milar menjadi Rp3.881 miliar pada akhir 2020. Dari sisi kualitas kredit, *Non Performing Financing* (NPF) Gross tahun 2020 tercatat sebesar 3,38%, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai 3,81%. Demikian halnya, NPF *Net* juga mengalami penurunan dari sebesar 2,80% pada 2019 menjadi 2,45% pada tahun ini.

Return on Asset (ROA) melambat menjadi 0,06% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,25%. *Return on Equity* (ROE) tercatat sebesar 0,01% pada tahun 2020, lebih rendah dari posisi tahun 2019 yang sebesar dari 1,08%. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) naik dari 97,74% pada tahun 2019 menjadi sebesar 99,42% pada tahun 2020. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2020 tercatat sebesar 111,71%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 95,72%.

Langkah Strategis Tahun 2020

Kebijakan manajemen dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada orientasi pencapaian hasil melalui pendekatan implementasi pendekatan *rewards and punishment* dalam KPI yang telah ditetapkan.
2. Fokus pada peningkatan budaya risiko di setiap lini bisnis melalui KPI dan pemantauan risiko yang ketat.
3. Fokus pada efisiensi biaya melalui pengendalian biaya yang efektif dan terintegrasi.
4. Fokus pada pertumbuhan yang seimbang antara penyaluran dana dan penghimpunan dana dan meletakkan pondasi pertumbuhan bisnis berkelanjutan pada masa mendatang.
5. Fokus kepada pemantauan risiko dan kontrol atas portofolio yang ada.
6. Fokus mengimplementasikan strategi yang efektif dalam mempercepat perbaikan nasabah NPF, AYDA dan *write-off* untuk menghindari penurunan modal Bank.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, pengembangan bisnis Bank akan fokus kepada pertumbuhan volume pembiayaan yang berimbang dengan pendanaannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Bank karena infrastruktur yang tersedia saat ini cukup terbatas. Berikut ini adalah strategi yang akan dilakukan Bank untuk mendukung arah kebijakan di tahun 2020 yaitu:

1. Memperkuat struktur bisnis *Wholesale Banking* yang fokus pada pembiayaan debitur besar dan juga membentuk tim pemantauan termasuk analis pembiayaan, penjamin kualitas pembiayaan dan *middle office* tim untuk mengurangi potensi risiko.

Bank from Rp2,396 billion to Rp3,881 billion in end of 2020. In terms of credit quality, Gross Non-Performing Financing (NPF) in 2020 was recorded at 3.38%, a decrease compared to the previous year's 3.81%. Likewise, the NPF Net has also decreased from 2.80% in 2019 to 2.45% this year.

Return on Assets (ROA) down to 0.06% in 2020 compared to 2019 which amounted to 0.25%. Return on Equity (ROE) was recorded at 0.01% this year, lower than the 2019 position of 1.08%. Operating Expenses to Operating Income (BOPO) increased from 97.74% in 2019 to 99.42% in 2020. Financing to Deposit Ratio (FDR) in 2020 was recorded at 111.71%, an increase from 2019 which amounted to 95.72%.

Strategic Steps in 2020

The management policies in the 2020 Bank Business Plan, are as follows:

1. Focus on results achievement orientation through the approach implementation of reward and punishment in the KPIs that has been set.
2. Focus on enhancing a risk culture in each line of business through strict KPIs and risk monitoring.
3. Focus on cost efficiency through effective and integrated cost control.
4. Focus on balanced growth between channeling funds and raising funds and laying the foundation for sustainable business growth in the future.
5. Focus on risk monitoring and control over existing portfolios.
6. Focus on implementing an effective strategy in accelerating the improvement of NPF, AYDA and write-off customers to avoid a decrease in the Bank's capital.

Based on the policies that have been set, the Bank's business development will focus on growing the financing volume in a balanced manner with its funding. This is a challenge for the Bank since the current available infrastructure is quite limited. These following are some strategies that has been implemented by the Bank to support the policy in 2020, as follows:

1. Strengthen the Wholesale Banking business structure that focuses on financing large debtors and also establish monitoring team including financing analysts, financing quality assurance and middle office team to reduce potential risks.

2. Melanjutkan evaluasi jaringan kantor yang akan berjumlah 13 cabang di tahun 2020 dan mengganti karyawan yang tidak sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi.
3. Melanjutkan pengembangan *branchless model* dengan aplikasi *mobile banking* yang *user-friendly*.
4. Mengembangkan pembiayaan UMKM berbasis komunitas dan menjalin kerja sama dengan perusahaan *fintech*.
5. Mengembangkan produk pembiayaan dan pendanaan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dukungan penuh dari perusahaan induk, yakni PaninBank yang merupakan salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dan Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Bank Panin Dubai Syariah. Bank Panin Dubai Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Penghargaan

Bank Panin Dubai Syariah tidak mengikuti undangan penghargaan (*award*) pada tahun 2020. Karena itu, tidak ada penghargaan yang diterima pada periode tersebut.

2. Continue to evaluate the office network, which totaled of 13 branches in 2020 and replace employees who are not in accordance with the objectives and strategies of the organization.
3. Continue the development of branchless model with a user-friendly mobile banking application.
4. Develop financing for community-based MSME's and collaborates with fintech companies.
5. Develop new financing and financing products according to customer needs.

The full support from the parent companies, PaninBank as one of the 10 largest banks in Indonesia and Dubai Islamic Bank PJSC as one of the largest Islamic banks in the world, has helped the development of Panin Dubai Syariah Bank. Panin Dubai Syariah Bank continues to be committed to building customer and public trust through services and product offerings that comply with sharia principles and meet customer needs.

Awards

Panin Dubai Syariah Bank did not participate in any award event in 2020, therefore, no awards were received during that period.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Overview of Financial Performance

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. KAP tersebut merupakan *member of* Deloitte. Kedua laporan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pan Indonesia Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial reviews disclosed below refer to the Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020 and 2019 as presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Imelda & Partners Public Accountants for the year ended December 31, 2020 and December 31, 2019. The accounting firm is member of Deloitte. In auditor's opinion, both financial statements, present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pan Indonesia Tbk and its Subsidiaries as of December, 31 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Aset						**Asset**
Aset Keuangan	202.610	196.319	193.293	3,20%	1,57%	Financial Asset
Aset Non Keuangan	15.457	14.968	13.911	3,27%	7,60%	Non-Financial Asset
Jumlah Aset	**218.067**	**211.287**	**207.204**	**3,21%**	**1,97%**	**Total Asset**
Liabilitas						**Liabilities**
Liabilitas Keuangan	168.028	163.899	163.084	2,52%	0,50%	Financial Liabilities
Liabilitas Non Keuangan	2.579	2.947	3.373	-12,49%	-12,63%	Non-Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas	**170.607**	**166.846**	**166.457**	**2,25%**	**0,23%**	**Total Liabilities**
Jumlah Ekuitas	**47.460**	**44.442**	**40.747**	**6,79%**	**9,07%**	**Total Equity**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**218.067**	**211.287**	**207.204**	**3,21%**	**1,97%**	**Total Liabilities and Equity**

Aset

Secara konsolidasi, Total Aset Bank mencapai Rp218.067 miliar pada tahun 2020, naik 1,97% dibanding tahun sebelumnya. Aset Keuangan meningkat 1,57% ke posisi Rp202.610 miliar sementara Aset Non-Keuangan naik 7,60% ke posisi Rp15.457 miliar. Peningkatan Aset Keuangan Bank didorong oleh kenaikan pada Efek-efek Pihak Ketiga yang dapat mengkompensasi penurunan pada penyaluran Kredit dan Pembiayaan. Sementara, kenaikan Aset Non-Keuangan didorong oleh kenaikan Aset Lain-lain. Porsi Aset Keuangan dan Aset Non-Keuangan dalam struktur Aset Perseroan relatif stabil, masing-masing di sekitar 93% dan 7%.

Assets

Consolidated total assets of the Bank in 2020 amounted to Rp218,067 billion, up 1.9% from the position in the previous year. The amount of Financial Assets increased 1.57% to Rp202,610 billion, while Non-Financial Assets increased 7.60% to reach Rp15,457 billion. The increase in Financial Assets was driven by the increase in Securities – Third Parties, which compensated for the decline in Loans and Financing. The increase in Non-Financial Assets meanwhile was attributable to the increase in Other Assets. The portions of Financial Assets and Non-Financial Assets in the Bank's asset structure remained stable at 93% and 7%, respectively.

Aset Keuangan

Kredit, Efek-efek, dan Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali mendominasi struktur Aset Keuangan dengan porsi masing-masing sebesar 57,31%, 21,25%, dan 8,52% pada tahun 2020. Permintaan kredit yang melambat ditambah dengan kenaikan profil risiko kredit seiring resesi ekonomi terkait pandemi COVID-19, mendorong Perseroan untuk lebih banyak menempatkan dana pada Efek-efek dan Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali. Porsi keduanya naik signifikan dari tahun 2019 yang masing-masing tercatat 9,12% dan 5,95%.

Perseroan memperkuat kualitas penyaluran kredit demi memitigasi peningkatan profil risiko kredit. Posisi Total Kredit turun 13,54% dari tahun sebelumnya menjadi Rp121.634 miliar. Berdasarkan jenis pinjaman, penurunan kredit pada tahun ini didorong oleh Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi yang masing-masing turun 20,38% dan 28,85% sehingga tercatat sebesar Rp33.922 miliar dan Rp19.399 miliar. Pada periode pandemi ini, Perseroan menahan penyaluran Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi serta mendorong penyaluran Kredit Investasi dan Pembiayaan Bersama.

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor Konstruksi, Jasa, Perdagangan, dan Industri menjadi empat sektor utama penerima kredit Bank. Penurunan Kredit selama 2020 terutama didorong oleh menurunnya arus kredit untuk sektor Jasa dan Perdagangan masing-masing 17,95% dan 17,44% sehingga tercatat sebesar Rp25.629 miliar dan 21,764 miliar pada akhir 2020. Perseroan menambah porsi kredit ke sektor Konstruksi dan Industri serta menahan kredit ke sektor Jasa dan Perdagangan.

Berdasarkan jangka waktunya, penurunan kredit didorong oleh penurunan kredit berjangka menengah 2-5 tahun dan kredit berjangka panjang lebih dari 5 tahun. Posisi keduanya masing-masing turun 13,61% dan 14,16% menjadi sebesar Rp29.532 miliar dan Rp45.069 miliar di akhir tahun 2020. Porsi keduanya juga relatif stabil pada kisaran 24% dan 37%. Kredit berjangka pendek, yaitu yang berjangka kurang dari 1 tahun dan 1-2 tahun masing-masing turun 5,39% dan 33,32% menjadi Rp37.356 miliar dan 9.676 miliar.

Efek-Efek tercatat naik 140,32% dari tahun sebelumnya menjadi Rp43.078 miliar pada tahun ini. Porsi Efek yang dimiliki PaninBank mencapai Rp42.502 miliar atau 98,66% dari total Efek sementara Rp576 miliar atau 1,34% sisanya dimiliki Entitas Anak. Perseroan lebih banyak menempatkan dana

Financial Assets

Loans, Securities, and Securities Purchased with Agreements to Resell accounted for 57.31%, 21.25% and 8.52%, respectively, of the Bank's Financial Assets in 2020. With the slower demand for loans as well as higher credit risk profile in line with the economic recession related to the COVID-19 pandemic, the Bank switched is funds to Securities and Securities Purchased with Agreements to Resell. These accounts showed a significant increase from the previous year, in which they only accounted for 9.12% and 5.95%, respectively.

The Bank strengthened the quality of loan disbursement in order to mitigate the increase in credit risk. Total outstanding loans declined 13.54% from the previous year to Rp121,634 billion. By type of loans, Working Capital Loans and Consumer Loans declined by 20.38% and 28.85%, respectively, to Rp33,922 billion and Rp19,399 billion, respectively, in 2020. During the pandemic, the Bank reduced the disbursement of Working Capital Loans and Consumer Loans, while increasing the amounts of Investment Loans and Joint Financing facilities.

Based on economic sectors, the majority of the Bank's loans was disbursed to four sectors, namely Construction, Services, Trading and Manufacturing. The decline in loan disbursement in 2020 was mostly evident in the disbursements to the Services and Trading sectors, which declined by 17.95% and 17.44% to Rp25,629 billion and Rp21,764 billion, respectively, as at end of 2020. The Bank increased loan disbursement to the Construction and Manufacturing sectors while reducing loans to the Services and Trading sectors.

Base on loan tenor, the decline in Loans was mostly driven by the decline in medium-term (2-5 years) and long-term (more than 5 years) loans, which declined by 13.61% and 14.16%, respectively, to Rp29,532 billion and Rp45,069 billion, respectively, at the end of 2020. Their portions were relatively stable at around 24% and 37%, respectively, of total loans. Short-term loans, with tenors of less tan 1 year and of 1-2 years, declined by 5.39% and 33.32%, respectively, to Rp37,356 billion and Rp9,676 billion, respectively.

Securities recorded an increase of 140.32% from the previous year to reach Rp43,078 billion in 2020. Securities owned by the Bank amounted to Rp42,502 billion, or 98.66% of the total Securities portfolio, while the remaining 1.34% are owned by the Bank's Subsidiaries. Most of the Bank's fund placements

pada instrumen Obligasi Pemerintah Indonesia dan Sukuk Negara yang relatif tidak berisiko. Penempatan pada Obligasi Pemerintah Indonesia naik 400,84% menjadi Rp36.101 miliar sementara Sukuk Negara naik 221,67% menjadi Rp5.390 miliar.

were on Government Bonds and Government Sukuk securities that are relatively free of risk. Placement in Government Bonds increased 400.84% to Rp36,101 billion, while Government Sukuk went up 221.67% to Rp5,390 billion.

Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga naik 47,74% dari tahun sebelumnya menjadi Rp17.259 miliar. Pada 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar efek yang dijadikan sebagai jaminan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, adalah Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar Rp18.644 miliar dan Rp12.163 miliar.

Securities Purchased with Agreements to Resell – Third Parties increased by 47.74% from the previous year to reach Rp17,259 billion in 2020. The fair value of the underlying securities purchased with agreements to resell in the form of Government bonds amounted to Rp18,644 billion and Rp12,163 billion, respectively, as at December 31, 2020 and 2019.

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Kas	1.871	1.339	1.194	39,79%	12,16%	Cash
Giro Pada Bank Indonesia	2.381	9.014	9.199	-73,59%	-2,01%	Demand Deposits with Bank Indonesia
Giro Pada Bank Lain - Bersih	2.038	848	829	140,16%	2,40%	Demand Deposits with Other Banks
Penempatan pada BI dan Bank Lain - Bersih	8.450	4.159	4.649	103,18%	-10,54%	Placement in BI & Others Bank - Net
Efek-Efek - Bersih	43.062	17.901	12.288	140,55%	45,69%	Securities - Net
Tagihan Derivatif - Pihak Ketiga	3	38	67	-91,28%	-43,76%	Derivative Receivables – Third Party
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali-Pihak Ketiga - Bersih	17.258	11.682	13.151	47,73%	-11,17%	Securities Purchased with Agreements to Resell-Third Parties - Net
Kredit - Bersih	116.110	136.725	137.386	-15,08%	-0,48%	Loans - Net
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	671	695	736	-3,42%	-5,57%	Factoring Receivables - Net
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	433	741	1.437	-41,52%	-48,41%	Finance Lease Receivables –Third Party
Piutang Pembiayaan Konsumen-Pihak Ketiga - Bersih	7.176	9.846	9.387	-27,12%	4,89%	Consumer Financing Receivables - Net
Tagihan Akseptasi - Bersih	2.496	2.578	2.408	-3,17%	7,06%	Acceptances Receivable - Net
Penyertaan dalam Bentuk Saham – Bersih	661	753	565	-12,29%	33,21%	Investment in Shares of Stock – Net
Total Aset Keuangan	**202.610**	**196.319**	**193.293**	**3,20%**	**1,57%**	**Total Financial Assets**

Aset Non-Keuangan

Sebanyak 66,81% atau Rp10.326 miliar dari jumlah keseluruhan Aset Non-Keuangan Bank merupakan Aset Tetap. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp10.252 miliar adalah Aset Tetap dan Rp74 miliar sisanya adalah Aset Hak Guna.

Non-Financial Assets

A total of Rp10,326 billion or 66.81% of the Bank's Non-Financial Assets are in the form of Premises & Equipment and Right-of-Use Assets, respectively at Rp10,252 billion and Rp74 billion.

Aset Non-Keuangan PaninBank dan Entitas Anak
Non-Financial Assets of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Biaya Dibayar Dimuka	70	135	139	-48,42%	-2,96%	Prepaid Expenses
Aset Tetap - Bersih	10.326	10.313	10.261	0,13%	0,50%	Fixed Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	101	32	127	220,77%	-75,06%	Deferred Tax Assets - Net
Aset Tak Berwujud	214	145	120	47,54%	21,14%	Intangible Assets
Aset Lain-Lain - Bersih	4.746	4.344	3.265	9,25%	33,04%	Other Assets - Net
Total Aset Non-Keuangan	**15.457**	**14.968**	**13.911**	**3,27%**	**7,60%**	**Total Non-Financial Assets**

Liabilitas
Pada akhir 2020, Total Liabilitas Konsolidasi Bank naik 2,25% dari tahun sebelumnya, sehingga tercatat sebesar Rp170.607 miliar. Liabilitas Keuangan naik 2,52% menjadi Rp168.028 miliar, sementara Liabilitas Non-Keuangan turun 12,48% menjadi Rp2.579 miliar. Kenaikan Liabilitas Keuangan didorong oleh kenaikan Simpanan Nasabah. Bank memanfaatkan momentum tingkat kecukupan likuiditas yang memadai ditengah perlambatan kredit untuk memperbaiki struktur CASA (*Current Account Saving Account*). Penurunan Liabilitas Non-Keuangan didorong oleh penurunan Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain.

Liabilities
As at year-end 2020, total consolidated Liabilities of the Bank recorded a growth of 2.25% from the previous year to reach Rp170,607 billion. Financial Liabilities increased 2.52% to Rp168,028 billion, while Non-Financial Liabilities declined 12.48% to Rp2,579 billion. The increase in Financial Liabilities was driven by the increase in Customer Deposits, as the Bank utilizes the adequate liquidity in funding during the slowdown in loan disbursement to improve its CASA (Current Account Savings Account) structure. The decline in Non-Financial Liabilities was driven by the decline in Accruals and Other Liabilities.

Liabilitas Keuangan
Sekitar 85,12% dari Total Liabilitas Keuangan berasal dari Simpanan Nasabah. Porsi pos ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,17%. Total Simpanan Nasabah mencapai Rp143.029 miliar atau naik 8,85%. Simpanan dari Pihak Berelasi turun 8,48% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.466 miliar, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 9,06% menjadi Rp141.563 miliar pada tahun ini.

DPK PaninBank meningkat 10,36% menjadi Rp133.644 miliar, terutama didorong oleh kenaikan pos Giro dan Tabungan. Giro turut mengalami kenaikan 19,15% sehingga dibukukan sebesar Rp11.401 miliar di tahun ini, sementara itu Tabungan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 44%, yakni tercatat Rp43.701 miliar. Di samping itu, Deposito juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,62% sehingga menjadi Rp78.542 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, rasio CASA membaik dari 39,17% menjadi 41,23% pada tahun ini. DPK pada Entitas Anak, yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk turun 9,06% dari tahun sebelumnya menjadi Rp7.919 miliar, terutama karena penurunan pos Deposito berjangka Mudharabah sebesar 10,78% menjadi Rp7.191 miliar.

Financial Liabilities
Customer Deposits contributed around 85.12% of total Financial Liabilities in 2020, which thus represented a significant increase compared with 80.17% the previous year. Customer Deposits amounted to Rp143,029 billion, or up by 8.85%. Deposits from Related Parties declined 8.48% from the previous year to Rp1,466 billion, while Third Party Funds (DPK) increased by 9.06% to Rp141,563 billion.

The Bank's DPK increased by 10.36% to Rp133,644 billion, mainly driven by the increases in Current Accounts and Savings Accounts. Current Accounts increased by 19.15% to Rp11,401 billion, while Savings Accounts rose by a significant 44% to reach Rp43,701 billion. Meanwhile, Time Deposits recorded an increase of 6.62% to Rp78,542 billion. In comparison with the previous year, CASA ratio improved from 39.17% to 41.23% this year. Third party Funds with the Bank's subsidiary PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk declined 9.06% from the previous year to Rp7,919 billion, mainly due to the 10.78% decline in Mudharabah time deposit accounts to Rp7,191 billion.

Tingkat kecukupan likuiditas yang memadai menjadi alasan penurunan pos Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga dan pos Pinjaman yang Diterima - Pihak Ketiga yang masing-masing turun 48,72% dan 45,20% menjadi Rp2.518 miliar dan Rp3.094 miliar.

In line with the availability of adequate liquidity, Securities Sold with Agreements to Repurchase – Third Parties and Borrowings – Third Parties also declined by 48.72% and 45.20%, respectively, to Rp2,518 billion and Rp3,094 billion.

Posisi Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih sebesar Rp11.513 miliar atau naik 0,17% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama karena adanya Surat berharga yang Dibeli kembali sebesar Rp97 miliar dan Diskonto yang Belum Diamortisasi sebesar Rp15 miliar. Perseroan tidak menerbitkan Surat Berharga baru pada tahun 2020.

Securities Issued – Net amounted to Rp11,513 billion, or up by 0.17% from the previous year. The increase was mainly due to Rp97 billion in Securities Repurchased and Rp15 billion in Unamortized Discount. The Bank did not issue new Securities in 2020.

Sementara itu, posisi Obligasi Subordinasi-Bersih tercatat sebesar Rp3.788 miliar, sedikit lebih tinggi dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.785 miliar. Hal itu karena adanya Diskonto yang Belum Diamortisasi sebesar Rp14 miliar. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi baru pada tahun 2020.

Subordinated Bonds – Net meanwhile amounted to Rp3,788 billion, slightly higher than the position in the previous year at Rp3,785 billion, reflecting Rp14 billion in Unamortized Discount. The Bank did not issue new Subordinated Bonds in 2020.

Liabilities Keuangan PaninBank dan Entitas Anak
Financial Liabilities of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Liabilitas Segera	203	175	288	16,03%	-39,44%	Liabilities Payable Immediately
Simpanan Nasabah	143.029	131.403	137.694	8,85%	-4,57%	Third Party Fund
Simpanan Dari Bank Lain	1.374	3.865	555	-64,47%	597,06%	Deposits from other Banks
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	2.518	4.910	-	-48,72%	-	Securities Sold under the Agreements to repurchase - Third Parties
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	3	38	66	-91,62%	-42,38%	Derivatives Payable – Third Party
Liabilitas Akseptasi	2.506	2.583	2.412	-2,99%	7,10%	Acceptance Payables
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	11.513	11.494	11.541	0,17%	-0,41%	Securities Issued - Net
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	3.094	5.645	4.748	-45,20%	18,88%	Borrowings – Third Party
Obligasi Subordinasi - Bersih	3.788	3.785	5.780	0,08%	-34,51%	Subordinated Bonds - Net
Total Liabilitas Keuangan	**168.028**	**163.898**	**163.084**	**2,52%**	**0,50%**	**Total Financial Liabilities**

Liabilitas Non-Keuangan

Porsi Liabilitas Non-Keuangan terhadap Total Liabilitas mencapai 1,51% pada tahun 2020, sedikit di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 1,77%.

Non-Financial Liabilities

The portion of Non-Financial Liabilities to Total Liabilities was recorded at 1.51% in 2020, slightly below the previous year at 1.77%.

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain turun 27,52% menjadi Rp1.302 miliar terutama didorong oleh penurunan pada pos Pendapatan Diterima Dimuka dan pos Bunga yang Masih Harus Dibayar. Keduanya masing-masing turun 48,79% dan 28,52% menjadi Rp309 miliar dan Rp302 miliar.

Accruals and Other Liabilities declined 27.52% to Rp1,302 billion, mainly due to the decline in Income Received in Advance and in Accrued Interest Payable, which declined by 48.79% and 28.52%, respectively, to Rp309 billion and Rp302 billion.

Liabilities Non-Keuangan PaninBank dan Entitas Anak
Non-Financial Liabilities of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Utang Pajak	109	274	309	-60,38%	-11,35%	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.168	876	893	33,38%	-1,99%	Post-Employment Benefits Obligation
Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain	1.302	1.797	2.170	-27,52%	-17,19%	Accrued Expenses and Other Liabilities
Total Liabilitas Non Keuangan	**2.579**	**2.947**	**3.373**	**-12,48%**	**-12,63%**	**Total Non-Financial Liabilities**

Ekuitas

Secara Konsolidasi, Total Ekuitas Perseroan dibukukan meningkat 6,79% dari tahun sebelumnya menjadi Rp47.460 miliar pada akhir 2020. Kenaikan tersebut terutama karena pos Komponen Ekuitas Lainnya mengalami kenaikan 24,12% sehingga tercatat menjadi Rp9.652 miliar dan juga pos Saldo Laba naik 3,96% menjadi Rp28.991 miliar.

Pada 26 Maret 2020, Bank membeli kembali 6.100.000 lembar saham senilai Rp4.233 juta yang dimiliki oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, senilai nominal Rp610 juta digunakan sebagai pengurang dari modal disetor, sedangkan sisanya senilai Rp3.623 juta digunakan sebagai pengurang agio saham.

Equity

On a consolidated basis, the Bank's Total Equity recorded an increase of 6.79% from the previous year to reach Rp47,460 billion as at year-end 2020. The increase was attributable to the Other Equity Component account, which increased by 24.12% to Rp9,652 billion, and the increase of 3.96% in Retained Earnings to Rp28,991 billion.

On March 26, 2020, the Bank conducted a share buyback of 6,100,000 shares from the public shareholders valued at Rp4,233 million. Of this amount, Rp610 million was recorded as treasury stock, while the remaining Rp3,623 million was recorded as deduction to additional paid-in capital.

Ekuitas PaninBank dan Entitas Anak
Equity of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						**Equity Attributable to Owners of the Parent Entity**
Modal Saham	2.409	2.409	2.409	0,00%	0,00%	Capital Stock
Saham yang Dibeli Kembali	(1)	-	-	-	-	Buyback Stock
Agio Saham	3.441	3.444	3.444	-0,11%	0,00%	Additional Paid-In Capital
Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak Non-Pengendali	(268)	(141)	(118)	89,51%	20,07%	Difference in Value of Equity Transactions with Non-Controlling Interest
Komponen Ekuitas Lainnya	9.652	7.777	7.449	24,12%	4,40%	Other Equity Components
Saldo Laba	28.991	27.886	24.562	3,96%	13,54%	Retained Earnings
Kepentingan Non-Pengendali	3.237	3.067	3.001	5,54%	2,20%	Non-Controlling Interest
Total Ekuitas	**47.460**	**44.442**	**40.747**	**6,79%**	**9,07%**	**Total Equity**

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan Bunga turun 8,22% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp15.796 miliar pada tahun ini. Penurunan tersebut terutama didorong oleh turunnya Pendapatan

STATEMENTS OF PROFIT-LOSS

Interest Revenues and Expenses

Interest revenues declined by 8.22% from the previous year to Rp15,796 billion for the year under review. The decline was mainly due to the decline in interest earned on loans in line

Bunga Kredit sejalan dengan perlambatan Kredit. Pos ini membukukan penurunan hingga 15,96% sehingga tercatat sebesar Rp11.197 miliar, terutama karena pendapatan dari Pinjaman Tetap turun 16,77% dan Pinjaman Rekening Koran turun 19,55% sehingga masing-masing dibukukan menjadi Rp8.399 miliar dan Rp1.945 miliar. Sementara itu, pos Pendapatan Bunga dari Efek-efek mengalami kenaikan signifikan seiring dengan pertambahan volumenya. Pos ini naik 118,54% menjadi Rp2.271 miliar.

with the decline in loan disbursement. The account recorded a decline of 15.96% to Rp11,197 billion, mainly representing the decline of 16.77% in interest on fixed loans and of 19.55% in interest on demand loans, to Rp8,399 billion and Rp1,945 billion, respectively. Meanwhile, Interest Earned on Securities recorded a significant increase of 118.54% to Rp2,271 billion in line with the increase in the securities portfolio.

Beban Bunga turun 15,73% dari tahun sebelumnya menjadi Rp7.378 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh pos Beban Bunga dari Simpanan Nasabah yang turun 16,03% menjadi Rp5.563 miliar. Meskipun posisi Simpanan Nasabah meningkat, kebijakan penurunan suku bunga simpanan sebagai respon terhadap penurunan suku bunga acuan BI 7-*Day Repo Rate* serta program restrukturisasi CASA, dapat menekan Beban Bunga dari Simpanan Nasabah. Penurunan Beban Bunga yang lebih besar dari penurunan Pendapatan Bunga mampu menahan penurunan Pendapatan Bunga Bersih yang lebih besar dalam kondisi resesi ekonomi. Pendapatan Bunga Bersih tercatat sebesar Rp8.807 miliar atau turun 1,81% dari tahun sebelumnya.

Interest Expenses decreased by 15.73% from the previous year to Rp7,378 billion. This decrease was mainly driven by the interest expense from customer deposits, which fell 16.03% to Rp5,563 billion. Despite the increase in the amounts of Customer Deposits, the policy of lowering the deposit interest rate in response to the cut in the BI 7-Day Repo Rate benchmark interest rate and the CASA restructuring program, combined to reduce the Interest Expense on Customer Deposits. A decrease in Interest Expense that is greater than the decrease in Interest Income is able to withstand a larger decline in Net Interest Income in an economic recession. Net Interest Income was recorded at Rp8,807 billion, or down by 1.81% from the previous year.

Pendapatan Bunga PaninBank dan Entitas Anak
Interest Income of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Pendapatan Bunga:						**Interest Revenues**
Giro	17	4	18	368,30%	-80,64%	Demand deposits
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	183	168	198	9,42%	-15,50%	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek	2.271	1.039	1.411	118,54%	-26,36%	Securities
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	595	906	499	-34,35%	81,80%	Securities purchased with agreements to resell
Kredit	11.197	13.323	12.893	-15,96%	3,34%	Loans
Lainnya	1.533	1.770	1.707	-13,39%	3,71%	Others
Provisi dan Komisi Kredit	390	515	486	-24,27%	5,87%	Commission and Fees From Loans
Total Pendapatan Bunga	16.185	17.725	17.212	-8,69%	2,98%	Total Interest Revenues
Beban Bunga:						Interest Expense:
Simpanan Nasabah	5.563	6.625	6.305	-16,03%	5,07%	Third Party Fund
Simpanan dari Bank Lain	60	108	109	-44,51%	-0,49%	Deposits from Other Banks
Pinjaman yang Diterima	376	462	427	-18,51%	8,03%	Loans Received
Surat Berharga yang Diterbitkan	1.355	1.537	1.379	-11,82%	11,44%	Securities Issued
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	22	24	27	-10,85%	-10,28%	Securities Purchased under the Agreements to Resell
Lainnya	2	-	1	-	-100,00%	Others
Total Beban Bunga	7.378	8.756	8.248	-15,73%	6,16%	Total Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	**8.807**	**8.969**	**8.964**	**-1,81%**	**0,05%**	**Interest Revenues - Net**

Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga

Bank membukukan kenaikan 4,89% pada Beban Operasional Selain Bunga sehingga tercatat sebesar Rp4.892 miliar pada 2020. Keuntungan dari Penjualan Aset Keuangan mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp114 miliar pada 2019 menjadi Rp1.784 miliar ditahun ini. Di sisi lain, Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (*Impairment*) meningkat 73,32% menjadi Rp2.658 miliar serta Beban Lainnya naik 21,68% menjadi Rp3.462 miliar. Berbanding terbalik, Beban Tenaga Kerja justru turun 2,19% menjadi Rp2.060 miliar. Selama pandemi, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan relaksasi bagi Bank BUKU III dan IV untuk menganggarkan biaya pendidikan kurang dari 5% pada tahun 2020 serta tren pelatihan daring berimbas pada penurunan Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang cukup signifikan hingga 57,40% menjadi Rp16 miliar pada tahun ini.

Non-Interest Operating Revenues and Expenses

The Bank recorded an increase of 4.89% in Non-Interest Operating Expenses to Rp4,892 billion in 2020. Gain from Sale of Financial Assets recorded a significant increase from Rp114 billion in 2019 to Rp1,784 billion in 2020. On the other hand, Loss on Impairment of Financial Assets increased by 73.32% to Rp2,658 billion, while Other Expenses rose 21.68% to Rp3,462 billion. Inversely, Personnel Expenses was down 2.19% to Rp2,060 billion. During the pandemic, the Financial Services Authority (OJK) policy which provided a relaxation for BUKU III and IV banks to budget for employee training costs of less than 5% in 2020 and the trend of online training resulted in a significant reduction in Education and Training Expenses of up to 57.40% to Rp16 billion for the year in review.

Pendapatan dan Beban Selain Bunga PaninBank dan Entitas Anak*
Income and Expenses Other than Interest PaninBank and Subsidiaries *

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan Growth 2019-2020	Description
Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	46	74	-37,74%	Gain (loss) from increase (decrease) fair value of Financial Asset
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.784	114	1.461,96%	Gain (loss) from increase (decrease) fair selling of Financial Asset
Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/*forward* (realisasi)	155	51	201,85%	Gain (loss) from transaction of spot and derivative/Forward (Realized)
Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan *equity method*	25	38	-34,72%	Gain (loss) from investment with equity method
Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	83	(10)	-939,98%	Gain (loss) from transaction of forex
Pendapatan dividen	15	4	323,00%	Dividend Revenue
Komisi/provisi/*fee* dan Biaya administrasi	477	755	-36,83%	Commission/Provision/Fees and Administration Cost
Pendapatan lainnya	774	870	-10,96%	Other Revenue
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	2.685	1.549	73,32%	Loss from value decrease of financial asset (impairment)
Kerugian terkait risiko operasional	3	3	1,26%	Loss from operational risk
Beban tenaga kerja	2.060	2.106	-2,19%	Employment Expense
Beban promosi	40	56	-28,23%	Promotion Expense
Beban lainnya	3.462	2.845	21,68%	Other Expense
Jumlah Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga	**(4.892)**	**(4.664)**	**4,89%**	**Total Non-Interest Revenue (Expense)**

*) Data tahun 2018 belum tersedia terkait perubahan format pelaporan dari OJK | 2018 data not available regarding changes to the reporting format from the OJK.

Laba Tahun Berjalan dan Laba Per Saham

Laba Tahun Berjalan Bank turun 10,69% menjadi Rp3.124 miliar. Dari jumlah Laba Tahun Berjalan tersebut, sekitar 0,67% atau Rp21 miliar merupakan bagian yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali. Sejalan dengan penurunan tersebut, Laba per Saham turun 6,44% dari Rp137,70 pada tahun 2019 menjadi Rp128,83 per lembar saham. Meskipun demikian, Bank tetap mampu menjaga laba dalam target *bottom-line* Rp3 triliun.

Income for the Year and Earnings per Share

The Bank recorded a decline of 10.69% in Net Income for the Year to Rp3,124 billion. Of this amount, some 0.67% or Rp21 billion, are attributable to Non-Controlling Interests. In line with the decline in net income, Earnings per Share recorded a decline of 6.44% from Rp137.70 in 2019 to Rp128.83 per share in 2020. Nevertheless, the Bank succeeded in keeping net income above the bottom line target of Rp3 trillion.

Laba Tahun Berjalan dan Laba per Saham PaninBank dan Entitas Anak
Profit for the Year and Earnings per Share for PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:						**Total Net Income Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	3.103	3.317	3.113	-6,45%	6,55%	Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	21	181	75	-88,40%	141,33%	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Tahun Berjalan	3.124	3.498	3.187	-10,69%	9,76%	Net Income For The Year
Laba Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	**128,83**	**137,70**	**129,22**	**-6,44%**	**6,56%**	**Earnings per Share (In full Rupiah amount)**

Laba Komprehensif

Laba Komprehensif meningkat 28,63% menjadi sebesar Rp4.945 miliar pada tahun ini. Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak naik signifikan dari Rp346 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.821 miliar, terutama karena didorong oleh Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Instrumen Hutang yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1.942 miliar, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp16 miliar. Dari jumlah Laba Komprehensif tersebut, seluruhnya termasuk dalam Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.

Comprehensive Income

Comprehensive Income increased 28.63% to Rp4,945 billion this year. Total Other Comprehensive Income (Loss) for the Year After Tax increased significantly from Rp346 billion in 2019 to Rp1,821 billion, mainly driven by Gains (Losses) from Changes in Fair Value of Financial Assets Payable Instruments Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income amounting to Rp1,942 billion, which was much higher than the previous year amount of Rp16 billion. Of the Total Comprehensive Income, all of them are included in Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity.

Laba Komprehensif PaninBank dan Entitas Anak
Comprehensive Income of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:						**Total Net Income Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	4.950	3.658	3.854	35,32%	-5,06%	Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	(5)	186	83	-102,69%	124,10%	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif	**4.945**	**3.844**	**3.937**	**28,64%**	**-2,36%**	**Total Comprehensive Income**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Posisi Kas dan Setara Kas di akhir periode tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.570 miliar, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp15.310 miliar. Pada periode ini, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi tercatat sebesar Rp26.275 miliar dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp2.548 miliar serta Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasional dibukukan sebesar Rp27.896 miliar.

STATEMENTS OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

Cash and Cash Equivalents at the end of 2020 was recorded at Rp14,570 billion, lower than the previous year at Rp15,310 billion. During this period, Net Cash Outflow from Investing Activities was recorded at Rp26,275 billion and Net Cash Outflow from Financing Activities was Rp2,548 billion, while Net Cash Inflow from Operating Activities was recorded at Rp27,896 billion.

Laporan Arus Kas PaninBank dan Entitas Anak
Cash Flow Statement for PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Arus Kas Masuk (Keluar) Bersih dari Aktivitas Operasional	27.896	4.605	(11.144)	505,83%	-141,32%	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas Masuk (Keluar) Bersih dari Aktivitas Investasi	(26.275)	(3.799)	(80)	591,63%	4677,35%	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas Masuk (Keluar) Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.548)	(762)	8.740	234,29%	-108,72%	Cash Flows From Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih & Setara Kas	(927)	43	(2.484)	-2.241,52%	-101,74%	Net Increase (Decrease) In Cash and Cash Equivalents
Posisi Kas dan Setara Kas di Awal Periode	15.310	15.441	17.780	-0,85%	-13,16%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Posisi Kas dan Setara Kas di Akhir Periode	14.570	15.310	15.446	-4,83%	-0,88%	Cash and Cash Equivalents at End of Year

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Jumlah komitmen dan kontinjensi bersih yang memiliki risiko kredit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp71.612 miliar, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sejumlah Rp85.418 miliar. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik mencatat penurunan 12,08% dari tahun sebelumnya menjadi Rp40.532 miliar pada tahun ini. Fasilitas yang terikat turun 11,12% menjadi Rp25.581 miliar dan yang tidak terikat turun 14,79% menjadi Rp9.053 miliar.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Total net commitments and contingencies with credit risk for the period ended December 31, 2020 were recorded at Rp71,612 billion, lower than the previous year's at Rp85,418 billion. Unused loan facilities to customers recorded a decrease of 12.08% from the previous year to Rp40,532 billion this year. Pledged facilities decreased 11.12% to Rp25,581 billion and non-pledged facilities decreased 14.79% to Rp9,053 billion.

Laporan Komitmen dan Kontinjensi PaninBank dan Entitas Anak
Commitment and Contingency Report of PaninBank and Subsidiaries

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Komitmen						**Commitments**
Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	512	4.849	4.273	-89,44%	13,49%	Outstanding Spot & Derivatives/ Forward-Buy
Kewajiban Komitmen						**Commitment Liabilities**
Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	35.634	40.532	39.245	-12,08%	3,28%	Undisbursed Loans
Irrevocable L/C yang masih berjalan	714	709	1.996	0,66%	-64,48%	Undisbursed Loans to Bank

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi *spot* dan derivatif/ *forward*	512	4.850	4.272	-89,45%	13,53%	Outstanding FX to Spot & Derivatives/ Forward-Sell
Komitmen Bersih	(36.348)	(41.241)	(41.240)	-11,86%	0,00%	Commitments - Net
Kontinjensi						**Contingencies**
Lainnya	1.010	-	1	-	-	Others
Garansi yang Diberikan	912	782	829	16,67%	-5,73%	Guarantees Issued
Lainnya	468	422	374	10,97%	12,70%	Others
Kontinjensi Bersih	(370)	(1.204)	(1.202)	-69,26%	0,11%	Contingencies - Net

RASIO KEUANGAN

Perseroan senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menjalankan bisnisnya dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan rekomendasi Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu tercermin dalam rasio keuangan utama. Pencapaian kinerja tahun 2020 menunjukkan fondasi keuangan tetap solid. Rasio keuangan yang mencerminkan kualitas permodalan, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi menunjukkan hasil bervariasi namun secara umum masih terjaga di atas standar kesehatan perbankan nasional.

FINANCIAL RATIOS

The Bank always prioritizes the prudential principle in its business while complying with applicable laws and regulations and also considers recommendations from the Government, Bank Indonesia and the Financial Services Authority. This is reflected in the Bank's key financial ratios. The 2020 performance achievement shows that the financial foundation remains solid. Financial ratios, which reflect the quality of capital, profitability, liquidity and efficiency, show mixed results but are generally still above the soundness standards of the national banking system.

Rasio Keuangan PaninBank dan Entitas Anak
Financial Ratio of PaninBank and Subsidiaries

Keterangan	2020	2019	2018	Selisih Gap		Description
				2019-2020	2018-2019	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	29,58%	23,41%	23,33%	6,17%	0,08%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	2,07%	2,51%	2,35%	-0,44%	0,16%	Total Non-Performing Productive Assets & Non-Performing Non-Productive Assets to Total Assets
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,93%	2,43%	2,49%	-0,50%	-0,06%	Non-Performing Productive Assets to Total productive Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,99%	2,22%	2,21%	0,77%	0,01%	Allowance for impairment losses for Financial Assets to Productive Assets
Kredit Bermasalah - Bruto	3,01%	3,02%	3,04%	-0,01%	-0,02%	Non-Performing Loans - Gross
Kredit Bermasalah - Bersih	0,66%	1,12%	0,91%	-0,46%	0,21%	Non-Performing Loans - Net
Tingkat Pengembalian Aset	1,91%	2,08%	2,16%	-0,17%	-0,08%	Return on Asset
Tingkat Pengembalian Ekuitas	7,66%	8,90%	9,23%	-1,24%	-0,33%	Return on Equity
Margin Bunga Bersih	4,62%	4,83%	4,84%	-0,21%	-0,01%	Net Interest Margin
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	79,54%	77,96%	78,27%	1,58%	-0,31%	Operating Expenses to Operating Revenues
Biaya terhadap Pendapatan	45,42%	44,43%	-	0,99%	-	Cost to Income Ratio
Rasio Kredit terhadap Simpanan Nasabah	90,82%	115,28%	110,07%	-24,46%	5,21%	Loan to Deposit Ratio

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

PaninBank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam mata uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah kemudian diatur secara lebih rinci pada Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Informasi SBDK yang berlaku dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank www.panin.co.id.

Bank menggunakan SBDK sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. Akan tetapi, SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besaran suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Bank senantiasa meninjau ulang dan memperbaharui SBDK sesuai dengan pergerakan suku bunga acuan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*. SBDK di PaninBank, dikelompokan berdasarkan segmentasi kredit menjadi empat kelompok, yaitu kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi.

PRIME LENDING RATE

PaninBank published the Prime Lending Rate (SBDK) in Rupiah as stipulated in OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 on Transparency and Publication of Bank Reports. The provisions of laws and regulations regarding the information transparency of banks' product and the use of customer personal data are regulated in more detail in OJK Circular Letter Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports. The applicable Prime Lending Rate information can be seen in publications at each of the Bank's office and/or the Bank's website at www.panin.co.id.

The Bank uses SBDK as the basis for determining the loan interest rate that will be charged to customers. However, the SBDK does not take into account the risk premium estimation component, the amount of which depends on the bank's assessment of the risk of each debtor or group of debtors. Thus, the amount of the loan interest rate charged to debtors is not necessarily the same as the SBDK.

The Bank constantly reviews and updates the prime lending rate according to the movement of the BI 7-day (Reverse) Repo Rate. Prime lending rates at PaninBank are grouped based on credit segmentation into four groups, namely corporate credit, retail credit, micro credit and consumer credit.

Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*) PaninBank

(%)

Periode	Kredit Korporasi Corporate Loan	Kredit Ritel Retail Loan	Kredit Mikro Micro Loan	Kredit Konsumsi Consumer Loan		Period
				KPR	Non KPR	
Maret 2018	9,81%	10,49%	17,76%	9,83%	9,83%	March 2018
Juni 2018	9,75%	10,47%	17,72%	9,77%	9,77%	June 2018
September 2018	9,88%	10,47%	18,00%	9,90%	9,90%	September 2018
Desember 2018	10,18%	10,73%	18,00%	10,20%	10,20%	December 2018
Maret 2019	10,65%	10,73%	18,00%	10,67%	10,67%	March 2019
Juni 2019	10,65%	10,73%	18,00%	10,67%	10,67%	June 2019
September 2019	10,65%	10,68%	17,93%	10,62%	10,62%	September 2019
Desember 2019	10,65%	10,60%	17,93%	10,62%	10,62%	December 2019
Maret 2020	10,25%	10,35%	17,83%	10,35%	10,35%	March 2020
Juni 2020	10,22%	10,35%	17,83%	10,35%	10,35%	June 2020
September 2020	10,44%	9,97%	17,33%	10,25%	10,25%	September 2020
Desember 2020	10,23%	9,65%	16,50%	9,50%	9,08%	December 2020

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Bank senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud komitmen dalam upaya turut serta membangun negara melalui instrumen perpajakan. Pajak yang dibayarkan Bank kepada Negara selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

COMPLIANCE AS TAXPAYER

The Bank always complies with the prevailing laws and regulations as a form of commitment in the efforts to participate in developing the country through taxation instruments. The taxes paid by the Bank to the State during the last three years are as follows:

Pembayaran Pajak PaninBank

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Pembayaran Pajak	2020	2019	2018	Tax Payment
Pajak Penghasilan Badan	787,10	976,10	1.073,67	Corporate Income Tax
Pajak Penghasilan Karyawan	72	64	61	Individual Income Tax

PERUBAHAN ATURAN DAN KEBIJAKAN YANG BERPENGARUH PADA TAHUN 2020

SIGNIFICANT CHANGES OF REGULATIONS AND POLICIES IN 2020

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

PaninBank melakukan kajian terhadap peraturan baru maupun amendemen dari peraturan yang telah ada sebelumnya untuk mengindentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan ketentuan tersebut dan kepatuhan Bank terhadap peraturan tersebut. Uraian tentang peraturan perundangan dan perubahannya yang efektif berlaku di sepanjang tahun 2020 beserta dampaknya terhadap kinerja PaninBank adalah sebagai berikut:

Changes in Laws and Regulations with Significnat Impact to the Bank

PaninBank continues to review new regulations as well as amendments to existing regulations to identify the impact that may result from changes in these provisions, and the Bank's compliance with these regulations. A description of such laws and regulations and the respective changes in effect throughout 2020, as well as their impact on PaninBank's performance, is as follows:

Peraturan Otoritas Moneter dan Keuangan yang Diterapkan pada Tahun 2020

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	**Dampak** | Impact
	Menteri Keuangan Minister of Finance		
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.05/2020 concerning Fund Placement in Banks	1. Peraturan ini mengatur mengenai Penempatan Dana kepada Perbankan untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) day/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 4. Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN adalah rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan Program PEN. 5. Penempatan Dana dilakukan kepada Bank Peserta.	1. This regulation regulates the Placement of Funds to Banks to implement the National Economic Recovery (PEN) program. 2. State Revenue and Expenditure Budget, hereinafter referred to as APBN, is an annual state government financial plan approved by the House of Representatives. 3. The National Economic Recovery Program, hereinafter referred to as the PEN Program, is a series of activities for the recovery of the national economy which is part of the state financial policy implemented by the Government to accelerate the handling of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and/or face threats that endanger the economy national and/or financial system stability as well as saving the national economy. 4. Fund Placement is an activity carried out by the government by placing a certain amount of funds in a certain commercial bank with a certain interest. Financial Services Authority, hereinafter abbreviated as OJK, is a financial sector regulatory and supervisory agency as defined in the Law on Financial Services Authority. 5. Fund Placements are made to Participating Banks.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
PMK Nomor 104/ PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Minister of Finance Regulation Number 104/ PMK.05/2020 concerning Placement of Funds in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program	1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 2. Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra. Penempatan Dana dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang Negara, Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN. 3. Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana sebagaimana dimaksud untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. 4. Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; b. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/ modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; c. Memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, berupa: 1) Ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan/atau 2) Pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;	1. The National Economic Recovery Program, hereinafter referred to as the PEN Program, is a series of activities for the recovery of the national economy which is part of the state financial policy implemented by the Government to accelerate the handling of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and/or face threats that endanger the economy national and/or financial system stability as well as saving the national economy. 2. In the context of implementing the PEN Program, the Government shall place Funds Placement in Partner Commercial Banks. Fund Placements are implemented using the State money management mechanism. Fund Placements at Partner Commercial Banks as referred to are part of the PEN Program financing 3. Partner Commercial Banks use Placement of Funds as intended to channel credit/financing to debtors in order to support and develop the ecosystem of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives and to support the acceleration of national economic recovery. 4. A Commercial Bank that becomes a Partner Commercial Bank as referred to in Article 2 must meet the following criteria at least: a. Has a valid business license as a Commercial Bank; b. Having business activities in the territory of the Republic of Indonesia and the majority of shareholders/capital are the State, Local Government, Indonesian Legal Entities, and/or Indonesian Citizens; c. Have a minimum composite health level of 3 (three) which has been verified by the Financial Services Authority; and d. Carrying out banking business activities that support the acceleration of national economic recovery, in the form of: 1) Credit expansion to debtors of Micro, Small, Medium Enterprises, Cooperatives, non-UMKM debtors and/or corporations in the context of national economic recovery; and/or 2) Providing financial support to financial institutions to expand credit to debtors of Micro, Small, Medium Enterprises, Cooperatives, non-UMKM debtors, and/or corporations in the context of restoring the national economy;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PMK Nomor 138/ PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Minister of Finance Regulation Number 138/ PMK.05/2020 concerning Procedures for the Provision of Interest/Margin Subsidy in the Context of Supporting the National Economic Recovery Program	1. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program Pemulihan Eekonomi Nasional (PEN). 2. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan. 3. Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan: a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/atau debitur lainnya dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; c. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 4. Debitur lainnya sebagaimana dimaksud merupakan: a. debitur KPR sampai dengan tipe 70; dan b. debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal. 5. Dalam hal Debitur memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.	1. The provision of interest subsidies/margin subsidies aims to protect, maintain, and improve the debtor's economy in running his business as part of an effort to support the National Economic Recovery Program (PEN). 2. The PEN Program Margin Interest Subsidy/Margin Subsidy is given to banking debtors, finance companies, and Government Credit Program Distribution Agencies who meet the requirements. 3. Banking debtors and finance companies as referred to must meet the following requirements: a. Is a Micro, Small Business, Medium Enterprise, Cooperative, and/or other debtors with a maximum Credit/Financing ceiling of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah); b. Have a Credit/Financing Debit Tray until February 29, 2020; c. Not included in the National Black List for Credit/ Financing ceilings above Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah); d. Has a current performing loan category (collectibility of 1 or 2) calculated as of February 29, 2020; and e. Have a Taxpayer Identification Number or register to get a Taxpayer Identification Number. 4. Other debtors as referred to are: a. KPR debtors up to type 70; and b. Motor Vehicle Credit Debtors for productive businesses, including those used for motorcycle taxis and/or informal businesses. 5. In the event that the Debtor has a Credit/Financing agreement of more than Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah), he must obtain restructuring from the Credit/Financing Provider.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority (OJK)			
POJK Nomor 12/ POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum OJK Regulation Number 12/POJK.03/2020 concerning Consolidation of Commercial Banks	1. Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank dapat memiliki 1 (satu) Bank atau beberapa Bank. 2. PSP Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. Bank; b. Badan hukum lembaga keuangan bukan Bank; c. Badan hukum bukan lembaga keuangan; atau d. Perorangan; 3. Konsolidasi Bank dilakukan melalui skema: a. Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi; b. Pengambilalihan yang diikuti dengan Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi; c. Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap Bank yang telah dimiliki; d. Pembentukan KUB karena Pemisahan Unit Usaha Syariah; atau e. Pembentukan KUB karena Pengambilalihan; 4. KUB sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, huruf d, atau huruf e dibentuk bagi PSP, Perusahaan Induk, dan/atau pelaksana Perusahaan Induk yang dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Bank yang berada dalam KUB. 5. KUB dapat dibentuk dalam hal rencana Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi Bank tidak akan meningkatkan skala usaha secara signifikan terhadap Bank setelah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.	1. Controlling Shareholders (PSP) of a Bank may own 1 (one) Bank or several Banks. 2. PSP Bank as referred to in paragraph (1) may consist of: a. Banks; b. Non-Bank financial institutions; c. Non-financial institutions; or d. Individuals; 3. Bank consolidation is carried out through the following schemes: a. Merger, Consolidation, or Integration; b. Acquisition followed by Merger, Consolidation, or Integration; c. Establishment of Bank Business Groups (KUB) for Banks that are already owned; d. Establishment of KUB due to Separation of Sharia Business Units; or e. KUB formation due to takeover; 4. KUB as referred to in number 3 letter c, letter d, or letter e is formed for PSP, Parent Company, and/or Parent Company executors who are deemed capable of meeting the capital adequacy and liquidity of Banks that are in KUB. 5. KUB may be formed in the event that the proposed Merger, Consolidation, or Bank Integration will not significantly increase the business scale of the Bank after the Merger, Consolidation, or Integration is carried out while still complying with the provisions referred to in number 4	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 13/ POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum OJK Regulation Number 13/POJK.03/2020 concerning Amendment to OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016 on Implementation of Risk Management in the Utilization of Information Technology in Commercial Banks	1. Bank wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia. 2. Bank hanya dapat menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank wajib memastikan bahwa data yang digunakan dalam Sistem Elektronik yang ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain: a. Sistem Elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal Bank yang bersifat global, termasuk lintas Negara. b. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor pusat Bank atau kantor induk/kantor entitas utama di luar wilayah Indonesia. c. Sistem Elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan kantor pusat Bank atau kantor induk Bank di luar wilayah Indonesia. d. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pelayanan kepada nasabah secara global, yang memerlukan integrasi dengan Sistem Elektronik milik grup Bank di luar wilayah Indonesia; e. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen komunikasi antara kantor pusat Bank dengan kantor cabang, atau antara anak perusahaan dengan perusahaan induk; dan/atau f. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen intern Bank. 4. Bank wajib mengimplementasikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). 5. Bank yang tidak mengimplementasikan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).	1. Banks are required to place Electronic Systems at Data Centers and Disaster Recovery Centers in the territory of Indonesia. 2. Banks may only place Electronic Systems at Data Centers and/or Disaster Recovery Centers outside the territory of Indonesia as long as they obtain approval from the Financial Services Authority. 3. Banks are required to ensure that data used in Electronic Systems placed at Data Centers and/or Disaster Recovery Centers outside the territory of Indonesia is not used for purposes other than: a. Electronic System used to support integrated analysis in order to comply with the provisions issued by the authority of the Bank's country of origin which is global, including across countries. b. Electronic systems used for risk management in an integrated manner with the Bank's head office or the main office/main entity office outside the territory of Indonesia. c. Electronic systems used for the implementation of anti money laundering and terrorism financing prevention in an integrated manner with the Bank's head office or Bank's main office outside the territory of Indonesia. d. Electronic Systems used for services to customers globally, requiring integration with Electronic Systems belonging to the Bank group outside the territory of Indonesia; e. Electronic systems used for communication management between the Bank's head office and branch offices, or between a subsidiary and a parent company; and/or f. Electronic systems used for internal management of the Bank. 4. Banks are required to implement action plans that have been submitted to the Financial Services Authority as referred to in Article 41 paragraph (2). 5. Banks that do not implement the action plan as referred to in paragraph (1) are declared to have violated the obligations referred to in Article 21 paragraph (1).	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concenring Plans and Implementation of General meeting of Shareholders of Public Companies	1. Bank wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 2. Bank dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. 3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.	1. Banks are required to hold an Annual GMS at the latest 6 (six) months after the end of the financial year. 2. The Bank may hold other GMS at any time based on the need for the interest of the Bank. 3. The Board of Directors shall be obliged to announce the GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding a GMS is received by the Board of Directors.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	4. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman. 5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan pemegang saham, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	4. The Board of Directors is obliged to deliver notification of the agenda of the meeting and registered letter from the shareholders or the Board of Commissioners to the Financial Services Authority no later than 5 (five) working days prior to the announcement. 5. In the event that the Board of Directors does not announce the GMS on the recommendation of the shareholders, not later than 15 (fifteen) days from the date the request for a GMS is received by the Board of Directors, the Board of Directors must announce: a. There is a request for a GMS from the shareholders that was not held; and b. The reason for not holding the GMS.	
POJK Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik OJK Regulation Number 16/ POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies through Electronic Means	1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Bank wajib mengikuti ketentuan POJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, kecuali diatur khusus dalam POJK ini. 2. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Bank dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. 3. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan: a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau b. sistem yang disediakan oleh Bank; 4. Dalam hal Bank melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, Bank wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. 5. Penyedia e-RUPS atau Bank wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.	1. The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) by a Bank is obliged to comply with the POJK provisions regarding the planning and holding of a General Meeting of Shareholders for a Public Company, unless specifically stipulated in this POJK. 2. In addition to the implementation of the GMS as referred to in the POJK regarding the planning and holding of the GMS of a Public Company, Banks can conduct the GMS electronically. 3. The implementation of the GMS electronically can be done by using: a. e-GMS provided by e-GMS Provider; or b. The system provided by the Bank; 4. In the event that a Bank conducts the GMS electronically by using the e-GMS provided by the e-GMS Provider, the Bank is obliged to comply with the provisions for using the e-GMS set by the e-GMS Provider. 5. The e-GMS provider or the Bank must be connected with the Depository and Settlement Institution and the securities administration bureau to ensure eligible shareholders attend the GMS.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 17/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha OJK Regulation Number 17/ POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Change in Business Activity	1. Bank yang melakukan Transaksi Material dalam: a. 1 (satu) kali transaksi; atau b. Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu; c. wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini. 2. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Bank. 3. Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal: a. Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Bank; b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Bank nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Bank nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Bank nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen). 4. Dalam hal transaksi dilakukan oleh Bank yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Bank. 5. Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang terkini dari: a. Laporan keuangan tahunan yang diaudit; b. Laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil reviu ataupun audit; atau c. Laporan keuangan interim selain huruf b yang diaudit	1. Banks that conduct material transactions in: a. 1 (one) transaction; or b. A series of transactions for a specific purpose or activity; c. Must comply with the provisions stipulated in this POJK. 2. A transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the equity of the Bank. 3. Transactions in the form of acquisitions and disposals of companies or operating segments are categorized as Material Transactions in terms of: a. The transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Bank's equity; b. The total assets that are the object of the transaction divided by the total assets of the Bank, the value is equal to or more than 20% (twenty percent); c. The net profit of the object of the transaction divided by the net profit of the Bank is equal to or more than 20% (twenty percent); or d. The operating income of the object of the transaction divided by the operating income of the Bank is equal to or more than 20% (twenty percent). 4. If the transaction is carried out by a Bank with negative equity, the transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 10% (ten percent) or more of the Bank's total assets. 5. Value of Material Transactions as referred to in Article 3 is calculated based on the latest financial statements of: a. Audited annual financial statements; b. Quarterly financial reports accompanied by accountants' reports on the results of reviews or audits; or c. Audited interim financial statements other than letter b	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 18/ POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank OJK Regulation Number 18/ POJK.03/2020 concerning Written Order for the Handling of Bank Problems	1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk: a. Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau b. Menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. 2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a kepada Bank yang memenuhi kriteria:	1. The Financial Services Authority has the authority to issue Written Orders to Banks to: a. Carry out a Merger, Consolidation, Acquisition, and/or Integration; and/or b. Accept Merger, Consolidation, Acquisition, and/or Integration. 2. The Financial Services Authority issues Written Orders as referred to in number 1 letter a to Banks that meet the following criteria:	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
	a. Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha atau dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; dan/atau b. Bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penguatan Bank. 3. Bank yang diberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib menyusun rencana tindak untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis 4. Bank yang diberikan Perintah Tertulis menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan rencana tindak untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5. Bank yang diberikan Perintah Tertulis wajib melaksanakan dan menjaga kelancaran proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai dengan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	a. Banks that, based on the assessment of the Financial Services Authority, experience financial problems that can interfere with business continuity or are deemed incapable of coping with the pressures that are being or will be faced; and/or b. Banks with controlling shareholders who do not have the ability to make efforts to strengthen the Bank. 3. A bank that is given a Written Order as referred to in number 2 is obliged to prepare an action plan to follow up the Written Order. 4. A bank that is given a Written Order submits information on the progress of the implementation of the action plan to follow up on the Written Order as referred to in paragraph (1) to the Financial Services Authority. 5. A Bank that is given a Written Order is obliged to carry out and maintain the smooth running of the Merger, Consolidation, Acquisition and/or Integration process in accordance with the action plan as referred to in paragraph (3).	
POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan OJK Regulation Number 36/POJK.02/2020 concerning the Third Amendment to OJK Regulation Number 4/POJK.04/2014 on Procedures for Collections on Administrative Sanction in the Form of Penalties in the Financial Services Sector	1. Latar belakang penyusunan perubahan POJK ini adalah implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan, sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga. 2. Penambahan 2 (dua) ayat pada ketentuan Pasal 7 POJK 4, yaitu ayat (4) dan ayat (5) dengan isi ketentuan sebagai berikut: a. Ayat (4) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan yang terjadi di luar pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Otoritas Jasa keuangan dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). b. Ayat (5) Jangka waktu penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh OJK. 3. Penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga karena terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berlaku untuk pengenaan sanksi yang ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2020.	1. The background for the preparation of this POJK change is the implications of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic which has had an impact on the financial system which has resulted in decreased productivity of financial service industry players, so that in the end it will reduce the ability of financial service industry players to fulfill their obligations in accordance with laws and regulations, including the obligation to pay Administrative Sanctions in the form of fines and/or interest. 2. The addition of 2 (two) paragraphs to the provisions of Article 7 POJK 4, namely paragraph (4) and paragraph (5) with the contents of the following provisions: a. Paragraph (4) To maintain financial system stability in the midst of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and/or to face the threat of an economic crisis and/or financial system stability that occurs outside of the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic, The Financial Services Authority can determine the postponement of the issuance of warning letters and the imposition of Interest as referred to in paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3). b. Paragraph (5) The period of postponement of issuing a warning letter and the imposition of Interest as referred to in paragraph (4) is determined by the OJK. 3. The postponement of issuing a warning letter and imposition of Interest due to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic applies to the imposition of sanctions that have been set since January 1, 2020.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan OJK Regulation Number 37/POJK.04/2020 concerning Procedures for Exemption in Fulfilling the Principle of Transparency for Issuers or Public Companies that are Financial Services Institutions in the Context of Prevention and Management of Financial Crisis	1. POJK ini merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 2. Adapun tujuan penerbitan POJK adalah untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan. 3. OJK dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat. 4. Pemohon adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan. 5. Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat dilakukan berdasarkan: a. Penelaahan oleh OJK terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tertentu; dan b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada OJK;	1. This POJK is an implementation of the provisions of Article 23 paragraph (1) letter b Government Regulation in lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or In the context of facing threats that endanger the country's economy and/or financial system stability. 2. The purpose of issuing POJK is to provide exemptions for the implementation of the Principle of Transparency in the Capital Market for Issuers or Public Companies that are financial service institutions in the context of preventing and resolving financial system crises and creating financial system stability. 3. OJK may stipulate exemptions for compliance with the Principle of Disclosure for Issuers or Public Companies that are Financial Services Institutions licensed by OJK to collect and/or manage public funds. 4. Applicant is an Issuer or Public Company that is a Financial Services Institution that applies for an exemption from compliance with the Principles of Disclosure. 5. Stipulation of exceptions for compliance with the Principle of Disclosure can be made based on: a. OJK's review of the Issuer or Public Company that is a certain Financial Service Institution; and b. The application submitted by the Petitioner to the OJK;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
POJK Nomor 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan OJK Regulation Number 42/ POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflict of Interest	1. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. 2. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan 3. Lingkup transaksi meliputi Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi dalam: a. 1 (satu) kali transaksi; atau b. suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan POJK ini. 4. Bank yang melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. 5. Bank wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Affiliated Transaction is any activity and/or transaction carried out by a publicly listed or controlled company with an affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or controller, including every activity and/or transaction carried out by a publicly listed company or controlled company for the benefit of an affiliate of a public company or an affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a major shareholder or the controlling party. 2. Conflict of Interest Transactions are transactions conducted by a publicly traded or controlled company with any party, either with an Affiliate or a party other than an Affiliate, which contains a Conflict of Interest. 3. The scope of the transaction includes Public Companies that carry out Affiliated Transactions in: a. 1 (one) transaction; or b. a series of transactions for a specific purpose or activity, must comply with the provisions of this POJK. 4. Banks conducting Affiliated Transactions are required to have adequate procedures to ensure that Affiliated Transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices. 5. Banks are required to keep documents related to the implementation of the procedures as referred to in the document retention period in accordance with the provisions of laws and regulations.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 45/ POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan OJK Regulation Number 45/ POJK.03/2020 concerning Financial Conglomerate	1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. 3. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. 5. Piagam Korporasi adalah perjanjian antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.	1. Financial Services Institutions, hereinafter abbreviated as LJK, are institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. 2. Financial Conglomerates are LJKs that are in a group or group due to ownership and/or control links. 3. Control is an action that aims to influence the management and/or policies of the LJK, in any way, either directly or indirectly. 4. Main Entity is the parent LJK of the Financial Conglomerate or LJK appointed by the controlling shareholder of the Financial Conglomerate. 5. Corporate Charter is an agreement between the Main Entity and LJK members of the Financial Conglomerate.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 48/ POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 POJK Number 48/ POJK.03/2020 Concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 11/ POJK.03/2020 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019	1. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehatihatian dan menghindari terjadinya moral hazard. 2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup: a. penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar; b. penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan c. pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/ pembiayaan baru. Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penambahan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuditas Bank. 3. Penambahan pengaturan antara lain: a. Penerapan manajemen risiko Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, Bank menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi: 1) memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; 2) melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit/ pembiayaan sesuai POJK ini;	1. This POJK was issued as an anticipatory and further step to encourage optimization of banking performance, maintain financial system stability, and support economic growth by still applying the precautionary principle and avoiding moral hazard. 2. The main points of regulation in POJK Stimulus COVID-19 in the form of relaxation policies for debtors affected by COVID-19 are still valid, including, among others: a. Credit/financing quality assessment is only based on the accuracy of principal and/or interest payments for credit/financing up to Rp10 billion; b. Determination of credit/financing quality to be Current after restructuring; and c. Separation of quality determination for new credit/ financing. As for the POJK Amendments to the POJK Stimulus COVID-19, there are additional regulations to ensure the implementation of risk management and prudential principles for banks in implementing these policies, as well as policies related to Bank capital and liquidity. 3. Additional provisions on: a. Application of risk management. In implementing policies that support the stimulus of economic growth, banks should implement risk management which at least includes: 1) Have guidelines for determining debtors who are affected by the spread of COVID-19; 2) Assessing debtors who are able to survive the impact of COVID-19 and still have business prospects so that they can be given credit/ financing restructuring in accordance with this POJK;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	3) membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini; 4) mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan 5) melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank. b. Restrukturisasi kredit/pembiayaan, meliputi: 1) Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan Bank bagi Bank Umum Konvensional (BUK). 2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian. 3) Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud. c. Kebijakan bagi Bank sebagai dampak penyebaran COVID-19 Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: 1) Bank yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, Bank umum kegiatan usaha 4, dan Bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage* ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. 2) Bank dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021. 3) Bank dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020. 4) Bank yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan Bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.	3) Forming reserves for debtors deemed unable to survive after the credit/financing restructuring is carried out in accordance with this POJK; 4) Considering capital resilience by taking into account additional reserves to anticipate the potential for deterioration in credit quality/ restructuring financing in the event that the bank will distribute dividends and/or bonuses; and 5) Conduct periodic resilience tests on potential deterioration in credit quality or restructured financing and its impact on bank liquidity and capital. b. Credit/financing restructuring, including: 1) The restructured credit/financing of COVID-19 is exempted from the calculation of low quality assets (KKR) in the assessment of the soundness of the Bank for Conventional Commercial Banks (BUK). 2) Banks can adjust the credit/financing restructuring approval mechanism as long as it complies with the prudential principle. 3) Banks must assess the ability of debtors who are affected by the spread of COVID-19 to survive until the end of this POJK. This assessment will have an impact on the assessment of the quality of the restructured credit/financing. c. Policies for banks as a result of the spread of COVID-19 Banks can implement liquidity and capital policies as a result of the spread of COVID-19, which consists of: 1) Banks that are included in the group of commercial banks with business activities 3, commercial banks with business activities 4, and foreign banks can adjust the lower limit of the fulfillment of the liquidity coverage ratio and the net stable funding ratio from 100% (one hundred percent) to 85% (eighty five percent) to with March 31, 2022. 2) Banks can provide education funding for less than 5% (five percent) of the human resource expenditure budget for 2020 and 2021. 3) Banks may determine the quality of foreclosed collateral obtained up to March 31, 2020 based on the quality of the foreclosed collateral at the end of March 2020. 4) Banks that are classified as commercial banks with business activities 3 and commercial banks with business activities 4 may fail to meet the capital conservation buffer of 2.5% (two	
POJK Nomor 51/ POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum Sebagai Kustodian OJK Regulation Number 51/ POJK.04/2020 concerning The Maintenance of Documents by Commercial Banks as Custodian	1. POJK ini merupakan konversi dari Peraturan Bapepam Nomor X.G.2 sehingga secara substansi tidak terdapat perubahan signifikan dibandingkan peraturan sebelumnya. 2. Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, serta keterangan tertulis yang berhubungan dengan: a. nasabah yang Efeknya disimpan pada Bank Kustodian paling sedikit memuat dokumen: 1) kontrak dengan nasabah jasa Bank Kustodian; dan 2) daftar biaya untuk jasa yang diberikan. b. posisi Efek yang disimpan pada Bank Kustodian paling sedikit memuat dokumen: 1) status Efek nasabah yang disimpan; 2) rahasia Efek yang disimpan; dan 3) bentuk Efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya. c. buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanannya serta hak nasabah yang melekat pada Efek yang dititipkan paling sedikit memuat dokumen:	1. This POJK is a conversion from Bapepam Regulation Number X.G.2 so that there is no significant change in substance compared to the previous regulation. 2. Commercial Banks that have obtained the approval of the Financial Services Authority to conduct business activities as Custodians are required to administer, keep and maintain records, books, data and written statements relating to: a. Customers whose Securities are kept at the Custodian Bank contain at least the following documents: 1) Contracts with Custodian Bank service customers; and 2) A list of fees for services rendered. b. Securities positions kept at the Custodian Bank contain at least the following documents: 1) Client's Securities Status that is deposited; 2) Secured securities that are kept; and 3) The form of Securities as a certificate or other proof of collective custody. c. The register of customers and the administration of their deposit and the rights of clients attached to the securities being deposited contains at least the following documents:	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	1) daftar transaksi harian Efek; 2) pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dulu atau hak atas Efek lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan; dan 3) memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, Biro Administrasi Efek dan Anggota Bursa Efek. d. tempat penyimpanan yang aman dan terpisah paling sedikit memuat dokumen: 1) pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa Kustodian; 2) perubahan penanggung jawab Bank Kustodian; 3) spesifikasi ruangan penyimpanan Efek, lemari besi atau brankas; dan 4) buku pedoman operasional. 3. Dokumen dimaksud wajib: a. disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan lain Bank Umum; b. tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan; dan c. Dokumen dimaksud wajib disimpan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.	1) List of daily Securities transactions; 2) Distribution of dividends, bonuses, exercise of pre-emptive rights or rights over other Securities, including the use of the voting rights represented; and 3) Memorandum of dispute settlement between clients, Securities Administration Bureau and Securities Exchange Members. d. A safe and separate storage area containing at least the following documents: 1) Employees who are specifically responsible for the operation of Custodian services; 2) Change of person in charge of the Custodian Bank; 3) Specifications for Securities storage rooms, safes or safes; and 4) Operational manual. 3. Such documents are required to be: a. Stored in a safe place separate from other commercial bank activities; b. Available at any time for the purpose of inspection by the Financial Services Authority; and c. The said document must be kept for a minimum of 10 (ten) years.	
POJK Nomor 53/ POJK.04/2020 tentang Rekening Efek pada Kustodian OJK Regulation Number 53/ POJK.04/2020 concerning Securities Account at Custodian	1. POJK tentang Rekening Efek Pada Kustodian merupakan konversi dari Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1997 tentang Rekening Efek Pada Kustodian. 2. Tujuan penerbitan POJK tentang Rekening Efek Pada Kustodian adalah memberikan kejelasan terkait ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme serta persyaratan rekening Efek pada kustodian. 3. Substansi pengaturan POJK tentang Rekening Efek Pada Kustodian yaitu ketentuan sebagai berikut: a. Bukti kepemilikan manfaat atas efek Ketentuan ini mengatur terkait bukti kepemilikan Efek, yaitu: 1) Bentuk dari Efek yang tercatat dalam rekening Efek pada Kustodian dalam Penitipan Kolektif; 2) Kewajiban Kustodian untuk memberikan bukti kepemilikan manfaat atas Efek kepada pemegang rekening Efek dalam bentuk konfirmasi tertulis; 3) Kewajiban Kustodian untuk mencatatkan pemindahan kepemilikan manfaat atas Efek; dan 4) Pembuktian dalam perselisihan atas saldo rekening Efek.	1. The POJK regarding Securities Accounts at Custodians is a conversion of Bapepam Regulation Number VI.A.3, Attachment to Decision of the Head of Bapepam Number Kep-48/PM/1997 concerning Securities Accounts at Custodians. 2. The purpose of issuing POJK concerning Securities Accounts at Custodians is to provide clarity regarding the provisions governing the mechanism and requirements for Securities accounts at custodians. 3. The substance of the POJK regulation concerning Securities Accounts at Custodian is the following provisions: a. Proof of beneficial ownership of securities. This provision regulates proof of ownership of Securities, namely: 1) Forms of Securities that are recorded in a Securities account with a Custodian in Collective Custody; 2) The Custodian's obligation to provide proof of beneficial ownership of Securities to the Securities account holder in the form of a written confirmation; 3) The Custodian's obligation to record the transfer of beneficial ownership of Securities; and 4) Evidence in disputes over securities account balances.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
	b. Persyaratan pendaftaran Efek atas nama Kustodian Ketentuan ini mengatur terkait keterangan tambahan dari pemegang rekening pada saat pendaftaran Efek, kewajiban Emiten untuk memperlakukan saham yang tercatat pada Kustodian sebagai saham yang dimiliki pemegang saham pendiri, serta kewajiban penentuan keterangan pemegang rekening pada pernyataan dari Kustodian. c. Kesepadanan Efek Ketentuan ini mengatur terkait Efek dalam Penitipan Kolektif yang dianggap sepadan dan proporsionalitas atas biaya dan manfaat dari Efek tersebut. d. Hak dan kewajiban pemegang rekening Efek pada Kustodian Ketentuan ini mengatur terkait hak dan kewajiban pemegang rekening, hak pemegang rekening untuk menuntut Kustodian untuk hal tertentu, penegasan bahwa Efek yang dicatat dalam rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, dan kewajiban Kustodian untuk menjaga kerahasiaan identitas pemegang rekening. e. Hak dan kewajiban Kustodian Ketentuan ini mengatur terkait hak Kustodian untuk meminta ganti rugi yang timbul karena tindakan pemegang rekening dan/atau membatalkan pencatatan Efek ke dalam rekening Efek dan kewajiban Kustodian untuk mengasuransikan rekening Efek terhadap risiko kerugian pemegang rekening. f. Tanggung jawab atas Efek yang diserahkan Ketentuan ini mengatur terkait kewajiban Pihak yang memasukkan Efek ke dalam rekening Efek untuk bertanggung jawab atas keabsahan Efek dan mekanisme pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek oleh Emiten.	b. Requirements for registering securities in the name of the custodian. This provision regulates additional information from the account holder at the time of registration of securities, the obligation of the Issuer to treat shares registered with the Custodian as shares owned by the founding shareholder, and the obligation to determine the account holder's information in a statement from the Custodian. c. Securities Equivalence This provision regulates Securities in Collective Custody which are considered to be equivalent and proportional to the costs and benefits of such Securities. d. Rights and obligations of the Securities account holder at the Custodian This provision regulates the rights and obligations of the account holder, the right of the account holder to sue the Custodian for certain matters, confirmation that Securities recorded in the Securities account are not assets of the Custodian, and the Custodian's obligation to maintain the confidentiality of the account holder's identity. e. Rights and obligations of the Custodian This provision regulates the rights of the Custodian to ask for compensation arising from the actions of the account holder and/or canceling the recording of Securities into the Securities account and the Custodian's obligation to insure the Securities account against the risk of loss to the account holder. f. Responsibility for Securities delivered. This provision regulates the obligations of Parties that deposit Securities into a Securities account to be responsible for the validity of Securities and the mechanism for registering Securities or for confirming the validity of Securities certificates by Issuers.	

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
	g. Penegasan mutlak atas penyerahan Efek terhadap pembayaran Ketentuan ini mengatur terkait hak pemegang rekening untuk memerintahkan Kustodian untuk menerbitkan dan melaksanakan penegasan mutlak atas penyerahan Efek terhadap pembayaran.	g. Absolute confirmation of the delivery of Securities against payment. This provision regulates the right of the account holder to order the Custodian to issue and carry out absolute confirmation of the delivery of Securities for payment.	
POJK Nomor 60/ POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun OJK Regulation Number 60/POJK.05/2020 concerning Amendment to OJK Regulation Number 5/POJK.05/2017 on Contributions, Pension Benefits, and Other Benefits Organized by Pension Funds	1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Perubahan atas POJK 5/2017: a. dana pensiun diharapkan dapat memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya guna mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun; dan b. penyesuaian atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (POJK 5/2017) untuk menampung ketentuan pembayaran manfaatpensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain. 2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan atas POJK 5/2017, antara lain: a. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; b. Pengalihan pembayaran manfaat pensiun kepada anuitas seumur hidup; c. Penyelenggaraan atau pemberian manfaat lain; d. Pengelolaan aset sesuai usia (*life cycle fund*) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); e. Penegakan kepatuhan; dan f. Ketentuan peralihan; 3. Peraturan Dana Pensiun (PDP) dapat memberikan pilihan bagi Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% banyak (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus. 4. Nilai batas bawah untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus tetap, Khusus bagi DPPK Menambahkan ketentuan dimana Pendiri dapat menetapkan nilai batas bawah yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh OJK dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kepentingan peserta. 5. Nilai Batas Atas untuk Pengaturan terkait batas atas dihapus. Dengan demikian, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus hanya dapat dilakukan apabila nilai Manfaat Pensiun kurang dari sama dengan batas bawah.	1. Background and objectives for the preparation of POJK Amendment to POJK 5/2017: a. Pension funds are expected to provide guarantees for the maintenance of welfare and sustainability of retirement income in order to balance the benefits that continue to develop in the labor system and take into account the conditions of the pension funds; and b. Adjustments to POJK Number 5/POJK.05/2017 concerning Contribution, Pension Benefits, and Other Benefits Organized by Pension Funds (POJK 5/2017) to accommodate the provisions for the payment of the first pension benefits at once and the addition of other benefit provisions. 2. The main points of regulation in POJK Amendments to POJK 5/2017, include: a. Payment of pension benefits in lump-sump; b. Transfer of pension benefit payments to life annuities; c. Providing or provision of other benefits; d. Age-appropriate asset management (life cycle fund) in the Employer Pension Fund (DPPK) which operates a Defined Contribution Pension Program (PPIP) and Financial Institution Pension Fund (DPLK); e. Compliance enforcement; and f. Transitional provisions; 3. The Pension Fund Regulation (PDP) may provide options for Participants at retirement or retirement and for widows/widowers or children to receive the first Pension Benefit at most 20% (twenty percent) of the Pension Benefits at once. 4. Lower limit value for the payment of pension benefits at once, especially for DPPK. Adding a provision whereby the Founder can set a lower limit value than determined by the OJK by applying the principle of prudence and taking into account the interests of the participants. 5. Upper Limit Value for Settings regarding upper limit is removed. Thus, the payment of pension benefits at once can only be made if the value of the pension benefits is less than the same as the lower limit.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 61/ POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan OJK Regulation Number 61/ POJK.07/2020 concerning Alternative Institutions for the Resolution of Disputes in the Financial Services Sector	1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. 2. LAPS Sektor Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan: a. diselenggarakan secara independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses; dan b. dipercaya oleh Konsumen dan Bank. 3. LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. 4. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang: a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen; b. memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan; c. melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan; d. membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan; e. melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan f. melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan;	1. Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution, hereinafter referred to as LAPS for the Financial Services Sector, is an institution that performs dispute resolution in the financial services sector outside the court. 2. The LAPS for the Financial Services Sector was formed with the aim that Dispute resolution services in the financial services sector: a. Organized independently, fairly, effectively and efficiently, and easily accessible; and b. Trusted by Consumers and Banks. 3. LAPS for the Financial Services Sector has the function of providing Integrated Dispute resolution services in the financial services sector. 4. To carry out the functions referred to, LAPS Financial Services Sector has the duties and authorities: a. Carry out the handling and settlement of Consumer Disputes; b. Provide dispute resolution consultations in the financial services sector; c. Carry out research and development of Dispute resolution services in the financial services sector; d. Making regulations in the context of dispute resolution in the financial services sector; e. Cooperating with national and international consumer protection institutions/agencies; and f. Developing the competence of mediators and arbitrators registered with LAPS for the Financial Services Sector;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	5. Badan hukum LAPS Sektor Jasa Keuangan berupa badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	5. LAPS Financial Services Sector legal entity in the form of association legal entity registered with the ministry that administers government affairs in the field of law and human rights.	
POJK Nomor 63/ POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK dan SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan OJK OJK Regulation Number 63/ POJK.03/2020 concerning Commercial Bank Reporting through OJK Reporting System, and SEOJK Number 26/SEOJK.03/2020 on Conventional Commercial Bank Reporting through OJK Reporting System	1. Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bank wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 4. Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan. 5. Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1. Banks are required to prepare and submit reports to the Financial Services Authority online through the Financial Services Authority Reporting System. 2. Banks are required to prepare and submit corrections to information errors in the Report as referred to online through the Financial Services Authority Reporting System. 3. Banks that do not comply with the provisions referred to will be subject to administrative sanctions in the form of a written warning. 4. The Bank is responsible for the completeness, accuracy, current and integrity of the data, as well as the timeliness of Report submission. 5. The Bank appoints an officer in charge of reporting to the Financial Services Authority.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
POJK Nomor 64/ POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK Regulation Number 64/POJK.03/2020 on Amendment to OJK Regulation Number 18/ POJK.03/2017 on Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Service System	1. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor. 2. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah system informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. 3. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan. 4. Pihak yang wajib menjadi Pelapor meliputi: a. Bank Umum; b. BPR; c. BPRS; d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek; f. Lembaga Pendanaan Efek; g. LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; h. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK 5. Bank wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.	1. Debtor Information is information about Debtors, Fund Provision Facilities received by Debtors, and/or other related information presented based on Debtor Reports received by OJK from Reporters. 2. Financial Information Service System, hereinafter referred to as SLIK, is an information system managed by OJK to support the implementation of supervisory duties and information services in the financial sector. 3. Credit Information Management Institution, hereinafter referred to as LPIP, is an institution or agency that collects and processes credit data and other data to produce credit information. 4. Parties that are required to become Reporters include: a. Commercial banks; b. BPR; c. BPRS; d. Financing Institutions that provide Fund Provision Facilities; e. Securities companies that carry out business activities as securities brokers; f. Securities Funding Institution; g. Other LJKs that provide Funds Provision Facilities include Indonesian export financing institutions, pawnshops, housing secondary finance companies, and financing companies for the development of cooperatives, small and medium enterprises; h. LJKs that are required to become Reporters in accordance with OJK Regulations 5. Banks are required to submit Debtor Reports to OJK in a complete, accurate, current, complete, and timely manner every month for the position of the end of the month.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
SEOJK Nomor: 3/ SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik OJK Circular Letter Number 3/SEOJK.04/2020 concerning Other Conditions As Market Conditions That Fluctuate Significantly in the Implementation of Shares Buyback Issued by Issuers or Public Companies	1. Bahwa kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%. 2. Bahwa kondisi perekonomian sedang mengalami pelambatan dan tekanan baik regional maupun nasional, antara lain disebabkan oleh wabah COVID-19. 3. Bahwa dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan karena kondisi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, diperlukan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat melakukan pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013.	1. Whereas the condition of stock trading on the Indonesia Stock Exchange from the beginning of 2020 until the issuance of this Financial Services Authority Circular was under significant pressure as indicated by a decrease in the Composite Stock Price Index (IHSG) of 18.46%. 2. That the economic condition is experiencing a slowdown and pressure both regionally and nationally, partly due to the COVID-19 outbreak. 3. Whereas in order to provide an economic stimulus and reduce the impact of the market which fluctuates significantly due to trading conditions as referred to in number 1 and number 2, it is necessary for the Issuer or Public Company to take corporate action to buy back shares without violating the provisions of the laws applies. 4. Issuers or Public Companies whose shares are listed on the Stock Exchange can repurchase their shares based on the mechanism stipulated in POJK Number 2/POJK.04/2013.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	5. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang akan atau sedang melakukan pembelian kembali saham atau telah menguasai sahamnya karena pembelian kembali (*treasury*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan akan melakukan pembelian kembali saham berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.04/2013, maka total keseluruhan pembelian kembali berdasarkan dua peraturan tersebut paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari modal disetor.	5. Issuers or Public Companies that will or are currently buying back shares or have controlled their shares because of the treasury based on the laws and regulations in the Capital Markets sector regarding the buyback of shares issued by the Issuer or Public Company and will make a repurchase shares based on POJK No. 2/POJK.04/2013, the total repurchase based on the two regulations is at most 20% (twenty percent) of the paid-up capital, provided that the minimum number of shares outstanding is 7.5% (seven point five percent) of the paid-up capital.	
SEOJK Nomor 6/ SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum OJK Circular Letter Number 6/SEOJK.03/2020 on Calculation of Risk Weighted Asset for Operational Risk using the Standard Approach for Commercial Banks	1. Untuk menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Bank menggunakan rumus sebagai berikut: ATMR Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar = 12,5 x MMRO 2. ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali diperhitungkan dalam rasio KPMM untuk posisi Januari 2023. Dalam perhitungan rasio KPMM sampai dengan posisi Desember 2022, Bank tetap menggunakan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. 3. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam SEOJK ini diterapkan Bank secara individu dan secara konsolidasi. 4. Dalam rangka perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar, Bank menyampaikan laporan baik secara individu maupun secara konsolidasi sebagai berikut: 5. Bank menyampaikan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional kepada OJK sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.	1. To calculate Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk in calculating the Capital Adequacy Ratio (KPMM), the Bank uses the following formula: RWA for Operational Risk Using the Standard Approach = 12.5 x MMRO 2. RWA for Operational Risk using the standard approach in this Financial Services Authority Circular Letter for the first time calculated in the KPMM ratio for the position of January 2023. In calculating the KPMM ratio up to the position of December 2022, the Bank continues to use RWA for Operational Risk using the approach as regulated in SEOJK Number 24/ SEOJK.03/2016 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Basic Indicator Approach. 3. Calculation of RWA for Operational Risk using the standard approach in SEOJK is implemented by the Bank individually and on a consolidated basis. 4. In the framework of calculating RWA for Operational Risk using a standardized approach, the Bank submits reports both individually and on a consolidated basis as follows: 5. The Bank submits a Risk Management Implementation Report for Operational Risk to OJK as part of the results of the self-assessment on the soundness of the Bank.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
SEOJK Nomor 9/ SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional OJK Circular Letter Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Tranparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports	1. SEOJK akan menggantikan SEOJK No. 43/ SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan menjadi peraturan pelaksana dari POJK No.37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 2. SEOJK memuat Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional. Pedoman terdiri dari format laporan dan pedoman pengisian dari laporan sebagai berikut: a. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan (periode Bulanan, Triwulanan dan Tahunan) b. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan (periode Triwulanan dan Tahunan): 1) Informasi umum; 2) Permodalan; 3) Risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, stratejik, dan Kepatuhan; dan 4) Tata kelola c. Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material d. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (periode Bulanan) e. Laporan Publikasi Lain (periode Tahunan) 3. SEOJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020, sehingga kewajiban penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Laporan Publikasi pertama kali dilakukan SEOJK ini untuk: **Nama Laporan Publikasi** | **Sejak Posisi Data** Laporan Informasi atau Fakta Material | 1 Juli 2020 Laporan Periode Bulanan | 31 Juli 2020 Laporan Periode Triwulanan | 30 September 2020 Laporan Periode Tahunan | 31 Desember 2020	1. SEOJK will replace SEOJK No. 43/SEOJK.03/2016 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and become the implementing regulation of POJK No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports. 2. SEOJK contains Guidelines for Conventional Commercial Bank Publication Reports. The guidelines consist of a report format and guidelines for filling out the reports as follows: a. Financial Publication Reports and Financial Performance Information (Monthly, Quarterly and Annual) b. Risk Exposure and Capital Publication Reports (Quarterly and Annually): 1) General information; 2) Capital; 3) Credit, market, operational, liquidity, legal, reputation, strategic, and compliance risks; and 4) Governance c. Report on Publication of Material Information or Facts d. Published Report on Prime Lending Rates (Prime Lending Rate) (Monthly) e. Other Publication Reports (Annual period) 3. This SEOJK comes into force since the position of the data on July 1, 2020, so that the obligation to prepare, announce, and submit the Publication Report for the first time is carried out by SEOJK for: **Name of Publication Report** | **Data Position Since** Material Information or Facts Report | July 1, 2020 Monthly Period Reports | July 31, 2020 Quarterly Period Reports | September 30, 2020 Annually Period Report | December 31, 2020	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
SEOJK Nomor 17/ SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal OJK Circular Letter Number 17/SEOJK.04/2020 on Guidelines on Assessment and Presentation of Business Evaluation Report in the Capital Market	1. Estimasi Nilai Terminal (*Terminal Value*) dilakukan dalam mengaplikasikan metode diskonto arus kas dengan 2 (dua) periode proyeksi laporan keuangan, yaitu periode waktu tetap dan periode waktu kekal. 2. Metode yang digunakan untuk mengestimasi Nilai Terminal (*Terminal Value*) yaitu: a. Nilai sisa (*residual value*); Nilai sisa digunakan dalam hal objek Penilaian memiliki jangka waktu yang tertentu. b. Kapitalisasi Pendapatan; 3. Pemberian Pendapat Kewajaran Dalam hal Penilai Bisnis melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa pemberian Pendapat Kewajaran maka Penilai Bisnis wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pendapat Kewajaran diberikan setelah Penilai Bisnis melakukan analisis atas: 1) Nilai dari objek yang ditransaksikan; 2) Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham; dan 3) Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham; b. Pendapat Kewajaran wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi dan unsur analisis rencana transaksi. c. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud, Penilai Bisnis wajib melakukan hal yang paling sedikit meliputi: 1) Analisis transaksi; 2) Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi; 3) Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan 4) Analisis atas faktor lain yang relevan; 4. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Pinjam – Meminjam dan/atau Penjaminan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan termasuk menjaminkan aset dan/atau memberikan jaminan perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan wajib didasarkan pada hasil evaluasi atas objek transaksi; b. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan serta unsur analisis rencana transaksi;	1. Terminal Value estimation is carried out in applying the discounted cash flow method with 2 (two) financial statement projection periods, namely a fixed time period and a perpetual time period. 2. The method used to estimate the Terminal Value is: a. Residual Value; The residual value is used in the event that the Appraisal object has a certain period of time. b. Income capitalization; 3. Giving Fairness Opinion In the event that the Business Appraiser carries out a Professional Appraisal Assignment in the form of a Fairness Opinion, the Business Appraiser must meet the following requirements: a. The Fairness Opinion is given after the Business Appraiser conducts an analysis of: 1) The value of the object being transacted; 2) The financial impact of the transaction to be carried out on the interests of shareholders; and 3) Business considerations used by company management in relation to planned transactions that will be carried out in the interests of shareholders; b. A Fairness Opinion must be given on the entire transaction plan and elements of the transaction plan analysis. c. In carrying out the analysis as referred to, the Business Appraiser is obliged to do at least include: 1) Transaction analysis; 2) Qualitative and quantitative analysis of planned transactions; 3) Analysis of the fairness of the transaction value; and 4) Analysis of other relevant factors; 4. Fairness Opinion on Lending - Borrowing and/or Guarantee Transactions Fairness Opinion on Lending-Borrowing Funds and/or Guarantee Transactions, including pledging assets and/or providing company guarantees, the following conditions apply: a. The Fairness Opinion on the Lending-Borrowing Fund and/or Guarantee Transactions must be based on the results of the evaluation of the object of the transaction; b. Fairness Opinions on Lending-Borrowing Funds and/or Guarantee Transactions must be given on the entire plan of lending-borrowing funds and/or guarantees as well as elements of the transaction plan analysis	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
SEOJK Nomor 19/ SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi OJK Circular Letter Number 19/SEOJK.05/2020 concerning Marketing Channels for Insurance Products	1. Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut: a. Secara langsung (*direct marketing*); b. Agen Asuransi; c. *Bancassurance*; dan/atau d. BUSB. 2. Perusahaan harus memastikan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan oleh pihak pemasar terbatas pada Produk Asuransi yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. 3. Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pemasaran Produk Asuransi pada setiap saluran pemasaran, termasuk identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko terkait penggunaan saluran pemasaran dengan mengacu kepada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. 4. Dalam penerapan manajemen risiko terkait penggunaan saluran pemasaran Produk Asuransi, Perusahaan harus melakukan pengendalian risiko paling sedikit: a. pada kategori risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi; dan b. pada proses pemilihan jenis saluran dan metode pemasaran, seleksi atau rekrutmen pihak yang melakukan pemasaran, pembuatan kerja sama pemasaran, pelatihan pihak yang melakukan pemasaran, penyampaian informasi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, pelaksanaan evaluasi kinerja saluran pemasaran, perlindungan kerahasiaan data, penanganan keluhan, dan penggunaan sistem informasi.	1. Companies can only market insurance products through the following marketing channels: a. Directly (direct marketing); b. Insurance agent; c. Bancassurance; and/or d. BUSB. 2. The company must ensure that the insurance products marketed by the marketer are limited to the insurance products listed in the cooperation agreement. 3. Companies must implement effective risk management in the marketing of insurance products in every marketing channel, including identification, measurement, control and monitoring of risks related to the use of marketing channels with reference to the provisions concerning the application of risk management to the Company. 4. In implementing risk management related to the use of insurance product marketing channels, the Company must carry out risk control at least: a. In the category of strategic risk, operational risk, legal risk, compliance risk and reputation risk; and b. In the process of selecting channel types and marketing methods, selection or recruitment of parties conducting marketing, establishing marketing cooperation, training of parties conducting marketing, conveying information to policyholders, the insured, or participants, implementing marketing channel performance evaluations, protecting data confidentiality, handling complaints, and use of information systems.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	Bank Indonesia		
PBI Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) BI Regulation Number 21/16/PBI/2019 on Standardization of Competences in Rupiah Currency Payment and Management System (SPPUR)	1. Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi SPPUR adalah penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang SPPUR adalah rumusan kemampuan kerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja. 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PBK SPPUR adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai dengan SKKNI Bidang SPPUR dan persyaratan di tempat kerja. 4. Bank wajib memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR memiliki Sertifikat SPPUR. 5. Pegawai sebagaimana dimaksud pada nomor 4 terdiri atas: a. Pejabat eksekutif; b. Penyelia; dan c. Pelaksana.	1. Competency Standardization of the Payment System and Rupiah Currency Management, hereinafter referred to as Competency Standardization of SPPUR, is the application of the Indonesian national work competency standard in the field of payment systems and rupiah currency management and the level of Indonesian national qualifications in the payment system and rupiah currency management. 2. Indonesian National Competency Standards for Payment Systems and Rupiah Currency Management, hereinafter referred to as SKKNI in the SPPUR Sector, are formulations of work capacity in the field of payment systems and rupiah currency management covering aspects of knowledge, skills and/or expertise as well as work attitudes. 3. Competency-Based Training for Payment System and Rupiah Currency Management, hereinafter referred to as PBK SPPUR, is a job training that focuses on mastering work skills in accordance with SKKNI in SPPUR and requirements in the workplace. 4. Banks are required to ensure that Employees who carry out SPPUR Activities have SPPUR Certificates. 5. The employees as referred to in number 4 consist of: a. Executive officer; b. Supervisor; and c. Executor.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah BI Regulation Number 22/3/PBI/2020 on Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/3/PBI/2018 on Mandatory Minimum Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units	1. Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian kepada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk kebijakan makroprudensial. 2. Ketentuan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian untuk kebijakan makroprudensial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank untuk kebijakan makroprudensial. 3. Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk kebijakan makroprudensial. 4. Ketentuan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian untuk kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank untuk kebijakan makroprudensial.	1. Bank Indonesia can provide leniency on the mandatory reserve requirement (GWM) in rupiah which must be fulfilled on a daily basis to Conventional Commercial Banks (BUK) for macroprudential policies. 2. Provisions for granting concessions on the mandatory reserve requirement in rupiah which must be fulfilled on a daily basis for macroprudential policies are implemented in accordance with Bank Indonesia Regulations concerning incentives for banks for macroprudential policies. 3. Bank Indonesia can provide leniency on the mandatory reserve requirement in rupiah which must be fulfilled on a daily basis as referred to for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units for macroprudential policies. 4. The provisions for granting concessions on the mandatory reserve requirement in rupiah, which must be fulfilled on a daily basis for the macroprudential policy as referred to, are implemented in accordance with the Bank Indonesia Regulation concerning incentives for banks for macroprudential policies.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona BI Regulation Number 22/4/PBI/2020 on Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities in Support of the Handling of Economic Impact of Corona Virus Pandemic	1. Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa: a. Kegiatan ekspor; b. kegiatan impor; c. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan/atau d. Kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; 2. Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian, dengan besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan. 4. Cakupan penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Kredit ekspor atau pembiayaan ekspor; b. Kredit impor yang bersifat produktif atau pembiayaan impor yang bersifat produktif; c. *Letter of Credit* (L/C); d. Kredit UMKM atau pembiayaan UMKM; dan/atau e. Kredit atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 5. Bank wajib menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar kepada Bank Indonesia.	1. Bank Indonesia provides incentives for Banks providing funds for certain economic activities in the form of: a. Export activities; b. Import activities; c. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Activities; and/or d. Economic activities in other priority sectors determined by Bank Indonesia; 2. Incentives for Banks as referred to in number 1 are in the form of leniency on the mandatory reserve requirement (GWM) in rupiah which must be fulfilled on a daily basis, with the amount determined by Bank Indonesia. 3. The incentives as referred to are provided by Bank Indonesia on a monthly basis. 4. The scope of provision of funds by Banks for certain economic activities as referred to consists of: a. Export credit or export financing; b. Productive import credit or productive import financing; c. Letter of Credit (L/C); d. UMKM credit or UMKM financing; and/or e. Credit or other financing as stipulated by Bank Indonesia; 5. Banks are required to correctly submit data on provision of funds for certain economic activities to Bank Indonesia.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
PBI Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional BI Regulation Number 22/5/PBI/2020 on the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 19/3/PBI/2017 on Short-Term Liquidity Funding for Conventional Commercial Banks	1. Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PJLP) kepada Bank Indonesia. 2. Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memperoleh PLJP dengan memenuhi persyaratan: a. Mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJP; b. Memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan c. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP. 3. Bank mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM). 4. Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berupa: a. Surat berharga; b. Surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank; c. Aset Kredit; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank.	1. Banks experiencing Short Term Liquidity Difficulties can apply for Short Term Liquidity Loans (PJLP) to Bank Indonesia. 2. Banks as referred to in number 1 can obtain PLJP by meeting the following requirements: a. Obtain an assessment from the OJK regarding the fulfillment of solvency requirements/adequacy and health level to be able to obtain PLJP; b. Have high quality collateral as collateral for the PLJP that meets the requirements stipulated in this Bank Indonesia Regulation; and c. It is estimated that it will be able to return the PLJP. 3. The Bank submits the PLJP ceiling based on the estimated amount of liquidity requirements until the Bank meets the Minimum Statutory Reserves (GWM). 4. High quality collateral as guarantee for the PLJP as referred to in number 2 in the form of: a. Securities; b. Securities based on sharia principles which are recorded in the books of the Sharia Business Unit (UUS) of the Bank; c. Credit Assets; and/or d. Financing Assets recorded in the UUS books of the Bank.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaiaan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19) BI Regulation Number 22/7/PBI/2020 on Adjustments in the Implementation of Several Regulations of Bank Indonesia due to the Impact of COVID-19 Pandemic	1. Ruang lingkup penyesuaian pelaksanaan beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi: a. proses Perizinan; b. penyampaian laporan; c. korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia; d. sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor; e. layanan kas Bank Indonesia; f. biaya SKNBI; g. penyelenggaraan kartu kredit; dan h. pemenuhan kewajiban implementasi beberapa Ketentuan Bank Indonesia. 2. Proses Perizinan atas pelaksanaan ketentuan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PBI Nomor 22/7/PBI/2020. 3. Penyesuaian pelaksanaan Penyampaian Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PBI Nomor 22/7/PBI/2020. 4. Penyesuaian pelaksanaan korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PBI Nomor 22/7/PBI/2020. 5. Penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PBI Nomor 22/7/PBI/2020.	1. The scope of adjustments to the implementation of several Bank Indonesia Regulations as a result of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic includes: a. Licensing Process; b. Submission of reports; c. Correspondence and/or meetings with Bank Indonesia; d. Administrative sanctions to non-natural resource exporters in the form of suspension of export services; e. Bank Indonesia cash services; f. SKNBI fee; g. Credit card operation; and h. Fulfillment of the mandatory implementation of several Bank Indonesia Regulations. 2. The Licensing Process for implementing the provisions is adjusted as listed in Attachment I of PBI Number 22/7/PBI/2020. 3. Adjustments to the implementation of Report Submission as listed in Attachment II of PBI Number 22/7/PBI/2020. 4. Adjustments to the implementation of correspondence and/or meetings with Bank Indonesia as listed in Attachment III PBI Number 22/7/PBI/2020. 5. Adjustment of the implementation of administrative sanctions to Exporters of Non-Natural Resources in the form of suspension of export services as listed in Attachment IV PBI Number 22/7/PBI/2020.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan BI Regulation Number 22/8/PBI/2020 on Bank Indonesia Integrated Licensing through the Licensing Front Office	1. Prinsip perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *Front Office* (FO) Perizinan meliputi: a. Transparan; b. Akuntabel; c. Efektif dan efisien; dan d. Dilaksanakan secara terpadu. 2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud disampaikan Bank kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan. 3. Tujuan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan untuk memudahkan pelayanan perizinan yang diajukan oleh Pemohon (Bank). 4. Perizinan meliputi: a. Izin; b. Persetujuan; dan c. Layanan, d. Kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.	1. The principles of integrated licensing of Bank Indonesia through Front Office (FO) Licensing include: a. Transparent; b. Accountable; c. Effective and efficient; and d. Implemented in an integrated manner. 2. Application for licensing as referred to is submitted by the Bank to Bank Indonesia through FO Perizinan. 3. The objective of integrated Bank Indonesia licensing through FO Perizinan is to facilitate licensing services proposed by the Applicant (Bank). 4. Licensing includes: a. Permits; b. Approval; and c. Service, d. Activities in the monetary, macroprudential, payment system and rupiah currency management sector.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
PBI No.22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah BI Regulation Number 22/10/PBI/2020 on the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/3/PBI/2018 on Mandatory Minimum Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units	1. Bagi BUK yang memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah, Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 2. Jasa giro sebagaimana dimaksud, diberikan dengan tingkat bunga tertentu. 3. Pemberian jasa giro kepada Bank yamg memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% pertahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). 4. Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 5. Jasa giro yang diberikan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. Jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dan b. Jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.	1. For BUKs that meet the Minimum Statutory Reserves (GWM) in rupiah, Bank Indonesia may provide current accounts for a certain portion of the fulfillment of the statutory reserve requirement in rupiah as referred to in Article 3 paragraph (1). 2. Current accounts as referred to are provided at a certain interest rate. 3. Provision of demand deposit services to banks that fulfill statutory reserves in rupiah both on a daily basis and an average of 1.5% per year, with the portion that is calculated to obtain demand deposits of 3% from Third Party Funds (DPK). 4. Bank Indonesia may provide demand deposit services for a certain portion of the fulfillment of the statutory reserve requirement in rupiah as referred to in Article 2. 5. Current accounts provided as intended, consist of: a. Current account service for a certain part of the daily fulfillment of statutory reserves in rupiah as referred to in Article 2 letter a; and b. Demand deposit service for a certain portion of the fulfillment of the average reserve requirement in rupiah as referred to in Article 2 letter b.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dan PADG Nomor 22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah BI Regulation Number 21/10/PBI/2019 concerning Management of Rupiah Currency and PADG Number 22/6/PADG/2020 concerning Rupiah Money Processing Service Operators	1. Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah. 2. Dalam hal Bank bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR. 3. Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR, Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR. 4. Bank harus menerima Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang berasal dari: a. PJPUR yang bekerja sama dengan Bank b. Perseorangan dan badan hukum; dan/atau c. Kegiatan pengolahan uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank 5. Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Aspek umum; dan b. Aspek kelayakan.	1. Banks operating in the Territory of the Republic of Indonesia are required to provide Rupiah exchange services to the public in accordance with the provisions on the exchange of Rupiah. 2. In the event that a Bank cooperates with a Rupiah Money Processing Service Provider (PJPUR), the Bank is required to monitor the PJPUR's performance and ensure the implementation of risk management by the PJPUR. 3. In the event that the Bank cooperates with the PJPUR, the Bank is required to monitor the PJPUR's performance and ensure the implementation of risk management by the PJPUR. 4. Banks must accept Rupiah currency of doubtful authenticity originating from: a. PJPUR in collaboration with the Bank b. Individuals and legal entities; and/or c. Rupiah processing activities carried out by the Bank 5. The party applying for a license to become a PJPUR as referred to in Article 5 paragraph (1) must meet the following requirements: a. General aspects; and b. Eligibility aspect.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 20/8/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka) Bank Indonesia Regulation Number 22/13/PBI/2020 concerning the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/8/2018 concerning Loan to Value Ration for Property Loan, Financing to Value Ratio for Property Financing, and Down Payment for Motor Vehicle Loan or Financing (PBI LTV/FTV and Down Payment)	1. Bank yang memberikan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut: a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen); b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen); dan c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen). 2. Ketentuan Uang Muka untuk KKB atau PKB sebagaimana dimaksud berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). 3. Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) maka Bank wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut: a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 15% (lima belas persen); b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 10% (sepuluh persen). 4. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait pemberian KKB atau PKB untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud.	1. Banks that provide Motor Vehicle Loans (KKB) or Motor Vehicle Financing (PKB) for the purchase of Environmental-Friendly Motorized Vehicles are required to meet the provisions for Down Payment as follows: a. For the purchase of two-wheeled motorized vehicles, at least 0% (zero percent); b. For purchases of three-wheeled motorized vehicles or more that are not intended for productive activities, at least 0% (zero percent); and c. For purchases of three-wheeled motorized vehicles or more intended for productive activities, it is at least 0% (zero percent). 2. The provisions for Down Payment for KKB or PKB as referred to apply to Banks that meet the requirements as referred to in Article 21 paragraph (1). 3. In the event that a Bank does not meet the requirements as referred to in Article 21 paragraph (1), the Bank is required to comply with the provisions for Down Payment as follows: a. For the purchase of two-wheeled motorized vehicles, at least 15% (fifteen percent); b. For purchases of three-wheeled motorized vehicles or more which are not intended for productive activities, at least 20% (twenty percent); and c. For purchases of three-wheeled motorized vehicles or more intended for productive activities, at least 10% (ten percent). 4. Banks are required to submit reports to Bank Indonesia regarding the provision of KKB or PKB for the purchase of Environmental Friendly Motor Vehicles as referred to.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
PBI Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter Bank Indonesia Regulation Number 22/14/PBI/2020 concerning Monetary Operations	1. Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter. 2. Operasi Moneter sebagaimana dimaksud, dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi. 3. Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 4. Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud, Operasi Moneter Konvensional (OMK) diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 5. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* sebagaimana dimaksud, dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.	1. Monetary Operation aims to support the achievement of monetary stability. 2. Monetary operations as referred to, are carried out on the money market and foreign exchange market in an integrated manner. 3. Monetary operations as referred to can be carried out conventionally and based on sharia principles. 4. To achieve monetary stability as referred to, Conventional Monetary Operations (OMK) are directed at controlling the Overnight Interbank Money Market interest rate and maintaining the stability of the rupiah exchange rate. 5. The interest rate on the Interbank Overnight Money Market as referred to is controlled so that it moves around the Bank Indonesia policy rate.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PJLP) bagi Bank Umum Konvensional Bank Indonesia Regulation Number 22/15/PBI/2020 concerning the Third Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 19/3/PBI/2017 on Short Term Liquidity Loan (PLJP) for Conventiaonal Commercial Banks	1. Dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai agunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan b. persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h telah terpenuhi. 2. Penyerahan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut: a. pada saat mengajukan permohonan terkait PLJP, Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau b. pada periode pemberian PLJP, dengan kondisi sebagai berikut: 1) Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau 2) Bank Indonesia meminta Bank untuk menyerahkan agunan lain jika agunan PLJP yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJP mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan Bank tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4a). 3. Nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan yang akan digunakan sebagai agunan PLJP ditetapkan sebagai berikut: a. SBI dihitung berdasarkan nilai jual SBI; b. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS; c. SDBI dihitung berdasarkan nilai jual SDBI; d. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI; e. SBN dihitung berdasarkan nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN; f. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga dimaksud; dan g. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan. 4. Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP.	1. In the event that the Credit Assets and/or Financing Assets that meet the requirements have never been restructured as referred to in paragraph (4) letter d are insufficient, the Bank may use the restructured Credit Assets and/or Financing Assets during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) stimulus period as collateral with the following conditions: a. Credit Assets and/or Financing Assets have never been restructured in the last 2 (two) years outside of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) stimulus period; and b. Requirements for Credit Assets and/or other Financing Assets as referred to in paragraph (4) letter a, letter b, letter c, letter e, letter f, letter g, and letter h have been fulfilled. 2. The delivery of other collateral as referred to in paragraph (7) is regulated as follows: a. When submitting an application related to PLJP, the Bank may submit other collateral in the form of land and buildings and/or land; and/or b. In the period of giving PLJP, with the following conditions: 1) The bank may submit other collateral in the form of land and buildings and/or land; and/or 2) Bank Indonesia asks the Bank to submit another collateral if the PLJP collateral received by Bank Indonesia during the period for which the PLJP is granted has decreased in value so that it does not meet the adequacy of the required collateral value calculation and the Bank is unable to replace or add to the collateral as referred to in paragraph (1) through paragraph (4a). 3. The value of securities, credit assets and financing assets to be used as collateral for the PLJP is determined as follows: a. SBI is calculated based on the selling value of the SBI; b. SBIS is calculated based on the SBIS nominal value; c. SDBI is calculated based on the selling value of SDBI; d. SukBI is calculated based on the selling value of SukBI; e. SBN is calculated based on the SUN market value and/or the SBSN market value; f. Securities issued by other legal entities are calculated based on the market value of the said securities; and g. Credit Assets or Financing Assets are calculated based on the market value of Credit Assets or Financing Assets. 4. Banks must maintain and administer a list of collateral that meets the requirements and is allocated as collateral for the PLJP.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 20/4/PBI/2018 tentang RIM dan PLM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Bank Indonesia Regulation Number 22/17/PBI/2020 concerning the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 on RIM and PLM for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	1. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara: a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki Bank Umum Konvensional (BUK), terhadap: a) Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan b) surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan;	1. Macroprudential Intermediation Ratio, hereinafter abbreviated as RIM, is the ratio of the results of the comparison between: a. Credit granted in rupiah and foreign currency; and b. Corporate securities in rupiah and foreign currency that meet certain requirements, owned by Conventional Commercial Banks (BUK), against: a) BUK Third Party Funds (DPK) in the form of demand deposits, savings, and time deposits/time deposits in rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds; and b) Securities in rupiah and foreign currency that meet certain requirements, issued by BUK to obtain a source of funding;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
	2. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah. 3. PLM ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah. 4. Kewajiban pemenuhan PLM diatur sebagai berikut: a. PLM dipenuhi dalam bentuk: 1) surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan 2) surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS; dan 5. Kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud menggunakan periode laporan sebagai berikut: a. PLM dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan b. Dalam hal terdapat perubahan: 1) besaran persentase PLM; 2) jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM; dan/atau 3) periode laporan untuk pemenuhan PLM;	2. Macroprudential Liquidity Buffer, hereinafter referred to as PLM, is a minimum liquidity reserve in rupiah which is required to be maintained by BUK in the form of securities that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of DPK BUK in rupiah. 3. PLM is set at 6% (six percent) of BUK DPK in rupiah. 4. The obligation to fulfill PLM is regulated as follows: a. PLM is fulfilled in the form of: 1) Securities in rupiah owned by BUK and can be used in monetary operations; and 2) Sharia securities in rupiah owned by UUS and can be used in sharia monetary operations, for BUK that owns UUS; and 5. The obligation to fulfill PLM as referred to uses the following reporting period: a. PLM is calculated by comparing the number of securities held by BUK as referred to at the end of each day for 2 (two) reporting periods to the daily average amount of BUK DPK in rupiah for 2 (two) reporting periods in the previous 4 (four) reporting periods; and b. In the event of a change in: 1) PLM percentage amount; 2) Types of securities for fulfillment of PLM; and/or 3) Report period for compliance with PLM.	
PBI Nomor 22/19/PBI/2020 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona Bank Indonesia Regulation Number 22/19/PBI/2020 concerning the Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2020 on Incentives for Banks that Provide Funds for Certain Economic Activities in Support of Handling the Economic Impact of Corona Virus Pandemic	1. Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6484) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021	1. The provisions of Article 10 in Bank Indonesia Regulation Number 22/4/PBI/2020 concerning Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain Economic Activities to Support Handling the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 86, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Indonesia Number 6484) was amended to read as follows: The incentives as referred to in Article 2 are valid until June 30, 2021	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Protection of Bank Indonesia Consumer	1. Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. 2. Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia meliputi: a. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran; b. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; c. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan d. Pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. dengan memperhatikan aspek pengaturan dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta keseimbangan hubungan antara Penyelenggara dan Konsumen. 3. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran meliputi: a. Penerbitan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; b. Penerbitan uang elektronik; c. Penerbitan cek dan/atau bilyet giro; d. Penyelenggaran dompet elektronik; e. Penyelenggaraan transfer dana termasuk transfer dana yang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; f. Penyelenggaraan penerusan transaksi pembayaran; dan/atau g. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	1. Consumer Protection as stipulated in this Bank Indonesia Regulation covers all areas of authority of Bank Indonesia in accordance with statutory regulations, namely the monetary, macroprudential and payment system sectors. 2. Operators covered by Bank Indonesia Consumer Protection include: a. Payment System Operators; b. Money Service Activities Operators; c. Money Market and Foreign Exchange Market Players; and d. Other parties regulated and supervised by Bank Indonesia. With due observance of regulatory aspects in the provisions issued by Bank Indonesia, as well as the balance of relations between Providers and Consumers. 3. Payment System Operators include: a. Issuing payment instruments using cards; b. Electronic money issuance; c. Issuance of checks and/or bilyet giro; d. Electronic wallet administration; e. Fund transfers, including fund transfers made through the Bank Indonesia Real Time Gross Settlement system and the Bank Indonesia National Clearing System; f. Implementation of payment transaction forwarding; and/or g. Operators in the other Payment System designated by Bank Indonesia.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	4. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang merupakan Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang yang melakukan: a. Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; b. Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 5. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing merupakan pihak yang melakukan kegiatan: a. Penerbitan instrumen Pasar Uang; dan/atau b. Pendukung transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berhubungan langsung dengan Konsumen.	4. Money Service Activity Operator is a Money Service Activity Operator that conducts: a. Non-bank foreign exchange business activities; b. Other Money Service Activities stipulated by Bank Indonesia. 5. Money Market and Foreign Exchange Market Players are parties that carry out activities: a. Issuance of Money Market instruments; and/or b. Supporting transactions in the Money Market and Foreign Exchange Market that are directly related to consumers.	
PBI Nomor 22/21/PBI/2020 tentang Perubahan atas PBI No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor Bank Indonesia Regulation Number 22/21/ PBI/2020 concerning the Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 21/14/PBI/2019 on Export Proceeds and Import Payment in Foreign Exchange	1. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor. 2. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar Impor. 3. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message* FTMS adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi 4. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana. 5. Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. 6. Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor jika Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.	1. Export Proceeds, hereinafter referred to as DHE, is foreign exchange from the proceeds of Export activities. 2. Import Payment, hereinafter referred to as DPI, is the foreign exchange used to pay for Imports. 3. Message Financial Transaction Messaging System, hereinafter referred to as Message FTMS, is a collection of data in a structured format sent or received by users or applications 4. Telegraphic Transfer, hereinafter abbreviated as TT, is a type of fund transfer through a Bank using electronic means based on a payment order from the owner of the funds. 5. In the event that the DHE value is less than the Export Value by a maximum difference of Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) or not more than 2.5% (two point five percent) of the Export Value, the DHE received value is considered in accordance with the Export Value so that the Exporter does not need to submit supporting documents. 6. In the event that the DHE value is less than the Export Value with a difference greater than the equivalent of Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and greater than 2.5% (two point five percent) of the Export Value, the DHE value received deemed in accordance with the Export Value if the Exporter submits adequate supporting documents.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PBI Nomor 22/22/PBI/2020 tentang Perubahan atas PBI Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi Bank Indonesia Regulation Number 22/22/PBI/2020 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 21/9/PBI/2019 on Integrated Report of Commercial Banks	1. Meluasnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menghambat operasional Bank, termasuk penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan waktu implementasi sistem LBUT guna memastikan penyampaian informasi perbankan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan kebijakan. 2. Penyesuaian pengaturan mengenai waktu implementasi LBUT, yaitu: a. Periode penyampaian LBUT terdiri atas: 1) Periode *parallel run* penyampaian laporan dan/ atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021. 2) Periode implementasi penuh: penyampaian laporan dan/koreksi laporan sejak data Juli 2021. 3. Pemberitahuan tertulis diberikan kepada bank yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan dan/ atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021. 4. Kewajiban penyampaian laporan *existing*, yaitu: a. Laporan Harian Bank Umum (LHBU); b. Laporan Bulanan Bank Umum (LBU); c. Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU); dan d. Laporan Berkala Bank Umum (LBBU); Masih tetap berlaku sampai dengan data akhir bulan Juni 2021. 5. Pengaturan waktu pemberlakuan ketentuan, yaitu: a. Pencabutan kewajiban penyampaian atas beberapa informasi pada laporan *existing* yang dialihkan ke OJK sesuai dengan tahapan pemberlakuan kewajiban pelaporan kepada OJK; b. Pencabutan ketentuan pelaporan *existing* sejak data bulan Juli 2021;	1. The spread of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic that hinders Bank operations, including the submission of Integrated Commercial Bank Reports (LBUT). In this regard, Bank Indonesia considers it necessary to adjust the timing of the LBUT system implementation in order to ensure complete, accurate, current, complete, and timely delivery of banking information to support policy making. 2. Adjustment of regulations regarding the implementation time of LBUT, namely: a. LBUT submission period consists of: 1) The parallel run period for the submission of reports and/or report corrections from the end of December 2019 data to the end of June 2021 data. 2) Full implementation period: report submission and/report correction since July 2021 data. 3. Written notification is given to banks that are late and do not submit reports and/or report corrections from the end of March 2021 to the end of June 2021. 4. Obligations to submit existing reports, namely: a. Commercial Bank Daily Report (LHBU); b. Commercial Bank Monthly Report (LBU); c. Commercial Bank Head Office Report (LKPBU); and d. Commercial Bank Periodic Reports (LBBU); Still valid until the end of June 2021 data. 5. The timing of the provisions, namely: a. Revocation of mandatory submission of some information in the existing report which has been transferred to OJK in accordance with the stages of implementing reporting obligations to OJK; b. Revocation of the existing reporting provisions since July 2021 data;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
PADG Nomor 21/28/ PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah PADG Number 21/28/ PADG/2019 concerning Monitoring of Foreign Exchange Transaction Activities by Banks and Customers	1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan sistem dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan sistem dan kewajiban finansial luar negeri antarpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 2. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut AFLN adalah aktiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan pada bukan penduduk, piutang dagang atau usaha dengan bukan penduduk, kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk, dan penyertaan modal pada bukan penduduk 3. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut KFLN adalah pasiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, utang dagang atau usaha dengan bukan penduduk, kepemilikan bukan penduduk pada surat berharga yang diterbitkan penduduk, pinjaman dari bukan penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk. 4. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan. 5. Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.	1. Foreign Exchange Flows, hereinafter abbreviated as LLD, are the transfer of financial systems and obligations between residents and non-residents, including the transfer of foreign financial systems and obligations between residents as referred to in the Law concerning foreign exchange flows and the exchange rate system. 2. Foreign Financial Assets, hereinafter referred to as AFLN, are assets of residents against non-residents, both in foreign currency and rupiah, among others in the form of cash in foreign currencies, deposits with non-residents, trade or trade receivables with non-residents, ownership of securities issued by non-residents, and equity participation by non-residents 3. Foreign Financial Obligations, hereinafter referred to as KFLN, are liabilities of residents against non-residents in both foreign currency and rupiah, among others in the form of deposits belonging to non-residents, trade or business payables with non-residents, non-resident ownership of securities issued by residents, loans from non-residents, and equity from non-residents. 4. Export Customs Declaration, hereinafter abbreviated as PPE, is a statement made by an individual or legal entity to carry out Export customs obligations in the forms and conditions in accordance with the provisions of laws and regulations regarding customs. 5. Banks are required to submit a complete, correct, and timely LLD Report to Bank Indonesia.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah melaporkan kegiatan lalu lintas devisa yang terkait PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions and has reported on the related foreign exchange activities
PADG Nomor 22/1/ PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG Nomor 19/20/PADG/2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia PADG Number 22/1/ PADG/2020 concerning Amendment to PADG Number 19/20/PADG/2017 on Current Account with Bank Indonesia	1. Jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) meliputi: a. Biaya transaksi; b. Biaya administrasi; dan c. Biaya meterai. 2. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Biaya perolehan sarana penarikan Rekening Giro; dan b. Biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif. 3. Pembebanan biaya transaksi sebagaimana dimaksud, diatur sebagai berikut: a. Biaya transaksi dikenakan untuk penarikan Rekening Giro berupa pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui sistem BIRTGS dan SWIFT; b. Biaya transaksi tidak dikenakan untuk penarikan Rekening Giro berupa pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui SKNBI; c. Biaya transaksi atas penarikan Rekening Giro dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN); dan d. Biaya transaksi tidak dikenakan untuk Penyetoran ke Rekening Giro. 4. Pembebanan biaya perolehan sarana penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud, dikenakan untuk sarana penarikan Rekening Giro berupa buku BG BI dan Cek BI. 5. Pembebanan biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif sebagaimana dimaksud, diatur sebagai berikut: a. Biaya administrasi dikenakan untuk saldo Rekening Giro tidak aktif yang telah dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia.; b. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud, dibebankan sampai dengan saldo 0 (nol) atau telah daluwarsa; dan c. Sisa saldo Rekening Giro yang telah dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dan telah daluwarsa diakui sebagai penerimaan Bank Indonesia.	1. Types of fees as referred to in Article 71 paragraph (1) include: a. Transaction fees; b. Administrative costs; and c. Stamp duty. 2. The administrative costs as intended consist of: a. Fees for the Demand Deposit Account withdrawal facility; and b. Inactive Demand Deposit Account administration fee. 3. Charging of the transaction fee as referred to is regulated as follows: a. Transaction fees are charged for Demand Deposit Account withdrawals in the form of fund transfers from the Demand Deposit Account made through the BIRTGS and SWIFT systems; b. Transaction fees are not charged for Demand Deposit Account withdrawals in the form of fund transfers from the Demand Deposit Account made through the SKNBI; c. Transaction fees for Demand Deposit Account withdrawals are subject to value added tax (VAT); and d. Transaction fees are not charged for deposits to the Demand Deposit Account. 4. The fee for the Demand Deposit Account withdrawal facility as referred to shall be charged for the Demand Deposit Account withdrawal facility in the form of the BI BG book and BI Check. 5. Charges for the inactive Demand Deposit Account administration fee shall be regulated as follows: a. An administration fee is charged for inactive Demand Deposit Account balances that have been transferred to certain accounts at Bank Indonesia; b. The administrative fee as referred to, is charged until the balance is 0 (zero) or has expired; and c. The remaining balance in the Demand Deposit Account that has been transferred to a certain account at Bank Indonesia as referred to and has expired is recognized as a receipt by Bank Indonesia.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
PADG Nomor 22/2/ PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG Nomor 20/10/ PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG Number 22/2/ PADG/2020 concerning the Fourth Amendment to PADG Number 20/10/ PADG/2018 on Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Conventional Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	1. Giro Wajib Mimum (GWM) dalam valuta asing ditetapkan sebesar rata-rata 4% (empat persen) dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional (DPK BUK) dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi: a. Secara harian sebesar 2% (dua persen); dan b. Secara rata-rata sebesar 2% (dua persen); 2. Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 tidak berlaku bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah. 3. BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam valuta asing. 4. Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.	1. Minimum Statutory Reserves (GWM) in foreign currencies are set at an average of 4% (four percent) of Conventional Commercial Bank Third Party Funds (DPK BUK) in foreign currencies during a certain reporting period, which must be fulfilled: a. On a daily basis, 2% (two percent); and b. On average 2% (two percent); 2. Fulfillment of GWM as referred to in Article 2 and Article 7 does not apply to BUK receiving short-term liquidity loans. BUK receiving short-term liquidity loans are required to meet GWM in rupiah on a daily basis of 5.5% (five point five percent) of BUK DPK in rupiah. 3. BUKs receiving short-term liquidity loans are required to meet GWM in foreign currencies on a daily basis of 4% (four percent) of BUK deposits in foreign currencies. 4. Fulfillment of the statutory reserves as referred to in number 2 and number 3 shall be made from the activation date of the short-term liquidity loan up to 1 (one) day before the short-term liquidity loan repayment date.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/3/ PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah PADG Number 22/3/ PADG/2020 concerning Standardization of Competences in Payment System and Rupiah Currency Management	1. Pelaku SPPUR wajib memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Sertifikat Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR). 2. Pelaku SPPUR wajib menatausahakan data Pegawai pemilik Sertifikat SPPUR. 3. Lembaga Pelatihan Kerja SPPUR (LPK SPPUR) yang telah diakui oleh Bank Indonesia wajib terakreditasi oleh lembaga yang berwenang paling lambat 1 (satu) tahun sejak LPK SPPUR diakui oleh Bank Indonesia. 4. LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang akan melakukan perubahan Program PBK SPPUR wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. 5. Permohonan persetujuan perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud, diajukan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia secara tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut: a. Daftar perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan b. Program PBK SPPUR hasil perubahan Pelaku SPPUR wajib memastikan Pegawai yang memiliki Sertifikat SPPUR melakukan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR secara berkala Pemeliharaan Kompetensi SPPUR secara berkala sebagaimana dimaksud bagi: 1) Pegawai pemilik Sertifikat PBK SPPUR, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan 2) Pegawai pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali sebelum masa berlaku Sertifikat Kompetensi SPPUR berakhir.	1. SPPUR providers are required to ensure that Employees carrying out SPPUR Activities as referred to in Article 2 have a Payment System and Money Management Certificate (SPPUR). 2. SPPUR implementers are required to administer the data of Employees who have SPPUR Certificates. 3. The SPPUR Job Training Institute (LPK SPPUR) that has been recognized by Bank Indonesia must be accredited by the competent institution no later than 1 (one) year after LPK SPPUR is recognized by Bank Indonesia. 4. LPK SPPUR recognized by Bank Indonesia that will make changes to the SPPUR PBK Program must obtain approval from Bank Indonesia. 5. Application for approval of SPPUR PBK Program amendments as referred to, submitted by LPK SPPUR recognized by Bank Indonesia in writing by completing the following documents: a. List of SPPUR PBK Program amendments as listed in Attachment VI which is an integral part of this Regulation of Members of the Board of Governors; and b. The SPPUR PBK program as a result of changes to the SPPUR Providers must ensure that employees who have an SPPUR certificate carry out regular SPPUR Competency Maintenance Periodically Maintenance of SPPUR Competencies as referred to: 1) Employees of SPPUR PBK Certificate, at least 1 (one) time within a period of 3 (three) years; and 2) Employees who hold SPPUR Competency Certificates, at least 1 (one) time before the expiration of the SPPUR Competency Certificate.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/4/ PADG/2020 tentang Pelaksanaan PBI No. 22/4/ PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona PADG Number 22/4/ PADG/2020 concerning the Implementation of PBI No. 22/4/PBI/2020 on Incentives for Banks that Provide Funds for Certain Economic Activities in Support of Handling the Economic Impact of Corona Virus Pandemic	1. Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa: a. Kegiatan ekspor; b. kegiatan impor; c. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan/atau d. Kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; 2. Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian, ditetapkan Sebesar 0,5% (nol koma lima persen). (Contoh terdapat pada Lampiran I PADG Nomor 22/4/ PADG/2020). 3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan. (detail periode waktu terdapat pada Pasal 3). 4. Cakupan penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Kredit ekspor atau pembiayaan ekspor; b. Kredit impor yang bersifat produktif atau pembiayaan impor yang bersifat produktif; c. *Letter of Credit* (L/C); d. Kredit UMKM atau pembiayaan UMKM; dan/atau e. Kredit atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;	1. Bank Indonesia provides incentives for Banks providing funds for certain economic activities in the form of: a. Export activities; b. Import activities; c. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Activities; and/or d. Economic activities in other priority sectors determined by Bank Indonesia; 2. Incentives for Banks as referred to in number 1 in the form of leniency on the mandatory reserve requirement (GWM) in rupiah which must be fulfilled on a daily basis is set at 0.5% (zero point five percent). (An example is in Appendix I of PADG Number 22/4/ PADG/2020). 3. The incentives as referred to are provided by Bank Indonesia on a monthly basis (details of the time period are in Article 3). 4. The scope of provision of funds by Banks for certain economic activities as referred to consists of: a. Export credit or export financing; b. Productive import credit or productive import financing; c. Letter of Credit (L/C); d. UMKM credit or UMKM financing; and/or e. Credit or other financing as stipulated by Bank Indonesia;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
	5. Bank wajib menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar kepada Bank Indonesia.	5. Banks are required to correctly submit data on provision of funds for certain economic activities to Bank Indonesia.	
PADG Nomor 22/7/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka PADG Number 22/7/PADG/2020 Tconcerning the Fourth Amendment to PADG Number 20/5/PADG/2018 on Instruments for Open Market Operation	1. SukBI (Sukuk Bank Indonesia) memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Menggunakan *underlying asset* berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau sukuk global; b. Berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*); d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; e. Hanya dapat dibeli oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di pasar perdana; f. Dapat diperdagangkan (*tradable*) di pasar sekunder; dan g. Hanya dapat dimiliki oleh Bank; 2. Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu *(early termination)* atas Transaksi *Repo* OPT Konvensional berdasarkan pertimbangan terkait perubahan status pengawasan Peserta OPT Konvensional menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait. 3. Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional berdasarkan pertimbangan terkait perubahan status pengawasan Peserta OPT Konvensional menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait.	1. SukBI (Bank Indonesia Sukuk) has the following characteristics: a. Using underlying assets in the form of State Sharia Securities (SBSN) and/or global sukuk; b. A period of at least 1 (one) day and a maximum of 12 (twelve) months stated in the number of calendar days, which is calculated from 1 (one) day after the date of transaction settlement to the maturity date; c. Issued without a script (scripless); d. Can be pledged as collateral to Bank Indonesia; e. Can only be purchased by Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) in the primary market; f. Can be traded (tradable) on the secondary market; and g. Can only be owned by the Bank; 2. Bank Indonesia may terminate transactions before maturity (early termination) of Conventional OMO Repo Transactions based on considerations related to changes in the supervisory status of Conventional OMO Participants to Banks that cannot be restructured by the relevant authorities. 3. Bank Indonesia may terminate transactions before maturity (early termination) of Conventional OMO Reverse Repo Transactions based on considerations related to changes in the supervisory status of Conventional OMO Participants to Banks that cannot be restructured by the relevant authorities.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/8/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka PADG Number 22/8/PADG/2020 concerning Fifth Amendment to PADG Number 20/6/PADG/2018 on Instruments for Open Market Operation	1. Dalam hal Peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dinyatakan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait, *outstanding* transaksi OPT yang dimiliki oleh Peserta OPT dimaksud dapat: a. Dialihkan kepada pihak lain; atau b. Dilakukan pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia; 2. Pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302A huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal *outstanding* transaksi *repo* atau transaksi *reverse repo* Peserta OPT yang dinyatakan tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait tidak dialihkan kepada pihak lain, dilakukan pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia; b. Tanggal pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi *repo* atau transaksi *reverse repo* berdasarkan tanggal diterimanya informasi tidak dialihkannya *outstanding* transaksi *repo* atau transaksi *reverse repo* Peserta OPT yang dinyatakan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi *repo* diperlakukan sebagai transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT kepada Bank Indonesia; d. Pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi *reverse repo* diperlakukan sebagai transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta OPT kepada Bank Indonesia; e. Setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan pada hari yang sama pada tanggal *early termination* (*same day settlement*); f. Dalam hal informasi atas tidak dialihkannya transaksi *repo* atau transaksi *reverse repo* kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS berakhir, pengakhiran transaksi (*early termination*) dan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya; g. Perhitungan nilai setelmen transaksi *outright* sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam Operasi Moneter;	1. In the event that an Open Market Operation (OPT) Participant is declared a bank that cannot be restructured by the relevant authorities, the OMO outstanding transaction owned by the said OMO Participant may: a. Transferred to another party; or b. Conducted an early termination by Bank Indonesia; 2. Early termination of repo transactions and reverse repo transactions as referred to in Article 302A letter b is carried out with the following conditions: a. In the event that an OMO Participant's outstanding repo transaction or reverse repo transaction that is declared unhealthy by the relevant authority is not transferred to another party, Bank Indonesia shall terminate it before maturity (early termination); b. Early termination of repo transactions or reverse repo transactions is based on the date when the information is received, the outstanding repo transactions or reverse repo transactions of OMO Participants that are declared unhealthy as referred to in letter a. c. Early termination of a repo transaction is treated as an outright sale of securities by OMO Participants to Bank Indonesia; d. Early termination of a reverse repo transaction is treated as an outright purchase transaction of securities by OMO Participants to Bank Indonesia; e. Early termination by Bank Indonesia as referred to in letter c and letter d shall be conducted on the same day on the date of early termination (same day settlement); f. In the event that information on repo transactions or reverse repo transactions is not transferred to other parties as referred to in letter a is received after the operational hours of the BI-RTGS System and BI-SSSS have ended, early termination and settlement shall be made on the following working day; g. The calculation of the outright transaction settlement value as referred to in letter c and letter d, refers to the Bank Indonesia regulations governing the criteria and requirements for securities in Monetary Operations;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	h. Dalam hal nilai setelmen transaksi *outright* lebih kecil daripada nilai kewajiban setelmen *second leg* transaksi *repo*, Peserta OPT harus menyelesaikan selisih kurang nilai setelmen	h. In the event that the outright transaction settlement value is smaller than the second leg repo transaction settlement obligation value, the OMO Participant must settle the difference in less settlement value.	
PADG Nomor 22/9/ PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG Nomor 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter PADG Number 22/9/ PADG/2020 concerning Amendment to PADG Number 20/7/PADG/2018 on Participation in Monetary Operation	1. Dalam hal Bank baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bank perantara, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan setelah seluruh kewajiban Bank asal diselesaikan dan/atau dialihkan kepada Bank perantara. 2. Dalam hal peserta Operasi Moneter dinyatakan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait, *outstanding* transaksi Operasi Moneter yang dimiliki oleh peserta Operasi Moneter dimaksud dapat: a. Dialihkan kepada pihak lain; atau b. Dilakukan pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia. 3. Pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dari otoritas terkait bahwa *outstanding* transaksi Operasi Moneter yang dimiliki oleh peserta Operasi Moneter dimaksud tidak dialihkan kepada pihak lain	1. In the event that the new bank as referred to in Article 5 is an intermediary bank, the license as referred to in Article 3 may be issued after all obligations of the original Bank have been settled and/or transferred to the intermediary Bank. 2. In the event that Monetary Operation participants are declared as banks that cannot be restructured by the relevant authorities, the outstanding Monetary Operation transactions owned by the Monetary Operation participants may: a. Transferred to another party; or b. End before maturity (early termination) by Bank Indonesia. 3. Early termination by Bank Indonesia as referred to in paragraph (1) letter b shall be conducted after receiving confirmation from the relevant authorities that outstanding Monetary Operation transactions owned by Monetary Operation participants have not been transferred to other parties.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/10/ PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG Nomor 20/10/ PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG Number 22/10/ PADG/2020 concerning the Fifth Amendment to PADG Number 20/10/ PADG/2018 on Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Conventional Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	1. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% (tiga koma lima persen) dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional (DPK BUK) dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi: a. Secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan b. Secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen) Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro setiap hari terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2. Bagian tertentu sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam rupiah. 3. Jasa giro sebagaimana dimaksud, diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun. 4. Jasa giro sebagaimana dimaksud, diberikan untuk setiap hari bagi BUK yang memenuhi rasio GWM dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 3,5% (tiga koma lima persen) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. 5. Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.	1. Minimum Statutory Reserves (GWM) in rupiah are set at an average of 3.5% (three point five percent) of Conventional Commercial Bank Third Party Funds (DPK BUK) in rupiah during a certain reporting period, which must be fulfilled: a. On a daily basis, 0.5% (zero point five percent); and b. On the average of 3% (three percent), Bank Indonesia may provide demand deposits every day for a certain portion of the fulfillment of statutory reserves in rupiah as referred to in Article 2. 2. The specified portion as referred to, is determined at 1.5% (one point five percent) of TPF in rupiah. 3. Current account services as referred to are provided at an interest rate of 0% (zero percent) per year. 4. Demand deposit service as referred to, is provided every day for BUKs that meet the GWM ratio in rupiah of more than or equal to 3.5% (three point five percent) Bank Indonesia may change the policy for giro services and/or the percentage of current accounts economic conditions and the direction of Bank Indonesia policies. 5. The provision of current accounts as referred to in numbers (1) to paragraph (4) does not apply to BUKs receiving short-term liquidity loans from the activation date of the short-term liquidity loans up to one day before the short-term liquidity loan repayment date.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/11/ PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG Number 22/11/ PADG/2020 concerning Amendments to PADG Number 21/22/PADG/2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	1. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut: a. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki: 1) Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau 2) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif; b. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki: 1) Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan 2) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan	1. Bottom Disincentive Parameters are determined as follows: a. At 0 (zero), if the Bank has: 1) The gross non-performing loan ratio is greater than or equal to 5% (five percent); or 2) Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) is less than or equal to Incentive KPMM; b. At 0 (zero), if the Bank has: 1) The gross non-performing loan ratio is less than 5% (five percent); and 2) KPMM is greater than Incentive KPMM and less than or equal to 19% (nineteen percent); and	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
	c. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki: 1) Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan 2) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan 2. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut: a. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau b. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif. 3. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional (DPK BUK) dalam rupiah PLM dipenuhi dalam bentuk: a. Surat berharga dalam rupiah yang dimiliki BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, PLM sebagaimana dimaksud paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga dalam rupiah dan/atau surat berharga syariah dalam rupiah sebagaimana dimaksud dengan jenis surat berharga berupa SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement*. b. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan setelmen pembelian SBN di pasar perdana dengan cara *private placement* tidak dapat diselesaikan pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku maka pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud, dilakukan pada hari setelmen pembelian SBN tersebut berhasil diselesaikan Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku sebagaimana dimaksud atau pada hari setelmen pembelian SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* berhasil diselesaikan sebagaimana dimaksud nilai SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* yang digunakan dalam perhitungan PLM yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil *private Placement*. c. Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud, ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku.	c. At 0 (zero), if the Bank has: 1) The gross non-performing loan ratio is less than 5% (five percent); and 2) KPMM is greater than 19% (nineteen percent); and 2. Top Disincentive Parameters are determined as follows: a. Amounted to 0 (zero), if the Bank has KPMM greater than or equal to Incentive KPMM; or b. As much as 0 (zero), if the Bank has a KPMM smaller than the Incentive KPMM. 3. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is set at 6% (six percent) of Conventional Commercial Bank Third Party Funds (DPK BUK) in rupiah PLM is fulfilled in the form of: a. Securities in rupiah held by BUK and can be used in monetary operations On the first working day after this Regulation of Members of the Board of Governors comes into effect, PLM as referred to at least 2% (two percent) of DPK BUK in rupiah is fulfilled in the form of securities in rupiah and/or Islamic securities in rupiah as referred to as types of securities in the form of SBN purchased on the primary market by means of private placement. b. In the event that there are certain conditions that cause the SBN purchase settlement on the primary market by means of private placement cannot be completed on the first working day after this Regulation of Members of the Board of Governors comes into effect, fulfillment of the PLM as referred to, shall be carried out on the day the SBN purchase settlement is successfully completed On the first working day after this Regulation of Members of the Board of Governors comes into effect as referred to or on the settlement day of the purchase of SBNs purchased on the primary market by means of a successful private placement as referred to the value of SBNs purchased on the primary market by means of private placement used in the calculation of PLM is the settlement value of the results private Placement. c. The use of BUK securities in the repo transaction as referred to, is determined to be a maximum of 6% (six percent) of BUK DPK in rupiah on the first working day after this Regulation of Members of the Board of Governors comes into effect.	
PADG Nomor 22/12/ PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui *Front Office* Perizinan PADG Number 22/12/ PADG/2020 dated April 30, 2020 concerning Implementing Regulation on Bank Indonesia Integrated Licensing through Licensing Front Office	1. Bank Indonesia memberikan perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. 2. Perizinan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Izin; b. Persetujuan; dan c. Layanan. 3. Bentuk perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait. 4. Pihak yang dapat menjadi Pemohon yaitu: a. Bank; b. Lembaga Selain Bank; c. Kementerian atau lembaga; dan d. Pihak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait 5. Bank Pemohon memiliki tugas untuk: a. Menatausahakan Hak Akses dan penggunaannya; b. Menggunakan aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai peruntukan; c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Hak Akses; dan d. Menyimpan asli Dokumen Persyaratan permohonan perizinan yang telah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, sesuai dengan jangka waktu penyimpanan dokumen.	1. Bank Indonesia provides licenses for activities in the monetary, macroprudential, payment system and rupiah currency management sectors. 2. Licensing as referred to includes: a. Permit; b. Approval; and c. Service. 3. The form of licensing in the monetary, macroprudential sector, as well as the payment system and rupiah currency management as referred to refers to the Bank Indonesia regulations concerning related licensing. 4. Parties that can become Petitioners are: a. Banks; b. Non-Bank Institutions; c. Ministries or institutions; and d. Other parties, as referred to in the Bank Indonesia provisions concerning related licensing 5. The Applicant Bank has the duty to: a. Administering Access Rights and their use; b. Using the Bank Indonesia licensing application according to the designation; c. Maintain the security and confidentiality of Access Rights; and d. Keep the original Documents Requirements for licensing applications that have been submitted through the Bank Indonesia licensing application, in accordance with the document retention period.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
PADG Nomor 22/15/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional PADG Number 22/15/PADG/2020 concerning Second Amendment to PADG Number 19/6/PADG/2017 on Short Term Liquidity Loan (PLJP) for Conventional Commercial Banks	1. Substansi penyesuaian pengaturan dalam PADG Perubahan Kedua PLJP BUK antara lain meliputi: a. Penyesuaian persyaratan bagi Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek untuk dapat memperoleh PLJP sehingga selengkapnya menjadi: 1) Mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJP; 2) Memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan 3) Diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP; Penyesuaian persyaratan tersebut juga dituangkan dalam pasal yang mengatur mengenai koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK, serta pasal yang mengatur mengenai persyaratan pencairan dan penghentian pencairan PLJP. b. Penyesuaian terkait pengaturan agunan PLJP meliputi: 1) Menambahkan kondisi agunan PLJP yaitu Bank menjamin agunan PLJP telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP; Salah satu persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dapat diterima menjadi agunan PLJP yaitu tidak pernah direkstrukturisasi dari sebelumnya dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir diubah menjadi 2 (dua) tahun terakhir. 2) Menambahkan kondisi bahwa agunan lain PLJP: a) Harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia; dan b) Tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali selama masih dalam status sebagai agunan lain PLJP tanpa persetujuan Bank Indonesia; 3) Terkait nilai agunan PLJP berupa surat berharga (SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN), Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan nilai yang berbeda untuk agunan PLJP tersebut. 4) Penyesuaian frekuensi penyampaian Laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dari sebelumnya dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali menjadi setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Ketentuan ini mulai berlaku sejak laporan untuk posisi akhir bulan Juni 2020. c. Penyesuaian dokumen permohonan PLJP meliputi: 1) Penyesuaian terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank serta menambahkan pernyataan bahwa Bank menjamin agunan PLJP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai agunan PLJP; 2) Penambahan dokumen berupa surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank (PSP) bahwa PSP Bank menjamin pelunasan PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset PSP; d. Kelengkapan dokumen yang disampaikan Bank pada saat melakukan permohonan PLJP merupakan dokumen asli yang dilengkapi dengan *soft copy*. e. Dalam hal permohonan PLJP disetujui, menambahkan dokumen yang harus disampaikan oleh Bank berupa: 1) Rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PSP Bank yang disertai dengan daftar aset PSP melalui notaris; dan 2) Formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;	1. Substance of regulatory adjustments in the Second Amendment of the PLJP BUK includes: a. Adjusted requirements for Banks experiencing Short-Term Liquidity Difficulties to be able to obtain PLJP so that the details are as follows: 1) Obtain an assessment from the OJK regarding the fulfillment of solvency requirements/adequacy and health level to be able to obtain PLJP; 2) Have high quality collateral as guarantee for the PLJP that meets the requirements as stipulated in this Regulation of Members of the Board of Governors; and 3) It is estimated that they will be able to return the PLJP; Adjustment of these requirements is also outlined in the article regulating coordination between Bank Indonesia and OJK, as well as the article regulating the requirements for disbursement and termination of PLJP disbursement. b. Adjustments related to the PLJP collateral arrangement include: 1) Adding the conditions for PLJP collateral, namely the Bank guarantees that the PLJP collateral has met all the requirements for PLJP collateral; One of the requirements for Credit Assets and/or Financing Assets that can be accepted as PLJP collateral is that it has never been restructured from the previous 3 (three) years being changed to the last 2 (two) years. 2) Adding the conditions that the PLJP's other collateral: a) Must be free from all engagements, disputes, confiscation, and not being pledged as collateral to other parties and/or Bank Indonesia; and b) It cannot be traded and/or re-guaranteed as long as it is still in the status as another PLJP collateral without the approval of Bank Indonesia; 3) Regarding the value of PLJP collateral in the form of securities (SBI, SBIS, SDBI, SukBI, and SBN), Bank Indonesia may, based on certain considerations, determine a different value for the PLJP collateral. 4) Adjustment of the frequency of submission of Report on the list of Credit Assets and/or Financing Assets from previously reported once every 6 (six) months to once every 3 (three) months for the positions at the end of March, June, September, and December. This provision shall come into effect as of the report for the position at the end of June 2020. c. The adjustment of the PLJP application documents includes: 1) Adjustments related to the statement letter signed by the board of directors of the Bank and acknowledged by the board of commissioners of the Bank and adding a statement that the Bank guarantees that the PLJP collateral has met all the requirements as PLJP collateral; 2) Additional documents in the form of a statement from the controlling shareholder of the Bank (PSP) that the PSP Bank guarantees the repayment of the PLJP and is capable of issuing a personal guarantee and/or corporate guarantee accompanied by a list of PSP assets; d. The documents submitted by the Bank at the time of submitting the PLJP application are original documents, accompanied by soft copies. e. In the event that the PLJP application is approved, add the documents that must be submitted by the Bank in the form of: 1) The draft personal guarantee and/or corporate guarantee from the PSP Bank, accompanied by a list of PSP assets through a notary; and 2) Know Your Customer form and other required documents if there is collateral in the form of Corporate Bonds and/or Corporate Sukuk;	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
	f. Penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta perubahan akta perjanjian pemberian PLJP dan perubahan akta pengikatan agunan PLJP seluruhnya dilakukan di hadapan notaris. Menambahkan ketentuan bahwa PSP melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP telah ditandatangani. g. Menyempurnakan ketentuan bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan, Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut atas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PSP Bank.	f. The signing of the agreement deed for the granting of the PLJP and the deed of binding the PLJP collateral as well as the amendment of the agreement deed for granting the PLJP and the amendment of the PLJP collateral binding deed are all carried out in front of a notary public. Adding a provision that PSP will sign before a notary the deed of personal guarantee and/or corporate guarantee in the event that the PLJP grant agreement deed and the PLJP collateral agreement deed have been signed. g. Revise the provisions that in the context of implementing collateral execution, Bank Indonesia will follow up on personal guarantees (personal guarantees) and/or corporate guarantees (corporate guarantees) from PSP Bank.	
PADG Nomor 22/18/ PBI/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah PADG Number 22/18/ PBI/2020 dated July 29, 2020 concerning Mechanism for the Issuance of Instruments and Settlement of InterBank Money Market Transactions Based on Sharia Principles	1. Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. 2. Kegiatan di PUAS meliputi: a. Penerbitan Instrumen PUAS; dan b. Transaksi *Repo* Syariah. 3. Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. SIMA; b. SiKA; dan c. SiPA. 4. Pada saat penerbitan Instrumen PUAS: a. BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana; dan b. BUK hanya dapat melakukan penempatan dana. Yang dimaksud dengan "hanya dapat melakukan penempatan dana" adalah BUK tidak dapat menerbitkan Instrumen PUAS. 5. Dalam Transaksi *Repo* Syariah, BUK dapat bertindak sebagai penjual Surat Berharga Syariah (SBS) dan pembeli Surat Berharga Syariah (SBS) Penjual SBS menjual SBS kepada pembeli SBS dengan menyepakati: a. Jenis dan seri SBS yang akan dijual; b. Nominal SBS; c. Harga SBS; dan d. Waktu penyelesaian transaksi (*settlement*).	1. Interbank Sharia Fund Management Certificate, hereinafter referred to as SiPA, is a certificate issued by a BUS or UUS as a statement of receipt of fund management at PUAS under a wakalah bi al-istitsmar contract. 2. Activities at PUAS include: a. PUAS instrument issuance; and b. Sharia Repo Transaction. 3. The PUAS instrument as referred to consists of: a. SIMA; b. SiKA; and c. SiPA. 4. At the time of issuance of the PUAS Instrument: a. BUS and UUS can place funds and/or receive funds; and b. BUK can only place funds. The meaning of "can only place funds" is that BUK cannot issue PUAS Instruments. 5. In a Sharia Repo Transaction, BUK can act as a seller of Sharia Securities (SBS) and buyer of Sharia Securities (SBS). SBS seller sells SBS to SBS buyers by agreeing to: a. The types and series of SBS to be sold; b. SBS Nominal; c. SBS prices; and d. Transaction settlement time.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/23/ PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka PADG Number 22/23/ PADG/2020 concerning the Implementation of Open Market Operation	1. Mekanisme pelaksanaan transaksi OPT Konvensional diatur untuk instrument sebagai berikut: a. Penerbitan SBI; b. Penerbitan SDBI; c. Penerbitan SBBI Valas; d. Transaksi Repo OPT KOnvensional; e. Transaksi Reverse Repo OPT KOnvensional; f. Transaksi Pembelian dan Penjualan SBN secara putus (*Outright*) dipasar sekunder; g. Transaksi *term deposit* OPT Konvensional dalam rupiah; h. Transaksi *term deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing; i. Transaksi *Spot*; j. Transaksi *Swap*; k. Transaksi *Forward*; dan l. Transaksi DNDF; 2. Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran dan/atau pengkinian informasi sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (SBBI Valas). 3. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBBI Valas dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Sistem LHBU, Laporan Bank Umum Terintegrasi, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.	1. The mechanism for implementing Conventional OMO transactions is regulated for the following instruments: a. Issuance of SBIs; b. SDBI issuance; c. Issuance of Foreign Currency SBBI; d. Conventional Repo OPT Transactions; e. Conventional Reverse Repo OPT Transactions; f. Outright SBN Purchase and Sale Transactions on the secondary market; g. Conventional OMO term deposit transactions in rupiah; h. Conventional OMO term deposit transactions in foreign currencies; i. Spot Transactions; j. Swap Transactions; k. Forward Transactions; and l. DNDF Transaction; 2. Participants of Conventional OMOs and Intermediary Agencies shall register and/or update information prior to participating in the auction of Bank Indonesia Securities in Foreign Currencies (SBBI Valas). 3. Bank Indonesia shall announce plans for the auction of SBBI in Foreign Currency and amendments no later than before window time through the automated system for auction of foreign currency monetary operations and/or other means stipulated by Bank Indonesia, the LHBU System, Integrated Commercial Bank Report, Bank Indonesia website, and/or other means used by Bank Indonesia.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	Isi Aturan	Content	Dampak | Impact
PADG Nomor 22/26/ PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter PADG Number 22/26/ PADG/2020 concerning Participation in Monetary operation	1. Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter atau Bank baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. 2. Langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter sebagaimana dimaksud, meliputi kegiatan: a. aksi korporasi berupa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan; b. perubahan status; c. perubahan nama; d. pencabutan izin usaha; dan/atau e. langkah strategis lainnya; 3. Bank Indonesia menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara dengan mempertimbangkan: a. aspek kapasitas; b. aspek kapabilitas; dan c. aspek reputasi. 4. Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. aspek kelembagaan; b. aspek infrastruktur; c. aspek kompetensi sumber daya manusia; dan d. aspek manajemen risiko; 5. Peserta Operasi Moneter wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal: a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan/atau b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).	1. Banks taking strategic and fundamental steps that have an impact on the operational relations of the Bank with Bank Indonesia in the monetary sector or new Banks that have obtained a business license from the competent authority must obtain a license from Bank Indonesia. 2. Strategic and fundamental steps that have an impact on the operational relationship between the Bank and Bank Indonesia in the monetary sector as referred to, include the following activities: a. Corporate actions in the form of Merger, Consolidation, Acquisition and Separation; b. Change in status; c. Change of name; d. Revocation of business license; and/or e. Other strategic step; 3. Bank Indonesia determines the requirements for obtaining a license for parties that will participate in Monetary Operations and Intermediary Agencies by considering: a. Capacity aspect; b. Capability aspect; and c. Reputation aspect. 4. Banks that will be participating in Monetary Operation as referred to must meet the following requirements: a. Institutional aspects; b. Infrastructure aspects; c. Human resource competency aspects; and d. Risk management aspects; 5. Monetary Operation participants are required to submit reports to Bank Indonesia in the following cases: a. There are changes in data, information, and/or information related to the fulfillment of requirements as participants in Monetary Operations as referred to in Article 10 paragraph (1); and/or b. There are changes in data, information, and/or information due to Monetary Operation participants taking strategic and fundamental steps as referred to in Article 31 paragraph (1).	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/31/ PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional PADG Number 22/31/ PADG/2020 concerning Third Amendment to PADG Number 19/6/PADG/2017 on Short Term Liquidity Loan (PLJP) for Conventional Commercial Banks	1. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. 2. Agunan PLJP berupa Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; b. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali kredit atau pembiayaan pegawai; c. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank; d. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; e. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP; f. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan; g. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan h. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain. 3. Dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud angka (2) huruf d tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai agunan PLJP dengan ketentuan sebagai berikut:	1. Short Term Liquidity Loans, hereinafter referred to as PLJP, are loans from Bank Indonesia to Banks to overcome Short Term Liquidity Difficulties experienced by Banks. 2. PLJP collateral in the form of Credit Assets as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g and/or Financing Assets as referred to in Article 4 paragraph (1) letter h must meet the following requirements: a. Collectibility is classified as smooth for the last 12 (twelve) consecutive months; b. Guaranteed as collateral for land and buildings and/or land, except for credit or employee financing; c. Not a credit and/or financing to parties related to the Bank; d. It has never been restructured in the last 2 (two) years; e. The remaining maturity of credit and/or financing is at least 9 (nine) months from the signing date of the PLJP grant agreement; f. The credit debit or principal balance of financing does not exceed the maximum limit for lending or disbursement of funds at the time of provision and does not exceed the credit or financing ceiling; g. Has a credit agreement and/or financing agreement as well as a binding collateral that has legal force; and h. In the credit agreement and/or financing agreement between the Bank and the debtor or customer, there is a clause that states that credit and/or financing can be transferred to another party. 3. In the event that the Credit Assets and/or Financing Assets that meet the requirements have never been restructured as referred to in number (2) letter d is insufficient, the Bank may use the restructured Credit Assets and/or Financing Assets during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) stimulus period as collateral for the PLJP with the following conditions:	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

Keterangan | Description	**Isi Aturan**	**Content**	**Dampak** | Impact
	a. aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan b. telah memenuhi persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.	a. Credit Assets and/or Financing Assets have never been restructured in the last 2 (two) years outside of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) stimulus period; and b. Has fulfilled the requirements for Credit Assets and/or other Financing Assets as referred to in paragraph (1) letter a, letter b, letter c, letter e, letter f, letter g, and letter h.	
PADG Nomor 22/33/ PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PADG Nomor 20/15/ PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* PADG Number 22/33/ PADG/2020 concerning the Third Amendment to PADG Number 20/15/PADG/2018 on the Implementation of Instant Fund Settlement through Bank Indonesia System-Real Time Gross Settlement	1. Bank dapat menetapkan dan mengenakan biaya Transfer Dana kepada nasabah paling banyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). 2. Bank wajib mengumumkan: a. besarnya biaya Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Penyelenggara kepada Bank; dan b. besarnya biaya Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan dan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. 3. Ketentuan mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS. 4. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. 5. Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.	1. Banks may determine and charge Funds Transfer fees to customers of a maximum of Rp30,000.00 (thirty thousand rupiah). 2. Banks are required to announce: a. The amount of the Funds Transfer fee through the BI-RTGS System determined by the Operator to the Bank; and b. The amount of the Funds Transfer fee through the BI-RTGS System determined and charged by the Bank to the customer. 3. Provisions regarding the announcement procedure referred to shall refer to the Bank Indonesia regulations governing customer protection in conducting fund transfers through the BI-RTGS System. 4. Attachment VIII is amended so that it becomes as listed in Attachment VIII which is an integral part of this Regulation of Members of the Board of Governors. 5. Attachment X is amended so that it becomes as listed in Appendix X which is an integral part of this Regulation of Members of the Board of Governors.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions
PADG Nomor 22/35/ PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona PADG Number 22/35/ PADG/2020 concerning Amendment to PADG Number 22/4/PADG/2020 on Incentives for Banks that Provide Funds for Certain Economic Activities in Support of Handling the Economic Impact of Corona Virus Pandemic	1. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional. 2. Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa: a. kegiatan ekspor; b. kegiatan impor; c. kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan/atau d. kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya. 3. Sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d terdiri atas: a. sektor hotel dan restoran; b. sektor otomotif; c. sektor tekstil dan produk tekstil dan alas kaki; d. sektor elektronik; dan/atau e. sektor kayu olahan, furnitur, dan produk kertas. 4. Besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 5. Contoh perhitungan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.	1. Minimum Statutory Reserves, hereinafter referred to as GWM, is the minimum amount of funds that must be maintained by Banks, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of the third party funds of the Bank as referred to in the Bank Indonesia provisions concerning statutory reserves in rupiah and foreign currencies for commercial banks. 2. Bank Indonesia provides incentives for Banks providing funds for certain economic activities in the form of: a. Export activities; b. Import activities; c. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Activities; and/or d. Economic activities in other priority sectors. 3. Other priority sectors as referred to in number 1 letter d consist of: a. Hotel and restaurant sector; b. Automotive sector; c. Textile sector and textile and footwear products; d. Electronics sector; and/or e. Processed wood, furniture and paper products sector. 4. The amount of the incentive for leniency on the mandatory fulfillment of GWM in rupiah which must be fulfilled on a daily basis is set at 0.5% (zero point five percent). 5. An example of calculating the leniency incentive for the obligation to fulfill statutory reserves in rupiah which must be fulfilled daily is listed in Appendix I which is an integral part of this Regulation of Members of the Board of Governors.	PaninBank telah menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut dan telah memastikan praktik terkait sesuai dengan ketentuan PaninBank has implemented and complied with these regulations and has ensured that the related practices are in accordance with the provisions

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA YANG DITERAPKAN PADA TAHUN 2020

Sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia, PaninBank dan entitas anak senantiasa mematuhi kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THE IMPACT OF ITS IMPLEMENTATION IN 2020

As a business entity operating in Indonesia, PaninBank and subsidiaries are in compliance at all times with all applicable accounting standards.

PSAK/ISAK Baru/Amandemen yang Diterapkan per 1 Januari 2020

Keterangan Description	**Isi Perubahan**	**Dampak** Impact
PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan	Menambahkan istilah "*obscuring*" (pengaburan), penjelasan dan contoh mengenai istilah tersebut, mengubah istilah "dapat mempengaruhi" menjadi "diperkirakan cukup mempengaruhi" dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama dan mengubah istilah "pengguna" menjadi "pengguna utama" dalam konteks pengguna laporan keuangan dan terdapat penambahan penjelasan terkait pengguna utama tersebut.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
PSAK 1 (2019 Amendment): Presentation of Financial Statements	Adding the term "obscuring", definition and examples of this term, changing the term "can influence" to "estimated enough to influence" in the context of decision making by the main user, and changing the term "user" to "main user" in the context of users of financial statements, as well as additional explanation related to the main user.	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	Mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Amendment to PSAK 15: Investment in Associates and Joint Ventures, About Long-term Interests in Associates and Joint Ventures	Regulates that the entity also applies PSAK 71 to financial instruments in associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests which substantially form part of the entity's net investment in associates or joint ventures	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material	Menambahkan referensi mengenai definisi material yang didefinisikan dalam PSAK 1.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Amendment to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors concerning Material Definitions.	Addition of reference to material definitions defined in PSAK 1.	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
PSAK 71: Instrumen Keuangan	Mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti: a. Klasifikasi dan pengukuran Bahwa pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi aset keuangan dilakukan melalui model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Melalui pendekatan tersebut aset keuangan akan diklasifikasikan menjadi: a. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi b. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi c. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. b. Penurunan nilai Penggunaan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Penyisihan kerugian instrumen keuangan dibagi menjadi: a. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12- *Month Estimated Credit Losses*) jika pada tanggal pelaporan risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. b. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Lifetime Estimated Credit Losses*) jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. c. Akuntansi lindung nilai Persyaratan tes efektivitas menjadi tidak berlaku dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum (*principle-based*).	Bank dan Entitas Anak telah mengadopsi persyaratan PSAK 71 mulai 1 Januari 2020, klasifikasi dan pengukuran serta persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif. PSAK 71 juga mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian untuk itu Bank dan Entitas Anak melakukan pengukuran instrumen keuangan terhadap kategori pemburukan kualitas kredit menjadi 3 kategori yaitu: 1. Tahap 1; CKPN atau Provisi Tahap 1 diukur selama 12 bulan ke depan. Kualitas baik dimana tidak terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan. 2. Tahap 2; CKPN atau Provisi Tahap 2 diukur selama umur instrumen keuangan. Kualitas kurang baik dimana terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan. 3. Tahap 3, CKPN atau Provisi Tahap 3 diukur selama umur instrumen keuangan. Kualitas tidak baik dimana telah terjadi penurunan nilai atau gagal bayar.

Keterangan Description	**Isi Perubahan**	**Dampak** Impact
		Sesuai yang disyaratkan PSAK 71, Bank dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada: 1. Biaya perolehan diamortisasi, 2. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau, 3. Nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dasar, yaitu: a. Model Bisnis dalam mengelola aset keuangan dan b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Penerapan akuntansi lindung nilai tidak berdampak karena saat ini Bank dan Entitas Anak tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai tersebut.
PSAK 71: Financial Instruments	Regulates amendment to requirements related to financial instruments, such as: a. Classification and measurement Whereas the approach used in the classification of financial assets is carried out through the entity's business model in managing financial assets and the characteristics of the contractual cash flows of financial assets. Through this approach, financial assets will be classified into: a. Financial assets measured at fair value through profit or loss b. Financial assets measured at amortized cost c. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income. b. Impairment of value Use of the expected credit loss method to measure losses on financial instruments due to impairment of financial instruments. Allowance for losses on financial instruments is divided into: a. Allowance for 12-month estimated credit losses if at the reporting date the credit risk for financial instruments has not increased significantly since initial recognition. b. Allowance for lifetime estimated credit risk if the credit risk for financial instruments has increased significantly since initial recognition. c. Hedge accounting The effectiveness test requirement becomes invalid and introduces more general (principle-based) requirements.	The Bank and Subsidiaries have adopted the requirements of PSAK 71 starting January 1, 2020, the classification and measurement as well as the requirements for impairment of financial assets, are applied retrospectively. PSAK 71 also requires allowance for losses to be recognized at the amount of estimated credit losses, therefore the Bank and Subsidiaries measure financial instruments against the deterioration of credit quality into 3 categories, namely: 1. Stage 1; CKPN or Provision Stage 1 is measured over the next 12 months. Good quality where there is no significant increase in credit risk. 2. Stage 2; CKPN or Provision Stage 2 is measured over the life of the financial instrument. Less than good quality where there is a significant increase in credit risk. 3. Stage 3, CKPN or Provision Stage 3 is measured over the life of the financial instrument. Poor quality where there has been an impairment or default. In accordance with the requirements of PSAK 71, the Bank and Subsidiaries classify financial assets so that after initial recognition financial assets are measured at: 1. Amortized cost, 2. Fair value through other comprehensive income or, 3. Fair value through profit or loss using the basis, namely: a. The business model in managing financial assets and b. The characteristics of the contractual cash flows of a financial asset. The application of hedge accounting has no impact because currently the Bank and Subsidiaries do not conduct transactions related to hedge accounting.
Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif	Mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Amendment to PSAK 71: Financial Instruments concerning Early Settlement Feature with Negative Compensation	Regulates that a financial asset with an early settlement feature that could result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow that arises solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
Amandemen PSAK: 71, PSAK 55 dan 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga	Amandemen ini memberikan kelonggaran atas efek potensial dari ketidakpastian yang disebabkan oleh reformasi acuan suku bunga (IBOR Reform) dengan memberikan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55. Sehingga entitas akan menganggap bahwa acuan tingkat bunga yang menjadi dasar arus kas yang dilindung nilai, dan/atau acuan tingkat bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi IBOR. Amandemen ini mengatur tentang: 1. Persyaratan kemungkinan besar terjadi (*highly probable*) untuk lindung nilai arus kas 2. Penilaian prospektif PSAK 71 dan penilaian retrospektif PSAK 55 3. Penetapan komponen risiko yang diidentifikasi secara terpisah 4. Penerapan amandemen ini wajib dan akan berlaku untuk jangka waktu terbatas 5. Pengungkapan.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Keterangan Description	**Isi Perubahan**	**Dampak** Impact
Amendments to PSAK 71, PSAK 55 and PSAK 60 on Reform of Benchmark Interest Rate	This amendment provides concessions on the potential effects of uncertainty caused by the interest rate benchmark reform (IBOR Reform) by providing an exception to the hedge accounting requirements in PSAK 71 and PSAK 55. The entity can assume that the benchmark interest rate forming the basis of the hedged cashflows, and/or the benchmark interest rate on which the hedging instrument cash flows are based, are not changed as a result of the IBOR reform. This amendment regulates: 1. Requirement for highly probable cash flow hedges; 2. Prospective assessment of PSAK 71 and retrospective assessment of PSAK 55; 3. Determination of risk components that are identified separately; 4. The adoption of these amendments is mandatory and will be in effect for a limited period; 5. Disclosure.	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	Menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut: 1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan; 2. Mengindentifikasi kewajiban pelaksanaan; 3. Menentukan harga transaksi; 4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; dan 5. Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan	Penerapan PSAK tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers	Establishes the principles that an entity applies to reporting useful information to users of financial statements about the nature, amount, timing and uncertainty of revenues and cash flows arising from contracts with customers. In order to determine the recognition of revenue, this Standard requires an entity to first perform a contractual analysis of transactions, which consists of the following 5 (five) stages: 1. Identifying contracts with customers; 2. Identifying implementation obligations; 3. Determining the transaction price; 4. Allocating transaction prices against performance obligations; and 5. Recognizing revenue when (or during) the entity has completed its performance obligations.	The implementation of the PSAK does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
PSAK 73: Sewa	1. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa kecuali sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah pada nilai kini dari *future lease payment.* 2. Biaya sewa digantikan dengan biaya depresiasi dan biaya bunga. 3. Mengakui amortisasi dari aset sewa dan bunga dari liabilitas sewa sepanjang masa sewa.	Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30: Sewa, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.
PSAK 73: Lease	1. Lessee is required to recognize lease assets and lease liabilities, except for short-term leases and leases where the underlying assets are low at the present value of the future lease payment. 2. Lease costs are replaced by depreciation costs and interest costs. 3. Recognizes the amortization of the leased assets and interest on the lease liabilities over the lease term.	The Group as lessee recognizes right-of-use assets and lease liabilities related to leases previously classified as operating leases under PSAK 30: Lease, except for short-term leases or leases with low-value assets. The Group has adopted PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental lending rates as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liability, adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with the lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

Keterangan Description	**Isi Perubahan**	**Dampak** Impact
Amandemen PSAK 73: Konsesi Sewa Terkait COVID-19	Amandemen PSAK 73 tersebut mengusulkan, sebagai cara praktis, bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait COVID-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan. Perbedaan antara Amandemen PSAK 73 dengan DE Amandemen PSAK 73 tersebut sebagai berikut: 1. Perpanjangan kondisi yang diusulkan dalam paragraf 46B (b) untuk memasukkan konsesi sewa terkait COVID-19 dimana segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2021 2. Persyaratan penyewa yang menerapkan cara praktis untuk mengungkapkan informasi bahwa penyewa telah menerapkan cara praktis untuk seluruh konsesi sewa (jika tidak menerapkan seluruh konsesi sewa maka mengungkapkan informasi tentang sifat kontrak konsesi sewa yang menerapkan cara praktis) dan jumlah yang diakui dalam laba rugi yang mencerminkan perubahan pembayaran sewa yang timbul dari konsesi sewa terkait COVID-19; 3. Penyewa tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan sesuai dengan PSAK 25 Kebijkan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan pada paragraf 28(f) dalam periode pelaporan di mana penyewa pertama kali menerapkan Amandemen PSAK 73 tersebut.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Amendment to PSAK 73: Rental Concessions related to COVID-19	The amendment to PSAK 73 proposes, as a practical way, that tenants can choose not to assess whether a lease related to COVID-19 is a rental modification and provides the conditions that must be met in order for this practical approach to be implemented. The differences between the Amendments to PSAK 73 and DE Amendments to PSAK 73 are as follows: 1. Extension of the conditions proposed in paragraph 46B (b) to include concession leases related to COVID-19 where any reduction in lease payments only affects payments that are originally due on or before 30 June 2021 2. The terms of the lessee who apply the practical way of disclosing information that the lessee has applied the practical way for the entire lease concession (if not applying the entire lease concession then it discloses information about the nature of the lease concession contract that applies the practical way) and the amount recognized in profit or loss that reflects changes in lease payments arising from lease concessions related to COVID-19; 3. The lessee is not required to disclose the information required in accordance with PSAK 25 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors in paragraph 28 (f) in the reporting period in which the lessee first applies the Amendments to PSAK 73.	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.
ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa	1. Penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya. 2. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan. 3. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.	Penerapan Amandemen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang di catat dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions on Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and in PSAK 73: Lease	1. Valuation in determining the accounting treatment related to a land right that looks at the substance of the land right and not its legal form. 2. Accounting treatment related to land rights in accordance with PSAK 16, that is, if a contractual provision provides rights that in substance resemble the purchase of fixed assets, including the provisions in paragraph 58 of PSAK 16 which stipulates that in general, land is not depreciated. 3. Accounting treatment related to land rights in accordance with PSAK 73, namely if the substance of a land right does not transfer control over the underlying asset and only gives the right to use the underlying asset for a period of time, then the substance of the land right is a lease transaction.	The implementation of the amendment does not have a significant impact on the disclosure or amounts recorded in the consolidated financial statements of the current year or the previous year.

Amandemen dan Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang sudah dikeluarkan IAI dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan menerapkan dini diperkenankan yaitu sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

   Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum amandemen PSAK 22 tersebut:

   a. Mengamandemen definisi Bisnis.

Amendments and Improvements to Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation of Financial Accounting Standard that have been issued by IAI and effective on or after January 1, 2021, with early adoption being permitted, are as follow:

1. Amendment to PSAK 22: Business Combination about the Definition of Business

   The amendment clarifies the definition of business so as to help entities in determining the recording of a transaction as a business combination or an asset acquisition. In general, the amendment to PSAK 22 sets out to:

   a. Amending the definition of Business;

b. Menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis
c. Mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output;
d. Menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi

2. Amanademen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi, PSAK 71: Instrumen Keuangan, dan PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2.

   Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif. Adapun isu akuntansi yang timbul dari penggantian IBOR dibagi menjadi dua tahap yaitu:

   a. Tahap 1 (*pre-replacement issues*) merupakan isu atas ketidakpastian yang muncul menjelang periode transisi yang mempengaruhi pelaporan keuangan pada periode sebelum penggantian acuan suku bunga. Untuk mengatasi isu tersebut IASB telah mengeluarkan *Interest Rate Benchmark Reform Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7* pada tahun 2019 yang telah diadopsi dan disahkan oleh DSAK IAI menjadi Amandemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, Amandemen PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* dan Amandemen PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga*. Informasi lengkap terkait hal ini dapat dilihat pada tautan http://bit.ly/IBOR-REFORM-Tahap-1.
   b. Tahap 2 (*replacement issues*) Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amandemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*, PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dan PSAK 73: *Sewa* yang terkait dengan:
      1) perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;

b. Adding an optional concentration test that allows for a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business;
c. Clarifying the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs;
d. Adding illustrative guidance and examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.

2. Amendments to PSAK 55: Financial Instrument – Recognition and Measurement; PSAK 60: Financial Instrument – Disclosure; PSAK 62: Insurance Contract; PSAK 71: Financial Instrument, and PSAK 73: Leases on Reform of Benchmark Interest Rate Phase 2.

   The reform of benchmark interest rate refers to the global reform which agrees to replace IBOR with an alternative interest rate benchmark. The accounting issues arising from the replacement of IBOR are divided into two phases, namely:

   a. Phase 1 (pre-replacement issues), refers to the uncertainty that arises prior to the transition period that affects financial reporting in the period before changing the benchmark interest rate. To overcome this issue, the IASB has issued Interest Rate Benchmark Reform Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 in 2019 which have been adopted and ratified by DSAK IAI to become Amendment to PSAK 71: Financial Instruments, Amendment to PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, and Amendment to PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures on Interest Rate Reference Reforms. Complete information regarding this matter can be seen at the link http://bit.ly/IBOR-REFORM-Tahap-1.
   b. Phase 2 (replacement issues). Interest Rate Reference Reform - Phase 2 addresses issues that may affect financial reporting during the benchmark interest rate reform, including the effects of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the benchmark interest rate with a new alternative reference. This amendment amends the requirements in PSAK 71: Financial Instruments, PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62: Insurance Contracts and PSAK 73: Leases related to:
      1) changes in the basis for determining the contractual cash flows from financial assets, financial liabilities and lease liabilities;

2) akuntansi lindung nilai; dan
3) pengungkapan.
Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai

3. Penyesuaian PSAK 110: Akuntansi Sukuk
Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Sedangkan investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebesar nilai wajar.

2) hedge accounting; and
3) disclosure.
The Reform of Benchmark Interest Rate - Phase 2 applies only to changes required by the benchmark interest rate reforms for financial instruments and hedging relationships.

3. Improvements to PSAK 110: Sukuk Accounting
An entity recognizes an investment in sukuk ijarah and sukuk mudharabah which is measured at cost and at fair value through other comprehensive income at fair value plus or minus the transaction costs associated with the acquisition of the investment. Meanwhile, investments in sukuk ijarah and sukuk mudharabah which are measured at fair value through profit or loss are recognized at fair value.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA

OTHER MATERIAL INFORMATION

Analisis Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Analysis of Debt Servicing Ability and Receivables Collectability

Kemampuan Membayar Utang

Bank senantiasa menjaga kemampuannya agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang melalui berbagai upaya dan strategi yang telah disusun, salah satunya dengan menjaga fundamental keuangan agar tetap dalam kondisi solid. Kemampuan tersebut diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas.

- **Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)**
Perseroan berupaya memastikan bahwa setiap kebutuhan likuiditas dan pendanaan saat ini dan masa yang akan datang dapat terpenuhi, baik dalam kondisi pasar normal maupun krisis. Perseroan mengelola risiko likuiditas secara hati-hati (*prudent*) dengan memastikan kecukupan dana secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) telah disusun untuk persiapan mitigasi jika terjadi krisis.

Manajemen senantiasa melakukan pemantauan terhadap parameter risiko likuiditas di antaranya *maturity gap* pada posisi likuiditas, analisi berkala *behavioral liquidity*, *stress testing*, *buffer liquidity* dan mengimplementasikan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dari OJK. Pada akhir tahun 2020, likuiditas Bank masih terjaga sangat baik dengan rata-rata LCR triwulan IV-2020 sebesar 275,46% sementara rasio aset likuid terhadap liabilitas lancar tercatat 38,61%, lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2019 yang sebesar 20,34%.

Debt Servicing Ability

The Bank continues to maintain its ability to meet short-term and long-term obligations through various efforts and strategies that have been formulated, one of which is by keeping financial fundamentals in solid condition. This capability is measured through several ratios, including liquidity ratios, profitability ratios and solvency ratios.

- **Short-Term Debt Servicing Ability (Liquidity)**
The Bank strives to ensure that any current and future liquidity and funding needs can be met, both in normal and crisis market conditions. The Bank manages liquidity risk prudently by ensuring sufficient funds in a timely manner from various available sources of funds, including ensuring the availability of high quality liquid assets. A contingency funding plan has also been prepared to prepare for mitigation in the event of a crisis.

The Bank's management constantly monitors liquidity risk parameters, including maturity gaps in the liquidity position, periodic behavioral liquidity analysis, stress testing, buffer liquidity and implements OJK's Liquidity Coverage Ratio (LCR) calculation. At the end of 2020, the Bank's liquidity was still very well maintained with an average LCR for the fourth quarter of 2020 of 275.46% while the ratio of liquid assets to current liabilities was recorded at 38.61%, higher than the position at the end of 2019 which was 20.34%.

- **Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)**
  Perseroan mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan. Permodalan terjaga pada level yang optimal. Posisi Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/ KPMM (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) Individual tercatat sebesar 24,07% pada akhir tahun 2019 dan meningkat menjadi 29,55% pada akhir tahun 2020. Rasio tersebut secara Konsolidasian juga meningkat dari 23,41% menjadi 29,58%. Sebagai perbandingan, data OJK pada akhir tahun 2020 menunjukkan KPMM bank umum berada pada pada level 23,89%. KPMM perseroan juga lebih tinggi dari prasyarat hingga 18,5% untuk bank yang masuk kategori sistemik (*Domestically Systemic Important Bank*/DSIB).

  Dengan tingkat permodalan tersebut, Perseroan memiliki kapabilitas untuk memitigasi risiko pasar, risiko kredit, maupun risiko operasional. Hal ini berarti bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

- **Rentabilitas**
  Dalam kondisi bisnis secara umum yang kurang kondusif seiring pelemahan ekonomi terkait pandemi COVID-19, Perseroan berupaya upaya memperbaiki struktur biaya dana yang tercermin dalam Marjin Bunga Bersih (*Net Interest Margin*/NIM). Pandemi telah menekan NIM dari 4,63% pada akhir 2019 menjadi 4,46% pada akhir 2020 secara Individual serta dari 4,83% menjadi 4,62% untuk Konsolidasian. Hal itu berimbas pada Laba terhadap Aset (*Return on Asset*/ROA) dan Laba terhadap Ekuitas (*Return on Equity*) tahun 2020 yang masing-masing sebesar 2,08% dan 8,47% untuk Individual serta 1,91% dan 7,66% untuk Konsolidasian. Sebagai perbandingan, kedua rasio tersebut pada tahun sebelumnya tercatat masing-masing 2,09% dan 9,15% untuk Individual serta 2,08% dan 8,90% untuk Konsolidasian. Perseroan berhasil memperbaiki efisiensi sebagaimana tercermin dari Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Individual yang turun dari 77,04% menjadi 76,50% namun secara Konsolidasian meningkat dari 77,96% menjadi 79,54%.

- **Long-Term Debt Servicing Ability (Solvency)**
  The Bank measures solvency through the capital ratio. Capital is maintained at an optimal level. The position of the Capital Adequacy Ratio (CAR) – bank only, was recorded at 24.07% at the end of 2019 and increased to 29.55% at the end of 2020. On a consolidated basis, this ratio also increased from 23.41% to 29.58%. As a comparison, OJK data at the end of 2020 shows that average CAR for commercial banks is at the level of 23.89%. The Bank's CAR is also higher than the prerequisite, up to 18.5% for banks that are included in the systemic category (Domestically Systemic Important Bank/DSIB).

  With this level of capital adequacy, the Bank has the capability to mitigate market risk, credit risk and operational risk. This means that the Bank has managed well the Bank's capital and has sufficient capital to protect it from solvency risk.

- **Profitability**
  In the generally unconducive business conditions in line with the economic downturn due to the COVID-19 pandemic, the Bank strives to improve the cost structure of funds which is reflected in the Net Interest Margin (NIM). The pandemic has pushed the NIM value from 4.63% in 2019 to 4.46% at the end of 2020 for Bank-only, and from 4.83% to 4.62% in a consolidated basis. This had an impact on Return on Assets (ROA) and Return on Equity (Return on Equity) in 2020, which amounted to 2.08% and 8.47% for Bank-only and 1.91% and 7.66%, respectively, on a consolidated basis. In comparison, the two ratios in the previous year were recorded at 2.09% and 9.15% for Bank-only and 2.08% and 8.90% for consolidated, respectively. The Company succeeded in improving efficiency as reflected in the ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO) for Bank-only, which fell from 77.04% to 76.50%, while on a consolidated basis it increased from 77.96% to 79.54%.

Kolektabilitas Kredit

Resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap peningkatan profil risiko kredit. Sadar akan hal tersebut, maka Bank memperkuat kualitas kebijakan penyaluran kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) terjaga pada level di bawah 5% sesuai ketentuan regulator dengan *Risk Appetite* pada kisaran 3%. NPL *Gross* tahun 2020 tercatat sebesar 2,93% untuk Individual dan 3,01% untuk Konsolidasian. Angka tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,02% baik untuk Individual dan Konsolidasian.

Loan Collectibility

The economic recession due to the COVID-19 pandemic has an impact on increasing the credit risk profile. Realizing this, the Bank has strengthened the quality of its lending policy. The ratio of non-performing loans (NPL) is maintained at a level below 5% in accordance with the regulatory provisions with a Risk Appetite in the range of 3%. Gross NPL in 2020 was recorded at 2.93% for Bank-only and 3.01% for Consolidated. This figure is better than the previous year which amounted to 3.02% for both Bank-only and Consolidated.

Bank mengimplementasikan berbagai model yang dibangun sesuai dengan standar regulasi Indonesia maupun *best practice* internasional. Bank mengembangkan model secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Implementasi tersebut mencakup model *rating* seperti *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) dan model skoring. Selain itu, Bank juga secara berkala melakukan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model tersebut.

The Bank implements various models built in accordance with Indonesian regulatory standards as well as international best practices. The Bank develops models independently or in collaboration with third parties. The implementation includes rating models such as Internal Credit Risk Rating (ICRR) and scoring models. In addition, the Bank also periodically makes necessary efforts to refine this model.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas portofolio kredit maupun eksposur risiko kredit lain yang bermasalah. Upaya yang dilakukan Bank akan hal ini yakni dengan melakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Proses pengelolaan kredit bermasalah telah diatur secara tersendiri dalam kebijakan yang bersifat khusus, termasuk pembentukan unit kerja khusus yang menanganinya.

More specific credit risk management is also carried out for non-performing loan portfolios and other credit risk exposures. Efforts made by the Bank in this regard include restructuring non-performing credit facilities, establishing provisions to cover potential losses, and implementing write-offs. The non-performing loan management process has been regulated separately in a specific policy, including the formation of a special work unit to handle it.

Kolektabilitas Kredit

Credit Collectibility

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Lancar	112.417	129.880	131.558	-13,45%	-1,28%	Current
Dalam perhatian khusus	5.583	6.489	5.339	-13,96%	21,54%	Special mention
Kurang lancar	701	252	299	178,17%	-15,72%	Substandard
Diragukan	271	724	400	-62,57%	81,00%	Doubtful
Macet	2.661	3.338	3.637	-20,28%	-8,22%	Loss
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.523)	(3.958)	(3.847)	39,54%	2,89%	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih	**116.110**	**136.725**	**137.386**	**-15,08%**	**-0,48%**	**Total Loans - Net**

Perjanjian-Perjanjian Signifikan

PaninBank telah mengadakan perjanjian/perikatan yang penting terkait aktivitas usaha. Beberapa perjanjian/perikatan tersebut dilakukan sebelum tahun 2020 namun masih berlaku ataupun sudah diperbaharui. Berikut adalah beberapa perjanjian/perikatan tersebut:

1. Bank mengadakan Perjanjian Induk *Bancassurance* dengan PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) berdasarkan Perjanjian Kerja sama tanggal 27 Juni 2016 mengenai persetujuan Bank untuk mempromosikan, memperkenalkan dan menjelaskan produk-produk AMAG kepada para nasabah Bank di Indonesia. Perjanjian ini akan tetap berlaku selamanya. Pada tanggal 30 Desember 2020, Bank mengadakan perubahan atas perjanjian kerja sama *Bancassurance*, dimana pembayaran atas komisi dilakukan setiap tahun dengan jangka waktu perjanjian 20 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 2020.

Significant Commitments

PaninBank has entered into a number of important agreements/commitments related to business activities. Some of these agreements/commitments were made before 2020 but are still valid or have been renewed. The following are some of the agreements/commitments:

1. The Bank entered into Master Bancassurance Agreement with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) based on joint agreement dated June 27, 2016 regarding the Bank consent to promote, introduce and explain AMAG's products to Bank's customers in Indonesia. This agreement shall remain effective in perpetuity. On December 30, 2020, the Bank has amended the Bancassurance agreement, whereby the payment of commissions will be effected annually for an agreed period of 20 years, starting from July 1, 2020.

2. Bank mengadakan perjanjian kerja sama pemasaran produk Bancassurance Panin Dana Pasti dengan PT Panin Life pada tanggal 22 Juni 2011. Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen pemasaran dengan memperoleh kompensasi berupa komisi, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pada tanggal 20 Mei 2013, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerja sama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah mekanisme penarikan nilai tunai Produk Asuransi Panin Dana Pasti. Pada tanggal 4 November 2013, PT Panin Life berubah nama menjadi PT Panin Dai-ichi Life. Pada tanggal 26 September 2016, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerja sama, dimana kedua pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan perubahan komisi yang diterima Bank menjadi sebesar 0,33%. Produk Bancassurance yang dimaksud dalam perjanjian adalah produk-produk asuransi jiwa dengan dilengkapi manfaat pasti yang diterbitkan oleh PT Panin Dai-Ichi Life, yang terdiri atas Produk Panin Dana Pasti, Produk Panin Flexilinked dan Produk Panin Lifevestlink.
3. Bank mengadakan perjanjian kerja sama pemasaran produk Bancassurance Panin Premier Protection dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerja sama tanggal 23 Juli 2013. Pada tanggal 18 Mei 2020 Bank mengadakan perubahan ketiga belas atas Perjanjian Produk *Bancassurance*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah spesifikasi produk Panin Premier Protection.
4. Bank mengadakan perjanjian kerja sama pemasaran Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 7 dengan PT Insight Investments Management pada 5 Oktober 2016. Dalam perjanjian tersebut, Bank bertindak sebagai agen penjual dengan memperoleh kompensasi berupa imbal jasa.
5. Bank mengadakan perjanjian kerja sama penjualan efek Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 132 dengan PT Bahana TCW Investment Management pada 28 Oktober 2014. Kerja sama tersebut tercatat telah diubah dua kali, yaitu pada 3 Oktober 2016 dan 9 Februari 2017.
6. Bank mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Panin Asset Management berdasarkan Perjanjian Kerja sama tanggal 15 September 2014 dalam memasarkan Reksa Panin Dana Utama Plus II, Reksa Dana Panin Dana Prioritas, Reksa Dana Panin Dana Unggulan dan Reksa Dana Panin Dana Prima. Pada tanggal 13 September 2019, Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Kerja sama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah definisi dan pengertian, kewajiban dan tanggung jawab Agen Penjual dan jangka waktu perjanjian.

2. The Bank entered into an agreement for the joint marketing of Bancassurance product Panin Dana Pasti with PT Panin Life on June 22, 2011. Based on the agreement, the Bank act as marketing agent and obtains compensation such as commission, for a period of 5 years and can be renewed. On May 20, 2013, the Bank amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to change the mechanism of the withdrawal of cash value of Panin Dana Pasti insurance product. On November 4, 2013, PT Panin Life changed its name into PT Panin Dai-ichi Life. On September 26, 2016, the Bank has amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to extend the period of the agreement up to June 21, 2021 and the changes of the commission rate earned by the Bank to 0.33%. The bancassurance product stated in the joint agreement refer to life insurance products with guaranteed benefit published by PT Panin Dai-Ichi Life, consisting of Panin Dana Pasti, Panin Flexilinked, and Panin Lifevestlink products.
3. The Bank entered into an agreement with PT Panin Dai-ichi Life based on Agreement Letter dated July 23, 2013, for the joint marketing of Panin Premier Protection bancassurance product. On May 18, 2020, the Bank has its thirteenth amendment of the bancassurance agreement, whereby both parties agree to change the product specification of Panin Premier Protection.
4. The Bank entered into a joint agreement with PT Insight Investments Management based on Agreement Letter No. 292/IIM/BOD/X/2016 dated October 5, 2016, concerning the Insight Terproteksi 7 protected mutual fund product. Based on the agreement, the Bank act as sales agent to obtain compensation in the form of fees.
5. The Bank entered into an agreement for the sale of Bahana Core Protected Fund 132 protected mutual fund product with PT Bahana TCW Investment Management on October 28, 2014. The agreement had been amended twice, on October 3, 2016 and on February 9, 2017.
6. The Bank entered into a joint agreement with PT Panin Asset Management based on the agreement dated September 15, 2014, for the marketing of Reksa Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Unggulan, and Panin Dana Prima mutual fund products. On September 13, 2019, the Bank has made the third amendment of the agreement, whereby both parties agreed to change the definition and meaning, liabilities and responsibility of Selling Agent and the tenor of the agreement.

7. Bank mengadakan perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI) sebagai pihak berelasi. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Bank akan membeli piutang-piutang yang dimiliki CFI terhadap pihak-pihak ketiga yang telah membeli mobil baik baru maupun bekas yang dibiayai oleh CFI. Tujuan dari kerja sama/fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan pihak ketiga (konsumen) secara porsi pembiayaan bersama adalah CFI sebesar 10% dari nilai pembiayaan bersama dan Bank sebesar 90% dari nilai pembiayaan bersama.

7. The Bank entered into a financing distribution cooperation agreement with PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI) as a related party. In the agreement, it is stated that the Bank will buy receivables owned by CFI from third parties who have purchased cars, both new and used, which are financed by CFI. The purpose of this cooperation/ financing facility is to finance the purchase of a third party (consumer) vehicle in a joint financing portion, namely CFI at 10% of the value of joint financing and the Bank at 90% of the value of joint financing.

Dasar dan Kebijakan Struktur Modal

PaninBank telah menyusun rencana permodalan dengan memperhatikan rencana pengembangan bisnis, profil risiko, ketentuan otoritas, dan kondisi lingkungan eksternal termasuk pasar modal. Kebijakan manajemen terkait permodalan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki modal yang kuat dan menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan pada masa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator, serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Basis of Capital Structure Policy

PaninBank has prepared a capital plan taking into account the business development plan, risk profile, regulatory provisions, and external environmental conditions including the capital market. The management policy related to capital is aimed at ensuring that the Bank has strong capital and creates a strong capital structure to support the current business expansion strategy and maintain the continuity of future development. In addition, the capital policy is set to comply with the capital adequacy requirement set by the regulator, as well as to ensure that the Bank's capital structure is always efficient.

Struktur Permodalan Tahun 2020

2020 Capital Structure

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
Modal Inti	44.246	39.203	35.810	12,86%	9,48%	Core Capital
Modal Disetor	2.408	2.409	2.409	-0,04%	0,00%	Paid-Up Capital
Cadangan Tambahan Modal	41.715	36.832	33.527	13,26%	9,86%	Additional Capital Reserve
Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	935	780	768	19,87%	1,56%	Non-Controlling Interest
Penyertaan	(642)	(675)	(503)	-4,89%	34,19%	Inclusion
Aset Pajak Tangguhan	(90)	(66)	(306)	36,36%	-78,43%	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Berwujud	(80)	(78)	(86)	2,56%	-9,30%	Intangible Assets
Modal Pelengkap	4.165	4.901	5.679	-15,02%	-13,70%	Complementary Capital
Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya	2.804	3.412	4.192	-17,82%	-18,61%	Instruments of Capital in Shares or Others
Agio/Disagio	-	-	-	-	-	Agio/Disagio
Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk	1.362	1.489	1.497	-8,53%	-0,53%	PPA General Reserves of Productive Assets
Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	(10)	-	-	Compensatory Capital Factor
Jumlah Modal	48.411	44.105	41.489	9,76%	6,31%	Total Capital
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko:						Weighted Asset On Risk

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	2020	2019	2018	Pertumbuhan Growth		Description
				2019-2020	2018-2019	
ATMR Risiko Kredit	141.942	165.644	157.090	-14,31%	5,45%	ATMR Credit Risk
ATMR Risiko Pasar	1.143	2.489	1.255	-54,08%	98,33%	ATMR Market Risk
ATMR Risiko Operasional	20.560	20.290	19.511	1,33%	3,99%	ATMR Operating Risk
Jumlah ATMR	163.645	188.423	177.857	-13,15%	5,94%	Total ATMR
Rasio Permodalan:						**Capital Ratio**
Rasio Modal Inti Utama 1 (%)	27,04%	20,81%	20,13%			Common Equity Tier 1 (CET 1) Ratio
Rasio *Tier* 1 (%)	27,04%	20,81%	20,13%			Tier 1 (%) Ratio
Rasio *Tier* 2 (%)	2,55%	2,60%	3,19%			Tier 2 (%) Ratio
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29,58%	23,41%	23,33%			Capital Adequacy Ratio (CAR)

Ikatan Material terkait Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal yang dilakukan. Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), PT Asuransi Central Asia dan China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd, seluruhnya merupakan pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp6.548 miliar dan SGD 280.000 pada 31 Desember 2020 dan Rp6.385 miliar dan SGD 280.000 pada 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Material Commitments in Capital Goods Investment

The Bank has no material commitments related to investment in capital goods. Fixed assets except land have been insured against fire, theft and other risks to PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), PT Asuransi Central Asia and China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd, all being third party, with a total coverage of Rp6,548 billion and SGD280,000 as of December 31, 2020 and Rp6,385 billion and SGD280,000 as of December 31, 2019. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on assets insured.

Realisasi Investasi Barang Modal

Bank telah melakukan investasi barang modal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional. Nilai wajar aset tetap yang digunakan dengan tujuan investasi barang modal tercatat sebesar Rp10.326 miliar pada tahun 2020, naik 0,13% dari nilai tahun sebelumnya. Nilai aset berupa Tanah naik 1,30% menjadi Rp6.103 miliar sementara Bangunan serta Kendaraan Bermotor dan Inventaris Kantor terdepresiasi masing-masing 3,29% dan 15,24% sehingga dibukukan sebesar Rp3.379 miliar dan Rp909 miliar. Pada tahun 2020 terdapat pengelompokan aset baru, yaitu Aset Tetap yang Akan Digunakan senilai Rp111 miliar dan Aset Hak Guna senilai Rp74 miliar.

Realization of Capital Goods Investment

The Bank has invested in capital goods with the aim of meeting the needs of operational activities. The fair value of fixed assets as investment in capital goods was recorded at Rp10,326 billion in 2020, an increase of 0.13% from the previous year's value. Asset value in the form of land increased 1.30% to Rp6,103 billion while Buildings and Motor Vehicles and Office Inventory depreciated by 3.29% and 15.24%, respectively, so that it was recorded at Rp3,379 billion and Rp909 billion. In 2020 there are new asset grouping, namely Unused Premises and Equipment worth Rp111 billion and Right-of-Use Assets worth Rp74 billion.

Nilai Wajar Aset Tetap untuk Investasi Barang Modal

Fair Value of Fixed Assets for Investment of Capital Goods

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	Tujuan Investasi Investment Purpose	2020	2019	Pertumbuhan Growth	Description
Tanah	Penunjang kegiatan operasional Supporting operational activities	6.103	6.025	1,30%	Land
Bangunan	Penunjang kegiatan operasional Supporting operational activities	3.268	3.379	-3,29%	Building
Kendaraan Bermotor dan Inventaris Kantor	Penunjang kegiatan operasional Supporting operational activities	770	909	-15,24%	Vehicle and Office Equipment
Aset tetap yang akan digunakan	Penunjang kegiatan operasional Supporting operational activities	111	-	-	Unused premises and equipments
Aset hak guna	Penunjang kegiatan operasional Supporting operational activities	74	-	-	Right of use of assets
Jumlah Belanja Barang Modal		**10.326**	**10.313**	**0,13%**	**Total Capital Expenditure**

Transaksi-Transaksi Penting Lainnya dalam Jumlah yang Signifikan

Tidak terdapat transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan yang dilakukan oleh PaninBank sepanjang tahun 2020.

Other Material Transactions involving Significant Amounts

There are no other material transactions involving significant amounts conducted by PaninBank in 2020.

Perubahan-Perubahan Penting yang Terjadi di Bank dan Kelompok Usaha Bank dalam Tahun yang Bersangkutan

Tidak terdapat perubahan-perubahan penting yang terjadi pada PaninBank dan kelompok usahanya sampai dengan periode 31 Desember 2020 yang berpengaruh terhadap posisi keuangan PaninBank.

Significant Changes at the Bank and in the Business Group during the Year Under Review

There are no significant changes occurring at PaninBank and in its business group in the period ending December 31, 2020 with an impact on the Bank's financial position.

Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat informasi keuangan yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi sepanjang tahun 2020.

Financial Information Reported of an Extraordinary or One-Off Event

There are no financial information of an extraordinary or one-off event in 2020.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi material yang dilakukan oleh PaninBank yang dapat diklasifikasikan benturan kepentingan, sebagaimana diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-412/BL/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam kegiatan usaha normal, PaninBank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Pihak Terkait), yang dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui oleh pihak-pihak tersebut. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, berupa penempatan dana oleh pihak berelasi dan pemberian kredit.

Information on Material Transactions with Conflict of Interest and/or Transactions with Related/Affiliated Parties

During 2020, there were no material transactions carried out by PaninBank that could be classified as a conflict of interest, as regulated in the Capital Market Supervisory Agency Regulation Number: Kep-412/BL/2009 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest on Certain Transactions.

In normal business activities, PaninBank conducts transactions with related parties, which are carried out at a price level and terms as agreed by the parties. Transactions with related parties are transactions that constitute the main business activity of the Company, in the form of placement of funds by related parties and provision of credit.

- Tujuan Transaksi Dengan Pihak Berelasi
  Transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan terutama untuk kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, dan jasa-jasa lainnya dan dilakukan dalam kegiatan normal bisnis masing-masing.

- Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
  Rincian saldo dengan pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan diungkapkan dalam Catatan No. 46 dari Laporan Keuangan yang diaudit per 31 Desember 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Informasi Transaksi Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi

Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi pada tahun 2020 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi, dan sumber dana kegiatan tersebut tidak disajikan.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

PaninBank telah menjual kepemilikan saham di Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) sejumlah 1.020.500.000 saham atau setara dengan 2,63% pada Februari dan Maret 2021. Hal itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan minimal 7,5% kepemilikan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1 Peraturan Bursa Nomor I-A. Sebelumnya, kepemilikan PaninBank tercatat 69,93% dan kepemilikan publik 4,97% setelah HMETD pada tahun 2020. Dengan adanya penjualan tersebut, kepemilikan masyarakat terhadap PDSB menjadi 7,6%.

Selain penjualan kepemilikan, informasi dan fakta material lainnya adalah proses penyidikan KPK terkait dugaan suap pajak PaninBank. Manajemen menghormati proses hukum dan prosedur kerja yang sedang dijalankan oleh KPK serta menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bank bersikap kooperatif serta memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada penyidik KPK untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan. Terkait proses pemeriksaan pajak tahun 2016 yang dipersoalkan, Bank menyatakan telah mengikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku serta telah didampingi oleh lembaga konsultan pajak yang kompeten dan kredibel. Bank sebagai perusahaan terbuka memastikan telah menjalankan praktik perbankan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* yang benar.

- Purpose of Transactions with Related Parties
  Transactions with related parties are conducted primarily for the interests and continuity of the Company's business in raising funds, providing credit and other services and are carried out in the normal course of their respective business.

- Value of Transactions with Related Parties
  Details of balances of transactions with related parties of the Company are disclosed in Note No. 46 of the audited Financial Statements as of December 31, 2020 which form part of this Annual Report.

Information on Transactions Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring

The Bank did not carry out any investment, expansion, divestment, acquisition and restructuring activities in 2020, so information regarding the purpose, transaction value and source of funds for these activities is not presented.

Material Facts and Information Subsequent to the Date of Accountant Report

PaninBank has sold its share ownership in Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) amounting to 1,020,500,000 shares or the equivalent of 2.63% in February and March 2021. This was done to meet the minimum requirement of 7.5% public ownership as stipulated in provision V.1 Exchange Rule Number I-A. Previously, PaninBank's ownership was recorded at 69.93% and public ownership of 4.97% after the Pre-emptive Rights in 2020. With this sale, the public's ownership of PDSB became 7.6%.

Apart from the sale of ownership, information and other material facts are the KPK investigation process regarding the alleged PaninBank tax bribery. Management respects the legal process and work procedures that are being carried out by the KPK and confirms that it will comply and comply as long as the tax findings are in accordance with applicable tax regulations. The Bank is cooperative and provide the widest possible opportunity and access for KPK investigators to carry out their duties according to the provisions. Regarding the 2016 tax audit process in question, the Bank stated that it had followed all applicable mechanisms and procedures and had been accompanied by a competent and credible tax consulting agency. The Bank as a public company ensures that it has carried out banking practices in accordance with the correct principles of Good Corporate Governance.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020 SERTA PROYEKSI TAHUN 2021

Perbandingan antara Target & Realisasi Tahun 2020

Aktivitas perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda pergerakan yang cukup variatif. Meski masih dalam teritori negatif, perekonomian mulai *rebound* dan menuju tren pemulihan pada triwulan III-2020. Namun, pergerakan tersebut belum diikuti dengan perbaikan kinerja kredit perbankan. Permintaan kredit masih menunggu kepastian pengendalian pandemi COVID-19. Selain itu, perbankan juga fokus pada proses restrukturisasi lanjutan dari debitur yang terdampak, sejalan dengan perpanjangan kebijakan relaksasi OJK.

Dalam kondisi tersebut, secara umum, realisasi kinerja PaninBank sepanjang tahun 2020 belum sesuai ekspektasi, terutama dari sisi pertumbuhan. Bank lebih fokus pada upaya menjaga daya tahan bisnis debitur sehingga kinerja fungsi intermediasi bisa lebih berkelanjutan. Meski begitu, fondasi keuangan cukup solid sebagaimana tercermin dari parameter rasio-rasio keuangan.

2020 TARGETS AND REALIZATION AND PROJECTIONS FOR 2021

Comparison of Targets and Realization in 2020

National economic activity shows quite varied signs of movement. Although still in negative territory, the economy started to rebound and headed for a recovery trend in Q3/2020. However, this movement has not been followed by an improvement in bank credit performance. The request for credit is still waiting for certainty to control the COVID-19 pandemic. In addition, banks also focus on the continued restructuring process of affected debtors, in line with the extension of the OJK relaxation policy.

Under these conditions, in general, the realization of PaninBank's performance throughout 2020 has not met expectations, especially in terms of credit growth. Banks are more focused on efforts to maintain the resilience of the debtor's business so that the performance of the intermediation function can be more sustainable. Even so, the financial foundation is quite solid as reflected in the parameters of financial ratios.

Perbandingan antara Target & Realisasi PaninBank (Individual) Tahun 2020

Comparison between PaninBank's Target & Realization (Individual) in 2020

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Description
Aset	212.586	201.320	94,70%	Asset
Kredit	133.802	113.588	84,89%	Loan
Dana Pihak Ketiga	143.139	136.417	95,30%	Third-Party Fund
Surat Berharga Yang Diterbitkan	14.211	9.611	67,63%	Securities Issued
Ekuitas	40.199	42.645	106,08%	Equity
Pendapatan Bunga Bersih	7.751	7.725	99,66%	Interest Income - Net
Pendapatan (Beban) Operasional Lain	(5.153)	(3.730)	72,39%	Other Operating Income (Expense)
Pendapatan (Beban) Non Operasional	57	7	12,85%	Non-Operating Income (Expense)
Laba Sebelum Pajak	2.656	4.002	150,70%	Net Profit Before Tax
Laba Bersih	2.102	3.075	146,27%	Net Profit After Tax
Rasio Keuangan:				**Financial Ratios:**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	24,89%	29,55%		Capital Adequacy Ratio
Laba terhadap Aset	1,36%	2,08%		Return On Asset
Laba terhadap Ekuitas	5,84%	8,47%		Return On Equity
Marjin Bunga Bersih	4,39%	4,46%		Net Interest Margin
Kredit Bermasalah - Bruto	3,86%	2,93%		Non-Performing Loan - Gross
Kredit terhadap Simpanan Nasabah	93,47%	83,26%		Loan to Deposit Ratio

Proyeksi Kinerja Tahun 2021

Prospek ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan membaik. Sektor-sektor yang terdampak telah menunjukkan indikasi pemulihan. Meski begitu, skala gangguan menunjukkan bahwa tanpa terselenggaranya kegiatan vaksinasi dan terapi pengendalian virus yang efektif, sektor-sektor tersebut akan cukup sulit untuk segera kembali ke keadaan normal. Prospek pemulihan ekonomi kedepan diproyeksikan tidak akan secepat yang diharapkan. Oleh sebab itu, Bank mengantisipasi dan memperhitungan potensi efek ikutan dari pemulihan tersebut terhadap peningkatan kredit bermasalah.

PaninBank optimis akan mampu menjaga kinerja bisnis tetap positif pada tahun 2021 mendatang. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh 3,5%-5,5% sementara penghimpunan DPK tumbuh 8%-10%. Bank terus berupaya menjaga permodalan pada posisi solid agar senantiasa kompetitif sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis ketika krisis. CAR PaninBank diproyeksikan terjaga dikisaran 30%.

Hal lain yang akan dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha kedepan, Bank akan mulai mengimplementasi *Digital Banking* Fase I pada tahun ini. Implementasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mendorong perluasan basis nasabah serta berkontribusi pada perbaikan CASA. Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas di pasar serta proses transformasi *digital banking* tersebut, CASA diproyeksikan bisa mencapai sekitar 46%.

Performance Projections for 2021

The economic prospects for 2021 are expected to improve. The affected sectors have shown indications of recovery. Even so, the scale of the disruption shows that without effective vaccination and viral control therapy activities in place, it will be difficult for these sectors to return to normal soon. The outlook for future economic recovery is not projected to be as fast as expected. Therefore, the Bank anticipates and calculates the potential side effects of the recovery on an increase in non-performing loans.

PaninBank is optimistic that it will be able to maintain positive business performance in 2021. Lending is projected to grow 3.5%-5.5%, while third party deposits will grow by 8%-10%. The Bank continues to strive to maintain a solid capital position so that it is always competitive while at the same time maintaining business continuity during a crisis. PaninBank's CAR is projected to be maintained at around 30%.

Also in order to maintain business continuity going forward, the Bank will start implementing Phase I Digital Banking this year. This implementation is expected to improve service quality, encourage customer base expansion and contribute to improved CASA. Taking into account liquidity conditions in the market and the digital banking transformation process, CASA is projected to reach around 46%.

Proyeksi Kinerja PaninBank (Individual) Tahun 2021
Projected Performance of PaninBank (Individual) in 2021

(Rp miliar kecuali dinyatakan lain) (Rp billion unless stated otherwise)

Keterangan	Realisasi 2020 2020 Realization	Proyeksi 2021 2021 Projection	Perubahan Growth	Description
Aset	201.320	214.190	6,39%	Asset
Kredit	113.588	119.594	5,29%	Loan
Dana Pihak Ketiga	136.417	146.710	7,55%	Third-Party Fund
Surat Berharga yang Diterbitkan	9.611	9.998	4,03%	Securities Issued
Ekuitas	42.645	43.528	2,07%	Equity
Pendapatan Bunga Bersih	7.725	8.586	11,15%	Interest Income - Net
Pendapatan (Beban) Operasional Lain	(3.730)	(4.413)	18,31%	Other Operating Income (Expense)
Pendapatan (Beban) Non Operasional	7	17	142,86%	Non-Operating Income (Expense)
Laba Sebelum Pajak	4.002	4.190	4,70%	Net Profit Before Tax
Laba Bersih	3.075	3.280	6,67%	Net Profit After Tax
Rasio Keuangan:				Financial Ratios:
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	29,55%	29,15%		Capital Adequacy Ratio
Laba terhadap Aset	2,08%	2,03%		Return On Asset
Laba terhadap Ekuitas	8,47%	8,87%		Return On Equity
Marjin Bunga Bersih	4,46%	4,61%		Net Interest Margin
Kredit Bermasalah - Bruto	2,93%	3,49%		Non-Performing Loan - Gross
Kredit terhadap Simpanan Nasabah	83,26%	81,51%		Loan to Deposit Ratio

Prospek Usaha Perusahaan

Persaingan dalam industri keuangan nasional terlihat semakin ketat dengan hadirnya berbagai perusahaan teknologi finansial/tekfin (*financial technology/fintech*) rintisan. Kemunculan tekfin dan perkembangan inovasi digital yang masif telah mendisrupsi bisnis perbankan tradisional. Data perusahaan tekfin *peer-to-peer lending* (P2P lending) OJK per Desember 2020 menunjukkan ada sebanyak 112 perusahaan yang terdaftar dan 37 perusahaan di OJK. Stabilitas industri keuangan terganggu dengan beroperasinya praktik-praktik *shadow banking* dari perusahaan tekfin rintisan tersebut, terutama dari yang ilegal. Sedikitnya 126 fintech P2P lending ilegal telah ditutup OJK sepanjang tahun 2020. Penguatan regulasi juga dilakukan OJK, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan P2P lending.

Meski menambah persaingan, keberadaan perusahaan tekfin juga turut mengakselerasi inklusi dan literasi keuangan. Survei OJK tahun 2019 menunjukkan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%, naik dari posisi 67,82 pada tahun 2016. Tingkat literasi mengalami kenaikan meskipun masih berada pada level yang rendah. Survei yang sama juga menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03%, naik dari 29,66% pada tahun 2016. Dari survei tersebut terlihat bahwa masih ada sekitar 65 juta jiwa penduduk Indonesia yang belum terlayani oleh sektor jasa keuangan.

Basis pasar industri keuangan dan perbankan di Indonesia masih cukup melimpah. Total populasinya saat ini sekitar 272 juta jiwa dan diperkirakan akan mencapai 321 juta jiwa pada tahun 2.045 dimana sekitar 65,11% adalah usia produktif. Bonus demografi tersebut berdampak positif bagi perekonomian. Penelitian Bappenas menunjukkan bonus demografi dapat berkontribusi sebesar 0,22% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Rasio kredit perbankan terhadap total produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru sekitar 35%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara G20 yang telah mencapai 88,02% atau dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah melampaui 100%. Lebih dari itu, suku bunga riil, yakni suku bunga kredit bank dikurangi inflasi masih sekitar 8,62% dengan rata-rata marjin bunga bersih (*net interest margin*/NIM) di atas 4%, lebih tinggi dari perbankan regional.

Business Prospects

Competition in the national financial industry seems to be getting tighter with the presence of various start-up financial technology/fintech companies. The emergence of fintech and the development of massive digital innovation has disrupted the traditional banking business. Data from OJK peer-to-peer lending (P2P lending) fintech companies as of December 2020 shows that there are 112 companies registered and 37 companies in the OJK. The stability of the financial industry was disrupted by the operation of the shadow banking practices of these start-up fintech companies, especially those that were illegal. At least 126 illegal P2P lending fintechs have been closed by OJK throughout 2020. OJK has also strengthened regulations, especially those related to the protection of personal data from P2P lending abuse.

Despite increasing competition, the presence of fintech companies also accelerates financial inclusion and literacy. A survey in 2019 by OJK showed the financial inclusion index reached 76.19%, up from the position of 67.82% in 2016. The level of literacy has increased even though it is still at a low level. The same survey also showed a financial literacy index of 38.03%, up from 29.66% in 2016. The survey shows that there are still around 65 million Indonesians who have not been served by the financial services sector.

The market base for the financial and banking industry in Indonesia is still quite abundant. The total population is currently around 272 million people and is expected to reach 321 million people in 2,045 where around 65.11% are of productive age. This demographic bonus has a positive impact on the economy. Research by Bappenas shows that the demographic bonus can contribute 0.22% to national economic growth.

The ratio of bank credit to total gross domestic product (GDP) of Indonesia is only around 35%, much lower than the average for the G20 countries which has reached 88.02% or with Malaysia, Singapore and Thailand which have already exceeded 100%. Moreover, the real interest rate, namely the bank credit interest rate minus inflation, is still around 8.62% with an average net interest margin (NIM) of above 4%, higher than regional banking.

Dalam jangka pendek, terutama pada tahun 2021 ini, tingkat profitabilitas bank masih tertekan sejalan pandemi COVID-19 yang diperkirakan belum akan berakhir. Profil risiko bank masih cukup tinggi, terutama risiko kredit. Meski sudah dalam trek pemulihan, laju permintaan kredit masih akan bergerak terbatas. Akselerasi ekonomi yang tidak secepat ekspektasi menjadi penyebabnya. Selain itu, perbankan juga masih akan berfokus pada proses restrukturisasi lanjutan dari debitur yang terdampak, sejalan dengan perpanjangan kebijakan relaksasi OJK.

In the short term, especially in 2021, the level of bank profitability is still depressed in line with the COVID-19 pandemic which is not expected to end. The bank risk profile is still quite high, especially credit risk. Even though it is already on the recovery track, the rate of credit demand will still be limited. The economic acceleration was not as fast as expected to be the cause. In addition, banks will still focus on the continued restructuring process of affected debtors, in line with the extension of the OJK relaxation policy.

Uraian Langkah Strategis Bank Tahun 2021

PaninBank terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanan terpadu yang bisa memberikan nilai tambah dan mampu mendukung keberhasilan nasabah. Untuk memberikan layanan yang berkualitas, Bank terus membangun kemampuan saluran distribusi *multichannel* dalam menjangkau nasabah di seluruh Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Description of the Bank's Strategic Steps in 2021

PaninBank continues to innovate to develop integrated products and services that can provide added value and are able to support customer success. To provide quality services, the Bank continues to build multichannel distribution channel capabilities to reach customers throughout Indonesia and support regional economic growth.

Terkait hal itu, Bank sedang dalam proses transformasi *digital banking*. Pandemi menjadi momentum untuk mengembangkan layanan perbankan *digital*. Selama pandemi, adopsi teknologi *digital*, terutama yang terkait dengan *e-Commerce,* pembayaran *online*, dan pembayaran nontunai (*cashless*) oleh masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan.

In this regard, the Bank is in the process of transforming digital banking. The pandemic has become a momentum to develop digital banking services. During the pandemic, the adoption of digital technology, especially those related to e-Commerce, online payments and cashless payments by the public, showed a significant increase.

Kebijakan pengembangan bisnis Bank secara umum bertumpu pada tiga faktor, yaitu organisasi yang lentur (*organizational flexibility*), fokus pada nasabah (*customer centric),* dan optimalisasi laba *(profit optimization*). Pengembangan digital banking diharapkan akan mampu mendukung upaya efisiensi operasional. *Digital banking* dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan nasabah serta terbangunnya organisasi yang adaptif yang mampu menjawab tantangan *flexibility & agility* dalam kompetisi yang makin ketat.

In general, the Bank's business development policy rests on three factors, namely organizational flexibility, focus on customers (customer centric), and profit optimization. It is hoped that the development of digital banking will be able to support operational efficiency efforts. Digital banking is developed by considering customer needs and satisfaction as well as the development of an adaptive organization that is able to answer flexibility & agility challenges in increasingly fierce competitions.

Organisasi yang Lentur (*Organizational Flexibility*). Fleksibilitas strategis telah menjadi elemen kompetitif dalam persaingan yang semakin dinamis. Kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan yang berfokus pada nasabah dan mengikuti kebutuhan nasabah bisa menjadi keunggulan yang berdaya saing. Fleksibilitas mencakup pembangunan kapabilitas dinamis, dukungan komunikasi horisontal dan kolaborasi unit kerja, dan struktur organisasi yang efektif.

1. Membangun lingkungan kerja yang adaptif dengan berpusat pada sistem pelatihan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan SDM yang tangkas dan lentur dalam merespons perubahan.

Organizational Flexibility. Strategic flexibility has become a competitive element in an increasingly dynamic competition. The ability of a company to hire employees who are customer focused and follow customer needs can be a competitive advantage. Flexibility includes dynamic capability building, horizontal communication support and work unit collaboration, and an effective organizational structure.

1. Developing an adaptive work environment centered on a continuous training system in order to create human resources that are agile and flexible in responding to change.

2. Menyatukan koordinasi pengembangan teknologi informasi dan meningkatkan kapabilitas internal dalam rangka merespon kebutuhan dan inovasi teknologi yang cepat dan dinamis.
3. Mengembangkan struktur organisasi dalam rangka mewujudkan koordinasi yang efektif serta penguatan peran dan fungsi pengawasan operasional.

Fokus Pada Nasabah (*Customer Centric*). Loyalitas nasabah merupakan salah satu identitas PaninBank. Identitas tersebut terbangun lama melalui proses pemahaman kebutuhan nasabah. Menempatkan nasabah sebagai pusat perhatian dikembangkan tidak hanya pada aspek layanan dan saluran pelayanan, namun juga budaya, strategi, dan filosofi perusahaan yang akan berujung pada pengalaman positif bagi nasabah.

1. Menerapkan strategi *multichannel* untuk menjangkau nasabah *existing* dan nasabah potensial.
2. Mengembangkan *digital banking* fase I: *Digital Banker* dan *Digital Customer* untuk meningkatkan *service availability.*
3. Menerapkan I-CARE sebagai nilai perusahaan secara lebih intensif dalam semua aspek dan jenjang pekerjaan melalui semangat ONE PANIN.

Optimalisasi Laba (*Profit Optimization*). Bank terus mengevaluasi setiap aliran sumber pendapatan dan sumber biaya untuk mencapai laba yang optimal. Dalam jangka panjang, pembangunan organisasi yang lentur serta penambahan basis nasabah loyal akan berdampak positif pada biaya yang makin efisien.

1. Memperbaiki struktur CASA sehingga mencapai *cost of fund* yang rendah.
2. Memperbaiki sebaran cabang di kota besar
3. Menerapkan *Funds Transfer Pricing* (FTP) untuk lebih mengoptimalkan penetapan *pricing product* dan *profitability management*, terutama sampai level *product & customer profitability.*

ASPEK PEMASARAN

Pangsa Pasar

Total aset PaninBank secara individual tercatat sebesar Rp201,25 triliun pada akhir tahun 2020, naik 5,78% dari tahun sebelumnya. Hal ini menempatkan PaninBank sebagai bank beraset terbesar ke-8 di Indonesia. Posisi tersebut turun setingkat dibanding tahun sebelumnya terutama karena kinerja kredit.

2. Coordinating the development of information technology and improve internal capabilities in response to the needs and technological innovations that are fast and dynamic.

3. Developing an organizational structure in order to achieve effective coordination and strengthening the role and function of operational supervision.

Customer Centric. Customer loyalty is one of PaninBank's identities. This identity was built over a long time through the process of understanding customer needs. Placing customers as the center of attention is developed not only in service aspects and service channels, but also on the company's culture, strategy and philosophy that will lead to a positive experience for customers.

1. Implementing a multichannel strategy to reach existing and potential customers.
2. Developing phase I digital banking: Digital Banker and Digital Customer to increase service availability.
3. Applying I-CARE as a corporate value more intensively in all aspects and levels of work through the spirit of ONE PANIN.

Profit Optimization. The Bank continues to evaluate each revenue stream and cost source in order to achieve optimal profit. In the long term, building a flexible organization and increasing the loyal customer base will have a positive impact on more efficient costs.

1. Improving the CASA structure so as to achieve a low cost of funds.
2. Improving the distribution of branches in big cities
3. Implementing Funds Transfer Pricing (FTP) to further optimize the determination of product pricing and profitability management, especially at the product & customer profitability level.

MARKETING ASPECTS

Market Share

The total assets of PaninBank as an individual were recorded at Rp201.25 trillion at the end of 2020, up 5.78% from the previous year. This puts PaninBank as the 8th largest bank in terms of asset size in Indonesia. This position dropped one level from the previous year, mainly due to credit performance.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan pangsa pasar kredit PaninBank turun dari posisi 2,36% dari total kredit bank umum tahun 2019 menjadi 2,07% pada tahun 2020. Sementara itu, pangsa pasar Dana Pihak Ketiga (DPK) relatif stabil sebesar 2,05%. Perlambatan kinerja kredit pada tahun ini disebabkan oleh kebijakan Bank yang lebih fokus pada upaya menjaga daya tahan bisnis debitur sehingga kinerja fungsi intermediasi bisa lebih berkelanjutan.

Fokus dan Strategi Pemasaran

Salah satu keuntungan kompetitif Bank adalah basis nasabah loyal. Selain untuk menyegarkan dan memperkuat *awareness* nasabah loyal, strategi pemasaran pada tahun 2021 mendatang akan diarahkan untuk memperluas basis nasabah dengan nasabah baru.

Bank tidak akan terlalu agresif dalam memasarkan fasilitas kredit meskipun permintaan kredit baru diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan Bank menilai akselerasi ekonomi yang masih lambat tetap berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit sehingga Bank masih akan melanjutkan kebijakan penyaluran kredit yang penuh kehati-hatian untuk menekan kenaikan kredit bermasalah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka fokus pemasaran Bank pada tahun ini adalah perbaikan struktur CASA (*Current Acount Saving Account*). CASA saat ini berada pada level 41,78% dengan porsi tabungan mencapai 32,36% dari total DPK. Bank memproyeksikan CASA bisa berada pada level 46%. Berikut adalah strategi pemasaran pada tahun 2021:

1. Sinergi antara unit kerja dana dan perkreditan untuk menggarap segmen usaha dengan *supply chain*-nya. Selain itu, Bank juga akan lebih intensif menggarap potensi dari institusi/yayasan di bidang sosial keagamaan, kesehatan, dan pendidikan dengan dukungan *Relationship Manager* (RM) *Specialist*.
2. Meluncurkan aplikasi *mobile* omnichannel sebagai bagian dari Transformasi *Digital Banking* Fase I untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus nilai Tabungan, terutama dari nasabah Milenial.
3. Memperkuat *brand awareness* produk-produk tabungan, terutama Panin Super Bonanza yang sudah menjadi *trademark* Bank. Panin Superbonanza diharapkan akan bisa memperkuat loyalitas nasabah *existing* dan menambah portofolionya, memperluas basis nasabah baru, serta memperkuat *brand awareness*. Produk seperti Panin Super Prize dan Simpanan Pelajar (Simpel) terus didorong untuk memperluas basis nasabah pemula.

The COVID-19 pandemic resulted in PaninBank's credit market share falling from 2.36% of total commercial bank loans in 2019 to 2.07% in 2020. Meanwhile, the market share of Third Party Funds (DPK) was relatively stable at 2.05%. The slowdown in credit performance this year was caused by the Bank's policy to focus more on efforts to maintain the resilience of the debtor's business so that the performance of the intermediation function can be more sustainable.

Marketing Focus and Strategy

One of the Bank's competitive advantages is its loyal customer base. In addition to refreshing and strengthening awareness of loyal customers, the marketing strategy in 2021 will be directed at expanding the customer base with new customers.

The Bank will not be too aggressive in marketing credit facilities, although the demand for new loans is expected to increase in line with the economic recovery. This is because the Bank considers that the slow economic acceleration will still have the potential to increase credit risk exposure, so that the Bank will continue its prudent lending policy to suppress the increase in non-performing loans.

By considering the factors above, the Bank's marketing focus this year is to improve the structure of the CASA (Current Account Saving Account). Currently, CASA's position is at the level of 41.78% with the portion of savings reaching 32.36% of total DPK. The Bank projects CASA to be at the level of 46%. Following are the marketing strategies for 2021:

1. Creating synergy between the funding and credit working units to work on the business segment and its supply chain. In addition, the Bank will also intensively work on the potential of institutions/foundations in the fields of socio-religious, health and education with the support of a Relationship Manager (RM) Specialist.
2. Launching the omnichannel mobile application as part of Phase I of Digital Banking Transformation to increase the number of customers as well as the value of savings, especially from Millennial customers.
3. Strengthening the brand awareness of savings products, especially the Panin Super Bonanza, which has become a trademark of the Bank. Panin Superbonanza is expected to be able to strengthen existing customer loyalty and increase its portfolio, expand new customer base, and strengthen brand awareness. Products such as the Panin Super Prize and Student Savings (Simpel) continue to be encouraged to expand the new customer base.

4. Melanjutkan program promosi *Member-get-Member* (MGM) yang pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2019. Program referal ini cukup berhasil dalam mendorong *brand awareness* dan jumlah nasabah.
5. Membuka *weekend banking* untuk memberikan alternatif pilihan layanan yang lebih mendekat pada nasabah.

Integrasi, Sinergi, dan Aliansi

Bank fokus untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis melalui sinergi dengan kelompok usaha di bawahnya. Sinergi yang dimaksud, misalnya antara PaninBank dengan Panin Dubai Syariah Bank dimana PaninBank merupakan salah satu pemegang saham pengendali dari Panin Dubai Syariah Bank (PDSB). Pada tahun 2021, PaninBank akan melakukan sinergi pemasaran produk dan layanan dengan PDSB terutama di kota-kota besar tertentu. Kerja sama juga ditingkatkan antara lain dengan perluasan dan pemanfaatan jaringan kantor Bank untuk Layanan Syariah Bank (LSB) dan Kantor Fungsional (KF) dengan PDSB.

Selain itu, Bank terus berupaya mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan kapasitas bisnis, termasuk memperluas *service availability* melalui kolaborasi dengan perusahaan *Fintech*. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menguntungkan secara bisnis tapi juga bisa melengkapi layanan untuk nasabah.

Kolaborasi dengan perusahaan *Fintech* antara lain dilakukan dengan penerapan *Application Program Interface* (API) Banking untuk memudahkan nasabah Small Medium Enterprise dan Wholesale Banking dalam melakukan transaksi perbankannya. Bank ikut serta dalam pengembangan aplikasi pembayaran QRIS yang dapat digunakan untuk sarana pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran QR di perbankan atau perusahaan *fintech* seperti BCA mobile, Sakuku, OVO, Gojek, Dana, Go mobile, dan lain-lain.

Keunggulan Layanan

Sepanjang kehadirannya hingga saat ini, PaninBank terus berkembang dan berinovasi untuk membangun kinerja yang berkesinambungan dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Produk dan layanan Bank diarahkan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan fokus utama Bank demi menciptakan keterikatan emosional dan loyalitas dengan nasabah.

Pelayanan prima juga menjadi salah satu tujuan dalam internalisasi nilai perusahaan I-CARE bagi karyawan. Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari

4. Continuing the Member-get-Member (MGM) promotion program which was first launched in early 2019. This referral program has been quite successful in driving brand awareness and the number of customers.
5. Opening weekend banking to provide alternative service options that are closer to customers.

Integration, Synergy, and Alliances

The Bank focuses on optimizing business growth through synergies with the business groups under it. The synergy in question is, for example, between PaninBank and Panin Dubai Syariah Bank where PaninBank is one of the controlling shareholders of Panin Dubai Syariah Bank (PDSB). In 2021, PaninBank will carry out a synergy in marketing products and services with PDSB, especially in certain big cities. Cooperation will also be enhanced, among others, by expanding and utilizing the Bank's office network for Bank Syariah Services (LSB) and Functional Offices (KF) with PDSB.

In addition, the Bank will continue to develop existing potentials to increase business capacity, including expanding service availability through collaboration with Fintech companies. The collaboration is expected not only to be profitable in terms of business but also to complement services for customers.

Collaboration with Fintech companies will be carried out, among others, by implementing the Banking Application Program Interface (API) to facilitate Small Medium Enterprise and Wholesale Banking customers in conducting their banking transactions. The Bank participates in the development of the QRIS payment application that can be used as a means of payment for all QR payment applications in banking or fintech companies such as BCA mobile, Sakuku, OVO, Gojek, Dana, Go mobile, and others.

Service Excellence

Throughout its existence to date, PaninBank continues to develop and innovate to build sustainable performance and provide excellent service to customers. The Bank's products and services are directed to meet all customer needs. Customer satisfaction is the main focus of the Bank in order to create emotional attachment and loyalty with customers.

Excellent service is also one of the goals in internalizing I-CARE's corporate values for employees. The application of I-CARE in all aspects of work enables employees to understand their role as part of the customer service process while

proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Bank untuk terus maju. I-CARE bukan hanya menjadi pedoman baku dalam setiap aktivitas di lingkungan Perseroan. Lebih dari itu, I-CARE menjadi landasan filosofis dan budaya perilaku yang dipegang erat oleh setiap insan Bank untuk memberikan layanan prima berbasis kepuasan pelanggan maupun nasabah lainnya. Bank memperkuat nilai-nilai I-CARE melalui perubahan *mindset* dengan mengedepankan pemahaman dan kesepahaman akan nilai utama organisasi yaitu "ONE PANIN"

Bank telah secara resmi masuk dalam kelompok Bank BUKU (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha) kategori 4 sejak 1 Maret 2019. Menjadi Bank BUKU 4 merupakan upaya Bank untuk terus meningkatkan kualitas layanan terhadap nasabah. Bank berupaya untuk tidak hanya memberikan rasa nyaman namun yang lebih utama juga rasa aman. Bank BUKU 4 memiliki kapasitas mitigasi risiko yang lebih besar yang diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah. Bank meyakini hubungan baik dan kepercayaan nasabah merupakan modal utama bisnis perbankan.

Pengembangan Produk

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah model bisnis perbankan. Pada era *technology disruption* seperti sekarang ini, bank yang tidak memperbaiki sistem digitalnya berpotensi tidak mampu bertahan dalam persaingan.

Secara umum, variasi produk digital PaninBank relatif sudah sama dengan pelaku perbankan lainnya. Bank melakukan *continuous improvement* dalam sistem teknologi informasi. Pengembangan produk dan layanan disesuaikan dengan perkembangan *modern digital banking.* Pada tahun 2021 ini, Bank mengimplementasikan program Transformasi *Digital Banking* Fase I. Transformasi tersebut diharapkan bisa memperluas basis nasabah loyal sehingga bisa berdampak pada perbaikan CASA dan memperkuat daya saing.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

PaninBank tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya di industri perbankan Indonesia. Meski demikian, Bank mewaspadai potensi peningkatan eksposur risiko kredit akibat akselerasi ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian diperkirakan masih akan terasa hingga dua tahun ke depan. Bank masih akan melanjutkan kebijakan penyaluran kredit yang telah diperkuat untuk menekan kenaikan kredit bermasalah.

positioning employees to synergize with the Bank's vision and mission to move forward. I-CARE is not only a standard guideline in every activity within the Company. More than that, I-CARE has become a philosophical foundation and a culture of behavior that is closely held by all Bank personnel to provide excellent service based on customer satisfaction and other customers. The Bank strengthens the values of I-CARE through a change in mindset by promoting understanding and understanding of the main values of the organization, namely "ONE PANIN"

The Bank has officially been included in the category BUKU 4 (Commercial Bank Based on Business Activities) group since March 1, 2019. Becoming a BUKU 4 bank is an effort of the Bank to continue to improve the quality of service to customers. The Bank strives to not only provide a sense of comfort but more importantly a sense of security. BUKU 4 banks has a greater risk mitigation capacity which is expected to further increase the sense of security and trust of customers. The Bank believes that good relationships and customer trust are the main assets of the banking business.

Product Development

The development of information technology has changed the banking business model. In the era of technology disruption like today, banks that don't improve their digital systems have the potential to be unable to survive the competition.

In general, PaninBank's digital product variations are relatively the same as other banking players. The Bank makes continuous improvement in the information technology system. Product and service development adapted to the modern development of digital banking. In 2021, the Bank will implement the Phase I Digital Banking Transformation program. This transformation is expected to expand the loyal customer base so that it can have an impact on improving CASA and strengthening competitiveness.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Issues with Potential Significant Impact on Business Continuity

PaninBank does not have issues that have the potential to significantly affect the continuity of its business in the Indonesian banking industry. However, the Bank is aware of the potential for an increase in credit risk exposure due to an economic acceleration that does not match expectations. It is estimated that the impact of the COVID-19 pandemic on the economy will continue for the next two years. The Bank will still continue with the strengthened lending policy to suppress the increase in non-performing loans.

Bank akan tetap mengupayakan kinerja berjalan secara optimal, baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bank berkomitmen untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Penyaluran kredit dan pengembangan portofolio yang berkesinambungan (*sustainable*) akan dijaga dengan tetap mengacu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential*), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta *monitoring* yang ketat terhadap kualitas kredit dan tingkat kesehatan portofolio.

The Bank will continue to strive for optimal performance, both in the collection of third party funds (DPK) and lending to support national economic growth. The Bank is committed to prioritizing the principle of prudence (prudential). Lending and portfolio development in a sustainable manner will be maintained with reference to the implementation of prudential principles, implementation of Good Corporate Governance (GCG), as well as close monitoring of credit quality and portfolio soundness.

Penilaian (*Assessment*) Manajemen dalam Pengelolaan Potensi yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

PaninBank secara reguler melakukan evaluasi risiko-risiko yang berpotensi menghambat kelangsungan usaha. Manajemen menyusun kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan parameter *risk appetite* dan *risk tolerance*. Kebijakan manajemen risiko disusun secara komprehensif dengan mengacu pada aturan dan praktik bisnis standar yang berlaku. Manajemen risiko mencakup penerapan strategi dalam empat aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*) dan tata kelola terintegrasi.

Bank juga telah menyusun dan mengkinikan Dokumen Pedoman Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik. Dokumen ini merupakan prosedur operasional standar yang menjadi acuan untuk tindakan pemulihan PaninBank ketika terjadi krisis.

Management Assessment in Managing Potential Issues with Significant Impact on Business Continuity

PaninBank regularly evaluates risks that have the potential to hinder business continuity. Management formulates policies and strategies that are adjusted to the parameters of risk appetite and risk tolerance. The risk management policy is prepared comprehensively by referring to the applicable standard business rules and practices. Risk management includes the implementation of strategies in four aspects, namely risk governance, risk management framework, risk management process, MIS and HR, as well as risk control systems and integrated governance.

The Bank has also compiled and updated the Recovery Plan Guideline Document in accordance with the mandate of Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Management and Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017 concerning Recovery Plan for Systemic Banks. This document is a standard operating procedure that becomes a reference for PaninBank's recovery actions when a crisis occurs.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Penilaian (*Assessment*)

Dalam penyusunan parameter penilaian, Manajemen berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, masukan dari regulator, dan praktik-praktik yang sudah umum berlaku (*best practices*). Hal tersebut meliputi beberapa faktor seperti kinerja keuangan, tingkat likuiditas dan solvabilitas, perikatan dan perjanjian signifikan, serta perkara hukum yang sedang dihadapi dalam melakukan *assessment* terkait kelangsungan usaha Bank.

Assumptions Used by Management in the Assessment

In preparing the assessment parameters, Management is guided by the provisions of the applicable laws and regulations, input from regulators, and generally accepted practices (best practices). This includes several factors such as financial performance, levels of liquidity and solvency, significant engagements and agreements, as well as legal cases currently being faced in conducting assessments regarding the continuity of the Bank's business.

Teknologi Informasi

Information Technology

GAMBARAN UMUM

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat mendorong Bank untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar senantiasa mampu menghadirkan layanan perbankan yang solutif sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan nasabah. Menyadari hal tersebut, Bank telah menyusun roadmap pengembangan *digital banking* serta melakukan pengelolaan TI yang terarah dan efektif agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Bank senantiasa meningkatkan kapasitas, keandalan dan keamanan jaringan sejalan dengan pertumbuhan transaksi nasabah. Dengan semangat digitalisasi, Bank terus berupaya menjaga ketersediaan (*availability*) dan keberlangsungan (*continuity*) sistem TI agar seluruh proses layanan perbankan dapat berjalan lebih sederhana, efektif, dan efisien. Hal lain yang tak kalah penting, Bank juga memastikan bahwa infrastruktur TI yang dimiliki senantiasa menjamin keamanan transaksi *digital* perbankan di tengah maraknya kejahatan siber.

Sepanjang tahun 2020, Bank telah menjalankan sejumlah inisiatif strategis guna mengatasi beragam tantangan digitalisasi yang sedang berlangsung, salah satunya dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti *business partner*, sistem integrator, *vendor solution*, dan lainnya.

ROADMAP TATA KELOLA TI

Tata kelola TI yang diterapkan di lingkup PaninBank sudah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai landasan dasar dan standar TI internasional dari COBIT, ITIL, dan ISO secara spesifik, yang tentunya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Proses penerapan atau pengelolaan kualitas pengembangan sistem TI yang melibatkan pengguna (*user*) aplikasi dimulai dari penentuan kebutuhan dan spesifikasi (*user need* & *specification*) hingga ke tahapan uji coba (*user acceptance test*) sebelum akhirnya aplikasi tersebut diterapkan. Selanjutnya, sistem dipantau untuk melihat efektivitas dukungannya terhadap peningkatan pelayanan nasabah, peningkatan sistem pengendalian dan tata kelola, serta kontribusinya secara keseluruhan dalam mendukung target menjadi bank *retail* dan komersil terkemuka di Indonesia.

GENERAL OVERVIEW

The rapid development of Information Technology (IT) has prompted the Bank to continue innovating and adapting to be able to provide solutive banking services according to customer expectations and needs. Recognizing this, the Bank has prepared a digital banking development roadmap as well as performed directed and effective IT management in order to support sustainable business growth.

The Bank continues to improve network capacity, reliability and security in line with customer transaction growth. With the spirit of digitalization, the Bank continually strives to maintain the availability and continuity of IT systems thus the whole processes of banking services can be run more simply, effectively, and efficiently. Also important is that the Bank ensures that its IT infrastructure always guarantees the security of digital banking transactions amid rampant cyber crime.

Throughout 2020, the Bank has carried out a number of strategic initiatives to overcome various ongoing challenges of digitalization, one of which is by collaborating with several parties, such as business partners, system integrators, solution vendors, and others.

IT GOVERNANCE ROADMAP

The IT governance applied within PaninBank has been adjusted to Bank Indonesia Regulation (PBI) and Financial Services Authority Regulation (POJK) as a basic foundation and specifically refers to international IT standards such as COBIT, ITIL, and ISO, which have also been tailored to the needs of the organization.

The process of completing or managing the IT system development that involves application users starts with determining the needs and specifications, up until the user acceptance test, before the application is finally implemented. Furthermore, the system is monitored to see the effectiveness of its support to the improvement of customer service, development of control and governance systems, as well as its overall contribution in achieving the target to become the leading retail and commercial bank in Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, Bank tengah mempersiapkan *roadmap* transformasi *digital* yang akan diluncurkan secara bertahap pada 2021 mendatang. Melalui terobosan ini, Bank berharap *level engagement* nasabah maupun karyawan terhadap Bank dapat semakin meningkat, serta kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah juga turut meningkat.

ORGANISASI PENGELOLAAN

Divisi Teknologi Informasi (TI) (IT Division) dan Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penerapan tata kelola TI di lingkungan Bank. Pada penerapannya, Divisi TI bertanggung jawab dalam memberikan layanan terbaik bagi aktivitas operasional dan transaksi nasabah melalui penerapan TI yang tepat agar nasabah senantiasa dapat melakukan transaksi perbankan secara aman dan nyaman. Sementara Komite Pengarah TI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan beranggotakan Direksi dan Kepala Biro Teknologi Informasi. Komite ini berperan dalam hal pengawasan implementasi manajemen risiko dalam hal penggunaan TI.

In 2020, the Bank prepared a digital transformation roadmap to be launched in stages in 2021. Starting with such a breakthrough, the Bank hopes that the level of engagement of customers and employees towards the Bank can be increased, and the quality of services provided to customers can also be improved.

MANAGEMENT ORGANIZATION

The Information Technology (IT) Division and the Information Technology Steering Committee are the parties responsible for the implementation of IT governance within the Bank. In practice, the IT Division is accountable for providing the best service for operational activities and customer transactions through appropriate IT implementation so that every customer can always perform secure and problem-free banking transactions. Additionally the IT Steering Committee reports directly to the President Director, with members consisting of all the Board of Directors and Head of Information Technology Bureau. This committee plays a role in overseeing the implementation of Risk Management in terms of IT use.

SDM DIVISI TI

Tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dan perangkat-perangkat TI semata, Bank turut memperhatikan kualitas pengembangan dan pengelolaan talenta yang tepat agar mereka senantiasa memiliki bekal keterampilan terbaru yang mumpuni di bidang TI.

Bank menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan SDM yang kompeten menjadi faktor yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan TI. Oleh karena itu, Bank senantiasa memberi dukungan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi SDM di bidang TI. Prinsip pengembangan SDM di lingkungan organisasi TI senantiasa mempertimbangkan kebutuhan proyek dan perkembangan teknologi agar Bank senantiasa dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi.

HR IT DIVISION

Not merely focusing on the development of IT infrastructure and its equipment, the Bank also pays attention to the quality of development and proper talent management to always be equipped with the newest qualified skills in the IT field.

The Bank is fully aware that the presence of competent human resources is a very important factor in IT management and development. Therefore, the Bank continues to provide support and facilitates HR competency development activities in the IT field. In principle, the HR development in the scope of IT organization always considers the needs of projects and technological developments so that the Bank continues to adapt well to changes and developments.

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola TI Bank sudah menerapkan aplikasi monitoring dan pengendalian sebagai salah satu upaya pemeliharaan dalam menjaga kualitas standar TI yang telah berjalan baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang. Pada prinsipnya, peranan TI di lingkungan Bank berfungsi sebagai *support system* bagi Bank dalam menunjang kegiatan operasional kantor, pengembangan produk baru, sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan.

Dalam rangka membangun teknologi informasi yang berkesinambungan, Bank telah melakukan proses otomatisasi di setiap aktivitas operasional kantor, serta semaksimal mungkin mengurangi proses-proses bisnis yang masih berjalan manual. Oleh karena itu, Bank telah menyusun inisiatif strategi TI yang berfungsi sebagai pedoman umum dan acuan bagi unit kerja TI dalam menyusun dan melaksanakan tugasnya. Berikut ini adalah strategi TI yang dijalankan Bank sampai dengan akhir 2020:

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY

The Bank's IT Governance has implemented a monitoring and control application as one of the efforts to maintain the quality of IT standards that have been running at both the head office and branch offices. In principle, the IT role of the Bank functions as a support system for office operations, to develop new products, management information systems, and decision-making.

In order to develop sustainable Information Technology, the Bank has carried out an automation process in every office operational activity, as well as reduced manual business processes as much as possible. To that end, the Bank developed an IT strategy that serves as a general guideline and reference for the IT work unit in preparing and carrying out its duties. The following is the Bank's IT strategy which runs until the end of 2020:

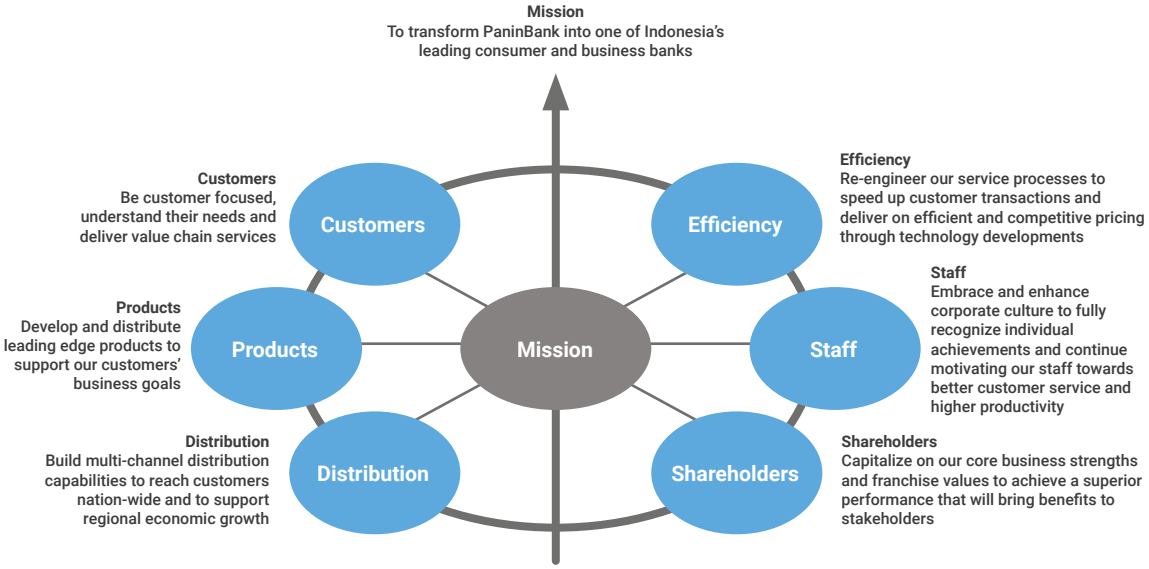

PENCAPAIAN TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah menyelesaikan sejumlah inisiatif pengembangan dan beberapa *project Enhancement* atau *Upgrade* berbagai aplikasi yang telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Bidang Teknologi Informasi. Bank telah menyelesaikan implementasi IFRS 9 (PSAK 71) serta berbagai *project* yang berkaitan dengan *Payment Gateway* dan Kartu Kredit.

Bank secara rutin melakukan Uji Coba fasilitas *Disaster Recovery Centre* (DRC) dan *Business Continuity Plan* (BCP), untuk memastikan bahwa jika terjadi bencana maka kegiatan operasional Bank dapat tetap berjalan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fasilitas Pusat Pengolahan Data yang dipergunakan oleh kantor-kantor cabang, Bank juga secara rutin melakukan proses uji coba fasilitas *Disaster Recovery Centre* (DRC), dengan tujuan:

- Memastikan bahwa sistem fasilitas DRC selalu siap dan berfungsi sebagaimana mestinya.
- Menguji integritas data antara mesin *production* dan mesin backup (DR) dengan menggunakan aplikasi MIMIX dalam melakukan replikasi perubahan data.
- Menguji kesiapan fasilitas jaringan *Data Communication* (*Network infrastructure/network provider*) sehingga bila bencana terjadi maka rencana pemulihan dapat diterapkan dan berjalan dengan baik.
- Menguji kelengkapan perangkat lunak dan perangkat keras yang berada di fasilitas *backup* DRC.

ACHIEVEMENTS IN 2020

Throughout 2020, the Bank has completed a number of development initiatives and several enhancements or upgrade projects for some applications that have been included in the Information Technology Sector Work Plan. The Bank has performed the implementation of IFRS 9 (PSAK 71) as well as various projects relating to Payment Gateways and Credit Cards.

The Bank routinely conducts Testing of the Disaster Recovery Center (DRC) and Business Continuity Plan (BCP) facilities, to ensure that if a disaster occurs, the Bank's operational activities can also continue to run.

In order to maintain the continuity of the Data Processing Center facilities that are used by branch offices, the Bank also regularly conducts a trial process for the Disaster Recovery Center (DRC) facility, with the aim of:

- Ensuring that the DRC facility system is always ready and functioning as well as it should.
- Test data integrity between production machines and backup machines (DR) by using the MIMIX applications to replicate data changes.
- Test the readiness of Data Communication network facilities (Network infrastructure/network provider) so when the disaster occurs, the recovery plan can be implemented and run well.
- Test the completeness of the software and hardware in the DRC backup facility.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

PENGELOLAAN SDM DI MASA PANDEMI

Bank senantiasa menempatkan setiap karyawan sebagai aset berharga yang berperan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan bisnis perbankan yang semakin pesat di era digitalisasi saat ini, Bank menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan SDM yang unggul, profesional, dan adaptif berkontribusi besar terhadap keunggulan kompetitif Bank. Oleh sebab itu, Bank menyadari bahwa penerapan strategi pengelolaan SDM yang tepat dan dinamis adalah mutlak diperlukan.

Selama 1 (satu) tahun berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19, pada akhirnya memaksa Bank untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan SDM yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan bekerja jarak jauh atau *Work From Home ("WFH")*, pengaturan jam kerja fleksibel, dan penerapan tatanan sistem kerja baru dengan penerapan protokol kesehatan ketat menjadi hal baru yang harus diterapkan oleh Bank dan seluruh elemen di dalamnya. Opsi kebijakan tersebut diambil Bank sebagai bentuk respons dalam mengatasi tantangan yang sedang terjadi.

Selain itu, beradaptasi dengan gaya hidup digital juga menjadi salah satu upaya Bank dalam menghadapi kenormalan baru agar tetap dapat bertahan dan melanjutkan aktivitas perbankan setiap harinya. Menyadari disrupsi yang terjadi, maka Bank telah mengambil langkah-langkah antisipatif dan menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang bertujuan agar motivasi bekerja dan tingkat produktivitas karyawan tetap terjaga selama masa pandemi tanpa harus mengabaikan faktor kesehatan dan keamanan karyawan.

Bank berkomitmen akan terus berupaya menanamkan pola pikir dan cara kerja *agile* yang selaras dengan nilai-nilai budaya PaninBank agar setiap karyawan selalu siap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perkembangan bisnis, baik yang tengah terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang.

HR MANAGEMENT IN THE PANDEMIC ERA

The Bank always places every employee as a valuable asset that plays an important role in supporting business continuity in the future. In line with the increasingly rapid development of the banking business in the current digitalization era, the Bank is fully aware that the existence of superior, professional, and adaptive human resources contributes greatly to the Bank's competitive advantage. Therefore, the Bank realizes that implementing a precise and dynamic HR management strategy is absolutely necessary.

During the 1 (one) year dealing with the COVID-19 pandemic, it forced the Bank to adjust the HR management policies that had been prepared previously. The policy of working remotely or Work From Home ("WFH"), setting flexible working hours, and implementing a new work system arrangement with the implementation of strict health protocols are new things that must be implemented by the Bank and all its elements. This policy option was taken by the Bank as a response to the ongoing challenges.

In addition, adapting to a digital lifestyle is also one of the Bank's efforts to face the new norms in order to survive and continue banking activities every day. Realizing the disruption that has occurred, the Bank has taken anticipatory steps and implemented HR management policies aimed at maintaining work motivation and employee productivity levels during the pandemic without having to ignore the health and safety factors of employees.

The Bank is committed to instilling an agile mindset and way of working in line with PaninBank's cultural values so that every employee is always ready to face various challenges and the dynamics of business development, both now and in the future.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM di lingkungan PaninBank berada di bawah Direktorat HR & Branch Development, yang terdiri dari:

- **Human Resources & General Affairs**
  Mengelola aset tetap Bank berikut pemeliharaannya, kegiatan pelayanan operasional karyawan, remunerasi dan fasilitas karyawan, serta administrasi SDM.

  Penanggung Jawab:
  Yusak Zefanya, 58 tahun, pertama kali ditunjuk sebagai penanggung jawab *HR & General Affairs* pada 17 Maret 2005.

- **HR Strategic**
  Mengelola aktivitas pelatihan dan pengembangan karyawan, rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan SDM berkualitas bagi Bank, serta pengembangan organisasi.

  Penanggung Jawab:
  Boyke Indrasakti Aveanto, 54 tahun, pertama kali ditunjuk sebagai penanggung jawab *HR Strategic* berdasarkan SK Direksi No. 006/DIR/BPE/SJ/19 tanggal 9 September 2019.

HR MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The HR management within PaninBank is under the HR & Branch Development Directorate, which consists of:

- **Human Resources & General Affairs**
  Manage the Company's fixed assets and their maintenance, employee operational service activities, employee remuneration and facilities, and HR administration.

  Person in charge:
  Yusak Zefanya, 58 years old, was first appointed in charge of HR & General Affairs on March 17, 2005.

- **Strategic HR**
  Managing employee training and development activities, recruitment to meet the needs of quality HR for the Company, and organizational development.

  Person in charge:
  Boyke Indrasakti Aveanto, 54 years old, was first appointed as the person in charge of HR Strategic based on the Decree of the Board of Directors No. 006/DIR/BPE/SJ/19 dated September 9, 2019.

PROSES REKRUTMEN KARYAWAN

Regenerasi SDM menjadi salah satu fokus utama Bank dalam mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Bank. Selain menyelenggarakan program pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan, Bank turut menyadari bahwa proses pencarian SDM unggul juga dimulai dari tahapan seleksi bagi para lulusan terbaik dari universitas-universitas di dalam maupun luar negeri. Bank berkeyakinan ketersediaan SDM yang berkualitas melalui proses rekrutmen yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan di masa depan.

Bank telah menerapkan strategi rekrutmen *digital-based* melalui aplikasi PATEN (PaninBank *Talent Enrolment*) yang ditujukan untuk menjaring kandidat Generasi Y dan Generasi Z di pasar tenaga kerja. Melalui aplikasi ini, Bank dapat merekrut calon kandidat karyawan terbaik dari jalur *fresh graduate* dan *professional hire* untuk mendukung pencapaian Visi & Misi Bank.

Di samping itu, Bank juga secara aktif berpartisipasi pada *event job/career fair* atau *campus hiring* yang diselenggarakan oleh berbagai kampus ternama di Indonesia. Nantinya para kandidat karyawan yang lolos dalam seleksi tersebut akan diikutsertakan pada *Panin Professional Program*, yaitu program pelatihan *Management Trainee* yang disusun secara komprehensif untuk mendukung pengembangan karakter, keterampilan (*skill*) dan kompetensi karyawan agar siap bekerja di PaninBank.

Berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 tentu saja juga berdampak pada fokus kebijakan rekrutmen Bank. Selama pandemi berlangsung, Bank memprioritaskan pemenuhan kebutuhan karyawan dari internal, meskipun untuk beberapa kantor cabang yang berlokasi di *remote area* tetap diperbolehkan untuk melakukan rekrutmen dari eksternal mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Selama tahun 2020, Bank telah merekrut sebanyak 408 karyawan baru. Strategi pemenuhan karyawan pada tahun ini telah mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, serta memperhatikan kebutuhan pengembangan bisnis Bank dan dinamika yang terjadi di industri perbankan nasional.

EMPLOYEE RECRUITMENT PROCESS

HR regeneration is one of the main focuses of the Bank in maintaining and developing the Bank's competitive advantage. In addition to organizing HR competency development programs on an ongoing basis, the Bank also realizes that the search for superior HR also starts from the selection stage for the best graduates from domestic and foreign universities. The Bank believes that the availability of quality human resources through a continuous recruitment process is one of the determining factors for future growth.

The Bank has implemented a digital-based recruitment strategy through the PATEN (PaninBank Talent Enrolment) application which is intended to recruit Generation Y and Generation Z candidates in the labor market. Through this application, the Bank can recruit the best prospective employee candidates from fresh graduates and professional hires to support the achievement of the Bank's Vision & Mission.

In addition, the Bank also actively participates in job/career fairs or campus hiring events held by various well-known campuses in Indonesia. Later, employee candidates who pass the selection will be included in the Panin Professional Program, a Management Trainee training program that is compiled comprehensively to support the character development, skills and competencies of employees so that they are ready to work at PaninBank.

The COVID-19 pandemic had an impact on the focus of the Bank's recruitment policy. During the pandemic, the Bank prioritized meeting the needs of internal employees, although for some branch offices located in remote areas it was still permissible to recruit from externals given the limited human resources. During 2020, the Bank has recruited as many as 408 new employees. This year's employee fulfillment strategy has taken into account the conditions of the COVID-19 pandemic which are still ongoing today, as well as taking into account the needs of the Bank's business development and the dynamics that occur in the national banking industry.

MANAJEMEN KARIER

Pengelolaan talenta merupakan bagian penting di dalam inisiatif strategis pengelolaan SDM yang senantiasa mendapatkan perhatian besar dari Direktorat HR & Branch Development. Untuk itu, Bank Menyusun program pengelolaan talenta secara komprehensif dan berkesinambungan guna memastikan ketersediaan dan kesiapan penerus kepemimpinan serta posisi kunci lainnya di Bank.

CAREER MANAGEMENT

Talent management is an important part of strategic HR management initiatives which always receives great attention from the HR & Branch Development Directorate. To that end, the Bank has compiled a comprehensive and sustainable talent management program to ensure the availability and readiness of future leadership and other key positions in the Bank.

Pada prinsipnya, PaninBank membuka kesempatan berkarier yang setara dan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan agar mereka terdorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di Bank, baik melalui sarana pelatihan, mutasi antar-divisi, pengayaan kompetensi atau mencari kesempatan di unit kerja lain. Seluruh rangkaian proses manajemen karier di Bank dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melalui tahapan evaluasi yang menyeluruh agar proses regenerasi manajemen puncak berjalan optimal dan diisi oleh para calon kandidat yang terbaik serta sesuai dengan kompetensi masing-masing.

In principle, PaninBank opens equal and broad career opportunities for all employees so that they are encouraged to continue to improve their performance at the Bank, either through training facilities, transfer between divisions, enrichment of competencies, or seeking opportunities in other work units. The entire series of career management processes at the Bank are carried out with great care and go through a comprehensive evaluation stage so that the regeneration process of top management runs optimally and is filled by the best candidates according to their respective competencies.

TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Meyakini bahwa regenerasi dan ketersediaan SDM yang berkualitas adalah salah satu faktor penentu keberlangsungan bisnis pada jangka panjang, maka Bank berusaha untuk selalu menghadirkan iklim kerja yang kondusif bagi semua karyawan. Upaya Bank dalam mengelola *regretted turn over* karyawan dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang lebih transparan.

Pada tahun 2020, tingkat perputaran karyawan Bank dibukukan pada angka 4,9%, relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam menjaga kestabilan *turnover* karyawan khususnya selama pandemi berlangsung dengan menyelaraskan pekerjaan dan melakukan *review* berkala terhadap kompentensi karyawan.

Berikut ini adalah rincian data *turnover* karyawan Bank sepanjang tahun 2020:

EMPLOYEE TURNOVER

Believing that the regeneration and availability of quality human resources is one of the determining factors for long-term business sustainability, the Bank strives to always provide a conducive work climate for all employees. The Bank's efforts to manage employee turnover are conducted in various ways, including by implementing a more transparent performance management system.

In 2020, the Bank's employee turnover rate was recorded at 4.9%, relatively stable compared to 2019. This condition shows the Bank's commitment to maintaining the stability of employee turnover, especially during the pandemic, by aligning work and conducting periodic reviews of employee competencies.

The following is a breakdown of the Bank's employee turnover data throughout 2020:

Keterangan	2020	2019	2018	Description
Meninggal Dunia	13	8	12	Passed Away
Pensiun	80	67	43	Pension
Mengundurkan Diri	393	760	622	Resigned
Total	**486**	**835**	**677**	**Total**

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan kondisi keuangan dan kinerja Bank. Adapun strategi remunerasi karyawan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja masing-masing karyawan. Dengan demikian, Bank berharap setiap karyawan menjadi lebih terdorong untuk selalu meningkatkan kontribusinya demi kemajuan Bank.

EMPLOYEE WELFARE AND REMUNERATION POLICY

The Bank pays great attention to improving employee welfare in accordance with the Bank's financial condition and performance. The employee remuneration strategy is determined based on the competence and work performance of each employee. Thus, the Bank hopes that every employee will be more motivated to increase their contribution for the advancement of the Bank.

Selain itu, Bank juga selalu standar penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tenaga kerja agar kualitas kesejahteraan karyawan tetap terjaga disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Bank senantiasa melakukan kajian atas kebijakan remunerasi yang ada dan studi banding (*benchmarking*) terhadap kebijakan dan praktik remunerasi di pasar tenaga kerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan filosofi remunerasi yang baik dalam menentukan kebijakan sistem kompensasi dan *benefit* bagi karyawan dalam rangka mempertahankan karyawan terbaiknya.

In addition, the Bank also always pays attention to the standards for determining the minimum wage as regulated in labor legislation so that the quality of employee welfare is maintained in line with ongoing economic conditions. The Bank constantly reviews existing remuneration policies and benchmarking against remuneration policies and practices in the labor market by prioritizing the principles and philosophy of good remuneration in determining the compensation and benefit system policies for employees in order to retain their best employees.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Bank secara berkala memfasilitasi setiap karyawan untuk mengikuti beragam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, baik dalam hal *leadership* maupun kemampuan teknis lainnya. Hal ini dilakukan agar kualitas dan kapabilitas seluruh insan Bank senantiasa terjaga sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitasnya yang pada jangka panjang diharapkan turut berkontribusi bagi kemajuan Bank.

Pada tahun ini, meskipun kegiatan secara tatap muka selama masa pandemi menjadi terbatas, Bank tetap menjalankan berbagai inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas SDM. Sehingga, kegiatan pelatihan/*workshop/courses* bagi karyawan tetap berlangsung meskipun dilakukan secara virtual atau *online* dengan mengandalkan *platform* teknologi yang ada.

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 7.430 karyawan PaninBank tercatat mengikuti program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karyawan serta mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, baik melalui *inhouse training* maupun eksternal *training* yang dibagi dalam kategori berikut:

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The Bank periodically facilitates each employee to participate in various educational, training and competency development activities, both in terms of leadership and other technical abilities. This is done so that the quality and capability of all Bank personnel are maintained so that they are able to increase their productivity which in the long term is expected to contribute to the progress of the Bank.

This year, although face-to-face activities during the pandemic period were limited, the Bank continued to carry out various policy initiatives aimed at maintaining the quality of human resources. Thus, training activities/workshops/courses for employees continued even though they were conducted virtually or online by relying on existing technology platforms.

Throughout 2020, 7,430 PaninBank employees were recorded as having participated in training programs tailored to the needs of each employee and taking into account the needs of the company, both through in-house training and external training which are divided into the following categories:

No.	**Kategori Pelatihan** Training Category	**Peserta** Participants
1	Company Introduction & Corp. Value Implementation	121
2	Certification Program	949
3	Operational & Service Program	5.755
4	People & Organization Development Program	549
5	Train the Trainers	56
	Jumlah | Total	**7.430**

DEMOGRAFI KARYAWAN

Jumlah karyawan Bank per 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 7.845 karyawan turun 4,22% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 8.191 karyawan. Berikut ini adalah komposisi statistik karyawan Bank dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir:

EMPLOYEE DEMOGRAPHY

The number of Bank employees as of December 31, 2020 was recorded at 7,845 employees, a decrease of 4.22% compared to the previous year of 8,191 employees. The following is the composition of the Bank's employee statistics for the last 3 (three) years:

Berdasarkan Gender | By Gender

Gender	2020	2019	2018	Gender
Laki-laki	3.502	3.668	3.816	Male
Perempuan	4.343	4.523	4.723	Female
Total	**7.845**	**8.191**	**8.539**	**Total**

Berdasarkan Jenjang Pendidikan | By Educational Level

Jenjang Pendidikan	2020	2019	2018	Educational Level
D1/D2	37	38	42	Diploma 1/Diploma 2
D3	560	600	637	Diploma 3
S1	6.758	7.026	7.283	Bachelor's Degree
S2	211	198	194	Master's Degree
S3	1	1	1	Doctorate Degree
Lainnya	277	328	382	Others
Total	**7.845**	**8.191**	**8.539**	**Total**

Berdasarkan Level Jabatan | By Position

Level Jabatan	2020	2019	2018	Position
Komisaris	4	4	4	Commissioner
Presiden Direktur	1	1	1	President Director
Wakil Presiden Direktur	1	2	2	Deputy President Director
Direktur	8	8	8	Director
Kepala Divisi & Kepala Cabang	74	74	73	Head of Division & Branch
Kepala Bidang	122	122	129	Head of Department
Kepala Bagian	798	829	859	Head of Division
Kepala Seksi	1.033	1.068	1.077	Head of Section
Team Leader	265	269	292	Team Leader
Supervisor	70	76	80	Supervisor
Staff	5.394	5.645	5.906	Staff
Non-staff	75	93	108	Non-Staff
Total	**7.845**	**8.191**	**8.539**	**Total**

Berdasarkan Usia | By Age

Usia	2020	2019	2018	Age
<25 tahun	137	312	359	< 25 years old
26-30 tahun	1.605	2.004	2.544	26-30 years old
31-40 tahun	4.168	4.035	3.840	31-40 years old
1-50 tahun	1.307	1.237	1.216	41-50 years old
>50 tahun	628	603	580	> 50 years old
Total	**7.845**	**8.191**	**8.539**	**Total**

Berdasarkan Masa Kerja | By Years of Service

Masa Kerja	2020	2019	2018	Years of Service
<1 tahun	3	8	29	< 1 Year
1-5 tahun	1284	1.871	2.296	1 - 5 Years
6-10 tahun	3400	3.332	3.515	6 -10 Years
1-20 tahun	2344	2.102	1.799	11 - 20 Years
21-30 tahun	655	762	765	21 - 30 Years
>30 tahun	159	116	135	> 30 Years
Total	**7.845**	**8.191**	**8.539**	**Total**

Berdasarkan Status Kepegawaian | By Employment Status

Status Kepegawaian	2020	2019	2018	Employment Status
Tetap	7.845	8.191	8.539	Permanent
Kontrak	1.291	1.514	1.959	Contract
Agent	592	782	853	Agent
Total	**9.728**	**10.487**	**11.351**	**Total**

PENCAPAIAN DIVISI SDM TAHUN 2020

Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir telah menimbulkan beragam tantangan. Pertemuan tatap muka menjadi sesuatu yang sangat dihindari selaras dengan anjuran pemerintah untuk menerapkan "*social distancing*" dalam kehidupan sehari-hari termasuk di ruang publik dan area perkantoran.

Berlatarbelakang faktor-faktor tersebut, maka sepanjang tahun ini Perseroan mulai menerapkan metode pembelajaran atau pelatihan jarak jauh atau "*distance learning*" bagi para karyawan, baik melalui *live streaming* atau *web seminar* dengan mengandalkan *platform* teknologi yang ada. Hampir seluruh kegiatan pengelolaan SDM yang berjalan di internal Bank pada tahun ini sangat mengandalkan keberadaan infrastruktur TI yang kokoh dan aman.

Berikut ini adalah daftar kegiatan pelatihan/*workshop* yang berhasil diselenggarakan Bank secara *virtual* atau *online* selama tahun 2020 sebagai bentuk respons dalam menjawab tantangan disrupsi bekerja di masa pandemi, antara lain:

- Program Sertifikasi, semua dilakukan lewat *online learning*:
  AAJI, PPL WAPERD, WPPEP, Sertifikasi *Treasury*, Sertifikasi Manajemen Risiko, *Refreshment* SMR

HR DIVISION ACHIEVEMENTS IN 2020

2020 is not an easy year to pass. The COVID-19 pandemic which is prolonged and unpredictable when it will end has created various challenges. Face-to-face meetings have become something that is highly avoided in line with the government's recommendation to implement "social distancing" in everyday life, including in public spaces and office areas.

With these factors in mind, throughout this year the Company has begun implementing distance learning or training methods for employees, either through live streaming or web seminars by relying on existing technology platforms. Nearly all HR management activities running internally at the Bank this year relied heavily on the existence of a strong and secure IT infrastructure.

The following is a list of training activities/workshops that were successfully held by the Bank virtually or online during 2020 as a form of response in responding to the challenges of work disruption during the pandemic, including:

- Certification program, all done through online learning:
  AAJI, PPL WAPERD, WPPEP, Treasury Certification, Risk Management Certification, Refreshment SMR

- *Soft Skill*, sebagian dilakukan secara *online* dan *offline learning* yang sangat dibatasi dengan pemberlakuan Protokol Kesehatan yang ketat.
  - *Effective Leadership Team Leader* dan *Supervisor*;
  - *Training Leadership Forum*;
  - *Workshop the New Normal*;
  - *Developing Intimate Relationship*;
  - *Workshop Leadership In The New Normal*;
  - *Team Work In The New Normal*;
- *External Enrichment,* dilakukan melalui *web* seminar:
  - *Negotiation In Handling Customer Complaint*;
  - *Service Leadership Webinar Series;*
  - *Anti-Money Laundering Detection: Sample Cases for Analytical Scenarios, Cyber Security & Data Sovereignty*;
  - *Auditing Scrum Team*;
  - *Cisa Review Course & Exam Cisa.*

INISIATIF STRATEGIS 2021

Menyambut prospek bisnis tahun 2021 mendatang yang bertepatan dengan 50 tahun berjayanya Bank Panin di sektor industri perbankan, Bank telah merumuskan sejumlah inisiatif utama yang berfokus pada keberlangsungan usaha di masa depan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang tahun ini pada akhirnya mendorong Bank untuk mampu beradaptasi dengan proses kerja yang berbeda di era "kenormalan baru".

Dewasa ini, Bank semakin menyadari bahwa keberadaan teknologi pada suatu perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai *support function,* akan tetapi sebagai penggerak utama (*enabler*) segala aktivitas operasional bisnis sehari-hari. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian kedepan mengingat situasi pandemi COVID-19 yang berkelanjutan sampai dengan saat ini, maka Bank akan terus mendorong kebijakan pengelolaan SDM yang mengandalkan kemajuan teknologi dalam mengatasi berbagai tantangan dan dinamika yang dikenal dengan istilah VUCA (*volatility, uncertainty, complexity & ambiguity*). Bank meyakini *Agility* (kelenturan) dalam kemampuan beradaptasi menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat bertahan dalam menghadapi era ekonomi & finansial yang demikian cepat berubah ini.

- Soft Skills, part of which is done online and offline learning, which is very limited by the implementation of strict Health Protocols.
  - Effective Leadership Team Leaders and Supervisors;
  - Leadership Forum Training;
  - Workshop the New Normal;
  - Developing Intimate Relationship;
  - Leadership In The New Normal Workshop;
  - Team Work In the New Normal;
- External Enrichment, conducted through web seminar:
  - Negotiation In Handling Customer Complaint;
  - Service Leadership Webinar Series;
  - Anti-Money Laundering Detection: Sample Cases for Analytical Scenarios, Cyber Security & Data Sovereignty;
  - Auditing Scrum Team;
  - Cisa Review Course & Exam Cisa.

STRATEGIC INITIATIVES 2021

In welcoming the business prospects in 2021 which coincide with the 50th anniversary of PaninBank in the banking industry sector, the Bank has formulated a number of key initiatives that focus on business sustainability in the future. The COVID-19 pandemic that has hit Indonesia throughout this year has finally encouraged the Bank to be able to adapt to different work processes in the "new normal" era.

Today, the Bank is increasingly aware that the existence of technology in a company no longer only acts as a support function, but as an enabler of all daily business operational activities. In facing various challenges and uncertainties in the future, given the ongoing situation of the COVID-19 pandemic to date, the Bank will continue to push for HR management policies that rely on technological advances in overcoming various challenges and dynamics known as VUCA (volatility, uncertainty, complexity & ambiguity). The Bank believes that Agility (flexibility) in the ability to adapt is a necessity to be able to survive in the face of this rapidly changing economic & financial era.

236 **Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance

251 **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
General Meeting of Shareholders (GMS)

264 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

280 **Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris**
Committees Under the Board of Commissioners

304 **Direksi**
Board of Directors

330 **Komite-Komite di Bawah Direksi**
Committees Under the Board of Directors

342 **Kebijakan Keberagaman dan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi**
Diversity and Succession Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

348 **Kebijakan Remunerasi PaninBank**
PaninBank Remuneration Policy

352 **Fungsi Kepatuhan**
Compliance Functions

364 **Audit Internal**
Internal Audit

373 **Audit Eksternal**
External Audit

375 **Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**
Risk Management Including Internal Control System

300 **Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur**
Assessment on Candidate for Commissioners and Directors

390 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

393 **Sekretaris Perusahaan**
Corporate Secretary

399 **Budaya Perusahaan**
Corporate Culture

399 **Perlindungan Nasabah**
Custo'mer Protection

401 **Kode Etik Perusahaan**
Code of Conduct

404 **Pakta Integritas Perseroan**
Company Integrity Pact

404 **Komitmen Anti Korupsi**
Anti-Corruption Commitment

405 **Penanganan Keluhan Pelanggan**
Customer Complaints Handling

406 ***Whistleblowing System***
Whistleblowing System

409 **Permasalahan Hukum**
Legal Cases

411 **Akses Informasi dan Data Perusahaan**
Information Disclosure and Company Data

418 **Rencana Strategis Perseroan**
Company's Strategic Plans

420 **Pengungkpan Aspek Lainnya**
Disclosure of Other Aspects

423 **Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi**
Integrated Governance and Integrated Risk Management

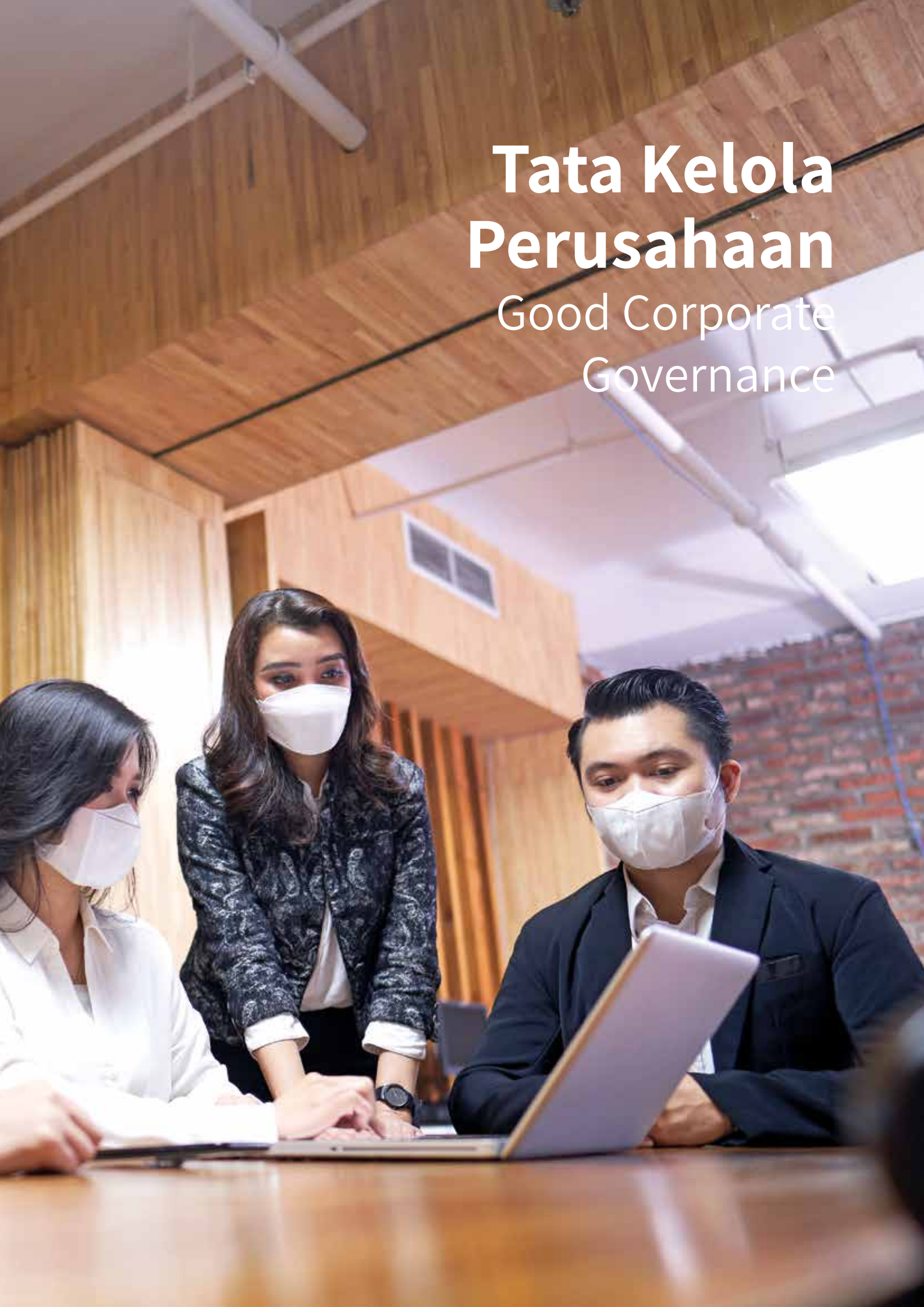

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dengan mengedepankan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), PaninBank optimis dapat menghadapi tantangan dunia perbankan di tengah pandemi COVID-19, serta dapat meningkatkan efisiensi Bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

By prioritizing the Good Corporate Governance (GCG) implementation, PaninBank is optimistic to be able to face any challenges in the banking industry amidst the COVID-19 pandemic, as well as can improve the Bank's efficiency, trust, and confidence of all stakeholders.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

TUJUAN PENERAPAN GCG

Kondisi luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini telah memaksa seluruh industri berinovasi dalam proses usaha mereka untuk bisa bertahan dengan senantiasa memperhatikan Tata Kelola Perusahan yang baik. Oleh karena itu, PaninBank saat ini terus mengembangkan layanan perbankan digital yang tidak hanya untuk mendukung bisnis Perseroan, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan inovasi para pelaku usaha

PaninBank terus memperkuat lini layanan dan produk perbankan digital untuk meningkatkan pemanfaatan dan membudayakan kebiasaan bertransaksi secara *online* di masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Inisiatif digitalisasi layanan perbankan ini juga sejalan dengan visi PaninBank untuk menjadi salah satu mitra finansial masyarakat Indonesia dengan bertransformasi menjadi *modern digital bank* terbaik yang dapat menghadirkan solusi perbankan digital yang handal dan simpel untuk berbagai kebutuhan nasabah

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The extraordinary conditions caused by the COVID-19 pandemic have forced all industries to innovate in their business processes to be able to survive by always paying attention to Good Corporate Governance. Therefore, PaninBank is currently continuing to develop digital banking services not only to support the Company's business, but also to support business needs.

PaninBank continues to strengthen its line of digital banking services and products to increase the utilization and encourage online transaction habits in the community, especially during the COVID-19 pandemic. This banking service digitalization initiative is also in line with PaninBank's vision to become one of the financial partners of the Indonesian people by transforming into the best modern digital bank that can provide reliable and simple digital banking solutions to cater various customer needs.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Tata Kelola PaninBank yang menjadi panduan dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap aktivitas dan jenjang organisasi di PaninBank dan perusahaan anak.

PaninBank memiliki visi untuk menjadi salah satu bank papan atas di Indonesia sehingga senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya secara sehat. Ke depan dalam rangka mewujudkan menjadi bank digital terdepan melalui inovasi berkelanjutan tentunya PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta standar yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), PaninBank diharapkan dapat menghadapi tantangan dunia perbankan di tengah pandemi COVID-19, meningkatkan efisiensi bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Good Corporate Governance (GCG) is the principles applied by companies to maximize company value, improve company performance and contribution, and maintain long-term sustainability of the company. Integrated Governance Principles and PaninBank Governance Principles which become practical guidelines and references in the implementation of good corporate governance principles in every activity and level of organization at PaninBank and its subsidiaries.

PaninBank has a vision to become one of the top banks in Indonesia so that it always maintains and improves its financial performance in a healthy manner. In the future, in order to become the leading digital bank through continuous innovation, PaninBank realizes the need to apply the Good Corporate Governance (GCG) principles in every aspect of the management of the Bank's business activities in accordance with applicable laws and regulations as well as the standards which commonly applied in the banking industry. By prioritizing the implementation of Good Corporate Governance (GCG), PaninBank is expected to be able to face the challenges in the banking industry in the midst of the COVID-19 pandemic, increasing bank efficiency, as well as enhancing the trust and confidence of all stakeholders.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama tata kelola, akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung tata kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh PaninBank sebagai arahan pelaksanaan GCG di PaninBank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi PaninBank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk:

1. Menciptakan landasan bagi PaninBank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
2. Meningkatkan daya saing PaninBank.
3. Mengangkat Citra PaninBank.
4. Meningkatkan kepercayaan investor kepada PaninBank.

PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan antara lain dari berbagai kinerja PaninBank yang dicapai pada periode 2020 dimana kinerja keuangan PaninBank pada periode Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Laba Perseroan tumbuh mencapai Rp3,12 triliun.
2. Aset tumbuh mencapai Rp218,07 triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp116,11 triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp143,03 triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp47,46 triliun.
6. *Non-Performing Loan* (NPL) Netto 0,66%.

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

The key to the success and continuity of the implementation of Good Corporate Governance, or GCG, in the Company is the effective functioning of the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors and Committees. Furthermore, these organs, which are the main organs of governance, will be greatly assisted if there are governance supporting organs that also function effectively. To support the implementation of such governance, a Code of Corporate Governance is required which has been used by PaninBank as the direction for GCG implementation at PaninBank.

The consistent implementation of Governance principles will provide benefits to PaninBank, both directly and indirectly, either in the long-term or short-term, to:

1. Create a foundation for PaninBank to grow and develop for the longterm.
2. Increase PaninBank's competitiveness.
3. Enhance PaninBank Image.
4. Increase investor confidence in PaninBank.

PaninBank has a view that refined implementation of Corporate Governance will be directly proportional to the overall performance improvement of PaninBank. This is shown, among others, from PaninBank's various performances achieved in the 2020 period, where the financial performance of PaninBank in the 2020 period is as follows:

1. The Company's profit grew to Rp3.12 trillion.
2. Assets grew to Rp218.07 trillion.
3. Loans disbursed reached Rp116.11 trillion.
4. Third Party Funds of Rp143.03 trillion.
5. Total Equity of Rp47.46 trillion.
6. Non-Performing Loan (NPL) - Net 0.66%.

PaninBank acknowledges the importance to practice Good Corporate Governance principles at every level of the organization and aspects of the management of PaninBank's business activities in accordance with prevailing laws and regulations, as well as generally accepted practice standards in the banking industry. By prioritizing the implementation of good governance, it is expected that PaninBank will be able to avoid the negative impact of the global economic crisis, improve the Company's efficiency, trust and confidence of all stakeholders.

Selain itu, penerapan GCG di PaninBank juga merujuk pada beberapa regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard, antara lain meliputi:

1. Beberapa Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan Pedoman Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK tanggal 4 Februari 2014;
4. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Kebijakan Bank (Kebijakan Pokok Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasional).

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karier dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karier setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity*, *Collaboration*, *Accountability*, *Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara umum, PaninBank telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

In addition, the implementation of GCG at PaninBank also refers to several regulations set by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) and international standards based on OECD principles and ASEAN CG Scorecard, among others:

1. Laws of the Republic of Indonesia, particularly regarding the Capital Market, Banking and Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulations (POJK), particularly regarding Implementation and Governance Guidelines, Annual Reports, and others;
3. The Indonesian Corporate Governance Roadmap submitted through the OJK press release dated 4 February 2014;
4. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
5. The Articles of Association of the Company and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);
6. Bank Policies (Core Company Policies, Code of Ethics & Employment Behavior, Policies, and Standard Operating Procedures).

PaninBank consistently encourages the development of each individual. Equipped with a comprehensive career and work performance appraisal system, PaninBank ensures that employees get the appropriate rewards. Besides, the system development prepared in stages following the development of responsibilities and career advancement of each individual, also supports the formation of excellent human resources. This is realized through the implementation of work values summarized in I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect and Excellence). The application of I-CARE in all aspects of work enables employees to understand their role as part of the customer service process while positioning employees to synergize with PaninBank's vision and mission to move forward.

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE

In general, PaninBank has implemented the basic principles of GCG which are transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, with confidence that this such action will guarantee an improved quality of GCG implementation as one of the efforts to strengthen the national banking industry in accordance with the Indonesian Banking Architecture.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PaninBank dapat diuraikan sebagai berikut:

The implementation of GCG principles at PaninBank can be described as follows:

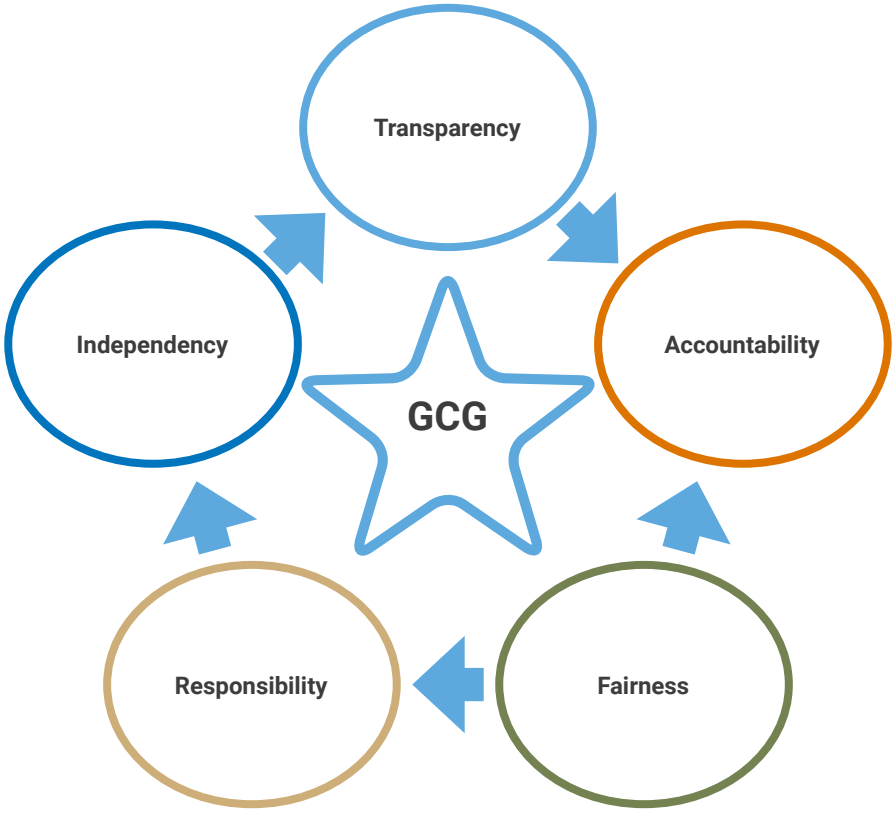

TRANSPARENCY

Transparansi ini diwujudkan oleh PaninBank dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan *Public Expose* untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja Perseroan kepada Pemegang Saham, investor, analis, dan media. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan PaninBank dengan tetap mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik *Good Corporate Governance*.

TRANSPARENCY

The principle of transparency is embodied by PaninBank by always pioneering the disclosure of financial and non-financial information to various interested parties and its disclosure is not limited to mandatory information. One of them is by conducting Public Expose activities to comply with capital market regulations in order to present the Company's performance to shareholders, investors, analysts and the media. Disclosure of such information is carried out by PaninBank while complying with prevailing laws and regulations and recommended by Good Corporate Governance practices.

ACCOUNTABILITY

PaninBank menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan bank maupun kepentingan PaninBank dengan pihak yang berkepentingan.

ACCOUNTABILITY

PaninBank applies the principle of accountability as a solution to overcome differences between individual interests and bank interests, as well as the interests of PaninBank and other interested parties.

Dalam mencapai akuntabilitas ini, maka PaninBank secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dan mekanisme *check and balance*. Tidak hanya itu, PaninBank berusaha untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

In achieving this accountability, PaninBank has formally prepared clear details of duties and responsibilities for each position by considering the segregation of duties and the check and balance mechanism. More than that, PaninBank strives to provide adequate resources so that there are no overlapping duties and responsibilities.

RESPONSIBILITY

PaninBank bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh karyawan PaninBank juga bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja, serta peraturan internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.

RESPONSIBILITY

PaninBank is obliged to comply with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, business competition, occupational health and safety, and so on. All PaninBank employees are also responsible for complying with policies, work procedures, and other internal regulations in all work activities.

INDEPENDENCY

Independensi ini diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ bank. PaninBank meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ PaninBank dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi PaninBank.

INDEPENDENCY

This independence is implemented by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities as well as the authority of each organ in the bank. PaninBank believes that by optimally implementing the independence principle, all of PaninBank organs can be functioned properly and optimally in making the best decisions and management for PaninBank.

FAIRNESS

PaninBank menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar, dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di samping itu, PaninBank akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau kerena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

FAIRNESS

PaninBank guarantees that all interested parties always treated fairly and equally in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations. In addition, PaninBank will accept and treat every employee fairly and free from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender, or other things that have nothing to do with performance.

Deklarasi *Anti-Fraud*

PaninBank menyatakan komitmennya "*Zero Tolerance to Fraud*" untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Anti-Fraud Declaration

PaninBank stated its commitment to "Zero Tolerance to Fraud" in doing business in accordance with the code of ethics and high legal standards as well as not to commit fraud and other inappropriate actions.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

PaninBank dalam melaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi

Code of Conduct

In implementing the Code of Conduct, PaninBank applies ethical standards which are a framework of expectations in which all PaninBank employees and management are expected to act according to this expectation framework. The Code of Conduct shall serve as a basic guideline that applies to all of PaninBank employees. The Code of Conduct implementation

seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan *Anti-Fraud* ini.

is carried out in accordance with the Code of Conduct Policy applied in PaninBank as well as periodically reviewed to be aligned with the PaninBank's dynamic environment and conforms to this Anti-Fraud Policy.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

The Code of Conduct applies in PaninBank regulates, among others, Receiving Gifts or Rewards, where each PaninBank employees are prohibited from receiving both cash and other non-cash, from parties outside PaninBank as remuneration to take any action that is not in accordance with PaninBank's interests or to give confidential information or as remuneration for facilities received by customers.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti-Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. PaninBank dan Karyawan

Another thing regulated in the Code of Conduct is Anti-Bribery, where PaninBank and PaninBank employees do not offer, promise or give anything, either cash or other non-cash assets, on behalf of PaninBank or personally to parties outside PaninBank such as regulators, government, goods/service providers, any organization or customer with the intent to influence or as a favor to the beneficiary for any reason.

Penerapan Tata Kelola di PaninBank telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

The implementation of Governance at PaninBank has complied with various laws and regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Integrated Governance for Financial Conglomerates
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
4. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies
5. Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks
6. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter
7. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks
8. Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

9. Financial Services Authority Circular Letter No. 40/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks
10. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks
11. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks

KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:

FRAMEWORK FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

In order to support the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG), therefore, a GCG implementation framework is needed which provides an overview of the linkages of GCG organs. The GCG implementation framework is prepared by referring to prevailing laws and regulations and considering the conditions, culture and values of the Company. The following is a framework for implementing GCG at PaninBank:

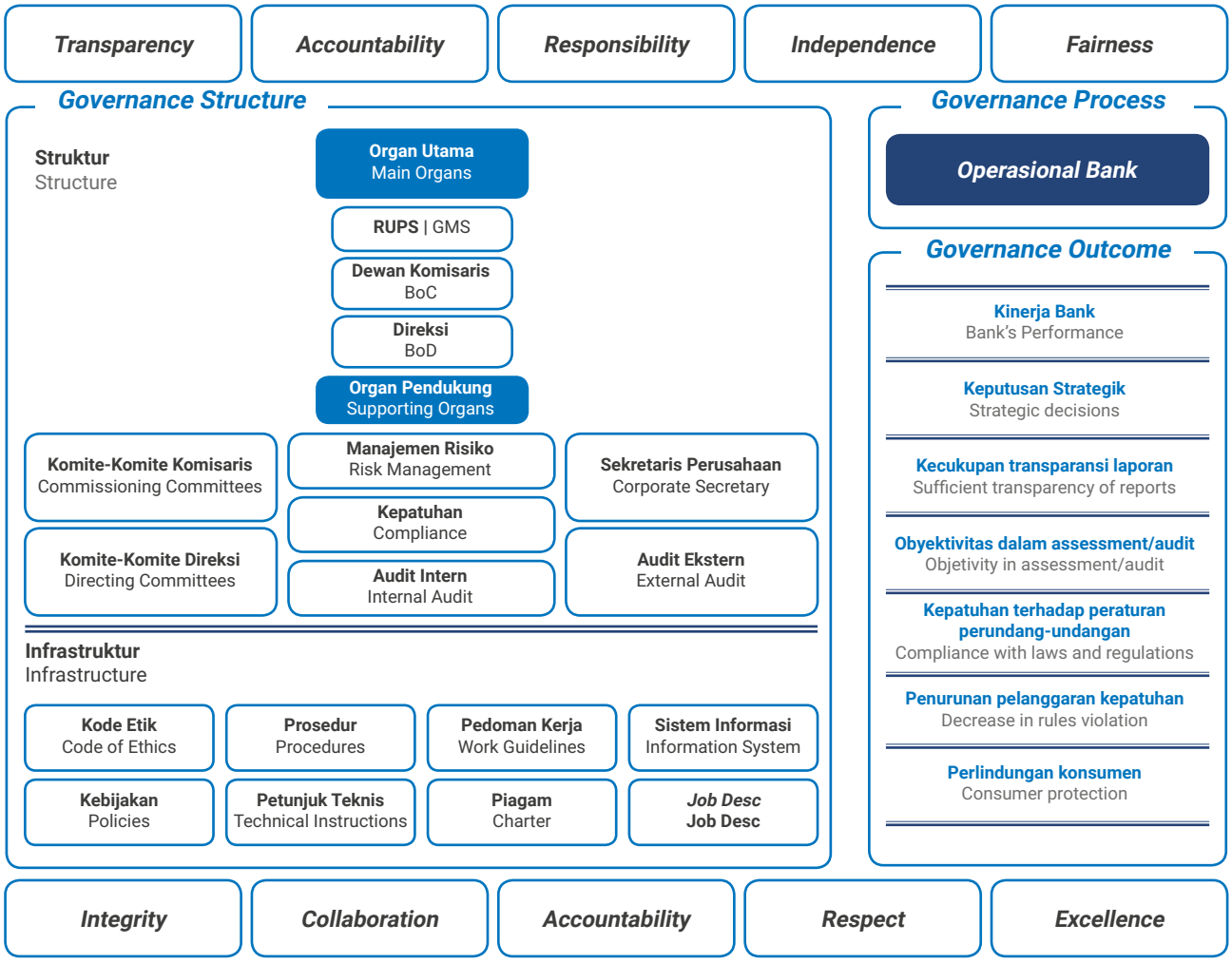

Governance Structure PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen, objektivitas dalam melakukan *assessment*/audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Self-Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.

PaninBank's Governance Structure consists of GCG structure and infrastructure. PaninBank's GCG structure consists of Main Organs and Supporting Organs. Main Organs comprise of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, while Supporting Organs consist of the Board of Commissioners Committee, the Board of Directors Committee, Corporate Secretary, Risk Management Unit, Compliance Work Unit, Internal Audit Unit (SKAI), and External Auditor. PaninBank's GCG infrastructure includes policies, guidelines, or work procedures and information system management that supports work unit operations. Main Organs and Supporting Organs of GCG must ensure the availability and readiness of infrastructure to achieve corporate plans and business plans that have been set.

The success performance of Main Organs and Supporting Organs in implementing GCG in PaninBank (Governance Process) will be measured from the Governance Outcome. A number of operational results that needs to be addressed are the adequacy of report transparency, compliance with laws and regulations, consumer protection, objectivity in conducting assessments/audits, Company performance such as profitability, efficiency, and capital, decreased number of violations as well as implementation of strategic policies taken in order to fulfill corporate plans and business.

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The governance policy is a set of rules to implement GCG in PaninBank. This policy regulates the relationship between organs so that there is a clear segregation of duties, responsibilities and authorities, in accordance with applicable laws and regulations, GCG principles, and sound business ethics. The main policies related to GCG contained in PaninBank, among others:

1. Code of Corporate Governance, which was ratified by a decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners dated June 5, 2013 and its amendments.
2. The Board of Commissioners Charter and Code of Conduct ratified by the Board of Commissioners' Decree dated June 5, 2013 and its amendments.
3. The Board of Directors Charter, which was ratified by the Board of Directors' Decree dated June 5, 2013 and its amendments.
4. Corporate Governance Self-Assessment Guidelines ratified by the Board of Directors' Decree dated June 5, 2013 and its amendments.

5. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2013 beserta perubahannya.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 7 Juli 2014 beserta perubahannya.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
9. Kebijakan Strategi *Anti-Fraud* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.
10. Pedoman *Whistle Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 30 Juli 2013 beserta perubahannya.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi tanggal 25 Juli 2013 beserta perubahannya.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 25 Juli 2013 beserta perubahannya.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 6 April 2016 beserta perubahannya.
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 26 September 2013 beserta perubahannya.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 beserta perubahannya.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Juni 2015 beserta perubahannya.

5. Conflict of Interest Management Guidelines ratified by the Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners dated October 31, 2013 and its amendments.
6. Guidelines for the Resolution of Customer Complaints which were ratified by the Board of Directors' Decree dated June 5, 2013 and its amendments.
7. Guidelines for Imposing Sanctions ratified by the Decree of the Board of Directors dated July 7, 2014 and its amendments.
8. Code of Conduct which was ratified by the Board of Directors' Decree dated June 5, 2013 and its amendments.
9. Anti-Fraud Strategy Policy that was ratified by the Board of Directors' Decree dated June 14, 2013 and its amendments.
10. Whistle Blowing Guidelines ratified by the Board of Directors' Decree dated June 14, 2013 and its amendments.
11. Guidelines for the Preparation of Bank Business Plans ratified the Board of Directors' Decree dated July 30, 2013 and its amendments.
12. Good Corporate Governance Committee Charter and Code of Conduct ratified by the Board of Directors' Decree dated July 25, 2013 and its amendments.
13. Information Technology Steering Committee Charter, which was ratified by the Board of Directors' Decree dated July 25, 2013 and its amendments.
14. Audit Committee Charter and Code of Conduct ratified by the Board of Directors' Decree dated June 5, 2013 as amended on April 6, 2016 and its amendments.
15. Guidelines for Communication Policy with External Parties ratified by the Board of Directors' Decree dated September 26, 2013 and its amendments.
16. Charter and Code of Conduct of Risk Management Committee ratified by the Board of Directors' Decree dated 27 June 2013 and its amendments.
17. Charter of the Asset and Liability Committee (ALCO) which was ratified by the Board of Directors' Decree dated June 27, 2013 as amended on June 16, 2015 and its amendments.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PaninBank saat ini telah menerapkan sebagian aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "*comply or explain*". Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan oleh PaninBank adalah sebagai berikut:

1. PaninBank telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.
2. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
3. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
4. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
5. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
6. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
7. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut PaninBank terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, PaninBank telah melakukan *self-assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE

Based on POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Governance Guidelines for Public Companies and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies, there are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) governance recommendations submitted by the Financial Services Authority (OJK). PaninBank has currently implemented some of these aspects, principles and recommendations based on the "comply or explain" approach. Some of the recommendations that have been made by PaninBank are as follows:

1. PaninBank has a method or technical procedure for voting, both openly and privately, which prioritizes the independence and interests of shareholders.
2. Summary of the GMS Minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.
3. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into consideration the conditions of the Public Company.
4. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the required diversity of expertise, knowledge and experience.
5. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into consideration the conditions of the Public Company and effective decision making.
6. Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the required diversity of expertise, knowledge and experience.
7. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.

Referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as the basis for regulations regarding the implementation of GCG, the GCG implementation adopted by PaninBank consists of 5 basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

To ensure the implementation of these 5 (five) basic principles of GCG as intended, PaninBank has conducted periodic self-assessments in accordance with regulatory provisions, namely per semester, with the following aspects of assessment:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan.

1. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors;
2. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners;
3. Completeness and Implementation of Committee Duties
4. Handling of Conflict of Interest;
5. Implementation of Compliance Function;
6. Implementation of the Internal Audit Function;
7. Implementation of the External Audit Function;
8. Implementation of Risk Management, including the Internal Control System;
9. Provision of Funds to Related Parties and Large Exposure;
10. Transparency of Bank's Financial and Non-Financial Conditions, Governance Implementation Reports and Internal reporting; and
11. The Company's Strategic Plan.

Self-Assessment Penerapan Tata Kelola

Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2020

Nama Bank : PT Bank Panin Tbk
Posisi : Semester I 2020 (Individual)

Self-Assessment of Governance Implementation

Report of Self-Assessment on GCG Implementation in 2020

The Bank's Name : PT Bank Panin Tbk
Position : Semester I 2020 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG
Results of GCG Implementation Self-Assessment

	Peringkat Rank	Definisi Peringkat Definition of Rank
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 2.10) (based on self-assessment work paper with a composite score of 2.10)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelolayang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsipTata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsipTata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Reflecting that the Bank's management has implemented GCG which is generally considered to be good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require adequate attention from the Bank's management.

Analisis

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self-assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I tahun 2020 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Structure
Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. *Governance Structure* memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan *(stakeholders)*. PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Analysis

Referring to the results of the analysis as disclosed in the self-assessment work paper on Good Corporate Governance, the implementation of Good Corporate Governance at PT Bank Panin, Tbk. For the first semester of 2020, it is generally considered good, which is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance.

Governance Structure
The governance structure and infrastructure in the Company have met the prevailing regulations. Governance Structure has an adequate relationship with the structure and infrastructure of Governance so that the process of implementing GCG principles results in an achievement in accordance with the expectations of stakeholders. PT Bank Panin, Tbk has a Governance structure consisting of the main organs, supporting organs, and GCG infrastructure.

The number, composition, criteria and independence of the PaninBank Directors have taken into account the scale and complexity of PaninBank's business. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been equipped with clear policies, guidelines and work procedures.

The number, composition, criteria and independence of the Board of Commissioners of PaninBank have taken into account the scale and complexity of PaninBank's business. Half or 50% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out in accordance with their duties and responsibilities, which are equipped with clear policies, guidelines and work procedures.

Governance Process
Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs *web* PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome
Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk Memiliki capaian yang sangat baik di 2020 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Process
The governance structure and infrastructure of PT Bank Panin, Tbk runs in accordance with its roles, duties and responsibilities to carry out an effective governance process based on GCG principles, prudential principles and the pillars of risk management implementation.

Adequacy of transparency of financial and non-financial conditions as well as adequate governance implementation reports. PaninBank has a policy regarding product information and the use of customers' personal data. PaninBank regularly announces financial and non-financial reports through print media or through the PaninBank website and submits financial and non-financial reports to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations.

Governance Outcome
The effectiveness of GCG implementation is reflected in the governance outcomes that have been obtained. PT Bank Panin, Tbk Has excellent achievements in 2020 both for operational performance and financial performance.

PaninBank also has a Business Plan prepared in accordance with PaninBank's vision and mission by taking into account macro and micro conditions, risk appetite, infrastructure, strategy and taking into account the principles of prudence and responsiveness to internal and external changes. The Business Plan and its realization have been submitted to regulators on a regular basis in accordance with applicable regulations.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2020

Nama Bank : PT Bank Panin Tbk
Posisi : Semester II 2020 (Individual)

Report of Self-Assessment on GCG Implementation in 2020

The Bank's Name : PT Bank Panin Tbk
Position : Semester II 2020 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan GCG
Results of GCG Implemetation Self-Assessment

	Peringkat Rank	Definisi Peringkat Definition of Rank
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,95) (based on the working paper of self-assessment with a composite score of 1.95)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Reflecting that the Bank's management has implemented GCG which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require adequate attention from the Bank's management.

Analisis	Analysis
Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self-assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester II tahun 2020 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.	Referring to the results of the analysis as disclosed in the self-assessment work paper on Good Corporate Governance, the implementation of Good Corporate Governance at PT Bank Panin, Tbk. for the second semester of 2020, in general it is good, which is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance.
Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. *Governance Structure* memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan *(stakeholders)*. PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.	**Governance Structure** The governance structure and infrastructure in the Company have met the prevailing regulations. Governance Structure has an adequate relationship with the structure and infrastructure of Governance so that the process of implementing GCG principles results in an achievement in accordance with the expectations of stakeholders. PT Bank Panin, Tbk has a Governance structure consisting of the main organs, supporting organs, and GCG infrastructure.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.	The number, composition, criteria and independence of the PaninBank Board of Directors have considered the scale and complexity of PaninBank's business. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been equipped with clear policies, guidelines and work procedures.
Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.	The number, composition, criteria and independence of the Board of Commissioners of PaninBank have taken into account the scale and complexity of PaninBank's business. Half or 50% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out in accordance with their duties and responsibilities, which are equipped with clear policies, guidelines and work procedures.

Governance Process
Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs *web* PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome
Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk Memiliki capaian yang sangat baik di 2020 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Process
The governance structure and infrastructure of PT Bank Panin, Tbk are in accordance with their roles, duties and responsibilities to carry out an effective governance process based on GCG principles, prudential principles and the pillars of risk management implementation.

Adequacy of transparency of financial and non-financial conditions as well as adequate governance implementation reports. PaninBank has a policy regarding product information and the use of customers' personal data. PaninBank regularly announces financial and non-financial reports through print media or through the PaninBank website and submits financial and non-financial reports to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations.

Governance Outcome
The effectiveness of GCG implementation is reflected in the governance outcome. PT Bank Panin, Tbk has excellent achievements in 2020 both for operational performance and financial performance.

PaninBank also has a Business Plan prepared in accordance with PaninBank's vision and mission by taking into account macro and micro conditions, risk appetite, infrastructure, strategy and taking into account the principles of prudence and responsiveness to internal and external changes. The Business Plan and its realization have been submitted to regulators on a regular basis in accordance with applicable regulations.

Atas hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self-assessment* 2020, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance,* yaitu *governance structure, governance process,* dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I tahun 2020 maupun pada semester II tahun 2020.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *GCG*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG,* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penilaian Eksternal/Regulator/Pengawas PaninBank atas hasil *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola (GCG)

Selain melakukan penilaian sendiri *Self-Assessment* atas penilaian penerapan GCG yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self-assessment* 2020, pihak Eksternal/Regulator/Pengawas juga melakukan penilaian berdasarkan pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus pada periode dimaksud yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank

Based on the self-assessment results conducted for the 2020 self-assessment reporting period, which are grouped into 3 (three) governance aspects, such as governance structure, governance process, and governance outcome, PaninBank obtained a ranking number that reflects the conditions of PaninBank's GCG implementation, namely rank 2 (two), both in the first half of 2020 and the second half of 2020.

The definition of rating 2 (two) indicates that the Bank's Management has implemented a decent GCG principles in general. This is reflected through the adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses in the application of GCG principles, in general these weaknesses are considered less significant and can be solved by normal actions by the Bank's management.

External Assessment/Regulator/Supervisor of PaninBank on the results of the GCG Implementation Self-Assessment

In addition to conducting Self-Assessment on the implementation of GCG that has been carried out by PaninBank for the 2020 reporting period, External Parties/ Regulators/Supervisors also conduct an assessment based on general examinations and/or specific examinations in the period concerned, in this case performed by the Financial Services Authority (OJK).

PLAN FOR IMPROVING THE QUALITY OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2021

PaninBank recognizes the importance of implementing Good Corporate Governance principles at every level of organization and aspects of the management of PaninBank's business

sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan.

Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi.

Pada dasarnya, penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard.

activities in accordance with prevailing laws and regulations, as well as generally accepted standard of practice in the banking industry. PaninBank views that the implementation of Corporate Governance improvement will be directly proportional to the improvement in the overall performance of PaninBank.

It is aligned with the Bank's strategic plan, where one of the targets is continuing the commitment to strengthen Governance and increasing the Governance implementation at all levels of the organization.

Basically, the Governance Implementation strengthening refers to regulations set forth by regulators such as Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK), and also guided by international standards in accordance with OECD principles and ASEAN CG Scorecard.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan perubahannya yaitu POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2020, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.49 s.d Selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta 10270

The GMS is the main organ of the Company that holds the highest authority and holds all authority that cannot be delegated or submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners. The GMS is a forum where shareholders exercise their rights to make important decisions as stipulated in the Articles of Association and the Prevailing Laws.

In addition, the GMS also functions as a forum in which the Board of Directors and Commissioners are accountable for the management of the company and its performance within a specified period within the limits stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association. Through the GMS, shareholders can exercise their rights, express opinions and vote equally in important decision-making processes.

Rights and Authorities of the GMS

The rights and authorities fully owned by the GMS include:

1. To approve amendments to the Articles of Association;
2. To decide the capital structure of the Company;
3. To approve the use of net income;
4. To appoint and dismiss Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. To determine the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
6. To evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The 2020 General Meeting of Shareholders

Based on Article 2 paragraph (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 and its amendments, namely POJK No. 10/POJK.04/2017 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the GMS consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS. In 2020, PaninBank held 1 (one) Annual GMS.

I. Annual General Meeting of Shareholders

A. Organizing the Annual GMS

Day/Date : Friday, June 26, 2020
Time : 10.49 until finish
Venue : Gedung Bank Panin Pusat Ground Floor Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank, serta Pengesahan Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris PaninBank dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi PaninBank untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PaninBank.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2020.
6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank
7. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PaninBank

With the Meeting Agenda as follows:

1. Approval of PaninBank Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as the Ratification of the PaninBank Financial Report for the 2019 financial year.
2. Approval of the use of PaninBank's profits for the 2019 financial year.
3. Determination of honorarium for members of the Board of Commissioners of PaninBank and Authorization to the Board of Commissioners of PaninBank to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors of PaninBank.
4. Granting power of attorney to the Board of Directors to determine the distribution of duties and powers of the members of the PaninBank Board of Directors.
5. Appointment of a Public Accountant to audit PaninBank's Financial Statements for the 2020 financial year.
6. Changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PaninBank
7. Updating of PaninBank's Recovery Plan.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

B. Pre-Implementation and Post-Implementation of Annual GMS

No.	Keterangan Information	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 OJK's Regulation No. 32/POJK.04/2014	Tanggal Date	Keterangan Note
1.	Pemberitahuan RUPS kepada OJK Dikirim melalui E - Reporting OJK	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 8 Ayat 1-3 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	12 Mei 2020	Melalui Surat No: 057/ DIR/OJK/2020
	Notification of the GMS to OJK Sent through E - Reporting OJK	POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 8 Paragraph 1-3 At the latest 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS. The agenda for the meeting as referred to must be disclosed in a clear and detailed manner. In the event that there is a change in the agenda for the meeting as referred to, the Public Company is obliged to submit the change in the agenda to the Financial Services Authority no later than the invitation for the GMS.	May 12, 2020	By Letter No: 057/DIR/ OJK/2020
2.	Pemberitahuan Rencana RUPS ke BEI dan KSEI	AD/ART PT Bank Panin Tbk. Pasal 12.6 PaninBank telah melakukan pengumuan RUPS dengan Iklan dalam surat kabar harian "Bisnis Indonesia" serta melalui: · Situs *web* Bursa Efek Indonesia · Situs *web* Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) · Situs *web* PaninBank	18 Mei 2020	Disampaikan melalui *E-Reporting* terintegrasi OJK dan BEI dan KSEI melalui Surat
	Announcement of the GMS Plan to the IDX and KSEI	Articles of Association of PT Bank Panin Tbk. Article 12.6 PaninBank has announced the GMS with advertisements in the daily newspaper "Bisnis Indonesia" and through: • Indonesia Stock Exchange website • Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website • PaninBank website	May 18, 2020	Delivered through integrated E-Reporting OJK and BEI and KSEI

No.	Keterangan Information	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 OJK's Regulation No. 32/POJK.04/2014	Tanggal Date	Keterangan Note
3.	Iklan Pemberitahuan RUPS	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs *web* Bursa Efek; c. situs *web* Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.	19 Mei 2020	Pengumuman melalui Iklan dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia, terbit pada tanggal 19 Mei 2020, situs *web* Bursa Efek ; dan, situs *web* Perseroan, keduanya pada tanggal 19 Mei 2020
	GMS Notification Advertisement	POJK No 32/POJK.04/2014 Article 10 Paragraph 2 and 4 No later than 14 (fourteen) days prior to the invitation to the GMS, excluding the date of announcement and the date of the summons through: a. 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation; b. Stock Exchange website; c. the website of the Public Company, in Indonesian and foreign languages. POJK No 32/POJK.04/2014 Article 10 Paragraph 3 It is obligatory to inform that the Public Company held a GMS because of a request from the shareholders if the GMS was held at the request of the shareholders.	May 19, 2020	Announcement was made through advertisement in the Harian Bisnis Indonesia, published on 19 May 2020, on the website of the Stock Exchange; and, the Company's website, both on 19 May 2020
4.	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 8 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.	19 Mei 2020	Dikirim melalui *E-Reporting* terintegrasi OJK dan BEI
	Submission of Notification Advertisement Proof to OJK and IDX	POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 10 Paragraph 8 No later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS. POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 10 Paragraph 9 In the event that the GMS is held at the request of the shareholders, the submission of evidence of the announcement of the GMS as referred to in paragraph (8) shall also be accompanied by a copy of the letter of request for holding the GMS.	May 19, 2020	Sent through integrated E-Reporting of OJK and IDX
5.	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.	03 Juni 2020	Diungkapkan di dalam Iklan Pemberitahuan RUPS
	Recording Date List of Shareholders entitled to attend the GMS	POJK No 32/POJK.04/2014 Article 19 Paragraph 2 1 (one) working day prior to the invitation to the GMS.	June 3, 2020	Disclosed in Advertisement of GMS Notification
6.	Iklan Penggilan RUPS	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs *web* Bursa Efek; c. situs *web* Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a. di situs *web* Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf "a" namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.	4 Juni 2020	Harian Bisnis Indonesia serta melalui; · Situs *Web* Bursa Efek Indonesia · Situs *Web* Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) · Situs *Web* PaninBank

No.	Keterangan Information	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 OJK's Regulation No. 32/POJK.04/2014	Tanggal Date	Keterangan Note
	GMS Summon Ad	POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 13 Paragraph 1 and 3 At the latest 21 (twenty one) days before the GMS, excluding the date of the summons and date of the GMS through: a. 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation; b. Stock Exchange website; c. Website of the Public Company, in Indonesian and foreign languages. Curriculum vitae of the candidates for the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who will be appointed must be available: a. On the website of the Public Company at least since the time of the invitation until the GMS is held; or b. At a time other than the time set forth in letter "a" but no later than the time the GMS is held, as long as it is regulated in the laws and regulations.	June 4, 2020	Bisnis Indonesia and through: • Indonesia Stock Exchange Website • Website of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) • PaninBank Website
7.	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 13 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.	04 Juni 2020	Dikirim melalui *E-Reporting* terintegrasi OJK dan BEI
	Submitting of GMS Summon Ad Proof to OJK and IDX	POJK No 32/POJK.04/2014 Article 13 Paragraph 7 No later than 2 (two) working days after the invitation to the GMS.	June 4, 2020	Sent through integrated E-Reporting OJK and IDX
8.	Pelaksanaan RUPS Jum'at, 26 Juni 2020 Pkl. 10.45 WIB Bertempat di Gedung PaninBank Pusat Lantai Dasar Jalan Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 26 Ayat 1.a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar	26 Juni 2020	
	Implementation of the GMS Friday, June 26, 2020 Time 10.45 WIB Venue at PaninBank Building, Ground Floor Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta June 26, 2020	POJK No 32/POJK.04/2014 Article 26 Paragraph 1.a A GMS can be held if at the GMS more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented, unless the Law and/or articles of association of a Public Company stipulate a larger quorum.	June 26, 2020	
9.	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs *web* Bursa Efek; c. situs *web* Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing	30 Juni 2020	Dikirim melalui *E-Reporting* terintegrasi OJK dan BEI
	Submission of GMS Results to OJK & IDX	POJK No 32/POJK.04/2014 Article 34 Paragraph 2 and 6 At the latest 2 (two) working days after the GMS is held through: a. 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation; b. Stock Exchange website; c. Website of the Public Company, in Indonesian and foreign languages	June 30, 2020	Sent through integrated E-Reporting OJK and IDX
10.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs *web* Bursa Efek; dan c. situs *web* Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing	30 Juni 2020	Surat kabar Harian Bisnis Indonesia
	Announcement of Resolution of General Meeting of Shareholders	POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 34 Paragraph 2 and 6 At the latest 2 (two) working days after the GMS is held through: a. 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation; b. Stock Exchange website; and c. Website of the Public Company, in Indonesian and foreign languages	June 30, 2020	Bisnis Indonesia Daily newspaper

No.	Keterangan Information	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 OJK's Regulation No. 32/POJK.04/2014	Tanggal Date	Keterangan Note
11.	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI Submission of Proof of GMS Results to OJK and IDX	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. POJK No. 32/POJK.04/2014 Article 34 Paragraph 7 No later than 2 (two) working days after being announced.	30 Juni 2020 June 30, 2020	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI Sent through integrated E-Reporting OJK and IDX
12.	Risalah RUPS Minutes of the GMS	POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. POJK N.o 32/POJK.04/2014 Article 33 (1) Minutes of the GMS must be submitted to the Financial Services Authority no later than 30 (thirty) days after the GMS is held. (2) In the event that the time for submitting the minutes of the GMS as referred to in paragraph (1) falls on a holiday, the minutes of the GMS must be submitted no later than the following working day.	24 Juli 2020 July 24, 2020	Dikirim melalui surat ke OJK Sent by mail to OJK

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

C. Table of Attendance at the Annual GMS

The Annual GMS is attended by the following members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners		Direksi | Board of Directors	
Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur President Director
Drs. H. Riyanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director
Chandra R. Gunawan	Komisaris Commissioner	Lionto Gunawan	Direktur Director
		H. Ahmad Hidayat	Direktur Director
Shareholders Pemegang Saham			
Agus Purwadi	PT Panin Financial	Kuasa Proxy	
Kevin Edwuard Matindas	Votraint	Kuasa Proxy	
Rosi Eka Setianingsih	Masyarakat	Reperesentatif e-Proxy KSEI KSEI e-Proxy Representative	

D. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Fatiah Helmi, SH., perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik.

Rapat tersebut dihadiri oleh 22.151.903.860 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,987% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

D. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Audit Committee

Shareholders who are entitled to attend are those registered in the PaninBank Shareholders Register. The Annual GMS is attended by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and all members of the Audit Committee. In addition, the Annual General Meeting of Shareholders was also attended by Notary Fatiah Helmi, SH., A representative of the Securities Administration Bureau and Public Accountant.

The meeting was attended by 22,151,903,860 shares, which have valid voting rights or equal to 91.987% of the total shares with valid voting rights issued by PaninBank.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapinya. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

E. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions

After finishing discussing the Agenda of the Meeting, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their Proxies to ask questions, and/or opinions in writing by raising their hands and the Chairperson of the Meeting will provide opportunities for Shareholders to submit their questions and/or opinions beginning with mentioning the name and number of shares owned or represented or by filling in the questionnaire to be distributed, then the question sheet will be taken by the Officer, to then be submitted to the Chair of the Meeting The Chairperson of the Meeting will read out the questions and will then answer or respond to them. The questions that will be answered are questions that are directly related to the Agenda of the Meeting.

F. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs *Web* PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka

F. Mechanisms for Voting, Vote Counting and Vote Counting in GMS Decision Making

The decision-making mechanism and procedures for voting and counting votes are regulated in the GMS rules which are disclosed on the PaninBank website and read out by the Chairman of the Meeting at the beginning of the GMS. Each Shareholder or Shareholder Proxy has the right to ask questions and/or submit opinions that are submitted in writing to the Chairperson of the meeting before voting is held for each meeting agenda. In the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 and/or the Company's Articles of Association, vote counting, 1 (one) share gives the holder the right to cast 1 (one) vote, if a shareholder has more than 1 (one) share, the person concerned is asked to vote 1 (once) and the vote represents the total number of shares it owns. Decision-making will be made after all the questions have been answered and/or the question and answer time is over and carried out by deliberation to reach a consensus. If there are no Shareholders/Proxies who disagree, abstain/form raises their hands at this stage, then the decision can be concluded as approved by deliberation and consensus and if there are Shareholders/Proxies who disagree, abstain/raise their hands at that stage, then Meeting decisions will be taken by voting and the Notary will report on the number of votes that do

keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

not agree and abstain/blank. The notary will carry out the calculation and report the results of the voting, in accordance with the provisions of PaninBank's articles of association and submit it to the Chairperson of the Meeting.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

G. Annual GMS Resolution and its Realization

Mata Acara Pertama Agenda 1	**Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank, serta Pengesahan Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2019** Approval of the PaninBank Annual Report and the Supervisory Report of the PaninBank Board of Commissioners, as well as the Ratification of the PaninBank Financial Report for the 2019 Financial Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Raise Question	1 (satu)		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	99,383%	0,615%	0,001%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (m*ember of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00036/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama PaninBank ("Laporan Keuangan") serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan. 2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan PaninBank. 1. To approve PaninBank's Annual Report regarding the state and operation of PaninBank's business activities, which includes, among other things, PaninBank's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019 which was audited by the Public Accountant Firm Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) as it turns out from Letter Number: 00036/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/II/2020 dated February 25, 2020, with a fair opinion in all material matters, which includes business activities that are derivatives of activities the main business of PaninBank ("Financial Report") as well as reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners and ratifying the Financial Statements. 2. Approve the Annual Report and the ratification of the Financial Statements including the PaninBank Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ended December 31, 2019, thus providing full release and settlement (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners PaninBank for their management and supervisory actions for the financial year ended December 31, 2019 as long as these management and supervisory actions are reflected in the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation and/or in the PaninBank		
Realisasi | Realization	2020		

Mata Acara Ke-dua Agenda 2	**Persetujuan atas penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku 2019** Approval of the use of PaninBank's profits for the 2019 financial year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Raise Question	1 (satu) 1 (one)		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	99,426%	0,572%	0,001%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2019 berupa laba bersih sebesar Rp3.065.171.250.711,14 seluruhnya akan dihgunakan untuk memperkuat modal inti PaninBank dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan Approved the use of net profit for the financial year 2019 amounting to Rp3,065,171,250,711.14, entirely to strengthen PaninBank's core capital for future business growth and recorded as Retained Profit		
Realisasi | Realization	2020		

Mata Acara Ke-tiga Agenda 3	**Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan** Determination of the honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and Authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Raise Question	1 (satu) 1 (One)		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	99,426%	0,572%	0,001%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 sebesar Rp3.769.000.000,-. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota DireksiPaninBank untuk tahun buku 2020. 3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian. 1. Approved the total honorarium for the Board of Commissioners for the 2020 financial year amounting to Rp3,769,000,000. 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of PaninBank to determine the amount of salary and allowances for the members of the PaninBank Board of Directors for the 2020 financial year. 3. Perform any and all other actions required for the above purpose without any exceptions.		
Realisasi | Realization	2020		

Mata Acara Ke-empat Agenda 4	**Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan** Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the distribution of duties and authorities of the members of the Board of Directors of the Company		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Raise Question	Nihil Nil		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	99,428%	0,572%	-
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi PaninBank untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PaninBank 2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian 1. Approved to authorize the PaninBank Board of Directors to determine the division of duties and powers of the PaninBank Board of Directors 2. Perform any and all other actions required for the above purpose without any exceptions		
Realisasi | Realization	2020		

Mata Acara Ke-lima Agenda 5	**Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2020** Appointment of a Public Accountant to audit PaninBank's Financial Statements for the 2020 financial year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Raise Question	Nihil Nil		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	99,374%	0,572%	0,054%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Elisabeth Imelda & Rekan (m*ember of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan ijin yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Adapun Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sebagai berikut: - Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PaninBank. - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka. - Independen. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.		

Mata Acara Ke-lima Agenda 5	**Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2020** Appointment of a Public Accountant to audit PaninBank's Financial Statements for the 2020 financial year
	1. Approved to appoint a Public Accountant Firm Elisabeth Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) with a registered license with the Financial Services Authority (OJK) which will audit the Financial Statements for the 2020 financial year by taking into account the recommendations of the Audit Committee regarding the selection of Public Accountants and Public Accountant Office to the Board of Commissioners with due observance of the recommendations of the Audit Committee regarding the selection of Public Accountants and Public Accounting Firms. The criteria or limits for a Public Accountant who can be appointed are as follows: - Have competence in accordance with the complexity of PaninBank's business. - Has a reputation as a Public Accounting Firm that has experience in providing audit services for the Annual Financial Statements of Public Companies. - Independent. 2. Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of PaninBank to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm and Public Accountant Firm by taking into account the recommendations of the Audit Committee. 3. In the event that the appointed Public Accountant and Public Accountant Firm for some reason cannot carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and other Public Accountant Firm that has experience in banking audits and is affiliated with a recognized International Public Accountant and registered with OJK.
Realisasi | Realization	2020

Mata Acara Ke-enam Agenda 6	**Perubahan Dewan Komisaris Perseroan** Change of the Company's Board of Commissioners		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Raise Question	Nihil Nil		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	98,009%	0,572%	1,418%
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menerima Pengunduran Diri: a Wanita Roosniati Salihin selaku Wakil Presiden Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020 b Tuan H. Ahmad Hidayat selaku Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020 Terhitung sejak ditutupnya Rapat 2. Mengangkat Tuan Haryono Wongsonegoro* dan Nyonya Marlina Gunawan* selaku Direktur Perseroan. 3. Mengangkat: a Tuan Nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen* b Tuan Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen c Tuan Johnny selaku Wakil Presiden Komisaris* d Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris* e Tuan Gregory James Terry selaku Komisaris* f Tuan Drs. H. Riyanto selaku Komisaris Independen *) efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK Susunan pengurus Direksi sesuai dengan Surat OJK No S-I/PB.33/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BankPanin Tbk. menjadi sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur : Herwidayatmo Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra Direktur : Edy Haryanto Direktur : Januar Hardi Direktur : Haryono Wongsonegoro Direktur : Gunawan Santoso Direktur : Ng Kean Yik Direktur : Suwito Tjokrorahardjo Direktur : Lionto Gunawan Direktur : Antonius Ketut Dwirianto Komisaris: Presiden Komisaris (Independen) : Nelson Tampubolon Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Lintang Nugroho Komisaris (Independen) : Drs.H.Riyanto Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan Komisaris : Johnny Komisaris : Gregory James Terry 4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak subtitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi PaninBank tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas		

Mata Acara Ke-enam Agenda 6	**Perubahan Dewan Komisaris Perseroan** Change of the Company's Board of Commissioners
	1. Accept Resignation: a. Mrs. Roosniati Salihin as Deputy President Director with a letter dated June 23, 2020 b. Mr. H. Ahmad Hidayat as Director with a letter dated June 23, 2020 Starting from the closing of the Meeting 2. To appoint Mr. Haryono Wongsonegoro * and Mrs. Marlina Gunawan * as Directors of the Company. 3. Appoint: a. Mr. Nelson Tampubolon as President Commissioner/Independent Commissioner * b. Tuan Lintang Nugroho as Vice President Commissioner/Independent Commissioner c. Mr. Johnny as Vice President Commissioner * d. Mr. Chandra Rahardja Gunawan as Vice President Commissioner * e. Mr. Gregory James Terry as Commissioner * f. Mr. Drs. H. Riyanto as Independent Commissioner *) Effective after obtaining approval from OJK The composition of the Board of Directors in accordance with OJK Letter No. S-I/PB.33/2021 dated January 8, 2021 regarding the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT BankPanin Tbk. to be as follows: Board of Directors: President Director: Herwidayatmo Deputy President Director: Hendrawan Danusaputra Director: Edy Haryanto Director: Januar Hardi Director: Haryono Wongsonegoro Director: Gunawan Santoso Director: Ng Kean Yik Director: Suwito Tjokrorahardjo Director: Lionto Gunawan Director: Antonius Ketut Dwirianto Board of Commissioners: President Commissioner (Independent): Nelson Tampubolon Vice President Commissioner (Independent): Lintang Nugroho Commissioner (Independent): Drs. H.Riyanto Commissioner: Chandra Rahardja Gunawan Commissioner: Johnny Commissioner: Gregory James Terry 4. Agree to give full authority and power with substitution rights to each member of the Board of Directors of PaninBank either individually or collectively to take all necessary actions related to decisions as taken and/or decided in this Meeting, including but not limited to declaring changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of PaninBank in the notary deed, and manages the receipt of notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as taking all necessary actions in connection with the aforementioned decision.
Realisasi | Realization	2020

Mata Acara Ke-tujuh Agenda 7	**Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan)** Approval for the Update of the Action Plan (Recovery Plan)		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya **Number of Shareholders Who Raise Question**	Nihil Nil		
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	Setuju | In Favour	Abstain | Abstain	Tidak Setuju | Against
	99,428%	0,572%	-
Keputusan Rapat **Meeting Resolutions**	Sehubungan dengen penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan melalui suat No. SR-32/D.03/2016 tanggal 11 Februari 2016 juncto SR-33/PB.33/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penetapan Status Systematical Importan Bank (SIB) dan Kewajiban Pemenuhan *Capital Surcharge* kepada PaninBank dan adanya kewajiban untuk melakukan pengkinian *Recovery Plan* minimal 1 (satu) kali dalam setahun; - Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan PaninBank sesuai dengan Lampiran akta Beritas Acara Rapat ini In connection with the stipulation of the Financial Services Authority (OJK) which was conveyed through No. SR-32/D.03/2016 dated February 11, 2016 juncto SR-33/PB.33/2020 dated May 11, 2020 concerning Determination of the Systematical Importance Status of the Bank (SIB) and the Capital Surcharge Fulfillment Obligation to PaninBank and the obligation to update Recovery Plan at least 1 (one) time a year; - Approved the Update on the Action Plan (PaninBank Recovery Plan) in accordance with the Attachment to the Deed of the Meeting Agenda		
Realisasi | Realization	2020		

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2020

Setelah berakhirnya tahun buku 2020, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat-lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

GMS held after the end of the 2020 financial year

After the end of the 2020 financial year, and during the process of preparing this Report, PaninBank has not yet held another General Meeting of Shareholders. PaninBank will continue to pay attention to the provisions related to the procurement of a General Meeting of Shareholders, where the annual GMS will be held no later than 6 (six) months after the end of the financial year.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Pada tahun 2020 PaninBank mengadakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 Juni 2020. Seluruh agenda pada RUPS Tahunan tersebut telah terelasisasi sehingga tidak ada resolusi tertunda dalam RUPS Tahunan 2020.

Delayed Resolution in GMS

In 2020 PaninBank held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020. All agendas at the Annual GMS have been clarified so that there is no resolution pending at the 2020 Annual GMS.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Realisasinya

I. RUPS Tahunan Tanggal 19 Juni 2019

Previous Year GMS Resolutions and Its Realization

I. Annual GMS on June 19, 2019

Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan RUPS 2019 2019 GMS Results	Status	
		Terealisasi Realized	Belum Terealisasi (Alasan) Not yet (Reason)
Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor : 00025/2.1097/AU.1/07/0558/2/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan. 2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.	Ya	
First	1. Approved the Company's Annual Report regarding the condition and the course of the Company's business activities, which includes, among other things, the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2018 which has been audited by the Public Accountant Firm Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) as it turns out from Letter Number: 00025/2.1097/AU.1/07/0558/2/1/II/2019 dated February 15, 2019, with a Fair opinion in all material matters, which includes business activities which are derivatives of the main business activities of the Company ("Financial Statements") as well as reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners and ratifying the Financial Statements. 2. Approved the Annual Report and ratified the Financial Statements including the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation of the Company for the financial year ended December 31, 2018, thus providing full release and settlement (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Company for management and supervisory actions that they have carried out for the financial year ended on December 31, 2018 as long as these management and supervisory actions are reflected in the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation of the Company and/or in the Annual Report.	Yes	
Ke dua	Tidak menyetujui pembagian Dividen sebesar Rp10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp240.876.459.980,- , Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp3.035.660.513.270,- akan dicatat sebagai laba yang ditahan.	Ya	
Second	Do not approve the distribution of dividends amounting to Rp10,- per share or a total of Rp240,876,459,980,-, so that the entire net profit for the 2018 financial year amounting to Rp3,035,660,513,270,- will be recorded as retained earnings.	Yes	

Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan RUPS 2019 2019 GMS Results	Status	
		Terealisasi Realized	Belum Terealisasi (Alasan) Not yet (Reason)
Ke tiga	1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi PaninBank terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur : Herwidayatmo Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra Direktur : Lionto Gunawan Direktur : Gunawan Santoso Direktur : Ng Kean Yik Direktur : Edy Heryanto Direktur : Januar Hardi Direktur : Antonius Ketut Dwirianto Direktur : Suwito Tjokrorahardjo Direktur : H. Ahmad Hidayat 2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris PaninBank terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Johnny Wakil Presiden Komisaris Independen : Lintang Nugroho Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan *) Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto Komisaris : Lianna Loren Limanto *) Pengangkatan saudara Chandra Rahardja Gunawan sebagai Komisaris Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak subtitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PaninBank tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Ya	
Third	1. Approved the appointment of PaninBank's Board of Directors members from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders as follows: Board of Directors: President Director : Herwidayatmo Deputy President Director : Roosniati Salihin Deputy President Director : Hendrawan Danusaputra Director : Lionto Gunawan Director : Gunawan Santoso Director : Ng Kean Yik Director : Edy Heryanto Director : Januar Hardi Director : Antonius Ketut Dwirianto Director : Suwito Tjokrorahardjo Director : H. Ahmad Hidayat 2. Approved to appoint members of the PaninBank Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders, as follows: Dewan Komisaris: President Commissioner : Johnny Vice President Commissioner : Lintang Nugroho Independent Commissioner : Chandra Rahardja Gunawan *) Independent Commissioner : Drs.H.Riyanto Commissioner : Lianna Loren Limanto *) The appointment of Chandra Rahardja Gunawan as Commissioner of the Company is effective after obtaining approval from the OJK. 3. Approved to grant full authority and power with substitution rights to each member of the Board of Directors of PaninBank either individually or collectively to take all necessary actions related to decisions as taken and/or decided in this Meeting, including but not limited to declare the appointment of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of PaninBank in the notarial deed, notifying the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PaninBank as mentioned above in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations	Yes	

Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan RUPS 2019 2019 GMS Results	Status	
		Terealisasi Realized	Belum Terealisasi (Alasan) Not yet (Reason)
Ke empat	1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar Rp5.993.000.000,-. dan Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019. 2. Menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.	Ya	
Fourth	1. Approved the total honorarium for the Board of Commissioners for the 2019 financial year amounting to Rp5,993,000,000 and Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries and allowances of the members of the Board of Directors of the Company for the 2019 financial year. 2. Agree to take any and all other actions necessary for the above purpose without any exceptions.	Yes	
Ke lima	Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan.	Ya	
Fifth	Approved to give the authority to the Board of Directors of the Company to determine the distribution of duties and authorities of the members of the Board of Directors of the Company and to carry out any and all other necessary actions.	Yes	
Ke enam	1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan ijin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), Akuntan Publik tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta membuat syarat dan ketentuan yang berlaku. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK	Ya	
Sixth	1. Approved to appoint the Satrio Bing Eny & Rekan Public Accountant Firm (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) with a license registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2019, and therefore until now the Board The Commissioner has not been able to determine the name of the Public Accountant, so agreed to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant from the Public Accountant Firm Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) who will audit PaninBank's Financial Statements for the 2019 financial year (Two Thousand Nineteen), the Public Accountant must have a license registered with the OJK and have the competence according to the complexity of the business, as well as make terms and conditions that apply. 2. Approved to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm by taking into account the recommendations of the Audit Committee. 3. Approved that in the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm for some reason cannot carry out their duties, authorizes the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and other Public Accountant Firm that has experience in banking audits and is affiliated with a recognized International Public Accountant and registered with the OJK	Yes	

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank;

Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;

The Board of Commissioners is the Company's main organ that accountable for supervising the Company's policies and providing advice to the Board of Directors. Other duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners are as stipulated in the provisions of legislation, such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Banking, the Financial Services Authority's Regulations, Bank Indonesia's Regulations, and PaninBank's Articles of Association.

The Board of Commissioners is also responsible for monitoring some Bank's policies regarding the Bank's operations in general that refer to the implementation of business strategies and plans that have been approved by the Board of Commissioners, and ensuring compliance with all applicable laws and regulations. In fulfilling its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall act independently.

Legal Basis

Legal basis uses as the reference for the establishment and appointment of the Board of Directors of PaninBank refers to several provisions, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Companies and Banking
2. OJK Regulations, BI Regulations, OJK Circular Letters and BI Circular Letters related to the Implementation and Organs of Corporate Governance;
3. The Bank's Articles of Association.

Collective Duties and Responsibilities by all Members of the Board of Commissioners

1. Assure that the Bank has considered the interests of Shareholders, Customers, and other Stakeholders in the decision-making process;
2. Ensure that the committees established have carried out their duties and responsibilities effectively;
3. Perform duties specifically given to them according to the Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or the resolutions of the GMS;

4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;
9. Meningkatkan kompetensi dan dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;
10. Menetapkan kriteria *Self-Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut;
    a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
    b. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
    c. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
    d. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
    e. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut;
        i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;

4. Review the Board of Directors' proposals for the Corporate Plan, Business Plan, and Annual Budget of the Bank;
5. Follow the development of the Bank's activities and immediately report to the GMS if the Bank shows significant setback symptoms accompanied by suggestions regarding corrective steps to be taken;
6. Participate in meetings or discussions related to the Bank's well-being and management of assets and liabilities without being involved in decision making or influencing the Management's decisions;
7. Give approval for the management of reserve funds by the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations and Articles of Association;
8. Provide written approval or related letters of agreement for actions taken by the Board of Directors that exceed authority;
9. Increase competence and knowledge on an ongoing basis, including taking part in trainings;
10. Establish the criteria of Self-Assessment and Key Performance Indicators (KPI) for the Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors;
11. Conduct evaluation and periodic assessment on the performance of the Board of Directors and Committees under the Board of Commissioners;
12. Review the accountability reports of each of the Board of Commissioners' Committees;
13. Review the Annual Report prepared by the Board of Directors as well as sign the report before it is submitted to the GMS, especially the required disclosures;
14. Perform information disclosure in accordance with Bank Indonesia's regulations and applicable Capital Market regulations, as follows:
    a. Share ownership that reaches 5% (five percent) or more of paid-up capital in PaninBank and other companies domiciled in the Republic of Indonesia and abroad;
    b. Financial, management, ownership, and family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Shareholders;
    c. Whether there is any conflict of interest and intervention of the Bank's owner in carrying out supervision;
    d. Remuneration and other facilities received from the Bank;
    e. Share ownership option that includes information as follows:
        i. Share option allocation policy;

ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan
vi. Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option.*

15. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
16. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
17. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan *anti-fraud*.

Tugas dan Kewenangan Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PaninBank berikut perubahan-perubahannya, wewenang yang diberikan oleh RUPS, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut;

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. Pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat gabungan dengan Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai;
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keuangan perbankan dan/atau;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapast membahayakan kelangsungan usaha bank.

   Pelaporan sebagaimana maksud di atas dilakukan apabila temuan tersebut belum dan atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

ii. The number of shares previously owned by each member of the Board of Commissioners before accepting the share option;
iii. The number of shares options given;
iv. The number of shares options that have been executed until the end of the reporting period;
v. The price of the share option given; and
vi. The period of validity of shares option execution.

15. Approve risk management policies, including Risk Management strategy and framework determined in accordance with the level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance.
16. Evaluate the requests of the Board of Directors related to transactions that require the supervision of the Board of Commissioners;
17. Assure that the Board of Directors have sought to foster a culture of risk management, compliance, internal control, and anti-fraud;

Duties and Authorities of Members of the Board of Commissioners

The Duties and Authorities of the Board of Commissioners based on the Articles of Association of PaninBank and its amendments, the powers granted by the GMS, the provisions of the Financial Services Authority and other provisions are as follows;

1. The Board of Commissioners has the main duty and authority to supervise the implementation of duties and responsibilities as well as the implementation of the authority of the Board of Directors in managing the bank without having to be involved in making decisions on the Bank operational activities;
2. Provide recommendations to the Board of Directors in carrying out the management of the Bank. Supervision and preparation of recommendations for the Board of Directors can be carried out by means of a meeting of the Board of Commissioners or in a joint meeting with the Board of Directors;
3. The Board of Commissioners must report the results of its supervision to the Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days from the discovery if the supervision is found;
   a. Violation of laws and regulations in banking finance and/or;
   b. Conditions or estimated circumstances that could endanger the continuity of the bank's business.

   The aforementioned reporting is carried out if the findings have not been and/or are not reported to the Financial Services Authority by the Bank and/or the Director in charge of the Compliance function;

4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali;
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum;
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Uraian Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat/arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan;
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir 4 Maret 2019). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan
   Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

4. The Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions regarding the Bank's operational activities, except;
   a. Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia provisions concerning the Legal Lending Limit (LLL) for Commercial Banks;
   b. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.
5. Organizing and attending meetings and making decisions as stipulated in the Articles of Association and the Board of Commissioners' Charter.

Description of the Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Supervise and ensure the implementation of Good Corporate Governance in all bank business activities at all levels or levels of the organization;
2. Supervise the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice/direction to all Directors;
3. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies;
4. Not involved in making decisions on bank operational activities, except for provision of funds to related parties or provision of credit exceeding the stipulated amount as well as other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and/or applicable laws, in the context of carrying out duties and supervision;
5. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners establishes the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Charter of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has a Charter (last revision on March 14, 2019). The following are objectives and scope of the Board of Commissioners Charter:

1. Objectives
   Serves as a guideline for the Board of Commissioners while carrying out their duties and responsibilities. In addition, the guidelines can also serve as a basis for evaluating the performance of the Board of Commissioners.

2. Ruang Lingkup
   Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 4 Maret 2019) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Posisi akhir Desember 2020, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yaitu Presiden dan Wakil Presiden Komisaris (keduanya Independen), Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris (termasuk 1 (satu) orang Komisaris yang telah disetujui oleh OJK namun berlaku efektif setelah RUPS berikutnya). Sebelumnya Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Wakil Presiden Komisaris (Independen), Komisaris Independen dan 2 (dua) Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.
3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test,* namun 1 Komisaris masih memerlukan persetujuan RUPS.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

2. Scope
   The Board of Commissioners Charter (revision on March 4, 2019) include Organization (number, composition, criteria, appointment, and term of office), Duties, Responsibilities, and Authority, Meeting Arrangements, Performance Assessment and Ethical Standards.

Number and Composition of Members of the Board of Commissioners

1. By the end of December 2020, there are 6 (six) members of the Board of Commissioners, namely President Commissioner and Vice President Commissioner (both are Independent), Independent Commissioner, and 3 (three) Commissioners (including 1 (one) Commissioner who has been approved by OJK, but applies effective after the next GMS). Previously, the Board of Commissioners consisted of 4 (four) people consisting of Vice President Commissioner (Independent), Independent Commissioner, and 2 (two) Commissioners.
2. The composition of the Board of Commissioners has complied with GCG which stipulates that the number of members of the Board of Commissioners shall at least 3 (three) people and maximum number of members of the Board of Directors, and shall at least 50% (fifty percent) are Independent Commissioners.
3. Six members of the Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners and have passed the Fit & Proper Test, however 1 Commissioner still need the GMS approval.

Fit and Proper Test Assessment

Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions states that prospective members of the Board of Commissioners must obtain approval from the OJK before conducting their actions, duties and functions as Board of Commissioners.

Members of the Board of Commissioners who have passed the fit and proper test without notes and have received approval from the OJK, indicate that each member of the Board of Commissioners has adequate integrity, competence, and financial reputation.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank Awal Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of PaninBank's Board of Commissioners in early 2020 were as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office	Domisili Domicile
1.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen) Vice President Commissioner (Independent)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014 The Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 2, 2014	2014 sampai dengan saat ini 2014 - present	Indonesia
2	Chandra R. Gunawan	Komisaris Commissioner	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Mei 2015 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2015	2015 sampai dengan saat ini 2015 - present	Indonesia
3	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004 Annual General Meeting of Shareholders on June 22, 2004	2004 sampai dengan saat ini 2004 - present	Indonesia
4	Lianna Loren Limanto*)	Komisaris Commissioner	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018. Annual General Meeting of Shareholders on May 21, 2018	2014 sampai dengan akhir 2020 2014 – end of 2000	Indonesia

*) Tidak lagi menjabat sejak RUPS 26 Juni 2020 | Ceased off since the General Meeting of Shareholders on June 26, 2020

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank Akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of PaninBank's Board of Commissioners at the end of 2020 is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office	Domisili Domicile
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020. Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020	2020 sampai dengan saat ini 2020 - present	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen) Vice President Commissioner (Independent)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020. Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020	2014 sampai dengan saat ini 2014 - present	Indonesia
3	Chandra R. Gunawan	Komisaris Commissioner	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2019. Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2019	2019 sampai dengan saat ini 2019 - present	Indonesia
4	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018. Annual General Meeting of Shareholders on May 21, 2018	2004 sampai dengan saat ini 2004 - present	Indonesia
5	Johnny *)	Komisaris Commissioner	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020. Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020	2020 sampai dengan saat ini 2020 - present	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris Commissioner	Rapat Umum Pemegang Saham 26 Juni 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020	2020 sampai dengan saat ini 2020 - present	Australia

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya | Effective after obtaining approval from the next GMS

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Pengalaman Kerja Work Experience
Nelson Tampubolon • Kewarganegaraan: WNI • Domisili: Jakarta • Balige, 12 Januari 1954 (67 Tahun) • Pendidikan: - Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan - Arthur D. Little Management Institute, Boston • Citizenship: Indonesian • Domicile: Jakarta • Balige, January 12, 1954 (67 Years old) • Education: - Faculty of Economics, Parahyangan University - Arthur D. Little Management Institute, Boston	Presiden Komisaris Independen sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin tanggal 26 Juni 2020. President Commissioner (Independent) pursuant to PaninBank's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 26, 2020.	• Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisioner *ex officio* OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia • President Commissioner of PT MNC Kapital Indonesia (2018 - 2019) • Member of the Financial Services Authority Commissioner Board • Ex-officio Board of Commissioners Member OJK at the Deposit Insurance Corporation • Director of the International Directorate, Bank Indonesia
Chandra R. Gunawan • Kewarganegaraan: WNI • Domisili: Jakarta • Jember, 05 Februari 1959 (62 Tahun) • Pendidikan: Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat • Citizenship: Indonesian • Domicile: Jakarta • Jember, February 5, 1959 (62 Years old) • Education: Business Administration, University of San Francisco, United States of America	Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin tanggal 21 Mei 2018. Commissioner pursuant to PT Bank Panin Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 21, 2018.	• Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank • Commissioner of PaninBank • Deputy President Director of PaninBank • Vice President of Chase Manhattan Bank
Lintang Nugroho • Kewarganegaraan: WNI • Domisili: Jakarta • Yogyakarta, 23 Juli 1956 (64 Tahun) • Pendidikan: - International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA - Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA - Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA • Citizenship: Indonesian • Domicile: Jakarta • Yogyakarta, July 23, 1956 (64 Years old) • Educatioin: - International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA - Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA - Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, USA	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin tanggal 2 September 2014. Vice President Commissioner/Independent Commissioner pursuant to PT Bank Panin Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 2, 2014.	• Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga • Vice President Commissioner of PaninBank • President Commissioner of PT PNM Ventura Syariah • Finance & Operations Director and Business Director of PT PNM Persero • IT & Operations Director of PT PNM Persero • Commissioner of PT Bank Shinta Indonesia • President Director of PT Quantum Konservasi Energi • Director of Compliance, HR, Operations & IT of PT Bank Tiara • Head of Operations Division of PT Bank Niaga
Johnny *) • Kewarganegaraan: WNI • Domisili: Jakarta • Tanjung Pinang, 20 Agustus 1953 (67 Tahun) • Pendidikan: - Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan - Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia • Citizenship: Indonesian • Domicile: Jakarta • Tanjung Pinang, August 20, 1953 (67 Years old) • Education: - Bachelor of Banking Finance, National Bank Academy - Bachelor of Economics in Management from the University of Indonesia	Menunggu RUPS berikutnya Waiting for the next AGM	• Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank • President Commissioner of PaninBank • Director of Treasury of PaninBank • Asst. Manager of PaninBank

Nama Name	Jabatan Position	Pengalaman Kerja Work Experience
Drs. H. Riyanto • Kewarganegaraan: WNI • Domisili: Jakarta • Pemalang, 11 November 1945 (75 Tahun) • Pendidikan: - Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada • Citizenship: Indonesian • Domicile: Jakarta • Pemalang, November 11, 1945 (75 Years old) • Education: - Bachelor of Economics, majoring in Accounting from Gadjah Mada University	Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin tanggal 22 Juni 2004. Independent Commissioner pursuant to PT Bank Panin General Meeting of Shareholders dated June 22, 2004.	• Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan • Commissioner of PaninBank • Commissioner of PT Bank Mitra Niaga • Executive Bank Inspectors of Bank Indonesia • Head of Internal Audit of PT Petro Kimia Gresik • Auditor at the Directorate General of State Financial Supervision, Department of Finance
Gregory James Terry • Kewarganegaraan: Australia • Domisili: Jakarta • Melbourne, 09 Desember 1944 (76 Tahun) • Pendidikan: - Fakultas Hukum, University of Melbourne - Master of Arts, Tuft University Chicago • Citizenship: Australian • Domicile: Jakarta • Melbourne, Desember 9, 1944 (76 Years old) • Education: - Faculty of Law - University of Melbourne - Master of Arts degree from Tufts University, Chicago.	Komisaris, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin tanggal 26 Juni 2020. Commissioner, pursuant to PT Bank Panin Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 26, 2020.	• Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank • Advisor of Oentoeng Suria and Partners Law Office • Executive Officer at JM Financial Limited • General Counsel at Morgan Stanley for Asia (2006-2009) • Operations Director at Brierley Investments Limited • Country Manager of Credit Suisse Bank, Austria • Country Manager of Jardine Fleming Investment Bank

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya | Effective after obtaining approval from the next GMS

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris

The duties and responsibilities as well as authorities of each member of the Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Resposibilities
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	1. Meyakini Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS; 3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif; 4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS; 5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati; 6. Memimpin Komite Audit; 7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi; 8. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; 9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris; 10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahi Kepatuhan. 1. Ensure the Bank's compliance with applicable laws and regulations; 2. Taking actions in the interests of the Bank in accordance with the scope of duties of the Commissioners based on prevailing rules and to be responsible to the GMS; 3. Ensure the determination the limits of responsibility and authority of the Board of Directors, and all control functions in the Bank's organizational structure, in accordance with effective corporate governance; 4. Ensure that the Shareholders' proposals which are deemed relating to the Bank's interests is appointed as the agenda item of the GMS; 5. Ensure that all audit findings by the External Auditor, Internal Auditor and Financial Services Authority (OJK) and other authorities is followed up by the Board of Directors in accordance with the agreed commitments; 6. Leading the Audit Committee; 7. Leading the Integrated Governance Committee; 8. Member of the Nomination and Remuneration Committee; 9. Lead and coordinate the implementation of duties of all members of the Board of Commissioners; 10. Supervision is more focused on the implementation of duties of the President Director, the Director in charge of HR and the Director in charge of Compliance.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Resposibilities
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen) Vice President Commissioner (Independent)	1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG; 3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta Regulator lainnya; 4. Memastikan berjalannya program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 5. Memimpin Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; 7. Anggota Komite Audit; 8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan Digital Banking dan Direktur yang membawahkan Operasional dan Teknologi Informasi. 1. Ensure the GCG implementation in every business activity of the Bank and at all levels of the organization; 2. Ensure the compliance aspect relating to information disclosure that needs to be disclosed in the Good Corporate Governance implementation report; 3. Ensure that the Company has submitted reports as required by Bank Indonesia, Bapepam-LK, Indonesia Stock Exchange, and other regulators; 4. Ensure the running of programs and implementation of knowledge and expertise development for members of the Board of Commissioners and Board of Directors; 5. Leading the Risk Monitoring Committee; 6. Members of the Integrated Governance Committee; 7. Members of the Audit Committee; 8. Supervision is more focused on the implementation of duties of the Vice President Director, the Director in charge of Digital Banking and the Director in charge of Operations and Information Technology.
3	Chandra R. Gunawan	Komisaris Commissioner	1. Meyakini bahwa Manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian internal, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas; 2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud; 4. Mengevaluasi dan me*monitor* penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi Bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan. 1. Ensure that management has continuously communicated the importance of risk management, internal control, corporate values, and the application of ethical and integrity values. 2. Monitor the effectiveness of risk management and internal control as well as the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) applied in every bank business activity at all levels or levels of the organization; 3. Evaluate and monitor all material risks and ensure that there are corrective steps taken in connection with the impacts caused by the risks. 4. Evaluate and monitor the handling of matters related to legal and compliance issues faced by the Bank; 5. Members of the Risk Monitoring Committee; 6. Supervision is more focused on the implementation of duties of the Director in charge of credit activities.
4	Drs H. Riyanto	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta Penyerapan Anggaran Tahunan Bank; 2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS; 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank; 4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan system remunerasi dan kompensasi Bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan Bank; 5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi; 6. Anggota Komite Audit 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Resposibilities
			1. Supervise the implementation and achievement of Corporate Plan and Business Plan as well as the absorption of the Bank's Annual Budget; 2. Propose a Public Accountant and a Public Accountant Firm that will audit financial statements for the GMS; 3. Monitor and evaluate the implementation of audits on financial statements and internal audits of the Bank; 1. Leading the Nomination and Remuneration Committee; 2. Convinced that the design and implementation of the Bank's remuneration and compensation system has considered risk management and is in accordance with the Bank's objectives; 5. Leading the Nomination and Remuneration Committee; 6. Members of the Audit Committee; 7. Supervision is more focused on the implementation of the duties of the Director in charge of network and distribution activities as well as the Director in charge of financial administration activities.
5	Johnny *)	Komisaris Commissioner	1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan; 2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan; 3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan atas kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko Bank; 4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi Bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi; 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Tresuri. 1. Monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies by considering long-term objectives and applied risk management. 2. Evaluate the Compliance Policy and Internal Control System at least once a year or in frequency adjusted to changes in factors that have a significant influence on the sustainability of the Bank's business activities. 3. Evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of Risk Management policies as well as provide direction on corrective steps for the implementation of risk management policies on a regular basis to ensure that the Board of Directors have performed an effective management of the Bank's activities and risks. 4. Evaluate and monitor the implementation of management duties related to maintaining the Bank's reputation; 5. Members of the Risk Monitoring Committee; 6. Members of the Remuneration and Nomination Committee; 7. Supervision is more focused on the implementation of the duties of the Director in charge of Treasury activities.
6	Gregory James Terry	Komisaris Commissioner	1. Melakukan tugas Komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan Pemegang Saham Pengendali *Votraint*; 2. Anggota Komite Pemantau Risiko; 3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan manajemen risiko 1. Performing the duties of the Commissioner in general, representing the interests of the Controlling Shareholders of Votraint; 2. Members of the Risk Monitoring Committee; 3. Supervision is more focused on the implementation of the duties of the Director in charge of risk management activities

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya | Effective after obtaining approval from the next GMS

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2020, PaninBank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 4 (empat) anggota Dewan Komisaris atau setara

Number and Composition of Independent Commissioners

In accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the composition of Independent Commissioners shall at least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners. As of December 31, 2020, PaninBank has 3 (three) Independent Commissioners out of a total of 4 (four) members of the

dengan 50% (lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen PaninBank telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Commissioners or equivalent to 50% (fifty percent). All of PaninBank Independent Commissioners have passed the fit and proper test and have obtained the OJK approval as Independent Commissioners as well as are appointed based on the GMS approval. Thus, the composition of PaninBank Independent Commissioner is in accordance with prevailing laws and regulations.

Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Lintang Nugroho serta Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 26 Juni 2020. Pernyataan independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari dua periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022.

Independency Statement of Each Independent Commissioner

In accordance with the provisions of POJK Number 33/POJK.04/2014, Lintang Nugroho and Riyanto have submitted independency statement at the AGMS on June 26, 2020. The statement of independence is related to his appointment as an Independent Commissioner who has served for more than two terms, starting from the closing of the meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2022.

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Independence or Affiliation of Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners performs its duties in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable rules/regulations as well as does not participate in operational activities. For Independent Commissioners who have served for more than 2 (two) terms, has made a declaration of independence.

Dua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan/kepengurusan/keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau PSP, Lintang Nugroho dengan Riyanto telah membuat surat pernyataan independen terkait dengan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dan 1 (satu) anggota Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan mempunyai hubungan keluarga dengan PSP dan 1 (satu) anggota Direksi.

Two members of the Board of Commissioners do not have financial/ownership/management/family relations to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the controlling shareholders (PSP), Lintang Nugroho with Riyanto have made an independent statement related to a term of office of more than 2 (two) periods and 1 (one) member of Commissioner, Chandra Rahardja Gunawan, has a family relationship with PSP, and 1 (one) member of the Board of Directors.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

The affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders is a criterion used to measure the independence of the Board of Commissioners, which includes:

1. Affiliation between fellow members of the Board of Directors.
2. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
3. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the main and/or Controlling Shareholders.

4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

4. Affiliation between fellow members of the Board of Commissioners.
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and members of the main and/or Controlling Shareholders

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation of Members of the Board of Commissioners

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Nelson Tampubolon		√		√		√		√		√		
Lintang Nugroho		√		√		√		√		√		
Chandra R. Gunawan		√		√		√		√	√			
Johnny		√		√		√		√		√		√
Drs. H. Riyanto		√		√		√		√		√		
Gregory James Terry		√		√		√		√		√		

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2020, hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Shares Ownership of the Board of Commissioners

As of December 31, 2020, only 1 (one) member of the Board of Commissioners who hold shares that reached 5% (five percent) or more.

Details of the shares ownership of members of the Board of Commissioners can be seen in the following table:

No	Nama Name	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih Share Ownership that Reaches 5% or More			
		Bank Panin PaninBank	Bank Lainnya Other Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya Other Companies
1.	Nelson Tampubolon	-	-	-	-
2	Lintang Nugroho	-	-	-	-
3	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
4	Johnny	-	9,35%	86%	10%
5	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
6	Gregory James Terry	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Concurrent Positions of Member of the Board of Commissioners

There were no concurrent positions for members of the Board of Commissioners as Commissioners, Directors, and Executive Officers at Banks, Non-Bank Financial Institutions, or other companies, except as permitted in the Financial Services Authority's Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan PaninBank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi Pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan PaninBank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Anggota Direksi

Pemberian saran/masukan/nasihat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam

Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Conflict of interest is a condition that can lead to conflicts between the interests of the Bank and the interests of individuals, members of the Board of Commissioners, Directors, and employees of the Bank, which causes them to be unable to act independently and objectively.

While conducting its duties and obligations, each individual at the Bank shall prioritize the Bank's interests over personal, family, or other parties' interests. In addition, every individual who has the authority to make a decision must make a statement that the individual concerned does not have a conflict of interest with respect to every decision made by him/her.

Handling Conflicts of Interest are implemented as follows:

1. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that can harm PaninBank or reduce the profits of PaninBank and must disclose the conflict of interest referred to in each decision;
2. The Board of Commissioners are obliged to make a statement, on an annual basis, regarding the presence or absence of conflict of interest, that there is no intervention by the Bank's owner in every decision that has been taken, and that the entire process is in accordance with the Bank's regulations and policies. If the Board of Commissioners have a conflict of interest, the Board of Commissioners must declare that all decisions that have been taken remain objective, independent, and harmless to the Bank.

Throughout 2020, there were no conflicts of interest by members of the Board of Commissioners.

Frequency and Method of Providing Advice to Members of the Board of Directors

Provision of giving suggestions/input/advice to the Board of Directors is delivered through joint meetings which are held quarterly and through the memorandum.

Disclosure of Company Policies and Their Implementation

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the authority to do matters as stipulated in the Articles of

Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, di antaranya sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PaninBank, rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Audit, Kegiatan Komite, Penerapan *Good Corporate Governance*, dan hal lainnya/*current issue,* sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali membahas mengenai evaluasi/*review* pencapaian rencana bisnis, *Branch Oversight* dan hal-hal lain/*current issue*.

Association of PT Bank Panin Tbk and the Limited Liability Company Law, including to:

1. Request an explanation from the Board of Directors regarding all matters concerning the Company.
2. Based on the decision of the Meeting of the Board of Commissioners, hold the right to temporarily dismiss members of the Board of Directors.
3. Perform management actions for the Company in certain circumstances for a certain period of time.
4. Approve several company policies referring to the provisions of the competent authorities.
5. Approve and evaluate risk management policies, and evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management policies.
6. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners due to the absence of other members, all duties and authorities granted to the President Commissioner or other members of the Board of Commissioners in the articles of association shall also apply to the present member.
7. Request assistance from experts for a limited period of time.

Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings with the Board of Directors

In accordance with the provisions stipulated in PaninBank's Articles of Association, the meetings shall be held at least once a month, and the Board of Directors can be invited. Meetings are only valid and entitled to take binding decisions if more than ½ (one half) of the members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.

All decisions in meetings must be made based on deliberation to reach a consensus. In the event that a deliberation to reach a consensus is not reached, the decision of the meeting is made by majority votes. All decisions of the meeting are binding on all members of the Board of Commissioners.

During 2020, the Board of Commissioners meetings has held 8 (eight) times. The discussions held at the Board of Commissioners Meeting were regarding Supervision of Business Plans, Supervision of Audit Follow-Up, Committee Activities, and GCG Implementation, and other matters/current issues, while in Joint Meetings with the Board of Directors 4 (four) times discussed evaluation/review of business plans achievements, Branch Oversight and other matters/current issues.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi
Attendance at Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings with the Board of Directors

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Meetings		Rapat Gabungan Joint Meetings	
	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % of Attendance
Nelson Tampubolon*)	3 kali	37,5%	1 kali	25%
Drs. H. Riyanto	8 kali	100,0%	4 kali	100%
Johnny***)	-	0,0%	-	0%
Lintang Nugroho	8 kali	100,0%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan	8 kali	100,0%	4 kali	100%
Gregory James Terry**)	1 kali	12,5%	-	0%

*) Efektif sebagai Komisaris 7 September 2020 | Effective as Commissioner on September 7, 2020
**) Efektif sebagai Komisaris 15 Desember 2020 | Effective as Commissioner on December 15, 2020
***) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya | Effective after obtaining approval from the next GMS

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 Agenda Rapat Dewan Komisaris membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Rencana Bisnis
2. Pengawasan Tindak Lanjut Audit
3. Kegiatan Komite
4. Penerapan GCG
5. APU PPT
6. Hal-hal lain/*current issue*

Board of Commissioners Meeting Agenda

During 2020, the Board of Commissioners meeting agenda discussed the following matters:

1. Supervision of business plans.
2. Supervision of audit follow-up actions.
3. Committees' activities.
4. Implementation of GCG.
5. APU PPT
6. Other matters/current issues.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Agenda for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	16 Januari 2020 January 16, 2020	- Hasil *Gap Analysis* FTP oleh KPMG - *Update Progress Digital Banking Roadmap* - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya	- Results of Gap Analysis FTP by KPMG - Update the progress of the Digital Banking Roadmap - Evaluation of the Business Plan and the Achievements
2	22 April 2020 April 22, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and the Achievements - Others
3	22 Juli 2020 July 22, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - *Issue-issue* Strategis – Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and the Achievements - Strategic Issues - Follow up on OJK Audit Results - Others
4	14 Oktober 2020 October 14, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - *Loan at Risk* (BAK, Commercial Banking, dan Corporate Banking) - *Update Progress* Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Mei 2019 - *Update Progress Digital Banking* (E-Cash Panin) - Rencana Tindak Lanjut Kantor Cabang Rugi (*Network & Distribution)* - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and the Achievements - Loan at Risk (BAK, Commercial Banking, and Corporate Banking) - Update on the Follow-up Progress of OJK Audit Results in May 2019 - Update Digital Banking Progress (E-Cash Panin) - Branch Office Follow-Up Plan for Loss (Network & Distribution) - Others

Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.

Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

a Webinar Strategi Bank di Era Digital yang diselenggrakan oleh *Indonesian Banking School* (IBS),

b *Intro to Crypto* yang diselenggarakan oleh Institute Banking Indonesia (IBI) dan lain-lain.

Decisions of the previous year's meeting and its realization this year

Decisions of meetings of the Board of Commissioners are always monitored and generally followed up.

Trainings for the Board of Commissioners

The Board of Commissioners training program is required for members of the Board of Commissioners so they can constantly update any information regarding the latest developments in the banking industry and other knowledge relating to the implementation of supervisory duties. Throughout 2020, the Board of Commissioners attended these following trainings:

a. Bank Strategy Webinar in the Digital Age organized by the Indonesian Banking School (IBS);

b. Intro to Crypto organized by the Indonesian Banking Institute (IBI) and others.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Committees Under the Board of Commissioners

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2020, PaninBank memiliki Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

Committees under the Board of Commissioners are the committees formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners. As of 2020, PaninBank has committees under the Board of Commissioners as follows:

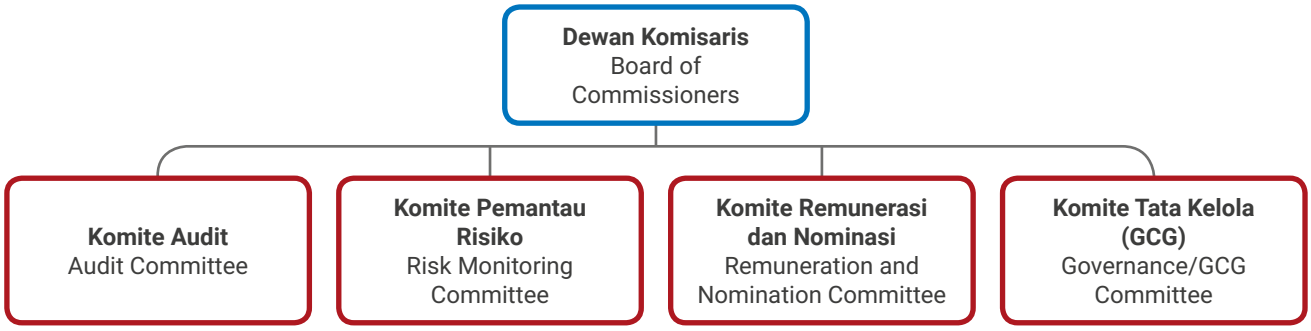

Penilaian terhadap Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi:

1. Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Assessment of Committee Performance under the Board of Commissioners

Performance evaluation of the committee that supports the implementation of duties of the Board of Commissioner, as follows:

1. The composition and competence of committee members are suitable compared to the size and complexity of the business of the Company and its subsidiaries, and are in accordance with the regulations set by the regulator.
2. The Committee has carried out its duties properly in accordance with the Bank's internal guidelines and has implemented effectively and efficiently.
3. Committees have been effectively assisted in the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut:

The establishment of committees under the Board of Commissioners is in accordance with the objectives and basic guidelines, as follows:

KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE

In accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners.

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk:

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

The Objectives of Establishing Audit Committee

Audit Committee was formed through the Board of Commissioners' Decree No. 002/SK-DK/007 dated June 21, 2007 in order to comply with the provisions of Bank Indonesia and Financial Services Authority, with the aims to:

1. Assist/support the effective implementation of duties of the Board of Commissioners in overseeing the Bank's management by the Board of Directors;
2. Monitor and evaluate the implementation of internal and external audit functions, the adequacy of internal controls in the financial reporting process;
3. Provide recommendations for the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Strategi *Anti-Fraud* Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Legal Basis

The establishment of Audit Committee are based on these following rules:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letters, regarding the implementation and organs of Corporate Governance, Audit Committee, Compliance Function of Commercial Bank, Anti-Fraud Strategy of Commercial Bank, Public Accountant, as well as Affiliated and Certain Conflict of Interest Transactions.
2. Bank's Company Policy

Pedoman Komite Audit

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 15 Maret 2019, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Audit Committee Charter

The latest amendments to the Audit Committee Charter was made on March 15, 2019, such amendment was made to accommodate adjustments to the relevant regulatory regulations. The Audit Committee Charter regulates the organization, duties and responsibilities, work ethics, working hours, meeting mechanism, and Management Information System.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.

Criteria for Audit Committee

According to the regulatory requirements that have been fulfilled by PaninBank, Audit Committee members shall meet the following criteria, among others:

1. Audit Committee members shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner as Chairman concurrently member, 1 (one) Independent Party having expertise in finance or accounting, and 1 (one) Independent Party having expertise in law or banking.
2. Committee members from Independent Parties having work experiences in finance and/or accounting for at least 5 (five) years and in law and/or banking in at least 5 (years).

3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area pekerjaan audit intern dan ekstern, Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

3. Independent commissioners and independent party becoming members of Audit Committee shall be at least 51% (fifty one percent) from total members of the Committee.
4. Chairman of the Committee may only concurrently serve as Chairman of the Committee at most in 1 (one) other Committee at the same Bank.
5. Committee members must have good integrity, character, and morals.

Audit Committee Qualifications and Certifications

Audit Committee members shall meet the qualifications and certifications which consists of:

1. Member of the Committee shall have high integrity, good characters, and morals.
2. Member of the Committee shall have adequate knowledge regarding OJK regulations, Bank Indonesia regulations, the laws of the Republic of Indonesia, and other related regulations.
3. Member of the Committee from independent party with financial or accounting expertise shall have sufficient work experience thus the person concerned can provide recommendations based on evaluation results in the areas of internal and external audit work, financial statements, internal control, and implementation of GCG.
4. Member of the Committee from independent party having expertise in banking or law, shall have sufficient work experience thus the person concerned can provide recommendations based on evaluation results in the areas of Bank Operations, Business Plans and Bank Development.

Independence of Audit Committee Members

Majority of Audit Committee members are from independent parties and do not have financial, management, ownership, or family relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders or relationships with the Bank, which may affect the independence of such Committee members.

Description of Duties and Responsibilities

1. Conducting supervision and review on the audit planning and its implementation well as supervision of the audit result follow-up in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy on financial reporting process;

2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap;
   a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal;
5. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi Bank posisi 31 Desember 2020;
6. Mengevaluasi KAP Imelda dan Rekan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2020 dan Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2021.
7. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Satuan Kerja Audit Internal/Biro Pengawasan dan Pemeriksaan antara pencapaian Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
8. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal Bank;
9. *Monitoring* tindak lanjut hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal;
10. Memantau tindak lanjut hasil temuan Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
11. Monitoring Rekomendasi *Management Action* (RMA);
12. Mengevaluasi laporan kegiatan Satuan Kerja Audit Internal kantor-kantor cabang secara Triwulanan;
13. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi Anti-Fraud (Semesteran);
14. Mengevaluasi Laporan Pengaduan Nasabah secara triwulanan;
15. Menghadiri *Exit Meeting* pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal secara *sampling*;
16. Melakukan *review* terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

2. In order to carry out the tasks referred to above, the Audit Committee at least monitors and evaluates:
   a. Implementation of duties of the Internal Audit Unit (IAU);
   b. Conformity of audit implementation by the Public Accounting Firm with applicable auditing standards;
   c. Suitability of financial statements with applicable accounting standards;
   d. Implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of SKAI and public accountants, and Bank Indonesia's supervision result in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
3. Providing recommendations regarding the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
4. Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of audit plan, scope and budget of Internal Audit Unit;
5. Monitoring the preliminary results on the examination of Consolidated Financial Statements of the Bank as of December 31, 2020.
6. Evaluating KAP Imelda and Partners on the examination of the Bank's Financial Statements for the 2020 financial year and Recommendations for the appointment of Public Accountant Firm that will audit the Bank's Financial Statements for the 2021 financial year.
7. Evaluating activities of Internal Audit Unit/Bureau of Supervision and Audit between the achievement of the Annual Work Plan and the Audit Result Report (LHP);
8. Evaluating the Audit Result Report (LHP) of the Bank's Internal Audit Unit;
9. Monitoring of follow-up findings of the Internal Audit Unit;
10. Monitoring the follow-up findings of Public Accountant Firm and Bank Indonesia or the Financial Services Authority;
11. Monitoring the Management Action Recommendations;
12. Evaluating activity reports of Internal Audit Unit in branch offices quarterly;
13. Evaluating the Anti-Fraud Strategy Implementation and Development Report (semester);
14. Evaluating Customer Complaint Reports on a quarterly basis;
15. Attending Exit Meeting relating to the inspection of Internal Audit Unit by sampling;
16. Conducting review of the Committee's Charter.

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite PaninBank.
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko.
5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Program Kerja Komite Audit selama tahun 2020 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Panin Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2019.
2. Menyusun rekomendasi penggunaan jasa dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dari KAP *Imelda & Rekan* (I&R) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2020, yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite Audit.
3. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI yang diterima sepanjang tahun 2020, sebanyak 87 LHP, yaitu:
   - LHP - Umum : 73 LHP
   - LHP – Khusus (Investigasi) : 13 LHP
   - LHP – Khusus permintaan OJK : 1 LHP
4. *Monitoring* tindak lanjut hasil temuan SKAI.
5. Memantau tindak lanjut hasil temuan KAP dan BI/OJK.
6. *Monitoring Recommendation Management Action* (RMA) selama tahun 2020

Authority of the Audit Committee

The Audit Committee has the authority to:

1. Having the rights to access records or information about employees, funds, assets, and other company resources relating to the implementation of their duties.
2. Obtaining access to be able to communicate directly with the Bank's employees, including the Board of Directors and the parties executing internal audit functions, risk management, and accounting as well as other internal and external parties regarding the duties and responsibilities of PaninBank's Committee.
3. Assigning professional staff to conduct specific tasks, if deemed necessary, at the expense of the Bank. The assignment of these professionals must be carried out in accordance with the Bank's internal regulations and with a clear basis of assignment in terms of period, compensation, and duties and responsibilities.
4. Having time to discuss the implementation of internal and external audit tasks without the presence of the management. This includes monitoring the implementation of internal controls, GCG, and Risk Management.
5. Have a functional line with IAU to communicate directly with the Internal Audit Unit.

Implementation of the Audit Committee Work Programs

Audit Committee Work Program for 2020, which was held, as follows:

1. Monitored the temporary results on the examination of Consolidated Financial Statements of PT Bank Panin Indonesia Tbk as of December 31, 2019.
2. Prepared recommendations regarding the use of services of Public Accountant and Public Accountant Firm of Imelda & Rekan (I&R) to perform audit implementation of the Financial Statements as of December 31, 2020, which will then be discussed in the Audit Committee Meeting.
3. Evaluated the Internal Audit Report (LHP) received throughout 2020, as many as 87 LHPs, namely:
   - LHP - General: 73 LHP
   - LHP - Special (Investigation): 13 LHP
   - LHP - Specifically for OJK requests: 1 LHP
4. Monitored the follow-up findings of Internal Audit Unit.
5. Monitored follow-up findings of KAP and BI/OJK.
6. Monitored the Management Action (MA) (Quarterly) in 2020.

7. Evaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang tahun 2020 (Triwulan IV 2019, Triwulan I, II dan III tahun 2020).
8. Evaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi *Anti-Fraud* tahun 2020 (semester II-2019 dan semester I-2020)
9. Evaluasi Laporan Pengaduan Nasabah tahun 2020 (Triwulan IV-2019, Triwulan I, II dan III tahun 2020).
10. Memantau Laporan *Whistleblowing System* (WBS) tahun 2020 (Triwulan IV-2019, Triwulan I, II dan III 2020).
11. Evaluasi penyusunan Rencana Audit, Ruang Lingkup dan Anggaran SKAI tahun 2020.
12. Mengevaluasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit periode 2020.
13. Menyusun program Kerja Komite Audit 2021.

7. Performed evaluation of Internal Audit activity reports in Branches during 2020 (Quarter IV 2019, Quarter I, II and III of 2020).
8. Conducted evaluation of Reports on the Implementation and Development of Anti-Fraud Strategies throughout 2020 (Semester II/2019 and Semester I/2020).
9. Conducted evaluation of the 2020 Customer Complaint Report (Quarter IV-2019, Quarter I, II and III of 2020).
10. Monitored the 2020 Whistleblowing System (WBS) Report (Quarter IV-2019, Quarter I, II and III 2020).
11. Evaluated the preparation of Audit Plan, Scope and Budget of Internal Audit Unit in 2020.
12. Evaluated the Audit Committee Charter for the 2020 period.
13. Prepared Audit Committee work program for 2021.

Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

Anggota :

1. Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. Lukman Abdullah (Pihak independen)
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Composition of the Audit Committee Members

The Audit Committee consists of 5 (five) people, namely:

Chairman: Nelson Tampubolon (Independent Commissioner)

Members:

1. Drs. H. Riyanto (Independent Commissioner)
2. Lintang Nugroho (Independent Commissioner)
3. Lukman Abdullah (Independent Party)
4. Bambang Setyoko (Independent Party)

Komposisi Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Penunjukan Legal Basis of Appoinment	Warga Negara Citizenship	Domisili Domicile
Nelson Tampubolon*	Ketua Komite Chairman of the Committee	2020 s/d saat ini 2020 - present	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI Indonesian	Jakarta
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite Committee Member	2007 s/d saat ini 2020 - present	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI Indonesian	Jakarta
Lintang Nugroho	Anggota Komite Committee Member	2017 s/d saat ini 2020 - present	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI Indonesian	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite Committee Member	2010 s/d saat ini 2020 - present	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI Indonesian	Jakarta
Bambang Setyoko	Anggota Komite Committee Member	2020 s/d saat ini 2020 - present	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI Indonesian	Jakarta

*) Efektif sebagai komisaris 7 September 2020 | Effective as Commissioner as of September 7, 2020

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Members of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Nelson Tampubolon	Ketua Komite Chairman of the Committee	• Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston • Faculty of Economics, Parahyangan University • Arthur D. Little Management Institute, Boston	• Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisioner *ex officio* OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia • President Commissioner of PT MNC Capital Indonesia • Member of the Financial Services Authority Commissioner Board • Ex-officio Board of Commissioners Member OJK at the Deposit Insurance Corporation • Director of the International Directorate, Bank Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite Committee Member	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada Bachelor of Economics, majoring in Accounting from Gadjah Mada University	• Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan • Commissioner of PaninBank • Commissioner of PT Bank Mitra Niaga • Executive Bank Inspectors of Bank Indonesia • Head of Internal Audit of PT Petro Kimia Gresik • Auditor at the Directorate General of State Financial Supervision, Department of Finance
Lintang Nugroho	Anggota Komite Committee Member	• *International Trade & Business* di UCLA – LA, CA, USA • *Executive Management Development Program,* University of Southern California Los Angeles, CA • *Management Development Program,* University of Southern California Los Angeles, CA • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA	• Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga • Vice President Commissioner of PaninBank • President Commissioner of PT PNM Ventura Syariah • Finance & Operations Director and Business Director of PT PNM Persero • IT & Operations Director of PT PNM Persero • Commissioner of PT Bank Shinta Indonesia • President Director of PT Quantum Konservasi Energi • Director of Compliance, HR, Operations & IT of PT Bank Tiara • Head of Operations Division of PT Bank Niaga
Lukman Abdullah	Anggota Komite Committee Member	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia Bachelor of Economics, Department of Accounting, University of Indonesia	• PT Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko • PT Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT Panin Insurance, Komisaris Independen • PT Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor • PT Bank Panin, Committe Member & Member of Risk Monitoring Committee • PT Multi Artha Guna, Independent Commissioner • PT. Panin Insurance, Independent Commissioner • PT. Clipan Finance Indonesia, Independent Commissioner • PT Asuransi Ramayana, Member of the Audit Committee • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Bambang Setyoko	Anggota Komite Committee Member	• Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. Jurusan: Ekonomi Manajemen. • Akademi Uang dan Bank, Yogyakarta, 1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta, 2005. Department: Management Economics.	• 2020 - sekarang PT Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 - sekarang PT Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 - PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 - 2018 PT Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • Bank Indonesia selama 34 tahun. Di berbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur. • 2020 - present, Member of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee of PT Bank Panin Tbk. • 2019 - present, member of the Audit Committee & Risk Monitoring Committee of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. • 2018 - PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 - 2018, member of the Audit Committee & Risk Monitoring Committee of PT Resona Bank Perdania. • Bank Indonesia for 34 years. In various work units in the country and abroad. Retired in 2013 with the last position as Assistant Director.

Temuan Komite Audit dan Penindaklanjutannya

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite

Audit Committee Findings and Follow-Ups

The follow-up to the findings of Internal Audit, KAP, OJK and other authorities is monitored and reported in the minutes of Committee meetings.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dengan Komisaris 5 (lima) kali, dengan Presiden Direktur dan SPI sebanyak 2 (dua) kali, dan rapat dengan SPI sebanyak 5 (lima) kali:

Audit Committee Meetings

The Audit Committee held 5 (five) meetings with the Commissioner, 2 (two) times with the President Director and SPI, and 5 (five) meetings with SPI:

No.	Nama Name	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	
		Jumlah Kehadiran Number of Attendace	Persentase (%) Percentage (%)
1.	Nelson Tampubolon*	2	40%
2	Drs. H. Riyanto	5	100%
3.	Lintang Nugroho	5	100%
4.	Lukman Abdullah	5	100%
5	Bambang Setyoko	5	100%

*) Efektif sebagai anggota komite 9 September 2020 | Effective as Commissioner as of September 9, 2020

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings

No	Tanggal Date	Pembahasan	Agenda
1	12/02/2020	Periode Triwulan IV – 2019, meliputi; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. *Good Corporate Governance* (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi *Anti Fraud* dan lain-lain	Quarter IV – 2019, meliputi; 1. Monitoring the implementation of BPP duties 2. The follow-up development of the audit findings 3. Good Corporate Governance (GCG), Customer Complaints, Anti-Fraud Strategy and others
2	15/05/2020	Periode Triwulan I-2020 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. *Good Corporate Governance* (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi *Anti Fraud* dan lain-lain	Quarter I-2020 1. Monitoring the implementation of BPP duties 2. The follow-up development of the audit findings 3. Good Corporate Governance (GCG), Customer Complaints, Anti-Fraud Strategy and others
3	19/06/2020	Pembahasan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (AKP) untuk audit laporan keuangan tahunan posisi 31 Desember 2020	Discussion on recommendations for the appointment of a Public Accountant (AP) and/or a Public Accounting Firm (AKP) to audit the annual financial statements for the position of December 31, 2020
4	14/08/2020	Periode Triwulan II-2020 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. *Good Corporate Governance* (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi *Anti Fraud* dan lain-lain	Quarter II-2020 1. Monitoring the implementation of BPP duties 2. The follow-up development of the audit findings 3. Good Corporate Governance (GCG), Customer Complaints, Anti-Fraud Strategy and others
5	16/11/2020	Periode Triwulan III -2020 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. *Good Corporate Governance* (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi *Anti Fraud* dan lain-lain	Quarter III -2020 1. Monitoring the implementation of BPP duties 2. The follow-up development of the audit findings 3. Good Corporate Governance (GCG), Customer Complaints, Anti-Fraud Strategy and others

Rapat Koordinasi Komite Audit
Audit Committee Coordination Meetings

No	Tanggal Date	Pihak Ketiga Third Party	Pembahasan	Agenda
1	18/02/2020	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Membahas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (*General Audit*) posisi per 31 Desember 2019	Discussing the results of the General Audit for the position as of December 31, 2019
2	08/07/2020	Ernst & Young (EY) Consulting	Interview *EY Consulting* terhadap Komite Audit terkait *Quality Assurance Review* (QAR) atas pelaksanaan fungsi SKAI PT Bank Panin Tbk. Periode Juli 2017 sd Juni 2020 (3 tahun).	EY Consulting's interview with the Audit Committee regarding Quality Assurance Review (QAR) on the implementation of the Internal Audit function of PT Bank Panin Tbk. Period July 2017 to June 2020 (3 years).
3	11/09/2020	SKAI/BPP	Membahas: 1. Laporan Hasil QAR oleh *EY Consultant* 2. Tanggapan OJK atas hasil pemeriksaan khusus SKAI 3. Temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	Discuss: 1. Report on QAR Results by EY Consultant 2. OJK's response to the results of the special SKAI examination 3. Audit findings and follow-up
4	02/11/2020	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Membahas rencana pemeriksaan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 PT Bank Panin Tbk.	Discussed the audit plan on the Financial Statements as of December 31, 2020, PT Bank Panin Tbk.
5	07/12/2020	SKAI/BPP	Membahas pelaksanaan *Whistleblowing System*	Discussing the implementation of the Whistleblowing System
6	14/12/2020	SKAI/BPP	Pembahasan Penyusunan RKAT BPP tahun 2021	Discussion on the Preparation of the BPP RKAT in 2021

Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2020, kegiatan pelatihan sebagai berikut:

Audit Committee Member Training

Training programs for the Audit Committee members is required so that each Audit Committee Members can always update information regarding the latest development in the banking industry and other knowledge relating to the implementation of duties as Audit Committee Members. Throughout 2020, the trainings followed were as follows:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara The organizers	Waktu Pelaksanaan Execution time	Tempat The place	Nama Peserta Participant's Name
Webinar Strategi Bank di Era Digital	Indonesian Banking School	Tahun | Year 2020	Indonesia	Seluruh Anggota | All Members
Intro to Crypto	Institute Banking Indonesia	Tahun | Year 2020	Indonesia	Seluruh Anggota | All Members

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Term of Office of Audit Committee Members

The term of office of Committee members who are members of the Board of Commissioners shall in accordance with the term of office/appointment as a member of the Board of Commissioners as stipulated in the GMS, while the term of office of members of the Independent Party shall be according to the needs.

Rencana Kerja Tahun 2020

Pada 2020, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

2020 Work Plan

In 2020, the Audit Committee has established a work plan by giving strategic priorities.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in helping carry out the duties and functions of the Board of Commissioners, which, in this case, is supervision of the implementation of risk management policies by the Directors.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Strategi *Anti-Fraud* Bank Umum, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 004/KOM/DIR/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehubungan dengan operasional perbankan, pengawasan dan manajemen risiko.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya pada area risiko kredit, pasar dan likuiditas.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko bank sekurang-kurangnya pada area penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, risiko operasional, hukum, reputasi, *strategic* dan kepatuhan.

Legal Basis

The establishment of the Risk Monitoring Committee is based on the following rules:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letters, regarding the implementation and organs of Corporate Governance, Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Anti-Fraud Strategies for Commercial Bank, as well as Affiliated and Certain Conflict of Interest Transactions.
2. Bank's Company Policy

The Objective of Establishing Risk Monitoring Committee

PaninBank's Risk Monitoring Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 004/KOM/DIR/21 dated February 24, 2021 concerning Changes in the Composition of Risk Monitoring Committee Members in order to comply with regulatory requirements and to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of risk management policies by the Board of Directors.

Risk Monitoring Committee Charter

The most recent amendment was made to the Risk Monitoring Committee Charter on December 22, 2017, such changes were made to accommodate adjustments to the relevant regulatory regulations. The Risk Monitoring Committee Charter includes the organization, duties and responsibilities, work ethics, working hours, meeting mechanism, and Management Information System.

Criteria for Risk Monitoring Committee Member

1. Shall have good integrity, character and morals.
2. Having adequate knowledge and experience in relation to banking operations, supervision and risk management.
3. Committee members from Independent Party who have financial expertise possess sufficient work experience to provide recommendations from the evaluation results on the implementation of risk management at least in the areas of credit, market and liquidity risks.
4. Committee members from Independent Party who have expertise in risk management have sufficient work experience so as they can provide recommendations from the evaluation results on the implementation of bank risk management at least in the areas of determining risk appetite and risk tolerance, operational risk, law, reputation, strategic and compliance.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komie Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Description of Duties and Responsibilities

1. Evaluating the conformity between Risk Management policies and the implementation of such policy.
2. Monitoring and evaluating the implementation of duties of Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu:

Ketua : Lintang Nugroho
Anggota :
1. Chandra R. Gunawan
2. Johnny Ng Wiraatmaja*)
3. Gregory James Terry*)
4. Lukman Abdullah
5. Usep Ekadaya
6. Bambang Setyoko

*) Belum efektif

Composition of Risk Monitoring Committee Members

Risk Monitoring Committee consists of 7 (seven) people, namely:
Chairman : Lintang Nugroho
Member :
1. Chandra R. Gunawan
2. Johnny Ng Wiraatmaja*)
3. Gregory James Terry*)
4. Lukman Abdullah
5. Usep Ekadaya
6. Bambang Setyoko

*) Not Yet Effective

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Members of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Lintang Nugroho	Ketua Komite Chairman of the Committee	• *International Trade & Business* di UCLA – LA, CA, USA • *Executive Management Development Program,* University of Southern California Los Angeles, CA • *Management Development Program,* University of Southern California Los Angeles, CA • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA	• Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga • Vice President Commissioner of PaninBank • President Commissioner of PT PNM Ventura Syariah • Finance & Operations Director and Business Director of PT PNM Persero • IT & Operations Director of PT PNM Persero • Commissioner of PT Bank Shinta Indonesia • President Director of PT Quantum Konservasi Energi • Director of Compliance, HR, Operations & IT of PT Bank Tiara • Head of Operations Division of PT Bank Niaga
Chandra R. Gunawan	Anggota Komite Committee Member	*Business Administration,* University of San Francisco, Amerika Serikat Bachelor of Business Administration, University of San Francisco, United States	• Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • *Vice President* Chase Manhattan Bank. • Commissioner of PaninBank • Deputy President Director of PaninBank • Vice President of Chase Manhattan Bank
Johnny *)	Anggota Komite Committee Member	• Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia • Bachelor of Banking Finance, National Bank Academy • Bachelor of Economics in Management from the University of Indonesia	• Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank • President Commissioner of PaninBank • Director of Treasury of PaninBank • Asst. Manager of PaninBank

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Gregory James Terry *)	Anggota Komite Committee Member	• Fakultas Hukum, University of Melbourne • *Master of Arts*, Tuft University Chicago • Faculty of Law - University of Melbourne • Master of Arts degree from Tufts University, Chicago.	• Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • *General Counsel* di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • *Country Manager* Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank • Advisor of Oentoeng Suria and Partners Law Office • Executive Officer at JM Financial Limited • General Counsel at Morgan Stanley for Asia (2006-2009) • Operations Director at Brierley Investments Limited • Country Manager of Credit Suisse Bank, Austria • Country Manager of Jardine Fleming Investment Bank
Lukman Abdullah	Anggota Komite Committee Member	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia Bachelor of Economics, Department of Accounting, University of Indonesia	• PT Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT Panin Insurance, Komisaris Independen • PT Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor • PT Bank Panin, Committe Member & Member of Risk Monitoring Committee • PT Multi Artha Guna, Independent Commissioner • PT. Panin Insurance, Independent Commissioner • PT. Clipan Finance Indonesia, Independent Commissioner • PT Asuransi Ramayana, Member of the Audit Committee • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Usep Ekadaya	Anggota Komite Committee Member	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung Bachelor of Economics, Accounting Department, Padjadjaran University, Bandung	• PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR) – Departemen Operational Risk & Others Risk (Manager/Ka. Bag). • PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)– Departemen Analisa Keuangan. • PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/(internal Audit) – (Manager/Group Head Kantor Pusat & Jabodetabek). • Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler). • Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). • PT Bank Panin Tbk, Risk Management Bureau (BMR) - Operational Risk & Others Risk Department (Manager/Head of Bank) • PT Bank Panin Tbk, Financial Administration Bureau (BAK) - Financial Analysis Department • PT Bank Panin Tbk, Bureau of Supervision and Inspection (BPP)/(Internal Audit) - (Manager/Group Head of Headquarters & Jabodetabek). • Public Accountant Firm–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) • Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
Bambang Setyoko	Anggota Komite Committee Member	• Akademi Uang dan Bank Yogyakarta, 1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta, 2005. • Jurusan: Ekonomi Manajemen. • Akademi Uang dan Bank, Yogyakarta, 1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta, 2005. • Department: Management Economics.	• 2020 – sekarang PT Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 – sekarang PT Bank Jtrust Indonesia Tbk, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 – PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 – 2018 PT Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • Bank Indonesia selama 34 tahun. Diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur. • 2020 – present, Member of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee of PT Bank Panin Tbk. • 2019 - present, member of the Audit Committee & Risk Monitoring Committee of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. • 2018 - PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 - 2018, member of the Audit Committee & Risk Monitoring Committee of PT Resona Bank Perdania. • Bank Indonesia for 34 years. In various work units in the country and abroad. Retired in 2013 with the last position as Assistant Director.

*) Belum efektif | Not Yet Effective

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko
Composition of Risk Monitoring Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Penunjukan Legal Basis of Appoinment	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
Lintang Nugroho	Ketua Komite Chairman of the Committee	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNI Indonesian	Jakarta
Chandra R. Gunawan	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNI Indonesian	Jakarta
Johnny *)	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNI Indonesian	Jakarta
Gregory James Terry*)	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNA Foreigner	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNI Indonesian	Jakarta
Usep Ekadaya	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNI Indonesian	Jakarta
Bambang Setyoko	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 sd saat ini 2020 - present	004/KOM/DIR/21	WNI Indonesian	Jakarta

*) Belum efektif | Not Yet Effective

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Independence of Risk Monitoring Committee Members

Chairman and members of the Committee comes from independent party who have no financial, management, ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders or relations with the Bank, which can affect the independence of Committee members.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2020 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
2. Melakukan evaluasi terhadap:
   a. Laporan realisasi RBB Manajemen Risiko (MR) setiap triwulan mengenai:
      i. Tata Kelola Risiko
         - Sasaran strategi bisnis; dan
         - Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
      ii. Kerangka Manajemen Risiko:
         - Strategi Manajemen Risiko;
         - Kecukupan/pengembangan perangkat organisasi dan;
         - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.
      iii. Proses Manajemen Risiko
      iv. Sistem pengendalian risiko
   b. Penerapan/Kegiatan Manajemen Risiko setiap triwulan:
      - Biro Manajemen Risiko;
      - Komite Manajemen Risiko dan;

Implementation of Risk Monitoring Committee Work Program

The Risk Monitoring Committee Work Program for 2020 that has been held, as follows:

1. Organized meetings and preparing reports.
2. Conducted evaluation to:
   a. Report on the realization of RBB Risk Management (MR) every quarter regarding:
      i. Risk Management:
         - Business strategy objectives; and
         - Determination of risk appetite and risk tolerance.
      ii. Risk Management Framework:
         - Risk Management Strategy;
         - Adequacy/development of organizational instruments; and
         - Adequacy of Policies, Procedures, and Risk Limit Determination.
      iii. Risk Management Process
      iv. Risk control system
   b. Implementation/Risk Management Activities:
      - Risk Management Bureau;
      - Risk Management Committee; and

- Laporan Profil Risiko;
- Lain-lain (PAB/Pengembangan IT, Evaluasi Pengaduan Nasabah);
- Evaluasi APU PPT (Bagian dari Risiko Kepatuhan).

c. Menyampaikan usulan kepada Direksi melalui surat tanggal 2 September 2020 terkait usulan perbaikan penyajian data realisasi RBB, dan memantau tindak lanjut atas usulan tersebut.
d. Pemantauan atas tindak lanjut hasil rapat konsultasi tanggal 7 Oktober 2020 (Perbaikan KPMR);
e. Mengevaluasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pemantau Risiko Periode 2020;
f. Menyusun program Kerja Pemantau Risiko 2021.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2020 sebanyak 4 kali dengan membahas Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Risk Profile Report;
- Others (PAB/IT Development, Evaluation of Customer Complaints);
- AML-CFT Evaluation (Part of Compliance Risk).

c. Submitted proposals to the Board of Directors through a letter dated September 2, 2020 regarding proposals for improving the presentation of data on the RBB realization and follow-up monitoring of these proposals.
d. Monitored the follow-up results of the consultation meeting on October 7, 2020 (Improvement of KPMR);
e. Evaluated the Risk Monitoring Committee Charter for 2020;
f. Prepared Risk Monitoring Work program for 2021.

Risk Monitoring Committee Meetings

Throughout 2020, the Risk Monitoring Committee has held 4 (four) meetings, which discussed the results of monitoring and evaluation on the implementation of BMR duties, KMR activities, risk profile, and bank soundness level.

The frequency of attendance of the Risk Monitoring Committee members in the Risk Monitoring Committee Meetings throughout 2020 were as follows:

No.	Nama Name	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings	
		Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
1.	Lintang Nugroho	5	100%
2.	Chandra R. Gunawan	5	100%
3	Johnny	-	
4	Gregory James Terry	-	
5	Lukman Abdullah	5	100%
6.	Usep Ekadaya	5	100%
7.	Bambang Setyoko	2	40%

*) Belum efektif | Not Yet Effective

Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meetings

No	Tanggal Date	Pembahasan	Agenda
1	14 Februari 2020 February 14, 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap: 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT	Results of Monitoring and Evaluation of: 1. Implementation of Duties of the Risk Management Bureau 2. Activities of the Risk Management Committee 3. Risk Profile 4. New Products/Activities (PAB) & APU PPT
2	20 Mei 2020 May 20, 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT	Results of Monitoring and Evaluation of: 1. Implementation of Duties of the Risk Management Bureau 2. Activities of the Risk Management Committee 3. Risk Profile 4. New Products/Activities (PAB) & APU PPT

Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meetings

No	Tanggal Date	Pembahasan	Agenda
3	19 Agustus 2020 August 19, 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap: 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT	Results of Monitoring and Evaluation of: 1. Implementation of Duties of the Risk Management Bureau 2. Activities of the Risk Management Committee 3. Risk Profile 4. New Products/Activities (PAB) & APU PPT
4	07 Oktober 2020 October 7, 2020	Rapat Konsultasi dengan agenda: 1. Perbaikan KPMR 2. Tindak Lanjut temuan OJK untuk perbaikan KPMR 3. KPMR terkait GCG dan APUPPT	Consultation Meeting with the agenda: 1. Revision of KPMR 2. Follow up on OJK's findings to improve KPMR 3. KPMR related to GCG and APUPPT
5	20 November 2020 November 20, 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap: 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT	Results of Monitoring and Evaluation of: 1. Implementation of Duties of the Risk Management Bureau 2. Activities of the Risk Management Committee 3. Risk Profile 4. New Products/Activities (PAB) & APU PPT

Komite Pemantau Risiko juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan Biro Manajemen Risiko (BMR) dan Biro Compliance (BCO) sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan berupa hasil evaluasi mengenai Kebijakan Manajemen Risiko, Kegiatan Manajemen Risiko, Profil Risiko, APU PPT.

The Risk Monitoring Committee also held Coordination Meetings, namely meetings with the Risk Management Bureau (BMR) and the Compliance Bureau (BCO) for 4 (four) times with a discussion agenda in the form of evaluation results regarding Risk Management Policies, Risk Management Activities, Risk Profiles, APU-PPT.

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2020, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Member Training

Training programs for members of the Risk Monitoring Committee are required so that each member can always update their information regarding the latest development in the banking industry and other knowledge related to the implementation of duties as a Risk Monitoring Member. Throughout 2020, the trainings followed were as follows:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Tempat Location	Nama Peserta Name of Partcipants
Webinar: Strategi Bank di Era Digital Webinar: Bank Strategy in the Digital Era	Indonesian Banking School	Tahun 2020 In 2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members
Intro to Crypto	Institute Banking Indonesia	Tahun 2020 In 2020	Indonesia	Seluruh Anggota All Members

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Term of Office of Risk Monitoring Committee Members

The term of office of Committee members who are members of the Board of Commissioners shall in accordance with the term of office/appointment as a member of the Board of Commissioners stipulated in the GMS, meanwhile the term of office of members from Independent Party is according to the needs.

Rencana Kerja Tahun 2021

Di tahun 2021, Komite akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam, Komite secara proaktif terus memantau dan mengangkat isu-isu terkait risiko terbaru sehingga tetap relevan dan *up-to-date* dengan risiko yang dihadapi oleh Bank.

Work Plan for 2021

In 2021, the Committee will continue to carry out its main duties and responsibilities, namely to support the effective implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners relating to risk management. In addition to the work plans that has been determined based on the responsibilities set forth in the Charter, the Committee continues to proactively monitor and raise the latest risk-related issues to remain relevant and up-to-date with the risks faced by the Bank.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners in overseeing the implementation of remuneration and nomination policy as well as staffing by the Board of Directors.

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sebagai wujud pemenuhan terhadap ketentuan regulator yaitu POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 34 ayat 1.c dalam rangka mendukung evektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Remunersi.

The Objective of Establishing Remuneration and Nomination Committee

As a form of compliance with the provisions of POJK No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, Article 34 paragraph 1.c in order to support the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish a Remuneration and Nomination Committee.

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

Legal Basis

PaninBank has established a Remuneration and Nomination Committee pursuant to the following regulations:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letters, regarding the implementation and Corporate Governance organs, Remuneration and Nomination Committee, Governance of Remuneration and Prudential Principles for Commercial Banks which performs Partial Delivery of Implementation to Other Parties;
2. Bank's Company Policy.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Charter

The latest amendments to the Remuneration and Nomination Committee Charter was made on December 22, 2017, such changes were made to accommodate adjustments to the relevant regulatory regulations. The Remuneration and Nomination Committee Charter regulates, among others, the

mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis atas sistem remunerasi;
3. Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang cukup serta mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
4. Pihak internal Bank yang menjadi anggota Komite, yaitu Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau Perwakilan Karyawan, wajib memiliki pengetahuan terkait proses penghitungan remunerasi dan proses nominasi dan *succession plan* Bank.
5. Apabila Bank mengangkat anggota Komite dari Perwakilan Karyawan, maka perlu diyakini keterwakilan karyawan Bank oleh yang bersangkutan.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
   a Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   b Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
      ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:
   a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b Prestasi kerja individual.
   c Kewajaran dengan *peer group*.
   d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
3. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
   a Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Authority, Position, Meeting, Attendance, as well as Duties and Responsibilities.

Criteria for Members of the Remuneration and Nomination Committee

1. Shall have good integrity, character and morals;
2. Having adequate knowledge in analyzing the remuneration system;
3. Having sufficient knowledge regarding Human Resource Management as well as having knowledge about labor regulations;
4. Internal parties of the Bank who are members of the Committee, namely Executive Officers in charge of Human Resources or Employee Representatives, shall possess knowledge regarding the process of calculating remuneration and the process of the Bank's nomination and succession plan.
5. If the Bank appoints a Committee member from the Employee Representative, it is necessary to ensure the representation of the Bank's employees by the person concerned.

Description of Duties and Responsibilities

1. Related to the Remuneration Policy:
   a. Evaluating the remuneration policy.
   b. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      i. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
      ii. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
2. While carrying out duties and responsibilities relating to the remuneration policy, shall be at least giving attention to:
   a. Financial performance and fulfillment of reserves as stipulated in prevailing laws and regulations.
   b. Individual work performance.
   c. Fairness with peer groups.
   d. Consideration of the Bank's long-term objectives and strategies.
3. Regarding the Nomination policy:
   a. Preparing and providing recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

b Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

c Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

b. Giving recommendations regarding candidate members of the Board of Commissioners and/or Bard of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

c. Providing recommendations regarding Independent Party who will become a member of the Committee to the Board of Commissioners.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Riyanto

Anggota :

1. Nelson Tampubolon
2. Johnny*)
3. Yusak Zefanya
4. Akijat Lukito

Composition of Remuneration and Nomination Committee Members

The Risk Monitoring Committee consists of 5 (five) people, namely:

Chairman: Riyanto

Members:

1. Nelson Tampubolon
2. Johnny*)
3. Yusak Zephanya
4. Akijat Lukito

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite Chairman	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Bachelor of Economics, majoring in Accounting from Gadjah Mada University	• Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan	• Commissioner of PaninBank • Commissioner of PT Bank Mitra Niaga • Executive Bank Inspectors of Bank Indonesia • Head of Internal Audit of PT Petro Kimia Gresik • Auditor at the Directorate General of State Financial Supervision, Department of Finance
Nelson Tampubolon	Anggota Komite Member	• Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston • Faculty of Economics, Parahyangan University • Arthur D. Little Management Institute, Boston	• Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisioner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia	• President Commissioner of PT MNC Capital Indonesia • Member of the Financial Services Authority Commissioner Board • Ex-officio Board of Commissioners Member OJK at the Deposit Insurance Corporation • Director of the International Directorate, Bank Indonesia
Johnny *)	Anggota Komite Member	• Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia • Bachelor of Banking Finance, National Bank Academy • Bachelor of Economics in Management from the University of Indonesia	• Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank	• President Commissioner of PaninBank • Director of Treasury PaninBank • Asst. Manager of PaninBank

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
Yusak Zefanya	Anggota Komite Member	• Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci • *Master of Arts* bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang. • Graduate from the Karawaci Harvest Leadership Institute • Master of Arts in Leadership from STT International Harvest, Karawaci, Tangerang.	• Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • Kepala Biro Umum dan Personalia • Kepala Bagian Personalia • Bagian Personalia • Bagian Umum	• Member of the Remuneration and Nomination Committee • Head of General and Personnel Bureau • Head of Personnel Section • Personnel Section • General Affairs Section
Akijat Lukito	Anggota Komite Member		• Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • PT Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang • PT Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan • PT Panin Insurance, Komisaris	• Member of the Remuneration and Nomination Committee • PT Bank Panin, KCU Cirebon, Branch Manager • PT Bank Panin, Head Office, Coordinator of Supervision & Inspection • PT Panin Insurance, Commissioner

*) Belum efektif | Not Yet Effective

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Composition of Members of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	Warga Negara Citizenship	Domisili Domicile
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite Chairman of the Committee	Periode 2020 s/d saat ini 2020 - present	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI Indonesian	Jakarta
Nelson Tampubolon	Angota Komite Committee Member	Periode 2020 s/d saat ini 2020 - present	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI Indonesian	Jakarta
Johnny *)	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 s/d saat ini 2020 - present	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI Indonesian	Jakarta
Yusak Zefanya	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 s/d saat ini 2020 - present	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI Indonesian	Jakarta
Akijat Lukito	Anggota Komite Committee Member	Periode 2020 s/d saat ini 2020 - present	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI Indonesian	Jakarta

*) Belum efektif | Not Yet Effective

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Independence of Remuneration and Nomination Committee Members

Chairman and members of the Committee who are Independent Commissioners do not have financial, management, ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Shareholders or any affiliated relations with the Company, which may affect the independence of the Committee members.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The committee implementation activities are reported every semester to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2020 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi
   Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2020 dan gratifikasi tahun buku 2020, antara lain:
   a Prestasi Kerja Individual.
   b Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
   c Industri Perbankan dan UMR.
   d Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
   e Faktor inflasi.
2. Berkaitan dengan Nominasi
   Penilaian sendiri *(Self-Assessment)* terhadap beberapa Calon Komisaris dan Calon Direksi PT Bank Panin Tbk. (Risalah Rapat tanggal 19 Juni 2020) yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi untuk diajukan ke RUPS tanggal 26 Juni 2020.

Implementation of Remuneration and Nomination Committee Work Program

Work Programs of Remuneration and Nomination Committee that has held during 2020 were as follows:

1. Relating to Remuneration
   Evaluated the remuneration policy in order to implement salary adjustments in 2020 and the gratification for the 2020 financial year, including:
   a. Individual work performance.
   b. Financial performance (the Bank's financial condition for the last 3 years) and fulfillment of reserves as stipulated in legislation.
   c. Banking industry and regional minimum wages (UMR).
   d. The Bank's Long-Term Objectives and Strategies.
   e. Inflation factor.
2. Relating to the Nomination
   Conducted self-Assessment of several Candidates for Commissioners and Candidates for Directors of PT Bank Panin Tbk (Minutes of Meeting dated June 19, 2020) which was submitted to the Board of Commissioners to be forwarded to the Board of Directors and subsequently submitted to the GMS on June 26, 2020.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Kebijakan Remunerasi 2019, Jumlah Rapat Komite Remunerasi & Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali membahas: 1) Kebijakan Remunerasi 2019, 2) *Self-Assessment*, 3) Pembahasan susunan keanggotaan komite-komite Dewan Komisaris. Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee Meetings

The Remuneration and Nomination Committee Meetings held in 2020 was 3 (three) times with the topic of meeting agenda discussing matters such as the 2019 Remuneration Policy, Self-Assessment, and the membership composition of the Board of Commissioners' committees. The frequency of attendance of members of the Remuneration and Nomination Committee in the 2020 Remuneration and Nomination Committee Meetings, as follows:

No.	Nama Name	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings	
		Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
1.	Riyanto	3	100%
2	Nelson Tampubolon	-	-
2.	Johnny Ng Wiraatmaja*)	-	-
3.	Yusak Zefanya	3	100%
4.	Akijat Lukito	3	100%

*) Belum efektif | Not Yet Effective

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Meetings

No	Tanggal Date	Pembahasan
1	23 April 2020	Kebijakan Remunerasi tahun 2020 2020 Remuneration Policy
2	19 Juni 2020	*Self-Assessment*
3	15 Juli 2020	Susunan keanggotaan Komite-komite Dewan Komisaris Membership composition of the Committees of the Board of Commissioners

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2020, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Trainings for Remuneration and Nomination Committee Members

Training programs for members of the Remuneration and Nomination Committee is required for members to always be update on the information regarding the latest development in the banking industry and other knowledge related to the implementation of duties as members of the Remuneration and Nomination Committee. Throughout 2020, the trainings followed were as follows:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan	Tempat Location	Nama Peserta Name of Participants
Webinar: Strategi Bank di Era Digital Webinar: Bank Strategy in the Digital Era	*Indonesian Banking School*	Tahun 2020 In 2020	Indonesia	Seluruh Anggota DeKom All BOC Members
Intro to Crypto	*Institute Banking* Indonesia	Tahun 2020 In 2020	Indonesia	Seluruh Anggota DeKom All BOC Members

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.

Term of Office of Members of the Remuneration and Nomination Committee

The term of office of Committee members who are members of the Board of Commissioners shall be in accordance with the term of office/appointment as a member of the Board of Commissioners stipulated in the GMS, while the term of service of members who are HR/Employee Executive Officers is in accordance with the Company's staffing regulations.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Integrated Governance Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners of Main Entity in ensuring the implementation of Integrated Governance through the assessment of adequate Internal Control, and implementation of Integrated Compliance function as well as gave recommendations for the improvements of Integrated Governance Guidelines.

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan

Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai wujud pemenuhan terhadap ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasl 14 ayat 1, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 27 Januari 2017 yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari;

a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota; dan
e. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin

Legal Basis

PaninBank has established a Remuneration and Nomination Committee based on these following regulations, as follows:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letters, regarding the implementation and organs of Corporate Governance, Integrated Governance and Prudential Principles for Commercial Banks that performs Partial Delivery of Implementation to Other Parties;
2. Bank's Company Policy

The Objective of Establishing an Integrated Governance Committee

As a form of compliance with the provisions of POJK No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates Article 14 paragraph 1, in order to support the effective implementation of its duties, the Board of Commissioners of Main Entity is required to establish an Integrated Governance Committee.

Integrated Governance Committee Charter

The Integrated Governance Committee Charter which was approved by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Main Entity on January 27, 2017 which regulates, among others, Authority, Position, Meeting, Attendance, and Duties and Responsibilities.

Criteria for Integrated Governance Committee Members

Based on the POJK provisions aforementioned, members of the Integrated Governance Committee shall at least consist of:

a. An Independent Commissioner who becomes Chairman of a Committee in Main Entity, as Chairman concurrently as a Member;
b. Independent Commissioner who represents and is appointed from LJK in a financial conglomerate, as a member;
c. An Independent Party as a Member;
d. Member of the Sharia Supervisory Board from LJK in the Financial Conglomerate, as a Member; and
e. Membership of Independent Commissioner in the KTKT can be in the form of permanent or non-permanent membership, according to the needs of Panin Group Financial Conglomerate.

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Independence of Integrated Governance Committee Members

Chairman and Committee members who come from Independent Commissioners, Independent Parties and Sharia Supervisors who do not have financial, management, ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders or relationship with the Company, which may affect the independence of Committee members.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Duties and Responsibilities

a. Evaluating the implementation of Integrated Governance at least through assessment of adequate internal control and implementation of compliance function in an integrated manner; and
b. Providing recommendation to the Board of Commissioners of Main Entity to improve Integrated Governance Charter.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference,* hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2020 telah dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2021. Rapat tersebut membahas antara lain:

a. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
b. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
c. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
d. Hal-hal lain terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee Meetings

The Integrated Governance Committee is obliged to hold a meeting at least once in each semester, in which the implementation can be done by video conference, the results of Integrated Governance Committee meeting are recorded in minutes of meeting and documented properly. The Integrated Governance Committee Meeting for the position of December 2020 was held on January 29, 2021. The meetings discussed a number of subjects, among others:

a. Evaluation of the Implementation of the Integrated Compliance Work Unit
b. Evaluation of the Implementation of the Integrated Risk Management Work Unit
c. Evaluation of the Implementation of the Integrated Internal Audit Work Unit
d. Other matters related to the implementation of Integrated Governance

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi
Composition of the Integrated Governance Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi Position in the Integrated Governance Committee
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk President Commissioner – Independent of PT Bank Panin Tbk	Ketua Chairman
2	Lintang Nugroho	Wakil Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk. Vice President Commissioner – Independent of PT Bank Panin Tbk	Anggota Member
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Independent Commissioner of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Anggota Member
4	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai-Ichi Life Sharia Supervisory Board of PT Panin Dai-Ichi Life	
5	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life Independent Commissioner of of PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota Member

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi
Composition of the Integrated Governance Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi Position in the Integrated Governance Committee
6	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life Chairman of Sharia Supervisory Board of PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota Member
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk Independent Commissioner of PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota Member
6	Peter Setiono	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk Independent Commissioner of PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota Member
7	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management Commissioner of PT Panin Asset Management	Anggota Member
9	Usep Ekadaya	Pihak Independen – PT Bank Panin Tbk Independent Party - PT Bank Panin Tbk	Anggota Member
10	Bambang Setyoko	Pihak Independen - PT Bank Panin Tbk. Independent Party - PT Bank Panin Tbk	Anggota Member

DIREKSI
Board of Directors

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

The Board of Directors is the Company's main organ that is responsible for managing the Company in the interests and objectives of the Company. Other duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors are stipulated in the provisions of legislation, such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Regulations, and the Company's Articles of Association. As stated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors has the right to represent PaninBank, both inside and outside the court.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PaninBank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank; dan
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan.

Legal Basis

Legal basis used as a reference to establish and to appoint the Board of Directors of PaninBank refers to several provisions, as follow:

1. Law of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Companies and Banking;
2. The Bank's Articles of Association; and
3. OJK Regulations, BI Regulations, OJK Circular Letters and BI Circular Letters related to the Implementation and Organs of Corporate Governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Menunjuk Anggaran Dasar PaninBank Pasal 16.14.a, pembagian tugas dan wewenang serta kepengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 26 Juni 2020 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/DIR-SK/20 tertanggal 12 November 2020 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Panin Tbk. Tugas Direksi PaninBank antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengurusan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.

2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip *Good Corporate*

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

According to PaninBank's Articles of Association Article 16.14.a, the division of duties and authorities, as well stewardship among members of the Board of Directors is determined based on the General Meeting of Shareholders (GMS). The Bank's GMS held on June 26, 2020 authorized the Board of Directors to determine segregation of duties and authorities of each member of the Board of Directors. In connection with this, based on Directors' Decree No. 009/DIR-SK/20 dated November 12, 2020 concerning Segregation of Duties and Authorities of the Board of Directors of PT Bank Panin Tbk. Duties of the Board of Directors of PaninBank are as follows:

1. Carry out the Bank's management by regulating, monitoring and ensuring the operation of the Bank's business activities in accordance with the Bank's vision and mission.
2. Establish business strategies and monitor as well as ensure its implementation in accordance with the principles of Risk Management and Good Corporate

Governance dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya bertanggung jawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.
5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembidangan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Bank, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.
7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong "Sehat".
11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan

Governance with due observance of the precautionary principle, duties and responsibilities in the General Control System as well as compliance with Financial Services Authority Regulations (POJK), Bank Indonesia Regulations (PBI), and other applicable statutory provisions.

3. Prepare the Bank's Business Plan and/or its revisions, conduct supervision and disseminate information to the relevant work unit officials, and submit it to the Financial Services Authority (OJK) after obtaining approval from the Board of Commissioners. Furthermore, responsible for monitoring the implementation from time to time.
4. Organize an Annual Work Meeting to evaluate and determine the Work Programs for the following year.
5. Determine the organizational structure of the Bank, along with the description of duties and authorities of each division.
6. Manage Company Resources to optimize the Bank's performance, examine every matter related to business efficiency, make decisions, prepare the policies, and carry out supervision as well as required verification.
7. Supervise all levels of management to ensure the accuracy and quality of reports and to approve financial data presented to the public, authorities and shareholders.
8. Organize the Board of Directors Meeting at least once per month to discuss matters relating to business developments, the Bank's Business Plan achievements, and problems encountered.
9. Organize Joint Meetings with the Board of Commissioners at least 4 (four) times a year to discuss matters relating to business developments, the Bank's Business Plan achievements, and obstacles faced.
10. Maintain the Bank Soundness Level to be classified as "Healthy".
11. Supervise and coordinate with members of conglomerate entities (Integrated Financial Services Institutions).

Authority of the Board of Directors

In carrying out its duties, the Board of Directors have the authority to:

1. Represent the Company both inside and outside the court regarding all matters and in all events, binding the Bank to other parties, as well as performing all necessary actions both those concerning the management and ownership

maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.

2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) asset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk melakukan transaksi yang dinilai memiliki benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan:

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa

with written approval from and or signed by 3 (three) members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners meeting, wherein one of them must be the President Commissioner or Vice President Commissioner.

2. The Board of Directors must seek approval of the GMS to be able to use more than 50% (fifty percent) of the Company's assets as collateral in one or more transactions occur, both relating to each other or not.
3. The Board of Directors must obtain the GMS' approval to conduct transactions considered having a conflict of interest between the personal economic interests of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners or controlling shareholders, and the economic interests of PaninBank.
4. The Board of Directors have the right to appoint one or more representatives or proxies in writing and to give certain powers as stipulated in the power of attorney in the written document.

Board of Directors Charter

PaninBank's Board of Directors already has the Board of Directors Charter which are formulated based on the applicable regulations governing matters relating to:

- Organization;
- Length of service;
- Duties and responsibilities;
- Authority;
- Delegation of authority;
- Independence of the President Director;
- Openness;
- Work ethics;
- Establishment of units
- Meetings;
- Mechanism for decision making;
- Performance assessment; and
- Position ethics.

This charter is regularly reviewed and updated. The Board of Directors Charter has been approved by the Commissioner and ratified by the President Director of PaninBank.

Appointment of Members of the Board of Directors

PaninBank's Board of Directors members are appointed by the GMS after considering the recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee. Term of office of

jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

members of the Board of Directors shall become effective from the date specified in the GMS and ends at the closing of the 3rd (third) GMS after the date of such appointment. If there are additional/replacement members of the Board of Directors, tenure of the board of Directors concerned starts from the date determined by the GMS and ends on the same date as the terms of office of the other Directors. The Articles of Association designate that members of the Board of Directors whose term of office has ended can be re-elected by the GMS for the next 3 (three) years. Appointment of members of the Board of Directors is declared effective after the appointed person is declared after having passed the fit and proper test in accordance with applicable regulations.

Kriteria Anggota Direksi diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukanya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparasi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
8. Kriteria lainya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Criteria for members of the Board of Directors are specified in the Board of Directors Charter, which, among others, requires the following:

1. Having good character and morals;
2. Having at least 5 (five) years experiences in the operational field as a Bank Executive Officer;
3. Having work professionalism and high integrity;
4. Understand the principles of good corporate governance and risk management principles;
5. Having adequate competence in accordance with their position;
6. Fulfill the criteria of independence and transparency;
7. Passed the Capability and Compliance assessment in accordance with the provisions of the Financial Services Authority; and
8. Other criteria in accordance with applicable laws and regulations.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2020 beranggotakan 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 1 (satu) orang berkewarga negaraan Malaysia, seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompentensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainya.

Total and Composition of the Board of Directors

As of December 31, 2020, PaninBank's Board of Directors consists of 10 (ten) members, comprise of 9 Indonesian citizens and 1 (one) Malaysian citizen, all of them are domiciled in Indonesia.

The Board of Directors is led by the President Director who comes from professional circles with integrity and competence in the banking sector. The President Director of PaninBank is an independent party that has no management, ownership and/or financial relationships as well as family relationships with controlling shareholders, as well as to members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan yang ditetapkan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

All members of PaninBank's Board of Directors are having high integrity, competence, reputation, experience, as well as expertise in the banking sector. The appointment or replacement of members of the Board of Directors always takes into account the recommendations given by the Remuneration and Nomination Committee, as well as regulations set by regulators governing assessment and appropriateness. All members of the Board of Directors who currently serves has had more than 5 (five) years of experience in the banking sector as the Bank's Executive Officers and have been certified in the field of Risk Management.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Fit and Proper Test Assessment

OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions states that prospective members of the Board of Directors shall obtain the approval from OJK prior to carry out act, duty, and function as the Board of Directors. Members of the Board of Directors who have passed fit and proper test without notes and have received approval from the OJK, indicate that each member of the Board of Directors has adequate integrity, competence and financial reputation, can be seen through the table below:

Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:
The composition of PaninBank Board of Directors is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Domisili Domicile
1	**Herwidayatmo**	**Presiden Direktur** **President Director**	1 September 2014 sampai dengan saat ini September 1, 2014 - present	Indonesia
2	**Hendrawan Danusaputra**	**Wakil Presiden Direktur** (Koordinator Bidang *Corporate Banking, Bidang Commercial Banking & Mortgage*, Bidang *Treasury*, Bidang *Network & Distribution* dan membawahi Institutional Banking & BUMN, *Credit Card & Personal Loan* (CCPL) dan *General Affair* serta Fungsi Pengembangan dan Pengawasan *Subsidiaries*) **Deputy President Director** (Coordinator for Corporate Banking, Commercial Banking & Mortgage, Treasury, Network & Distribution and in charge of Institutional Banking & BUMN, Credit Card & Personal Loan (CCPL) and General Affair as well as the Development and Supervision Function of Subsidiaries)	2016 sampai dengan saat ini 2016 - present	Indonesia
3	**Januar Hardi**	**Direktur I** (Bidang *Corporate Banking*) **Director I** (Corporate Banking)	13 Desember 2016 sampai dengan saat ini December 13, 2016 - present	Indonesia
4	**Edy Heryanto**	**Direktur II** (Bidang *Commercial Banking & Mortgage, Small Medium Business*, Mikro dan *Mortgage*) **Director II** (*Commercial Banking & Mortgage, Small Medium Business*, Micro and *Mortgage*)	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini May 28, 2004 - present	Indonesia
5	**Gunawan Santoso**	**Direktur III** (Bidang Tresuri, meliputi *Liquidity, Currency Trading & Commercial*, dan *Capital Market & Investor Relations*) **Director III** (Treasury Sector, including Liquidity, Currency Trading & Commercial, and Capital Market & Investor Relations)	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini June 28, 2007 - present	Indonesia

Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:

The composition of PaninBank Board of Directors is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Domisili Domicile
6	**Haryono Wongsonegoro**	**Direktur IV** (Bidang *Network & Distribution)* **Director IV** (Network & Distribution)	12 November 2020 sampai dengan saat ini November 12, 2020 - present	Indonesia
7	**Ng Kean Yik**	**Direktur V** (Bidang *Risk Management* meliputi *Risk Management* dan *Digital & Liabilities Management*) **Director V** (Risk Management including Risk Management and Digital & Liabilities Management)	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini June 30, 2008 - present	Indonesia
8	**Lionto Gunawan**	**Direktur VI** (Bidang SDM dan Bisnis & Strategis IT) **Director VI** (HR and Business & IT Strategic)	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini June 9, 1997 - present	Indonesia
9	**Suwito Tjokrorahardjo**	**Direktur VII** (Bidang Operasional & Teknologi Informasi, *International Operations*, dan *Internal Control*) **Director VII** (Operations & Information Technology, International Operations, and Internal Control)	29 Mei 2015 sampai dengan saat ini May 29, 2015 - present	Indonesia
10	**Antonius Ketut Dwirianto**	**Direktur VIII** (Kepatuhan, *Legal Affairs*, Pengaduan Nasabah dan APU PPT) **Director VIII** (Compliance, Legal Affairs, Customer Complaints and AML-CFT)	8 September 2009 sampai dengan saat ini September 8, 2019 - present	Indonesia

Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2020

Profile of PaninBank Board of Directors at End of 2020

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Herwidayatmo	WNI Indonesian	64 tahun/ years old	Presiden Direktur President Director	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) - *Master Business Administration* dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992) - Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1981) - Master of Business Administration from Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992)	- Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - Bapepam, Departemen Keuangan - President Director of Bank Panin - Vice President Director of PT Bank Permata - Legal and Compliance Director of PT Bank Permata - Executive Director of World Bank for Southeast Asia - Chairman of Bapepam - Deputy Minister of BUMN for Restructuring and Privatization - Bapepam, Department of Finance
Hendrawan Danusaputra	WNI Indonesian	56 tahun/ years old	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director	*Computer Science*, University of Technology, Sydney, Australia (1988) Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)	- Wakil Presiden Direktur PaninBank - Direktur Institutional Banking PaninBank - *Vice President* Divisi Internasional - Direktur *Financial Institution* di American Express Bank - Deputy President Director of PaninBank - Institutional Banking Director of PaninBank - Vice President for International Division - Director of Financial Institution at American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI Indonesian	53 tahun/ years old	Direktur Director	*Finance*, San Francisco State University, Amerika Serikat Finance, San Francisco State University, United State of America	- Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank - Human Resources, Business & Information Technology Strategic Director of PaninBank - Director at ANZ PaninBank - Manager of Westpac PaninBank

Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2020

Profile of PaninBank Board of Directors at End of 2020

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Edy Heryanto	WNI Indonesian	56 tahun/ years old	Direktur Director	- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia - Academy of Finance and Development Banking - Indonesian Institution of Banking Education	- Direktur Perbankan Komersial & Mortgage PaninBank - *Vice President* dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - *Credit Analyst*, Bank Universal - Commercial Banking and Mortgage Director of PaninBank - Vice President and Jakarta Palmerah Branch Office Manager - Credit Analyst of Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI Indonesian	53 tahun/ years old	Direktur Director	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Engineering Faculty from Gadjah Mada University, Yogyakarta	- Direktur Tresuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk - Treasury Director of PaninBank - Commissioner of PT Verena Multi Finance - Commissioner of PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	Malaysia Malaysian	65 tahun/ years old	Direktur Director	- Jurusan *Commerce* University of Melbourne, Australia - *Master Business Administration*, University of Melbourne, Australia - Commerce, University of Melbourne, Australia - Master of Business Administration, University of Melbourne, Australia	- Direktur *Risk Management, Digital & Liabilities Development* - Direktur Perbankan Ritel PaninBank - *Group Manager Retail Banking* PaninBank - *Head Portfolio Management* ANZ Bank - *Executive Group Strategy* ANZ Bank - Risk Management, Digital & Liabilities Development Director - Retail Banking Director of PaninBank - Retail Banking Group Manager of PaninBank - Head Portfolio Management of ANZ Bank - Executive Group Strategy of ANZ Bank
Januar Hardi	WNI Indonesian	57 tahun/ years old	Direktur Director	Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Husbandry/Economics Studies in Husbandry, Bogor Agricultural University (IPB)	- Direktur Perbankan Korporasi PaninBank - *Vice President Head of Corporate Banking* PaninBank - *Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group* PaninBank - *Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group* PaninBank - *Manager Unit Head Corporate Banking Group* PaninBank - *Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking* - Corporate Banking Director of PaninBank - Vice President - Head of Corporate Banking Group of PaninBank - Asst. Vice President Unit Head of Corporate Banking Group of Bank Panin - Manager Unit Head of Corporate Banking Group of Bank Panin - Manager of PaninBank Group Corporate Banking Unit Head - Account Manager for Consumer Banking Junior Officer for Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo	WNI Indonesian	56 tahun/ years old	Direktur Director	- Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing - University of Surabaya - Pelita Harapan University with a Masters in Economics/ Marketing	- Direktur Operasional dan Teknologi - *Branch Network & Operations Group Head* PaninBank - Lippo Bank - Citibank - Operations and Technology Director - Branch Network & Operations Group Head of PaninBank - Lippo Bank - Citibank

Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2020

Profile of PaninBank Board of Directors at End of 2020

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Antonius Ketut Dwirianto	WNI Indonesian	52 tahun/ years old	Direktur Director	- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) in Finance and Banking, Yogyakarta - Indonesia Banking Development Institute (LPPI) - Bachelor of Laws from Sebelas Maret University, Surakarta - Master of Business Law from Pelita Harapan University - Master of Business Law in the Post Graduate Study from Jayabaya University	- Direktur Kepatuhan, Legal Affair & AML - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - *Branch Manager* Bank CIC - *Account Officer* Bank CIC - Compliance, Legal Affairs & AML Director - Compliance and Risk Management Director of PaninBank - Head of Compliance Bureau of PaninBank - Branch Manager of Bank CIC - Account Officer of Bank CIC
Haryono Wongsonegoro	WNI Indonesian	56 tahun/ years old	Direktur Director	- Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - *Master of Management,* Universitas Udayana Bali (2004) - Bachelor of Accounting, Putra Bangsa University Surabaya (1990) - Master of Management, Udayana University Bali (2004)	- Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989) - Network and Distribution Director of PaninBank (2020-present) - Head of Jakarta Regional Office of Bank Central Asia (2011-2019) - Head of Small and Medium Business (SME) and Commercial Business of Bank Central Asia (2009-2011) - Head of Central Java Regional Office of Bank Central Asia (2005-2009) - Head of Main Branch Office of Bank Central Asia (1995-2005) - Deputy Chairman of Main Branch Office of Bank Central Asia (1993-1995) - Head of Internal Audit Team of Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor at Public Accounting Firm (1987-1989)

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi, sebagai berikut;

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

Duties and responsibilities of Member of the Board of Directors are presented in the following table as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
1	Herwidayatmo	1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat; 2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi; a Merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada); b Mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait; c Melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun. 3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang *Risk Management* (*Non-Risk Taking Unit*), Bidang *Finance & Planning*, Bidang *Human Resources*, *Business & IT Strategic*, Bidang *Operations & Information Technology*, dan Bidang *Compliance*, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & *Legal Affair* (*Non Business & Operation Legal*) dan membawahi *Business & Corporate Legal* (Biro Hukum), *Corporate Credit Restructuring & Recovery* (CRR) dan *Sprecial Asset Management* (SAM), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (SKAI), serta *Corporate Secretary*; 5. Memastikan; a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern; b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu mendorong pertumbuhan yang sehat dan mampu memberikan keuntungan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya; c. Pelaksanaan Bidang *Compliance*, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & *Legal Affairs (Non-Business & Operation Legal*) dan penanganan perkara hukum terkait kegiatan operasional Bank di luar perkreditan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; d. Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management – Non-Risk Taking Unit*) yang efektif dan efisien untuk menjalankan fungsi "Four Eyes Principles"; e. Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan (akunting) dan perencanaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku: f. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank dan ke depannya; g. Terjaganya tingkat kesehatan Bank; h. Efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan OJK, temuan audit internal dan audit eksternal; i. Pengendalian dan pemantauan efektivitas pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) untuk memberi kesempatan kepada seluruh jenjang organisasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan *internal fraud;* 6. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja terkait,	1. Ensuring the Bank's vision and mission can be realized with the support of the Bank's appropriate strategies and policies; 2. Responsible for the Bank's Business Plan which includes; a Formulating Bank policies and strategies in the Bank Business Plan, along with its revisions (if any); b Disseminating information to all relevant organizational levels; c Evaluate the realization of the Bank's Business Plan at the end of each month/end of quarter/end of year. 3. Leading the management of the Bank and all other activities carried out by members of the Board of Directors; 4. Coordinating activities in the fields of Risk Management (Non-Risk Taking Unit), Finance & Planning, Human Resources, Business & IT Strategic, Operations & Information Technology, and Compliance, Group Conglomeration, AML-CFT, Customer Complaints (CCH) & Legal Affair (Non Business & Operation Legal) and in charge of Business & Corporate Legal (Bureau of Law), Corporate Credit Restructuring & Recovery (CRR) and Special Asset Management (SAM), Bureau of Supervision & Audit (SKAI), and Corporate Secretary; 5. Ensuring; a. The development and control of activities in fields and work units under their coordination are well implemented in accordance with internal and external regulations; b. The achievement of all Bank work plans while complying with applicable laws and regulations, encouraging sound growth and providing benefits to Shareholders and other stakeholders; c. Implementation of Compliance, Group Conglomeration, AML-CFT, Customer Complaints (CCH) & Legal Affairs (Non-Business & Operation Legal) and handling of legal cases related to Bank operational activities outside of credit, in accordance with applicable laws and regulations; d. Implementation of Risk Management, Risk Management - Non-Risk Taking Unit, effectively and efficiently to carry out the "Four Eyes Principles" function; e. The implementation of Financial Administration (accounting) activities and financial planning in accordance with applicable regulations; f. Development of Bank systems and technology that can support all operational activities of the Bank and in the future; g. Maintained soundness level of the Bank; h. The effectiveness of the implementation of the Internal Control System and the follow-up on the results of OJK inspections, internal audit findings and external audits; i. Control and monitoring of the effectiveness of the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) to provide opportunities for all levels of the organization to participate in efforts to eradicate internal fraud; 6. Consolidate with all sectors in the preparation of the Bank Business Plan which will be submitted to the OJK as well as disseminate information to all relevant Work Unit Officers;

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
		7. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu; 8. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi di luar jadwal yang ada; 9. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik; 10. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; 11. Menjadi Ketua dari Komite-komite Direksi; 12. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan hadir, sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi; 13. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*.	7. Coordinate with field Directors in evaluating the implementation of the Bank's Business Plan on a quarterly basis and recommending revisions if deemed necessary; 8. To chair Board of Directors Meetings, ALCO Meetings and other Board of Directors Committees according to the set schedule as well as Board of Directors meetings outside the existing schedule; 9. Creating a harmonious relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors Shareholders, Employees, Customers, Investors and other Government Agencies in order to create good corporate governance; 10. Fostering good relations with all partners of the Bank in order to create mutually beneficial relationships for both parties; 11. Serves as Chairman of the Board of Directors' Committees; 12. Take over the duties of a member of the Board of Directors and/or his replacement who was unable to attend, in accordance with the Rules for Signing Letters and Replacing Directors; 13. Leading and directing Human Resources policies under his coordination in coordination with the Director of Human Resources.
2	Hendrawan Danusaputra	A Selaku Koordinator Bidang; 1. Menetapkan Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian target usaha, bersama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait; 2. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang *Corporate Banking*, Bidang *Commercial Banking & Mortgage*, Bidang *Treasury*, dan Bidang *Network & Distribution*; 3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang *Commercial Banking & Mortgage*, Bidang *Treasury* dan Bidang *Network & Distribution*; 4. Memastikan; a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Pemberian *Credit Line* antar Bank, plafond transaksi *Forex*, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; c. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan tercapainya target yang ditetapkan; d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara dengan baik; e. Terkendalinya tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) Bank; 5. Menggantikan tugas Presiden Direktur dan/atau Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi. B Bidang *Institutional Banking* & BUMN, *Credit Card & Personal Loan* dan *General Affair*, 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Institutional Banking* & BUMN, CCPL dan *General Affair*, 2. Menetapkan Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi Bidang *Institutional Banking* & BUMN, CCPL dan *General Affair*. 3. Memastika; a. Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi terlaksana dengan baik; b. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya; c. Pengadaan barang & jasa, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta aset Bank (*Non-Financial*) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan; d. Terselenggaranya program *marketing* yang terencana dan terkoordinasi baik; e. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis CCPL kepada Cabang sesuai koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Recources*;	A As Field Coordinator; 1. Establish Policies and Strategies to achieve business targets, together with the Directors of the Fields and related Work Units; 2. Establish policies, planning, development and strategies in the Corporate Banking Sector, Commercial Banking & Mortgage, Treasury, and Network & Distribution; 3. Approve and decide matters relating to the activities and business plans of the Bank in the Commercial Banking & Mortgage Sector, Treasury Sector and Network & Distribution Sector; 4. Ensure; a. The development and control of Unit activities under its coordination are well implemented and in accordance with the prevailing laws and regulations; b. Provision of interbank credit lines, Forex transaction ceilings, securities transactions and money markets in accordance with the limits of authority given; c. Competitive business development and the achievement of the targets set; d. Coordination of the implementation of policies, planning, development and strategies that have been determined is well organized; e. The Bank's Non-Performing Loan (NPL) is under control; 5. Replaces the duties of the President Director and/or other Directors/replacements if the person concerned is absent in accordance with the Rules for Signing Letters and Replacing Directors. B Institutional Banking & BUMN, Credit Card & Personal Loans and General Affairs; 1. Prepare a Bank Business Plan for Institutional Banking & BUMN, CCPL and General Affairs; 2. Establish Policies, Planning, Development and Strategy for Institutional Banking & BUMN, CCPL and General Affairs. 3. Ensure; a. Policy, Planning, Development and Strategy are well executed; b. The achievement of the earning assets target under its management; c. Procurement of goods & services, management and supervision of Bank inventories and assets (Non-Financial) are managed and operated efficiently and in accordance with determined policies; d. The implementation of a well-planned and coordinated marketing program; e. Management and allocation of CCPL business targets to branches according to coordination through coordination with the Director of Human Resources;

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
		C. Fungsi Pengembangan dan Pengawasan Subsidiaries dan Bank Koresponden; 1. Menetapkan kebijakan, perencanaan, *monitoring*, pengembangan dan strategi subsidiaries; 2. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk KPM *Joint Finance*; 3. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, lembaga pemeringkat dan lembaga Keuangan.	C Function of Development and Supervision of Subsidiaries and Correspondent Banks; 1. Establish policies, planning, monitoring, development and subsidy strategies; 2. Fostering, developing and supervising the performance, business, operations and business growth of the Subsidiary including KPM Joint Finance; 3. Fostering good relations with Correspondent Banks, rating agencies and financial institutions.
3	Januar Hardi	Selaku Direktur Bidang *Corporate Banking* 1. Menyusun Rencana Bisnis Banking Bidang *Corporate Banking*; 2. Menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan dan pengembangan Bidang *Corporate Banking* serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan; 3. Memastikan; a. Terselenggaranya kegiatan di bawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Korporasi; d. Terkendalinya tingkat NPL dan *Sprecial Mention* kredit korporasi; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamia dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur *Human Resources.* 4. Melakukan supervisi dan pengendalian Divisi *Corporate Banking* dan memastikan pelaksanaan tugas Divisi sesuai kebijakan yang ditentukan; 5. Menjalin hubungan dengan perusahaan Korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif; 6. Memutuskan pemberian pembiayaan Korporasi sesuai denggan batas kewenangan yang diberikan; 7. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 8. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*; 9. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi.	As Director for Corporate Banking 1. Prepare a Banking Business Plan in the Corporate Banking Sector; 2. Establish policies, strategies, planning and development in the Corporate Banking sector and pay attention to the quality of loans; 3. Make sure; a. The implementation of activities under its coordination according to business targets; b. Planned policies and strategies are well executed according to the precautionary principle; c. The achievement of corporate credit targets; d. Controlled levels of NPL and Sprecial Mention of corporate loans; e. Training and coaching for effective product marketing to make it more dynamic and competitive, in coordination with the Human Resources Director. 4. Supervise and control the Corporate Banking Division and ensure the implementation of Division duties according to determined policies; 5. Establishing relationships with the Corporation and ensuring competitive services; 6. Decide on the provision of Corporate financing in accordance with the limits of the authority given; 7. Recommend processes for credit recovery (earning assets) in their respective fields; 8. To lead and direct Human Resources policies under its coordination in coordination with the Human Resources Director; 9. Replace the duties of another Director/successor if he/she is unable to comply with the Rules for Signing Letters and Replacing Directors.
4	Edy Heryanto	Selaku Direktur Bidang *Commercial Banking & Mortgage*, meliputi *Commercial, Small Medium Business* (SMB), Mikro dan *Mortgage* 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Commercial Banking* dan *Mortgage*; 2. Menetapkan Kebijakan dan Strategi; a. Perencanaan dan pengembangan Bidang *Commercial Banking*, SMB Mikro dan *Mortgage*; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat; c. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan *Special Mention* segmen Komersial, SMB, Mikro, dan *Mortgage.* 3. Memastikan; a. Terselenggaranya kegiatan di bawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Komersial, SMB, Mikro dan *Mortgage* di seluruh Cabang; d. Terkendalinya tingkat NPL dan *Special Mention* kredit segmen Komersial, SMB, Mikro dan *Consumer Lending*; e. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur *Human Resources.* 4. Memutuskan pemberian pembiayaan *Commercial*, SMB, Mikro dan *Mortgage* sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;	As Director of Commercial Banking & Mortgage, covering Commercial, Small Medium Business (SMB), Micro and Mortgage 1. Prepare a Bank Business Plan for Commercial Banking and Mortgage; 2. Establish Policies and Strategies; a. Planning and development of Commercial Banking, SMB Micro and Mortgage; b. Management and allocation of business targets to branches according to market share and local market potential; c. Management of non-performing loans and Special Mention for the Commercial, SMB, Micro, and Mortgage segments. 3. Ensure; a. The implementation of activities under its coordination according to business targets; b. Planned policies and strategies are well executed in accordance with the precautionary principle; c. The achievement of targets for Commercial, SMB, Micro and Mortgage Loans in all Branches; d. Controlled NPL levels and Special Mention for loans in the Commercial, SMB, Micro and Consumer Lending segments; e. Training and coaching for effective product marketing to make it more dynamic and competitive in coordination with the Human Resources Director. 4. Decide on the provision of Commercial, SMB, Micro and Mortgage financing in accordance with the limits of the authority given;

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
		5. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources* 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi.	5. Recommend processes for salvaging credit (earning assets) in their respective fields; 6. Leading and directing Human Resources policies under his coordination in coordination with the Director of Human Resources 7. Replace the duties of another Director/successor if he/she is unable to comply with the Rules for Signing Letters and Replacing Directors.
5	Gunawan Santoso	Selaku Direktur Bidang *Treasury* 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Treasury*; 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang *Treasury* serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar; 3. Memutuskan pemberian *line* antar Bank, plafon transaksi *Forex*, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari Transaksi *Treasury* dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank; 5. Memastikan; a. Pemenuhan likuiditas Bank, kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta tersedianya *Secondary Reserve* sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku; b. Terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) Bank dari waktu ke waktu sesuai ketentuan yang berlaku; c. Terselenggaranya transaksi valuta asing baik untuk kepentingan Bank maupun kebutuhan transaksi nasabah secara aman dan menguntungkan; d. Terselenggaranya transaksi surat-surat berharga baik untuk keperluan *trading* maupun *banking book* secara aman dan menguntungkan; e. Pembinaan, sosialisasi informasi penting, pengembangan hubungan baik serta komunikasi dengan para investor terselenggara dengan efektif dan berjalan secara wajar; f. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi denga Direktur *Human Resources*. 6. Menyiapkan, menganalisis dan menyajikan laporan-laporan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset dan Kewajiban Bank dalam Rapat ALCO, 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti DIreksi.	As Director of Treasury 1. Prepare a Bank Business Plan in the Treasury Sector; 2. Establish policies and strategies for the Treasury sector and ensure the smooth and smooth operation of these activities; 3. Decide on the provision of interbank lines, Forex transaction limits, securities transactions and the money market in accordance with the limits of authority given; 4. Help increase the Bank's revenue from Treasury Transactions within the risk limits that the Bank can tolerate; 5. Ensure; a. Fulfillment of Bank liquidity, adequacy of Statutory Reserves at Bank Indonesia and the availability of a Secondary Reserve in accordance with applicable policies and regulations; b. Maintained the Bank's Net Open Position (PDN) from time to time in accordance with applicable regulations; c. The implementation of foreign exchange transactions both for the benefit of the Bank and for the needs of customer transactions in a safe and profitable manner; d. The implementation of securities transactions for both trading and banking book needs in a safe and profitable manner; e. Coaching, dissemination of important information, development of good relations and communication with investors are carried out effectively and run fairly; f. Training and coaching for effective product marketing to make it more dynamic and competitive in coordination with the Human Resources Director. 6. Prepare, analyze and present reports relating to the Management of Bank Assets and Liabilities in ALCO Meetings, 7. Replace the duties of another Director/successor if the person concerned and his successor are unable to do so, in accordance with the Rules for Signing Letters and Substitute Directors.
6	Haryono Wongsonegoro	Selaku Direktur Bidang Network & Distribution 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Network & Distribution*; 2. Menetapkan Kebijakan dan strategi; a. Perencanaan dan Pengembangan Bidang *Network & Business* dan *National Sales Management*; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 3. Memastikan; a. Terselenggaranya kegiatan di bawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Terselenggaranya program *marketing* yang terencana dan terkordinasi baik; d. Tercapainya target bisnis dan *sales* di seluruh Cabang; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur *Human Resources*; 4. Memimpin dan mengarahkan Kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*.	As Director of Network & Distribution 1. Prepare a Bank Business Plan in the Network & Distribution Sector; 2. Establish policies and strategies; a. Planning and Development of Network & Business and National Sales Management; b. Management and allocation of business targets to branches according to market share and local market potential. 3. Ensure; a. The implementation of activities under its coordination according to business targets; b. Planned policies and strategies are well executed in accordance with the precautionary principle; c. The implementation of a well-planned and coordinated marketing program; d. Achievement of business and sales targets in all branches; e. Training and coaching for effective product marketing to make it more dynamic and competitive in coordination with the Human Resources Director; 4. Lead and direct the Human Resources Policy under his coordination in coordination with the Human Resources Director.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
7	Ng Kean Yik	Selaku Direktur Bidang Manajemen Risiko, *Digital* & *Liabilities Management* 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Risk Management* dan *Digital & Liabilities Management*; 2. Mengembangkan strategi implementasi kerangka Manajemen Risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank; 3. Menetapkan strategi perencanaan dan pengembangan produk-produk *Digital* serta memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis, bekerja sama dengan Direktur *Human Resources*, Bisnis dan IT Strategi, Direktur *Operations* dan *Information Technology* dan Direktur *Network & Distribution* dan Direktur *Compliance*. 4. Memastikan; a. Efektivitas pengelolaan Bidang Manajemen Risiko (*Non Risik Taking Unit*); i. Melakukan Monitoring agar risiko Bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan *risk appetite* Bank melalui proses pemantauan, ii. Memberikan opini/pendapat manajemen risiko atas usulan dan rancangan keputusan dari Direktur bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan perkreditan, operasional dan atau rancangan produk/aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan/keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini, dengan tujuan; 1) Agar risiko yang mungkin timbul bisa diidentifikasi dan dikelola, 2) Prinsip-prinsip Manajemen Risiko bisa diperbaiki, 3) Terpenuhinya penerapan *Four Eyes Principles* bagi manajemen Bank. opini/pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini/pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (*Non-Risk Tak ing Unit*), namun sebagai bahan pertimbangan oleh Manajemen (Komite Pemutus Kredit/KKD) dalam pengambilan keputusan; iii. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya; iv. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK atau Peraturan yang berlaku; v. Bekerja sama dengan Direktur *Complinace* dalam pelaksanaan Konglomerasi Keuangan Panin Grup. b. Pengembangan *Digital Banking and Liabilitiy Product* yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar; 5. Meminpin Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup selaku ketua KMR Terintegrasi; 6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*; 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi.	As Director of Risk Management, Digital & Liabilities Management 1. Prepare a Bank Business Plan for Risk Management and Digital & Liabilities Management; 2. Develop an adequate Risk Management framework implementation strategy in accordance with the characteristics, business complexity and risk profile of the Bank; 3. Determine planning and development strategies for Digital products and ensuring that these activities are carried out according to business targets, in collaboration with the Director of Human Resources, Business and IT Strategy, Director of Operations and Information Technology and Director of Network & Distribution and Director of Compliance. 4. Ensure; a. Effectiveness of Risk Management (Non Risk Taking Unit); i. Bank risk monitoring so that it is identified, measurable, can be managed properly and controlled according to the vision, mission, strategy and risk appetite of the Bank through the monitoring process; ii. Provide opinion/risk management opinion on proposals and draft decisions from Directors of other fields that will carry out lending, operational and/or new product/activity designs as long as the design of the activity/decision is submitted and an opinion is requested, with the aim of; 1) So that risks that may arise can be identified and managed, 2) The principles of risk management can be improved, 3) Fulfillment of the implementation of the Four Eyes Principles for tire managementk. opinion will be given as long as the request for opinion is presented and requested openly and officially. The nature of the risk management opinion is not absolute and must not be binding, and does not constitute an agree or disagree (Non-Risk Taking Unit) decision, but as a consideration by the Management (Credit Approval Committee/KKD) in making decisions; iii. Submitting reports or written information periodically or incidentally, relating to the implementation of risk management tasks to the President Director, the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and other regulators; iv. Maintain implementation, submit reports, provide opinions related to the implementation of Integrated Risk Management in accordance with POJK or applicable regulations; v. Working closely with the Compliance Director in the implementation of the Panin Group Financial Conglomerate. b. Development of Digital Banking and Liability Products that can meet the Bank's target achievement in accordance with market developments; 5. To lead the Integrated Risk Management Committee of the Panin Group Financial Conglomerate as chairman of the Integrated KMR; 6. To lead and direct Human Resources policies under its coordination in coordination with the Human Resources Director; 7. Carry out the duties of another Director/successor if he/she is absent, in accordance with the Rules for Signing Letters and Substitute Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
8	Lionto Guanawan	Selaku Direktur Bidang *Human Resources* dan *Business & IT Strategic* 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Human Resources* dan *Business & IT Strategic*; 2. Menetapkan kebijakan dan strategi; a. Perencanaan dan pengembangan *Human Resources* meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan nominasi, pengaturan dan penetapan kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan; b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang *Business & IT Strategic* dilakukan melalui pemberian ide dan saran dalam rapat Direksi dan rapat Komite IT (*IT Steering Committee*) terkait strategi bisnis dan IT. 3. Memastikan; a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan *Human Resources* secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan, serta mengikuti perkembangan situasi ketenagakerjaan saat ini; b. Kebijakan *Human Resources* serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku; c. *Strategi Business* & IT termasuk inovasinya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan perkembangan pasar, d. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya, e. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya.	As Director of Human Resources and Business & IT Strategic 1. Prepare a Bank Business Plan in the Human Resources and Business & IT Strategic Areas; 2. Establish policies and strategies; a. Human Resources planning and development includes recruitment, placement & appointment of employees, remuneration and nomination systems, arrangement and determination of ranks, career paths, employee education and training; b. The implementation of duties and responsibilities in the Business & IT Strategic field is carried out through the provision of ideas and suggestions in Board of Directors meetings and IT Steering Committee meetings related to business and IT strategies. 3. Ensures; a. Fulfillment of needs, development, welfare, education and training and optimal management of Human Resources in accordance with the direction and development of the organization set, as well as following developments in the current employment situation; b. Human Resources Policy and Development & Training in accordance with applicable regulations; c. Business & IT strategy including innovation is in accordance with the Bank's business needs and market developments, d. Leading and directing Human Resources policies under its coordination, e. Leading and directing Human Resources policies under his coordination.
9	Suwito Tjokrorahardjo	Selaku Direktur Bidang *Operations, Information Technology, Internation Operations* dan *Internal Control* 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Operations, Information Technology, International Operations* dan *Internal Control*; 2. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang *Operations, Information Technology, International Operations* dan *Internal Control* yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank; 4. Memastikan: a. Kebijakan dan Strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik, b. Terselenggaranya kegiatan Operasional Bank yang lancar secara efektif, efisien dan aman; c. *Internal Control* Bank berjalan sebagaimana mestinya; d. Penyusunan dan pengkinian *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*; 6. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi.	As Director of Operations, Information Technology, International Operations and Internal Control 1. Prepare the Bank's Business Plan for Operations, Information Technology, International Operations and Internal Control; 2. Formulate and establish strategies and develop effective and efficient Operations, Information Technology, International Operations and Internal Control; 3. Become a partner for other Directorates in the implementation of operational and development of the Bank's IT & Standard Operating Procedure (SOP); 4. Ensures: a. Planned policies and strategies are implemented well, b. The implementation of smooth Bank Operational activities in an effective, efficient and safe manner; c. Internal Control of the Bank is running as it should be; d. Preparation and updating of the Bank's Standard Operating Procedure (SOP) in accordance with the applicable regulations; 5. Leading and directing Human Resources policies under his coordination in coordination with the Director of Human Resources; 6. Carry out the duties of another Director/successor if he/she is absent, in accordance with the Rules for Signing Letters and Substitute Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
10	Antonius Ketut Dwirianto	Selaku Direktur Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Laundering* (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup dan Pengaduan Nasabah 1. Menyusun Rencana Bsinis Bank Bidang Hukum/*Legal Affair*, Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Laundering* (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah, 2. Menyusun rencana kerja, kebijakan dan strategi Bidang Hukum/*Legal Affair*, Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Launderng* (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap perundang undangan dan peraturan lainnya; 4. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*; 5. Memastikan; a. Bidang Hukum (*Legal Affair*); i. Menjaga kepantingan PaninBank dari risiko Hukum (di luar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya), melalui; 1) Pemberian Opini Hukum/*Review* perjanjian dengan pihak ketiga, 2) Pemberian pendampingan perkara hukum terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang dan/atau Karyawan dengan status sebagai terlapor/terperiksa untuk perkara operasional di luar penanganan kredit bermasalah atau proses penyelamatan kredit; 3) Menunjuk Kantor Hukum untuk menjaga kepentingan Bank; 4) Pemberian opini/pendapat hukum terhadap permasalahan hukum Bidang Operasional Bank dan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Pemberian opini/pendapat hukum terhadap rancangan produk/aktivitas baru; ii. Melakukan korespondensi dan menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (di luar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya) kepada KPK, BNN, Kepolisian, DJP dan Instansi penegak hukum lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. b Bidang Kepatuhan (*Compliance*) & Hubungan Kelembagaan (*Intitutional Relations*); i. Memonitor Kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; ii. Memonitor Kepatuhan Bank dan memitigasi risiko kepatuhan dengan memberikan; 1) Opini/pendapat kepatuhan yanng didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku; 2) Opini/pendapat kepatuhan terhadap rancangan produk/aktivitas baru, rancangan kebijakan/pedoman, dan rancangan memorandum pemberian kredit dengan nominal tertentu; iii. Menyusun dan menyampaikan *Recommendation Management Action* (RMA) atas hasil pemeriksaan audit internal kepada Manajemen dan Auditee untuk ditindaklanjuti; iv. Menyusun dan menyampaikan Laporan *self-assessment Good Corporate Governance* dan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;	As Director of Compliance, Institutional Relations, Anti Money Laundering (APU PPT), Group Financial Conglomerates and Customer Complaints 1. Prepare the Bank Business Plan for Legal Affairs/Legal Affairs, Compliance, Institutional Relations, Anti Money Laundering (AML-CFT), Panin Group Financial Conglomeration and Customer Complaints, 2. Develop work plans, policies and strategies in the field of law/legal affairs; Effective and efficient Compliance, Institutional Relations, Anti Money Laundering (APU PPT), Panin Group Financial Conglomeration and Customer Complaints; 3. Become a partner of other Directorates in the implementation of compliance with laws and other regulations; 4. Leading and directing Human Resources policies under his coordination in coordination with the Director of Human Resources; 5. Ensures; a Legal Affairs; i. Safeguarding PaninBank's interests from legal risks (outside the process of handling non-performing loans and other corporate actions), through; 1) Providing Legal Opinions/Reviewing agreements with third parties, 2) Providing legal case assistance to the Head Office, Branch Offices and/or Employees with status as reported/investigated for operational cases outside the handling of non-performing loans or credit rescue processes; 3) Appoint a Law Office to protect the interests of the Bank; 4) Providing legal opinions/opinions on legal issues in the Bank Operations Sector and customer complaints in accordance with applicable regulations; 5) Providing legal opinions/opinions on the design of new products/activities;; ii. Conduct correspondence and follow up on written requests related to law enforcement (outside the process of handling non-performing loans and other corporate actions) to the KPK, BNN, Police, DGT and other law enforcement agencies as applicable. b Compliance & Institutional Relations; i. Monitor the Bank's Compliance with the Bank's commitments to the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other Regulators according to applicable regulations; ii. Monitor Bank Compliance and mitigate compliance risk by providing; 1) Compliance opinion/opinion based on the prevailing laws and regulations; 2) Opinion/opinion on compliance with new product/activity designs, draft policies/guidelines, and draft credit granting memoranda with a certain nominal value; iii. Prepare and submit Management Action Recommendations (RMA) on the results of internal audit examinations to Management and the Auditee for follow-up; iv. Prepare and submit self-assessment reports on Good Corporate Governance and/or written information on a regular basis or incidentally related to the implementation of compliance in accordance with the provisions/regulations/laws to the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and other regulators as stipulated in the regulations. apply;

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
		v. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan terbaru dari regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, kepada Direksi dan/atau Unit Kerja terkait; vi. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkembangan Bidang Kepatuhan; vii. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK atau peraturan yang berlaku; viii. Mewakili Bank dalam berbagai kegiatan hubungan kelembagaan serta dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar Bank (antara lain; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa) serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/Instansi Pengawas Bank, Pemerintah, BUMN dan Swasta,	v. Deliver/disseminate the latest regulations from regulators relating to the Bank's business activities, to the Board of Directors and/or related Work Units; vi. Submitting periodic reports to the President Director on matters related to the development of the Compliance Sector; vii. Maintain implementation, submit reports, provide opinions related to the implementation of Integrated Governance in accordance with POJK or applicable regulations; viii. Representing the Bank in various institutional relations activities, as well as in the management of organizations outside the Bank (among others; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa), as well as establishing good relations and cooperation between institutions/ Bank Supervisory Agencies, Government, BUMN and the private sector,
		c. Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)/Anti Money Laundering (AML); i. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; ii. Memonitor, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT/CTR), transaksi keuangan mencurigakan (TKM/STR), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL/IFTI) sesuai ketentuan perundang undangan; iii. Menyampaikan laporan secara berkal ataupun insidentil, serta menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan program APU PPT kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; iv. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan terkait penerapan APU PPT kepada Direksi, Unit Kerja terkait dan/atau Kantor Cabang; v. Mengembangkan *system monitoring* dan *reporting* transaksi APU PPT.	c Anti Money Laundering and Prevention of Terrorist Funding (AML)/Anti Money Laundering (AML); i. Ensure that the implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorist Funding Program (AML-CFT) is in accordance with the prevailing laws and regulations; ii. Monitor, analyze and report cash financial transactions, suspicious financial transactions, and financial transactions of fund transfers to and from abroad, in accordance with statutory provisions; iii. Submitting reports periodically or incidentally, as well as following up on written requests related to the implementation of the AML-CFT program to the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) and other agencies as applicable; iv. Deliver/disseminate provisions and policies related to AML-CFT implementation to Directors, related work units and/or branch offices; v. Develop monitoring and reporting system for AML-CFT transactions.
		d. Bidang Konglomerasi Grup i. Mengkoordinasikan Konglomerasi Keuangan Bank melalui konsolidasi laporan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai POJK yang berlaku. Di luar pengawasan terhadap perkembangan bisnis dan operasional perusahaan anak (*Subsidiaries*); ii. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik; iii. Menyampaikan Laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai ketentuan/peraturan/Undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); iv. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK/Grup Entitas Utama) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup Panin selaku Entitas Utama,	d Group Conglomeration Sector i. Coordinating the Bank's Financial Conglomerates through consolidated reports on Integrated Governance, Integrated Risk Management, Integrated Capital and Integrated Audit in accordance with the applicable POJK. Apart from monitoring the business development and operations of the subsidiaries; ii. Provide opinion on integrated compliance to ensure that the implementation of duties and responsibilities of the Bank as the Main Entity in the framework of Integrated Governance runs well; iii. Submitting reports or written information periodically or incidentally, relating to the implementation of Integrated Governance, Integrated Risk Management, Integrated Capital and Integrated Audit in accordance with the provisions/regulations/laws to the Financial Services Authority (OJK); iv. Submitting other reports periodically to the President Director of the Main Entity and Financial Services Institution (LJK/Main Entity Group) on matters relating to the Panin Group Financial Conglomerate as the Main Entity,
		e. Bidang Pengaduan Nasabah (*Customer Complaint Handling*) i. Menerima penngaduan nasabah dan menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut sesuai ketentuan dan kebijakan serta menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yangn berlaku terkait pengaduan nasabah/konsumen;	e Customer Complaint Handling i. Receive customer complaints and follow up on customer complaints according to the provisions and policies as well as compile and submit periodic reports in accordance with applicable regulations regarding customer/consumer complaints;

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

No	Nama | Name	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
		ii. Memonitor dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah oleh seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk pengaduan yang diterima melalui media masa, *e-mail* dan sosial media perusahaan sesuai ketentuan; iii. Mengadministrasikan dan menganalisa statistik pengaduan nasabah dan melaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja terkait sebagai *feedback* untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank; iv. Memberikan pendampingan dalam rangka penanganan pengaduan nasabah dan dalam proses mediasi perbankan dengan nasabah sehubungan dengan sengketa konsumen di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai ketentuan.	ii. Monitor and ensure the resolution of customer complaints by all Work Units of the Head Office and Branch Offices including complaints received through mass media, e-mail and corporate social media in accordance with the provisions; iii. Administer and analyze customer complaint statistics and report to the Board of Directors and related work units as feedback to improve and improve the quality of the Bank's products and services; iv. Providing assistance in the context of handling customer complaints and in the process of banking mediation with customers in connection with consumer disputes at Bank Indonesia (BI) or the Financial Services Authority (OJK) in a timely manner according to regulations.

*) Yang dimaksud dengan berhalangan adalah dalam hal anggota Direksi yang digantikan:
What is meant by being absent is if the member of the Board of Directors who is being substituted is:
a. Menjalani Cuti | On leave
b. Tidak masuk kerja karena sakit | Sick leave
c. Melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri | Take an official trip to the region or abroad
d. Dalam hal pengganti 1 & 2 berhalangan, maka Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Pengganti |
In the event that the successors 1 & 2 are unable to do so, the President Director and the Vice President Director become the Alternating Directors

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independence or Affiliation of Members of the Board of Directors

There are no members of the Board of Directors who have financial relations with other members of the Board of Directors, Commissioners or Controlling Shareholders (PSP), but there are 2 (two) members of the Board of Directors who have family relationships with members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders (PSP).

Members of the Board of Directors are not authorized to give general power of attorney to other parties which resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

Affiliation relationship among members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders is the criteria used to measure the Board of Commissioners' independence, which includes:

1. Affiliation between fellow members of the Board of Directors.
2. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
3. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Main and/or Controlling Shareholders.
4. Affiliation between fellow members of the Board of Commissioners.
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and members of the Main and/or Controlling Shareholders.

Hubungan Afiliasi Direksi
Affiliation of Members of the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial affiliation with						Hubungan Keluarga dengan Family relations with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Herwidayatmo		√				√		√		√		√
Hendrawan Danusaputra		√				√		√		√		√
Lionto Gunawan		√		√		√	√		√		√	
Edy Heryanto		√				√		√		√		√
Gunawan Santoso		√				√		√		√		√
Ng Kean Yik		√				√		√		√		√
Januar Hardi		√				√		√		√		√
Suwito Tjokrorahardjo		√		√		√	√		√		√	
Antonius Ketut Dwirianto		√				√		√		√		√
Haryono Wongsonegoro		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2020, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT Bank Pan Indonesia, Tbk. dan pada perusahaan lain.

Shares Ownership of the Board of Directors

As of December 31, 2020, there were no members of the Board of Directors who owned shares that reached 5% (five percent) or more at PT Bank Pan Indonesia Tbk or other corporations.

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Number of Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership
1.	Hendrawan Danusaputra	1.000.000	0,0041
2.	Haryono Wongsonegoro	100.000	0,0004

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Concurrent Positions of the Board of Directors

There were no concurrent positions of the Board of Directors as Commissioners, the Board of Directors and Executive Officers in Banks, Non-Bank Financial Institutions or other companies, except as allowed under the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Rangkap Jabatan Direksi
Concurrent Positions of the Board of Directors

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahan lain Position at other Company	Perusahaan/Badan Organisasi Company/Institutions	Bidang Usaha Line of Business
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur President Director	-	-	-
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director	-	-	-
3.	Lionto Gunawan	Direktur Director	-	-	-
4.	Edy Heryanto	Direktur Director	-	-	-

Rangkap Jabatan Direksi
Concurrent Positions of the Board of Directors

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahan lain Position at other Company	Perusahaan/Badan Organisasi Company/Institutions	Bidang Usaha Line of Business
5.	Gunawan Santoso	Direktur Director	Komisaris Commissioner	PT Verena Multi Finance, Tbk	Multifinance
6	Ng Kean Yik	Direktur Director	-	-	-
7	Januar Hardi	Direktur Director	-	-	-
8	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur Director	-	-	-
9	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Director	-	-	-
10	Haryono Wongsonegoro	Direktur Director	-	-	-

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Di samping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Meeting of the Board of Directors

Meeting of the Board of Directors are held regularly at least once a month. In addition to regular meetings, the Board of Directors meetings can be held at any time if deemed necessary upon the request from the President Director or by one or more members of the Board of Directors, or at a written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights.

Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya Rapat Direksi,
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir,
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PaninBank atau di tempat kegiatan usaha utama PaninBank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat,
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,

Implementation of Board of Directors' Meeting

1. Summons to the Board of Directors Meeting shall be made in written form by the President Director or other member of the Board of Directors appointed by the President Director and shall be delivered within 5 (five) days and, in urgent matters, could be no later than 2 (two) days before the meeting is held. In such summons must state the meeting agenda, date, time and place of the meeting;
2. Prior meeting summons is not required if all members of the Board of Directors are present or represented;
3. The Board of Directors Meeting is chaired by the President Director, and he/she can be replaced by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors Meeting concerned by virtue of a power of attorney if the President Director is unable to attend;
4. The Board of Directors Meeting is held at the domiciled of PaninBank or at the domiciled of PaninBank's main business activities within the territory of the Republic of Indonesia at the time and venue determined by the party summon the meeting;
5. A member of the Board of Directors can only be represented in the Board of Directors Meeting by another member of the Board of Directors based on a power of attorney;

6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Bank;
   b. Kesehatan dan operasional Bank;
   c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
   d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
   e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;
   f. Penggunaan laba bersih PaninBank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Risalah Rapat

1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut,
2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga,
3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan Kepada Divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*,

6. The Board of Directors Meeting shall at least discuss the following matters:
   a. Implementation and achievement of corporate plans and the Bank's business plan;
   b. The Bank's health and operations;
   c. Implementation of internal control, risk management and Corporate Governance;
   d. Implementation of the audit internal, audit external, and audit performed by regulators;
   e. Strategic personnel policy;
   f. The use of PaninBank's net profit in a financial year as stated in the Annual Financial Report which has been approved by the Annual GMS.

Implementation of the Board of Directors Meetings through Electronic Facilities

Meeting of the Board of Directors can be held through teleconferencing, video conferencing, or other electronic facilities that allow all participants of the Board of Directors to see each other and hear directly and participate in meetings. In this case, members of the Board of Directors are declared to have participated in the Board of Directors Meeting. The implementation of the Board of Directors Meeting through electronic means must be recorded, and minutes of meeting will be made. The policy on the use of electronic documents as corporate documents is stipulated by the Board of Directors by meeting the minimum requirements for electronic system operation at PaninBank in accordance with provisions of laws on information and electronic transactions.

Minutes of Meetings

1. Minutes of the Meetings must be prepared for each Meeting of the Board of Directors and signed by the Chairperson of the Meeting together with another member of the Board of Directors who is present and appointed by the Chairperson of the Meeting of Board of Directors to ensure the completeness and correctness of the minutes concerned.
2. Documents on Minutes of the Meeting of the Board of Directors is a valid evidence regarding the decisions made at the meeting whether for the purposes of members of the Board of Directors, shareholders, or third parties.
3. Documents on Minutes of the Meetings of the Board of Directors are confidential. These documents are archived/maintained by the Corporate Secretary. Decisions on the results of the Board of Directors Meeting which require follow-up actions from the relevant divisions must be immediately forwarded to the concerned Division by the Corporate Secretary.

4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan PaninBank.

Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi PaninBank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*.

Berikut adalah mekanisme pengambilan keputusan di PaninBank:

4. The frequency of the Board of Directors Meetings and the attendance of members of the Board of Directors are also reported in PaninBank's annual report.

Dissenting Opinions

In principle, decision of the Board of Directors Meeting must be made based on deliberation to reach consensus, or majority votes. If there is a dispute regarding matters that are included in Minutes of the Board of Directors Meeting, then such matter must be decided in the Board of Directors Meeting and the decision must be approved by more than 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Directors who are present.

However, in the event that there is a Director who does not approve the meeting decision, the person concerned can declare/make a statement of disagreement and it will be recorded in the minutes of the Board of Directors Meeting. This is intended if the decision turns out to cause problems for PaninBank one day, then the person concerned will not be blamed for it. In addition, a member of the Board of Directors who does not approve of such decision of the meeting of the Board of Directors may submit an appeal to the Board of Commissioners preceded by discussion or requesting an opinion from the relevant committee.

Decision Making

The decision-making mechanism of the Board of Directors can be carried out in several ways, namely through the Board of Directors meeting, the Board of Director's decision, and circular approval. All decisions taken by the Board of Directors must be documented and maintained by the Corporate Secretary.

Following are the decision-making mechanisms at PaninBank:

Pengambilan Keputusan melalui Rapat Direksi
Decision Making through the Board of Directors Meetings

Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Itikad baik;
- Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
- Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
- Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
- Kesinambungan operasional PaninBank; dan
- Kesesuaian dengan rencana dan tujuan PaninBank.
- Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat Direksi hanya dapat dilakukan dalam forum Rapat Direksi berikutnya.

In determining the policy on a matter, each Member of the Board of Directors shall consider the following principles:
- Good intention;
- Rational considerations and sufficient information;
- Investigation of problems and possible settlement;
- Made based on consideration solely for the interest of PaninBank;
- PaninBank's operational sustainability; and
- Compliance with PaninBank's plans and objectives.
- Any cancellation or amendment to matters decided in the Board of Directors Meeting may only be made in the next Board of Directors meeting.

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi
Decision Making by Members of the Board of Directors without the Board of Directors Meeting

- Keputusan untuk direktorat dari Direktur terkait
- Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam Surat Keputusan atau peraturan intern PaninBank.

- Decision for the directorate of the relevant Directors
- Decisions regarding the processes set forth in the Decree or internal regulations of PaninBank.

Pengambilan Keputusan Direksi melalui *Circular Approval*
Decision-making of the Board Directors through Circular Approval

- Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topik-topik/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda Rapat Direksi.
- Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan/hal tertentu.
- Kriteria topik-topik/permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui *circular approval* adalah:
- Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi;
- Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian tujuan dan target PaninBank.
- Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme *circular approval*, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda Rapat Direksi.

- The purpose of this mechanism is to improve the efficiency of the Board of Directors decision-making process for certain topics/issues that need not be included in the agenda of the Board of Directors Meeting.
- The decision taken is considered valid if it has been approved by a minimum of 50% of the members of the Board of Directors. The approval of the Board of Directors is evidenced by the signing of a written agreement on a certain decision/matter.
- Criteria of certain topics/problems that the Board approves process may be through circular approval are:
- Decisions set forth in the Board of Directors Committee;
- Not a strategic decision, urgent, and no significant impact to the achievement of goals and targets PaninBank.
- If there are members of the Board of Directors who do not agree with the decision taken through the circular approval mechanism, then the decision will be included in the agenda of the Board of Directors Meeting.

Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Decision Making Process of the Board of Directors' Meetings

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi yang hadir.
The decision of the meeting is made by way of deliberation to agree. If deliberations for consensus are not reached, then the decision of the meeting shall be based on the number of votes agreed over 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Directors.

Rapat Direksi berhak untuk mengambil keputusan yang sah dengan keputusan mengikat apabila jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat mencapai lebih dari 50%.
Meetings of the the Board of Directors shall be entitled to take a valid decision with a binding decision if the number of members currently being served or represented in the meeting is more than 50% (fifty percent).

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
If the number of votes that agree and disagree as much, then the proposal concerned is considered rejected.

Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
Each Director has the right to issue 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the member of the BoD he represents.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ditentukan lain.
The voting of a person is made by a closed ballot without a signature, while voting on other matters is oral unless otherwise specified.

Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
Unauthorized letters and voices are considered not to be issued legally and are not counted in determining the number of votes cast in the meeting.

Apabila seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan traksaksi atau kontrak tersebut dalam suatu Rapat Direksi.
If a member of the Board of Directors has an interest in a transaction or contract, the member of the Board of Directors shall not be entitled to vote in matters relating to such transaction or contract in a meeting of the Board of Directors.

Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,
6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan; dan
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

Joint Meetings

1. Joint meetings can be initiated by the Board of Commissioners or the Board of Directors as needed;
2. Joint meetings are initiated by the Board of Directors in the event that the Board of Directors require direction from the Board of Commissioners. If needed, in a joint meeting, they can invite speakers from inside or outside the Bank;
3. Joint meetings reach a quorum if it's attended by at least 51% (fifty one percent) of the invited participants;
4. Joint meeting is led by the President Commissioner, and may be replaced by a Commissioner appointed by the Joint Meeting based on a power of attorney if the President Commissioner is unable to attend;
5. Minutes of joint meetings must be signed by the Chairperson of the Joint Meeting and by the President Director or one of the Board of Directors appointed by and from the meeting participants;
6. The minutes of the original meeting is properly administered and should be kept, and should be available when needed; and
7. Corporate Secretary is in charge of inviting meeting participants, compiling and administering the minutes of joint meetings.

Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2020

Selama tahun 2020, Rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 16 (enam belas) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali.

Board of Directors' Meetings in 2020

During 2020, the Board of Directors Meetings has held 16 (sixteen) times and Joint Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners) has held 4 (four) times.

Nama Name	Rapat Direksi Board of Directors' Meetings		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings	
	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Herwidayatmo	16	100,00%	4	100,00%
Hendrawan Danusaputra	16	100,00%	4	100,00%
Lionto Gunawan	16	100,00%	4	100,00%
Edy Heryanto	16	100,00%	4	100,00%
Gunawan Santoso	16	100,00%	4	100,00%
Ng Kean Yik	16	100,00%	4	100,00%
Januar Hardi	16	100,00%	4	100,00%
Suwito Tjokrorahardjo	16	100,00%	4	100,00%
Haryono Wongsonegoro*	2	12,50%	-	0,00%
Antonius Ketut Dwirianto	16	100,00%	4	100,00%

*) Efektif sebagai Direktur pada tanggal 4 November 2020 | Effective as Director on November 4, 2020

Agenda Rapat Direksi / Board of Directors Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1.	4 Februari 2020 February 4, 2020	- Tindaklanjut RBBR - *Update Progress* Penugasan OJK kepada SKAI - Surat OJK No. S-8/PB.03/2020 tanggal 28 Feb 2020 (Revisi RBB 2020-2022)	- Follow up on RBBR - Update the Progress of the OJK's Assignment to SKAI - OJK Letter No. S-8/PB.03/2020 dated February 28, 2020 (Revised RBB 2020-2022)
2.	12 Februari 2020 February 12, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Pembahasan Tindak lanjut Pemeriksaan OJK Posisi 31 Mei 2019 - *Update Progress Digital Banking Roadmap* - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Discussion on the OJK Audit Follow-up Position on May 31, 2019 - Update the progress of the Digital Banking Roadmap - Others
3.	16 Maret 2020 March 16, 2020	- Konfirmasi Revisi RBB 2020-2022 - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Confirmation of the 2020-2022 RBB Revision - Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
4.	23 Maret 2020 March 23, 2020	Kebijakan Strategis Bank mengantisipasi Wabah COVID-19	The Bank's Strategic Policy to anticipate the COVID-19 Outbreak
5.	20 Mei 2020 May 20, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
6.	26 Mei 2020 May 26, 2020	- Penyamaan Kolektibilitas Kartu Kredit dengan Kredit lainnya sesuai *One* Debtor *Concept*. - Perhitungan *Days Past Due* Pinjaman Rekening Koran (PRK) dalam perhitungan CKPN. - Pemisahan Kredit Mikro dari segmentasi Kredit Komersil untuk perhitungan CKPN di Sistem PSAK 71. - Penerapan model makroekonomi untuk *forward looking* perhitungan CKPN menurut PSAK 71. - Lain-lain	- Equating the collectability of credit cards with other credits according to the One Debtor Concept. - Calculation of Days Past Due of Current Account Loan (PRK) in the calculation of CKPN. - Separation of Micro Credit from Commercial Credit segmentation for the calculation of CKPN in the PSAK 71 System. - Application of macroeconomic models for forward looking calculation of CKPN according to PSAK 71. - Others
7.	29 Mei 2020 May 29, 2020	- Perhitungan Days Past Due Pinjaman Rekening Koran (PRK) dalam perhitungan CKPN. - Penerapan model makroekonomi untuk *forward looking* perhitungan CKPN menurut PSAK 71. - Pemantauan Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19.	- Calculation of Days Past Due of Current Account Loan (PRK) in the calculation of CKPN. - Application of macroeconomic models for forward looking calculation of CKPN according to PSAK 71. - Monitoring of Restructuring Credit related to COVID-19.
8.	4 Juni 2020 June 4, 2020	- Perhitungan *Days Past Due* Pinjaman Rekening Koran (PRK) - Pembentukan CKPN bulan Mei 2020 - Data restrukturisasi COVID-19 - Segmentasi kredit dalam pembentukan CKPN - Pelaporan Laba Mei 2020	- Calculation of Days Past Due of Current Account Loan (PRK) - Establishment of CKPN in May 2020 - COVID-19 restructuring data - Credit segmentation in the formation of CKPN - May 2020 Profit Reporting
9.	11 Juni 2020 June 11, 2020	Tanggapan atas Wali Amanat terkait Kesehatan Bank	Responses to Trustees related to Bank Health

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
10.	17 Juni 2020 June 17, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
11.	29 Juni 2020 June 29, 2020	- Pelaksanaan Konglomerasi Keuangan Grup Panin - Tindak lanjut *Action Plan* Penyelesaian Masalah HB dan HT	- Implementation of the Panin Group Financial Conglomerate - Follow-up Action Plan for solving HB and HT Problem
12.	29 Juni 2020 June 29, 2020	*Fraud* di KCP Maesonette	Fraud at KCP Maesonette
13.	12 Agustus 2020 August 12, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
14.	16 September 2020 September 16, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
15.	13 November 2020 November 13, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
16.	17 Desember 2020 December 17, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others

Agenda Rapat Gabungan / Joint Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1.	16 Januari 2020 January 16, 2020	- Hasil *Gap Analysis* FTP oleh KPMG - *Update Progress Digital Banking Roadmap* - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Results of Gap Analysis FTP by KPMG - Update the progress of the Digital Banking Roadmap - Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
2.	22 April 2020 April 22, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Others
3.	22 Juli 2020 July 22, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - *Issue-issue* Strategis - Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Strategic Issues - Follow up on OJK Audit Results - Others
4.	14 Oktober 2020 October 14, 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - *Loan at Risk* (BAK, *Commercial Banking*, dan *Corporate Banking*) - *Update Progress* Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Mei 2019 - *Update Progress Digital Banking (E-Cash* Panin) - Rencana Tindak Lanjut Kantor Cabang Rugi (*Network & Distribution)* - Lain-lain	- Evaluation of the Business Plan and Its Achievements - Loan at Risk (BAK, Commercial Banking, and Corporate Banking) - Update on the Follow-up Progress of OJK Audit Results in May 2019 - Update Digital Banking Progress (E-Cash Panin) - Branch Office Follow-Up Plan for Loss (Network & Distribution) - Others

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2020, Direksi telah mengikuti *training* sebagai berikut:

Trainings for the Board of Directors

The training program for the Board of Directors is necessary so that members of the Board of Directors can always update information relating to the latest developments in the banking industry and other knowledge relating to the implementation of supervisory duties. Throughout 2020, the Board of Directors participate in the following training:

Nama Name	Workshop/Training/Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Date and Venue	Penyelenggara Organizer
Herwidayatmo	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
	Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Terkait Tingkat Kesehatan Bank Regulation and Role of Management (Board of Commissioners and the Board of Directors) Related to Bank Soundness Level	12 Agustus 2020 - Online	LKDI
Hendrawan Danusaputra	-	-	-

Nama Name	Workshop/Training/Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Date and Venue	Penyelenggara Organizer
Lionto Gunawan	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
	Managing Financial Risks and Capturing Financial Oppurtunities in the Crisis Era	8 Oktober 2020 - Webinar	Economic Review
Edy Heryanto	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
Gunawan Santoso	Sosialisasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 Socialization of the 2025 Money Market Development Blueprint	23 Desember 2020 - Jakarta	Bank Indonesia
	Peluncuran & Bedah Buku" Kekuatan Komunikasi" "The Power of Communication" Book Launch & Review	11 Desember 2020 - Jakarta	Bank Indonesia Institute
	Seminar 'Will Vaccine Bring Back Confidence & Growth"	25 November 2020 - Jakarta	OJK dan FWD Asset Management
	Sustainable Finance Awareness	22 September 2020 - Jakarta	LPPI
	Strategi Sektor Perbankan Selama dan Pasca Pandemi COVID-19 Banking Sector Strategy during and after the COVID-19 Pandemic	11 Juli 2020 - Yogyakarta	Univ. Gadjah Mada
	Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19 Finance Industry in the Midst of COVID-19 Pandemic	28 Mei 2020 - Jakarta	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ng Kean Yik	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
Januar Hardi	-	-	
Haryono Wongsonegoro	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-5 Training Level-5 Risk Management Certification	8, 10,13 dan 15 Juli 2020 - Jakarta	PT Orbit Mitra Edukasi
	Customer Service: How to Survive the Pandemic	16 Juli 2020 - Jakarta	Service Quality Institute
	Overcoming Uncertainty through Knowledge	6 Oktober 2020 - Jakarta	Indonesia Knowledge Forum
Suwito Tjokrorahardjo	Enhancing Operational Excellence Facing 21st Global Competition In Industry 4.0 Era Through Lean Management	18 Desember 2020- Zoominar	Economic Review
Antonius Ketut Dwirianto	Webinar "AML CTF On Virtual Asset"	12 November 2020 - Webinar	PPATK
	Sosialisasi Ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Dissemination of Provisions for Short Term Liquidity Loans and Board of Governors' Regulations	14 Desember 2020-Online	Bank Indonesia

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 17 tanggal 27 Januari 2021, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Board of Directors' Term of Office

In accordance with the Deed of General Meeting of Shareholders (GMS) No. 17 dated January 27, 2021, the term of office of all members of the Board of Directors ends until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2021.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Committees Under the Board of Directors

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan tahun 2020, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:

Committees under the Board of Directors are committees established by and responsible to the Board of Directors in assisting the implementation of duties and functions of the Board of Directors. As of 2020, PaninBank has the following committees under the Board of Directors as follows:

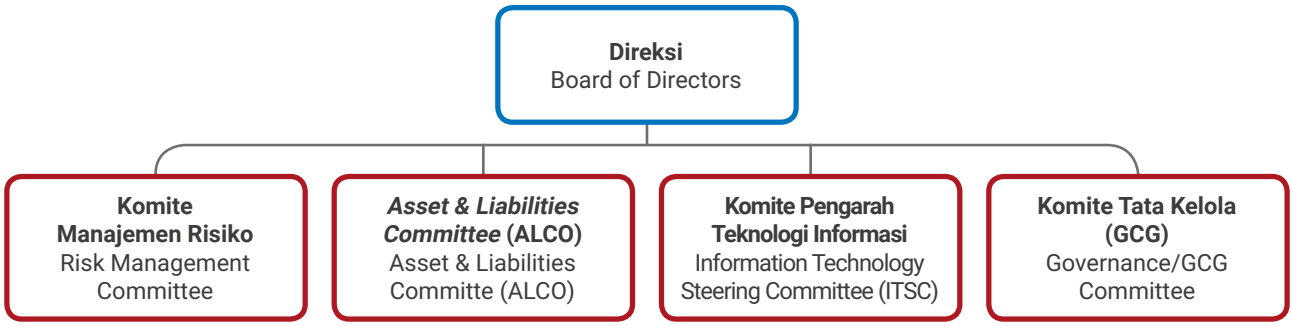

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penujukan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Risk Management Committee is an executive committee formed by the Company's Board of Directors as a forum for decision-making and evaluation of implementation, management through the formulation of policies, strategies and objectives in the field of Risk Management.

Structure and Membership

The Risk Management Committee consists of majority of members of the Board of Directors who serves as permanent members of Risk Management Committee and non-permanent members consisting of Bank Executive Officers. The appointment of members of the Board of Directors and Executive Officers is conducted by the President Director, taking into account the Company's risk exposure. The Risk Management Committee consists of:

	Komite Manajemen Risiko **Risk Management Committee**	
Anggota Tetap Permanent Member	1. Presiden Direktur 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur Bidang Manajemen Risiko 4. Direktur Bidang *International Banking* 5. Direktur Bidang *Treasury* 6. Direktur Bidang Kredit Komersial 7. Direktur Bidang Kredit Korporasi 8. Direktur Bidang Operasi dan IT 9. Direktur Bidang Kepatuhan	1. President Director 2. Deputy President Director 3. Director of Risk Management 4. Director of International Banking 5. Director of Treasury 6. Director of Commercial Banking 7. Director of Corporate Banking 8. Director of Operations and IT 9. Director of Compliance
Anggota Tidak Tetap Non-permanent Member	1. Kepala Divisi *International Banking* 2. Kepala Divisi Likuiditas 3. Kepala Divisi *Currency Trading & Commercial* 4. Kepala Divisi *Capital Market* 5. Kepala Divisi/*Head* Bidang Perkreditan Konsumer 6. Kepala Divisi/*Head* Bidang Perkreditan Komersil 7. Kepala Divisi/*Head* Bidang Perkreditan Korporasi 8. Kepala Biro Manajemen Risiko 9. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan	1. Head of International Banking Division 2. Head of Liquidity Division 3. Head of Currency Trading & Commercial Division 4. Head of Capital Market Division 5. Head of Consumer Credit Division 6. Head of Commercial Credit Division 7. Head of Division/Head of Corporate Credit 8. Head of Risk Management Bureau 9. Head of Supervision and Inspection Bureau

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contigency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional dan Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal PaninBank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*Justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis PaninBank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh PaninBank.

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

Duties and responsibilities of Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director on matters relating to, among others, and at least the following:

1. Formulation of Risk Management Policy and its amendments, including risk management strategies and contingency plan in the event of abnormal external conditions. The preparation is carried out together with Head of Operational Work Unit and Head of Risk Management Work Unit.
2. Make improvements or enhancements to the implementation of risk management which is conducted periodically or incidentally, due to changes in PaninBank's external and internal conditions that affects the bank's capital adequacy and risk profile as well as the evaluation results on the effectiveness of such implementation.
3. Justification of matters relating to business decisions that are not in accordance with normal procedures (irregularities), such as a significant business expansion exceeding the Bank's predetermined business plan or taking position/risk exposure which exceeds the set limit. Justification is delivered in the form of recommendations to the President Director based on a business consideration and the results of analysis related to the Bank's certain business transactions or activities so that these require an exception to the procedures set by PaninBank.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

Meetings and Activities of Risk Management Committee

Meetings of the Risk Management Committee shall be held as needed and at least once in every 4 (four) months a year. Meetings of the Risk Management Committee declared a quorum if attended by a minimum of 50% (fifty percent) of committee members. Throughout 2020, the Risk Management Committee has held 4 (four) meetings with the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda/Materi	Agenda
1	16 Januari/January 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan IV 2019	Discussion on the Bank's Risk Profile for Quarter IV 2019
2	15 April 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan I 2020	Discussion on the Bank's Risk Profile in Quarter I 2020
3	15 Juli/July 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan II 2020	Discussion on the Bank's Risk Profile in Quarter II 2020
4	14 Oktober/October 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan III 2020	Discussion on the Bank's Risk Profile in Quarter III 2020

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Meetings of the Risk Management Committee reviews and provides recommendations on matters relating to risk management and its implementation, as well as the realization of Risk Management Committee's work programs for further decision-making is made based on the meetings resolutions and applicable provisions.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Decision Making at the Meeting

Implementation of decision-making in the Risk Management Committee Meetings is taken by deliberation and consensus. In the event that no consensus is reached, permanent members with voting rights can participate in a voting.

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

Resolutions of the Risk Management Committee Meetings are valid and entitled to make binding decisions if it has been approved by more than 50% (fifty percent) of the number of permanent members present.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

Accountability and Realization of the Committee's Work

Accountability and work realization of the Risk Management Committee is reported through written reports on a regular basis at least once a year to the Board of Directors concerning the Implementation of Risk Management for 8 (eight) types of Risks and other matters regarding the results of regular meetings at the Risk Management Committee meetings.

ASSET & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

ASSET & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Tujuan Pembentukan ALCO

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam hal pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA).

The Objective on the Establishment of ALCO

The purpose of establishing ALCO is to assist the Board of Directors in supervising and managing Asset and Liability Management (ALMA).

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:

Structure and Membership

ALCO consists of permanent members, i.e. the Board of Directors, and non-permanent members, namely Bank Executive Officers. Here are the details of the composition of ALCO membership:

	Komite ALCO **ALCO Committee**	
Anggota Tetap Permanent Members	1. Presiden Direktur (Ketua) 2. Wakil Presiden Direktur I 3. Direktur *Treasury* 4. Direktur Kepatuhan 5. Direktur Manajemen Risiko 6. Direktur *Commercial Banking* 7. Direktur *Corporate & Credit* 8. Direktur Administrasi Keuangan 9. Direktur SDM, Bisnis dan IT Strategis 10. Direktur *Institutional Banking*	1. President Director (Chairman) 2. Deputy President Director I 3. Director of Treasury 4. Director of Compliance 5. Director of Risk Management 6. Director of Commercial Banking 7. Director of Corporate & Credit 9. Director of Finance 10. Director of HR, Business and IT Strategic 11. Director of Institutional Banking

	Komite ALCO ALCO Committee	
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Kepala Divisi *Liquidity* 2. Kepala Divisi *Capital Market* 3. Kepala Divisi *Currency Trading and Commercial* 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan. 5. Kepala Biro Manajemen Risiko 6. Kepala Divisi Perkreditan 7. Kepala *Branch Network &Operations Group* 8. Kepala Divisi *Corporate Banking* 9. Kepala Divisi *Institutional Banking* &BUMN 10. Kepala Divisi *International Operations* 11. Kepala Divisi *Commercial Banking* 12. Kepala Divisi SMB 13. Kepala *National Car Loan* 14. Kepala *National Home Loan* 15. Kepala *National Liabilities* 16. Kepala *National RMS & WM* 17. Kepala Divisi *Strategy Development* 18. Kepala Biro Teknologi Informasi 19. Kepala Divisi *Subsidiaries*	1. Head of Liquidity Division 2. Head of Capital Market Division 3. Head of Currency Trading and Commercial Division 4. Head of Financial Administration Bureau. 5. Head of Risk Management Bureau 6. Head of Credit Division 7. Head of Branch Network & Operations Group 8. Head of Corporate Banking Division 9. Head of Institutional Banking & BUMN Division 10. Head of International Operations Division 11. Head of Commercial Banking Division 12. Head of SMB Division 13. Head of National Car Loan 14. Head of the National Home Loan 15. Head of National Liabilities 16. Head of National RMS & WM 17. Head of Strategy Development Division 18. Head of Information Technology Bureau 19. Head of Subsidiaries Division

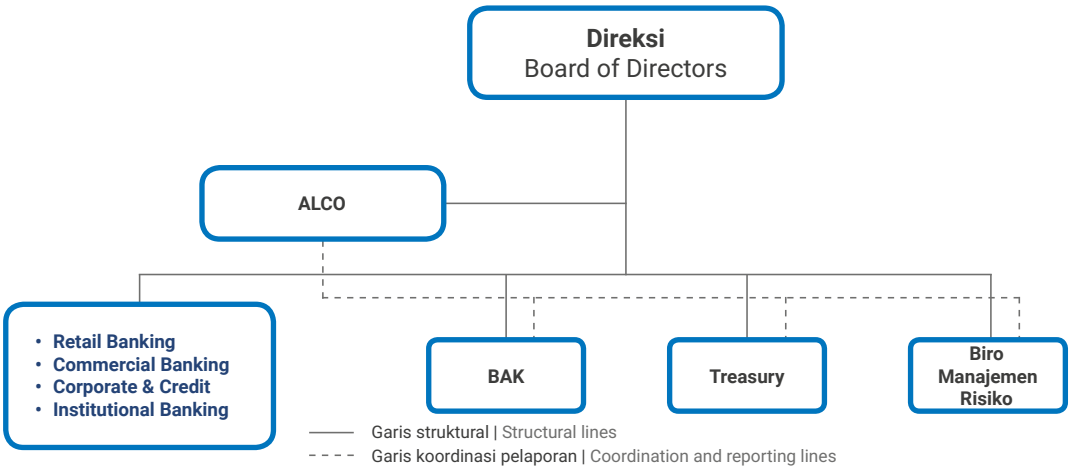

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA
   a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
   b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Duties and Responsibilities of ALCO

ALCO as a supporting organ of the Board of Directors has duties and responsibility to analyze proposals from business units/directorates related to asset and liability management (ALMA) and recommending ALMA strategies. In carrying out its duties and responsibilities, ALCO will be forward looking to achieve the Bank's ALMA strategies. The following are duties and responsibilities of ALCO, among others:

1. Review and update the ALMA strategies:
   a. Evaluate interest rate risk exposures and ALMA strategies to maintain consistency between the Bank's risk-taking position and the objectives of interest rate risk management.
   b. Inform the Board of Directors regarding changes in regulations and developments that will affect ALMA's strategy and policies.

2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
   a. Kondisi perekenomian domestik, antara lain:
      i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
      ii. Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
      iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
      iv. Situasi politik dan sosial
   b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
   c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
      i. Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
      ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
   a. Penetapan Harga Aset
      i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
      ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
         1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
         2) Aset produktif (*earning asset*). (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
      iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
   b. Penetapan Harga *Liability*
      i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
      ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
      iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
   c. Perubahan Tingkat Suku Bunga
      Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/

2. Evaluate various macroeconomic indicators:
   a. Domestic economic conditions including:
      i. Exchange rates, current and expected interest rates in the future
      ii. Bank Indonesia's monetary signal (monetary policy: contraction or expansion)
      iii. Various key economic indicators, such as foreign exchange reserves, inflation, Gross Domestic Product (GDP), and balance of payments
      iv. Political and social situations
   b. Consistency with the Bank's interest rate management
   c. International economic conditions, including:
      i. Trend of interest rates and US Dollar exchange rates compared to other major foreign currencies.
      ii. World economic growth in general and its effects on Indonesia.
3. Review the pricing (pricing) of bank assets and liabilities:
   a. Determination of Asset Prices
      i. Review the determination of monthly average price for loans in each business sector, historically (separate for Rupiah and US Dollar)
      ii. Review historical returns from:
         1) Interest rate-sensitive assets, and
         2) Earning assets (separate for Rupiah and US Dollar)
      iii. Review it historically (from various Bank Indonesia's reports) the growth of assets owned by the Bank compared to the industry average.
   b. Determination of Price Liability
      i. Assess the nominal cost of funds for each category of liability sensitive interest rate and the total cost of funds for all liability sensitive interest rate (separate for Rupiah and US Dollar)
      ii. Assess the total cost of funds for liabilities that are sensitive to historical interest rates (separate for Rupiah and US Dollar)
      iii. Review it historically (from various Bank Indonesia's reports) the growth of third-party funds owned by the Bank compared to the industry average.
   c. Changes in Interest Rates
      Based on the Net Interest Margin (NIM), the growth of assets and liabilities, interest rate trends, and interest rates held by competitors determine the increase/

penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.

4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain-lain. Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

1. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
2. Divisi Treasury, tentang:
   a Perubahan tren likuiditas pasar,
   b Suku bunga,
   c Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
   d Lelang SBI dan lelang obligasi,
   e Data ekonomi,
   f Kurs valuta asing,
   g Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
3. Divisi Kredit, yang berhubungan dengan:
   a Consumer Banking,
   b Commercial Banking,
   c Corporate Banking,
   d Institutional Banking & BUMN
   e Perubahan di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Program Kerja ALCO Tahun 2020 serta Realisasinya

Kegiatan ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat Komite ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja ALCO tahun 2020 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

decrease in overall interest rates or only for several loan business sectors and/or some types of customer deposits.

4. Periodically review and update the emergency funding plans to ensure the effectiveness of such emergency funding plan, if necessary.
5. Review the system and assumptions used as the basis for ALCO's recommendations and policies, especially to accommodate external changes, for example market conditions and others. The system and assumptions must be reviewed whenever significant changes occur in the market, changes to regulations and market conditions, and others, at least once a year and can be done as often as possible depending on the condition of the Bank and the banking industry.

ALCO receives information about regulatory conditions and markets through:

1. Compliance Bureau regarding Amendments to regulations that affect the Bank.
2. Treasury Division, regarding:
   a. Changes in market liquidity trends,
   b. Interest rates,
   c. Bank Indonesia's open market operations,
   d. SBI auctions and bond auctions,
   e. Economic data,
   f. Foreign exchange rates,
   g. Treasury products, and matters related to other Treasury businesses.
3. Credit Division, which deals with:
   a. Consumer Banking,
   b. Commercial Banking,
   c. Corporate Banking,
   d. Institutional Banking & BUMN
   e. Changes in the commercial loan market, consumer loan markets, and other aspects related to loans.

The 2020 ALCO Work Program and Its Realization

ALCO's activities are formulated in the form of ALCO meetings, which include coordination meetings to assist the Board of Directors in supervising and managing ALMA. The resolutions of ALCO's meeting are contained in the minutes of the ALCO meeting. ALCO's work program during 2020 was inseparable from the tasks relating to the supervision and management of ALMA.

Rapat ALCO

Selama tahun 2020 ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali. Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

ALCO Meetings

During 2020, the ALCO Committee held 12 (twelve) meetings. The details of ALCO meetings during 2020 were as follows:

Rapat ke: Meeting	Tanggal Date	Agenda
1	16 Januari/January 2020	• Makro Ekonomi • *Liquidity* • *Interest Rate* • *Exchange Rate* • *Capital Market* • *Financial Performance* • *Pricing Strategy* • *Maturity Profile* • Permodalan • Macro Economy • Liquidity • Interest Rate • Exchange Rate • Capital Market • Financial Performance • Pricing Strategy • Maturity Profile • Capital
2	12 Februari/February 2020	
3	16 Maret/March 2020	
4	22 April 2020	
5	20 Mei/May 2020	
6	17 Juni/June 2020	
7	22 Juli/July 2020	
8	12 Agustus/August 2020	
9	16 September 2020	
10	14 Oktober/October 2020	
11	13 November 2020	
12	17 Desember/December 2020	

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee). Tujuan pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

In order to maintain the implementation of information technology (IT), the Board of Directors of PaninBank formed an Information Technology Steering Committee. The purpose of establishing an IT Steering Committee is to provide recommendations and assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in monitoring the implementation and readiness of IT infrastructure.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.014/SK-DIR/20 tanggal 16 November 2020, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

Structure and Membership

Pursuant to the Decree of the Establishment of Information Technology Steering Committee of PT Bank Panin Tbk, namely Decree No.014/SK-DIR/20 dated November 16, 2020, the membership composition of PaninBank's Information Technology Steering Committee were as follows:

ITSC	
Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
Wakil Ketua I Vice Chairman I	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director
Anggota Member	Direktur Operations dan IT Operation and IT Director
Anggota Member	Direktur HR, Business &IT Strategy HR, Business & IT Strategy Director
Anggota Member	Direktur Risk Management, Digital & Liability Dev. Risk Management, Digital & Liability Dev. Director
Anggota Member	Kepala Biro Teknologi Informasi Head of Information Technology Bureau

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-proyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan)* selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal:
   - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis PaninBank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
   - Sumber daya yang dibutuhkan;
   - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan;*

Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee

As a supporting organ of the Board of Directors, the Information Technology (IT) Steering Committee has the duties and responsibilities of reviewing the IT strategic planning and monitoring the implementation of IT projects, which consists of:

1. To evaluate and to assure that the formulation of information technology policies and procedures has been updated in accordance with the prevailing laws and regulations, by taking into account the security and risk management regarding the use of information technology;
2. To evaluate and to assure that the Information Technology Strategic Plan is in line with the Bank's strategic business plan, as well as supporting the management information system of the Bank's business unit or work unit, as well its operational activities, and to determine the priority status of critical IT projects, such as:
   - Road map to achieve information technology requirements that support PaninBank's business strategy. The road map consists of the current state, the future state and the steps to be taken to achieve the future state;
   - The resources needed;
   - Benefits that will be obtained when the plan is implemented.
3. Evaluating the planning, implementation and completion of IT projects;
4. Evaluating the achievement of service level agreement on IT project performance. The Committee also complements the evaluation results with recommendations based on the results of analysis and major IT projects to enable the Board of Directors to make decisions efficiently;
5. Evaluating the performance of information technology, and efforts to improve it, for example by detecting obsolescence of information technology and measuring the effectiveness and efficiency of implementing information technology security policies;
6. Evaluating the effectiveness of measures to minimize the risk on the Bank's investment in the information technology sector and that these investments contribute to the achievement of the Bank's business objectives;
7. Ensuring the readiness of the Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan;

8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem untuk melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI; dan
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2020. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2020 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

8. Making efforts to resolve various problems related to information technology, which the Information Technology Bureau and users cannot solve. The Committee also facilitate the resolution of problems that arise; and
9. Evaluating the adequacy and allocation of resources owned by the Bank. If the available resources are insufficient and the Bank will use the services of other parties in the provision of information technology, the Information Technology Steering Committee must ensure that the Bank has related policies and procedures.

Authorities of the Information Technology Steering Committee

Authorities of the Information Technology Steering Committee, as follows:

1. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the implementation of their duties and responsibilities;
2. Obtain access and data into the system in order to conduct an assessment of IT operations; and
3. Request third party to test the IT system security.

Activities of the Information Technology Steering Committee

The work programs of the Information Technology Steering Committee are carried out through regular coordination meetings to discuss IT implementation performed by the Information Technology Bureau during 2020. The resolutions of the meeting are set forth in the form of minutes of the Information Technology Steering Committee meeting.

Information Technology Steering Committee Meeting

Throughout 2020, the Information Technology Steering Committee held 3 (three) meetings, namely:

No	Tanggal Date	Agenda/Materi	Agenda
1	19 Februari/February 2020	1. *Summary Audit* TI Q4 2019 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2019 3. Rencana Kerja TI Q1 2020 4. BCP & DRP	1. Summary of Audit IT Q4 2019 2. Realization of the IT Q4 2019 Work Plan 3. IT Q1 2020 Work Plan 4. BCP & DRP
2	20 Mei/May 2020	1. *Summary Audit* TI Q1 2020 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2020 3. Rencana Kerja TI Q2 2020	1. Summary of Audit IT Q1 2020 2. Realization of the IT Q1 2020 Work Plan 3. IT Q2 2020 Work Plan
3	26 Agustus/August 2020	1. *Summary Audit* TI Q2 2020 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2020 3. Rencana Kerja TI Q3 2020	1. Summary of Audit IT Q2 2020 2. Realization of the IT Q2 2020 Work Plan 3. IT Q3 2020 Work Plan

KOMITE TATA KELOLA/GCG

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG. Berikut adalah anggota Komite GCG:

GOVERNANCE/GCG COMMITTEE

Structure and Membership

The GCG Committee is comprised of members of the Board of Directors who serves as permanent members of the GCG Committee as well as non-permanent members consisting of appointed Executive Officers of the Company. The appointment of members of the Board of Directors and Executive Officers is conducted by the President Director by taking into account the scope of GCG implementation. The following are members of the GCG Committee:

	Komite GCG **GCG Committee**	
Anggota Tetap Permanent Members	1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur yang membawahi *Commercial Banking Group* 4. Direktur yang membawahi *Corporate & Credit* 5. Direktur yang membawahi *Institutional Banking* 6. Direktur yang membawahi *Treasury* 7. Direktur yang membawahi *HR Business & IT Strategic* 8. Direktur yang membawahi *Compliance* 9. Direktur yang membawahi *Risk Management*	1. President Director; 2. Deputy President Director 3. Director in charge of Commercial Banking Group 4. Director in charge of Corporate & Credit 5. Director in charge of Institutional Banking 6. Director in charge of Treasury 7. Director in charge of HR, Business & IT Strategic 8. Director in charge of Compliance 9. Director in charge of Risk Management
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. *Corporate Secretary* 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko 4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan 5. Kepala Group Operations 6. Kepala Biro Umum & Personalia 7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan 8. Kepala Biro Internal Control	1. Corporate Secretary 2. Head of Compliance Bureau 3. Head of Risk Management Bureau 4. Head of Supervision and Inspection Bureau 5. Head of Group Operations 6. Head of General & Personnel Bureau 7. Head of Accounting and Finance Bureau 8. Head of Internal Control Bureau

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2020, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Dalam rapat tersebut, agenda/materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self-Assessment* GCG.

GCG Committee Activities

The GCG Committee activities is outlined in the form of organizing Committee meetings. In 2020, the GCG Committee held 2 (two) meetings. During the meeting, the agenda/material discussed was regarding the GCG Self-Assessment results.

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Members
1	11 Maret/March 2020	1. Pembahasan Hasil *Self-Assessment* GCG Bank Semester I 2019 2. Pembahasan Hasil *Self-Assessment* GCG Terintegrasi Semester II Tahun 2019	Anggota Tetap 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Wakil Presiden Direktur 2 4. Direktur yang membawahi *Retail Banking Group* 5. Direktur yang membawahi *Commercial Banking Group* 6. Direktur yang membawahi *Corporate & Credit* 7. Direktur yang membawahi *Finance* 8. Direktur yang membawahi *Institutional Banking* 9. Direktur yang membawahi *Treasury* 10. Direktur yang membawahi *General Affairs & HR* 11. Direktur yang membawahi *Compliance & Risk Management* Anggota Tidak Tetap 1. *Corporate Secretary* 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Members
		1. Discussion on the Bank's GCG Self-Assessment Results for Semester I of 2019 2. Discussion of the Integrated GCG Self-Assessment Results for the Semester II of 2019	Permanent Members 1. President Director 2. Deputy President Director 1 3. Deputy President Director 2 4. Director in charge of Retail Banking Group 5. Director in charge of Commercial Banking Group 6. Director in charge of Corporate & Credit 7. Director in charge of Finance 8. Director in charge of Institutional Banking 9. Director in charge of Treasury 10. Director in charge of General Affairs & HR 11. Director in charge of Compliance & Risk Management Non-Permanent Members 1. Corporate Secretary 2. Head of Compliance Bureau 3. Head of Risk Management Bureau
2	9 September 2020	1. Pembahasan Hasil *Self-Assessment* GCG Bank Semester II 2019 2. Pembahasan Hasil *Self-Assessment* GCG Terintegrasi Semester I Tahun 2020	Anggota Tetap 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Direktur yang membawahi *Retail Banking Group* 4. Direktur yang membawahi *Commercial Banking Group* 5. Direktur yang membawahi *Corporate & Credit* 6. Direktur yang membawahi *Finance* 7. Direktur yang membawahi *Institutional Banking* 8. Direktur yang membawahi *Treasury* 9. Direktur yang membawahi *General Affairs & HR* 10. Direktur yang membawahi *Compliance & Risk Management* Anggota Tidak Tetap 1. *Corporate Secretary* 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko
		1. Discussion on the Bank's GCG Self-Assessment Results for Semester II of 2019 2. Discussion of the Integrated GCG Self-Assessment Results for the Semester I of 2020	Permanent Members 1. President Director 2. Deputy President Director 1 3. Director in charge of Retail Banking Group 4. Director in charge of Commercial Banking Group 5. Director in charge of Corporate & Credit 6. Director in charge of Finance 7. Director in charge of Institutional Banking 8. Director in charge of Treasury 9. Director in charge of General Affairs & HR 10. Director in charge of Compliance & Risk Management Non-Permanent Members 1. Corporate Secretary 2. Head of Compliance Bureau 3. Head of Risk Management Bureau

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi *anti-fraud* dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

Duties and Responsibilities of the GCG Committee

The GCG Committee as a supporting organ of the Board of Directors has duty and responsibility to formulate, communicate and supervise as well as take corrective actions on compliance with GCG implementation, ethics, internal control, anti-fraud strategy and relating to HR. The following are duties and responsibilities of the GCG Committee on compliance with matters, including:

Penerapan GCG & Pengendalian Intern
GCG Implementation & Internal Control

- Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct*, Strategi *Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self-assessment* GCG oleh tim *self-assesment* GCG.
- Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai periodesasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deposan besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal

- Evaluate the Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Anti-Fraud Strategy and Guidelines for the Directors and Committees of Directors periodically to be submitted to the Compliance Bureau so that updates can be made.
- Monitor the planning, implementation and report of GCG self assessment by the GCG self-assessment team.
- Evaluate governance outcomes at least as follows: Reporting to regulators, Implementation and development of compliance culture, Settlement of customer complaints and complaints that require cross-settlement, Implementation of Anti-Fraud Strategy, Conflict of Interest and KYE according to the periodization of each statement, Violation of compliance with regulations external and internal; and Implementation of large depositors' policies and the provision of large funds and the provision of funds to related parties.
- Ensure increased GCG awareness and compliance culture that is carried out through socialization and communication activities through internal media.

Strategi *Anti Fraud*
Anti Fraud Strategies

- Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian *fraud*.
- Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator).
- Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud* Manajemen Team (FMT) dan *whistleblowing system* (WBS)
- Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

- Ensuring an increase in awareness of anti-fraud strategies carried out through dissemination and communication activities through internal media.
- Monitor and supervise investigations and resolve incidents/fraud incidents
- Ensure that BOC and BOD get a report on the resolution of fraud issues/incidents that have a significant impact and report it to the regulator (Bank)
- Supervise the effectiveness of the implementation of the Fraud Management Team (FMT) function and whistleblowing system (WBS).
- Provide recommendations for the President Director on handling fraud indications based on the WBS that has been verified by FMT.
- Overseeing the follow-up in the form of improvements that must be made by the related unit to prevent fraud from happening again.

Etika
Ethics

- Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

- Monitor sanctions related to violations of Company Regulations, Ethics and Behavior Guidelines and disciplinary actions towards Bank rules and regulations as well as compliance with applicable laws and regulations.
- Monitor training, refreshment, dissemination, and information on Company Regulations and Ethics and Behavior Guidelines.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Human Resources (HR)

- Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG.
- Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi.

- Monitor the implementation of HR programs and policies related to the implementation of GCG principles
- Monitor reports of violations and sanctions

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity and Succession Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin melalui penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Diversity Composition of the Board of Commissioners

The diversity in the composition of members of the Board of Commissioners is a combination of characteristics, both institutionally and individually, in accordance with the needs of public company. These characteristics can be reflected through the determination of expertise, knowledge, and experience required during the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners of Public Company as set out in Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 regarding the Guidelines for Public Corporate Governance.

Tabel Komposisi Keberagaman/Profil Anggota Dewan Komisaris

Table Composition of Diversity/Profile of Members of the Board of Commissioners

Nama Name	**Warga Negara** Citizenship	**Usia** Age	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience
Nelson Tampubolon	WNI Indonesian	67	Presiden Komisaris President Commissioner	• Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston • Faculty of Economics, Parahyangan University • Arthur D. Little Management Institute, Boston	• Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisioner *ex-officio* OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia • President Commissioner of PT MNC Kapital Indonesia (2018 - 2019) • Member of the Financial Services Authority Commissioner Board • Ex-officio Board of Commissioners Member OJK at the Deposit Insurance Corporation • Director of the International Directorate, Bank Indonesia
Lintang Nugroho	WNI Indonesian	63	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	• *International Trade & Business* di UCLA – LA, CA, USA • *Executive Management Development Program,* University of Southern California Los Angeles, CA • *Management Development Program,* University of Southern California Los Angeles, CA • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA	• Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga • Vice President Commissioner of PaninBank • President Commissioner of PT PNM Ventura Syariah • Finance & Operations Director and Business Director of PT PNM Persero • IT & Operations Director of PT PNM Persero • Commissioner of PT Bank Shinta Indonesia • President Director of PT Quantum Konservasi Energi • Director of Compliance, HR, Operations & IT of PT Bank Tiara • Head of Operations Division of PT Bank Niaga

Nama Name	Warga Negara Citizenship	Usia Age	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Chandra R. Gunawan	WNI Indonesian	60	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner	*Business Administration*, University of San Francisco, Amerika Serikat Bachelor of Business Administration, University of San Francisco, United States of America	• Wakil Presiden Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • *Vice President* Chase Manhattan Bank • Vice President Commissioner of PaninBank • Deputy President Director of PaninBank • Vice President of Chase Manhattan Bank
Drs. H. Riyanto	WNI Indonesian	73	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Bachelor of Economics, majoring in Accounting from Gadjah Mada University	• Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan • Commissioner of PaninBank • Commissioner of PT Bank Mitra Niaga • Executive Bank Inspectors of Bank Indonesia • Head of Internal Audit of PT Petro Kimia Gresik • Auditor at the Directorate General of State Financial Supervision, Department of Finance
Johnny*	WNI Indonesian	67		• Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia • Bachelor of Banking Finance, National Bank Academy • Bachelor of Economics in Management from the University of Indonesia	• Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank • President Commissioner of PaninBank • Director of Treasury of PaninBank • Asst. Manager of PaninBank
Gregory James Terry	WNA Foreigner	76		• Fakultas Hukum, University of Melbourne • *Master of Arts*, Tuft University Chicago • Faculty of Law - University of Melbourne • Master of Arts degree from Tufts University, Chicago.	• Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • *Country Manager* Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank • Advisor of Oentoeng Suria and Partners Law Office • Executive Officer at JM Financial Limited • General Counsel at Morgan Stanley for Asia (2006-2009) • Operations Director at Brierley Investments Limited • Country Manager of Credit Suisse Bank, Austria • Country Manager of Jardine Fleming Investment Bank

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya | Effective after obtaining approval from the next GMS

Komposisi Keberagaman/Profil Direksi

Komposisi keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin melalui penentuan pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Direksi Perusahaan Terbuka sebagaimana di tuangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Diversity of the Board of Directors' Composition

The diversity in the composition of members of the Board of Directors is a combination of characteristics, both in terms of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of Public Company. These characteristics can be reflected through the determination of knowledge and experience required during the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Directors of public company as set out in Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 regarding the Guideline for Public Corporate Governance.

Tabel Komposisi Keberagaman/Profil Direksi

Composition of Diversity/Profile of Members of the Board of Directors

Nama Name	**Warga Negara** Citizenship	**Usia** Age	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience
Herwidayatmo	WNI Indonesian	62 tahun 62 years old	Presiden Direktur President Director	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - *Master Business Administration* dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia - Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1981) - Master of Business Administration from Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada	- Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - *Executive Director* World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - President Director of Bank Panin - Vice President Director of PT Bank Permata - Legal and Compliance Director of PT Bank Permata - Executive Director of World Bank for Southeast Asia - Chairman of Bapepam - Deputy Minister of BUMN for Restructuring and Privatization
Hendrawan Danusaputra	WNI Indonesian	54 tahun 54 years old	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director	*Computer Science*, University of Technology, Sydney, Australia Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia	- Direktur Institutional Banking PaninBank - *Vice President* Divisi Internasional - Komisaris PT Clipan Finance - Direktur Financial Institution di American Express Bank - Institutional Banking Director of PaninBank - Vice President for International Division - Commissioner of PT Clipan Finance - Director of Financial Institution at American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI Indonesian	51 tahun 51 years old	Direktur Director	*Finance*, San Francisco State University, Amerika Serikat Finance, San Francisco State University, United State of America	- Direktur Umum dan SDM PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank - Human Resources and General Affairs Director of PaninBank - Director at ANZ PaninBank - Manager of Westpac PaninBank
Edy Heryanto	WNI Indonesian	56 tahun 56 years old	Direktur Director	- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia - Academy of Finance and Development Banking - Indonesian Institution of Banking Education	- Direktur Perbankan Komersial PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal - Commercial Banking Director of PaninBank - Vice President and Jakarta Palmerah Branch Office Manager - Credit Analyst of Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI Indonesian	51 tahun 51 years old	Direktur Director	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Faculty of Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta	- Direktur Tresuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk - Treasury Director of PaninBank - Commissioner of PT Verena Multi Finance - Commissioner of PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA Foreigner	63 tahun 63 years old	Direktur Director	- Jurusan *Commerce* University of Melbourne, Australia - *Master Business Administration*, University of Melbourne, Australia - Majoring in Commerce, University of Melbourne, Australia - Master of Business Administration, University of Melbourne, Australia	- Direktur Perbankan Ritel PaninBank - Group Manager Retail Banking PaninBank - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy ANZ Bank - Risk Management, Digital & Liabilities Development Director - Retail Banking Director of PaninBank - Retail Banking Group Manager of PaninBank - Head Portfolio Management of ANZ Bank - Executive Group Strategy of ANZ Bank

Nama Name	Warga Negara Citizenship	Usia Age	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Januar Hardi	WNI Indonesian	55 tahun 55 years old	Direktur Director	Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Husbandry/Economics Studies in Husbandry, Bogor Agricultural University (IPB)	- Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin - *Vice President Head of Corporate Banking* Bank Panin - *Asst. Vice President* Unit *Head Corporate Banking Group* Bank Panin - Senior Manager Unit Head *Corporate Banking Group* Bank Panin - *Manager Unit Head Corporate Banking Group* Bank Panin - *Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking* - Corporate Banking Director of PaninBank - Vice President - Head of Corporate Banking Group of PaninBank - Asst. Vice President Unit Head of Corporate Banking Group of Bank Panin - Manager Unit Head of Corporate Banking Group of Bank Panin - Manager of PaninBank Group Corporate Banking Unit Head - Account Manager for Consumer Banking Junior Officer for Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo	WNI Indonesian	54 tahun 54 years old	Direktur Director	- Universitas Surabaya - Magister bidang Ekonomi/ Marketing dari Universitas Pelita Harapan - University of Surabaya - Masters in Economics/ Marketing from Pelita Harapan University	- *Branch Banking Division Head* PaninBank - *Branch Network & Operations Group* Head PaninBank - Citibank - Lippo Bank - Branch Banking Division Head of PaninBank - Branch Network & Operations Group Head of PaninBank - Citibank - Lippo Bank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI Indonesian	50 tahun 50 years old	Direktur Director	- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Pelatihan di bidang *Credit Analysis of Agricultural Trade Finance* di Iowa State University, Amerika Serikat - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya - College of Economics (STIE) in the field of Finance and Banking Yogyakarta - Indonesia Banking Development Institute (LPPI) - Training in Credit Analysis of Agricultural Trade Finance at Iowa State University, United States - Bachelor of Laws from Sebelas Maret University, Surakarta - Master of Business Law from Pelita Harapan University - Master of Business Law in the Post Graduate Study from Jayabaya University	- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - *Branch Manager* Bank CIC - *Account Officer* Bank CIC - Compliance and Risk Management Director of PaninBank - Head of Compliance Bureau of PaninBank - Branch Manager of Bank CIC - Account Officer of Bank CIC

Nama Name	Warga Negara Citizenship	Usia Age	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Haryono Wongsonegoro	WNI Indonesian	56 tahun 56 years old	Direktur Director	- Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - *Master of Management*, Universitas Udayana Bali (2004) - Bachelor of Accounting, Putra Bangsa University Surabaya (1990) - Master of Management, Udayana University Bali (2004)	- Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989) - Network and Distribution Director of PaninBank (2020-present) - Head of Jakarta Regional Office of Bank Central Asia (2011-2019) - Head of Small and Medium Business (SME) and Commercial Business of Bank Central Asia (2009-2011) - Head of Central Java Regional Office of Bank Central Asia (2005-2009) - Head of Main Branch Office of Bank Central Asia (1995-2005) - Deputy Chairman of Main Branch Office of Bank Central Asia (1993-1995) - Head of Internal Audit Team of Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor at Public Accounting Firm (1987-1989)

PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS DAN DIREKTUR

Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

ASSESSMENT ON CANDIDATE FOR COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Assessment Indicators for Commissioner and Director Candidates

As a Bank that emphasizes the principle of prudence, the Company uses this principle as one of the important criteria in the nomination and succession process of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition, the background of experience, knowledge and expertise in the field to be occupied is always strived to be aligned and in accordance with the company's needs, so that the Bank gets the best composition of the Board of Directors who can work optimally.

Individual quality and a strong knowledge regarding the company culture are important factors. Candidates may come from external as well as from senior staff who have the potential to become a Director who have been prepared through the Company's employee development plan. Currently, more than 90% of members of the Board of Directors are internal candidates, most of them were previously had operational experiences in the Bank for at least 5 (five) years as Executive Officers of the Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membeda-bedakan ras, etnis, gender dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:

Procedure for Submission of Candidates for Commissioners and Directors

The process of identifying candidates who meet the requirements is conducted by the Remuneration and Nomination Committee, by examining the candidate's backgrounds and track records, regardless of race, ethnicity, gender, and religion. The Nomination Committee proposes the elected candidates to the Board of Commissioners, furthermore, the Board of Commissioners will request the Board of Directors to submit to the Financial Services Authority (OJK) for taking Fit and Proper Test, as well as to be submitted in the Annual or Extraordinary General Meeting of Shareholders to get approval and ratification. The procedures for submitting candidates for Commissioners and Directors are as follows:

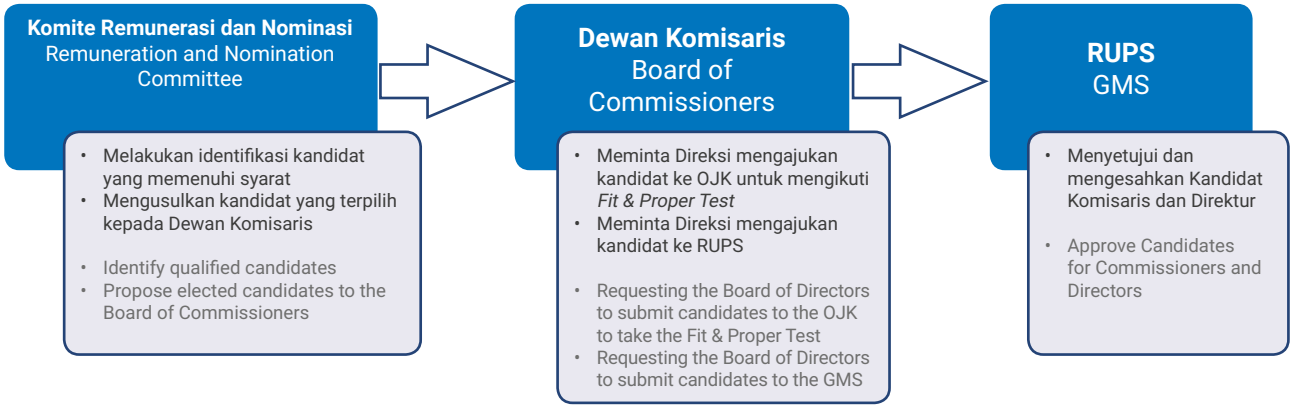

Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, bertujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut:

1. *Overview* peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta *Risk Management*
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. *Overview* Bisnis PaninBank

Orientation Program for New Board of Directors and Board of Commissioners

Introduction or Orientation Program for New Members of the Board of Directors and Board of Commissioners following up on the appointment of new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, intends to provide a general introduction to the company's condition so that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners can work together as a solid team, given their different backgrounds. The materials presented in the orientation program is as follow:

1. Overview of roles, duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners
2. Implementation of Compliance and GCG, as well as Risk Management
3. PaninBank audit results
4. Implementation of Corporate Cultures
5. PaninBank Business Overview

KEBIJAKAN REMUNERASI PANINBANK
PaninBank Remuneration Policy

Prosedur Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Procedure for Determining the Remuneration and Facilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Board of Commissioners

Provisions regarding the amount of salary or honorarium or remuneration and/or allowances for the Board of Commissioners are determined by the GMS by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Board of Directors

Provisions regarding the amount of salary or remuneration and/or allowances for members of the Board of Directors are determined by the Board of Commissioners in the GMS by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

The procedures for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

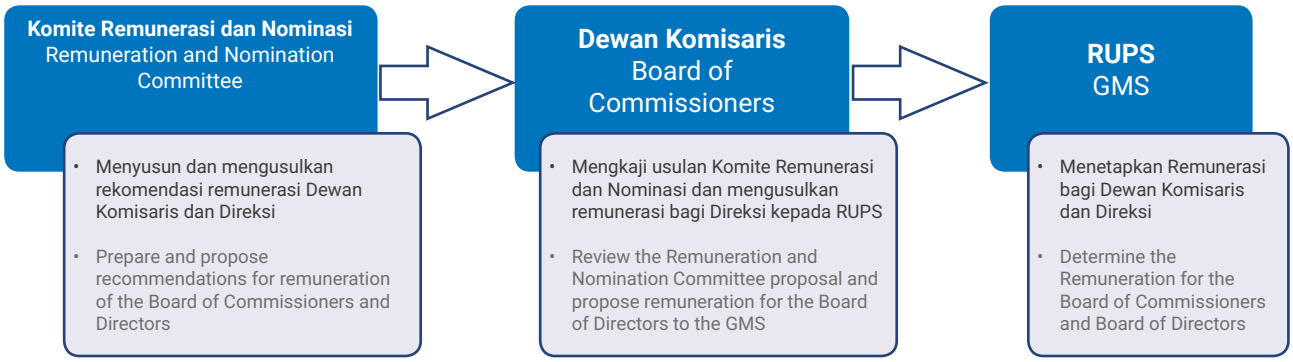

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group;*
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Remuneration Policy for Directors

The criteria for determining remuneration for Directors are as follows:

1. Individual work performance;
2 Inflation rate;
3. Fairness with the peer group;
4. Financial performance and reserve fulfillment as stipulated in the applicable laws and regulations;
5. Long-term goals and strategies of the Bank.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (*Material Risk Taker)* dan perhitungan *Malus* dan *Clawback*.

Penggunaan Konsultan

PaninBank menggunakan jasa konsultan

1. Daya Mandiri dengan tugas menyusun perhitungan aktuaria terkait dengan pensiun dan/atau pesangon karyawan
2. *Wyr Solution* dengan tugas membantu memperkuat Organisasi PaninBank melalui pengembangan *onboarding* untuk rekrutmen dan mengidentifikasi talenta-talenta yang ada.

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

Performance indicators to measure the determination of remuneration for Directors & Board of Commissioners are as follows:

1. Achievement of targets set in the Company's Business Plan;
2. Internal and external audit results;
3. Completion of developing problems (if any).

The remuneration structure that shows the type and amount of short-term and long-term/post-employment benefits for each member of the Board of Directors is as follows:

1. Salary;
2. Allowances and other facilities are in accordance with Bank regulations

Remuneration Adjustment is associated with Performance and Risk

Provision of remuneration related to performance and risk by determining the MRT (Material Risk Taker) and calculation of Malus and Clawback.

Use of Consultants

PaninBank uses consultant services

1. Daya Mandiri with the task of compiling actuarial calculations related to employee pension and/or severance pay
2. Wyr Solution with the task of helping to strengthen the PaninBank Organization by developing onboarding for recruitment and identifying existing talents.

Remuneration Policy Package for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remuneration packages/policies and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which consist of honorarium for the Board of Commissioners and Salaries for Board of Directors.

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris
Remuneration and other facilities received by Board of Commissioners

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam Tahun 2020 Amount Received in 2020	
		Orang Person	Rp Juta Rp Million
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salaries, bonuses, routine allowances and other facilities in non-natura forms)	5	4.576
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of natura (housing, taxi transport, health insurance, and others) that*): a. Can be owned b. Cannot be owned	2	219
TOTAL			4.795

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah | Valued in Rupiah equivalent

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi
Remuneration and other facilities received by the Board of Directors

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam Tahun 2020 Amount Received in 2020	
		Orang Person	Rp Juta Rp Million
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salaries, bonuses, routine allowances and other facilities in non-natura forms)	12	51.406
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of natura (housing, taxi transport, health insurance, and others) that*): a. Can be owned b. Cannot be owned	9	4.515
TOTAL			55.922

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah | Valued in Rupiah equivalent

Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2020
Amount of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners per person in 2020

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *) Amount of Remuneration Per Person in 1 year *)	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
di atas Rp 2 miliar | above Rp 2 billion	9	0
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar | above Rp1 billion to Rp 2 billion	2	1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | above Rp500 million to Rp1 billion	1	3
Rp 500 juta ke bawah | Rp 500 million and below	0	1

*) yang diterima secara tunai | Received in cash

Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Variable Remuneration

Remuneration in variables, including:

1. The form of variable remuneration along with the reasons for choosing the form; and
2. Explanation in the event of differences in the provision of variable remuneration between the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or Employees, including an explanation of the factors that determine the difference along with the underlying considerations.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2020 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Table of the Number of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year and nominal in 2020 as follows:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun Amount Received in 1 (One) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employee	
	Orang Person	Rp Juta Rp Million	Orang Person	Rp Juta Rp Million	Orang Person	Rp Juta Rp Million
Total	9	56.283	4	4.576	5.638	164,613

Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Termination of Employee

In 2020, there will be 10 (ten) employees who have been terminated, while the amount and total nominal value of severance pay is presented in the following table

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan The nominal of severance pay paid	Jumlah Pegawai Number of Employees
Lebih dari Rp 1 Miliar Above Rp 1 Billion	-
Lebih dari Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar Above Rp 500 Million to Rp1 Billion	-
Kurang dari Rp 500 Juta Below Rp 500 Million	10

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2020 dan perbandingannya dengan Tahun 2018 dan 2019, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

The ratio of salary of employees, Board of Directors and Board of Commissioners in 2020 and its comparison with 2018 and 2019, is illustrated in the following table:

No	Keterangan Description	Ratio 2018	Ratio 2019	Ratio 2020
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Highest and lowest salary of employee	52,03 : 1	48,37 : 1	47,72 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Highest and lowest salary of the Board of Directors	2,04 : 1	2,08 : 1	2,17 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Highest and lowest salary of the Board of Commissioners	2,48 : 1	2,49: : 1	3,95 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai Tertinggi Highest salary of the Board of Directors and the highest salary of the employee	1,96 : 1	1,96 : 1	1,77 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana | Notes : Employee is a permanent employee until executor level.

FUNGSI KEPATUHAN
Compliance Functions

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Bank tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

The complexity of the Bank's business activities is increasing along with the development of information technology, globalization and financial market integration. The complexity of the business activities has a huge impact on the risk exposure faced by the Bank, and one of them is compliance risk.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Compliance risk is a risk arising from the Bank's failure in complying with and/or not implementing the applicable laws and regulations. Mitigating the risk arising from the Bank's business activities needs various preventive (ex-ante) and curative (ex-post) measures. Ex-ante measures can be pursued by adhering to various applicable banking rules to reduce or minimize the risk of bank business activities.

Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Preventive actions, namely by ensuring that all business activities, policies, provisions, systems and procedures of the bank have complied with the applicable laws and regulations. It is expected that with these preventive actions, the bank will be able to eliminate or minimize the impact of the risk events. To realize the things referred to above, it is necessary to increase the role and Compliance Function and the Compliance Unit in the Bank so that the potential risk of business activities can be anticipated earlier.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

The Compliance Unit is responsible for implementing the compliance function and coordinating the improvement and development of a culture of compliance at the Company. As stated in the PaninBank Compliance Charter, compliance with regulations and legislation is an obligation of all organs and employees of the Company to create a culture of compliance.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 July 12, 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, in the organizational structure, PaninBank has a Compliance Director, where in carrying out its duties the Compliance Director is assisted by a Compliance Unit headed by a Head of Bureau (Head of Unit Compliance Work).

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan PaninBank:

Compliance Function Organizational Structure

The following is a table of PaninBank Compliance organizational structures:

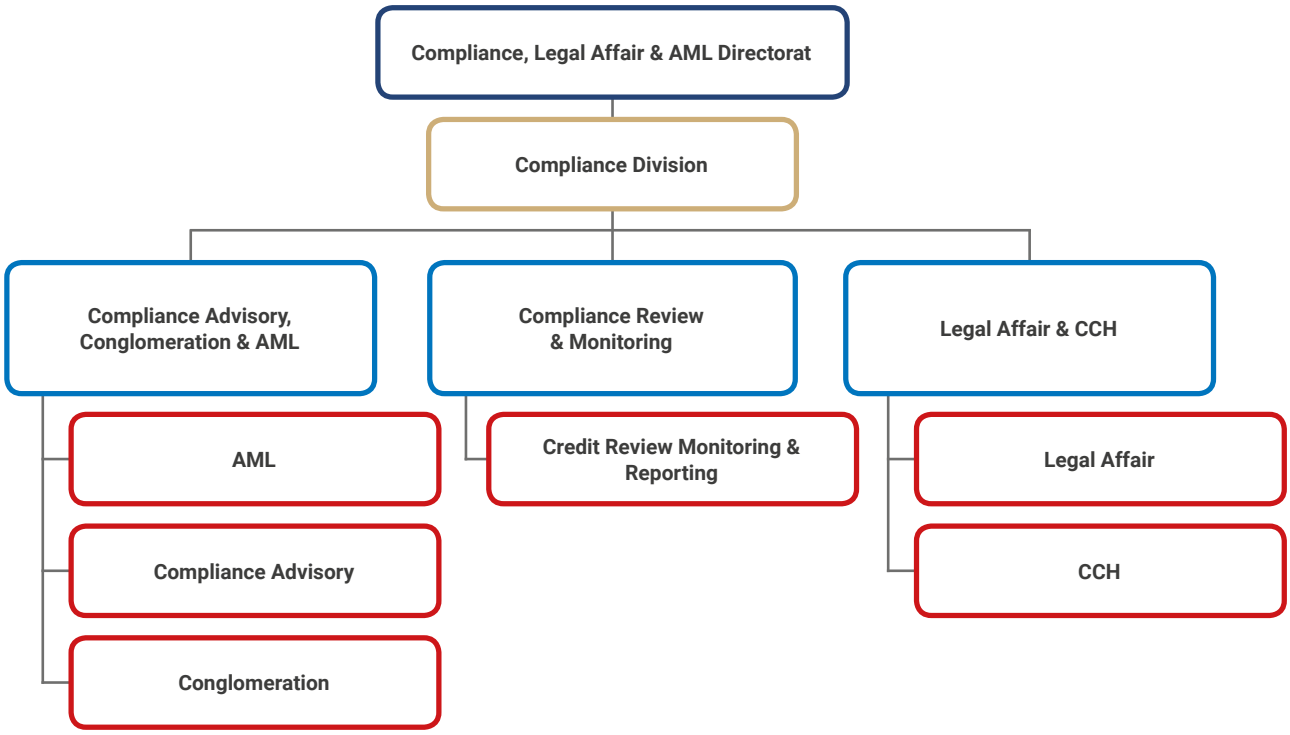

Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

In general, the implementation of the Compliance Function is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank - Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank	- Taking active role in supervising Company compliance function. - Providing input for improving Company compliance function
Direksi Board of Directors	- Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku - Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya	- Managing the Bank in compliance with prevailing rules, regulations, and regulations. - Supporting the realization of a culture of compliance in each Work Unit under its supervision.
Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Work Unit	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan	Implementing compliance functions as set forth in the Compliance Unit Manual.
Satuan Kerja Audit Intern Internal Audit Unit	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern	Auditing the Bank's compliance with laws, and regulations in accordance with the Internal Audit Charter and Work Plan.
Divisi/Biro/Group/Cabang Divison/Bureau/Group/ Branch	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	Ensuring the accuracy and fulfillment of mandatory reporting and compliance with applicable laws, regulations, and regulations.

Biro Kepatuhan (*Compliance*)

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan PaninBank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Compliance Bureau

Bank has an organizational structure of the Compliance Unit (Compliance Bureau) led by the Compliance Director. The appointment of the Compliance Director of PaninBank shall adhere to the provisions, namely appointed based on the GMS and has obtained approval from the banking regulator.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

To carry out its functions, duties and responsibilities, the Compliance Director is assisted by the Head of the Compliance Bureau who oversees the Compliance Unit (Compliance Bureau).

Scope of Compliance Function

The Company's Compliance Function includes actions to:

1. Realize the implementation of a compliance culture at all levels of the organization and business activities of the Bank in accordance with the Financial Services Authority Regulations and other applicable provisions;
2. Managing compliance risks faced by the Bank;
3. Ensure that policies, systems and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the policies of the banking regulator provisions and applicable laws and regulations;
4. Ensure the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities.

Duties and Responsibilities of the Compliance Bureau

To improve the effectiveness of the Bank's Compliance Function, PaninBank has determined the duties and responsibilities of the Bank Compliance Bureau as follow:

1. Taking the measures to support the creation of compliance culture in all business activities of the Bank at every level of the organization in accordance with the strategy of improving compliance culture prepared by the Compliance Director;
2. Identifying, measuring, monitoring and controlling compliance risk by referring to the regulations of banking regulator regarding the implementation of risk management for commercial banks;
3. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, provisions, systems and procedures that are owned by the Bank with applicable laws and regulations;
4. Reviewing and/or providing recommendation for updating or refining policies, provisions, systems and procedures adopted by the Bank to conform with the provisions of the banking regulator and applicable laws and regulations, which can be done in collaboration with the related units;
5. Ensuring that the policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities of the Bank are in accordance with the provisions of the banking regulator and applicable laws and regulations;

6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

6. Performing other tasks related to the Compliance Function.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

Profile of the Head of the Compliance Bureau

The following is information about the Head of the Compliance Bureau:

Wahyu Wardhanakusuma **Kewarganegaraan** Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Riwayat Pendidikan Sarjana Hukum – Universitas Padjadjaran, Bandung	**Job History & Work Experience** Bachelor of Law - Padjadjaran University, Bandung
Riwayat Jabatan • Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010) • Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011) • Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)	**Position Jistory** • Head of Compliance Unit (2008-2010) • Head of Compliance Division (2010-2011) • Head of Compliance Bureau (2011-present)
Dasar Hukum Penunjukan Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011	**Legal Basis of Appointment** Appointment Letter No. 018/DIR/BCO/SJ/11 dated September 13, 2011
Kualifikasi dan Sertifikasi • Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011) • Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)	**Qualifications and Certifications** • Risk Management Certification - Level 4 (2011) • Compliance Certification Level 1 (2015)

Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

Criteria for Head of Compliance Bureau

The criteria for the Head of the Compliance Bureau consist of:

1. Meeting the independence requirements;
2. Mastering the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations;
3. Not carrying out other duties outside the Compliance Function; and
4. Have a high commitment to implement and develop a compliance culture.

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Compliance Bureau Personnel Qualifications

The Compliance Bureau both collectively and individually must have the knowledge, skills and other competencies needed to carry out their responsibilities as members, namely:

1. Having knowledge of laws and regulations related to bank operations, Bank Indonesia regulations, regulations of the Financial Services Authority and other regulators;
2. Having the ability to do a gap analysis;
3. Have good communication, interpersonal, negotiation and correspondence skills.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

Implementation of Compliance Function Activities in 2020

The efforts and steps that have been carried out by the Compliance Unit in 2020 include the following:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan Attempts and Measurments of the Compliance Unit	
Sosialisasi **Socialization**	• Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru • Dilaksanakan secara tatap muka atau pelatihan dengan pihak yang terkait, maupun dalam bentuk penyampaian melalui media tertulis dan elektronik. • Hal-hal yang disampaikan antara lain mengingatkan kepada Unit Kerja untuk mematuhi ketentuan terbaru dan melakukan penyesuaian pada Buku Pedoman Internal Unit Kerja apabila diperlukan • Submission of information on the latest regulatory requirements. • Conducted face-to-face or training with related parties, as well as in the form of delivery through written and electronic media. • The items conveyed, among others, remind the Working Units to comply with the latest provisions and make adjustments to the Working Unit's Internal Guidelines if necessary
Pemantauan **Monitoring**	• Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati-hatian *Financial Key Point* Bank, antara lain: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), *Non Performing Loan (NPL)*, Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). • Pemantauan atas kewajiban pelaporan oleh Unit Kerja pada Perseroan yang disampaikan kepada regulator/pihak eksternal. • Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh Perseroan disebabkan ketidakpatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku. • Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK dan BI. • Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. • Pemantauan atas penerapan Tata Kelola terintegrasi, dimana PaninBank yang ditunjuk sebagai entitas utama. • Monitoring of compliance with the prudential principles of the Financial Key Point Bank, among others: the Bank's Minimum Capital Requirement (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Net Open Position (NOP), and Legal Lending Limit (BMPK). • Monitoring of reporting obligations by the Perseroan's Work Unit submitted to regulators/external parties. • Monitoring of strikes/sanctions received by the Company due to non-compliance of the Company to prevailing regulations. • Monitoring of the Company's commitment to OJK and BI Examination Results. • Monitoring, analyzing, and identifying transactions that meet the suspicious criteria. • Monitoring on the implementation of integrated governance, in which PaninBank is appointed as the main entity.
Pelatihan **Training**	Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perseroan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain: • Dalam *training* Program Pengenalan PaninBank terdapat sesi mengenai Standar Kehati-hatian Perbankan, maupun APU PPT, dimana peserta training adalah calon pegawai/pegawai baru. • Karyawan pada Biro Compliance diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan. • Diadakannya rapat kerja petugas UKPN cabang dengan tujuan *refreshment* atas ketentuan APU dan PPT untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang. Education and training are provided to employees and prospective employees in accordance with the level of need. It aims to build/increase awareness of the individual the importance of performing the compliance function on the Company's business activities. The form of training provided include: • In the training of the PaninBank Introduction Program there are sessions on Banking Prudential Standards, as well as the PPU APU, where trainees are prospective employees/new employees. • Employees at the Compliance Bureau are included in the Risk Management certification and Compliance certification. • The holding of working meetings of UKPN branch officers with the aim of refreshment on the provisions of APU and PPT to be applied within the scope of work of each Branch.
Pembinaan **Mentoring**	Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum/surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan di masa yang akan datang. Coaching is given to the Work Unit/Branch in accordance with the existing provisions. Coaching efforts can be done through a memorandum/letter of guidance, with the aim that the Work Unit/Branch observes the compliance principle and does not re-occur violations of future provisions
Pemberian Opini/ *Review* **Giving Opinion/Review**	Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Perseroan antara lain: • Rencana penerbitan produk/aktivitas baru maupun pengembangan • Pembuatan/pengkinian Kebijakan/Buku Pedoman/ketentuan internal Perseroan • Pemberian fasilitas *Lending* (Kredit maupun Treasury) tertentu. • Kegiatan yang berkaitan dengan APUPPT • Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/perjanjian Compliance Opinion on Company activities/activities include: • Plan of publishing new products or activities as well as development. • Preparation/updating of the Company's Policy/Manual/internal provisions. • Provision of certain Lending facilities (Credit or Treasury). • Activities related to APU & PPT. • Activities related to legal affair work units such as: giving legal opinion, reviewing legal developments, reviewing contracts/ agreements

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan Attempts and Measurments of the Compliance Unit	
Pelaporan Reporting	Biro Compliance menyusun dan menyampaikan beberapa jenis laporan baik yang ditujukan kepada pihak eksternal maupun internal The Compliance Bureau compiles and submits several types of reports, both to external and internal parties.
Lain-Lain Others	• Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APUPPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya) • Sebagai *Liaison Officer* antara Perseroan dengan pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan oleh regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK). • Ensure that the policies and procedures of the Compliance Unit, APU & PPT and Legal Affair are in compliance with applicable regulations. • Serves as a contact person for authority authorities related to the application of APU & PPT (including PPATK, KPK, Directorate General of Taxation, BNN and other Law Enforcement) • As Liaison Officer between Bank and auditor in inspection activity by regulator (Bank Indonesia, Financial Services Authority, PPATK).

Selama tahun 2020, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

In 2020, there were violations of the regulatory provisions, including:

No	Tanggal Date	Nomor dan Perihal Surat Number and Subject	Jenis Sanksi (Rp) Type of Sanction (Rp)
1	22-1-2020	Surat OJK No : S-128/PM.112/2020 Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan November 2019	50.000,-
2	28-1-2020	Surat OJK No : S-12/PB.331/2020 Perihal : Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi keuangan (SLIK) periode Laporan Debitur Bulan Februari 2019 s.d Juni 2019 Bank Saudara	29.350.000,-
3	29-1-2020	Surat OJK No : S-12/PB.3341/2020 Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda	15.500.000,-
4	6-2-2020	Surat BI No : 22/45/DKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan secara *Offline* Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)	50.000,-
5	26-3-2020	Surat BI No : 22/98/DKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan secara *Offline* Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)	13.600.000,-
6	06-5-2020	Surat Masuk BI No.22/9/DPSP-GOSP-KIM/Srt/B tanggal 06 Mei 2020 Perihal : Pembayaran kupon SBR-009 yang Tidak Dilakukan Pada Tanggal yang Sama dengan Tanggal *Sub-Registry* Menerima Pembayaran Kupon dari Bank Indonesia.	Teguran Warning
7	02-7- 2020	Surat OJK No : S-55/PB.331/2020 Perihal: Pengenaan Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode Oktober 2019 s.d Desember 2019 Bank Saudara. Pengenaan Sanksi/Denda sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhadap keterlambatan penyampaian koreksi laporan debitur untuk bulan September 2019 atas 1 (satu) debitur selama 2 (dua) hari kerja.	100.000,-
8	15-7-2020	Surat OJK No: S-58/PB.331/2020 Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan OJK posisi 31 Mei 2019 PT Bank Panin Tbk. Teguran atas temuan pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti sesuai komitmen hasil pemeriksaan posisi 31 Mei 2019.	Teguran Warning

No	Tanggal Date	Nomor dan Perihal Surat Number and Subject	Jenis Sanksi (Rp) Type of Sanction (Rp)
9	05-10-2020	Surat BI No: 22/208/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal: Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan secara Offline Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Pengenaan Sanksi/Denda sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhadap koreksi *offline* LBU sebanyak 2 (dua) *item* periode data Juli 2020.	100.000,-
10	13-10-2020	Surat OJK No : S-609/PM.112/2020 Perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan Maret 2020 Pengenaan Sanksi/Denda sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) terhadap keterlambatan penyampaian laporan Transaksi Efek periode bulan Maret 2020 selama 2 (dua) jam.	20.000,-
11	16-10-2020	Surat BI No: 22/136/Mdn-PU/Srt/B Perihal: Teguran tertulis atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli dan selisih lebih kurang Pengenaan Sanksi/Denda sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) terhadap Temuan Uang Rupiah Tidak Asli sebanyak 1 (satu) Lembar pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).	500.000,-
12	21-10-2020	Surat OJK No : S-661/PM.112/2020 Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan Juni 2020 Pengenaan Sanksi/Denda sebesar Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) terhadap keterlambatan penyampaian laporan Transaksi Efek periode bulan Juni 2020 selama 1 (satu) jam.	10.000,-
13	22-10-2020	Surat BI No: 22/141/Mdn-PU/Srt/B Perihal : Teguran tertulis atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli dan selisih lebih kurang Pengenaan Sanksi/Denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) terhadap Temuan Uang Rupiah Tidak Asli sebanyak 1 (satu) Lembar pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).	1.000.000,-
14	20-11-2020	Surat OJK No: SR-60/EP.123/2020 Perihal: Surat Pembinaan Iklan PT Bank Pan Indonesia Triwulan 3 Tahun 2020 Teguran atas iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Teguran Warning

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

However, PaninBank will continue to improve the Bank's Compliance Function.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan PaninBank atas peraturan perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh PaninBank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORISM FUNDING PROGRAMS (APU & PPT)

As a form of PaninBank's compliance with laws and regulations and various other regulations related to the principle of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT), the application of the APU & PPT principles carried out by PaninBank refers to the provisions of Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Funding Crimes, Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning

tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal PaninBank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank, PaninBank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU & PPT, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN PaninBank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;

Amendments to POJK Number 12/POJK.01/2017 concerning the Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector, Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.03./2017 Regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Banking Sector, as well as Decisions and Regulations of Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Regulators, such as OJK, PPATK and PaninBank Internal Auditors, regularly supervise or audit the implementation of APU & PPT Principles at PaninBank.

To support the implementation of the principles of APU & PPT at PaninBank, PaninBank has a special unit called the Customer Identification Unit (UKPN) coordinated by the Compliance Bureau. The implementation of the APU & PPT Principles at PaninBank through UKPN officers, both at the Head Office and Main Branch Offices with a minimum of 1 (one) UKPN dedicated officer in each of the main branch offices supported by the existing system running the APU & PPT programs.

In order to implement the principles of APU & PPT consistently and continuously, the PaninBank UKPN makes the following efforts:

1. Periodically analyze the risk assessment of money laundering and/or terrorism funding offenses related to customers, countries or geographical areas, products, services, transactions or delivery channels;
2. Arrange, update, and propose policies and procedures for the implementation of the APU and PPT programs that have been prepared to manage and mitigate risks based on risk assessment, for consideration and approval from the Board of Directors;
3. Ensure a system that can identify, analyze, monitor and provide reports effectively on the characteristics of transactions carried out by customers;
4. Ensure that the policies and procedures prepared are in accordance with changes and developments which include, among other things, products, services, and technology in the financial services sector, activities and complexity of business activities, the volume of PJK transactions, and modes of money laundering and/or terrorism funding;

5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU & PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;
9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU & PPT terhadap satuan kerja terkait;
11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU & PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan sumber informasi yang memadai;
12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;
13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU & PPT terlaksana dengan baik;
15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU & PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU & PPT;
17. Berperan aktif terhadap pengkinian data nasabah.

Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya,

5. Ensure that the forms relating to the Customer have accommodated the data needed in the implementation of the APU and PPT program;
6. Monitor customer accounts and customer transactions;
7. Evaluate the results of monitoring and analysis of customer transactions to ensure the presence or absence of suspicious financial transactions, cash financial transactions and/or financial transactions to transfer funds to and from abroad;
8. Ensure that the business activities that are at high risk of money laundering and/or terrorism funding criminal offenses are effectively identified in accordance with PJK policies and procedures and provisions;
9. Ensure that there is a good communication mechanism from each relevant work unit to a special work unit or official responsible for implementing the APU and PPT program by maintaining the confidentiality of information and paying attention to anti-tipping-off provisions;
10. Conduct supervision regarding the implementation of the APU and PPT program to the relevant units;
11. Ensure the identification of high risk areas related to the implementation of the APU and PPT programs by referring to the provisions of legislation and adequate sources of information;
12. Receiving, analyzing, and preparing suspicious financial transaction reports and/or financial transactions carried out in cash delivered by the Branch of UKPN;
13. Compile reports of suspicious financial transactions, cash financial transactions, and/or financial transactions to transfer funds to and from abroad;
14. Ensure that all activities in the framework of implementing the APU and PPT program are well implemented;
15. Monitor, analyze, and recommend training needs regarding the implementation of APU and PPT programs for officials and/or employees of PJK;
16. Serve as the contact person for regulators and authorized agencies related to the implementation of APU and PPT programs;
17. Play a role in updating customer data.

In addition, UKPN has also carried out the obligation to submit data on the number of customers to PPATK in the interest of the Integrated Service User Information System (SIPESAT). UKPN has also followed up on requests for customer information data required by regulators, government agencies and other authorized financial institutions, and has followed up on

serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah PaninBank sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan PaninBank dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU & PPT kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerja sama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada PaninBank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan di atas, PaninBank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU & PPT

Sepanjang Tahun 2020, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dilaksanakan PaninBank adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 34.593 (Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga) laporan yang terdiri dari 34.326 (Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam) LTKT dan 267 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) LTKM.

requests and revocation of blocking the assets of PaninBank customers in accordance with requests from the competent institutions, namely the Directorate General of Taxes (Director General of Taxes), and the Corruption Eradication Commission (KPK).

Other activities that have been done to support the APU & PPT program are to submit questionnaires related to APU & PPT to correspondent banks or banks that have credit facility cooperation. The submission of this questionnaire is part of the implementation of APU & PPT principles in PaninBank in Cross Border Correspondent Banking (CBCB) activities as required by the recommendation of Financial Action Task Force (FATF) and Bank Indonesia regulation. Through the efforts described above, PaninBank is fully committed to supporting government programs in the prevention and eradication of criminal acts of money laundering and terrorism funding crimes, and creating a sound banking system.

Activities related to the Implementation of the APU & PPT Program

Throughout 2020, activities related to the implementation of the APU & PPT program implemented by PaninBank were as follows:

1. Submission of the Cash Transaction Report (Laporan Transaksi Keuangan Tunai/LTKT) and Suspicious Financial Transaction Report (LTKM) to the Financial Analysis and Transaction Center (PATK) from January to December period amounted to 34,593 (thirty four thousand five hundred and ninety three) reports consisting of 34,326 (thirty four thousand three hundred and twenty six) LTKT and 267 (two hundred sixty seven) LTKM.

No	Bulan Month	Jenis Laporan Type of Report		Total
		LTKT	LTKM	
1	Januari	4.389	21	4.410
2	Februari	2.725	35	2.760
3	Maret	2.773	10	2.783
4	April	2.806	2	2.808
5	Mei	2.023	7	2.030
6	Juni	2.911	25	2.936
7	Juli	2.667	38	2.705
8	Agustus	2.286	18	2.304
9	September	3.203	6	3.209
10	Oktober	2.509	7	2.216
11	November	3.190	20	3.210
12	Desember	2.844	78	2.922
Jumlah | Total		**34.326**	**267**	**34.593**

Adapun komposisi LTKM berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Tipologi Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

The composition of the LTKM based on the type of work and the type of crime is as follows:

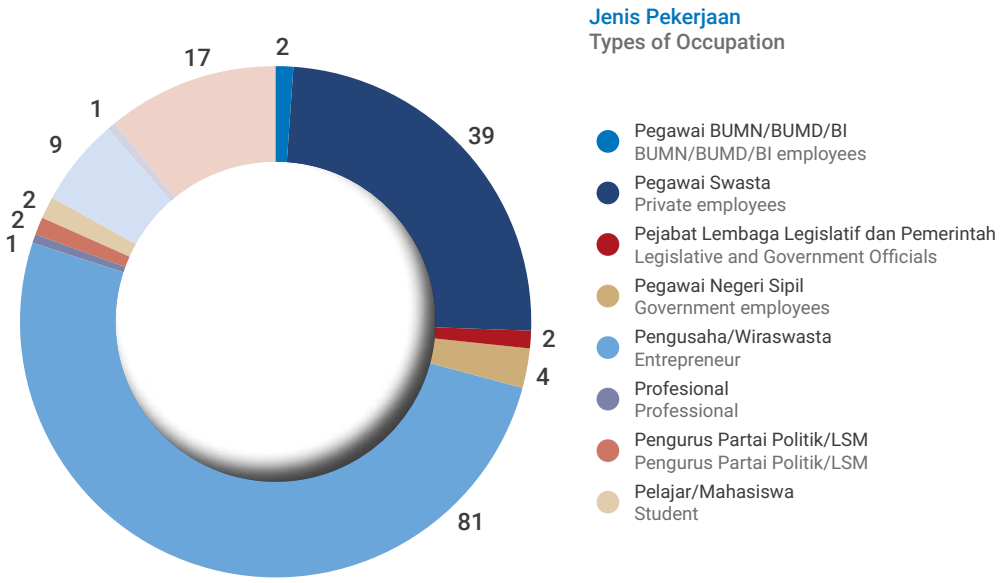

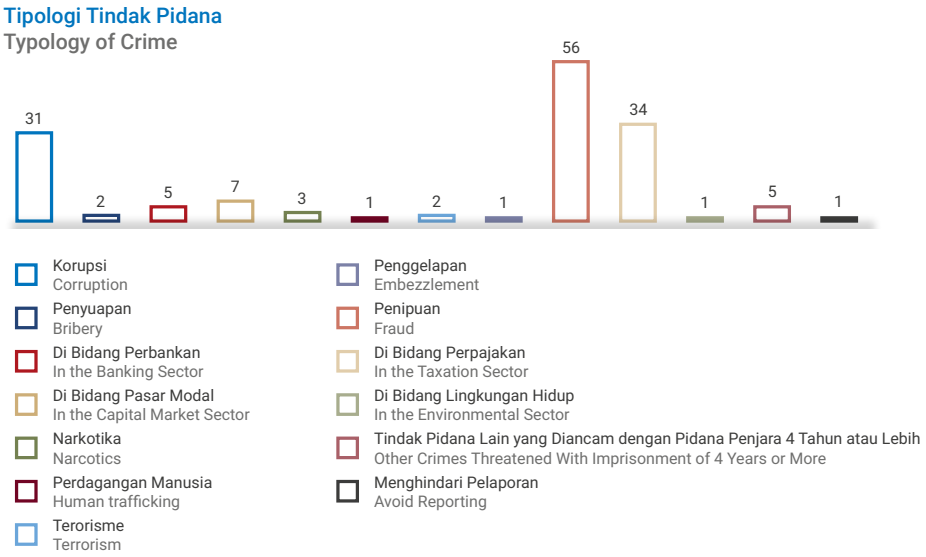

2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri/*International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 171.780 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) laporan.

2. Submission of Financial Transaction Reports from and to Foreign Funds Transfer/International Fund Transfer Instruction (IFTI) during the period of January to December were 171,780 (one hundred seventy one thousand seven hundred eighty) reports.

No	Bulan Month	IFTI Report		Total
		Incoming	Outgoing	
1	Januari	4.286	16.271	20.557
2	Februari	3.112	10.342	13.454
3	Maret	3.594	12.127	15.721
4	April	3.154	9.017	12.171
5	Mei	2.759	8.364	11.123
6	Juni	3.058	10.800	13.858
7	Juli	3.290	10.867	14.157
8	Agustus	3.163	10.097	13.260
9	September	3.296	12.146	15.442
10	Oktober	2.893	9.813	12.706
11	November	3.386	12.757	16.143
12	Desember	2.953	10.235	13.188
Jumlah | Total		**38.944**	**132.836**	**171.780**

4. PaninBank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020.
5. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan APU & PPT dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah/*Know Your Customer* (KYC) *Principle* dan *Enhancement* Aplikasi APU & PPT.

Dalam rangka penerapan program APU & PPT dan prinsip pengenalan nasabah pada PaninBank, PaninBank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU & PPT dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi APU & PPT yang digunakan oleh PaninBank. Kegaitan tersebut antara lain:

a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama PaninBank yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2017 dan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama PaninBank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
c. Sosialisasi Program APU & PPT kepada seluruh karyawan baru PaninBank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
d. Penyempurnaan/*enhancement* Aplikasi APU & PPT.

3. PaninBank always corresponds with the Tax Office to follow up the letters from the Tax Service Office during the period of January to December 2020.
4. Dissemination and refreshment of APU & PPT provisions and/or Application of Customer Recognition Principles/Know Your Customer (KYC) Principle and APU & PPT Applications Enhancement.

In the implementation of APU & PPT programs and the principle of customer recognition, PaninBank always conducts dissemination and refreshment related to APU & PPT provisions and improvements and enhancements to APU & PPT Applications used by PaninBank. These activities include:

a. APU & PPT Refreshment and train to trainers to UKPN officers from all major branch offices held in November 2017 and conducted periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year.
b. APU & PPT Refreshment and train to trainers by UKPN Officers from each of the main branch offices to sub-branch offices that are held regularly at least 1 (one) time in 1 (one) year.
c. Dissemination of the APU & PPT program to all new PaninBank employees, especially new employees who deal directly with customers (frontliners).
d. Enhancement of APU & PPT application.

AUDIT INTERNAL
Internal Audit

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Dalam struktur organisasi Bank Panin, unit Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Structure and Position of the Internal Audit Unit

Within PaninBank's organizational structure, the Internal Audit Unit (SKAI) is led by a Head of Internal Audit Unit who reports directly to the President Director.

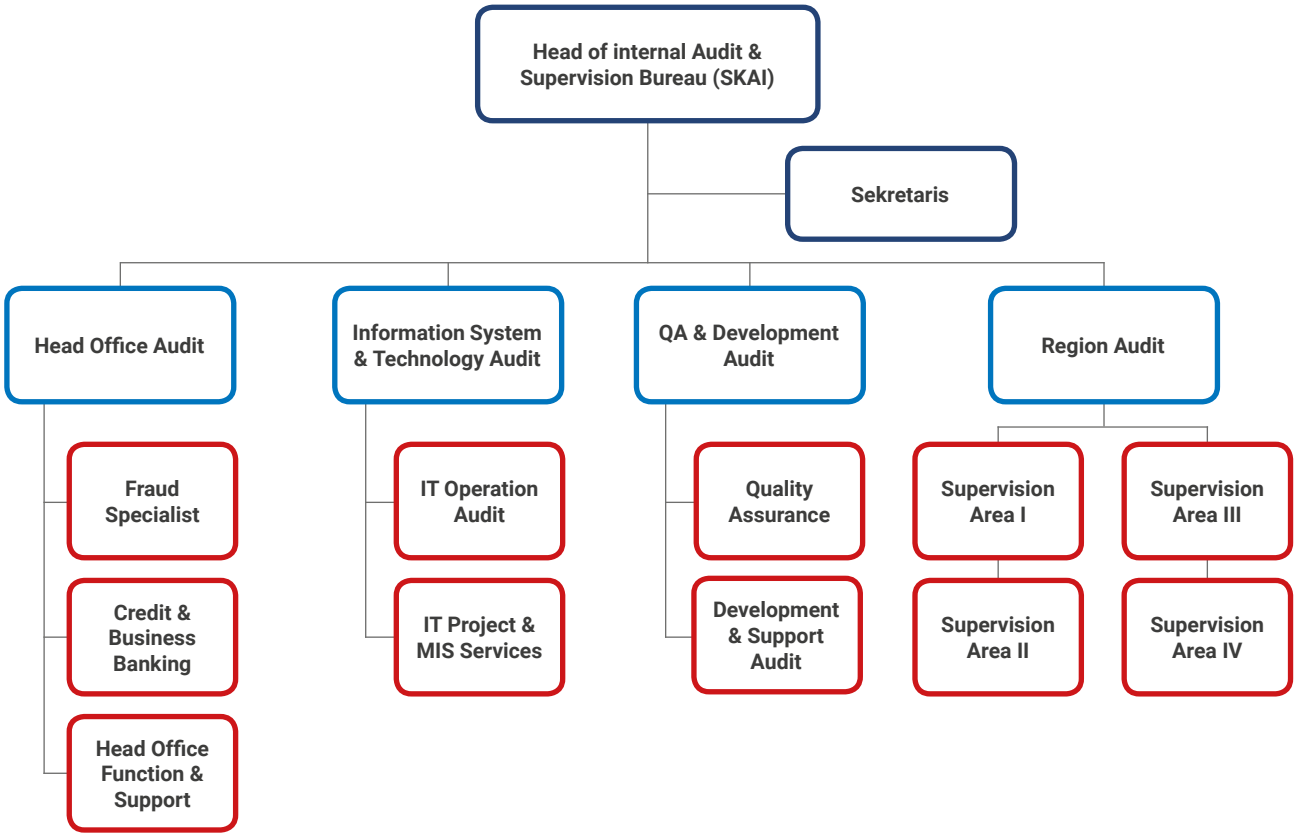

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit

Appointment and Dismissal of Head of SKAI

Head of Internal Audit Unit (SKAI) is appointed and dismissed by the President Director upon the Board of Commissioners' approval based on recommendation of the Audit Committee.

Profil Kepala SKAI

Head of SKAI Profile

Herbert J.S. Sibuea
Ketua SKAI
Head of SKAI

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Tangerang	**Domiciled** Tangerang
Riwayat Jabatan & Pengalaman Kerja Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan Internal Audit Officer Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI KC Palmerah dan Batam, sebagai Operations Manager di KC Serang dan Centralized Processing Head di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/SKAI) sejak Januari 2009.	**Job History & Work Experience** Started career at PaninBank since January 1997. Starting from participating in PaninBank Internal Audit Officer Education Program Batch 1, became the Coordinator of the SKAI Palmerah and Batam Branch, as Operations Manager at KC Serang and Centralized Processing Head at KC Palmerah, and serves as Head of the Supervision & Inspection Bureau (Internal Audit Work Unit/SKAI) since January 2009.
Dasar Hukum Penunjukan • Surat tanggal 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan • Surat tanggal 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI	**Legal Basis of Appointment** • Letter dated December 24, 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, concerning the Appointment of Position Letter • Letter dated December 24, 2008, No. 344-DIR-KBI-08, concerning the Appointment of Head of SKAI
Kualifikasi dan Sertifikasi Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4	**Qualifications and Certifications** Risk Management Certification - Level 4.

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. **Visi:**
   Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang independen, objektif, profesional dan *respectable*.
2. **Misi:**
   Memberikan layanan Audit *Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Vision and Mission of SKAI

The SKAI's vision and mission are as follows:

1. **Vision:**
   Become an independent, objective, professional strategic partner and respectable Internal Audit.
2. **Mission:**
   Providing professional Internal Audit services to ensure the realization of a sound bank, develop naturally and can support the national economy which is the interests of the stakeholders.

Piagam Audit Internal

Audit Internal PT Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikan pada tanggal 24 Mei 2019, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum, dimana secara garis besar Piagam Audit Internal berisi: Visi/

Internal Audit Charter

Internal Audit of PT Bank Panin Tbk has an Internal Audit Charter which was updated on May 24, 2019, has been aligned with regulatory requirements, namely Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, in general, Internal Audit Charter broadly contains:

Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

Vision/Mission, Position, Authority and Responsibility, Scope of Activities, Independence, Requirements, and Code of Ethics of Internal Auditor.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2020 SKAI memiliki total 152 (seratus limapuluh dua) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Composition of Internal Audit Workforce

In 2020, SKAI has a total of 152 (one hundred and fifty-two) auditors with the following classification of tenure, as follows:

Masa Kerja Working Period	Total Auditor
0 – 4 tahun | 0 – 4 years	13
5 – 9 tahun | 5 – 9 years	42
10 – 14 tahun | 10 – 14 years	45
≥ 15 tahun | > 15 years	52

Adapun program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Certification programs that have been followed by Internal Auditor during 2020 were as follows:

Sertifikasi Certifications	Total Auditor
Certified Information System Auditor (CISA)	1
Cyber Security Foundation Professional Certificate	3

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses *governance*, *risk management*, dan *compliance* telah memadai dan berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/BPP mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

Bertanggung jawab untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit internal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

SKAI is responsible for ensuring that the processes of governance, risk management, and compliance are adequate and functioning effectively.

Head of SKAI/BPP has the following responsibilities and obligations:

Responsible for:

1. Assisting the tasks of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by outlining operational aspects both planning, implementation and monitoring of internal audit results.
2. Performing analysis and assessments in finance, accounting, operations, and other activities through internal audits.
3. Identifying all possibilities to improve and increase the efficient use of resources and funds.
4. Providing suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management.

Tanggung Jawab SKAI/BPP

SKAI/BPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses *Good Corporate Governance, Risk Management,* dan *Compliance* (GRC) telah memadai serta berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/BPP mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:
   a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal,
   b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI, serta memastikan staf Audit Internal mengikuti pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman sesuai dengan perkembangan kompleksitas serta kegiatan usaha Bank,
   c. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) beserta anggaran, dan memastikan realisasinya telah berjalan sesuai dengan rencana.
   d. Melaporkan temuan *significant* beserta hasil pemantauan tindak lanjut perbaikannya dalam waktu yang cepat kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait, serta melaporkan tindak lanjut perbaikannya juga kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
   e. Melaksanakan fungsinya sebagai SKAI Entitas Utama, bekerjasama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Berkewajiban untuk:
   a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur terkait serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
   b. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester;
   c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Responsibilities of SKAI/BPP

SKAI/BPP is responsible for ensuring that the processes of Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) are adequate and functioning effectively.

Head of SKAI/BPP has the following responsibilities and obligations:

1. Responsible for:
   a. Ensuring the implementation of internal audit function in accordance with the Internal Audit Professional Standards and Code of Ethics of Internal Audit;
   b. Selecting competent human resources according to the needs in the implementation of SKAI duties, as well as ensuring that Internal Audit staff participates in the development activities of competence, professionalism and experience in accordance with the development of complexity and business activities of the Bank;
   c. Preparing an Annual Audit Work Plan (RKAT) along with a budget, and ensuring such implementation has run in accordance with the plans;
   d. Reporting significant findings along with the results of monitoring the follow-up improvements in a short time to the President Director and relevant Directors as well as reporting the follow-up improvements to the Board of Commissioners with copies to the Audit Committee and Director in charge of compliance function; and
   e. Carry out its function as the SKAI's Main Entity, in collaboration with work unit that performs internal audit function in Financial Services Institution within the Panin Group Financial Conglomeration.
2. Obliged to:
   a. Submit audit report to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Audit Committee and relevant Director as well as Director in charge of Compliance;
   b. Prepare an implementation report along with the main points of audit results and submitted to the President Director and Board of Commissioners every semester;
   c. Prepare a report immediately on the audit result findings which could disturb the continuity of the Bank's business.

Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:

a. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal perusahaan anak,
b. Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.

Indepedensi Audit Internal

a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan serta sebagai pelaksana dalam kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (*cooling-off period*).

Fokus dan Pengembangan Audit 2020

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan fokus dan pengembangan audit di tahun 2020, terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan masa pandemi yang dimulai sejak bulan Maret 2020 antara lain:

a. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.
b. Memposisikan diri sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management*, dan *Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ketentuan yang berlaku.

For a Bank which is a parent company:

a. Determine the strategy for implementing the subsidiary's internal audit;
b. Formulating the principles of internal audit which includes the audit methodology and steps for implementing quality control.

Independence of the Internal Audit Unit (SKAI)

a. Internal Auditors may not have the authority or responsibility to run operational activities of the auditee.
b. SKAI/BPP and each Internal Auditor are independent while performing their duties and express views as well as thoughts in accordance with the profession and generally accepted auditing standards.
c. Internal Auditors must not have direct or indirect interest in the object or activity their examined so that conflicts of interest can be avoided.
d. SKAI/BPP may not carry out concurrent duties and positions of the Internal Auditor as well as executors in the Bank's operational activities including in subsidiary companies.
e. To avoid conflicts of interest, SKAI members are not permitted to perform audit tasks on the same functional area for at least 2 (two) audit periods (cooling-off period).

Audit Focus and Development in 2020

In accordance with the Work Plan which has determined focus and development of audits in 2020, there have been several adjustments and changes in connection with the pandemic period which began in March 2020, including:

a. Improving the risk-based supervision functions (scope and focus on high-risk areas) with a review of the adequacy of Risk Management Implementation Quality (KPMR) and GCG implementation. Most of the monitoring process is done offsite or using virtual media.
b. Positioning itself as a strategic partner in improving company performance, especially in assessing the implementation and management of GCG, Risk Management, and Compliance in the Bank's operational activities in accordance with applicable policies/provisions.

c. Mengoptimalkan strategi Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko. Pelaksanaan *onsite* di Kantor Cabang dilakukan oleh SKAI Region yang ditempatkan di beberapa Kantor Cabang.
d. Memprioritaskan fungsi *Audit Analytical* dengan penerapan *Continuous Audit* dan meningkatkan kualitas SDM serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya baik dari sisi *hardware* maupun *software*.
e. Kompetensi Auditor: Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
f. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance*, Konsultasi melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practise* (*The Institute of Internal Auditors* - IIA) dan melakukan implementasi panduan/juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit,* QA *Review*.
g. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi *Anti-Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Audit Internal/SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. 15 Kantor Cabang Utama dari total 57 KCU Bank Panin dan 22 Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas di bawahnya yang meliputi Bidang Operasional, Perkreditan, dan APU-PPT serta Bidang Kredit Mikro.
2. 11 Aktivitas pada Divisi/Biro/Group di Kantor Pusat.
3. 4 Aplikasi/*Security*/Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
4. 4 Aktivitas *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat.

c. Optimizing Regional Audit strategies to support the implementation of work plans that can support the implementation of risk-based audits. Onsite implementation at Branch Offices is carried out by Regional SKAI which is placed in several Branch Offices.
d. Prioritizing Audit Analytical functions by implementing Continuous Audit and improving the quality of HR as well as updating its supporting infrastructure both in terms of hardware and software.
e. Auditor Competence: continue to improve auditor competency through training, both on product knowledge and procedures, as well as training in understanding risk management and audit processes and professional certification.
f. Running Services and Assurance Functions, Consultation through the Development of Audit Methodology, updating new Audit Guidelines that refer to the Standards of Best Practices (The Institute of Internal Auditors - IIA) and implementing Audit Program guidelines/technical guidelines, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review.
g. Running Fraud Investigation and Reporting Services, as a coordinator in the Fraud Management Team related to the implementation of 4 pillars of Anti-Fraud Strategy, Dissemination of the Fraud Awareness Module for Employees, Preventive Action through Lessons Learned Fraud Risk/Events to all Branch Office Managers and Head Office Units, Role and Function of Investigation Audit on Fraud Incident and follow-up to reporting of Customer Complaints and Whistleblowing System, Detection Monitoring through Account Monitoring and KYE.

Implementation of SKAI's 2020 Duties

Throughout 2020, Internal Audit/SKAI has examined:

1. 15 Main Branch Offices from a total of 57 PaninBank KCUs and 22 Sub-Branch Offices/Cash Offices under the covers of Operations, Credit, and AML-CFT and Micro Credit.
2. 11 Activities at Division/Bureau/Group in the Head Office.
3. 4 Applications/Security/Activities in the IT Field.
4. 4 Thematic Audit Activities, which were carried out at sampling Branch Offices and Product Management at the Head Office.

Pelaksanaan Tugas SKAI

a. SKAI menyampaikan aktivitas, tugas, dan fungsinya secara berkala, baik triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Presiden Direktur, Komisaris, dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
b. Bank telah melakukan pengkajian/*review* 3 (tiga) tahunan pada tahun 2020 atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern (SPAI) oleh pihak independen/eksternal untuk periode Juli 2017 - Juni 2020.

Hasil dari pengkajian/*review* tersebut berkesimpulan bahwa secara umum penilaian atas kesesuaian atas pemenuhan peraturan OJK adalah *"Generally Conform"* (GC), dimana kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan oleh SKAI/BPP telah sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan di dalam SPAI

Implementation of SKAI Duties

a. SKAI submits its activities, duties and functions periodically, both quarterly, semi-annually and annually to the President Director, Commissioners and Directors in charge of compliance function.
b. The Bank has conducted 3 (three) annual reviews in 2020 on the performance and compliance of SKAI with the Internal Audit Professional Standards (SPAI) by an independent/external party for the period July 2017 - June 2020.

The assessment/review results concluded that in general the conformity assessment to compliance with OJK regulations is "Generally Conform" (GC), in which the policies, procedures, and implementation of internal audit function performed by SKAI/BPP are in accordance with the Financial Services Authority (OJK) as stipulated in the SPAI

Temuan Audit

1. Hasil audit disampaikan dalam laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Laporan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Recommendation Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Audit Internal meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung. Tindak lanjut tersebut selalu dimonitor hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee.*

Audit Findings

1. The audit results are presented in audit report containing all findings and responses from the auditee as well as the auditee's ability to complete the intended audit findings within a predetermined period of time.
2. Audit report followed up by the management to make a Letter of Recommendation Management Action a coaching and improvement step to the auditee, as well as monitoring the follow-up and recommendations on the audit results.
3. As a follow-up to the audit/examination results, Internal Audit requested evidence of corrective actions that were carried out using supporting documents. Such follow-up actions is always monitored until all problems can be resolved by the auditee.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

RKAT untuk tahun 2020 telah dilakukan evaluasi dan revisi dengan mempertimbangkan perkembangan industri Perbankan sehubungan dengan masa pandemi. Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan 2020, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan, antara lain:

a. Peningkatan Kualitas hasil Pemeriksaan IA & Peningkatan Produktivitas Internal Audit: Pelaksanaan fungsi audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan 2020, SKAI melakukan beberapa

Audit Work Plans for 2020

The 2020 RKAT has been evaluated and revised by taking into account the development of the Banking industry in connection with the pandemic period. In accordance with the 2020 Annual Audit Work Plan, the plans and implementation of a risk-based audit prioritizes, among others:

a. Improved Quality of IA Audit results & Increased Productivity of Internal Audit: Implementation of risk-based audit functions (scope and focus on high-risk areas) and review the adequacy of Risk Management Implementation Quality and GCG implementation. In planning and implementing the 2020 Annual Audit Work Plan, SKAI made several adjustments relating to

penyesuaian terkait dengan *Methodology, Assessment*, dan Realisasi, sesuai dengan beberapa pertimbangan, masukan, dan kondisi berjalan, khususnya terkait dengan masa pandemi.

b. Meningkatkan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*
c. Penguatan fungsi konsultasi Audit pada area *prevention, detection* dan *correction* dengan pengembangan fungsi dan penyediaan sumber daya pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tujuan dan kinerja audit.
d. Peningkatan Kompetensi Internal Audit: Pemenuhan kecukupan Auditor yang ahli dan spesialis sesuai area aktivitas Audit dan Sertifikasi Kompetensi Auditor
e. Pengembangan *Internal Audit Infrastructure*: Mencapai Standar yang telah ditetapkan regulator (OJK), *Best Practise (The Institute of Internal Auditors* - IIA)/IPPF untuk mencapai pengawasan yang efektif dan bersinergi (*strategic business partner*) dalam mendukung penerapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
f. Peningkatan Audit Berbasis Teknologi: Penguatan fungsi monitoring, *detection* dan *control* yang efektif dan efisien dengan menggunakan *tools* atau otomasi data/informasi dalam mendukung pengembangan Bank di era *Digital Banking*.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2020.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2020, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2020 adalah 2 (dua) kasus.

Terkait Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi *Anti-Fraud* 2020.

Methodology, Assessment and Realization, according to some considerations, inputs and current conditions, particularly in relation to a pandemic;

b. Improved Fraud Investigation and Reporting Services;
c. Strengthened the Audit consulting function in the area of prevention, detection and correction by developing functions and providing supporting resources in increasing the efficiency and effectiveness of audit objectives and performance;
d. Internal Audit Competence Improvement: Fulfillment of adequate auditors who are experts and specialists in accordance with the audit activity area and Auditor Competency Certification;
e. Internal Audit Infrastructure Development: Achieve the standards set by the regulator (OJK), Best Practices (The Institute of Internal Auditors - IIA)/IPPF to achieve effective and synergyc supervision (strategic business partner) in supporting the Bank's Business Plan (RBB) implementation; and
f. Technology-Based Audit Enhancement: Strengthen the effective and efficient monitoring, detection and control functions by using tools or automation of data/information to support the development of the Bank in the era of Digital Banking.

INTERNAL FRAUD

Number of cases of internal fraud with a value of loss/deviation of more than Rp100 million in 2020.

In accordance with the reporting to Bank Indonesia based on the Reporting of Anti-Fraud Strategy Implementation for Semester I and Semester II in 2020, there were 2 (two) cases of internal fraud with a loss/deviation of above Rp100 million.

Regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategy, PaninBank already have and performed detection functions through whistleblowing system and SKAI has conducted an investigative function in accordance with the 2020 Anti-Fraud Strategy reporting.

Tabel *Internal Fraud* Tahun 2020
Table of Internal Fraud in 2019

***Internal Fraud* dalam 1 Tahun** **Internal Fraud in 1 Year**	**Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh** Number of Cases Performed by					
	Pengurus Management		**Pegawai Tetap** Permanent Employee		**Pegawai Tidak Tetap** Non-Permanent Employee	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	**Tahun Berjalan** Current Year	**Tahun Sebelumnya** Previous Year	**Tahun Berjalan** Current Year	**Tahun Sebelumnya** Previous Year	**Tahun Berjalan** Current Year
Jumlah *Internal Fraud* Number of Internal Fraud	-	-	1	-	1	-
Telah diselesaikan Settled	-	-	1	-	1	-
Dalam proses penyelesaian internal In the Process of Internal Settlement	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya The Solution has not been Attempted yet	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been Followed up through Legal Process	-	-	-	-	-	-

Penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | The deviation with a value of more than Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiah)

AUDIT EKSTERNAL
External Audit

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khusunya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

External audits by independent parties need to be done to ensure the accountability of information, especially in the financial aspects so that the Company is able to determine strategic steps and appropriate policies to support the sustainability of the Company's business. External auditors who have fulfilled the requirements help the Company to ensure that the accounting records prepared in accordance with the provisions of the Accounting and Financial Standards (PSAK) and prepared reports present reasonable financial position and results of operations and do not violate the provisions of the applicable legislation.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte) melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan.

Authority and Power of the Board of Directors in Appointing Independent Public Accountants

The Company's Board of Directors appointed Public Accountant Firm, Imelda & Rekan (Deloitte) through the approval of the GMS based on the recommendations of the Audit Committee through the Board of Commissioners. As documented in the minutes of the Company's Annual GMS, the GMS authorized the Board of Directors of the Company to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's books.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan ("I&R") anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("Deloitte"), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Independence in the Implementation of the Audit Process

Public Accountant Firm of Imelda & Rekan ("I&R"), member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("Deloitte"), conducted audits in accordance with auditing standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("generally accepted auditing standards") and Bank Indonesia Regulations.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The purpose of the audit carried out in accordance with generally accepted auditing standards is to express an opinion on the fairness of the presentation of the Company's financial statements, in all material matters, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PaninBank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.350.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba

General Audit Fee Financial Statements

The total General Audit costs for PaninBank Financial Statements for the financial year ending December 31, 2020 are Rp4,350,000,000 (four billion three hundred fifty million Rupiah) which includes an audit of the Balance Sheet, Profit

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

and Loss Statement, Statement of Changes in Equity, and Cash Flows Reports for the financial year ending that date, to express opinions regarding the fairness of the presentation of financial position, results of operations, changes in equity and cash flows of the company, in all material matters in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

The following are the general audit costs of PaninBank's financial statements in the last 5 (five) years:

Tahun Year	**Biaya** Fee (Rp)	**Akuntan Publik** Public Accountant	**Izin Akuntan Publik** Public Accountnt Permit
2016	3.800.000.000	Syamsul	No. AP. 0763
2017	3.950.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2018	4.750.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2019	3.900.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849
2020	4.350.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849

MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Risk Management Including Internal Control System

PaninBank sangat memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisir. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha.

PaninBank fully understands the banking business sector has various risks that need to be identified, managed, monitored consistently and should be taken with mitigation measures so that the risk impact can be minimized. Delay in mitigating risks can be fatal, on the other hand, the speed and accuracy in identifying and mitigating risks can create opportunities for business development.

PaninBank menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pentingnya peran inti dari manajemen risiko untuk memastikan kesinambungan kinerja bisnis maupun keuangan. PaninBank menyadari bahwa terdapat risiko yang melekat (*inheren*) dalam kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, PaninBank telah menerapkan suatu kerangka yang terdiri dari strategi, organisasi dan kebijakan, serta infrastruktur manajemen risiko dalam memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh PaninBank maupun entitas-entitas anak dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, PaninBank terus melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan yang berlaku maupun *international best practices*.

PaninBank emphasizes the importance of the prudence principle in terms of lending and the importance of the core role of risk management to ensure a sustainable business and financial performance. PaninBank realizes that there are some inherent risks embedded in the business and banking operations activities. In order to mitigate various risks faced, PaninBank has implemented a framework consisting of strategy, organization and policy, as well as risk management infrastructure to ensure that all risks confronted by PaninBank and its subsidiaries can be identified, measured, monitored, controlled and reported correctly. In addition, to support the implementation of effective risk management, PaninBank continues to develop risk management infrastructure by referring to applicable regulations and international best practices.

Dalam pengelolaan risiko, PaninBank memiliki mekanisme pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. Bank berupaya memitigasi risiko dari setiap lini bisnis yang berpotensi memiliki risiko. Pengelolaan manajemen risiko juga dilakukan melalui penerbitan dan kaji ulang kebijakan-kebijakan Bank, baik kebijakan terkait pengelolaan risiko maupun kebijakan lainnya. Kualitas kredit Bank secara umum terjaga dengan baik, bahkan dalam kondisi ekonomi domestik maupun global yang melambat. *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* sampai dengan akhir Desember 2019 berada di level 3,02%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam pengelolaan risiko kredit.

In terms of risk management, PaninBank has a risk management mechanism that intends to minimize the risks that may be faced. The Bank tries to mitigate risks from each business lines that considered potentially at risk. Risk management is also conducted through the issuance and review of Bank policies, both policies relating to risk management and other policies. Credit quality of the Bank is well maintained, even in the midst of slowing domestic and global economic conditions. Gross Non-Performing Loan (NPL) by the end of December 2019 was at the level of 3.02%. This reflects the excellent implementation of prudent principles in credit risk management.

PaninBank terus mewaspadai perkembangan kondisi ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko penurunan kualitas aset PaninBank ke depannya. PaninBank menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent* dan menerapkan *early warning system*

PaninBank continues to be aware of the economic developments that potentially increase the risk of deterioration in PaninBank's asset quality in the future. PaninBank maintains the quality of its loans portfolio through the application of prudent credit risk management and implementation of early

untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkah-langkah *preventif* melalui restrukturisasi dan langkah penyelesaian kredit bermasalah sedini mungkin.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur manajemen risiko terdiri dari beberapa komite, antara lain Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

Komite Pemantau Risiko

Merupakan otoritas pengelola risiko tertinggi yang berada pada tingkat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategis dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.

Komite Manajemen Risiko

Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara keseluruhan di Bank yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan strategi, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan adanya kebijakan dari OJK terkait Manajemen Risiko untuk Konglomerasi Keuangan, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dengan anggota Direktur yang ditunjuk dari setiap anak perusahaan (Lembaga Jasa Keuangan/LJK) dan Kepala-kepala Biro/Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan/LJK. Tugas utama dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank terkait dengan penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko mencakup satuan kerja yang menggabungkan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional dan risiko informasi dalam satu kesatuan organisasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, telah dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi dapat dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko dan peraturan regulator. Satuan kerja

warning system to monitor changes in debtor's repayment capacity and take preventive actions through restructuring and to settle non-performing loans as early as possible.

Organizational Structure of Risk Management

Risk management structure consists of several committees, including the Risk Management Committees and Risk Management Work Units with various levels of responsibility.

Risk Monitoring Committee

A risk manager that held the highest authority at the Board of Commissioners level which functions as the supervisory board to monitor the implementation of strategic and risk management policies as well as evaluate the accountability of the Board of Directors in managing risk exposure.

Risk Management Committee

At the Board of Directors level, the Risk Management Committee was established to manage the overall risk of the Bank which functions to oversee the implementation of strategies, policies and evaluate significant risk issues.

Integrated Risk Management Committee

In line with the OJK's policy regarding Risk Management for Financial Conglomerates, the Bank has formed an Integrated Risk Management Committee chaired by the Director of Compliance & Risk Management of the Main Entity with a member of the Director appointed by each subsidiary (Financial Services Institution/LJK) and Heads of Bureau/Division in the Risk Management Unit of Financial Services Institutions/LJK. The main task of Integrated Risk Management Committee is to provide recommendations to the Board of Directors of the Bank regarding the preparation, improvement or refinement of Integrated Risk Management Policy based on the evaluation results.

Risk Management Work Unit

Risk Management work unit comprises a work unit that merges the credit, market, liquidity, operational and information risks in a single organizational unit. In the application of integrated risk management, the Risk Management Unit has been modified by adding an integrated risk management function to ensure that the process of identification, measurement, monitoring and risk control in an integrated manner can be performed and reported following the risk management framework and regulatory regulations. This work unit consists of professionals and senior officers who are capable in the

ini beranggotakan para profesional dan senior dalam bidang manajemen risiko. Fungsi ini adalah fungsi yang independen sebagai *second line of defense*. Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, kerangka kerja, limit, dan prosedur.

field of risk management. This function works independently as a second line of defense. Integrated Risk Management work unit develops an overall risk management strategy that includes policies, methodologies, frameworks, limits, and procedures.

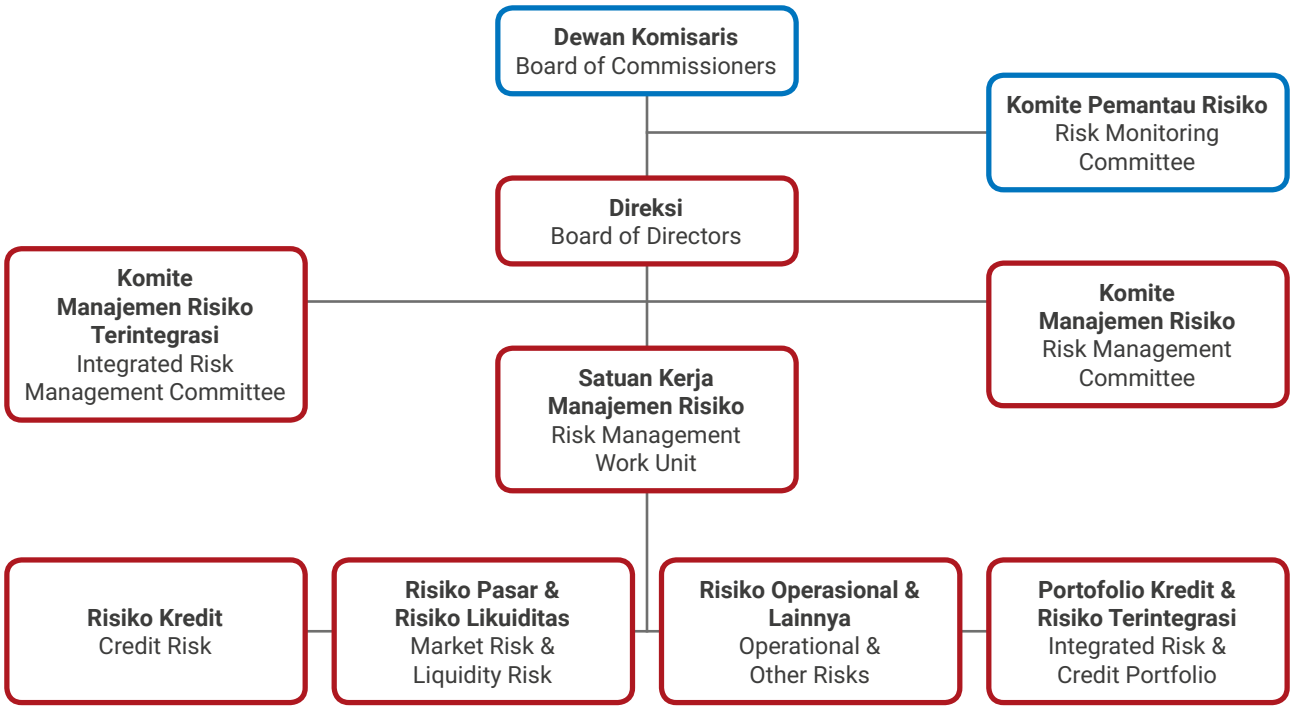

Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

Profile of the Head of the Risk Management Bureau

The following is information regarding the Head of the Risk Management Work Unit:

Antoni	
Kewarganegaraan Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Jakarta	**Domiciled** Jakarta
Riwayat Pendidikan Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan	**Job History & Work Experience** Bachelor of Chemical Engineering - Parahyangan University
Riwayat Jabatan • Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011) • Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)	**Position Jistory** • Head of Market & Liquidity Risk (2010-2011) • Head of Risk Management Bureau (2011-present)
Dasar Hukum Penunjukan Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011	**Legal Basis of Appointment** Letter of Appointment No. 019/DIR/BMR/SJ/11 dated September 13, 2011
Kualifikasi dan Sertifikasi • Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011) • Financial Risk Manager (2008)	**Qualifications and Certifications** • Risk Management Certification - Level 4 (2011) • Financial Risk Manager (2008)

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT BUREAU

Departemen Department	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab	Role, Duties and Responsibilities
Loan Portfolio & Integrated Risk	1) Melakukan pemantauan terhadap portofolio *Bankwide, Maturity, Payment Default for New Booking Loan,* Debitur Besar, Pengelolaan kolektibilitas dalam perhatian khusus di cabang, sub-sektor ekonomi di cabang 2) Melakukan penyampaian, pengkajian dan penetapan parameter risiko kredit agar kualitas ukuran profil risiko kredit dapat terjaga dengan baik 3) Melakukan penyusunan, pengkoordinasian, penyampaian laporan profil risiko individu (Bank), profil risiko konsolidasi Entitas Anak, profil risiko terintegrasi, ICAAP 4) Melakukan pemantauan limit pada LJK anggota konglomerasi keuangan Group Panin 5) Melakukan pemantauan risiko transaksi keuangan intra-grup 6) Penyusunan dan pengkinian Pedoman dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi 7) Mengelola data yang akurat, andal, dan tepat waktu untuk pelaporan kepada manajemen	1) Monitor Bank-wide portfolios, Maturity, Payment Default for New Booking Loans, Large Debtors, Collectability Management for Special Attention Customers at Branches, Economic Sub Sector at Branches 2) Submit, review, and determine credit risk parameters so as the quality of Credit Risk Profile can be well-maintained 3) Prepare, coordinate, submission of an individual (Bank only) risk profile reports, Consolidated Risk Profile of Subsidiaries, Integrated Risk Profile, ICAAP 4) Monitor limits on LJK members of the Panin Group financial conglomerate 5) Monitor the risk of Intra-group Financial Transaction 6) Prepare and update the Integrated Risk Management Guidelines and Procedures 7) Manage accurate, reliable, and timely data for reporting to the management
Market & Operational Risk	1) Memastikan akurasi nilai *mark to value* (valuasi) dan *mark to model*, hasil *backtesting* dari pengukuran VaR 2) Melakukan analisis, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas *trading treasury* kepada unit bisnis dan manajemen 3) Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi *funding*, liabilitas, dan pembiayaan aset Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali 4) Penyusunan dan pengkinian Pedoman dan Prosedur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas 5) Melakukan *stress testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas untuk menguji ketahanan permodalan Bank 6) Melakukan identifikasi risiko, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko operasional dan risiko lainnya yang terekspos pada seluruh unit kerja Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang	1) Ensure the accuracy of mark to market value (valuation) and mark to model, the backtesting results from VaR measurements 2) Perform analysis, provide recommendations and carry out market risk control functions on treasury trading activities to the business and management units 3) Manage the Bank's liquidity risk by applying the liquidity risk management principles as well as formulate alternative strategies for funding, liabilities, and financing of the Bank's assets so as the Bank's liquidity can be managed efficiently with controlled risk 4) Prepare and update the Guidelines & Procedures of Market Risk & Liquidity 5) Perform stress testing of Market Risk & Liquidity Risk to examine the Bank's capital resilience 6) Identify, measure, monitor and control operational risks and other risks exposed to all work units at the Bank, both at the head office and branch offices
	7) Menerapkan penilaian *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang *8) Monitoring* pencatatan insiden risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko hukum yang menimbulkan kerugian finansial *(Loss Event Management) termasuk kasus fraud* internal maupun eksternal 9) Monitoring pencatatan insiden risiko operasional yang hampir (nyaris) menimbulkan kerugian finansial (*nearmiss Management)* 10) Monitoring parameter *Key Risk Indikator (KRIs)* yang telah ditetapkan dalam *risk appetite* dan *risk tolerance* 11) Memantau progress *action plan RCSA, LEM* dan *KRIs* sebagai langkah mitigasi yang dilakukan *risk owner* terhadap risiko yang melewati ambang batas *risk appetite/risk tolerance* 12) Menyusun opini risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan pada rencana/penerbitan produk atau aktivitas baru. 13) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait untuk memantau kepatuhan bisnis dan operasional Bank terhadap ketentuan regulator 14) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait untuk memantau kasus-kasus hukum yang dihadapi Bank serta progress penyelesaiannya 15) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait untuk memantau adanya publikasi negatif terhadap bank baik melalui *bad* media report maupun pengaduan nasabah 16) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait untuk memantau kesesuaian strategi dan target bisnis Bank dengan lingkungan bisnis internal dan eksternal. 17) Melakukan uji coba perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar	7) Implement a Risk & Control Self Assessment (RCSA) at Head Office and Branch Offices 8) Monitor the incidents documentation of operational risk, compliance risk and legal risk that causing financial loss (Loss Event Management) including internal and external fraud cases 9) Monitor the recording of operational risk incidents that almost causing financial loss (near-miss Management) 10) Monitor the Key Risk Indicators (KRIs) parameters as determined in risk appetite and risk tolerance 11) Monitor the progress of RCSA, LEM and KRIs action plans as mitigation actions taken by the risk owner on risks that exceed the risk appetite/risk tolerance threshold 12) Prepare an opinion on operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk with plans/issuances of new products or activities 13) Establish coordination with relevant work units to monitor compliance of the Bank's business and operations with regulatory requirements 14) Establish coordination with relevant work units to monitor legal cases faced by the Bank and its settlement progress 15) Establish coordination with relevant work units to perform negative news screening about the bank either through bad media reports or customer complaints 16) Establish coordination with relevant work units to monitor the alignment of the Bank's business strategy and targets with the internal and external business environment 17) Perform trial testing of the RWA Calculations of Operational Risk using the standardized approaches

Departemen Department	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab	Role, Duties and Responsibilities
Credit Risk	1) Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi dan *rating* dengan menggunakan *Internal Credit Risk Rating (ICRR) tool,* dan opini debitur atas usulan kredit 2) Melakukan analisis, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko kredit pada produk dan aktivitas baru kepada unit bisnis dan manajemen 3) Melakukan analisis terkait faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan Risiko Kredit debitur maupun portofolio Bank secara keseluruhan 4) Melakukan *stress testing* Risiko Kredit untuk menguji ketahanan permodalan Bank	1) Develop and refine the methodology and rating by using Internal Credit Risk Rating (ICRR) tool, as well as the debtor's opinion on the credit proposal 2) Perform analysis, provide recommendations and carry out credit risk control functions for new products and activities to business and management units. 3) Perform analysis relating to external factors that potentially increase the debtor's Credit Risk and the Bank's portfolio as a whole 4) Perform stress testing of Credit Risk to test the Bank's capital resilience.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang digunakan PaninBank untuk mendukung kinerja bisnis, sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis terbaik yang berkesinambungan. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, *monitoring*, dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko.

Pengelolaan manajemen risiko PaninBank dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan bisnis maupun aktivitas operasional yang sehat dan berkelanjutan serta menjaga agar dapat menghasilkan *return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

Dalam penerapan manajemen risiko, PaninBank senantiasa patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sebagai wujud komitmen PaninBank dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal pengelolaan risiko, PaninBank telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan infrastruktur pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko di dalam organisasi PaninBank senantiasa berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, Bank telah menjalankan fungsi manajemen risiko yang sejalan dengan kerangka kerja manajemen risiko sebagai wujud kombinasi atas citra dan identitas perusahaan, arahan pemegang saham, dan strategi yang ditetapkan.

Implementation of Risk Management

Risk Management Implementation practiced by PaninBank to support business performance has aligned with the sustainable development of regulations and best business practices. Implementation of risk management function includes matters relating to identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and control risks covers the development of technology and management information systems for each type of risk, as well as improving the quality of human resources in risk management.

PaninBank's risk management is performed continuously to achieve sound and sustainable business growth and operational activities as well as to maintain optimal returns according to the desired risk appetite.

In the application of risk management, PaninBank always complies with applicable regulations in Indonesia, by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

As a form of PaninBank's commitment to implement good corporate governance practices, especially in terms of risk management, PaninBank has formulated policies, processes, competencies, accountability, reporting and supporting infrastructure that intend to ensure that risk management implementation within the PaninBank organization continues to be effective and efficient. Thus, the Bank has run risk management function that aligned with its risk management framework as a form of a combination of corporate image and identity, shareholder direction, and a defined strategy.

Elemen-elemen utama yang menjadi pendukung struktur tata kelola Manajemen Risiko di PaninBank menganut prinsip Empat Pilar sebagai berikut:

1. **Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

   Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko di Bank, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya mengkaji dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dalam kaitannya dengan:

   a. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.
   b. Penerapan rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Biro Manajemen Risiko.
   c. Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait.
   d. Penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

   Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

   a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
   b. Bertanggung jawab atas atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan.
   c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
   d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
   e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
   f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
   g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
      i. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
      ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
      iii. Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

   Pelaksanaan Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (manajemen) dilakukan diantaranya:

   a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The key elements that support the Risk Management governance structure at PaninBank adhere to the following Four Pillars:

1. **Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors**

   In conducting its supervisory function on the implementation of risk management in the Bank, the Board of Commissioners has clear duties and responsibilities, including perform studies and approve the recommendations given by Risk Monitoring Committee with regard to:

   a. Implementation of Risk Management Policy.
   b. Implementation of recommendations given by the Risk Monitoring Committee and Risk Management Bureau.
   c. Approve the provision of credit facilities to relevant parties.
   d. Implementation of integrated risk management in the Financial Conglomerate.

   In running its risk management function, the Board of Directors has clear duties and responsibilities, among others:

   a. Develop a written and comprehensive risk management policy and strategy.
   b. Accountable for the implementation of risk management policy and risk exposure taken by the Company as a whole.
   c. Evaluate and decide which transactions that require the Board of Directors' approval.
   d. Develop a risk management culture at all levels of the organization.
   e. Ensure the increased competence of human resource related to risk management.
   f. Ensure that the risk management function always run independently.
   g. Carry out regular reviews to ensure:
      i. The accuracy of risk assessment methodology.
      ii. Implementation of adequate management information system.
      iii. Accuracy of risk management policy and procedures as well as determination of risk limits.

   Implementation of active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors (management) is conducted through:

   a. Supervision of the Board of Commissioners is carried out according to duties and responsibilities as stipulated in the articles of association and prevailing laws and regulations.

b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

   i. Komite Audit, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.
   ii. Komite Pemantau Risiko, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.
   iii. Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
   iv. Komite Tata Kelola Terintegrasi, dibentuk untuk mengevaluasi penerapan Tata Kelola Perseroan antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank (Entitas Utama) maupun Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Konglomerasi Keuangan Panin Grup.

c. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
d. Direksi secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.

b. Supervisory duty of the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Remuneration and Nomination Committee as well as the Integrated Governance Committee.

   i. The Audit Committee, was formed to ensure the implementation of an effective internal control system, financial reporting process and corporate governance.
   ii. The Risk Monitoring Committee, was established to ensure that risk management framework provides adequate protection against the risks faced by the Bank.
   iii. The Remuneration and Nomination Committee is formed to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policy as well as systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
   iv. The Integrated Governance Committee, was established to evaluate the implementation of Corporate Governance, among others by assessing the adequacy of internal controls and implementation of compliance function in the Bank (Main Entity) and Financial Services Institutions in the Panin Group Financial Conglomeration.

c. The Board of Commissioners actively provides advice to the Board of Directors in determining strategic actions that need to be conducted.
d. The Board of Directors actively conducts discussions, provides input and monitor internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect the Company's business strategy.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Perseroan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang memadai untuk penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien dan profesional terhadap 8 (delapan) jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan serta terhadap risiko lainnya dalam mendukung pertumbuhan Perseroan secara *prudent*, konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Perseroan di mata seluruh pemangku kepentingan.

2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limits

The Company has adequate policies, procedures and limits to implement an effective, efficient and professional risk management framework for 8 (eight) main types of risks, such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as well as other risks in order to support the Company's growth in a prudent, consistent and sustainable manner as well as to increase the Company's added value in the eyes of all stakeholders.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko didokumentasikan dan ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan internal maupun eksternal.

Policies, procedures and determination of risk limits are documented and reviewed periodically in accordance with internal and external developments.

3. **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

   Penerapan manajemen risiko Bank fokus terhadap 4 (empat) risiko utama yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar & Risiko Likuiditas, dengan tetap memperhatikan risiko-risiko lainnya yaitu Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan. Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain dengan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

   Bank secara berkelanjutan telah mengembangkan alat ukur risiko seperti *scoring, value at risk* (VaR), *portfolio management, stress testing, Risk Control Self-Assessment* (RCSA), *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai pendukung untuk membuat keputusan bisnis. Secara periodik, alat ukur risiko tersebut dikaji ulang untuk menjaga keandalan dan validitas model serta memenuhi persyaratan regulator.

   Bank memastikan memiliki kecukupan modal untuk meng*cover* risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan regulator (OJK & Basel) maupun kebutuhan internal Bank. Terkait dengan Basel III, Bank meningkatkan kecukupan permodalan baik kualitas maupun kuantitas modal sesuai dengan ketentuan OJK.

   Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional ditujukan untuk mengelola risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar & likuiditas pada level yang dapat diterima. Bank menerapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk kebijakan limit. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko maupun limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui prinsip Three Lines of Defense. Pengelolaan risiko pasar dan likuiditas dilakukan melalui penetapan limit-limit. Pengelolaan risiko operasional pada produk dan aktivitas Bank dilakukan oleh seluruh unit kerja, dan di-*review* secara *bankwide* oleh Biro Manajemen Risiko.

3. **Adequacy of Identification, Measurement, Monitoring and Risk Control Processes as well as Risk Management Information System**

   Implementation of Bank risk management focuses on 4 (four) main risks, namely Credit Risk, Operational Risk, Market Risk & Liquidity Risk, with due regard to other risks, namely Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk. Implementation of such risk management among others by carrying out the Process of Identification, Measurement, Monitoring, Risk Control and Risk Management Information System.

   The Bank has continuously developed risk measurement tools such as scoring, value at risk (VaR), portfolio management, stress testing, Risk Control Self-Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), Key Risk Indicator (KRI) as supporting tools for making business decisions. Periodically, the risk measurement tool is reviewed to maintain the reliability and validity of the model and fulfill the regulatory requirements.

   The Bank ensures that it has sufficient capital to cover credit risk, market risk and operational risk, both based on regulatory provisions (OJK & Basel) and the Bank's internal needs. In relation to Basel III, the Bank increases its capital adequacy, both in terms of quality and quantity of capital, in accordance with OJK regulations.

   Risk management through operational activities is intended to manage credit risk, operational risk, market risk & liquidity at an acceptable level. The Bank applies risk appetite and risk tolerance in the form of policy limit. Determination of limits is based on the overall limits, limits per type of risk and limits per certain functional activity that has risk exposure. Credit risk management is conducted through the Three Lines of Defense principle. Market and liquidity risk management is carried out through the establishment of limits. Operational risk management on the Bank's products and activities is run by all work units and reviewed on a bank-wide basis by the Risk Management Bureau.

Bank juga memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh. Guna mendukung proses penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, Bank telah mengembangkan berbagai model untuk mengkuantifikasi eksposur risiko dalam rangka mengoptimalkan proses pengambilan keputusan maupun mitigasi risiko.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Biro Manajemen Risiko telah menyusun laporan profil risiko Perseroan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Intern

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*). Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses* (sesuai bagan di bawah ini) dijabarkan sebagai berikut:

a. Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
b. Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
c. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

The Company also has infrastructure to identify, measure, monitor and control risks supported by an adequate management information system which able to support the overall risk management function. In order to support the overall risk management implementation process, the Bank has developed various models to quantify risk exposures in order to optimize the decision-making process and risk mitigation.

As part of the risk management information system, the Risk Management Bureau has compiled the Company's risk profile reports which are submitted periodically to the Board of Directors and the Risk Management Committee.

4. Internal Control System

Implementation of the Bank's internal control system refers to SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017 concerning Guidelines for Standard Internal Control Systems for Commercial Banks.

Internal control system is a supervisory mechanism established by the Management on an on-going basis. The Bank applies the three lines of defense concept in its internal control system and risk management, which involves all lines of the organization, and is supervised by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The application of the three lines of defense concept (according to the chart below) must be defined as follows:

a. All business units and operational units function as the First Line of Defense which is responsible for managing internal control and risks relating to the work unit (as risk owner).
b. Relevant work units, such as the Risk Management Work Unit (SKMR) and Compliance Work Unit (SKK) that functions as the Second Line of Defense to monitor the implementation of risk management policies and guidelines in a corporate manner according to regulatory requirements.
c. The Internal Audit Unit (SKAI) functions as the Third Line of Defense in charge of providing independent assurance on the adequacy and effectiveness of the internal control system, risk management and governance.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja Bank, untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Bank Panin menerapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Internal Control System fosters the attainment of the Bank's performance, increases the value for stakeholders, minimizes the risk of loss and maintain compliance with prevailing laws and regulations. Bank Panin performs the Internal Control System as an important supervisory component in the Bank's management and becomes a reference for the Bank's healthy and controlled operational activities.

Implementation of the Bank's Internal Control System refers to the COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework in preparing the internal control framework that ensures the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, as well as compliance with law and applicable regulations.

All of the Bank's management and employees are having roles and responsibilities to implement and comply with as well as to improve the quality of a reliable and effective internal control system implementation of the Bank.

Penerapan Basel

Bank terus mempersiapkan diri dalam melaksanakan penerapan Basel di Indonesia. Terkait penerapan Basel di Indonesia, baik dari segi permodalan dan likuiditas, Bank Panin turut berpartisipasi mendukung persiapan penerapan Basel tersebut antara lain melalui *Quantitative Impact Study* (QIS). Dalam QIS tersebut Bank berpartisipasi dalam pelaksanaan QIS kerangka Permodalan, *Leverage Ratio*, NSFR, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.

Pada tahun 2020, Rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) telah diterapkan oleh OJK dan Bank Panin dan nilainya memenuhi ketentuan OJK terkait NSFR, baik terkait pelaporan maupun minimum rasionya. Dalam rangka penerapan Basel, Bank juga telah menerapkan manajemen risiko suku bunga dalam *Banking Book* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum.

Basel Application

The Bank continues to prepare itself for the implementation of Basel in Indonesia. Regarding the implementation of Basel in Indonesia, both in terms of capital and liquidity, Bank Panin also participated in supporting the preparation for such Basel implementation, among others through the Quantitative Impact Study (QIS). In the QIS, the Bank participates in the implementation of QIS Capital Framework, Leverage Ratio, NSFR, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

In 2020, the Net Stable Funding Ratio (NSFR) has been applied by the OJK and PaninBank as well as its value already meets the OJK regulations regarding NSFR, both in terms of reporting and the minimum ratio required. While applying the basel, the Bank has also implemented the management of Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) as stipulated in OJK Circular Letter No. 12/SEOJK.03/2018 concerning Implementation of Risk Management and Risk Measurement of the Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book for Commercial Banks.

Risiko yang dihadapi PaninBank

Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait dalam melakukan manajemen risiko bertanggung jawab dalam mengelola 8 jenis risiko yang dihadapi Bank, serta membahas dan mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko.

Delapan jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Operasional, Risikok Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.

Risks faced by PaninBank

Risk Management together with relevant work units in performing risk management are responsible for managing 8 types of risks encountered by the Bank, as well as discussing and proposing policies and risk management guidelines.

Eight types of risk faced by the Bank, namely: Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Reputation Risk and Strategic Risk.

Jenis Risko	Type of Risk
1. **Risiko Kredit** Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk dalam risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit.	1. **Credit Risk** Credit risk is a risk due to the failure of the debtor and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank, including credit risk is the risk of credit concentration.
2. **Risiko Pasar** Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.	2. **Market Risk** Market risk is the risk on the balance sheet and administrative accounts, including derivative transactions due to overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices.
3. **Risiko Likuiditas** Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.	3. **Liquidity Risk** Liquidity risk the risk due to the inability of the Bank to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or high quality liquidity assets that can be utilized without disrupting the Bank's activities and financial condition.
4. **Risiko Operasional** Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PaninBank.	4. **Operational Risk** Operational Risk is the risk due to inadequate and/or malfunctioning of internal processes, human error, system failures and/or external events that affect PaninBank operations.
5. **Risiko Hukum** Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	5. **Legal Risk** Legal risk is the risk due to lawsuits and/or legal weaknesses in juridical aspects.
6. **Risiko Reputasi** Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.	6. **Reputational Risk** Reputational Risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust that comes from negative stakeholder perceptions of the Bank.
7. **Risiko Stratejik** Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.	7. **StrategicRisk** Strategic risk is the risk due to inaccuracy in preparing and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.
8. **Risiko Kepatuhan** Risiko kepatuhan adalah risiko akibat PaninBank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	8. **Compliance Risk** Compliance risk is the risk of non-compliance and/or failure to comply with laws and regulations.

Risk Appetite

Bank mendefinisikan *risk appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bisnis Bank. *Risk appetite* yang ditetapkan oleh Bank tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Risk Appetite

The Bank defines risk appetite as the level and type of risk that the Bank is willing to retain in order to achieve the Bank's business objectives. The risk appetite set by the Bank is reflected in the Bank's business strategy and objectives.

Stress Test

Bank melakukan *stress test* sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bagi Bank, *stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal kontraktual maupun behavioural Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal

Stress Test

The Bank perform stress tests as a basis for decision-making as well as the fulfillment of the applicable regulatory provisions in Indonesia. For the Bank, stress testing aims to estimate the amount of loss, estimate the resilience of the Bank's contractual and behavioral capital, and identify steps that must be taken to mitigate risks and maintain capital resilience.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*Risk Control System*), baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Sedangkan, dalam Manajemen Risiko Terintegrasi, risiko yang dikelola juga mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Dalam melakukan penilaian Profil Risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan Profil Risiko adalah Biro Manajemen Risiko.

Profil Risiko Perseroan

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka Bank melakukan pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Bank pada tahun 2020. Adapun peringkat komposit untuk profil risiko Individual (*Bank Only*) secara keseluruhan per 31 Desember 2020 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat Profil Risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko Konsolidasi

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip kehati-hatian dan Laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, maka Bank melakukan pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Bank, peringkat komposit untuk Profil Risiko Konsolidasi dengan Entitas Anak secara keseluruhan per 31 Desember 2020 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Risk Profile Assessment

Risk Profile Assessment includes inherent risks assessment and assessment of the quality of Risk Management implementation that reflects risk control system, both individually and on a consolidated basis. Such assessment is conducted for 8 (eight) risks, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputation Risk. Meanwhile, in the Integrated Risk Management, managed risks also include Intra-Group Transaction Risk and Insurance Risk. In assessing Risk Profile, the Bank shall be obliged to OJK regulations governing the assessment of Commercial Banks soundness level. The responsibility for coordinating the preparation of Risk Profile report is held by the Risk Management Bureau.

The Company's Risk Profile

Pursuant to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks and the Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.03/2016 concerning Assessment of Commercial Banks Soundness Level, the Bank monitors each of major risk groups determined by the Bank in 2020. The composite rating for individual risk profile (Bank Only) as of December 31, 2020 was ranked as 2 (Low to Moderate). The Risk Profile Rating is the result of an inherent risk assessment of "Moderate" and the "Satisfactory" risk management implementation quality rating.

Consolidated Risk Profile

With the provisions contained in the Financial Services Authority Regulation Number 38/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Consolidated Risk Management for Banks controlling Subsidiaries, Financial Services Authority Circular Letter Number 43/SEOJK.03/2017 concerning the Principle of Prudence and Reports for the implementation of consolidated risk management for Banks exercising control over Subsidiaries. The Bank monitors each of the main risk groups calculated by the Bank, the composite rating for the Consolidated Risk Profile with Subsidiaries as a whole as of 31 December 2020 was ranked 2 (Low to Moderate). The risk profile rating is the result of an assessment of the inherent risk rating as "Moderate" and rating of the quality of risk management implementation as "Satisfactory".

Profil Risiko Terintegrasi

Dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Bank sebagai Entitas Utama melakukan Profil Risiko secara Terintegrasi bersama dengan 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan Panin Grup.

Berdasarkan hasil penilaian secara Terintegrasi, pada semester II 2020 peringkat Profil Risiko secara terintegrasi adalah "*Low to Moderate*". Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Integrated Risk Profile

Along with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 14/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates. The Bank as the Main Entity performs an Integrated Risk Profile together with 5 (five) Panin Group Financial Services Institutions.

Based on the Integrated Assessment results, in half II 2020 the Integrated Risk Profile rating was "Low to Moderate". The risk profile rating is the result of an assessment of the inherent risk rating as "Low to Moderate" and rating of the quality of risk management implementation as "Satisfactory".

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarannya.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko.

Secara berkala, komite-komite tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, *Risk Update* dan laporan terkait lainnya.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management System

The Bank continuously evaluates and monitors the overall effectiveness of internal control implementation, including changes in internal and external conditions that may affect the Bank in achieving its objectives.

Evaluation form toward risk management policy is conducted through annual evaluation of the Risk Management Policy and Standard Procedures. The Board of Commissioners plays an active role in the evaluation of risk management system implementation by reviewing the evaluations results conducted by the Board of Directors as the organ that responsible for the effective implementation of a risk management system.

Periodically, these committees hold a meeting to discuss and provide input and recommendations to the Board of Commissioners and Board of Directors.

Evaluation and updating of policies, procedures and methodologies are performed regularly to maintain compliance with regulations and operational conditions. Evaluation of risk management effectiveness is also conducted through periodic reports submitted to the Board of Commissioners and Board of Directors, including Risk Profile Report, Risk Update and other relevant reports.

Komitmen Manajemen PaninBank terhadap Sistem Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Panin dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan

PaninBank Management's Commitment to the Risk Management System

The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Commissioners of Bank Panin in order to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem manajemen risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan me*review* secara berkelanjutan terkait kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Hubungan Kerja dengan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

in supervising and providing advice to the Board of Directors to obtain sufficient confidence so as the implementation of Bank's risk management continues to fulfills the adequacy elements of procedures and risk management methodologies thus the Bank's business activities can remain under control within acceptable limits and benefit the Bank.

Accompanying with the development of increasingly diverse and complex banking activities as well as followed by an increasing potential of risks, the Bank continues to improve risk management in terms of organizational structure and human resources, policies and procedures, support systems, and methodologies.

The risk management system requires a commitment from every level of management in the organization to develop systems and technology in order to support the core components of risk control. Risk Management System should at least be able to assess the position, calculate the risk of all financial instruments in each main currency where the bank conducts business, both individually and in aggregate. Subsequently, the report is submitted to the Board of Directors and all relevant units to the report concerned. The operational unit should play a role in accessing and reviewing on an ongoing basis relating to the minimum requirements for the development of systems and technology needed by the bank's activities, to be subsequently ratified by the Board of Directors.

Working Relationship with the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has a role and responsibility of providing recommendations to the Board of Commissioners by evaluating the Bank's risk management policy guidelines (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputation Risk), evaluating conformity among the Bank's risk management policy guidelines with its implementation and monitoring as well as evaluating the implementation of duties of Risk Management Committee. The Risk Monitoring Committee shall make periodic reports to the Board of Commissioners regarding the Risk Monitoring Committee activities at least once every 3 (three) months. The Risk Monitoring Committee shall make a report to the Board of Commissioners on each given assignment and/or for each identified problem that requires the Board of Commissioners' attention.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi manajemen risiko dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan *risk awareness* seluruh lini di Bank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan *risk awareness* antara lain:

a. *Monitoring* secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
b. Penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda *workshop*, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
c. Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Budaya Risiko

Budaya manajemen risiko yang kuat diciptakan jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dalam kaitan ini Bank berketetapan untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Bank menjalankan operasional Bank secara hati-hati (*prudent*) dan berdasarkan *best practices*.

Budaya risiko ditetapkan melalui:

a Pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
b Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis;
c Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku; dan
d Manajemen Risiko dan Infrastruktur, untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif untuk mendukung strategi Bank.
e Kesadaran akan budaya risiko pada semua tingkatan organisasi terus dibangun melalui:
   - Komunikasi atas tingkat toleransi risiko Bank dan profil risiko yang diharapkan melalui berbagai batasan dan manajemen portofolio.
   - Memberi kewenangan kepada karyawan untuk menangani risiko secara hati-hati (*prudent*) dalam kegiatan mereka.
   - Memantau efektivitas manajemen risiko di seluruh area Bank.
   - Komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko di seluruh lini pertahanan Bank.

Socialization of Risk Management

Risk management socialization is conducted continuously on every occasion to further increase risk awareness of all lines of the Bank, both at the level of the Board of Directors meeting and implementation of Board of Directors' directives through the implementation of business processes in accordance with existing policies, systems and procedures. A number of efforts to increase risk awareness, among others:

a. Regular monitoring at the level of the Board of Directors and Board of Commissioner, includes monthly evaluation of performance developments, potential risks and so on.
b. Submission of relevant material relating to risk management in various agenda of workshops, education and internal training since the they first became an employee.
c. Increase risk awareness of human resources at all levels of the organization through socialization and training/training relating to the implementation of Operational Risk Management which is held internally and externally.

Risk Culture

A robust risk management culture can be developed if all employees know and understand the risks encountered while carrying out various activities. In this regard, the Bank is determined to build a unique combination of values, trust, implementation and management supervision that will ensure that all levels of the Bank have run the Bank's operations carefully and based on best practices.

Risk culture is established through:

a. Direction and supervision from the Board of Commissioners and Directors;
b. Introduction of risk management as an integral part of business operations;
c. Compliance with all applicable policies, procedures, laws and regulations; and
d. Risk Management and Infrastructure, to build an effective risk management and control process to support the Bank's strategy.
e. Awareness of the risk culture at all levels of the organization continues to be built through:
   - Communication on the Bank's risk tolerance level and expected risk profile through various boundaries and portfolio management.
   - Give authority to employees to handle risks prudently in their activities.
   - Monitor the effectiveness of risk management in all areas of the Bank.
   - Consistent communication regarding the importance of risk management in all lines of defense of the Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pelaksanaan Pengendalian Keuangan antara lain dilakukan melalui:

a Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan, dan telah didistribusikan kepada pejabat Bank yang terkait dalam rangka implementasi.

b Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan Bank, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).

The implementation of the Bank's internal control system refers to SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017 concerning Guidelines for Standard Internal Control Systems for Commercial Banks.

The internal control system is a supervision mechanism established by the Management on an on-going basis. The Bank applies the three lines of defense concept in its internal control and risk management system, which involves all organizational lines, and is supervised by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The implementation of the Bank's Internal Control System refers to the COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework in preparing an internal control framework that ensures the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with law and applicable regulations.

All management and employees of the Bank have roles and responsibilities to implement and comply with and improve the quality of the implementation of the Bank's reliable and effective internal control system.

Financial and Operational Control, and Compliance with Other Laws and Regulations

The implementation of Financial Control, among others, is carried out through:

a. The Board of Directors has prepared and received approval from the Board of Commissioners on a strategic plan that is outlined in the Bank Business Plan (RBB) as a 3 (three) year business strategy blueprint, and has been distributed to relevant Bank officials for implementation.

b. The determination of the strategy takes into account the impact of strategic risk on Bank capital, including, among others, projected capital and KPMM (Minimum Capital Adequacy Requirement).

c Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Bank.

Pelaksanaan Pengendalian Operasional antara lain dilakukan melalui:

a Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
b Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur dan limit.
c Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari *business/supporting* unit kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
d Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank.
e Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a Bank memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
b Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.

Bank telah melakukan pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/Regulator lainnya

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarannya.

c. The Board of Directors actively conducts discussions/provides input and monitors internal conditions and developments in external factors that directly or indirectly affect the Bank's business strategy.

The implementation of Operational Control includes, among others:

a. The conformity of the internal control system with the type and level of risk inherent in the Bank's business activities.
b. Establishment of authority and responsibility for compliance monitoring, procedures and limits.
c. Establishment of clear reporting lines and separation of functions from business/supporting units to work units that carry out control functions.
d. Organizational structure that clearly describes the Bank's business activities.
e. Effective, independent and objective review of the procedures for assessing the Bank's operational activities.

Compliance with applicable laws and regulations:

a. The Bank is committed to complying with the prevailing laws and regulations and taking steps to correct these risk weaknesses, should they occur.
b. A Compliance Work Unit (SKK) has been established which is independent of the risk-taking unit and is responsible for monitoring the Bank's compliance.

The Bank has monitored Reporting Compliance to BI/OJK/other Regulators

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

The Board of Directors is responsible for the implementation of a reliable and effective Internal Control System and has an obligation to promote an effective risk awareness culture and must ensure that this is inherent at every level of the organization.

The Bank continuously evaluates and monitors the effectiveness of the overall implementation of internal control, including changes in internal and external conditions that may affect the Bank in achieving its goals.

SKAI bertanggung jawab Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif.

IAU is responsible for Internal Audit is responsible for evaluating and playing an active role in improving the effectiveness of the Internal Control System on an ongoing basis with regard to operational implementation in achieving the targets set by the Bank. IAU periodically reviews and inspects all activities in the Work Unit. The results of the evaluation are submitted to the Board of Directors for follow-up and monitoring of its implementation to ensure that the SPI is running effectively.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan PaninBank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004.

The establishment of Corporate Secretary function at PaninBank is in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, and Regulation No. I-A Regarding the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies, Attachment to IDX Decree No. Kep-305/BEJ/07-2004.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

Jasman Ginting Munthe
Sekretaris Perusahaan
Corparate Secretary

Warga Negara Indonesia	**Citizen** Indonesian
Domisili Tangerang	**Domiciled** Tangerang
Tempat/Tanggal Lahir Medan, 20 Agustus 1965	**Place/Date of Birth** Medan, August 20, 1965
Riwayat Pendidikan • Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas, Padjadjaran, Bandung • Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	**Educational Background** • A graduate from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Padjadjaran, Bandung • A Master's degree in Economics and Management in Islamic Finance from the University of Indonesia
Pengalaman Kerja Memulai karirnya sebagai Management Trainee (Officer Development Program) di PT Bank Panin Tbk (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai Marketing Treasury Produk (1992-1993), ALCO Support Group (1993-1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (1995-1996) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (tahun 1996-2009). Komisaris PT Bank Panin Dubai Syariah (2009-2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai Corporate Secretary PaninBank.	**Work Experience** He began his career as a Management Trainee in the Officer Development Program at PT Bank Panin Tbk (PaninBank) in 1991, and served as Product Marketing Treasury (1992-1993), ALCO Support Group (1993-1995), part of Jakarta Branch Office Credit (1995-1996), and Treasury Division - ALCO Support Group (1996-2009). Comissioner of PT Bank Panin Dubai Syariah (2009-2017) Since 1997, he has served as the Corporate Secretary of PaninBank.
Dasar Hukum Penunjukan Memo Direksi PaninBank tanggal 23 Januari 1997.	**Legal Basis of Appointment** Memo of the Board of Directors of the Company dated 23 January 1997
Kualifikasi dan Sertifikasi • Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998. • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.	**Qualifications and Certifications** • Corporate Secretary Program Batch II, 1998. • Risk Management Certificate Level 2.

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti *training* sebagai berikut:

Competency Development & Training Program

Training and competency development programs are needed so that the Corporate Secretary can always update information related to the latest developments in the banking industry and other knowledge related to the implementation of the duties of the Corporate Secretary. Throughout 2020, the Corporate Secretary has attended the following training:

Nama	Workshop/Training/Seminar	Vendor Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Tempat Location
Jasman Ginting Munthe	Sharing Session dan Demo Sistem E-Rups Easy Emiten dan BAE Sharing Session and Demo on E-GMS Easy System for Issuers and Registrars	KSEI	23-Mar-20	Jakarta
	Sosialiasi Indeks Kepercayaan Konsumen Deposan 2020 Socialization of the 2020 Depositor's Consumer Confidence Index	LPS	4-Jun-20	Jakarta
	Pendalaman Atas POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Learn more about POJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.	ICSA	8-Jul-20	Jakarta
	Sosialisasi POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Socialization of POJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities	OJK dan IDX	11-Aug-20	Jakarta
	Tantangan dan Peluang *Renewable Energy* di Era New Normal Challenges and Opportunities for Renewable Energy in the New Normal Era	IKBI	13-Aug-20	Jakarta
	Managing Financial Riks and Capturing Financial Opportunities in the Crisis Era	Economic Review	8-Oct-20	Jakarta
	Webinar CSR Forum Bisnis Indonesia 2020: Creating Impact for Social Sustainability in Pandemic Era The 2020 Webinar on CSR Forum of Bisnis Indonesia: Creating Impact for Social Sustainability in Pandemic Era	Bisnis Indonesia	22-Oct-20	Jakarta
	Kelas Keuangan Berkelanjutan: Transisi Energi dan Pembiayaan Energi Terbarukan Sustainable Finance Class: Energy Transition and Renewable Energy Financing	IKBI dan WWF	04 s.d 15 Dec-20	Jakarta
	Enhancing Operational Excellence Facing 21st Global Competition in Industry 4.0 Era Through Lean Management	Economic Review	18-Dec-20	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PaninBank:

Organizational Structure

The following is the organizational structure of PaninBank's Corporate Secretary:

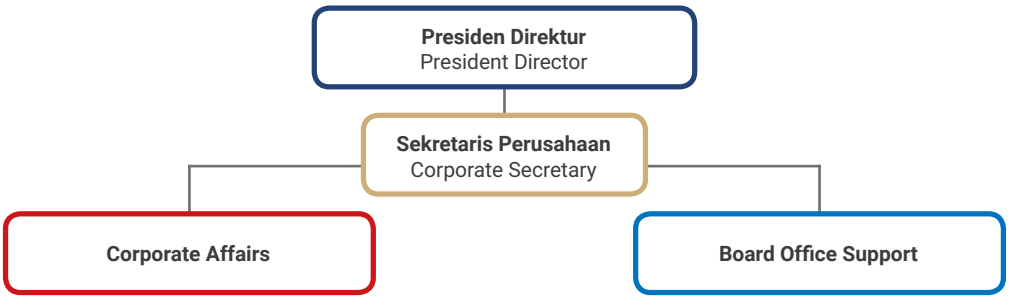

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

    a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web*;
    b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang Corporate Affairs**
  Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:
  a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
  b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
  c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
  d. Menyelenggarakan *public expose*,
  e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions, dividend payment*, dan lain-lain.
  f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu
  g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
  h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
  i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
  j. Mengadakan *press conference*,

Duties and Responsibilities

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary acts as a liaison between the Issuer or Public Company and shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders. The Corporate Secretary must always keep abreast of developments in the capital market, especially the prevailing laws and regulations. Other duties are:

1. Provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector;
2. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing good corporate governance, which includes:
    a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Website;
    b. Submission of reports to the Financial Services Authority in a timely manner
    c. Organizing and documenting the GMS;
    d. Organizing and documenting the meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and
    e. Organizing orientation programs for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Activities carried out include:

- **Corporate Affairs**
  Responsible for all activities related to fulfilling the requirements as a public company, including:
  a. Follow the development of the capital market and understand all the regulations that apply in the capital market,
  b. Organizing the General Meeting of Shareholders
  c. Fulfilling the obligation of Information Disclosure,
  d. Organizing a public expose,
  e. Coordinating the implementation of corporate actions, dividend payments, and others.
  f. Monitoring the composition of the Company's shareholders from time to time
  g. Managing communication with mass media (media relations)
  h. Preparing and distributing press releases,
  i. Preparing and distributing Annual Reports to parties according to the provisions.
  j. Organizing a press conference,

k. Memaintain *website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*.
l. Melakukan *media monitoring* dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin, baik yang terbit di media cetak, media *online*, dan media elektronik lainnya.
m. Merespons dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank.
n. Berkoordinasi dengan *Customer Complain Handling Department* dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
o. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.
p. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**
  a. Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain:
     1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
     2) Mengatur jadwal rapat,
     3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
     4) Menyusun agenda rapat,
     5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat.
     6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Selama Tahun 2020, Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

k. Maintaining the Bank's website, especially content related to the provision of information to investors, GCG implementation, and Corporate Secretary activities.
l. Conducting media monitoring and/or clipping of news related to the Company, Major Shareholders, Subsidiaries, and companies in the Panin business group, whether published in print media, on-line media, and other electronic media.
m. Responding quickly and proportionally to any negative news in the mass media (print and electronic) related to the Company, Major Shareholders, Subsidiaries, and companies in the PaninBank business group which can have a negative impact directly or indirectly on the reputation of PaninBank.
n. Coordinating with the Customer Complain Handling Department in providing responses to customer complaints published in the mass media.
o. Disseminating and communicating the latest developments in the Company, important publications and management policies that are important for all management, staff and employees of the Bank to know.
p. Carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) activities, coordinating with related work units.

- **Board Office Support**
  a. Ensuring that the activities of the Board of Directors and the Committees of the Board of Directors can run effectively in the context of implementing Good Corporate Governance (GCG), including:
     1) Organizing the meeting of the Board of Directors and the Committees of the Board of Directors,
     2) Preparing a meeting schedule,
     3) Preparing and circulating meeting invitations
     4) Arranging meeting agendas,
     5) Preparing minutes of meetings and administering meeting documents.
     6) Monitoring and follow up on meeting decisions and carry out internal communication if necessary.

Implementation of 2020 Assignments

During 2020, the Corporate Secretary carried out various activities, including the following:

1. Dalam bidang *Corporate Affairs* Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
   a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 26 Juni 2020, termasuk mempublikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS di Media Cetak dan *Website* Bank, menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan KSE sesuai ketentuan.
   b. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan Perseroan pada tanggal 11 Desember 2020, dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
   c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dibidang Pasar Modal, serta memberikan *update* dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait, antara lain:
      - POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
      - POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019
      - Surat Edaran OJK No. S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS.
      - Proses kerja Sistem Pendaftaran Elektronik -SPRINT E-Registration untuk memproses pernyataan pendaftaran atas penambahan modal dengan HMETD.
   d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK *e-Reporting*, serta keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media masa.
   e. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan
   f. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten *website* Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
   g. Menyelenggarakan *Press Conference* dan menyusun serta mendistribusikan *press release.*
   h. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.

1. In the field of Corporate Affairs the Corporate Secretary has succeeded, among others:
   a. Holding the Company's Annual General Meeting of Shareholders, on June 26, 2020, including publishing the Notification and Summons of the GMS in Print Media and the Bank's Website, submitting reports to the Financial Services Authority, the Exchange and KSE in accordance with the provisions.
   b. Organizing the Company's Annual Public Expose on December 11, 2020, and fulfilled reporting obligations in accordance with the provisions of the Exchange.
   c. Keeping abreast of capital market developments including attending the socialization of new regulations in the Capital Market sector, as well as providing updates and input to the Board of Commissioners, Directors and related work units, including:
      - POJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities
      - POJK Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019
      - OJK Circular No. S-92/D.04/2020 concerning Relaxation of Obligation to Submit Report and Implementation of GMS.
      - Electronic Registration System work process - SPRINT E-Registration to process registration statements for additional capital with HMETD.
   d. Delivering information disclosure to the public through the OJK e-Reporting portal, as well as information disclosure to the mass media.
   e. Submitting periodic reports and incidental reports to the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, Bank Indonesia, including reports to Rating Agencies, Trustees and institutions appointed by the Banking Authority
   f. Updating the appearance and completing the content of the Bank's website to comply with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) No. 8/POJK.04/2015 regarding Website of Issuers or Public Companies
   g. Organizing Press Conferences and compiling and distributing press releases.
   h. Complete the preparation and submission of the Company's Annual Report to the Regulator in accordance with the provisions and distribute it to parties according to the provisions.

i. Melakukan media *monitoring* dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
j. Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media masa.
k. Menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) Bank Panin Tahun 2019 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2021-2024, dan menyampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2020 sesuai ketentuan.

2. Dalam bidang Bidang *Board Office Support & Customer Complain Handling*, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 16 (enam belas) Rapat Direksi, 4 (empat) Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, 12 (dua belas) Rapat ALCO, dan 9 (sembilan) Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. *Corporate Secretary* juga bertanggung jawab:

   a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua Rapat tersebut di atas
   b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
   c. Menyelesaikan dan mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan-pengaduan nasabah sesuai dengan SLA dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
   d. Menyampaikan Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan
   e. Menjawab dan memberikan penjelasan progres penyelesaian pengaduan nasabah yang diminta oleh OJK dan Bank Indonesia.
   f. Menghadiri mediasi penyelesaian pengaduan nasabah yang difasilitasi oleh OJK dan Bank Indonesia.

   Board *Office Support & Customer Complain Handling* bertanggung jawab dalam penanganan dan pelaporan pengaduan nasabah sampai dengan 31 Oktober 2020, dan selanjutnya tugas dan tanggung jawab penanganan pengaduan nasabah diselenggarakan oleh Bidang *Corporate Affair.*

i. Performing media monitoring and/or clipping of news related to the Bank, responding quickly and proportionally to negative news in the mass media.
j. Responding to complaints submitted by customers published in the mass media.
k. Preparing the 2019 PaninBank Sustainability Report and the Sustainable Finance Action Plan 2021-2024, and submit it to the OJK on November 30, 2020 according to the regulations.

2. In the Board of Office Support & Customer Complain Handling, the Corporate Secretary holds and attends 16 (sixteen) Board of Directors Meetings, 4 (four) Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors, 12 (twelve) ALCO Meetings, and 9 (nine) Committee Meetings -Board of Directors Committees, such as the Risk Management Committee, GCG Committee and Information Technology Steering Committee. The Corporate Secretary is also responsible for:
   a. Preparing and administering the minutes of the meetings for all of the aforementioned Meetings
   b. Monitoring the follow-up to meeting decisions
   c. Resolving and coordinating the settlement of customer complaints in accordance with the SLA and OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013, concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection of Payment System Services.
   d. Submitting a Customer Complaint Resolution Report to the OJK and Bank Indonesia in accordance with the regulations
   e. Responding and providing an explanation of the progress of customer complaint resolution requested by OJK and Bank Indonesia.
   f. Attending the mediation of settlement customer complaint facilitated by the OJK and Bank Indonesia.

   Board Office Support & Customer Complain Handling is responsible for handling and reporting customer complaints until October 31, 2020, and then the duties and responsibilities for handling customer complaints are held by the Corporate Affairs Division.

BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Culture

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerja sama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

Corporate culture is a set of values that serve as structure and guiding principles on behavior for all employees, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company to conduct their daily duties and obligations. The Company realizes that every individual in the organization can only advance together if the Company has a positive work culture. This is realized through the implementation of work values, which was summarized in I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect and Excellence). The implementation of I-CARE in all aspects of work enables employees to understand their role as part of the customer service process while positioning employees to synergize with the Company's vision and mission to move forward.

These corporate values are disseminated to all employees and top management of the Company through training programs, Annual Report, the Company's website and various other activities. I-CARE aims to encourage greater attention to service and stakeholder satisfaction through cooperation based on mutual trust and vision.

PERLINDUNGAN NASABAH
Customer Protection

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

a. Nama produk dan jenis produk
b. Penerbit produk
c. Manfaat dan risiko produk
d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk

Provisions regarding customer protection are regulated in POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services, and Bank Indonesia Regulation Number No. 7/6/PBI/2005 concerning Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data. PaninBank implements customer protection policies in accordance with the provisions stipulated by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. In accordance with these provisions, in conducting transactions, PaninBank is required to convey information to customers, including:

a. Product name and product type
b. Product publisher
c. Product benefits and risks
d. Requirements and procedures for using the product

e. Biaya-biaya yang melekat
f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga penjual/Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual dan tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana).

PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor-Cabang PaninBank.

e. Inherent costs
f. Interest calculation/profit sharing/profit margin
g. Duration of product validity

These regulations not only require Company to deliver complete and clear information to the public, but also require Company to maintain their customer data. The Company are permitted to provide personal data of customers to other parties on the condition that they have received written approval from the customer. Before approving that their data can be given to another party, the customer has the right to get an explanation of the purpose and consequences of providing the customer's personal data to other parties.

Provision of information to customers is best delivered through product feature brochures, tariff boards, and currency rates in the Company's offices. The salesperson are equipped with adequate Company and banking product knowledge and have good quality standards. For the marketing of mutual fund and insurance products where PaninBank is the selling agent and salesperson has the required certification for selling agents from the Financial Services Authority such as AAJI (Indonesian Life Insurance Association) and WAPERD (Reksa Dana Selling Agent Representative).

PaninBank also continues to convey whether the funds deposited in the Bank are guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS) or not, as well as attaching stickers to the Company's participation in the LPS (Deposit Insurance Corporation) guarantee program, in all PaninBank branches.

KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)
Code of Conduct

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang Undangan**
2. **Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah**
3. **Hubungan dengan Pelaku Bisnis:**
   a. Nasabah
   b. Vendor
   c. Investor
4. **Hubungan Internal Bank**
   a. Iklim kerja yang kondusif
   b. Perilaku Karyawan PaninBank
   c. Hubungan Keluarga di PaninBank
   d. Pengungkapan Informasi
   e. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)
   Karyawan PaninBank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.
   f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank
5. **Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan**
   PaninBank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).
6. **Benturan Kepentingan:**
   a. Kepemilikan bisnis
   b. Bekerja di Luar Perseroan
   c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
   d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan
7. **Pelaporan dan Kehandalan Pelaporan Keuangan**
8. **Anti Penyuapan dan Pencucian Uang**
9. **Sosialisasi, Penerapan dan Penegakan Etika Perusahaan.**
   PaninBank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang

Objective of Code of Conduct Policy

It is a guidelines for employees in carrying out their activities. This guideline is aligned with the existing Company's core values and the principles of Good Corporate Governance.

Content of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct regulates the following:

1. **Compliance with Rules and Regulations**
2. **Relations with Regulators and the Government**
3. **Relations with the Business Community:**
   a. Customer
   b. Vendors
   c. Investors
4. **Internal Bank Relations**
   a. Conducive working climate
   b. PaninBank Employee Behavior
   c. Family Relations at PaninBank
   d. Information Disclosure
   e. Insider Trading
   PaninBank employees are not allowed to talk or to review or to discuss, either verbally or in writing, matters that are not public information, conveyed by official representatives of the Bank or Customers, which have the potential to influence a person or legal entity to buy or sell shares/foreign exchange
   f. Utilization and Maintenance of Bank Assets
5. **Relations with the Community and the Environment**
   PaninBank is also committed to contributing to improving the welfare of the wider community through social program activities that can have a positive impact directly on the community (Corporate Social Responsibilities).
6. **Conflicts of Interest:**
   a. Business ownership
   b. Working outside the Company
   c. Acceptance of Gifts or Rewards
   d. Providing banquet or entertainment
7. **Reporting and Reliability of Financial Reporting**
8. **Anti-Bribery and Money Laundering**
9. **Dissemination, Implementation and Enforcement of Corporate Ethics.**
   PaninBank are required to communicate and socialize

berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi PaninBank. Setiap Karyawan PaninBank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. **Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi Perusahaan.**
    Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank. PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
11. **Budaya Perusahaan.**
    Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE)

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, PaninBank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana PaninBank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.
2. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Signoff* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan PaninBank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
3. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence* (ICARE).

the Ethics and Behavior Guidelines that apply to all levels and levels of the Bank's organization. Every PaninBank employee who is aware of a violation of the Code of Ethics and Conduct as well as Company Regulations is required to report all information they know as soon as possible. This report can be addressed to the GCG Committee; Fraud Management Team; Bosses/Direct Bosses; or use the Whistleblowing line (kasihtau@panin.co.id).

10. **The Code of Ethics Statement Applies at All Levels of the Company Organization.**
    Signed on June 5, 2013 by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PaninBank. PaninBank requires all Company Employees to read, understand and sign the Statement Sheet.
11. **Corporate Culture.**
    Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE)

Efforts to Improve Implementation of the Code of Ethics

In improving the implementation of the code of ethics, PaninBank has implemented several efforts, namely:

1. Socialization, implementation and enforcement of corporate ethics, where PaninBank communicates and disseminates the Code of Ethics and Conducts that applies to all levels of the organization. Every employee who is aware of a violation of the Code of Ethics and Conduct as well as Company Regulations is required to report all information he/she knows as soon as possible. This report can be addressed to the GCG Committee; Fraud Management Team; Direct Supervisor; or through Whistleblowing channel.
2. The code of ethics statement applies at all levels of the company organization. Signoff on June 5, 2013 by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PaninBank, where PaninBank requires all PaninBank employees to read, understand and sign the Statement Sheet.
3. Implementing corporate culture as part of the Key Performance Indicator (KPI), namely Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE).

4. Pelaksanaan Kode Etik PaninBank dilakukan sebagai berikut:
   a Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
   b Hubungan dengan regulator dan pemerintah
   c Hubungan dengan pelaku bisnis
   d Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan
   e Hubungan internal
   f Benturan kepentingan
   g Pelaporan dan kehandalan pelaporan keuangan
   h Anti penyuapan dan pencucian uang
   i Disosialisasikan ke seluruh Karyawan dalam bentuk distribusi buku etika dan perilaku kepatuhan, *fraud awareness* dan *whistlesblowing system*
   j Sanksi pelanggaran yang diatur dalam buku pemberian sanksi

4. The implementation of the PaninBank Code of Ethics is carried out as follows:
   a. Compliance with laws and regulations
   b. Relations with regulators and government
   c. Relationships with business people
   d. Relations with the community and the environment
   e. Internal relations
   f. Conflict of interest
   g Reporting and financial reporting reliability
   h. Anti-bribery and money laundering.
   i. Disseminated to all employees in the form of distribution of ethics and compliance behavior books, fraud awareness and whistleblowing system.
   j. Sanctions for violations set out in the sanctions book

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN
Company Integrity Pact

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Intergritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

PaninBank requires all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees to understand and sign the Integrity Pact. The Integrity Pact, among others, requires all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees to always act honestly, showing high integrity and professionalism. The Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees must actively contribute in protecting and safeguarding the Company's assets and customer funds by complying with applicable internal and external regulations.

KOMITMEN ANTI KORUPSI
Anti-Corruption Commitment

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. **Penerimaan Hadiah atau Imbalan**
   Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

2. **Anti Penyuapan**
   PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

PaninBank has a Code of Conduct (Code of Conduct) that, among other things, stipulate the following:

1. **Acceptance of Gift or Reward**
   Every employee is prohibited from accepting any gift, either in cash or non-cash, from outside parties as reward for taking an action that is not in accordance with the interests of the Bank or for providing confidential information about the Bank or as remuneration for facilities received by customers from Bank.

2. **Anti-Bribery**
   PaninBank and PaninBank employees do not offer, promise or give anything, either cash or non-cash, on behalf of PaninBank or personal, to any external party, such as regulators, governments, providers of goods/services, any organization or customers with the aim of influencing or in return for service rendered to the recipient for any reason, it is prohibited to use a third party in offering, promising or giving anything, either cash or non-cash, on behalf of PaninBank or personally to any external parties.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
Customer Complaints Handling

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai koordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

a. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
b. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
c. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
d. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

PaninBank has established a Customer Complaint Handling Unit in charge of managing and resolving customer complaints in accordance with the standards and provisions of the Service Level Agreement (SLA) as contained in the Customer Complaint Resolution Guidelines. The establishment of this unit is aimed to ensure the implementation of an effective complaint resolution mechanism within an adequate period of time. The objective of having such unit is to reduce the reputation risk, since any complaint that is not immediately addressed could potentially reduce the customer's trust.

This special function handles and resolves complaints, submitted orally or in writing, stationed at the head office as a coordinator or in the main branch office/sub-branch office/related work unit at the Head Office.

In resolving customer complaints, the Customer Complaint Handling work unit is guided by the Customer Complaint Resolution Guidelines which are always updated in accordance with applicable regulations. The latest updated Guidelines were made to comply with two new regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and by Bank Indonesia, as follows:

a. POJK No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector;
b. Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services;
c. POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector;
d. POJK No. 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Institutions for Settlement of Dispute in the Financial Services Sector.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi *Anti-Fraud* PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

The Company adopts Whistleblowing System as one of the components of detection in PaninBank's Anti-Fraud Strategy. All parties, both internal and external, are allowed to file a report on indications of violations to the Bank through the channels that have been provided. By adopting an effective early detection function, the Bank is able to early detect any indication of fraud, so that mitigation measures to prevent risks can be implemented immediately. Complaints with strong indications will be followed up with investigation process to find out the causes, modus operandi, and perpetrators of fraud in order to determine the follow-up actions that can be taken both financially and non-financially for PaninBank.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017. atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Submission of Violation Report

Whistleblowing system is an effort to control violation through a system that can be used as a media for witnesses to convey information about violations that are indicated to have occurred in the Company. Complaints obtained from the Whistleblowing mechanism will be attended and followed-up, including the imposition of appropriate sanctions in order to have a deterrent effect for the perpetrators and also for those who intend to do so. Submission of violation reports can be made by written letter, send to PO BOX 1771 JKT 10017. or electronic mail: kasihtau@panin.co.id or panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup Perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Pelanggaran Etika Perbankan
8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik.

The Whistleblower is not required to include the identity of the reporter or evidence of an indication of the reported violation. Information and matters that can be reported include, among others, if within the scope of the Company the following occurs:

1. Fraud
2. Theft
3. Asset Embezzlement
4. Information leak
5. Banking Crimes
6. Money Laundering
7. Banking Ethics Violation
8. Other actions/violations reported in good faith.

Perlindungan bagi *Whistleblower*

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower/*pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh Terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindak tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses *e-mail* dimaksud.

Protection for Whistleblowers

For reports that are proven to be true, PaninBank is obliged to appreciate and to provide protection for the whistleblower. Whistleblower protection includes:

1. Reporting media facilities and administration that ensure the confidentiality of the reporter's identity and the reported case.
2. Protection/guarantee of the confidentiality of the whistleblower/reporter's identity and the contents of the submitted report.
3. Protection just in case the violation reported goes to court.
4. Protection from retaliation by the Reported Party
5. Guaranteed protection against treatment that is detrimental to the reporter
6. Guaranteed protection for the possibility of threats, intimidation, punishment or other unpleasant acts from the reported party

In order to ensure confidentiality, for the reporter who includes his/her identity, the name of the reporter is only known by the designated whistleblowing officer, who is authorized to access the e-mail in question.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/*whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisanya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada Pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

The Handling of Complaints

Reports of fraud incidents/allegations submitted by the reporter/whistleblower shall include at least the following basic information:

1. Type of fraud;
2. The scene of the incident;
3. Parties involved;
4. The modus operandi;
5. Indication of losses.

All incoming reports will be analyzed by the appointed whistleblowing officer. If the initial information is deemed sufficient, the whistleblowing officer then submits the results of the analysis to the Fraud Management Team, which involves the Internal Audit Unit (SKAI), Human Resources or other units related to the material being reported, for investigation.

Progress of follow-up of the Report will be informed to the reporter until the follow up is completed. If the incoming report is irrelevant to the scope of the whistleblowing program, the whistleblowing officer will respond to the reporter that the incoming report will not be followed up, which will be accompanied by an explanation from the unit related to the report.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Parties Managing the Complaints

The recipient of the report is a Whistleblowing Officer under the Fraud Management Team appointed by the President Director, who is primarily responsible for carrying out reporting administration, monitoring report completion and maintaining the confidentiality of the Reporter's and Reported's identity.

Hasil Penanganan Pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Unit Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Results from Complaint Handling

Each incoming report shall be properly administered and regularly submitted to the Director in charge of Compliance and Risk Management and the President Director with a copy to the Director in charge of Human Resources. The identity of the reporter is kept confidential throughout handling process. The Party Managing the Complaints, In accordance with PaninBank's current internal policy, is the Risk Management Unit has the authority to open email of complaints and manage the whistleblowing program.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The results of investigations conducted by IAU will be reported to the President Director with a copy to the Fraud Management Team. In the event that a disciplinary action must be taken against the reported party, PaninBank shall be guided by the guidelines for enforcing discipline and applicable sanctions. If based on the results of the investigation it is proven that the reported party committed fraud/violation, then the approval officer will impose sanctions in accordance with the applicable regulations.

Tabel Pengaduan Tahun 2020

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Table of Complaints for 2020

The number of complaints received and processed in the last financial year and their follow-ups during 2020 are as follows:

No.	Perihal Subject	Jumlah Number
1.	Pengaduan Nasabah Customer Complaints	845
2.	Pengaduan Nasabah yang diselesaikan pada tahun yang sama Customer complaints resolved in the same year	**845**

PERMASALAHAN HUKUM
Legal Cases

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

Important Cases Currently being Faced by the incumbent Board of Commissioners and Board of Directors

Throughout 2020, there were no important cases being faced by the incumbent Board of Commissioners & Directors.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Important Issues that are being Faced by the Company

In conducting its business activities, PaninBank faces litigation risks and may get involved in legal cases. The number of legal cases faced by PaninBank during the 2020 period are as follows:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata Number of Civil Cases	Jumlah Kasus Pidana Number of Criminal Cases	Legal Cases
Kasus yang Sudah Selesai	46	1	Solved Case
Kasus yang Masih Dalam Penyelesaian	174	0	Case Still in Progress
Jumlah Kasus Hukum	**220**	**1**	**Number of Legal Cases**

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan
of Important Cases currently Faced by the Company

No	Pokok Perkara Legal Cases	Putusan Verdict	Posisi Terakhir Current Position
1	- Nama Penggugat: Yudiawan Tansari - Tergugat I: Dirjen Pajak - Tergugat II: Bank Panin Kantor Cabang Cilegon - Tergugat III: Bank BCA - Nomor Perkara: 585/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi gugatan: Gugatan PMH atas Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCU Bank Panin Pecenongan berdasarkan Perintah Dirjen Pajak Materiil: Rp21,000,000,000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) - Plaintiff: Yudiawan Tansari - Defendant I: Director General of Taxes - Defendant II: PaninBank, Cilegon Branch Office - Defendant III: Bank BCA - Case Number: 585/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Lawsuit: Unlawful Actions for Blocking the Plaintiff's Tax Account by the Main Branch Office of Bank Panin Pecenongan based on the Order of the Director General of Taxes Material: Rp21,000,000,000 (Twenty One Billion Rupiah)	- Tanggal Putusan Kasasi pada 18 Desember 2018 - Putusan adalah menolak permohonan kasasi dari Dirjen Jenderal Pajak Jakarta Pusat - The date of the Cassation Verdict is on December 18, 2018 - The Verdict rejected the appeal for cassation from the Director General of Taxes, Central Jakarta	Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Director General of Taxes submits a Review of Court Decision (PK)
2	- Penggugat : Liaw Tjhai Djun - Tergugat I: Dirjen Pajak, - Tergugat II: PT Bank Panin - Nomor Perkara: 582/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi Gugatan: Gugatan PMH atas Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCP Sunter berdasarkan Perintah Dirjen Pajak, Sita Jaminan gedung Bank Panin KCP Sunter. Nilai gugatan: imateriil sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) - Plaintiff : Liaw Tjhai Djun - Defendant I: Director General of Taxes, - Defendant II: PT Bank Panin - Case Number: 582/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Lawsuit: Unlawful Act Lawsuit on Blocking of Plaintiff's Tax Account by KCP Sunter based on the Order of the Director General of Taxes, Seizing Collateral for the PaninBank KCP Sunter building. Claim value: immaterial of 1,000,000,000 (One Billion Rupiah)	- Putusan tingkat Banding pada 20 Juni 2016 dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri - Verdict on Appeal level on June 20, 2016 with an order to strengthen the District Court Decision	Menunggu salinan Putusan tingkat Banding Waiting for a copy of the Verdict from Appeal Court

No	Pokok Perkara Legal Cases	Putusan Verdict	Posisi Terakhir Current Position
3	- Penggugat : Kang Taryo Honggo - Tergugat I: PT Bank Panin Surabaya Coklat - Tergugat II: KPKNL Surabaya - Tergugat III: PT Duta Balai Lelang - Tergugat IV: Hary Tjahjono - Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2012/Pn.Sby - Materi gugatan yaitu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait jaminan telah terjual dan debitur tidak bersedia mengosongkannya - Nilai gugatan: Materril & Imateriil Rp14.525.000.000 - Plaintiff : Kang Taryo Honggo - Defendant I: PT Bank Panin Surabaya Coklat - Defendant II: KPKNL Surabaya - Defendant III: PT Duta Balai Lelang - Defendant IV: Hary Tjahjono - Case Number: 32/Pdt.G/2012/Pn.Sby - Lawsuit: The plaintiff filed a lawsuit against the Unlawful Acts, related that the guarantee had been sold and the debtor was not willing to vacate it - Value of the lawsuit: Material & Immaterial Rp14,525,000,000	- Tanggal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 April 2016 - Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri - The verdict date of the High Court is April 27, 2016 - Confirming the verdict of the District Court	Proses Kasasi Cassation Process
4	- Penggugat : Sony Sandra - Tergugat: PT Bank Panin KCU Kediri - Nomor Perkara: 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr - Materi gugatan: Menyatakan Tergugat melakukan PMH, penggugat menuntut pembayaran atas gagal bayar produk MTN milik PT SNP kepada Bank Panin, Sita Jaminan terhadap gedung Bank Panin KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana - Nilai Gugatan: Materiil Rp35.000.000.000 Immateriil Rp40.000.000.000 ditambah bunga Rp2.800.000.000/per tahun - Plaintiff : Sony Sandra - Defendant: PT Bank Panin KCU Kediri - Case Number: 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr - Lawsuit: Stating that the Defendant has carried out the Unlawful Act, the plaintiff demands payment for the default of PT SNP's MTN products to Bank Panin, Seizing Collateral for the PaninBank building KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana - Claim value: Material Rp35,000,000,000 Immaterial Rp40,000,000,000 plus interest Rp2,800,000,000/per tahun	- Tanggal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 November 2020 - Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. - Untuk Gugatan sita Jaminan terhadap gedung Bank Panin KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana tidak dikabulkan di PN maupun PT - Menolak permohonan ganti rugi Immateriil - The High Court verdict date is November 27, 2020 - Declared to strengthen the verdict of the District Court. - Claims for seizure of collateral against the PaninBank building KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana were not granted, either in the District Court or in the High Court. - Refused Immaterial claim for compensation	Bank Panin Mengajukan upaya hukum Kasasi PaninBank Filed for Cassation

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Company Information and Data

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 beserta perubahannya dan salinan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional."

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain:

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs *Web* PaninBank sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

INFORMATION DISCLOSURE

The Company has put in place policies and procedures regarding transparency in financial and non-financial conditions in accordance with regulatory regulations.

The Financial Statements has been prepared in accordance with POJK Number 6/POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports dated March 31, 2015 along with the amendments and copy of OJK Circular Letter No. 43/SEOJK.03 2016 dated September 28, 2016 concerning "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report."

By referring to the POJK above, the Bank submits reports to regulators and stakeholders. The reports include:

- Monthly Publication Report
- Quarterly Publication Reports
- Capital Disclosure Obligations
- Annual Publication Report
- Other Publication Reports

The report is also available on the PaninBank website according to the time period, along with other information that can be easily accessed by the public.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

RELATIONSHIP WITH INVESTORS AND MEDIA

In delivering information and in communicating with external parties, PaninBank upholds the principles of open, active and responsible communication. The Investor Relation is in charge of ensuring that all information required by Shareholders and Investors can be fulfilled by observing the principles of confidentiality and applicable laws and observing the regulations of the Capital Supervisory Authority and the Stock Exchange without reducing the obligation to carry out full disclosure and equitable principles treatment.

Investor Relation must ensure that the information provided is valid and has been verified by other functions within the Company in relation to the information before being submitted to investors.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

The Corporate Secretary is responsible for documenting the management of media relations, both electronic and printed media, so that the integrity and credibility of Company information to the public can be maintained.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Forms of communication with the mass media can be in the form of press conferences, announcements, press releases or interviews. Every question, criticism or suggestion from the public, whether delivered orally or in writing through various means of communication, must be responded to as well as possible. The Corporate Secretary is responsible for coordinating the responses to be delivered by the Company with due observance of the input given by the related Divisions/Bureau.

Pada tahun 2020, PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank Panin, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

In 2020, PaninBank held various events regularly or specifically so that the investor community can get information about PaninBank, including through press conferences, distribution of press releases, media interviews, analyst meetings, analyst visits, and others.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

PaninBank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk PaninBank agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (*advertising*) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat *Above the line* (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL), berupa *event*, spanduk, poster, *flyer* dan lain-lain.

PROMOTION IN MASS MEDIA

PaninBank carries out promotions in the mass media to introduce and to market PaninBank products so that it can be better known and in demand by the public. Promotion is carried out through the mass media (print and electronic), in 2 (two) channels, namely the advertising channel and the news channel (or coverage by the media). Promotional activities through mass media are organized by the Branding & Communications Division, both Above the line (ATL), such as TV, Radio, Magazines, Newspapers, and Billboards, as well as Below the Line (BTL), in the form of events, banners, posters, flyers and others.

WEBSITE PANINBANK

PaninBank senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stakeholders.* Publik dapat dengan mudah mengakses *website* PaninBank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* PaninBank, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada PaninBank. Publik juga dapat memanfaatkan *website* PaninBank untuk menghubungi PaninBank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank Panin juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

PANINBANK WEBSITE

PaninBank always maintains the Company's website (www.panin.co.id) properly, which is aimed at providing information and also the interests of stakeholders. The public can easily access the PaninBank website to obtain the information needed regarding PaninBank, both financial and non-financial information of the Bank, ranging from products/facilities, reports that must be posted on the PaninBank website, to the opportunity to have a career with PaninBank. The public can also use the PaninBank website to contact PaninBank if they have anything to say. In addition, PaninBank website can also be used by customers to conduct internet banking transactions.

SIARAN PERS

PaninBank merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (*press release*). Pada tahun 2020 PaninBank menyelenggarakan 8 (delapan) Konferensi Pers dan mengeluarkan 9 (sembilan) Siaran Pers sebagai berikut:

PRESS RELEASE

PaninBank responds and provides information to the mass media in the form of direct interviews, press conferences, as well as issuing press releases. In 2020 PaninBank held 8 (eight) Press Conferences and issued 9 (nine) Press Releases as follows:

A. Konferensi Pers

A. Press Conference

No	Agenda	Tanggal | Date	Tempat | Place
1	Public Expose PaninBank PaninBank Public Expose	11 Desember 2020	Jakarta
2	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 Resolution of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders	26 Juni 2020	Jakarta
3	Penyerahan Bantuan APD Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Submission of PPE Assistance to the Central Indonesian Red Cross (PMI)	19 Mei 2020	Jakarta
4	Launching Panin Super Bonanza 2020 Launching of the Panin Super Bonanza 2020	26 Maret 2020	Jakarta
5	Donor Darah KCU AM Sangaji Blood Donation of KCU AM Sangaji	17 Februari 2020	Jakarta

Media Interview diwakili oleh Presiden Direktur antara lain dengan jaringan televise CNBC dan BeritaSatu

Media Interview was represented by the President Director, among others, the CNBC television network and BeritaSatu.

B. Press Release

B. Press Release

No	Agenda	Tanggal | Date	Tempat | Place
1	Kinerja Triwulan III Tahun 2020, PaninBank Lanjutkan Pertumbuhan Laba di Kuartal III 2020 2020 Quarter III Performance, PaninBank continues to grow profit in the third quarter of 2020	2 November 2020	Jakarta
2	Nasabah PaninBank KCP Dumai Menangkan Hadiah Panin Super Bonanza Sebesar Rp1,025 Miliar, Customer of PaninBank KCP Dumai Wins Panin Super Bonanza Prize of Rp1.025 Billion,	28 Oktober 2020	Pekanbaru
3	Kinerja Semester I 2020, PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp1,35 Triliun Performance of Semester I 2020, PaninBank Booked Net Profit of Rp1.35 Trillion	29 Juli 2020	Jakarta
4	RUPS Tahunan PaninBank 2020 PaninBank Annual GMS 2020	26 Juni 2020	Jakarta
5	PaninBank Bantu Korban Banjir Konawe Utara, 12 Juni 2019 PaninBank Helps the Victims of North Konawe Flood, June 12, 2019	12 Juni 2019	Kendari
6	Ramadhan Berbagi PaninBank Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H Ramadhan Berbagi - PaninBank Welcomes Eid Al-Fitr 1440 H	24 Mei 2019	Jakarta
7	Kinerja Kuartal I 2019, Kinerja Kuartal I 2020 PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp731 Miliar Performance of the First Quarter of 2019, the Performance of the First Quarter of 2020 PaninBank Booked a Net Profit of Rp731 billion	15 Mei 2020	Jakarta
8	Panin Super Bonanza Hadir Kembali Dengan Hadiah Total Uang Tunai Rp4 Miliar Setiap Bulan Panin Super Bonanza Returns with a Total Cash Prize of Rp4 billion Every Month	26 Maret 2020	Jakarta
9	KINERJA TAHUN 2019 PaninBank Mencatat Laba Rp3,5 triliun PERFORMANCE IN 2019 PaninBank Recorded Profit of Rp3.5 trillion	27 Februari 2020	Jakarta

KORESPONDENSI

Selama tahun 2020 Perusahaan mengirimkan surat/ melakukan korespondensi dengan pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

CORRESPONDENCE

During 2020, the Company sent letters/conducted correspondence with external parties, namely the Financial Services Authority as follows:

Korespondensi ke Otoritas Jasa Keuangan
Correspondence to the Financial Services Authority

No.	Tanggal | Date	No. Surat | No. Letter	Perihal | Regarding
1	14 Januari 2020	003/DIR/OJK/20	Laporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*
2	27 Januari 2020	006/DIR/OJK/21	Rencana Pendidikan Tahun 2020
3	29 Januari 2020	008/DIR/OJK/20	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT Bank Panin Tbk Periode Desember 2019
4	29 Januari 2020	009/DIR/OJK/21	Laporan Tingkat Kesehatan (*Risk Based Bank Rating)* PT Bank Pan Indonesia Tbk Periode Desember 2019
5	29 Januari 2020	010/DIR/OJK/20	Laporan Rincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2019
6	30 Januari 2020	011/DIR/OJK/20	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Panin
7	6 Februari 2020	012/DIR/OJK/20	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk Triwulan IV th 2019 (tidak diaudit)
8	7 Februari 2020	014/DIR/OJK/20	Informasi Terkait Pemenuhan POJK 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten
9	13 Februari 2020	018/DIR/OJK/20	Laporan *Self-Assessment* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin Periode Semester II 2019
10	13 Februari 2020	019/DIR/OJK/20	Laporan Tingkat Kesehatan (*Risk Based Bank Rating)* PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak Periode Desember 2019
11	13 Februari 2020	020/DIR/OJK/20	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT Bank Pan Indonesia Tbk dan Entitas Anak Periode Des 2019
12	27 Februari 2020	024/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk Dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit)
13	27 Februari 2020	025/DIR/OJK/20	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit)
14	5 Maret 2020	028/DIR/OJK/20	Pemberitahuan RUPS
15	13 Maret 2020	032/DIR/OJK/20	Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
16	16 Maret 2020	033/DIR/OJK/20	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk Triwulan IV th 2019 (diaudit)
17	23 Maret 2020	037/DIR/OJK/20	Penjelasan Terkait Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham
18	31 Maret 2020	040/DIR/OJK/20	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan
19	8 April 2020	043/DIR/OJK/20	Hasil Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
20	22 April 2020	046/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG PaninBank Tahun 2019
21	12 Mei 2020	053/DIR/OJK/20	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk Secara Elektronik
22	15 Mei 2020	056/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Tahunan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk
23	19 Mei 2020	057/DIR/OJK/20	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS
24	28 Mei 2020	059/DIR/OJK/20	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk
25	4 Juni 2020	064/DIR/OJK/20	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
26	4 Juni 2020	065/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Tahunan 2019
27	9 Juni 2020	068/DIR/OJK/20	Berakhirnya Periode PUB Obligasi Berkelanjutan III dan Subordinasi Berkelnajutan III PaninBank Tahun 2018
28	25 Juni 2020	074/DIR/OJK/20	Pengunduran Diri Sdri. Roosniati Salihin Selaku Wakli Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk
29	25 Juni 2020	075/DIR/OJK/20	Pengunduran Diri Sdr. Ahmad Hidayat Selaku Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk
30	30 Juni 2020	078/DIR/OJK/20	Laporan & Bukti Iklan Ringkasaan Risalah RUPST 2020
31	30 Juni 2020	079/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2019
32	30 Juni 2020	081/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Tahunan Entitas Induk dan Entitas Anak
33	30 Juni 2020	082/DIR/OJK/20	Susunan Pengurus Entitas Anak Perusahaan
34	10 Juli 2020	087/DIR/OJK/20	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau KAP dalam Rangka Audit 31 Desember 2020

No.	Tanggal | Date	No. Surat | No. Letter	Perihal | Regarding
35	13 Juli 2020	091/DIR/OJK/20	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2019
36	13 Juli 2020	092/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bank Pan Indonesia Tbk
37	15 Juli 2020	093/DIR/OJK/20	Informasi Kontrak Kantor Akuntan Publik
38	27 Juli 2020	099/DIR/OJK/20	Penyampaian Risalah RUPST PaninBank
39	27 Juli 2020	100/DIR/OJK/20	Penunjukkan Pejabat
40	29 Juli 2020	105/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk
41	29 Juli 2020	106/DIR/OJK/20	Laporan Rincian Pihak Terkait Bank
42	29 Juli 2020	107/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal pada Entitas Anak PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
43	7 Agustus 2020	116/DIR/OJK/20	Dukungan Penerapan Strategi Nasional Anti Korupsi
44	12 Agustus 2020	120/DIR/OJK/20	Kelengkapan Informasi Untuk Laporan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau KAP dalam Rangka Audit 31 Desember 2021
45	12 Agustus 2020	121/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk
46	12 Agustus 2020	122/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengurus PT Bank Pan Indonesia Tbk
47	14 Agustus 2020	126/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bank Pan Indonesia Tbk
48	31 Agustus 2020	136/DIR/OJK/20	Tambahan Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengurus PT Bank Pan Indonesia Tbk
49	2 September 2020	138/DIR/OJK/20	Tambahan Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengurus PT Bank Pan Indonesia Tbk
50	11 September 2020	141/DIR/OJK/20	Penyampaian Informasi Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pan Indonesia Tbk
51	21 September 2020	145/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal
52	5 Oktober 2020	151/DIR/OJK/20	Penyampaian Jadwal Emisi
53	5 Oktober 2020	152/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bank Pan Indonesia Tbk
54	15 Oktober 2020	155/DIR/OJK/20	Tambahan Kelengkapan Dokumen Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk
55	2 November 2020	163/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk
56	18 November 2020	170/DIR/OJK/20	Perubahan PIC Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Pan Indonesia Tbk
57	24 November 2020	171/DIR/OJK/20	Laporan Realisasi Tambahan Penyertaan Modal PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Melalui *Right Issue*
58	30 November 2020	172/DIR/OJK/20	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank Pan Indonesia Tbk Tahun 2021-2024
59	16 Desember 2020	182/DIR/OJK/20	Penyampaian Informasi Terkait Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pan Indonesia Tbk
60	23 Desember 2020	185/DIR/OJK/20	Penyampaian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin

FUNGSI *INVESTOR RELATION*

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur PaninBank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Bank, serta *review* terhada kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

INVESTOR RELATION FUNCTION

The Investor Relations Unit is in charge in delivering accurate, reliable and timely information to external parties, including shareholders, potential investors, capital market analysts, correspondent banks, rating agencies and PaninBank creditors.

Periodically, Investor Relations conducts performance exposures, analyst meetings, meetings with investors, and other meetings with the aim of delivering performance updates, the Bank's strategy, as well as a review of Indonesia's macroeconomic conditions.

Investor Relations has the main responsibility to represent the Board of Directors in relation to investors, capital market analysts and fund managers, as well as shareholders, including for:

1. Merespons permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund* Manager
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/ conference*
3. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft 'research report'* dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "*President Director's Note*" secara regular.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah Internal in Actions
- Majalah Internal Best Lifestyle
- Smartnews
- Surat Edaran Dicetak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

1. **Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik (tahun 2020 belum detil)**
   Guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan, Perseroan menerapkan kebijakan internal yang melarang keterlibatan Bank maupun karyawan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

1. Responding to requests for data/information required by analyst/fund managers
2. Prepare presentation materials for an analyst meeting/ conference
3. Attending forums/analyst meetings
4. Reviewing, correcting and completing the draft 'research report' from capital market analysts and other rating agencies
5. Organizing an annual public expose according to the provisions
6. Attending analyst meetings as assigned by the Board of Directors

INTERNAL COMMUNICATION

PaninBank maintains effective two-way communication with employees. Communication is also carried out through the PaninBank Employee Association (IKBP), especially on matters related to managing harmonious relationships with all employees. PaninBank also provides information regarding business developments, business progress, Company rules and regulations, and promotion of internal work, in the form of regular distribution of "President Director's Notes".

Internal communication is carried out based on the principles of openness, transparency, two-way, responsibility, timely, accurate and simple. To foster good communication with employees, PaninBank apart from holding various employee meetings, is also actively utilizing communication media such as:

- Internal Magazine in Actions
- Best Lifestyle Internal Magazine
- Smartnews
- Printed Circular Letters and E-mails
- Annual Work Meeting
- Directors visit
- Company Anniversary Celebration
- Employee Sports Events

1. **Provision of Funds for Social and Political Activities**
   In order to maintain the independence and professionalism of the Bank and employees, the Company implements an internal policy that prohibits the involvement of the Bank and employees in political activities, including providing funds for political purposes. During 2020, the Bank did not provide funds for political activities.

2. **Kebijakan yang diterapkan perusahaan terkait *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi sepanjang 2020.**
   Guna mendukung himbauan OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020, ditengah kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 yang mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Perseroan telah melakukan *Buy Back* Saham.

   Kebijakan pelaksanaan *Buy Back* Saham dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan.

   Selama tahun 2020 jumlah Saham yang dibeli kembali sebanyak 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham dan dibukukan sebagai *Treasury Stock.*

2. **Policies implemented by the company regarding Buy Back Shares and Buy Back Bonds throughout 2020.**
   In order to support the appeal of the OJK and the Indonesia Stock Exchange through OJK Circular No. 03/SEOJK.04/2020 dated 9 March 2020, amidst the conditions of stock trading on the Indonesia Stock Exchange since early 2020 which experienced significant pressure as indicated by the decline in the Composite Stock Price Index (IHSG), the Company has carried out a Shares Buy Back.

   Shares Buy Back implementation policy is carried out in accordance with OJK Regulation No. 02/POJK.04/2013 dated August 23, 2013 concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies in Market Conditions that Fluctuate Significantly.

   During 2020 the number of Shares bought back was 6,100,000 (six million one hundred thousand) shares and recorded as Treasury Stock.

RENCANA STRATEGIS PERSEROAN
Company's Strategic Plans

Target Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, berpusat pada nasabah, produk, dan distribusi yang diterjemahkan ke dalam penguatan tiga aspek, yaitu *organizational flexibility*, *customer centric*, dan *profit optimization*.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

Short and Medium-Term Targets

The Company established short-term targets to be achieved in the following year and medium-term targets for the next three years by taking into account the vision and mission, customer-centered, products and distribution which are embodied in the strengthening of three aspects, namely organizational flexibility, customer-centric, and profit optimization.

The short and medium-term targets of the Company are as follows:

TARGET JANGKA PENDEK

Pertumbuhan kinerja keuangan diproyeksikan dalam kisaran 3,5%-5,5% untuk kredit, dan 8%-10% untuk DPK dan Aset.

Mencermati prospek ekonomi-bisnis tahun depan, Bank memproyeksikan pertumbuhan bisnis yang moderat. Ketidakpastian diperkirakan masih akan mewarnai perekonomian pada tahun depan. Pemulihan ekonomi Indonesia berpotensi lebih lambat dari ekspektasi. Upaya-upaya penanganan pandemi dan ketersediaan vaksin sangat menentukan akselerasi pemulihan ekonomi. Bank akan lebih selektif dalam mencari ceruk pembiayaan agar rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*/NPL) tidak meningkat.

Mensukseskan transformasi *digital banking* - fase I.

Perkembangan teknologi digital yang cukup pesat telah mengubah lanskap keuangan Indonesia. Disrupsi dari perusahaan tekfin rintisan yang makin marak direspons pelaku perbankan dengan pengembangan *digital banking*. Adopsi teknologi ini makin cepat sejak terjadi pandemi. Kemunculan *platform* dompet digital (*e-Wallet)* hingga *peer-to-peer lending* membuat bank-bank konvensional menjadi lebih agresif dalam melakukan transformasi digital. Bank memproyeksikan implementasi *digital banking* dapat melewati *pilot testing* pada triwulan III-2021 dan segera diperkenalkan kepada nasabah mulai triwulan IV-2021.

SHORT-TERM TARGETS

Financial performance growth is projected in the range of 3.5%-5.5% for credit, and 8%-10% for deposits and assets.

Observing the economic-business prospects in the coming year, the Bank is forecasting a moderate business growth. Various uncertainties are predicted to continue to fulfill the economy next year. Indonesia's economic recovery has the potential to be slower than expected. A number of efforts taken to deal with a pandemic and the availability of vaccines will greatly determine the acceleration of economic recovery. The Bank will be more selective in finding financing niches so as the ratio of Non-Performing Loans (NPL) does not increase.

Successful transformation of Digital Banking - phase I.

The rapid development of digital technology has changed Indonesia's financial landscape. Disruption originating from start-up fintech companies that are increasingly widespread has responded by the banking actors through the digital banking development. The adoption of such technology has been accelerating since the pandemic occurred. The emergence of digital wallet platforms (e-Wallets) to peer-to-peer lending has made conventional banks more aggressive in performing the digital transformation. The bank predicted that the digital banking implementation could pass through the pilot testing in quarter III-2021 and will immediately be introduced to customers starting in quarter IV-2021.

TARGET JANGKA MENENGAH

Memperluas basis nasabah.

Penambahan nasabah baru, terutama dari generasi milenial merupakan bagian dari program regenerasi nasabah Bank. Transformasi digital banking dalam rangka penguatan layanan berbasis digital diharapkan bisa mendorong jumlah nasabah dari generasi milenial ini

Mendorong CASA ke level yang lebih efisien.

Tingkat CASA yang tinggi berarti biaya Bank makin efisien. Hal itu akan berdampak positif pada peningkatan potensi laba dari penyaluran kredit. Bank memproyeksikan CASA bisa mencapai 50% pada tiga tahun mendatang.

MEDIUM-TERM TARGETS

Expanding customer base.

The addition of new customers, primarily from the millennial generation segment is part of the Bank's customer regeneration program. The digital banking transformation in order to strengthen digital-based services is expected to increase the number of customers from the millennial gen segment.

Promote CASA to a more efficient level.

A high CASA level means that the Bank's costs are more efficient. This will have a positive impact to the increase in profitability of credit. The bank projected its CASA will be reach 50% within the next three years.

PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA
Disclosure of Other Aspects

BUY BACK SAHAM DAN *BUY BACK* OBLIGASI BANK

Pada tahun 2020 PaninBank melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham Perseroan dan tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

BUY BACK BANK SHARES AND BOND

In 2020, PaninBank had conducted the Company's shares buyback and did not buy back the bonds issued by the Company.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik
   Guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan, Perseroan menerapkan kebijakan internal yang melarang keterlibatan Bank maupun karyawan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

2. Kebijakan yang diterapkan perusahaan terkait *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi sepanjang 2020.
   Guna mendukung himbauan OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020, ditengah kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 yang mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Perseroan telah melakukan *Buy Back* Saham.

   Kebijakan pelaksanaan *Buy Back* Saham dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan.

   Selama tahun 2020 jumlah Saham yang dibeli kembali sebanyak 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham dan dibukukan sebagai *Treasury Stock.*

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait PaninBank. Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2020:

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURE

1. Provision of Funds for Social and Political Activities
   In order to maintain the independence and professionalism of the Bank and employees, the Company implements an internal policy that prohibits the involvement of the Bank and employees in political activities, including providing funds for political purposes. During 2020, the Bank did not provide funds for political activities.

2. Policies implemented by the Bank regarding Buy Back Shares and Buy Back Bonds throughout 2020.
   In order to support the appeal of the OJK and the Indonesia Stock Exchange through OJK Circular No. 03/SEOJK.04/2020 dated March 9, 2020, amidst the conditions of stock trading on the Indonesia Stock Exchange which experienced significant pressure since early 2020, as indicated by the decline in the Composite Stock Price Index (IHSG), the Company has carried out Shares Buy Back.

   The Shares Buy Back is carried out in accordance with OJK Regulation No. 02/POJK.04/2013 dated August 23, 2013 concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies in Market Conditions that Fluctuate Significantly.

   During 2020, 6,100,000 (six million one hundred thousand) shares were bought back and recorded as Treasury Stock.

During 2020 there were no violations and/or excesses of the LLL for the provision of funds to both Related Parties and Non-Related Parties of PaninBank. The following is a breakdown of the provision of funds to parties related to the Bank and also to the Bank's core debtors (unrelated) as of December 31, 2020:

Penyediaan Dana	Debitur Debtor	Jumlah | Amount Nominal (Rp Juta | Rp Million)	Provision of Fund
Kepada Pihak Terkait	127	1.712.712	To Related Party
Kepada Debitur Inti:			To Core Debtor:
- Individual	6	6.559.162	- Individual
- Group	19	37.865.919	- Group

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2020 Bank Panin tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan Politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dalam 5 bidang, yaitu bidang Kesehatan, Kesjahteraan sosial dan Penanggulangan Bencana, Pemeliharaan lingkungan, serta bidang Pendidikan, Seni dan Olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2020 sebesar Rp40.754.334.263,- (Empat puluh milar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga) yang terdistribusi ke kegiatan sebagai berikut:

PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

In 2020, PaninBank did not provide funds for political activities. The provision of funds for social activities is carried out in 5 sectors, namely Health, Social Welfare and Disaster Management, Environmental Care, and Education, Arts and Sports sectors. The amount of funds channeled for social and CSR activities in 2020 is Rp40,754,334,263,- (Forty billion seven hundred fifty four million three hundred thirty four thousand two hundred sixty three) which are distributed to the following activities:

No	Bidang Kegiatan Activities	Jumlah Amount
1	Kesehatan, berupa pengadaan Rumah Sakit dan Sarana Penunjang, Pengadaan APD dan *Rapid Test*, Donor Darah Health, in the form of procurement of hospitals and supporting facilities, procurement of PPE and rapid tests, and blood donations	Rp39.912.188.641,-
2	Pemeliharaan Lingkungan (Penghijauan) Environmental Preservation (Replantation)	Rp109.068.112,-
3	Kegiatan Sosial dan Penanggulangan Bencana Social Activities and Disaster Management	Rp203.954.510,-
4	Pendidikan dan Literasi Keuangan Education and Financial Literacy,	Rp394.123.000,-
5	Kegiatan Sosial Lainnya Other Social Activities	Rp135.000.000,-
TOTAL		Rp40.754.334.263,-

SHARES OPTION

Saat ini PaninBank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

SHARES OPTION

Currently, PaninBank does not have a share option program either for management (MSOP) or for employees (ESOP).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan objektif.

TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Conflict of interest is a situation where the Company's interest is competing with those of the individuals, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company, which causes them to be unable to act independently and objectively.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memilii benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan PaninBank tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi/Dewan Komisaris/ pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perusahaan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

In carrying out its duties and obligations, each PaninBank individual must always put the interests of the Bank above personal, family, and other parties' interests. In addition, every individual who has the authority to make decisions must make a statement that the individual concerned does not have a conflict of interest in any decisions that have been made by him.

Handling of Conflict of Interest is carried out as follows:

1. Shareholders who have a conflict of interest must cast their votes at the GMS in accordance with the decisions made by shareholders who have no conflict of interest.
2. Employees who have or have the potential to have a conflict of interest must immediately disclose it to their direct supervisor, according to the organizational structure level.
3. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm PaninBank or reduce PaninBank's profits and must disclose the conflict of interest referred to in every decision.
4. Directors who have a conflict of interest with PaninBank are not allowed to represent the Company both inside and outside the court and those entitled to represent the Company are the Board of Directors/the Board of Commissioners/other parties in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. The Board of Commissioners and the Board of Directors are required to make a statement, on an annual basis, regarding whether or not there is a conflict of interest and there is no intervention by the Company owner in any decisions that have been taken and the entire process is in accordance with the regulations and Company policies. If the Board of Commissioners and the Board of Directors have a conflict of interest, the Board of Commissioners and the Board of Directors must state that all decisions they have taken are objective, independent, and not detrimental to the Company.

During 2020, there were no transactions containing conflict of interest by the Directors and/or other employees.

TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT

Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Januari 2018.
3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016.
4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Februari 2016.
5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)

Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
Posisi Laporan : Juni 2020 (semester I 2020)

Integrated Governance

The Panin Group Financial Conglomerate has implemented Integrated Governance properly and effectively in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates and OJK Circular No. 15/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.

Integrated Corporate Governance Policy

The integrated governance policy is a set of rules in implementing integrated governance in the Panin Group Financial Conglomerate. The main policies related to integrated governance include:

1. Integrated Governance Guidelines Revision I which was ratified by a decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners dated October 30, 2017.
2. Integrated Risk Management Guidelines ratified by the decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners in January 2018.
3. Integrated Governance Committee Charter ratified by the Board of Commissioners' decision dated January 27, 2016.
4. Guidelines for the Integrated Risk Management Committee which were ratified by the decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners in February 2016.
5. Integrated Internal Audit Guidelines Revision I which was ratified by a decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners dated October 30, 2017.
6. Integrated Compliance Guidelines Revision I which was ratified by the decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners dated October 30, 2017.

ASSESSMENT OF INTEGRATED GOVERNANCE (Self-Assessment of the Implementation of Integrated Governance)

Integrated Governance Implementation Self-Assessment Report 2020

Main Entity : PT Bank Panin Tbk
Report Position : June 2020 (semester I 2020)

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
Results of the Self-Assessment of the Implementation of Integrated Corporate Governance

Peringkat Rank	Definisi Peringkat	Rank Definition
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.	The Financial Conglomerate is considered to have implemented Integrated Governance which is generally excellent. This is reflected in the adequate fulfillment of the application of the principles of Integrated Governance. If there are weaknesses in the implementation of Integrated Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Main Entity and/or LJK.

Analisis	Analysis
Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.	In general, the Panin Group Financial Conglomerate has implemented Integrated Governance in all Financial Services Institutions (LJK) properly and effectively in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 172/DIR/OJK/16 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut: · PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; · PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; · PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; · PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; · PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota; · PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.	Referring to the PaninBank Letter as the Main Entity No. 172/DIR/OJK/16 dated 25 October 2016 concerning Report on Changes in Members of Financial Conglomerates, the Financial Services Institutions (LJK) within the Panin Group Financial Conglomerates are as follows: · PT Bank Panin Tbk, as the Main Entity; · PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, as member of LJK; · PT Clipan Finance Indonesia Tbk, as member of LJK; · PT Panin Sekuritas Tbk, as member of LJK; · PT Panin Aset Manajemen, as member of LJK; · PT Panin Dai-Ichi Life, as member of LJK.
Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup: · Struktur Tata Kelola *(Governance Structure)* · Proses Tata Kelola *(Governance Process)* · Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*	The scope of the application of Integrated Governance includes the Main Entity and LJK in the Panin Group Financial Conglomeration which is comprehensive and structured covering: · Governance Structure; · Governance Process; · Governance Outcome.
Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:	Based on the analysis of the indicators on all the assessment factors for the implementation of Integrated Governance, it is concluded that:
A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: • Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut: - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi - Pedoman Audit Internal Terintegrasi - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi • Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut: - Komite Tata Kelola Terintegrasi - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	**A. Integrated Governance Structure** 1. The values that reflect the strength of the structural aspects of the Integrated Governance of the Financial Conglomerate are as follows: • The Panin Group Financial Conglomerate has formulated Policies and Guidelines related to the implementation of Integrated Governance as follows: - Integrated Governance Guidelines - Integrated Risk Management Guidelines - Integrated Governance Committee Charter - Integrated Risk Management Committee Charter - Integrated Internal Audit Guidelines - Integrated Compliance Guidelines • The Panin Group Financial Conglomerate has established supporting organs for the implementation of Integrated Governance as follows: - Integrated Governance Committee - Integrated Risk Management Committee - Integrated Risk Management Work Unit - Integrated Internal Audit Work Unit - Integrated Compliance Work Unit

Analisis

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
   - Fungsi–fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
   - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
   - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, *workshop*, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
   - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama semester I tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
   - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama semester I 2020, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dan hal-hal lain/*current issue*.
   - Pada Semester I 2020 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi:
     - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
     - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
     - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
     - Laporan Audit Intern Terintegrasi
   - Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
     - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
     - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
     - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Analysis

2. The values that reflect the weaknesses of the Integrated Governance structure aspects of the Financial Conglomerate are as follows:
   - Differences in the lines of business and the horizontal structure of the conglomerate are obstacles faced in coordinating and synergizing among LJKs in the Financial Conglomeration. However, these obstacles can gradually be mitigated in line with the full support and commitment of PT Bank Panin Tbk as the Main Entity in the Panin Group Financial Conglomerate.
   - Functions related to the implementation of Integrated Governance, which include the Risk Management function, the Internal Audit function, and the Compliance function at LJK in the Panin Group Financial Conglomeration are still very limited. This will be a concern and for this reason improvements will continue to be made in order to fulfill and support the implementation of Integrated Governance.

B. Integrated Governance Process

1. The values that reflect the strength of the aspects of the Integrated Governance Process of the Financial Conglomerate are as follows:
   - Policies and Guidelines related to the implementation of Integrated Governance have been disseminated to all LJKs within the Panin Group Financial Conglomeration.
   - Commitment and support from the Main Entity to continuously monitor and ensure the implementation of Integrated Governance in every business activity carried out by LJK in the Financial Conglomerate is in accordance with the Panin Group Financial Conglomerate Integrated Governance Guidelines.
   - The Board of Directors and Board of Commissioners of the Main Entity continue to make improvements in the context of implementing Integrated Governance through a number of meetings, workshops, and joint outreach with all LJKs in the Panin Group Financial Conglomeration.
2. The values that reflect the weaknesses of the Integrated Governance process aspects of the Financial Conglomerates are as follows:
   - The effectiveness of the evaluation of the Guidelines has not been carried out completely. This is always a concern for all parties involved in the process of evaluating the Guidebook.
   - Standard governance and risk management indicators are different for each sector of the financial industry, so it will take time to harmonize the implementation of governance and risk management indicators on a group-wide basis.

C. Integrated Governance Results

1. Values that reflect the strength of the results of the Integrated Governance of the Financial Conglomerate are as follows:
   - In accordance with the provisions stipulated in the current regulations and provisions concerning Financial Conglomerates, the Board of Commissioners of the Main Entity and the Integrated Governance Committee are required to hold regular meetings at least 1 (one) time per semester. During the first semester of 2020, the Main Entity Board of Commissioners Meeting and Integrated Governance Committee Meetings were held 1 (one) time.
   - Discussions conducted at the Main Entity Board of Commissioners Meeting, namely regarding the evaluation of the discussion on the results of the Implementation of Integrated Governance at each LJK during the first semester of 2020, Activities of the Integrated Governance Committee and other matters/current issues.
   - In Semester I of 2020, the Main Entity has received a report on the implementation of Integrated Supervision as part of the Main Entity's monitoring function of members of the Financial Conglomeration, the report includes:
     - Risk Profile Report of each Financial Service Institution
     - Integrated Governance Report of each Financial Service Institution
     - Compliance Report of Each Financial Service Institution
     - Integrated Internal Audit Report
   - In line with compliance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations related to Financial Conglomerates, the Main Entity has compiled the reporting obligations to be reported to OJK, including:
     - Integrated Risk Profile Report
     - Integrated Governance Implementation Assessment Report
     - Integrated Capital Adequacy Report.

Analisis	Analysis
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: • Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna. • Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	2. The values that reflect the weaknesses of the Integrated Governance results of the Financial Conglomerates are as follows: • Assessment of the adequacy of internal control at each LJK has not been carried out effectively and has not been completely documented. • The implementation of Integrated Governance, which includes the Risk Management function, Internal Audit function, and Compliance function at LJK in the Panin Group Financial Conglomeration is still very limited, this will be a concern and improvements will continue to be made to meet and support the implementation of Integrated Governance.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020	Integrated Governance Implementation Self-Assessment Report 2020
Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk	Main Entity : PT Bank Panin Tbk
Posisi Laporan : Desember 2020 (Semester II 2020)	Report Position : December 2020 (semester II 2020)

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
Results of the Self-Assessment of the Implementation of Integrated Corporate Governance

Peringkat Rank	Definisi Peringkat	Rank Definition
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.	The Financial Conglomerate is considered to have implemented Integrated Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the application of the principles of Integrated Governance. If there are weaknesses in the implementation of Integrated Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Main Entity and/or LJK.

Analisis	Analysis
Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.	In general, the Panin Group Financial Conglomerate has implemented Integrated Governance in all Financial Services Institutions (LJK) properly and effectively in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut: • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Asset Management, sebagai LJK anggota; • PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.	Referring to the PaninBank Letter as the Main Entity No. 011/DIR/OJK/21 dated January 29, 2016 concerning Report on Changes in Members of Financial Conglomerates, the Financial Services Institutions (LJK) within the Panin Group Financial Conglomerates are as follows: · PT Bank Panin Tbk, as the Main Entity; · PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, as member of LJK; · PT Clipan Finance Indonesia Tbk, as member of LJK; · PT Panin Sekuritas Tbk, as member of LJK; · PT Panin Aset Manajemen, as member of LJK; · PT Panin Dai-Ichi Life, as member of LJK.
Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup: • Struktur Tata Kelola *(Governance Structure)* • Proses Tata Kelola *(Governance Process)* • Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*	The scope of the application of Integrated Governance includes the Main Entity and LJK in the Panin Group Financial Conglomeration which is comprehensive and structured covering: · Governance Structure; · Governance Process; · Governance Outcome.
Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:	Based on the analysis of the indicators on all the assessment factors for the implementation of Integrated Governance, it is concluded that:

Analisis

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
     - Pedoman Tata Kelola Terintegras
     - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
     - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
     - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
     - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
     - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
     - Piagam Konglomerasi Grup Panin
   - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
     - Komite Tata Kelola Terintegrasi
     - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
     - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
     - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
     - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
   - Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
   - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
   - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, *workshop*, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
   - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

Analysis

A. Integrated Governance Structure

1. The values that reflect the strength of the structural aspects of the Integrated Governance of the Financial Conglomerate are as follows:
   - The Panin Group Financial Conglomerate has formulated Policies and Guidelines related to the implementation of Integrated Governance as follows:
     - Integrated Governance Guidelines
     - Integrated Risk Management Guidelines
     - Integrated Governance Committee Charter
     - Integrated Risk Management Committee Charter
     - Integrated Internal Audit Guidelines
     - Integrated Compliance Guidelines
     - Panin Group Conglomeration Charter
   - The Panin Group Financial Conglomerate has established supporting organs for the implementation of Integrated Governance as follows:
     - Integrated Governance Committee
     - Integrated Risk Management Committee
     - Integrated Risk Management Work Unit
     - Integrated Internal Audit Work Unit
     - Integrated Compliance Work Unit
2. The values that reflect the weaknesses of the Integrated Governance structure aspects of the Financial Conglomerate are as follows:
   - Differences in the lines of business and the horizontal structure of the conglomerate are obstacles faced in coordinating and synergizing among LJKs in the Financial Conglomeration. However, these obstacles can gradually be mitigated in line with the full support and commitment of PT Bank Panin Tbk as the Main Entity in the Panin Group Financial Conglomerate.
   - Functions related to the implementation of Integrated Governance, which include the Risk Management function, the Internal Audit function, and the Compliance function at LJK in the Panin Group Financial Conglomeration are still very limited. This will be a concern and for this reason improvements will continue to be made in order to fulfill and support the implementation of Integrated Governance.

B. Integrated Governance Process

1. The values that reflect the strength of the aspects of the Integrated Governance Process of the Financial Conglomerate are as follows:
   - Policies and Guidelines related to the implementation of Integrated Governance have been disseminated to all LJKs within the Panin Group Financial Conglomeration.
   - Commitment and support from the Main Entity to continuously monitor and ensure the implementation of Integrated Governance in every business activity carried out by LJK in the Financial Conglomerate is in accordance with the Panin Group Financial Conglomerate Integrated Governance Guidelines.
   - The Board of Directors and Board of Commissioners of the Main Entity continue to make improvements in the context of implementing Integrated Governance through a number of meetings, workshops, and joint outreach with all LJKs in the Panin Group Financial Conglomeration.
2. The values that reflect the weaknesses of the Integrated Governance process aspects of the Financial Conglomerates are as follows:
   - The effectiveness of the evaluation of the Guidelines has not been carried out completely. This is always a concern for all parties involved in the process of evaluating the Guidebook.
   - Standard governance and risk management indicators are different for each sector of the financial industry, so it will take time to harmonize the implementation of governance and risk management indicators on a group-wide basis.

Analisis	Analysis
C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: • Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama Semester II tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali. • Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama Semester II 2020, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dan hal-hal lain/*current issue*. • Pada Semester II 2020 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi: o Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan o Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan o Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan o Laporan Audit Intern Terintegrasi • Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi: o Laporan Profil Risiko Terintegrasi o Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi o Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi 2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: • Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna. • Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	**C. Integrated Governance Results** 1. Values that reflect the strength of the results of the Integrated Governance of the Financial Conglomerate are as follows: • In accordance with the provisions stipulated in the current regulations and provisions concerning Financial Conglomerates, the Board of Commissioners of the Main Entity and the Integrated Governance Committee are required to hold regular meetings at least 1 (one) time per semester. During the first semester of 2020, the Main Entity Board of Commissioners Meeting and Integrated Governance Committee Meetings were held 1 (one) time. • Discussions conducted at the Main Entity Board of Commissioners Meeting, namely regarding the evaluation of the discussion on the results of the Implementation of Integrated Governance at each LJK during the first semester of 2020, Activities of the Integrated Governance Committee and other matters/current issues. • In Semester II of 2020, the Main Entity has received a report on the implementation of Integrated Supervision as part of the Main Entity's monitoring function of members of the Financial Conglomeration, the report includes: o Risk Profile Report of each Financial Service Institution o Integrated Governance Report of each Financial Service Institution o Compliance Report of Each Financial Service Institution o Integrated Internal Audit Report • In line with compliance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations related to Financial Conglomerates, the Main Entity has compiled the reporting obligations to be reported to OJK, including: o Integrated Risk Profile Report o Integrated Governance Implementation Assessment Report o Integrated Capital Adequacy Report. 2. The values that reflect the weaknesses of the Integrated Governance results of the Financial Conglomerates are as follows: • Assessment of the adequacy of internal control at each LJK has not been carried out effectively and has not been completely documented. • The implementation of Integrated Governance, which includes the Risk Management function, Internal Audit function, and Compliance function at LJK in the Panin Group Financial Conglomeration is still very limited, this will be a concern and improvements will continue to be made to meet and support the implementation of Integrated Governance.

Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup

Structure of the Panin Group Financial Conglomerate.

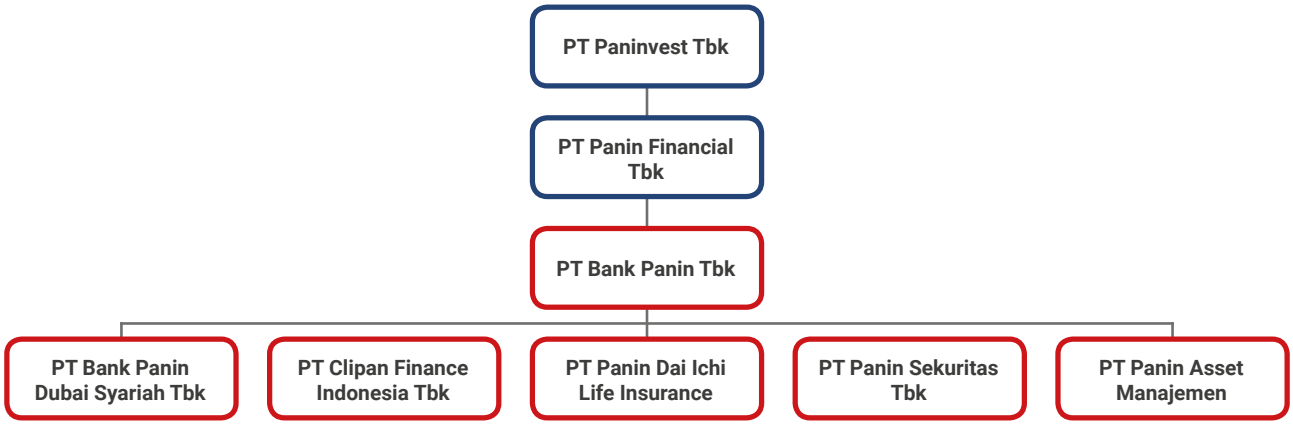

Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
Anggota LJK :
1. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
2. PT Clipan Finance Indonesia Tbk
3. PT Panin Dai Ichi Life Insurance
4. PT Panin Sekuritas Tbk
5. PT Panin Asset Manajemen

Integrated Governance is implemented in all Financial Service Institutions (LJK) within the Panin Group Financial Conglomeration, with a conglomerate structure as follows:

Main Entity : PT Bank Panin Tbk
Member of LJK :
1. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
2. PT Clipan Finance Indonesia Tbk
3. PT Panin Dai Ichi Life Insurance
4. PT Panin Sekuritas Tbk
5. PT Panin Asset Manajemen

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Organizational Structure

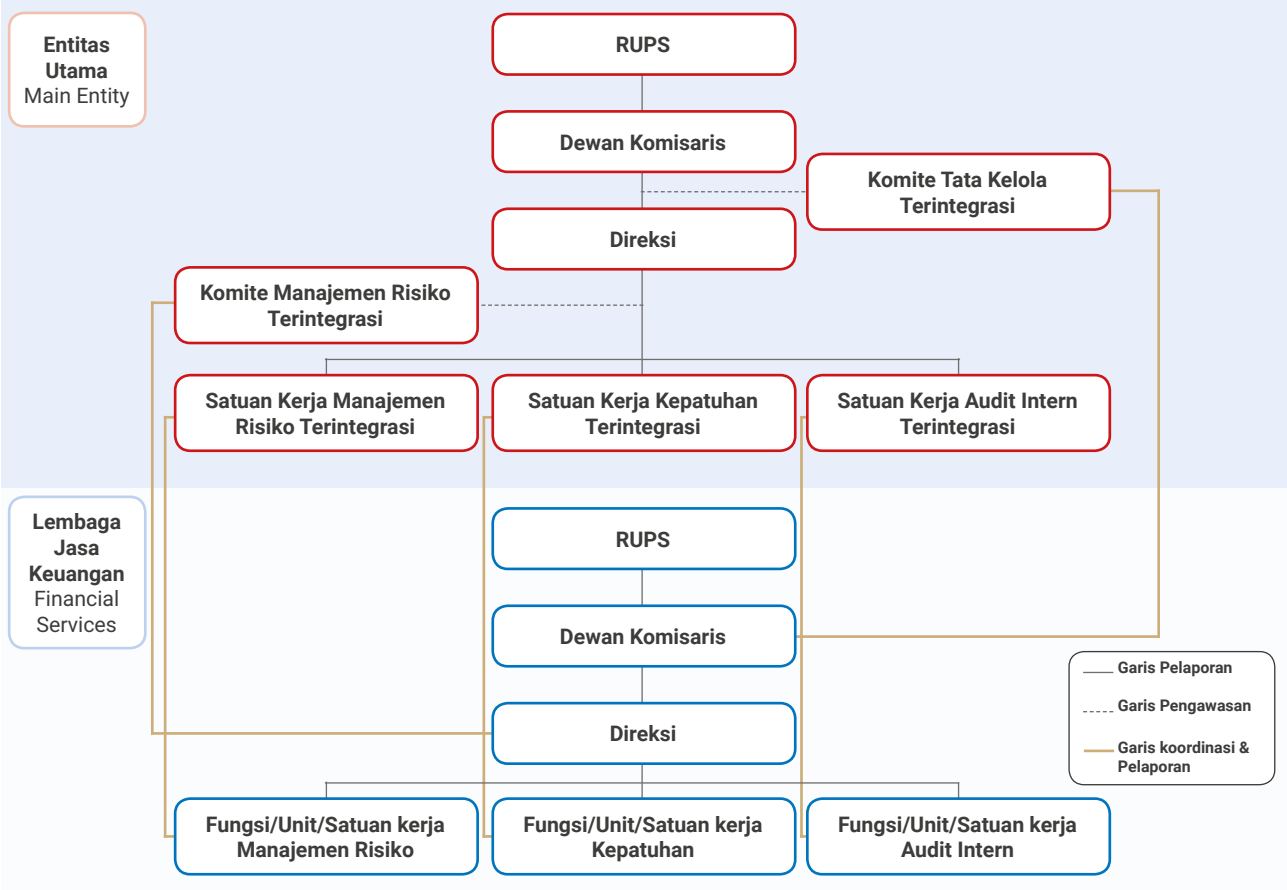

A. Direksi Entitas Utama

PT Bank Panin Tbk telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 11 (sebelas) orang, dan seluruhnya

A. Board of Directors of the Main Entity

PT Bank Panin Tbk has been approved by OJK as the Main Entity in the Panin Financial Conglomerate based on OJK Letter No. S-41/PB.33/2015. The Board of Directors of the Main Entity has already have the integrity, competence and financial reputation that meets OJK requirements. The Board of Directors of the Main Entity consist of 11 (eleven) persons,

telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK.

1. **Persyaratan**
   Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. **Tugas dan Tanggung Jawab**
   a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
      - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
      - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
      - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
   b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan
   Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Tugas dan Tanggung Jawab
   Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:
   a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

all of whom have met the integrity, competency and financial reputation requirements required by the OJK, and have passed the Fit and Proper Test from the OJK.

1. **Requirements**
   Possessing knowledge of the Main Entity and knowledge of LJK in the Panin Financial Conglomerate.
2. **Duties and Responsibilities**
   a. Ensuring the implementation of Integrated Governance in Financial Conglomerates, which at least includes:
      - Preparing Integrated Governance Guidelines;
      - Directing, monitoring and evaluating the implementation of the Integrated Governance Guidelines; and
      - Following up directions or advice from the Board of Commissioners of the Main Entity in order to improve the Integrated Governance Guidelines.
   b. Ensuring that audit findings and recommendations from the Integrated Internal Audit Work Unit (SKAIT), external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority and/or results of supervision by other authorities have been followed up by LJK in the Financial Conglomeration.

B. Board of Commissioners of the Main Entity

Members of the Main Entity's Board of Commissioners are professional individuals who have integrity, competence and good financial reputation. In addition, all members of the Board of Commissioners of the Main Entity do not have a criminal record, nor ever been declared bankrupt or found guilty of causing the Company to go bankrupt, and have never committed a disgraceful act or been convicted of an unlawful act in the financial sector. The entire Board of Commissioners of the Main Entity is also highly competent in their fields, having experience in finance and economics.

1. Requirements
   Possessing knowledge of the Main Entity and knowledge of LJK in the Panin Financial Conglomerate.
2. Duties and Responsibilities
   Supervise the implementation of Integrated Governance, which at least includes:
   a. Overseeing the implementation of Governance in each LJK to comply with the Integrated Governance Guidelines;

b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan

c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

b. Overseeing the implementation of duties and responsibilities of the Main Entity's Board of Directors, as well as providing direction or advice to the Main Entity's Board of Directors on the implementation of the Integrated Governance Guidelines; and

c. Evaluating the Integrated Governance Guidelines and directing them for improvement.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

The composition of the Main Entity's Board of Commissioners is:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen) Vice President Commissioner (Independent)

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Konglomerasi Keuangan Panin telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/KOM-EU/DIR-EU/20 tanggal 14 Oktober 2020.

1. Persyaratan

a. Susunan keanggotaan KTKT setidaknya terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak, sebagai anggota;
- Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK Anak.

b. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.

c. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan

C. Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee (KTKT) of the Panin Financial Conglomerate has been established based on the Decree of the Board of Directors No. 002/KOM-EU/DIR-EU/20 dated 14 October 2020.

1. Requirements

a. The composition of the KTKT membership consists of at least:

- An Independent Commissioner who serve as Chairman of a committee in the Main Entity, as chairman and concurrently as member;
- Independent Commissioner who represents and is appointed from Subsidiary, as member;
- An independent party, as member; and
- Member of the Sharia Supervisory Board from Subsidiary.

b. The number and composition of Independent Commissioners who are members of the KTKT are adjusted to the needs of the Panin Financial Conglomerate as well as the efficiency and effectiveness of the implementation of the KTKT tasks by taking into account at least the representation of each financial service sector of the Subsidiary LJK.

c. The membership of the Independent Commissioners at the KTKT can be in the form of permanent or non-permanent membership, according to the needs of the Panin Financial Conglomerate.

2. Duties and Responsibilities

a. Evaluating the implementation of Integrated Governance, at least through assessment of the adequacy of internal control and implementation of the integrated compliance function; and

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

b. Provide recommendations to the Board of Commissioners of the Main Entity to improve the Integrated Governance Guidelines.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, dimana Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut terdiri dari:

The Board of Commissioners of the Main Entity has formed the Integrated Governance Committee of the Panin Financial Conglomerate, where the members of the Integrated Governance Committee consist of:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi Position in the Integrated Governance Committee
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk Independent President Commissioner of PT Bank Panin Tbk	Ketua | Chairman
2	Lintang Nugroho	Wakil Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk. Independent Deputy Commissioner of PT Bank Panin Tbk.	Anggota | Member
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Independent Commissioner of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Anggota | Member
4	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai-Ichi Life Sharia Supervisory Board of PT Panin Dai-Ichi Life	
5	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life Independent Commissioner of PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota | Member
6	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota | Member
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk Independent Commissioner of PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota | Member
6	Peter Setiono	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk Independent Commissioner of PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota | Member
7	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management Commissioner of PT Panin Asset Management	Anggota | Member
9	Usep Ekadaya	Pihak Independen – PT Bank Panin Tbk Independent Party - PT Bank Panin Tbk	Anggota | Member
10	Bambang Setyoko	Pihak Independen - PT Bank Panin Tbk. Independent Party - PT Bank Panin Tbk.	

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2020 telah dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2021. Rapat tersebut membahas antara lain:

a. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
b. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
c. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
d. Hal-hal lain terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi

The Integrated Governance Committee Meeting for the position of December 2020 was held on January 29, 2021. The meeting discussed, among others:

a. Evaluation of the Implementation of the Integrated Compliance Work Unit
b. Evaluation of the Implementation of the Integrated Risk Management Work Unit
c. Evaluation of the Implementation of the Integrated Internal Audit Work Unit
d. Other matters related to the implementation of Integrated Governance

D. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

D. Integrated Risk Management Committee

The Integrated Risk Management Committee (KMRT) is a committee that provides recommendations to the Directors of the Main Entity in improving the implementation of Integrated Risk Management.

1. **Persyaratan**
   a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
      - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
      - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
      - Pejabat eksekutif.
   b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
   c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. **Tugas dan Tanggung Jawab**
   Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:
   a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
   b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2020 adalah:

1. **Requirements**
   a. The composition of the KMRT membership consists of at least:
      - Main Entity Compliance & Risk Management Director as chairman and concurrently a member of the KMRT;
      - Director who represents and is appointed from the Subsidiary Financial Services Institution in the Panin Financial Conglomerate; and
      - Executive officer.
   b. The number and composition of directors who are members of the KMRT are adjusted to the needs of the Panin Financial Conglomerate as well as the efficiency and effectiveness of the implementation of duties of the KMRT by taking into account, among others, the representation of each financial service sector of the Subsidiaries
   c. The number and nature of executive officer membership in the KMRT with the needs of each Financial Conglomerate.

2. **Duties and Responsibilities**
   Provide recommendations to the Board of Directors of the Main Entity, which at least includes:
   a. Formulation of Integrated Risk Management policies; and
   b. Improvement or refinement of the Integrated Risk Management policy based on the evaluation results of the implementation of the Integrated Risk Management framework.

In order to support the Main Entity's Board of Directors related to Integrated Risk Management, the Main Entity has formed a KMRT whose task is to provide recommendations to the Main Entity's Board of Directors regarding the implementation of Integrated Risk Management. KMRT members have been appointed with due regard to the representation of each LJK in the Panin Financial Conglomerate. The members of the Main Entity KMRT for the 2020 period are:

No	Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan Company
1	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Director	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Jahja Anwar	Direktur Director	Clipan Finance
3	Tjiang Jefry	Direktur Director	Panin Sekuritas
4	Naohide Noguchi	Direktur Director	Panin Dai-Ichi Life
5	Budi Prakoso	Direktur Director	Bank Panin Dubai Syariah
6	Rudiyanto	Direktur Director	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2020, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata cara pelaksanaan, koordinasi, kajian atas jenis-jenis risiko-risiko yang menjadi ketetapan penilaian masing-masing LJK. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. **Persyaratan**
   SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
2. **Tugas dan Tanggung Jawab**
   a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
   b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan),

Until the second semester of 2020, the Directors of the Main Entity and the LJK Directors in charge of the Risk Management Function of each LJK have held meetings with an agenda to discuss fundamentals on the implementation of integrated risk management and procedures for implementing, coordinating, studying the types of risks involved be the determination of the assessment of each LJK. The results of the risk profile assessment have also been regularly submitted by SKMRT.

E. Integrated Compliance Unit

The Board of Directors of the Main Entity has fulfilled the need for quality human resources as members of the Integrated Compliance Work Unit by taking into account the competencies, qualifications and experience of members of the Integrated Compliance Work Unit.

The Integrated Compliance Work Unit consists of personnel from the Compliance Bureau of the Main Entity and representatives of each LJK who oversees the compliance function and is chaired by the Main Entity Compliance Director. Each member who has been appointed is selected based on objective considerations in terms of competence, work experience, educational background and expertise/specialization.

The membership composition of the SKKT has been determined by the Board of Directors of the Main Entity by taking into account the quantity and quality of work that is capable of being carried out in order to carry out duties and responsibilities effectively.

1. **Requirements**
   SKKT is an independent work unit owned by the Main Entity
2. **Duties and Responsibilities**
   a. Monitor and evaluate the implementation of the compliance function at each LJK in the Financial Conglomerate
   b. Prepare and submit reports on the implementation of duties and responsibilities to the Compliance & Risk Management Director of the Main Entity (as the Director appointed to carry out the supervisory function of LJKs in the Panin Financial Conglomeration)

In accordance with the Panin Financial Conglomerate's Integrated Compliance Guidelines, the Integrated Compliance Work Unit is an independent Main Entity Work Unit and does not concurrently be a work/business or operational unit (there are no concurrent positions), where its members

dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO) di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing. Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

are not involved in operational activities. Members of the Integrated Compliance Work Unit are drawn from personnel from the Compliance Bureau (BCO) in the Main Entity and also representatives from LJK who are in charge of the compliance function in each LJK. The structure of the members of the Integrated Compliance Work Unit includes:

No	Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan Company
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan Head of Compliance Bureau	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

In addition, to facilitate the Main Entity in coordinating compliance with LJK members of the Financial Conglomeration, each LJK has appointed a person in charge of integrated compliance, namely:

No	Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan Company
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan Head of Compliance Bureau	Bank Panin Dubai Syariah
2	John Barni Manik	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Head of Compliance and Risk Management Unit	Panin Dai-ichi Life
3	Febry Pratama	Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Work Unit	Panin Sekuritas
4	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Head of Risk Management Work Unit	Panin Asset Management
5	Meyli Rita	Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Work Unit	Clipan Finance

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan Rapat SKKT untuk posisi Desember 2020. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

The Integrated Compliance Work Unit (SKKT) has held the SKKT Meeting for the position of December 2020. The results of the SKKT Meeting have been brought to the Integrated Governance Committee as evaluation material.

3. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Panin Group

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Tata Kelola Terintegrasi telah diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

3. Panin Group Integrated Governance Self-Assessment Report

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning Integrated Governance for Financial Conglomerates and Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates, Integrated Governance has been implemented in all Financial Services Institutions (LJK) which is in the Panin Group Financial Conglomerate.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group:

The following is the flow for the submission of the Panin Group Integrated Governance Self-Assessment Report:

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama
Compliance Unit of the Main Entity

- **Mengirimkan Kertas Kerja *Self-Assessment* kepada seluruh LJK**
- **Menyusun Kertas Kerja *Self-Assessment* untuk Entitas Utama**
- Submitting Self-Assessment Paper to all LJKs
- Prepare a Self-Assessment Working Paper for the Main Entity

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Panin Group
Integrated Compliance Working Unit Panin Group

- **Penanggungjawab Kepatuhan Terintegrasi masing-masing LJK menyusun Kertas Kerja *Self-Assessment* berdasarkan kondisi dari masing-masing LJK tersebut**
- **Mengirimkan Kertas Kerja *Self-Assessment* kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama**
- Person in charge in integrated compliance of each LJK prepare a Self-Assessment Working Paper based on the conditions of each LJK
- Submitting a Self-Assessment Working Paper to the Compliance Unit of the Main Entity

Hasil Akhir
Financial Result

- **Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama menerima Kertas Kerja *Self-Assessment* dari masing-masing LJK**
- **Melakukan Rapat Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi guna membahas hasil penilaian *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi**
- **Satker Kepatuhan Entitas Utama mengirimkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Panin Group kepada Regulator (OJK)**
- Compliance Unit of the Main Entity received Self-Assessment Paper from each LJK
- An integrated compliance work meeting to discuss the results of the integrated Self-Assessment governance assessment
- Compliance Unit of the Main Entity sending integrated Panin Group's governance report to the regulator The Financial Services Authority (FSA)

F. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/ bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. **Persyaratan**
   SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama
2. **Tugas dan Tanggung Jawab**
   a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
   b. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk

F. Integrated Internal Audit Work Unit

In accordance with the Guidelines for the Integrated Internal Audit of the Panin Financial Conglomerate, it is stipulated that the Integrated Internal Audit Work Unit is an independent Main Entity Work Unit and does not concurrently be a work/business or operational unit (there are no concurrent positions). The coordinator and members of the Integrated Internal Audit Work Unit are structurally also not concurrently with other positions as work units.

1. **Requirements**
   SKAIT is an independent work unit that must be owned by the Main Entity
2. **Duties and Responsibilities**
   a. Monitor the implementation of internal audits at each LJK in the Financial Conglomerate
   b. Submit the integrated internal audit report to the Main Entity Compliance & Risk Management Director (as the appointed Director to carry out the supervisory

melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan *monitoring* tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. **Persyaratan**
   a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

function of LJK in the Panin Financial Conglomerate) and the Main Entity's Board of Commissioners.

Members of the Integrated Internal Audit Work Unit are drawn from the PaninBank Internal Audit Unit as the Main Entity and also from the Internal Audit Function contained in each LJK member of the Panin Financial Conglomeration. Each member who has been appointed is selected based on objective considerations in terms of competence, work experience, educational background, certification, and expertise/specialization. Determination of the number of SKAIT members has been determined by the Board of Directors of the Main Entity by taking into account the quantity and quality of work that is capable of being carried out in order to carry out duties and responsibilities effectively.

The Integrated Internal Audit Work Unit monitors the implementation of internal audit at FSIs by monitoring the implementation of the audit plan and the realization of the audit plan, significant findings and monitoring the follow-ups submitted by the LJK internal audit to the Main Entity SKAI in the form of a semester report. The semi-annual reports are submitted by each LJK in the Panin Group Financial Conglomerate in accordance with the report format determined by the Main Entity. The discussion on the semester report is discussed at the monitoring and evaluation meeting conducted jointly by the Main Entity's SKAI and all LJK internal audits in each semester in the following month.

G. Integrated Risk Management Work Unit

The Main Entity has formed an Integrated Risk Management Work Unit and an Integrated Risk Management Committee in an effort to support the implementation of risk management in the Financial Conglomerate in accordance with OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014. The Integrated Risk Management Work Unit (SKMRT) is a Risk Management Work Unit in the Main Entity (cq. BMR) which acts as the coordinator of all Functions/Units/Work Units of LJK Risk Management in the Panin Financial Conglomeration, while the Integrated Risk Management Committee (KMRT) is a which provides recommendations to the Main Entity's Board of Directors in improving the implementation of Integrated Risk Management.

1. **Requirements**
   a. SKMRT is an independent work unit owned by the Main Entity

b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
   - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
   - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
   - Profil Risiko secara terintegrasi;
d. Melakukan *stress testing*;
e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
   - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen RisikoTerintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

b. SKMRT reports directly to the Main Entity's Compliance & Risk Management Director

2. Duties and Responsibilities

a. Providing input to the Board of Directors of the Main Entity, among others in the formulation of Integrated Risk Management policies;
b. Monitor the implementation of Integrated Risk Management policies including developing procedures and tools for identification, measurement, monitoring and control of risks;
c. Monitor the Risk of the Panin Financial Conglomerate based on the results of the assessment:
   - Risk Profile of each LJK in the Financial Conglomerate,
   - Risk Level of each Risk in an integrated manner,
   - Integrated Risk Profile;
d. Perform stress testing;
e. Carry out regular reviews to ensure:
   - The accuracy of the Risk assessment methodology;
   - Adequacy of management information system implementation; and
   - Accuracy of policies, procedures and determination of Risk limits
f. Reviewing proposed new business lines that are strategic and have a significant effect on Panin's Financial Conglomerate Risk exposure;
g. Provide information to KMRT on matters that need to be followed up on the results of the evaluation of the implementation of Integrated Risk Management;
h. Providing input to KMRT, in the framework of formulating and refining Integrated Risk Management policies;
i. Prepare and submit integrated Risk profile reports regularly to the Director of Compliance & Risk Management of the Main Entity and KMRT.

Based on the Integrated Risk Management Guidelines owned by the Panin Financial Conglomeration, the Main Entity forms an Integrated Risk Management Work Unit consisting of several personnel drawn from the Risk Management Bureau (BMR) of Bank Panin as the Main Entity and also representatives of LJK in charge of the Risk Management function.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan Company
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko Head of Risk Management Bureau	Entitas Utama Main Entity
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk Head of the Loan Portfolio & Integrated Risk Department	Entitas Utama Main Entity

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

In addition, to assist the Main Entity in coordinating integrated risk management with LJK members of the Financial Conglomerate, each LJK has appointed a person in charge regarding integrated risk management, namely:

No	Nama Name	Jabatan Position	Perusahaan Company
1	Agus Buntoro	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Head of Risk Management Work Unit	Clipan Finance
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Head of Risk Management Work Unit	Panin Sekuritas
4	Davin Septian Perdana	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Head of Risk Management Work Unit	Panin Dai-ichi Life
5	Gamma Mufti Jauhari	Pjs.Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Acting Head of Risk Management Unit	Bank Panin Dubai Syariah
6	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Head of Risk Management Work Unit	Panin Asset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan Januari 2020 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian agregat risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

SKMRT held a meeting with each LJK in January 2020 using data sourced from the Risk Profile Report. The meeting, among others, was to discuss and assess the risk aggregate of various LJK members of the Panin Financial Conglomerate.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif stratejik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik manajemen risiko dalam hal tata

Integrated Risk Management

In connection with the issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, the Bank has implemented Integrated Risk Management for the Panin Group Financial Conglomerates. This is also one of the strategic initiatives of the Risk Management Unit and is the focus of special attention of the Bank's management. This is considered important because the risk exposure that arises in the Panin Group may affect the Bank's business continuity, either directly or indirectly.

The risk management integration process is carried out by taking into account the different business characteristics of each Panin Group. The implementation of the risk management integration process includes, among others, the process of mentoring and aligning risk management practices

kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuh kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;

in terms of risk governance, risk management policies and procedures, risk management reporting, and enhancing a risk awareness culture. In an integrated manner, the Bank manages 10 (ten) types of risk, namely: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, strategic risk, reputation risk, legal risk, compliance risk, insurance risk and intragroup transaction risk.

Integrated risk management culminates in determining the amount of risk appetite or tolerance limits that can be taken by the Bank in determining a portfolio according to price risk that has been carefully considered and is reflected in the amount of capital managed to deal with risks, as well as supporting business development. Given the importance of risk management in the banking business, the Bank strives to implement an adaptive risk management framework that is easy to understand and implement by all levels. To support the effectiveness of risk management, the Bank also seeks to foster a risk culture at all levels, so that there is an awareness that risk management is essentially the responsibility of all levels.

The process of monitoring the implementation of risk management is carried out by the Risk Management Unit of each entity to be reported to the Risk Management Unit in the Main Entity. The process of monitoring and evaluating the risk exposure of members of the Panin Group Financial Conglomerate will also be reported through the Integrated Risk Management Committee (KMRT). KMRT consists of representatives from each member entity in the Financial Conglomerate. In this monitoring and evaluation process, the Committee focuses on the risk exposure of members of the Financial Conglomerate for the improvement of risk management processes in the future.

The implementation of Integrated Risk Management that has been carried out by the Panin Group Financial Conglomerate includes:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Main Entity on the Panin Group Financial Conglomerate;
2. Adequacy of Integrated Risk Management policies, procedures, and limits;
3. There is an adequate process for identification, measurement, monitoring, integrated risk control, and an Integrated Risk Management information system;

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

4. Comprehensive internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.

In terms of implementing Integrated Risk Management, the Bank has carried out:

1. Appointment of the Director in charge of the Risk Management function to become the Director in charge of the Integrated Risk Management function to carry out the implementation of Integrated Risk Management.
2. Establishment of an Integrated Risk Management Committee to ensure that the risk management framework provides adequate protection against all risks of the Main Entity and other entities in an integrated manner.
3. Adjustment of the organizational structure of the Risk Management Unit by adding an integrated risk management function to ensure that the risks faced in an integrated manner can be correctly identified, measured, monitored, controlled and reported through the application of an appropriate risk management framework.
4. Identification of the Main Entity and other entities that are members of the Panin Group Financial Conglomerate.
5. Formulation of Integrated Risk Management Guidelines for the implementation of Integrated Risk Management.
6. Compilation and submission of Integrated Risk Profile Reports.
7. Review the implementation of integrated risk management.
8. Compiling and submitting an Integrated Capital Adequacy Report.

Integrated Risk Profile Report

The Bank's Financial Conglomeration manages 10 (ten) types of risk in an integrated manner, including 8 (eight) types of risk that are already contained in the Bank's Risk Management Implementation plus the Intra-Group Transaction Risk (TIG) and Insurance Risk.

Intra-Group Transaction Policy

The Integrated Risk Management Framework explains that Intra Group Risk is the risk due to the dependence of an entity, either directly or indirectly, on another entity in a Financial Conglomerate in the context of fulfilling written and unwritten agreement obligations followed by a transfer of funds and/or not followed by a transfer of funds.

Risiko Transaksi Intra Grup

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Asuransi

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter di bawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Intra-Group Transaction Risk

The Panin Group Financial Conglomerate monitors the Intra-Group Transaction Risk to ensure that the Intra-Group Transactions carried out are in accordance with the principles of fairness, business practice and applicable regulations and have been well documented. Based on the results of the assessment, the Intra-Group Transaction Risk has an insignificant impact on the overall performance of the Financial Conglomerate.

Insurance Risk

The Panin Group Financial Conglomerate also manages Insurance Risk due to the existence of Members of Financial Services Institutions (LJK) engaged in insurance. The Panin Group Financial Conglomerate Insurance Risk is classified as Low to Moderate, which is the result of an assessment of Low Inherent Risk and an assessment of the Quality of the Implementation of Satisfactory Risk Management.

The Main Entity identifies the risks inherent in the Panin Financial Conglomerate business. Issues addressed in the implementation of the risk identification process include:

1. The Main Entity regularly identifies risks both to the risks inherent in the main entity's business and the risks of LJKs included in the Panin Financial Conglomerate.
2. The Main Entity has a methodology in implementing risk identification.
3. The risk identification process is carried out by analyzing the risk sources that are at least carried out on the risks from the products and activities of the Panin Financial Conglomerate, among others based on the experience of losses that have occurred.

Measurement of the risk of intra-group transactions is carried out at least by using the following parameters:

1. Composition of intra-group transactions within the Panin Financial Conglomerate
2. Documentation and transaction fairness
3. Other information.
4. Fulfillment of the arm's length principle in the overall intra-group transaction agreement
5. Impact of intra-group transactions on financial performance of FSIs.
6. Materiality of intra-group transactions that can affect the condition of the Financial Services Institution and the condition of the Financial Conglomerate.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portofolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini (*"as is" position*) dan posisi proyeksi yang akan dicapai (*"to be" position*) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Pemeringkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan "jumlah kerugian potensial", dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi

The Panin Financial Conglomerate formulates an Integrated Risk Management strategy according to the overall business strategy by taking into account the level of risk to be taken (Risk Appetite) and risk tolerance (Risk Tolerance). In determining the Risk Appetite, the Board of Directors ensures that the risk appetite taken is in accordance with the business strategy, risk profile and capital plan of the Panin Financial Conglomerate. The Risk Appetite that has been determined by the Board of Directors is always monitored and if there is an actual risk profile that passes the Risk Appetite that has been determined, the Board of Directors must take actions deemed necessary to bring the risk profile to be in the Panin Financial Conglomerate's Risk Appetite.

Risk tolerance is the maximum level and type of risk determined by the Financial Conglomerate as a description of the level of risk to be taken (Risk Appetite) after considering the integrated business strategy, risk profile and capital plan as well as the ability of the Panin Financial Conglomerate to take Risk Capacity). Risk tolerance is determined per risk type and the risk of the Panin Financial Conglomerate as a whole as well as the Risk Appetite, through the following approach:

1. Measuring the position of various risk types in the Panin Financial Conglomerate's current portfolio ("as is" position) and the projected position to be achieved ("to be" position) in the future (one year ahead), for Exchange Rate Risk. , Interest Rates, Liquidity, Credit, Operational, and Other Risks, as well as an internal Credit Rating System using the "quick and dirty" method for Credit Risk.
2. After the risk exposure for the Panin Financial Conglomerate has been measured and quantified with a certain measurement model and formula, the final measurement and calculation results must be reviewed.
3. If the Board of Directors agrees that the amount of risk taken and is currently planned to be applied or projected for the coming year, the Panin Financial Conglomerate can use the "potential loss amount", and the actual loss suffered determines the maximum loss that the Panin Financial Conglomerate can receive.
4. When the results of measuring and calculating risk exposure using certain models and formulas are deemed too low or too high, the amount of risk tolerance to be taken by the Panin Financial Conglomerate can be increased or decreased by reducing the relevant exposure to the risks of the Panin Financial Conglomerate. The calculation and

Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

measurement results can be adjusted according to the income or equity of the Panin Financial Conglomerate.

Berdasarkan posisi Desember 2020, Perseroan telah melakukan *Self-Assessment* profil risiko secara terintegrasi dengan kesimpulan bahwa profil risiko konglomerasi keuangan berada pada peringkat 2 (*Low to Moderat Risk*) dan memiliki kualitas manajemen risiko yang memadai sesuai dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi.

Based on the position in December 2020, the Company has carried out an integrated risk profile Self-Assessment with the conclusion that the risk profile of the financial conglomerate is ranked 2 (Low to Moderate Risk) and has adequate risk management quality in accordance with the complexity of the business at hand.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi. Dari penilaian Risiko Inheren dan penilaian KPMR Terintegrasi akan diperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Terintegrasi.

The Integrated Risk Profile assessment process is an assessment of 10 (ten) types of risk based on Inherent Risk and Quality of Integrated Risk Management Implementation. The ten types of risk are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Intragroup Transaction Risk and Insurance Risk. From the Inherent Risk assessment and the Integrated KPMR assessment, an Integrated Risk Profile Rating will be obtained.

Profil Risiko **Risk Profile**	**Posisi Desember 2020** Position of December 2020		
	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	**Peringkat Kualitas Manajemen Risiko** Risk Management Quality Rating	**Peringkat Tingkat Risiko** Risk Level Rating
Risiko Kredit | Credit Risk	Moderate	Fair	**Moderate**
Risiko Pasar | Market Risk	Low to Moderat	Satisfactory	**Low to Moderat**
Risiko Likuiditas | Liquidity Risk	Low to Moderat	Satisfactory	**Low to Moderat**
Risiko Operasional | Operational Risk	Moderat	Satisfactory	**Low to Moderat**
Risiko Hukum | Legal Risk	Moderat	Satisfactory	**Low to Moderat**
Risiko Reputasi | Reputation Risk	Low to Moderat	Satisfactory	**Low to Moderat**
Risiko Stratejik | Strategic Risk	Low to Moderate	Satisfactory	**Low to Moderate**
Risiko Kepatuhan | Compliance Risk	Low to Moderate	Satisfactory	**Low to Moderate**
Risiko Intra-Grup | Intra-Group Risk	Low to Moderate	Satisfactory	**Low to Moderate**
Risiko Asuransi | Insurance Risk	Low	Satisfactory	**Low**
Peringkat Komposit | Composite Rating	Low to Moderat	Satisfactory	**Low to Moderat**

Uraian Singkat mengenai Pelaksanaan Penilaian Risiko Teintegrasi oleh Biro Manajemen Risiko (SKMRT)
Brief Description of the Implementation of Integrated Risk Assessment by the Risk Management Bureau (SKMRT)

Penilaian Profil Risiko pada masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggunakan metode perhitungan kuantitatif dan penilaian kualitatif dengan perhitungan dan penilaian secara terintegrasi oleh PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama namun beberapa Sasaran Penilaian telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Assessment of the Risk Profile of each member of the Financial Services Institution (LJK) is carried out using quantitative calculation methods and qualitative assessments with calculations and assessments carried out in an integrated manner by PT Bank Panin Tbk as the Main Entity. However, some of the Assessment Targets have been adjusted to the conditions of each member of the Financial Services Institution (LJK).

Analisis Analysis

Secara umum Konglomerasi Keuangan Panin Group telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

In general, the Panin Group Financial Conglomerate has implemented Integrated Risk Management properly and effectively in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.

PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Panin Tbk tahun 2020. Seluruh Manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

CLOSING

Thus we convey the preparation of the Annual Governance Report and the Annual Integrated Governance Report of PT Bank Panin, Tbk for fiscal year 2020. All PaninBank Management hereby states that in carrying out their business activities, they have implemented the principles of good corporate governance.

In conducting its business activities, PaninBank always refers to the laws and regulations applicable to the Company. This report is non-binding but can be adapted to the needs and to support existing laws and regulations. If deemed necessary, this report can be revised and adjusted to the needs and changes that occur.

Manajemen Risiko

Risk Management

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Implementasi Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan Bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Bank terus berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam mengelola manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi meningkatkan *four eyes principle* dan transparansi dalam proses manajemen risiko. Bank juga senantiasa mengkaji dan menyempurnakan setiap kebijakan dan prosedur yang membentuk efektivitas strategi manajemen risiko sejalan dengan perkembangan bisnis Bank yang semakin kompleks.

Direksi menentukan strategi, kebijakan, kerangka manajemen risiko dan *risk appetite* yang sesuai dengan bisnis Bank. Istilah "*Tone From the Top*" sangat relevan karena kepemimpinan Direksi yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko ditambah dengan sosialisasi yang baik akan diikuti oleh seluruh jenjang organisasi.

Dalam menjalankan aktivitas terkait pengelolaan risiko, Direksi dibantu oleh komite-komite dan satuan kerja. Komite Manajemen Risiko (KMR) bertanggung jawab dalam evaluasi penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dan penetapan *Risk Appetite* Bank. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan mayoritas Direksi dan beberapa pejabat eksekutif yang terkait.

Selain Komite Manajemen Risiko, terdapat pula komite di tingkat eksekutif yang mengelola risiko secara spesifik seperti Assets & Liabilities Committee (ALCO) terkait risiko pasar dan risiko likuiditas dan Komite Kredit Direksi (KKD) terkait risiko kredit. Di level pelaksana, Direksi dibantu Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern dan unit-unit lainnya yang secara sinergi mengelola risiko Bank sehingga rencana bisnis dapat tercapai

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE

Implementation of Risk Management aims to protect the Bank from losses that may arise as a result of its various activities as well as to maintain risk level aligned with the Bank's business strategy and growth. Hence, the Bank maintains the balance between risk and benefit in order to generate long-term sustainable value growth for shareholders.

The Bank continually strives to conduct regular monitoring of the risk level surfaced including the entire risk management process based on the application of good corporate governance principles.

In running its management risk, a corporate governance structure is required which functions to improve the four-eyes principle and transparency in the risk management process. The Bank also constantly reviews and refines each policy and procedure that shapes the effective risk management strategies aligned with the Bank's business development which is getting more complex.

The Board of Directors determines the strategy, policies, risk management framework, and risk appetite in accordance with the Bank's business. The term "Tone From the Top" is very relevant because the leadership of the Board of Directors is in accordance with risk management principles coupled with good socialization which will be followed by all levels of the organization.

In carrying out activities relating to risk management, the Board of Directors is assisted by committees and work units. The Risk Management Committee (KMR) is responsible for evaluating the overall implementation of risk management and determining the Bank's Risk Appetite. The Risk Management Committee is chaired by the President Director and consists of the majority of the Board of Directors and several related executive officers.

Apart from Risk Management Committee, there are also some committees at the executive level that manage specific risks, such as the Assets & Liabilities Committee (ALCO) relating to market risk and liquidity risk and the Credit Committee of the Board of Directors (KKD) relating to credit risk. At the executive level, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Unit, Compliance Work Unit, Internal Audit Unit and other units which synergistically manage the Bank's risks so as the business plans can be achieved according to

sesuai target. Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional (*risk taking unit*) dan terhadap Satuan Kerja Audit Intern.

Dewan Komisaris juga merupakan bagian dari keseluruhan Struktur dan Tata Kelola Manajemen Risiko disesuaikan dengan kewenangannya. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) dalam melaksanakan tugas pengawasannya terkait implementasi manajemen risiko di PaninBank.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan anggota konglomerasi grup Panin. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan secara independen oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Terkait dengan limit-limit risiko, secara umum Bank telah menetapkan *Risk Appetite dan Risk Tolerance* per jenis risiko, dimana hal tersebut menjadi acuan dalam menetapkan limit risiko yang lebih detail dan tersebar di masing-masing satuan kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Bisnis unit mengajukan usulan limit kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk dianalisa dan dihitung potensi risikonya secara *bankwide* untuk kemudian direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk diputuskan. Mekanisme pemantauan limit dan eskalasi kasus apabila terjadi pelampauan limit termasuk proses persetujuannya diatur dalam suatu Kebijakan.

Sebagaimana konsep *Three Lines of Defense/Three Lines Model,* Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan *risk oversight*, memantau tingkat risiko yang terjadi dan potensi risiko ke depan dan melaporkannya kepada Komite Manajemen Risiko atau Direksi. Laporan-laporan dari satuan kerja bisnis dan support di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang dilakukan secara *self-assessment* divalidasi kewajarannya melalui data-data dan informasi secara keseluruhan dan hasil validasi dikomunikasikan kembali untuk mendapatkan pandangan yang sama dan menentukan langkah-langkah mitigasi apabila diperlukan.

targets. Risk Management Unit works independently from the business and operational work units (risk-taking unit) and the Internal Audit Work Unit.

The Board of Commissioners is also part of the entire Risk Management Structure and Governance tailored to its authority. The Board of Commissioners is helped by the Risk Monitoring Committee (KPR) in performing its supervisory duties relating to the risk management implementation at PaninBank.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Risk Management Policy is determined by the Board of Directors and Board of Commissioners and disseminated to all levels of the organization at the Head Office, Branch Offices, and members of the Panin Group conglomerate. During daily operations, the Bank has prepared an Operational Guidelines for each work unit, in which the formulation is according to the Risk Management Policy that has been set.

Evaluation of Risk Management implementation in each work unit, both at the Head Office and at Branch Offices, is performed independently by the Internal Audit Unit.

With regard to risk limits, in general, the Bank has established a Risk Appetite and Risk Tolerance per type of risk as a reference in determining a more detailed and dispersed risk limit in each work unit, both at the Head Office and Branch Offices. The business unit proposes a limit proposal to the Risk Management Unit for analysis and the potential risk is calculated on a bank-wide basis henceforth recommended to the Risk Management Committee for getting the decision. The limit monitoring mechanism and case escalation in the event of a limit exceeding occurs including its approval process are regulated in a Policy.

Based on the Three Lines of Defense/Three Lines Model, concept, the Risk Management Unit conducts risk oversight, monitor the level of risk that occurs and future potential risks, as well as report them to the Risk Management Committee or the Board of Directors. Reports from business and support work units at the Head Office and Branch Offices are prepared on a self-assessment basis in which its fairness are validated through data and information as a whole and the validation results are communicated to get the same views and determine mitigation measures if necessary.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Panin senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain dengan mengacu pada:

a. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
b. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
c. Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
d. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Kecukupan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum.
e. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
f. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
g. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
h. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
i. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengedalian terhadap Perusahan Anak.
j. Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.
k. Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
l. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan atas POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
m. Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

BASIC IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

In implementing risk management, PaninBank is always compliant and obedient to the regulations and legislation in force in Indonesia, among others by referring to:

a. OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
b. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates
c. OJK Regulation No. 26/POJK.03/2015 dated 11 December 2015 concerning the Minimum Capital Adequacy for Integrated Financial Conglomerates.
d. OJK Regulation No. 42/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Adequacy Obligations to Fulfill the Liquidity Coverage Ratio for Commercial Banks.
e. OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning Assessment of Commercial Bank Soundness Levels.
f. OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016 concerning the Minimum Capital Adequacy for Commercial Banks, which is refined by OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning Amendments to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy for Commercial Banks.
g. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks.
h. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
i. OJK Regulation No. 38/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Conducting Control of Subsidiary Companies.
j. OJK Regulation No. 50/POJK.03/2017 dated July 17, 2017, concerning the Obligation of Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks.
k. Bank Indonesia Regulation No. 20/4/PBI/2018 dated July 16, 2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units.
l. OJK Regulation No.13/POJK.03/2020 dated March 24, 2020 concerning Amendments to POJK No.38/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
m. OJK Regulation No.45/POJK.03/2020 dated October 14, 2020 concerning Financial Conglomerates.

n. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
o. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
p. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
q. Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
r. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
s. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
t. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
u. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
v. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in Banking Book*) bagi Bank Umum.
w. Surat Edaran OJK No. 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

FOKUS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah menetapkan sejumlah area yang menjadi fokus penerapan manajemen risiko, antara lain:

a) Peningkatan Tata Kelola yang baik menjadi dasar dalam penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
b) PaninBank senantiasa menjalankan proses kegiatan bisnis dengan berpegang pada prinsip kehatian-hatian dengan menerapkan kaidah manajemen risiko dan mematuhi peraturan yang berlaku.
c) Menerapkan kebijakan-kebijakan yang jelas dari Direksi memungkinkan untuk mendukung pengelolaan risiko kredit hingga ke level Kantor Cabang agar senantiasa berjalan dengan baik dan dapat dimonitor di Kantor Pusat.

n. Bank Indonesia Circular No. 9/31/DPNP dated December 12, 2007 concerning Guideline for The Use of Internal Model in The Calculation of Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks by Taking Into Account Market Risk.
o. OJK Circular No. 14/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
p. OJK Circular No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
q. OJK Circular No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
r. OJK Circular No. 38/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016 concerning Guidelines for Using Standard Method in Calculating the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks by Taking into account Market Risk.
s. OJK Circular No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
t. OJK Circular No. 43/SEOJK.03/2017 dated July 19, 2017 concerning Prudential Principles and Reports in the Framework of Consolidation of Risk Management for Banks conducting Control of Subsidiary Companies.
u. OJK Circular No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Assessment of Soundness of Commercial Banks.
v. OJK Circular No. 12/SEOJK.03/2018 dated August 21, 2018 concerning Application of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book for Commercial Banks.
w. OJK Circular No. 06/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using the Standard Approach for Commercial Banks.

FOCUS IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN 2020

In 2020, the Bank has determined the program and focus on risk management implementation, as follows:

a) Improved Good Governance as the basis toward a better risk management implementation.
b) PaninBank run the business activity processes by adhering to the principle of prudence through the implementation of risk management principles and comply with applicable regulations.
c) Implement clear policies from the Board of Directors allows to support credit risk management until to the Branch Office level thus it continues to run well and can be monitored at the Head Office.

d) Kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan risiko inheren meningkat terutama pada risiko kredit dan risiko operasional. Oleh sebab itu, PaninBank telah berupaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk memitigasi peningkatan risiko inheren tersebut.
e) Sejalan dengan peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 maka PaninBank mengeluarkan kebijakan untuk merespons hal tersebut dengan mengidentifikasi debitur-debitur yang terdampak COVID-19 dan melakukan analisa yang komprehensif sebelum mengambil langkah mitigasi.
f) Bank melakukan pemantauan secara ketat terhadap debitur-debitur yang kreditnya direstrukturisasi karena dampak COVID-19.
g) Penerapan PSBB dan kebijakan *work from home* mempengaruhi kegiatan operasional Bank terutama pada saat awal pandemi sehingga secara otomatis meningkatkan potensi risiko operasional PaninBank.
h) *Assessment* terhadap risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan sistem dan *human error* termasuk potensi terjadinya *fraud* dilakukan secara lebih intensif dan melibatkan Satuan Kerja Audit Intern.
i) PaninBank secara berkala melakukan *stress test* untuk mengukur dampak perubahan faktor makroekonomi terhadap kondisi permodalan dan laba perusahaan berdasarkan skenario yang ditetapkan.
j) Bank mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD (*Probability of Default*), LGD (*Lost Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*) yang digunakan sebagai komponen perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mengacu pada PSAK 71 yang telah diimplementasikan pada bulan Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 55.
k) Meningkatkan penerapan efektivitas manajemen risiko melalui pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menanamkan budaya sadar risiko baik melalui komunikasi secara rutin ataupun dengan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan pada semua lini unit kerja dan cabang di PaninBank yang dilaksanakan secara virtual.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan Manajemen Risiko di PaninBank melibatkan seluruh jajaran di organisasi, mulai dari Direksi, Pejabat Eksekutif sampai ke seluruh karyawan. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan konsep *Three Lines Models/Three Lines of Defense.*

d) COVID-19 pandemic situation in 2020 has caused the Bank's inherent risk increased, in particular with credit risk and operational risk. Therefore, PaninBank has made an effort to improve the Quality of Risk Management Implementation to mitigate the increase in inherent risk.

e) In line with OJK regulation No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Coronavirus Disease 2019 Spread, PaninBank issued some policies to respond to such situation by identifying debtors who affected by COVID-19 and performed a comprehensive analysis before taking mitigation steps.

f) The Bank has closely monitored the debtors who's their credit was restructured due to the impact of COVID-19.

g) The implementation of PSBB and work from home policy affected the Bank's operational activities, particularly at the beginning of the pandemic thereby automatically increased PaninBank's potential operational risk.
h) Operational risk assessment due to system failure and human error including potential fraud has been done more intensively and involves the Internal Audit Unit.

i) PaninBank regularly performs stress tests to measure the impact of changes in macroeconomic factors toward the company's equity condition and profits based on the predetermined scenario.
j) The Bank develops risk parameter modeling such as PD (Probability of Default), LGD (Lost Given Default) and EAD (Exposure at Default) which are used as calculation components of Allowance for Impairment Losses (CKPN) as defined by PSAK 71 which was implemented in January 2020 as a substitute for PSAK 55.

k) Improved the implementation of risk management effectiveness through the development of Human Resources (HR) quality as well as instill risk awareness culture either through regular communication or by providing training for all employees at all lines of work units and branches in PaninBank which held virtually

PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT

Risk Management at PaninBank involves all levels in the organization, starting from the Board of Directors, Executive Officers to all employees. Such implementation is practiced in accordance with the concept of Three Lines Models/Three Lines of Defense.

Tata Kelola Perusahaan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite
Corporate Governance BOC, BOD, Committes

First Line Roles	*Second Line Roles*	*Third Line Roles*
• Unit yang melakukan kegiatan bisnis/operasional harian, Melakukan proses identifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko yang ada di areanya masing-masing • Units that carry out daily business/ operational activities identify, measure, monitor and control risks in their respective areas	• *Risk Oversight* • Menetapkan standar pengelolaan risiko • Verifikasi dan validasi atas potensi risiko hasil identifikasi dan pengukuran *First Line* • Memberikan nasihat pengelolaan risiko • Risk Oversight • Establish risk management standards • Verification and validation of potential risks identified and measured by First Line • Provide risk management advice	• Mengevaluasi/memastikan efektivitas Kerangka Manajemen Risiko dan pengelolaan risiko • Evaluating/ensuring the effectiveness of the Risk Management Framework and risk management
Seluruh unit (Risk Owner) All Units (Risk Owner)	**Risk Management, Compliance** Risk Management, Compliance	**Audit Intern** Internal Audit

Dalam Kerangka Manajemen Risiko, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan rencana bisnis dan limit-limit risiko yang ada. Kerangka Manajemen Risiko meliputi:

1. Tata kelola perusahaan dan Struktur Organisasi Manajemen Risiko.
2. Rencana bisnis yang selaras dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.
3. Proses Manajemen Risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Infrastruktur Manajemen Risiko yang mencakup kecukupan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada ketiga *Lines of Defense*, kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit, serta dukungan Teknologi dan data yang memadai.
5. Budaya Risiko yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh karyawan PaninBank.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, PaninBank telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

In Risk Management Framework, the risk is managed in an integrated manner through alignment of existing business plans and risk limits. The Risk Management Framework are composed of:

1. Corporate governance and Risk Management Organizational Structure.
2. A business plan which aligned with the Bank's Risk Appetite and Risk Tolerance.
3. Risk Management process which includes identification, measurement, monitoring and risk control.
4. Risk Management Infrastructure, which consists of the adequacy of quality and quantity of Human Resources in the Three Lines of Defense, adequacy of Policies, Procedures and Limits, as well as adequate technology and data support.
5. Risk Culture that is comprehended and performed by all PaninBank employees.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

In accordance with Bank Indonesia regulation No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Managers and Officers of Commercial Banks, PaninBank has implemented HR development program to accommodate all employees who are required to obtain Risk Management Certifications held by the Banking Professional Certification Institutions and Risk Management Certification Agency.

Bank mengikutsertakan pengurus bank serta karyawan yang terkait dengan pengelolaan risiko dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai persyaratan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tahun 2020, Bank tidak dapat melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko, dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

Bank juga memberikan seminar penyegaran (*Refreshment*) bagi Pejabat/Karyawan Bank pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masa berlaku sertifikatnya akan habis sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pada Pasal 13 PBI No. 11/19/PBI/2009, telah diatur hal-hal mengenai program pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikat SMR, antara lain:

a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1;
b. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 2;
c. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3;
d. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 4; dan
e. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 5.

Bank selama tahun 2020, telah melakukan *Refreshment* sebanyak 492 peserta, yang dilaksanakan secara *offline* sebanyak 250 peserta (Januari 2020) dan secara *online* sebanyak 242 peserta (Agustus 2020), dengan topiknya, yaitu:

- *Economic Outlook 2020, Strategic Risk Management*
- *Digital Banking & Corporate Banking, Credit Risk Management, Sustainable Banking & Risk Management*
- *Strategic Risk* (Ekonomi Makro dan Manajemen Risiko).

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

PaninBank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara baik dan efektif sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

The Bank involves all managers and employees of the Bank whom their tasked are relating to risk management to join the Risk Management Certification program in accordance with Bank Indonesia and OJK requirements. However, in 2020, the Bank was not able to carry out the Risk Management Certification program, due to COVID-19 pandemic.

In addition, the Company also provides refreshment seminars for Bank Officers/Employees who already hold a Risk Management Certification whose validity period will expire in accordance with Bank Indonesia regulations. Article 13 PBI No. 11/19/PBI/2009, has regulated matters regarding the SMR Certificate Refreshment program, among others:

a. 1 (one) time in 4 (four) years for level 1;
b. 1 (one) time in 4 (four) years for level 2;
c. 1 (one) time in 2 (two) years for level 3;
d. 1 (one) time in 2 (two) years for level 4; and
e. 1 (one) time in 2 (two) years for level 5.

During 2020, the Bank has conducted a Refreshment of 492 participants, which was carried out offline as many as 250 participants (January 2020) and through online as many as 242 participants (August 2020), with the topics, namely:

- Economic Outlook 2020, Strategic Risk Management
- Digital Banking & Corporate Banking, Credit Risk Management, Sustainable Banking & Risk Management
- Strategic Risk (Macroeconomics and Risk Management).

INTEGRATED RISK MANAGEMENT

PaninBank has implemented Integrated Risk Management properly and effectively as a manifestation of the Bank's compliance with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates and OJK Circular No. 14/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.

Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Panin
Panin Group Financial Conglomerate Structure

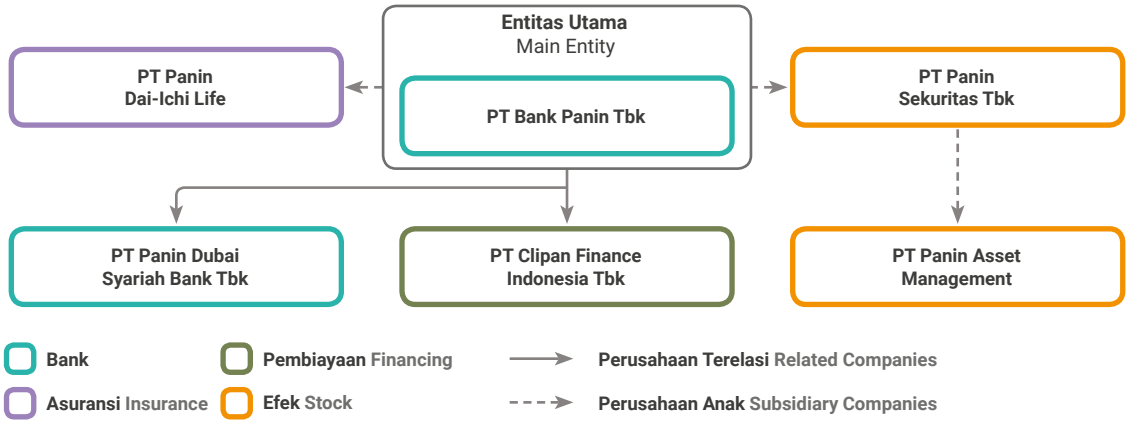

Di tahun 2020, Struktur Konglomerasi Keuangan (KK) Grup Panin tidak berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh KK Panin mencakup:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari entitas utama terhadap KK Panin;
b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
d. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, PaninBank sebagai entitas utama telah:

a. Memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
b. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
c. Menyesuaikan Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mencakup fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
d. Melaporkan entitas utama dan anggota Konglomerasi Keuangan Panin kepada OJK.
e. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan Panin.
f. Menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara periodik.
g. Menyampaikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi secara periodik.

Sejalan dengan fungsi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), sepanjang tahun 2020, KMRT telah melakukan rapat secara berkala di antaranya membahas mengenai:

a. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
b. Pengkajian ulang/*review* terhadap *range* terintegrasi di seluruh Risiko
c. Limit Risiko Terintegrasi
d. Isu-isu lainnya yang membutuhkan persetujuan dari KMRT

PENGUNGKAPAN ESKPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2020, Bank telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai jenis eksposur kredit dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut ini adalah profil risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko, antara lain:

In 2020, the structure of Panin Group Financial Conglomerate (KK) did not change from previous year.

Implementation of Integrated Risk Management that has been carried out by KK Panin consists of:

a. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Main Entity towards the Panin Group Financial Conglomerate;
b. Adequacy of Integrated Risk Management Policies, Procedures, and Limits;
c. Adequacy of Integrated Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes, as well as the Integrated Risk Management Information System; and
d. Comprehensive internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.

In terms of Integrated Risk Management implementation, PaninBank as the main entity has conducted:

a. Has a Director in charge of Integrated Risk Management function.
b. Established an Integrated Risk Management Committee.
c. Adjusted the Risk Management Work Unit Organizational Structure which includes Integrated Risk Management function.
d. Report the main entities and members of the Panin Financial Conglomerate to OJK.
e. Socialized and established coordination with Panin Financial Conglomerate members.
f. Submission of periodic Integrated Risk Profile Reports.
g. Submission of periodic Integrated Capital Adequacy Reports.

In line with the function of Integrated Risk Management Committee (KMRT), throughout 2020, the KMRT held regular meetings which discussed the following topics:

a. Integrated Risk Profile Report
b. Review of the integrated range across all Risks
c. Integrated Risk Limit
d. Other issues that require approval from the KMRT

DISCLOSURE OF RISK EXPOSURES AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

During 2020, the Bank has conducted an in-depth studies of various types of credit exposure in its business activities. The following are a number of risk profiles confronted by the Bank and the application of risk management for each risk, among others:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul dan berdampak pada kerugian finansial Bank karena nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran kembali kepada Bank. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian pada aktiva produktif atau kerugian yang lebih besar lagi yang akan berdampak negatif bagi posisi keuangan Bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Proses pengelolaan kredit PaninBank diawali dengan menentukan target pasar dan dilanjutkan dengan melakukan *risk assessment* dan *monitoring* atas pemberian kredit. Dalam menyalurkan kreditnya, PaninBank senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. PaninBank senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

- Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi eksposur dan penerapan manajemen risiko kredit
- Di tingkat Direksi, tugas pengelolaan dan pengendalian risiko kredit termasuk dalam tugas Komite Manajemen Risiko. Selain itu, terdapat Direktur Manajemen Risiko yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan independen terhadap *risk taking unit* (bisnis dan operasional).
- Secara transaksional, kewenangan untuk memutuskan pemberian fasilitas kredit dimiliki oleh Komite Kredit yang diatur secara berjenjang sesuai dengan tingkat risikonya, besaran fasilitas, dan kompetensi pengambil keputusan.
- Divisi Bisnis dibagi menjadi Kredit Korporasi, Kredit Komersil, SMB (*Small Medium Bisnis) & Mortgage*, Kredit kepada *Financial Institution* & BUMN, dan Kredit *unsecured* (kartu kredit dan *personal loan*). Masing-masing merupakan unit yang mengajukan kredit dan melakukan analisa kelayakan calon debitur.
- Divisi Credit Restructure & Recovery menangani debitur-debitur yang memerlukan penyelamatan/ restrukturisasi maupun debitur yang telah masuk dalam kategori macet.
- Sebagaimana penerapan *Three Lines of Defense*, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan risiko kredit.

1. Credit Risk

Credit risk is a risk that can possess an impact on the Bank's financial losses and arise because customers fail to meet their payment obligations to the Bank. Failure to manage this risk may result in a loss on earning assets or even greater losses which will harm the Bank's financial position.

Risk Management Efforts

PaninBank's credit management process begins with the determination of the target market and continues by conducting a risk assessment and monitoring of credit disbursement. In channeling its credit, PaninBank always upholds the principle of prudence by placing a credit analysis which conducted by independent business units and credit risk units. PaninBank is always guided by the Credit Policy to manage the end-to-end credit risk.

Credit Risk Management Organization

- Risk Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in evaluating exposure and applying credit risk management
- At the Board of Directors level, the duties of managing and controlling credit risk are included in the duties of the Risk Management Committee. In addition, there is a Risk Management Director who oversees the Risk Management Work Unit (SKMR) and works independently from risk-taking units (business and operations).
- In transactional, the authority to decide the provision of credit facilities is held by the Credit Committee which is arranged in stages according to the level of risk, the amount of facilities, and competence of the decision-maker.
- Business Division is divided into Corporate Loans, Commercial Loans, SMB (Small Medium Business) & Mortgages, Loans to Financial Institutions & BUMN, and Unsecured Loans (credit cards and personal loans). Each is a unit that applies for credit and analyzes the feasibility of prospective debtors.
- Credit Restructure & Recovery Division handles debtors who need help/restructuring as well as debtors who have fallen into the bad credit (Loss) category.
- Along with the implementation of Three Lines of Defense, the Risk Management Unit and Internal Audit Unit perform their respective functions in managing credit risk.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Manajemen Portofolio melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan menentukan limit antara lain untuk sektor industri, valuta asing, jenis fasilitas kredit tertentu serta eksposur perseorangan dan grup usaha. Seiring dengan perkembangan rating *database*, teknologi, sumber daya manusia, tingkat kompleksitas Bank, pasar serta regulasi yang ada, manajemen portofolio Bank secara aktif berfungsi untuk mengoptimalisasi alokasi modal Bank pada suatu tingkat risiko/*risk appetite* dan *risk tolerance* yang dapat diterima Bank.

Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Bank mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, yang mensyaratkan seluruh bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Untuk keperluan internal, Bank menggunakan pengukuran berdasarkan *internal rating* yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan kredit.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penetapan sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen untuk penerapan proses manajemen risiko kredit secara efektif yang meliputi:

a) Evaluasi proses administrasi perkreditan.
b) Penilaian terhadap akurasi penerapan internal *risk rating* atau penggunaan alat pemantauan lainnya.
c) Efektivitas pelaksanaan unit kerja dan petugas Bank yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.

Selain itu, Bank juga menerapkan sistem deteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi bermasalah dan melakukan upaya penanganan secara dini dan sesegera mungkin guna meminimalisir dampak kredit bermasalah terhadap keseluruhan portofolio.

Tagihan yang Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Tagihan yang jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* adalah aset keuangan yang memiliki nilai signifikan secara individual dan terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai individual terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Credit Concentration Risk Management Policy

Portfolio Management manages credit concentration risk by determining limits, among others, the industrial sector, foreign exchange, certain types of credit facilities as well as individual and business group exposures. Along with the development of rating database, technology, human resources, the Bank's complexity level, the market as well as existing regulations, the Bank's portfolio management actively functions to optimize the Bank's capital allocation at an acceptable risk appetite and risk tolerance level of the Bank.

Credit Risk Assessment and Control

The Bank estimates credit risk using the standard method according to OJK Circular Letter No.42/SEOJK.03/2016 concerning Guidelines for the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk by Using Standardized Approach, which requires all banks to perform RWA calculations for credit risk using the Standard Approach. For internal purposes, the Bank using measurements based on the internal rating which is used as a tool in the credit decision-making process.

Credit risk control is conducted through the application of an independent internal credit review system to implement an effective credit risk management process which includes:

a) Evaluation of the credit administration process.
b) Assessment of accuracy in applying the internal risk rating or using other monitoring tools.
c) The effectiveness of business units and Bank officers who monitor individual credit quality.

In addition, the Bank also implements an early detection system for non-performing or potentially becoming non-performing loans as well as make an early and immediate response as an attempts in order to minimize the impact of non-performing loans on the entire portfolio.

Payables Due and Impairment

Payables due represent all payables which past due more than 90 days, both for principal and/or interest payments. Meanwhile, impaired payables are financial assets with significant value at an individual level and with objective evidence that an individual's impairment occurs after the initial recognition of such financial assets.

Pendekatan yang Digunakan untuk Pembentukan CKPN

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Istilah CKPN dalam penerapan PSAK 50/55 disesuaikan menjadi *impairment*.

Evaluasi penurunan nilai dikelompokkan dalam dua jenis, yakni secara individual dan kolektif. Pendekatan perhitungan individual *impairment* merupakan selisih antara nilai tunai atas estimasi *cash flow* yang didiskonto berdasarkan suku bunga efektif (*Effective Interest Rate – EIR*) dengan *amortized cost* pada saat terjadi *impairment*.

Sementara itu, pendekatan perhitungan *collective impairment* secara statistik menggunakan parameter *Probability of Default* (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan *Migration Analysis* dan *Roll Rates*. Kemudian, *Loss Given Default* (LGD), yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendapatkan persentase LGD yang wajar, maka diperlukan analisis data historis.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Mulai 1 Januari 2020, perhitungan pencadangan Bank mengacu pada PSAK 71. Di mana dalam PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrument keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*) yang digunakan sebagai komponen perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Staging Criteria

PSAK 71 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan Aset Keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (*stage 1, stage 2* dan *stage 3)* dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

The Approach Used for the Formation of CKPN

Allowance for Impairment Losses is an allowance established if the gross carrying value of financial assets after impairment is less than the initial carrying value. The term of CKPN as referred to PSAK 50/55 has been adjusted as impairment.

The impairment evaluation is categorized into two types, i.e. on an individual and collective basis. The approaches to calculate individual impairment is by finding the difference between the cash value of estimated discounted cash flow based on the Effective Interest Rate (EIR) under the amortized cost during such impairment.

Meanwhile, the approach to calculating collective impairment on a statistic basis is by using the Probability of Default (PD) parameter, namely the probability of debtor's failure to meet their obligations, as measured by the Migration Analysis and Roll Rates approach. Further, Loss Given Default (LGD) is the level of loss resulting from the debtor's failure to meet their obligations. To gain a reasonable percentage of LGD, then it is necessary to analyze the historical data.

Measurement of Expected Credit Loss

Starting on January 1, 2020, the Bank's allowance calculation refers to PSAK 71, which introduces the expected credit loss method in measuring financial instrument losses due to impairment of financial instruments.

If at the reporting date, credit risk for financial instruments is not increased significantly since initial recognition, then the entity shall measure the allowance for losses for these financial instruments at 12-month expected losses. An entity shall measure the allowance for losses on a financial instrument at the amount of expected credit losses against its lifetime if the credit risk on such financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank develops risk parameter modeling such as PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default), and EAD (Exposure at Default) which are used as components of calculating expected credit losses.

Staging Criteria

PSAK 71 requires entities to classify Financial Assets into three stages of impairment (stage 1, stage 2, and stage 3) by determining whether there is a significant increase in credit risk.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (*stage 1*) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (*stage 2*) serta aset keuangan yang mengalami penurunan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran (*stage 3*).

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Bank membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal. Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR).

Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar (memiliki tunggakan lebih dari 90 hari) atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Forward-looking Information

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan saat ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi *forward looking* dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali debitur Bank.

The Bank measures the allowance at 12-month expected credit losses for financial assets that have low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifetime credit losses for financial assets that experience a significant increase in credit risk (stage 2) as well as financial assets that have experienced a sharp decline followed by a history of late payment (stage 3).

At each reporting date, the Bank assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly (SICR) since initial recognition. In conducting this assessment, the Bank compares the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition. In general, financial assets with arrears of 30 days or more and have not been impaired are always considered to have experienced a significant increase in credit risk (SICR).

Financial asset is only considered impaired and suffered a lifetime expected credit losses, if there is any observable objective evidence of impairment, including, among other, default (more than 90 days in arrears) or significant financial difficulties.

Forward-looking Information

A thriving economic environment is a key determinant of the Bank's customer capacity to meet its obligations when matured. It is a basic principle of PSAK 71 that potential future losses must depend not only on the current economic health but it should take into account possible changes in the economic environment. For example, if the Bank anticipates a sharp slowdown in the world economy, then the Bank should create more reserves today to absorb credit losses that are likely to occur soon.

To capture the effects of changes on the economic environment, the PD model is used to calculate expected credit losses, by including forward-looking information in the form of estimated economic variable values which is likely to have an impact on the repayment ability of the Bank debtor.

Penerapan Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit, Bank mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018.

Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II mengacu pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui OJK.

Tujuan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR risiko kredit hanya ditujukan untuk jenis tagihan kepada pemerintah negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional tertentu, bank dan korporasi.

Counterparty Credit Risk timbul dari jenis transaksi derivatif *Over the Counter* (OTC) dan transaksi repo/ *reverse repo* baik atas posisi *trading book* maupun *banking book*. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) adalah dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Adapun penentuan credit limit terkait *counterparty credit risk* disesuaikan dengan kebutuhan *counterparty* dan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite*) Bank serta ketentuan yang ada antara lain POJK No.32/ POJK.03/2018 dan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penyediaan Dana besar bagi Bank Umum.

Mitigasi Risiko Kredit

Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat secara efektif dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah.

Penilaian agunan dilakukan oleh penilai independen, kecuali di lokasi agunan tersebut tidak terdapat penilai independen, maka akan dilakukan oleh staf penilai internal yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit. Untuk

Implementation of Credit risk Assessment under Standard Approach

In calculating Credit Risk-Weighted Assets (RWA) for credit risk, the Bank refers to OJK Circular Letter No.42/SEOJK.03/2016 concerning Guidelines for Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk by Adopting the Standard Approach, OJK Circular Letter No.48/SEOJK.03/2017 and OJK Circular Letter No.11/ SEOJK.03/2018.

RWA calculation for Credit Risk using Basel II Standard Approach refers to the ranking results issued by rating agencies recognized by the OJK as stipulated in OJK Circular Letter No. 37/SEOJK.03/2016 concerning Rating Agencies and Ratings recognized by OJK.

The purpose of using the rating in the calculation of credit risk RWA risk is only intended for types of payables to governments of other countries, public sector entities, multilateral development banks, and certain international institutions, banks, and corporations.

Counterparty Credit Risk arises from Over the Counter (OTC) derivative transactions and repo/reverse repo transactions for both trading book and banking book positions. Credit Risk Calculation to calculate KPMM for exposures posing credit risk due to counterparty credit risk is using the Standard Approach.

The decision of credit limits related to counterparty credit risk is adjusted to the needs of counterparties and the risk appetite of the Bank as well as prevailing regulations including POJK No. 32/POJK.03/2018 and POJK No. 38/ POJK.03/2019 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks.

Credit Risk Mitigation

The main type of collateral accepted for credit risk mitigation is solid collaterals in the form of cash or land and buildings. This type of collateral has relatively high liquidity value and/or permanent existence (not moving) thus it can be effectively disbursed when the debtor/group debtor's loan falls into the non-performing category.

A collateral appraisal is performed by an independent assessor. If there is no independent assessor at the collateral location, it will be conducted by an internal assessor who is not involved in the credit granting

mengontrol fisik agunan yang dijaminkan oleh debitur ke PaninBank, maka harus dilakukan peninjauan agunan secara berkala.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dianalisis pada saat pengolahan kredit dan kelayakan pemberian kredit tersebut diputuskan dengan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi Analisa risiko kredit.

Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama. Selain itu untuk memitigasi risiko kredit yang mungkin terjadi, portofolio kredit PaninBank telah terdiversifikasi dengan baik, secara kategori kredit maupun industri/sektor ekonomi.

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan pengukuran risiko kredit secara portofolio dan juga secara individu untuk debitur-debitur besar. *Stress test* risiko kredit juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui dampak risiko kredit pada *worst case scenario*. Pengukuran risiko penting dilakukan agar dapat terpantau bahwa bisnis berjalan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.

Pendelegasian wewenang pemutusan kredit mulai dari Komite Kredit Direksi, Direktur Bidang dan Komite Kredit Cabang. Limit kewenangan mempertimbangkan tingkat risiko, cakupan bisnis dan kompetensi dari SDM yang ditunjuk sebagai pemutus kredit. Kewenangan ini dikaji secara berkala sesuai dengan eksposur risiko dan juga perkembangan kondisi eksternal.

PaninBank juga menggunakan agunan sebagai mitigasi eksposur risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang telah memenuhi syarat. Tetapi agunan bukan sebagai dasar tunggal dan utama dalam pengambilan keputusan kredit, namun tetap berdasarkan analisa yang komprehensif. Tujuan dari mitigasi risiko kredit mengunakan agunan adalah sebagai berikut:

- Mengurangi/Membatasi risiko kerugian pada saat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Bank.
- Melindungi risiko yang tidak terduga dan melekat pada suatu eksposur kredit di masa yang akan datang.

process. To control the physical collateral guaranteed by the debtor to PaninBank, a collateral review must be conducted periodically.

The main parties who provide collateral/guarantees are analyzed at the time of credit processing. The feasibility of credit provision is decided by applying the Four Eyes Principle, whereby the credit provisions are determined by two independent parties, namely the business development side and the credit risk analysis side.

The use of credit mitigation techniques focuses on collateral which included in the main types of collateral. In addition, to mitigate possible credit risks, PaninBank's credit portfolio has been diversified, both in the category of credit and industrial/economic sector.

The Risk Management Unit monitors and measures credit risk in a portfolio as well as individually for large debtors. Credit risk stress tests are also conducted regularly to determine the impact of credit risk on the worst-case scenario. It is important to measure risk so that it can be monitored that the business is operating following the Bank's risk appetite and risk tolerance.

Delegation of credit approval authority, starting from the Credit Committee of the Board of Directors, Director of Division, and Branch Credit Committee. The limit of authority takes into account the level of risk, business scope, and competence of the HR appointed as the credit decision-maker. This authority is reviewed periodically in accordance with risk exposure as well as external conditions development.

PaninBank also uses collateral to mitigate credit risk exposure and risk mitigation policies to determine the type of collateral that has met the requirements. However, collateral is not the sole and main basis for credit decision-making but is still based on a comprehensive analysis. The objectives of mitigating credit risk using collateral are as follows:

- Reduce/Limit the risk of loss when the debtor is unable to meet its obligations to the Bank.
- Protect the risk of unexpected and attached to a credit exposure in the future

2. Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar tidak hanya terbatas pada pengelolaan risiko, namun juga pengawasan atas semua risiko yang dihadapi Bank akibat dari pergerakan faktor pasar (suku bunga dan nilai tukar). Risiko pasar timbul dari dua area yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Area pertama, aktivitas *trading* di *treasury* (risiko *Trading Book*) dan area kedua adalah aktivitas dalam *balance sheet* Bank (khususnya risiko suku bunga pada *Banking Book*).

Upaya Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit bisnis dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office*, middle office, dan back office. Organisasi Manajemen Risiko Pasar di tingkat *second line of depend* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko yang terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book.*

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di PaninBank menganut prinsip Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis (*three lines of defense)* yang terdiri dari:

1) Pertahanan pertama *(first line of defense)* dilakukan oleh pejabat/karyawan satuan kerja treasury dah dan operasional treasuri terkait lainnya
2) Pertahanan kedua (*Second line of defense)* dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional
3) Pertahanan ketiga (*third line of defense)* dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Risiko pasar *trading book* merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Sedangkan risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga, nilai tukar dan harga opsi atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas PaninBank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal PaninBank (*economic value perpective*).

Pengelolaan risiko pasar *banking book* PaninBank dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dimonitor tiap minggu dan bulan oleh unit kerja terkait.

2. Market Risk

Market Risk Management is not only limited to risk management but is also related to the supervision of all risks faced by the Bank as a result of movements in market factors (interest rates and exchange rates). Market risks arise from two different areas and are managed separately. The first area is trading activities in treasury (Trading Book risk) and the second area is activities in the Bank's balance sheet (particularly interest rate risk in the Banking Book).

Risk Management Efforts

Market risk management is carried out by business units through the application of segregation of duties principle, namely by separating functions and responsibilities which consist of front office, middle office, and back office. Market Risk Management Organization comprise of two parts, namely Market Risk Management - Trading Book and Market Risk Management - Banking Book.

Market risk management framework and governance in PaninBank adheres to the principle of the Three Lines of Defense Approach which consists of the following:

1) First line of defense is performed by treasury work unit officers/employees and other relevant treasury operations
2) Second line of defense is held by Risk Management Work Units and Compliance Work Units that works independently from business and operational work units
3) Third line of defense is conducted by Internal Audit Work Unit (SKAI)

Trading book market risk represents the risk arising from potential losses due to trading book activities, such as changes in interest rates and exchange rates (including derivative instruments). While banking book market risk is a risk that arises due to changes in interest rates, exchange rates and option prices on banking book activities which potentially affecting PaninBank's profitability (earning perspective) and the economic value of PaninBank's capital (economic value perspective).

PaninBank's banking book market risk management is conducted by optimizing the balance sheet structure to obtain maximum returns in accordance with an acceptable level of risk. In addition, the Bank also sets the limits which refers to internal policies and prevailing legal requirements that are monitored on a weekly and monthly basis by the relevant business units.

Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan aktif serupa dengan organisasi risiko kredit yaitu melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, namun ditambah juga dengan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

Sebagai *first line* terutamanya adalah Direktorat Treasury berperan sebagai *risk taking unit* yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada aktivitas hariannya dan memastikan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merupakan unit independen yang bertanggung jawab pada penetapan kebijakan, proses pengelolaan dan kontrol risiko pasar. Tugas dan tanggung jawab SKMR antara lain melakukan *limit monitoring* dan melakukan eskalasi pelampauan limit apabila terjadi sesuai prosedur yang ditetapkan.

Faktor-Faktor Risiko

Faktor risiko didefinisikan sebagai variabel yang menyebabkan perubahan nilai dari instrumen keuangan atau sebuah portofolio dari *instrument* keuangan, baik di *on* atau *off-balance sheet*. Faktor risiko pasar utama yang termasuk di dalam sistem pengukuran risiko adalah nilai tukar, suku bunga, ekuitas dan komoditas. Faktor-faktor risiko tersebut dapat timbul secara terpisah ataupun merupakan kombinasi dari beberapa faktor risiko, apabila suatu produk ataupun aktivitas bank memungkinkan memiliki beberapa faktor risiko untuk dikelola. Pengelolaan risiko pasar pada perbankan di Indonesia hanya terbatas pada faktor risiko suku bunga dan nilai tukar.

Portofolio Risiko Pasar

Bank memiliki eksposur pada *Trading Book* dan *Banking Book*. Eksposur *Trading Book* berasal dari kegiatan perdagangan valuta asing dan surat-surat Berharga yang didorong dari pemenuhan kebutuhan nasabah. Penilaian laba rugi posisi *Trading Book* dilakukan melalui valuasi (*marked to market*) secara harian sesuai harga pasar.

Semua posisi di luar *trading book* adalah posisi *banking book*, termasuk transaksi yang dimaksudkan untuk mengelola likuiditas, cadangan wajib, dan upaya mengoptimalkan pendapatan melalui pemeliharaan posisi jangka panjang.

Market Risk Management Organization

The active supervisory roles of the Board of Commissioners and Board of Directors are similar to those of credit risk organization, namely through the Risk Monitoring Committee and the Risk Management Committee, coupled with the Asset and Liability Committee (ALCO) as well.

As the first line, the Treasury Directorate acts as a risk-taking unit that identifies, measures, monitors, and controls risks in its daily activities and ensures that the established risk management framework can be implemented properly.

The Risk Management Unit (SKMR) is an independent unit that is responsible for determining policies, managing processes, and controlling market risks. The duties and responsibilities of SKMR include, among others, limit monitoring and escalating limit exceedances if it occurs according to the established procedures.

Risk Factors

Risk factors are defined as variables that cause changes in the value of a financial instrument or a portfolio of financial instruments, either on or off-balance sheets. The main market risk factors covered in the risk measurement system are exchange rates, interest rates, equity, and commodities. These risk factors may arise separately or might be a combination of several risk factors if a product or bank activity allows it to have several risk factors to be managed. Market risk management for banking in Indonesia is limited to interest rate and exchange rate risk factors.

Market Risk Portfolio

The Bank has exposure to the Trading Book and Banking Book. Trading Book exposure originates from the trading activities in foreign exchange and securities, which are driven by the fulfillment of customer needs. Profit and loss assessment of Trading Book positions is carried out through daily valuations (marked to market) according to market prices.

All positions outside the trading book are banking book positions, including transactions that intends to manage liquidity, legal reserves, and efforts to optimize revenue through maintenance of long-term positions.

Eksposur nilai tukar berasal yang berasal dari posisi *trading book* dan *banking book* berfokus pada posisi USD/IDR. Posisi Devisa Neto dikelola pada tingkat di bawah batas maksimum ketentuan regulator yaitu 20% dari modal.

Eksposur suku bunga berasal dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar. Eksposur risiko suku bunga pada *banking book* yang diukur dengan parameter ΔEVE dikelola pada tingkat di bawah batas maksimum ketentuan Regulator yaitu 15% dari *Tier* 1.

Seluruh aktiva dan pasiva dalam trading book dicatat dalam akun keuangan berdasarkan nilai wajar yang konsisten dengan Standar Akuntansi. Posisi dalam *trading book* di *marked-to-market* (MTM) secara konsisten dan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Manajemen Portofolio *Trading* dan *Banking Book*

Pelaksanaan pengelolaan risiko pasar atas aktivitas *trading treasury* secara lebih efektif dan efisien serta mendukung bisnis PaninBank di tahun 2020, maka Bank melakukan pemantauan terhadap limit-limit *treasury* serta melakukan kaji ulang secara berkala. Limit-limit *trading treasury* yang telah ditetapkan oleh manajemen antara lain *exposure limit, stop loss limit, cut loss limit, VaR limit* dan *PV01 limit.*

Dalam menunjang bisnis Bank, Bank juga telah memiliki sistem yaitu Guava System yang terintegrasi antara *front office, middle office* dan *back office* sehingga semakin optimal dalam pengukuran dan pemantauan limit *treasury* secara rutin dan berkala melalui sistem tersebut.

Pengukuran Risiko Pasar

Perhitungan kebutuhan modal risiko pasar untuk keperluan regulator menggunakan Pendekatan Standar.

Namun, secara internal Bank mengembangkan pengukuruan risiko lain diantaranya *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Monte Carlo, Loss Limit, Sensitivity Analysis* menggunakan pendekatan *PV01* dan *stress test.*

Backtesting juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa model VaR yang dipilih masih relevan dengan kondisi aktual.

Exchange rate exposure comes from the trading book and banking book positions which focused on USD/IDR positions. The Net Open Position is managed at a level below the maximum regulatory limit, namely 20% of capital.

Interest rate exposure originates from the trading book and banking book position which caused by changes in market interest rates. Interest rate risk exposure on the banking book as measured by the ΔEVE parameter is managed at a level below the maximum limit of the Regulator's provisions, which is 15% of Tier 1.

All assets and liabilities in the trading book are recorded in financial accounts based on fair value consistent with Accounting Standards. The trading book positions are marked-to-market (MTM) is consistent and refers to prevailing financial accounting standards.

Portfolio Management of Trading and Banking Book

More effective and efficient implementation of market risk management for treasury trading activities as well as in order to support PaninBank's business in 2020, then the Bank monitors treasury limits and conducts periodic reviews. Treasury trading limits that have been set by the management include the exposure limit, stop loss limit, cut loss limit, VaR limit, and PV01 limit.

In supporting the Bank's business, the Bank also has a system, namely the Guava System, which is integrated between the front office, middle office, and back-office so that it is more optimal in measuring and monitoring treasury limits on a regular and regular basis through the system.

Market Risk Measurement

The calculation of market risk capital requirements for regulators uses the Standardized Approach.

However, internally, the Bank has formulated other risk measures among others Value at Risk (VaR) with the Monte Carlo approach, Loss Limit, Sensitivity Analysis using the PV01 approach, and stress test.

Backtesting is also performed periodically to ensure that the selected VaR model is still relevant to the actual conditions.

Risiko Nilai Tukar

Secara umum Bank tidak terpapar risiko nilai tukar secara signifikan. Hal ini terlihat dari Posisi Devisa Neto atau NOP Bank sepanjang tahun 2020. NOP akhir hari tidak pernah melampaui limit internal Bank (limit 15% dari modal) maupun ketentuan Bank Indonesia (20% dari modal).

Dalam mengantisipasi potensi kerugian akibat perubahan pasar untuk risiko nilai tukar, Bank menggunakan perhitungan *Value at Risk* (VaR) sehingga potensial kerugian dapat diperkirakan dalam keadaan pasar normal. Sedangkan risiko suku bunga dalam *trading book* seperti potensi kerugiannya diukur dengan menggunakan PV01 dan VaR.

Risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik *trading book* maupun *banking book* diukur dengan *stress testing* secara berkala dalam rangka mengantisipasi gejolak pasar yang berubah secara signifikan. Dengan begitu, Bank dapat mengantisipasi dampak dari gejolak tersebut. Profil risiko pasar terkait risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik trading book maupun *banking book* sepanjang tahun 2020 terpantau *low* dan *low to moderate.*

Berikut grafik Posisi Devisa Neto (*Net Open Position*) dibandingkan dengan Modal Bank sepanjang tahun 2020:

Exchange Rate Risk

In general, the Bank is not exposed to significant foreign exchange rate risk. This can be seen from the Bank's Net Open Position or NOP in 2020. The end-of-day NOP never exceeds the Bank's internal limit (limit 15% of capital) or Bank Indonesia regulations (20% of capital).

In anticipating potential losses arising due to market changes for exchange rate risk, the Bank uses the Value at Risk (VaR) calculation hence potential losses can be estimated under normal market conditions. Meanwhile, interest rate risk in the trading book as the potential loss is measured by using PV01 and VaR.

Exchange rate risk and interest rate risk, both in the trading book and banking book, are measured by regular stress testing to anticipate market volatility that changes significantly. So that, the Bank can anticipate the turmoil impact. Market risk profile relating to exchange rate risk and interest rate risk both in the trading book and banking book throughout 2020 was monitored to be low and low to moderate.

The following is the chart of Net Open Position compared to Bank's Capital throughout 2020:

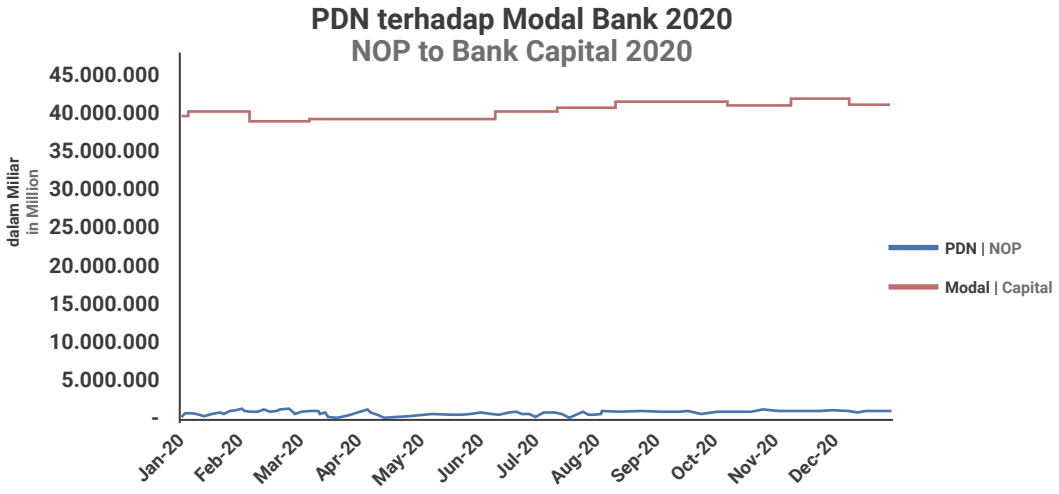

Grafik Pengukuran Risiko Nilai Tukar dengan Menggunakan *Value at Risk* Tahun 2020
Chart of Foreign Exchange Risk Measurement Using Value at Risk in 2020

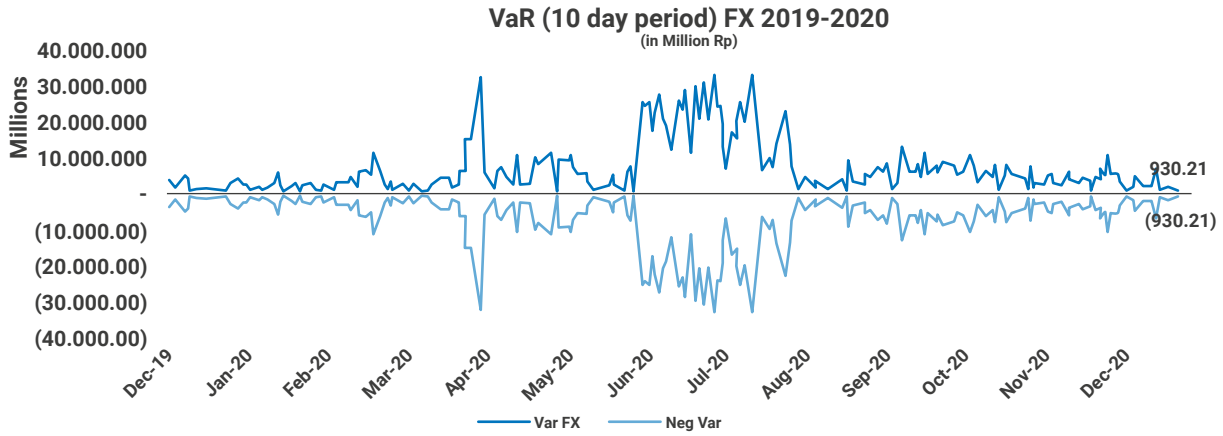

Bank juga melakukan backtesting guna memantau efektivitas hasil pengukuran risiko nilai tukar yaitu estimasi potensial kerugian dengan menggunakan *Value at Risk* (VaR) terhadap kerugian yang terjadi dalam satu hari.

Berikut ini adalah grafik hasil backtesting VaR untuk nilai tukar sepanjang tahun 2020:

The Bank also performs backtesting to monitor the effectiveness of the exchange rate risk measurement results, namely the estimation of potential losses using Value at Risk (VaR) against losses that occur in one day.

The following is a chart of the VaR backtesting results for exchange rates throughout 2020:

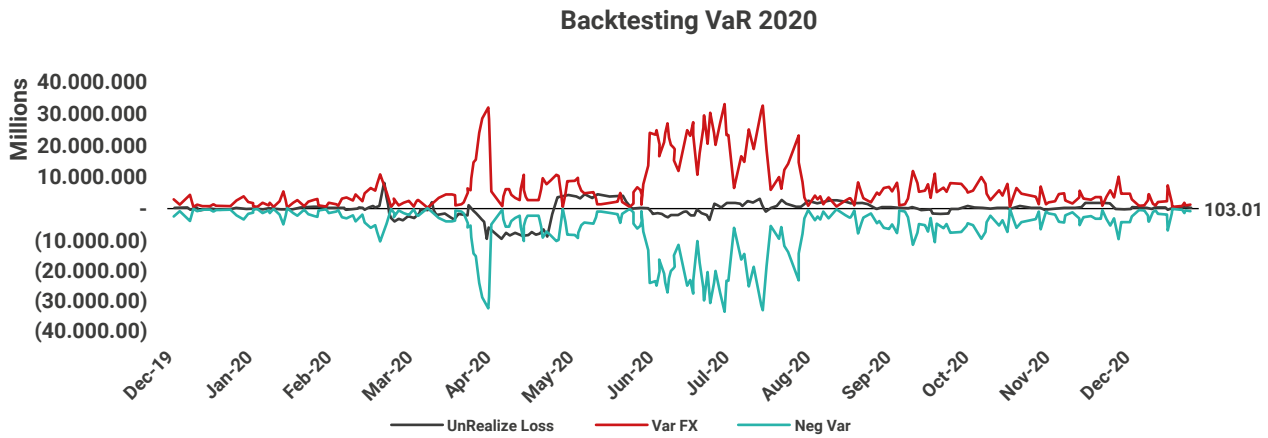

Risiko Suku Bunga

Bank juga menghitung risiko dari suku bunga yang diukur dari total RSA (*Rate Sensitive Assets*) dan RSL (*Rate Sensitive Liabilities*) dibagi dengan setiap *time bucket*. Apabila terlihat pada grafik terjadi *gap* positif untuk jangka pendek (<1 bulan), artinya pada *time bucket* <1 bulan apabila suku bunga turun, maka Bank tidak akan mengalami kerugian tetapi pendapatan bunga Bank akan berkurang.

Interest Rate Risk

The Bank also calculates the risk of interest rates as measured by totalling RSA (Rate Sensitive Assets) and RSL (Rate Sensitive Liabilities), later the results are divided by each time bucket. If the graph shows a positive gap for the short term (<1 month), it shall mean that during time bucket<1 month if interest rates decrease, then the Bank will not experience a loss but the Bank's interest income will decrease.

Berikut ini adalah *Repricing Gap* Profile Bank hingga akhir tahun 2020:

The following is the Bank's Repricing Gap Profile until the end of 2020:

31-Dec-2020

Rp Juta/ Rp Million **Aset**	Jumlah / Subtotal	< 3 bulan *3 month or less*	3 - 6 bulan *3 - 6 months or less*	*6 - 12 bulan* *6 -12 months or less*	*1-2 tahun* *1 - 2 years or less*	*2-3 tahun* *2-3 years or less*	*3-4 tahun* *3-4 years or less*	*4-5 tahun* *4-5 years or less*	*5-6 tahun* *5-6 years or less*	*> 6 tahun* *> 6 years*	*Non Repricing*	
Penempatan pada BI	3,185,010	3,185,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Placement with BI*
Penempatan pada bank lain	8,122,170	8,122,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Placement with other bank*
Surat-surat berharga	42,101,898	202,822	351,565	121,446	647,476	531,608	1,371,346	2,904,352	7,708,330	28,262,953	-	*Securities*
Reverse Repo	17,259,226	17,259,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reverse Repo
Kredit	110,343,015	22,822,150	16,719,416	23,694,078	20,961,007	6,628,378	7,277,632	2,459,838	1,961,433	7,777,352	41,730	*Loans*
Tagihan Derivatif	3,288	3,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Derivative Receivables*
Jumlah	**181,014,606**	**51,594,666**	**17,070,981**	**23,815,525**	**21,608,483**	**7,159,986**	**8,648,978**	**5,364,189**	**9,669,763**	**36,040,305**	**41,730**	
Kewajiban												
Simpanan nasabah	136,085,493	9,262,424	19,326,471	21,807,754	25,307,552	28,649,994	4,795,982	5,590,435	9,368,932	10,378,840	1,597,108	*Deposits*
Kewajiban pada BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bank Indonesia*
Simpanan dari bank Lain	1,380,194	1,370,551	-	-	-	-	-	-	-	-	9,643	*Deposits from other bank*
Surat berharga yang diterbitkan	9,625,000	-	3,500,000	2,125,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	*Securities issued*
Obligasi subordinasi	3,802,000	-	-	-	-	100,000	2,400,000	-	1,302,000	-	-	*Subordinated bonds*
Surat berharga repo	2,518,308	-	1,310,333	1,207,975	-	-	-	-	-	-	-	*Repo*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Borrowings*
Kewajiban Derivatif	3,185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,185	*obligation derivatives*
Jumlah	**153,414,181**	**10,632,975**	**24,136,805**	**25,140,730**	**25,307,552**	**32,749,994**	**7,195,982**	**5,590,435**	**10,670,932**	**10,378,840**	**1,609,937**	
Repricing Gap	**27,600,425**	***40,961,691***	***(7,065,824)***	***(1,325,205)***	***(3,699,070)***	***(25,590,007)***	***1,452,997***	***(226,245)***	***(1,001,169)***	***25,661,464***	***(1,568,207)***	
Cummulative Gap		***40,961,691***	***33,895,867***	***32,570,662***	**28,871,593**	**3,281,585**	**4,734,582**	**4,508,337**	**3,507,168**	**29,168,632**	**27,600,425**	

Pengelolaan Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (IRRBB)

Pergerakan suku bunga di pasar mempengaruhi posisi *Banking Book* yang berpotensi akan berdampak pada rentabilitas dan permodalan Bank baik dalam janga pendek maupun jangka panjang. Manajemen IRRBB dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang yang mempengaruhi nilai ekonomis dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih.

Pengukuran risiko IRRBB Bank menggunakan pendekatan standar dengan dua metode, yaitu: pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*/EVE) dan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*/NII). Skenario *shock* suku bunga dalam perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar terdiri dari 6 (enam) skenario untuk metode EVE dan 2 (dua) skenario untuk metode NII sebagaimana yang tercantum dalam SEOJK.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah untuk *Non-Maturity Deposit* yang menggunakan *behavior model, Early Redemption* untuk *Time Deposit* dan *Loan Prepayment* untuk produk kredit yang memiliki tenor panjang terutamanya di *Mortgage Loan.*

Management of Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Interest rate movement in the market could affect the Banking Book which has the potential to have an impact on the profitability and capital of the Bank both in the short and long-term period. The IRRBB management is conducted by identifying, measuring, monitoring, and controlling interest rate movements that may cause changes in present value and timing of future cash flows that might affect the economic value of assets, liabilities, and off-balance-sheet transactions of the Bank and cause changes in interest income.

The Bank's IRRBB risk measurement uses a standardized approach with two methods, namely: measurement based on changes in the economic value of equity (EVE) and changes in net interest income (NII). The interest rate shock scenario in the IRRBB calculation using the standard approach consists of 6 (six) scenarios for the EVE method and 2 (two) scenarios for the NII method as stated in SEOJK.

Some of the assumptions used in the calculation of IRRBB are for Non-Maturity Deposits that use a behavior model, Early Redemption for Time Deposits, and Loan Prepayments for credit products with long tenors, especially in Mortgage Loans.

Mitigasi Risiko Pasar

Bank mengimplementasikan mitigasi risiko melalui limit yang ditetapkan dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko dan/atau ALCO. Untuk mengantisipasi kondisi ekstrim, perhitungan *stress test* dilakukan secara berkala. Hasil *stress test* tersebut digunakan untuk memastikan bahwa permodalan Bank masih kuat dalam mendukung kegiatan usahanya apabila terjadi kondisi ekstrim. Limit-limit dikaji ulang secara berkala dengan mengacu kepada rencana bisnis, instrumen yang diperdagangkan, tingkat utilisasi, dan pengaruh faktor eksternal. Pemantauan dan pelaporan atas penggunaan limit-limit ini dilakukan secara harian. Setiap pelampauan yang terjadi dieskalasi sesuai prosedur yang berlaku.

Market Risk Mitigation

The Bank implements risk mitigation through limits that are determined and approved by the Risk Management Committee and/or ALCO. To anticipate extreme conditions, stress test calculations are carried out regularly. The results of the stress test are used to ensure that the Bank's capital is still strong in supporting its business activities in the event of extreme conditions. The limits are reviewed periodically regarding the business plan, traded instruments, utilization rates, and the influence of external factors. Monitoring and reporting on the use of these limits are carried out daily. Any exceedances that occur are escalated according to the applicable procedures.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai kerugian akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau isu eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

3. Operational Risk

Operational risk is defined as losses due to inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, or external issues that may affect the Bank's operations.

Proses Manajemen Risiko Operasional

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, PaninBank mengembangkan metodologi identifikasi, pengukuran, pengendalian/mitigasi dan pemantauan eksposur risiko operasional terekspos pada di setiap Unit Kerja. Bank telah mengembangkan sistem informasi manajemen risiko operasional yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha.

PaninBank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung proses pemantauan, pengukuran dan pelaporan risiko operasional, yaitu: Aplikasi *Operational Risk Assessor* (OPRA) dan Aplikasi *Risk Base Bank Rating* (RBBR) yang telah diimplementasikan pada seluruh unit kerja Kantor Pusat atau Kantor Cabang.

Modul yang tersedia dalam aplikasi *Operational Risk Assessor (OPRA)* adalah modul *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA), modul *Loss Event Management* (LEM), Modul *Near Miss, dan modul Key Risk Indicators* (KRIs).

- *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)*
  Merupakan pendekatan risiko operasional untuk mendukung *risk taking unit* dalam melakukan proses identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan serta melaporkan risiko operasional yang terekspos di dalam unit kerjanya secara *self-assessment*.

Operational Risk Management Process

To implement effective Operational Risk Management, PaninBank develops methodologies for identification, measurement, control/mitigation, and monitoring of operational risk exposures exposed in each Work Unit. The Bank has developed an operational risk management information system which tailored to the characteristics, activities, and complexity of business activities.

PaninBank already has an Operational Risk Management system to support the process of monitoring, measuring, and reporting operational risk, namely: Application of Operational Risk Assessor (OPRA) and Application of Risk Base Bank Rating (RBBR) which have been implemented in all work units at Head Office or Branch Offices.

The modules available in the Operational Risk Assessor (OPRA) application are the Risk and Control Self-Assessment (RCSA) module, the Loss Event Management (LEM) module, the Near Miss module, and the Key Risk Indicators (KRIs) module.

- Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
  Is an operational risk approach to support the risk-taking unit in the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling as well as reporting operational risks exposed in the work unit on a self-assessment basis.

Proses RCSA adalah memprediksi tingkat risiko operasional dalam beberapa periode ke depan berdasarkan data historis dan efektivitas kontrol yang tersedia. *Risk Taking Unit* harus membuat *action plan (*tindak lanjut perbaikan*)* terhadap kontrol-kontrol risiko yang kondisi/pelakanaannya lemah agar risiko tidak terjadi pada masa mendatang.

- *Loss Event Management (LEM)*
  Risk Taking Unit yang tidak melakukan penerapan manajemen risiko operasional secara efektif dapat menjadi *trigger bagi terjadi* insiden risiko operasional. Proses pengelolaan Insiden yang berdampak/ menimbulkan kerugian finansial bagi Bank disebut *Loss Event Management (LEM). Risk Taking Unit* harus menindaklanjuti setiap insiden LEM untuk memperoleh pengembalian *(recovery)* dan untuk mencegah agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

- *Near Miss*
  Risk Taking Unit yang tidak melakukan penerapan manajemen risiko operasional secara efektif dapat menjadi *trigger* bagi terjadi insiden risiko operasional. Insiden risiko operasional yang tidak menimbulkan kerugian finansial/hampir menimbulkan kerugian finansial disebut *Near Miss*. Walaupun insiden ini tidak menimbulkan kerugian finansial, namun *Risk Taking* Unit tetap harus menjadi perhatian dini (*early warning signal)* agar tidak terulang dikemudian hari dan menjadi insiden *LEM*.

- *Key Risk Indicators (KRIs*)
  KRIs merupakan indikator-indikator risiko Utama yang ditetapkan dan dipantau serta dianalisis trennya sebagai *early warning signal*. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kejadian/insiden risiko kejutan *(shock incident).*

- *Risk Register TI*
  Risk register TI adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian aplikasi TI yang digunakan PaninBank untuk mendukung operasional, bisnis dan layanan. *Risk Register* TI dapat memberikan informasi risiko *risk owner* (*user*/penyelenggara) TI dan pihak terkait agar melakukan pemantauan dan melakukan tindakan mitigasi yang diperlukan agar *up time* aplikasi TI tetap terjaga dan mampu mendukung operasional dan bisnis serta layanan nasabah Bank secara berkelanjutan.

The RCSA process is to predict the level of operational risk in the next several periods based on historical data and the effectiveness of available controls. Risk-Taking Units must create an action plans (follow-up improvements) for risk controls with weak conditions/ practices so that risks do not occur in the future.

- Loss Event Management (LEM)
  Risk Taking Units that do not implement operational risk management effectively can become a trigger for operational risk incidents to occur. The process of managing incidents that have an impact/cause financial losses for the Bank is called Loss Event Management (LEM). Risk-Taking Unit should follow up every LEM incident to obtain a recovery and to prevent similar incidents from recurring in the future.

- Near Miss
  Risk-Taking Units that do not implement operational risk management effectively can be a trigger for operational risk incidents to occur. Operational risk incidents that do not cause financial losses/almost cause financial losses are called Near miss. Although such incident does not result in a financial loss, but Risk-Taking Unit should be considered early (early warning signal) so as not to happen in the future and become an LEM incident.

- Key Risk Indicators (KRIs)
  KRIs are key risk indicators that are determined and monitored as well as trend analysis as an early warning signal. This is necessary to prevent shock incidents.

- Risk Register IT
  IT risk register is a document containing the results of identification, measurement, monitoring, and control of IT applications used by PaninBank to support operations, business, and services. The IT Risk Register can provide information on the risk of IT risk owners (users/operators) and relevant parties to monitor and take necessary mitigation actions hence the IT application up time is maintained and able to support operations and business as well as Bank customer service on an ongoing basis.

Sebagai *output* dari pengelolaan risiko operasional adalah Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional Bank baik secara bank wide maupun per entitas serta profil risiko aplikasi TI yang digunakan PaninBank untuk mendukung operasional, bisnis dan layanan nasabah.

Bank juga telah melakukan perhitungan ATMR risiko operasional dengan menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan peraturan OJK.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya risiko kejahatan IT (*Cyber*), PaninBank terus berupaya untuk mengupdate infrastruktur teknologi informasi dan keamanan sistem agar mampu mengidentifikasi, menangkal dan memonitor setiap potensi risiko kejahatan *cyber*. Untuk tingkat internal PaninBank kewaspadaan terhadap serangan *cyber*, dilakukan melalui publikasi *e-mail* dan *IT Security awareness* terhadap kejahatan *cyber* harus dibangun dan menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* PaninBank secara berkesinambungan.

PaninBank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi Pejabat/Karyawan melalui *training* dan sertifikasi terkait dengan teknologi informasi, *cyber security risk and data protection.*

Satuan Kerja Audit Internal sebagai *3rd line of defense* harus melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan bisnis PaninBank telah sesuai dengan ketentuan internal, eksternal dan praktik yang berlaku umum/*common practices* di industri.

Identifikasi Risiko

Metode identifikasi risiko operasional PaninBank diawali dari proses *mapping* risiko operasional dengan 7 (tujuh) aktivitas fungsional Bank (perkreditan, treasury & investasi, operasional & jasa, pembiayaan perdagangan & bank garansi, pendanaan & instrumen utang, TSI & SIM atau pengelolaan SDM) dan semua satuan kerja divisi/biro/group/cabang untuk menentukan satuan kerja Bank yang terekspos risiko operasional yang akan berfungsi sebagai *risk taking unit/risk owner.*

Unit kerja/*risk owner* dengan dukungan Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi terhadap parameter, indikator dan isu risiko operasional yang melekat pada aktivitas fungsional di unit kerjanya dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, termasuk yang melekat pada produk/aktivitas baru dan sistem informasi teknologi Bank.

As the output of operational risk management is the Operational Risk Profile which describes the Bank's operational risk exposure both on a bank-wide basis and per entity as well as the risk profile of IT applications used by PaninBank to support operations, business, and customer service.

The Bank has also calculated the RWA for operational risk using the Basic Indicator Approach (BIA) following OJK regulations.

In line with the development of information technology and the increasing risk of IT (Cyber) crime, PaninBank continuously strives to update its information technology infrastructure and system security to be able to identify, prevent and monitor any potential risks of cyber crime. For the internal level of PaninBank, vigilance against cyber-attacks carried out through e-mail publication and IT Security awareness of cyber crime must be built and become the responsibility of all PaninBank stakeholders on an ongoing basis.

PaninBank always strives to improve the competence of executives/employees through training and certification relating to information technology, cyber security risk, and data protection.

The Audit Internal Work Unit as the 3rd line of defense must review and ensure that all operational and business activities of PaninBank are in accordance with internal, external regulations and common practices in the industry.

Risk Identification

The risk identification method for PaninBank's operations begins with an operational risk mapping process with 7 (seven) functional activities of the Bank (credit, treasury & investment, operations & services, trade finance & bank guarantees, funding & debt instruments, TSI & SIM, or HR management) and all division/bureau/group/branch work units to determine Bank work units exposed to the operational risk that will function as risk-taking units/risk owners.

Work unit/risk owner supported by the Risk Management Work Unit is responsible for identifying parameters, indicators, and operational risk issues embedded in functional activities in the work unit and potentially causing losses to the Bank, including those attached to new products/activities and the Bank's information technology system.

Sumber data identifikasi risiko operasional dapat berasal dari ketentuan regulator, Kebijakan dan Prosedur Bank, *job description* dan sumber-sumber risiko lainnya termasuk data kecurangan (*fraud*) dan eksternal lainnya. Parameter/indikator/isu risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya disusun dalam risk register risiko operasional.

Pengukuran Risiko

Risk Taking Unit/Risk owner melakukan pengukuran risiko yang melekat (*inheren risk*) dan risiko sisa (*residual risk*) terhadap semua parameter risiko/indikator risiko/Isu risiko operasional dalam daftar/*risk register*. Cakupan penilaian risiko operasional meliputi:

a. Jenis dampak risiko (*financial/non-financial*) dan tingkat dampaknya (*risk impact*)
b. Jenis frekuensi kejadian risiko (rutin/non-rutin) dan tingkat frekuensi kejadian risiko (*risk likelihood*) menggunakan skala kuantifikasi dampak dan skala kuantifikasi frekuensi
c. Tingkat risiko inheren komposit (*risk inherent composite*) yang terbagi ke dalam 5 (lima) level, yaitu: *low risk, low to moderate risk, moderate risk, moderate to high risk* atau *high risk* menggunakan *risk map*

Parameter/indikator/isu risiko operasional yang telah diukur, dikelompokan berdasarkan tingkat risiko inheren kompositnya untuk proses mitigasi dan pengendalian sesuai operational *risk appetite/risk tolerance* yang ditetapkan Direksi.

Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Proses mitigasi risiko operasional dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu: risiko yang dapat diterima (*risk accepted*), risiko dihindari (*risk avoidance),* atau pengalihan risiko (*risk transfer*). Penetapan mitigasi risiko merupakan wewenang Direksi berdasarkan tingkat *risk appetite/risk tolerance*.

Parameter/indikator/isu-isu risiko operasional immaterial atau dengan tingkat risiko inheren komposit berada pada kisaran *low risk* sampai dengan *moderate risk (*di bawah *risk appetite/risk tolerance* PaninBank risikonya dapat diterima Bank (*absorb/accepted*), sebaliknya yang material/tingkat risiko inheren kompositnya berada pada kisaran *moderate to high risk* sampai dengan *high risk/*di atas *risk appetite/risk tolerance* Bank harus dikendalikan (*risk transfer*) atau atas kebijakan Direksi risiko tersebut dihindari *(risk avoid).*

Untuk mengendalikan risiko operasional yang terekspos pada unit kerja Bank, maka manajemen PaninBank telah menetapkan mekanisme kontrol, baik berupa *hard control* maupun *soft control.*

Sources of operational risk identification data may come from regulatory provisions, Bank Policies and Procedures, job descriptions, and other sources of risk including fraud and other external data. The identified risk parameters/indicators/issues are further compiled in the operational risk register.

Risk Measurement

Risk-Taking Unit/Risk owner measures inherent risk and residual risk for all risk parameters/risk indicators/operational risk issues in the risk register. The scope of operational risk assessment includes:

a. Type of risk impact (financial/non-financial) and level of impact (risk impact)
b. The type of frequency of risk events (routine/non-routine) and the level of risk likelihood using the impact quantification scale and the frequency quantification scale
c. The level of risk inherent composite is divided into 5 (five levels), namely: low risk, low to moderate risk, moderate risk, moderate to high risk, or high risk using the risk map

Operational risk parameters/indicators/issues that have been measured are grouped based on the level of inherent risk in the composite for mitigation and control processes according to the operational risk appetite/risk tolerance set by the Board of Directors.

Risk Mitigation and Control

The operational risk mitigation process can be carried out in several ways, namely: risk accepted, risk avoidance, or risk transfer. Determination of mitigation is the authority of the Board of Directors based on the level of risk appetite/risk tolerance.

Parameters/indicators/issues of immaterial operational risk or with an inherent composite risk level are in the range of low risk to moderate risk (below PaninBank's risk appetite/risk tolerance is acceptable to the Bank (absorb/accepted), on the other hand, the material/risk level is inherently composite is in the range of moderate to high risk to high risk/above risk appetite/risk tolerance. The Bank must be controlled (risk transfer) or at the policy of the Board of Directors the risk is avoided (risk avoid).

To control operational risks exposed to the Bank's work unit, PaninBank management has established risk control mechanisms, both in the form of hard controls and soft controls.

Berdasarkan sifat dan fungsinya kontrol risiko yang dtetapkan manajemen dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu:

a. *Directive* (peraturan perbankan, kebijakan dan prosedur Bank)
b. *Preventive* (pencegahan)
c. *Detective* (identifikasi/investigasi)
d. *Corrective* (perbaikan/koreksi)

Risk taking unit/risk owner bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme kontrol risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen tersedia dalam kondisi baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien agar risiko operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Paninbank dapat dicegah/tidak terjadi.

Pemantauan Risiko Operasional

Pemantauan risiko operasional dimaksudkan untuk memastikan bahwa pejabat atau karyawan terkait (*risk owner*) telah melakukan pengendalian risiko operasional dengan baik dan tingkat risiko sisa (*residual risk*) berada pada kisaran yang dapat diterima Bank (*low risk-moderate* risk).

Proses pemantuan risiko operasional, Bank menggunakan *system* aplikasi *Risk Base Bank Rating* (RBBR) untuk profil risiko dan Aplikasi *Operational Assessor* (OPRA) berbasis *website* untuk penerapan manajemen risiko operasional, dengan cakupan pemantauan dan pelaporan sebagai berikut:

a. *Risk & Control Self-Assessment* (RCSA) periodik dan Risiko TI

Pemantauan dengan RCSA dilakukan setiap enam bulanan (semesteran) untuk memprediksi tingkat risiko operasional enam bulan ke depan berdasarkan efektivitas kontrol dan data historis enam bulan terakhir.

RCSA merupakan proses evaluasi dan penilaian terhadap ketersediaan, kondisi dan pelaksanaan kontrol risiko (efektivitas kontrol) dalam menurun tingkat risiko inheren (*inherent risk*) menjadi tingkat risiko sisa (*residual risk*) yang dapat diterima Bank.

Jika mekanisme kontrol risiko tidak tersedia/kondisi kontrol tidak baik/pelaksanaan kontrol tidak sesuai Buku Pedoman Operasi atau praktek yang berlaku umum/*common banking practice*, maka kontrol dinilai lemah *weak*/tidak efektif sehingga tingkat *residual risk* isu risiko operasional tinggi (*moderate to high risk-high risk*). Untuk itu, *risk owner* harus membuat rencana tindak perbaikan (*action plan*) terhadap kontrol risiko yang lemah (*weak*) tersebut.

Based on the nature and function of risk control defined by management, it can be divided into 4 categories, namely:

a. Directive (banking regulations, Bank policies, and procedures)
b. Preventive (prevention)
c. Detective (identification/investigation)
d. Corrective (correction)

The risk-taking unit/risk owner is responsible for ensuring that risk control mechanisms that have been determined by management are in good condition and implemented effectively and efficiently so that operational risks that have the potential to cause losses to Paninbank can be prevented/not occurred.

Operational Risk Oversight

Operational risk monitoring is intended to ensure that the officials or employees concerned (risk owners) have properly controlled operational risks and the level of residual risk is within the acceptable range of the Bank (low risk-moderate risk).

As for the operational risk monitoring process, the Bank uses the Risk Base Bank Rating (RBBR) application system for risk profiles and a website-based Operational Assessor (OPRA) application for the implementation of operational risk management, with the following monitoring and reporting scopes:

a. Regular Risk & Control Self-Assessment (RCSA) and IT risk

Monitoring with RCSA is conducted every six months (every semester) to make a projection on the level of operational risk in the next six months based on the effectiveness of controls and historical data of the last six months.

RCSA is a process of assessing and evaluating the availability, condition, and implementation of risk controls (effectiveness of controls) in decreasing the level of inherent risk to the level of residual risk that is acceptable to the Bank.

If the risk control mechanisms is not available/ the control is not in good condition/the control implementation is not in accordance with the Operations Manual or common banking practice, then the control is considered weak/ineffective resulting in a high residual risk level of operational risk issues (moderate to high risk-high risk). For this reason, the risk owner must develop an action plan for weak risk control.

Dengan dukungan Aplikasi OPRA *web base processses Risk & Control Self-assessment* (RCSA) dapat menampilkan peta risiko/profil risiko operasional dari setiap satuan kerja Bank (divisi/biro/group/cabang) maupun secara *Bank wide* secara otomatis.

b. Manajemen Insiden Risiko Operasional

Selain RCSA, Bank juga melakukan pemantauan terhadap insiden kejadian risiko operasional untuk mengkaji efektivitas penerapan manajemen operasional yang telah dilakukan Bank. Manajemen Insiden Risiko Operasional dilakukan melalui pencatatan atas insiden/kejadian kesalahan terkait risiko operasional baik yang menimbulkan kerugian financial (*loss event data*) maupun yang hampir menimbulkan kerugian finansial (*near miss*). Jika frekuensi kejadian/nominal insiden risiko operasional tinggi, artinya penerapan manajemen risiko operasional masih perlu ditingkatkan.

Strategi *Anti-Fraud*

Sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum, Bank memiliki fungsi yang melaksanakan Strategi *Anti-Fraud* yaitu *Fraud Management Team* (*FMT*).

Penerapan 4 pilar Strategi *Anti-Fraud* di Bank adalah sebagai berikut:

A. Pencegahan

Dalam melaksanakan pilar 1 Pencegahan, Bank melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan upaya menumbuhkan kesadaran perlunya pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank (*Anti-Fraud Awareness*) melalui:
  - Penetapan "*Zero Tolerance to Fraud*" sebagai *tone from the top* Manajemen Bank
  - Pelaksanaan program *employee awareness*
  - Pelaksanaan program *customer awareness*
- Melakukan proses identifikasi kerawanan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas.
- Menerapkan kebijakan *Know Your Employee* mulai dari proses rekrutmen dan pemantauan secara berkala.

B. Deteksi

- Kebijakan dan Mekanisme *Whistle Blowing* yang mencakup sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan dan perlindungan kepada *Whislteblower.*

With the support of the OPRA Application web-based processes, Risk & Control Self-Assessment (RCSA) can display risk maps/operational risk profiles of each Bank unit (division/bureau/group/branch) and Bank-wide on an automated basis.

b. Operational Risk Incident Management

In addition to RCSA, the Bank also monitors the incidents of operational risk events to review the effectiveness of the implementation of operational management that has been conducted by the Bank. Management of Operational Risk Incidents is performed by recording incidents/errors that are related to operational risks that trigger financial loss (loss event data) or that near trigger financial loss (near-miss). If the frequency of events/nominal operational risk incidents is high, it means that the implementation of operational risk management still needs improvements.

Anti-Fraud Strategy

In accordance with POJK No. 39/POJK.03/2019 concerning Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, the Bank has a function that implements the Anti-Fraud Strategy, namely the Fraud Management Team (FMT).

Application of the 4 pillars of the Anti-Fraud Strategy in the Bank are as follows

A. Prevention

In implementing pillar 1 of prevention, the Bank does the following:

- Make efforts to raise awareness about the fraud prevention needs for all levels of the Bank's organization and various parties which relevant to the Bank (Anti-Fraud Awareness) through:
  - Determination of "Zero Tolerance to Fraud" as the tone from the top of the Bank's Management
  - Implementation of employee awareness program
  - Implementation of customer awareness program
- Conduct a vulnerability identification process to identify fraud risks embedded in each activity.
- Implement the Know Your Employee policy starting from the recruitment process until periodic monitoring.

B. Detection

- Whistle Blowing Policy and Mechanism which includes a reporting system and a mechanism for follow-up reports and protection to Whislteblowers.

- *Surprise Audit* dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan prosedur kerjanya dan juga dilakukan oleh Supervisor langsung maupun tidaklangsung pada suatu unit kerja sebagai bentuk pengawasan melekat. Surprise Audit terutama dilakukan pada unit bisnis/proses kerja yang berisiko tinggi terjadi *fraud* sesuai dengan hasil pemetaan identifikasi kerawanan.
- Melakukan *Surveillance System* yaitu pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen atau pihak internal Bank tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.

C. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
- Proses investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan laporan yang bersumber dari Permintaan Manajemen, Laporan/pengaduan nasabah, Hasil pemeriksaan SKAI yang memiliki indikasi *fraud*, atau berasal dari *Whistleblowing System*.
- Pelaporan internal kejadian/dugaan *fraud* merupakan tanggung jawab dari setiap pimpinan unit kerja. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh FMT untuk penanganan selanjutnya. Sedangkan untuk pelaporan ke OJK, Bank menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- Penerapan Sanksi kejadian *fraud* mengacu pada Pedoman Sanksi yang dimiliki Bank dengan semangat "*Zero Tolerance to Fraud".*

D. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan keputusan penanganan *fraud* oleh FMT dan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Penerapan Strategi Anti-*Fraud* dievaluasi secara berkala dan Direksi maupun Komite Audit memberikan masukan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh FMT.

Pengelolaan Risiko Teknologi Sistem Informasi

Bank telah memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi yang ditetapkan Direksi dan memastikan:

- Teknologi informasi yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha Bank
- Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif

- Surprise Audits are conducted by the Internal Audit Unit in accordance with their work procedures and are also performed by the Supervisors directly or indirectly in a work unit as a form of inherent supervision. Surprise audits are mainly carried out on business units/work processes that have a high risk of fraud in accordance with the results of vulnerability identification mapping.
- Conduct a Surveillance System, by testing or checking performed by an independent party or an internal party of the Bank without being noticed or realized by the party concerned that being tested or examined.

C. Investigation, Reporting, and Sanctions
- The investigation process is conducted by the Internal Audit Unit based on the reports sourced from Management Requests, customer reports/complaints, SKAI examination results that indicate fraud, or originate from the Whistleblowing System.
- Internal reporting of the incident/suspected fraud is the responsibility of each work unit leader. FMT will follow up on the report for further handling. Meanwhile, for the OJK reporting purpose, the Bank submits an Anti-Fraud Strategy Implementation Report every semester for the positions at the end of June and December.
- Implementation of sanctions for fraud incidents refers to the Bank's Sanctions Guidelines with the spirit of "Zero Tolerance to Fraud".

D. Monitoring, Evaluation and Follow Up

Monitoring is conducted on the implementation of fraud handling decisions by FMT and reported to the President Director with a copy to the Audit Committee.

Implementation of the Anti-Fraud Strategy is regularly evaluated and the Board of Directors or the Audit Committee provides recommendations to be followed up by FMT.

Risk Management for Information System Technology

The Bank has an Information Technology Strategic Plan established by the Board of Directors and ensures:

- The information technology used can support the development of the Bank's business
- Availability of an effective information security management system

- Kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi
- Penerapan proses manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka pengawasan aktif Direksi, Bank memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang belum selesai.

Identifikasi dan pengukuran risiko Teknologi Sistem Informasi (TSI), dilakukan melalui *assessment* IT *Risk Register* secara berkala yang cakupan penilaiannya baik dari sisi *Hardware*, *Software* maupun *Network* (jaringan). Konsep penilaian IT *Risk Register* serupa dengan RCSA yaitu dengan menilai dan mengukur tingkat risiko inheren dan efektivitas kontrol untuk masing-masing objek penilaian (*hardware/software* (aplikasi)/jaringan).

Untuk menjaga keberlangsungan usaha pada saat terjadi bencana/gangguan usaha sesuai ketentuan regulator PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memastikan kegiatan usaha Bank yang kritikal masih dapat berjalan. *Business Continuity Plan* (BCP) PaninBank selalu dilakukan testing secara berkala untuk memastikan ketersediaan dan kesiapannya dalam menghadap krisis/kondisi darurat. Demikian juga dengan *Disaster Recovery Plan* (DRP) *data centre* yang berada di German Centre selalu dilakukan testing berkala sesuai ketentuan regulator.

Sedangkan untuk memitigasi risiko serangan siber (*cyber security*) dari pihak luar terhadap TSI Bank, Bank senantiasa melakukan evaluasi dan *upgrading* TSI yang digunakan dan juga secara berkala mengundang pihak eksternal untuk melakukan *penetration test* maupun audit khusus TSI.

Penjelasan tentang *Three Lines of Defense*

Guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas dari pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan SKMR bersama dengan SKAI dan Unit-Unit Kerja Bank terkait, maka penerapan konsep tiga lapis lini pertahanan (*three lines of defense/three lines model*) dijalankan secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:

- Adequacy of the quantity and quality of Human Resources associated with the operation and use of information technology
- Implementation of an effective risk management process

In the context of active supervision held by the Board of Directors, the Bank has an Information Technology Steering Committee which is responsible for providing recommendations to the Board of Directors regarding the Information Technology Strategic Plan in accordance with the Bank's Business Plan and efforts to resolve various issues related to Information Technology that have not been completed.

Identification and measurement of Information System Technology (TSI) risk is carried out through periodic assessment of IT Risk Register with the scope of assessment in terms of both hardware, software, and network. The IT Risk Register assessment concept is similar to the RCSA by assessing and measuring the level of inherent risk and control effectiveness for each of the assessment objects (hardware/software (application)/ network).

To maintain business continuity in the event of a disaster/ business disruption in accordance with regulatory provisions, PaninBank has a Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) Policy and Procedure Guidelines to ensure that the Bank's critical business activities are still running. PaninBank's Business Continuity Plan (BCP) is always tested regularly to ensure its availability and readiness in facing crises/emergencies. Likewise, the Disaster Recovery Plan (DRP) data center located in the German Center is always subject to periodic testing in accordance with regulatory provisions.

Meanwhile, to mitigate the risk of cyber-attacks from outside parties against the TSI Bank, the Bank always evaluates and upgrades the TSI used and also regularly invites external parties to conduct penetration tests and special TSI audits.

Discussion on Three Lines of Defense

In order to improve the coordination and effectiveness of Operational Risk management carried out by SKMR together with SKAI and relevant Work Units of the Bank, the application of the three lines of defense/three lines model is performed consistently with the following mechanisms:

a. Lini pertama *(first Line of defense)* adalah satuan kerja bisnis dan operasional (divisi/biro/group/cabang) PaninBank sebagai *risk owner* yang bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal dan pengelolaan risiko operasional dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka pun bertugas untuk melakukan tindakan korektif dalam mengatasi kelemahan pada proses pengendalian.
b. Lini kedua *(second line of defense)* adalah Biro Manajemen Risiko dan Biro Kepatuhan yang berfungsi membantu membangun kerangka kerja dan memantau implementasi pengendalian internal pada Lini Pertama. Meskipun tidak sepenuhnya independen, fungsi-fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan, dan dioperasikan dengan memadai.
c. Lini ketiga *(third line of defense)* adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang memberikan pemastian (*assurance*) secara independen terhadap efektivitas dari pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mereka bertugas juga untuk memastikan lapis pertama dan kedua berhasil mencapai sasaran manajemen risiko dan pengendalian yang telah ditetapkan.

Direksi melalui KMR dan Dewan Komisaris melalui KPR akan memastikan bahwa ketiga lapis pertahanan ini berjalan dengan baik. Sebagai tambahan atas ketiga lapis pertahanan tersebut diatas, masih terdapat lapis tambahan, yaitu auditor eksternal dan regulator yang juga memegang peranan dalam meyakinkan efektivitas dari keseluruhan tata kelola Manajemen Risiko Bank.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dilikuidasi segera dan/atau diagunkan tanpa mengganggu aktivitas keuangan Bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko likuiditas harian dilakukan oleh Satuan Kerja *Liquidity* di bawah direktorat *Treasury* secara terukur dan komprehensif, PaninBank menerapkan strategi antara lain:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk menguji kekuatan modal PaninBank sebagai antisipasi terhadap perubahan faktor internal dan eksternal yang bersifat ekstrim terhadap kondisi likuiditas.

a. The first layer (first line of defense) is a business and operational work unit (division/bureau/group/branch) whereas PaninBank as the risk owner who is responsible for implementing internal control and managing operational risk in daily work. They are also assigned to take corrective action in overcoming weaknesses during the process and control.

b. The second layer (second line of defense) is the Risk Management Bureau and the Compliance Bureau which functions to assist in building a framework and monitoring the the internal control implementation in the First Line. Though not completely independent, these functions ensure the first layer is properly designed, implemented, and operated.
c. The third layer (third line of defense) is the Internal Audit Unit (SKAI) which provides independent assurance on the effective implementation of corporate governance, risk management and internal control. They are also tasked to ensure that the first and second layers succeed in achieving the risk management and control objectives that have been set.

The Board of Directors through KMR and Board of Commissioners through KPR must ensure that all three layers of defense have been well operated. In addition to the three layers of defense mentioned above, there are still additional layers, namely external auditors and regulators who also play a role in ensuring the effectiveness of the Bank's overall Risk Management governance.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk represents the risk due to the inability of the Bank to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or high-quality liquid assets that can be utilized without disrupting the activities of PaninBank's financial condition.

Risk Management Efforts

The management of daily liquidity risk is carried out by the Liquidity Unit under the Directorate of Treasury in a measured and comprehensive manner, PaninBank implements strategies, including:

1. Setting the limits that refer to internal conditions and prevailing legal provisions.

2. Conducting stress testing of liquidity risk regularly to determine the impact of changes in market factors and internal factors in extreme conditions on liquidity.

3. Memonitor indikator-indikator eksternal serta informasi pasar terkini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Kebijakan di Bidang Risiko Likuiditas

Bank memiliki relasi yang baik dengan *counterparty* sehingga apabila mengalami posisi *short Bank* dapat dengan mudah memanfaatkan pinjaman jangka pendek dari *interbank*. Kaji ulang terhadap *liquidity gap limit* telah dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan dan rencana bisnis Bank.

Bank mengelola risiko likuiditas dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal Bank. Pengelolaan likuiditas Bank sudah dilakukan dengan baik dengan mengukur kondisi likuiditas Bank di masa mendatang dengan memproyeksikan melalui metodologi *liquidity gap* yang merupakan *maturity mismatch* antara komponen-komponen aset dan liabiltas termasuk *off balance sheet* yang disusun ke dalam periode waktu (*time bucket*) berdasarkan *contractual maturity* ataupun *behavioral maturity.*

Bank juga melakukan pemantauan likuiditas melalui *buffer* likuiditas secara mingguan dalam menjaga ketersediaan aset likuid berupa *interbank placement*, *Term Deposit* BI dan surat-surat berharga likuid seperti SBI, SBN, dengan jumlah yang memadai guna melindungi Bank dari potensi risiko likuiditas. Bank juga melakukan *stress testing* terhadap risiko likuiditas secara berkala dan telah memiliki Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*).

Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank. Dalam hal ini Bank mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas terdiri dari Satuan Kerja Liquidity sebagai *first line of defense,* serupa dengan organisasi Satuan Kerja manajemen risiko pasar dan Satuan Kerja Kepatuhan pada *second line of defense* dan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *third line of defense*, serta Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dan komite-komite risiko lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Monitoring external indicators and the latest market information. This aims to increase awareness of unstable economic conditions, both due to global crisis conditions and various domestic issues.

Policy in Liquidity Risk

The Bank has a good relationship with counterparties, thus, if the Bank experiences a short position, the Bank can easily take advantage of short term interbank loans. A review of the liquidity gap limit has been conducted regularly by taking into account the Bank's needs and business plans.

The Bank manages liquidity risk by setting limits that refer to the Bank's internal and regulatory requirements. The Bank's liquidity management has been well performed by measuring the Bank's liquidity condition in the future by projecting through the liquidity gap methodology, which is a maturity mismatch between the components of assets and liabilities, including off-balance sheets which arranged into time periods (buckets) based on contractual maturity or behavioral maturity.

The Bank also monitors its liquidity through liquidity buffers on a weekly basis in order to maintain the availability of liquid assets in the form of interbank placement, BI Term Deposit, and liquid securities such as SBI, SBN, in an adequate amount to protect the Bank from potential liquidity risk. The Bank also conducts stress testing to its liquidity risk on a regular basis and has a Contingency Funding Plan.

Financing Strategy

The funding strategy includes a strategy of diversification of sources and funding periods associated with the characteristics and business plans of the Bank. In this case, the Bank identifies and monitors the main factors that influence the Bank's ability to obtain funds, including identifying and monitoring alternative funding that can strengthen its capacity to withstand crisis conditions.

Management Organization of Liquidity Risk

The Liquidity Risk Management Organization comprise of the Liquidity Work Unit as the first line of defense, similar to the organization of the market risk management Work Unit and the Compliance Work Unit in the second line of defense and the Internal Audit Unit as the third line of defense, as well as the Asset and Liability Committee (ALCO) and other risk committees under the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pengukuran Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan antara lain melalui metode berikut :

- Analisis *excess liquidity* dan *liquidity gap*
  Risiko likuditas sesuai definisninya terutama dikelola dari *mismatch/gap* yang timbul dari profil jatuh waktu dan juga memperhitungkan kebiasaan (*behavior*) dari aktiva dan pasiva.
- Rasio-rasio likuiditas
  Pengukuran dan pemantauan rasio-rasio likuiditas dapat digunakan sebagai *early warning signal* bagi Bank terhadap profil risiko likuiditas. Rasio likuiditas yang dipantau antara lain: *loan to deposit ratio*, rasio perbandingan aktiva likuid terhadap *non-core deposit*, rasio konsentrasi pendanaan, dan rasio likuiditas sesuai Basel III yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
- *Stress Test*
  Untuk melengkapi pengukuran risiko dalam kondisi normal, Bank juga melakukan *stress test* risiko likuiditas baik dalam kondisi *maket-wide stress* maupun kondisi *idiosyncratic*. Beberapa asumsi yang digunakan yaitu penarikan dana pihak ketiga, penurunan harga aktiva likuid yang dimiliki, kemampuan pengumpulan dana dari pasar, dan sebagainya.

Kondisi Likuiditas Bank berdasarkan perhitungan NSFR

Pada tahun 2020, OJK mengimplementasikan ketentuan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/* NSFR). Berdasarkan perhitungan NSFR pada tahun 2020, baik secara individu maupun konsolidasi, rasio NSFR Bank berada di atas syarat minimum yang ditetapkan.

Mitigasi Risiko Likuiditas

Mitigasi risiko likuiditas PaninBank dilakukan secara terukur dan komprehensif, dengan menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
- Memantau dan melaporkan hasil pengukuran rasio-rasio likuiditas.
- Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrim (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
- Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Contigency Funding Plan* (CFP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Bank dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/beli FX instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan

Liquidity Risk Measurement

Measurement of liquidity risk is carried out, among others, through the following methods:

- Excess liquidity and liquidity gap analysis
  Liquidity risk by definition is mainly managed from mismatches/gaps arising from the maturity profile and also takes into account the behavior of assets and liabilities.
- Liquidity ratios
  Measurement and monitoring of liquidity ratios can be used as an early warning signal for the Bank on the liquidity risk profile. The monitored liquidity ratios consists of loan to deposit ratio, the ratio of liquid assets to non-core deposit, funding concentration ratio, and liquidity ratio according to Basel III, namely Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Stress Test
  To complete the risk measurement under normal conditions, the Bank also performs a liquidity risk stress test in both market-wide stress and idiosyncratic condition. Some of the assumptions used are the withdrawal of third-party funds, a decrease in the price of liquid assets held, the ability to raise funds from the market, and so on.

Bank Liquidity Condition based on NSFR Calculation

In 2020, OJK implemented the requirement of the Net Stable Funding Ratio (NSFR). Based on the NSFR calculations in 2020, both on the Bank stand-alone and consolidated basis, the Bank's NSFR ratio is recorded above the minimum requirement.

Liquidity Risk Mitigation

PaninBank's liquidity risk mitigation is conducted in a measured and comprehensive manner, by implementing the following strategies:

- Establish limits that refers to internal regulations and applicable regulatory provisions.
- Monitor and report the results of measuring liquidity ratios.
- Perform regular stress testing of liquidity risk to determine the impact of changes in market factors and internal factors in extreme conditions (crisis) on liquidity conditions.
- Prepare and conduct regular reviews of the Contingency Funding Plan (CFP) and Recovery Plan which regulates the Bank's procedures in dealing with deteriorating liquidity conditions including alternative funding strategies, among others, through sales/purchase transactions of FX Money Market instruments and Repo of Interbank Securities, sales

Government Bond, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi-strategi pendanaan dalam CFP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

- Memonitor indikator-indikator eksternal di antaranya Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), USD Interbank, suku bunga Rupiah, *spread* antara *Return On Invesment* (ROI) dibandingkan UST, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. *Monitoring* ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

of Government Bond, the use of the Bank Indonesia Standing Facility as well as Bank Indonesia securities repo. The determination of liquidity conditions and funding strategies in the CFP and Recovery Plan takes into account internal and external conditions.

- Monitor external indicators including the Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), USD Interbank, Rupiah interest rate, spread between Return On Investment (ROI) versus UST, Outstanding IDR banking liquidity, USD/IDR exchange rate, spread of credit default swaps (CDS), Composite Stock Price Index (IHSG), as well as the latest market information. This monitoring aims to increase awareness of unstable economic conditions, both due to global crisis conditions and due to various domestic issues.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan karena adanya gugatan atau tuntutan dari nasabah atau pihak ketiga, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal) dan/atau kelemahan aspek hukum yang dilakukan oleh Bank (termasuk ketiadaan dan/atau perubahan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen pengikatan hukum).

Kerangka Kerja manajemen risiko hukum merujuk pada regulasi yang berlaku. Mitigasi risiko hukum merupakan salah satu aspek penting yang pada hakikatnya bertujuan mengantisipasi adanya kasus hukum di masa mendatang dan menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sedang dihadapi Bank agar tidak menimbulkan kerugian baik finansial maupun non finansial.

Upaya Pengelolaan Risiko

Mekanisme pengelolaan Risiko Hukum dilakukan melalui proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Kerja hukum PaninBank ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Pada prinsip setiap unit kerja PaninBank wajib mengelola risiko hukum yang terekspos pada dalam produk atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lainnya.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank telah memahami risiko hukum yang dihadapi PaninBank dan senantiasa memberikan arahan yang jelas, pengawasan dan mitigasi secara aktif serta berupaya mengembangkan budaya Manajemen Risiko hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Legal Risk

Legal risk is the risk arising from a lawsuit by a customer or third party, either through court or outside the court (carried out by internal or external parties) and/or weaknesses in the legal aspects committed by the Bank (including the absence and/or changes in legal and regulatory documents or there is a weakness in the legal binding document).

The legal risk management framework refers to the prevailing regulations. Legal risk mitigation is one important aspect that essentially aims to anticipate future legal cases and resolve legal cases currently facing the Bank so as not to cause financial or non-financial losses.

Risk Management Efforts

The legal risk management mechanism is carried out through the identification process of measurement, monitoring and control carried out by the PaninBank legal work unit in accordance with applicable regulations. In principle, each PaninBank work unit is required to manage legal risks that are exposed in the products or activities that are its responsibility so as not to have a broad impact and trigger other risks.

Active Oversight of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Directors and Board of Commissioners of PaninBank understand the legal risks encountered by PaninBank and at all times provide clear guidelines, active supervision, and mitigation and seek to develop a culture of legal Risk Management in a comprehensive and sustainable manner.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam manajemen risiko hukum, dilakukan dengan membentuk Komite Pematau Risiko (KPR) yang bertugas mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Hukum Bank dan memastikan berjalan sesuai kerangka kerja yang ditetapkan Direksi serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Direksi dalam manajemen risiko hukum dilakukan dengan membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang anggotanya mayoritas Direksi PaninBank. KMR melakukan pertemuan secara berkala dan memberikan masukan kepada Direktur Utama terkait penerapan Manajemen Risiko Hukum PaninBank.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Untuk menerapkan Manajemen Risiko Hukum yang efektif, PaninBank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko hukum yang menjadi pedoman kerangka kerja dalam pengelolaan risiko hukum Bank. Kerangka kerja manajemen risiko hukum Bank telah dilengkapi dengan limit risiko hukum yang ditetapkan berdasarkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity, risk appetite* dan *risk tolerance*).

Kebijakan, Prosedur dan Limit risiko Hukum PaninBank telah dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja terkait agar dipahami dan dimplementasikan dalam operasional dan bisnis PaninBank sehari-hari.

Mekanisme Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Hukum

- Untuk memitigasi Risiko Hukum, PaninBank membentuk Satuan Kerja hukum yang terdiri Biro Hukum, Credit Recovery & Restructuring dan Satuan Kerja Legal Affair di Kantor Pusat dan Unit Legal dan Special Assets Management (SAM) Cabang.
- Untuk memitigasi risiko hukum, semua aktivitas operasional dan bisnis PaninBank yang terekspos risiko hukum seperti: penerbitan produk atau aktivitas baru, perikatan kredit, kontrak/kerja dengan pihak ketiga harus di-*review* dan memperoleh opini legal dari Satuan Kerja hukum. Satuan Kerja Hukum harus memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis/ pengikatan perjanjian antara PaninBank dengan para pihak sebagai prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
- Satuan kerja hukum bersama unit kerja terkait senantiasa melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya tuntutan hukum/litigasi, memberikan

Active supervision by the Board of Commissioners in legal risk management is conducted by establishing a Risk Oversight Committee (KPR) to evaluate the implementation of the Bank's Legal Risk Management and ensures that it runs according to the framework set by the Board of Directors as well as provides input to the Board of Commissioners.

The Board of Directors' active supervision in legal risk management is conducted by establishing a Risk Management Committee (KMR), most of whose members are the Board of Directors of PaninBank. KMR holds meetings regularly and provides advice to the President Director regarding the implementation of PaninBank's Legal Risk Management.

Adequacy of Policies, Procedures, and Decision of Threshold

To implement an effective Legal Risk Management, PaninBank has policies, procedures, and legal risk management limits that uses as guidelines for the framework in managing the Bank's legal risk. The Bank's legal risk management framework is equipped with legal risk limits that are determined based on the Bank's business strategy and objectives as well as the Bank's ability to take risks (risk-bearing capacity, risk appetite, and risk tolerance).

PaninBank's Policies, Procedures, and Legal Risk Limits have been communicated to all relevant work units to be understood and implemented in the Bank's daily operations and business.

Mechanism of Legal Risk Management and Control

- To mitigate Legal Risk, PaninBank established a legal work unit consisting of the Legal Bureau, Credit Recovery & Restructuring, and Legal Affairs Unit at Head Office and Branch Legal and Special Assets Management (SAM) Units.
- To mitigate legal risks, all operational and business activities of PaninBank that are exposed to legal risks such as issuance of new products or activities, credit engagements, contracts/work with third parties must be reviewed and obtain a legal opinion from the legal work unit. The Legal Work Unit must ensure the suitability and adequacy of the juridical/binding agreement between PaninBank and the parties as a precautionary principle to protect the interests of the Bank.
- Legal work units, together with related work units, constantly monitor the potential for lawsuits/litigation,

pendampingan hukum kepada pejabat/petugas Bank yang terlibat dalam permasalahan hukum dan penyelesaian perkara hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Output dari pengelolaan risiko hukum tercermin pada profil risiko hukum PaninBank.

Proses Manajemen Risiko Hukum

Pada dasarnya tujuan utama dari penerapan manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi atas suatu aktivitas PaninBank. Pengukuran risiko hukum mencakup parameter/indikator sebagai berikut:

- Faktor litigasi.
- Faktor kelemahan perikatan.
- Faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

Mitigasi Risiko Hukum

Terkait dengan implementasi manajemen risiko hukum tersebut, PaninBank telah menerapkan beberapa hal berikut:

- Pelaksanaan pengawasan risiko hukum oleh manajemen (khususnya untuk kasus-kasus hukum yang memiliki risiko hukum yang tinggi).
- Pembuatan Kerangka Acuan Hukum dan SOP Penerapan Manajemen Risiko Hukum yang antara lain mengatur tentang identifikasi dan *mapping* risiko hukum berikut mitigasinya, serta matriks parameter, baik untuk risiko inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko hukum.
- Pembentukan unit kerja yang ditunjuk manajemen untuk melakukan pengawasan dan mengelola risiko hukum yang melekat dari suatu produk dan aktivitas PaninBank agar kemungkinan risiko hukum yang ada tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko lain.

6. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat pengambilan keputusan stratejik yang tidak tepat, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu keputusan stratejik, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Risiko ini juga mencakup kemampuan Bank dalam menciptakan keunggulan kompetitif di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan bisnis tersebut, yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan.

provide legal assistance to Bank officials/officers involved in legal issues and settlement of legal cases, both through the court and outside the court.

Output from legal risk management is reflected in PaninBank's legal risk profile.

Legal Risk Management Process

Basically, the main objectives of implementing legal risk management are to ensure that the risk management process can minimize the possible negative impact of weaknesses in juridical aspects, absence and/or changes to laws and regulations, and the litigation process of a PaninBank activity. Legal risk measurement includes the following parameters/indicators:

- Litigation factors.
- Engagement weakness factor.
- The absence/change of laws and regulations.

Legal Risk Mitigation

Concerning the implementation of legal risk management, PaninBank has implemented the following:

- Implementation of legal risk oversight by management (especially for legal cases with high legal risks).
- Preparation of Legal Terms of Reference and SOP for the Application of Legal Risk Management, which among other things regulates the identification and mapping of legal risks and their mitigation, as well as a matrix of parameters, both for inherent risks and the quality of legal risk management implementation.
- Establishment of a work unit appointed by management to supervise and manage legal risks inherent in PaninBank products and activities so that the possibility of existing legal risks does not have a broad impact and becomes a trigger for the emergence of other risks.

6. Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising due to improper strategic decision making, failure to anticipate changes in the business environment, inability to carry out a strategic decision, or a combination of these things. This risk also covers the Bank's capability to create a competitive advantage in the midst of increasingly tight banking competition. Inability to face such business challenges, which continue to change from time to time, will lead to failure in achieving the vision that had been set.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko PaninBank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal PaninBank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, PaninBank senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan. Untuk mengukur kemajuan pencapaian rencana bisnis, PaninBank telah melakukan antara lain:

1. Identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko stratejik dan penyusunan laporan profil risiko stratejik secara berkala.
2. Penyusunan laporan realisasi RBB yang antara lain memuat pencapaian kinerja keuangan (realisasi *vs budget*), realisasi program kerja perusahaan/Divisi/Biro dan realisasi pengembangan/perubahan jaringan kantor.

Organisasi Manajemen Risiko Stratejik

Agar penerapan manajemen risiko stratejik berjalan efektif, PaninBank memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan risiko Stratejik, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan manajemen risiko stratejik di tingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), berfungsi untuk memberikan masukan kepada dewan komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko Stratejik Bank.

2. Di tingkat Direksi, tanggung jawab pengelolaan risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru, berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik, perbaikan/penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Stratejik dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregulatory*).

3. Biro Administrasi Keuangan (BAK) sebagai Koordinator Jenis Stratejik dan membantu Direksi dalam mengelola risiko stratejik dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.

Risk Management Efforts

PaninBank risk management is regulated in the bank's risk management policy which is prepared by referring to Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, Basel provisions, and international best practices. This policy is regularly reviewed to anticipate changes in business conditions, regulations, and internal conditions of PaninBank.

In managing strategic risk, PaninBank constantly reviews performance and evaluates policies for the preparation of business targets and takes corrective steps in preparing strategic plans and business targets by considering the internal and external conditions, if necessary. To measure the progress toward the realization of business plans, PaninBank has carried out, among others:

1. Identification, measurement, monitoring of strategic risks, and preparation of strategic risk profile reports regularly.
2. Compilation of reports regarding the RBB realization which includes among other things, the achievement of financial performance (realization vs budget), work programs realization of the company/division/Bureau, and realization of development/change of office networks.

Strategic Risk Management Organization

To effectively implement a strategic risk management, PaninBank ensures a clear segregation of duties and responsibilities in managing strategic risk as follows:

1. Supervision of strategic risk management at the Board of Commissioners level is conducted by the Risk Monitoring Committee (KPR), which functions to provide input to the Board of Commissioners regarding the Bank's Strategic Risk Management implementation.
2. At the Board of Directors level, the risk management responsibility is performed by the Risk Management Committee (KMR), the Information Technology Steering Committee (KPTI), and the New Product or Activity Launch Committee, which serves to provide recommendations to the President Director regarding the Strategic Risk Management Policy, improvement/refinement on the implementation of Strategic Risk Management and business decisions that deviate from normal (irregulatory) procedures.
3. The Financial Administration Bureau (BAK) acts as a Strategic Coordinator and assists the Board of Directors in managing strategic risk as well as facilitate change management in order to develop the company in a sustainable manner.

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari *risk owner/risk taking unit* yang bertugas memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko stratejik pada seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank berjalan efektif sesuai ketentuan Direksi.

5. Semua satuan kerja Bank (divisi/biro/group/cabang) sebagai *risk owner/risk taking unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko-risiko stratejik yang terekspos dalam unit kerjanya.
6. Sedangkan untuk mengkaji ulang pengelolaan risiko stratejik dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang Independen terhadap *risk owner/risk taking unit.*

Manajemen Risiko Stratejik

Untuk memitigasi risiko stratejik, rencana bisnis Direksi disusun secara matang dan realistis, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif sesuai arahan dari regulator. Melalui tahapan proses sebagai berikut:

1) Mengacu pada arahan regulator terkait informasi perkembangan ekonomi global dan nasional saat ini dan beberapa tahun ke depan (*outlook* ekonomi).

2) Memperhatikan kondisi kemampuan internal Bank saat ini dan strategi ke depan dengan mempertimbangkan perkembangan *peer bank* (lingkungan bisnis Bank).

3) Penyusunannya melibatkan semua satuan kerja bisnis dan pendukung PaninBank (divisi/biro/group/cabang) di bawah Koordinasi Biro Administrasi Keuangan (BAK).
4) Rencana bisnis Bank harus memperoleh persetujuan Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan

5) Opsi perubahan/revisi Rencana Bisnis Bank bila diperlukan.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko stratejik, PaninBank melakukan pemantauan realisasi rencana bisnis Bank untuk mengkaji kesesuaian rencana bisnis Bank dengan lingkungan bisnis Bank melalui:
1) Pengukuran realisasi pencapaian target aset, aset produktif, sumber dana, permodalan, laba sebelum pajak, produk/aktivitas baru, jaringan kantor dan lainnya dibanding target yang tercantum dalam rencana bisnis Bank.
2) Melakukan perbandingan parameter-parameter tertentu dengan perkembangan *peer* Bank.
3) Melakukan analisis perbandingan terhadap realisasi rencana bisnis dengan periode sebelumnya.

4. The Risk Management Unit works independently from the risk owner/risk-taking unit which tasked to monitor and ensure that the implementation of strategic risk management in all operational and business activities of the Bank runs effectively in accordance with provisions of the Board of Directors.
5. All business units of the Bank (division/bureau/group/branch) acts as risk owner/risk-taking units that are responsible for managing strategic risks exposed in their work unit.
6. On the other hand, a review of strategic risk management is carried out by the Internal Audit Unit which works independently of the risk owner/risk taking unit.

Strategic Risk Management

To mitigate strategic risks, the Board of Directors' business plan is prepared carefully and realistically, based on the principle of prudence and risk management implementation with comprehensive coverage in accordance with the regulator's direction. The process steps are as follows:
1. According to the regulator's directions regarding information on current global and national economic developments and economic outlook for the next few years.
2. Monitor the current condition of the Bank's internal capability and future strategy by taking into account the development of peer banks (the Bank's business environment).
3. The preparation involved all business work units and supports in PaninBank (divisions/bureaus/groups/branches) under the coordination of the Financial Administration Bureau (BAK).
4. The Bank's business plan must obtain the approval of the Board of Directors and the Financial Services Authority
5. Prepare an option to change/revise the Bank's Business Plan, if necessary.

In order to implement strategic risk management, PaninBank monitors the realization of the Bank's business plan to review the conformity of the Bank's business plan with the Bank's business environment through:
1. Measurement on the actual achievement of the target assets, productive assets, sources of funds, capital, profit before tax, new products/activities, office networks, and others compared to the targets stated in the Bank's business plan.
2. Compare certain parameters with the development of the Bank's peers.
3. Conduct a comparative analysis of the business plan realization with the prior period.

4) Sebagai output dari pengelolaan Risiko Stratejik adalah penilaian Profil Risiko Stratejik yang berada pada kisaran *low to moderate*, dengan nilai risiko inheren *"Low to Moderate"* dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu "*Satisfactory*".

Mitigasi Risiko Stratejik

Bank merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis.

Secara umum untuk mengelola 8 jenis risiko Bank di atas, maka kebijakan, prosedur dan penerapan manajemen risiko terus diperbaiki, diperbarui dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis Bank dan perubahan lingkungan bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko kepatuhan pada umumnya bersumber dari aktivitas yang menyimpang atau melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan guna meminimalkan dampak risiko kepatuhan sedini mungkin.

Proses Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Penerapan pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan melalui pengkajian terhadap kebijakan, produk, aktivitas, penyediaan dan penghimpunan dana serta aktivitas usaha Bank lainnya. Proses ini dilakukan untuk mendeteksi adanya potensi ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, dan standar etika bisnis yang sehat. Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dilakukan berdasarkan hasil kajian kepatuhan kebijakan dan aktivitas Bank serta pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/otoritas pengawas lain yang berwenang, termasuk ketentuan prinsip kehati-hatian Bank.

4. As the output of Strategic Risk management is an assessment of the Strategic Risk Profile categorized as low to moderate, with an inherent risk value of "Low to Moderate" and the level of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) as "Satisfactory".

Strategic Risk Mitigation

The Bank formulates risk mitigation strategies to balance risk and returns by taking into account changes in market conditions, regulations, and the business environment.

In general, in managing such 8 types of Bank risk as mentioned above, hence the policies, procedures and implementation of risk management are continuously improved, updated and refined periodically to ensure conformity with the development of the Bank's business and changes in the business environment as well as compliance with applicable regulations.

7. Compliance Risk

Compliance risk is the risk that occurs because of the Bank does not comply with and/or does not implement laws and regulations. Compliance risk generally comes from activities that deviate or violate the provisions of laws and regulations or applicable standards. Implementation of risk management for Compliance Risk is performed in order to minimize the impact of compliance risk as early as possible.

Implementation of Compliance Risk Management

Implementation of compliance risk management is conducted through a process of identification, measurement, monitoring, and risk control. The process of identification and measurement of compliance risk is carried out through an assessment of policies, products, activities, provision, and collection of funds as well as other Bank business activities. This process is carried out to detect the occurrence of any potential non-compliance with applicable laws and regulations, the principles of prudence, and sound business ethical standards. Compliance risk monitoring and control is carried out based on the results of a review of the Bank's policy compliance as well as fulfillment of the Bank's commitment to the Financial Services Authority/Bank Indonesia/other competent supervisory authorities, including the provisions of the Bank's prudential principles.

Upaya Pengelolaan Risiko

Seluruh jajaran PaninBank bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan prinsip kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya tata kelola terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi di PaninBank adalah Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha PaninBank.
4. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang dilakukan PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, Bank telah memiliki Biro Kepatuhan yang senantiasa melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan dari regulator kepada satuan kerja terkait. Kemudian unit kerja tersebut menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan pemantauan atas sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari regulator, serta memberikan opini manajemen risiko kepatuhan pada penerbitan produk/aktivitas baru dan Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK).

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka penerapan manajemen risiko Kepatuhan agar dapat berjalan berjalan efektif, PaninBank memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

Risk Management Efforts

The whole ranks of PaninBank are fully responsible for applying compliance principles in their respective activities. The organization and duties and responsibilities of the Compliance function are as follows:

1. In relation to the implementation of the Compliance Function and Implementation of Integrated Governance, the Board of Commissioners shall conduct active supervision on such implementation.
2. The committee established to assist the Board of Commissioners in conducting the oversight function of the implementation of integrated governance and integrated compliance functions at PaninBank is the Integrated Governance Committee.
3. The Board of Directors has the duty and responsibility to foster and realize the implementation of Compliance Culture as well as to ensure the implementation of compliance function at all organizational levels and PaninBank's business activities.
4. The Director in charge of compliance function is responsible for formulating a compliance culture strategy, minimizing compliance risk, determining compliance systems and procedures, and ensuring that all policies, regulations, systems, and procedures carried out by PaninBank are in accordance with laws and regulations.
5. The Compliance Unit assists and/or represents the Director in charge of the compliance function in conducting its duties and responsibilities.

To improve compliance with regulatory provisions, the Bank has a Compliance Bureau that continues to disseminate the regulations issued by regulators to the relevant business units. Then such work unit submits a report on the follow-up results to the Audit Result Report (LHP), monitors the financial penalty sanctions imposed on the Bank by the regulator, as well as provides compliance risk management opinion on the issuance of new products/activities and Credit Recommendation Memorandum (MRK).

Compliance Risk Management Organization

In order to effectively implement Compliance risk management, PaninBank ensures that there is a clear segregation of duties and responsibilities in managing compliance risk. The segregation of duties and responsibilities are as follows:

1. Pengawasan manajemen risiko kepatuhan ditingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), berfungsi untuk memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko kepatuhan berjalan sesuai ketentuan Direksi dan memberikan masukan kepada dewan komisaris terkait penerapan manajemen risiko Kepatuhan PaninBank

2. Di tingkat Direksi tanggung jawab pengelolaan risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru, berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Kebijakan Manajemen risiko Kepatuhan, perbaikan/penyempurnaan penerapan manajemen risiko Kepatuhan dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregulatory*).

3. Biro Kepatuhan sebagai Koordinator Jenis Stratejik dan membantu Direksi dalam mengelola risiko kepatuhan Bank melalui sosialisasi ketentuan regulator.

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko bekerja secara independen independen dari *risk owner/risk taking unit* yang bertugas memantau dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko kepatuhan di seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank telah berjalan efektif sesuai ketentuan Direksi.
5. Semua Satuan Kerja Bank (Divisi/Biro/Group/Cabang) sebagai *risk owner/risk taking unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko risiko kepatuhan yang terekspos dalam unit kerjanya.
6. Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen terhadap *risk owner/risk taking unit* untuk kaji ulang pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan oleh *risk owner*.

Penilaian atas Kepatuhan terhadap Regulasi

Penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dilakukan berdasarkan parameter/indikator kepatuhan yang telah ditetapkan oleh regulator, baik melalui peraturan maupun surat edaran, antara lain:
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan Bank terhadap ketentuan regulator, baik berupa jumlah/nominal sanksi denda maupun jenis yang dilakukan Bank.
2. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan Bank/*track record* kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator.

3. Pelanggaran terhadap transaksi keuangan tertentu.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).

1. Supervision of compliance risk management at the Board of Commissioners level is conducted by the Risk Monitoring Committee (KPR), which serves to monitor and ensure the implementation of compliance risk management runs according to the provisions of the Board of Directors and provide advice to the Board of Commissioners regarding the implementation of PaninBank's Compliance risk management
2. At the Board of Directors level, the risk management responsibility is held by the Risk Management Committee (KMR), the Information Technology Steering Committee (KPTI), and the New Product or Activity Launch Committee, which functions to provide recommendations to the President Director regarding Compliance Risk Management Policy, improvement/refinement to the implementation of Compliance risk management and business decisions that deviate from normal (irregulatory) procedures.
3. The Compliance Bureau acts as a Strategic Type Coordinator and assists the Board of Directors in managing the Bank's compliance risks through socialization of regulatory provisions.
4. The Risk Management Unit works independently from the risk owner/Risk Taking Unit which is assigned to monitor and ensure the implementation of Compliance risk management in all operational and business activities of the Bank has been running effectively in accordance with provisions of the Board of Directors.
5. All of the Bank's Work Units (Division/Bureau/Group/Branch) as the risk owner/risk-taking units are responsible for managing compliance risks exposed in their business units.
6. The Internal Audit Unit works independently from the risk owner/risk-taking unit to review compliance risk management which performed by the risk owner.

Assessment of Compliance with Regulatory Requirements

Compliance assessment with regulatory provisions is conducted based on the compliance parameters/indicators as stipulated by the regulator, both through regulations and circular letters, among others:
1. Types and significance of violations committed by the Bank against regulatory provisions, both in the form of nominal fines and the type of sanctions committed by the Bank.
2. Frequency of violations committed by the Bank/track record of bank compliance with regulatory requirements.
3. Violation of certain financial transactions.
4. Violation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorist Funding (APUPPT) provisions.

Pemantauan dan Pengendalian

Untuk memitigasi risiko kepatuhan, PaninBank senantiasa melakukan pemantauan dan pengendalian serta memastikan bahwa operasional dan bisnis Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:

1. Biro Kepatuhan selalu melakukan sosialisasi semua peraturan dan surat edaran yang diterbit regulator kepada satuan kerja terkait.
2. Divisi/biro/group sebagai *risk owner* melakukan kaji ulang dan pengkinian terhadap Pedoman Kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan terkini.
3. Biro Kepatuhan telah melakukan inventarisasi dan memantau serta memastikan bahwa Bank telah menyampaikan laporan baik yang *mandatory* maupun opsional kepada regulator secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
4. Pemberian kredit dengan total plafon di atas Rp60 miliar harus memperoleh opini kepatuhan dari Biro Kepatuhan
5. Melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap teguran/*reminding letter*/ sanksi/denda dari regulator
6. Menindaklanjuti semua temuan audit dari eksternal/ regulator sesuai target *date* yang telah disepakati.
7. Melakukan sosialisasi dan pelatihan APU-PPT kepada pejabat/petugas Bank dan pada program pelatihan penerimaan karyawan baru.

Output dari penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah hasil penilaian Profil Risiko kepatuhan yang berada pada kisaran "*low to moderate*", dengan nilai risiko inheren *"Low to Moderate"* dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu "*Satisfactory*".

Oversight and Control

In order to mitigate compliance risk, PaninBank continues to monitor and control as well as to ensure that the Bank's operations and business do not deviate from applicable regulatory provisions, among others:

1. Compliance Bureau always socializes all regulations and circulars issued by regulators to the relevant business units.
2. The division/bureau/group as the risk owner reviews and updates the Policy Guidelines and procedures according to the latest regulations.
3. Compliance Bureau has carried out an inventory and monitored as well as ensured that the Bank has submitted a complete, accurate and timely reports both mandatory and optional to regulators.
4. Provision of loans with total thresholds of more than Rp60 billion must obtain a compliance opinion from the Compliance Bureau
5. Monitor and take corrective steps against the reprimands/reminding letters/sanctions/fines from the regulator
6. Follow-up on all audit findings from external/regulators according to the agreed target dates.
7. Conduct the AML-CFT socialization and training for the Bank executives/officers and during the new employee recruitment training program.

The output gained from the implementation of compliance risk management is the assessment results of compliance Risk Profile which classified as "low to moderate", with the inherent risk value of "Low to Moderate" and the level of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) categorized as the "Satisfactory".

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme *monitoring*, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary* dengan didukung oleh unit kerja terkait, dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pengeloaan Risiko

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan Risiko Reputasi, PaninBank memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi terdampak pada Risiko Reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi

8. Reputational Risk

Reputation risk is managed through the mechanism of monitoring, supervision, handling, and settlement under the coordination of Corporate Secretary Division and supported by relevant work units in accordance with internal regulations and applicable laws.

Risk Management Efforts

As a form of implementation toward the Reputational Risk management policy, PaninBank ensures that all works units have performed their respective functions properly in accordance with applicable regulations. As for any events that potentially affect the Reputational Risk relating to the main duties and functions of certain works units, then such work unit is required to provide detailed information

secara rinci kepada Sekretaris Perusahaan agar kejadian tersebut dapat dikelola dengan tepat sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Saat ini, PaninBank memiliki sarana untuk menerima pengaduan dan keluhan dari nasabah melalui Call Center Panin 1500678, kantor cabang, email, dan media sosial. Pada penerapannya, Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan seluruh Kantor Cabang PaninBank dalam menangani keluhan nasabah.

PaninBank juga melakukan *monitoring* dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik yang dipublikasikan di media cetak, *online*, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi PaninBank. Selanjutnya hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi Bank secara berkesinambungan.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

1. Pengawasan manajemen risiko reputasi ditingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), berfungsi memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko reputasi berjalan sesuai ketentuan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko reputasi PaninBank.

2. Di tingkat Direksi, tanggung jawab pengelolaan risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru, berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait kebijakan manajemen risiko reputasi, perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko reputasi dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregulatoris*) atau dapat menimbulkan publikasi negatif terhadap Bank.

3. Satuan Kerja Corporate Secretary sebagai koordinator jenis reputasi dan membantu Direksi dalam mengelola risiko reputasi terkait penanganan pengaduan atau keluhan nasabah Bank.
4. Satuan kerja *call center* dan *help desk* berfungsi memberikan layanan dan menerima serta menindaklanjuti pengaduan nasabah.
5. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari *risk owner/risk taking unit* yang bertugas memantau dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko

to the Corporate Secretary so as the incident concerned can be managed appropriately as an effort to minimize the impact.

Presently, PaninBank maintains its infrastructure to receive reports and complaints from customers through Panin Call Center 1500678, branch offices, e-mail, and social media. In practice, the Corporate Secretary coordinates with all PaninBank Branch Offices in handling customer complaints.

PaninBank also periodically monitors and evaluates various news reports published in printed media, online news, electronic and social media to assess the effectiveness of PaninBank's publication and communication activities. Further, the results of monitoring and evaluation are used as the basis for publication and communication activities for the next period in order to strengthen the Bank's reputation on an ongoing basis.

Reputational Risk Management Organization

1. Supervision of reputational risk management at the Board of Commissioners level is performed by the Risk Monitoring Committee (KPR), whose function is to monitor and ensure that the implementation of reputational risk management has been run in accordance with the Board of Directors' requirements and give advice to the Board of Commissioners regarding the implementation of PaninBank's reputational risk management.
2. At the Board of Directors level, the risk management responsibility is taken by the Risk Management Committee (KMR), the Information Technology Steering Committee (KPTI), and the Committee of Product Launch or New Activity which serves to provide recommendations to the President Director regarding the reputation risk management policy, improvement or refinement to the implementation of reputation risk management and business decisions that deviate from normal (irregulatory) procedures or may cause negative publicity to the Bank.
3. The Corporate Secretary Unit acts as a reputation risk coordinator and assists the Board of Directors in managing reputation risk relating to the handling of complaints from the Bank's customers.
4. Call center and help desk work units functions to provide services and receive as well as follow up on customer complaints.
5. Risk Management Unit is work independently from the risk owner/risk-taking unit whose task is to monitor and ensure the implementation of reputation risk

reputasi pada seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank telah berjalan efektif sesuai ketentuan Direksi.

6. Semua satuan kerja Bank (divisi/biro/group/cabang) terkait sebagai *risk owner/risk taking unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko risiko reputasi yang terekspos dalam unit kerjanya.
7. Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen terhadap *risk owner/risk taking unit* untuk mengkaji ulang pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh *risk owner*.

Pengendalian Risiko Reputasi

Pengendalian risiko reputasi yang dilakukan oleh Bank antara lain:

1. Ketersedian Pedoman Kebijakan dan Prosedur standard (BPO) yang lengkap dan *up to date* sebagai panduan kerja bagi petugas Bank.
2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan *hard skill/soft skill* kepada SDM Bank agar dapat memberikan layanan yang cepat dan akurat serta *service excellence*.
3. Menyediakan sistem aplikasi tombol layanan nasabah untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah
4. Memberikan edukasi kepada nasabah tentang hal penting terkait produk/aktivitas PaninBank yang perlu dilakukan untuk kebaikan nasabah
5. Meningkatkan peran Satuan kerja *customer service, call centre* dan *help desk/complain handling* untuk menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai POJK Nomor 18/POJK.07/2016 tentang Layanan Penganduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
6. Pemantauan terhadap jumlah dan penyelesaian pengaduan nasabah, pemberitaan/publikasi negatif (*bad media report*) tentang PaninBank yang meliputi: pejabat, pemilik dan perusahaan terkait serta rekanan bisnis Bank lainnya.
7. Menerapkan transparansi produk yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Regulator mengenai transparansi produk melalui *website* Bank.
8. Pengelolaan informasi perusahaan kepada masyarakat melalui prinsip *equitable treatment* dan transparansi informasi laporan keuangan Bank kepada publik.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Penciptaan persepsi positif dilakukan melalui

management in all operational and business activities of the Bank has been run effectively in accordance with the provisions of the Board of Directors.

6. All relevant work units (divisions/bureaus/groups/branches) acts as risk owner/risk-taking units which is responsible for managing reputational risks exposed in their work unit.
7. The Internal Audit Unit works independently of the risk owner/risk taking unit to review compliance risk management carried out by the risk owner.

Reputational Risk Control

Reputational risk controls performed by the Bank include the following:

1. The availability of complete and up to date standard policy and procedure guidelines (BPO) as a work guidelines for Bank officers.
2. Provide socialization and hard skills/soft skills training to the Bank's employees in order to deliver a quick and accurate service as well as service excellence.
3. Provide a customer service button application system to measure the level of customer satisfaction
4. Transfer knowledge to customers concerning important matters relating to PaninBank products/activities that need to be executed for the customers' benefit.
5. Enhance the role of customer service, call center, and help desk/complaint management unit to receive, handle and resolve customer complaints in accordance with POJK No.18/POJK.07/2016 regarding Consumer Assistance Services in the Financial Services Sector
6. Monitor the number and settlement of customer complaints, negative news/publications (bad media reports) concerning PaninBank which include: the executives, owners, and relevant companies, as well as other Bank business partners.
7. Implement transparency of products offered to customers in accordance with regulatory requirements regarding product transparency through the Bank's website.
8. Corporate information management to the public through the principle of equitable treatment and transparency of the Bank's financial statements information to the public.

Reputational Risk Management Mechanism

Reputational risk is managed through monitoring, supervision, handling, and settlement mechanisms which is coordinated by the Corporate Secretary with reference to the provisions of the Corporate Secretary Guidelines Standard. The creation of positive perceptions is done

publikasi artikel dan berita positif di media cetak, *media online* dan media elektronik terkait aktivitas bisnis dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary.*

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Bank memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi terdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada Corporate Secretary pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Output dari proses Pengelolaan Risiko Reputasi Bank adalah profil risiko reputasi yang berada pada kisaran *low risk*, dengan nilai risiko inheren pada kisaran "*Low*" dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada kisaran "*Satisfactory*".

9. Risiko Asuransi

Organisasi & Kebijakan Manajemen Risiko Asuransi

Risiko asuransi dikelola oleh LJK (Lembaga Jasa Keuangan) asuransi dengan pengawasan dari PaninBank sebagai induk usaha. LJK (Lembaga Jasa Keuangan) asuransi telah memiliki kebijakan manajemen risiko perusahaan asuransi yang mengatur kerangka kerja manajemen risiko serta proses manajemen risiko pada perusahaan asuransi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang ditinjau secara periodik.

Kategori risiko yang dikelola Bank antara lain: risiko asuransi, risiko stratejik, risiko operasional, risiko aset & liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, dan risiko dukungan dana.

Penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi, antara lain mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi, dan Dewan Komisaris.
2. Memastikan adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
3. Memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

through the publication of articles and positive news in printed media, online, and electronic media relating to business activities in accordance with provisions of the Corporate Secretary Guidelines Standard.

Implementation of Reputation Risk Management Policies

As a form of implementation of the reputation risk management policy, the Bank ensures that all work units have performed their respective functions properly and in accordance with applicable regulations. Whereas if an event occurs that has the potential to impact on reputation risk related to the main duties and functions of certain work units, then the work unit concerned is obliged to provide detailed information to the Corporate Secretary at the first opportunity in order to manage the event quickly to minimize the impact.

The output of the Bank's Reputational Risk Management process is a reputation risk profile ranging from low risk, with an inherent risk value of "Low" and the "Satisfactory" level of Quality of Risk Management Implementation (KPMR).

9. Insurance Risk

Organization & Policy of Insurance Risk Management

Insurance risk is managed by LJK (Financial Services Institution) insurance under the supervision of PaninBank as the main entity. LJK insurance has an insurance company risk management policy that regulates the risk management framework and the risk management process for insurance companies in accordance with OJK Regulation No. 44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions which is periodically reviewed.

The risk categories managed by the Bank, include: insurance risk, strategic risk, operational risk, asset & liability risk, management risk, governance risk, and financing support risk.

The application of risk management in insurance companies includes, among others:

1. Active supervision conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Ensure the adequacy of policies, procedures, and determination of risk limits.
3. Ensure the adequacy of identification, measurement, monitoring, and risk control processes.

4. Memastikan kecukupan sistim informasi manajemen risiko.
5. Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko Asuransi

Pengelolaan Manajemen Risiko Asuransi dilakukan oleh LJK (Lembaga Jasa Keuangan) asuransi dalam group usaha PaninBank yang bergerak dalam bidang usaha asuransi. Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha entitas yang bergerak di bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. PaninBank dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran risiko asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan PaninBank tergolong *low*, yang merupakan hasil dari penilaian risiko inheren "Low" dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "*Satisfactory*".

Informasi terkait Pengungkapan prinsip-prinsip manajemen risiko dan eksposur risiko termasuk permodalan PaninBank yang mengacu kepada Surat Edaran OJK No.09/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dapat diakses pada situs *web* www.panin.co.id pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

4. Ensure the adequacy of risk management information systems.
5. Ensure the implementation of a comprehensive internal control system.

Insurance Risk Management

Insurance Risk Management is conducted by LJK (Financial Services Institution) insurance in the PaninBank business group which engaged in the insurance business. The Bank identifies and analyzes activities that can increase insurance risk exposure and affect the company's performance.

Such of this risk identification is carried out in the entity's business activities engaged in insurance business by considering its characteristics. PaninBank can combine qualitative and quantitative approaches in the process of measuring insurance risk, which will then carry out periodic risk monitoring in accordance with established procedures.

PaninBank's Financial Conglomerate Insurance Risk is categorized as low, which is the result of "Low" inherent risk assessment and the assessment of Quality of Risk Management Implementation as "Satisfactory".

Information relating to the Disclosure of risk management principles and risk exposure including the capital of PaninBank which refers to OJK Circular Letter No. 09/SEOJK.03/2020 dated 30 June 2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports can be accessed on the website www.panin.co.id in the Investor Relations section - Annual Report.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kompeten di semua tingkat merupakan kunci dari penerapan Manajemen Risiko di PaninBank. Kemampuan dan keterampilan SDM terkait dengan manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan secara internal maupun eksternal. Selain itu SDM juga diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku.

HUMAN RESOURCES

Adequate and competent Human Resources (HR) at all levels serve as the key to implementing Risk Management at PaninBank. HR capabilities and skills related to risk management continue to be improved through internal and external training. In addition, HR is also required to follow risk management certification in accordance with prevailing regulations.

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DALAM SISTEM MANAJEMEN RISIKO BANK

Teknologi informasi dan data merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank. Data yang tersedia harus merupakan data yang telah teruji integritas dan keakuratannya agar hasil pengolahannya pun dapat diandalkan.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) IN THE BANK'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

Information technology and data are part of a management information system that must be maintained and developed in accordance with the Bank's needs. The available data should be the data that has been tested for integrity and accuracy so that the processing results can be relied on.

Sistem informasi berperan penting dalam mendukung Bank dalam pengelolaan risiko. Sistem informasi diperlukan sebagai alat bantu dalam proses pengukuran dan pemantauan risiko dan pada akhirnya dapat membantu proses pengambilan keputusan yang tepat untuk dapat mengelola risiko secara efektif dan efisien.

Sistem informasi manajemen risiko dikembangkan agar dapat memastikan:

1. Terukurnya eksposur risiko secara akurat dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, serta eksposur risiko per segmen bisnis Bank;
2. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko; dan
3. Tersedianya hasil (realisasi) dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan yang digunakan untuk pemantauan risiko secara berkelanjutan agar dapat mengetahui eksposur risiko sebenarnya dan mengurangi potensi terjadinya kejadian risiko di kemudian hari.

PaninBank senantiasa mengembangkan Teknologi Informasinya baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan perkembangan bisnis dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Tren *Digital Banking* dapat menyebabkan perubahan proses bisnis dan proses manajemen risiko yang terjadi selama ini dan PaninBank telah mengantisipasi hal tersebut.

RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Bank sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan *Recovery Plan* (RP) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menyusun Pedoman RP untuk kebutuhan internal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik. Selain itu, Bank juga harus memenuhi kewajiban untuk memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.

Recovery Plan (RP) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. RP memuat skenario, indikator & *trigger level*, serta opsi-opsi pemulihan yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan memperbaiki kondisi Bank terhadap permasalahan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank telah memiliki *Recovery Plan* (RP) yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam Rapat Umum Pemegang

The information system plays an important role in supporting the Bank in risk management. Information systems are needed as a tool in the process of measuring and monitoring risk and, eventually, can help the right decision-making process to be able to manage risks effectively and efficiently.

The risk management information system are developed to ensure:

1. Accurate and timely measurement of risk exposure, both overall risk exposure and exposure per type of risk inherent in the Bank's business activities, as well as risk exposure per business segment of the Bank;
2. Compliance of the implementation of risk management with risk limit policies, procedures and determination; and
3. Availability of results compared to the targets set by the Bank in accordance with the policies and strategies for implementing risk management.

The information system must be able to produce reports that are used for continuous risk monitoring in order to determine the true risk exposure and reduce the potential for risk events in the future.

PaninBank continues to develop its Information Technology both independently and in collaboration with third parties vendors, in accordance with fast-paced developments in the business environment and in digital technology. PaninBank has anticipated trends in Digital Banking that can lead to changes in business processes and risk management processes.

ACTION PLAN (RECOVERY PLAN)

Banks as one of the Systemic Banks in Indonesia are required to prepare and submit a Recovery Plan (RP) to the Financial Services Authority (OJK) and prepare RP Guidelines for internal needs in accordance with the provisions as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.03/2017 concerning Recovery Plan for Systemic Banks. In addition, the Bank must also fulfill the obligation to have debt or investment instruments that have capital characteristics.

Recovery Plan (RP) is a plan to overcome financial problems that may occur in the Bank. RP contains scenarios, indicators & trigger levels, as well as recovery options aimed at preventing, restoring and improving the condition of the Bank against financial problems.

Recovery Plan (RP) is a plan to overcome financial problems that may occur in the Bank. RP contains scenarios, indicators & trigger levels, as well as recovery options aimed at preventing,

Saham (RUPS) serta ditandatangani oleh PSP, Presiden Komisaris, dan Presiden Direktur.

Bank menetapkan *trigger level* untuk kondisi "Pencegahan", "Pemulihan" dan "Perbaikan" terhadap 4 aspek utama yaitu Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset.

Opsi Pemulihan untuk masing-masing aspek telah diidentifikasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila *trigger level* terlewati sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu Buku Pedoman dan Prosedur yang telah disampaikan juga kepada OJK.

INISIATIF PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2021

Secara umum, kondisi tahun 2021 masih akan sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan seberapa cepat pemulihan dapat terjadi. Sehingga fokus pengelolaan risiko masih sejalan dengan tahun 2020 yaitu terutama pada risiko kredit dan risiko operasional serta risiko lain yang mengikutinya.

Sesuai dengan strategi bisnis dan memperhitungkan kondisi makro ekonomi, secara berkala PaninBank akan melakukan *review Risk Appetite & Risk Tolerance*, mengkinikan Kebijakan manajemen risiko secara umum, meningkatkan kecukupan organisasi dan SDM Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan menguatkan pemantauan manajemen risiko anak perusahaan.

PaninBank memiliki inisiatif untuk beberapa area peningkatan penerapan manajemen risiko yang akan dilakukan di tahun 2021, yaitu:

1. Kaji ulang dan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko
2. Mengkinikan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* serta menyelaraskannya dengan *strategic objective* dan *Recovery Plan* PaninBank
3. Meningkatkan program budaya risiko
4. Mengefektifkan kembali fungsi koordinasi dan penyusunan SOP secara *bank wide*
5. Meningkatkan kecukupan organisasi dan SDM Satuan Kerja Manajemen Risiko
6. Mengevaluasi dan mengkinikan konten RSCA untuk mencerminkan titik-titik risiko dari aktivitas/proses baru/terkini
7. Menguatkan pemantauan manajemen risiko anak perusahaan
8. Meningkatkan pengawasan dan pelaporan kepada Komite Manajemen Risiko
9. Mengimplementasikan *enterprise risk assessment* pada Rencana Bisnis Bank dengan *output* antara lain *enterprise risk register* dan *emerging risk*

restoring and improving the condition of the Bank against financial problems.

The Bank sets a trigger level for the conditions of "Prevention", "Recovery" and "Improvement" on 4 main aspects, namely Capital, Liquidity, Profitability, and Asset Quality.

Recovery options for each aspect have been identified and steps that need to be taken if the trigger level is exceeded as stipulated in the Manual and Procedure Guidelines that has also been submitted to the OJK.

RISK MANAGEMENT INITIATIVES FOR 2021

In general, the upcoming conditions for 2021 will much remain to be greatly affected by the COVID-19 pandemic and by how quickly the economic recovery could occur. Thus, the focus of risk management will still be in line with those in 2020, especially on credit risk and operational risk as well as other risks that follow.

In accordance with the business strategy and taking into account the macroeconomic conditions, PaninBank will periodically review the Risk Appetite & Risk Tolerance, update the risk management policies in general, increase the adequacy of the Risk Management Unit organization and personnel, and strengthen the risk management monitoring of subsidiaries.

Initiatives by PaninBank to improve the implementation of risk management in 2021 include:

1. Review and update the Risk Management Policy
2. Update the Risk Appetite and Risk Tolerance and aligning them with PaninBank's strategic objectives and Recovery Plan
3. Improve the risk culture program
4. Reactivate the coordination function and formulation of bank wide SOPs
5. Increase the adequacy of the organization and human resources of the Risk Management Unit
6. Evaluate and update RSCA content to reflect risk points of new/recent activities/processes
7. Strengthen the risk management monitoring of subsidiaries
8. Improve supervision and reporting to the Risk Management Committee
9. Implementing an enterprise risk assessment in the Bank's Business Plan with outputs including enterprise risk register and emerging risk

10. Meningkatkan kapabilitas sistem informasi manajemen risiko
11. Menguatkan pengendalian intern
12. Meningkatkan lingkup dan kualitas analisis risiko
13. Menguatkan *Business Continuity Management*
14. Mengevaluasi dan mengkinikan *Key Risk Indicator* (KRI)
15. Mengevaluasi proses manajemen risiko secara berkala

Terkait risiko kredit, meningkatnya kredit-kredit yang direstrukturisasi pada tahun 2020 sejalan dengan POJK Stimulus/Relaksasi Debitur terdampak COVID-19. Di tahun 2021:

- Menjaga pertumbuhan kredit PaninBank pada tingkat yang *acceptable* dengan tetap *prudent*.
- Bank dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu (*early warning*) apabila terjadi penurunan kualitas kredit.
- Melakukan *Stress Test* dengan beberapa skenario.
- Membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara konservatif untuk memitigasi peningkatan kredit-kredit bermasalah.
- Meningkatkan fungsi pemantauan dan pengendalian risiko dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap proses pemantauan dan pengukuran risiko secara terintegrasi.

Dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat awal pandemi, risiko inheren operasional sudah menurun karena operasional Bank sudah lebih siap dengan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, risiko operasional masih perlu mendapat perhatian karena sampai saat ini masih beroperasi di luar kondisi normal.

Risiko seperti risiko hukum, kepatuhan, reputasi dan strategik juga perlu diperhatikan sebagai turunan dari meningkatnya risiko kredit dan risiko operasional.

Untuk itu, hal-hal yang menjadi perhatian Bank di tahun 2021 adalah:

- Meningkatkan fungsi/peran manajemen risiko operasional dan risiko lainnya mendukung proses operasional dan bisnis Bank yang efektif dan efisien sehingga insiden-insiden kerugian risiko operasional dapat diminimalkan.
- Meningkatkan *monitoring* terhadap pengaduan nasabah dan memastikan semua pengaduan nasabah telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan *monitoring* parameter-parameter pencapaian target bisnis Bank sesuai rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan.

10. Increase the capability of the risk management information system
11. Strengthen internal control
12. Increase the scope and quality of risk analysis
13. Strengthen the Business Continuity Management
14. Evaluate and update the Key Risk Indicator (KRI)
15. Evaluate the risk management process regularly

In terms of credit risk, an increase in restructured credit in 2020 in line with POJK Stimulus/Relaxation of Debtors affected by COVID-19. In 2021:

- Maintain PaninBank credit growth at an acceptable level while remaining prudent.
- Closely monitors the development of the Bank's credit portfolio which enables the Bank to take precautionary measures on time (early warning) in the event of a decline in credit quality.
- Perform a Stress Test with several scenarios.
- Establish a conservative allowance for impairment losses (CKPN) to mitigate the increase in non-performing loans.
- Improve risk monitoring and control functions in the context of Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
- Conduct a comprehensive review of the integrated risk monitoring and measurement process.

Compared to 2020 at the onset of the pandemic, the inherent operational risk has decreased due to the Bank's operations was more prepared with some adjustments. Nevertheless, the operational risk still needs to get attention, as bank operations are still have been running outside normal conditions.

Other types of risk such as legal, compliance, reputation and strategic risks also need to be considered as derivatives of increased credit risk and operational risk.

Accordingly, some topics that will be the Bank's concern in the coming 2021, as follows:

- Improve the function/role of operational risk management and other risks to support effective and efficient operational and business processes of the Bank in order to minimize incidents of operational risk losses.
- Improve the monitoring of customer complaints and ensure that all customer complaints have been resolved in accordance with applicable regulations.
- Improve the monitoring of the parameters for achieving the Bank's business targets according to the Bank's business plan.

- Meningkatkan *monitoring* terhadap kasus dan penyelesaian perkara hukum Bank terutama terkait dengan penyelesaian kredit, serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan Bank, baik kerugian aktual maupun potensial.
- Meningkatkan *monitoring* terhadap kepatuhan Bank dalam memenuhi ketentuan regulator khususnya terkait *reminding letter* maupun denda yang dari regulator.
- Melakukan uji coba perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar.

TABEL MANAJEMEN RISIKO

Dalam Rangka memberikan informasi mengenai penerapan manajemen risiko yang lebih transparan, Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Sebagaimana diwajibkan oleh regulator melalui peraturan tersebut, Bank secara berkala menyampaikan pelaporan terkait pengungkapan kuantitatif eksposur risiko dan permodalan baik secara individual (*bank only)* maupun konsolidasian sepanjang 2020. Tabel-tabel risiko Bank tersebut dapat diakses secara terpisah melalui situs *web* PaninBank: www.paninbank.co.id >> About Us >> Laporan Tahunan.

- Improve the monitoring of cases and settlement of Bank legal cases, especially those related to credit settlement, as well as costs that must be incurred by the Bank, both actual and potential losses.
- Improve the monitoring of the Bank's compliance in meeting regulatory requirements, particularly regarding reminding letters and fines issued by regulators.
- Test the calculation for Operational Risk RWA using a standardized approach.

RISK MANAGEMENT TABLE

In order to provide information regarding the implementation of more transparent risk management, the Bank refers to Financial Services Authority Regulation Number 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports and Financial Services Authority Circular Letter Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

As required by regulators through this regulation, the Bank periodically submits reports relating to quantitative disclosure of risk exposure and capital both on individual (bank only) and consolidation basis throughout 2020. The Bank's risk tables can be accessed separately through the PaninBank website: www.paninbank.co.id >> About Us >> Annual Report.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

497 **Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Corporate Social Responsibility Governance

499 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia**
Commitment and Policy on Social Responsibility related to Human Rights

500 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil**
Commitment and policy on Social Responsibility related to Fair Operations

500 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup**
Commitment and Policy on Social Responsibility related to the Environment

503 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja**
Commitment and Policy on Social Responsibility related to Employment, Occupational Health and Safety

504 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan**
Commitment and Policy on Social Responsibility related to Community Development

507 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Nasabah**
Commitment and Policy on Social Responsibility related to the Customer

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Berada di tengah masa pandemi COVID-19 yang cukup sulit, pada akhirnya mendorong Bank untuk tanggap, serta lebih terlibat dan berperan aktif dalam mendukung kualitas kehidupan komunitas dan masyarakat luas.

In the midst of a challenging COVID-19 pandemic, the Bank is encouraged to be responsive, and more involved, playing an active role in supporting the quality of life of communities and the society in general.

Bank memandang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/"CSR") sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal pengelolaan usaha bagi sebuah entitas bisnis kepada para pemangku kepentingannya *(stakeholders)*. Berangkat dari kesadaran tersebut, Bank telah menyusun program dan kegiatan CSR dengan nama "Panin Peduli" yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, sejatinya pelaksanaan CSR Bank tidak semata sebagai sebuah rutinitas tahunan yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi, namun lebih besar daripada itu yakni sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat kepada para *stakeholders* dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

The Bank views the implementation of Corporate Social Responsibility ("CSR") as a form of responsibility in terms of business management for a business entity to its stakeholders. With this awareness, the Bank each year regularly prepares and implements CSR programs and activities under the 'Panin Peduli' umbrella program. However, in fact, the Bank's CSR implementation is not merely an annual routine that aims to comply with regulatory requirements, but is greater than that, particularly as a form of contribution and giving benefits to stakeholders in an effort to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, PaninBank selalu berusaha menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara keuntungan (*profit*), lingkungan (*planet*), dan masyarakat sekitar (*people*). Pelaksanaan CSR PaninBank dilaksanakan melalui program "PaninPeduli" yang mencakup berbagai aktivitas, antara lain peningkatan kesehatan, menjaga lingkungan hidup, bantuan sosial dan penanggulangan bencana, pendidikan dan olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

In carrying out banking business activities, PaninBank always tries to maintain balance and harmony between profit, the environment (planet), and the surrounding community (people). PaninBank's CSR implementation is carried out through the "PaninPeduli" program which includes various activities, including improving health, protecting the environment, social assistance and disaster management, education and sports, religious activities and other social activities.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komitmen Tanggung Jawab Sosial

Hampir 5 (lima) dekade berdiri, Bank menyatakan kesungguhan dan komitmen besarnya untuk terus memperbesar peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri maupun komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Setiap tahun, program dan/atau kegiatan CSR Bank dievaluasi secara menyeluruh agar tepat menyasar para penerima manfaat, sehingga Bank berharap dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan serta menempatkannya dalam jajaran warga korporasi yang memiliki reputasi tanggung jawab sosial yang baik. Komitmen besar Bank terhadap pelaksanaan CSR sekaligus merupakan bentuk pemenuhan dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Social Responsibility Commitment

Over the past 5 (five) decades of journey, the Bank has expressed its seriousness and commitment to continue to expand its role in supporting sustainable economic development in order to improve the quality of life and a beneficial environment, both for the Bank itself and the local community and society in general.

Each year, the Bank's CSR programs and/or activities are thoroughly evaluated to target the right beneficiaries, so that the Bank can provide contribution and give positive value added to sustainable growth, and position of the Bank in the ranks of corporate citizens who have a good reputation for social responsibility. The Bank's commitment to CSR implementation is also a form of fulfillment and compliance with the provisions of POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the implementation of sustainable finance.

Dasar Kebijakan Tanggung Jawab Sosial

Penyelenggaraan kegiatan CSR PaninBank mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Legal Basis for Social Responsibility Policy

The implementation of CSR activities by PaninBank refers to a number of applicable laws and regulations, including:

1. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
2. Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012 dated August 1, 2012 concerning Submission of the Annual Report of Issuers or Public Companies.
3. Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program dan/atau kegiatan CSR Bank dilakukan secara berkesinambungan yang ruang lingkupnya mencakup perlindungan terhadap nasabah, kepatuhan kepada regulator, serta pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bank juga menyatakan kesungguhan dalam mendukung dan senantiasa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SDGs, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program CSR di lingkungan Bank, salah satunya melalui pelaksanaan program kesehatan dan upaya mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam 17 tujuan program SDGs.

Sejak bulan Februari 2020, PaninBank resmi tercatat sebagai anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), bersama 8 bank besar lainnya di Indonesia. Bergabungnya PaninBank didalam IKBI menjadi wujud komitmen Bank dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan yang inklusif pada sektor jasa keuangan.

Scope of Corporate Social Responsibility

The Bank's CSR programs and/or activities are conducted on an ongoing basis, which are the scope of implementation covers customer protection, compliance with regulators, as well as community empowerment and environmental preservation.

The Bank also expressed its seriousness to support and to always actively participating in attaining the SDGs, both directly and indirectly, through CSR activities and programs, one of them is through the implementation of health programs and efforts to support the level of community welfare which are included in the 17 program objectives of the SDGs.

Since February 2020, PaninBank has been officially registered as a member of the Indonesian Sustainable Finance Initiative (IKBI), along with 8 other major banks in Indonesia. The joining of PaninBank in IKBI is a manifestation of the Bank's commitment to implementing inclusive sustainable finance practices in the financial services sector.

Strategi Penerapan Program CSR

Strategi pelaksanaan program dan kebijakan alokasi anggaran CSR disusun secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pada implementasinya, program CSR PaninBank disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan nilai keberlanjutan dari program tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat lebih kepada para pemangku kepentingan, termasuk bagi komunitas sekitar lingkungan operasional Bank.

CSR Program Strategy

The CSR program implementation strategy and budget allocation policy are prepared comprehensively by prioritizing the principle of prudence. In its implementation, the PaninBank's CSR program is tailored to the needs of the community and takes into account the sustainability value of the program. Thus, it is expected that it can provide added value and more benefits to stakeholders, including the communities around the Bank's operational environment.

Pembiayaan dan Anggaran CSR Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah merealisasikan anggaran CSR sebesar Rp40,76 miliar dengan rincian sebagai berikut:

CSR Funding and Budget for 2020

Throughout 2020, the Bank has realized its CSR budget of Rp40.76 billion with the following details:

(Rp Juta) (Rp Million)

Kegiatan	2020	Activity
Kesehatan, berupa pengadaan Rumah Sakit dan Sarana Penunjang, Pengadaan APD dan Rapid Test, Donor Darah	39.912	Health, in the form of procurement of hospitals and supporting facilities, procurement of PPE and rapid tests, and blood donations
Lingkungan (Penghijauan)	109	Environment (Reforestation)
Sosial dan Penanggulangan Bencana	183	Social and Disaster Management
Pendidikan dan Literasi Keuangan	394	Education and Financial Literacy
Kegiatan Sosial Lainnya	165	Other Social Activities
Total	**40.763**	**Total**

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Komitmen dan Kebijakan

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan setiap harinya, Bank berkomitmen menghormati hak dasar yang dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menyadari hal tersebut, Bank telah merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM agar seluruh kegiatan usaha Bank tidak bersinggungan bahkan bertentangan dengan unsur-unsur pelanggaran HAM.

Sepanjang tahun 2020, Bank telah merumuskan sejumlah program dan/atau kegiatan CSR yang bertujuan untuk mendukung penegakkan aspek HAM di lingkungan Bank, antara lain:

- **Membantu Kelompok Rentan**
  Bank telah mengidentifikasi kelompok atau komunitas rentan yang berada di sekitar lingkungan operasional dan memberikan pernyataan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan Bank tidak akan mendiskriminasi dan tidak akan memanfaatkan atau mencelakakan kelompok rentan secara sepihak.
- **Perlakuan Adil dan Setara**
  Bank menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi konsumen dan mitra usaha, serta karyawan agar masing-masing pihak mendapatkan perlakuan yang tidak dibeda-bedakan.
- **Menghormati Hak Sipil dan Politik**
  Bank memberikan ruang bagi nasabah dan karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpendapat dan berekspresi serta berkumpul sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Commitment and Policy on Social Responsibility related to Human Rights

Commitment and Policy

In carrying out daily banking business activities, the Bank is committed to respecting the basic rights possessed by all human beings, including but not limited to civil, political, economic, social and cultural rights. Thus, the Bank has formulated a policy on corporate social responsibility related to human rights principles so that all of the Bank's business activities do not conflict with elements of human rights violations.

Throughout 2020, the Bank has formulated a number of CSR programs and/or activities aimed at supporting the enforcement of human rights aspects within the Bank, as follows:

- **Helping Vulnerable Groups**
  The Bank identified vulnerable groups or communities around the operational area and affirmed the statement that all business activities performed by the Bank will not discriminate and will not unilaterally exploit or harm vulnerable groups.
- **Fair and Equal Treatment**
  The Bank upholds the principles of fairness and equality for consumers and business partners, as well as employees so that each party should be treated fairly and equitably.
- **Respect Civil and Political Rights**
  The Bank gives freedom for customers and employees, as well as other stakeholders to have an opinion and expression and to gather as regulated in prevailing laws and regulations.

- **Menghormati Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**
  Hak untuk memperoleh akses bidang ekonomi, hak kesehatan, pendidikan, dan budaya, termasuk juga mengidentifikasi kaum rentan untuk ikut dapat mengakses bidang-bidang tersebut.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

Komitmen dan Kebijakan

Seluruh kegiatan operasional bisnis Bank senantiasa berpedoman pada kebijakan internal yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kepatuhan Bank dari tindakan yang bersifat melanggar regulasi dan dapat merusak citra atau reputasi Bank dikemudian hari.

Komitmen Bank dalam menegakkan prinsip operasi yang adil tercermin dari implementasi tata kelola perusahaan Bank yang diterapkan terintegrasi. Bank juga telah memiliki perangkat kebijakan internal yang selalu diperbaharui secara berkala agar senantiasa selaras dengan kebutuhan dan dinamika bisnis Bank, serta dalam rangka menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi terkait.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Komitmen dan Kebijakan

Meskipun *core business* Bank tidak berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi alam, Bank berkomitmen akan terus mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan alam melalui berbagai inisiatif pelestarian lingkungan, penerapan

- **Respect for Economic, Social and Cultural Rights**
  Having right to access the economic sector, the right to health, education and culture, as well as identifying vulnerable groups so as they are enabled to access these fields.

Commitment and policy on Social Responsibility related to Fair Operations

Commitment and Policy

In carrying out all of its business operations, the Bank always refers to internal policies that are in accordance with prevailing laws and regulations. This is performed to maintain the quality of the Bank's compliance from any actions that violate regulations and may damage the image or reputation of the Bank in the future.

The Bank's commitment to upholding fair operating principles is reflected in the integrated implementation of the Bank's corporate governance. The Bank also has an internal policy tool which is always updated regularly to always be in line with the Bank's business needs and dynamics, as well as in order to ensure the Bank's compliance with related regulations.

Commitment and Policy on Social Responsibility related to the Environment

Commitment and Policy

Although the Bank's core business is not directly related to natural exploration activities, the Bank is committed to continuously gives support to all of the efforts in conserving the environment through various environmental conservation

kegiatan operasional ramah lingkungan hingga penyaluran kredit pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Sampai saat ini, Bank telah mengambil langkah-langkah kebijakan internal yang bertujuan untuk meminimalisir kegiatan yang dapat menimbulkan risiko/dampak operasional bagi lingkungan sekitar.

Dampak, Target, dan Kegiatan Tahun 2020

Bank merumuskan dan menerapkan inisiatif kegiatan CSR berwawasan lingkungan hidup yang sudah berjalan cukup lama hingga saat ini. Bentuk komitmen Bank terhadap isu pelestarian lingkungan diwujudkan melalui implementasi *Environmental and Social Management System* (ESMS) dalam penyaluran kredit kepada sektor tertentu, penerapan inisiatif kegiatan perkantoran ramah lingkungan, penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan konsisten menyelenggarakan program penanaman pohon (*Reforest Indonesia*)

Pemanfaatan Energi, Kertas, dan Plastik

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Bank telah menerapkan program penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan mudah daur ulang, mengoptimalkan pemakaian energi, serta meminimalisir konsumsi material kertas *(paperless)* dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan internal. Hal ini selaras dengan *roadmap* digitalisasi Perseroan yang secara tidak langsung bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses kebutuhan informasi untuk kepentingan operasional.

Selain itu, Bank juga secara konsisten menggaungkan program *"People (Not Plastic) for the Planet"* sebagai bagian dari program *Save Our Planet.* Melalui program ini, Bank berupaya menumbuhkan dan membangun budaya kesadaran setiap karyawan agar semakin bijak dalam menggunakan bahan plastik dalam aktivitas sehari-hari.

Sepanjang tahun 2020, Bank telah menerapkan sejumlah inisiatif atau kegiatan CSR dibidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang berisiko bagi alam sekitar sehingga Bank turut berperan aktif dalam mendukung pelestarian lingkungan bagi generasi penerus bangsa, antara lain:

initiatives, implementation of environmentally-friendly operational activities, and distribute credit to eco-friendly business activities. To date, the Bank has taken internal policy steps which intend to minimize activities that may pose a risk/impact.

Impacts, Targets, and Activities in 2020

The Bank formulates and implements environmental CSR initiatives that have been running for a long time to date. Real form of the Bank's commitment to the environmental conservation issues is manifested through the implementation of Environmental and Social Management System (ESMS) while distributing credit to certain sectors, implementation of eco-friendly workplace initiative, provide credit to Environmentally Friendly Business Activities segments and consistently organizes the tree planting programs. (Reforest Indonesia)

Energy, Paper and Plastics Usage

In conducting daily operational activities, the Bank has implemented a program to use an eco-friendly and easily recycled raw materials, optimize the energy use, and reduce the use of paper material (paperless) in disseminating information and internal policies. This is in line with the Company's digitalization roadmap, which indirectly intends to simplify and accelerate access to information needs for operational purposes.

In addition, the Bank also consistently promotes the "People (Not Plastic) for the Planet" program as part of the Save Our Planet program. Through this program, the Bank seeks to foster and build a culture of awareness for every employee so as they become wiser in using plastic materials in daily activities.

Throughout 2020, the Bank has implemented a number of CSR initiatives or activities in the environmental sector to minimize the negative impacts that may pose some risks to the surrounding environment so that the Bank plays an active role in supporting environmental preservation for the nation's future generations, including:

(Rp Juta) (Rp Million)

No.	Program	Pelaksanaan Kegiatan Implementation of Activities	Biaya Expenses	Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Conformance with the Sustainable Development Goals
1.	Pembibitan dan Penanaman Pohon Trembesi Rain tree nursery and planting	Berkesinambungan Continuous	83,85	Menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan Stopping and rehabilitating land degradation
2.	Pemeliharaan Pohon Trembesi Maintenance of Rain Trees	Berkesinambungan Continuous	25,22	Menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan Stopping and rehabilitating land degradation

Penanaman Pohon (Reforest Indonesia)

Perubahan iklim yang terjadi pada skala global salah satunya disebabkan oleh dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin buruk setiap tahunnya. Berangkat dari kesadaran akan hal tersebut, Bank terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya ekosistem lingkungan hidup yang berkualitas demi generasi penerus.

Salah satu bentuk komitmen PaninBank ditunjukkan dengan program Reforest Indonesia yang juga sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan "Satu Miliar Pohon" yang diresmikan Presiden Republik Indonesia. Melalui program ini, Bank mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Tree Planting (Reforest Indonesia)

Climate change occurring on a global scale is caused by the impact of environmental damage which is likely to be worse each year. Based on this awareness, the Bank continues to strive to increase its contribution in supporting the creation of a quality environmental ecosystem for future generations.

One of PaninBank's commitment is shown by the Reforest Indonesia program which is also a form of support for the "One Billion Trees" movement which was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia. Through this program, the Bank invites the public to be actively involved and participate directly in preserving the environment.

Sistem Pengelolaan Limbah

Bank menghasilkan limbah padat berupa sampah dari aktivitas perkantoran dan limbah cair dari air buangan perkantoran. Pengelolaan limbah cair oleh Bank dilakukan dengan memanfaatkan pengelolaan limbah air berupa *sewage treatment plant* sehingga dapat menghemat biaya pengelolaan lingkungan.

Disamping itu, Bank juga menyiapkan tempat-tempat sampah yang cukup banyak di area kantor pusat dan kantor-kantor cabang untuk selanjutnya sampah-sampah tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola oleh pihak ketiga. Sementara sampah dedaunan yang rontok di area terbuka hijau dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Waste Management System

The Bank produces solid waste in the form of waste from office activities and liquid waste from office waste water. Liquid waste management managed by the Bank is by utilizing wastewater treatment in the form of a sewage treatment plant so it can save the cost of environmental management.

In addition, the Bank has also prepared many trash bins in the head office and branch offices henceforth such waste is disposed of to the landfill (TPA) managed by the third party. Meanwhile, the fallen leaf litter in green open areas is to be used as organic fertilizer.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Bank tidak menyediakan kanal atau media pengaduan khusus terkait masalah lingkungan ataupun pengelolaan limbah. Akan tetapi, Bank memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bisnis Bank telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Environmental Complaints Mechanism

The Bank does not provide specific means or media for complaints relating to the environmental problems or waste management. However, the Bank ensures that all of Bank's operational business activities are in accordance with the rules and regulations of the law, particularly Law no. 32 of 2009 concerning the Environment.

Sertifikasi dibidang Lingkungan Hidup

Hingga akhir 2020, Bank belum mendapatkan sertifikasi yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup dikarenakan *core business* Bank yang tidak relevan dengan hal tersebut.

Environmental Certification

Until the end of 2020, the Bank had not received certification that was directly related to the environment due to the Bank's core business is not relevant to this.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Komitmen dan Kebijakan

Bank senantiasa memandang keberadaan karyawan sebagai aset penting yang menentukan keberlangsungan usaha pada jangka panjang. Meyakini hal tersebut, Bank selalu memprioritaskan pemenuhan hak-hak karyawan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, Bank telah menerapkan kebijakan internal terkait pengelolaan SDM yang bertujuan agar para karyawan mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Dampak, Target, dan Kegiatan Tahun 2020

Sejauh ini ruang lingkup CSR Bank yang berkaitan dengan ketenagakerjaan mencakup area berikut ini, antara lain:

- **Ketenagakerjaan**
  Bank menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia seluruh karyawan melalui penegakan prinsip kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, pemberian remunerasi yang kompetitif, sistem promosi karier berjenjang, dan kebebasan berserikat.

  Uraian lebih lengkap mengenai hal-hal di atas telah diungkapkan pada Bab Fungsi Pendukung, sub-bab Sumber Daya Manusia (SDM), dalam Laporan Tahunan ini.

Commitment and Policy on Social Responsibility related to Employment, Occupational Health and Safety

Commitment and Policy

The Bank always considers the existence of employees as an important asset that determines the long-term business continuity. Therefore, the Bank always prioritizes the fulfillment of employees' rights based on prevailing laws and regulations, namely Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. To that end, the Bank has implemented an internal policy relating to HR management which aims to ensure that each employee experience a safe and comfortable work environment.

Impacts, Targets, and Activities in 2020

So far, the scope of the Bank's CSR-related to manpower covers the following areas, including:

- **Employment**
  The Bank guarantees the fulfillment of rights of all employees by upholding the principle of gender equality in employment opportunities, equality in participating in education and training programs, providing competitive remuneration, a tiered career promotion system, and freedom of association.

  A more complete description of the above matters has been disclosed in the Support Functions Chapter, sub-chapter Human Resources (HR), in this Annual Report.

- **Kesehatan**
  Bank juga mendaftarkan seluruh karyawannya pada program Asuransi BPJS serta bekerja sama dengan Asuransi Multi Artha Guna dalam hal proteksi kesehatan bagi karyawan dan keluarga. Perlindungan kesehatan bagi karyawan mencakup rawat inap di rumah sakit, rawat jalan, penggantian kacamata, *medical check-up,* dan penggantian biaya persalinan hingga anak ke-3.

- **Keselamatan Kerja**
  Bank memiliki pedoman/panduan keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Akan hal ini, Bank memastikan kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung kantor agar selalu *comply* dengan standar keselamatan yang berlaku. Baik gedung kantor pusat maupun kantor-kantor cabang telah diperlengkapi dengan perangkat keselamatan seperti APAR, *Smoke detector, Diesel Pump*, dan Tangga Darurat. Selain itu, seluruh karyawa Bank juga sudah diikutsertakan sebagai peserta Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti, yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK).

- **Peran Bank Bagi Karyawan di Masa Pandemi**
  Dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 selama masa pandemi baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang, Bank telah menerapkan sejumlah kebijakan internal dan program tanggap darurat COVID-19 yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan.

  Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Bank dalam menjaga kesehatan dan keselamatan para karyawan selama menjalankan kegiatan usaha perbankan sehari-hari di masa pandemi, di antaranya dengan membagikan Vitamin C gratis kepada seluruh karyawan, memberikan fasilitas *rapid test* gratis secara berkala kepada karyawan, serta menyediakan *Swab* Antigen gratis kepada karyawan yang masuk kategori *suspect* atau bergejala mengidap virus COVID-19.

- **Health**
  The Bank also registers all of its employees in the BPJS Insurance program and collaborates with Multi Artha Guna Insurance in terms of health protection for employees and their families. Health protection for employees includes hospitalization, outpatient care, replacement of glasses, medical check-ups, and reimbursement of childbirth costs up to the 3rd child.

- **Work Safety**
  The Bank has work safety guidelines that shall be complied with by all employees. In this regard, the Bank ensures the readiness of equipment and safety facilities for the office building to continuously comply with applicable safety standards. Both head office and branch offices are equipped with safety equipments such as fire extinguishers, smoke detectors, diesel pumps and emergency stairs. In addition, all of Bank's employees have also been included as participants in Social Security for Workers (Jamsostek) through BPJS Ketenagakerjaan. The programs that are followed are as follows: Pension Benefits, Work Accident Benefits, and Death Protection.

- **The Role of the Bank for Employees During the Pandemic**
  In order to cope with the spread of COVID-19 during the pandemic period both at the head office and in branch offices, the Bank has implemented a number of internal policies and a COVID-19 emergency response program that must be obeyed by all employees.

  This is one of the Bank's efforts to maintain the health and safety of all employees while carrying out daily banking business activities during the pandemic, including by distributing free Vitamin C to all employees, providing free rapid test facilities on a regular basis to employees, as well as providing free antigen swab test to employees who are categorized as suspect or symptomatic of the COVID-19 virus.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Komitmen dan Kebijakan

Bank senantiasa berusaha menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata Bank dalam meningkatkan

Commitment and Policy on Social Responsibility related to Community Development

Commitment and Policy

The Bank seeks to harmonize its presence and business activities in the community. This is done as a part of the Bank's real support in improving welfare and encouraging the quality

kesejahteraan dan mendorong kualitas kehidupan masyarakat sekitar yang juga disadari berperan sebagai pemangku kepentingan utama Bank.

Oleh karena itu, Bank secara konsisten menaruh perhatian besar terhadap program CSR bidang pengembangan sosial kemasyarakatan. Program literasi keuangan menjadi salah satu kegiatan utama yang rutin diselenggarakan Bank setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi wujud pemenuhan Bank terhadap regulasi POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Dampak, Target, dan Kegiatan Tahun 2020

Berada ditengah masa pandemi COVID-19 yang cukup sulit, pada akhirnya mendorong Bank untuk tanggap, serta lebih terlibat dan berperan aktif dalam mendukung kualitas kehidupan komunitas dan masyarakat luas. Sadar akan hal tersebut, sepanjang tahun 2020, Bank kembali menyelenggarakan sejumlah kegiatan CSR yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19, antara lain:

of life of the surrounding community who are also recognized as the main stakeholders of the Bank.

Therefore, the Bank consistently gives great attention to CSR programs in the field of social development. Financial literacy program is one of the Bank's main activities that are regularly held each year. The implementation of this activity is also a manifestation of the Bank's compliance with POJK Regulation No. 76/POJK.07/2016 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or Communities.

Impacts, Targets, and Activities in 2020

In the midst of a challenging COVID-19 pandemic, the Bank is encouraged to be responsive, and more involved, playing an active role in supporting the quality of life of the community and the wider community. Realizing this, throughout 2020, the Bank has organized a number of CSR activities that intended to assist the Indonesian government in overcoming the COVID-19 pandemic, including:

Target, Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan, serta Dampak Kegiatan
Target, Activity Plan and Implementation, and Activity Impact

Kegiatan Activity	**Tujuan Pelaksanaan** Implementation Objectives	**Dampak** Impact
Bidang Kesehatan **Health Sector**		
Donasi 1.000 APD Bagi Tenaga Medis Donation of 1,000 PPE for Medical Personnel	PaninBank menyerahkan 1.000 Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis yang sudah berjuang sebagai garda terdepan selama masa pandemi. Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Direktur Kepatuhan PaninBank, Antonius Ketut kepada Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, bertempat di Kantor Pusat PMI, Jakarta. PaninBank handed over 1,000 Personal Protective Equipment (PPE) for medical personnel who had been fighting as the front guard during the pandemic. The handover of assistance was given directly by PaninBank's Compliance Director, Antonius Ketut, to the Chairman of the Indonesian Red Cross (PMI), Jusuf Kalla, at the PMI Head Office, Jakarta.	Membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Assisting the Government's efforts in tackling the COVID-19 outbreak.
Membagikan Masker Gratis di Palu Distributing Free Masks in Palu	Bank menyadari aktivitas keseharian masyarakat mengalami *shifting* selama masa pandemi COVID-19 yang dikenal dengan era *new normal*. Dewasa ini, masker menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dimiliki dan digunakan oleh masyarakat saat melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, melalui program Panin Peduli, Bank bersama-sama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sulawesi Tengah, melakukan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di jalan Sam Ratulangi, Kota Palu. The Bank is aware of a shift in people's daily activities during the COVID-19 pandemic, known as the new normal era. Today, masks are a necessity that must be owned and used by the community when carrying out daily activities. Therefore, through the Panin Peduli program, the Bank, together with the Indonesian Chinese Association (INTI) Central Sulawesi, carried out activities to distribute masks to people passing on Jalan Sam Ratulangi, Palu City.	Membantu masyarakat untuk mendapatkan akses masker yang sempat mengalami kelangkaan serta sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Helping the public to get masks, which were scarce, as well as an effort to prevent the transmission of the COVID-19 virus.

Kegiatan Activity	**Tujuan Pelaksanaan** Implementation Objectives	**Dampak** Impact
Memberikan bantuan 4.000 Masker Bedah Kepada RSUD Bendan, Pekalongan Provided 4,000 Surgical Masks to Bendan Hospital, Pekalongan	Sebagai bentuk dukungan kepada para petugas medis yang selama ini bekerja sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19, PaninBank berinisiatif untuk menyerahkan donasi berupa 4.000 *Surgical Face* Masker kepada RSUD Bendan, Pekalongan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sub-Branch Manager Pekalongan, Bapak Michael Laloy. As a form of support for medical personnel who have been working as the frontguard in combating COVID-19 pandemic, PaninBank took the initiative to submit donations in the form of 4,000 Surgical Face Masks to Bendan Hospital, Pekalongan. The assistance was handed over directly by the Pekalongan Sub-Branch Manager, Mr. Michael Laloy.	Membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Assisting the Government's efforts in combating the COVID-19 outbreak.
Menyalurkan 250 Set Alat Pelindung Diri (APD) melalui RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Distributed 250 Sets of Personal Protective Equipment (PPE) through Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM)	PaninBank menyalurkan sebanyak 250 set Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis yang bertugas di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). PaninBank distributed 250 sets of Personal Protective Equipment (PPE) to medical personnel on duty at Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM).	Membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Assisting the Government's efforts in combating the COVID-19 outbreak.
Pengadaan Masker untuk Pencegahan Wabah COVID-19 melalui Yayasan Benih Baik Indonesia Procurement of Masks for the Prevention of the COVID-19 Outbreak through the Yayasan Benih Baik Indonesia	Bekerja sama dengan www.benihbaik.com atau Yayasan Benih Baik, PaninBank berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp100 juta yang diperuntukkan untuk pembelian masker bagi masyarakat umum ataupun para tenaga medis. In collaboration with www.benihbaik.com or the Seed Baik Foundation, PaninBank has managed to collect donations of up to Rp100 million for the purchase of masks for the general public or medical personnel.	Membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Assisting the Government's efforts in combating the COVID-19 outbreak.
Memberikan Sumbangan untuk program Pencegahan Wabah COVID-19 yang diselenggarakan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Making a Contribution to the COVID-19 Outbreak Prevention program organized by the Buddhist Tzu Chi Indonesia Foundation	Dalam rangka menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, PaninBank turut berpartisipasi membantu pemerintah dengan menyalurkan sumbangan uang tunai sebesar Rp20 miliar melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. In order to cope with the spread of the COVID-19 virus in Indonesia, PaninBank has participated in helping the government by distributing cash donations of Rp20 billion through the Indonesian Buddhist Tzu Chi Foundation.	Membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Assisting the Government's efforts in combating the COVID-19 outbreak.
Bidang Keagamaan Religion Sector		
Memberikan Bantuan Kepada Rumah Ibadah dan Yayasan Difabel Providing Assistance to Houses of Worship and Difabel Foundation	· Melalui program Panin Peduli, PaninBank membantu Yayasan Al Kautsar melalui pemberian bantuan berupa 10 paket bahan kebutuhan harian; · Panin Peduli juga memberikan bantuan kepada Gereja Advent di Desa Sidondo, berupa 2 buah kipas angin dan 20 buah kursi untuk Gereja BK Pos Waturalele; dan · Sedangkan kepada Yayasan Difabel Berkarya, bantuan yang disalurkan PaninBank berupa 40 paket kebutuhan harian. · Through the Panin Peduli program, PaninBank helps the Al Kautsar Foundation by providing assistance in the form of 10 packages of daily necessities; · Panin Peduli also provided assistance to the Adventist Church in Sidondo Village, in the form of 2 fans and 20 chairs for the Waturalele Post BK Church.; and · Meanwhile, for the Difabel Berkarya Foundation, the assistance provided by PaninBank was in the form of 40 packages of daily necessities.	Bentuk kepedulian dan kontribusi nyata PaninBank dalam mendukung kualitas kehidupan masyarakat sekitar. PaninBank's form of concern and real contribution in supporting the quality of life of the surrounding community.
Kegiatan Sosial Lainnya Other Social Activities		
Membagikan 500 Paket Sembako untuk Bantu Masyarakat di Tengah Wabah COVID-19 Distributed 500 Food Packages to Help Communities amidst the COVID-19 Outbreak	Bekerja sama dengan Vox Point, PaninBank cabang DI Yogyakarta membagikan lebih dari 500 paket sembako kepada masyarakat sekitar yang terdampak wabah COVID-19. Bantuan tersebut disalurkan secara langsung *door to door* sehingga penerima manfaat tepat sasaran. In collaboration with Vox Point, PaninBank DI Yogyakarta branch distributed more than 500 food packages to local communities affected by the COVID-19 outbreak. The aid is distributed directly door to door so that the beneficiaries are right on target.	PaninBank berharap dengan tersalurkannya bantuan sembako tersebut beban masyarakat yang terdampak pandemi dapat terasa lebih ringan. PaninBank hopes that the distribution of basic food assistance can ease the burden on the people affected by the pandemic.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Nasabah

Komitmen dan Kebijakan

Seluruh aktivitas Bank senantiasa berfokus pada pemberian layanan prima kepada para nasabah. Tidak hanya itu, Bank juga melindungi hak-hak nasabah dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah, serta penanganan keluhan nasabah yang cepat dan mudah. Komitmen Bank akan hal ini merupakan salah satu upaya Bank dalam memenuhi regulasi POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan Nasabah.

Pada prinsipnya, Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dan/atau layanan yang terbaik serta memberikan pelayanan yang konsisten, terpercaya, aman, menyeluruh, dan penuh perhatian kepada nasabah. Bank juga berinovasi agar seluruh produk dan/atau jasa yang ditawarkan senantiasa dapat menjawab berbagai kebutuhan para nasabah di tengah pesatnya perkembangan perbankan digital saat ini.

Commitment and Policy on Social Responsibility related to the Customer

Commitment and Policy

All activities of the Bank are always focused on providing excellent service to customers. Not only that, the Bank also protects customer rights by always prioritizing the principles of transparency, confidentiality and security of customer data/information, as well as fast and easy handling of customer complaints. The Bank's commitment to this is one of the Bank's efforts to comply with POJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector; and PBI No. 7/7/PBI/2005 concerning Resolution of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/PBI/2008 regarding Customer Protection.

In principle, the Bank is committed to continuously delivering the best products and/or services as well as providing consistent, reliable, safe, comprehensive and attentive service to customers. The bank also continues to innovate so that all products and/or services offered can always meet customer needs amid the current rapid development of digital banking.

Dampak, Target, dan Kegiatan Tahun 2020

Bank menjamin bahwa seluruh produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah sudah terjamin perlindungannya secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan (*product liability*).

Informasi Produk

Bank secara transparan menyajikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan pada situs web: www.panin.co.id. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan Bank terhadap hak-hak nasabah agar tidak terjadi *misleading information* atas produk dan/atau layanan yang ditawarkan. Selain melalui situs *web*, para nasabah juga dapat meminta informasi yang lebih detail terkait produk dan/atau layanan kepada para petugas *frontliner* yang bertugas di kantor-kantor cabang terdekat, atau dapat juga mengakses media sosial resmi Bank yaitu:

Instagram: @paninbank.official
Twitter: @PaninBank

Bank menjamin seluruh produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada nasabah sudah lulus tahapan uji risiko dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak otoritas terkait, dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kaitannya atas produk, Bank berkomitmen akan terus melakukan inovasi terhadap produk-produk yang sudah ada guna memperkaya dan menyediakan alternatif pilihan bagi para nasabah. Inovasi produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan loyalitas nasabah di tengah ketatnya persaingan bank yang semakin kompetitif.

Sarana Penanggulangan Pengaduan Nasabah

Bank bersikap terbuka serta menerima dengan baik seluruh keluhan atau aduan yang disampaikan oleh nasabah. Bank berkomitmen akan selalu responsif terhadap setiap laporan pengaduan yang masuk dan diproses sesuai dengan standar kebijakan internal yang telah ditetapkan. Para nasabah diharapkan dapat menyampaikan keluhannya melalui kanal media berikut ini:

E-mail: panin@panin.co.id
Situs *Web*: www. panin.co.id

Selain mengandalkan *platform* media sosial di atas, para nasabah juga dapat mengajukan keluhan dengan mendatangi kantor-kantor cabang terdekat di wilayah nasabah masing-masing dengan mengisi formulir Pengaduan Nasabah yang telah disediakan.

Impacts, Targets, and Activities in 2020

The bank guarantees that all banking products offered to customers are guaranteed maximum protection and can be accounted for (product liability).

Product Information

The Bank transparently presents information or matters relating to products and/or services on the website: www. panin.co.id. This is done as a form of Bank protection for customer rights to avoid misleading information on the products and/or services offered by the Bank. Apart from using the website, customers can also request more detailed information relating to products and/or services from frontliner officers at the nearest branch offices, or can also access the Bank's official social media, namely:

Instagram: @paninbank.official
Twitter: @PaninBank

The Bank guarantees that all products and/or services offered to customers have passed the risk test phase and have received approval from the relevant authorities, in this case Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). In relation to products, the Bank is committed to continuing to innovate on existing products in order to enrich and provide alternative choices for customers. This product innovation is expected to increase customer loyalty amid increasingly competitive bank competition.

Means of Handling Customer Complaints

The bank is very open and welcomes with all complaints or grievances submitted by customers. The Bank continues to always be responsive to any incoming complaint received and processed in accordance with existing internal policy standards. Customers are expected to be able to submit their complaints through these following media channels, as follows:

E-mail: panin@panin.co.id
Website: www. panin.co.id

Apart from relying on the above social media platforms, customers can also file their complaints by visiting the branch offices nearby by filling out the Customer Complaint form that has been provided.

Sepanjang tahun 2020, Bank menerima sebanyak 845 pengaduan nasabah dengan uraian sebagai berikut:

Throughout 2020, the Bank received 845 customer complaints with the following descriptions:

Kategori Permasalahan	2020 Jumlah Kasus Number of Case	Kasus Selesai per 31 Desember 2020 Solved Case as of December 31, 2020	Category of Complaint
Kartu Kredit	320	100,0%	Credit Card
Perbankan	525	98,5%	Banking
Total	**845**	**99,1%**	**Total**

Sementara itu, dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari benturan kepentingan, Bank juga menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan dan nasabah untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan atau indikasi terjadinya tindakan penipuan, pencurian, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana pencucian uang. Pelaporan atas hal tersebut dapat dikirim melalui email: kasihtau@panin.co.id dengan mencantumkan identitas pelapor.

On the other hand, in order to promote a sound work environment and free from conflict of interest, the Bank also provides a whistle blowing system that can be used by employees and customers to report matters relating to actions or indications of fraudulent, theft, embezzlement of assets, information leakage, banking crimes, and money laundering. All such reports on this matter can be sent through email: kasihtau@panin.co.id by including the rapporteur's identity.

Jaringan Kantor

Office Network

Hingga berakhirnya tahun 2020, Bank memiliki 506 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki 1 (satu) Perwakilan di luar negeri yakni Singapura. PaninBank membagi kantor cabangnya ke dalam beberapa jenis, berikut uraian jenis kantor dan jumlahnya.

At the end of 2020, the Bank has 506 branch offices throughout Indonesia and has 1 (one) Representative overseas, Singapore. PaninBank divides its branch offices into several types, along with a description of the types of offices and their numbers.

Jenis Kantor	Jumlah Total	Type of Office
Kantor Wilayah (Kanwil)	1	Regional Offices
Kantor Cabang (KC)	57	Branch Offices (KC)
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	423	Sub Branch Offices (KCP)
Kantor Kas (KK)	25	Cash Offices(KK)
Kantor Cabang Luar Negeri (KLN)	-	Overseas Branch Offices (KLN)
Perwakilan	1	Representative
Total	**507**	**Total**

Adapun keterangan alamat kantor cabang tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

The description of the branch office address is described in the following table:

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telepon Phone Number
DKI Jakarta		
Senayan	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 , Senayan	021-2700787
Grand Wijaya	Jl. Darmawangsa III Blok D/15, Wijaya Grand Centre	021-2701069
Permata Hijau	Jl. Permata Hijau Blok D17-18	021-5331972
BEJ	Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Suite 107B	021-5154112
Sungai Sambas	Jl. Sunga Sambas VI 189 H	021-7230973
Permata Senayan	Jl. Tentara Pelajar, Komp. Ruko Permata Senayan Unit E 62-63	021-57940960
Tamini Square	Jl. Taman Mini Raya, Tamini Square GF Unit GB/3	021-87785855
Sudirman Park	Jl. K.H Mansyur Kav. 35, Sudirman Park, Rukan Hook Blok A No.1	021-57943788
Panin Plaza	Jl. Permata Hijau Blok CC No. 6, Panin Plaza Unit 6-05, 6-06 dan 6-07	021-53664636
Simprug	Jl. Teuku Nyak Arif No. 10	021-7235880
Palmerah	Jl. Palmerah Utara 52	021-5342728
Kebun Jeruk	Jl. Meruya Ilir Raya, Ruko Intercon Plaza Blok E 21-22, Kebun Jeruk, Jakarta Barat	021-5872378
Green Garden	Jl. Panjang, Komp. Green Garden Blok I.9 No. 36	021-58303188
Green Ville	Komp. Green Ville Blok A W No. 55	021-5645729
Taman Ratu	Jl. Surya Wijaya 33 A, Sunrise	021-56940587
Kedoya	Jl. Kedoya Raya No. 27 F, Komp. Cosmos	021-56962223
Kedoya Elok	Komp. Kedoya Elok Plaza Blok DB Kav. No. 30	021-5806663
Graha Kencana	Komp. Graha Kencana, Jl. Perjuangan No. 88 C.J	021-53660680
Green Garden II	Komp. Perumahan Green Garden Blok Z4 No. 8	021-58358466
Kedoya Angsana	Jl. Kedoya Angsana Blok II No. 46	021-58358531
Pesanggrahan	Jl. Pesanggrahan No. 3 A	021-58908061
Kepa Duri	Jl. Mangga Raya No. 1	021-44617421/4
Menara Imperium	Jl. H.R. Rasuna Said, Metropolitan Kuningan Superblok Kav.1	021-8351189
Pasar Minggu	Jl. Raya Pasar Minggu No. 19 B-C	021-7943639
Menteng Prada	Jl. Pegangsaan Timur 15 A, Komp. Pertokoan Prada, Blok 7E Lt.1	021-3929058

Keterangan Description	**Alamat** Address	**No. Telepon** Phone Number
Johar	Jl. Johar No. 3, Gedung Kantor Pusat Borobudur	021-3158728
Mampang	Jl. Mampang Prapatan Raya, Komp. Rukan Buncit Mas Blok BB-7-8	021-79186201
Plaza Mutiara	Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.2 No.1 & 2, Kawasan Mega Kuningan	021-5761597
Tebet	Jl. Tebet Timur Dalam Raya 2	021-8309371
Mampang II	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 56 C	021-7994606
Saharjo	Jl. Dr. Saharjo No. 244 C	021-83702081
Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika No. 210	021-80876272
Jatinegara	Jl. Jatinegara Barat 54 E, Blok B3-4, Panin Life Building	021-8516815
Matraman	Jl. Raya Matraman Blok A I Kav. No. 3	021-859 18018
K. Kas Jatinegara	Jl. Jatinegara Barat 41	021-2800501
K. Kas Salemba Tengah	Jl. Salemba Tengah No 35	021-31900557
K. Kas Lenteng Agung	Jl. Raya Rawa Bambu No. 88-B, Pasar Minggu	021-78847977
Pecenongan	Jl. Pecenongan 84	021-3456750
Krekot	Jl. Krekot Bunder 7	021-3853837
Pintu Besar	Jl. Pintu Besar Selatan 52	021-6902778
Sawah Besar	Jl. Sukarjo Wirjopranoto No. 2R, Sawah Besar	021-3854978
Juanda	Jl. Ir. Juanda III/16	021-3457131
Lindeteves	Jl. Hayam Wuruk, Lindeteves Trade Center Ground Floor1, No. RB 55-56	021-62200919
Pintu Besar Selatan Dua	Jl. Pintu Besar Selatan No. 62	021-6244168
Gunung Sahari	Jl. Gunung Sahari, Blok B4-B5, No. 60-63	021-4214243
Garuda	Jl. Garuda No. 26-26A	021-4258828
Karang anyar	Jl. Karang Anyar No. 55, Ruko Karang Anyar Permai Blok A No. 21	021-62200018
Pinangsia	Jl. Pinangsia, Ruko Glodok Plaza Blok F No.3	021-6495833
P. Jayakarta	Jl. P. Jayakarta No.24/4, Mangga Besar Selatan	021-62201508
Senen	Ruko Segitiga Senen Blok F No.32	021-3441453
Kem Tower	Jl. Landasan Pacu Barat Blok B No.10 Kav. No. 2, Kem Tower Lt.1 Unit A	021-65703891
Mangga Besar	Jl. Mangga Besar Raya No. 90	021-6242158
Kartini	Jl. Kartini Raya No. 55 E, RT.001/03	021-6008875
Lau Tze	Jl. Lau Tze No.109	021-6247050
CBD Pluit	Jl. Pluit Selatan Raya, CBD Pluit Boutique Office Blok S No. 9	021-66672781
Muara Karang	Jl. Pluit Karang Timur 51-52	021-66693147
Muara Indah	Jl. Pluit Karang Barat, Apartment Muara Indah, Menara 2B, Lt.1 No. 1 - 6, 1 -7	021-66604761
Muara Karang Jelita	Jl. Pluit Karang Jelita I, Muara Karang Blok Z8 No. 10 dan 12	021-66695455
Pluit Sakti	Jl. Pluit Sakti Blok A Kav. No. 1	021-66606058
Megamal Pluit	Jl. Pluit Permai Raya, Megamal Pluit Blok R No. 25 - 26	021-6684068
PIK Manyar	Ruko Manyar Blok A No. 16 ,17,18, Bukit Golf Mediterania	021-56947350
Taman Grisenda	Ruko Taman Grisenda Blok G4 No. 18 -19, Komp. Taman Grisenda GE	021-55965559
Duta Mas	Ruko Komp. Duta Mas A - 3, No. 29	021-56980192
PIK Cordoba	Ruko Cordoba Blok B No. 1, 2 & 3, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk	021-56983338
Niaga Mediterania	Jl. Galeri Niaga I Blok X - 3 Kav. No. C, Taman Resor Mediterania	021-55964913
Teluk Gong	Ruko Komp. Duta Harapan Indah Blok L No. 1 - 2	021-66600345
Pluit Selatan Satu	Jl. Pluit Selatan I/75 Blok D Kav. No. 13	021-6629930
Dadap	Komp. Ruko Villa Taman Bandara, Blok N 10 No. 33	021-55962886
City Resort	Komp. City Resort Residences Blok B No. 28	021-29020548
Mutiara Taman Palem	Ruko Mutiara Taman Palem Blok D 01 No. 17	021-54355918
Mutiara Palem Ring Road	Jl. Lingkar Luar Kamal Raya, Perum Perumnas Blok A/2	021-29020152

Keterangan Description	**Alamat** Address	**No. Telepon** Phone Number
Kopi	Jl. Kopi 52	021-6911901
Ancol	Jl. R.E Martadinata 1 B - C	021-6910491
Manggadua	Jl. Manggadua Raya Blok I 5A & 5B	021-6123628
Mall Mangga Dua	Jl. Mangga Dua Raya, Ruko Mangga Dua Mal Blok RM No. 42	021-62303998
Jembatan II	Jl. Jembatan Dua, Ruko Robinson No. 82	021-66606601
Jembatan III	Jl. Jembatan Tiga 36 FQ	021-66606501
Bandengan Indah Utara	Jl. Bandengan Utara Blok A - 38, Rukan Bandengan Indah No. 80	021-66696559
Jembatan Dua II	Jl. Jembatan Dua, Apartemen Robinson No. 2Q	021-66607239
GB Mangga Dua	Jl. Mangga Dua Raya Blok C Kav. No.2, Grand Boutique Center	021-62203081
Wisma Eka Jiwa	Wisma Eka Jiwa Unit B No. 10	021-62301511
Permata Kota	Jl. Tubagus Angke 170, Ruko Permata Kota Blok I No16-17	021-66674233
Jelambar	Jl. Jelambar Baru Raya, Blok B Kav. No. 1 SEB No 37 B	021-56981071
Seasons City	Jl. Jembatan Besi, Latumeten, Season City Blok B No. 29 dan 30	021-29071207
Jembatan Lima	Jl. K.H. Mas Mansyur No. 150 - 152	021-638 52069
Jembatan Lima II	Jl. KH. Mansyur No. 183 C	021-63852375
Sangaji	Jl. AM. Sangaji Raya No. 15,15A dan 17	021-63851711
Cideng Timur	Jl. Cideng Timur 80 B Petojo Selatan	021-3523588
Roxy Mas	Jl. K.H.Hasyim Ashari, Roxy Mas Blok E 2 No. 1 - 2, Pusat Niaga Roxy Mas	021-6327718
Tomang	Jl. Tomang Raya, Wisma Lumbini, No. 53	021-565 8333
Duta Merlin	Jl. Gajahmada Blok B 19 No. 3 - 5	021-63867610
Harmoni	Jl. Suryopranoto No. 81	021-3442937
Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 93, Krukut	021-63858060
Hasyim Ashari	Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 A	021-63861627
Muwardi	Jl. Dr. Muwardi I No. 35 C	021-56985880
Harmoni Plaza	Jl. Petojo Binatu III No. 1	021-6344315
Biak	Jl. Biak No. 14-B2	021-6329229
Pasar Tanah Abang Blok B	Jl. Fachrudin, Pasar Tanah Abang Blok B Lt. 5 No.7 dan 8	021-23573108
Tanah Abang	Jl. Fachrudin 47-49	021-3151002
Tanah Abang 2	Jl. Fachrudin Proyek Tanah Abang Bukit Blok A No.14/36	021-3140566
Mediterania Garden	Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5-9, Apartemen Mediterania Garden Residences I, Blok Dahlia, Lt. Ground Floor No.SH/D/GDD	021-56981338
Garden City	Jl. S. Parman Kav. 28, Podomoro City, Garden Shopping Arcade Unit 8/08/EA-EB	021-56985238
Tanjung duren	Jl. Tanjung duren Raya No.15 B	021-56959123
Plaza Pasifik	Komp. Plaza Pasifik Blok B 4 No. 83, 85 dan 87	021-45842275
Kelapa Gading	Jl. Boulevard Barat LC-7 No. 61	021-45840308
Kelapa Gading Timur	Kelapa Gading Boulevard Blok CN-2 Kav. No. 1	021-4532488
Gading Kirana	Perumahan Gading Kirana Blok B-10 Kav. No. 31	021-45840988
Sunter Paradise	Jl.Sunter Paradise Raya II Blok C. 17 - 18	021-65832368
Danau Sunter	Jl. Danau Sunter Utara F 21 No. 3	021-65835018
Danau Sunter Utara	Jl. Danau Sunter Utara Blok B Kav. No. 12	021-6511664
Enggano	Jl. Enggano, Ruko Enggano Megah Blok B No.9 E-F	021-43925198
Metro Kencana	Jl. Metro Kencana VII Blok Q No.12 & 12A	021-65302650
Cempaka mas	Jl. LetJend.d. Suprapto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok A/003	021-4260617
Graha Cempaka Mas	Jl. LetJend.d. Suprapto dan Jl. Yos Sudarso No. C/26, Rusun Graha Cempaka Mas	021-4213550
Pulo Gadung Trade Center	Jl. Bekasi Raya Blok B-H Kav. No. 1, Pulo Gadung Trade Center	021-46800230
Ujung Menteng	Jl. Bekasi Raya Km 25 A-22	021-46802236
Kelapa Gading Boulevard	Komp. Kelapa Gading Boulevard Blok RA I No. 32	021-45878384

Keterangan Description	**Alamat** Address	**No. Telepon** Phone Number
Graha Boulevard	Graha Boulevard Blok KGC No. A06	021-29375200
Buaran	Jl. Perumnas Blok I / 9	021- 86605989
Rawamangun	Jl. Balai Pustaka Timur, Blok B No. 17, RT 012/09	021-47885208
Kalimalang	Jl. Kalimalang, Komp. Billy & Moons Blok M I BZ No. 2, SEB/2E	021-8643630
Puri Tirta	Komp. Puri Kencana Blok L6 No. 88 M,N,O	021-58358558
Puri Indah	Jl. Puri Indah Raya Blok I/12A, Komp. Perumahan Puri Indah Kembangan	021-5818882
Sentra Niaga	Komp. Sentra Niaga Puri Indah Raya Blok T 3/17-18A	021-58303057
Permata Buana	Jl. Pulau Bira Blok D1 Kav. No.21, Perumahan Taman Permata Buana	021-58357739
Taman Semanan	Jl. Dharma Kencana Blok D, Komp. Taman Semanan No. 16-18	021-5445598
Bojong Indah	Jl. Pakis Raya Komp. Perumahan Bojong Indah No. 88 O	021-58300837
Daan Mogot	Jl.Jimbaran Blok B No. 2-3, Perumahan Daan Mogot Baru	021-5443088
Taman Palem Lestari	Taman Palem Lestari Blok C1/19	021-55956265
Citra Niaga	Jl. Utan Jati, Komp. Rukan Citra Niaga Blok A No. 33	021-54377118
Dian Kasih	Dian Kasih International School, Komp. Citra Garden 5	021-55951711
Citra Dua	Komp. Perumahan Citra 2.A Blok BG-3.B Persil No. 29-30	021-54390882
Kencana Niaga	Jl. Taman Aries, Rukan Kencana Niaga Blok D I-21	021-58906068
Puri Mansion	Puri Mansion Blok B No. 27	021-29025891
Citra Business Park	Komp.Citra Business Park Blok B No.7 - 8	021-29020426
permata Taman Palem	Komp. Perum Permata Taman Palem Blok A.1 No. 1	021-54360492
Duta Garden	Komp. Duta Garden Square Blok C No. 53 & 55 Rt.004/004	021-54371542
Raden Saleh	Jl. Raden Saleh Raya Blok R1 / 12	021-7315556
Sultan Iskandar Muda	Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 10 D - E, Komp. Sentra Arteri Mas	021-7290227
Pondok Indah	Jl. Metro Duta I/UA-17, Komp. Pertokoan PI, Pondok Indah	021-7650890
Fatmawati	Jl. R.S. Fatmawati, Komp. DEPLU Sektor V/1	021-7662012
JIS Cilandak	Jl. Terogong Raya 33, Jakarta International School	021-7692555
TB. Simatupang	Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arcadia	021-78838407
Kemang	Jl. Kemang Raya No. 112 A	021-7198020
Cipete	Jl. Fatmawati No. 63 A, B, C	021-72799951
Cilandak	Jl. Cilandak (KKO) No. 9	021-7827860
Radio Dalam	Jl. Radio Dalam Raya No. 52 A	021-7223468
Cinere	Jl. Raya Cinere Blok A No.40	021-7535583
Duta Mas Fatmawati	Ruko Komp. Pertokoan Duta Mas Blok B2 No. 27	021-72796545
Fatmawati II	Jl. RS Fatmawati No. 37 D	021-7665860
Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto	021-7313380
Maisonette	Jl. Raya Joglo, Maisonette Regency Kebon Jeruk Kav. No. 30	021-58900109
Botanic Junction	Jl. Meruya Selatan, Ruko Botanical Junction Blok H 9 No. 15, Komp. Puri Botanical	021-58907417
Joglo	Ruko Intercon Megah, Perumahan Taman Kebon Jeruk, Blok W.IV No.31	021-5867508
Banten		
Serang	Jl. Maulana Hasanuddin, Komp. Pertokoan Serang Plaza Blok II No. 1	0254-216100
Cilegon	Jl. S. A. Tirtayasa No. 7	0254-376222
Bitung	Komp. Citra Raya Sektor 1, 2, Blok L - 01 No. 9 R dan 10 R	021- 5969588
K. Kas A. Yani	Jl. Jenderal A. Yani No. 157	0254-8241718
Gading Serpong	Ruko Fifth Avenue Blok A No.1-3	021- 54217336
BSD City	Jl. Raya Pahlawan Seribu, Malibu BSD City Sektor VII Blok B 15 -16	021-53162445
WTC Matahari Serpong	Jl. Raya Serpong, WTC Serpong	021-53155570
BSD Golden Boulevard	BSD City, Rukan Golden Boulevard Blok M No.3 & 5	021-5379866
BSD Golden Madrid	Ruko Golden Madrid Blok E No. 3, 5, 6 & 7	021-53160537

Keterangan Description	**Alamat** Address	**No. Telepon** Phone Number
Tangerang	Jl. Merdeka No. 140	021-5525132
Metropolis Town Square	Metropolis Town Square, Ruko Blok GM - 6 No. 6 - 7 & Kios Blok GA -5 No. 11 - 12	021-55780306
Cikokol	Jl. MH. Thamrin Raya A 7	021-55774479
Bintaro	Komp. Ruko Bintaro Jaya, Blok C No. 6 dan 7, Sektor 9	021-7452250
Pamulang	Jl. Pamulang Raya Blok SH 18 No. 4	021-74701575
Lippo Karawaci	Komp. Ruko Pinangsia Blok I No. 38-39, Lippo Karawaci	021-55798889
Tangerang City	Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Business Park Tangerang City Blok B 8 dan B 9	021-53140450
Alam Sutera	Ruko Jalur Alam Sutera 29 A No. 1	021-73889123
Royal Poin	Jl. Majapahit Timur No. 4, Ruko Royal Poin	021-45428185
Arcadia Daan Mogot	Jl. Daan Mogot KM 21 Blok E1 No. 26	021-5532599
Bidex BSD	Ruko Bidex Blok C No. 16, BSD City	021-53163359
Kisamaun	Jl. Kisamaun 195 Rt. 002/016	021-55794985
K. Kas Imam Bonjol Karawaci	Jl. Imam Bonjol Blok A No. 1 - 2 Rt.003/001	021-55769741
K. Kas Bethsaida	RS Bethsaida lantai 1, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 29	021-29309999 Ext 248
Jawa Barat/West Java		
Bandung	Jl. Banceuy No. 8 - 10	022-4233100
Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 462	022-6032081
Otista	Jl. Otto Iskandardinata No. 233	022-4230927
Surya Sumantri	Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 6A	022-2001068
Gardujati	Jl. Gardujati No. 66	022-4224721
Dago	Jl. H. Juanda No. 110	022-2506854
Asia Afrika	Jl. Asia Afrika No. 166 - 170	022-4233200
Kopo	Komp. Kopo Mas Regency Blok N 1A	022-5436865
Setiabudi	Jl. Dr. Setiabudi No. 167 A	022-2007844
IBCC Jenderal A. Yani	Jl. Jenderal A. Yani, IBCC A I No. 3 A5, A6, & A7	022-7238170
Buah Batu	Jl. Buah Batu No. 238	022-7300770
Taman Kopo Indah	Jl. Arteri Komp. Taman Kopo Indah II Ruko 1 B No. 22	022-5413399
Abdurahman Saleh	Jl. Abdurahman Saleh No. 37	022-6025059
Festival Citylink	Jl. Peta No. 241, Gedung Festival City Link, Ground Floor No. 27	022-6128711
Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 17	0231-205588
Jatibarang	Jl. Mayor Dasuki No. 102	0234-351387
Plered	Jl. Raya Plered No. 88	0231-321067
Pulosaren	Jl. Pulasaren No. 93	0231-207493
Ciledug	Jl. Merdeka Barat No. 38	0231-321067
Jatiwangi	Jl. Kolonel. S. Sukani No. 27	0233-881458
Kuningan	Jl. Siliwangi No. 91	0233-871159
Kadipaten	Jl. Raya Kadipaten No. 27	0234-271048
Tuparev	Jl. Tujuh Pahlawan Revolusi No. 34	0231-201165
Losari	Jl. Raya Losari 138	0231-831231
Indramayu	Jl. Jenderal. Sudirman No. 195	0234-271048
Cherbon Grand Center	Jl. Karanggetas, Cherbon Grand Centre Blok D No.15	0231-211900
Bogor	Jl. Pakuan No. 14	0251-8321333
Parung	Jl. Raya Parung, Ruko Bintang Parung Blok A1 No. 4	0251-8616888
Lawang Seketeng	Jl.Lawang Seketeng 94-96	0251-8355050
Tajur	Jl. Raya Tajur No. 67	0251-8345007
Depok	Jl. Margonda Raya No. 88, Depok Mall Blok B1 No.49	021-77204788

Keterangan Description	**Alamat** Address	**No. Telepon** Phone Number
Pasar Anyar	Jl. R. Dewi Sartika Kav. No. 7	0251-8316161
Kedung Jaya	Jl. K.H. Soleh Iskandar, Komp. Ruko 24 No. 2 R - S	0251-8316066
Cibubur	Jl. Raya Alternatif Cibubur No. 79, Komp. Pertokoan Moderen	021-84592233
DETOS	Jl. Raya Margonda, Depok Town Square Blok GE No. 1	021-78870388
Warung Jambu	Jl. Raya Pajajaran No. 12 A	0251- 8345533
Cimanggis	Jl. Raya Bogor KM 31 No. 98, RT/RW, 03/04	021-87754888
Kota Wisata	Komp. Ruko Perumahan Kota Wisata Blok SEA No.16	021-84934166
K. Kas Pahlawan	Jl. Pahlawan No. 68/102, RT 02/18	0251-8372900
K. Kas Kedung Halang	Jl. Raya Kedung Halang No. 134, Kp.Cibuluh RT/RW, 01 /08	0251-865722
Sukabumi	Jl. Jenderal Sudirman No. 102	0266-223623
Pasar Pelita	Jl. Pasar No. 78	0266-223625
Cianjur	Jl. Pasar Baru Kav. 7 & 8	0263-286699
Cibadak	Jl. Siliwangi, RT/RW, 01/07	0266-534828
Garut	Jl. Ciledug No. 113-115	0262-231191
Sumedang	Jl. Mayor Abdulrachman No. 180	0261-201625
Tasikmalaya	Jl. KH. Z. Mustafa No. 372 B	0265-310005
Bekasi Square	Jl. Jenderal A. Yani, Ruko Bekasi Square Unit No. 57-58, Kios UG 182-183	021-82434751
Bekasi	Jl. Cut Meutia No. 3	021-8803486
Grand Wisata	Ruko Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 47, Grand Wisata	021-82616211
Cikarang	Cikarang Plaza Unit B -15, Cikarang - Bekasi	021-89111551
Margajaya	Jl. Jenderal A. Yani, Komp. Ruko Bekasi Mas Kav. D.2.B	021-88960670
Unkris	Jl. Raya Jatiwaringin No.335	021-84993224
Taman Harapan Indah	Sentra Niaga Bulevard Hijau Blok A No.9, Taman Harapan Indah	021-8874861
Jababeka	Jl. Niaga Raya, Ruko Metro Boulevard 2 Unit No. B - 18	021-89833315
Grand Mall Bekasi	Jl. Jenderal Sudirman, Grand Mall Bekasi Lt Dasar I & II / Ruko B No. 60 dan Kios No. 40	021-88855829
Pondok Gede	Jl. Raya Pondok Gede, Plaza Pondok Gede Blok A No. 16-17	021-84938018
Cut Meutiah II	Jl. Cut Mutiah Kav. No. A II - 5A	021-88343479
Kalimas	Komp. Ruko Kalimas Kav. No. A – 26	021-88345156
Karawang	Karawang Resinda Blok F No. 23	0267-8604176
Karawang Plaza	Jl. Tuparev, Karawang Plaza No.32	0276-8452379
Cikampek	Jl. Jenderal A. Yani Kav. 89, RT/RW, 01/06	0264-8388791
K. Kas Lippo Cikarang	Komp. Ruko Union Blok C/10	021-89902696
Jawa Tengah/Central Java		
Solo	Jl. Gatot Subroto 91F	0271-656890
Kartasura	Jl. A.Yani 136 A - Kartasura, Sukoharjo Ruko Blok D - 04	0271-780834
Boyolali	Jl. Pandanaran 82	0276-321294
Wonogiri	Jl. Raya Wonogiri 187	0273-321436
Klaten	Jl. Pemuda Utara 19	0272-323006
Kusmanto	Jl. Mayor Kusmanto No. 7	0271-651600
Palur	Jl. Raya Palur	0271-821741
Pasar Legi	Jl. S.Parman No. 89	0271-664471
Solo Baru	Jl. Raya Solo Baru HH-14	0271-621252
Sragen	Jl. Raya Sukowati No. 199	0271-893367
K. Kas Center Point	Jl. Slamet Riyadi No. 373, Komp. Center Point Ruko A-19	0271-621252
K. Kas Nusukan	Jl. Kapten Pierre Tendean No. 173	0271-7892060
Semarang	Jl. Pandanaran No. 6-8	024-8415888
Suari	Jl. Suari No. 27	024-3545552

Keterangan Description	**Alamat** Address	**No. Telepon** Phone Number
Tanah mas	Jl. Telaga Mas Raya, Ruko Telaga Mas Blok A No. 18 B -19 B	024-3513829
Kaligawe	Jl. Industri Raya Timur Kav. 3	024-6585205
Salatiga	Jl. Diponegoro No. 49	0298-321434
Weleri	Jl. Raya Weleri No. 222	0294-641347
Temanggung	Jl. LetJend.d. Suprapto No. 5	0293-491266
Ungaran	Jl. Diponegoro 772 A	024-6921309
Purwodadi	Jl. LetJend.d. Suprapto No. 31 – 33	0292-421537
Majapahit	Jl. Majapahit No. 225 A	024-6723435
Parakan	Jl. Diponegoro 91	0293-596434
A.Yani	Jl. Jenderal A. Yani 195 B	024-8448208
Dargo	Jl.Dargo A 10-11, Komp. Ruko Dargo Plaza Indah	024-3589155
Sultan Agung	Jl. Sultan Agung No. 55 E-F	024-8506446
Magelang	Jl. Tidar, Komp. Ruko Rejotumoto II No. 10	0293-311750
Kudus	Jl. Jenderal A. Yani No. 7, Komp. Ruko Jenderal A. Yani	0291-446357
Gg. Besen	Jl. Gang Besen No. 92	024-3566761
Pekalongan	Jl. KH. Mas Mansyur No.30 C-D	0285-423288
Blora	Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 7 dan 8	0296-532842
Gatot Subroto	Jl. Gatoto Subroto F1 No. 16, Kawasan Industri Candi	024-76633174
Pati	Komp. Ruko Plaza Puri Blok A No. 16 – 17	0295-385929
K. Kas Jend Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 148	024-7609639
Tegal	Jl. Jenderal A. Yani No. 78 - 80	0283-324500
Adiwerna	Jl. Raya Utara No. 15	0283-442233
Brebes	Jl. Jenderal Sudirman Tengah No.94 , RT/RW, 01/21	0283-6177533
Batang	Jl. Jenderal Sudirman No. 254	0285-392444
Purwokerto	Jl. Jenderal Sudirman No. 786, Ruko Nusantara	0281-642565
Purbalingga	Jl. Jenderal Sudirman No. 45	0281-894713
Cilacap	Jl. Jenderal A. Yani No.38	0282-532355
DI Yogyakarta		
Yogyakarta	Jl. Gejayan CT X No. 10	0274-541777
Jogjatronik	Jl. Brigjend Katamso, Mall Jogja Tronik	0274-420333
Terban	Jl. C. Simanjuntak No. 75	0274-550555
Godean	Jl. Godean KM 4	0274-622113
K. Kas Gedong Kuning	Ruko Yellow Square No. 135	0274-2840333
Jawa Timur/East Java		
Surabaya Coklat	Jl. Coklat No. 16	031-3535700
Tunjungan	Jl. Tunjungan No. 92	031-5345231
Darmo	Jl. Darmo No. 139	031-5676514
Kusuma Bangsa	Jl. Kusuma Bangsa No. 39	031-5323737
Dharmahusada	Jl. Dharmahusada No. 121 A - B	031-5948300
Kutisari	Jl. Kutisari No. 58 A	031-8413777
Demak	Jl. Demak No. 167	031-5311844
Arief Rahman Hakim	Jl. Arief Rahman Hakim No 55 - 55 A	031-5940955
Semarang	Jl. Semarang , Blok A 12 No. 108 D	031-5479757
Perak	Jl. Tanjung Perak Timur 242	031-3299369
Ngagel	Jl. Raya Ngagel No.179-183, Blok K1-K2, Komp. Pertokoan Ruko Taman Graha Asri	031-5037572
Mayjen Sungkono	Jl. Mayjen Sungkono No. 100	031-5674410
Mulyosari	Jl. Raya Mulyosari No.362, Blok Z No. 51/52, Komp. Pertokoan Mulyosari	031-5929978

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telepon Phone Number
Galaxy	Jl. Sukosemolo, Komp. Perumahan dan Pertokoan Galaxy, Bumi Permai Blok I - 1 No. 1 & 2	031-5921247
Rukun Makmur Indah	Komp. Rukun Makmur Indah Blok B5 dan B7	031-5055900
Pucang	Jl. Pucang Anom No. 35 A	031-5017522
Sukomanunggal	Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Satelite, Satelite Town Square	031-7326755
Kapas Krampung	Jl. Kapas Kerampung No. 30	031-5017798
ITC Surabaya	Jl. Gembong No. 20-30 TC Mega Grosir I	031-3743777
HR Muhammad	Jl. HR Muhammad Blok C 19 - 20 & C 29 - 30	031-7311515
Darmo Indah	Jl. Darmo Indah Timur SS 3	031-7348500
G Walk	Ruko Sentra Taman Gapura Blok J3 & J5, Citraland	031-7451018
Pasar Atum	Jl. Bunguran 45, Pasar Atum Mall Stand Lt. II Blok BA-20	031-3553838
Gateway Sidoarjo	Jl. Raya Waru, Komp. Ruko Gateway Sidoarjo Blok B No. 8	031-8544649
Gubeng	Jl. Raya Gubeng No. 68, Komp. Ruko 21, Gubeng I Type Diamond Kav. C	031-5010069
K. Kas Pakuwon City	Jl. Pakuwon Boulevard II Blok AA 15, Komp. Ruko Pakuwon City	031-5955565
K. Kas Kali Rungkut	Jl. Raya Rungkut, Blok E-1 No. 5	031-8795155
Malang	Jl. Sultan Agung 14	0341-365270
Pasar Besar	Jl. Kyai Tamin Komp. Pasar Besar KT No. 01	0341-364340
Blimbing	Jl. Terusan Borobudur No. 47 A	0341-480900
Lawang	Jl. Thamrin No. 19 D	0341-423420
Pandaan	Jl. Raya Jenderal A. Yani 321, Ruko Sentral Niaga Pandaan Blok B - 01	0343-635115
Batu	Jl. Dewi Sartika No. 4	0341-593921
Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman No. 266	0335-427111
Bojonegoro	Jl. Untung Suropati No. 28	0353-881166
Babat	Jl. Raya No. 219	0322-452000
Cendana Surabaya	Jl. Kombes Polisi M. Duryat 25	031-5465409
Gresik	Jl. R.A Kartini No. 218	031-3981557
Sidoarjo	Jl. Kh. Mukmin No. 11/B4	031-8968612
Tambak Langon	Jl. Tambak Langon No. 15	031-7493008
Mojokerto	Jl. Hos Cokroaminoto No. 60	0321-323681
Jenderal A. Yani	Jl. Jenderal A. Yani No. 40	031-8958161
Tuban	Jl. Panglima Sudirman No. 146	0356-333999
Wiyung	Jl. Wiyung Indah A - 40	031-7665577
Lamongan	Jl. Basuki Rahmat No. 40	0322-317789
Tropodo	Jl. Raya Tropodo No. 29 B	031-8690363
Jombang	Jl. KH Wahid Hasyim No. 195	0321-879293
Mojosari	Jl. Airlangga No.109	0321-594898
Krian	Jl. Raya Imam Bonjol No. 94	031-8982028
Pasar Turi	Jl. Dupak No. 1, Pusat Grosir Surabaya Lt. 4 Blok C - 5 No. 5 dan 6	031-52403811
Semolowaru	Jl. Nginden Semolowaru No. 101 / 31	031-5992541
Kenjeran	Jl. Putro Agung Timur Blok C-01 & 02, Komp. Kenjeran Palace	031-3823106
Kediri	Jl. Brawijaya No. 50	0354-686345
Madiun	Jl. LetJend. S.Parman	0351-495233
Blitar	Jl. Merdeka No. 28 Kav. I & II	0342-806999
Tulungagung	Jl. Panglima Sudirman No.45 I	0355-326999
Magetan	Jl. Jenderal A. Yani No. 14 B & C	0351-4486400
Nganjuk	Jl. Yos Sudarso No. 12, Komp. Ruko Harly Square Blok D5 & D6	0358-3516001
Jember	Jl. Sultan Agung No. 64	0331-428111
Banyuwangi	Jl. Jenderal A. Yani No. 50 B	0333-417222
Lumajang	Jl. LetJend. Suprapto No.22	0334-892944

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telepon Phone Number
Bali		
Kuta	Jl. Legian 80 - X	0361-757666
Diponegoro	Jl. Diponegoro 150 A1/ 4 - 6	0361-244500
Nusa Dua	Shopping Centre Nusa Dua Blok E/28	0361-771711
Sanur	Jl. Danau Tamblingan No. 67 A	0361-282100
Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No. 338 C	0361-484909
Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto Tengah No.279	0361-429399
Dewi Sartika	Komp. Pertokoan Duta Permai Blok I / D - E	0361-231155
Gatot Subroto Timur	Jl. Gatot Subroto Timur No. 209	0361-424747
K. Kas Kuta Galeria	Jl. Patih Jelantik, Komp. Pertokoan Kuta Galeria Blok Valet I No.7	0361-9153678/9152678
Nusa Tenggara Barat/West Nusa Tenggara		
Mataram	Jl. Sandubaya No. 18 - 21, Komp. Pertokoan Sweta Indah	0370-671616
Pejanggik	Jl. Pejanggik No. 11	0370-628333
Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara		
Kupang	Jl. Tompelo No. 9, RT/RW, 029/008	0380 - 825789
DI Aceh		
Banda Aceh	Jl. Muh. Jam No. 1 G - H	0651 - 27999
Sumatera Utara/North Sumatera		
Medan	Jl. Pemuda 16 - 22	061- 4538165
Sutomo	Jl. Sutomo No. 32	061-4571262
Gatot Subroto	Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196	061-4566608
Setia Budi	Komp. Taman Setia Budi Indah Blok UU No. 47	061-8200982
KK Budi Murni	Jl. Sutomo Ujung No. 21 E	061-4550994
Tanjung Morawa	Jl. Pahlawan 17 - C	061-7945260
Jl. Bandung	Jl. Bandung No. 38	061-4570675
Krakatau	Jl. Krakatau No. 14B	061-6641327
Zainul Arifin	Jl. Zainul Arifin No. 63	061-4513070
Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 197 D	061-6642642
Pasar Petisah	Jl. Kota Baru III No. 46	061-4146776
Asia	Jl. Asia No. 115 C	061-7341635
Zein Hamid	Jl. Zein Hamid No. 809 B - C	061-7883458
Iskandar Muda	Jl. Iskandar Muda No. 99 B -C- D	061-4160004
Pulau Pinang	Jl. Pulau Pinang 6	061-4538460
Sutomo 2	Jl. Sutomo No. 190/566, sudut Jalan Veteran	061-4517901
Binjai	Jl. Sudirman No. 382	061-8830200
Pematang Siantar	Jl. Merdeka No. 69 - 71	0622-21466
Perdagangan	Jl. Sisingamangaraja No. 551	0622-96230
Soa Sio	Jl. Soa Sio No. 22 A - B	0622-434888
Tebing Tinggi	Jl. Jenderal A. Yani No. 119	0621-329200
Kisaran	Jl. Imam Bonjol No. 28	0623-348484
Rantau Prapat	Jl. Jenderal A. Yani No 175	0624-325580
Tanjung Balai	Jl. Sisingamangaraja No. 77	0623-92799
Riau		
Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 335	0761-31605
Duri	Jl. Jend. Sudirman No. 62	0765-91008
Rengat	Jl. Bupati Tulus No. 32	0769-323141

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telepon Phone Number
Selat Panjang	Jl. Teuku Umar No. 8 D	0763-434299
Nangka	Jl. Nangka/Tuanku Tambusai No. 425	0761-571741
Riau	Jl. Riau Komplek Riau Business Center Blok B No. 4	0761-860825
Harapan Raya	Jl. Harapan Raya/H. Imam Munandar No. 247 E	0761-839301
Sudirman Atas	Jl. Jenderal Sudirman 415	0761-826171
Tembilahan	Jl. M. Boya No. 231 - 232	0768-324917
Baganbatu	Jl. Jenderal. Sudirman No. 171	0765-551880
Sudirman	Jl. Jenderal. Sudirman No. 145	0761-28080
HR Subrantas	Jl. H. R. Subrantas	0761-587777
Ujung Batu	Jl. Jenderal Sudirman, Ujung Batu	0762-736310
Dumai	Jl. Sultan Syarif Kasim	0765-36113
Bengkalis	Jl. Jenderal A. Yani, Bengkalis	0766-24110
Perawang	Jl. Raya Perawang KM 6	0761-693585
Kepulauan Riau/Riau Islands		
Batam	Jl. Sultan Abdul Rahman, Komp. Lumbung Rejeki Blok A 1-2	0778-450222
Tj. Balai Karimun	Jl. Setiabudi No. 307	0777 - 21053
Penuin	Komp. Penuin Blok K No. 1	0778-422700
Tj. Pinang	Jl. Merdeka No. 1 - 3	0771-24888
Nagoya	Komp. Nagoya Bussiness Center Blok V No. 28	0778-426300
Batam Centre	Komp. Ruko Palm Spring Blok B2 No. 9	0778 - 461561
Tanjung Uncang	Komp. Pertokoan Perumnas Fanindo Blok D No. 08 & 09	0778 -3581155
Batam City Condominium	Jl. Bunga Mawar No. 5, Batam City Condominium Hotel & Residence	0778-427612
K. Kas Botania Garden	Komp. Perum Botania Garden Tahap III Blok A6 No. 1, Batam Center	0778-7431031
Sumatera Barat/West Sumatera		
Padang	Jl. Belakang Olo No. 61	0751-841130
Pondok	Jl. Pondok No. 92	0751-841515
Jambi		
Jambi	Jl. Hayam Wuruk No. 143 BCD	0741-34001
Muara Bungo	Jl. Prof. M. Yamin No. 36-37, Komp. Wiltop Plaza	0747-323457
Wiltop	Jl. Sultan Thaha Blok A No. 32 - 33	0741-7837150
Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera KM 1, Komplek Sentral Bisnis Ceria Blok C No. 7 & 8	0745-91999
Talang Banjar	Jl. Orang Kayo Pingai No. 171, RT/RW, 02/01	0741-32770
Kuala Tungkal	Jl. Kemakmuran No. 30	0742-22385
Bengkulu		
Bengkulu	Jl. LetJend. Suprapto No. 30	0736-344350
Sumatera Selatan/South Sumatra		
Palembang	Jl. M. P. Mangkunegara No. 1	0711-810100
Mesjid Lama	Jl. Mesjid Lama 97 - 99	0711-322626
Rajawali	Jl. Rajawali No. 11 - 12	0711-369900
Kol. Atmo	Jl. Kol. Atmo No. 863	0711-372828
Prabumulih	Jl. Jenderal Sudirman No. 48, Karang Raja	0713-323158
Betung	Jl. Raya Palembang - Betung KM 12	0711-7433113
Lubuklinggau	Jl. Yos Sudarso No.5 A - B	0733-320100
Batubara	Jl. Mayor Salim Batubara	0711-8617333
Baturaja	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 1 & 2	0735-321768
Lahat	Jl. Mayor Ruslan III	0731-324001

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telepon Phone Number
Bandar Lampung		
Bandar Lampung	Jl. R. A. Kartini 97 - 99	0721-241255
Teluk Betung	Jl. Ikan Lemuru No. 12	0721-486755
Bandar Jaya	Jl. Proklamator Raya No. 63, Bandar Jaya	0725-25700
Metro	Jl. Ryamizard Ryacudu No. 10 A - B	0725-43888
Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 71 C & 71 D	0721-255260
Bangka Belitung		
Pangkal Pinang	Jl. Soekarno Hatta, Ruko Harmoni City Blok C No. 9 -11	0717-434205
Sungailiat	Jl. Muhidin	0717 - 96140
Tanjung Pandan	Jl. Sekolah No. 18	0719-21277
Kalimantan Barat/West Kalimantan		
Pontianak	Jl. Imam Bonjol 44	0561-733133
K. Kas S. Muhammad	Jl. Sultan Muhammad 71-73	0561-732925
Sidas	Jl.Sidas no.3	0561-740708
Megamal	Ruko Jenderal A. Yani Mall	0561-766400
Singkawang	Jl. Yos Sudarso No. 88	0562 - 639063
Sintang	Jl. MT. Haryono	0565-2025522
Sanggau	Jl. Jenderal A. Yani	0564-21959
Ketapang	Jl. Suprapto No. 44	0534-3038599
Paris Jenderal A. Yani	Jl. Jenderal A. Yani No 7 - 8	0561-570616
Sultan Abdurachman	Jl. Sultan Syarif Abdurrachman	0561-8100978
Kalimantan Selatan/South Kalimantan		
Banjarmasin	Jl. H. Anang Adenansi No. 1	0511-3364336
Jenderal A. Yani	Jl. Jenderal A.Yani KM 4 & 5 No. 31	0511-3268068
Pasar Baru	Jl. Pasar Baru Indah Blok B/IV	0511-3364660
Kuripan	Jl. Kuripan Gg. IV No. 17	0511-3273455
Banjarbaru	Jl. Jenderal A. Yani KM 33,5 No. 11	0511 4787551
Barabai	Jl. Kramat Muka No. 38 - 39	0517-42166
Batulicin	Jl. Transmigrasi	0518-74355
Kalimantan Timur/East Kalimantan		
Samarinda	Jl. Jenderal Sudirman No. 35	0541-738388
Mall Lembuswana	Jl. S. Parman, Komp.Ruko Mall Lembuswana Blok D No. 1 - 2	0541-206622
Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 7, Panin Tower Komp. Grand Sudirman	0542-7219999
Plaza Kebon Sayur	Jl. LetJend. Suprapto, Plaza Kebun Sayur No. T 15	0542-748040
Jenderal A. Yani	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 03	0542-733123
K. Kas Balikpapan Baru	Jl. Ruhui Rahayu RT 052, Komp. Ruko J Square	0542-8860737
Sulawesi Utara/North Sulawesi		
Manado	Jl. Piere Tendean, Komp. ITC Marina Plaza Blok Bunaken No. 24 -26	0431-8881515
Dotulolong Lasut	Jl. Dotulolong Lasut No. 9	0431-853055
Bahu	Jl. Wolter Monginsidi, Komp. Bahu Mall Blok S No. 11	0431- 864738
Bitung	Jl. Yos Sudarso No. 52	0438-32373
K. Kas Paal Dua	Jl. Yos Sudarso No. 12, Komp. Pasar Segar	0431-840165
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi		
Palu	Jl. Sam Ratulangi No. 82	0451-457457
Luwuk	Jl. DR. Sutomo, Luwuk Trade Centre Kav. 12 - 13	0461-22299
Palu Plaza	Jl. Danau Poso, Kompleks Pertokoan Palu Plaza No. A1/B1	0451-458555
Emmy Saelan	Jl. Emmy Saelan No. 11 D	0451-482636

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telepon Phone Number
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi		
Kendari	Jl. Jenderal A. Yani No. 30 E	0401-3125999
Bau-Bau	Jl. Bataraguru No. 60	0402-2825300
Kolaka	Jl. Chairil Anwar No. 20	0405-2322777
MT Haryono	Jl. MT. Haryono No. 42	0401-3198010
Citraland	Kompleks Citraland Ruko Imperium Blok A 01, Kav. 002	0401-3131537
Mandonga	Jl. Abdullah Silondae No. 50, Mandonga	0401-3131537
K. Kas Golden Trade Center	Jl. Konggoasa, Komp. Golden Trade Center Blok B No. 5	0401-3131197/3131185
Sulawesi Barat/West Sulawesi		
Mamuju	Jl. Abdul Syakur Blok B 5 - 6	0426-21016
Polewali Mandar	Jl. Jenderal Sudirman No. 68	0428-52311
Sulawesi Selatan/South Sulawesi		
Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 20	0411-852081
Veteran	Jl. Veteran No. 78	0411-315123
Makasa	Jl. Pengayoman Blok D/9, Panakukang Mas, Komp. Ruko Pasar Mirah	0411-457388
Permata Sari	Jl. Sultan Alauddin Kompleks Ruko Permatasari No. 2	0411-868062
Tentara Pelajar	Jl. Tentara Pelajar 157 A	0411-322748
Tello	Jl. Perintis Kemerdekaan, Komp. Ruko Puri Kencana Sari Blok D No. 9 - 10	0411-591223
Sulawesi	Jl. Sulawesi No. 151	0411-312827
Sungai Sadang	Jl. Sungai Saddang Baru No. B2	0411-420058
Pare-pare	Jl. Andi Makkassau No. 59 E	0421-22155
Palopo	Jl. Kelapa No. 11 D	0471-23798
Gowa	Jl. KH. Wahid Hasyim 185 C	0411-867553
Cendrawasih	Jl. Perintis Kemerdekaan	0411-855550
Latimojong	Jl. Gunung Latimojong LR 61/5	0411-321500
Tanjung Bunga	Jl. Metro Tanjung Bunga 27	0411-8113940
Bone	Jl. Makmur No. 37	0481-23775
K. K. MTC Karebosi	Jl. Jenderal A. Yani, Mall MTC Kios Ground Floor A9 - 10	0411-3652027
Veteran Selatan	Jl. Veteran Selatan, Petak Pertama, Botolebang	0411-858358
K. Kas Kima	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16, Komp. Kima Square Blok A/26	0411-4723477
K. Kas Pettarani	Jl. Andi Pangeran Pettarani	0411-420872
Gorontalo		
Gorontalo	Jl. Nani Watabone No. 32 D	0435-831155
Maluku		
Ambon	Jl. Diponegoro No. 20	0911-321515
Citraland Ambon	Jl. Citraland Utama, Komp. Pertokoan East Arcade Blok C No. 8 - 9	0911-3826088
Papua		
Jayapura	Jl. Sam Ratulangi No. 1	0967-522300
Abepura	Jl. Raya Abepura	0967 -581500
Sentani	Jl. Raya Sentani	0957-593673
Timika	Jl. Budi Utomo	0901-3127012
Papua Barat/West Papua		
Sorong	Jl. Jenderal Sudirman No. 41	0951-333979
Manokwari	Jl. Merdeka No. 38	0986-212128
Luar Negeri/Overseas		
Singapore	Fu LU Shou Complex 149	
Sulawesi Selatan/South Sulawesi		
Wilayah Indonesia Timur	Jl. Sam Ratulangi No. 15 A	0411-858827

PaninBank

Laporan Keuangan

Financial Statements

Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 /
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER**
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020		**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS** – For the year ended December 31, 2020
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8	Notes to Consolidated Financial Statements
INFORMASI TAMBAHAN		**SUPPLEMENTARY INFORMATION**
Daftar I : Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	234	Schedule I : Parent Entity's Statements of Financial Position
Daftar II : Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	236	Schedule II : Parent Entity's Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	237	Schedule III : Parent Entity's Statements of Changes in Equity
Daftar IV : Laporan Arus Kas Entitas Induk	238	Schedule IV : Parent Entity's Statements of Cash Flows
Daftar V : Investasi Entitas Induk Dalam Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi	239	Schedule V : Parent Entity's Investments in Subsidiaries and Associates

PaninBank

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN INFORMASI TAMBAHAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
PT BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
PT BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

1. Nama/ Name : Herwidayatmo
   Alamat kantor/Office address : Bank Panin Pusat, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta 10270
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card : Jakarta
   Nomor Telepon/Phone Number : (021) 2700545
   Jabatan/Position : Presiden Direktur/President Director

2. Nama/Name : Hendrawan Danusaputra
   Alamat kantor/Office address : Bank Panin Pusat, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta 10270
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card : Jakarta
   Nomor Telepon/Phone Number : (021) 2700545
   Jabatan/ Position : Wakil Presiden Direktur/Vice President Director

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan;
2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information;
2. The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;
   b. The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Bank's internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 29 Maret / March 29, 2021

Presiden Direktur/President Director	Wakil Presiden Direktur/Vice President Director
Herwidayatmo	Hendrawan Danusaputra

METERAI TEMPEL
F3C3AAJX043486984

Imelda & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 308/KM.1/2019
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8200, 2992 8300
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. 00084/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian P.T. Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank") dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

No. 00084/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/III/2021

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of P.T. Bank Pan Indonesia Tbk ("the Bank") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian P.T. Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Bank dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Bank (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas investasi pada entitas anak dan asosiasi (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of P.T. Bank Pan Indonesia Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended was conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Bank (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and the list of subsidiaries and associates (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the Bank's management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

IMELDA & REKAN

Elisabeth Imelda
Izin Akuntan Publik/Public Accountant Licence No. AP.0849

29 Maret 2021/March 29, 2021

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	Catatan/ Notes	2019 Rp Juta/ Rp Million	
ASET				**ASSETS**
KAS	1.871.377	5	1.338.683	**CASH**
GIRO PADA BANK INDONESIA	2.380.915	6	9.013.643	**DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA**
GIRO PADA BANK LAIN		7		**DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS**
Pihak berelasi	762.539	46	39.295	Related parties
Pihak ketiga	1.275.413		809.263	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(43)		-	Allowance for impairment losses
Bersih	2.037.909		848.558	Net
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		8		**PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS**
Pihak ketiga	8.450.702		4.158.848	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(704)		-	Allowance for impairment losses
Bersih	8.449.998		4.158.848	Net
EFEK-EFEK		9		**SECURITIES**
Pihak ketiga	43.078.134		17.925.420	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.937)		(23.500)	Allowance for impairment losses
Bersih	43.062.197		17.901.920	Net
TAGIHAN DERIVATIF	3.288	10	37.693	**DERIVATIVE RECEIVABLES**
EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		11		**SECURITIES PURCHASED WITH AGREEMENTS TO RESELL**
Pihak ketiga	17.259.226		11.682.078	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.476)		-	Allowance for impairment losses
Bersih	17.257.750		11.682.078	Net
KREDIT		12		**LOANS**
Pihak berelasi	926.684	46	987.250	Related parties
Pihak ketiga	120.706.825		139.695.580	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.523.484)		(3.957.940)	Allowance for impairment losses
Bersih	116.110.025		136.724.890	Net
TAGIHAN ANJAK PIUTANG		13		**FACTORING RECEIVABLES**
Pihak ketiga	784.863		732.387	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.590)		(37.356)	Allowance for impairment losses
Bersih	671.273		695.031	Net
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN		13		**FINANCE LEASE RECEIVABLES**
Pihak ketiga	456.616		768.774	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.167)		(27.563)	Allowance for impairment losses
Bersih	433.449		741.211	Net
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN		14		**CONSUMER FINANCING RECEIVABLES**
Pihak ketiga	7.439.105		10.021.764	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(263.381)		(175.652)	Allowance for impairment losses
Bersih	7.175.724		9.846.112	Net
TAGIHAN AKSEPTASI		15		**ACCEPTANCES RECEIVABLE**
Pihak ketiga	2.500.941		2.577.543	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.228)		-	Allowance for impairment losses
Bersih	2.495.713		2.577.543	Net
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM	660.648	16	753.830	**INVESTMENT IN SHARES OF STOCK**
Cadangan kerugian penurunan nilai	-		(625)	Allowance for impairment losses
Bersih	660.648		753.205	Net
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	69.583		134.892	**PREPAID EXPENSE**
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	10.326.085	17	10.312.649	**PREMISES AND EQUIPMENT AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET**
ASET PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	101.209	42	31.552	**DEFERRED TAX ASSETS - NET**
ASET TAKBERWUJUD	214.431	18	145.333	**INTANGIBLE ASSETS**
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	4.745.517	19	4.343.529	**OTHER ASSETS - NET**
JUMLAH ASET - BERSIH	218.067.091		211.287.370	**TOTAL ASSETS - NET**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	Catatan/ Notes	2019 Rp Juta/ Rp Million	
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS				**LIABILITIES**
LIABILITAS SEGERA	202.644		174.641	**LIABILITIES PAYABLE IMMEDIATELY**
SIMPANAN		20		**DEPOSITS**
Pihak berelasi	1.466.368	46	1.602.269	Related parties
Pihak ketiga	141.562.822		129.800.640	Third parties
Jumlah	143.029.190		131.402.909	Total
SIMPANAN DARI BANK LAIN		21		**DEPOSITS FROM OTHER BANKS**
Pihak berelasi	275.000	46	-	Related parties
Pihak ketiga	1.098.505		3.865.387	Third parties
Jumlah	1.373.505		3.865.387	Total
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - PIHAK KETIGA	2.518.308	22	4.910.465	**SECURITIES SOLD WITH AGREEMENTS TO REPURCHASE - THIRD PARTIES**
LIABILITAS DERIVATIF - PIHAK KETIGA	3.185	10	37.988	**DERIVATIVE PAYABLES - THIRD PARTIES**
LIABILITAS AKSEPTASI - PIHAK KETIGA	2.506.155	15	2.583.493	**ACCEPTANCES PAYABLE - THIRD PARTIES**
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - BERSIH	11.512.892	23	11.493.797	**SECURITIES ISSUED - NET**
PINJAMAN YANG DITERIMA - PIHAK KETIGA	3.093.526	24	5.644.826	**BORROWINGS - THIRD PARTIES**
UTANG PAJAK	108.670	25, 42	274.298	**TAXES PAYABLE**
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	-		-	**DEFERRED TAX LIABILITIES - NET**
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	1.167.900	44	875.600	**POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION**
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN	1.302.543	26	1.797.096	**ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES**
OBLIGASI SUBORDINASI - BERSIH	3.788.241	27	3.785.156	**SUBORDINATED BONDS - NET**
JUMLAH LIABILITAS	170.606.759		166.845.656	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS				**EQUITY**
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 100 per saham				**CAPITAL STOCK -** par value of Rp 100 per share
Modal dasar - 96.000.000.000 saham				Authorized - 96,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.087.645.998 saham	2.408.765	28	2.408.765	Subscribed and paid-up - 24,087,645,998 shares
SAHAM YANG DIBELI KEMBALI	(610)	28	-	**TREASURY STOCK**
TAMBAHAN MODAL DISETOR	3.440.707	28	3.444.330	**ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**
SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI	(268.112)	29	(141.474)	**DIFFERENCE IN VALUE OF EQUITY TRANSACTION WITH NON-CONTROLLING INTEREST**
KOMPONEN EKUITAS LAINNYA	9.651.846	31	7.776.508	**OTHER COMPREHENSIVE OF EQUITY**
SALDO LABA				**RETAINED EARNINGS**
Ditentukan penggunaannya	140.000		140.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	28.850.755		27.746.429	Unappropriated
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	44.223.351		41.374.558	**EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY**
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	3.236.981	30	3.067.156	**NON-CONTROLLING INTEREST**
JUMLAH EKUITAS	47.460.332		44.441.714	**TOTAL EQUITY**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	218.067.091		211.287.370	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	Catatan/ Notes	2019 Rp Juta/ Rp Million	
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				**OPERATING REVENUES (EXPENSES)**
Pendapatan Bunga				**Interest Revenues**
Bunga yang diperoleh	15.795.662	33,46	17.210.167	Interest earned
Provisi dan komisi kredit	389.737		514.527	Loan commissions and fees
Jumlah Pendapatan Bunga	16.185.399		17.724.694	**Total Interest Revenues**
Beban Bunga	7.378.410	34,46	8.755.818	**Interest Expense**
Pendapatan Bunga - Bersih	8.806.989		8.968.876	**Interest Revenues - Net**
Pendapatan Operasional Lainnya				**Other Operating Revenues**
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	213.055		117.448	Gain on foreign exchange transactions - net
Keuntungan bersih penjualan efek	1.784.165	35	114.226	Net gain on sale of securities
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	98.872	36	130.696	Commissions and fees from transactions other than loans - net
Bagian laba bersih entitas asosiasi	24.995	16	38.291	Share in net income of associates
Kenaikan nilai efek yang diperdagangkan	45.835		75.629	Increase in value of trading securities
Lainnya	1.110.295	37	1.435.454	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	3.277.217		1.911.744	**Total Other Operating Revenues**
Beban kerugian penurunan nilai		38		**Provision for impairment losses**
Aset keuangan	2.685.422		1.549.399	Financial assets
Aset non-keuangan	(2.888)		49.101	Non-financial assets
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	2.682.534		1.598.500	**Total Provision for Impairment Losses**
Beban Operasional Lainnya				**Other Operating Expenses**
Umum dan administrasi	1.838.128	39	1.876.414	General and administrative
Tenaga kerja	2.062.513	40	2.110.021	Personnel
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	283.388	44	269.776	Pension and employee benefits
Lainnya	1.291.774	41	609.717	Others
Jumlah Beban Operasional Lainnya	5.475.803		4.865.928	**Total Other Operating Expenses**
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(4.881.120)		(4.552.684)	**Other Operating Expenses - Net**
LABA OPERASIONAL	3.925.869		4.416.192	**INCOME FROM OPERATIONS**
PENDAPATAN NON OPERASIONAL				**NON-OPERATING REVENUES**
Hasil sewa	10.074		11.611	Rental revenues
Lainnya - bersih	135.849		167.814	Others - net
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	145.923		179.425	**NON-OPERATING REVENUES - NET**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.071.792		4.595.617	**INCOME BEFORE TAX EXPENSE**
BEBAN PAJAK	(947.587)	42	(1.097.318)	**TAX EXPENSE**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	3.124.205		3.498.299	**NET INCOME FOR THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	Catatan/ Notes	2019 Rp Juta/ Rp Million	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		31		**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Surplus revaluasi aset tetap	(8.111)		326.764	Gain on revaluation of premises
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	(189.367)		110.028	Remeasurement of defined benefit obligation
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	967		(750)	Share of other comprehensive income of associates
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	75.367	42	(106.199)	Income tax relating to items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	(121.144)		329.843	Sub total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.480.803		21.635	Changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(538.705)	42	(5.409)	Income tax relating to items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	1.942.098		16.226	Sub total
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	1.820.954		346.069	Total other comprehensive income for the current year net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	4.945.159		3.844.368	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME**
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				**NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:**
Pemilik entitas induk	3.103.248		3.316.841	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	20.957	30	181.458	Non-controlling interest
LABA BERSIH	3.124.205		3.498.299	**NET INCOME**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:**
Pemilik entitas induk	4.949.689		3.658.429	Equity holders of the parent enity
Kepentingan non-pengendali	(4.530)	30	185.939	Non-controlling interest
Jumlah Laba Komprehensif	4.945.159		3.844.368	**Total Comprehensive Income**
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		43		**EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)**
Dasar/Dilusian	128,83		137,70	Basic/Diluted

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Saham yang dibeli kembali/ Treasury stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali/ Difference in value of equity transaction with non-controlling interest	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income: Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation of premises and equipment	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ Actuarial gain (loss)	Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income	Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi/ Shares in other comprehensive income of associate	Saldo Laba/Retained Earnings: Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo per 1 Januari 2019		2.408.765	-	3.444.330	(117.830)	7.348.436	40.052	59.106	1.430	140.000	24.421.806	37.746.095	3.001.022	40.747.117	Balance as of January 1, 2019
Dampak atas kehilangan pengendalian atas anak perusahaan	30	-	-	-	(23.644)	(7.118)	445	-	351	-	-	(29.966)	(119.805)	(149.771)	Impact on the losses of control over subsidiary entity
Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi		-	-	-	-	(7.782)	-	-	-	-	7.782	-	-	-	Transfer of surplus revaluation of premises and equipment to retained earning arising from sale of revalued premises and equipment
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.316.841	3.316.841	181.458	3.498.299	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	32	-	-	-	-	242.517	83.522	16.299	(750)	-	-	341.588	4.481	346.069	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2019		2.408.765	-	3.444.330	(141.474)	7.576.053	124.019	75.405	1.031	140.000	27.746.429	41.374.558	3.067.156	44.441.714	Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan standar akuntansi baru		-	-	-	-	-	-	31.327	-	-	(2.001.352)	(1.970.025)	(6.060)	(1.976.085)	Effect of the adoption of the new accounting standards
Saldo per 1 Januari 2020		2.408.765	-	3.444.330	(141.474)	7.576.053	124.019	106.732	1.031	140.000	25.745.077	39.404.533	3.061.096	42.465.629	Balance as of January 1, 2020
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	30	-	-	-	(126.638)	-	-	-	-	-	-	(126.638)	126.638	-	Difference in value of equity transaction with non-controlling interest
Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi		-	-	-	-	(2.430)	-	-	-	-	2.430	-	-	-	Transfer of surplus revaluation of premises and equipment to retained earning arising from sale of revalued premises and equipment
Saham yang dibeli kembali		-	(610)	-	-	-	-	-	-	-	-	(610)	-	(610)	Treasury stock
Agio saham		-	-	(3.623)	-	-	-	-	-	-	-	(3.623)	(4.039)	(7.662)	Additional paid-in capital
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.103.248	3.103.248	20.957	3.124.205	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	32	-	-	-	-	22.395	(147.070)	1.970.149	967	-	-	1.846.441	(25.487)	1.820.954	Other comprehensive income - net of tax
Setoran modal entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.816	57.816	Additional paid-in capital of subsidiaries
Saldo per 31 Desember 2020		2.408.765	(610)	3.440.707	(268.112)	7.596.018	(23.051)	2.076.881	1.998	140.000	28.850.755	44.223.351	3.236.981	47.460.332	Balance as of December 31, 2020

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	16.024.952	17.628.166	Interest, loan commissions and fees received
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	(7.517.351)	(8.728.537)	Interest, prizes, fund commissions and fees paid
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	2.842.060	1.813.157	Other operating revenues received
Pembayaran beban operasional lainnya	(4.659.745)	(4.808.524)	Other operating expenses paid
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih	207.760	115.212	Gain on foreign exchange transactions - net
Penerimaan pendapatan non operasional - bersih	162.838	75.183	Non-operating income received - net
Pembayaran beban pajak	(969.218)	(1.131.310)	Tax expense paid
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	6.091.296	4.963.347	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi			Decrease (increase) in operating assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(121.288)	373.800	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek (diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	3.295.989	(1.842.906)	Securities (measured at fair value through profit and loss)
Kredit	15.864.196	800.317	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(5.577.148)	1.468.537	Securities purchased with agreements to resell
Piutang sewa pembiayaan	301.183	667.153	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	2.057.693	(2.102.426)	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang	(53.301)	44.270	Factoring receivables
Aset lain-lain	(364.574)	(1.195.440)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera	28.003	(114.318)	Liabilities payable immediately
Simpanan	11.626.281	(6.291.430)	Deposits
Simpanan dari bank lain	(2.491.882)	3.310.860	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	(736)	1.307	Acceptances payable
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(2.392.157)	4.910.465	Securities sold with agreements to repurchase
Liabilitas lain-lain	(367.666)	(388.996)	Other liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	27.895.889	4.604.540	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penerimaan dividen	35.740	24.393	Dividends received
Hasil penjualan aset tetap	9.886	10.896	Proceeds from sale of premises and equipment
Perolehan aset tak berwujud	(93.069)	(37.281)	Acquisition of intangible assets
Perolehan aset tetap	(258.656)	(80.581)	Acquisitions of premises and equipment
Efek-efek (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	(25.968.609)	(3.716.374)	Securities (other than those measured at fair value through profit or loss)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(26.274.708)	(3.798.947)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari entitas non-pengendali	53.777	-	Proceeds from non-controlling entities
Pembelian kembali saham yang diterbitkan	(4.233)	-	Treasury Stocks
Pembayaran liabilitas sewa	(46.510)	-	Lease liability payment
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman yang diterima	(2.551.300)	1.237.698	Borrowings received (paid)
Pelunasan obligasi subordinasi yang diterbitkan	-	(2.000.000)	Redemption of subordinated bond
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.548.266)	(762.302)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(927.085)	43.291	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	15.309.731	15.445.890	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
Penyesuaian saldo kas dan setara kas atas kehilangan pengendalian anak perusahaan (Catatan 54)	-	(5.308)	Adjustment of cash and cash equivalents due to loss of control over subsidiary (Note 54)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing	187.012	(174.142)	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	14.569.658	15.309.731	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 (Lanjutan)

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020 (Continued)

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			**SUPPLEMENTAL DISCLOSURES**
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents consist of:
Kas	1.871.377	1.338.683	Cash on hand
Giro pada Bank Indonesia	2.380.915	9.013.643	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.037.952	848.558	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.279.414	4.108.847	Placements with Bank Indonesia and other banks
Jumlah	14.569.658	15.309.731	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

P.T. Bank Pan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank") didirikan dengan akta No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 dari notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972 Tambahan No. 210. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0055417 dan No. AHU-AH.01.03-0055418 tertanggal 8 Juni 2016.

Bank berkedudukan di Jakarta dengan 57 kantor cabang di Indonesia dan 1 kantor perwakilan di Singapura. Kantor pusat Bank beralamat di Gedung Panin Centre, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Jumlah rata-rata karyawan Bank dan entitas anak (selanjutnya disebut ”Grup”) masing-masing 11.660 dan 12.242 karyawan pada tahun 2020 dan 2019.

Sesuai dengan anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha bank umum dalam arti kata seluas-luasnya di dalam maupun di luar negeri.

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Agustus 1971, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Pemegang saham pengendali dari Bank adalah sebagai berikut:

a. PT Panin Financial Tbk, dengan pemegang saham pengendali adalah Gunadi Gunawan, Mu’min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo dan Tidjan Ananto.

b. Votraint No. 11013 Pty, Ltd, dengan pemegang saham pengendali adalah ANZ Banking Group.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

P.T. Bank Pan Indonesia Tbk (the “Bank”) is established based on Deed No. 85 dated August 17, 1971 of notary Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja, S.H. The Deed of Establishment is approved by the Minister of Justice through Decision Letter No. J.A.5/81/24 dated April 19, 1972 and is published in Supplement No. 210 of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 6, 1972. The Bank’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 42 dated May 19, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, to conform the Bank’s Articles of Association with the Financial Services Authority (OJK) regulations No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0055417 and No. AHU-AH.01.03-0055418 dated June 8, 2016.

The Bank is domiciled in Jakarta and has 57 main branch offices in Indonesia and 1 representative office in Singapore. The Bank’s head office is located at Panin Centre Building, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. The Bank and its subsidiaries (the “Group”) have average total number of employees in 2020 and 2019 of 11,660 and 12,242, respectively.

In accordance with the Bank’s Articles of Association, the scope of its activities is to engage in general banking both in Indonesia and overseas.

The Bank started commercial operations on August 18, 1971 when it obtained its business license based on the Decision Letter No. KEP-205/DDK/II/8/1971 dated August 18, 1971 from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. In accordance with Bank Indonesia’s Decision Letter No. 5/2-Kep.Dir. dated April 21, 1972, the Bank is authorized to be a foreign exchange bank.

The ultimate shareholders of the Bank are as follows:

a. PT Panin Financial Tbk, the ultimate shareholders are Gunadi Gunawan, Mu’min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo and Tidjan Ananto.

b. Votraint No. 11013 Pty, Ltd, the ultimate shareholder is ANZ Banking Group.

Susunan pengurus dan komite audit Bank pada tanggal dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank's management and audit committee consist of the following:

	31 Desember/ December 31, 2020	
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Nelson Tampubolon	President Commissioner/ Independent Commissioner
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Lintang Nugroho	Vice President Commissioner/ Independent Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Drs. Johnny *)	Vice President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Chandra Rahardja Gunawan *)	Vice President Commissioner
Komisaris	Gregory James Terry	Commissioner
Komisaris Independen	Drs. H. Riyanto	Independent Commissioners
Direksi		**Directors**
Presiden Direktur	Herwidayatmo	President Director
Wakil Presiden Direktur	Hendrawan Danusaputra	Deputy President Director
Direktur Perbankan Komersial dan KPR	Edy Heryanto	Commercial Banking and Mortgage Director
Direktur Perbankan Korporasi	Januar Hardi	Corporate Banking Director
Direktur Jaringan dan Distribusi	Haryono Wongsonegoro	Network and Distribution Director
Direktur Treasuri dan Pasar Modal	Gunawan Santoso	Treasury and Capital Market Director
Direktur Manajemen Risiko dan Pengembangan Digital	Ng Kean Yik	Risk Management and Digital Development Director
Direktur Keuangan dan Perencanaan	Marlina Gunawan **)	Finance and Planning Director
Direktur Manajemen SDM, Strategi Bisnis dan Teknologi Informasi	Lionto Gunawan	Human Resources, Business and Information Technology Strategic Director
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	Suwito Tjokrorahardjo	Operation and Information Technology Director
Direktur Kepatuhan, Hukum dan Anti Pencucian Uang	Antonius Ketut Dwirianto	Compliance, Legal Affairs and Anti Money Laundering Director
Komite Audit *)**		**Audit Committee ***)**
Ketua	Nelson Tampubolon	Chairman
Anggota	Drs. H. Riyanto	Members
	Lukman Abdullah	
	Lintang Nugroho	
	Bambang Setyoko	
Komite Pemantau Risiko **)**		**Risk Monitoring Committee ****)**
Ketua	Lintang Nugroho	Chairman
Anggota	Chandra Rahardja Gunawan	Members
	Drs. Johnny	
	Gregory James Terry	
	Lukman Abdullah	
	Usep Ekadaya	
	Bambang Setyoko	
Komite Remunerasi dan Nominasi ***)**		**Remuneration and Nomination Committee *****)**
Ketua	Drs. H. Riyanto	Chairman
Anggota	Nelson Tampubolon	Members
	Drs. Johnny	
	Yusak Zefanya	
	Akijat Lukito	
Audit Internal	Herbert J.S. Sibuea	**Audit Internal**
Sekretaris Perusahaan	Jasman Ginting	**Corporate Secretary**

	31 Desember/ December 31, 2019	
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Presiden Komisaris Independen	Drs. Johnny ******)	Independent President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Lintang Nugroho	Vice President Commissioner/ Independent Commissioner
Komisaris Independen	Drs. H. Riyanto	Independent Commissioners
Komisaris	Chandra Rahardja Gunawan	Commissioner
Komisaris	Lianna Loren Limanto	Commissioner
Direksi		**Directors**
Presiden Direktur	Herwidayatmo	President Director
Wakil Presiden Direktur I	Roosniati Salihin	Vice President Director I
Wakil Presiden Direktur II	Hendrawan Danusaputra	Vice President Director II
Direktur Perbankan Retail	Ng Kean Yik	Retail Banking Director
Direktur Perbankan Komersial	Edy Heryanto	Commercial Banking Director
Direktur Perkreditan dan Korporasi	Januar Hardi	Credit and Corporate Director
Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Cabang	Lionto Gunawan	Human Resources and Branch Development Director
Direktur Treasuri	Gunawan Santoso	Treasury Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Antonius Ketut Dwirianto	Compliance and Risk Management Director
Direktur Administrasi Keuangan	H. Ahmad Hidayat	Finance Administration Director
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	Suwito Tjokrorahardjo	Operational and Information Technology Director
Komite Audit *)**		**Audit Committee ***)**
Ketua	Drs. H. Riyanto	Chairman
Anggota	Lukman Abdullah Lintang Nugroho	Members
Komite Pemantau Risiko **)**		**Risk Monitoring Committee ****)**
Ketua	Lintang Nugroho	Chairman
Anggota	Chandra Rahardja Gunawan Lukman Abdullah Lianna Loren Limanto Usep Ekadaya	Members
Komite Remunerasi dan Nominasi ***)**		**Remuneration and Nomination Committee *****)**
Ketua	Drs. H. Riyanto	Chairman
Anggota	Lianna Loren Limanto Akijat Lukito Yusak Zefanya	Members
Audit Internal	Herbert J.S. Sibuea	**Audit Internal**
Sekretaris Perusahaan	Jasman Ginting	**Corporate Secretary**

*) Berlaku efektif setelah adanya pengesahan RUPS.

**) Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Juni 2020 untuk posisi 31 Desember 2020.

***) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/SK-DIR/20. Berlaku efektif pada tanggal 15 Juli 2020 untuk posisi 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/2018 tanggal 19 Februari 2018. Berlaku efektif pada tanggal 19 Februari 2018 untuk posisi 31 Desember 2019.

****) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/SK-DIR/21. Berlaku efektif pada tanggal 25 Februari 2021 untuk posisi 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/2019 tanggal 26 November 2019. Berlaku efektif pada tanggal 26 November 2019 untuk posisi 31 Desember 2019.

*) Effective after getting approval from Stockholders Meeting (RUPS).

**) According to the Decision of Stockholders Meeting (RUPS) dated on June 26, 2020 as of December 31, 2020.

***) According to Director's Decision Letter No. 04/SK-DIR/20. Effective on July 15, 2020, as of December 31, 2020. According to Director's Decision Letter No. 002/SK-DIR/2018 dated Febuary 19, 2018. Effective on February 19, 2018, as of December 31, 2019.

****) According to Director's Decision Letter No. 03/SK-DIR/20. Effective on February 25, 2020 as of December 31, 2020. According to Director's Decision Letter No. 008/SK-DIR/2019 dated November 26, 2019. Effective on November 26, 2019, as of December 31, 2019.

*****) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 06/SK-DIR/20. Berlaku efektif pada tanggal 15 Juli 2020 untuk posisi 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/SK-DIR/2018 tanggal 21 November 2018. Berlaku efektif pada tanggal 20 September 2018 untuk posisi 31 Desember 2019.

******) Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Juni 2019 untuk posisi 31 Desember 2019.

Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit".

*****) According to Director's Decision Letter No. 06/SK-DIR/20. Effective on July 15, 2020 as of December 31, 2020. According to Director's Decision Letter No. 014/SK-DIR/2018 dated November 21, 2018. Effective on September 20, 2018, as of December 31, 2019.

******) According to the Decision of Stockholders Meeting (RUPS) dated June 19, 2019 as of December 31, 2019.

The establishment of the Audit Committee is based on Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding "The Establishment and the Implementation Guidelines of Audit Committee".

b. Entitas Anak

Bank memiliki secara langsung lebih dari 50% saham atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak berikut:

b. Consolidated Subsidiaries

The Bank has direct ownership interest of more than 50% or has control over the management of the following subsidiaries:

Entitas Anak/Subsidiaries	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership		Persentase pemilikan kepentingan non-pengendali/ Percentage of ownership held by non-controlling interest		Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Eliminations)	
		2020	2019	2020	2019		2020	2019
							Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI)	Lembaga pembiayaan/ Financing	51,49%	51,49%	48,51%	48,51%	1982	10.917.456	12.117.478
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB)	Bank Syariah/ Sharia Banking	69,93%	53,70%	30,07%	46,30%	2009	11.302.082	11.135.825

Seluruh entitas anak berdomisili di Jakarta dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 23 November 2020, PT Panin Dubai Syariah Bank (PDSB) telah menyelesaikan rangkaian proses Penawaran Umum Terbatas II, melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank membeli 14.276.230.158 lembar untuk mempertahankan hak kepemilikan sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga untuk sisa saham yang tidak dikonversi oleh pemegang saham lain. Oleh karena itu, kepemilikan Bank terhadap PDSB meningkat dari 53,70% menjadi 69,93%.

Pada tanggal 25 Januari 2019, PT Verena Multi Finance (VMF) telah menyelesaikan rangkaian proses Penawaran Umum Terbatas II melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank tidak mengeksekusi atau mengambil haknya saat saham baru diterbitkan sehingga Bank mengalami dilusi kepemilikan pada VMF dari sebelumnya memiliki 57,54% menjadi 26,15%. Bank melepas 31,39% saham VMF. Pemegang saham pengendali VMF beralih dari Bank Panin kepada IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) sebagai pemegang 63,63% total saham VMF.

Pada bulan Desember 2019, Bank menjual saham VMF sebanyak 62 juta lembar sehingga kepemilikan saham VMF turun dari 26,15% menjdi 25,06%.

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and listed in the Indonesia Stock Exchange.

On November 23, 2020, PT Panin Dubai Syariah Bank (PDSB) has completed a series of Limited Public Offering II processes through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD). Bank purchases 14.276.230.158 shares to maintain its ownership and conducts as ready buyer for the rest shares that was not converted by other shareholders. Therefore, The Bank's ownership in PDSB increase from 53.70% to 69.93%.

On January 25, 2019, PT Verena Multi Finance (VMF) has completed a series of Limited Public Offering II processes through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD). The Bank did not execute or take away its rights when the new shares were issued so that the Bank had diluted its ownership in VMF from previously owning 57.54% to 26.15%. The Bank released 31.39% shares in VMF. VMF controlling shareholders switch from Bank Panin to IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) as the holder of 63.63% of total shares of VMF.

On December 2019, Bank sells 62 million shares of VMF so that the Bank's ownership in VMF has reduced from 26.15% to 25.06%.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2015 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2015, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pengendalian adalah berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Definisi pengendalian pada PSAK 65 terjadi apabila terdapat kekuasaan pada *investee*, dimana saat ini kepemilikan saham Bank di VMF kurang dari 50%, dan Bank bukan merupakan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, laporan keuangan VMF tidak dikonsolidasikan lagi dengan Bank sejak 25 Januari 2019. Selanjutnya penyertaan dalam VMF dicatat sebagai penyertaan dalam bentuk saham dengan metode ekuitas (Catatan 16).

Rincian dari entitas anak yang tidak dimiliki seluruhnya dimana Grup memiliki kepentingan non pengendali diungkapkan di Catatan 30.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports issued on March 31, 2015 and effective as of April 1, 2015, states that the provisions regarding control are based on applicable financial accounting standards. The definition of control in PSAK 65 accounts if there is power in the investee, while currently the Bank's ownership in VMF is less than 50% and the Bank is not the ultimate shareholder. Therefore, VMF's financial statements is no longer consolidated with the Bank since January 25, 2019. Furthermore, investments in VMF are recorded as investments in shares using the equity method (Note 16).

Details of non-wholly owned subsidiaries that have non-controlling interest to the Group are disclosed in Note 30.

c. Penawaran Umum Efek Grup

c. Public Offering of Shares and Bonds of the Group

Penawaran Umum Saham

Public Offering of Shares

Penawaran Umum Perdana dan Terbatas yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

The initial public offering and limited public offerings conducted by the Bank were as follows:

Tahun/ Year	Keterangan/ Description	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai nominal per saham/ Par value per share	Harga penawaran per saham/ Offering price per share	Nomor dan tanggal surat efektif dari BAPEPAM/ Number and date of BAPEPAM's notice of effectivity
			Rp	Rp	
1982	Penawaran Umum Perdana/ Initial Public Offering	1.637.500	1.000	3.475	SI-014/PM/E/1982 28 Oktober 1982/ October 28, 1982
1983	Penawaran Umum Kedua/ Second Public Offering	3.162.500	1.000	3.550	SI-017/PM/E/1983 18 Mei 1983/ May 18, 1983
1989	Penawaran Umum Terbatas I/ Limited Public Offering I	914.655	1.000	4.500	S-467/PM/1989 31 Oktober 1989/ October 31, 1989
1990	Penawaran Umum Terbatas II/ Limited Public Offering II	2.614.410	1.000	13.000	21 April 1990/April 21, 1990
1995	Penawaran Umum Terbatas III/ Limited Public Offering III	60.180.462	1.000	1.900	S-725/PM/1995 8 Juni 1995/ June 8, 1995
1997	Penawaran Umum Terbatas IV/ Limited Public Offering IV	300.902.312	500	1.200	S-1212/PM/1997 10 Juni 1997/ June 10, 1997
1998	Penawaran Umum Terbatas V/ Limited Public Offering V	702.105.395	500	500	S-1268/PM/1998 19 Juni 1998/ June 19, 1998
1999	Penawaran Umum Terbatas VI/ Limited Public Offering VI	1.225.406.221	250	1.100	S-1180/PM/1999 29 Juni 1999/ June 29, 1999
2006	Penawaran Umum Terbatas VII/ Limited Public Offering VII	4.016.358.393	100	350	S-791/BL/2006 28 Juni 2006/ June 28, 2006

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa I para pemegang saham yang tercantum dalam Akta Berita Acara No. 52 tanggal 28 Mei 2004 dari Veronica Lily Dharma, S.H., notaris di Jakarta, disetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saldo laba dengan jumlah maksimum 1.176.093.346 saham. Jumlah saham bonus yang dibagikan menjadi sejumlah 1.176.091.818 saham karena adanya pembulatan. Nilai nominal Rp 100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004.

Based on the Extraordinary Meeting I of Stockholders as stated in Minutes of Meeting Deed No. 52 dated May 28, 2004 of Veronica Lily Dharma, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved to distribute bonus shares from retained earnings at a maximum of 1,176,093,346 shares. The actual number of shares distributed is 1,176,091,818. Par value is Rp 100 per share. All of those shares have been listed on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges on June 28, 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2020, sejumlah 23.837.645.998 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 250.000.000 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

As of December 31, 2020, the Bank's outstanding shares totaling 23,837,645,998 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange, while the founder shares totaling 250,000,000 shares are not listed on the stock exchange.

Penawaran Umum Obligasi

Public Offering of Bonds

Pada tanggal 8 Juni 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-69/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 10.000 miliar.

On June 8, 2018, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Services Authority in the letter No. S-69/D.04/2018 to conduct public offering of Continuous Bonds III Bank Panin Year 2018 with targeted funds amounting to Rp 10,000 billion.

- Pada tanggal 3 Juli 2018, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 4 Juli 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

- On July 3, 2018, the Bank issued Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 with a nominal value of Rp 100 billion. On July 4, 2018, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 17 Juni 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-299/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahun 2016 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 10.000 miliar.

On June 17, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in the letter No. S-299/D.04/2016 to conduct public offering of Continuous Bonds II Bank Panin Year 2016 with targeted funds amounting to Rp 10,000 billion.

- Pada tanggal 28 Juni 2016, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000 miliar. Pada tanggal 29 Juni 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

- On June 28, 2016, the Bank issued Continuous Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016 with a nominal value of Rp 2,000 billion. On June 29, 2016, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

- Pada tanggal 27 Oktober 2016, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 2.125 miliar. Pada tanggal 28 Oktober 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

- On October 27, 2016, the Bank issued Continuous Bonds II Bank Panin Phase II Year 2016 with a nominal value of Rp 2,125 billion. On October 28, 2016, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

- Pada tanggal 27 Februari 2018, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 3.900 miliar. Pada tanggal 27 Februari 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

- On February 27, 2018, the Bank issued Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018 with a nominal value of Rp 3,900 billion. On February 27, 2018, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

- Pada tanggal 18 April 2018, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.500 miliar. Pada tanggal 19 April 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

- On April 18, 2018, the Bank issued Continuous Bonds II Bank Panin Phase IV Year 2018 with a nominal value of Rp 1,500 billion. On April 19, 2018, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

Penawaran Umum *Medium Term Notes* (MTN)

Pada tanggal 28 Maret 2018, CFI menerbitkan MTN IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 miliar sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 No. 53 tanggal 26 Maret 2018.

Pada tanggal 21 Maret 2018, CFI menerbitkan MTN III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 miliar sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 No. 33 tanggal 19 Maret 2018.

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi

Pada tanggal 8 Juni 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-69/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 6.000 miliar.

- Pada tanggal 3 Juli 2018, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.302 miliar. Pada tanggal 4 Juli 2018, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 17 Juni 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-299/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 kepada masyarakat dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2.500 miliar.

- Pada tanggal 28 Juni 2016, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 29 Juni 2016, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

- Pada tanggal 17 Maret 2017, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 2.400 miliar. Pada tanggal 20 Maret 2017, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Public Offering of Medium Term Notes (MTN)

On March 28, 2018, CFI issued MTN IV Clipan Finance Indonesia Year 2018 with nominal value of Rp 1,000 billion as set forth in the Deed of Issuance and Monitoring Agent of Clipan Finance Indonesia IV Year 2018 MTN No. 53 dated March 26, 2018.

On March 21, 2018, CFI issued MTN III Clipan Finance Indonesia Year 2018 with nominal value of Rp 1,000 billion as set forth in the Deed of Issuance and Monitoring Agent of Clipan Finance Indonesia III Year 2018 MTN No. 33 dated March 19, 2018.

Public Offering of Subordinated Bonds

On June 8, 2018, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Services Authority in the letter No. S-69/D.04/2018 to conduct public offering of Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Year 2018 with targeted funds amounting to Rp 6,000 billion.

- On July 3, 2018, the Bank issued Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 with a nominal value of Rp 1,302 billion. On July 4, 2018, all of the bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

On June 17, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Services Authority in the letter No. S-299/D.04/2016 to conduct public offering of Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016 with targeted funds amounting to Rp 2,500 billion.

- On June 28, 2016, the Bank issued Continous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016 with a nominal value of Rp 100 billion. On June 29, 2016, all of the subordinated bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

- On March 17, 2017, the Bank issued continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2016 with a nominal value of Rp 2,400 billion. On March 20, 2017, all of the subordinated bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 12 Desember 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan surat No. S-14175/BL/2012 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000 miliar. Pada tanggal 21 Desember 2012, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2019 obligasi ini telah dilunasi.

On December 12, 2012, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of BAPEPAM-LK in the letter No. S-14175/BL/2012 for the Bank's continuous public offering of Continuous Subordinated Bonds I Bank Panin Phase I Year 2012 with a nominal value of Rp 2,000 billion. On December 21, 2012, all of the subordinated bonds have been listed on the Indonesia Stock Exchange. On 2019 this bond has been settled.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar, Amandemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, kecuali sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan

  Penerapan PSAK 71 memberikan panduan pada pengakuan, pengukuran serta pengungkapan instrumen keuangan yang berbeda dengan periode sebelumnya dengan tujuan agar menyajikan informasi yang lebih relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas.

  Grup menerapkan PSAK 71 dan amendemen konsekuensi untuk standar lainnya dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Grup belum menyajikan kembali informasi komparatif, yang tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 55 *Instrumen Keuangan* ("PSAK 55"). Efek yang timbul dari penerapan PSAK 71 telah diakui segera dalam saldo laba.

  PSAK 71 memberikan persyaratan baru untuk:

  1) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan;
  2) Penurunan nilai aset keuangan; dan
  3) Akuntansi lindung nilai umum.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

a. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Effective in The Current Year

In the current year, the Group has applied new standards and a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2020. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years, except as discussed below.

- PSAK 71: Financial Instruments

  The application of PSAK 71 provides guidance on the recognition, measurement and disclosure of financial instruments that are different from the previous period with the aim of presenting more relevant and useful information for users of financial statements to assess the amount, time and uncertainty of the entity's future cash flows.

  The Group applied PSAK 71 and the consequential amendments to other standards with an initial application date of January 1, 2020. The Group has not restated the comparative information, which continues to be reported under PSAK 55 *Financial Instruments* ("PSAK 55"). Effects arising from the adoption of PSAK 71 have been recognized directly in retained earnings.

  PSAK 71 introduces new requirements for:

  1) The classification and measurement of financial assets and financial liabilities;
  2) Impairment of financial assets; and
  3) General hedge accounting.

Rincian persyaratan baru tersebut dan dampaknya terhadap laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

Grup telah menerapkan PSAK 71 sesuai dengan ketentuan-ketentuan transisi dalam PSAK 71.

(a) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

Tangal penerapan awal (yaitu, tanggal ketika Grup telah menilai aset keuangan dan liabilias keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 71) adalah 1 Januari 2020. Oleh karena itu, Perusahaan telah menerapkan persyaratan PSAK 71 untuk instrumen yang belum dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2020 dan tidak menerapkan persyaratan pada instrumen yang telah dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2020.

Seluruh aset keuangan yang diakui dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71 disyaratkan untuk diukur selanjutnya menggunakan dasar biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Khususnya:

- instrumen utang yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

- instrumen utang yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan mengumpulkan arus kas kontraktual dan juga untuk menjual instrumen utang, dan yang memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVTOCI”);

- investasi utang lainnya dan investasi ekuitas yang diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”).

Details of these new requirements as well as their impact on the financial statements are described below.

The Group has applied PSAK 71 in accordance with the transition provisions set out in PSAK 71.

(a) Classification and measurement of financial assets

The date of initial application (i.e. the date on which the Group has assessed its existing financial assets and financial liabilities in terms of the requirements of PSAK 71) is January 1, 2020. Accordingly, the Group has applied the requirements of PSAK 71 to instruments that have not been derecognized as at January 1, 2020 and has not applied the requirements to instruments that have already been derecognized as at January 1, 2020.

All recognized financial assets that are within the scope of PSAK 71 are required to be measured subsequently at amortized cost or fair value on the basis of the entity’s business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

Specifically:

- debt instruments that are held within a business model whose objective is to collect the contractual cash flows, and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, are measured subsequently at amortized cost;

- debt instruments that are held within a business model whose objective is both to collect the contractual cash flows and to sell the debt instruments, and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, are measured subsequently at fair value through other comprehensive income (“FVTOCI”);

- all other debt investments and equity investments are measured subsequently at fair value through profit or loss (“FVTPL”).

Terlepas dari hal-hal di atas, Grup dapat melakukan pemilihan yang tidak terbatalkan dari salah satu pilihan berikut saat pengakuan awal aset keuangan:

- Grup dapat melakukan pemilihan yang tidak terbatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya atas nilai wajar sebuah investasi ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan dan juga bukan merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi kombinasi bisnis dalam penghasilan komprehensif lain; dan

- Grup dapat melakukan penetapan yang tidak terbatalkan untuk investasi utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FTVOCI sebagai diukur pada FVTPL jika hal tersebut menghilangkan atau mengurangi inkonsistensi akuntansi secara signifikan.

Pada tahun berjalan, Grup belum menetapkan investasi utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL.

Ketika invesasi utang yang diukur pada FVTOCI dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi dari ekuitas menjadi laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Ketika investasi ekuitas uang dikukur pada FVTOCI dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya selanjutnya dialihkan ke saldo laba.

Instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI dapat mengalami penurunan nilai. Lihat poin (b) di bawah ini.

Tidak ada reklasifikasi aset keuangan yang berdampak terhadap posisi keuangan, laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau jumlah penghasilan komprehensif milik Grup pada tahun tersebut.

(b) Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan

Perubahan signifikan PSAK 71 dalam hal klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar suatu liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit penerbit.

Despite the aforegoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Group may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment that is neither held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination in other comprehensive income; and

- the Group may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

In the current year, the Group has not designated any debt investments that meet the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL.

When a debt investment measured at FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment. When an equity investment designated as measured at FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is subsequently transferred to retained earnings.

Debt instruments that are measured subsequently at amortized cost or at FVTOCI are subject to impairment. See (b) below.

None of the reclassifications of financial assets have had any impact on the Group's financial position, profit or loss, other comprehensive income or total comprehensive income for the year.

(b) Classification and measurement of financial liabilities

A significant change introduced by PSAK 71 in the classification and measurement of financial liabilities relates to the accounting for changes in the fair value of a financial liability designated as at FVTPL attributable to changes in the credit risk of the issuer.

Secara spesifik, PSAK 71 mensyaratkan perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang dapat diaatribusikan pada perubahan dari risiko kredit liabilitas untuk disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dari dampak perubahan tersebut dapat menyebabkan atau memperbesar inkonsistensi perlakuan akuntansi dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan selanjutnya tidak direklasifikasi ke laba rugi, namun dialihkan ke saldo laba ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Sebelumnya, berdasarkan PSAK 55, seluruh perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL disajikan pada laba rugi.

Penerapan PSAK 71 tidak berdampak pada klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan Grup.

(c) Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian yang berbeda dengan model kerugian kredit pada saat terjadinya berdasarkan PSAK 55. Model kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk menunjukkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Tidak lagi disyaratkan terjadinya peristiwa kredit sebelum pengakuan kerugian kredit.

Secara khusus, PSAK 71 mensyaratkan Grup untuk mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian atas:

1) Giro dan penempatan pada Bank lain;
2) Efek-efek atau investasi utang yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI;
3) Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali;
4) Kredit;
5) Lease receivables and consumer financing receivables;
6) Tagihan akseptasi;
7) Investasi ekuitas yang setelah pengakuan awal diukur pada FVTOCI; dan
8) Komitmen dan kontinjensi di mana persyaratan penurunan nilai PSAK 71 berlaku.

Specifically, PSAK 71 requires that the changes in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability be presented in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk are not subsequently reclassified to profit or loss, but are instead transferred to retained earnings when the financial liability is derecognized. Previously, under PSAK 55, the entire amount of the change in the fair value of the financial liability designated as at FVTPL was presented in profit or loss.

The application of PSAK 71 has had no impact on the classification and measurement of the Group's financial liabilities.

(c) Impairment of financial assets

PSAK 71 requires an expected credit loss model as opposed to an incurred credit loss model under PSAK 55. The expected credit loss model requires the Group to account for expected credit losses and changes in those expected credit losses at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the financial assets. It is no longer necessary for a credit event to have occurred before credit losses are recognized.

Specifically, PSAK 71 requires the Group to recognize a loss allowance for expected credit losses on:

1) Demand deposits and placement with other Banks;
2) Debt investments subsequently measured at amortized cost or at FVTOCI;
3) Securities purchased with agreements to resell;
4) Loans;
5) Lease receivables and consumer financing receivables;
6) Acceptance receivables;
7) Equity investments subsequently measured at FVTOCI; and
8) Commitment and contingency to which the impairment requirements of PSAK 71 apply.

Secara khusus, PSAK 71 mengharuskan Grup untuk mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL") sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, atau jika instrumen keuangan tesebut merupakan pembelian atau berasal dari aset keuangan yang nilai kreditnya telah mengalami penurunan nilai. Namun, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal (kecuali untuk pembelian atau berasal dari aset keuangan yang nilai kreditnya telah mengalami penurunan nilai), Grup diharuskan untuk mengukur cadangan kerugian dari instrumen keuangan tesebut sejumlah ECL sepanjang 12 bulan.

In particular, PSAK 71 requires the Group to measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses ("ECL") if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, or if the financial instrument is a purchased or originated credit-impaired financial asset. However, if the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition (except for a purchased or originated credit-impaired financial asset), the Group is required to measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-months ECL.

Sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK 71, Bank memilih untuk menerapkan PSAK 71 secara retrospektif dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

a. Nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada tanggal penerapan awal sebagai jumlah bruto tercatat baru dari aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi baru dari liabilitas keuangan tersebut pada tanggal penerapan awal yaitu 1 Januari 2020.

b. Bank tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, dan mengakui selisih antara nilai tercatat periode sebelumnya dengan nilai tercatat pada awal periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal, pada saldo laba awal dari pelaporan di tanggal penerapan awal.

According to transitional arrangement of PSAK 71, Bank choose to adopt PSAK 71 retrospectively with few condition as follows:

a. Fair value of financial assets or financial liabilities on initial adoption as the new gross carrying value of the financial assets or new amortized cost of the financial liabilities on the date of the initial adoption on January 1, 2020.

b. Bank does not restate the prior period, and recognize the difference between carrying value on prior period and carrying value on the beginning of the initial adoption, to retained earnings of the report on the date of the initial adoption.

Tambahan cadangan kerugian aset keuangan sebesar Rp 2.668.777 juta pada tanggal 1 Januari 2020 telah diakui pada saldo laba 1 Januari 2020, sebelum memperhitungkan dampak pajak tangguhan sebesar Rp 661.450 juta dan pengaruh perubahan kurs sebesar Rp 85 juta, menyebabkan penurunan bersih saldo laba sebesar Rp 2.007.412 juta (termasuk porsi kepentingan non-pengendali sebesar Rp 6.060 juta) pada tanggal 1 Januari 2020. Lihat tabel di bawah ini untuk rincian jumlah penyesuaian.

The additional credit loss allowance of Rp 2,668,777 million as at January 1, 2020 has been recognized against retained earnings at January 1, 2020, gross of their related deferred tax impact of Rp 661,450 millon and foreign exchange rate changes impact of Rp 85 million, resulting in a net decrease in retained earnings of Rp 2,007,412 million (including the portion of non-controlling interest of Rp 6,060 million) as at January 1, 2020. See table below for further financial details of the adjustments.

Rekonsiliasi antara saldo akhir provisi penurunan nilai berdasarkan PSAK 55 dan provisi berdasarkan PSAK 57 (untuk kontrak jaminan keuangan) dengan saldo awal cadangan kerugian berdasarkan PSAK 71 untuk instrumen keuangan yang dijelaskan di atas pada tanggal 1 Januari 2020 diungkapkan pada catatan masing-masing.

The reconciliation between the ending provision for impairment in accordance with PSAK 55 and the provision in accordance with PSAK 57 (for the financial guarantee contracts) to the opening loss allowance determined in accordance with PSAK 71 for the above financial instruments on January 1, 2020 is disclosed in their respective notes.

	Klasifikasi sesuai PSAK 55/ Classification according to PSAK 55	Klasifikasi sesuai PSAK 71/ Classification according to PSAK 71	Nilai tercatat sesuai PSAK 55/ Carrying value according to PSAK 55	Sehubungan dengan penerapan awal PSAK 71/ Adjustment on initial adoption of PSAK 71	Nilai tercatat Sesuai PSAK 71/ Carrying value according to PSAK 71	
			Rp Juta/ *Rp Million*	Rp Juta/ *Rp Million*	Rp Juta/ *Rp Million*	
ASET						**ASSETS**
Kas			1.338.683	-	1.338.683	Cash
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Measured at amortized cost	9.013.643	-	9.013.643	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain			848.558	(1.145)	847.413	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			4.158.848	(11.364)	4.147.484	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek						Securities
Diperdagangkan	Diperdagangkan/ Trading	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at fair value through profit and loss	3.688.136	-	3.688.136	Trading
Tersedia untuk dijual	Tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ Measured at fair value through other comprehensive income	2.195.814	(31.327)	2.164.487	Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Measured at amortized cost	12.017.970	(1.288)	12.016.682	Held to maturity
Tagihan derivatif	Diperdagangkan/ *Trading*	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at fair value through profit and loss	37.693	-	37.693	Derivatives receivables
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			11.682.078	(21.190)	11.660.888	Securities purchased with agreements to resell
Kredit			136.724.890	(2.506.435)	134.218.455	Loans
Tagihan anjak piutang	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*	695.031	607	695.638	Factoring receivables
Piutang sewa pembiayaan			741.211	8.439	749.650	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen			9.846.112	(21.537)	9.824.575	Consumer financing receivables
Tagihan akseptasi			2.577.543	(7.093)	2.570.450	Acceptances receivables
Penyertaan dalam bentuk saham	Metode Ekuitas/ *Equity Method*	Metode Ekuitas/ *Equity Method*	559.967	(10.484)	549.483	Investment in shares of stocks
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*	61.100	-	61.100	
	Tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Measured at fair value through other comprehensive income*	132.138	-	132.138	
Aset pajak tangguhan - bersih			31.552	661.450	693.002	Deferred tax assets - net

	Klasifikasi sesuai PSAK 55/ Classification according to PSAK 55	Klasifikasi sesuai PSAK 71/ Classification according to PSAK 71	Nilai tercatat sesuai PSAK 55/ Carrying value according to PSAK 55	Sehubungan dengan penerapan awal PSAK 71/ Adjustment on initial adoption of PSAK 71	Nilai tercatat Sesuai PSAK 71/ Carrying value according to PSAK 71	
			Rp Juta/ *Rp Million*	Rp Juta/ *Rp Million*	Rp Juta/ *Rp Million*	
LIABILITAS						**LIABILITIES**
Liabilitas segera			174.641	-	174.641	Liabilities payable immediately
Simpanan	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*	131.402.909	-	131.402.909	Deposits
Simpanan dari bank lain			3.865.387	-	3.865.387	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			4.910.465	-	4.910.465	Securities sold with agreements to repurchase
Liabilitas derivatif	Diperdagangkan/ *Trading*	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit and loss*	37.988	-	37.988	Derivative payables
Surat berharga yang diterbitkan			11.493.797	-	11.493.797	Securities issued
Pinjaman yang diterima	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*	5.644.826	-	5.644.826	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			1.797.096	65.960	1.863.056	Accruals and other liabilities
Obligasi subordinasi			3.785.156	-	3.785.156	Subordinated bonds
Dampak perubahan kurs				(85)		Foreign exchange impact
Jumlah bersih dampak penerapan PSAK baru pada saldo laba				(2.007.412)		Total net impact of adoption new PSAK to retained earning

- PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

  PSAK 72 menggantikan PSAK 34 Kontrak Konstruksi (“PSAK 34”), PSAK 23 *Pendapatan* (“PSAK 23”) dan Interpretasi terkait. PSAK 72 memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Pedoman yang menentukan telah ditambahkan dalam PSAK 72 sehubungan dengan skenario tertentu. Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi Grup atas dampak dari penerapan PSAK 72.

- PSAK 73: Sewa

  PSAK 73 memperkenalkan persyaratan baru atau persyaratan yang disesuaikan sehubungan dengan akuntansi sewa. PSAK 73 memperkenalkan perubahan signifikan pada akuntansi sewa dengan menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, mensyaratkan pengakuan aset hak - guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan untuk seluruh sewa, kecuali sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Berbeda dengan akuntansi penyewa, persyaratan akuntansi pesewa secara luas tetap tidak berubah. Rincian atas persyaratan baru tersebut dijelaskan dalam Catatan 3. Dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup diuraikan di bawah ini.

  Tanggal penerapan awal PSAK 73 bagi Grup adalah 1 Januari 2020.

- PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers

  PSAK 72 supersedes PSAK 34 Construction Contracts (“PSAK 34”), PSAK 23 Revenue (“PSAK 23”) and the related Interpretations. PSAK 72 introduces a 5-step approach to revenue recognition. Far more prescriptive guidance has been added in PSAK 72 to deal with specific scenarios. There have been no changes to the Group’s accounting policies resulting from the adoption of PSAK 72.

- PSAK 73: Lease

  PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to the lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requirling the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. Details of these new requirements are described in Note 3. The impact of the adoption of PSAK 73 on the Group's consolidated financial statements is described below.

  The date of initial application of PSAK 73 for the Group is January 1, 2020.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang mana:

- mensyaratkan Grup untuk mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal; dan
- tidak memperkenankan penyajian kembali saldo komparatif, yang tetap disajikan sesuai PSAK 30 Sewa ("PSAK 30") dan ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8").

(a) Dampak dari definisi baru sewa

Grup telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi PSAK 73 untuk tidak menilai kembali apakah sebuah kontrak mengandung sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 dan ISAK 8 akan tetap diterapkan terhadap sewa yang disepakati atau dimodifikasi sebelum 1 Januari 2020.

Perubahan pada definisi sewa terutama berhubungan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal ini berbeda dengan fokus terhadap 'risiko dan manfaat' dalam PSAK 30 dan ISAK 8.

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang terdapat dalam PSAK 73 terhadap seluruh kontrak sewa yang disepakati atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020 (terlepas apakah Perusahaan adalah pesewa atau penyewa dalam kontrak sewa). Definisi baru dalam PSAK 73 tidak akan mengubah secara signifikan lingkup kontrak yang memenuhi definisi sewa bagi Grup.

(b) Dampak terhadap akuntansi penyewa

<u>Sewa operasi terdahulu</u>

PSAK 73 mengubah cara Grup memperlakukan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, yang tidak dicatat di neraca.

The Group has applied PSAK 73 using the cumulative catch-up approach which:

- requires the Group to recognize the cumulative effect of initially applying PSAK 73 as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the date of initial application; and
- does not permit restatement of comparatives, which continue to be presented under PSAK 30 Leases ("PSAK 30") and ISAK 8 Determining whether an Arrangement Contains a Lease ("ISAK 8").

(a) Impact of the new definition of a lease

The Group has made use of the practical expedient available on transition to PSAK 73 not to reassess whether a contract contains a lease. Accordingly, the definition of a lease in accordance with PSAK 30 and ISAK 8 will continue to be applied to those leases entered or modified before January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in PSAK 30 and ISAK 8.

The Group applies the definition of a lease and related guidance set out in PSAK 73 to all lease contracts entered into or modified on or after January 1, 2020 (whether it is a lessor or a lessee In the lease contract). The new definition in PSAK 73 does not change significantly the scope of contracts that meet the definition of a lease for the Group.

(b) Impact on lessee accounting

<u>Former operating leases</u>

PSAK 73 changes how the Group accounts for leases previously classified as operating leases under PSAK 30, which were off-balance-sheet.

Dengan menerapkan PSAK 73, untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana dijelaskan di bawah ini), Grup:

(i) Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan konsolidasian, yang pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan, dengan aset hak-guna disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau terutang terkait sewa tersebut sesuai dengan PSAK 73.C08(b)(ii), kecuali untuk aset hak-guna sewa properti yang diukur secara retrospektif seolah-olah standar telah diterapkan sejak tanggal permulaan sewa;

(ii) Mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan

(iii) Memisahkan jumlah kas yang dibayarkan atas bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pembiayaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasi) dalam laporan arus konsolidasian.

Insentif sewa (contoh, periode sewa gratis) diakui sebagai bagian dari pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa di mana dalam PSAK 30 insentif sewa mengakibatkan pengakuan liabilitas insentif sewa, yang diamortisasi sebagai pengurang atas beban sewa secara garis lurus.

Dalam PSAK 73, aset hak-guna diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset (“PSAK 48”). PSAK 73 menggantikan persyaratan sebelumnya untuk mengakui provisi atas kontrak sewa yang bersifat memberatkan.

Untuk sewa jangka-pendek (sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (seperti komputer pribadi dan furnitur kantor), Perusahaan telah memilih untuk mengakui beban sewa secara garis lurus sebagaimana diijinkan dalam PSAK 73. Beban ini disajikan dalam “beban umum dan administrasi” di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Applying PSAK 73, for all leases (except as noted below), the Group:

(i) Recognizes right-of-use assets and lease liabilities in the consolidated statement of financial position, initially measured at the present value of future lease payments, with the right-of-use asset adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments in accordance with PSAK 73.C08(b)(ii), except for right-of-use asset for property leases which were measured on a retrospective basis as if the standard have been applied on commencement date;

(ii) Recognizes depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income; and

(iii) Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

Lease incentives (e.g. free rent period) are recognized as part of the measurement of the right-of-use assets and lease liabilities whereas under PSAK 30 they resulted in the recognition of a lease incentive liability, amortized as a reduction of rental expense on a straight-line basis.

Under PSAK 73, right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48 Impairment of Assets (“PSAK 48”). This replaces the previous requirement to recognize a provision for onerous lease contracts.

For short-term leases (lease term of 12 months or less) and leases of low-value assets (such as personal computers and office furniture), the Group has opted to recognize a lease expense on a straight-line basis as permitted by PSAK 73. This expense is presented within “general administrative expenses” in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Grup telah menggunakan cara praktis berikut ketika menerapkan pendekatan dampak kumulatif pada awal penerapan terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30:

- Grup telah menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang secara wajar serupa;
- Grup telah menyesuaikan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal dengan jumlah provisi sewa yang bersifat memberatkan sesuasi PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi (“PSAK 57”) segera dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan reviu penurunan nilai;
- Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terhadap sewa-sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal;
- Grup telah mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Group telah menggunakan tinjauan ke belakang, dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

Untuk sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan sesuai PSAK 30, jumlah tercatat aset sewaan dan utang sewa pembiayaan yang diukur sesuai PSAK 30 segera sebelum tanggal penerapan awal direklasifikasi masing-masing ke aset hak-guna dan liabilitas sewa tanpa penyesuaian, kecuali dalam hal Perusahaan telah memilih untuk menerapkan pengecualian pengakuan sewa bernilai rendah.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa dicatat sesuai PSAK 73 dari 1 Januari 2020.

The Group has used the following practical expedients when applying the cumulative catch-up approach to leases previously classified as operating leases applying PSAK 30:

- The Group has applied a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- The Group has adjusted the right-of-use asset at the date of initial application by the amount of provision for onerous leases recognized under PSAK 57 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* (“PSAK 57”) in the consolidated statement of financial position immediately before the date of initial application as an alternative to performing an impairment review;
- The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities to leases for which the lease term ends within 12 months of the date of initial application;
- The Group has excluded initial direct costs from the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application; and
- The Group has used hindsight when determining the lease term when the contract contains options to extend or terminate the lease.

Former finance leases

For leases that were classified as finance leases applying PSAK 30, the carrying amount of the leased assets and obligations under finance leases measured applying PSAK 30 immediately before the date of initial application is reclassified to right-of-use assets and lease liabilities respectively without any adjustments, except in cases where the Group has elected to apply the low-value lease recognition exemption.

The right-of-use asset and the lease liability are accounted for applying PSAK 73 from January 1, 2020.

Perbedaan utama antara PSAK 73 dan PSAK 30 sehubungan dengan kontrak yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah pengukuran jaminan nilai residual yang diberikan oleh penyewa kepada pesewa. PSAK 73 mensyaratkan Grup mengakui sebagian dari liabilitas sewa hanya sejumlah nilai yang diharapkan akan terhutang berdasarkan jaminan nilai residual, bukan jumlah jaminan nilai maksimum seperti yang disyaratkan oleh PSAK 30. Perubahan ini tidak berdampak material pada laporan keuangan konsolidasi Grup.

The main differences between PSAK 73 and PSAK 30 with respect to contracts formerly classified as finance leases is the measurement of the residual value guarantees provided by the lessee to the lessor. PSAK 73 requires that the Group recognizes as part of its lease liability only the amount expected to be payable under a residual value guarantee, rather than the maximum amount guaranteed as required by PSAK 30. This change did not have a material effect on the Group's consolidated financial statements.

(c) Dampak terhadap akuntansi pesewa

(c) Impact on lessor accounting

PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

PSAK 73 does not substantially change how a lessor accounts for leases. Under PSAK 73, a lessor continues to classify leases as either finance leases or operating leases and accounts for those two types of leases differently.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

However, PSAK 73 has changed and expanded the disclosures required, in particular regarding how a lessor manages the risks arising from its residual interest in leased assets.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 7,85%.

The weighted average lessee's incremental borrowing rate applied to the lease liabilities recognized in the consolidated statement of financial position on January 1, 2020 is 7.85%.

Tabel di bawah ini menunjukkan komitmen sewa operasi yang diungkapkan dengan menerapkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal dan liabilitas sewa yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal penerapan awal:

The following table shows the operating lease commitments disclosed by applying PSAK 30 at December 31, 2019, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application and the lease liabilities recognized in the consolidated statement of financial position at the date of initial application:

	1 Januari/ *January 1* , 2020 Rp Juta/ *Rp Million*	
Komitmen sewa operasi pada 31 Desember 2019	15.194	Operating lease commitments at December 31, 2019
Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah	(1.284)	Short-term leases and leases of low value assets
Dampak diskonto jumlah di atas	(1.000)	Effect of discounting the above amounts
Liabilitas sewa diakui pada 1 Januari 2020	12.910	Lease liabilities recognized as at January 1, 2020

Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran akrual sewa yang terkait dengan sewa tersebut yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian segera sebelum tanggal penerapan awal. Aset hak-guna sebesar Rp 80.243 juta diakui pada tanggal 1 Januari 2020, pembayaran di muka sebesar Rp 67.333 juta sehingga liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp 12.910 juta.

- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

  Amendemen PSAK 15 menerapkan perubahan sesuai dengan PSAK 71, dimana PSAK ini mengubah cara Bank dan entitas anak dalam mengklasifikasi instrumen keuangan dan mengukur penurunan nilai aset keuangan, sesuai dengan PSAK 71.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material.

  Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks mengurangi *over disclosure* karena terjadi perubahan ambang batas (*thresholds*) dari definisi material tersebut. Secara garis besar, DE Amendemen PSAK 1 dan DE Amendemen PSAK 25 tersebut:

  a. menambahkan istilah "*obscuring*" (pengaburan), penjelasan dan contoh mengenai istilah tersebut;

  b. mengubah istilah "dapat mempengaruhi" menjadi "diperkirakan cukup dapat mempengaruhi" dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama;

  c. mengubah istilah "pengguna" menjadi "pengguna utama" dalam konteks pengguna laporan keuangan dan terdapat penambahan penjelasan terkait pengguna utama tersebut;

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statement of financial position immediately before the date of initial application. Right-of-use assets of Rp 80,243 million were recognized on January 1, 2020, prepayments of Rp 67,333 million and lease liabilities recognized on January 1, 2020 was Rp 12,910 million.

- PSAK 15: Investment in Associates and Joint Ventures on the Long-Term Interests of Associates and Joint Ventures

  Amendments of PSAK 15 apply changes in accordance with PSAK 71, where this PSAK changes the way Bank and its subsidiaries classify financial instruments and measure impairment of financial assets, in accordance with PSAK 71.

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements and PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors concerning Material Definitions.

  Amendments of PSAK 1 and PSAK 25 clarify material definitions with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. It also provides clearer guidance related to the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition. In general, the DE Amendments to PSAK 1 and DE Amendments to PSAK 25 are:

  a. add "obscuring" terms, explanations and examples of these terms;

  b. change the term "can affect" to "estimated to be able to affect enough" in the context of decision making by key users;

  c. change the term "user" to "primary user" in the context of users of financial statements and there are additional explanations related to the primary user;

b. Standar, Amandemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, amandemen PSAK yang relevan bagi Grup diterbitkan namun belum belaku efektif sebagai berikut:

- PSAK 73 (amandemen) Sewa : Konsesi Sewa terkait *COVID-19* efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini.
- PSAK 22 (amandemen) Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian masih dihitung dampaknya secara detail oleh manajemen.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective:

- PSAK 73 (amendment) Leases: Rental Concessions related to *COVID-19* effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early application permitted.
- PSAK 22 (amendment) Business Combination: Definition of a Business effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are still calculated in detail by the management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah untuk entitas anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, dan peraturan Bapepam-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and Sharia Financial Accounting Standards for the subsidiary operates in Sharia Banking and the Bapepam-LK No. KEP 347/BL/2012 dated June 25, 2012 Regulation No. VIII.G.7 regarding the Guideline for Financial Statement Presentation and Disclosure of Issuers or Public Entities.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan keuangan entitas anak yang menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2016) tentang ”Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

The consolidated statements of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash on hand, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less from the date of placement and not pledged or restricted.

The financial statements of a subsidiary company engaged in sharia banking have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 101 (Revised 2016) regarding “Presentation of Sharia Financial Statements”.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Bank dan entitas yang dikendalikan oleh Bank dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Bank memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Bank menilai kembali apakah Bank mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Bank memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Bank mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Bank cukup untuk memberikan Bank kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Bank relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Bank, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Bank memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Bank and entities (including structured entities) controlled by the Bank and its subsidiaries. Control is achieved where the Bank has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Bank reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Bank has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Bank considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Bank’s voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Bank’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Bank, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Bank has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Bank memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Bank kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Bank sampai tanggal ketika Bank berhenti mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan non-pengendali. Bank juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Kepentingan non-pengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan non-pengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non-pengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Consolidation of a subsidiary begins when the Bank obtains control over the subsidiary and ceases when the Bank loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Bank gains control until the date when the Bank ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Bank and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Bank and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Bank.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss recognized in profit or loss is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Penilaian kembali atas *goodwill* dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan nilai *goodwill*. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. Reassessment of goodwill performed to identify any changes in goodwill value. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari peraturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui diakui di laba rugi.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup (termasuk operasi bersama) atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran (lihat di atas), pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interests (including joint operations) in the acquired entity are remeasured to their acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if those interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup dan laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional individu masing-masing entitas Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs *spot Reuters* pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group and the individual financial statement of each Group entity are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the individual financial statement of each Group entity and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated using reporting (closing) exchange rate set by Bank Indonesia, which is Reuters' spot rate at 4.00 P.M. Western Indonesia Time to reflect the rates of exchange prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

f. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

   ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

   iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;

   ii. has significant influence over the reporting entity; or

   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. the entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

   ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

   iii. both entities are joint ventures of the same third party.

   iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

   v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is it self such a plan the sponsoring employees are also related to the reporting entity.

   vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset Keuangan (sejak 1 Januari 2020)

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

- Diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI);
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. the entity, or any members of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial Assets (from January 1, 2020)

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

- Measured at amortized cost;
- Measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI);
- Measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis dan arus kas kontraktual dimana aset keuangan tersebut dimiliki. Model bisnis menunjukkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk tujuan bisnis tertentu.

Dalam menentukan apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Bank harus mempertimbangkan beberapa hal sbb:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas.

Terkait dengan persyaratan kontraktual dari aset keuangan, definisi jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Sedangkan, bunga terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVTOCI”), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”).

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (“SPPI”) on the principal amount outstanding.

Financial assets are classified based on the business model and contractual cash flows where the financial assets are owned. The business model shows how groups of financial assets are managed for certain business purposes.

In determining whether contractual cash flows have the characteristics of SPPI, Bank must consider the following matters:

- Contingency events that will change the amount and timing of cash flows;
- Leverage feature;
- Accelerated repayment or facility extension requirements.

Related to the contractual requirements of financial assets, the definition of the principal amount is the fair value of financial assets at initial recognition. Meanwhile, interest consists of compensation for the time value of money, credit risk related to the principal amount owed at a certain time period and the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income (“FVTOCI”):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss (“FVTPL”).

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi (lihat di bawah); dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) (lihat di bawah).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Group may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met (see below); and
- the Group may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (see below).

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, Grup mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit. Bank tidak memiliki aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos “Penghasilan bunga”.

Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI

Efek utang yang dimiliki oleh Grup diklasifikasikan sebagai FVTOCI. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 52. Efek utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat pada efek utang tersebut sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam cadangan revaluasi investasi. Jika efek utang ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.The Bank does not have purchased or originated credit-impaired financial assets.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Debt instruments classified as at FVTOCI

Debt securities held by the Group are classified as at FVTOCI. Fair value is determined in the manner described in Note 52. The debt securities are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of these debt securities as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these debt securitires had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these debt securities are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these debt securities are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTOCI

Pada pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak terbatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas pada FVTOCI. Penetapan pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Aset keuangan tersedia untuk diperdagangkan jika:

- Diperoleh untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- Pada pengakuan awal, merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi dimana dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan actual laba jangka pendek; atau
- Merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrument lindung nilai yang ditunjuk dan efektif).

Investasi dalam instrumen ekuitas di FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan dialihkan ke saldo laba.

Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas tersebut diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71, kecuali jika dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan dari sebagian biaya investasi. Dividen disertakan dalam pos “Pendapatan Operasional Lainnya - Lainnya” (Catatan 37) dalam laba rugi.

Grup menetapkan semua investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan pada FVTOCI ketika pengakuan awal.

Equity instruments designated as at FVTOCI

On initial recognition, the Group may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

A financial asset is held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).

Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the investments revaluation reserve. The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the equity investments, instead, it is transferred to retained earnings.

Dividends on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss in accordance with PSAK 71, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment. Dividends are included in the “Other Operating Revenues - Others” line item (Notes 37) in profit or loss.

The Group designated all investments in equity instruments that are not held for trading as at FVTOCI on initial recognition.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal (di atas).

- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 52.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi;

- Untuk instrumen utang diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang diakui dalam laba rugi. Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi;

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI (above) are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition (above).

- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria (above) are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called 'accounting mismatch') that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 52.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of each reporting period. Specifically:

- for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss;

- for debt instruments measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve;

- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi; dan

- Untuk instrumen ekuitas diukur pada FVTOCI, selisih kurs diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

Aset Keuangan (sebelum 1 Januari 2020)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal penyelesaian dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL);
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS);
- Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

- for financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss; and

- for equity instruments measured at FVTOCI, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investment revaluation reserve.

Financial Assets (before January 1, 2020)

All financial assets are recognized and derecognized on settlement date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL);
- Held-to-maturity investments;
- Available-for-sale (AFS) financial assets;
- Loans and receivable.

Financial assets at FVTPL

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial asset is either held for trading or its designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or

- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Grup disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan *Chief Executive Officer* (CEO).

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures), for example the board of directors and Chief Executive Officer (CEO).

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 3i.

Held-to-maturity investments

Financial assets are classified as held-to-maturity investments only if these investments have fixed or determined payments and their maturity date has been determined and the Group has the positive intention and ability to hold such financial assets to maturity. Held-to-maturity investments are initially measured at fair value plus transaction costs which are attributable directly to the acquisition of the financial assets. Subsequent to initial recognition, held-to-maturity investments are measured at amortized cost, using effective interest rate method less impairment.

Loans and receivables

Financial assets that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as loans and receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain di ekuitas sebagai akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter, yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau (jika lebih tepat), digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Available-for-sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL). AFS financial assets are initially measured at fair value plus any directly attributable transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income in equity as accumulated in AFS investment revaluation, with the exception of impairment losses, interest income calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. When the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS investment revaluation is reclassified to profit or loss.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividend on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Group's right to receive the dividends is established.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discount) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penurunan nilai aset keuangan (sejak 1 Januari 2020)

PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian yang lebih melihat ke depan dalam mengukur penurunan nilai instrumen keuangan (*expected loss*). Setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung (*reasonable and supportable information*). Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atau 12 bulan sesuai dengan tingkat risiko kreditnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Jika informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) yang wajar dan terdukung tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, Bank tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, Ketika informasi yang lebih bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) daripada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, Bank dapat menggunakan informasi tunggakan yang dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Impairment of financial assets (from January 1, 2020)

PSAK 71 introduces the expected credit loss method which is more forward looking at measuring impairment of financial instruments (expected loss). At each reporting date, the Group assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition using reasonable and supportable information. The Group measures the allowance for possible losses on financial instruments at the amount of expected credit losses throughout their life or 12 months in accordance with the level of credit risk.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, government and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

If reasonable and supportable forward-looking information is available without undue cost or effort, the Bank cannot rely solely on delinquent information to determine whether credit risk has increased significantly since initial recognition. However, when information that is more forward-looking than the status of arrears (either individually or collectively) is not available without undue cost or effort, the Bank may use the arrears information referred to determine whether there is a significant increase in credit risk since the initial recognition.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Bank menerapkan definisi gagal bayar yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan mempertimbangkan indikator kualitatif (sebagai contoh: perjanjian keuangan) ketika keadaannya sesuai. Akan tetapi, terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa gagal bayar tidak terjadi ketika aset keuangan selambat-lambatnya menunggak 90 hari, kecuali Bank memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa *lagging default criterion* lebih tepat digunakan. Defnisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan ini diterapkan secara konsisten untuk seluruh instrumen keuangan kecuali informasi tersebut tersedia yang dapat menunjukkan definisi gagal bayar lain lebih tepat untuk instrumen keuangan tertentu.

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;
2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of investment grade in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of performing. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Bank applies a definition of default that is consistent with the definition used for internal credit risk management purposes for the relevant financial instruments and considers qualitative indicators (for example: financial covenant) when appropriate. However, there is a rebuttable presumption that the default does not occur when financial assets are 90 days in arrears, unless the Bank has reasonable and supportable information to demonstrate that the lagging default criterion is more appropriate. The default definition used for this purpose is consistently applied to all financial instruments unless such information is available which may indicate a more appropriate definition of default for a particular financial instrument.

Pengukuran risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Hapus buku merupakan upaya penyelesaian atas aset keuangan yang tidak dapat ditagih. Hapus buku adalah tindakan administratif Grup untuk menghapusbukukan aset keuangan yang memiliki kualitas macet dan/atau telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari kewajiban debitur kepada Grup. Hapus buku aset keuangan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Credit risk measurement is based on default risk at the reporting date by considering changes in default risk that occur during the life of the financial instrument.

Financial Assets Deteriorate

Financial Assets decrease in loan amount when one or more event that has an effect in future cash flow estimation from financial assets have happened. The proof of financial assets experiencing decrement including the data that can be observe related to the event as follows:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- breach of contract, such as default or delinquency in payments;
- Lenders, for economic or contractual reason related to financial difficulty experience by borrower, has given the concessions to borrower that will not be given if the borrower didn't experience financial difficulty;
- it's probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

Write-off is an attempt to resolve uncollectible financial asset. Write-off is an administrative action of the Group to write-off the financial asset with bad quality and/or financial asset with 100% allowance for impairment losses of the debtor's obligation to the Bank. Writen-off financial assets are recorded in off-balance sheet. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Faktor pengukuran risiko kredit mengacu pada ketentuan Basel II yaitu *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD). Pengukuran risiko kredit ini merupakan estimasi berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi sebagai komponen *forward-looking/predictor*.

Perhitungan cadangan kerugian kredit ekspektasian (ECL) dibagi menjadi 3, yaitu:

- *Stage 1*

  Dalam PSAK 71, Bank membukukan cadangan ECL untuk 12 bulan sejak hari pengakuan awal untuk *Stage 1*. Untuk periode selanjutnya, Bank terus memonitor apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dari pengakuan awal.

- *Stage 2*

  Jika terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan, eksposur akan pindah ke *Stage 2* dimana pencadangan dibukukan berdasarkan ECL sepanjang umur eksposur. Sebaliknya, jika terdapat perbaikan yang signifikan pada kualitas kredit, eksposur akan pindah kembali ke *Stage 1.*

- *Stage 3*

  Eksposur pada *Stage 2* dapat pindah ke *Stage 3* jika terdapat bukti penurunan nilai yang obyektif (contohnya wanprestasi/ gagal bayar) yang teridentifikasi sejak pengakuan awal. Cadangan penurunan nilai pada *Stage 3* didasarkan pada ECL sepanjang umur eksposur. Eksposur yang dapat dipulihkan akan pindah ke *Stage 2* atau *Stage 1*.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVTOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Untuk komitmen pinjaman yang belum digunakan, kerugian kredit ekspektasian merupakan nilai kini dari perbedaan antara arus kas kontraktual yang menjadi hak Grup jika pemegang komitmen pinjaman menggunakan pinjaman, dan arus kas yang diharapkan diterima oleh Grup jika pinjaman digunakan. Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen dan kontinjensi diakui pada liabilitas lain-lain (Catatan 26).

Measurement and recognition of expected credit losses

Credit risk measurement factors refer to Basel II provisions, Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD). This credit risk measurement is an estimate based on historical experience by considering macroeconomic factors as a component of forward-looking/predictor.

Calculation of expected credit loss (ECL) reserves is divided into 3 stage:

- Stage 1

  In PSAK 71, Bank records ECL reserves for 12 months from the day of initial recognition for Stage 1. For the next period, Bank continues to monitor whether there is a significant increase in credit risk from initial recognition.

- Stage 2

  If there is a significant increase in credit risk, the exposure will move to Stage 2 where reserves are posted on the ECL basis throughout the lifetime of the exposure. Conversely, if there is a significant improvement in credit quality, the exposure will move back to Stage 1.

- Stage 3

  Exposures on Stage 2 can move to Stage 3 if there is evidence of objective impairment (for example non-performance of contract/ default) identified from initial recognition. Allowance for impairment on Stage 3 is based on ECL for the life of the exposure. Recoverable exposures will move to Stage 2 or 1.

For assets measured at amortized cost, the balance in the balance sheet reflects gross assets less expected credit losses. For debt instruments in the FVTOCI category, the balance in the balance sheet reflects the fair value of the instrument, with expected credit loss reserves recorded separately as reserves for other comprehensive income. For undrawn loan commitments, the expected credit loss is the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Group if the holder of the loan commitment draws down the loan, and the cash flows that the Group expects to receive if the loan is drawn down. Expected credit loss for commitments and contingencies are recognized in other liabilities (Notes 26).

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

Penurunan nilai aset keuangan (sebelum 1 Januari 2020)

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Impairment of financial assets (before January 1, 2020)

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk seluruh aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali aset keuangan yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jika aset keuangan tidak tertagih, aset keuangan tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

For all other financial assets, the objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

For financial assets carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi. Pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income. In respect of AFS debt securities, impairment losses are subsequently reversed through profit or loss if an increase in the fair value of the investment can be objectively related to an event occurring after the recognition of the impairment loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Derecognition of financial assets

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes their retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at FVTPL) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at FVTPL are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Instrumen keuangan majemuk

Bagian komponen instrumen keuangan majemuk (obligasi konversi) yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen keuangan. Opsi konversi yang akan diselesaikan dengan pertukaran sejumlah kas atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas Perusahaan yang telah ditetapkan merupakan instrumen ekuitas.

Pada tanggal penerbitan, nilai wajar komponen liabilitas diestimasikan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen non-konversi serupa. Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dihentikan pengakuannya pada saat konversi atau pada tanggal jatuh tempo instrumen.

Opsi konversi yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas ditentukan dengan mengurangkan jumlah komponen liabilitas dari nilai wajar instrumen majemuk secara keseluruhan. Jumlah ini diakui dan dicatat dalam ekuitas, neto setelah dampak pajak penghasilan, dan selanjutnya tidak diukur ulang. Sebagai tambahan, opsi konversi yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas akan tetap di dalam ekuitas hingga opsi konversi belum dieksekusi, dalam kasus tersebut, jumlah yang diakui di ekuitas akan dialihkan ke “tambahan modal disetor”. Ketika opsi konversi masih tidak dieksekusi pada tanggal jatuh tempo obligasi konversi, jumlah yang diakui di ekuitas akan dialihkan ke “tambahan modal disetor”. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui di laba rugi pada saat konversi atau kadaluarsa opsi konversi.

Biaya transaksi yang berasal dari penerbitan obligasi konversi dialokasikan ke liabilitas dan komponen ekuitas sebesar proporsi terhadap alokasi hasil bruto. Biaya transaksi terkait komponen ekuitas diakui secara langsung di ekuitas. Biaya transaksi terkait komponen liabilitas diperhitungkan dalam jumlah tercatat komponen liabilitas dan diamortisasi sepanjang umur obligasi konversi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Compound instruments

The component parts of compound instruments (convertible notes) issued by the Group are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument. A conversion option that will be settled by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the Company’s own equity instruments is an equity instrument.

At the date of issue, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for similar non-convertible instruments. This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument’s maturity date.

A conversion option classified as equity is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound instrument as a whole. This is recognized and included in equity, net of income tax effects, and is not subsequently remeasured. In addition, the conversion option classified as equity will remain in equity until the conversion option is exercised, in which case, the balance recognized in equity will be transferred to “additional paid-in capital”. Where the conversion option remains unexercised at the maturity date of the convertible notes, the balance recognized in equity will be transferred to “additional paid-in capital”. No gain or loss is recognized in profit or loss upon conversion or expiration of the conversion option.

Transaction costs that relate to the issue of the convertible notes are allocated to the liability and equity components in proportion to the allocation of the gross proceeds. Transaction costs relating to the equity component are recognized directly in equity. Transaction costs relating to the liability component are included in the carrying amount of the liability component and are amortized over the lives of the convertible notes using the effective interest method.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either “at FVTPL” or “at amortized cost”.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan pada FVTPL

Sebelum 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan lain yang sebagai FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 3i.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or its designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition, if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.

Subsequent measurement of financial liabilities at FVTPL

Before January 1, 2020

Other financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any gains or losses arising on remeasurement recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Note 3i.

Sejak 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam laporan laba rugi.

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

After January 1, 2020

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is included in profit or loss.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Setelah 1 Januari 2020, ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

i. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan poisisi keuangan konsolidasian jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Starting January 1, 2020, when the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

j. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Grup memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Grup melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut yang mengkategorikan ke dalam tiga tingkat masukan untuk teknik penilaian:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana Grup dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

j. Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the Group measures the fair value of the financial instruments held based on the following hierarchy that categorized into three levels the inputs to valuation techniques:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; that the Group can access at the measurement date;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

k. Kas

Kas terdiri dari kas kecil, kas besar, kas pada pihak ketiga, kas di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kas pada *teller* dan *bank notes*.

k. Cash

Cash includes petty cash, cash, cash in third parties, cash in Automated Teller Machines (ATMs), cash in teller and bank notes.

l. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan sebagai kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

l. Demand Deposits with Bank Indonesia and Other Banks

Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost since January 1, 2020 and categorized as loans and receivable before January 1, 2020.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of demand deposits with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3g dan 3i related to financial assets.

m. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan sebagai kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

m. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost since January 1, 2020 and categorized as loans and receivable before January 1, 2020.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of placements with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

n. Efek-efek

Kebijakan berlaku sejak 1 Januari 2020

Setelah pengakuan awal, efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara efek yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI diukur pada nilai wajar setelah pengakuan awal, dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi laba/rugi yang belum direalisasi serta cadangan kerugian yang dibentuk diakui ke laba rugi. Untuk efek yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar langsung diakui ke laba rugi.

n. Securities

Policy applicable since January 1, 2020

After initial recognition, the effects measured at cost are amortized using the effective interest rate. While securities classified as FVTOCI are measured at fair value after initial recognition, where unrealized gains and losses on changes in fair value will be recognized as other comprehensive income. At the time of derecognition, the accumulated unrealized gain/loss and allowance for losses that have been created are recognized in profit or loss. For securities classified as FVTPL, after initial recognition will be measured at fair value where unrealized gains and losses on changes in fair value are recognized immediately in profit or loss.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Efek-efek diklasifikasikan dalam kategori diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Investasi pada Sukuk

Sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha pada saat perolehan sebagai berikut:

(i) Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Policy applicable before January 1, 2020

Securities are classified as FVTPL, available-for-sale and held-to-maturity.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

Investments in Sukuk

Sukuk classified based on business model determined at acquisition as follow:

(i) Measured at cost if the investments held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows; and the contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

(ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/ atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya.

(iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Grup mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Grup mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

At the initial recognition, the investments in sukuk measured at cost, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using the straight-line method during sukuk period and recognized in profit or loss.

(ii) Measured at fair value through other comprehensive income if the investments held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows and sale of sukuk; and the contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.

At the initial recognition, the investments in sukuk measured at fair value through other comprehensive income, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using the straight-line method during sukuk period and recognized in profit or loss. Gains or losses from changes in fair value recognized in other comprehensive income after taking into account the balance of the difference between the acquisition cost and the nominal value and the unamortized balance of the cumulative gain or loss in fair value recognized in other comprehensive income previously.

(iii) Measured at fair value through profit or loss

Investments in sukuk which are not classified as measured at cost or measure at fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss. At the initial recognition, the investment is measured at fair value at acquisition cost exclude transaction costs and subsequently, this investment is measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

Fair value of investments is discussed in Note 3i.

For investments in sukuk measured at cost and at fair value through other comprehensive income, if there is indication of impairment, the Group measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Group recognizes an impairment loss. For investments in sukuk at fair value through other comprehensive income, an impairment loss recognized in profit or loss is the amount after taking into account the balance recorded in other comprehensive income. Recoverable amount is the amount that would be received from the principal repayment regardless its present value.

o. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas derivatif mengacu pada Catatan 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

p. Kredit

Kredit diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan sebagai kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan kredit mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Dalam kredit yang diberikan termasuk pembiayaan oleh entitas anak (PDSB) berupa piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Piutang Murabahah diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang Murabahah mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang Murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal.

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. PDSB menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3g).

Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas Qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

o. Derivative Receivables and Payables

Derivative receivables and payables are classified as FVTPL.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value measurement, impairment and derecognition of derivative receivables and payables are discussed in Notes 3g, 3h and 3i related to financial assets and financial liabilities.

p. Loans

Loans are classified as amortized cost since January 1, 2020 and categorized as loans and receivable before January 1, 2020.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of loans are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

Loans included in financing by subsidiary (PDSB) consist of murabahah receivable, mudharabah financing and musyarakah financing.

Murabahah receivables are classified as loans and receivable.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of Murabahah receivables are discussed in to Notes 3g and 3i related to financial assets.

Accelerated repayment or repayment before maturity date for Murabahah receivables are treated as if the repayment is made on due date. Discount or muqasah can be offered based on applicable term but can not be predetermined.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance less allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is provided based on a review on the quality of each individual financing account (Note 3g).

Qardh is recognized based on fund provided at the transaction date. Excess received from repayment of Qardh is recognized as income when received.

Pinjaman Qardh disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. PDSB menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3g).

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.

Qardh are stated at their outstanding balance net of impairment losses.

Musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for impairment losses. PDSB provides allowance for impairment losses based on the quality of the financing as determined by a review of each individual account (Note 3g).

If there is a loss in Musyarakah due to negligence or irregularities of Musyarakah partners, the partners are to bear the expenses. The Bank's losses caused by negligence or irregularities by those partners are recognized as the past due Musyarakah financing.

q. Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Restrukturisasi kredit dilakukan terhadap debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok atau bunga sesuai jadwal yang diperjanjikan.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi seperti yang dibahas pada Catatan 3o.

q. Troubled Debt Restructuring

Debt restructuring performed to the borrower that unable or predicted to unable to fulfill its principal payment installments responsibilities or interest according to contractual schedule.

Losses resulting from loan restructuring related to modification of credit terms are recognized if the present value of future cash receipts which have been determined in new loan terms, including receipts designated as interest or principal, is less than the amount of the outstanding loan before the restructuring as discussed in Note 3o.

r. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas akseptasi mengacu pada Catatan 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

r. Acceptances Receivable and Payable

Acceptance receivables are classified as amortized cost since January 1, 2020 and categorized as loans and receivable before January 1, 2020.

Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of acceptances receivable and payable are discussed in Notes 3g, 3h dan 3i related to financial assets and financial liabilities.

s. Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

s. Consumer Financing Receivables

Consumer financing receivables are classified as amortized cost since January 1, 2020 and categorized as loans and receivable before January 1, 2020.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value measurement, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

Jaminan kendaraan yang dikuasai kembali oleh CFI dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen atau nilai realisasi bersih. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi bersih dicatat sebagai cadangan kerugian ekpektasian atau cadangan kerugian penurunan nilai dan dibebankan sebagai laba/rugi. Dalam upaya penyelesaian piutang, konsumen memberi kuasa kepada CFI untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Jika harga jual jaminan kendaraan lebih rendah dibandingkan dengan nilai saldo piutang pembiayaan, maka selisih tersebut dibebankan sebagai laba/rugi. Apabila harga jual jaminan kendaraan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai saldo piutang pembiayaan, maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

Net realisable value of repossessed vehicle obtained by CFI are stated at the lower of related consumer financing receivables' carrying value or net realisable value of the repossessed assets. The difference between the carrying value and net realisable value is recorded as allowance for expected loss and allowance for impairment loan losses and is charged as profit/loss. In case of default, the consumer gives the right to CFI to sell repossessed assets or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables. If the sale price of the repossessed vehicles is lower compared to the consumer financing receivable, then the difference is charged as profit/ loss. If the sale price of the repossessed vehicles is higher compared to the consumer financing receivable, then the difference will be paid back to the consumers.

t. Sewa

Kebijakan berlaku sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai Penyewa *(Lessee)*

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi tunggal dan mensyaratkan *lessee* mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset dengan nilai rendah. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat dimana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

t. Leases

Policy applicable since January 1, 2020

On the date of the contract's inception, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract gives the right to control the use of an identification asset for a period of time to be exchanged for compensation.

As a lessee

PSAK 73 introduces a single accounting model and requires the lessee to recognize right of-use asset and lease liabilities on the date of commencement of lease for all leases with terms of more than 12 months, except for low value asset. Right of-use asset are initially measured at cost, which consists of the initial measurement of the lease liabilities adjusted for lease payments made on or before the commencement date, plus the initial direct costs incurred, and the estimated costs to dismantle and move the underlying asset or to restore the underlying asset or the place where the asset is, less the lease incentives received.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

After the start date, the right of-use assets are measured using the cost model. The right of-use asset are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earliest date between the end of the useful life of the right of-use asset or the end of the lease period. In addition, the right of-use asset are periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for the re-measurement of lease liabilities.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Lease liabilities are initially measured at the present value of the unpaid lease payments at the start date, discounted using the implicit interest rate in the lease or, if the interest rate cannot be determined, the Group's incremental loan interest rate is used. Generally, the Group uses the incremental loan rate as the discount rate.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah.

The Group has chosen not to recognize right of-use asset and lease liabilities for short-term leases that have a lease period of 12 months or less and lease for low value assets.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Policy applicable before January 1, 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Sebagai *Lessor*

As Lessor

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh *lessee* diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor*.

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the leases.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Sebagai *Lessee*

As Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statement of financial position as a finance lease obligations.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

u. Penyertaan dalam Bentuk Saham

Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

u. Investments in Shares of Stock

Investments in associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing it's share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilainya sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. The Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

Penyertaan lainnya

Penyertaan dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) sejak 1 Januari 2020, dan dikategorikan dalam kelompok tersedia untuk dijual sebelum 1 Januari 2020.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penyertaan lainnya mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

v. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

w. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

When the group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interests.

When a group entity transacts with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

Other investments

Investment in shares of stock with percentage of ownership less than 20% is classified as measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) since January 1, 2020 and categorized as available-for-sale before January 1, 2020.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of other investments are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

v. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

w. Premises and Equipment

Premises and equipment are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses, except for land is not depreciated. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the determined fair value as at consolidated statement financial position reporting date. Asset with insignificant changes in fair value, must be revalued at least every 3 (three) years.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising from appraisal is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the revaluation surplus relating to a previous revaluation of such assets.

Penyusutan aset tetap yang direvaluasi diakui pada laba rugi.

Depreciation on revalued premises and equipment is recognized in profit or loss.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Pada bulan Januari 2017, Bank mengubah metode penyusutan aset tetap untuk kelompok kendaraan bermotor dan inventaris kantor dari metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*) menjadi metode garis lurus (*straight-line method*). Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan Bank atas pola konsumsi aset di masa depan dan diterapkan secara prospektif.

In January 2017, the Bank has changed its depreciation method for motor vehicles and office furniture and fixtures from the double-declining-balance method to straight-line method. This change is based on the Bank's assessment on the consumption pattern of the assets in the future and applied the change prospectively.

Tidak terdapat perubahan untuk metode penyusutan bangunan, yaitu metode garis lurus (*straight-line method*).

There is no changes for buildings depreciation method, which is straight-line method.

Tarif penyusutan untuk bangunan, kendaraan bermotor dan inventaris kantor masing-masing adalah sebagai berikut:

The depreciation rate for buildings, motor vehicles, and office furnitures and fixtures, respectively are as follows:

	Tahun/Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20 – 48	2% - 5%	Buildings
Kendaraan bermotor	3 – 5	25% - 50%	Motor vehicles
Inventaris kantor	3 – 25	25% - 50%	Office furniture and fixtures

Aset tetap kendaraan bermotor dan inventaris kantor milik entitas anak disusutkan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 2 – 5 tahun.

The depreciation of subsidiaries vehicles and office furniture and fixtures are computed using the straight line method based on their estimated useful lives of 2 – 5 years.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di*review* setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap.

The legal cost of land rights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under premises and equipment.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai biaya pada tahun berjalan.

The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an expense in the current year.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item premises and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

x. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

x. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less cost to sell.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi.

Non-current assets (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

y. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari *goodwill* dan perangkat lunak yang dibeli oleh Grup.

Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut (lihat Catatan 3d di atas) dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap *goodwill* yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai *goodwill* diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas, jumlah *goodwill* yang dapat diatribusikan termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

Kebijakan Grup atas *goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas asosiasi dan ventura bersama dijelaskan pada Catatan 3d.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibeli oleh Grup dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi di*review* setiap akhir tahun.

y. Intangible Assets

Intangible assets consist of goodwill and software acquired by the Group.

Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business (see Note 3d above) less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

The Group's policy for goodwill arising on the acquisition of an associate and Joint Venture is described in Note 3d.

Software

Software acquired by the Group is stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss using the double-declining balance method based on its estimated useful lives of 4 years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each year end.

z. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pemulihan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi (Catatan 3v).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g; penurunan nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 3w.

aa. Aset Tetap yang Belum Digunakan dalam Kegiatan Operasional

Aset tetap yang belum digunakan dalam kegiatan operasional dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

z. Impairment of Non-financial Assets except Goodwill

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (Note 3v).

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g; while impairment for goodwill is discussed in Note 3w.

aa. Unused Premises and Equipment

Unused premises and equipment are stated at carrying amount, i.e. cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

ab. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan kredit dan pembiayaan yang telah diambil alih oleh Grup) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit atau piutang pembiayaan di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

ab. Foreclosed Collateral

Land and other assets (collateral foreclosed by the Group) are presented in the Foreclosed Collateral account under "Other assets".

Foreclosed collateral are stated at net realizable value. The excess of loan receivable or financing receivables over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged against allowance for impairment losses.

The difference between the carrying amount of foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as gain or loss at the time of sale.

Management evaluates the value of foreclosed collateral periodically. Allowance for impairment losses on foreclosed collateral is reserved on reduction of foreclosed collateral value.

The carrying amount of foreclosed collateral is written down to recognize a permanent decline in the value of the foreclosed collateral, which is charged to current operations.

ac. Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang merupakan piutang yang dibeli dari perusahaan lain. Tagihan anjak piutang diklasifikasikan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020, dan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan anjak piutang mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

ac. Factoring Receivables

Factoring receivables are purchased receivables from the other companies. These are classified as amortized cost since January 1, 2020 and as loan and receivables before January 1, 2020.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of factoring receivables are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

ad. Simpanan

Simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan mengacu pada Catatan 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

Simpanan dan dana syirkah temporer entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah dinyatakan sebagai berikut:

- Giro wadiah dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

- Tabungan wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

ad. Deposits

Deposits are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of deposits are discussed in Notes 3h and 3i related through financial liabilities.

The policy on subsidiary's deposits and temporary syirkah funds which operates in sharia banking industry are stated as follow:

- *Wadiah* demand deposits are stated at the amounts due to current account holders.

- *Wadiah* savings are stated at the value of savings holders' savings in the Bank.

- Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.
- Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan entitas anak.

- *Mudharabah* savings are stated at the value of savings holders' saving in the Bank.
- *Mudharabah* time deposits are stated at the nominal amount set forth in the agreements between the subsidiary and the holders of time deposits.

ae. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *interbank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, tabungan dan deposito berjangka.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan dari bank lain mengacu pada Catatan 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

ae. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized cost.

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of demand deposits, interbank call money deposits with original maturities of 90 days or less, saving deposits and time deposits.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of deposits from other banks are discussed in Notes 3h and 3i related to financial liabilities.

af. Instrumen Utang dan Ekuitas yang Diterbitkan

Surat Berharga yang Diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan surat berharga yang diterbitkan mengacu pada Catatan 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

Obligasi Subordinasi

Obligasi subordinasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan obligasi subordinasi mengacu pada Catatan 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham yang menambah dan beratribusi secara langsung terhadap penerbitan saham baru disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

af. Debt and Equity Instruments Issued

Securities Issued

Bonds issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of securities issued are discussed in Notes 3h and 3i related to financial liabilities.

Subordinated Bonds

Subordinated bonds issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of subordinated bonds are discussed in Notes 3h and 3i related to financial liabilities.

Share Issuance Costs

Share issuance costs that are incremental and directly attributable to issuance of new shares are deducted from additional paid-in capital and are not amortized.

ag. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) diklasifikasikan dalam kategori liabililtas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

ag. Securities Sold with Agreements to Repurchase

Securities sold with agreements to repurchase (repo) are classified as financial liabilities at amortized cost.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mengacu pada Catatan 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

Securities sold under repurchase agreements (repo) are presented as liabilities and stated at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortized using effective interest method as interest expense over the year commencing from the selling date to the repurchase date.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of securities sold with agreements to repurchase refer to Notes 3h and 3i related to financial liabilities.

ah. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi sejak 1 Januari 2020 dan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sebelum 1 Januari 2020.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali efek-efek yang disepakati dikurangi selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan metode suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu pada Catatan 3g dan 3i terkait aset keuangan.

ah. Securities Purchased with Agreements to Resell

Securities purchased with agreements to resell are classified as amortized cost after January 1, 2020 and categorized as loans and receivable before January 1, 2020.

Securities purchased under resale agreements (reverse repo) are presented as receivables and stated at the agreed resale price less the difference between the purchase price and the agreed resale price. The difference between the purchase price and the agreed resale price is amortized using the effective interest method as interest income over the year commencing from the acquisition date to the resale date.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of securities purchased with agreements to resell are discussed in Notes 3g and 3i related to financial assets.

ai. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3g).

Pendapatan kredit yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian termasuk:

- Bunga pada aset dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.
- Bunga pada instrumen sekuritas investasi tersedia untuk dijual dihitung menggunakan suku bunga efektif.

ai. Recognition of Interest Revenues and Expenses

Interest income and expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest rate method (Note 3g).

Interest income from impaired loan are computed using the effective interest method based on the amount of loan – net of impairment loss.

Interest income and expense recognized in the consolidated financial statements includes:

- Interest on financial assets and liabilities measured at amortized costs using the effective interest method.
- Interest on available-for-sale financial assets is computed using the effective interest method.

Perubahan nilai wajar pada efek-efek yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan diukur pada nilai wajar pada laba rugi dan derivatif lainnya yang digunakan untuk kepentingan manajemen risiko, dan aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, akan mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Changes in fair value of trading securities measured at FVTPL and other derivatives used for risk management purposes, and other financial assets and liabilities measured at FVTPL will affect the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Di dalam pendapatan dan beban bunga terdapat pendapatan dan beban pengelolaan dana oleh entitas anak (PDSB) berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad Murabahah dan pendapatan dari bagi hasil yaitu Mudharabah, Musyarakah dan pendapatan usaha utama lainnya serta hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.

Included in interest income and expense are income as fund manager (mudharib) by PDSB consist of income from Murabahah transactions, income from profit sharing of Mudharabah, Musyarakah and other main operating income and third parties' share on the return of temporary syirkah funds.

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Murabahah revenue are recognized on accrual basis using the effective rate of return method.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Revenue from Musyarakah distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on Musyarakah revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as right of the passive partner on the revenue sharing and as a liability.

Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Revenue from Mudharabah is recognized during the period of revenue sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio and recognition of revenue based on projected result is not allowed. Loss incurred due to negligence of mudharib is charged to mudharib and will not reduce the Mudharabah investment.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh PDSB yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Third party share on the revenue sharing of temporary syirkah funds represents their share on the return of their fund managed by PDSB based on Mudharabah Mutlaqah principles, which is recognized based on distributed income (cash basis).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan PDSB yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Distribution of income is based on revenue sharing principle, which is calculated from PDSB gross profit margin.

aj. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

aj. Recognition of Revenues and Expenses on Commissions and Fees

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif.

Commissions and fees income related to loan activities or specific terms and with significant amounts are treated as deferred transaction cost which directly attributable to the financial instruments and amortized over the periods of the related financial instruments using the effective interest method.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan jangka waktu tertentu atau nilainya tidak material menurut Grup diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Commissions and fees, which are not related to loan activities and terms of the loan or whose amount is not material according to the Group are recognized as revenues or expenses at the time the transactions are made.

ak. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

ak. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds consist of Mudharabah savings deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Interbank Investment Certificates.

Mudharabah savings deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Mudharabah time deposits are stated at the nominal amount set forth in the agreements between the holders of time deposit and the Bank.

Temporary syirkah funds can not be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when the Bank has loss, unless there is negligence or default by the Bank. On the other side, temporary syirkah funds can not be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss in proportion to the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

al. Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pemilik dana atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil pemilik dana yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

al. Depositors Share on Revenue Sharing of Temporary Syirkah Funds

Depositors share on the revenue sharing of temporary syirkah funds represents their share on the return of their fund managed by the Bank based on Mudharabah Mutlaqah principles, which is recognized based on distributed income.

Distribution of income is based on revenue sharing principle, which is calculated from gross profit margin.

am. Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Bank menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Bank menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

am. Pension Plan and Other Post-employment Benefits

The Bank established a defined benefit pension plan covering the local permanent employments. In addition, the Group also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the “Labor Laws”). For normal pension scheme, the Bank calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), diakui langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam ”saldo laba” tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amandemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

an. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements recognised in other comprehensive income are reflected immediately in “retained earnings” not reclassified. Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier. Net interest is calculated by applying a discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group’s defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

an. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group’s liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

ao. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

ao. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all potentially dilutive ordinary shares.

ap. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja informasi segmen.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

ap. Segment Information

Operating segments identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
b) whose operating results are reviewed regularly by the entity’s chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

aq. Program Loyalitas Pelanggan

Bank telah menyusun berbagai strategi, mulai dari program promosi untuk menarik minat nasabah baru, mempertahankan loyalitas nasabah *existing*, perluasan usaha hingga peningkatan layanan terhadap nasabah.

Beberapa program terkait dengan promosi antara lain sebagai berikut:

- Program Panin Super Bonanza (PSB).
- Program Panin *Member Get Member*.
- Bunga ringan KPR fixed berjenjang.
- Uang muka ringan untuk KPR.

Perlakuan akuntansi atas program loyalitas pelanggan dilakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk Panin Super Bonanza dan Panin Member Get Member, dan hadiah diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pada akun simpanan (Catatan 3ad), sebagai biaya transaksi. Sementara untuk program bunga dan uang muka ringan, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pada akun kredit (Catatan 3p).

Beberapa program terkait dengan perluasan usaha dan jaringan antara lain sebagai berikut:

- Menjadi bank pembayaran untuk transaksi pasar modal.
- Kerjasama dengan *digital fintech company* seperti PT Dana (*Direct Debit* Dana) dan Tokopedia (pembayaran *virtual account*).

Beberapa program terkait dengan pengembangan layanan, antara lain sebagai berikut:

- Penambahan fasilitas, seperti *virtual account, auto collection, payroll service,* dan transfer online di *transaction banking*.
- Memperluas *acceptance* kartu debit Panin Bank untuk mendukung perkembangan *e-commerce*.
- Nasabah dapat memantau *portfolio* reksadana, *bancassurance* maupun obligasi melalui fitur pada *internet banking* dan *mobile banking* Panin Bank.

aq. Customer Loyalty Program

The Bank has developed various strategy, from promotion program to attract new customers, maintain the loyalty of existing customers, expanding business and improving the services to customers.

Few programs related to promotion, are as follows:

- Panin Super Bonanza (PSB) Program.
- Panin Member Get Member Program.
- Lower and fixed tiered interest for KPR.
- Lower Down Payment for KPR.

Accounting treatment for Customer Loyalty Program is in accordance with the applicable of financial accounting standards. In relation to Panin Super Bonanza and Panin Member Get Member, and prizes are treated based on accounting policies of deposits (Note 3ad), as transaction cost. While for low interest and down payment program are treated based on accounting policies of loans (Note 3p).

Some programs related to expanding business and network, are as follows:

- To be the payment bank for capital market transaction.
- Cooperate with digital fintech company such as PT Dana (Direct Debit Dana) and Tokopedia (virtual account payment).

Few programs related to expanding service, are as follows:

- Additional facilities, such as virtual account, auto collection, payroll service, and online transfer in banking transaction.
- Expand the acceptance of Panin Bank debit card to support the development of e-commerce.
- Customers can monitor mutual funds portfolio, bancassurance and bonds via Panin Bank internet banking and mobile banking features.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pengendalian atas entitas anak

Pada tanggal 28 Desember 2018, VMF telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-193/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) sebanyak 3.102.193.089 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140 setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 434.307 juta dan biaya emisi saham sebesar Rp 13.029 juta.

Pada tanggal 25 Januari 2019, VMF telah menyelesaikan rangkaian proses Penawaran Umum Terbatas II melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank tidak mengeksekusi atau mengambil haknya saat saham baru diterbitkan sehingga Bank mengalami dilusi kepemilikan pada VMF dari sebelumnya memiliki 57,54% menjadi 26,15%. Bank melepaskan 31,39% saham VMF. Pemegang saham pengendali VMF beralih dari Bank Panin kepada IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) sebagai pemegang 63,63% total saham VMF.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimates is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgement in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the managements have made in the process of applying the Group’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Control over subsidiaries

On December 28, 2018, VMF obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of the Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervisor through its Letter No. S-193/D.04/2018 for VMF Limited Public Offering of Shares II (“PUT II”) through Pre-emptive Rights Issue (“HMETD”) of 3,102,193,089 common shares with par value of Rp 100 per share with an offering price of Rp 140 per share or equivalent to Rp 434,307 million and issuance cost of Rp 13,029 million.

On January 25, 2019, VMF has completed a series of Limited Public Offering II processes through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD). The Bank did not execute or take away its rights when the new shares were issued so that the Bank had diluted its ownership in VMF from previously owning 57.54% to 26.15%. The bank released 31.39% shares in VMF. VMF controlling shareholders switch from Bank Panin to IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) as the holder of 63.63% of total shares of VMF.

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Manajemen telah menelaah aset keuangan Grup yang dimiliki hingga jatuh tempo karena persyaratan pemeliharaan modal dan likuiditas dan telah dikonfirmasi intensi positif Grup dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo ini diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Rincian dan jumlah tercatat aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dijelaskan dalam Catatan 9.

Held-to-maturity financial assets

The management have reviewed the Group's held-to-maturity financial assets in the light of its capital maintenance and liquidity requirements and have confirmed the Group's positive intention and ability to hold those assets to maturity. Held-to-maturity financial assets are measured at amortised cost. The details and its carrying amounts of the held-to-maturity financial assets are described in Note 9.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Rugi penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio aset keuangan. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Impairment loss on financial assets

The Group assesses its financial assets at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial assets have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the omission of payment of receivables.

Provision for loss on impairment will be set up to recognize the impairment loss that occurs in a portfolio of financial assets. Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling the future cash flows.

Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Kebijakan berlaku sejak 1 Januari 2020

PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian yang lebih melihat ke depan dalam mengukur penurunan nilai instrumen keuangan (*expected loss*). Setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung (*reasonable and supportable information*). Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atau 12 bulan sesuai dengan tingkat risiko kreditnya.

Pengukuran risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

Faktor pengukuran risiko kredit mengacu pada ketentuan Basel II yaitu *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD). Pengukuran risiko kredit ini merupakan estimasi berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi sebagai komponen *forward-looking/predictor.*

Perhitungan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibagi menjadi 3, yaitu:

- *Stage 1*

  Dalam PSAK 71, Bank membukukan cadangan ECL untuk 12 bulan sejak hari pengakuan awal untuk *Stage* 1. Untuk periode selanjutnya, Bank terus memonitor apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dari pengakuan awal.

- *Stage 2*

  Jika terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan, eksposur akan pindah ke *Stage* 2 dimana pencadangan dibukukan berdasarkan ECL sepanjang umur eksposur. Sebaliknya, jika terdapat perbaikan yang signifikan pada kualitas kredit, eksposur akan pindah kembali ke *Stage* 1.

- *Stage 3*

  Eksposur pada *Stage* 2 dapat pindah ke *Stage* 3 jika terdapat bukti penurunan nilai yang obyektif (contohnya wanprestasi/ gagal bayar) yang teridentifikasi sejak pengakuan awal. Cadangan penurunan nilai pada *Stage* 3 didasarkan pada ECL sepanjang umur eksposur. Eksposur yang dapat dipulihkan akan pindah ke *Stage* 2 atau *Stage* 1.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVTOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen dan kontinjensi diakui pada liabilitas lain-lain.

Policy applicable since January 1, 2020

PSAK 71 introduces the expected credit loss method which is more forward looking at measuring impairment of financial instruments (expected loss). At each reporting date, the Group assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition using reasonable and supportable information. The Group measures the allowance for possible losses on financial instruments at the amount of expected credit losses throughout their life or 12 months in accordance with the level of credit risk.

Credit risk measurement is based on default risk at the reporting date by considering changes in default risk that occur during the life of the financial instrument.

Credit risk measurement factors refer to Basel II provisions, Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD). This credit risk measurement is an estimate based on historical experience by considering macroeconomic factors as a component of forward-looking/predictors.

Calculation of expected credit loss reserves is divided into 3 stage:

- Stage 1

  In PSAK 71, Bank records ECL reserves for 12 months from the day of initial recognition for Stage 1. For the next period, Bank continues to monitor whether there is a significant increase in credit risk from initial recognition.

- Stage 2

  If there is a significant increase in credit risk, the exposure will move to Stage 2 where reserves are posted on the ECL basis throughout the lifetime of the exposure. Conversely, if there is a significant improvement in credit quality, the exposure will move back to Stage 1.

- Stage 3

  Exposures on Stage 2 can move to Stage 3 if there is evidence of objective impairment (for example non-performance of contract/ default) identified from initial recognition. Allowance for impairment on Stage 3 is based on ECL for the life of the exposure. Recoverable exposures will move to Stage 2 or 1.

For assets measured at amortized cost, the balance in the balance sheet reflects gross assets less expected credit losses. For debt instruments in the FVTOCI category, the balance in the balance sheet reflects the fair value of the instrument, with expected credit loss reserves recorded separately as reserves for other comprehensive income. Loan expectations for commitments and contingencies are recognized in other liabilities.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Grup melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

a. Individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas aset keuangan pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual aset keuangan dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, suku bunga dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Policy applicable before January 1, 2020

The Group performs assessment of the impairment amounts in two ways, namely:

a. Individually, made to the amount of financial assets that exceed certain threshold and to certain financial assets that have objective evidence that impairment has been identified separately on the date of consolidated statement of financial position. Impairment loss is the difference between the carrying amount and the present value of the best estimated future cash flows and realization of collateral at the initial effective interest rates of financial assets. The estimates are made by considering the debt capacity and financial flexibility of the debtor, debtor's earnings quality, quantity and source of cash flows, industry in which the debtor operates and realizable value of collateral. Estimating the amount and timing of future recovery will require a lot of considerations. The amount of revenue depends on the performance of the debtor in the future and the value of collateral, both of which will be affected by future economic conditions, in addition to the fact that the collateral may not be easily sold. The actual value and date of receipt of future cash flows may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the consolidated financial statements.

b. Collectively, made to the amount of financial assets that do not exceed certain threshold and do not have objective evidence of impairment when assessed individually, and to the financial assets that have objective evidence of impairment but has not been identified separately on the date of consolidated statement of financial position. Establishment of collective impairment loss is made by, among others, taking into account the number and duration of arrears, collateral and past loss experience. The most important factors in establishing reserves are the probability of default and the loss given default. The quality of financial assets in the future is affected by uncertainties that could cause actual loss on financial assets, which may differ materially from the impairment loss reserves that have been established. These uncertainties include the economic environment, interest rates and the effect on spending of the debtor, unemployment rate and payment behaviour.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di tahun berjalan. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Employee benefits

Determination of liability for employee benefits depends on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating the amount of such liability. These assumptions include, among others, the discount rate and the rate of increase in salaries. Different realization of the Group's assumptions is directly recognized in the consolidated other comprehensive income and therefore, generally affect the recognized amount of other comprehensive income and recorded obligation in the period in which they occur. Although the assumptions used by the Group are assessed to be appropriate and fair, significant changes in actual events or significant changes in the assumptions used can significantly affect the Group's post-employment benefits liability.

Penentuan Nilai Wajar dan Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Aset tetap milik Grup diukur berdasarkan nilai wajarnya. Grup menggunakan jasa penilai independen yang terdaftar di OJK untuk mengestimasi nilai aset tetap berdasarkan pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Informasi mengenai penilai independen dan cara penentuan nilai wajar dijelaskan dalam Catatan 17 dan 52.

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 17.

Fair Value Measurement and Estimated Useful Lives of Premises and Equipment

Premises and equipment owned by the Group are measured based on its fair value. The Group use independent appraiser registered in OJK to estimate the value of premises and equipment based on market data approach, income approach and cost approach. Information regarding independent appraiser and valuation method to determine its fair value as described in Notes 17 and 52.

The useful life of each item of the Group's premises and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimation due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of premises and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of premises and equipment are disclosed in Note 17.

5. KAS

5. CASH

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah	1.809.247	1.283.319	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	51.380	43.705	United States Dollar
Dollar Singapura	10.750	11.659	Singapore Dollar
Jumlah	1.871.377	1.338.683	Total

Saldo kas termasuk uang pada mesin ATM (*Automated Teller Machines*) sejumlah Rp 210.356 juta dan Rp 135.644 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Cash includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp 210,356 million and Rp 135,644 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Kas pada mesin ATM (*Automated Teller Machines)* telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 354.350 juta tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 356.850 juta tanggal 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Cash in ATMs (Automated Teller Machine) are insured against fire, theft and other possible risks with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) with coverage amount of Rp 354,350 million as of December 31, 2020, and Rp 356,850 million as of December 31, 2019. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

6. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah	1.734.017	7.261.081	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	646.898	1.752.562	United States Dollar
Jumlah	2.380.915	9.013.643	Total

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan PADG No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan melalui PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, serta sesuai dengan PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (COVID-19). Peraturan ini berlaku sampai tanggal 23 Desember 2020, lalu digantikan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/35/PADG/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang pelaksanaan PBI No. 22/4/PBI/2020 terkait insentif. Berikut adalah persentase minimum giro wajib minimum dan yang telah Bank penuhi:

In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 and PADG No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units, which has been amended several times, the amendment through PBI No. 22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020 and Board of Governors Regulation No. 22/10/PADG/2020 dated April 29, 2020, as well as per PBI No. 22/4/PBI/2020 regarding Incentive for Banks that Provide Funds for Certain Economic Activities to Support the control in Economic Impacts due to Corona Virus (COVID-19). This regulation applied until December 23, 2020, and has been replaced with Board Governors Regulation No. 22/35/PADG/2020 dated December 23, 2020 regarding implementation of PBI No. 22/4/PBI/2020 related incentives. The Bank's minimum statutory reserves and required minimum percentage are as follows:

	2020		2019		
	%	Minimal/ Minimum %	%	Minimal/ Minimum %	
Konvensional					Conventional
Rupiah					Rupiah
GWM Primer	4,22	3,00	6,01	6,00	Primary GWM
GWM Harian	1,13	0,00	3,00	3,00	Daily GWM
GWM Rata-rata	3,09	3,00	3,01	3,00	Average GWM
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	42,57	6,00	22,20	4,00	Macroprudential Intermediation Ratio
Dollar Amerika Serikat					United States Dollar
GWM Valuta Asing	4,00	4,00	8,02	8,00	Primary GWM
GWM Harian	2,00	2,00	6,00	6,00	Daily GWM
GWM Rata-rata	2,00	2,00	2,02	2,00	Average GWM
Entitas Anak Syariah					Sharia Subsidiary
Rupiah					Rupiah
GWM Primer	3,04	3,00	4,53	4,50	Primary GWM
GWM Harian	0,00	0,00	1,50	1,50	Daily GWM
GWM Rata-rata	3,04	3,00	3,03	3,00	Average GWM
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	9,26	4,50	6,54	4,00	Macroprudential Intermediation Ratio

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM Sekunder berubah menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) berubah menjadi Rasio Intermediasi Makro Prudensial (RIM). GWM LFR dan RIM ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsetif atas dengan selisih antara LFR, RIM bank dan RIM target, dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM insentif. Sesuai PBI No. 20/4/PBI/2018 dan perubahannya dalam PBI No. 21/12/PBI/2019 dan PADG No. 21/22/PADG/2019 dan perubahan terakhirnya sesuai PADG No. 22/11/PADG/2020 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan sebesar 6% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Untuk entitas anak syariah Perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) dilakukan sesuai peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana setiap bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. GWM dalam Rupiah dan Dollar Amerika Serikat ditetapkan masing–masing sebesar 5% dan 1%. Selain itu, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah kurang dari 80% wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% - 3%. Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sampai dengan Rp 1.000.000 juta tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/14/PADG/2019 tentang perubahan atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, GWM Bank Umum Syariah dalam Rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 4,5% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 1,5% dan secara rata-rata sebesar 3%, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/27/PADG/2019 tentang perubahan ketiga atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. GWM Bank Umum Konvensional dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2,5% dan secara rata-rata sebesar 3%, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 6% dan secara rata-rata sebesar 2%.

Based on PBI No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018, the Secondary GWM changed into Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) and GWM Loan to Funding Ratio (LFR) changed into Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). GWM LFR and RIM which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the Bank's LFR, RIM and target RIM by taking into account the difference between the bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. In accordance with PBI No. 20/4/PBI/2018 and its amendment in PBI No. 21/12/PBI/2019 and PADG No. 21/22/PADG/2019 and the latest amendment in PADG No. 22/11/PADG/2020 regarding Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is set at 6% of total third party funds in Rupiah.

For the sharia subsidiary The Minimum Statutory Reserves (GWM) were calculated in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013 regarding Mandatory Minimum Deposit Balances in Rupiah and Foreign Currencies for Islamic Bank and Islamic Business Unit, which provides that each commercial bank conducting business based on sharia principles in Indonesia is required to maintain minimum deposit balances with Bank Indonesia, as liquidity reserve. GWM in Rupiah and United States Dollar are set respectively at 5% and 1%. In addition, for a bank with less than 80% financing to deposit ratio in Rupiah is required to maintain an additional reserves by 1% - 3%. A bank with financing to deposit ratio in Rupiah is at 80% or more and/or have deposits in Rupiah of up to Rp 1,000,000 million is not required to maintain additional reserves.

Based on Board of Governors Regulation (PADG) No. 21/14/PADG/2019 regarding to the amendment of PADG No. 20/10/PADG/2018 regarding to Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Bank, Islamic Bank and Islamic Business Unit, Rupiah GWM in Islamic Bank is set at average of 4.5% of its deposits (DPK) in Rupiah during certain period which comprises 1.5% Daily and 3% in average, foreign currency GWM is set at 1% of its DPK in foreign currency on certain period which required to maintain daily.

Based on Board of Governors Regulation (PADG) No. 21/27/PADG/2019 regarding to the third amendment of PADG No. 20/10/PADG/2018 regarding to Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Bank, Islamic Bank and Islamic Business Unit. GWM in Conventional Bank is set at average 5.5% of its deposits (DPK) in Rupiah during certain period which comprises 2.5% daily and 3% in average, foreign currency GWM is set at 8% of its DPK in foreign currency during certain period which comprises 6% daily and 2% in average.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/2/PADG/2020 tentang perubahan keempat atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. GWM Bank Umum Konvensional dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2,5% dan secara rata-rata sebesar 3%, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2% dan secara rata-rata sebesar 2%.

Based on Board of Governors Regulation (PADG) No. 22/2/PADG/2020 regarding to the amendment of PADG No. 20/10/PADG/2018 regarding to Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Bank, Islamic Bank and Islamic Business Unit. GWM in Conventional Bank is set at average 5.5% of its deposits (DPK) in Rupiah during certain period which comprises 2.5% daily and 3% in average, foreign currency GWM is set at 4% of its DPK in foreign currency during certain period which comprises 2% daily and 2% in average.

Berdasarkan peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/10/PADG/2020 tentang perubahan kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvesional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. GWM Bank Umum Konvesional dalam Rupiah ditetapkan sebesar 3,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% dan secara rata-rata sebesar 3%. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2% dan secara rata-rata sebesar 2%.

Based on Members of the Board of Governors Regulation No. 22/10/PADG/2020 concerning the fifth amendment to PADG No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Conventional Commercial Banks Statutory Reserves in Rupiah are set at 3.5% of Third Party Funds (DPK) in Rupiah during certain reporting periods that must be fulfilled daily by 0.5% and on average by 3%. Statutory Reserves in Foreign Currencies are set at 4% of Third Party Funds in Foreign Currencies during the specified reporting period which must be fulfilled daily by 2% and on average by 2%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 tentang insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona. Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu. Insentif bagi Bank berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dengan besaran insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 0,5% yang tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/35/PADG/2020 tentang pelaksanaan peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 tentang insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 22/4/PBI/2020 concerning incentives for Banks providing funds for certain economic activities to support the handling of economic impacts due to the corona virus outbreak. Bank Indonesia provides incentives for Banks that provide funds for certain economic activities. Incentives for Banks in the form of concessions for the fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled daily with the amount of incentives set by Bank Indonesia, 0.5% as stipulated in the Regulations of the Board of Governors No. 22/35/PADG/2020 concerning the implementation of Bank Indonesia regulation No. 22/4/PBI/2020 concerning incentives for banks that provide funds for certain economic activities to support the handling of economic impacts due to the corona virus outbreak.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has complied with the required minimum deposit balances under the Bank Indonesia regulation.

7. GIRO PADA BANK LAIN

Rincian giro pada bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

7. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

Demand deposits with other banks by type of currencies are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi			Related parties
Bank			The Bank
Dollar Australia	736.786	27.191	Australian Dollar
Dollar Selandia Baru	25.753	12.104	New Zealand Dollar
Jumlah	762.539	39.295	Total
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	42.309	61.116	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	587.362	224.044	United States Dollar
Euro	205.446	20.236	Euro
Dollar Singapura	121.970	133.515	Singapore Dollar
Yen Jepang	110.231	183.584	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	45.125	74.661	Great Britain Poundsterling
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	145.601	60.180	Others (below 5% each)
Sub jumlah	1.258.044	757.336	Sub total
Entitas anak			Subsidiaries
Rupiah	17.369	51.853	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	-	74	United States Dollar
Sub jumlah	17.369	51.927	Sub total
Jumlah	1.275.413	809.263	Total
Jumlah Giro pada Bank Lain	2.037.952	848.558	Total Demand Deposits with Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(43)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bersih	2.037.909	848.558	Total Demand Deposits with Other Banks - Net

Rincian giro pada bank lain berdasarkan pihak dimana Grup menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

Demand deposits with other banks by counterparties are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Bank			The Bank
Rupiah			Rupiah
Bank Central Asia	30.655	107	Bank Central Asia
Bank Riau Kepri	5.028	6.176	Bank Riau Kepri
Bank BJB	2.897	3.095	Bank BJB
Standard Chartered Bank	28	50.037	Standard Chartered Bank
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	3.701	1.701	Others (below 5% each)
Sub jumlah	42.309	61.116	Sub total
Valuta Asing			Foreign Currencies
Australia and New Zealand Bank, Melbourne	736.786	27.192	Australia and New Zealand Bank, Melbourne
Bank of China, Jakarta	260.203	2.551	Bank of China, Jakarta
J.P Morgan Chase, New York	135.721	124.427	J.P Morgan Chase, New York
Deutsche Bank AG, Frankfurt	117.179	7.839	Deutsche Bank AG, Frankfurt
Mizuho Bank, Tokyo	110.231	183.584	Mizuho Bank, Tokyo
United Overseas Bank Ltd., Singapura	96.852	108.368	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Standard Chartered, London	45.125	74.661	Standard Chartered, London
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	476.177	206.893	Others (below 5% each)
Sub jumlah	1.978.274	735.515	Sub total
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bank	2.020.583	796.631	Total Demand Deposit with Other Banks - Bank

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Entitas Anak			Subsidiaries
Rupiah			Rupiah
Bank Central Asia	11.685	36.656	Bank Central Asia
Bank DKI	2.278	2.264	Bank DKI
Bank Rakyat Indonesia	1.940	590	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	219	9.924	Bank Mandiri
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	1.247	2.419	Others (below 5% each)
Sub jumlah	17.369	51.853	Sub total
Valuta asing			Foreign currencies
J Trust Bank	-	74	J Trust Bank
Jumlah Giro pada Bank Lain - Entitas Anak	17.369	51.927	Total Demand Deposit with Other Banks - Subsidiaries
Jumlah Giro pada Bank Lain	2.037.952	848.558	Total Demand Deposit with Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(43)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bersih	2.037.909	848.558	Total Demand Deposits with Other Banks - Net

Tingkat suku bunga efektif rata-rata per tahun giro pada bank lain untuk mata uang Rupiah dan valuta asing masing-masing sebesar 1,01% dan 0,10% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1,07% dan 0,38% pada tanggal 31 Desember 2019.

The average annual effective interest rates of demand deposits with other banks in Rupiah and foreign currencies were 1.01% and 0.10% as of December 31, 2020 and 1.07% and 0.38% as of December 31, 2019, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan agunan oleh Grup.

As of December 31, 2020 and 2019, there are no demand deposits from other banks that serve as collateral to the Group.

Mutasi nilai tercatat Giro pada Bank Lain adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount on Demand Deposits with other Banks are as follows:

	2020					
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Syariah Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	845.518	-	-	3.040	848.558	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	1.201.671	-	-	1.445	1.203.116	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	2	-	-	107	109	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(13.724)	-	-	(107)	(13.831)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan	1.187.949	-	-	1.445	1.189.394	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	2.033.467	-	-	4.485	2.037.952	Ending balance

Mutasi nilai cadangan kerugian penurunan nilai Giro pada Bank Lain adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on Demand Deposits with other Banks are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Penerapan PSAK 71	1.145	-	-	-	1.145	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	1.145	-	-	-	1.145	Balance at the beginning of the year PSAK 71
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.085)	-	-	-	(1.085)	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(17)	-	-	-	(17)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(1.102)	-	-	-	(1.102)	Total decreases for the current year
Saldo akhir tahun	43	-	-	-	43	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai Giro pada Bank Lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses on Demand Deposits with other Banks is adequate to cover the losses.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan jenis penempatan adalah sebagai berikut:

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

Placements with Bank Indonesia and other banks by types of placements are as follows:

	2020			
	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
Bank				The Bank
Call money	5 - 34 hari/days	3,85%	4.924.761	Call money
Tabungan	-	1.25%	11	Savings deposits
Sub jumlah			4.924.772	Sub total
Entitas anak				Subsidiary
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	5 hari/days	3,00%	756.000	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Deposito berjangka	92 - 181 hari/days	8,63%	600.000	Time deposit
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	273 hari/days	3,78%	154.054	Bank Indonesia Sharia Certificate
Sub jumlah			1.510.054	Sub total
Jumlah			6.434.826	Total
Valuta asing				Foreign currencies
Pihak ketiga				Third parties
Bank				The Bank
Call money				Call money
Dollar Amerika Serikat	7 - 33 hari/days	0,33%	1.025.650	United States Dollar
Dollar Singapura	14 - 34 hari/days	0,89%	519.703	Singapore Dollar
Dollar Australia	92 hari/days	0,01%	268.812	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	33 hari/days	0,01%	57.037	Great Britain Poundsterling
Yuan China	62 hari/days	2,35%	43.140	Chinese Yuan
Euro	182 hari/days	1,00%	17.234	Euro
Deposito Berjangka				Time Deposit
Dollar Amerika Serikat	5 hari/days	0.05%	84.300	United States Dollar
Jumlah			2.015.876	Total
Jumlah			8.450.702	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(704)	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			8.449.998	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net

	2019			
	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun/ Average annual effective interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
Bank				The Bank
Call money	2 - 31 hari/days	5,32%	955.000	Call money
Tabungan		1,25%	11	Savings deposits
Sub jumlah			955.011	Sub total
Entitas anak				Subsidiary
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	2 hari/days	4,25%	745.000	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	182 - 273 hari/days	6,28%	370.000	Bank Indonesia Sharia Certificate
Sub jumlah			1.115.000	Sub total
Jumlah			2.070.011	Total
Valuta asing				Foreign currencies
Pihak ketiga				Third parties
Bank				The Bank
Call money				Call money
Dollar Australia	28 - 63 hari/days	0,88%	1.312.928	Australian Dollar
Dollar Singapura	14 - 94 hari/days	1,78%	474.492	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	14 - 21 hari/days	0,49%	82.072	Great Britain Poundsterling
Dollar Amerika Serikat	187 hari/days	3,80%	69.413	United States Dollar
Yuan China	32 - 33 hari/days	2,49%	39.880	Chinese Yuan
Dollar Selandia Baru	14 - 33 hari/days	0,81%	32.674	New Zealand Dollar
Euro	184 hari/days	1,20%	31.140	Euro
Dollar Hongkong	21 hari/days	1,73%	24.958	Hongkong Dollar
Dollar Kanada	33 hari/days	1,13%	21.280	Canadian Dollar
Jumlah			2.088.837	Total
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain			4.158.848	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan pihak dimana Grup menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia and other banks by counterparties are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Call Money			Call Money
Bank Victoria Internasional	1.400.000	-	Bank Victoria International
Bank Indonesia	954.761	-	Bank Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	560.000	-	Bank Rakyat Indonesia
BPD Papua	500.000	-	BPD Papua
BPD Riau	400.000	-	BPD Riau
Bank Mega	-	475.000	Bank Mega
Bank Jateng	-	230.000	Bank Jateng
Bank Jambi	-	200.000	Bank Jambi
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	1.110.000	50.000	Others (below 5% each)
Sub jumlah	4.924.761	955.000	Sub total
Tabungan			Savings deposits
Bank Negara Indonesia	11	11	Bank Negara Indonesia
Jumlah	4.924.772	955.011	Total

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Entitas anak			Subsidiary
Bank Indonesia	910.054	1.115.000	Bank Indonesia
Bank Bukopin	600.000	-	Bank Bukopin
Sub jumlah	1.510.054	1.115.000	Sub total
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Rupiah	6.434.826	2.070.011	Total Placements w ith Bank Indonesia and Other Banks - Rupiah
Valuta Asing			Foreign currencies
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Call Money			Call Money
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Bank Negara Indonesia, Seoul	828.950	-	Bank Negara Indonesia, Seoul
Bank Mizuho, Jakarta	196.700	-	Bank Mizuho, Jakarta
Bank Mandiri Europe, London	-	69.413	Bank Mandiri Europe, London
Sub jumlah	1.025.650	69.413	Sub total
Dollar Singapura			Singapore Dollar
Bank Negara Indonesia, Singapura	456.066	92.835	Bank Negara Indonesia, Singapore
Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura	63.637	-	Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapore
Bank Negara Indonesia, Jakarta	-	309.452	Bank Negara Indonesia, Jakarta
CIC Bank, Singapura	-	72.205	CIC Bank, Singapore
Sub jumlah	519.703	474.492	Sub total
Dollar Australia			Australian Dollar
CIC Bank, Singapura	268.812	301.487	CIC Bank, Singapore
National Bank of Kuw ait, Singapura	-	1.011.441	National Bank of Kuw ait, Singapore
Sub jumlah	268.812	1.312.928	Sub total
Poundsterling Inggris			Great Britain Poundsterling
Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura	57.037	-	Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapore
CIC Bank, Singapura	-	82.072	CIC Bank, Singapore
Sub jumlah	57.037	82.072	Sub total
Yuan China			Chinese Yuan
Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura	43.140	-	Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapore
CIC Bank, Singapura	-	39.880	CIC Bank, Singapore
Sub jumlah	43.140	39.880	Sub total
Euro			Euro
Bank Mandiri Europe, London	17.234	31.140	Bank Mandiri Europe, London
Dollar Selandia Baru			New Zealand Dollar
CIC Bank, Singapura	-	32.674	CIC Bank, Singapore
Dollar Hongkong			Hongkong Dollar
CIC Bank, Singapura	-	24.958	CIC Bank, Singapore

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Kanada			Canadian Dollar
CIC Bank, Singapura	-	21.280	CIC Bank, Singapore
Deposito Berjangka			Time Deposit
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Bank Indonesia	84.300	-	Bank Indonesia
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Valuta asing	2.015.876	2.088.837	Total Placements with Bank Indonesia and other banks - Foreign currencies
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	8.450.702	4.158.848	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(704)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih	8.449.998	4.158.848	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The carrying amount of placements with Bank Indonesia and other banks at amortized cost were as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.450.702	4.158.848	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 19)	5.917	15.487	Accrued interest receivable (Note 19)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(704)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	8.455.915	4.174.335	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijadikan agunan oleh Grup.

On December 31, 2020 and 2019, there are no placements with Bank Indonesia and other banks that serve as collateral to the Group.

Mutasi nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount of placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	4.158.848	-	-	4.158.848	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	8.450.702	-	-	8.450.702	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.158.848)	-	-	(4.158.848)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan	4.291.854	-	-	4.291.854	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	8.450.702	-	-	8.450.702	Ending balance

Mutasi cadangan penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Penerapan PSAK 71	11.364	-	-	-	11.364	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	11.364	-	-	-	11.364	Balance at the beginning of the year PSAK 71
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	704	-	-	-	704	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(11.364)	-	-	-	(11.364)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(10.660)	-	-	-	(10.660)	Total decreases for the current year
Saldo akhir tahun	704	-	-	-	704	Ending balance

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not applying PSAK 71

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin muncul.

Management believes that the allowance for impairment losses on placement with Bank Indonesia and other banks is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible placement with Bank Indonesia and other banks.

9. EFEK-EFEK

Rincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

9. SECURITIES

Securities classified according to currencies are as follows:

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	40.242.438	14.900.346	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	2.035.063	2.179.919	United States Dollar
Euro	223.223	385.575	Euro
Yen Jepang	1.165	1.085	Japanese Yen
Entitas anak - Rupiah	576.245	458.495	Subsidiaries - Rupiah
Jumlah efek-efek	43.078.134	17.925.420	Total securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.937)	(23.500)	Allow ance for impairment losses
Jumlah Efek-Efek - Bersih	43.062.197	17.901.920	Total Securities - Net

Klasifikasi efek-efek berdasarkan jenis dan tujuan adalah sebagai berikut:

Securities classified according to type and purpose were as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			**Third parties**
Diukur pada biaya perolehan			**Measured at amortized cost**
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	3.401.932	-	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	1.684.468	-	Government Sukuk
Obligasi lainnya	274.349	-	Other bonds
Sukuk lainnya	25.000	-	Other Sukuk
Wesel tagih	7.275	-	Export drafts
Entitas anak			Subsidiaries
Sukuk Bank Indonesia	372.028	-	Bank Indonesia Sukuk
Sukuk Negara	188.279	-	Government Sukuk
Obligasi lainnya	15.938	-	Other bonds
Jumlah efek diukur pada biaya perolehan	5.969.269	-	Total securities measured at cost
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			**Measured at fair value through other comprehensive income**
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	32.443.701	-	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	3.431.987	-	Government Sukuk
Reksadana	497.398	-	Mutual funds
Surat utang jangka menengah	252.199	-	Medium term notes
Obligasi lainnya	100.886	-	Other bonds
Jumlah efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	36.726.171	-	Total securities measured at fair value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			**Measured at fair value through profit or loss (FVTPL)**
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	255.198	-	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	85.328	-	Government Sukuk
Surat utang jangka menengah	42.168	-	Medium term notes
Jumlah efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	382.694	-	Total securities measured at fair value through profit or loss
Jumlah efek-efek	43.078.134	-	Total securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.937)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Efek-Efek - Bersih	43.062.197	-	Total Securities - Net

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			**Third parties**
Dimiliki hingga jatuh tempo			**Held-to-maturity securities**
Bank			The Bank
Sertifikat Bank Indonesia	-	6.171.675	Bank Indonesia Certificates
Obligasi Pemerintah Indonesia	-	3.458.195	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	-	1.329.983	Government Sukuk
Surat Perbendaharaan Negara	-	311.651	Government Treasury Bills
Obligasi lainnya	-	271.219	Other bonds
Wesel tagih	-	35.251	Export drafts
Sukuk lainnya	-	25.000	Other Sukuk
Entitas anak			Subsidiaries
Sukuk Negara	-	231.077	Government Sukuk
Sukuk Bank Indonesia	-	183.832	Bank Indonesia Sukuk
Obligasi lainnya	-	23.587	Other bonds
Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo	-	12.041.470	Total held-to-maturity securities/
Tersedia untuk dijual			**Available-for-sale securities**
Bank			The Bank
Reksadana	-	1.541.632	Mutual funds
Surat utang jangka menengah	-	288.798	Medium term notes
Obligasi Pemerintah Indonesia	-	286.527	Indonesian Government bonds
Obligasi lainnya	-	58.858	Other bonds
Entitas anak			Subsidiary
Reksadana	-	19.999	Mutual funds
Jumlah efek tersedia untuk dijual	-	2.195.814	Total available-for-sale securities
Diperdagangkan			**Trading securities**
Bank			The Bank
Obligasi Pemerintah Indonesia	-	3.463.290	Indonesian Government bonds
Sukuk Negara	-	114.611	Government Sukuk
Surat utang jangka menengah	-	107.597	Medium term notes
Obligasi lainnya	-	2.638	Other bonds
Jumlah efek diperdagangkan	-	3.688.136	Total trading securities
Jumlah efek-efek	-	17.925.420	Total securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(23.500)	Allowance for impairment losses
Jumlah Efek-Efek - Bersih	-	17.901.920	Total Securities - Net

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk efek-efek adalah sebagai berikut:

The average annual effective interest rates of the above securities are as follows:

	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Sukuk Bank Indonesia	3.83%	5.00%	Bank Indonesia Sukuk
Obligasi	7.28%	8.12%	Bonds
Sukuk	7.07%	6.57%	Sukuk
Surat Perbendaharaan Negara	-	5.48%	Government Treasury Bills
Surat utang jangka menengah	9.50%	9.22%	Medium term notes
Wesel tagih	9.88%	10.23%	Export drafts
Sertifikat Bank Indonesia	-	6.33%	Bank Indonesia Certificates
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi	5.51%	5.50%	Bonds
Wesel tagih	5.96%	6.00%	Export drafts
Sukuk	3.72%	3.72%	Sukuk
Surat utang jangka menengah	-	6.00%	Medium term notes
Euro			Euro
Obligasi	2.63%	2.04%	Bonds
Yen Jepang			Japanese Yen
Wesel tagih	3.00%	3.00%	Export drafts

Jangka waktu efek-efek sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The terms of the above securities from acquisition dates to maturity dates were as follows:

	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Obligasi	10 bulan - 28 tahun/ 10 months - 28 years	11 bulan - 27 tahun/ 11 months - 27 years	Bonds
Sukuk	2 bulan - 26 tahun/ 2 months - 26 years	2 bulan - 25 tahun/ 2 months - 25 years	Sukuk
Surat utang jangka menengah	1 - 3 tahun/years	2 - 3 tahun/years	Medium term notes
Wesel tagih	53 - 147 hari/days	39 - 119 hari/days	Export drafts
Sukuk Bank Indonesia	3 bulan/months	7 hari/days	Bank Indonesia Sukuk
Sertifikat Bank Indonesia	-	4 - 12 bulan/months	Bank Indonesia Certificates
Surat Perbendaharaan Negara	-	3 - 9 bulan/months	Government Treasury Bills
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi	5 - 30 tahun/years	5 - 30 tahun/years	Bonds
Wesel tagih	14 hari/days	14 hari/days	Export drafts
Sukuk	7 - 10 tahun/years	7 - 10 tahun/years	Sukuk
Surat utang jangka menengah	-	2 tahun/years	Medium term notes
Euro			Euro
Obligasi	7 - 12 tahun/years	7 - 12 tahun/years	Bonds
Yen Jepang			Japanese Yen
Wesel tagih	14 hari/days	14 hari/days	Export drafts

Efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*. Rata-rata suku bunga efektif untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo untuk mata uang Rupiah dan valuta asing ini masing-masing sebesar 7,97% dan 5,03% per tahun untuk tahun 2020 dan 8,58% dan 7,93% per tahun untuk tahun 2019.

Securities measured at amortized cost are arranged at both fixed and floating interest rates, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk. The average effective interest rate in these held-to-maturity securities in Rupiah and foreign currencies in 2020 were 7.97% and 5.03% per annum and in 2019 were 8.58% and 7.93% per annum, respectively.

Rincian efek-efek berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi berdasarkan beberapa perusahaan pemeringkat pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Securities classified according to issuers and rating of bonds from various rating companies as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	2020		2019		
	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	Rp Juta/ Rp Million	Peringkat/ Rating	
Rupiah					Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia	-		6.171.675		Bank Indonesia Certificate
Obligasi / Sukuk					Bonds / Sukuk
Pemerintah Republik Indonesia	39.479.619	BBB	6.689.722	BBB	Government of Republic of Indonesia
Bank Indonesia	372.028		183.832		Bank Indonesia
Perusahaan Lainnya					Other Companies
PT Lautan Luas	56.478	idA-	58.858	idA-	PT Lautan Luas
PT Bank Victoria International	44.408	id A-	-		PT Bank Victoria International
PT Japfa Comfeed Indonesia	30.000	A+(idn)	30.000	A+(idn)	PT Japfa Comfeed Indonesia
PT Indosat Ooredoo	25.000	idAAA	25.000	idAAA	PT Indosat Ooredoo
PT Tiga Pilar Sejahtera Food	15.938	idD	26.225	idD	PT Tiga Pilar Sejahtera Food
Surat Perbendaharaan Negara	-		311.651		Government Treasury Bills
Surat utang jangka menengah					Medium term notes
Badan Usaha Milik Negara					State owned enterprises
PT Barata Indonesia	192.207	idCCC	185.962	idBBB	PT Barata Indonesia
PT Perum Perindo	83.755	idBB+	82.366	idBB+	PT Perum Perindo
PT Perum Perumnas	12.231	idBBB-	12.184	idBBB+	PT Perum Perumnas
PT Pindad	6.174	idA-	9.025	idA-	PT Pindad
Reksadana					Mutual funds
Perusahaan lainnya					Other Companies
Bahana Seri D Optima Protected Fund 56	276.290		273.238		Bahana Seri D Optima Protected Fund 56
Bahana Seri D Optima Protected Fund 55	221.108		218.664		Bahana Seri D Optima Protected Fund 55
RDT Bahana Protected Fund H 86	-		1.049.730		RDT Bahana Protected Fund H 86
Bahana MES Syariah Fund	-		19.999		Bahana MES Syariah Fund
Wesel tagih					Export drafts
Perusahaan lainnya	3.447		10.710		Other Companies
Jumlah Efek-efek - Rupiah	40.818.683		15.358.841		Total Securities - Rupiah
Dollar Amerika Serikat					United States Dollar
Obligasi / Sukuk					Bonds / Sukuk
Pemerintah Republik Indonesia	1.788.051	BBB	1.808.386	BBB	Government of Republic of Indonesia
Badan Usaha Milik Negara					State-owned enterprises
PT Perusahaan Gas Negara	174.943	BBB-	172.682	BBB-	PT Perusahaan Gas Negara
PT Perusahaan Pelayaran Indonesia	69.406	BBB	68.537	BBB	PT Perusahaan Pelayaran Indonesia
Surat Utang Jangka Menengah					Medium Term Notes
Perusahaan Lainnya					Other Companies
PT Indah Kiat Pulp & Paper	-	idA+	106.858	idA+	PT Indah Kiat Pulp & Paper
Wesel tagih					Export drafts
Perusahaan lainnya	2.663		23.456		Other Companies
Jumlah Efek-efek - Dollar Amerika Serikat	2.035.063		2.179.919		Total Securities - United States Dollar
Euro					Euro
Obligasi					Bonds
Pemerintah Republik Indonesia	223.223	BBB	385.575	BBB	Government of Republic of Indonesia
Yen Jepang					Japanese Yen
Wesel tagih	1.165		1.085		Export drafts
Jumlah Efek-efek	43.078.134		17.925.420		Total Securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.937)		(23.500)		Allowance for impairment losses
Jumlah Efek-efek - Bersih	43.062.197		17.901.920		Total Securities - Net

Efek-efek telah diperingkat oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan Grup, yaitu Pefindo dan PT Fitch Ratings Indonesia.

Securities are rated by third parties that are not related to the Group, namely Pefindo and PT Fitch Ratings Indonesia.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E ditujukan untuk biaya izin kepada Pemerintah. Sukuk Ijarah Tiga Pilar Sejahtera Food I Tahun 2013 ditujukan untuk penjaminan aset tetap PT Tiga Pilar Sejahtera dan PT Poly Meditra Indonesia, keduanya merupakan entitas anak dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indonesia Tahap II Tahun 2016 Seri E were utilized to finance lecense fee to government. Sukuk Ijarah Tiga Pilar Sejahtera Food I Tahun 2013 were utilized to underwrite the plant, property and equipment owned by PT Tiga Pilar Sejahtera and PT Poly Meditra Indonesia, both are subsidiaries of PT Tiga Pilar Sejahtera Food.

Biaya perolehan efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 5.983.761 juta dan Rp 11.840.162 juta. Premi dan diskonto yang belum diamortisasi bersih pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 14.478 juta dan Rp 239.171 juta.

Cost of securities measured at amortized cost as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 5,983,761 million and Rp 11,840,162 million, respectively. Unamortized net premium and discount as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 14,478 million and Rp 239,171 million, respectively.

Keuntungan yang belum direalisasi akibat peningkatan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), setelah dikurangi pajak penghasilan tangguhan pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 1.979.428 juta dan Rp 34.956 juta, yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain (Catatan 31).

Unrealized gain from increase in fair value of securities measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), net of deferred income tax in 2020 and 2019 amounting to Rp 1,979,428 million and Rp 34,956 million, respectively, are recorded as other comprehensive income (Note 31).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, efek-efek yang dijadikan sebagai efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 22), adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, securities which serve as collateral for securities sold with agreements to repurchase (Note 22), are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.675.000	2.565.000	Indonesia Government Bank
Sertifikat Bank Indonesia	-	3.225.000	Bank Indonesia Certificate
Jumlah	2.675.000	5.790.000	Total

Surat berharga PT Tiga Pilar Sejahtera Food sebesar Rp 15.938 juta dan Rp 26.225 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah surat berharga yang mengalami penurunan nilai. Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 15.908 juta dan Rp 23.500 juta. Surat berharga ini diklasifikasikan dalam kategori efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The securities issued by PT Tiga Pilar Sejahtera Food amounted to Rp 15,938 million and Rp 26,225 million are the securities which was impaired as of December 31, 2020 and 2019. The impairment losses of securities as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 15,908 million and Rp 23,500 million. The securities are classified as securities measured at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat efek-efek yang dijadikan agunan oleh Grup.

On December 31, 2020 and 2019, there are no securities that serve as collateral to the Group.

Pada tahun 2020 dan 2019, terdapat beberapa efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi seluruhnya atau terdapat pelunasan dipercepat dengan nilai nominal sebagai berikut:

In 2020 and 2019, certain securities that are measured at amortized cost has matured and were settled or there is an early redemption with nominal value as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Sertifikat Bank Indonesia	6.307.359	1.300.000	Bank Indonesia Certificates
Sukuk Bank Indonesia	1.364.638	795.784	Bank Indonesia Sukuk
Surat Perbendaharaan Negara	317.383	600.000	Government Treasury Bills
Obligasi Pemerintah	137.765	210.510	Government Bonds
Sukuk Negara	93.398	1.968.053	Government Sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	-	170.000	Mudharabah Interbank Investment Certificate
Surat Utang Jangka Menengah	-	100.000	Medium Term Notes
Obligasi lainnya	-	95.000	Other bonds
Jumlah	8.220.543	5.239.347	Total

Nilai tercatat dari efek-efek yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

The net carrying amount of securities measured securities at amortized cost is as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Efek-efek	5.969.269	12.041.470	Securities
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 19)	95.601	89.290	Accrued interest receivables (Note 19)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.937)	(23.500)	Allow ance for impairment losses
Jumlah	6.048.933	12.107.260	Total

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Rincian obligasi rekapitalisasi pemerintah beserta tanggal jatuh tempo dan frekuensi pembayaran bunga adalah sebagai berikut:

Recapitalization Government Bonds

The details of recapitalization government bonds along with maturity date and interest payment frequency are as follows:

Nama Efek/Securities Name	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Frekuensi Pembayaran Bunga/Interest Payment Frequency	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million
Rupiah				
Bank				
Fixed Rate (FR)/Fixed Rate Bonds				
FR 0080	15 Juni/June 15, 2035	Semesteran/Semi annually	8.188.266	70.663
FR 0087	15 Februari/February 15, 2031	Semesteran/Semi annually	7.527.153	-
FR 0086	15 April/April 15, 2026	Semesteran/Semi annually	5.232.846	-
FR 0083	15 April/April 15, 2040	Semesteran/Semi annually	3.501.186	707.743
FR 0082	15 September/September 15, 2030	Semesteran/Semi annually	2.372.286	886.420
FR 0076	15 Mei/May 15, 2048	Semesteran/Semi annually	1.837.636	-
FR 0081	15 Juni/June 15, 2025	Semesteran/Semi annually	1.395.606	382.157
FR 0085	15 April/April 15, 2031	Semesteran/Semi annually	942.604	-
FR 0068	15 Maret/March 15, 2034	Semesteran/Semi annually	803.380	-
FR 0040	15 September/September 15, 2025	Semesteran/Semi annually	622.356	625.964
FR 0045	15 Mei/May 15, 2037	Semesteran/Semi annually	543.801	543.633
FR 0064	15 Mei/May 15, 2028	Semesteran/Semi annually	504.936	473.923
FR 0044	15 September/September 15, 2024	Semesteran/Semi annually	320.903	321.117
FR 0065	15 Mei/May 15, 2033	Semesteran/Semi annually	292.596	98.515
FR 0074	15 Agustus/August 15, 2032	Semesteran/Semi annually	194.404	129.242
FR 0059	15 Mei/May 15, 2027	Semesteran/Semi annually	123.268	172.481
FR 0075	15 Mei/May 15, 2038	Semesteran/Semi annually	84.637	212.506
FR 0039	15 Agustus/August 15, 2023	Semesteran/Semi annually	51.304	51.720
FR 0084	15 Februari/February 15, 2026	Semesteran/Semi annually	32.948	-
FR 0072	15 Mei/May 15, 2036	Semesteran/Semi annually	2.330	-
FR 0067	15 Februari/February 15, 2044	Semesteran/Semi annually	1.157	-
FR 0062	15 April/April 15, 2042	Semesteran/Semi annually	962	-
FR 0078	15 Mei/May 15, 2029	Semesteran/Semi annually	-	539.971
FR 0071	15 Maret/March 15, 2029	Semesteran/Semi annually	-	22.385
FR 0063	15 Mei/May 15, 2023	Semesteran/Semi annually	-	11.993
FR 0079	15 April/April 15, 2039	Semesteran/Semi annually	-	10.709
FR 0031	15 November/November 15, 2020	Semesteran/Semi annually	-	110.983
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)/ Indonesia Retail Bonds				
ORI 017	15 Juli/July 15, 2023	Bulanan/Monthly	4.795	-
ORI 015	15 Oktober/October 15, 2021	Bulanan/Monthly	1.517	-
ORI 016	15 Oktober/October 15, 2022	Bulanan/Monthly	313	503
ORI 014	15 Oktober/October 15, 2020	Bulanan/Monthly	-	130.160

Nama Efek/Securities Name	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Frekuensi Pembayaran Bunga/Interest Payment Frequency	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million
Project Based Sukuk (PBS)/				
Project Based Sukuk (PBS)				
PBS 028	15 Oktober/October 15, 2046	Semesteran/Semi annually	1.704.725	-
PBS 017	15 Oktober/October 15, 2025	Semesteran/Semi annually	833.429	91.559
PBS 026	15 Oktober/October 15, 2024	Semesteran/Semi annually	754.980	645.891
PBS 022	15 April/April 15, 2034	Semesteran/Semi annually	661.038	-
PBS 005	15 April/April 15, 2043	Semesteran/Semi annually	551.269	-
PBS 002	15 Januaril/January 15, 2022	Semesteran/Semi annually	201.706	199.974
PBS 003	15 Januaril/January 15, 2027	Semesteran/Semi annually	-	15.765
Sukuk Ritel (SRI)/				
Retail Sukuk				
SR013	10 September/September 10, 2023	Bulanan/Monthly	602	-
SR010	10 Maret/March 10, 2021	Bulanan/Monthly	401	2.130
SR011	10 Maret/March 10, 2022	Bulanan/Monthly	-	337
SR009	10 Maret/March 10, 2020	Bulanan/Monthly	-	201
Sub jumlah/Sub total			39.291.340	6.458.645
Entitas anak				
Project Based Sukuk (PBS)/				
Project Based Sukuk (PBS)				
PBS 027	15 Mei/May 15, 2023	Semesteran/Semi annually	49.946	-
PBS 014	15 Mei/May 15, 2021	Semesteran/Semi annually	49.903	49.640
PBS 002	15 Januaril/January 15, 2022	Semesteran/Semi annually	49.273	48.574
PBS 003	15 Januaril/January 15, 2027	Semesteran/Semi annually	20.130	20.151
PBS 004	15 Februari/February 15, 2037	Semesteran/Semi annually	19.027	18.967
PBS 006	15 September/September 15, 2020	Semesteran/Semi annually	-	64.453
Sukuk Ritel (SR)				
SR009	10 Maret/March 10, 2020	Bulanan/Monthly	-	29.292
Sub jumlah/Sub total			188.279	231.077
Jumlah Rupiah/Total Rupiah			39.479.619	6.689.722
Valuta asing/Foreign currency				
Bank				
Dollar Amerika Serikat/				
United States Dollar				
Republic of Indonesia Bonds (ROI)/				
Republic of Indonesia Bonds (ROI)				
ROI 110123 2,95	11 Januaril/January 11, 2023	Semesteran/Semi annually	378.977	374.287
ROI 050521 4,875 REGS	5 Mei/May 5, 2021	Semesteran/Semi annually	350.960	346.037
ROI 121035 8,5 REGS	12 Oktober/October 12, 2035	Semesteran/Semi annually	294.258	290.726
ROI 170237 6,625 REGS	17 Februari/February 17, 2037	Semesteran/Semi annually	189.209	186.307
ROI 170138 7,75 REGS	17 Januaril/January 17, 2038	Semesteran/Semi annually	81.013	79.962
ROI 130320 5,875 REGS	13 Maret/March 13, 2020	Semesteran/Semi annually	-	27.856
ROI 180929 3,4	18 September/September 18, 2029	Semesteran/Semi annually	-	14.473
Republic of Indonesia Bonds Sukuk (ROI)/				
Republic of Indonesia Bonds Sukuk (ROI)				
ROI SUKUK 211122 3,3 REGS N	21 November/November 21, 2022	Semesteran/Semi annually	282.884	280.500
ROI SUKUK 290327 4,15 REGS	29 Maret/March 29, 2027	Semesteran/Semi annually	140.500	138.825
ROI SUKUK 290326 4,55 REGS	29 Maret/March 29, 2026	Semesteran/Semi annually	70.250	69.413
Jumlah Dollar Amerika Serikat/Total United Stated Dollar			1.788.051	1.808.386
Euro/Euro				
Republic of Indonesia Bonds (ROI)/				
Republic of Indonesia Bonds (ROI)				
ROI 180724 2,15 REGS	18 Juli/July 18, 2024	Tahunan/Annually	120.520	108.857
ROI 140623 2,625 REGS	14 Juni/June 14, 2023	Tahunan/Annually	51.521	46.485
ROI 140628 3,75 REGS	14 Juni/June 14, 2028	Tahunan/Annually	51.182	46.188
ROI 301031 1,4	30 Oktober/October 30, 2031	Tahunan/Annually	-	184.045
Jumlah Euro/Total Euro			223.223	385.575
Jumlah/Total			41.490.893	8.883.683

Sukuk negara yang dimiliki Bank dan entitas anak ditujukan untuk membiayai infrastruktur dan kegiatan APBN.

Government sukuk owned by Bank and subsidiaries were utilized to finance infrastructures and APBN's activity.

Reksadana

Mutual Funds

Rincian reksadana adalah sebagai berikut:

Mutual funds are as follows:

	2020				
	Unit penyertaan/ Investment unit	Nilai aset bersih per unit/ Net asset value per unit	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)	Nilai wajar/ Fair value	
		Rp	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank					The Bank
Bahana Seri D Optima Protected Fund 56	250.000.000	1.105,16	26.290	276.290	Bahana Seri D Optima Protected Fund 56
Bahana Seri D Optima Protected Fund 55	200.000.000	1.105,54	21.108	221.108	Bahana Seri D Optima Protected Fund 55
Jumlah	450.000.000		47.398	497.398	Total

	2019				
	Unit penyertaan/ Investment unit	Nilai aset bersih per unit/ Net asset value per unit	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)	Nilai wajar/ Fair value	
		Rp	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank					The Bank
RDT Bahana Protected Fund H 86	1.000.000.000	1.049,73	49.730	1.049.730	RDT Bahana Protected Fund H 86
Bahana Seri D Optima Protected Fund 56	250.000.000	1.092,95	23.238	273.238	Bahana Seri D Optima Protected Fund 56
Bahana Seri D Optima Protected Fund 55	200.000.000	1.093,32	18.664	218.664	Bahana Seri D Optima Protected Fund 55
Entitas Anak					Subsidiary
Bahana MES Syariah Fund	15.206.704	1.339,97	199	19.999	Bahana MES Syariah Fund
Jumlah	1.465.206.704		91.831	1.561.631	Total

Wesel Tagih

Export Drafts

Rincian wesel tagih adalah sebagai berikut:

Export drafts are as follows:

	Suku bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2020 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mizuho	10,00%	1 Februari/February 1, 2021	2.039	PT Bank Mizuho
PT Bank DKI	10,00%	5 April/April 5, 2021	604	PT Bank DKI
PT Bank Mandiri (Persero)	10,00%	15 Februari/February 15, 2021	337	PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	10 Februari/February 10, 2021	225	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	23 Februari/February 23, 2021	151	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	11 Januari/January 11, 2021	91	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Jumlah			3.447	Total

	Suku bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2020 Rp Juta/ Rp Million	
Valuta asing				Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
Bank Woori	6,00%	13 Januari/January 13 2021	689	Bank Woori
PT Bank Mizuho	7,00%	11 Januari/January 11, 2021	668	PT Bank Mizuho
Industrial Bank of Korea	5,00%	11 Januari/January 11, 2021	426	Industrial Bank of Korea
Industrial Bank of Korea	6,00%	13 Januari/January 13 2021	351	Industrial Bank of Korea
Industrial Bank of Korea	5,00%	12 Januari/January 12 2021	344	Industrial Bank of Korea
First Commercial Bank	6,00%	13 Januari/January 13 2021	185	First Commercial Bank
Jumlah			2.663	Total
Yen Jepang				Japanese Yen
MUFG Bank	3,00%	4 Januari/January 4 2021	620	MUFG Bank
MUFG Bank	3,00%	5 Januari/January 5 2021	545	MUFG Bank
Jumlah			1.165	Total
Jumlah			7.275	Total

	Suku bunga/ Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero)	11,00%	16 April/April 16, 2020	2.519	PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Permata	10,00%	29 Januari/January 29, 2020	2.410	PT Bank Permata
PT Bank Mandiri (Persero)	9,00%	6 Januari/January 6, 2020	1.233	PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Permata	10,00%	31 Januari/January 31, 2020	1.073	PT Bank Permata
PT Bank DKI	10,00%	27 Januari/January 27, 2020	928	PT Bank DKI
PT Bank Permata	10,00%	28 Januari/January 28, 2020	642	PT Bank Permata
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	16 Januari/January 16, 2020	640	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank DBS Indonesia	12,00%	20 Januari/January 20, 2020	573	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	20 Januari/January 20, 2020	301	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	27 Januari/January 27, 2020	152	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10,00%	17 Februari/February 17, 2020	151	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Permata	10,00%	30 Januari/January 30, 2020	88	PT Bank Permata
Jumlah			10.710	Total
Valuta asing				Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
Credit Suisse	6,00%	31 Desember/December 31, 2019	16.894	Credit Suisse
Credit Suisse	6,00%	3 Januari/January 3, 2020	3.513	Credit Suisse
Credit Suisse	6,00%	6 Januari/January 6, 2020	2.169	Credit Suisse
Standard Chartered First Bank Korea	6,00%	9 Januari/January 9, 2020	586	Standard Chartered First Bank Korea
Shinhan Bank	6,00%	3 Januari/January 3, 2020	294	Shinhan Bank
Jumlah			23.456	Total
Yen Jepang				Japanese Yen
MUFG Bank	3,00%	6 Januari/January 6, 2020	1.085	MUFG Bank
Jumlah			24.541	Total
Jumlah Wesel Tagih			35.251	Total Export Drafts

Seluruh transaksi wesel tagih pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berasal dari transaksi usaha.

All export drafts as of December 31, 2020 and 2019 are from business transaction.

Mutasi nilai tercatat efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount on securities measured at amortized cost are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	11.602.974	-	-	438.496	12.041.470	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	44.444	-	-	1.002	45.446	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	403.021	-	-	437.912	840.933	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.657.416)	-	-	(301.165)	(6.958.581)	Financial asset derecognized
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(6.209.951)	-	-	137.749	(6.072.202)	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo 31 Desember 2020	5.393.023	-	-	576.245	5.969.268	Balance as of December 31, 2020

Mutasi nilai cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on securities measured at amortized cost are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	23.500	23.500	Balance at the beginning of the year
Penerapan PSAK 71	1.288	-	-	-	1.288	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	1.288	-	-	23.500	24.788	Balance at the beginning of the year PSAK 71
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.178)	-	-	(7.592)	(8.770)	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(81)	-	-	-	(81)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(1.259)	-	-	(7.592)	(8.851)	Total decreases for the current year
Saldo 31 Desember 2020	29	-	-	15.908	15.937	Balance as of December 31, 2020

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not applying PSAK 71

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek.

Management believes that the allowance for impairment losses on securities is adequate to cover the losses, which might arise from uncollectible securities.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif dalam bentuk pembelian dan penjualan berjangka valuta asing (*forward*) dan *swap* untuk tujuan *trading*.

Transaksi *swap* terdiri dari kontrak *swap* mata uang asing. Transaksi tersebut merupakan komitmen untuk melunasi liabilitas dalam mata uang asing dengan kurs yang ditentukan terlebih dahulu.

10. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

The Bank's derivative instruments, principally consist of forward foreign exchange contracts and swap contracts for trading purposes.

Swap transactions consists of foreign currency swap contracts. Such currency swap transactions are commitments to settle in cash on a future date an obligation in foreign currency at a predetermined rate of exchange.

Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya perubahan nilai potensial fluktuasi kurs mata uang, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada Bank. Jangka waktu dari pembelian dan penjualan berjangka valuta asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berkisar antara 6 hari sampai 152 hari dan 6 hari sampai 117 hari.

The market risk of derivative transactions arise from potential changes in value due to fluctuations in foreign exchange rates, while credit risk is the possibility that a loss may occur due to the failure of a counterparty to fulfill its obligations. According to the terms of the contracts as of December 31, 2020 and 2019, the Bank's derivative instruments have terms range from 6 days to 152 days and 6 days to 117 days, respectively.

Rincian tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of derivative receivables and payables as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020				
	Jumlah nosional/ Notional amount		Nilai w ajar/ Fair value		
	Beli/ Buy	Jual/ Sell	Tagihan/ Receivables	Liabilitas/ Payables	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga					Third parties
Forw ard	210.130	123.622	2.462	2.526	Forw ard
Sw ap	49.175	125.045	826	659	Sw ap
Jumlah	259.305	248.667	3.288	3.185	Total

	2019				
	Jumlah nosional/ Notional amount		Nilai w ajar/ Fair value		
	Beli/ Buy	Jual/ Sell	Tagihan/ Receivables	Liabilitas/ Payables	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga					Third parties
Forw ard	900.433	262.822	3.822	14.769	Forw ard
Sw ap	1.485.428	2.155.952	33.871	23.219	Sw ap
Jumlah	2.385.861	2.418.774	37.693	37.988	Total

Tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2020 adalah dalam mata uang Rupiah dan 31 Desember 2019 adalah dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.

The derivative receivables and payables are denominated in Rupiah as of December 31, 2020 and in Rupiah and United States Dollar as of December 31, 2019.

Pada tahun 2020 dan 2019, jumlah keuntungan dan kerugian atas tagihan dan liabilitas derivatif yang diakui dalam laba rugi dalam akun "pendapatan transaksi valuta asing - bersih" masing-masing sebesar Rp 158.314 juta dan Rp 60.463 juta.

In 2020 and 2019, the amount of gain or loss on derivative receivables and payables recognized in profit or loss under "gain on foreign exchange transactions - net" amounted to Rp 158,314 million and Rp 60,463 million, respectively.

11. EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI – PIHAK KETIGA

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

11. SECURITIES PURCHASED WITH AGREEMENTS TO RESELL – THIRD PARTIES

The details of securities purchased with agreements to resell are as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal Mulai/ Starting Date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2020 Nilai penjualan kembali/ Resale amount	2020 Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest income	2020 Nilai tercatat/ Carrying value
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	30 Desember/ December 30, 2020	6 Januari/ January 6, 2021	3.362.789	1.750	3.361.039
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	31 hari/days	29 Desember/ December 29, 2020	29 Januari/ January 29, 2021	2.303.318	6.874	2.296.444
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	28 Desember/ December 28, 2020	4 Januari/ January 4, 2021	1.998.906	624	1.998.282
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	29 hari/days	17 Desember/ December 17, 2020	15 Januari/ January 15, 2021	1.875.022	2.762	1.872.260
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	30 Desember/ December 30, 2020	6 Januari/ January 6, 2021	951.534	496	951.038
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	31 hari/days	21 Desember/ December 21, 2020	21 Januari/ January 21, 2021	918.747	1.933	916.814
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	30 hari/days	23 Desember/ December 23, 2020	22 Januari/ January 22, 2021	911.885	2.020	909.865
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	21 hari/days	22 Desember/ December 22, 2020	12 Januari/ January 12, 2021	781.748	900	780.848
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	30 hari/days	16 Desember/ December 16, 2020	15 Januari/ January 15, 2021	698.484	1.029	697.455
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	19 hari/days	23 Desember/ December 23, 2020	11 Januari/ January 11, 2021	505.318	530	504.788
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	7 hari/days	28 Desember/ December 28, 2020	4 Januari/ January 4, 2021	492.495	154	492.341
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	16 hari/days	23 Desember/ December 23, 2020	8 Januari/ January 8, 2021	488.353	357	487.996
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	30 hari/days	16 Desember/ December 16, 2020	15 Januari/ January 15, 2021	466.729	688	466.041
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	20 hari/days	22 Desember/ December 22, 2020	11 Januari/ January 11, 2021	463.208	484	462.724
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	364 hari/days	17 Januari/ January 17, 2020	15 Januari/ January 15, 2021	428.242	815	427.427
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	364 hari/days	10 Januari/ January 10, 2020	8 Januari/ January 8, 2021	364.664	347	364.317
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	20 hari/days	23 Desember/ December 23, 2020	12 Januari/ January 12, 2021	269.858	311	269.547
Jumlah/Total				17.281.300	22.074	17.259.226
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses						(1.476)
Jumlah Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - Bersih/ Total Securities Purchased with Agreements to Resell - Net						17.257.750

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal Mulai/ Starting Date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2019 Nilai penjualan kembali/ Resale amount	2019 Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest income	2019 Nilai tercatat/ Carrying value
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	14 hari/days	23 Desember/ December 23, 2019	6 Januari/ January 6, 2020	2.936.156	2.116	2.934.040
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	272 hari/days	2 Agustus/ August 2, 2019	30 April/ April 30, 2020	1.815.438	34.471	1.780.967
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	182 hari/days	9 Agustus/ August 9, 2019	7 Februari/ February 7, 2020	1.503.663	8.844	1.494.819
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	182 hari/days	8 November/ November 8, 2019	8 Mei/ May 8, 2020	1.430.798	25.293	1.405.505
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	91 hari/days	7 November/ November 7, 2019	6 Februari/ February 6, 2020	1.119.560	5.626	1.113.934
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	364 hari/days	18 Oktober/ October 18, 2019	16 Oktober/ October 16, 2020	1.142.021	47.767	1.094.254
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	273 hari/days	14 Juni/ June 14, 2019	13 Maret/ March 13, 2020	524.116	6.493	517.623
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	364 hari/days	1 November/ November 1, 2019	30 Oktober/ October 30, 2020	517.965	21.695	496.270
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	91 hari/days	6 November/ November 6, 2019	5 Februari/ February 5, 2020	323.498	1.580	321.918
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	14 hari/days	27 Desember/ December 27, 2019	10 Januari/ January 10, 2020	201.751	262	201.489
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	91 hari/days	6 November/ November 6, 2019	5 Februari/ February 5, 2020	192.907	942	191.965
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	91 hari/days	6 November/ November 6, 2019	5 Februari/ February 5, 2020	129.929	635	129.294
Jumlah Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali -Bersih/ Total Securities Purchase with Agreement to Resell - Net				11.837.802	155.724	11.682.078

Seluruh efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berlokasi di Jakarta.

All securities purchased with agreements to resell are located in Jakarta.

Suku bunga efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berkisar antara 3,75% - 5,15% pada 31 Desember 2020 dan berkisar antara 5,09% - 6,50% pada 31 Desember 2019.

Interest rate of securities purchased with agreements to resell are ranged between 3.75% - 5.15% on December 31, 2020 and between 5.09% - 6.50% on December 31, 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar efek yang dijadikan sebagai jaminan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, adalah Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar Rp 18.644.191 juta dan Rp 12.163.431 juta.

As of December 31, 2020 and 2019, the fair value of securities used to secure the securities purchased with agreements to resell is Indonesian Government Bonds amounted to Rp 18,644,191 million and Rp 12,163,431 million, respectively.

Mutasi nilai tercatat untuk efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah sebagai berikut:

The changes in net carrying amount of securities purchased with agreement to resell are as follows:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	11.682.078	-	-	11.682.078	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	17.259.226	-	-	17.259.226	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(11.682.078)	-	-	(11.682.078)	Financial asset derecognized
Total penambahan tahun berjalan	5.577.148	-	-	5.577.148	Total additions for the current year
Saldo akhir tahun	17.259.226	-	-	17.259.226	Ending balance

Mutasi nilai cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance of impairment losses of securities purchased with agreement to resell are as follows:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Penerapan PSAK 71	21.190	-	-	21.190	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	21.190	-	-	21.190	Balance at the beginning of the year PSAK 71
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	1.476	-	-	1.476	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(21.190)	-	-	(21.190)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(19.714)	-	-	(19.714)	Total decreases for the current year
Saldo akhir tahun	1.476	-	-	1.476	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible securities purchased with agreement to resell.

12. KREDIT

Kredit memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

12. LOANS

Loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

a. Jenis Pinjaman

a. By Type of Loan

	2020						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Kredit investasi	28.646.152	2.268.204	366.182	85.838	1.027.624	32.394.000	Investment loans
Kredit modal kerja	28.517.348	292.424	147.130	38.951	641.867	29.637.720	Working capital loans
Pinjaman rekening koran	21.553.602	1.269.613	73.240	56.468	615.666	23.568.589	Demand loans
Kredit konsumsi	17.766.245	1.158.715	95.950	53.585	324.228	19.398.723	Consumer loans
Pembiayaan bersama	5.754.021	87.626	-	-	-	5.841.647	Syndicated loans
Pinjaman karyawan	71.817	-	-	-	-	71.817	Demand loans
Kredit lainnya	3.520.982	206.401	17.922	36.442	51.950	3.833.697	Others
Jumlah - Rupiah	105.830.167	5.282.983	700.424	271.284	2.661.335	114.746.193	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit modal kerja	4.284.126	-	-	-	-	4.284.126	Working capital loans
Kredit investasi	1.611.929	300.336	-	-	-	1.912.265	Investment loans
Pembiayaan bersama	604.624	-	-	-	-	604.624	Syndicated loans
Pinjaman rekening koran	31.305	-	-	-	-	31.305	Demand loans
Kredit lainnya	54.996	-	-	-	-	54.996	Others
Jumlah - Valuta asing	6.586.980	300.336	-	-	-	6.887.316	Total - Foreign currencies
Jumlah	112.417.147	5.583.319	700.424	271.284	2.661.335	121.633.509	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(5.523.484)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						116.110.025	Total Loans - Net

	2019						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Kredit modal kerja	34.080.565	911.840	63.322	19.397	563.354	35.638.478	Working capital loans
Kredit investasi	29.066.378	2.023.412	21.007	467.581	1.061.440	32.639.818	Investment loans
Kredit konsumsi	24.192.727	2.250.287	77.827	65.288	679.762	27.265.891	Consumer loans
Pinjaman rekening koran	23.774.607	592.901	58.559	138.761	904.016	25.468.844	Demand loans
Pembiayaan bersama	4.551.266	-	-	-	-	4.551.266	Syndicated loans
Pinjaman karyawan	88.289	-	-	-	-	88.289	Employee loans
Kredit lainnya	4.849.269	402.950	30.733	33.163	129.923	5.446.038	Others
Jumlah - Rupiah	120.603.101	6.181.390	251.448	724.190	3.338.495	131.098.624	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit modal kerja	6.965.019	-	-	-	-	6.965.019	Working capital loans
Kredit investasi	1.737.888	307.618	-	-	-	2.045.506	Investment loans
Pinjaman rekening koran	32.706	-	-	-	-	32.706	Demand loans
Pembiayaan bersama	470.184	-	-	-	-	470.184	Syndicated loans
Kredit lainnya	70.791	-	-	-	-	70.791	Others
Jumlah - Valuta asing	9.276.588	307.618	-	-	-	9.584.206	Total - Foreign currencies
Jumlah	129.879.689	6.489.008	251.448	724.190	3.338.495	140.682.830	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(3.957.940)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						136.724.890	Total Loans - Net

b. Sektor Ekonomi

b. By Economic Sector

	2020						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Konstruksi	25.794.221	647.358	198.670	38.408	881.673	27.560.330	Construction
Jasa	21.917.796	1.590.158	25.254	83.884	181.935	23.799.027	Services
Perdagangan	19.997.349	789.213	51.911	67.495	813.804	21.719.772	Trading
Industri	19.682.160	1.111.001	366.485	18.092	481.858	21.659.596	Industry
Lain-lain	18.438.641	1.145.253	58.104	63.405	302.065	20.007.468	Others
Jumlah - Rupiah	105.830.167	5.282.983	700.424	271.284	2.661.335	114.746.193	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Industri	2.734.102	-	-	-	-	2.734.102	Industry
Konstruksi	1.978.438	300.336	-	-	-	2.278.774	Construction
Jasa	1.829.794	-	-	-	-	1.829.794	Services
Perdagangan	44.646	-	-	-	-	44.646	Trading
Jumlah - Valuta asing	6.586.980	300.336	-	-	-	6.887.316	Total - Foreign currencies
Jumlah	112.417.147	5.583.319	700.424	271.284	2.661.335	121.633.509	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(5.523.484)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						116.110.025	Total Loans - Net

	2019						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Konstruksi	26.159.262	1.943.468	31.525	26.128	577.584	28.737.967	Construction
Jasa	25.983.286	1.166.746	16.607	27.296	825.577	28.019.512	Services
Perdagangan	24.294.092	976.455	92.034	175.200	784.074	26.321.855	Trading
Industri	21.662.125	700.501	18.296	423.518	585.202	23.389.642	Industry
Lain-lain	22.504.336	1.394.220	92.986	72.048	566.058	24.629.648	Others
Jumlah - Rupiah	120.603.101	6.181.390	251.448	724.190	3.338.495	131.098.624	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Industri	3.739.561	-	-	-	-	3.739.561	Industry
Jasa	3.216.952	-	-	-	-	3.216.952	Services
Konstruksi	2.279.872	307.618	-	-	-	2.587.490	Construction
Perdagangan	40.203	-	-	-	-	40.203	Trading
Jumlah - Valuta asing	9.276.588	307.618	-	-	-	9.584.206	Total - Foreign currencies
Jumlah	129.879.689	6.489.008	251.448	724.190	3.338.495	140.682.830	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(3.957.940)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih						136.724.890	Total Loans - Net

Sektor ekonomi lain-lain terdiri dari administrasi, rumah tangga, perumahan, apartemen, gedung perkantoran, agrikultur, minyak dan pertambangan.

Other economic sectors consist of administration, household, property residential, apartment, office building, agriculture, oil and mining.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode pinjaman dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

c. By Period

Loans classified based on the term of the loan agreements are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
≤ 1 tahun	37.355.846	39.482.412	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	9.676.476	14.510.800	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	29.532.178	34.186.433	> 2 - 5 years
> 5 tahun	45.069.009	52.503.185	> 5 years
Jumlah	121.633.509	140.682.830	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.523.484)	(3.957.940)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih	116.110.025	136.724.890	Total Loans - Net

d. Berdasarkan *Staging* PSAK 71

Berikut adalah perubahan nilai tercatat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020:

d. By PSAK 71 Staging

Following are the changes in the carrying value of loans and receivables/sharia financing with the classification of amortized cost based on the stage for the year ended December 31, 2020:

	2020					
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Syariah *) Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Biaya perolehan diamortisasi						**Amortized cost**
Saldo Awal Tahun	123.573.235	3.520.140	5.254.284	8.335.171	140.682.830	Balance at beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	1.135.620	(1.045.776)	(89.844)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(3.650.227)	3.657.508	(7.281)	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(2.580.354)	(667.595)	3.247.949	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	118.478.274	5.464.277	8.405.108	8.335.171	140.682.830	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(11.837.457)	(497.318)	39.943	(353.497)	(12.648.329)	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.309.620	25.778	730.208	2.897.645	13.963.251	New financial assets issued or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(13.597.810)	(926.297)	(3.806.616)	(2.033.520)	(20.364.243)	Financial assets derecognized
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(15.125.647)	(1.397.837)	(3.036.465)	510.628	(19.049.321)	Total additions/(decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	103.352.627	4.066.440	5.368.643	8.845.799	121.633.509	Ending Balance

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not applying PSAK 71

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit:

1) Pada tahun 2020 dan 2019 tingkat bunga efektif rata-rata untuk kredit adalah sebagai berikut:

Other major information on loans are as follows:

1) In 2020 and 2019, the average effective annual interest rates for loans are as follows:

	2020	2019	
Rupiah	10,91%	11,19%	Rupiah
Valuta asing	3,99%	4,52%	Foreign currency

2) Kredit dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit juga dijamin dengan jaminan tunai berupa giro, tabungan dan deposito berjangka (Catatan 20). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

3) Kredit untuk modal kerja dan investasi terdiri dari pinjaman jangka panjang, tetap, berulang, rekening koran dan diskonto, sedangkan kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lain.

4) Kredit, selain kredit dalam rangka pembiayaan sindikasi, dalam Rupiah berjangka waktu 16 hari sampai 30 tahun, sedangkan kredit dalam valuta asing berjangka waktu antara 2 bulan sampai 11 tahun. Kredit dalam rangka pembiayaan sindikasi dalam Rupiah berjangka waktu 4 tahun sampai dengan 15 tahun, sedangkan dalam valuta asing berjangka waktu 12 tahun.

5) Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 4,91% - 21,02% pada tahun 2020 dan 4,56% - 22,10% pada tahun 2019.

6) Kredit kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu 1 sampai 10 tahun. Pembayaran kembali kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulan.

7) Pada tahun 2020 dan 2019, Bank mengakui langsung dalam laba rugi, perbedaan nilai wajar dari kredit yang diberikan kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 852 juta dan Rp 1.484 juta.

8) Dalam jumlah kredit termasuk kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 831.205 juta dan Rp 977.140 juta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 95.479 juta dan Rp 10.110 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

   Seluruh kredit yang diberikan kepada pihak berelasi tidak ada yang lewat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

   Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 172.138 juta setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 91.495 juta mengalami penurunan nilai secara individu pada tanggal 31 Desember 2020. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi sebesar Rp 11.407 juta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 9.904 juta mengalami penurunan nilai secara individu pada tanggal 31 Desember 2019.

2) Loans are secured by collateral, which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industry. Loans are also secured by cash collateral, in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits (Note 20). Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses which may arise from uncollectible loans.

3) Loans for working capital and investments include long-term, fixed, revolving, demand and discounted loans, while consumer loans include housing, car and other consumer loans.

4) Loans, other than syndicated loans, in Rupiah have terms ranging from 16 days to 30 years, while those in foreign currencies have terms ranging from 2 months to 11 years. Syndicated loans have terms of 4 years to 15 years for Rupiah and 12 years for foreign currencies.

5) The Bank's participation as a member in syndicated loans range from 4.91% to 21.02% in 2020 and 4.56% to 22.10% in 2019.

6) Employee loans represent interest bearing loans for purchase of cars, houses and other necessities. The maturity periods range from 1 to 10 years and the interest rate is charged at 6% per annum. The payments are deducted from monthly salary.

7) In 2020 and 2019, the Bank recognizes directly to profit or loss, the difference in the fair value of employee loans amounting to Rp 852 million and Rp 1,484 million, respectively.

8) Total loans include loans to related parties amounting to Rp 831,205 million and Rp 977,140 million net of allowance for impairment losses of Rp 95,479 million and Rp 10,110 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

   All loans to related parties as of December 31, 2020 and 2019 are not past due.

   Loans to related parties amounting to Rp 172,138 million net of allowance for impairment losses of Rp 91,495 million are individually impaired as of December 31, 2020. Loans to related parties amounting to Rp 11,407 million net of allowance for impairment losses of Rp 9,904 million are individually impaired as of December 31, 2019.

9) Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan adalah sebesar 2,44% dan 2,49% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

10) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kredit yang dijadikan agunan oleh Grup.

11) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian kredit yang direstrukturisasi menurut jenis pinjaman adalah sebagai berikut:

9) The ratio of small business loans to total loans as of December 31, 2020 and 2019 is 2.44% and 2.49%, respectively.

10) As of December 31, 2020 and 2019, there are no loans pledged as collateral to the Group.

11) As of December 31, 2020 and 2019, the details of restructured loans classified based on types of loans are as follows:

	2020						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Llancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Kredit investasi	15.957.355	2.049.580	7.364	85.377	280.754	18.380.430	Investment loans
Kredit modal kerja	6.271.069	275.237	35.193	28.794	275.194	6.885.487	Working capital loans
Kredit konsumsi	4.808.800	645.314	62.926	41.188	55.144	5.613.372	Consumer loans
Pinjaman rekening koran	4.552.060	361.993	19.621	28.362	108.955	5.070.991	Demand loans
Jumlah - Rupiah	31.589.284	3.332.124	125.104	183.721	720.047	35.950.280	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit investasi	1.692.430	309.662	-	-	-	2.002.092	Investment loans
Kredit modal kerja	11.240	-	-	-	-	11.240	Working capital loans
Jumlah - Valuta asing	1.703.670	309.662	-	-	-	2.013.332	Total - Foreign currencies
Jumlah Kredit - Bersih	33.292.954	3.641.786	125.104	183.721	720.047	37.963.612	Total Loans - Net

	2019						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah							Rupiah
Kredit investasi	3.781.064	966.102	12.820	84.026	427.160	5.271.172	Investment loans
Kredit konsumsi	701.257	323.377	47.819	13.850	81.518	1.167.821	Consumer loans
Kredit modal kerja	523.974	224.665	24.097	1.981	189.468	964.185	Working capital loans
Pinjaman rekening koran	305.669	78.114	860	29.948	101.696	516.287	Demand loans
Jumlah - Rupiah	5.311.964	1.592.258	85.596	129.805	799.842	7.919.465	Total - Rupiah
Valuta asing							Foreign currencies
Kredit investasi	781.541	140.342	-	-	-	921.883	Investment loans
Jumlah Kredit - Bersih	6.093.505	1.732.600	85.596	129.805	799.842	8.841.348	Total Loans - Net

Selama tahun 2020 dan 2019, Bank telah melakukan penyelamatan kembali atas kredit untuk beberapa debitur masing-masing sebesar Rp 36.154.154 juta dan Rp 3.042.161 juta.

In 2020 and 2019, the Bank has restructured loans for some debtors, which amounted to Rp 36,154,154 million and Rp 3,042,161 million, respectively.

12) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan (Bank Indonesia) adalah sebagai berikut:

12) As of December 31, 2020 and 2019, the details of restructured loans based on Financial Services Authority's (Bank Indonesia) collectibility are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Lancar	33.292.954	6.093.505	Current
Dalam Perhatian Khusus	3.641.786	1.732.600	Special Mention
Kurang Lancar	125.104	85.596	Substandard
Diragukan	183.721	129.805	Doubtful
Macet	720.047	799.842	Loss
Jumlah	37.963.612	8.841.348	Total

13) Rasio *non-performing loan* (NPL) yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

13) Non-performing loan (NPL) ratio calculated based on Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011 are as follows:

	2020		2019		
	Konsolidasi/ Consolidated	Bank	Konsolidasi/ Consolidated	Bank	
NPL Bruto	3,01%	2,93%	3,02%	3,02%	Gross NPL
NPL Neto	0,66%	0,50%	1,12%	0,97%	Net NPL

14) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat kredit yang tidak memenuhi ketentuan BMPK.

14) As of December 31, 2020 and 2019, there is no loan exceeding the legal lending limit (BMPK) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

15) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

15) As of December 31, 2020 and 2019, the details of non-performing loans based on economic sector are as follows:

	2020		2019		
	Kredit bermasalah/ Non-performing loans Rp Juta/ Rp Million	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses Rp Juta/ Rp Million	Kredit bermasalah/ Non-performing loans Rp Juta/ Rp Million	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah					Rupiah
Konstruksi	1.118.751	988.844	635.237	468.411	Construction
Perdagangan	933.210	735.137	1.051.308	843.438	Trading
Industri	866.435	571.187	1.027.016	478.511	Industry
Jasa	291.073	227.353	869.480	397.315	Services
Lain-lain	423.574	330.215	731.092	614.243	Others
Jumlah - Rupiah	3.633.043	2.852.736	4.314.133	2.801.918	Total - Rupiah

16) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kredit yang disalurkan dengan sistem penyaluran kredit melalui lembaga pembiayaan, berupa kredit kendaraan motor dan mobil sebesar nihil dan Rp 612.606 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kredit yang disalurkan dengan sistem *joint financing* melalui CFI, berupa kredit kendaraan bermotor dan mobil sebesar Rp 2.057.964 juta dan Rp 3.173.776 juta.

16) As of December 31, 2020 and 2019, loans channeled through financing companies, to finance motorcycle and car loans amounted to nil and Rp 612,606 million, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, loans channeled through joint financing system with CFI to finance motorcycle and car loans amounted to Rp 2,057,964 million and Rp 3,173,776 million, respectively.

17) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

17) The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	231.208	253.698	3.231.422	241.612	3.957.940	Balance at beginning of the year
Penerapan PSAK 71	635.842	657.739	1.212.854	-	2.506.435	Adoption of PSAK 71
Saldo Awal PSAK 71	867.050	911.437	4.444.276	241.612	6.464.375	Balance at beginning of the year PSAK 71
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	225.525	(161.197)	(64.328)	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(20.354)	23.900	(3.546)	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(105.809)	(115.717)	221.526	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	966.412	658.423	4.597.928	241.612	6.464.375	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	175.145	171.954	2.087.418	(8.645)	2.425.872	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	181.542	4.956	291.445	26.115	504.058	New financial assets issued or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(62.210)	(496.155)	(3.291.933)	(20.523)	(3.870.821)	Financial assets derecognized
Total penambahan / (penurunan) tahun berjalan	294.477	(319.245)	(913.070)	(3.053)	(940.891)	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	1.260.889	339.178	3.684.858	238.559	5.523.484	Ending balance

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not applying PSAK 71

	2019			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	3.795.539	51.269	3.846.808	Balance at beginning of the year
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 38)				Provision during the year (Note 38)
Individual	578.587	48.093	626.680	Individually
Kolektif	100.768	62.141	162.909	Collectively
Akrual bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai (Catatan 33)	(108.437)	(907)	(109.344)	Accrued interest on impaired loans (Note 33)
Penghapusan tahun berjalan	(489.577)	(76.354)	(565.931)	Written-off during the year
Selisih kurs	-	(3.182)	(3.182)	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	3.876.880	81.060	3.957.940	Balance at end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible loans.

18) Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

18) The changes in the loans written off are as follows:

	2020			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	3.454.528	1.894.652	5.349.180	Balance at beginning of the year
Penambahan dalam tahun berjalan	3.035.422	-	3.035.422	Additions during the year
Koreksi saldo hapus buku tahun - tahun sebelumnya	(80.041)	62.893	(17.148)	Corrections to write-off balances of previous years
Hapus tagih	(192.064)	(9.892)	(201.956)	Write-off
Penerimaan kembali	(190.025)	(169.308)	(359.333)	Recovery
Selisih kurs	-	22.859	22.859	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	6.027.820	1.801.204	7.829.024	Balance at end of the year

	2019			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	3.217.040	1.962.599	5.179.639	Balance at beginning of the year
Penambahan dalam tahun berjalan	489.577	76.354	565.931	Additions during the year
Hapus tagih	(39.221)	-	(39.221)	Write-off
Penerimaan kembali	(212.868)	(76.402)	(289.270)	Recovery
Selisih kurs	-	(67.899)	(67.899)	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	3.454.528	1.894.652	5.349.180	Balance at end of the year

Kredit yang dihapus buku dicatat dalam rekening administratif. Grup terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapus buku tersebut.

Loans written-off is recorded in administrative account. The Group continuously collect those written-off loans.

19) Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

19) The carrying amount of loans at amortised cost is as follows:

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kredit	121.633.509	140.682.830	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 19)	666.321	840.935	Accrued interest receivables (Note 19)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.523.484)	(3.957.940)	Allowance for impairment losses
Jumlah	116.776.346	137.565.825	Total

13. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN DAN TAGIHAN ANJAK PIUTANG

a. Piutang Sewa Pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

Piutang sewa pembiayaan berasal dari CFI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan perincian sebagai berikut:

13. FINANCE LEASE RECEIVABLES AND FACTORING RECEIVABLE

a. Finance Lease Receivables

Finance lease receivables are arranged at fixed interest rates, thus the Group is exposed to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

Finance lease receivables are entered into by CFI as of December 31, 2020 and 2019 with details as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Piutang sewa pembiayaan	445.598	883.438	Finance lease receivables
Nilai sisa	295.697	377.763	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(30.903)	(157.671)	Unearned finance lease income
Simpanan jaminan	(295.697)	(377.763)	Security deposits
Jumlah - Rupiah	414.695	725.767	Total - Rupiah
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Piutang sewa pembiayaan	41.921	43.422	Finance lease receivables
Nilai sisa	6.714	6.617	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	-	(415)	Unrealized income on finance lease
Simpanan jaminan	(6.714)	(6.617)	Security deposits
Jumlah - Dollar Amerika Serikat	41.921	43.007	Total - United States Dollar
Jumlah	456.616	768.774	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.167)	(27.563)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	433.449	741.211	Total - Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			Average annual effective interest rates
Rupiah	17,22%	20,60%	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	9,00%	9,00%	United States Dollar

Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan stage:

Finance lease receivables as of December 31, 2020 and 2019 based on stages:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	504.858	228.466	35.450	768.774	Balance at beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	154.404	(153.163)	(1.241)	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(1.045)	1.102	(57)	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(5.329)	(5.658)	10.987	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Jumlah saldo awal setelah pengalihan	652.888	70.747	45.139	768.774	Balance at beginning of the year after transfer

	2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(323.146)	(27.522)	(25.721)	(376.389)	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	70.903	1.703	2.600	75.206	New financial assets issued or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	(10.975)	(10.975)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan / (penurunan) tahun berjalan	(252.243)	(25.819)	(34.096)	(312.158)	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	400.645	44.928	11.043	456.616	Ending Balance

Jumlah piutang sewa pembiayaan bruto (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total gross financial lease receivable (before unearned lease income and allowance for impairment losses) as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk

a. Based on type of products

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Kapal	200.784	221.743	Ship
Mesin	141.577	240.396	Machine
Kendaraan bermotor	81.321	169.868	Vehicle
Alat berat	52.573	85.297	Heavy equipment
Lain-lain	11.264	209.556	Others
Jumlah	487.519	926.860	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha

b. Based on business activities

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Investasi	437.808	614.163	Investment
Modal kerja	49.711	16.665	Working capital
Multi guna	-	296.032	Multi purpose
Jumlah	487.519	926.860	Total

Jumlah angsuran sewa pembiayaan (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total lease installments (gross of allowance for impairment losses) based on maturity date are as follows:

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ Minimum lease payments		Nilai kini dari pembayaran minimum sewa pembiayaan/Present value of minimum lease payments		
	2020	2019	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Angsuran sewa pembiayaan					**Lease Installments**
Sampai dengan satu tahun	299.859	556.680	273.508	496.050	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	138.453	275.174	133.901	210.489	More than one year up to five years
Lebih dari lima tahun	49.207	95.006	49.207	62.235	More than five years
Sub jumlah	487.519	926.860	456.616	768.774	Sub total

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ Minimum lease payments		Nilai kini dari pembayaran minimum sewa pembiayaan/Present value of minimum lease payments		
	2020	2019	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pendapatan sewa pembiayaan belum diakui					**Unearned finance lease income**
Sampai dengan satu tahun	(26.352)	(60.630)	-	-	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	(4.551)	(64.685)	-	-	More than one year up to five years
Lebih dari lima tahun	-	(32.771)	-	-	More than five years
Sub jumlah	(30.903)	(158.086)	-	-	Sub total
Jumlah	456.616	768.774	456.616	768.774	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.167)	(27.563)	(23.167)	(27.563)	Allowance for impairment losses
Jumlah	433.449	741.211	433.449	741.211	Total

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 1 – 10 tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan mayoritas pembiayaan ditenor 4 tahun.

The range of financing terms is 1 – 10 years as of December 31, 2020 and 2019 with majority tenor of within 4 year.

Biaya-biaya yang timbul, seperti premi asuransi, bea materai dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan perolehan aset sewa pembiayaan, dibebankan kepada debitur.

Costs incurred, such as insurance premium, stamp duty, and other related costs in connection with finance lease transaction are charged directly to consumers.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	11.390	4.284	11.889	27.563	Balance at beginning of the year
Dampak penerapan PSAK 71	(9.641)	(2.407)	3.609	(8.439)	Effect of adoption of PSAK 71
Saldo Awal PSAK 71	1.749	1.877	15.498	19.124	Balance at beginning of the year PSAK 71
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	(73)	20	53	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	63	(165)	102	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	1.063	-	(1.063)	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Jumlah saldo awal setelah pengalihan	2.802	1.732	14.590	19.124	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	6.206	3.148	16.293	25.647	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	106	-	-	106	New financial assets issued or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(410)	(505)	(20.795)	(21.710)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan / (penurunan) tahun berjalan	5.902	2.643	(4.502)	4.043	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	8.704	4.375	10.088	23.167	Ending Balance

Sebagian dari piutang sewa pembiayaan dijamin dengan kendaraan bermotor dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan yang bersangkutan. Piutang sewa pembiayaan untuk tanah dan Bangunan dijamin dengan objek yang dibiayai Perusahaan dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Piutang sewa pembiayaan untuk tongkang dan *tug boat* diikat dengan akta fidusia (*grosse akta*) dari barang-barang yang dibiayakan sedangkan piutang sewa pembiayaan untuk alat-alat berat, mesin-mesin produksi dan peralatan dijamin dengan barang-barang yang dibiayai.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Seluruh piutang sewa pembiayaan diberikan kepada pihak ketiga.

CFI menggunakan piutang sewa pembiayaan yang dimilliki sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima (Catatan 23 dan 24). Jumlah piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan oleh CFI sebesar Rp 86.875 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan jumlah piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan oleh CFI sebesar Rp 548.922 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 109.466 juta dan Rp 204.709 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 95.211 juta dan Rp 17.988 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, *lessee* memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee* pada akhir masa sewa pembiayaan.

Various finance lease receivables are secured by motor vehicles and Vehicle Document of Ownership (BPKB) of the related vehicle. Finance lease receivable related to land and buildings are secured by the object financed by the Company and document of ownership in the form of Certificates of Ownership (SHM) or Certificates of Building Use Right (SHGB). Finance lease receivables related to barges and tug boats are tied with fiduciary certificate (certificate grosse) of the financed items, while finance lease receivables related to heavy equipment, production machinery and equipment are secured by financed items.

The management of the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the losses, which might arise from uncollectible finance lease receivables.

All of finance lease receivables are with third parties.

Finance lease receivables are used as collateral for loans received by CFI from securities issued and bank loans (Notes 23 and 24). Total finance lease receivables pledged by CFI amounted to Rp 86,875 million as of December 31, 2020. Total finance lease receivables pledged by CFI amounted to Rp 548,922 million as of December 31, 2019.

The amount of restructured finance lease receivables is Rp 109,466 million and Rp 204,709 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The restructured finance lease receivables that are neither past due nor impaired as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 95,211 million dan Rp 17,988 million, respectively.

At the inception of finance lease contract, the lessee rendered security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the option is exercised. If the option is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

b. Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang memiliki suku bunga tetap, sehingga Perusahaan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*).

b. Factoring Receivable

The factoring receivable are arranged at fixed interest rates, thus exposing the Company to fair value interest rate risk.

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Tagihan anjak piutang	874.482	881.408	Factoring receivable
Pendapatan anjak piutang belum diakui	(89.620)	(149.021)	Unearned factoring income
Jumlah	784.863	732.387	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.590)	(37.356)	Allow ance for impairment losses
Bersih	671.273	695.031	Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	17,17%	16,27%	Average annual effective interest rate

Tagihan Anjak Piutang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan stage:

Factoring receivables as of December 31, 2020 and 2019 based on stages:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	633.137	-	99.250	732.387	Balance at beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	(600.000)	600.000	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Jumlah saldo awal setelah pengalihan	33.137	600.000	99.250	732.387	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(4.473)	57.774	-	53.301	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	(825)	(825)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan / (penurunan) tahun berjalan	(4.473)	57.774	(825)	52.476	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	28.664	657.774	98.425	784.863	Ending Balance

Seluruh tagihan anjak piutang merupakan pembiayaan modal kerja dan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

All of the Company's factoring receivable are financing working capital and in Indonesian Rupiah.

Jangka waktu tagihan anjak piutang berdasarkan periode dalam perjanjian adalah 50 hari sampai dengan 5 tahun dengan mayoritas di tenor kurang dari 1 tahun serta dapat diperpanjang.

The term of factoring receivable based on the agreements are 50 days up to 5 years with majority tenor less than 1 year and can be extended.

Tagihan anjak piutang memiliki jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan.

Factoring receivable have additional collateral in the form of land and buildings.

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang selama tahun berjalan:

The following table show movement of the allowance for impairment losses of factoring receivable:

	2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	31.899	-	5.457	37.356	Balance at beginning of the year
Dampak penerapan PSAK 71	(24.945)	-	24.338	(607)	Effect of adoption of PSAK 71
Saldo Awal PSAK 71	6.954	-	29.795	36.749	Balance at beginning of the year PSAK 71
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	-	-	-	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	-	-	-	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Jumlah saldo awal setelah pengalihan	6.954	-	29.795	36.749	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	9.342	85.281	(16.957)	77.666	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	(825)	(825)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan / (penurunan) tahun berjalan	9.342	85.281	(17.782)	76.841	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	16.296	85.281	12.013	113.590	Ending Balance

Umur tagihan anjak piutang yang secara individual mengalami penurunan nilai, antara lain:

The aging of factoring receivable that are individually impaired as follows:

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Millon	Rp Juta/ Rp Millon	
Kurang dari 90 hari	709.862	47.500	Less than 90 days
Lebih dari 90 hari	75.000	76.750	More than 90 days
Jumlah	784.862	124.250	Total

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari debitur telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya anjak piutang.

The management believes that allowance for impairment losses and collateral received from consumers are adequate to cover the possible losses arising from uncollectible factoring receivable.

14. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Piutang pembiayaan konsumen memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk).*

Jumlah piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan piutang pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh CFI dengan perincian sebagai berikut:

14. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

The consumer financing receivables are arranged at fixed interest rates, thus the Group are exposed to fair value interest rate risk.

Consumer financing receivables as of December 31, 2020 and 2019 are consumer financing receivables made by CFI with details as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga			Third parties
Piutang pembiayaan konsumen	8.941.432	12.434.249	Consumer financing receivables
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.502.327)	(2.412.485)	Unearned consumer financing income
Jumlah	7.439.105	10.021.764	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(263.381)	(175.652)	Allowance for impairment losses
Bersih	7.175.724	9.846.112	Net

Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan stage:

Consumer financing receivables as of December 31, 2020 and 2019 based on stages:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	9.332.599	457.950	231.215	10.021.764	Balance at beginning of the year
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	90.653	(88.017)	(2.636)	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(182.961)	184.818	(1.857)	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(370.086)	(156.841)	526.927	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Jumlah saldo awal setelah pengalihan	8.870.205	397.910	753.649	10.021.764	Balance at beginning of the year after transfer
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.902.490	40.460	32.076	1.975.026	New financial assets issued or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.780.879)	(198.844)	(577.962)	(4.557.685)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan / (penurunan) tahun berjalan	(1.878.389)	(158.384)	(545.886)	(2.582.659)	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	6.991.816	239.526	207.763	7.439.105	Ending Balance

Jumlah piutang pembiayaan konsumen bruto (sebelum dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan kegiatan usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total gross consumer finance receivable (before unearned income and allowance for impairment losses) based on business activity are as of December 31, 2020 and 2019 as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Multi guna	7.490.965	10.430.757	Multi purpose
Investasi	1.108.260	1.588.040	Investment
Modal kerja	342.207	415.452	Working capital
Jumlah	8.941.432	12.434.249	Total

Piutang pembiayaan konsumen jatuh tempo dalam:

Consumer financing receivables matured within:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Satu tahun berikutnya (termasuk yang telah jatuh tempo)	4.814.666	5.531.729	The following year (including past due)
> 1 - 2 tahun	2.655.614	3.805.507	> 1 - 2 years
Lebih dari 3 tahun	1.471.152	3.097.013	More than 3 years
Jumlah	8.941.432	12.434.249	Total
Tingkat bunga rata-rata efektif per tahun			Average effective interest rates per annum
Rupiah	18,91%	19,36%	Rupiah

Aset yang dibiayai oleh Perusahaan adalah kendaraan baru dan bekas, apartemen, tanah serta tanah dan bangunan dengan tenor pembiayaan adalah 1 - 7 tahun dengan mayoritas pembiayaan di tenor 4 tahun.

Assets finance by the Company are new and used vehicles, apartment, land and land and buildings with period of financing ranging from 1 - 7 years with majority tenor of within 4 years.

Biaya-biaya yang timbul, sehubungan dengan perolehan aset pembiayaan konsumen, dibebankan kepada debitur.

Additional cost, related to financing are charged to customers.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 3.110.523 juta dan Rp 14.520 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Total restructured consumer financing receivables as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 3,110,523 million and Rp 14,520 million, respectively

Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 2.267.734 juta dan Rp 4.702 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The restructured consumer financing receivables that are neither past due nor impaired as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 2,267,734 million and Rp 4,702 million, respectively.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2020				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	43.850	9.458	122.344	175.652	Balance at beginning of the year
Dampak penerapan PSAK 71	15.118	17.250	(10.831)	21.537	Effect of adoption of PSAK 71
Saldo Awal PSAK 71	58.968	26.708	111.513	197.189	Balance at beginning of the year PSAK 71
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	(4.384)	3.002	1.382	-	Transfer to 12-months expected credit loss (stage 1)
Transfer ke kredit yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	5.751	(7.125)	1.374	-	Transfer to Lifetime ECL - Not Credit Impaired (stage 2)
Transfer ke kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	1.374	1.385	(2.759)	-	Transfer to Lifetime ECL - Credit Impaired (stage 3)
Jumlah saldo awal setelah pengalihan	61.709	23.970	111.510	197.189	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	775	5.921	564.577	571.273	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.157	1.444	26.818	35.419	New financial assets issued or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.780)	(3.592)	(530.128)	(540.500)	Financial assets derecognized
Jumlah penambahan / (penurunan) tahun berjalan	1.152	3.773	61.267	66.192	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	62.861	27.743	172.777	263.381	Ending Balance

Piutang pembiayaan konsumen dijamin dengan kendaraan bermotor (baru dan bekas) beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan yang bersangkutan sedangkan piutang pembiayaan konsumen untuk apartemen, tanah serta tanah dan bangunan dijamin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS).

Consumer financing receivables are secured by vehicles (new and used) and the related certificates of ownership (BPKB) of the vehicle while consumer financing receivable related to apartment, land and land and buildings are secured by Certificates of Ownership (SHM) or Certificates of Building Use Right (SHGB) or Certificatesffar of Ownership of Mansions Unit (SHMASRS).

Piutang pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima oleh CFI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dari beberapa bank (Catatan 23 dan 24). Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan masing-masing sebesar Rp 3.798.087 juta dan Rp 4.836.865 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Consumer financing receivables are pledged as collateral for loans received by CFI as of December 31, 2020 and 2019 from securities issued and bank loans (Notes 23 and 24). Total consumer financing receivables pledged as collateral amounted to Rp 3,798,087 million and Rp 4,836,865 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

The management of the Group believes that the amount of allowance for impairment losses of consumer financing receivables is adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible consumer financing receivables.

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

15. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND PAYABLE

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Tagihan Akseptasi			**Acceptances Receivable**
Rupiah	1.459.940	1.790.742	Rupiah
Valuta asing			Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat	935.390	657.943	United States Dollar
Yen Jepang	74.589	116.677	Japanese Yen
Euro	19.890	13.393	Euro
Poundsterling Inggris	16.346	-	Great Britain Poundsterling
Yuan China	-	3.372	Chinese Yuan
Dollar Singapura	-	1.366	Singapore Dollar
Jumlah	2.506.155	2.583.493	Total
Diskonto tagihan akseptasi	(5.214)	(5.950)	Discount on acceptances receivable
Jumlah	2.500.941	2.577.543	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.228)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Tagihan Akseptasi - Bersih	2.495.713	2.577.543	Total Acceptances Receivable - Net
Liabilitas Akseptasi			**Acceptances Payable**
Rupiah	1.459.940	1.790.742	Rupiah
Valuta asing			Foreign currencies
Dollar Amerika Serikat	935.390	657.943	United States Dollar
Yen Jepang	74.589	116.677	Japanese Yen
Euro	19.890	13.393	Euro
Poundsterling Inggris	16.346	-	Great Britain Poundsterling
Yuan China	-	3.372	Chinese Yuan
Dollar Singapura	-	1.366	Singapore Dollar
Jumlah	2.506.155	2.583.493	Total

Tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan jangka waktu perjanjian adalah sebagai berikut:

The acceptances receivable and payable classified based on the term of the agreement are as follows:

	2020		2019		
	Tagihan/ Receivable Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas/ Payable Rp Juta/ Rp Million	Tagihan/ Receivable Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas/ Payable Rp Juta/ Rp Million	
≤ 1 bulan	11.964	11.968	11.386	11.386	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	123.049	123.081	190.847	191.008	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	2.247.739	2.252.301	2.259.596	2.264.354	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	107.376	107.731	95.102	95.736	> 6 - 12 months
> 12 bulan	10.813	11.074	20.612	21.009	> 12 months
Jumlah	2.500.941	2.506.155	2.577.543	2.583.493	Total

Mutasi nilai tercatat dari tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying amount of acceptances receivable are as follows:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	2.577.543	-	-	2.577.543	Balance at the beginning of the year
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	2.500.941	-	-	2.500.941	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.577.543)	-	-	(2.577.543)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(76.602)	-	-	(76.602)	Total decreases for the current year
Saldo akhir tahun	2.500.941	-	-	2.500.941	Ending balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai dari tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of acceptances receivable are as follows:

	2020				
	Stage 1 Rp Juta/ Rp Million	Stage 2 Rp Juta/ Rp Million	Stage 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Penerapan PSAK 71	6.952	140	-	7.093	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	6.952	140	-	7.093	Balance at the beginning of the year PSAK 71
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	5.228	-	-	5.228	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.952)	(140)	-	(7.093)	Financial asset derecognized
Total penurunan tahun berjalan	(1.725)	(140)	-	(1.865)	Total decreases for the current year
Saldo akhir tahun	5.228	-	-	5.228	Ending balance

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

The management of the Group believes that the amount of allowance for impairment losses of acceptance receivables is adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible acceptance receivables.

16. PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM

16. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership 2020	2019	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million
Metode Ekuitas/Equity Method					
Bank					
PT Panin Sekuritas	Sekuritas/Securities	29,00%	29,00%	396.186	392.390
PT Verena Multi Finance	Lembaga pembiayaan/ Financing	25,06%	25,06%	158.379	167.577
Subjumlah/Subtotal				554.565	559.967
Aset keuangan - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain / Financial Assets - measured at FVTOCI					
Bank					
PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG)	Asuransi/Insurance	7,76%	7,76%	87.688	114.848
PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan/Banking	1,00%	1,00%	16.500	16.500
PT First Asia Capital	Sekuritas/Securities	2,50%	2,50%	750	750
PT Sarana Kalsel Ventura	Modal ventura/ Venture Capital	1,04%	1,04%	208	40
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga pembiayaan/ Financing	0,00%	9,33%	-	625
Entitas anak/Subsidiary					
PT Al Ijarah Finance	Lembaga pembiayaan/ Financing	6,77%	6,77%	937	61.100
Subjumlah/Subtotal				106.083	193.863
Jumlah Penyertaan dalam bentuk saham/ Total Investments in shares of stock				660.648	753.830
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses				-	(625)
Jumlah Penyertaan dalam bentuk saham - Bersih/ Investment in shares of stock - Net				660.648	753.205

Lokasi utama kegiatan usaha seluruh entitas adalah di Indonesia.

The principal domicile of business of all the entities are located in Indonesia.

Mutasi penyertaan dalam bentuk saham dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

The changes in investments in shares accounted for under the equity method are as follows:

	2020						
	Saldo awal periode/ Balance at beginning of period Rp Juta/ Rp Million	Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi/Share in net income (loss) of associates Rp Juta/ Rp Million	Laba (rugi) komprehensif lain atas entitas asosiasi/ Share in other comprehensive Income (loss) of associates Rp Juta/ Rp Million	Penerapan awal PSAK 71/ Initial adoption of PSAK 71 Rp Juta/ Rp Million	Penambahan (pengurangan)/ Addition (deduction) Rp Juta/ Rp Million	Saldo akhir periode/ Balance at end of period Rp Juta/ Rp Million	
PT Panin Sekuritas	392.390	24.243	986	(553)	(20.880)	396.186	PT Panin Sekuritas
PT Verena Multi Finance	167.577	752	(19)	(9.931)	-	158.379	PT Verena Multi Finance
Jumlah	559.967	24.995	967	(10.484)	(20.880)	554.565	Total

	2019					
	Saldo awal tahun/ Balance at beginning of year	Bagian laba bersih entitas asosiasi/Share in net income of associates	Bagian Laba (rugi) komprehensif lain atas entitas asosiasi/ Share in other comprehensive Income (loss) of associates	Penambahan (pengurangan)/ Addition (deduction)	Saldo akhir tahun/ Balance at end of year	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
PT Panin Sekuritas	376.300	37.070	(100)	(20.880)	392.390	PT Panin Sekuritas
PT Verena Multi Finance	154.715	1.221	(651)	12.292	167.577	PT Verena Multi Finance
Jumlah	531.015	38.291	(751)	(8.588)	559.967	Total

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi di atas adalah sebagai berikut:

Summary of the associates' financial statements above are as follows:

	PT Panin Sekuritas Tbk		PT Verena Multi Finance Tbk		
	2020	2019	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset	2.966.071	2.332.900	2.679.222	2.652.724	Assets
Liabilitas	1.596.568	979.262	2.048.024	1.984.130	Liabilities
Aset Bersih	1.369.503	1.353.638	631.198	668.594	Net Assets
Pendapatan	334.286	1.353.638	631.898	333.009	Revenue
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	83.598	127.827	2.995	1.772	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2.110	1.053	-	-	Non-controlling interest
Laba tahun berjalan	85.708	128.880	2.995	1.772	Income for the year
Jumlah laba (rugi) dan laba komprehensif yang diatribusikan kepada:					Total profit (loss) and comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	86.998	127.827	3.343	93	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2.277	1.053	-	-	Non-controlling interest
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	89.275	128.880	3.343	93	Total comprehensive income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	3.567	(399)	348	(1.679)	Other comprehensive income (loss)
Penerimaan dividen	20.880	20.880	-	-	Dividends received

Pada tanggal 25 Januari 2019, VMF telah menyelesaikan rangkaian proses Penawaran Umum Terbatas II melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank tidak mengeksekusi atau mengambil haknya saat saham baru diterbitkan sehingga Bank mengalami dilusi kepemilikan pada VMF dari sebelumnya memiliki 57,54% menjadi 26,15%. Bank melepas 31,39% saham VMF, dimana saat ini kepemilikan saham Bank di VMF kurang dari 50%, dan Bank bukan merupakan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, laporan keuangan VMF tidak dikonsolidasikan lagi dengan Bank sejak 25 Januari 2019. Selanjutnya penyertaan dalam VMF dicatat sebagai penyertaan dalam bentuk saham dengan metode ekuitas. Pemegang saham pengendali VMF beralih dari Bank Panin kepada IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) sebagai pemegang 63,63% total saham VMF.

On January 25, 2019, VMF has completed a series of Limited Public Offering II processes through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD). The Bank did not execute or take away its rights when the new shares were issued so that the Bank had diluted its ownership in VMF from previously owning 57.54% to 26.15%. The Bank released 31.39% shares in VMF, while currently the Bank's ownership in VMF is less than 50% and the Bank is not the ultimate shareholder. Therefore, VMF's financial statements is no longer consolidated with the Bank since January 25, 2019. Furthermore, investments in VMF are recorded as investments in shares using the equity method. VMF controlling shareholders switch from Bank Panin to IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) as the holder of 63.63% of total shares of VMF.

Nilai wajar penyertaan dalam bentuk saham pada PT Panin Sekuritas dengan menggunakan harga kuotasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 268.308 juta dan Rp 297.540 juta.

Fair value of investment in shares of stock in PT Panin Sekuritas by using quoted price as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 268,308 million and Rp 297,540 million, respectively.

Nilai wajar penyertaan dalam bentuk saham pada VMF dengan menggunakan harga kuotasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 148.250 juta dan Rp 199.568 juta.

Fair value of investment in shares of stock in VMF by using quoted price as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 148,250 million and Rp 199,568 million.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, *unquoted equity instruments*, yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan dengan andal, diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

As of December 31, 2020 and 2019, unquoted equity instruments whose fair value cannot be determined reliably are classified as measured at fair value through other comprehensive income that are recorded at cost net of allowance for impairment losses.

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas penyertaan saham AMAG sebesar Rp 60.916 juta. Nilai wajar penyertaan saham AMAG didasarkan pada harga pasar yang tercatat pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar penyertaan, setelah dikurangi pajak penghasilan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 20.882 juta dan Rp 40.449 juta yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain tahun berjalan (Catatan 31).

The initial fair value of the investment in AMAG amounting to Rp 60,916 million is based on its quoted market price as of reporting date. The unrealized gain on increase in value of investment, net of deferred income tax, as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 20,882 million and Rp 40,449 million, respectively, and is recorded as other comprehensive income in the current year (Note 31).

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas penyertaan saham ALIF sebesar Rp 61.100 juta. Nilai wajar penyertaan saham ALIF didasarkan pada teknik penilaian yang mencakup input berupa model bisnis dan arus kas kontraktual. Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar penyertaan, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 60.163 juta dan nihil yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain tahun berjalan (Catatan 31).

The initial fair value of the investment in ALIF amounting to Rp 61,100 million is based on valuation technique that include inputs from business model and contractual cash flow. The unrealized loss on decrease in value of investment, as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 60,163 million dan nil, and is recorded as other comprehensive income in the current year (Note 31).

17. ASET TETAP

17. PREMISES AND EQUIPMENT

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Aset Tetap	10.252.500	10.312.649	Fixed Assets
Aset Hak Guna	73.585	-	Right-of-use Assets
Jumlah Tercatat	10.326.085	10.312.649	Net Book Value

a. Aset tetap

a. Premises and equipment

	2020						
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penerapan metode revaluasi/Application of the revaluation method	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Model revaluasi:							At revaluation model:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	6.025.239	-	-	84.597	(6.342)	6.103.494	Land
Bangunan	3.526.550	2.079	-	24.569	(2.071)	3.551.127	Buildings
Kendaraan bermotor	193.000	14.381	15.894	-	-	191.487	Vehicles
Inventaris kantor	760.442	66.543	2.581	-	-	824.404	Office equipments
Aset tetap yang akan digunakan	-	66.484	-	44.708	-	111.192	Unused premises and equipments
Jumlah	10.505.231	149.487	18.475	153.874	(8.413)	10.781.704	Total
Model revaluasi:							At revaluation model:
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Bangunan	147.734	135.839	-	-	(104)	283.469	Buildings
Kendaraan bermotor	15.012	48.494	3.362	-	-	60.144	Vehicles
Inventaris kantor	29.836	158.273	2.518	-	-	185.591	Office equipments
Jumlah	192.582	342.606	5.880	-	(104)	529.204	Total
Jumlah Tercatat	10.312.649				(8.309)	10.252.500	Net Book Value

	2019						
	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions *)	Reklasifikasi/ Reclassification	Penerapan metode revaluasi/Application of the revaluation method	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Model revaluasi:							At revaluation model:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	6.046.660	5.026	27.662	1.215	-	6.025.239	Land
Bangunan	3.521.102	7.719	3.212	941	-	3.526.550	Buildings
Kendaraan bermotor	206.068	31.184	21.643	-	(22.609)	193.000	Vehicles
Inventaris kantor	902.749	36.652	12.174	-	(166.785)	760.442	Office equipments
Jumlah	10.676.579	80.581	64.691	2.156	(189.394)	10.505.231	Total
Model revaluasi:							At revaluation model:
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Bangunan	12.557	135.193	16	-	-	147.734	Buildings
Kendaraan bermotor	76.184	35.772	5.594	-	(91.350)	15.012	Vehicles
Inventaris kantor	326.920	122.123	8.160	-	(411.047)	29.836	Office equipments
Jumlah	415.661	293.088	13.770	-	(502.397)	192.582	Total
Jumlah Tercatat	10.260.918				313.003	10.312.649	Net Book Value

*) Termasuk pengurangan aset tetap milik VMF dengan jumlah tercatat sebesar Rp 38.415 juta yang tidak dikonsolidasikan sejak 25 Januari 2019.

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan dan penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

*) Include the deduction of premises and equipment owned by VMF amounted to Rp 38,415 million that no longer consolidated since January 25, 2019.

Deductions of premises and equipment represent the sale and write-off of premises and equipment with details as follows:

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Nilai buku	20.904	12.499	Net book value
Harga jual	18.330	10.896	Selling price
Rugi penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih	(2.574)	(1.603)	Loss on sale and write-off of premises and equipment - net

Pada tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas nilai wajar inventaris yang dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dengan laporan tertanggal 17 Desember 2019. Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal.

In 2019, Bank revalued its fair value of inventory were performed by independent appraisers registered in OJK, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan as stated in the report dated December 17, 2019. Based on the appraisal report, the valuation was determined in accordance with the Bapepam-LK's rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market.

Ringkasan Penilai Independen adalah sebagai berikut:

The summary of the Independent Appraiser are as follows:

Penilai Independen/ Independent Appraiser	Rekan Penanggung Jawab/ Partner In-charge	Tanggal Laporan/ Report Date	Metode Penilaian/ Appraisal Method	Tanggal Efektif Revaluasi/ Revaluation Effective Date
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Drs. Nirboyo Adiputro, MAPPI (Cert.)	17 Desember/ December 17, 2019	Pasar, pendapatan dan biaya/Market, income and cost	30 September/ September 30, 2019
KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan	Audrey Angelina, M.Bus., MAPPI (Cert.)	31 Januari/ January 31, 2020	Pasar dan biaya/Market and cost	31 Desember/ December 31, 2019
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Sukanto Hasan, SE., MAPPI (Cert.)	10 Desember/ December 10, 2018	Pasar, pendapatan dan biaya/Market, income and cost	2 Oktober/ October 2, 2018
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Sukanto Hasan, SE., MAPPI (Cert.)	28 Desember/ December 28, 2018	Pasar, pendapatan dan biaya/Market, income and cost	31 Oktober/ October 31, 2018
KJPP Febriman Siregar & Rekan	Febriman Muda Siregar, ST., MM., MAPPI (Cert.)	30 November/ November 30, 2018	Pasar dan pendapatan/Market and income	25-26 Oktober/ October 25-26, 2018
KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc., MAPPI (Cert.)	15 November/ November 15, 2018	Pasar dan biaya/Market and cost	24-30 Oktober/ October 24-30, 2018
KJPP Mutaqqin Bambang Purwanto	Muhammad Syarif, S.T., M.M., MAPPI (Cert.)	21 November/ November 21, 2018	Pasar dan pendapatan/Market and income	26 Oktober/ October 26, 2018
KJPP Sapto Kasmodiard & Rekan	Sapto Haji, S.E., M.Ec Dev, MAPPI (Cert.)	26 November - 17 Desember/ November 26 - December 17, 2018	Pasar dan pendapatan/Market and income	25-29 Oktober/ October 25-29, 2018

Pada tahun 2020 dan 2019, selisih lebih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dikurangi dengan pajak penghasilan masing-masing adalah sebesar Rp 22.678 juta dan Rp 248.070 juta, dibukukan dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada akun "Surplus Revaluasi Aset Tetap" (Catatan 31). Sedangkan selisih kurang nilai wajar aset dengan nilai tercatat masing-masing adalah sebesar nihil, dibukukan dalam laba rugi tahun berjalan pada akun "beban non operasional".

In 2020 and 2019, the difference between the fair value and carrying amount of the assets net of tax amounting to Rp 22,678 million and Rp 248,070 million, respectively, is recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as "Revaluation of premises and equipment" (Note 31). Impairment for certain assets with carrying amount exceeding its fair value amounting to nil, respectively is recorded in current year profit and loss as "non-operating expenses".

Jika aset tetap dicatat menggunakan model biaya, nilai tercatatnya adalah sebagai berikut:

If the premises and equipment are measured using the cost model, the carrying amount would be as follows:

	2020			2019			
	Biaya perolehan/ Cost	Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation	Jumlah/ Total	Biaya perolehan/ Cost	Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Tanah	1.105.795	-	1.105.795	1.022.485	-	1.022.485	Land
Bangunan	2.529.843	1.506.972	1.022.871	2.506.826	1.406.271	1.100.555	Building
Kendaraan bermotor	284.544	245.625	38.919	285.110	229.762	55.348	Motor vehicle
Inventaris kantor	1.447.474	1.311.850	135.624	1.383.386	1.256.709	126.677	Furnitures and fixtures
Jumlah	5.367.656	3.064.447	2.303.209	5.197.807	2.892.742	2.305.065	Total

Bank memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan 2046. Bank memiliki beberapa bangunan dengan hak legal berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) yang berjangka waktu 27 (dua puluh tujuh) tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan 2038. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Bank owns several pieces of land with Building Use Right (HGB) for 36 (thirty six) years expiring up to 2046. The Bank owns several buildings with Strata Title Ownership Right (HMASRS) for 27 (twenty seven) years expiring in 2038. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land are acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat tanah dan bangunan milik Bank dengan nilai buku sebesar Rp 8.514 juta yang masih dalam proses balik nama atau atas nama pihak lain.

As of December 31, 2020, land and buildings owned by the Bank with net book value amounting to Rp 8,514 million, are still in process of transferring the name of the owner or are still under other parties' name.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset tetap masih lebih rendah dari pada nilai yang dapat dipulihkan, oleh karena itu tidak diperlukan penurunan nilai aset tetap.

Management believes that the carrying amount of premises and equipment is lower than the recoverable value, as such there is no impairment in value of premises and equipment.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), PT Asuransi Central Asia dan China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd, seluruhnya merupakan pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 6.548.059 juta dan SGD 280.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 6.385.360 juta dan SGD 280.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Premises and equipment, except for land, are insured against fire, theft and other possible risks with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG), PT Asuransi Central Asia and China Taiping Insurance (Singapore) Pte. Ltd, third parties, with coverage amount of Rp 6,548,059 million and SGD 280,000 as of December 31, 2020 and Rp 6,385,360 million and SGD 280,000 as of December 31, 2019. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

b. **Aset hak guna**

Perusahaan menyewa beberapa aset termasuk bangunan, kendaraan bermotor, dan peralatan lainnya dengan masa sewa rata-rata adalah 5 tahun.

b. Right-of-use assets

The Group leases several assets including building, motor vehicles, and other equipment with an average lease periode of 5 years.

Jumlah yang diakui ke laba rugi tahun 2020 yang timbul dari sewa adalah beban penyusutan aset-hak-guna sebesar Rp 33.275 juta yang diakui sebagai penyusutan dan amortisasi pada Catatan 39, dan beban bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp. 2.429 juta yang dicatat sebagai beban bunga atas liabilitas sewa pada Catatan 34 .

The amount recognized in 2020 profit or loss arising from leases are depreciation expense of right-of-use assets amounting to Rp 33,275 million which is recognized as depreciation and amortization in Note 39, and interest expense on lease liabilities amounting to Rp 2,429 million which is recorded as interest expense on lease liability on Note 34.

	2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak PSAK 73/ Impact of SFAS 73[1)]	Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset hak-guna							**Right-of-use assets**
Harga perolehan							Acquisition cost
Ruangan	-	71.290	71.290	64.907	37.180	99.017	Rooms
Kendaraan bermotor	-	6.662	6.662	1.257	2.367	5.552	Motor vehicles
Lainnya	-	2.291	2.291	-	-	2.291	Others
	-	80.243	80.243	66.164	39.547	106.860	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Ruangan	-	-	-	29.477	-	29.477	Rooms
Kendaraan bermotor	-	-	-	2.653	-	2.653	Motor vehicles
Lainnya	-	-	-	1.145	-	1.145	Others
	-	-	-	33.275	-	33.275	
Nilai buku bersih	-					73.585	Net book value

18. ASET TAKBERWUJUD - PERANGKAT LUNAK

Perincian perangkat lunak adalah sebagai berikut:

18. INTANGIBLE ASSETS - SOFTWARE

The details of software are as follows:

	2020	2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Biaya perolehan			Cost
Awal tahun	401.154	363.871	Beginning of the year
Penambahan tahun berjalan	93.068	37.283	Additions during the year
Akhir tahun	494.222	401.154	End of the year
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortization
Awal tahun	(255.821)	(243.896)	Beginning of the year
Amortisasi tahun berjalan	(23.970)	(11.925)	Amortization during the year
Akhir tahun	(279.791)	(255.821)	End of the year
Jumlah Tercatat	214.431	145.333	Carrying Value

19. ASET LAIN-LAIN / 19. OTHER ASSETS

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Bank			**The Bank**
Agunan yang diambil alih	1.813.441	1.405.368	Foreclosed properties
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.183.227	963.389	Accrued interest receivables
Persediaan hadiah dan barang cetakan	40.075	41.016	Gifts and printed matters
Uang muka			Advances
Pembelian aset tetap	58.603	21.664	Purchase of premises and equipments
Pihak ketiga	15.082	63.308	Third parties
Pendirian cabang	6.101	28.802	New branches
Lainnya	703.993	734.490	Others
Bersih	3.820.522	3.258.037	Net
Entitas Anak			**Subsidiaries**
Agunan yang diambil alih	681.360	839.993	Foreclosed properties
Piutang lain-lain	519.345	520.441	Other receivables
Lainnya	59.119	71.571	Others
Sub jumlah	1.259.824	1.432.005	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	(334.829)	(346.513)	Allowance for impairment losses on non-financial assets
Bersih	924.995	1.085.492	Net
Jumlah Aset Lain-lain - Bersih	4.745.517	4.343.529	Total Other Assets - Net

Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit dan pembiayaan konsumen dalam bentuk tanah, bangunan dan kendaraan yang telah diambil alih oleh Grup.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih, antara lain melalui penjualan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

Foreclosed Properties

Foreclosed properties represent collaterals on loan and consumer financing collaterals in the form of land, buildings and vehicles that have been foreclosed by the Group.

The Bank has taken actions for the resolution of foreclosed properties as required by Financial Services Authority No. 14/15/PBI/2012, dated October 24, 2012, among others through sales.

The changes in the allowance for impairment losses on foreclosed collateral are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	263.512	216.134	Balance at beginning of the year
Penghapusan	(7.249)	(1.723)	Write-off
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(2.888)	49.101	Provision (recovery) during the year
Saldo akhir tahun	253.375	263.512	Balance at end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses on foreclosed collateral is adequate to cover potential losses.

Pendapatan bunga yang Masih Akan Diterima

Merupakan bunga yang masih akan diterima atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek dan kredit.

Accrued Interest Receivables

These accounts represents interest receivables on placement with Bank Indonesia and other banks, securities and loans.

Piutang lain-lain

Jumlah piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari CFI dengan perincian berikut:

Other Receivables

Other receivables as of December 31, 2020 and as of December 31, 2019 represents CFI with details as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Piutang dalam proses penyelesaian	430.261	430.077	Receivables in settlement process
Lain-lain	89.084	90.364	Others
Jumlah	519.345	520.441	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(81.454)	(83.001)	Allowance for impairment loss
Bersih	437.891	437.440	Net

Piutang dalam proses penyelesaian dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih.

Receivable in settlement process stated at net realizable value.

Piutang pembiayaan yang tercatat direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban konsumen setelah melalui proses yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal piutang pembiayaan khususnya untuk anjak piutang dilakukan reklasifikasi menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika Hak Tanggungan jaminan tambahan digunakan untuk memenuhi kewajiban konsumen setelah melalui proses yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

The carrying amount of finance lease receivable and consumer finance receivable was reclassified into receivable in settlement process when guarantee could use for fulfilled the consumer obligation after through the process which stipulated in financing agreement. In finance receivable, particularly for factoring is conducted reclassification become right dependents additional collateral used to fulfill the obligation consumer after through the process which determined in financing agreement.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Receivable in settlement process are classified as financial asset in group of loans and receivable.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses in 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	83.001	47.205	Balance as beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	25.891	69.563	Provision for the year
Penghapusan	(27.438)	(33.767)	Write-off
Jumlah Tercatat	81.454	83.001	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivable in settlement process is adequate to cover potential losses.

Aset Keuangan Lainnya / **Other Financial Assets**

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi			Related party
Bank			Bank
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Pendapatan yang masih akan diterima			Accrued interest receivables
Kredit	3.570	5.570	Loans
Pihak ketiga			Third parties
Bank			Bank
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Pendapatan yang masih akan diterima			Accrued interest receivables
Kredit	608.393	814.559	Loans
Efek-efek	89.806	84.796	Securities
Penempatan pada BI dan Bank lain	3.483	4.405	Placement with BI and other banks
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	471.695	5.606	Measured at value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Pendapatan yang masih akan diterima			Accrued interest receivables
Efek-efek	6.280	48.453	Loans
Entitas anak			Subsidiary
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Pendapatan yang masih akan diterima			Accrued interest receivables
Kredit	27.957	22.762	Loans
Efek-efek	5.922	4.494	Securities
Pendapatan pada BI dan Bank lain	927	11.081	Placement with BI and other banks
Lainnya	10.493	-	Others
Piutang lain	519.345	84.735	Other receivables
Setoran jaminan	2.855	4.687	Security deposits
Jumlah Aset Keuangan Lainnya	1.750.726	1.091.148	Total Other Financial Assets

20. SIMPANAN

Simpanan memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

20. DEPOSITS

Deposits are arranged at both fixed and floating interest rate, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

	2020			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank				The Bank
Giro	146.877	11.400.967	11.547.844	Demand deposits
Tabungan	437.501	43.700.947	44.138.448	Savings deposits
Deposito berjangka	881.990	78.542.126	79.424.116	Time deposits
Sub Jumlah	1.466.368	133.644.040	135.110.408	Sub Total
Entitas Anak				Subsidiary
Giro *Wadiah*	-	243.242	243.242	*Wadiah* demand deposits
Tabungan *Wadiah*	-	290.665	290.665	*Wadiah* savings deposits
Tabungan *Mudharabah*	-	194.131	194.131	*Mudharabah* savings deposits
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	7.190.744	7.190.744	*Mudharabah* time deposits
Sub Jumlah	-	7.918.782	7.918.782	Sub Total
Jumlah	1.466.368	141.562.822	143.029.190	Total

	2019			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Bank				The Bank
Giro	132.554	9.568.760	9.701.314	Demand deposits
Tabungan	610.676	37.857.361	38.468.037	Savings deposits
Deposito berjangka	859.039	73.666.862	74.525.901	Time deposits
Sub Jumlah	1.602.269	121.092.983	122.695.252	Sub Total
Entitas Anak				Subsidiary
Giro *Wadiah*	-	212.118	212.118	*Wadiah* demand deposits
Tabungan *Wadiah*	-	288.570	288.570	*Wadiah* savings deposits
Tabungan *Mudharabah*	-	147.555	147.555	*Mudharabah* savings deposits
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	8.059.414	8.059.414	*Mudharabah* time deposits
Sub Jumlah	-	8.707.657	8.707.657	Sub Total
Jumlah	1.602.269	129.800.640	131.402.909	Total

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari simpanan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of deposits at amortized cost are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Simpanan			Deposits
Giro	11.791.086	9.913.432	Demand deposits
Tabungan	44.623.244	38.904.162	Savings deposits
Deposito berjangka	86.614.860	82.585.315	Time deposits
Jumlah	143.029.190	131.402.909	Total
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 26)			Accrued interest payable (Note 26)
Giro	669	495	Demand deposits
Tabungan	1.031	1.621	Savings deposits
Deposito berjangka	221.657	301.375	Time deposits
Sub jumlah	223.357	303.491	Subtotal
Jumlah	143.252.547	131.706.400	Total

a. Giro terdiri atas:

a. Demand deposits consist of:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi			Related parties
Bank			The Bank
Rupiah	101.886	106.392	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	43.754	24.672	United States Dollar
Lainnya	1.237	1.490	Others
Sub Jumlah	146.877	132.554	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	8.132.053	6.723.628	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	2.817.756	2.400.965	United States Dollar
Lainnya (masing-masing di baw ah 5%)	451.158	444.167	Others (below 5% each)
Sub Jumlah	11.400.967	9.568.760	Sub Total
Entitas Anak - Rupiah	243.242	212.118	Subsidiary - Rupiah
Jumlah	11.791.086	9.913.432	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			Average annual effective interest rate
Rupiah	2,58%	2,46%	Rupiah
Valuta asing	0,13%	0,13%	Foreign currencies
Tingkat bonus rata-rata per tahun	1,05%	1,95%	Average bonus rate per annum

Jumlah giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 16.351 juta dan Rp 9.977 juta.

As of December 31, 2020 and 2019, demand deposits which are earmarked and pledged as loan collateral amounted to Rp 16,351 million and Rp 9,977 million, respectively.

b. Tabungan terdiri atas:

b. Savings deposits consist of:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Bank			The Bank
Tabungan Panin	29.650.414	22.417.840	Panin Saving Deposits
Tabungan Panin Super Prize	4.157.662	5.458.487	Panin Super Prize Saving Deposits
Tabungan Bisnis Panin	853.934	1.026.551	Bisnis Panin Saving Deposits
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	1.643.221	1.469.259	Others (below 5% each)
Sub Jumlah	36.305.231	30.372.137	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiary
Tabungan *Wadiah*	290.665	288.570	*Wadiah* Saving Deposit
Tabungan *Mudharabah*	194.131	147.555	*Mudharabah* Saving Deposit
Sub Jumlah	484.796	436.125	Sub Total
Sub Jumlah - Rupiah	36.790.027	30.808.262	Sub Total - Rupiah
Valuta asing			Foreign currencies
Bank			The Bank
Tabungan Pan Dollar			Pan Dollar Saving Deposits
Dollar Amerika Serikat	6.135.365	6.045.038	United States Dollar
Dollar Australia	778.245	985.906	Australian Dollar
Dollar Singapura	504.809	495.088	Singapore Dollar
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	414.798	569.868	Others (below 5% each)
Sub Jumlah - valuta asing	7.833.217	8.095.900	Sub Total - foreign currency
Jumlah	44.623.244	38.904.162	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			Average annual effective interest rates
Rupiah	1,30%	2,04%	Rupiah
Valuta asing	0,15%	0,15%	Foreign currencies
Tingkat bonus rata-rata per tahun	5,41%	6,70%	Average bonus rate per annum
Bagi hasil rata-rata per tahun	3,98%	3,81%	Profit sharing per annum

Jumlah tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 123.746 juta dan Rp 86.025 juta.

As of December 31, 2020 and 2019, blocked savings deposits which pledged as loan collateral are amounted to Rp 123,746 million and Rp 86,025 million, respectively.

c. Deposito berjangka terdiri atas:

c. Time deposits consist of:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi			Related parties
Bank			The Bank
Rupiah	723.783	779.582	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	155.715	77.068	United States Dollar
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	2.492	2.389	Other (below 5% each)
Sub Jumlah	881.990	859.039	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
Bank			The Bank
Rupiah	75.763.512	70.652.841	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	2.600.480	2.728.031	United States Dollar
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	178.134	285.990	Others (below 5% each)
Sub Jumlah	78.542.126	73.666.862	Sub Total
Entitas Anak - Rupiah	7.190.744	8.059.414	Subsidiary - Rupiah
Jumlah	86.614.860	82.585.315	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			Average annual effective interest rates
Rupiah	5,18%	6,68%	Rupiah
Valuta asing	0,46%	0,51%	Foreign currencies
Bagi hasil rata-rata per tahun	7,12%	7,60%	Profit sharing per annum

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

Time deposits classified based on the term are as follows:

	2020			2019			
	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currencies Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currencies Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
1 bulan	41.725.220	1.744.630	43.469.850	35.414.193	1.950.148	37.364.341	1 month
3 bulan	25.377.813	470.724	25.848.537	28.509.186	486.068	28.995.254	3 months
6 bulan	9.178.773	551.024	9.729.797	8.422.358	529.680	8.952.038	6 months
12 bulan	6.950.676	170.443	7.121.119	6.706.425	127.582	6.834.007	12 months
Lebih dari 12 bulan	445.557	-	445.557	439.675	-	439.675	More than 12 months
Jumlah	83.678.039	2.936.821	86.614.860	79.491.837	3.093.478	82.585.315	Total

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.312.374 juta dan Rp 4.795.829 juta.

As of December 31, 2020 and 2019, blocked time deposits which pledged as loan collateral are amounted to Rp 4,312,374 million and Rp 4,795,829 million, respectively.

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Deposits from other banks are arranged at both fixed and floating interest rate, thus exposing the Group to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

	2020			2019			
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Pihak berelasi							Related parties
Bank							The Bank
Call money	275.000	-	275.000	-	-	-	Call money
Pihak ketiga							Third parties
Bank							The Bank
Giro	179.604	2.446	182.050	152.860	2.512	155.372	Demand deposits
Tabungan	115.088	-	115.088	95.608	-	95.608	Savings deposits
Deposito berjangka	33.084	-	33.084	149.552	-	149.552	Time deposits
Call money	765.000	-	765.000	1.695.000	1.416.015	3.111.015	Call money
Sub Jumlah	1.092.776	2.446	1.095.222	2.093.020	1.418.527	3.511.547	Sub Total
Entitas Anak							Subsidiary
Giro *Wadiah*	2.661	-	2.661	3.250	-	3.250	*Wadiah* demand deposits
Deposito berjangka *Mudharabah*	500	-	500	150.500	-	150.500	*Mudharabah* time deposits
Tabungan *Mudharabah*	122	-	122	90	-	90	*Mudharabah* saving deposits
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank	-	-	-	200.000	-	200.000	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate
Sub Jumlah	3.283	-	3.283	353.840	-	353.840	Sub Total
Jumlah	1.371.059	2.446	1.373.505	2.446.860	1.418.527	3.865.387	Total

	2020		2019		
	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	Rupiah	Valuta asing/ Foreign currencies	
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun					Average annual effective interest rates
Giro	3,51%	0,50%	3,95%	0,15%	Demand deposits
Tabungan	2,40%	-	3,37%	-	Savings deposits
Deposito berjangka	4,28%	-	6,15%	-	Time deposits
Call money	3,10%	-	5,49%	2,16%	Call money
Tingkat bonus rata-rata per tahun					Average bonus rate per annum
Giro *Wadiah*	1,05%	-	1,95%	-	*Wadiah* demand deposits
Bagi hasil rata-rata per tahun					Revenue sharing per annum
Deposito berjangka *Mudharabah*	7,12%	-	7,60%	-	*Mudharabah* time deposits
Tabungan *Mudharabah*	3,98%	-	3,81%	-	*Mudharabah* saving deposit
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank	-	-	6,59%	-	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate

Jumlah tabungan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.500 juta dan Rp 10.499 juta.

As of December 31, 2020 and 2019, blocked savings deposits from other banks which pledged as loan collateral are amounted to Rp 3,500 million and Rp 10,499 million, respectively.

Jangka waktu simpanan dari bank lain sejak tanggal penempatan hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The term of deposits from other banks from placement date to maturity date are as follows:

	2020	2019	
Rupiah			Rupiah
Deposito berjangka	30 hari/days	31 - 366 hari/days	Time deposits
Call money	5 - 7 hari/days	7 - 33 hari/days	Call money
Deposito berjangka *Mudharabah*	-	31 hari/days	*Mudharabah* time deposit
Sertifikasi Investasi *Mudharabah* Antarbank	-	12 - 31 hari/days	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Call money	-	7 - 32 hari/days	Call money

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

The carrying amount of deposits from other banks at amortized cost are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Simpanan			Deposits
Giro	184.711	158.622	Demand deposits
Tabungan	115.210	95.698	Savings deposits
Deposito berjangka	33.584	300.052	Time deposits
Call money	1.040.000	3.111.015	Call money
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank	-	200.000	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate
Jumlah	1.373.505	3.865.387	Total
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 26)			Accrued interest payable (Note 26)
Giro	14	15	Demand deposits
Tabungan	5	9	Savings deposits
Deposito berjangka	32	254	Time deposits
Call money	179	2.720	Call money
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank	-	725	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate
Jumlah	230	3.723	Total
Jumlah	1.373.735	3.869.110	Total

22. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI – PIHAK KETIGA

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri dari:

22. SECURITIES SOLD WITH AGREEMENTS TO REPURCHASE – THIRD PARTIES

The details of securities sold with agreements to repurchase are as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2020 Nilai pembelian kembali/ Repurchase amount Rp Juta/ Rp Million	2020 Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense Rp Juta/ Rp Million	2020 Nilai tercatat/ Carrying value Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	21 hari/days	21 Desember/ December 21, 2020	11 Januari/ January 11, 2021	755.777	792	754.985
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	19 hari/days	18 Desember/ December 18, 2020	6 Januari/ January 6, 2021	704.926	369	704.557
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	18 hari/days	18 Desember/ December 18, 2020	5 Januari/ January 5, 2021	606.030	254	605.776
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	18 hari/days	21 Desember/ December 21, 2020	8 Januari/ January 8, 2021	453.322	332	452.990
Jumlah/Total				2.520.055	1.747	2.518.308

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	2019 Nilai pembelian kembali/ Repurchase amount Rp Juta/ Rp Million	2019 Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense Rp Juta/ Rp Million	2019 Nilai tercatat/ Carrying value Rp Juta/ Rp Million
Bank						
Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ Bank Indonesia Certificate of Deposits	14 hari/days	26 Desember/ December 26, 2019	9 Januari/ January 9, 2020	1.530.302	1.765	1.528.537
Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ Bank Indonesia Certificate of Deposits	28 hari/days	16 Desember/ December 16, 2019	13 Januari/ January 13, 2020	1.447.766	2.539	1.445.227
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	14 hari/days	27 Desember/ December 27, 2019	10 Januari/ January 10, 2020	1.434.026	1.864	1.432.162
Obligasi Pemerintah Indonesia/ Indonesian Government Bonds	21 hari/days	17 Desember/ December 17, 2019	7 Januari/ January 7, 2020	504.971	432	504.539
Jumlah/Total				4.917.065	6.600	4.910.465

23. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN – BERSIH

Surat berharga yang diterbitkan oleh Grup adalah sebagai berikut:

23. SECURITIES ISSUED - NET

Securities issued by the Group are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Nilai nominal			Nominal value
Bank			Bank
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018 - Pihak berelasi	100.000	100.000	Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018 - Related party
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap IV Tahun 2018			Continuous Bonds II Bank Panin Phase IV Year 2018
Pihak berelasi	1.100	1.100	Related parties
Pihak ketiga	1.498.900	1.498.900	Third parties
	1.500.000	1.500.000	
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018			Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018
Pihak berelasi	184.800	204.700	Related parties
Pihak ketiga	3.715.200	3.695.300	Third parties
	3.900.000	3.900.000	
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016			Continuous Bonds II Bank Panin Phase II Year 2016
Pihak berelasi	10.500	9.000	Related parties
Pihak ketiga	2.114.500	2.116.000	Third parties
	2.125.000	2.125.000	
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016			Continuous Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016
Pihak berelasi	67.500	56.000	Related parties
Pihak ketiga	1.932.500	1.944.000	Third parties
	2.000.000	2.000.000	
Entitas Anak			Subsidiaries
Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018			Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018
Pihak berelasi	97.000	100.000	Related parties
Pihak ketiga	903.000	900.000	Third parties
	1.000.000	1.000.000	
Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 - Pihak ketiga	1.000.000	1.000.000	Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 - Third parties
Surat berharga yang beredar	11.625.000	11.625.000	Outstanding securities
Surat berharga yang dibeli kembali *)	(97.000)	(100.000)	Securities repurchased *)
Diskonto yang belum diamortisasi	(15.108)	(31.203)	Unamortized discount
Bersih	11.512.892	11.493.797	Net

*) Surat berharga yang dibeli kembali merupakan obligasi yang dibeli oleh Grup dengan tujuan untuk dijual kembali.

*) Securities repurchased represents bonds repurchased by the Group for resell purposes.

Suku bunga efektif rata-rata pada tahun 2020 dan 2019 untuk obligasi yang diterbitkan masing-masing adalah sebesar 8,39% dan 8,31% per tahun.

Seluruh surat berharga diterbitkan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh Grup tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Bank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

Jumlah surat berharga diterbitkan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan adalah senilai Rp 7.625.000 juta dan nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

The average annual effective interest rate of these securities in 2020 and 2019 are 8.39% and 8.31% per annum, respectively.

All securities issued and recorded at Indonesia Stock Exchange, Jakarta.

All securities issued by Group are not secured by a specific collateral, whether tangible or income or other assets of any kind of the Bank and are not guaranteed by any other party.

The amount of securities issued that will due within 12 months are Rp 7,625,000 million and nil on December 31, 2020 and 2019, respectively.

The carrying amount of securities issued at amortized cost are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	11.512.892	11.493.797	Securities issued - net
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 26)	87.783	89.738	Accrued interest payable (Note 26)
Jumlah	11.600.675	11.583.535	Total

Bank

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan rincian sebagai berikut:

The Bank

Bonds issued by the Bank offered at 100% of nominal value, with details are as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Peringkat/ Rating	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	5 tahun/years	3 Juli/ July 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2023	8,00%	idAA *)	100.000	100.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap IV Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase IV Year 2018	3 tahun/years	18 April/ April 18, 2018	18 April/ April 18, 2021	7,40%	idAA **)	1.500.000	1.500.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018	5 tahun/years	27 Februari/ February 27, 2018	27 Februari/ February 27, 2023	7,60%	idAA **)	3.900.000	3.900.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase II Year 2016	5 tahun/years	27 Oktober/ October 27, 2016	27 Oktober/ October 27, 2021	8,75%	idAA **)	2.125.000	2.125.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	5 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2016	28 Juni/ June 28, 2021	9,15%	idAA **)	2.000.000	2.000.000
Obligasi yang beredar/Outstanding bonds						9.625.000	9.625.000
Diskonto yang belum diamortisasi/Unamortized discount						(13.516)	(23.195)
Bersih/Net						9.611.484	9.601.805

*) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 April 2020 No. RC-395/PEF-DIR/IV/2020 untuk periode 8 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.

**) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 April 2020 No. RC-397/PEF-DIR/IV/2020 untuk periode 8 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.

*) Based on PT Pefindo's letter No. RC-395/PEF-DIR/IV/2019, dated April 8, 2020 for period April 8, 2020 until April 1, 2021.

**) Based on PT Pefindo's letter No. RC-397/PEF-DIR/IV/2019, dated April 8, 2020 for period April 8, 2020 until April 1, 2021.

Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak tanggal emisi, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

After one year from the issuance date of the bonds, the Bank has the option to buy them back in full or in part as a reserve for future resale or redemption, in accordance with the applicable regulations.

Tujuan penerbitan surat berharga oleh Bank adalah untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

The purpose of issuing securities by Bank is for working capital in the context of business development, especially in providing loans.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee for the bonds issued is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

The trustee agreement, contain a set of limitations that restrict the Bank to, among others:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- Mengadakan perubahan bidang usaha.
- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
- Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

- Reduce its Issued and Paid Up Capital.
- Change its business.
- Increase its equity to any parties that in total will exceed the Financial Services Authority regulation or authorized financial institution.
- Perform a merger, consolidation or reorganization with other companies, that contradict with Financial Services Authority or authorized financial institution.
- Sell or dispose of or transfer part or all of land and the buildings on it, both existing and those that will exist in the future.
- Pledge or encumber in any way the Bank's assets, existing or future to any third parties.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan surat berharga yang diterbitkan selama tahun 2020 dan 2019.

The Bank has no defaults of payment of interest nor breaches of any loan covenants with respect to securities issued in 2020 and 2019.

Pembayaran kupon bunga dilakukan setiap triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

Interest is paid quarterly, with details as follow:

Jenis/Type	Kupon bunga pertama/ First coupon payment	Kupon bunga terakhir/ Last coupon payment
Obligasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	3 Oktober/ October 3, 2018	3 Juli/July 3, 2023
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap IV Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase IV Year 2018	18 Juli/July 18, 2018	18 April/April 18, 2021
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase III Year 2018	27 Mei/May 27, 2018	27 Februari/ February 27, 2023
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase II Year 2016	27 Januari/ January 27, 2017	27 Oktober/ October 27, 2021
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016/ Continuous Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	28 September/ September 28, 2016	28 Juni/ June 28, 2021

PT Clipan Finance Indonesia (CFI)

Surat berharga yang diterbitkan oleh CFI adalah sebagai berikut:

PT Clipan Finance Indonesia (CFI)

Securities issued by CFI are as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/ Term	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Peringkat/ Rating *)	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million
Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 (MTN IV)/ Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Year 2018 (MTN IV)	3 tahun/years	28 Maret/ March 28, 2018	28 Maret/ March 28, 2021	9,00%	idAA-	1.000.000	1.000.000
Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 (MTN III)/ Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Year 2018 (MTN III)	3 tahun/years	21 Maret/ March 21, 2018	21 Maret/ March 21, 2021	9,00%	idAA-	1.000.000	1.000.000
Surat berharga yang beredar/Outstanding securities						2.000.000	2.000.000
Surat berharga yang dibeli kembali/Securities repurchased						(97.000)	(100.000)
Diskonto yang belum di amortisasi/Unamortized discount						(1.592)	(8.008)
Bersih/Net						1.901.408	1.891.992

*) Berdasarkan surat PT Pefindo No. RC-203/PEF-DIR/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 untuk periode 6 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021.

*) Based on PT Pefindo's letter No. RC-203/PEF-DIR/III/2020 dated March 11, 2020 for period of March 6, 2020 until March 1, 2021.

Pembayaran kupon bunga dilakukan setiap triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

Interest is paid quarterly, with details as follows:

Jenis/Type	Kupon bunga pertama/ First coupon payment	Kupon bunga terakhir/ Last coupon payment
Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018/ Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Year 2018	28 Juni/June 28, 2018	28 Maret/March 28, 2021
Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018/ Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Year 2018	21 Juni/June 21, 2018	21 Maret/March 21, 2021

CFI memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga (Catatan 13 dan 14).

Wali amanat untuk penerbitan MTN III dan IV ini adalah PT Bank Mega Tbk. CFI telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan. Pembayaran bunga dan nominal MTN III dan IV dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

CFI provides collateral in the form of finance lease receivables and consumer financing receivables from third parties (Notes 13 and 14).

The trustee for the MTN III and IV issued is PT Bank Mega Tbk. CFI has no breaches and has complied with all covenants. Principal and interest payments of MTN III and IV are being paid as scheduled through Indonesian Central Securities Depository (KSEI).

24. PINJAMAN YANG DITERIMA

24. BORROWINGS

	2020			
	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata efektif/ Average effective annual interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga				Third parties
CFI				CFI
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri	4 tahun/years	9,10%	802.898	PT Bank Mandiri
PT Bank Central Asia	2 - 3 tahun/years	9,04%	462.507	PT Bank Central Asia
PT Bank BJB	3 - 4 tahun/years	8,89%	450.930	PT Bank BJB
PT Bank Maybank Indonesia	3 tahun/years	9,02%	332.987	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank Permata	4 tahun/years	9,34%	265.147	PT Bank Permata
PT Bank DKI	3 - 4 tahun/years	9,00%	222.463	PT Bank DKI
PT Bank OCBC NISP	3 - 4 tahun/years	8,93%	200.107	PT Bank OCBC NISP
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)			356.487	Others (below 5% each)
Jumlah			3.093.526	Total

	2019			
	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata efektif/ Average effective annual interest rate	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Pihak ketiga				Third parties
Bank				The Bank
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	10 tahun/years	Libor 6 bulan/monhts + 2,5%	416.287	Non-bank financial institution
Pinjaman dari Bank lain				Other Bank
Bank of New York - Singapura	2 bulan/months	2,29%	319.298	Bank of New York - Singapore
Standard Chartered - Jakarta	1 bulan/months	2,17%	97.177	Standard Chartered - Jakarta
Sub jumlah			832.762	Sub total
CFI				CFI
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri	4 tahun/years	9,17%	1.015.964	PT Bank Mandiri
PT Bank Central Asia	2 - 3 tahun/years	9,29%	677.792	PT Bank Central Asia
PT Bank Maybank Indonesia	3 tahun/years	9,00%	550.528	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank BJB	3 - 4 tahun/years	9,24%	489.858	PT Bank BJB
PT Bank DKI	3 - 4 tahun/years	9,05%	410.437	PT Bank DKI
PT Bank OCBC NISP	3 - 4 tahun/years	9,11%	408.791	PT Bank OCBC NISP
PT Bank Permata	4 tahun/years	9,43%	361.474	PT Bank Permata
PT Bank Danamon	3 tahun/years	9,27%	293.286	PT Bank Danamon
PT Bank KEB Hana Indonesia	3 - 4 tahun/years	9,41%	236.141	PT Bank KEB Hana Indonesia
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)			367.793	Others (below 5% each)
Sub jumlah			4.812.064	Sub total
Jumlah			5.644.826	Total

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The carrying amount of borrowings at amortized cost are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pinjaman yang diterima	3.093.526	5.644.826	Borrowings
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 26)	10.482	22.312	Accrued interest payable (Note 26)
Jumlah	3.104.008	5.667.138	Total

Bagian pinjaman yang diterima yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan adalah sebesar Rp 2.340.601 juta dan Rp 2.318.106 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Loans received that will due within 12 months from the reporting date are amounting to Rp 2,340,601 million dan Rp 2,318,016 million on December 31, 2020 and 2019, respectively.

Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing pinjaman adalah sebagai berikut:

Payment made on the period for each loan facility are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
CFI			CFI
PT Bank Central Asia	507.142	453.403	PT Bank Central Asia
PT Bank Danamon	328.019	83.603	PT Bank Danamon
PT Bank Mandiri	308.394	184.323	PT Bank Mandiri
PT Bank KEB Hana Indonesia	258.150	137.180	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	239.063	276.736	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
PT Bank OCBC NISP	238.819	264.167	PT Bank OCBC NISP
PT Bank Maybank Indonesia	217.917	156.875	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank DKI	188.172	216.248	PT Bank DKI
PT Bank Permata	161.502	61.360	PT Bank Permata
Lainnya	370.288	102.887	Others
Jumlah	2.817.466	1.936.782	Total

Bank

Pada tanggal 18 Desember 2014 Bank memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan surat No. 16/120/DSSK/DQA terkait dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman dari *DEG-Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH* sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 dengan tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan plus 2,5% per tahun.

Bank terikat dengan beberapa batasan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Capital Adequacy Ratio* minimum 12%
- *Liquidity Ratio* minimum 25%
- *Solvency Ratio* minimum 10%

Bank telah melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sesuai jadwal serta memenuhi semua persyaratan-persyaratan penting yang diwajibkan. Pinjaman telah dilunasi pada saat jatuh tempo.

CFI

Seluruh pinjaman yang diterima oleh CFI digunakan untuk modal kerja. Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

The Bank

On December 18, 2014, the Bank obtained an approval from Financial Services Authority (OJK) as stated through its letter No. 16/120/DSSK/DQA regarding the extension of borrowing from DEG-Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH until March 16, 2020 with an annual interest rate at six months LIBOR plus 2.5% per annum.

The Bank is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Capital Adequacy Ratio minimum 12%
- Liquidity Ratio minimum 25%
- Solvency Ratio minimum 10%

The Bank has paid the interest and loan principal as scheduled and complied with all significant covenants required. The borrowing has settled on maturity date.

CFI

All CFI's borrowing is used for working capital. Summary of major information related to borrowing are as follows:

Bank	Fasilitas/Facility	Batas Kredit/ Credit Limit	Awal/ Begin	Akhir/ Due	Jaminan/Collateral	
		Rp Juta				
Bank Mandiri	Modal Kerja 1/Working Capital 1	500.000	25-Mei-18	14-Mar-23	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja (Catatan 14)/ Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 80% of the outstanding balance of working capital credit facility (Note 14)	
	Modal Kerja 2/Working Capital 2	500.000	16-Apr-18	20-Okt-23		
	Modal Kerja 3/Working Capital 3	500.000	09-Des-18	20-Des-24		
Bank Central Asia	*Installment Loan 9*	500.000	09-Mei-17	20-Jul-20	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit *installment dan uncommited money market/* Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 80% of the outstanding balance of installment and uncommited money market credit facility	*)
	Installment Loan 10	750.000	04-Feb-19	15-Apr-22		
	Installment Loan 11	1.000.000	15-Nov-19	17-Feb-24		
	Uncommited Money Market Line	250.000	17-Mei-20	17-Mei-21		**)
	Pinjaman Rekening Koran/Overdraft	50.000	17-Jun-20	17-Jun-21		**)
Bank BJB	Kredit Modal Kerja 5/Working Capital 5	300.000	30-Mar-17	28-Apr-20	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar minimal 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja 6,7 dan 8/ Finance lease receivables and/or consumer financing receivables at a minimum amount equivalent to 80% of the outstanding balance of working capital credit facility 6, 7, and 8.	*)
	Kredit Modal Kerja 6/Working Capital 6	300.000	29-Sep-17	26-Des-22		
	Kredit Modal Kerja 7/Working Capital 7	300.000	26-Okt-18	12-Jan-23		
	Kredit Modal Kerja 8/Working Capital 8	300.000	25-Nov-19	27-Des-24		
Bank Maybank Indonesia	Pinjaman Berjangka III/Term Loan III	200.000	19-Des-17	08-Jan-21	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit pinjaman berjangka 3, 4 dan 5 (Catatan 14)/ Consumer financing receivables at an amount equivalent to 80% of the outstanding balance of term loan credit facility 3, 4 and 5 (Note 14)	
	Pinjaman Berjangka IV/Term Loan IV	300.000	07-Jun-18	16-Agu-22		
	Pinjaman Berjangka V/Term Loan V	500.000	06-Agu-19	05-Des-23		
Bank Permata	Modal Kerja 1/Working Capital 1	350.000	16-Nov-18	22-Mei-23	Piutang sewa pembiayaan dan/atau piutang pembiayaan konsumen sebesar 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit modal kerja 1 dan 2 (Catatan 14)/ Finance leases receivables and/or customer financing receivables at an amount equivalent to 80% of the outstanding balance of working capital credit facility 1 and 2 (Notes 14)	
	Modal Kerja 2/Working Capital 2	200.000	23-Des-19	23-Des-24		
	Money Market	50.000	18-Mar-20	18-Mar-21		**)
Bank DKI	Pinjaman Berjangka 1/Term Loan 1	300.000	22-Mei-17	29-Agu-20	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit Term Loan (Catatan 14)/ Consumer financing receivables at an amount equivalent to 100% of the outstanding balance of term loan credit (Note 14)	*)
	Pinjaman Berjangka 2/Term Loan 2	500.000	21-Mei-18	01-Okt-22		
Bank OCBC NISP	Pinjaman Berjangka 1/Term Loan 1	500.000	14-Jul-17	18-Sep-20	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit Term Loan (Catatan 14)/ Consumer financing receivables at an amount equivalent to 100% of the outstanding balance of term loan credit (Note 14)	*)
	Pinjaman Berjangka 2/Term Loan 2	500.000	14-Feb-18	13-Jan-24		
Bank Danamon	Pinjaman Berjangka 1/Term Loan 1	150.000	27-Jan-16	25-Jan-21	Piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen sebesar 80% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit pinjaman berjangka 1, 2, 3, 5 dan modal kerja/ (Catatan 13 dan 14)/ Finance lease receivables and consumer financing receivables at an amount equivalent to 80% of the outstanding balance of term loan 1, 2, 3, 5 and working capital credit facility (Notes 13 and 14)	
	Pinjaman Berjangka 2/Term Loan 2	100.000	17-Jun-19	19-Jul-23		
	Pinjaman Berjangka 3/Term Loan 3	100.000	23-Agu-19	21-Okt-23		
	Pinjaman Berjangka 5/Term Loan 5	500.000	30-Jul-20	30-Jul-24		
	Modal Kerja/Working Capital	150.000	29-Jun-20	27-Jun-21		
Bank KEB Hana Indonesia	*Working Capital Installment V*	150.000	26-Mei-17	07-Jun-20	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 80% dari jumlah utang pokok fasilitas Working Capital VI/ Consumer financing receivables at an amount equivalent to 80% of the outstanding balance of Working Capital VI Installment facility	*)
	Working Capital Installment VI	200.000	28-Sep-18	12-Jun-23		
	Money Market Line (Uncommited)	100.000	15-Apr-20	15-Apr-21		**)

*) telah berakhir di tahun 2020
**) diperpanjang

*) matured in 2020
**) renewal

Terkait dengan utang bank tersebut di atas, CFI wajib menjaga *gearing ratio* sebesar 8x - 10x. CFI juga diwajibkan menjaga *rasio non-performing loan* untuk tunggakan lebih dari 30 hari tidak melebihi 5% dan tunggakan lebih dari 90 hari berkisar antara 3% - 5%. CFI diharuskan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank terkait dengan perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk CFI, komposisi permodalan dan pembagian laba CFI.

In relation to these bank loans, CFI is required to keep its gearing ratio value between 8x - 10x. CFI is also required to keep its non-performing loan ratio value for arrears exceeding 30 and 90 days between 5% and 3% - 5%, respectively. CFI must give written notification to concerned banks regarding changes in management, mergers and acquisitions, changes in CFI structure, composition of capital and CFI profit sharing arrangement.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, CFI telah memenuhi semua pembatasan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2020 and 2019, CFI has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Weighted average effective interest rate of loans in 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Jangka panjang	9,06%	9,15%	Long term
Jangka pendek	6,65%	6,79%	Short term

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga CFI terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Bank loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus, exposing CFI to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

25. UTANG PAJAK

25. TAXES PAYABLE

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Bank			The Bank
Pajak penghasilan badan (Catatan 42)	2.021	131.672	Corporate income tax (Note 42)
Pajak Penghasilan			Income tax
Pasal 21	21.253	19.511	Article 21
Pasal 23/26	72.442	87.366	Articles 23/26
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	628	703	Value Added Tax - Net
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan badan	2.750	22.401	Corporate income tax
Pajak Penghasilan			Income tax
Pasal 21	1.578	2.548	Article 21
Pasal 23/26	7.751	9.551	Articles 23/26
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	247	546	Value Added Tax - Net
Jumlah	108.670	274.298	Total

CFI

Pada bulan November dan Desember 2014, CFI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun 2011 dan 2010 dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa, atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 22.652 juta dan Rp 8.326 juta.

CFI

In November and December 2014, CFI received the Underpayment Tax Assessment Letter and Tax Collection letter for fiscal year 2011 and 2010 from Listed Company Tax Office for the underpayment of income tax and value added tax of Rp 22,652 million and Rp 8,326 million, respectively.

Pada tanggal 18 Desember 2014, CFI telah membayar sebagian dari kekurangan pajak tersebut sebesar Rp 623 juta dan sisanya dilunasi pada bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing sebesar Rp 1.411 juta untuk tahun pajak 2010 dan Rp 28.944 juta untuk tahun pajak 2010 dan 2011.

On December 18, 2014, CFI paid a portion of the tax underpayment amounting to Rp 623 million and the remaining amount has been fully paid in January and February 2015 amounting to Rp 1,411 million for tax year 2010 and Rp 28,944 million for tax year 2010 and 2011, respectively.

Pada tanggal 6 Februari 2015, CFI melunasi sisa kurang bayar pajak sebesar Rp 22.029 juta dan Rp 6.915 juta untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

On February 6, 2015, CFI fully paid the remaining tax underpayment of Rp 22,029 million and Rp 6,915 million for the tax years 2011 and 2010.

Pada tanggal 17 Februari 2015, CFI mengajukan keberatan dengan surat No. 046/CFI/DIR/II/2015-060/CFI/DIR/II/2015 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2010 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 6.613 juta dan Rp 20.903 juta.

On February 17, 2015, CFI filed objection letter No. 046/CFI/DIR/II/2015-060/CFI/DIR/II/2015 for the Underpayment Tax Assessment Letter for tax years 2010 and 2011 of Rp 6,613 million and Rp 20,903 million, respectively.

Pada bulan Februari 2016, CFI menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jendral Pajak yang menolak seluruh keberatan CFI atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

On February 2016, CFI received Decision Letter from Directorate General of Taxation, that reject all CFI's objection letter on the Underpayment Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter for tax years 2011 and 2010.

Pada tanggal 31 Maret 2016, CFI mengajukan banding dengan surat No. 128/CFI/DIR/III/2016 – 142/CFI/DIR/III/2016 atas surat keputusan dari Direktorat Jendral Pajak untuk tahun pajak 2010 dan 2011.

On March 31, 2016, CFI filed appeal letter No. 128/CFI/DIR/III/2016 –142/CFI/DIR/III/2016 for the decision letter of the Directorate General of Taxation for tax years 2010 and 2011.

Pada bulan Mei 2016, CFI menerima tanda terima surat permohonan banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan surat No. T-598/PAN.WK/B6.I/2016 – T-612/PAN.WK/ B6.I/2016 tanggal 26 April 2016.

On May 2016, CFI received appeal letter receipt from The Secretariat of Tax Court based on letter No. T-598/PAN.WK/B6.I/2016 – T-612/PAN.WK/ B6.I/2016 dated April 26, 2016.

Pada bulan Maret 2018, CFI menerima Surat Keputusan Banding untuk tahun pajak 2010 dan 2011 dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan surat No. PUT-102373/PP/M.VIIIB tahun 2018 – PUT-102387/PP/M.VIIIB tahun 2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang menyetujui satu pengajuan banding perusahaan dan menolak hal lainnya atas pengajuan banding perusahaan.

On March 2018, CFI received an appeal decision letter for tax year 2010 and 2011 from Directorate General of Taxation based on letter No. PUT-102373/PP/M.VIIIB year 2018 – PUT-102387/PP/M.VIIIB year 2018 dated March 12, 2018 which approved one company appeal and refused another for the Company's appeal.

Pada tanggal 8 Juni 2018, CFI mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas surat keputusan penolakan banding dari Direktorat Jendral Pajak dengan surat No. 460/DIR/CFI/VI/2018 – 474/DIR/CFI/VI/2018.

On June 8, 2018, CFI filed application for judicial review to Supreme Court for decision letter refusal appeal from Directorate General of Taxation based on letter No. 460/DIR/CFI/VI/2018 – 474/DIR/CFI/VI/2018.

Pada bulan Agustus 2018, CFI menerima kontra memori Peninjauan Kembali (PK) dari Panitera Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor KMPK-2914/PAN.Wk/2018 – KMPK-2927/PAN.Wk/2018.

On August 2018, CFI received counter memory judicial review from clerk of the tax court based on letter Number KMPK-2914/PAN.Wk/2018 – KMPK-2927/PAN.Wk/2018.

Pada bulan November 2018, CFI menerima Surat Putusan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berdasarkan surat No. 3405/B/PK/PJK/2018 – No. 3409/B/PK/PJK/2018 tertanggal 28 November 2018 yang mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali (PK).

On November 2018, CFI received appeal decision judicial review request letter from Supreme Court based on letter No. 3405/B/PK/PJK/2018 – No. 3409/B/PK/PJK/2018 date November 28, 2018 that granted all judicial review request.

Pada bulan Maret 2019, CFI menerima Surat Putusan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berdasarkan surat No. 3427/B/PK/PJK/2018-No. 3431/B/PK/PJK/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yang mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali (PK).

On March 2019, CFI received appeal decision judicial review request letter from Supreme Court based on letter No 3427/B/PKP/PJK/2018 - No. 3431/B/PK/PJK/2018 dated December 10, 2018 that fully granted judicial review request.

Pada bulan April 2019, CFI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan surat No. KEP-00145.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 – KEP-00148.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 tertanggal 10 April 2019, serta surat No. KEP-00154.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 tertanggal 15 April 2019 yang memutuskan agar membayar/memindahbukukan kelebihan pembayaran PPN dalam negeri.

On April 2019, CFI received disbursement of refund claim from Directorate General of Taxes based on letter No. KEP-00145.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 – KEP-00148.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 dated April 10, 2019 and letter No. KEP-00154.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 dated April 15, 2019 which decide to paid or transfer overpayment to domestic value-added tax.

Pada bulan Juni 2019, CFI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan surat No. KEP-00233.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 – KEP-00235.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 tertanggal 25 Juni 2019, serta surat No. KEP-00259.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang memutuskan agar membayar/ memindahbukukan kelebihan pembayaran pendapatan PPN dalam negeri. CFI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan surat No. KEP-00107.PPH/WPJ.07/KP.0803/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang memutuskan agar membayar/memindahbukukan kelebihan pembayaran pendapatan PPh Pasal 25/29.

On June 2019, CFI received disbursement of refund claim from Directorate General of Taxes based on letter No. KEP-00233.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 – KEP-00235.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 dated June 25, 2019 and letter No. KEP-00259.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 dated June 25, 2019 which decide to paid or transfer overpayment to domestic value-added tax. CFI received disbursement of refund claim from Directorate General of Taxes based on letter No. KEP-00107.PPH/WPJ.07/KP.0803/2019 dated June 25, 2019 which decide to paid or transfer of overpayment to income tax article 25/29.

Pada bulan Agustus 2019, CFI menerima Surat Putusan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan surat No. KEP-00323.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 yang memutuskan agar membayar/ memindahbukukan kelebihan pembayaran pendapatan PPN dalam negeri.

CFI received letter of judicial review decision from Supreme Court based on letter in the form of disbursement of refund claim from Directorate General of Taxes based on letter No. KEP-00323.PPN/WPJ.07/KP.0803/2019 dated August 5, 2019 which decide to paid or transfer of overpayment to domestic value-added tax.

Pada bulan Januari 2020, CFI menerima Surat Putusan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berdasarkan surat No. 3726/B/PK/PJK/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali.

CFI received letter of judicial review decision from Supreme Court based on letter No. 3726/B/PK/PJK/2019 dated October 29, 2019 that fully granted judicial review request.

Seluruh pembayaran di atas dicatat pada akun aset lain-lain sebesar Rp 1.647 juta dan Rp 7.092 juta masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 (Catatan 19).

All payment above are recorded under other assets account amounted to Rp 1,647 and Rp 7,092 million in 2020 and 2019, respectively (Note 19).

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, CFI belum menerima pengembalian pembayaran tersebut.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, CFI has not yet received the payment of tax return.

26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

26. ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Bank			The Bank
Pendapatan diterima dimuka	309.459	604.279	Income received in advance
Bunga yang masih harus dibayar	301.711	422.087	Accrued interest payable
Setoran jaminan	214.176	207.032	Marginal deposits
Cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	54.497	-	Allowance for impairment losses of commitments and contingencies
Liabilitas sewa	16.759	-	Lease liabilities
Lainnya	167.667	156.004	Others
Sub jumlah	1.064.269	1.389.402	Sub total
Entitas anak			Subsidiaries
Liabilitas titipan setoran nasabah	97.282	177.588	Customer deposit liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	48.251	80.311	Accrued expenses
Lainnya	92.741	149.795	Others
Sub jumlah	238.274	407.694	Sub total
Jumlah	1.302.543	1.797.096	Total

Pendapatan Diterima dimuka

Merupakan pendapatan provisi kredit dan pendapatan *bancassurance* diterima dimuka yang belum diamortisasi.

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan, simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi.

Setoran Jaminan

Merupakan setoran jaminan transaksi L/C, bank garansi dan sewa *safe deposit*.

Income Received in Advance

This account represents unamortized fees on loans and bancassurance income.

Accrued Interest Payable

This account represents interest payable on deposits, deposits from other banks, securities sold with agreements to repurchase, borrowings, securities issued and subordinated bonds.

Marginal Deposits

This account represents marginal deposits on L/C transactions, bank guarantee and safe deposit rentals.

Liabilitas keuangan lainnya / **Other Financial Liabilities**

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Financial liabilities, measuret at amortized cost
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related party
Jangka pendek			Short term
Pendapatan diterima dimuka	194.500	458.866	Income received in advance
Pihak ketiga			Third party
Jangka pendek			Short term
Pendapatan diterima dimuka	114.959	145.774	Income received in advance
Bunga yang masih harus dibayar	301.711	422.087	Accrued interest payable
Jangka panjang			Long term
Setoran jaminan	214.176	207.032	Security deposits
Sub jumlah	825.346	1.233.759	Sub total
Entitas anak			Subsidiary
Pihak ketiga			Third party
Jangka pendek			Short term
Bunga yang masih harus dibayar	48.251	18.026	Accrued interest payable
Jangka panjang			Long term
Setoran jaminan	117	106	Security deposits
Sub jumlah	48.368	18.132	Sub total
Jumlah	873.714	1.251.891	Total

27. OBLIGASI SUBORDINASI – BERSIH

Merupakan obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh Bank dengan rincian sebagai berikut:

27. SUBORDINATED BONDS – NET

This account represents subordinated bonds issued by the Bank with details as follows:

Jenis/Type	Jangka waktu/Term	Tanggal mulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Peringkat/Rating	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	7 tahun/years	3 Juli/ July 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2025	9,50%	idA+ *)	1.302.000	1.302.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2017	7 tahun/years	17 Maret/ March 17, 2017	17 Maret/ March 17, 2024	10,25%	idA+ **)	2.400.000	2.400.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	7 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2016	28 Juni/ June 28, 2023	9,60%	idA+ **)	100.000	100.000
Obligasi yang beredar/Outstanding bonds						3.802.000	3.802.000
Diskonto yang belum diamortisasi/Unamortized discount						(13.759)	(16.844)
Bersih/Net						3.788.241	3.785.156
Tingkat bunga rata-rata per tahun/Average annual interest rate						9,98%	9,98%

*) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 April 2020 No. RC-396/PEF-DIR/IV/2019 untuk periode 8 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.

**) Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 April 2020 No. RC-398/PEF-DIR/IV/2019 untuk periode 8 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.

Amortisasi diskonto untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.085 juta dan Rp 5.004 juta.

Obligasi subordinasi yang diterbitkan memiliki suku bunga tetap, sehingga Grup terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*). Suku bunga efektif rata-rata pada tahun 2020 dan 2019 dari obligasi subordinasi yang diterbitkan ini masing-masing sebesar 10,10% dan 9,90% per tahun.

Pembayaran kupon bunga dilakukan setiap triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

*) Based on PT Pefindo's letter No. RC-396/PEF-DIR/IV/2019, dated April 8, 2020 for period April 8, 2020 until April 1, 2021.

**) Based on PT Pefindo's letter No. RC-398/PEF-DIR/IV/2019, dated April 8, 2020 for period April 8, 2020 until April 1, 2021.

Amortization of discount in 2020 and 2019 amounted to Rp 3,085 million and Rp 5,004 million, respectively.

Subordinated bonds are arranged at fixed interest rates, exposing the Group to fair value interest rate risk. The average effective interest rate in these subordinated bonds in 2020 and 2019 were 10.10% and 9.90% per annum, respectively.

Interest is paid quarterly, with details as follow:

Jenis/Type	Kupon bunga pertama/ First coupon payment	Kupon bunga terakhir/ Last coupon payment
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahap I Tahun 2018/ Continuous Subordinated Bonds III Bank Panin Phase I Year 2018	3 Oktober/ October 3, 2018	3 Juli/ July 3, 2025
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase II Year 2017	17 Juni/ June 17, 2017	17 Maret/ March 17, 2024
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016/ Continuous Subordinated Bonds II Bank Panin Phase I Year 2016	28 September/ September 28, 2016	28 Juni/ June 28, 2023

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2020 dan 2019.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari obligasi subordinasi adalah sebagai berikut:

The Bank has no defaults on payment of interest nor breaches of any loan covenants with respect to subordinated bonds in 2020 and 2019.

The carrying amount of subordinated bonds at amortized cost are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Obligasi subordinasi - bersih	3.788.241	3.785.156	Subordinated bonds - net
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 26)	9.647	39.882	Accrued interest payable (Note 26)
Jumlah	3.797.888	3.825.038	Total

Tujuan penerbitan obligasi subordinasi adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif.

Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

The purpose of issuing subordinated bonds is to strengthen capital structure and support the growth of productive assets.

The trustee for the issuance of subordinated bonds is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The Bank has no right to redeem all or a part of the subordinated bonds.

Dalam hal terjadi penutupan usaha atau disolusi atau likuidasi karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

In the event of liquidation or dissolution for any reason, any proceeds from the liquidation process will only be applied to the outstanding amount due to the subordinated bondholders after all payment of obligation to senior debts have been made. Claims in regard to subordinated bonds are ranked paripassu without any preferences among subordinated bondholders.

Obligasi subordinasi tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Bank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

These subordinated bonds are not secured by a specific collateral, whether tangible or income or other assets of any kind of the Bank and are not guaranteed by any other party.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

The trustee agreement, contain a set of limitations that restrict the Bank to, among others:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- Mengadakan perubahan bidang usaha.
- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
- Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang.
- Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

- Reduce its Issued and Paid Up Capital.
- Change its business.
- Increase its equity to any parties that in total will exceed the Financial Services Authority regulation or authorized financial institution.
- Perform a merger, consolidation or reorganization with other companies, that contradict with Financial Services Authority or authorized financial institution.
- Sell or dispose of or transfer part or all of land and the buildings on it, both existing and those that will exist in the future.
- Pledge or encumber in any way the Bank's assets, existing or future to any third parties.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2020 dan 2019.

The Bank has no defaults of payment of interest nor breaches of any loan covenants with respect to subordinated bonds in 2020 and 2019.

28. MODAL SAHAM

Berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek, rincian pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

28. CAPITAL STOCK

Based on report from the Securities' Administration Bureau, the Bank's stockholders as of December 31, 2020 and 2019 as follows:

	2020			
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp Juta/ Rp Million	Name of stockholders
PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	46,04%	1.108.907	PT Panin Financial Tbk
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	9.349.793.152	38,82%	934.979	Votraint No. 1103 Pty Ltd.
Wakil Presiden Direktur - Hendrawan Danusaputra	1.000.000	0,00%	100	Vice President Director - Hendrawan Danusaputra
Direktur - Haryono Wongsonegoro	100.000	0,00%	10	Director - Haryono Wongsonegoro
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.641.581.561	15,12%	364.159	Public (below 5% each)
Jumlah	24.081.545.998	99,98%	2.408.155	Total
Saham treasuri	6.100.000	0,02%	610	Treasury stock
Jumlah	24.087.645.998	100,00%	2.408.765	Total

	2019			
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp Juta/ Rp Million	Name of stockholders
PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	46,04%	1.108.907	PT Panin Financial Tbk
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	9.349.793.152	38,82%	934.979	Votraint No. 1103 Pty Ltd.
Direktur - Roosniati Salihin	6.416.037	0,03%	642	Director - Roosniati Salihin
Direktur - Hendrawan Danusaputra	1.000.000	0,00%	100	Director - Hendrawan Danusaputra
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.641.365.524	15,11%	364.137	Public (below 5% each)
Jumlah	24.087.645.998	100,00%	2.408.765	Total

Saham Treasuri

Sehubungan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tertanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Bank telah melaksanakan pembelian kembali saham yang diterbitkan.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Bank membeli kembali 6.100.000 lembar saham senilai Rp 4.233 juta yang dimiliki oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, senilai nominal Rp 610 juta digunakan sebagai pengurang dari modal disetor, sedangkan sisanya senilai Rp 3.623 juta digunakan sebagai pengurang agio saham.

Agio Saham

Agio saham merupakan kelebihan di atas nominal dari penjualan saham perdana, penawaran umum terbatas, *right issue*, pelaksanaan waran, pembagian dividen saham, *swap share,* dan pembelian saham treasuri.

Treasury Stocks

Due to Circular Letter from Financial Service Authority (OJK) No. 3/SEOJK.04/2020 dated March 9, 2020, about Other Condition as Significant Fluctuation of Market Condition Regarding to Repurchase of Stocks that has been issued by The Public Company, Bank has repurchase its own stocks.

On March 26, 2020, Bank repurchase 6,100,000 shares amounting to Rp 4,233 million owned by public. From that amount, Rp 610 million is used as deduction of capital stock, while the rest amounting to Rp 3,623 million is used as deduction of additional paid in capital.

Additional Paid in Capital

The additional paid-in capital represents the excess of the total proceeds over the total par value of shares arising from the sale of shares through public offering, rights issues, exercise of warrants, stock dividends, share swap and the purchase of treasury stocks.

Berikut ini adalah mutasi agio saham:

The changes of additional paid in capital are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal periode	3.444.330	Balance at the beginning of period
Pengurangan agio dari saham treasuri	(3.623)	Deduction paid in capital from treasury stock
Saldo akhir periode	3.440.707	Balance at the end of period

29. SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

Merupakan selisih antara ekuitas bagian Bank di ekuitas entitas anak sebelum dan sesudah pengeluaran saham dengan nilai ekuitas entitas anak sebelum pengeluaran saham, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V saham CFI sejumlah 1.171.488.567 saham disertai sejumlah 911.157.774 waran pada tahun 2011 dan pelaksanaan waran Seri V sejumlah 209.723.040 waran pada tahun 2014, Penawaran Umum Saham Perdana PDSB sejumlah 4.750.000.000 saham disertai sejumlah 950.000.000 waran Seri I pada tahun 2014, pelaksanaan waran Seri I sejumlah 275.809.846 tahun 2017, dan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I PDSB dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 13.763.702.595 saham pada tahun 2018.

Pada tanggal 25 Januari 2019, VMF telah menyelesaikan rangkaian proses Penawaran Umum Terbatas II melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank tidak mengeksekusi atau mengambil haknya saat saham baru diterbitkan sehingga Bank mengalami dilusi kepemilikan pada VMF dari sebelumnya memiliki 57,54% menjadi 26,15%. Bank melepas 31,39% saham VMF. Pemegang saham pengendali VMF beralih dari Bank Panin kepada IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) sebagai pemegang 63,63% total saham VMF.

29. DIFFERENCE IN VALUE OF EQUITY TRANSACTION WITH NON-CONTROLLING INTEREST

Represents the difference between the Bank's interest in the equity of subsidiaries, before and after issuance of shares in relation with CFI limited public offering V of 1,171,488,567 shares with 911,157,774 warrants in 2011, and the exercise of warrants Series V to 209,723,040 shares in 2014 and the PDSB Initial Public Offering of 4,750,000,000 shares with 950,000,000 warrants Series I in 2014 and the exercise of warrants Series I to 275,809,846 shares in 2017, perform to increase of Capital through PDSB Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights Issued (HMETD) of 13,763,702,595 shares in 2018.

On January 25, 2019, VMF has completed a series of Limited Public Offering II processes through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD). The Bank did not execute or take away its rights when the new shares were issued so that the Bank had diluted its ownership in VMF from previously owning 57.54% to 26.15%. The Bank released 31.39% shares in VMF. VMF controlling shareholders switch from Bank Panin to IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) as the holder of 63.63% of total shares of VMF.

30. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

30. NON-CONTROLLING INTEREST

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Kepentingan Non-pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak			Non-controlling Interest in Net Assets of Subsidiaries
CFI	2.299.859	2.282.558	CFI
PDSB	937.122	784.598	PDSB
Jumlah	3.236.981	3.067.156	Total

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Kepentingan Non-pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak			Non-controlling Interest in Net Income (Loss) of Subsidiaries
CFI	20.868	175.329	CFI
PDSB	89	6.129	PDSB
Jumlah	20.957	181.458	Total
Kepentingan Non-pengendali atas Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Entitas Anak - setelah pajak			Non-controlling Interest in Other Comprehensive Income (Loss) of Subsidiaries - net of tax
CFI	2.516	(1.474)	CFI
PDSB	(28.003)	5.955	PDSB
Jumlah	(25.487)	4.481	Total

Ringkasan informasi keuangan atas setiap entitas anak Grup yang memiliki kepentingan non pengendali yang material dijelaskan dibawah. Ringkasan informasi keuangan dibawah merupakan nilai sebelum eliminasi intra kelompok usaha.

Summarized financial information in respect of each of the Group's subsidiaries that has material non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations.

CFI

CFI

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Jumlah Aset	10.917.456	12.117.478	Total Assets
Jumlah Liabilitas	6.172.266	7.411.796	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	4.745.190	4.705.682	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.917.456	12.117.478	Total Liabilities and Equity
Pendapatan	1.847.954	2.164.663	Revenue
Beban	(1.787.421)	(1.677.996)	Expenses
Laba sebelum pajak	60.533	486.667	Income before tax
Beban pajak	(13.966)	(125.071)	Tax expense
Laba bersih tahun berjalan	46.567	361.596	Profit for the year
Laba (rugi) komprehensif lain	5.433	(3.039)	Other comprehensive income (loss)
Jumlah laba komprehensif	52.000	358.557	Total comprehensive income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			Profit attributable to:
Pemilik Perusahaan	25.699	186.364	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	20.868	175.232	Non-controlling interest
Laba tahun berjalan	46.567	361.596	Profit for the year

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik Perusahaan	28.616	184.585	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	23.384	173.972	Non-controlling interests
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	52.000	358.557	Total comprehensive income for the year
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk):			Net cash inflow (outflow) from:
Aktivitas operasi	2.903.228	(552.035)	Operating activities
Aktivitas investasi	(12.441)	(35.317)	Investing activities
Aktivitas pendanaan	(1.070.687)	638.783	Financing activities

PDSB

PDSB

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Jumlah Aset	11.302.082	11.135.825	Total Assets
Jumlah Liabilitas	8.186.429	9.441.259	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	3.115.653	1.694.566	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	11.302.082	11.135.825	Total Liabilities and Equity
Pendapatan	715.082	662.560	Revenue
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	591.221	522.518	Depository share on Return of Temporary Syirkah Funds
Pendapatan Usaha Lainnya	93.597	77.070	Other operating Revenues
Beban Kerugian Penurunan Nilai	(3.397)	(10.046)	Provision for Impairment Losses - net
Beban Usaha Lainnya	215.547	208.607	Other Operating Expenses
Laba Usaha	5.308	18.551	Income from Operations
Pendapatan Non Usaha - bersih	1.430	4.795	Non-operating Revenues - net
Laba sebelum Zakat dan Beban Pajak	6.738	23.346	Income before Zakat and Tax Expense
Zakat	168	1.119	Zakat
Laba sebelum Pajak	6.570	22.227	Income before Tax Expense
Beban pajak	(6.442)	(8.990)	Tax expense
Laba bersih tahun berjalan	128	13.237	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	(1.818)	12.862	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	(1.690)	26.099	Total comprehensive income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			Profit attributable to:
Pemilik Perusahaan	39	7.108	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	89	6.129	Non-controlling interest
Laba tahun berjalan	128	13.237	Profit for the year
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik Perusahaan	26.224	14.015	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	(27.914)	12.084	Non-controlling interest
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(1.690)	26.099	Total comprehensive income for the year
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk):			Net cash inflow (outflow) from:
Aktivitas operasi	(1.608.248)	80.647	Operating activities
Aktivitas investasi	(939)	(1.378)	Investing activities
Aktivitas pendanaan	1.481.422	-	Financing activities

31. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

31. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Surplus revaluasi aset tetap (Catatan 17)	7.596.018	7.576.053	Gain on revaluation of premises (Note 17)
Perubahan nilai w ajar investasi yang diukur pada nilai w ajar melalui penghasilan komprehensif lain (Catatan 9 dan 16)	2.076.881	75.405	Changes in fair value marketable securities at fair value through other comprehensive income (Notes 9 and 16)
Bagian pendapatan komprehensif lain atas entitas asosiasi (Catatan 16)	1.998	1.031	Share of other comprehensive income of an associate (Note 16)
Pengukuran kembali atas kew ajiban imbalan pasti (Catatan 44)	(23.051)	124.019	Remeasurement of defined benefit obligation (Note 44)
Jumlah	9.651.846	7.776.508	Total

Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)

Changes in fair value financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

	2020			2019			
	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currencies Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	Rupiah Rp Juta/ Rp Million	Valuta asing/ Foreign currencies Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun sebelum pajak tangguhan	147.829	(46.555)	101.274	132.533	(53.344)	79.189	Balance at beginning of the year before deferred tax
Penambahan tahun berjalan	2.536.848	-	2.536.848	(314)	-	(314)	Addition during the year
Kerugian (keuntungan) yang direalisasi atas penjualan selama tahun berjalan	(50.465)	(261)	(50.726)	(3.932)	6.133	2.201	Realized loss (gain) on sale during the year
Perubahan nilai efek tahun berjalan	(28.561)	(1.562)	(30.123)	19.542	(978)	18.564	Changes in the value of outstanding securities during the year
Selisih kurs	-	2.617	2.617	-	1.634	1.634	Exchange rate differences
Jumlah sebelum pajak tangguhan	2.605.651	(45.761)	2.559.890	147.829	(46.555)	101.274	Balance at end of the year before deferred tax
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	(574.284)	10.067	(564.217)	(36.957)	11.639	(25.318)	Deferred income tax asset (liability) - net
Cadangan kerugian penurunan nilai	108.785	-	108.785	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	2.140.152	(35.694)	2.104.458	110.872	(34.916)	75.956	Total
Kepentingan non-pengendali	(27.577)	-	(27.577)	(551)	-	(551)	Non-controlling interest
Saldo akhir tahun	2.112.575	(35.694)	2.076.881	110.321	(34.916)	75.405	Balance at end of the year

Revaluasi FVTOCI merupakan akumulasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang diukur pada penghasilan komprehensif lain bersih setelah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi ketika aset tersebut telah dilepas.

The FVTOCI valuation reserve represents the cumulative gains and losses arising from the revaluation of financial assets measured at FVTOCI that have been recognized in other comprehensive income, net of amounts reclassified to profit or loss when those assets have been disposed.

Mutasi nilai tercatat atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The changes in carrying amount of securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	2.223.521	49.608	-	19.999	2.293.128	Balance at the beginning of the year
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(188.610)	2.093	188.109	-	1.592	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	35.986.646	-	-	-	35.986.646	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.440.472)	-	-	(19.999)	(1.460.471)	Financial asset derecognized
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	34.357.564	2.093	188.109	(19.999)	34.527.767	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	36.581.085	51.701	188.109	-	36.820.895	Ending balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	-	Balance at the beginning of the year
Penerapan PSAK 71	14.348	16.979	-	-	31.327	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	14.348	16.979	-	-	31.327	Balance at the beginning of the year PSAK 71
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(104.789)	(10.309)	196.901	-	81.803	Remeasurement of the allowance for impairment losses
Aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibeli	12	-	-	-	12	New financial assets issued or purchase
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.357)	-	-	-	(4.357)	Financial asset derecognized
Total pembentukan/(pembalikan) tahun berjalan	(109.134)	(10.309)	196.901	-	77.458	Total additions / (decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	(94.786)	6.670	196.901	-	108.785	Ending balance

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not applying PSAK 71

32. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

2020

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 58 tanggal 23 Juli 2020 dari Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta telah ditetapkan Bank tidak membayar dividen.

2019

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 27 tanggal 19 Juni 2019 dari Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta telah ditetapkan Bank tidak membayar dividen.

32. DIVIDENDS AND APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

2020

As stated in the Deed of the Annual Stockholders' Meeting No. 58 dated July 23, 2020 of Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta the stockholders approved that the Bank will not distribute any dividends.

2019

As stated in the Deed of the Annual Stockholders' Meeting No. 27 dated June 19, 2019 of Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta the stockholders approved that the Bank will not distribute any dividends.

33. PENDAPATAN BUNGA YANG DIPEROLEH / 33. INTEREST EARNED

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Rupiah			Rupiah
Diukur pada nilai w ajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	126.491	-	Bonds/Sukuk
Surat utang jangka menengah	3.327	-	Medium Term Notes
Sub jumlah - Diukur pada nilai w ajar melalui laba rugi	129.818	-	Sub total - Measured at fair value through profit and loss
Diukur pada nilai w ajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	1.468.866	-	Bonds/Sukuk
Reksadana	100.040	-	Mutual funds
Surat utang jangka menengah	24.994	-	Medium Term Notes
Sub jumlah - Diukur pada nilai w ajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.593.900	-	Sub total - Measured at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Giro	15.327	-	Demand deposits
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			Placements w ith Bank Indonesia and other banks
Deposito Berjangka	90.952	-	Time Deposit
Call money	46.235	-	Call money
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	20.079	-	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	12.487	-	Bank Indonesia Sharia Certificates
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	271.734	-	Bonds/Sukuk
Sertifikat Bank Indonesia	135.684	-	Bank Indonesia Certificates
Sukuk Bank Indonesia	14.680	-	Bank Indonesia Sukuk
Surat Perbendaharaan Negara	5.732	-	Government Treasury Bill
Wesel tagih	704	-	Export drafts
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank	56	-	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	595.027	-	Securities purchased w ith agreements to resell
Kredit			Loans
Pinjaman tetap	7.985.859	-	Fixed loans
Pinjaman rekening koran	1.943.196	-	Demand loans
Pembiayaan bersama	478.960	-	Syndicated loans
Kredit program	144.798	-	Program loans
Kredit lainnya	193.983	-	Other loans
Lainnya			Others
Pembiayaan konsumen	1.410.335	-	Consumer financing
Sew a pembiayaan	57.366	-	Finance lease
Anjak piutang	66.045	-	Factoring receivables
Lainnya	(635)	-	Others
Sub jumlah - Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	13.488.604	-	Sub total - Measured at amortized cost

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Diperdagangkan			Trading
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	-	172.145	Bonds/Sukuk
Surat utang jangka menengah	-	5.578	Medium Term Notes
Surat Perbendaharaan Negara	-	3.120	Government Treasury Bills
Sub jumlah - Diperdagangkan	-	180.843	Sub total - Trading
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Efek-efek			Securities
Reksadana	-	81.643	Mutual Funds
Surat utang jangka menengah	-	46.157	Medium Term Notes
Obligasi/Sukuk	-	37.819	Bonds/Sukuk
Sub jumlah - Tersedia untuk dijual	-	165.619	Sub total - Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo			Held-to-maturity
Giro	-	499	Demand deposits
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			Placements with Bank Indonesia and other banks
Call money	-	86.028	Call money
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	25.345	Bank Indonesia Sharia Certificates
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	-	12.020	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	-	268.215	Bonds/Sukuk
Sertifikat Bank Indonesia	-	261.041	Bank Indonesia Certificates
Sukuk Bank Indonesia	-	13.914	Bank Indonesia Sukuk
Surat Perbendaharaan Negara	-	13.458	Government Treasury Bill
Surat utang jangka menengah	-	2.501	Medium Term Notes
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank	-	1.635	*Mudharabah* Interbank Investment Certificate
Wesel tagih	-	1.432	Export drafts
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	906.361	Securities purchased with agreements to resell
Kredit			Loans
Pinjaman tetap	-	9.611.122	Fixed loans
Pinjaman rekening koran	-	2.415.586	Demand loans
Pembiayaan bersama	-	362.921	Syndicated loans
Kredit program	-	180.333	Program loans
Kredit lainnya	-	241.163	Other loans
Lainnya			Others
Pembiayaan konsumen	-	1.574.460	Consumer financing
Sewa pembiayaan	-	166.158	Finance lease
Anjak piutang	-	25.436	Factoring receivables
Lainnya	-	274	Others
Sub jumlah - Dimiliki hingga jatuh tempo	-	16.169.902	Sub total - Held-to-maturity
Jumlah Pendapatan Bunga - Rupiah	15.212.322	16.516.364	Total Interest Earned - Rupiah
Valuta asing			Foreign currencies
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	1.625	-	Bonds/Sukuk
Surat utang jangka menengah	728	-	Medium Term Notes
Sub jumlah - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.353	-	Sub total - Measured at fair value through profit and loss

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Efek-efek			Securities
Surat utang jangka menengah	470	-	Medium Term Notes
Obligasi/Sukuk	-	-	Bonds/Sukuk
Sub jumlah - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	470	-	Sub total - Measured at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Giro	1.382	-	Demand deposits
Penempatan pada bank lain			Placements with other banks
Call money	13.586	-	Call money
Deposito berjangka	51	-	Time deposits
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	115.283	-	Bonds/Sukuk
Wesel tagih	242	-	Export drafts
Kredit			Loans
Pinjaman tetap	413.338	-	Fixed loans
Pembiayaan bersama	32.612	-	Syndicated loans
Pinjaman rekening koran	1.473	-	Demand loans
Kredit lainnya	2.445	-	Other loans
Lainnya			Others
Sewa pembiayaan	105	-	Finance lease
Sub jumlah - Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	580.517	-	Sub total - Measured at amortized cost
Diperdagangkan			Trading
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	-	9.121	Bonds/Sukuk
Surat utang jangka menengah	-	3.945	Medium Term Notes
Sub jumlah - Diperdagangkan	-	13.066	Sub total - Trading securities
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Efek-efek			Securities
Surat utang jangka menengah	-	2.545	Medium Term Notes
Obligasi/Sukuk	-	1.525	Bonds/Sukuk
Sub jumlah - Tersedia untuk dijual	-	4.070	Sub total - Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo			Held-to-maturity
Giro	-	3.069	Demand deposits
Penempatan pada bank lain			Placements with other banks
Call money	-	43.820	Call money
Deposito berjangka	-	387	Time deposits
Efek-efek			Securities
Obligasi/Sukuk	-	112.853	Bonds/Sukuk
Wesel tagih	-	350	Export drafts
Kredit			Loans
Pinjaman tetap	-	481.004	Fixed loans
Pembiayaan bersama	-	23.373	Syndicated loans
Pinjaman rekening koran	-	1.546	Demand loans
Kredit lainnya	-	6.357	Other loans
Lainnya			Others
Sewa pembiayaan	-	3.897	Finance lease
Lainnya	-	11	Others
Sub jumlah - Dimiliki hingga jatuh tempo	-	676.667	Sub total - Held-to-maturity
Jumlah Pendapatan Bunga - Valuta asing	583.340	693.803	Total Interest Earned - Foreign currencies
Jumlah Pendapatan Bunga	15.795.662	17.210.167	Total Interest Earned

Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Accrued interest income on impaired financial assets are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Kredit (Catatan 12)	12.514	109.344	Loans (Note 12)
Efek-efek	328	-	Securities
Tagihan anjak piutang	-	7.173	Factoring receivables
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 13)	-	4.168	Finance lease receivables (Note 13)
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 14)	-	272	Consumer financing receivables (Note 14)
Jumlah	12.842	120.957	Total

Jumlah pendapatan syariah yang diperoleh dari pendapatan usaha utama sebesar Rp 754.196 juta dan Rp 662.646 juta masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

Sharia income earned from primary income transactions amounted to Rp 754,196 million and Rp 662,646 million in 2020 and 2019, respectively.

34. BEBAN BUNGA

34. INTEREST EXPENSE

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Financial liabilities measured at amortized cost
Rupiah			Rupiah
Simpanan			Deposits
Deposito berjangka	4.527.392	5.452.840	Time deposits
Tabungan	816.312	932.478	Saving deposits
Giro	187.939	183.701	Demand deposits
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
Call money	24.058	61.844	Call money
Sertifikat investasi Mudharabah	15.837	4.226	Mudharabah investment certificate
Deposito berjangka	7.719	16.754	Time deposits
Giro	7.228	6.662	Demand deposits
Tabungan	2.601	3.744	Saving deposits
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21.534	24.154	Securities sold with agreements to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan			Securities issued
Obligasi	794.061	793.261	Bonds
Obligasi subordinasi	383.063	566.549	Subordinated bonds
Surat utang jangka menengah	178.236	177.310	Medium Term Notes
Pinjaman yang diterima	371.515	438.601	Borrowings
Liabilitas sewa	2.451	-	Lease liability
Sub jumlah	7.339.946	8.662.124	Sub total
Valuta asing			Foreign currencies
Simpanan			Deposits
Deposito berjangka	14.339	39.168	Time deposits
Tabungan	12.476	12.537	Saving deposits
Giro	4.368	4.032	Demand deposits
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
Call money	2.491	14.817	Call money
Giro	21	4	Demand deposits
Pinjaman yang diterima	4.769	23.136	Borrowings
Sub jumlah	38.464	93.694	Sub total
Jumlah Beban Bunga	7.378.410	8.755.818	Total Interest Expense

Jumlah beban syariah sebesar Rp 599.776 juta dan Rp 539.763 juta masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

Sharia expense amounted to Rp 599,776 million and Rp 539,763 million in 2020 and 2019, respectively.

35. KEUNTUNGAN BERSIH PENJUALAN EFEK

35. NET GAIN ON SALE OF SECURITIES

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Diukur pada nilai w ajar melalui laba rugi			Measured at fair value through profit or loss
Laba penjualan efek obligasi	212.410	93.569	Gain on sale of bonds
Laba penjualan efek lainnya	158	649	Gain on sale of other securities
Sub jumlah	212.568	94.218	Sub total
Diukur pada nilai w ajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Laba penjualan efek obligasi	1.571.597	19.993	Gain on sale of bonds
Laba penjualan efek lainnya	-	15	Gain on sale of other securities
Sub jumlah	1.571.597	20.008	Sub total
Jumlah	1.784.165	114.226	Total

36. PROVISI DAN KOMISI SELAIN KREDIT – BERSIH

36. COMMISSIONS AND FEES FROM TRANSACTIONS OTHER THAN LOANS - NET

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Transaksi ekspor - impor	53.084	58.921	Export - import transactions
Asuransi	28.003	44.560	Insurance
Kiriman uang	4.030	10.547	Money transfers
Lainnya - bersih	13.755	16.668	Others - net
Jumlah	98.872	130.696	Total

37. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

37. OTHER OPERATING REVENUES - OTHERS

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku	367.747	505.456	Recovery of loans previously w ritten-off
Pendapatan jasa administrasi	311.531	444.303	Administration fees
Jasa bank lainnya	98.054	97.664	Other service fees
Pendapatan komisi (Catatan 57)	42.709	151.404	Commissions revenue (Note 57)
Lainnya	290.254	236.627	Others
Jumlah	1.110.295	1.435.454	Total

Pendapatan operasional lain-lainnya antara lain terdiri dari hasil jasa kustodian, pendapatan administrasi buku cek/giro dan dividen yang diterima.

Other operating revenues consist of custodial services fees, cheque book fees and dividends received.

38. BEBAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI / 38. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan			**Financial Assets**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Measured at amortized cost
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 8)	(11.646)	-	Placement w ith Bank Indonesia and other banks (Note 8)
Efek-efek (Catatan 9)	(8.837)	270.550	Securities (Note 9)
Kredit (Catatan 12)	1.948.995	789.589	Loans (Note 12)
Tagihan anjak piutang (Catatan 13b)	77.666	3.911	Factoring receivables (Note 13b)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 11)	(19.713)	-	Securities purchased under agreement to resell (Note 11)
Piutang sew a pembiayaan (Catatan 13a)	15.042	(32.123)	Finance lease receivables (Note 13a)
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 14)	591.159	447.909	Consumer financing receivables (Note 14)
Tagihan akseptasi (Catatan 15)	(2.578)	-	Acceptances receivables (Note 15)
Sub jumlah	2.590.088	1.479.836	Subtotal
Diukur pada nilai w ajar melalui penghasilan komprehensif lain			Measured at fair value through other comprehensive income
Efek-efek (Catatan 31)	80.590	-	Securities (Note 31)
Jumlah	2.670.678	1.479.836	Total
Aset Lain-lain (Catatan 19)			**Other Assets (Note 19)**
Piutang lain - lain	25.891	69.563	Other Receivables
Komitmen dan Kontinjensi (Catatan 26)	(11.147)	-	**Commitment and Contigencies (Note 26)**
Jumlah	2.685.422	1.549.399	**Total**
Aset Non Keuangan (Catatan 19)			**Non Financial Assets (Note 19)**
Agunan diambil alih	(2.888)	49.101	Foreclosed properties
Jumlah	2.682.534	1.598.500	**Total**

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / 39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Penyusutan dan amortisasi	481.998	335.020	Depreciation and amortization
Pemeliharaan dan perbaikan	178.475	169.222	Repairs and maintenance
Komunikasi	158.180	166.711	Communication
Peralatan dan kebutuhan kantor	104.477	127.846	Office supplies and stationaries
Pajak	76.616	84.499	Taxes
Sew a	57.150	124.883	Rental
Honorarium	54.913	60.645	Honorarium
Premi asuransi	52.785	53.026	Insurance premium
Iklan	40.288	56.137	Advertising
Representasi dan sumbangan	14.734	23.123	Representation and donations
Lainnya	618.512	675.302	Others
Jumlah	1.838.128	1.876.414	Total

Termasuk dalam beban umum dan administrasi lainnya adalah biaya peralatan teknologi, biaya transportasi, biaya pengiriman, biaya *outsourcing*, biaya eksekusi dan lelang jaminan, biaya ijin dan perpanjangannya.

Included in others general and administrative expenses are expenses for technology equipment, transport, courier, outsourcing fee, collateral execution and auction fee, permits and its extension.

40. BEBAN TENAGA KERJA

40. PERSONNEL EXPENSES

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Gaji dan tunjangan	1.820.439	1.814.546	Salaries and benefits
Gratifikasi dan bonus	175.148	189.982	Gratuities and bonuses
Pendidikan dan pelatihan	16.080	37.744	Training and education
Lainnya	50.846	67.749	Others
Jumlah	2.062.513	2.110.021	Total

Gaji dan bonus atas kelompok direksi, dewan komisaris, komite audit dan pejabat eksekutif yang termasuk dalam gaji dan tunjangan dan gratifikasi dan bonus diatas adalah sebagai berikut:

Salaries and bonuses of directors, commissioners, audit committee and executive officers included in salaries and benefit and gratuities and bonuses above are as follows:

2020	Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits Rp Juta/ Rp Million	Bonus/ Bonuses Rp Juta/ Rp Million	Beban manfaat pensiun/ Pension benefits Rp Juta/ Rp Million	Beban manfaat karyawan/ Post-employment benefits Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Dewan Komisaris	4	4.221	355	-	-	4.576	Board of Commissioners
Direksi	9	37.190	14.217	4.824	52	56.283	Directors
Anggota Komite Audit	2	417	25	-	-	442	Audit Committee Members
Pejabat eksekutif	87	78.688	21.708	15.238	1.085	116.719	Executive officers
Jumlah	102	120.516	36.305	20.062	1.137	178.020	Total

2019	Jumlah Pejabat/ Number of Officers	Gaji dan Tunjangan/ Salaries and Benefits Rp Juta/ Rp Million	Bonus/ Bonuses Rp Juta/ Rp Million	Beban manfaat pensiun/ Pension benefits Rp Juta/ Rp Million	Beban manfaat karyawan/ Post-employment benefits Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Dewan Komisaris	4	3.491	278	-	-	3.769	Board of Commissioners
Direksi	11	37.285	2.654	4.985	117	45.041	Directors
Anggota Komite Audit	1	303	48	-	-	351	Audit Committee Members
Pejabat eksekutif	85	74.848	19.579	15.297	1.243	110.967	Executive officers
Jumlah	101	115.927	22.559	20.282	1.360	160.128	Total

41. BEBAN OPERASIONAL LAIN – LAINNYA

41. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Beban premi penjaminan (Catatan 51)	283.608	275.335	Deposit insurance premium paid (Note 51)
Beban pungutan Otoritas Jasa Keuangan	102.604	95.321	Financial Service Authority fee expense
Lainnya	905.562	239.061	Others
Jumlah	1.291.774	609.717	Total

42. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Grup terdiri dari:

42. INCOME TAX

Tax expense of the Group consist of the following:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Pajak kini			Current tax
Bank	(787.100)	(976.097)	The Bank
Entitas anak			Subsidiaries
CFI	(27.638)	(135.808)	CFI
PDSB	(5.177)	(9.389)	PDSB
Jumlah	(819.915)	(1.121.294)	Total
Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode lalu Bank	-	-	Adjustment for current tax of prior period The Bank
Pajak tangguhan			Deferred tax
Bank	(140.079)	12.839	The Bank
Entitas anak			Subsidiaries
CFI	13.672	10.737	CFI
PDSB	(1.265)	400	PDSB
Jumlah	(127.672)	23.976	Total
Jumlah	(947.587)	(1.097.318)	Total

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.071.792	4.595.617	Income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak - entitas anak	(67.103)	(508.893)	Income before tax - subsidiaries
Laba sebelum pajak - Bank	4.004.689	4.086.724	Income before tax - Bank
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai	59.150	177.593	Allowance for impairment losses
Beban imbalan pasca kerja	8.515	11.356	Post-employment benefit costs
Beban pensiun	78.772	80.398	Pension costs
Penyusutan aset tetap	15.004	(72.324)	Depreciation of premises and equipment
Biaya emisi obligasi subordinasi	3.085	5.004	Subordinated bond issuance costs
Biaya emisi obligasi	9.679	8.924	Bond issuance costs
Kenaikan perubahan nilai wajar efek diperdagangkan yang belum direalisasi	(46.232)	(74.239)	Unrealized gain (loss) from changes in fair value of trading securities
Pendapatan komisi	(240.792)	(120.395)	Commission income
Biaya peralatan teknologi	7.198	34.910	Expenses for technology equipment
Biaya peralatan teknologi kredit mikro	28	130	Expenses for micro loan technology equipment
Jumlah	(105.593)	51.357	Total

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Beban (manfaat) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non deductible expenses (non taxable income):
Representasi, sumbangan dan denda	16.998	23.566	Representation, donations and penalties
Kenikmatan kepada karyawan	5.025	6.658	Employees' benefits in kind
Hasil sewa	(15.041)	(16.837)	Rental income
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(24.994)	(38.291)	Equity in net income of associates
Lainnya	(303.359)	(208.790)	Others
Jumlah	(321.371)	(233.694)	Total
Laba Kena Pajak Bank	3.577.725	3.904.387	Taxable Income - Bank

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The computations of current tax expense and current tax payable are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Beban pajak kini	787.100	976.097	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar di muka:			Prepaid income tax:
Pasal 25	(785.079)	(844.425)	Article 25
Utang Pajak Kini - Bank (Catatan 25)	2.021	131.672	Current Tax Payable - Bank (Note 25)

Bank menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan badan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00013/206/16/091/18 tanggal 29 Agustus 2018 atas pajak penghasilan tahun 2016 sebesar Rp 216.430 juta dan denda sebesar Rp 86.572 juta. Bank telah membayar dan mencatat kekurangan pembayaran pajak berikut dendanya.

The Bank received corporate income tax underpayment assessment letter from Directorate General of Taxation No. 00013/206/16/091/18 dated August 29, 2018 regarding income tax year 2016 amounting to Rp 216,430 million and penalty amounting to Rp 86,572 million. The Bank has paid and recorded the underpayment and its penalty.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bank mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak tahun 2016 melalui surat No. 701/DIR/EXT/2019. Atas surat permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengabulkan pengurangan sebesar Rp 160.387 juta atas surat ketetapan pajak tahun 2016 melalui Surat Keputusan No. KEP-00543/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 8 Mei 2020. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 77 juta dikompensasikan sebagai pengurang pajak lainnya, sedangkan sisanya sebesar Rp 160.310 juta ditransfer langsung ke rekening Bank. Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut pada Juni 2020.

On December 20, 2019, the Bank submitted a request for reduction or cancellation of 2016 tax assessment letter through the letter No. 701/DIR/EXT/2019. Upon the request letter submitted by the Bank, Directorate General of Taxation has approved the reduction of 2016 tax assessment letter by Rp 160,387 million through Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-00543/NKEB/WPJ.19/2020 dated May 8, 2020. The refund was compensated to other taxes of Rp 77 million and received in cash of Rp 160,310 million. The bank received the refund of in June 2020.

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Bank mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak tahun 2016 kedua melalui surat No. 391/DIR/EXT/2020 sejumlah Rp 134.308 juta. Permohonan tersebut, telah ditolak melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 29 Desember 2020. Pada tanggal 20 Januari 2021, Bank telah mengajukan surat gugatan no. 017/DIR/EXT/21 ke Pengadilan Pajak.

On August 4, 2020, the Bank submitted second request of reduction or cancellation for 2016 tax assessment letter to Directorate General of Taxation through letter No. 391/DIR/EXT/2020 on the remaining Rp 134,308 million. Such request has been rejected by Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 dated December 29, 2020. On January 20, 2021, the Bank file letter No. 017/DIR/EXT/21 to the tax court on this matter.

Bank menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan badan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00014/206/17/091/19 tanggal 30 September 2019 atas pajak penghasilan tahun 2017 sebesar Rp 368.257 juta. Bank telah membayar dan mencatat kekurangan pembayaran pajak tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bank mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tahun 2017 tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat No. 699/DIR/EXT/2019. Atas surat keberatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan seluruhnya keberatan Bank sejumlah Rp 360.586 juta melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01454/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 17 Desember 2020. Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut pada 23 Maret 2021.

The Bank received corporate income tax underpayment assessment letter from Directorate General of Taxation No. 00014/206/17/091/19 dated September 30, 2019 regarding income tax year 2017 amounting to Rp 368,257 million. The Bank has paid and recorded the underpayment.

On December 20, 2019, the Bank submitted an objection letter on the 2017 tax assessment letter to Directorate General of Taxation through letter No. 699/DIR/EXT/2019. The Directorate General of Taxation granted the objection of Rp 360,586 million in full through Decision Letter of Directorate General of Taxation No. KEP-01454/KEB/WPJ.19/ 2020 dated December 17, 2020. The Bank received the refund on March 23, 2021.

Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain

Income tax recognized in other comprehensive income

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Manfaat (beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:			Arising on income and expense recognized in other comprehensive income:
Surplus revaluasi aset tetap	30.309	(78.692)	Revaluation of premises and equipment
Keuntungan (kerugian) aktuarial (Catatan 44)	44.566	(27.507)	Remeasurement of defined benefit obligation (Note 44)
Revaluasi aset keuangan tersedia untuk dijual	(528.189)	(5.959)	Changes in fair value of AFS securities
Jumlah	(453.314)	(112.158)	Total
Reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi			Reclassification from equity to profit or loss
Berkaitan dengan aset keuangan tersedia untuk dijual	(10.807)	550	Relating to AFS securities
Jumlah pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(464.121)	(111.608)	Total income tax recognized in other comprehensive income

Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2020 Rp Juta/ Rp Million	Efek penerapan PSAK 71/ Impact of implementation PSAK 71	Efek perubahan tarik pajak/ Impact of change in tax rate: ke laba rugi/ to profit or loss Rp Juta/ Rp Million	Efek perubahan tarik pajak/ Impact of change in tax rate: ke penghasilan komprehensif lain/ to other comprehensive income Rp Juta/ Rp Million	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the year Rp Juta/ Rp Million	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income Rp Juta/ Rp Million	31 Desember/ December 31, 2020 Rp Juta/ Rp Million	
Bank								The Bank
Cadangan kerugian penurunan nilai	101.578	661.450	(91.564)		13.013		684.477	Allowance for impairment losses
Liabilitas imbalan pasca kerja	22.673	-	(4.999)	2.278	1.873	(615)	21.210	Post-employment benefits obligations
Beban pensiun	177.056	-	(24.160)	2.914	17.330	44.702	217.842	Pension costs
Penyusutan aset tetap	(100.415)	-	12.050	-	3.301	-	(85.064)	Depreciation of premises and equipment
Surplus revaluasi aset tetap	(250.258)	-	-	30.031	-	278	(219.949)	Revaluation of premises and equipment
Biaya emisi obligasi subordinasi	(4.210)	-	505	-	679	-	(3.026)	Subordinated bond issuance costs
Biaya emisi obligasi	(5.790)	-	695	-	2.129	-	(2.966)	Bond issuance costs
Biaya peralatan teknologi	8.728	-	(1.047)	-	1.584	-	9.265	Expenses for technology equipment
Biaya peralatan teknologi kredit mikro	32	-	(4)	-	6	-	34	Expenses for micro loan technology equipment
Pendapatan komisi	60.198	-	(7.224)	-	(52.974)	-	-	Commission income
Penurunan (kenaikan) perubahan nilai wajar efek diperdagangkan dan tersedia untuk dijual yang belum direalisasi	(15.987)	-	(1.100)	3.066	(10.171)	(542.113)	(566.305)	Unrealized loss (gain) from changes in fair value of trading and available-for-sale securities
Jumlah	(6.395)	661.450	(116.848)	38.289	(23.230)	(497.748)	55.518	Total
Entitas anak								Subsidiaries
CFI	31.371	-	(601)	(2.911)	14.272	(1.957)	40.174	CFI
PDSB	6.576	-	(1.111)	316	(154)	(110)	5.517	PDSB
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	31.552	661.450	(118.560)	35.694	(9.112)	(499.815)	101.209	Total Deferred Tax Assets

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp Juta/ Rp Million	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the year Rp Juta/ Rp Million	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income Rp Juta/ Rp Million	31 Desember/ December 31, 2019 Rp Juta/ Rp Million	
Bank					The Bank
Cadangan kerugian penurunan nilai	57.179	44.399	-	101.578	Allowance for impairment losses
Liabilitas imbalan pasca kerja	21.235	2.839	(1.401)	22.673	Post-employment benefits obligations
Beban pensiun	183.734	20.099	(26.777)	177.056	Pension costs
Penyusutan aset tetap	(82.334)	(18.081)	-	(100.415)	Depreciation of premises and equipment
Surplus revaluasi aset tetap	(171.566)	-	(78.692)	(250.258)	Revaluation of premises and equipment
Biaya emisi obligasi subordinasi	(5.461)	1.251	-	(4.210)	Subordinated bond issuance costs
Biaya emisi obligasi	(8.021)	2.231	-	(5.790)	Bond issuance costs
Biaya peralatan teknologi	-	8.728	-	8.728	Expenses for technology equipment
Biaya peralatan teknologi kredit mikro	-	32	-	32	Expenses for micro loan technology equipment
Pendapatan komisi	90.297	(30.099)	-	60.198	Commission income
Penurunan (kenaikan) perubahan nilai wajar efek diperdagangkan dan tersedia untuk dijual yang belum direalisasi	8.034	(18.560)	(5.461)	(15.987)	Unrealized loss (gain) from changes in fair value of trading and available-for-sale securities
Jumlah	93.097	12.839	(112.331)	(6.395)	Total
Entitas anak					Subsidiaries
CFI	19.621	10.737	1.013	31.371	CFI
PDSB	6.466	400	(290)	6.576	PDSB
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	119.184	23.976	(111.608)	31.552	Total Deferred Tax Assets

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amount computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.071.792	4.595.617	Income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak - entitas anak	(67.103)	(508.893)	Income before tax - subsidiaries
Laba sebelum pajak - Bank	4.004.689	4.086.724	Income before tax - Bank
Tarif pajak yang berlaku	881.032	1.021.681	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(70.701)	(58.423)	Tax effect of nontaxable income
Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode lalu Bank	116.848	-	Adjusment for current tax of prior period The Bank
Beban Pajak - Bank	927.179	963.258	Tax Expense - Bank
Beban Pajak - entitas anak			Tax Expenses - subsidiaries
CFI	13.966	125.071	CFI
PDSB	6.442	8.989	PDSB
Jumlah	947.587	1.097.318	Total

43. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

43. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic/diluted earnings per share attributable to the owners of the Bank is based on the following data:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Laba bersih			Net income
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian:			Earnings for computation of basic/diluted earnings per share:
Laba bersih	3.103.248	3.316.841	Net income
Jumlah Saham (dalam angka penuh)	Lembar/ Shares	Lembar/ Shares	Numbers of Shares (in full amount)
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar/dilusian	24.087.645.998	24.087.645.998	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic/diluted earnings per share

44. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Bank menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dengan akta No. 25 tanggal 15 Agustus 1981 dari notaris Hendra Karyadi, S.H., yang disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat No. S-879/MK.11/1983 tanggal 15 Desember 1983, Bank mendirikan Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pan Indonesia Bank (YDJHT PIB).

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Bank tanggal 4 Januari 1994 telah menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan YDJHT PIB menjadi Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank (DPK PIB). Penyesuaian nama menjadi DPK PIB maupun peraturannya telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusannya No. Kep-069/KM.17/1994 tanggal 4 April 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1994.

DPK PIB mengelola program pensiun manfaat pasti yang memberikan jaminan hari tua bagi seluruh karyawan yang telah pensiun atau, bila yang bersangkutan meninggal dunia, kepada janda-janda/duda-duda dan anak-anak mereka di bawah usia 21 tahun atau belum menikah.

44. PENSION PLAN AND OTHER POST-EMPLOYMENT BENEFITS

a. Defined Benefits Pension Plan

The Bank established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The Bank established Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pan Indonesia Bank (YDJHT PIB), based on Deed No. 25 dated August 15, 1981 of notary Hendra Karyadi, S.H., which is approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. S-879/MK.11/1983 dated December 15, 1983.

Based on the Extraordinary Meeting of the Bank's Stockholders on January 4, 1994, the stockholders agreed and decided to change the name of YDJHT PIB into Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank (DPK PIB). The change in the name and its regulation was approved by the Minister of Finance of Republic of Indonesia through Decision Letter No. Kep-069/KM.17/1994 dated April 4, 1994, and is published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 10, 1994.

DPK PIB manages the Bank's defined benefit pension program, which provides pension benefits to the employees when they retire or, in case of death, to their widows/widowers and their children below 21 years old or their unmarried children.

Pendanaan DPK PIB terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan sebesar 3% dari gaji pokok.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur kepada Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan perumahan. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan *real estate* untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

DPK PIB is funded by contributions from both the employer and its employees. Employees contributions amounted to 3% of their basic salaries.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the Board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas program pensiun imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respects of the defined benefit plan are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Diakui pada laba rugi			Recognized in profit or loss
Biaya jasa kini	179.001	171.421	Current service cost
Beban bunga	246.347	245.289	Interest cost
Ekspektasi pengembalian investasi	(194.934)	(186.465)	Expected return on assets
Jumlah	230.414	230.245	Total
Diakui pada penghasilan komprehensif lain			Recognized in other comprehensive income
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto			Remeasurement on the net-defined benefit obligation
Kerugian aktuarial	203.192	(107.107)	Actuarial loss
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	433.606	123.138	Total recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income

Rekonsiliasi liabilitas manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Pension benefits obligation reconciliation is as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	708.223	734.933	Beginning balance of the year
Beban pensiun tahun berjalan	230.414	230.245	Pension expense during the year
Beban pensiun pada penghasilan komprehensif lain	203.192	(107.107)	Expense recognized in other comprehensive income
Iuran pensiun dibayar tahun berjalan	(151.642)	(149.848)	Pension contributions paid for the year
Saldo akhir tahun	990.187	708.223	Ending balance of the year

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup berasal dari kewajiban atas program pensiun untuk posisi 31 Desember 2020 dan 2019 dari aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the Group's obligation in respect of the defined benefit plan as of December 31, 2020 and 2019 based on the latest actuarial report of an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo were, as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Nilai kini liabilitas	3.524.336	3.027.451	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	(2.534.149)	(2.319.228)	Fair value of plan assets
Liabilitas bersih	990.187	708.223	Net liabilities

Mutasi nilai kini aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai wajar aset program	2.319.228	2.010.317	Beginning fair value of plan assets
Kontribusi pemberi kerja	151.642	149.848	Contributions from the employer
Pendapatan bunga atas aset program	194.934	186.465	Interest income on plan assets
Imbal hasil aset program	(96.056)	(579)	Return on plan assets
Kontribusi dari peserta program	20.174	19.936	Contributions from plan participants
Pembayaran manfaat	(55.773)	(46.759)	Benefits paid
Saldo akhir nilai wajar aset program	2.534.149	2.319.228	Ending fair value of plan assets

Mutasi nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of defined benefit obligation were as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai kini liabilitas	3.027.451	2.745.250	Beginning present value of obligation
Biaya jasa kini kotor	199.176	191.356	Gross current service cost
Pembayaran manfaat	(55.773)	(46.759)	Benefits paid
Beban bunga	246.347	245.289	Interest cost
Pengaruh perubahan asumsi aktuarial	107.135	(107.685)	Effect of changes in actuarial assumption
Saldo akhir nilai kini liabilitas	3.524.336	3.027.451	Ending present value of obligation

Nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

The fair value of the plan assets at the end of the reporting period for each category are as follows.

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Kas dan setara kas	591.167	248.068	Cash and cash equivalents
Instrumen ekuitas	557.838	648.014	Equity instruments
Instrumen utang	1.048.801	1.086.282	Debt instruments
Perumahan	134.177	134.177	Real estate
Derivatif	88.643	93.137	Derivatives
Lain-lain	113.523	109.550	Others
Jumlah	2.534.149	2.319.228	Total

Nilai wajar instrumen ekuitas, utang dan derivatif di atas ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian di pasar aktif sedangkan nilai wajar perumahan tidak didasarkan pada harga pasar kuotasian di pasar aktif. Dana pensiun memiliki kebijakan untuk menggunakan *swap* tingkat bunga (*interest rate swap*) sebagai lindung nilai terhadap eksposur risiko suku bunga. Kebijakan ini telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan sebelumnya. Eksposur mata uang asing sepenuhnya dilindungi dengan menggunakan kontrak berjangka valuta asing.

The fair values of the above equity, debt instruments and derivatives are determined based on quoted market prices in active markets whereas the fair values of properties are not based on quoted market prices in active markets. It is the policy of the fund to use interest rate swaps to hedge its exposure to interest rate risk. This policy has been implemented during the current and prior years. Foreign currency exposures are fully hedged by the use of the forward foreign exchange contracts.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 227.492 juta (meningkat sebesar Rp 239.844 juta) pada tanggal 31 Desember 2020 dan berkurang sebesar Rp 176.452 juta (meningkat sebesar Rp 203.780 juta) pada tanggal 31 Desember 2019.

- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp 205.880 juta (turun sebesar Rp 203.190 juta) pada tanggal 31 Desember 2020 dan naik sebesar Rp 177.262 juta (turun sebesar Rp 157.403 juta) pada tanggal 31 Desember 2019.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 227,492 million (increase by Rp 239,844 million) as of December 31, 2020 and decrease by Rp 176,452 million (increase by Rp 203,780 million) as of December 31, 2019.

- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 205,880 million (decrease by Rp 203,190 million) as of December 31, 2020 and increase by Rp 177,262 million (decrease by Rp 157,403 million) as of December 31, 2019.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the consolidated statements of financial position.

The key actuarial assumptions used for the calculation of pension benefits are as follows:

	2020	2019	
Tabel mortalitas	TMI 4 (2019)	TMI 3 (2011)	Mortality table
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age
Kenaikan gaji per tahun	10,00%	10,00%	Salary increase rate per annum
Tingkat diskonto per tahun	7,50%	8,20%	Discount rate per annum
Tingkat pengembalian aset program per tahun	7,50%	8,20%	Expected return on plan assets per annum
Formula perhitungan manfaat pensiun	2,5% x masa kerja x gaji/ 2.5% x years of service x salary		Pension benefits formula

b. Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas dan beban imbalan pasca kerja terdiri atas:

b. Employee Benefits

Employee benefits liabilities and expenses are as follows:

	2020			2019			
	Liabilitas/ Liabilities Rp Juta/ Rp Million	Beban/ Expenses Rp Juta/ Rp Million	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income Rp Juta/ Rp Million	Liabilitas/ Liabilities Rp Juta/ Rp Million	Beban/ Expenses Rp Juta/ Rp Million	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income Rp Juta/ Rp Million	
Bank	96.402	22.571	(2.798)	90.685	17.423	(5.606)	**Bank**
Entitas anak							**Subsidiaries**
PDSB	20.008	6.075	(726)	16.665	8.003	(1.367)	PDSB
CFI	61.303	22.677	(10.301)	60.027	14.105	4.052	CFI
Jumlah	177.713	51.323	(13.825)	167.377	39.531	(2.921)	Total

Bank

Bank menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 7.815 dan 8.113 karyawan masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Bank

The Bank calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits is 7,815 and 8,113 in 2020 and 2019.

The details of post-employment benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Diakui pada laba rugi			Recognized in of profit or loss
Biaya jasa kini	8.761	8.905	Current service cost
Biaya bunga	6.898	7.153	Interest cost
Kelebihan pembayaran	6.670	934	Excess payment
Pengakuan masa kerja lalu	242	431	Recognition of past services
Jumlah	22.571	17.423	Total
Diakui pada penghasilan komprehensif lain			Recognized in of other comprehensive income
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto			Remeasurement on the net-defined benefit obligation
Keuntungan aktuarial	(2.798)	(5.606)	Actuarial gain
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	19.773	11.817	Total recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income

Rekonsiliasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit obligations reconciliation is as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	90.685	84.936	Beginning balance for the year
Beban imbalan pasca kerja tahun berjalan	22.571	17.423	Post-employment benefit expense during the year
Beban imbalan pasca kerja pada penghasilan komprehensif lain	(2.798)	(5.606)	Post-employment benefit recognised in other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(7.386)	(5.134)	Benefits paid
Kelebihan pembayaran manfaat	(6.670)	(934)	Excess benefit paid
Saldo akhir tahun	96.402	90.685	Ending balance for the year

Mutasi nilai kini liabilitas yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of past service liability in the current year were as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal nilai tunai liabilitas yang tidak didanai	90.685	84.936	Beginning present value of past service liability
Biaya jasa kini kotor	8.761	8.905	Gross current service cost
Beban bunga	6.898	7.153	Interest cost
Pembayaran manfaat	(7.386)	(5.134)	Benefits paid
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	242	431	Liability assumed due to recognition of past services
Kerugian (keuntungan) pada kewajiban aktuarial	(2.798)	(5.606)	Actuarial loss (gain) on obligation
Saldo akhir nilai tunai liabilitas yang tidak didanai	96.402	90.685	Ending present value of past service liability

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 4.940 juta (meningkat sebesar Rp 6.655 juta) pada tanggal 31 Desember 2020 dan berkurang sebesar Rp 5.007 juta (meningkat sebesar Rp 5.622 juta) pada tanggal 31 Desember 2019.

- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp 5.491 juta (turun sebesar Rp 4.006 juta) pada tanggal 31 Desember 2020 dan naik sebesar Rp 4.582 juta (turun sebesar Rp 4.167 juta) pada tanggal 31 Desember 2019.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 4,940 million (increase by Rp 6,665 million) as of December 31, 2020 and decrease by Rp 5,007 million (increase by Rp 5,622 million) as of December 31, 2019.

- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 5,491 million (decrease by Rp 4,006 million) as of December 31, 2020 and increase by Rp 4,582 million (decrease by Rp 4,167 million) as of December 31, 2019.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo aktuaris independen dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

The cost of providing employee benefits is calculated by an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, using the following key assumptions:

	2020	2019	
Tabel mortalitas	TMI 4 (2019)	TMI 3 (2011)	Mortality table
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	10%	10%	Salary increment rate per annum
Tingkat diskonto per tahun	7,50%	8,20%	Discount rate per annum
Tingkat ketidakmampuan	10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate		Disability rate
Tingkat pengunduran diri	15% sampai dengan usia 25 tahun dan menurun secara linear setiap tahun sampai 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 15% up to age 25 and reducing linearly up to 1% at age 45 and beyond; and thereafter		Resignation rate
Porsi dari pengunduran diri dipercepat	100% dari usia pengunduran diri normal/100% at normal retirement age		Proportion of early retirement
Usia dari pengunduran diri normal	55 tahun/years		Normal retirement age

45. JASA KUSTODIAN

Bank memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan surat keputusan No. KEP-01/PM/Kstd/2002 tanggal 28 Februari 2002. Penyimpanan efek nasabah pada kustodian dalam bentuk obligasi tanpa warkat adalah sebesar Rp 12.544.530 juta dan USD 81,79 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 12.321.017 juta dan USD 92,14 juta pada tanggal 31 Desember 2019, sementara penyimpanan dalam bentuk saham tanpa warkat sebesar 4.584.068.554 lembar dan 4.305.566.954 lembar masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Jasa kustodian yang dilakukan kustodian Bank antara lain meliputi jasa penyelesaian transaksi efek, jasa penyimpanan dan pengadministrasian efek serta jasa-jasa kustodian lainnya misalnya mengurus/menagihkan hak-hak yang melekat pada efek antara lain pembayaran kupon, dividen, bonus, pembayaran efek saat jatuh waktu dan lain-lainnya.

45. CUSTODIAL SERVICES

The Bank has obtained approval to act as a custodian bank from BAPEPAM through Decision Letter No. KEP-01/PM/Kstd/2002 dated February 28, 2002. The securities which are administered by the Bank, consist of scriptless bonds amounting to Rp 12,544,530 million and USD 81.79 million as of December 31, 2020 and Rp 12,321,017 million and USD 92.14 million as of December 31, 2019, and securities in the form of scriptless shares consisting of 4,584,068,554 shares and 4,305,566,954 shares as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The custodial services offered by the Bank consist of, among others, handling the settlement of securities transaction, safekeeping and administration of securities, and other related services such as corporate actions, and payments of coupon, dividends, bonus payments, payments of securities at maturity date and others.

46. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI

Sifat Berelasi

a. Perusahaan-perusahaan di bawah ini yang merupakan pihak yang berelasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang dijelaskan pada Catatan 3f.

- PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Verena Multi Finance Tbk
- PT Panin Dai-Ichi Life Tbk
- PT Multi Amana Gemilang
- PT Amana Jaya
- PT Terminal Builders

b. ANZ National Bank Ltd. (Melbourne dan Wellington) dan PT Bank ANZ Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang pemegang saham utamanya sama dengan Bank.

c. PT Panin Financial Tbk merupakan pemegang saham Bank.

d. PT Paninvest Tbk merupakan pemegang saham PT Panin Financial Tbk.

e. DPK PIB adalah perusahaan yang didirikan oleh Bank untuk mengelola program pensiun manfaat pasti Bank, seperti yang dibahas pada Catatan 44.

Transaksi Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup juga mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Giro pada bank lain dan penerimaan bunga (Catatan 7 dan 33).

2. Pemberian kredit dan penerimaan bunga (Catatan 12 dan 33).

3. Penempatan dana dari pihak-pihak yang berelasi dalam bentuk simpanan, simpanan dari bank lain dan pembayaran bunga (Catatan 20, 21 dan 34).

4. Grup memberikan tunjangan untuk kelompok manajemen kunci, diungkapkan di Catatan 40.

5. Dana Pensiun Grup, dikelola oleh DPK PIB diungkapan di Catatan 44.

6. Sewa gedung dari Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank, PT Panin Financial Tbk, PT Multi Amana Gemilang, PT Amana Jaya dan PT Terminal Builders.

46. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

a. The companies below are related parties as mentioned in Note 3f.

- PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Verena Multi Finance Tbk
- PT Panin Dai-Ichi Life Tbk
- PT Multi Amana Gemilang
- PT Amana Jaya
- PT Terminal Builders

b. ANZ National Bank Ltd. (Melbourne and Wellington) and PT Bank ANZ Indonesia are the companies with the same majority stockholder as the Bank.

c. PT Panin Financial Tbk is a shareholder of the Bank.

d. PT Paninvest Tbk is a shareholder of PT Panin Financial Tbk.

e. DPK PIB is an entity established by the Bank to manage the Bank's defined benefit pension program, as discussed in Note 44.

Transactions with Related Parties

In the course of business, the Group entered into certain transactions with related parties. These transactions included, among others, the following:

1. Demand deposits with other banks and receipt of interest (Notes 7 and 33).

2. Granting of loans and receipt of interest (Notes 12 and 33).

3. Placements of funds by related parties in the form of deposits, deposits from other banks and payment of interest (Notes 20, 21 and 34).

4. The Group provides benefits to the key management personnel as disclosed in Note 40.

5. The Group's post-employment benefit is managed by DPK PIB, as disclosed in Note 44.

6. The Group provides rentals of buildings from Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank, PT Panin Financial Tbk, PT Multi Amana Gemilang, PT Amana Jaya and PT Terminal Builders.

7. PT Verena Multi Finance Tbk, PT Paninvest Tbk dan PT Panin Sekuritas Tbk menyewa ruang-ruang kantor.

7. The Group obtained a lease of office spaces from PT Verena Multi Finance Tbk, PT Paninvest Tbk and PT Panin Sekuritas Tbk.

Persentase giro pada bank lain, kredit dan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pihak yang berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

The percentage of demand deposits with other banks, loans and accrued interest receivables from related parties to total assets are as follows:

	2020		2019		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Giro pada bank lain (Catatan 7)					Demand deposits with other banks (Note 7)
ANZ National Bank Ltd., Melbourne	736.786	0,338	27.191	0,013	ANZ National Bank Ltd., Melbourne
ANZ National Bank Ltd., Wellington	25.753	0,012	12.104	0,006	ANZ National Bank Ltd., Wellington
Kredit (Catatan 12)					Loans (Note 12)
Manajemen kunci	926.684	0,425	987.250	0,467	Key management
Aset lain-lain (Catatan 19)					Other assets (Note 19)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	3.570	0,001	5.570	0,003	Accrued interest receivables
Jumlah	1.692.793	0,776	1.032.115	0,489	Total

Persentase simpanan, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan pendapatan diterima dimuka dari pihak yang berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

The percentage of deposits, deposits from other banks, securities issued and income received in advance from related parties to total liabilities are as follows:

Persentase pendapatan bunga, beban bunga, beban sewa dan beban asuransi kepada pihak yang berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga, beban bunga, serta beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The percentage of interest income, interest expense, rental expense and insurance expense from related parties to total interest income, total interest expense, and total general and administrative expense are as follows:

	2020		2019		
	Rp Juta/ Rp Million	%	Rp Juta/ Rp Million	%	
Pendapatan bunga	87.481	0,554	57.609	0,335	Interest income
Beban bunga	53.105	0,720	30.148	0,344	Interest expense
Beban sewa dan asuransi	14.588	0,793	67.290	3,571	Rental expense and insurance expense

47. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN TUNAI VALUTA ASING

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah nosional pembelian dan penjualan tunai valuta asing yang belum diselesaikan terdiri atas:

47. SPOT TRANSACTIONS

As of December 31, 2020, the notional amount outstanding of unsettled spot exchange contracts are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	
Pembelian tunai valuta asing		**Unsettled spot purchase transactions**
Dollar Amerika Serikat	70.250	United States Dollar
Penjualan tunai valuta asing		**Unsettled spot sale transactions**
Dollar Amerika Serikat	70.475	United States Dollar

48. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank dan Entitas Anak yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

48. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Commitment and contingency transactions in the business activities of Bank and its Subsidiaries has credit risk as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Komitmen			**Commitments**
Liabilitas Komitmen			Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	35.634.276	40.531.727	Unused facilities
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	713.654	708.977	Outstanding irrevocable Letters of Credit (L/C) for export and import
Jumlah Liabilitas Komitmen	36.347.930	41.240.704	Total Commitment Liabilities
Kontinjensi			**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi			Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	419.658	1.148.480	Past due interest revenues
Liabilitas Kontinjensi			Contingent Liabilities
Bank Garansi	912.024	781.808	Bank Guarantee
Standby L/C	228	117	Standby L/C
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	912.252	781.925	Total Contingent Liabilities
Jumlah Liabilitas Kontinjensi - Bersih	1.331.910	1.930.405	Total Contingent Liabilities - Net
Lainnya			Others
Kredit hapus buku (Catatan 12)	7.829.024	5.349.180	Loans writen - off (Note 12)

a. Berikut adalah perubahan nilai tercatat atas komitmen dan kontinjensi dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020:

a. The following shows the changes in the carrying amount of commitments and contingencies based on amortized cost classification on a stage basis for the year ended December 31, 2020:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal PSAK 71	41.069.015	18.104	75.158	860.351	42.022.628	Balance at beginning of the year
Pengalihan ke:						Transfer to :
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	284.731	(122.038)	(162.693)	-	-	- 12-Months Expected Credit Losses (Stage 1)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(9.226)	9.330	(104)	-	-	- Lifetime ECL - Not Credit Impaired (Stage 2)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(6.975)	(6)	6.981	-	-	- Lifetime ECL - Credit Impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	41.337.545	(94.610)	(80.658)	860.351	42.022.628	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	873.481	(3.613)	(206.839)	-	663.029	Remeasurement of the carrying value
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	4.386.620	4	-	1.082.499	5.469.123	New commitments and contingencies
Komitmen dan kontinjensi baru yang dihentikan pengakuannya	(9.972.892)	(1.724)	(59.631)	(860.351)	(10.894.598)	Commitments and contingencies derecognized
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(4.712.791)	(5.333)	(266.470)	222.148	(4.762.446)	Total additions/(decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	36.624.754	(99.943)	(347.128)	1.082.499	37.260.182	Ending Balance

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not Applying PSAK 71

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi:

b. Movements of expected credit losses on commitments and contingencies:

	2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah *)	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	-	Balance at beginning of the year
Penerapan PSAK 71	47.151	847	17.962	-	65.960	Adoption of PSAK 71
Saldo awal PSAK 71	47.151	847	17.962	-	65.960	Balance at beginning of the year PSAK 71
Pengalihan ke:						Transfer to :
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	2.025	(526)	(1.499)	-	-	- 12-Months Expected Credit Losses (Stage 1)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(80)	82	(2)	-	-	- Lifetime ECL - Not Credit Impaired (Stage 2)
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(57)	(4)	61	-	-	- Lifetime ECL - Credit Impaired (Stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	49.039	399	16.522	-	65.960	Balance at beginning of the year after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	1.146	492	(342)	-	1.296	Remeasurement of the carrying value
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	5.709	1	-	-	5.710	New commitments and contingencies
Komitmen dan kontinjensi baru yang dihentikan pengakuannya	(5.727)	(191)	(12.552)	-	(18.470)	Commitments and contingencies derecognized
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.128	302	(12.894)	-	(11.464)	Total additions/(decreases) for the current year
Saldo akhir tahun	50.167	701	3.628	-	54.496	Ending Balance

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) Not Applying PSAK 71

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya komitmen dan kontinjensi.

Management believes that the allowance for impairment losses on commitment and contigencies is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible commitments and contigencies.

49. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

49. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Posisi aset dan liabilitas dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

The balance of assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Aset			**Assets**
Kas	62.130	55.364	Cash on hand
Giro pada Bank Indonesia	646.898	1.752.562	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.978.274	735.589	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.015.876	2.088.837	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	2.259.451	2.566.579	Securities
Kredit	6.887.316	9.584.206	Loans
Piutang sewa pembiayaan	41.921	43.007	Finance lease receivables
Tagihan akseptasi	1.043.880	790.416	Acceptances receivable
Aset lain-lain	51.145	73.817	Other assets
	14.986.891	17.690.377	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(48.444)	(84.701)	Allowance for impairent losses
Jumlah Aset	14.938.447	17.605.676	Total Assets
Liabilitas			**Liabilities**
Liabilitas segera	85.790	4.668	Liabilities payable immediately
Simpanan	14.083.947	14.060.672	Deposits
Simpanan dari bank lain	2.446	1.418.527	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	1.046.215	792.751	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	-	832.762	Borrowings
Liabilitas lain-lain	147.365	135.114	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	15.365.763	17.244.494	Total Liabilities
Jumlah Aset (Liabilitas) Bersih	(427.316)	361.182	Total Net Assets (Liabilities)

Rincian aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, the details of assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		Mata Uang Asing/ Foreign Currency Dalam angka penuh/ In full amount	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp Rp Juta/ Rp Million	
ASET				Assets
Bank				Bank
Kas	USD	3.656.904	51.380	Cash
	SGD	1.013.598	10.750	
Giro pada Bank Indonesia	USD	46.037.530	646.828	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain				Demand deposits with other banks
Pihak berelasi	AUD	68.522.497	736.786	Related parties
	NZD	2.552.811	25.753	
Pihak ketiga	USD	41.805.137	587.362	Third parties
	EUR	11.920.693	205.446	
	SGD	11.499.919	121.970	
	JPY	810.702.813	110.231	
	AUD	4.866.333	52.325	
	GBP	2.373.468	45.125	
	CAD	3.149.745	34.587	
	HKD	17.250.718	31.263	
	CNY	11.727.781	25.297	
	CHF	133.900	2.129	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	USD	79.000.000	1.109.950	Placements with Bank Indonesia and other banks
	SGD	49.000.000	519.703	
	AUD	25.000.000	268.812	
	GBP	3.000.000	57.037	
	CNY	20.000.000	43.140	
	EUR	1.000.000	17.234	
Efek-efek	USD	144.844.357	2.035.063	Securities
	EUR	12.952.126	223.223	
	JPY	8.570.804	1.165	
Kredit	USD	486.880.132	6.840.666	Loans
	SGD	4.398.440	46.650	
Tagihan akseptasi	USD	66.452.184	933.653	Acceptances receivables
	JPY	544.975.207	74.100	
	EUR	1.147.955	19.784	
	GBP	859.608	16.343	
Aset lain-lain	USD	3.406.167	47.857	Other assets
	EUR	174.455	3.007	
	Lainnya/Others		281	
Sub jumlah - Bank			14.944.900	Sub total - Bank
Entitas anak				Subsidiaries
Giro pada Bank Indonesia	USD	5.000	70	Demand deposits with Bank Indonesia
Piutang sewa pembiayaan	USD	2.983.687	41.921	Finance lease receivables
Sub jumlah - Entitas anak			41.991	Sub total - Subsidiaries
Cadangan kerugian penurunan nilai	USD	(3.400.992)	(47.784)	Allowance for impairment losses
	Lainnya/Others		(660)	
			(48.444)	
Jumlah Aset			14.938.447	Total Assets

		Mata Uang Asing/ Foreign Currency Dalam angka penuh/ In full amount	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas				Liabilities
Bank				Bank
Liabilitas segera	USD	3.831.002	53.826	Liabilities payable immediately
	EUR	645.684	11.128	
	SGD	565.039	5.993	
	CNY	2.543.667	5.487	
	AUD	306.107	3.291	
	JPY	11.246.224	1.529	
	HKD	784.634	1.422	
	Lainnya/others		1.405	
Simpanan				Deposits
Pihak berelasi	USD	37.319.038	524.332	Related parties
	SGD	667.842	7.083	
	HKD	1.027.049	1.861	
	AUD	1.100.799	11.836	
	CNY	550.120	1.187	
	Lainnya/others		1.502	
Pihak ketiga	USD	799.198.714	11.228.742	Third parties
	AUD	81.340.930	874.616	
	SGD	61.257.524	649.708	
	EUR	24.607.779	424.101	
	JPY	810.954.375	110.265	
	GBP	5.535.604	105.245	
	CNY	26.497.927	57.156	
	NZD	2.555.716	25.782	
	CAD	3.197.817	35.115	
	HKD	11.098.229	20.113	
	CHF	333.503	5.303	
Simpanan dari bank lain	USD	174.094	2.446	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	USD	66.575.830	935.390	Acceptance payable
	JPY	548.568.200	74.589	
	EUR	1.154.066	19.890	
	GBP	859.772	16.346	
Liabilitas lain-lain	USD	9.637.334	135.405	Other liabilities
	JPY	73.013.714	9.928	
	EUR	67.608	1.165	
	Lainnya/others		867	
Sub jumlah - Bank			15.364.054	Sub total - Bank
Entitas Anak				Subsidiaries
Liabilitas segera	USD	121.622	1.709	Liabilities payable immediately
Jumlah Liabilitas			15.365.763	Total liabilities
Jumlah Liabilitas - Bersih			(427.316)	Total Liabilities - Net

Jumlah aset dan liabilitas moneter pada tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan kurs 29 Maret 2021 masing-masing sebesar Rp 15.315.491 juta dan Rp 15.756.555 juta.

Bank senantiasa menyiapkan beberapa perangkat dalam pengelolaan risiko mata uang asing, sebagai berikut:

- Membatasi rasio posisi devisa neto baik *limit intraday* maupun *limit overnight*.
- Menetapkan *limit* bagi *risk taking unit*, berupa *limit* kerugian, *limit counterparty* dan *limit* terkait lainnya.

The total monetary assets and liabilities on December 31, 2020 using the exchange rate on March 29, 2021 amounted to Rp 15.315.491 million and Rp 15.756.555 million, respectively.

The Bank implements certain measures in managing the foreign exchange risk as follows:

- Set up a limit for net open position ratio, both intraday and overnight.
- Set up a limit for risk taking unit, in the form of loss limit, counterparty limit, and other related limits.

Kurs yang digunakan oleh Bank untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs Reuters pada pukul 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:

The foreign exchange rates used by the Bank to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are exchange rate determined by Bank Indonesia, which is the Reuters spot rate at 4:00 PM Western Indonesian Time as follows:

Valuta asing	29 Maret/ March 29, 2021	31 Desember/December 31, 2020	31 Desember/December 31, 2019	Foreign currencies
	Rp	Rp	Rp	
1 Poundsterling Inggris	19.929,77	19.012,46	18.238,14	1 Great Britain Poundsterling
1 Euro	17.024,88	17.234,43	15.570,61	1 Euro
1 Franc Swiss	15.401,44	15.900,87	14.336,99	1 Swiss Franc
1 Dollar Amerika Serikat	14.445,00	14.050,00	13.882,50	1 United States Dollar
1 Dollar Kanada	11.454,74	10.980,86	10.639,97	1 Canadian Dollar
1 Dollar Australia	11.036,71	10.752,47	9.725,39	1 Australian Dollar
1 Dollar Singapura	10.728,21	10.606,18	10.315,05	1 Singapore Dollar
1 Dollar Selandia Baru	10.091,28	10.087,90	9.335,29	1 New Zealand Dollar
1 Ringgit Malaysia	3.486,19	3.481,17	3.391,77	1 Malaysian Ringgit
1 Yuan China	2.202,00	2.157,00	1.994,00	1 Chinese Yuan
1 Dollar Hongkong	1.858,20	1.812,30	1.782,75	1 Hongkong Dollar
1 Yen Jepang	131,74	135,97	127,81	1 Japanese Yen

50. INFORMASI SEGMEN

Grup melaporkan segmen-segmen sesuai kegiatan usaha berikut:

1. Perbankan
2. Perusahaan Pembiayaan

Sektor perbankan termasuk di dalamnya bank umum konvensional dan bank umum syariah yang dianggap sebagai segmen operasi yang sama oleh pengambil keputusan operasional. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, segmen-segmen operasi tersebut telah digabungkan ke dalam satu segmen operasi tunggal dengan mempertimbangkan industri yang sama dan sifat dari jasa yang diberikan adalah sama.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

50. OPERATING SEGMENTS

The Group's reportable segments based on the following business segment:

1. Banking
2. Multi-finance

Banking sector includes conventional commercial bank and sharia commercial bank which is considered as identical operating segment by the chief operating decision maker. For financial statements presentation purposes, these individual operating segments have been aggregated into a single operating segment taking into account the similar industry and nature of service provided.

The business segment information is as follows:

	2020				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan bunga	14.677.326	1.567.202	(59.129)	16.185.399	Interest revenues
Beban bunga	6.856.289	577.286	(55.165)	7.378.410	Interest expense
Pendapatan (beban) lainnya	3.176.968	251.471	(5.299)	3.423.140	Other revenues (expenses)
Jumlah	10.998.005	1.241.387	(9.263)	12.230.129	Total

	2020				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
HASIL					INCOME
Bagian laba bersih entitas asosiasi	24.995	-	-	24.995	Share in net income of associates
Hasil dari operasi	3.925.914	(3.277)	3.232	3.925.869	Income from operations
Laba sebelum beban pajak	4.013.055	60.533	(1.796)	4.071.792	Income before tax expense
Laba bersih				3.124.205	Net income
Penghasilan komprehensif lain				1.820.954	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif				4.945.159	Total comprehensive income
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
ASET					ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.049.998	600.000	(200.000)	8.449.998	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - bersih	43.159.604	-	(97.407)	43.062.197	Securities - net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	17.257.750	-	-	17.257.750	Securities purchased with agreements to resell - net
Kredit - bersih	116.910.025	-	(800.000)	116.110.025	Loans - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	433.449	-	433.449	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	7.175.724	-	7.175.724	Consumer financing receivables - net
Aset tetap - bersih	10.128.244	210.948	(13.107)	10.326.085	Premises and equipment - net
Aset lainnya - bersih	14.073.312	2.497.336	(1.318.786)	15.251.862	Other assets - net
Jumlah Aset	209.578.933	10.917.457	(2.429.300)	218.067.090	Total Assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Simpanan	144.334.906	-	(1.305.716)	143.029.190	Deposits
Simpanan dari bank lain	1.583.461	-	(209.956)	1.373.505	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	9.611.484	1.998.408	(97.000)	11.512.892	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima	-	3.893.526	(800.000)	3.093.526	Borrowings
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.518.308	-	-	2.518.308	Securities sold under agreement to repurchase
Liabilitas lainnya	5.024.459	280.333	(13.695)	5.291.097	Other liabilities
Obligasi subordinasi - bersih	3.788.241	-	-	3.788.241	Subordinated bonds - net
Jumlah Liabilitas	166.860.859	6.172.267	(2.426.367)	170.606.759	Total Liabilities
Pengeluaran modal	130.257	19.230	-	149.487	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	448.473	33.525	-	481.998	Depreciation and amortization
Beban kerugian penurunan nilai	1.972.776	709.758	-	2.682.534	Provision for impairment losses

	2019				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan bunga	15.982.305	1.781.233	(38.844)	17.724.694	Interest revenues
Beban bunga	8.140.621	647.575	(32.378)	8.755.818	Interest expense
Pendapatan (beban) lainnya	1.675.515	380.256	35.398	2.091.169	Other revenues (expenses)
Jumlah	9.517.199	1.513.914	28.932	11.060.045	Total

	2019				
	Bank/ Banking	Pembiayaan/ Financing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
HASIL					INCOME
Bagian laba bersih entitas asosiasi	38.291	-	-	38.291	Share in net income of associates
Hasil dari operasi	3.979.001	390.999	46.192	4.416.192	Income from operations
Laba sebelum beban pajak	4.068.067	486.666	40.884	4.595.617	Income before tax expense
Laba bersih				3.498.299	Net income
Penghasilan komprehensif lain				346.069	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif				3.844.368	Total comprehensive income
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
ASET					ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.458.848	-	(300.000)	4.158.848	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - bersih	18.003.670	-	(101.750)	17.901.920	Securities - net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.682.078	-	-	11.682.078	Securities purchased with agreements to resell
Kredit - bersih	136.869.085	-	(144.195)	136.724.890	Loans - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	741.211	-	741.211	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	9.846.112	-	9.846.112	Consumer financing receivables - net
Aset tetap - bersih	10.100.122	212.527	-	10.312.649	Premises and equipment - net
Aset lainnya - bersih	18.657.910	1.316.772	(55.020)	19.919.662	Other assets - net
Jumlah Aset	199.771.713	12.116.622	(600.965)	211.287.370	Total Assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Simpanan	131.456.093	-	(53.184)	131.402.909	Deposits
Simpanan dari bank lain	4.166.270	-	(300.883)	3.865.387	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	9.601.805	1.991.992	(100.000)	11.493.797	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima	832.762	4.956.259	(144.195)	5.644.826	Borrowings
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.910.465	-	-	4.910.465	Securities sold under agreement to repurchase
Liabilitas lainnya	5.281.094	463.544	(1.522)	5.743.116	Other liabilities
Obligasi subordinasi - bersih	3.785.156	-	-	3.785.156	Subordinated bonds - net
Jumlah Liabilitas	160.033.645	7.411.795	(599.784)	166.845.656	Total Liabilities
Pengeluaran modal	32.197	48.384	-	80.581	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	306.630	28.390	-	335.020	Depreciation and amortization
Beban kerugian penurunan nilai	1.109.240	489.260	-	1.598.500	Provision for impairment losses

Informasi Wilayah Geografis

Operasional utama Grup di wilayah Indonesia yang memiliki risiko dan imbalan relatif sama. Bank hanya memiliki kantor perwakilan di Singapura, yang kegiatan operasionalnya tidak signifikan.

Geographical Information

The principal operations of the Group in Indonesia have risks and returns which are relatively similar. The Bank owns a representative office in Singapore whose operations are insignificant.

51. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2005 pada tanggal 26 September 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan yang telah disempurnakan dengan peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.

51. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS

Based on “Lembaga Penjamin Simpanan” Regulation No. 1/PLPS/2005 dated September 26, 2005 regarding Deposit Guarantee Program, as enhanced by LPS regulation No. 1/LPS/2006 dated March 9, 2006 that stated, since September 22, 2005, the “Lembaga Penjamin Simpanan” will guarantee bank deposits including demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings deposit, and other forms of deposits, including deposits from other banks.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp 100 juta diubah menjadi maksimal Rp 2.000 juta.

Beban premi penjaminan simpanan yang dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 283.608 juta dan Rp 275.335 juta.

In accordance with Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008, starting October 13, 2008, the "Lembaga Penjamin Simpanan" guarantee deposits for each customer in a bank which was previously set at a maximum of Rp 100 million was changed to maximum of Rp 2,000 million.

The Deposit insurance premium paid up to December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 283,608 million and Rp 275,335 million, respectively.

52. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

Selain daripada yang disebutkan dalam tabel dibawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan adalah hampir sama dengan nilai wajarnya.

52. CLASIFICATION AND FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amount of financial assets and liabilities approximate their fair values.

		2020		2019		
	Catatan/ Notes	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp Juta/ Rp Million	Nilai wajar/ Fair value Rp Juta/ Rp Million	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp Juta/ Rp Million	Nilai wajar/ Fair value Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan						Financial assets
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi						Measured at amortized cost
Efek-efek	9	5.953.332	6.843.127	12.017.970	12.097.351	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivable
Kredit	12	107.721.500	113.017.219	128.929.388	132.659.816	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11	17.257.750	18.644.191	11.682.078	12.163.431	Securities purchased with agreement to resell
Piutang sewa pembiayaan	13	433.449	412.844	741.211	751.288	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	14	7.175.723	7.374.296	9.846.112	9.881.583	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang		671.273	821.606	695.031	864.945	Factoring receivables
Piutang lain-lain	19	437.891	510.373	437.440	514.812	Other receivable
Jumlah Aset Keuangan		139.650.918	147.623.656	164.349.230	168.933.226	Total Financial Assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Surat berharga yang diterbitkan	23	11.512.892	11.780.847	11.493.797	11.784.125	Securities issued
Pinjaman yang diterima	24	3.093.526	3.903.074	5.644.826	5.751.526	Borrowings
Obligasi subordinasi	27	3.788.241	3.877.286	3.785.156	3.764.172	Subordinated bonds
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	2.518.308	2.793.023	4.910.465	5.306.980	Securities sold with agreement to repurchase
Jumlah Liabilitas Keuangan		20.912.967	22.354.230	25.834.244	26.606.803	Total Financial Liabilities

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan non-keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, pendapatan yang masih akan diterima, simpanan, simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar, setoran jaminan dan liabilitas keuangan lainnya dengan suku bunga tetap yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair value of financial and non-financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- Management considers that the carrying amount of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, income receivables, deposits, deposits from other banks, securities sold with agreements to repurchase, accrued interest, margin deposits and other financial instruments with fixed interest recognized in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

- Nilai wajar efek-efek dan penyertaan saham dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar.

- Nilai wajar tagihan dan liabilitas derivatif diukur dengan menggunakan kurs kuotasi dan kurva *yield* yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow* menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan *dealer* untuk instrumen sejenis.

- Nilai wajar aset tetap ditentukan antara lain dengan menggunakan pendekatan pasar yang mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding, pendekatan pendapatan yang mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai, serta pendekatan biaya yang berdasarkan prinsip harga yang akan dibayarkan pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, risiko atau faktor lainnya.

Tabel berikut ini memberikan analisis dari nilai wajar aset dan liabilitas yang dikelompokkan ke level 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Fair value of securities and investments in shares of stocks with standard terms and conditions and traded on active markets, securities issued and subordinated bonds are determined with reference to quoted market prices.

- Fair value of derivative receivables and payables are measured using quoted forward exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.

- Fair value of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models on discounted cash flow analysis using prices from observable current market transactions and dealer quotes for similar instruments.

- Fair value of premises and equipment was determined based on market approach that consider current market value from identical or comparable assets transaction, income approach that consider the value of income that generates by the assets during its useful life and calculating the value through capitalization. Capitalization is conversion process from revenue into equity through appropriate discount rate, also cost approach that based on cost principal that will be paid by the buyer in the market for the assets that valued less than its cost to buy or to build the comparable assets, except for unfair timing factor, inconvenience, risk or other factors.

The following table provides an analysis of fair value of assets and liabilities, grouped into levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

	2020				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial asset
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Measured at fair value through other comprehensive income
Efek- efek	36.726.171	-	-	36.726.171	Securities
Penyertaan dalam bentuk saham	87.688	-	18.395	106.083	Investments in share of stock
	36.813.859	-	18.395	36.832.254	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Measured at fair value through profit and loss
Efek- efek	382.694	-	-	382.694	Securities
Tagihan derivatif	-	3.288	-	3.288	Derivative receivables
	382.694	3.288	-	385.982	
Aset non keuangan					Non-financial asset
Aset tetap					Premises and equipment
Tanah	-	6.103.494	-	6.103.494	Land
Bangunan	-	3.267.658	-	3.267.658	Buildings
Kendaraan dan inventaris kantor	-	770.156	-	770.156	Motor vehicles and furniture and fixtures
Aset tetap yang akan digunakan	-	111.192	-	111.192	Unused premises and equipments
Aset hak guna	-	73.585	-	73.585	Riight of use of assets
	-	10.326.085	-	10.326.085	

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED (Continued)

	2020				
	Level 1 Rp Juta/ Rp Million	Level 2 Rp Juta/ Rp Million	Level 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Measured at fair value through other comprehensive income
Penyertaan dalam bentuk saham	416.558	-	-	416.558	Investment on share of stock
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Efek- efek	6.843.127	-	-	6.843.127	Securities
Kredit	-	-	113.017.219	113.017.219	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.644.191	-	-	18.644.191	Securities purchased with agreement to resell
Piutang sewa pembiayaan	-	-	412.844	412.844	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	7.374.296	7.374.296	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang	-	-	821.606	821.606	Factoring receivables
Piutang lain-lain	-	-	510.373	510.373	Other receivable
	25.487.318	-	122.136.338	147.623.656	
Jumlah Aset	63.100.429	10.329.373	122.154.733	195.584.535	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Liabilities measured at fair value through profit and loss
Liabilitas derivatif	-	3.185	-	3.185	Derivative payables
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.793.023	-	-	2.793.023	Securities sold with agreement to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan	11.780.847	-	-	11.780.847	Securities issued
Pinjaman yang diterima	-	-	3.903.074	3.903.074	Borrowings
Obligasi subordinasi	3.877.286	-	-	3.877.286	Subordinated bonds
	18.451.156	-	3.903.074	22.354.230	
Jumlah Liabilitas	18.451.156	3.185	3.903.074	22.357.415	Total Liabilities

	2019				
	Level 1 Rp Juta/ Rp Million	Level 2 Rp Juta/ Rp Million	Level 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial asset
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Measured at fair value through other comprehensive income
Efek- efek	2.195.814	-	-	2.195.814	Securities
Penyertaan dalam bentuk saham	114.848	-	-	114.848	Investments in share of stock
	2.310.662	-	-	2.310.662	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Measured at fair value through profit and loss
Efek- efek	3.688.136	-	-	3.688.136	Securities
Tagihan derivatif	-	37.693	-	37.693	Derivative receivables
	3.688.136	37.693	-	3.725.829	
Aset non keuangan					Non-financial asset
Aset tetap					Premises and Equipment
Tanah	-	6.025.239	-	6.025.239	Land
Bangunan	-	3.378.816	-	3.378.816	Buildings
Kendaraan dan inventaris kantor	-	908.594	-	908.594	Motor vehicles and furniture and fixtures
	-	10.312.649	-	10.312.649	

	2019				
	Level 1 Rp Juta/ Rp Million	Level 2 Rp Juta/ Rp Million	Level 3 Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Measured at fair value through other comprehensive income
Penyertaan dalam bentuk saham	497.108	-	-	497.108	Investment on share of stock
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortized cost
Efek- efek	12.097.351	-	-	12.097.351	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivable
Kredit	-	-	132.659.816	132.659.816	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12.163.431	-	-	12.163.431	Securities purchased with agreement to resell
Piutang sewa pembiayaan	-	-	751.288	751.288	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	9.881.583	9.881.583	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang	-	-	864.945	864.945	Factoring receivables
Piutang lain-lain	-	-	514.812	514.812	Other receivable
	12.163.431	-	144.672.444	156.835.875	
Jumlah Aset	30.756.688	10.350.342	144.672.444	185.779.474	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Diperdagangkan					Trading
Liabilitas derivatif	-	37.988	-	37.988	Derivative payables
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liabilities for which fair values are disclosed
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Surat berharga yang diterbitkan	11.784.125	-	-	11.784.125	Securities issued
Pinjaman yang diterima	-	-	5.751.526	5.751.526	Borrowings
Obligasi subordinasi	3.764.172	-	-	3.764.172	Subordinated bonds
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.306.980	-	-	5.306.980	Securities sold with agreement to purchase
	20.855.277	-	5.751.526	26.606.803	
Jumlah Liabilitas	20.855.277	37.988	5.751.526	26.644.791	Total Liabilities

Pada tahun 2020 dan 2019, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari level 1 menjadi level 2, dan sebaliknya.

In 2020 and 2019, there were no transfer between level 1 to level 2, and vice versa.

53. INFORMASI LAINNYA

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 dan perubahannya POJK No. 34/OJK.03/2016 tanggal 26 September 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana bank wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* secara bertahap mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, *Capital Conservation Buffer* yang wajib dibentuk oleh Bank adalah sebesar 0,000% dan 2,500% dari ATMR.

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu masing-masing peringkat 2 (dua), maka KPMM minimum ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% pada 31 Desember 2020 dan 2019.

53. OTHER INFORMATION

a. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) on December 31, 2020 and 2019 is calculated based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016 and its amendment No. 34/POJK.03/2016 dated September 26, 2016 regarding Concerning Capital Adequacy Ratio of Commercial Bank where as is mandatory for the bank to establish Capital Conservation Buffer gradually starting from January 1, 2016 until January 1, 2019. On December 31, 2020 and 2019, Capital Conservation Buffer which should be established by the Bank amounted to 0.000% and 2.500%, respectively from Risk Weighted Assets.

Based on the Bank' risk profile, which is level 2 (two) respectively as of December 31, 2020 and 2019, therefore minimum CAR is set to 9% to less than 10% as of December 31, 2020 and 2019.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dihitung sebagai berikut:

The Bank's capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risks as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Konsolidasian			**Consolidated**
Modal Inti (Tier 1)			Core Capital (Tier 1)
Modal Inti Utama (CET 1)	44.245.628	39.203.390	Prime Core Capital (CET 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	4.165.117	4.901.343	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal	48.410.745	44.104.733	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets
ATMR untuk risiko kredit *)	141.941.552	165.643.935	for credit risk *)
ATMR untuk risiko pasar **)	1.142.874	2.489.023	for market risk **)
ATMR untuk risiko operasional ***)	20.560.175	20.290.350	for operational risk ***)
Total ATMR	163.644.601	188.423.308	Total risk weighted assets
Rasio KPMM			CAR Ratio
Rasio CET 1	27,04%	20,81%	Ratio CET 1
Rasio Tier 1	27,04%	20,81%	Ratio Tier 1
Rasio Tier 2	2,55%	2,60%	Ratio Tier 2
Rasio Total	29,58%	23,41%	Total Ratio
Rasio KPMM berdasarkan profil resiko	10,05%	9.26%	CAR ratio based on risk profile
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	Minimun Ratio Tier 1
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	Minimum Ratio CET 1
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	10,00% - 11,00%	9,00% - 10,00%	Minimum CAR based on risk profile
CET 1 untuk *Buffer*	19,53%	14,15%	CET 1 for Buffer
Persentase *Buffer* yang wajib dipenuhi oleh Bank			The percentage of the Buffer that must be fulfilled by the Bank
Capital Conservation Buffer	0,000%	2,500%	Capital Conservation Buffer
Countercyclical Buffer	0,000%	0,000%	Countercyclical Buffer
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik	1,000%	1,000%	Capital Surcharge for Systemic Bank

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Bank			**Bank**
Modal Inti (Tier 1)			Core Capital (Tier 1)
Modal Inti Utama (CET 1)	38.853.812	35.510.388	Prime Core Capital (CET 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	3.998.053	4.733.796	Supplementary Capital (Tier 2)
Total Modal	42.851.865	40.244.184	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets
ATMR untuk risiko kredit *)	126.252.602	147.454.226	for credit risk *)
ATMR untuk risiko pasar **)	1.185.219	2.383.658	for market risk **)
ATMR untuk risiko operasional ***)	17.585.250	17.325.588	for operational risk ***)
Total ATMR	145.023.071	167.163.472	Total risk weighted assets
Rasio CAR			CAR Ratio
Rasio CET 1	26,79%	21,24%	Ratio CET 1
Rasio Tier 1	26,79%	21,24%	Ratio Tier 1
Rasio Tier 2	2,76%	2,83%	Ratio Tier 2
Rasio Total	29,55%	24,07%	Total Ratio
Rasio KPMM berdasarkan profil resiko	10,11%	8,00%	CAR ratio based on risk profile
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	Minimun Ratio Tier 1
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	Minimum Ratio CET 1
CAR minimum berdasarkan profil risiko	9,00% - 10,00%	9,00% - 10,00%	Minimum CAR based on risk profile
CET 1 untuk *Buffer*	19,44%	15,24%	CET 1 for Buffer
Persentase *Buffer* yang wajib dipenuhi oleh Bank			The percentage of the Buffer that must be fulfilled by the Bank
Capital Conservation Buffer	0,000%	2,500%	Capital Conservation Buffer
Countercyclical Buffer	0,000%	0,000%	Countercyclical Buffer
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik	1,000%	1,000%	Capital Surcharge for Systemic Bank

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

*) Rasio ATMR untuk risiko kredit dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

**) Rasio ATMR untuk risiko pasar dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

***) Rasio ATMR untuk risiko operasional dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

***) *Capital Conservation Buffer* dihitung berdasarkan Kebijakan Stimulus dari OJK No. SP 37/DHMS/OJK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

On December 31, 2020 and 2019, the Bank has complied with required ratio set by Bank Indonesia for capital adequacy ratio.

*) Risk weighted assets ratio for credit risk is calculated based on Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016.

**) Risk weighted assets ratio for market risk is calculated based on Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.38/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016.

***) Risk weighted assets ratio for operational risk is calculated based on Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016.

***) Capital Conservation Buffer is calculated according to Stimulus Policy from OJK No. SP 37/DHMS/OJK/V/2020 dated May 28, 2020.

b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif dan non produktif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1,62% dan 2,51%.

c. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

Perhitungan BMPK 31 Desember 2020 disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak dalam perhitungan BMPK Bank yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020.

Perhitungan BMPK 31 Desember 2019 disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum yang mulai berlaku 1 Juni 2019. Batas Maksimum Penyediaan Dana diatur sebagai berikut :

- Kepada pihak terkait tidak melebihi 10% dari modal Bank.
- Kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait tidak melebihi 25% dari modal inti Bank.
- Kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait tidak melebihi 25% dari modal inti Bank.

Berikut ini adalah saldo penyediaan dana kepada pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):

b. The ratio of classified earning assets to total earning assets and non-earning assets as of December 31, 2020 and 2019 are 1.62% and 2.51%, respectively.

c. As of December 31, 2020 and 2019, there was no excess of Legal Lending Limit (LLL) to both related parties and non-related parties.

LLL calculation as of December 31, 2020, is prepared based on regulation No. 38/POJK.03/2019 regarding the implementation of consolidated risk management to the subsidiaries which are controlled by the Bank in the Bank's LLL calculation which is effective starting on January 1, 2020.

LLL calculation as of December 31, 2019 is prepared based on OJK regulation No. 32/POJK.03/2018 regarding Legal Lending Limit and Large Exposure for Commercial Bank which is effective starting on June 1, 2019. The maximum lending limit is as follows:

- To related parties not exceed than 10% from Bank's capital.
- To one non-related party debtor not exceed than 25% of the Bank's tier 1 capital.
- To one non-related party group debtors not exceed than 25% of the Bank's tier 1 capital.

The following are the balances of amounts with affiliates as of December 31, 2020 and 2019 in accordance with the Legal Lending Limit (LLL) regulation of Bank Indonesia:

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Giro pada bank lain	762.539	39.294	Demand deposits with other banks
Penempatan pada bank lain	-	300.274	Placement with BI and other banks
Efek-efek	99.638	101.826	Securities
Kredit	1.540.092	997.349	Loans
Penyertaan dalam bentuk saham	16.500	16.500	Investments in shares of stock
Rekening administratif	187.775	257.469	Administrative accounts
Jumlah	2.606.544	1.712.712	Total

Batas maksimum pemberian kredit kepada pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.285.187 juta dan Rp 4.024.418 juta (10% dari modal Bank).

Maximum legal lending limit to affiliates as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 4,285,187 million and Rp 4,024,418 million (10% of the Bank's capital), respectively.

54. KEHILANGAN PENGENDALIAN ATAS ENTITAS ANAK

Pada tanggal 25 Januari 2019, VMF telah menyelesaikan rangkaian proses Penawaran Umum Terbatas II melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank tidak mengeksekusi atau mengambil haknya saat saham baru diterbitkan sehingga Bank mengalami dilusi kepemilikan pada VMF dari sebelumnya memiliki 57,54% menjadi 26,15%. Bank melepaskan 31,39% saham VMF. Pemegang saham pengendali VMF beralih dari Bank Panin kepada IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) sebagai pemegang 63,63% total saham VMF.

Pada bulan Desember 2019, Bank menjual saham VMF sebanyak 62 juta lembar sehingga kepemilikan saham VMF turun dari 26,15% menjadi 25,06%.

Pada tanggal terdilusi, analisa aset dan liabilitas atas hilangnya pengendalian adalah sebagai berikut:

54. LOSSES CONTROL OF A SUBSIDIARY

On January 25, 2019, VMF has completed a series of Limited Public Offering II processes through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD). The Bank did not execute or take away its rights when the new shares were issued so that the Bank had diluted its ownership in VMF from previously owning 57.54% to 26.15%. The bank released 31.39% shares in VMF. VMF controlling shareholders switch from Bank Panin to IBJ Leasing Co. Ltd. (IBJL) as the holder of 63.63% of total shares of VMF.

On December 2019, Bank sells 62 million shares of VMF so that the Bank's ownership in VMF has reduced from 26.15% to 25.06%.

As of the date of diluted, the analysis of assets and liabilities over which control was lost is as follows:

	2019 Rp Juta/ *Rp Million*	
Aset		Assets
Kas dan setara kas	338	Cash and cash equivalents
Giro	11.663	Demand deposits
Piutang sewa pembiayaan	1.417.531	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	114.240	Other accounts receivable
Biaya dibayar dimuka	2.087	Prepaid expenses
Aset pajak tangguhan	10.070	Deferred tax assets
Aset tetap	51.509	Premises and equipment
Aset lain-lain	17.727	Other assets
Jumlah Aset	1.625.165	Total Assets
Liabilitas		Liabilities
Utang bank	816.000	Bank loans
Utang lain-lain	38.411	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	4.914	Accrued expenses
Utang pajak	1.234	Taxes payable
Jumlah Liabilitas	860.559	Total Liabilities

Penyesuaian saldo kas dan setara kas pada laporan arus kas atas hilangnya pengendalian sebesar Rp 5.308 juta.

Adjustment of cash and cash equivalent balance in the statements of cash flows due to the loss of control is Rp 5,308 million.

55. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Bank yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

55. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Banks's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows financing activities.

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	11.493.797	-	19.095	11.512.892	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	5.644.826	(2.551.300)	-	3.093.526	Borrowing - third parties
Obligasi subordinasi - bersih	3.785.156	-	3.085	3.788.241	Subordinated bonds - net
Jumlah	20.923.779	(2.551.300)	22.180	18.394.659	Total

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	11.540.723	-	(46.926)	11.493.797	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	4.748.233	1.237.698	(341.105)	5.644.826	Borrowing - third parties
Obligasi subordinasi - bersih	5.780.152	(2.000.000)	5.004	3.785.156	Subordinated bonds - net
Jumlah	22.069.108	(762.302)	(383.027)	20.923.779	Total

56. MANAJEMEN RISIKO

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Menurut surat edaran tersebut, penerapan manajemen risiko harus dilakukan pada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Bisnis Bank mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Bank adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini, mengelola posisi risiko dan menentukan alokasi modal. Bank secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terbaik.

Pengelolaan risiko di Bank mengacu pada praktik terbaik industri keuangan, dengan menyediakan kebijakan dan kerangka kerja serta struktur manajemen, perangkat dan proses yang jelas.

56. RISK MANAGEMENT

The Bank has implemented risk management procedures in accordance with the Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016 concerning The Application of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning The Application of Risk Management for Commercial Banks. According to the circular letter, the implementation of risk management must be carried out on credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.

The Bank's business involves risk taking with specific target and managed professionally. The core functions of the Bank's risk management is to identify all key risks for the Bank, measure the risks, manage the risk positions and determine the capital allocations. The Bank regularly reviews its risk management's policies and systems to adopt the changes in markets, products and best market practices.

The Bank's risk management refers to best practices of leading financial institutions, by providing defined policies and framework and also management structure, clearly defined tools and processes.

Aspek – aspek pengelolaan risiko yang efektif perlu ditanamkan dalam lingkungan Bank untuk memastikan bahwa risiko dapat ditangani secara langsung pada unit usaha yang bersangkutan. Pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab bersama di Bank dan diemban oleh seluruh karyawan di setiap lini organisasi. Bank juga membangun budaya yang menitikberatkan kesadaran seluruh karyawan akan risiko guna mendorong konsistensi dan efektivitas proses manajemen risiko Bank. Budaya tersebut dibangun dan menjadi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi (*tone from the top*).

The aspects of effective risk management need to be embedded onto the Bank's environment to ensure that risk can be directly handled by the respective business unit. Risk management is a responsibility that is shared by all employees at all level in the organization. The Bank also develop culture to all employee that emphasize on the awareness of risk to achieve consistency and effectivity in risk management process. The culture is developed and is a commitment from Board of Commissioners and Board of Directors (tone from the top).

Dengan menggunakan pendekatan *three lines of defense*, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang dimulai dengan *oversight*, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. *First Line of Defense* akan melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan, *Second Line of Defense* mengelola risiko secara independen, dan *Third Line of Defense* bertugas melaksanakan *risk assurance* dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala.

By using the three lines of defense approach, risk management functions are performed comprehensively at all levels within the organization which is started from oversight performed by Board of Commissioners and Directors. First Line of Defense will grow the business and still considering risk aspects in every decision made, Second Line of Defense is in charge of managing risk independently, and Third Line of Defense is responsible for providing risk assurance as well as monitoring and periodic evaluation.

Sejalan dengan ketentuan OJK perihal Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan, Bank juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur Risiko Terintegrasi dan anggotanya terdiri dari Direksi Bank, Direksi yang mewakili Entitas Anak serta Pejabat Eksekutif terkait yang ditunjuk. Fungsi utama Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank terkait dengan penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Bank telah membentuk fungsi Risiko Terintegrasi. Risiko Terintegrasi merupakan suatu fungsi manajemen risiko terintegrasi yang menggabungkan risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Fungsi ini dipimpin oleh Direktur Risiko Terintegrasi dan didukung penuh oleh para manajer risiko yang berpengalaman. Ini merupakan fungsi yang terpusat dan independen yang secara jelas terlepas dari semua bisnis dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap bisnis.

In line with the provisions of the OJK regarding Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, the Bank has also established an Integrated Risk Management Committee chaired by the Director of Integrated Risk and its members consist of Bank's Directors, Directors representing the Subsidiary and related Executive Officers. The main function of the Integrated Risk Management Committee is to provide recommendations to the Bank's Directors regarding the preparation, correction or improvement of the Integrated Risk Management Policy based on the results of the evaluation of the implementation. The Bank has established the Integrated Risk function. Integrated Risk is an integrated risk management function that combines credit, market, liquidity and operational risk. This function is led by the Integrated Risk Director and is fully supported by experienced risk managers. This is a centralized and independent function that is clearly independent of all businesses and has no business responsibility.

Bank terus berupaya mengembangkan fungsi manajemen risiko secara berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Dengan didukung dengan sistem informasi manajemen, maka pengelolaan risiko di internal Bank dapat dioptimalkan. Namun, Bank tetap harus mereviu keandalan sistem pengendalian internal dan sistem informasi manajemen sehingga sistem pengelolaan risiko selalu terkini.

The Bank continuously developing sustainable risk management function, also continues to develop and improve risk management system framework and integrated and comprehensive internal control. Supported by management information system, the internal risk management could be optimized internally. However, the Bank must review periodically the reliability of internal control system and management information system thus risk management system is always updated.

Sejak awal tahun 2020, penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi diberbagai daerah. Pandemi Covid-19 telah dan terus berdampak material pada bisnis di seluruh dunia dan lingkungan ekonomi tempat berbagai perusahaan beroperasi. Sejumlah wilayah tempat Bank beroperasi telah menerapkan pembatasan yang ketat terhadap pergerakan penduduk, yang mengakibatkan dampak signifikan pada kegiatan ekonomi.

Dampak terhadap Bisnis

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang telah diterima karena berkurang/ tidak adanya pendapatan yang diterima. Kondisi ini tentunya akan menjadi tantangan terhadap pertumbuhan kredit dan kualitas kredit di Bank, sehingga Bank segera melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas dan mengurangi dampak tersebut.

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 terdapat beberapa peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Regulator, antara lain sebagai berikut:

- POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Siaran pers OJK No. SP 28/DHMS/OJK/IV/2020 tentang panduan penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 untuk perbankan di masa Pandemi COVID-19 tanggal 16 April 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138/PMK.05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga/ subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, tanggal 28 September 2020.
- POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Bank telah berupaya untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mendukung program dari Regulator dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Memberikan restrukturisasi/ relaksasi kredit untuk debitur yang bisnisnya terkena dampak Covid-19;
- Melakukan *monitoring* secara rutin dan proaktif, serta menjaga hubungan yang baik dengan debitur sehingga dapat bersama-sama melewati kondisi yang sulit ini;
- Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah;
- Memantau dan menjaga tingkat likuiditas dan modal.

Since the beginning of 2020, the spread of the Covid-19 pandemic has halted most economic activities in various regions. The Covid-19 pandemic has a material impact on businesses around the world and the economic environment in which various companies operate. A number of areas in which the Bank operates have applied a strict restrictions on population movement, which have a significant impact on economic activity.

Impact on Business

The Covid-19 pandemic has been a challenge for the debtor to make repayments of loans that have been received due to the reduction/ no income received. This condition will certainly become a challenge to credit growth and credit quality in the Bank, therefore the Bank immediately takes steps to maintain stability and reduce this impact.

Related to the spread of Covid-19, there are several new regulations issued by the Regulator, as follow:

- POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 concerning The National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy as a result of the spread of Coronavirus Disease 2019 which aims to encourage optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintain financial system stability, and support economic growth.
- OJK press release No. SP 28/DHMS/OJK/ IV/2020 on the guidelines for the application of PSAK 71 and PSAK 68 for banks during the COVID-19 Pandemic on April 16, 2020.
- Regulation from the Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 138/PMK.05/ 2020 on the procedures for granting interest subsidies/ margin subsidies in order to support the implementation of the national economic recovery program on September 28, 2020.
- POJK No. 48/POJK.03/2020 dated December 3, 2020 regarding the changes of POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy as a result of the spread of Coronavirus Disease 2019.

The Bank has made some efforts to participate in maintaining financial stability and supporting Indonesia's economic growth to support the Regulator's program by taking the following steps:

- Providing credit restructuring/ relaxation for debtors whose businesses have been affected by Covid-19;
- Monitoring regularly and proactively, as well as maintaining good relationships with debtors so that they can get through this difficult condition together;
- Increase efforts to collect and settle non-performing loans;
- Monitoring and maintaining the liquidity and capital levels.

Selain itu Bank juga telah melakukan penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit dengan mengacu pada POJK 48/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK 11/2020) dan kebijakan internal terkait dengan pemberian stimulus perekonomian bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Adapun penyesuaian ketentuan restrukturisasi melalui stimulus perekonomian mencakup: Kriteria debitur terdampak, sektor usaha yang terdampak Covid-19, Kriteria penilaian kemampuan debitur, skenario *stress testing* terhadap potensi penurunan kualitas kredit diresktrukturisasi yang berdampak pada kinerja keuangan, mekanisme dan skema restrukturisasi, penetapan kualitas kredit, kewenangan memutus, monitoring, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi.

Penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 ini diharapkan dapat membantu debitur Bank serta kualitas portofolio kredit Bank senantiasa terjaga dengan baik.

Bank melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis risiko, sebagai berikut:

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Bank.

a. Pengukuran Risiko Kredit

Klasifikasi Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dilakukan berdasarkan model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan dan pengujian karakteristik arus kas kontraktual (*Solely Payment of Principal & Interest* (SPPI). Asset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
b. Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Dimulai pada 1 januari 2020, perhitungan pencadangan Bank mengacu pada PSAK 71. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit eksptektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen, berbeda dengan PSAK 55 sebelumnya yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

In addition, the Bank has also made adjustments to the provisions for the credit restructuring process by referring to POJK 48/2020 (as an adjustment to POJK 11/2020) and internal policies related to provide economic stimulus for debtors affected by the Covid-19. The adjustment of restructuring provisions through economic stimulation includes: criteria for affected debtors, business sectors affected by Covid-19, criteria for assessing debtors' ability, stress testing scenarios for potential deterioration in restructured credit that have an impact on financial performance, restructuring mechanisms and schemes, determination of credit quality, authority to decide, monitoring, reporting to regulators and accounting journals.

The adjustment of the provisions for the credit restructuring process affected by Covid-19 is expected to be able to help the debtors and the quality of the Bank's credit portfolio to be maintained properly.

The Bank manages eight types of risks as follows:

Credit Risk Management

Credit risk is the risk of financial losses should any of the Bank's customers, clients or counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank.

a. Credit Risk Measurement

Classification of Financial Assets

The classification of financial assets is based on the Bank's business model in managing financial assets and testing the characteristics of contractual cash flows (Solely Payment of Principal & Interest (SPPI). The Bank's financial assets are classified as follows:

a. Measured at fair value through profit and loss (FVTPL)
b. Measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
c. Measured at amortized cost

Measurement of Expected Credit Loss

Starting on January 1, 2020, the calculation of allowance for impairment loss refers to PSAK 71. PSAK 71 introduces the expected credit loss method in measuring financial instrument losses, which changes from the previous PSAK 55 which recognized credit losses when the credit loss event occurred, PSAK 71 required the immediate recognition of the effect of changes in expected credit losses after the initial recognition of the financial asset.

Bank juga telah menerapkan perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian mengacu pada prinsip-prinsip PSAK 71 sesuai ketentuan Regulator, dimana menghitung pencadangan Kerugian Kredit Ekspektasian secara *forward-looking*, Bank menggunakan 2 (dua) metode perhitungan, yaitu:

a. Perhitungan secara kolektif, yaitu perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara portofolio untuk lini bisnis. Pada metode ini, Bank menggunakan rating/umur tunggakan sebagai basis dalam penentuan model PD (*Probability of Default*) untuk masing-masing Debitur. Sedangkan untuk model LGD mempertimbangkan nilai *Recovery* dan EAD (*Exposure at Default*) merupakan posisi semua *on balance sheet and off balance sheet.*

b. Perhitungan secara individu, untuk portofolio besar dengan kondisi yang mengalami penurunan nilai dan eksposur di atas Rp 15 Miliar. Perhitungan ini menggunakan pendekatan DCF (*Discounted Cash Flow*) atau pendekatan agunan (*Collateral*) yang dihitung secara individu.

Kriteria Penentuan *Stage*

PSAK 71 mensyaratkan Bank untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (*stage* 1, *stage* 2, dan *stage* 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk asset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (*stage* 1) dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (*stage* 2 dan *stage* 3).

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Bank membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal.

Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR).

Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar (memiliki tunggakan lebih dari 90 hari) atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

The Bank has also implemented the calculation of Expected Credit Loss which refers to the principles of PSAK 71 that is in accordance with the Regulators' provisions, which calculates the allowance for Expected Credit Loss in a forward-looking approach, the Bank uses 2 (two) calculation methods, as follow:

a. Collective calculation, which is the calculation of expected credit loss by Portfolio for business lines of the Bank. In this method, the Bank uses the rating/age of arrears as the basis for determining the PD (Probability of Default) model for each debtor. Meanwhile, the LGD model considers the value of recovery and EAD (Exposure at Default) that is including all assets on balance sheet and off balance sheet.

b. Individual calculations, for large exposure portfolios with impaired conditions and exposures above Rp 15 billion. This calculation uses the DCF (Discounted Cash Flow) or Collateral approach which is calculated in individual level.

Stage Criteria

PSAK 71 requires Banks to classify financial assets into three stages of impairment (stage 1, stage 2, and stage 3) by determining whether there is a significant increase in credit risk.

The Bank measures the allowance for impairment losses in the amount of 12 months expected credit loss for financial assets with low credit risk at the reporting date (stage 1) and lifetime expected credit loss for financial assets that experience a significant increase in credit risk (stage 2 and stage 3).

At each reporting date, the Bank assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly (SICR) since initial recognition. In conducting this assessment, the Bank compares the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition.

In general, financial assets with arrears of 30 days or more and have not experienced a impairment in value will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk (SICR).

Financial assets will only be deemed impaired and expected credit losses are recognized throughout their life, if there is observable objective evidence of impairment, such as default (having arrears of more than 90 days) or experiencing significant financial difficulties.

Informasi terkait *Forward-Looking*

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan saat ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi *forward looking* dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variable ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali debitur Bank.

Macroeconomic Variables (MEV), merupakan salah satu parameter/komponen pada perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara pendekatan *forward-looking*. Bank juga menetapkan variabel makro ekonomi secara berkala dan mengkorelasikan terhadap model-model PSAK 71. MEV yang digunakan Bank antara lain GDP Indonesia, Inflasi, 7 *days repo rate*, kurs USDIDR, harga minyak dunia dan suku bunga USD 3-month LIBOR.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (“ECL”) bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linear serta tergantung pada portofolio yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, bukan hanya variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

Kesesuaian Model dengan Kondisi Ekonomi

Untuk evaluasi kesesuaian model dengan kondisi ekonomi dilakukan *backtesting* secara berkala minimal 1 tahun sekali. Model *forward looking* dibentuk dalam kondisi normal dengan data historis pembentuknya juga data-data pada saat kondisi normal sehingga proyeksi yang dihasilkan merupakan proyeksi kondisi normal. Pada situasi diluar normal seperti yang terjadi di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit, maka model *forward-looking* yang telah dibentuk sebelumnya tidak dapat memproyeksikan kondisi dengan tepat dan memerlukan penyesuaian (*adjustment*).

Forward-Looking Information

The evolving economic environment is a determinant key of the Bank's customers' ability to fulfill their obligations as they become due. It is a basic principle of PSAK 71 that potential future losses must depend not only on the current economic health, but must also consider the possible changes in the economic environment. For example if the Bank anticipates a sharp slowdown in the world economy, the bank should create more allowance for the current time to absorb possible credit losses in the near future.

To capture the effects of changes in the economic environment, the PD model is used to calculate expected credit losses, by including forward looking information in the form of estimated values of economic variables that are likely to have an impact on the repayment ability of Bank debtors.

Macroeconomic Variables (MEV), is one of the parameters/components in calculating expected credit loss using a forward-looking approach. The Bank also determines macroeconomic variables on a regular basis and correlates them with the PSAK 71 models. The MEV used by the Bank includes Indonesian GDP, inflation, 7 days repo rate, USDIDR exchange rate, world oil price and the USD 3-month LIBOR interest rate.

The calculation of allowance for impairment losses (“ECL”) is dependent on several variables and is inherently non-linear and portfolio dependent which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of expected credit loss to changes in MEV. The Bank believes that sensitivity should be applied to all variables, not just single variables, as this is in line with the multi-variable nature of ECL calculations.

Suitability of the Model with Economic Conditions

To evaluate the suitability of the model with economic conditions, back testing is conducted periodically at least once a year. The forward looking model is formed in normal conditions with historical data forming it as well as data during normal conditions so that the resulting projection is a projection of normal conditions. In situations outside of normal, such as what happened in 2020 with the Covid-19 pandemic and the existence of a credit restructuring relaxation policy, the forward-looking model that has been formed previously cannot project conditions appropriately and requires adjustments.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bank melakukan *post model overlay* dengan melakukan analisa terhadap debitur-debitur yang terdampak pandemi Covid-19 secara signifikan dan kredit-kredit yang direstrukturisasi untuk dapat melakukan penyesuaian pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan potensi risiko kreditnya.

To overcome the situation, the Bank conducted a post model overlay by analyzing debtors who were significantly affected by the Covid-19 pandemic and restructured credits to be able to make adjustments to the formation of allowance for impairment losses in accordance with their potential credit risk.

b. Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Bank mengelola, membatasi dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit di manapun risiko tersebut teridentifikasi – secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta geografis. Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur, atau beberapa kelompok debitur, dan berdasarkan segmen geografis dan industri. Batas pemberian kredit ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi dan telaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi.

b. Risk limit control and mitigation policies

The Bank manages, limits and controls the credit risk's concentrations wherever the risk is identified - in particular, to individual counterparties and group, and industries and also geographical. The Bank determined the levels of credit risk by applying limits on the amount of risk that can be accepted related to a debtor or a group of debtors, and based on geographic and industry segments. Legal lending limits are reviewed by following the change in the market and economic conditions and periodically credit reviews and assessment of the default probability.

c. Ekposur maksimum terhadap risiko kredit (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit Grup atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

c. Maximum exposure to credit risk (net of allowance for impairment losses)

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk on financial instruments in its consolidated statements of financial position and commitments and contingencies (administrative accounts), without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

Uraian	2020	2019	Description
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Laporan posisi keuangan:			**Statements of financial position:**
Kas	1.871.377	1.338.683	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.380.915	9.013.643	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.037.909	848.558	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	8.449.998	4.158.848	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Efek-efek - bersih	1.571.304	9.018.273	Securities - net
Tagihan derivatif	3.288	37.693	Derivative receivables
Kredit - bersih	107.721.500	128.929.388	Loans - net
Tagihan anjak piutang - bersih	671.273	695.031	Factoring receivables - net
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	17.257.750	11.682.078	Securities purchased with agreements to resell - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	433.449	741.211	Finance leases receivable - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	7.175.724	9.846.112	Consumer financing receivables - net
Tagihan akseptasi - bersih	2.495.713	2.577.543	Acceptance receivables - net
Obligasi pemerintah	41.490.893	8.883.683	Government bonds
Aset lain-lain	1.750.726	1.091.148	Other assets
Sub Jumlah	195.311.819	188.861.892	Sub Total
Komitmen dan Kontinjensi:			**Commitments and Contingencies:**
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	35.634.276	40.531.727	Unused loan facilities
Bank garansi yang diterbitkan	912.252	781.925	Guarantees issued
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	713.654	708.977	Outstanding irrevocable L/C
Sub Jumlah	37.260.182	42.022.629	Sub Total
Jumlah	232.572.001	230.884.521	Total

d. Analisis risiko konsentrasi kredit

Tabel berikut ini menggambarkan rincian konsentrasi kredit Bank pada nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri:

d. Concentration of credit analysis

The following table presents the Bank's credit concentration on its carrying value before deducted by the allowance for impairment losses, categorized based on its industry sector:

	2020						
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Perdagangan besar & eceran	18.915.500	491.983	51.911	67.097	767.843	20.294.334	Trading
Industri pengolahan	18.634.976	826.654	112.268	18.085	381.085	19.973.068	Manufacturing
Rumah tangga	17.487.512	1.025.529	50.516	59.330	273.244	18.896.131	Household
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	16.065.976	664.035	197.790	33.408	688.530	17.649.739	Property, residential and others
Konstruksi	9.766.324	233.807	880	5.000	109.916	10.115.927	Construction
Perantara keuangan	8.011.324	93.110	-	-	860	8.105.294	Financial institutions
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4.381.393	1.014.556	2.267	471	89.981	5.488.668	Accommodation and food and beverages
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	3.799.508	97.191	715	449	15.637	3.913.500	Transportation, warehouse and communication
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	2.363.195	140.082	21.076	81.754	52.562	2.658.669	Community, cultural, leisure and other personal services
Listrik, gas dan air	2.332.953	-	-	781	719	2.334.453	Electricity, gas and water
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.367.091	3.427	243.308	7	8.008	1.621.841	Agrobusiness and forestry
Pertambangan dan penggalian	832.193	12.051	-	-	13.611	857.855	Mining
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	730.468	2.354	1.196	332	1.412	735.762	Health & social services
Jasa pendidikan	179.466	23.606	-	-	2.311	205.383	Education services
Perikanan	155.686	-	10.909	-	-	166.595	Fishery
Jumlah	105.023.565	4.628.385	692.836	266.714	2.405.719	113.017.219	Total

	2019						
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Perdagangan besar & eceran	23.204.424	711.529	91.526	175.200	736.495	24.919.174	Trading
Rumah tangga	21.908.812	1.301.811	92.986	71.030	535.981	23.910.620	Household
Industri pengolahan	21.563.208	275.449	6.403	422.630	313.247	22.580.937	Manufacturing
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	17.225.886	1.895.092	8.588	3.187	227.622	19.360.375	Property, residential and others
Perantara keuangan	11.762.407	5.488	-	865	5.907	11.774.667	Financial institutions
Konstruksi	9.498.852	211.411	22.937	22.941	265.735	10.021.876	Construction
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5.044.084	596.807	508	1.557	628.881	6.271.837	Accommodation and food and beverages
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.573.210	44.588	6.901	16.876	43.996	4.685.571	Transportation, warehouse and communication
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	3.095.693	252.923	6.993	5.453	97.338	3.458.400	Community, cultural, leisure and other personal services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.811.936	10.289	262	729	47.016	1.870.232	Agrobusiness and forestry
Listrik, gas dan air	1.731.750	16.615	-	-	3.688	1.752.053	Electricity, gas and water
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	972.032	6.599	1.197	1.141	15.066	996.035	Health & social services
Pertambangan dan penggalian	573.481	13.189	-	-	133.257	719.927	Mining
Jasa pendidikan	245.332	7.520	760	1.403	2.427	257.442	Education services
Perikanan	66.448	591	11.631	-	2.000	80.670	Fishery
Jumlah	123.277.555	5.349.901	250.692	723.012	3.058.656	132.659.816	Total

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai, yang dikategorikan berdasarkan area geografis operasi debitur pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The following table present the details of the Bank's credit exposure at their carrying amounts before allowance for impairment losses, categorized by the debtor's geographical area of operation as at December 31, 2020 and 2019.

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
DKI Jakarta	82.013.884	95.319.011	DKI Jakarta
Jawa Timur dan Bali	10.162.204	11.850.667	East Java and Bali
Sumatera	7.315.907	8.665.683	Sumatera
Jawa Barat	5.531.531	6.867.533	West Java
Sulawesi	2.621.929	3.310.623	Sulawesi
Jawa Tengah dan Yogyakarta	2.703.421	3.220.494	Central Java dan Yogyakarta
Kalimantan	1.682.742	2.221.716	Kalimantan
Lain-lain	985.601	1.204.089	Others
Jumlah	113.017.219	132.659.816	Total

e. Konsentrasi aset keuangan berdasarkan jenis debitur (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai).

e. Credit concentration by type of debtors (gross of allowance for impairment losses)

	2020						
	Korporasi/ Corporate Rp Juta/ Rp Million	BI dan pemerintah/ BI and government Rp Juta/ Rp Million	Bank-bank/ Other banks Rp Juta/ Rp Million	Retail/ Retail Rp Juta/ Rp Million	Lainnya/ Others Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2.380.915	2.037.952	-	-	4.418.867	Demand deposit with BI and other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.949.115	6.501.587	-	-	8.450.702	Placement with BI and other banks
Efek-efek	1.163.530	372.027	51.684	-	-	1.587.241	Securities
Tagihan derivatif	1.891	-	1.397	-	-	3.288	Derivative receivable
Kredit yang diberikan	94.375.820	-	1.677	10.949.775	7.689.947	113.017.219	Loan
Tagihan akseptasi	2.493.985	-	6.956	-	-	2.500.941	Acceptance receivable
Obligasi pemerintah	-	41.490.893	-	-	-	41.490.893	Government bonds
Aset lain-lain - bersih *)	1.957.613	17.829.334	5.167	7.052.359	846.062	27.690.535	Other assets - net *)
Komitmen dan kontinjensi	32.455.379	-	124.489	4.607.172	73.142	37.260.182	Commitments and contingencies
Jumlah	132.448.218	64.022.284	8.730.909	22.609.306	8.609.151	236.419.868	Total

	2019						
	Korporasi/ Corporate Rp Juta/ Rp Million	BI dan pemerintah/ BI and government Rp Juta/ Rp Million	Bank-bank/ Other banks Rp Juta/ Rp Million	Retail/ Retail Rp Juta/ Rp Million	Lainnya/ Others Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	-	9.013.643	848.558	-	-	9.862.201	Demand deposit with BI and other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.115.000	3.043.848	-	-	4.158.848	Placement with BI and other banks
Efek-efek	2.339.328	6.667.157	35.252	-	-	9.041.737	Securities
Tagihan derivatif	4.414	-	33.279	-	-	37.693	Derivative receivable
Kredit yang diberikan	107.402.141	-	22.001	13.130.331	12.105.343	132.659.816	Loan
Tagihan akseptasi	2.551.055	-	26.488	-	-	2.577.543	Acceptance receivable
Obligasi pemerintah	-	8.883.683	-	-	-	8.883.683	Government bonds
Aset lain-lain - bersih *)	2.365.530	8.696.429	3.140.034	9.689.840	404.318	24.296.151	Other assets - net *)
Komitmen dan kontinjensi	34.417.191	2.776.500	112.640	4.612.625	103.673	42.022.629	Commitments and contingencies
Jumlah	149.079.659	37.152.412	7.262.100	27.432.796	12.613.334	233.540.301	Total

*) Akun ini terdiri dari tagihan anjak piutang, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, efek yang dibeli

*) This account consists of factoring receivables, finance leases receivable, consumer financing receivables, securities

dengan janji dijual kembali dan aset keuangan lainnya.

f. Kualitas kredit berdasarkan kelas aset keuangan

Sebagai bagian dari manajemen risiko kredit, Bank mengadopsi kebijakan *rating* kredit untuk mengukur kualitas kredit dari aset keuangan berdasarkan *rating* eksternal dan mengembangkan sistem *rating* kredit secara internal menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

Kualitas kredit diklasifikasikan sebagai berikut:

– *High Grade*

Peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas sangat baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah.

– *Medium Grade*

Peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas yang baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah.

– *Low Grade*

Peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas yang cukup dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sedang.

– *Unrated*

Kategori ini tidak menyediakan peringkat dikarenakan ketidaktersediaan dari model-model peringkat atau risiko pada lembaga pemerintah dan/atau agen-agen yang berhubungan dengan pemerintah.

Untuk PDSB, kualitas kredit dari pinjaman yang diberikan (piutang Murabahah segmen konsumsi dan retail) dinilai berdasarkan parameter *Historical/ Behavorial* DPD (*Days Past Due*).

Penilaian dilakukan dengan menganalisa data ketepatan membayar dalam rentang waktu 6 bulan ke belakang sehingga dapat digunakan sebagai indikasi tingkat potensi risiko kredit inherennya.

Kredit *grading* atas piutang tersebut diklasifikasikan berdasarkan parameter sebagai berikut:

High Grade

- Jumlah terjadinya *past due* nihil + jumlah hari *past due* nihil

Medium Grade

purchased with agreements to resell and other financial assets.

f. Credit quality by class of financial asset

As part of its credit risk management, the Bank adopted a credit rating policy to assess the credit quality of financial assets based on the external ratings and internally developed credit rating system which uses qualitative and quantitative data.

The credit quality are defined as follows:

– High Grade

Rating in this category have an excellent capacity to meet financial commitments with very low credit risk.

– Medium Grade

Rating in this category have a good capacity to meet financial commitments with very low credit risk.

– Low Grade

Rating in this category have fairly acceptable capacity to meet financial commitments with standard credit risk.

– Unrated

This category are currently not assigned with any ratings due to unavaibility of rating models or exposures and/or government related agencies.

For PDSB, the credit quality of loans (Murabahah receivables in the consumer and retail segment) is assessed based on the Historical/ Behavorial Parameter of DPD (Days Past Due).

Assessment is conducted by analyzing at the data on timeliness of payment within the previous six-month period so that it can be used as an indication of the level of potential inherent credit risk.

Credit grading of the receivables is classified based on the following parameters:

High Grade

- Nil number of times past due + nil number of days past due

Medium Grade

- Jumlah terjadinya *past due* rendah + jumlah hari *past due* rendah

Low Grade

- Jumlah terjadinya *past due* sedang + jumlah hari *past due* rendah
- Jumlah terjadinya *past due* rendah + jumlah hari *past due* sedang

Unrated

- Jumlah terjadinya *past due* sedang + jumlah hari *past due* sedang

Untuk CFI, kualitas kredit dari piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, dan tagihan anjak piutang dinilai berdasarkan banyaknya dan jumlah hari *delay* selama masa tenor pembayaran.

Kredit *grading* atas piutang-piutang tersebut akan berdasarkan parameter yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Low number of times past due + low number of days past due

Low Grade

- Moderate number of times past due + low number of days past due
- Low number of times past due + moderate number of days past due

Unrated

- Moderate number of times past due + moderate number of days past due

For CFI, the credit quality of receivables from finance lease receivables, consumer financing receivables, and factoring receivables are assessed based on the frequency and historical number of days of delays in payments during the credit term.

The credit grades of the receivables are further classified into the followings:

	Gabungan Kualitas Kredit/Composite Grade:	
High Grade	Jumlah kali delay rendah + jumlah hari delay rendah/ Low frequency of delay + low days of delay	High Grade
Medium Grade	Jumlah kali delay sedang + jumlah hari delay sedang, jumlah kali delay rendah + jumlah hari delay sedang/ Medium frequency of delay + medium days of delay, low frequency of delay + medium days of delay Jumlah kali delay sedang + jumlah hari delay rendah/ Medium frequency of delay + low days of delay Jumlah kali delay rendah + jumlah hari delay tinggi, jumlah kali delay tinggi + jumlah hari delay rendah/ Low frequency of delay + high days of delay, high frequency of delay + low days of delay	Medium Grade
Low Grade	Jumlah kali delay sedang + jumlah hari delay tinggi, jumlah kali delay tinggi + jumlah hari delay tinggi/ Medium frequency of delay + high days of delay, high frequency of delay + high days of delay Jumlah kali delay tinggi + jumlah hari delay sedang/ High frequency of delay + medium days of delay	Low Grade

Tabel di bawah ini menyajikan kualitas aset keuangan berdasarkan kelas dengan risiko kredit, jumlah yang disajikan adalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The table shows the quality of financial assets by class with credit risk, amount presented are gross of allowance for impairments loss.

	2020							
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired				Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai Individual/ Individually Impaired	Jumlah/ Total	
	Grade tinggi/ High grade	Grade menengah/ Medium grade	Grade rendah/ Low grade	Tidak di*rating* / Unrated				
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain								Measured at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	36.726.171	-	-	-	-	-	36.726.171	Securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi								Measured at fair value through profit and loss
Efek-efek	382.694	-	-	-	-		382.694	Securities
Tagihan derivatif	3.288	-	-	-	-	-	3.288	Derivative receivables
Diukur pada biaya pendapatan diamortisasi								Measured at amortized cost
Giro pada Bank Indonesia	2.380.915	-	-	-	-	-	2.380.915	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.037.952	-	-	-	-	-	2.037.952	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.450.702	-	-	-	-	-	8.450.702	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.953.331	-	-	-	-	15.938	5.969.269	Securities
Kredit	25.939.622	62.584.722	4.748.129	12.014.563	69.954	7.660.229	113.017.219	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.259.226	-	-	-	-	-	17.259.226	Securities purchased with agreement to resell
Piutang sewa pembiayaan	192.827	35.679	165.898	39.045	-	23.167	456.616	Finance lease receivable
Piutang pembiayaan konsumen	4.263.913	1.339.100	1.275.883	306.310	-	253.899	7.439.105	Consumer financing receivables
Tagihan akseptasi	2.500.941	-	-	-	-	-	2.500.941	Acceptance receivables
Tagihan anjak piutang	103.012	600.000	-	-	-	81.851	784.863	Factoring receivables
Aset lain-lain	1.282.768	334.869	24.440	48.698		59.951	1.750.726	Other assets
Jumlah	107.477.362	64.894.370	6.214.350	12.408.616	69.954	8.095.035	199.159.687	Total

	2019							
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired				Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai Individual/ Individually Impaired	Jumlah/ Total	
	Grade tinggi/ High grade	Grade menengah/ Medium grade	Grade rendah/ Low grade	Tidak di *rating*/ Unrated				
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dimiliki hingga jatuh tempo								Held-to-maturity
Efek-efek	12.017.970	-	-	-	-	23.500	12.041.470	Securities
Tersedia untuk dijual								Available-for-sale
Efek-efek	2.195.814	-	-	-	-	-	2.195.814	Securities
Diperdagangkan								Held-for-trading
Efek-efek	3.685.498	-	-	-	-	2.638	3.688.136	Securities
Tagihan derivatif	37.693	-	-	-	-	-	37.693	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan dan piutang								Loans and receivable
Giro pada Bank Indonesia	9.013.643	-	-	-	-	-	9.013.643	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	848.558	-	-	-	-	-	848.558	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.158.848	-	-	-	-	-	4.158.848	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	12.017.970	-	-	-	-	23.500	12.041.470	Securities
Kredit	34.589.618	74.739.571	3.623.772	11.807.245	65.409	7.834.201	132.659.816	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.682.078	-	-	-	-	-	11.682.078	Securities purchased with agreement to resell
Piutang sewa pembiayaan	421.498	152.994	146.996	3.141	-	44.145	768.774	Finance lease receivable
Piutang pembiayaan konsumen	7.276.567	1.076.373	901.381	588.129	-	179.314	10.021.764	Consumer financing receivables
Tagihan akseptasi	2.577.543	-	-	-	-	-	2.577.543	Acceptance receivables
Tagihan anjak piutang	45.293	599.679	-	-	-	87.415	732.387	Factoring receivables
Aset lain-lain	882.370	461.082	23.852	63.172	192	90.557	1.521.225	Other assets
Jumlah	101.450.961	77.029.699	4.696.001	12.461.687	65.601	8.285.270	203.989.219	Total

g. Analisis umur pinjaman dan piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

g. Aging analysis of loans and receivables that would otherwise be past due or impaired.

	2020						
	Kredit/ Loans	Piutang sewa pembiayaan/ Finance lease receivables	Piutang pembiayaan komsumen/ Consumer financing receivables	Tagihan anjak piutang/ Factoring receivables	Aset lain-lain/ Other assets	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
< 30 hari	39.761	-	-	-	-	39.761	within 30 days
31 - 60 hari	985	-	-	-	-	985	31 - 60 days
61 - 90 hari	29.208	-	-	-	-	29.208	61 - 90 days
91 - 180 hari	-	-	-	-	-	-	91 - 180 days
> 180 hari	-	-	-	-	-	-	over 180 days
Jumlah	69.954	-	-	-	-	69.954	Total

	2019						
	Kredit/ Loans	Piutang sewa pembiayaan/ Finance lease receivables	Piutang pembiayaan komsumen/ Consumer financing receivables	Tagihan anjak piutang/ Factoring receivables	Aset lain-lain/ Other assets	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
< 30 hari	38.372	-	-	-	131	38.503	within 30 days
31 - 60 hari	4.102	-	-	-	36	4.138	31 - 60 days
61 - 90 hari	22.935	-	-	-	25	22.960	61 - 90 days
91 - 180 hari	-	-	-	-	-	-	91 - 180 days
> 180 hari	-	-	-	-	-	-	over 180 days
Jumlah	65.409	-	-	-	192	65.601	Total

h. Agunan

Bank menerapkan kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Praktik yang umum dilakukan adalah dengan meminta agunan sebagai jaminan. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan yang diterima antara lain adalah hipotek, tanah dan bangunan, persediaan, piutang usaha dan instrumen keuangan.

Berikut adalah tabel eksposur kredit dibanding dengan nilai jaminan:

h. Collateral

The Bank implements policies and practices to mitigate credit risk. The most common practice is to receive collateral. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific collateral that can be accepted to mitigate the credit risk. The types of collateral accepted includes; mortgage, land and building, inventories, account receivable and financial instruments.

The credit exposure compared with the value of collateral are as follows:

	2020						
	Korporasi/ Corporate	Komersial/ Commercial	Retail/ Retail	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Karyawan/ Employee	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Eksposur kredit	30.193.896	41.373.690	18.716.297	22.663.130	70.206	113.017.219	Credit exposure
Nilai jaminan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Grup	191.842.630	139.282.041	40.932.063	23.906.557	78.283	396.041.574	Collateral value based on Group's assessment
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	-	-	-	-	-	-	Total unsecured credit exposure
Porsi eksposur piutang tanpa jaminan	-	-	-	-	-	-	Unsecured portion of credit exposure
Jenis agunan							Types of collateral
Tanah dan bangunan	103.413.701	121.229.471	40.126.061	4.133.279	11.809	268.914.321	Land and buldings
Mesin-mesin	10.544.359	1.397.846	-	-	-	11.942.205	Machineries
Kendaraan	76.711	459.525	532.262	6.747.760	312	7.816.570	Vehicles
Deposito dan tabungan	93.578	3.562.511	25.729	116.075	-	3.797.893	Deposits
Garansi	-	2.690.238	103.066	973.500	-	3.766.804	Personal guarantee
Kapal	3.354.012	-	-	-	-	3.354.012	Vessels
Lainnya	74.360.269	9.942.450	144.945	11.935.943	66.162	96.449.769	Others
Jumlah	191.842.630	139.282.041	40.932.063	23.906.557	78.283	396.041.574	Total

	2019						
	Korporasi/ Corporate	Komersial/ Commercial	Retail/ Retail	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Karyawan/ Employee	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Eksposur kredit	31.035.086	50.399.825	23.384.266	27.753.763	86.876	132.659.816	Credit exposure
Nilai jaminan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Grup	188.897.267	152.502.984	51.856.411	28.074.036	93.793	421.424.491	Collateral value based on Group's assessment
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	-	-	-	-	-	-	Total unsecured credit exposure
Porsi eksposur piutang tanpa jaminan	-	-	-	-	-	-	Unsecured portion of credit exposure
Jenis agunan							Types of collateral
Tanah dan bangunan	96.179.544	132.867.891	49.861.613	3.416.246	9.724	282.335.018	Land and buldings
Mesin-mesin	9.535.999	1.521.456	335	-	-	11.057.790	Machineries
Kendaraan	38.967	555.434	1.694.850	8.893.923	312	11.183.486	Vehicles
Deposito dan tabungan	63.437	4.130.162	31.794	-	-	4.225.393	Deposits
Garansi	230.000	2.987.173	117.809	915.150	-	4.250.132	Personal guarantee
Kapal	3.321.297	-	-	-	-	3.321.297	Vessels
Lainnya	79.528.023	10.440.868	150.010	14.848.717	83.757	105.051.375	Others
Jumlah	188.897.267	152.502.984	51.856.411	28.074.036	93.793	421.424.491	Total

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dimana nilai wajar atau arus kas dimasa mendatang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat adanya pergerakan dari variabel pasar seperti: suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas. Risiko pasar melekat pada semua portofolio bank, baik posisi *trading book* maupun posisi *banking book* di neraca dan rekening administratif. Pemantauan risiko pasar senantiasa dilakukan secara rutin dan berkala baik harian, mingguan, hingga bulanan. Untuk meningkatkan fungsi pemantauan tersebut, Bank menggunakan *Guava Treasury System* yang telah terintegrasi antara *front office, middle office, dan back office.*

Market Risk Management

Market risk is the potential loss that occurs due to the movements of market factor in which the fair value or cash flow of financial instruments in the future fluctuates due to movements from market variables such as: interest rate, foreign exchange, equity price and commodity price. Market risk is inherent to all Bank's portfolio, in trading book position as well as in banking book within the balance sheet and administrative account. Market risk monitoring is constantly done routine and periodically in daily, weekly until monthly. To increase such monitoring function, the Bank utilize the Guava Treasury System which is integrated in front office, middle office and back office.

Risiko pasar dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko yang timbul akibat adanya pergerakan nilai tukar yang akan berpengaruh terhadap portofolio bank yang memiliki posisi valuta asing. Risiko nilai tukar bank tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN).

Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, batas maksimum posisi devisa neto yang dapat dipegang oleh Bank adalah sebesar 20% dari modal, mengikuti aturan dari regulator. Pada Triwulan IV 2020 Posisi devisa neto Bank sebesar Rp 918,13 miliar atau 2,21% dan berada dalam kisaran antara Rp 560,90 miliar – Rp 941,70 miliar (1,35% - 2,25% dari modal Bank). Value at Risk per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5,71 miliar atau sebesar 0,62% dari posisi devisa neto.

Tabel dibawah ini menyajikan Posisi Devisa Neto Bank per mata uang pada posisi tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Market risk is divided into two parts, specifically:

1. Exchange Rate Risk

Exchange rate risk is the risk that arise from the existence of foreign exchange rate movements that affects the bank's portfolio with foreign currency. The Bank's exchange rate risks are reflected within the Net Open Position.

To manage and mitigate exchange rate risk, the maximum net open position that Bank can withhold is as much as 20% from the Bank's capital, adhering to the regulator's provision. In the fourth quarter of 2020 the bank's Net Open Position is Rp 918.13 billion or 2.21% and within the range of Rp 560.90 billion – Rp 941.70 billion (1,35% - 2,25% of the bank's capital). Value at Risk as of December 31, 2020 is Rp 5.71 billion or 0.62% of Net Open Position.

The table below presents the Bank's Net Open Position per currency as of December 31, 2020 and 2019.

	2020			
Mata Uang	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ Liabilities, commitment and contingent liabilities	Bersih absolut/ Net absolute	Currencies
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Amerika Serikat	25.029.738	25.700.892	671.154	United States Dollar
Dollar Australia	1.944.967	1.776.931	168.036	Australian Dollar
Dollar Singapura	1.315.112	1.279.123	35.989	Singapore Dollar
Euro	907.225	896.420	10.805	Euro
Yen Jepang	322.311	333.807	11.496	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	224.537	228.530	3.993	Great Britain Poundsterling
Yuan China	127.391	123.113	4.278	Chinese Yuan
Dollar Kanada	70.041	70.711	670	Canadian Dollar
Dollar Hongkong	53.618	45.752	7.866	Hongkong Dollar
Dollar Selandia Baru	51.818	52.473	655	New Zealand Dollar
Franc Swiss	7.742	10.933	3.191	Swiss Franc
Jumlah	30.054.500	30.518.685	918.133	Total
Jumlah Modal			41.520.698	Total Capital
Persentase PDN terhadap modal			2,21%	Percentage of NOP to capital

	2019			
Mata Uang	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi/ Assets, commitment and contingent receivables	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ Liabilities, commitment and contingent liabilities	Bersih absolut/ Net absolute	Currencies
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Amerika Serikat	31.515.075	31.428.996	86.079	United States Dollar
Dollar Australia	2.549.572	2.395.376	154.196	Australian Dollar
Dollar Singapura	1.263.699	1.231.432	32.267	Singapore Dollar
Euro	903.003	905.762	2.759	Euro
Yen Jepang	511.017	522.372	11.355	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	317.945	321.827	3.882	Great Britain Poundsterling
Yuan China	142.408	143.640	1.232	Chinese Yuan
Dollar Selandia Baru	88.318	86.869	1.449	New Zealand Dollar
Dollar Kanada	67.228	68.135	907	Canadian Dollar
Dollar Hongkong	53.069	46.185	6.884	Hongkong Dollar
Franc Swiss	11.661	15.273	3.612	Swiss Franc
Jumlah	37.422.995	37.165.867	304.622	Total
Jumlah Modal			39.674.793	Total Capital
Persentase PDN terhadap modal			0,77%	Percentage of NOP to capital

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio PDN sebesar 2,21%, masih berada dibawah ketentuan regulasi Bank Indonesia yaitu dibawah 20% dari modal. Pada akhir triwulan IV 2020, komposisi PDN terbesar yang dimiliki oleh bank adalah mata uang USD sebesar 73,10% dari total PDN, diikuti oleh mata uang AUD yaitu sebesar 18,30%.

Dalam pengelolaan risiko pasar dalam *trading book* Bank menggunakan beberapa metode selain Posisi Devisa Neto, Bank juga mengukur risiko pasar dengan menggunakan *Value at Risk* (VaR), *Present Value of Basis Point* (PVBP) dan *Stop Loss Limit* serta sensitivitas nilai tukar dan suku bunga.

VaR digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar pada posisi devisa neto. VaR didefinisikan sebagai potensi kerugian maksimum yang berasal dari pergerakan pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan dan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan sensitivitas atau volatilitas dari setiap variabel instrumen. Metodologi VaR yang digunakan Bank adalah metode *parametric* (*variance covariance*) dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) sebesar 99%.

Based on the table above it can be seen that the NOP Ratio is as much as 2.21%, it is still below the Bank Indonesia regulation which is under 20% from capital. At the end of Q4 2020, the largest NOP composition held by the bank is USD currency as much as 73.10% from the total NOP, followed by AUD currency which is 18.30%.

In managing market risk within the trading book, the Bank utilize several methods besides Net Open Position, the Bank also measures market risk by using Value at Risk (VaR), Present Value of Basis Point (PVBP) and Stop Loss Limit as well as exchange value and interest rate sensitivity.

VaR is utilized to measures the exchange rate risk on Net Open Position. VaR is defined as the maximum potential loss that originates from normal market movements with confidence level and for a certain time periods based on the sensitivity or volatility of every variable instrument. VaR methodology that is being utilized by the Bank is the parametric method (variance covariance) with the confidence level of 99%.

Tabel di bawah ini menyajikan VaR Posisi Devisa Neto Bank sepanjang triwulan IV tahun 2020 dan 2019.

The table below presents VaR on the Bank's Net Open Position during the Q4 of 2020 and 2019.

Valuta asing	2020 Rata-rata/ Average	Tertinggi/ Maximum	Terendah/ Minimum	VaR akhir tahun/ Year-end VaR	Foreign currencies
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Australia	1.837	1.991	1.609	1.910	Australian Dollar
Euro	98	102	94	94	Euro
Dollar Singapura	212	235	182	220	Singapore Dollar
Dollar Amerika Serikat	4.602	5.613	3.399	4.795	United States Dollar
Poundsterling Inggris	51	64	31	64	Great Britain Poundsterling
Yen Jepang	106	122	93	102	Japanese Yen
Dollar Kanada	11	14	6	6	Canadian Dollar
Franc Swiss	34	41	28	28	Swiss Franc
Dollar Selandia Baru	6	9	1	7	New Zealand Dollar
Yuan China	29	54	4	28	China Yuan
Dollar Hongkong	39	56	20	56	Hongkong Dollar

Valuta asing	2019 Rata-rata/ Average	Tertinggi/ Maximum	Terendah/ Minimum	VaR akhir tahun/ Year-end VaR	Foreign currencies
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Dollar Australia	1.152	1.291	905	1.260	Australian Dollar
Euro	23	29	17	17	Euro
Dollar Singapura	109	137	84	84	Singapore Dollar
Dollar Amerika Serikat	1.141	1.805	308	308	United States Dollar
Poundsterling Inggris	43	48	36	45	Great Britain Poundsterling
Yen Jepang	82	100	61	85	Japanese Yen
Dollar Kanada	6	7	5	6	Canadian Dollar
Franc Swiss	25	29	22	24	Swiss Franc
Dollar Selandia Baru	7	12	2	12	New Zealand Dollar
Yuan China	5	8	3	5	China Yuan
Dollar Hongkong	14	26	1	26	Hongkong Dollar

Sensitivitas Nilai Tukar

Analisis sensitivitas nilai tukar diukur dengan kemampuan ekses modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari nilai tukar, yaitu dengan membuat asumsi perubahan/ fluktuasi nilai tukar yang berlawanan arah dengan masing-masing posisi nilai tukar. Pada posisi Desember 2020, selisih lebih modal Bank mampu meng-*cover* risiko nilai tukar sebesar 140,29 kali, turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, Bank dinilai tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar.

Exchange Rate Sensitivity

Exchange rate sensitivity analysis is measured by Bank's capital excess ability to absorb potential loss from the exchange rate, namely by creating assumption of changes/ fluctuation of exchange rate that are in opposition with each exchange rate position. In the December 2020 position, the bank's capital excess has the adequacy to cover exchange rate risk as much as 140,29 times, decreasing compared to previous quarter. Therefore, the Bank is not considered vulnerable to exchange rate movements.

2. Risiko Suku Bunga

Pengelolaan risiko pasar pada *banking book* terutama dalam pengelolaan risiko suku bunga dengan menganalisa *gap* penyesuaian suku bunga (*repricing gap*). Dalam analisa ini, baik aset maupun liabilitas dikelompokan dalam *time bucket* tertentu sesuai dengan periode penyesuaian atau waktu perubahan suku bunga (di-*reprice*) untuk menghasilkan *net repricing gap* dimana *net repricing gap* ini dapat mengukur seberapa besar pengaruh jika terjadi perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih (*net interest income*).

2. Interest Rate Risk

Market risk management within the banking book mainly in the management of interest rate risk by analyzing interest rate gap adjustment (repricing gap). In this analysis, asset as well as liabilities are grouped into a certain time bucket corresponding to the adjustment period or time of interest rate shift (reprice) to result in net repricing gap in which this net repricing gap can measure the amount of impact if there were to be a shift of interest rate against net interest income.

Tabel di bawah ini menyajikan *Repricing Profile* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga dan diurutkan berdasarkan rentang waktu suku bunga tersebut akan di-*repricing* (*floating rate*) atau sisa jangka waktu sampai dengan jatuh temponya (*fixed rate*).

The table below presents the re-pricing profile of the Bank's assets and liabilities that are sensitive to interest rates and sorted based on the time span of the interest rate will be re-pricing (floating rate) or the remaining term to maturity (fixed rate).

2020	Sampai dengan 3 bulan/ 3 month or less	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	> 1 - 2 tahun/ years	> 2 - 3 tahun/ years	> 3 - 4 tahun/ years	> 4 - 5 tahun/ years	> 5 - 6 tahun/ years	> 6 tahun/ years	Tidak di-*repricing*/ Non Repricing	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset												Assets
Penempatan pada BI	3.941.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.941.010	Placement with BI
Penempatan pada bank lain	8.122.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.122.170	Placement with other bank
Efek-efek	574.850	401.468	171.283	746.695	586.704	1.371.346	2.904.352	7.708.330	28.262.953	-	42.727.980	Securities
Tagihan derivatif	3.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.288	Derivative receivables
Kredit	26.286.078	18.342.100	25.192.700	23.216.018	7.744.364	7.522.840	2.490.564	1.977.687	7.816.576	8.884.915	129.473.841	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.259.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.259.226	Securities purchased with agreements to resell
Jumlah	56.186.622	18.743.568	25.363.983	23.962.712	8.331.068	8.894.187	5.394.916	9.686.017	36.079.529	8.884.915	201.527.515	Total
Liabilitas												Liabilities
Simpanan nasabah	16.573.524	19.940.779	21.955.182	25.307.552	28.649.994	4.795.982	5.590.435	9.368.932	10.378.840	1.597.108	144.158.328	Deposits
Simpanan dari bank lain	1.370.551	-	-	-	-	-	-	-	-	9.643	1.380.194	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.310.333	1.207.975	-	-	-	-	-	-	-	2.518.308	Securities sold with agreements to resell
Surat berharga yang diterbitkan	1.998.407	3.500.000	2.125.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	11.623.407	Securities issued
Pinjaman yang diterima	1.195.158	382.857	762.586	1.067.574	460.028	25.324	-	-	-	-	3.893.526	Borrowings
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	100.000	2.400.000	-	1.302.000	-	-	3.802.000	Subordinated bonds
Kewajiban derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.185	3.185	Derivative payables
Jumlah	21.137.640	25.133.970	26.050.743	26.375.126	33.210.021	7.221.305	5.590.435	10.670.932	10.378.840	1.609.937	167.378.950	Total

2019	Sampai dengan 3 bulan/ 3 month or less	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	> 1 - 2 tahun/ years	> 2 - 3 tahun/ years	> 3 - 4 tahun/ years	> 4 - 5 tahun/ years	> 5 - 6 tahun/ years	> 6 tahun/ years	Tidak di-*repricing*/ Non Repricing	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset												Assets
Penempatan pada BI	8.629.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.629.958	Placement with BI
Penempatan pada bank lain	4.140.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.140.479	Placement with other banks
Efek-efek	2.115.584	339.226	1.755.338	649.979	600.930	484.485	1.248.548	1.152.280	4.973.949	19.532	13.339.851	Securities
Tagihan derivatif	37.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.693	Derivative receivables
Kredit	58.487.139	4.517.857	4.916.494	32.711.453	13.248.410	6.067.089	7.853.715	4.432.479	7.514.645	8.445.876	148.195.157	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.905.080	3.186.473	1.590.525	-	-	-	-	-	-	-	11.682.078	Securities purchased with agreements to resell
Jumlah	80.315.933	8.043.556	8.262.357	33.361.432	13.849.340	6.551.574	9.102.263	5.584.759	12.488.594	8.465.408	186.025.216	Total
Liabilitas												Liabilities
Simpanan nasabah	28.412.874	16.950.278	18.329.776	21.907.535	15.105.445	5.618.727	3.092.925	4.222.426	16.959.743	1.763.514	132.363.243	Deposits
Simpanan dari bank lain	3.499.573	-	-	-	-	-	-	-	-	12.856	3.512.429	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.910.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.910.465	Securities sold with agreements to resell
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.991.992	5.625.000	-	4.000.000	-	-	-	-	11.616.992	Securities issued
Pinjaman yang diterima	1.371.097	530.363	833.116	1.385.961	931.320	320.873	-	-	-	-	5.372.730	Borrowings
Obligasi subordinasi	2.000.000	-	-	-	-	100.000	2.400.000	1.302.000	-	-	5.802.000	Subordinated bonds
Jumlah	40.194.009	17.480.641	21.154.884	28.918.496	16.036.765	10.039.600	5.492.925	5.524.426	16.959.743	1.776.370	163.577.859	Total

Bank senantiasa menjaga rasio RSA (*rate sensitive asset*) terhadap RSL (*rate sensitive liabilities*) untuk memperkecil dampak perubahan tingkat suku bunga terhadap pendapatan. Dengan demikian, Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar, ketika terjadi perubahan tingkat suku bunga secara paralel pada aset dan liabilitas.

Bank continues to maintain the ratio of RSA (rate sensitive assets) against RSL (rate sensitive liabilities) In order to minimize the impact of interest rate changes on the Bank's income. Therefore, Bank is not exposed to great interest rate risk if a parallel interest rates change were to occur on the assets and liabilities.

Sensitivitas Suku Bunga

Analisis sensitivitas suku bunga diukur dengan kemampuan ekses modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari perubahan suku bunga, yaitu dengan membuat asumsi perubahan/fluktuasi suku bunga terhadap aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Pada posisi Desember 2020, selisih lebih modal Bank mampu meng-*cover* risiko suku bunga sebesar 10,23 kali lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini diartikan bahwa bank tidak rentan terhadap perubahan suku bunga.

Interest Rate Sensitivity

Interest rate sensitivity analysis is measured by the ability of the Bank's excess capital to absorb potential loss from changes in interest rate, namely by making an assumption of interest rate changes or fluctuations on assets and liabilities that are sensitive to interest rate. In December 2020, the excess of the Bank's capital able to cover the risk of interest rate of 10.23 times, lower compared to the previous quarter. It means that Bank is not vulnerable to interest rate changes.

Bank juga menganalisis kemungkinan perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada laba rugi portofolio Bank. Tabel di bawah ini menyajikan perubahan tingkat suku bunga posisi *trading book* dan *banking book* dan pengaruhnya terhadap laba rugi maupun ekuitas Bank.

The Bank also analyzes the possibility of interest rate changes which have an impact on the Bank's portfolio of profit and loss. The table below presents the interest rate changes for trading book and banking book position and its effect on the Bank's income and equity.

	2020					
	Perubahan pada tingkat suku bunga/ Change on interest rate	Pengaruh penurunan suku bunga pada laba sebelum pajak/ Effect of decrease on interest rate to profit before tax	Pengaruh peningkatan suku bunga pada laba sebelum pajak/ Effect of increase on interest rate to profit before tax	Pengaruh penurunan suku bunga pada ekuitas/ Effect of decrease on interest rate to equity	Pengaruh peningkatan suku bunga pada ekuitas/ Effect of increase on interest rate to equity	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan						Financial assets
Efek-efek						Securities
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	93 bps	-	-	2.794.025	(2.505.425)	Measured at fair value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	43 bps	28.104	(25.048)	-	-	Measured at fair value through profit and loss
Kredit	8 bps	(109.430)	109.430	-	-	Loans
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Simpanan						Deposits
Giro	2 bps	4.134	(4.134)	-	-	Demand deposits
Tabungan	3 bps	24.879	(24.879)	-	-	Savings
Pinjaman yang diterima	0 bps	-	-	-	-	Borrowings

	2019					
	Perubahan pada tingkat suku bunga/ Change on interest rate	Pengaruh penurunan suku bunga pada laba sebelum pajak/ Effect of decrease on interest rate to profit before tax	Pengaruh peningkatan suku bunga pada laba sebelum pajak/ Effect of increase on interest rate to profit before tax	Pengaruh penurunan suku bunga pada ekuitas/ Effect of decrease on interest rate to equity	Pengaruh peningkatan suku bunga pada ekuitas/ Effect of increase on interest rate to equity	
		Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Aset keuangan						Financial assets
Efek-efek						Securities
Tersedia untuk dijual	90 bps	-	-	6.703	(6.452)	Available-for-sale
Diperdagangkan	91 bps	79.950	(72.333)	-	-	Trading
Kredit	19 bps	(115.485)	115.485	-	-	Loans
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Simpanan						Deposits
Giro	20 bps	27.248	(27.248)	-	-	Demand deposits
Tabungan	13 bps	80.564	(80.564)	-	-	Savings
Pinjaman yang diterima	22 bps	1.075	(1.075)	-	-	Borrowings

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah atau pihak lawan (*counterparty*) secara tepat waktu dengan biaya yang wajar. Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang sangat penting karena dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Bank senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap kebutuhan likuiditas dan pendanaan saat ini dan masa yang akan datang dapat terpenuhi baik dalam kondisi pasar normal maupun krisis.

Liquidity Risk Management

Liquidity risk is the risk arising if the Bank cannot meet its financial obligation to customers or counterparties in a timely manner with a reasonable cost. Liquidity risk management is very important because it has significant impact on the business sustainability. The Bank strives to ensure that every needs of liquidity and funding currently and in the foreseeable future can be met in both normal and crisis market condition.

Bank mengelola risiko likuiditas secara hati-hati (*prudent*) dengan memastikan kecukupan dana secara harian maupun di masa datang baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan liabilitas secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis.

The Bank manages prudent liquidity risk by ensuring sufficient funds on a daily and future basis both in normal conditions and crisis conditions in fulfilling timely liabilities from various available sources of funds, including ensuring the availability of high-quality liquid assets. An emergency funding plan (contingency funding plan) has been prepared to prepare the Bank in the event of a crisis

Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio dari aset likuid terhadap liabilitas lancar. Bank juga telah mengimplementasi perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sesuai dengan ketentuan LCR dari OJK.

The Bank measures and monitors liquidity risk through liquidity maturity gap analysis and liquidity ratios. One of the liquidity ratio used is the ratio of liquid assets to current liabilities. The Bank has also Implemented Liquidity Coverage Ratio (LCR) calculation in accordance with the LCR's implementation Guidance from OJK.

Pada tahun 2020, pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK diprakirakan membaik masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 8-10% sejalan dengan prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan.

In 2020, growth of loans and deposits are expected to improve to around 10-12% and 8-10%, respectively, in line with stronger economic growth. Going forward, Bank Indonesia will maintain an accommodative macroprudential policy and strengthen the coordination with other relevant authorities to maintain financial system stability and catalyse the bank intermediation function.

Pada triwulan IV 2020 likuiditas bank masih terjaga sangat baik dengan rata – rata LCR triwulan IV 2020 sebesar 275,46%.

In fourth Quarter 2020 bank liquidity has been maintained very well with average LCR in fourth quarter of 2020 amounted to 275.46%.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio dari aset likuid terhadap liabilitas lancar.

The table below presents the ratio of liquid assets to current liabilities.

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
Kas	1.871.377	1.338.683	Cash
Giro, SBI & penempatan BI lainnya	4.702.058	16.484.150	Demand deposits, BI Certificate and other BI placements
Obligasi Pemerintah	41.490.893	8.883.683	Government bonds
Penempatan pada bank lain dikurangi dengan simpanan dari bank lain	7.166.034	27.019	Placement with other banks less deposits from other banks
Jumlah aset likuid bersih	55.230.362	26.733.535	Total net liquid assets
Simpanan	143.029.190	131.402.909	Deposits
Rasio	38,61%	20,34%	Ratio

Analisis Jatuh Tempo untuk Liabilitas Keuangan

Dalam analisis ini dilakukan pengelompokan jatuh tempo untuk liabilitas keuangan berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual dari tanggal pelaporan. Untuk liabilitas keuangan dimana pihak lawan memiliki pilihan kapan suatu jumlah dibayarkan, maka liabilitas dialokasikan pada periode paling awal dimana Grup dapat diisyaratkan untuk membayar.

Maturity Analysis for Financial Liabilities

In this analysis the maturity of financial liabilities are grouped based on the remaining contractual maturity from the date of reporting. For financial liabilities where the counterparty has a choice of when an amount is paid, the liability is allocated to the earliest period for which the Group can be implied to pay.

Tabel di bawah menunjukkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas tidak terdiskonto.

The table below shows the maturity profile of the Group's financial liabilities based on undiscounted cash flows.

2020

	Lain-lain/ Others Rp Juta/ Rp Million	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less Rp Juta/ Rp Million	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months Rp Juta/ Rp Million	> 3 bulan s/d 12 bulan/ > 3 - 12 months Rp Juta/ Rp Million	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 - 2 years Rp Juta/ Rp Million	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 - 5 years Rp Juta/ Rp Million	> 5 tahun/ > 5 years Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Tanpa suku bunga:									Without interest:
Liabilitas segera	-	200.465	2.179	-	-	-	-	202.644	Liabilites payable immediately
Simpanan	-	5.971.631	1.527.732	587.908	-	-	-	8.087.271	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	2.969	-	-	-	-	-	2.969	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	2.345	408	432	-	-	-	3.185	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	447.202	1.122.115	929.034	7.804	-	-	2.506.155	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	-	12.829	319.212	14.006	-	114.659	413.008	873.714	Other liabilities
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Simpanan	-	55.810.160	-	-	-	-	-	55.810.160	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	307.094	-	-	-	-	-	307.094	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	-	Borrowings
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Simpanan	-	50.169.087	21.267.463	8.375.880	25	-	-	79.812.455	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	1.558.496	2.618	3.565	-	-	-	1.564.678	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	2.520.746	-	-	-	-	-	2.520.746	Securities sold with agreements to repurchase
Pinjaman yang diterima	-	141.889	253.269	1.145.443	1.067.574	485.352	-	3.093.527	Borrowings
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	-	3.802.000	-	3.802.000	Subordinated bonds
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.901.407	5.625.000	-	4.000.000	-	11.526.407	Securities issued
Sub jumlah	-	117.144.913	26.396.403	16.681.268	1.075.403	8.402.011	413.008	170.113.005	Sub total
Liabilitas komitmen									Commitment liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	34.711.969	91.554	88.219	139.910	74.001	265.037	263.586	35.634.276	Unused facilities
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	-	167.685	379.067	156.235	10.667	-	-	713.654	Outstanding irrevocable letters of credit (L/C) for export and import
Sub jumlah liabilitas komitmen	34.711.969	259.239	467.286	296.145	84.668	265.037	263.586	36.347.930	Sub total commitment liabilities
Liabilitas kontinjensi									Contingent liabilities
Bank garansi	-	125.084	360.082	421.548	1.595	3.715	-	912.024	Bank guarantee
Standby L/C	-	99	129	-	-	-	-	228	Standby L/C
Sub jumlah liabilitas kontinjensi	-	125.183	360.211	421.548	1.595	3.715	-	912.252	Sub total contingent liabilities
Jumlah	34.711.969	117.529.335	27.223.900	17.398.961	1.161.666	8.670.763	676.594	207.373.187	Total

2019

	Lain-lain/ Others Rp Juta/ Rp Million	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less Rp Juta/ Rp Million	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months Rp Juta/ Rp Million	> 3 bulan s/d 12 bulan/ > 3 - 12 months Rp Juta/ Rp Million	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 - 2 years Rp Juta/ Rp Million	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 - 5 years Rp Juta/ Rp Million	> 5 tahun/ > 5 years Rp Juta/ Rp Million	Jumlah/ Total Rp Juta/ Rp Million	
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Tanpa suku bunga:									Without interest:
Liabilitas segera	-	159.419	15.084	-	-	-	-	174.503	Liabilites payable immediately
Simpanan	-	6.928.881	1.415.298	386.756	-	-	-	8.730.935	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	154.924	-	-	-	-	-	154.924	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	19.338	18.650	-	-	-	-	37.988	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	365.365	1.284.117	923.445	3.231	7.335	-	2.583.493	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	-	398.051	163.743	233.548	600	626.213	267.059	1.689.214	Other liabilities
Suku bunga variabel:									Variable interest rate:
Simpanan	-	48.267.920	-	-	-	-	-	48.267.920	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	251.863	-	-	-	-	-	251.863	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	380.000	851.097	-	-	-	-	1.231.097	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	61.118	-	-	-	-	-	61.118	Other liabilities
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate:
Simpanan	-	43.292.589	23.295.578	8.508.124	4.973	-	-	75.101.264	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	3.448.705	5.314	5.438	5.226	-	-	3.464.683	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	4.917.065	-	-	-	-	-	4.917.065	Securities sold with agreements to repurchase
Pinjaman yang diterima	-	598.228	351.894	1.260.829	1.385.961	1.252.193	-	4.849.105	Borrowings
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	-	2.500.000	1.302.000	3.802.000	Subordinated bonds
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	7.616.992	4.000.000	-	11.616.992	Securities issued
Liabilitas lain-lain	-	79.571	1.473	149	-	-	-	81.193	Other liabilities
Sub jumlah	-	109.323.037	27.402.248	11.318.289	9.016.983	8.385.741	1.569.059	167.015.357	Sub total
Liabilitas komitmen									Commitment liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	39.683.925	425.930	139.216	280.153	41	-	2.462	40.531.727	Unused facilities
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	-	195.421	299.893	195.627	18.036	-	-	708.977	Outstanding irrevocable letters of credit (L/C) for export and import
Sub jumlah liabilitas komitmen	39.683.925	621.351	439.109	475.780	18.077	-	2.462	41.240.704	Sub total commitment liabilities
Liabilitas kontinjensi									Contingent liabilities
Bank garansi	-	132.715	162.105	470.853	14.824	1.311	-	781.808	Bank guarantee
Standby L/C	-	-	117	-	-	-	-	117	Standby L/C
Sub jumlah liabilitas kontinjensi	-	132.715	162.222	470.853	14.824	1.311	-	781.925	Sub total contingent liabilities
Jumlah	39.683.925	110.077.103	28.003.579	12.264.922	9.049.884	8.387.052	1.571.521	209.037.986	Total

Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dan bisnis Bank.

Pengelolaan risiko operasional sangat penting, karena kegagalan/ ketidakmampuan Bank dalam memitigasi risiko operasional dapat memicu terjadinya insiden yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, baik kerugian *financial* maupun *non-financial* atau hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity gain*). Selain itu kegagalan dalam mengelola risiko operasional dapat memicu (*trigger*) bagi terjadi 7 (tujuh) jenis risiko lainnya (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan atau risiko stratejik).

Risiko operasional ini terekspos pada seluruh aktivitas fungsional Bank, sehingga manajemen risiko operasional harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pejabat dan karyawan Bank Panin. Untuk itu maka manajemen risiko operasional harus disosialisasikan dan diinternalisasikan agar operational *risk awareness* dan *risk culture* semua pejabat dan karyawan Bank meningkat dan pada akhirnya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/ insiden operasional dan bisnis Bank.

Bank Panin sangat memperhatikan penerapan manajemen risiko operasional dan telah mengelola risiko operasional yang melekat pada semua aktivitas fungsional Bank dengan baik. Beberapa aktivitas untuk mengelola/ memitigasi risiko operasional antara lain:

a) Bank telah melakukan identifikasi, mengukur tingkat risiko, memantau dan mengendalikan semua isu risiko (*risk issue*) yang melekat (*inherent risk*) pada semua aktivitas fungsional Bank. Isu risiko yang memiliki tingkat risiko signifikan (*high risk*) telah dilakukan *treatment*/ dilengkapi dengan kontrol risiko (*risk control*) dan senantiasa dimonitor efektivitas kontrolnya.

b) Memberikan opini manajemen risiko operasional pada penerbitan produk/ aktivitas baru sesuai dengan pedoman dan standarisasi mengenai tata kelola yang sesuai dengan ketentuan dari regulator.

c) Meningkatkan *operational risk awareness*, *operational risk culture* dan kompetensi bagi semua pejabat/ karyawan melalui sertifikasi manajemen risiko dan sosialisasi/ *workshop*/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Operational Risk Management

Operational Risk is a risk occurred because of insufficiency and/ or non-functioning internal processes, human error, system failure and/ or any external events that affect the operations and business of the Bank.

Operational risk management is very important, because the failure/ inability of the Bank to mitigate operational risk that can trigger incidents that can cause losses to the bank, both financial and non-financial losses or lost opportunities to gain. In addition, the failure to manage operational risk can trigger 7 other types of risks (credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, compliance risk or strategic risk).

Operational risk management process has been applied to all functional activities the Bank, of so operational risk management must be understood and implemented by all Bank Panin officials and employees. For this reason, the operational risk management must be socialized and internalized so that the operational risk awareness and risk culture increases of all Bank official and employees and ultimately can minimize the occurrence of operational and business errors/ incidents in the Bank.

Bank Panin is very concerned about the implementation of operational risk management and has managed operational risks inherently in all functional activities of the Bank properly. Some activities to manage/ mitigate operational risk includes:

a) Bank has identified, measured the level of risk, monitored and controlled all inherent risk issues in all functional activities of the Bank. Risk issues that have significant level of risk (high risk) have been carried out with treatment/ equipped with risk control (risk control) and the effectiveness of controls is constantly monitored.

b) Providing opinions on operational risk management on the issuance of new products/ activities in accordance with guidelines and standardization regarding governance in accordance with the requirement by the regulator.

c) Increase operational risk awareness, operational risk culture and competence for all officials/ employees through risk management certification and socialization/ workshops/ training organized internally and externally.

d) Melakukan pemantauan dan pencatatan atas insiden/ kejadian kesalahan yang terkait dengan risiko operasional (disebabkan oleh *people*, *internal processes*, *systems* dan *external events*), baik yang menimbulkan kerugian financial (*loss event*) maupun yang hampir menimbulkan kerugian finansial (*near miss*).

- Pengelolaan *nearmiss* agar *risk owner* dan pihak terkait lebih *aware* atas insiden / kejadian kesalahan operasional supaya tidak terulang dan tidak menimbulkan kerugian di masa datang.
- Pengelolaan LED (*Loss Event Data*) dilakukan agar insiden kesalahan operasional yang menimbulkan kerugian financial bagi Bank dapat di-*recovery* serta tidak terulang di masa datang.
- Pengelolaan KRIs (*Key Risk Indicators*) untuk memantau dan mencegah terjadinya insiden (*early warning system*).
- Menginventarisasi kejadian *fraud* dan pemantauan tindak lanjut kejadian *fraud* di seluruh unit kerja Bank serta melaporkannya secara berkala ke regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Menyusun Laporan *Recommendation Management Action* (RMA) Direksi sebagai instruksi dari manajemen kepada *auditee* agar menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit internal/ eksternal.

f) Melakukan pemantauan terhadap Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA).

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memantau penerapan manajemen risiko operasional, Bank Panin telah mengembangkan Sistem Aplikasi *Operational Risk Assessor* (OPRA) dan Aplikasi *Risk Base Bank Rating* (RBBR) yang berbasis web. Aplikasi OPRA dilengkapi beberapa modul untuk memantau penerapan manajemen risiko operasional, antara lain: *Modul Risk & Control Self Assessment* (RCSA), *Loss Event Database*, *Nearmiss*, *Key Risk Indicators* (KRIs), *Risk Register TI* dan modul *Whistle Blowing System*.

Dengan dukungan aplikasi tersebut, Bank panin telah melakukan penilaian/ pengukuran tingkat risiko operasional secara berkala untuk memenuhi ketentuan internal dan ekternal/ regulator yang berlaku.

d) Monitor and record incidents / errors related to operational risks (caused by people, internal processes, systems and external events), both those that cause financial losses (loss event) and those that almost cause financial losses (near miss).

- Nearmiss management intended for the risk owners and related parties to be more aware of operational errors / incidents to prevent similar events and losses in the future.
- Loss Event Data (LED) management performed so that operational error incident that cause financial loss to the Bank can be recovered and will not recur in the future.
- Management of KRIs (Key Risk Indicators) to monitor and prevent incidents (early warning systems).
- Registering fraud events and monitoring the follow-ups throughout all units, and thereafter reporting them periodically to the regulator in accordance with the prevailing regulations.

e) Prepare the Recommendation Management Action (RMA) Report as instructions from management to the auditee to follow up the internal/ external audit Examination Report (LHP).

f) Monitor the Total Risk Weighted Assets (RWA) Operational Risk using the Basic Indicator Approach (BIA).

To increase effectiveness and efficiency in monitoring the implementation of operational risk management, Bank Panin has developed a web-based Operational Risk Assessor (OPRA) Application and a Bank-Based Risk Rating Bank (RBBR) Application. The OPRA application has several modules to monitor the implementation of operational risk management, including: the Risk & Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database, Nearmiss, Key Risk Indicators (KRIs), IT Risk Register and the Whistle Blowing System.

By the support from the application, Bank Panin has carried out periodic assessments/ measurements of operational risk levels to meet internal and external/ regulatory requirements.

Bank juga telah melakukan beberapa hal dalam mengantisipasi dampak dari Pandemi Covid-19 dan mendukung kebijakan pemerintah. Bank telah melakukan beberapa program protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah setempat, diantaranya:

- Sosialisasi terkait informasi dan tindakan preventif dalam menghadapi Covid-19 kepada karyawan;
- Pengaman lingkungan/ area kerja untuk karyawan dan nasabah;
- Pengaturan aktivitas kantor, seperti pelaksanaan *split operation*, *work from home*, pelaksanaan rapat/ training melalui *conference call/ video conference*, penyesuaian jam layanan, pengaturan jam kerja karyawan, dan lain-lain;
- Sterilisasi tempat kerja;
- Pemakaian masker dan *hand sanitizer*.

The Bank has also taking some actions to anticipate the impact of Covid-19 pandemic and follow the government regulations. The Bank has carried out some health protocol programs in accordance with the regulations from local government as follow:

- Socialization about the information and preventive actions in dealing with Covid-19 to employees;
- Safety environment/ work area for employees and customers;
- Arrangement of office activities, such as implementing split operations, working from home, conducting meetings/ training via conference calls/ video conferences, adjusting service hours, setting employee working hours, and others;
- Workplace sterilization;
- The use of masks and hand sanitizer.

Manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis, yang bersumber dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang dilakukan Bank tidak sesuai ketentuan yang ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Untuk memitigasi Risiko Hukum, Bank telah memiliki Biro Hukum, Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Departemen *Legal Affair*, SAM Kantor Cabang. Satuan kerja tersebut bersama unit kerja terkait bertugas melakukan proses legislasi/ memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis pengikatan perjanjian antara Bank dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank dan melakukan pemantauan terhadap potensi munculnya litigasi atau tuntutan hukum baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selain itu, Bank melakukan pendampingan hukum kepada pejabat/ petugas Bank dalam proses penyelesaian perselisihan hukum yang dihadapi Bank di pengadilan, memberikan opini hukum kepada kantor pusat dan kantor cabang serta melakukan legal reviu kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko hukum, Bank melaksanakan penilaian profil risiko hukum secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi risiko hukum secara *bankwide*.

Legal Risk Management

Legal risk is a risk due to lawsuits and/ or weaknesses of judicial aspects. The sources of legal risk include weakness of the juridical aspects that is caused by Bank's lack of commitment, absence and/ or changes in legislation which lead to a transaction that the Bank has conducted which is not in accordance with the existing provisions, and a litigation process whether arising from third-party's lawsuit against the Bank or the Bank's against any third party.

To mitigate the Legal Risk, Bank has Legal Department, Head Office Special Task Force (STKP), Legal Affairs Department, SAM Branch. The task force above together with the working unit carry out the legislative process/ ensure the suitability and adequacy of the agreement between the Bank and the counterpart by referring to the precautionary principle in order to protect the interest of the Bank and monitoring the potential for emergence of litigation or lawsuit both through the court or despite resolution outside the court.

In addition, the Bank provides legal assistance to Bank officials/ officers in the process of resolving legal disputes passed by the banks in-court and provides legal opinion to head office and branch offices and also perform legal review of contracts with third parties.

As an output of the legal risk management process, Bank conducts a quarterly risk profile of the legal risk profile of several risk indicator parameters in accordance with prevailing regulatory provisions to obtain an overview of the bankwide risk level of legal risk.

Manajemen Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Bank merumuskan dan menetapkan target dan strategi bisnis yang akan dicapai di dalam rencana bisnis (*business plan*) dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan visi dan misi Bank.

Tujuan utama Bank dalam mengelola risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Bank melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian implementasi target dan strategi bisnis dengan *business plan*, antara lain melalui pengumpulan data, analisis, pengukuran, pemantauan dan pengendalian pencapaian target aset, aset produktif, sumber dana, permodalan, laba sebelum pajak, produk/ aktivitas baru, jaringan kantor dan lainnya dibandingkan dengan realisasinya yang dilakukan secara periodik (sesuai kebutuhan).

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko stratejik, Bank melaksanakan penilaian profil risiko stratejik secara triwulan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi risiko stratejik secara *bankwide.*

Manajemen Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pengelolaan risiko reputasi yang memadai, Bank antara lain membentuk unit kerja *Call Center* untuk memberikan layanan informasi perbankan serta menerima keluhan/ pengaduan nasabah, *Corporate Secretary* yang memberikan informasi yang perlu disampaikan kepada publik atau *stakeholders* terkait aktivitas Bank, serta petugas Bank di kantor-kantor cabang yang setiap saat dapat memberikan informasi kepada nasabah.

Strategic Risk Management

Strategic Risk is a risk due to inaccuracy in making and/ or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.

Bank formulates and defines the business targets and strategies to be achieved in the business plan by considering internal and external factors in accordance with Bank's vision and mission.

The main objective of the Bank in managing strategic risk is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from inaccurate strategic decision making and failure to anticipate changes in the business environment.

Bank monitors and evaluates the suitability of the implementation of business targets and strategies with business plans, among others through data collection, analysis, measurement, monitoring and controlling achievement of asset targets, earning assets, financial resources, capital, pre-tax profit, new products/ activities, office and others compared with the realization that done periodically (as needed).

As an output of the strategic risk management process, Bank conducts a quarterly risk profile of the strategic risk profile of several risk indicator parameters in accordance with prevailing regulatory provisions to obtain an overview of the bankwide risk level of strategic risk.

Reputation Risk Management

Reputation risk is the risk due to declining levels of stakeholders “trust”, which is derived from the negative perception toward the Bank comes from negative perceptions of the Bank.

In order to fulfill the need for adequate reputation risk management, the Bank, establishes a Call Center unit to provide banking information services as well as to receive customer complaints, Corporate Secretary who provide information that needs to be conveyed to the public/ stakeholders related to Bank activities, as well as Bank officers in branch offices which at any time can provide information to the customer.

Selain itu pengendalian risiko reputasi juga dilakukan antara lain dengan melalui pemantauan yang dilakukan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary* terhadap berita di media massa terkait pemilik dan Perusahaan terkait dan mitra bisnis Bank, transparansi produk yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Regulator mengenai Transparansi Produk melalui website Bank, pengelolaan informasi Perusahaan kepada masyarakat melalui prinsip *equitable treatment* dan transparansi informasi laporan keuangan Bank kepada publik serta upaya peningkatan standar layanan nasabah dengan melakukan pelatihan *service excellence* kepada petugas Bank.

In addition, reputation risk control is carried out, among others through monitoring by the Corporate Secretary Work Unit on news in the media related to of the reputation of owners and retied companies and business partner of the Bank, transparency of products offered to customers in accordance with Regulatory Regulations regarding to Product Transparency through the Bank's website, management of Company information of the Bank's financial statements to the public as well as efforts to improve customer service standards by conducting service excellence training to Bank officers.

Sebagai *output* dari proses Pengelolaan Risiko Reputasi, Bank melaksanakan penilaian Profil Risiko Reputasi secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko Reputasi secara *bankwide*.

As an output of the Reputation Risk Management process, the Bank implements a Reputation Risk Profile assessment on a quarterly basis for several risk indicator parameters in accordance with the applicable regulatory regulations to obtain an overview of the potential level of Reputation Risk on a bankwide basis.

Manajemen Risiko Kepatuhan

Compliance Risk Management

Risiko kepatuhan dapat bersumber dari ketidakpatuhan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank sehingga dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Compliance risk may derived from non-compliance of the Bank to comply with all laws and regulations related to the Bank's business activities thus impacting the going concern of the Bank's business.

Manajemen Risiko Kepatuhan dimaksudkan untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dan bisnis Bank tidak menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The main objective of compliance risk management is to ensure the Bank's operational and business activities do not deviate or violate the prevailing standard, rules and/ or regulations.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, Bank telah memiliki Biro Kepatuhan yang senantiasa melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan dari regulator kepada satuan kerja terkait, menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan pemantauan atas sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari regulator, serta memberikan opini manajemen risiko kepatuhan pada penerbitan produk atau aktivitas baru dan Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK).

To improve compliance with the regulatory provisions, Bank has a Compliance Bureau that continues to disseminate regulations from regulators to relevant work units, submit follow-up reports on Examination Results (LHP), monitor the sanctions of financial penalty imposed on banks from regulators, and provides compliance risk management opinions on the issuance of new products or activities and Credit Recommendation Memorandum (MRK).

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko kepatuhan, Bank melaksanakan penilaian profil risiko kepatuhan secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi risiko kepatuhan secara *bankwide*.

As an output of the compliance risk management process, the Bank conducts a quarterly risk profile of the compliance risk profile of several risk indicator parameters in accordance with prevailing regulatory provisions to obtain an overview of the bankwide risk level of compliance risk.

Analisis perbedaan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan jangka waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo kontrak dan asumsi perilaku (*behavioral assumptions*):

Maturity Mismatch Analysis

The table below showed the maturity gap analysis of the Group on December 31, 2020 and 2019 arranged by remaining days until maturity date and behavioral assumptions:

	2020								
	Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 - 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta Rp Million	
Aset									Asset
Tanpa suku bunga									Without interest
Kas	-	1.871.377	-	-	-	-	-	1.871.377	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	2.380.915	-	-	-	-	-	2.380.915	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	(43)	1.399.765	-	-	-	-	-	1.399.722	Demand deposits with other bank
Tagihan derivatif	-	2.597	431	260	-	-	-	3.288	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	(5.228)	447.064	1.123.945	922.389	7.543	-	-	2.495.713	Acceptance receivables
Kredit	(11.251)	21.796	2.051	15.907	32.294	60.601	107.007	228.404	Loans
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	-	660.648	660.648	Investments in share of stock
Efek-efek	-	3.919	2.751	604	-	-	-	7.275	Securities
Aset lain-lain - bersih	-	654.823	573.703	-	483.696	-	2.855	1.715.077	Other assets - net
Suku bunga variabel									Variable interest rate
Giro pada bank lain	-	638.187	-	-	-	-	-	638.187	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	11	-	-	-	-	-	11	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	497.398	-	-	-	-	-	497.398	Securities
Kredit	(4.932.364)	90.699	402.961	1.988.367	1.139.998	4.757.659	13.648.434	17.095.755	Loans
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(704)	7.367.451	911.952	171.288	-	-	-	8.449.987	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	(15.938)	241.235	229.537	538.248	696.749	4.857.252	36.010.440	42.557.523	Securities
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(1.476)	17.259.226	-	-	-	-	-	17.257.750	Securities purchased with agreements to resell
Kredit	(579.868)	3.957.076	10.857.421	30.424.865	9.820.669	23.615.755	20.689.948	98.785.867	Loans
Tagihan anjak piutang	(113.590)	75.000	-	709.863	-	-	-	671.273	Factoring receivable
Piutang sewa pembiayaan	(23.167)	4.449	4.351	155.840	126.009	57.054	108.913	433.449	Finance leases receivables
Piutang pembiayaan konsumen	(263.381)	24.583	39.920	880.505	2.086.518	4.401.748	5.831	7.175.724	Consumer financing receivables
Aset lain-lain - bersih	-	775	1.538	6.723	8.148	17.944	521	35.649	Other assets - net
Jumlah Aset	(5.947.011)	36.938.346	14.150.561	35.814.860	14.401.624	37.768.014	71.234.597	204.360.991	Total Asset
Liabilitas									Liabilities
Tanpa suku bunga:									Without interest
Liabilitas segera	-	202.644	-	-	-	-	-	202.644	Liabilities payable immediately
Simpanan	-	5.974.069	1.523.803	587.908	-	-	-	8.085.780	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	9.643	-	-	-	-	-	9.643	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	2.345	408	432	-	-	-	3.185	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	447.202	1.125.836	925.313	7.804	-	-	2.506.155	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	-	12.829	319.212	14.006	-	114.659	413.008	873.714	Other liabilities
Suku bunga variabel:									Variable interest rate
Simpanan	-	3.971.365	4.500.943	47.207.848	6.135	-	-	55.686.291	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	297.451	-	-	-	-	-	297.451	Deposits from other banks
Suku bunga tetap:									Fixed interest rate
Simpanan	-	49.939.507	21.116.758	8.128.256	72.598	-	-	79.257.119	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	1.055.809	7.102	3.500	-	-	-	1.066.411	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	2.518.308	-	-	-	-	-	2.518.308	Securities sold with agreements to repurchase third parties
Pinjaman yang diterima	-	141.889	253.269	1.145.442	1.067.574	485.352	-	3.093.526	Borrowings
Obligasi subordinasi	-					3.788.241		3.788.241	Subordinated bonds
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.901.408	5.622.084	-	3.989.400	-	11.512.892	Securities issued
Jumlah Liabilitas	-	64.573.061	30.748.739	63.634.789	1.154.111	8.377.652	413.008	168.901.360	Total Liabilities
Selisih	(5.947.011)	(27.634.715)	(16.598.178)	(27.819.929)	13.247.512	29.390.362	70.821.589	35.459.631	Difference

	2019								
	Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/1 month or less	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 - 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 5 tahun/ > 2 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta Rp Million	
Aset									Asset
Tanpa suku bunga									Without interest
Kas	-	1.338.683	-	-	-	-	-	1.338.683	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	9.013.643	-	-	-	-	-	9.013.643	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	504.628	-	-	-	-	-	504.628	Demand deposits with other bank
Tagihan derivatif	-	19.056	18.637	-	-	-	-	37.693	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	-	11.386	190.847	2.259.597	95.102	20.611	-	2.577.543	Acceptance receivables
Kredit	(42)	-	79	1.948	2.900	33.702	21.849	60.436	Loans
Penyertaan dalam bentuk saham	(625)	-	-	-	-	-	753.830	753.205	Investments in share of stock
Efek-efek	-	-	24.541	10.710	-	-	-	35.251	Securities
Aset lain-lain - bersih	-	986.366	-	15.359	42.992	-	4.687	1.049.404	Other assets - net
Suku bunga variabel									Variable interest rate
Giro pada bank lain	-	343.930	-	-	-	-	-	343.930	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	11	-	-	-	-	-	11	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	1.561.631	-	-	-	-	-	1.561.631	Securities
Kredit	(3.256.386)	5.500.501	12.325.816	33.897.310	12.430.159	26.187.044	22.881.121	109.965.565	Loans
Suku bunga tetap									Fixed interest rate
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3.410.433	698.404	50.000	-	-	-	4.158.837	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	(23.500)	1.918.176	1.864.344	3.537.597	548.229	2.333.962	6.126.230	16.305.038	Securities
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.135.529	1.757.111	6.789.438	-	-	-	11.682.078	Securities purchased with agreements to resell
Kredit	(701.512)	690.770	564.743	1.911.944	1.654.509	6.163.446	16.414.989	26.698.889	Loans
Tagihan anjak piutang	(37.356)	677.126	774	51.240	3.247	-	-	695.031	Factoring receivable
Piutang sewa pembiayaan	(27.563)	66.924	51.895	377.231	132.517	77.972	62.235	741.211	Finance leases receivables
Piutang pembiayaan konsumen	(175.652)	538.900	875.065	2.876.946	3.054.748	2.674.924	1.181	9.846.112	Consumer financing receivables
Aset lain-lain - bersih	-	817	1.609	6.988	8.687	20.037	3.606	41.744	Other assets - net
Jumlah Aset	(4.222.636)	29.718.510	18.373.865	51.786.308	17.973.090	37.511.698	46.269.728	197.410.563	Total Asset
Liabilitas									Liabilities
Tanpa suku bunga									Without interest
Liabilitas segera	-	174.641	-	-	-	-	-	174.641	Liabilities payable immediately
Simpanan	-	5.706.258	2.579.863	444.809	-	-	-	8.730.930	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	1.733	-	-	-	-	-	1.733	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	19.338	18.650	-	-	-	-	37.988	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	365.364	1.284.118	923.445	3.231	7.335	-	2.583.493	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	-	310.971	129.920	-	-	604.278	207.138	1.252.307	Other liabilities
Suku bunga variabel									Variable interest rate
Simpanan	-	7.757.429	3.359.798	37.052.124	-	-	-	48.169.351	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	250.130	-	-	-	-	-	250.130	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	380.000	-	-	832.762	-	-	1.212.762	Borrowings
Suku bunga tetap									Fixed interest rate
Simpanan	-	43.172.375	23.072.217	8.174.014	84.022	-	-	74.502.628	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	3.598.274	5.250	5.000	5.000	-	-	3.613.524	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	4.910.465	-	-	-	-	-	4.910.465	Securities sold with agreements to repurchase third parties
Pinjaman yang diterima	-	181.187	351.894	1.260.829	1.385.961	1.252.193	-	4.432.064	Borrowings
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	-	2.490.068	1.295.088	3.785.156	Subordinated bonds
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	7.508.632	3.985.165	-	11.493.797	Securities issued
Jumlah Liabilitas	-	66.828.165	30.801.710	47.860.221	9.819.608	8.339.039	1.502.226	165.150.969	Total Liabilities
Selisih	(4.222.636)	(37.109.655)	(12.427.845)	3.926.087	8.153.482	29.172.659	44.767.502	32.259.594	Difference

57. KONTINJENSI, IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a. Bank mengadakan Perjanjian Induk Bancassurance dengan PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Juni 2016 mengenai persetujuan Bank untuk mempromosikan, memperkenalkan dan menjelaskan produk-produk AMAG kepada para nasabah Bank di Indonesia berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan nilai fasilitas awal adalah sebesar Rp 601.976 juta. Salah satu bentuk promosi produk AMAG adalah dalam bentuk asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai dengan fasilitas KPM di seluruh kantor cabang dan perwakilan yang menjadi wewenang Bank, dengan syarat dan prosedur penutupan objek pertanggungan ditentukan oleh AMAG. Perjanjian ini akan tetap berlaku selamanya.

57. CONTINGENCIES, COMMITMENTS AND OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. The Bank entered into Master Bancassurance Agreement with PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) based on joint agreement dated June 27, 2016 regarding the Bank consent to promote, introduce and explain AMAG's products to Bank's customers in Indonesia based on agreement with upfront facilitation fee amounting to Rp 601,976 million. Among others, the promotion of AMAG's product is in motor vehicle insurance funded by KPM facility in all Bank's branches and Bank's authorized representative with terms and procedures of coverage determine by AMAG. This agreement shall remain effective in perpetuity.

Pada tanggal 30 Desember 2020, Bank mengadakan perubahan atas perjanjian kerjasama *Bancassurance*, dimana pembayaran atas komisi dilakukan setiap tahun dengan jangka waktu perjanjian 20 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 2020.

On December 30, 2020 the Bank has amend the Bancassurance agreement, whereby the payment of commission is made annually with 20 years tenor start from July 1, 2020.

Magna Sehat

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Magna Sehat dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2018.

Pada tanggal 8 November 2019 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Magna Sehat, dimana kedua pihak sepakat untuk menambahkan ketentuan yang mengatur proses pemasaran kepada Nasabah Individu.

Magna Sehat

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance product marketing Magna Sehat with AMAG based on agreement dated on November 1, 2018.

On November 8, 2019 the Bank has its first amendment of Bancassurance Agreement Magna Sehat, whereby both parties agree to to the additional of terms regarding marketing process to individual customers.

Asuransi Kecelakaan Diri

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Asuransi Kecelakaan Diri dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2019.

Pada tanggal 1 Agustus 2019 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Kecelakaan Diri, dimana kedua pihak sepakat untuk menambahkan ketentuan yang mengatur proses penutupan polis kepada nasabah KEP dan menambahkan ketentuan pada ayat 1 pasal 17.

Self Accident Insurance

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance product marketing Self Accident Insurance with AMAG based on agreement dated on April 9, 2019.

On August 1, 2019 the Bank has its first amendment of joint agreement of Bancassurance Product Self Accident Insurance, whereby both parties agreed to add some policies regarding the process of the closure of insurance policy of KEP customers and add some policies to article 17 verse 1.

Magna Property

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Non Kendaraan Bermotor dengan PT Panin Insurance berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juni 2011.

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Bank mengadakan perubahan ketiga atas perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk Bancassurance Asuransi Non Kendaraan Bermotor, dimana kedua pihak sepakat untuk menambah ketentuan referensi produk.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Bank mengadakan perubahan keempat atas perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Asuransi Non Kendaraan Bermotor, dimana kedua pihak sepakat untuk menambah ketentuan perluasan penawaran asuransi.

Magna Property

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance product marketing Non-Vehicle Insurance with PT Panin Insurance based on Joint Agreement dated June 21, 2011.

On October 17, 2017 the Bank has the third amendment of the joint agreement of Bancassurance Reference Product, Non-Vehicle Insurance, whereby the both parties has agreed to add the policies regarding the product reference.

On March 29, 2019 the Bank has its fourth amendment of the agreement of Bancassurance product reference marketing of Non-Vehicle Insurance, where both parties agree to the additional of terms regarding insurance offerings.

Magna Secure

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran referensi produk *Bancassurance* Magna Secure dengan AMAG berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017.

Magna Secure

The Bank enters the agreement of product reference marketing of Bancassurance Magna Secure with AMAG based on the agreement dated November 20, 2017.

Pada tanggal 15 November 2019, Bank mengadakan perubahan kedua atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Asuransi Magna Secure, dimana kedua pihak sepakat untuk menambahkan ketentuan perluasan penawaran Asuransi.

On November 15, 2019 the Bank has its second amendment of the agreement of Bancassurance Product Magna Secure Insurance, whereby both parties agree to the additional of terms regarding Insurance offerings.

b. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Panin Dana Pasti dengan PT Panin Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.254-A/Dir/006/06.11, No 254-B/Dir/006/06.11 dan No. 254-C/Dir/006/06.11 tanggal 22 Juni 2011.

b. The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance Panin Dana Pasti with PT Panin Life based on Agreement Letter No. 254-A/Dir/006/06.11, No. 254-B/Dir/006/06.11 and No. 254-C/Dir/006/06.11 dated June 22, 2011.

Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen pemasaran dengan memperoleh kompensasi berupa komisi, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Based on the agreement, the Bank act as marketing agent and obtains compensation such as commission, for 5 years and can be renewed.

Pada tanggal 20 Mei 2013, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah mekanisme penarikan nilai tunai Produk Asuransi Panin Dana Pasti. Pada tanggal 4 November 2013, PT Panin Life berubah nama menjadi PT Panin Dai-ichi Life.

On May 20, 2013 the Bank amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to change the mechanism of the withdrawal of value cash Produk Asuransi Panin Dana Pasti. On November 4, 2013, PT Panin Life changed its name into PT Panin Dai-ichi Life.

Pada tanggal 26 September 2016, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan perubahan komisi yang diterima Bank menjadi sebesar 0,33%.

On September 26, 2016 the Bank has amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to extend the period of the agreement up to June 21, 2021 and the changes of the commision earned by Bank to 0.33%.

Produk *Bancassurance* yang dimaksud dalam perjanjian adalah produk-produk asuransi jiwa dengan dilengkapi manfaat pasti yang diterbitkan oleh PT Panin Dai-Ichi Life, yang terdiri atas Produk Panin Dana Pasti, Produk Panin Flexilinked dan Produk Panin Lifevestlink.

Bancassurance product stated in the joint agreement refer to life insurance which is fulfilled with guaranteed benefit published by PT Panin Dai-Ichi Life, consists of Produk Panin Dana Pasti, Produk Panin Flexilinked and Produk Panin Lifevestlink.

c. Panin Premier Protection

c. Panin Premier Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Panin Premier Protection dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Juli 2013.

The Bank entered into a joint agreement of Bancassurance with PT Panin Dai-ichi Life based on Agreement Letter dated July 23, 2013.

Pada tanggal 6 Agustus 2019 Bank mengadakan perubahan kedua belas atas Perjanjian Produk Bancassurance, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah pasal mengenai kepatuhan dan data nasabah dan spesifikasi produk.

On August 6, 2019 the Bank has the twelfth amendment of Agreement of Bancassurance, whereby the both parties has agreed to amend the article about compliance and customer data and product specification.

Pada tanggal 18 Mei 2020 Bank mengadakan perubahan ketiga belas atas Perjanjian Produk Bancassurance, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah spesifikasi produk Panin Premier Protection.

On May 18, 2020 the Bank has its thirteenth amendment of the bancassurance agreement, whereby both parties agree to change the product specification of Panin Premier Protection.

Critical Illness Infinite Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection* dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2016.

Pada tanggal 26 Oktober 2016 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance Critical Illness Infinite Protection*, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah seluruh Standard Operating Procedure dan menambahkan pasal mengenai *twisting/churning*.

Solusi Garda Asuransi Prima

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Solusi Garda Asuransi Prima dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2015.

Pada tanggal 1 November 2017 Bank mengadakan perubahan pertama atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Solusi Garda Asuransi Prima, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah lampiran spesifikasi produk.

Premier Maxima Protection

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk *Bancassurance* Premier Maxima Protection dengan PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Mei 2018.

Pada tanggal 18 Mei 2020 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Produk *Bancassurance* Premier Maxima Protection, dimana kedua pihak sepakat untuk menambah spesifikasi produk Premier Maxima Protection.

d. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan IV dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 014/BTIM-BANKPANIN/0808 tanggal 22 Agustus 2008.

Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen penjual dengan memperoleh kompensasi berupa imbal jasa.

Pada tanggal 25 Agustus 2011 Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah daftar reksadana yang ditawarkan menjadi Bahana Reksadana Panin Terproteksi VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV dan AXVIII.

Critical Illness Infinite Protection

The Bank has entered into joint agreement of Bancassurance Marketing Product, Critical Illness Infinite Protection with PT Panin Dai-ichi Life based on joint agreement dated February 15, 2016.

On October 26, 2016 the Bank has its first amendment of into joint agreement of Bancassurance Marketing Product, Critical Illness Infinite Protection, whereby both parties agreed to amend all Standard Operating Procedures and add the article about twisting/ churning.

Solusi Garda Asuransi Prima

The Bank entered into a marketing agreement for Bancassurance products, Solusi Garda Asuransi Prima with PT Panin Dai-ichi Life based on a Cooperation Agreement dated November 20, 2015.

On November 1, 2017 the Bank has its first amendment of the agreement of Bancassurance Marketing Product, Solusi Garda Asuransi Prima, whereby both parties has agreed to change the product specification appendix.

Premier Maxima Protection

The Bank has entered into joint agreement of Bancassurance Marketing Product, Premier Maxima Protection with PT Panin Dai-ichi Life based on agreement dated May 21, 2018.

On May 18, 2020 Bank has its third amendment to Bancassurance product agreement of Premier Maxima Protection whereby both parties agreed to have additional product specification on Premier Maxima Protection.

d. The Bank entered into a marketing agreement for Bahana Reksa Panin Terproteksi III and IV with PT Bahana TCW Investment Management based of an Agreement Letter No. 014/BTIM-BANKPANIN/0808 dated August 22, 2008.

Based on the agreement, the Bank acts as the sole sales agent and obtain compensation in the form of service fees.

On August 25, 2011 the Bank has amended the cooperation agreement whereby both parties agreed to change the list of mutual funds offered to become Bahana Reksadana Panin Terproteksi VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV and AXVIII.

Pada tanggal 20 Juli 2012, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama pemasaran dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

On July 20, 2012 the Bank made changes on the joint agreement in marketing, wherein both sides agreed to change the period of the agreement for 5 years and can be renewed.

Reksadana Bahana

Bahana Mutual Funds

Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Oktober 2014 dalam memasarkan Reksa Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas Prima.

The Bank has entered into joint agreement with PT Bahana TCW Investment Management based on the agreement dated October 28, 2014 in marketing Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Mutual Funds.

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian.

On October 17, 2019 the Bank has its third amendment of the agreement, whereby both parties agreed to extend the period of the agreement.

Pada tanggal 18 November 2020 Bank mengadakan perubahan keempat atas Perjanjian Kerjasama, dimana kedua pihak sepakat dan setuju untuk memperbarui rincian informasi produk Reksa Dana Ganesha Abadi menjadi Reksa Dana Ganesha Abadi Kelas G serta menambahkan Fitur baru dengan nama produk Reksa Dana Ganesha Abadi Kelas D.

On November 18, 2020 the Bank has its fourth amendment on the agreement whereby both parties agreed to renew detail information of mutual fund product of Reksa Dana Ganesha Abadi and to name the product as Reksa Dana Ganesha Abadi Class G also to add new feature and name the product Reksa Dana Ganesha Abadi Class D.

e. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 7 dengan PT Insight Investments Management berdasarkan kerjasama No. 292/IIM/BOD/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

   Dalam perjanjian tersebut, Bank bertindak sebagai agen penjual dengan memperoleh kompensasi berupa imbal jasa.

e. The Bank entered into a joint agreement of Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 7 with PT Insight Investments Managament based on Agreement Letter No. 292/IIM/BOD/X/2016 dated October 5, 2016.

   Based on the agreement, the Bank act as sales agent to obtain compensation in the form of rewards.

f. Bank mengadakan perjanjian kerjasama penjualan efek Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 132 dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan kerjasama No. 014/BTIM-PANIN/X/14 tanggal 28 Oktober 2014.

   Pada tanggal 3 Oktober 2016, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama melalui Addendum I No. 026/BTIM-PANIN/X/16.

   Pada tanggal 9 Februari 2017, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama melalui Addendum II No. 004/BTIM-PANIN/II/17 Reksa Dana.

f. The Bank entered into a marketing agreement of the sale of Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 132 with PT Bahana TCW Investment Management based on Agreement No. 014/BTIM-PANIN/X/14 dated October 28, 2014.

   On October 3, 2016 the Bank made changes on the joint agreement based on Addendum I No. 026/BTIM-PANIN/X/16.

   On February 9, 2017, the Bank made changes on the joint agreement based on Addendum II No. 004/BTIM-PANIN/II/17 Reksa Dana.

g. Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Panin Asset Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 September 2014 dalam memasarkan Reksa Panin Dana Utama Plus II, Reksa Dana Panin Dana Prioritas, Reksa Dana Panin Dana Unggulan dan Reksa Dana Panin Dana Prima.

g. The Bank entered into a joint agreement with PT Panin Asset Management based on the agreement dated September 15, 2014 in marketing Reksa Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Prioritas Mutual Funds, Panin Dana Unggulan Mutual Funds, Panin Dana Prima Mutual Funds.

Pada tanggal 13 September 2019 Bank mengadakan perubahan ketiga atas Perjanjian Kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah definisi dan pengertian, kewajiban dan tanggung jawab Agen Penjual dan jangka waktu perjanjian.

On September 31, 2019 the Bank has third amendment of the agreement, whereby both parties agreed to change the definition and meaning, liabilities and responsibility of Selling Agent and the term of agreement.

CFI

a. CFI mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan dengan Bank, pihak berelasi, berdasarkan akta No. 24 tanggal 11 Juni 2003 jo akta Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 5 tanggal 7 September 2005, yang keduanya dibuat oleh James Herman Rahardjo, S.H., notaris di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Bank akan membeli piutang-piutang yang dimiliki CFI terhadap pihak-pihak ketiga yang telah membeli mobil baik baru maupun bekas yang dibiayai oleh CFI. Tujuan dari kerjasama/ fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan pihak ketiga (konsumen) secara "*consumer finance without recourse*" yang dananya disalurkan melalui CFI.

Tingkat suku bunga untuk fasilitas perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan (*channeling*) menjadi sebesar 10,60% per tahun untuk tenor 1 - 12 bulan, 11,10% per tahun untuk tenor 13 - 24 bulan dan 11,25% per tahun untuk tenor 25 - 36 bulan.

Berdasarkan surat dari Bank No.355/IBD/EXT/16 tanggal 30 September 2016, CFI memperoleh fasilitas kerjasama penyaluran pembiayaan (*channeling*) baru. Tujuan dari kerjasama/fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan kendaraaan bermotor baru dan bekas yang dananya disalurkan melalui CFI. Jumlah pokok yang dapat dibiayai tidak melebihi Rp 2.000 miliar dengan jangka waktu kerjasama selama 60 bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Jangka waktu pinjaman atas fasilitas ini adalah maksimum 72 bulan untuk pembiayaan mobil baru dan maksimum 48 bulan untuk pembiayaan mobil bekas.

Jumlah pokok sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen sehubungan dengan fasilitas kerjasama penyaluran pembiayaan (*channeling*) ini masing-masing sebesar nihil dan Rp 612.606 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

CFI

a. CFI enters into channeling agreement with the Bank, related party, based on deeds No. 24 dated June 11, 2003 jo Addendum of Channeling Agreement Deeds No. 5 dated September 7, 2005, which both are made by James Herman Rahardjo, S.H., notary in Jakarta. In that agreement, noted that the Bank will buy receivables own by CFI from third parties that bought new and used car, financed by CFI. The purpose of this agreement/ financing facility is to finance the purchase of vehicle by third parties, in consumer finance without recourse, and the fund will be transferred via CFI.

Interest rate for channeling agreement amounting to 10.60% per annually for tenor 1 – 12 months, 11.10% per annually for tenor 13 – 24 months, and 11.25% per annually for tenor 25 – 36 months.

Based on letter from the Bank No. 355/IBD/EXT/16 dated September 30, 2016, CFI obtained new channeling facilities. The purpose of this channeling agreement is to finance new and used vehicles, which the fund will be transferred via CFI. The principal amount that can be financed, no to exceed Rp 2,000 billion with the tenor of 60 months since the signing of the agreement. The tenor of this borrowing facility is maximum at 72 months to finance new car, and maximum at 48 months for used car.

Total outstanding of finance lease and consumer financing that includes in this channeling agreement is amounting to nil and Rp 612,606 million, each on December 31, 2020 and 2019.

b. CFI mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan bersama (*joint financing*) dengan Bank, pihak berelasi, berdasarkan akta No. 28 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat oleh Sri Rahayuningsih, S.H., notaris di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Bank akan mendanai piutang-piutang yang dimiliki CFI terhadap pihak- pihak ketiga yang telah membeli mobil baik baru maupun bekas yang dibiayai oleh CFI. Tujuan dari kerjasama/ fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan pihak ketiga (konsumen) secara porsi pembiayaan bersama adalah CFI sebesar 10% dari nilai pembiayaan bersama dan Bank sebesar 90% dari nilai pembiayaan bersama.

CFI memperoleh Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 6.000 miliar dan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Periode tersedianya dana atas fasilitas ini adalah 72 bulan untuk pembiayaan mobil penumpang dan 60 bulan untuk pembiayaan mobil komersial.

Tingkat suku bunga untuk fasilitas perjanjian kerjasama pembiayaan penyaluran pembiayaan (*joint financing*) mengalami perubahan, dimana berdasarkan surat terakhir No. 344/IBD/EXT/20 tanggal 02 November 2020 dari Bank untuk mobil komersial sebesar 8,00% per tahun untuk tenor 1 – 12 bulan, 8,25% per tahun untuk tenor 13 – 24 bulan, 8,50% per tahun untuk tenor 25 – 36 bulan, 8,75% per tahun untuk tenor 37 – 48 bulan, 9,75% per tahun untuk tenor 49 – 60 bulan; sedangkan untuk mobil penumpang sebesar 7,00% per tahun untuk tenor 1 – 12 bulan, 7,25% per tahun untuk tenor 13 – 24 bulan, 7,50% per tahun untuk tenor 25 – 36 bulan, 7,75% per tahun untuk tenor 37 – 48 bulan, 8,75% per tahun untuk tenor 49 – 60 bulan, 9,75% per tahun untuk tenor 61 – 72 bulan.

Jumlah pokok pembiayaan konsumen sehubungan dengan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama (*joint financing*) masing-masing sebesar Rp 2.507.963.505 ribu dan Rp 3.173.776.271 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

c. CFI mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan bersama (*joint financing*) dengan VMF, pihak berelasi, berdasarkan akta No. 08 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., notaris di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa VMF akan membeli piutang-piutang yang dimiliki CFI terhadap pihak- pihak ketiga yang telah membeli mobil baik baru maupun bekas yang dibiayai oleh CFI. Tujuan dari kerjasama/ fasilitas pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan pihak ketiga (konsumen) secara porsi pembiayaan bersama adalah CFI sebesar 10% dari nilai pembiayaan bersama dan VMF. sebesar 90% dari nilai pembiayaan bersama.

b. CFI enters into joint financing agreement with the Bank, related party, based on deed No. 28 dated May 9, 2019 made by Sri Rahayuningsih, S.H., notary in Jakarta. In that agreement, noted that the Bank will finance receivables owned by CFI from third parties that buys new and used car that financed by CFI. The purpose of this agreement is to finance the purchase of vehicles by third parties, by proportion. CFI will finance 10% of the outstanding and the Bank will finance 90% from the outstanding of the joint finance.

CFI obtain joint financing agreement with the outstanding not to exceed Rp 6,000 billion and the tenor of 10 years from the signing of the agreement. The fund will be available for 72 months period for passenger car and 60 months period for commercial car.

Interest rate of joint financing agreement has changed for few times, lastly based on letter No. 344/IBD/EXT/20 dated November 2, 2020 from the Bank. For commercial car 8% per annually for tenor 1 – 12 months, 8.25% per annually for tenor 13 – 24 moths, 8.50% per annually for tenor 25 – 36 months, 8.75% per annually for tenor 37 – 48 months, 9.75% per annually for tenor 49 – 60 months. For passenger car 7.00% per annually for tenor 1 – 12 months, 7.25% per annually for tenor 13 – 24 moths, 7.50% per annually for tenor 25 – 36 months, 7.75% per annually for tenor 37 – 48 months, 8.75% per annually for tenor 49 – 60 months, 9.75% per annually for tenor 41 – 72 months.

Total outstanding of consumer financing that includes in this joint financing agreement is amounting to Rp 2,507,964 million and Rp 3,173,776 million, each on December 31, 2020 and 2019.

c. CFI enters into joint financing agreement with VMF, related party, based on deed No. 08 dated December 5, 2018 made by Nanny Wiana Setiawan, S.H., notary in Jakarta. In the agreement, noted that VMF will buy receivables own by CFI from third parties that has bought new and used car, financed by CFI. The purpose of this agreement is to finance the purchase of vehicle by third parties by propotion. CFI will finance 10% of outstanding and VMF will finance 90% of outstanding.

Tingkat suku bunga untuk fasilitas perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan bersama (*joint financing*) sebesar 11,00% per tahun untuk tenor 1 - 48 bulan.

CFI memperoleh Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 223.000 juta dan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Periode tersedianya dana atas fasilitas ini adalah 48 bulan untuk pembiayaan mobil penumpang dan 48 bulan untuk pembiayaan mobil komersial.

Pada tanggal 31 Desember 2019 fasilitas ini sudah dilunasi oleh VMF.

d. CFI menghadapi berbagai kasus hukum yang belum terselesaikan, tuntutan administrasi, dan gugatan sehubungan dengan kegiatan usaha CFI. Tidak memungkinkan bagi CFI untuk memperkirakan dengan pasti apakah CFI akan menghasilkan dalam setiap kasus hukum tersebut, atau jika tidak, dampak yang mungkin timbul.

Interest rate for the joint financing agreement is 11.00% per annually for tenor 1 – 48 months.

CFI obtain joint financing facility agreement with outstanding not to exceed Rp 223,000 million and tenor 12 months since the signing of the agreement. The period of availability of funds under this facility is 48 months for passenger car financing and 48 months for comercial car financing.

On December 31, 2019, this facility has been settled by VMF.

d. CFI faces various legal case that has not been settled, administration claim, and lawsuit due to operational activities of CFI. It is not posible for CFI to certainly estimate the probability of gain in every legal case, neither, the impact that may rise in every case.

58. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Mengacu pada ketentuan V.1 Peraturan Bursa Nomor I-A, setiap perusahaan tercatat memiliki saham oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor. Sehubungan dengan partisipasi Bank dalam HMETD yang dilakukan PDSB (anak perusahaan Bank) di tahun 2020, kepemilikan Bank meningkat menjadi 69,93%. Dengan perubahan tersebut, saham PDSB yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sebesar 4,97% dan hal tersebut lebih rendah dari ketentuan tersebut di atas. Oleh karena itu, Bank telah menjual kepemilikan saham di PDSB sebesar 1.020.500.000 saham atau setara dengan 2,63% pada Februari dan Maret 2021, sehingga kepemilikan masyarakat terhadap PDSB adalah sebesar 7,6%.

58. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Referring to provision V.1 of Stock Exchange Regulation Number I-A, each listed company owns shares by non-controlling and non-majority shareholders of at least 50 million shares and at least 7.5% of the total shares in paid-up capital. In connection with the Bank's participation in the Pre-emptive Rights carried out by PDSB (a subsidiary of the Bank) in 2020, the Bank's ownership increased to 69.93%. With this amendment, the PDSB shares owned by the public amounted to 4.97% and this is lower than the aforementioned provision. Therefore, the Bank has sold its share ownership in PDSB amounting to 1,020,500,000 shares, equivalent to 2.63% in February and March 2021, so that the public's ownership of PDSB is 7.6%.

b. Sehubungan dengan pemberitaan di media massa tentang kasus yang dikaitkan dengan Bank Panin, serta penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik KPK di Kantor Pusat Bank pada tanggal 23 Maret 2021, dapat dijelaskan bahwa Manajemen Bank menghormati proses hukum dan prosedur kerja yang sedang dijalankan oleh KPK. Jika benar kasus tersebut tekait dengan pajak Bank, maka Bank menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bank bersikap kooperatif dan sangat terbuka, serta memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada penyidik KPK untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan. Bahwa selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016 tersebut, telah diikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang benar. Bank adalah wajib Pajak yang taat dan mengikuti seluruh aturan perpajakan. Selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, Bank juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel. Bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari Bank terkait urusan pajak tahun 2016. Bank sebagai perusahaan terbuka menjalankan perusahaan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* yang benar.

b. In connection with the news in the mass media about a case that was linked to Bank Panin, as well as the searches carried out by KPK investigators at the Bank's Head Office on March 23, 2021, it can be explained that the Bank Management respects the legal process and work procedures that are being carried out by KPK. If it is true that the case is related to Bank taxes, the Bank confirms that it will comply as long as the tax findings are in accordance with the applicable tax regulations. Bank is cooperative and very open and provide the widest possible opportunity and access for KPK investigators to carry out their duties according to the provisions of regulations. During the 2016 tax assessment process, all the proper mechanisms and procedures had been followed. Bank is a good taxpayer who obey and follow all tax regulations. During the examination process and tax legal efforts in 2016, the Bank was accompanied by a competent and credible institution. It is not true if there are parties who claim to have received gifts or promises from the Bank regarding tax matters in 2016. The bank as a publicly listed company runs the company according to the correct principles of Good Corporate Governance.

59. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai dengan 233 dan informasi tambahan dari halaman 234 sampai dengan 239 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Bank untuk diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2021.

59. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY INFORMATION

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statement of page 1 to 233 and supplementary information on page 234 to 239 are the responsibilities of the management and, are approved and authorized for issue by the Director on March 29, 2021.

60. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS INDUK

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No.4 (revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak yang disajikan pada biaya perolehan.

60. BASIS PREPARATION PARENT ENTITY’S STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

The separate financial statements of parent entity are prepare in accordance with the statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) No.4 (revised 2013), “Separate Financial Statements”. Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries which are stated at cost.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
PARENT ENTITY ONLY
SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S STATEMENT OF FINANCIAL POSITION *)
DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
ASET			**ASSETS**
KAS	1.855.967	1.317.625	**CASH**
GIRO PADA BANK INDONESIA	2.145.949	8.629.958	**DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA**
GIRO PADA BANK LAIN			**DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS**
Pihak berelasi	762.539	39.295	Related parties
Pihak ketiga	1.258.044	757.336	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(43)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	2.020.540	796.631	Total
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN			**PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS**
Pihak berelasi	200.000	300.000	Related parties
Pihak ketiga	6.940.649	3.043.848	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(704)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	7.139.945	3.343.848	Total
EFEK-EFEK			**SECURITIES**
Pihak berelasi	97.407	101.750	Related parties
Pihak ketiga	42.501.889	17.466.925	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(30)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	42.599.266	17.568.675	Total
TAGIHAN DERIVATIF - PIHAK KETIGA	3.288	37.693	**DERIVATIVE RECEIVABLES - THIRD PARTIES**
EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI - PIHAK KETIGA	17.259.226	11.682.078	**SECURITIES PURCHASED WITH AGREEMENTS TO RESELL - THIRD PARTIES**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.476)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	17.257.750	11.682.078	Total
KREDIT			**LOANS**
Pihak berelasi	1.726.684	1.131.445	Related parties
Pihak ketiga	111.861.025	131.360.409	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.284.924)	(3.716.327)	Allowance for impairment losses
Jumlah	108.302.785	128.775.527	Total
TAGIHAN AKSEPTASI - PIHAK KETIGA	2.500.941	2.577.543	**ACCEPTANCES RECEIVABLE - THIRD PARTIES**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.228)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	2.495.713	2.577.543	Total
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM	3.702.407	2.302.401	**INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK**
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(625)	Allowance for impairment losses
Jumlah	3.702.407	2.301.776	Total
BIAYA DIBAYAR DI MUKA	54.288	99.886	**PREPAID EXPENSES**
ASET TETAP - BERSIH	9.924.894	10.001.964	**PREMISES AND EQUIPMENT - NET**
ASET PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	55.424	-	**DEFERRED TAX ASSETS - NET**
ASET TAKBERWUJUD	196.087	120.221	**INTANGIBLE ASSETS**
ASET LAIN-LAIN	3.565.246	2.998.923	**OTHER ASSETS**
JUMLAH ASET	201.319.549	190.252.348	**TOTAL ASSETS**

***) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA**

***) PRESENTED UNDER COST METHOD**

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
31 DESEMBER 2020 (Lanjutan)

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
PARENT ENTITY ONLY
SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S STATEMENT OF FINANCIAL POSITION *)
DECEMBER 31, 2020 (Continued)

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
LIABILITAS DAN EKUITAS			**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS			**LIABILITIES**
LIABILITAS SEGERA	196.167	151.708	**LIABILITIES PAYABLE IMMEDIATELY**
SIMPANAN			**DEPOSITS**
Pihak berelasi	2.772.083	1.655.453	Related parties
Pihak ketiga	133.644.041	121.092.982	Third parties
Jumlah	136.416.124	122.748.435	Total
SIMPANAN DARI BANK LAIN			**DEPOSITS FROM OTHER BANKS**
Pihak berelasi	284.957	883	Related parties
Pihak ketiga	1.095.221	3.511.547	Third parties
Jumlah	1.380.178	3.512.430	Total
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - PIHAK KETIGA	2.518.308	4.910.465	**SECURITIES SOLD WITH AGREEMENTS TO REPURCHASE - THIRD PARTIES**
LIABILITAS DERIVATIF - PIHAK KETIGA	3.185	37.988	**DERIVATIVE PAYABLES - THIRD PARTIES**
LIABILITAS AKSEPTASI - PIHAK KETIGA	2.506.155	2.583.493	**ACCEPTANCES PAYABLE - THIRD PARTIES**
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	-	6.789	**DEFERRED TAX LIABILITIES**
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - BERSIH			**SECURITIES ISSUED - NET**
Pihak berelasi	361.747	367.783	Related parties
Pihak ketiga	9.249.737	9.234.022	Third parties
Jumlah	9.611.484	9.601.805	Total
PINJAMAN YANG DITERIMA - PIHAK KETIGA	-	832.762	**BORROWINGS - THIRD PARTIES**
UTANG PAJAK	96.572	239.252	**TAXES PAYABLE**
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	1.086.590	798.909	**POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS**
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN	1.071.425	1.389.980	**ACCRUALS AND OTHER LIABILITIES**
OBLIGASI SUBORDINASI - BERSIH	3.788.241	3.785.156	**SUBORDINATED BONDS - NET**
JUMLAH LIABILITAS	158.674.429	150.599.172	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS			**EQUITY**
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 100 per saham			**CAPITAL STOCK -** par value of Rp 100 per share
Modal dasar - 96.000.000.000 saham			Authorized - 96,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.087.645.998 saham	2.408.765	2.408.765	Subscribed and paid-up - 24,087,645,998 shares
SAHAM YANG DIBELI KEMBALI	(610)	-	**TREASURY STOCK**
TAMBAHAN MODAL DISETOR	3.440.707	3.444.330	**ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	9.625.499	7.721.473	**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
SALDO LABA			**RETAINED EARNINGS**
Ditentukan penggunaannya	140.000	140.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	27.030.759	25.938.608	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	42.645.120	39.653.176	**TOTAL EQUITY**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	201.319.549	190.252.348	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

***) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA**

***) PRESENTED UNDER COST METHOD**

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR II: INFORMASI LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
PARENT ENTITY ONLY
SCHEDULE II: PARENT ENTITY'S STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME *)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			**OPERATING REVENUES AND EXPENSES**
Pendapatan Bunga			Interest Revenues
Bunga yang diperoleh	13.532.913	14.804.626	Interest earned
Provisi dan komisi kredit	390.217	515.034	Loan commissions and fees
Jumlah Pendapatan Bunga	13.923.130	15.319.660	Total Interest Revenues
Beban Bunga	6.256.513	7.600.859	Interest Expenses
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH	7.666.617	7.718.801	**INTEREST REVENUES - NET**
Pendapatan Operasional Lainnya			**Other Operating Revenues**
Keuntungan bersih penjualan efek	1.783.639	113.338	Net gain on sale of securities
Keuntungan bersih penilaian efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	45.835	75.629	Net gain on valuation of securities measured at fair value through profit and loss
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	211.957	119.081	Gain on foreign exchange transactions - net
Pendapatan dividen	35.740	24.393	Dividend income
Provisi dan komisi lainnya - bersih	98.872	130.696	Other commissions and fees - net
Pendapatan lainnya	815.239	1.028.918	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.991.282	1.492.055	Total Other Operating Revenues
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai			**Provision (Reversal) for Impairment Losses**
Aset keuangan	1.986.309	1.070.185	Financial assets
Aset non-keuangan	(10.137)	49.101	Non-financial assets
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	1.976.172	1.119.286	Total Provision for Impairment Losses
Beban Operasional Lainnya			**Other Operating Expenses**
Umum dan administrasi	1.593.933	1.643.650	General and administrative
Tenaga kerja	1.668.908	1.673.970	Personnel expenses
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	252.985	247.668	Pension and employee benefits
Lainnya	1.249.409	583.242	Others
Jumlah Beban Operasional Lainnya	4.765.235	4.148.530	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL	3.916.492	3.943.040	**INCOME FROM OPERATIONS**
PENDAPATAN NON OPERASIONAL			**NON OPERATING REVENUES**
Hasil sewa	15.041	16.838	Rental revenues
Lainnya - bersih	70.838	68.554	Others - net
Jumlah Pendapatan Non Operasional - Bersih	85.879	85.392	Total Non Operating Revenues - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.002.371	4.028.432	**INCOME BEFORE TAX EXPENSE**
BEBAN PAJAK	(927.179)	(963.259)	**TAX EXPENSE**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	3.075.192	3.065.173	**NET INCOME FOR THE YEAR**
PENGHASILAN KOMREHENSIF LAIN			**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Surplus revaluasi aset tetap	(6.594)	314.768	Gain on revaluation of premises
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	(200.394)	112.714	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	79.587	(106.870)	Income tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	(127.401)	320.612	Sub total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Perubahan nilai wajar efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.540.245	25.255	Changes in fair value of securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(538.747)	(6.314)	Income tax relating to item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	2.001.498	18.941	Sub total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	1.874.097	339.553	Total other comprehensive income for the current year net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	4.949.289	3.404.726	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME**
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)			**EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)**
Dasar/Dilusian	127,67	127,25	Basic/Diluted

***) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA**

***) PRESENTED UNDER COST METHOD**

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR III : INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
PARENT ENTITY ONLY
SCHEDULE III : PARENT ENTITY'S STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY *)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

				Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo Laba/Retained Earnings			
	Modal saham/ Capital stock	Saham yang dibeli kembali/ Treasury stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Surplus revaluasi aset tetap/ Gain on revaluation of premises and equipment	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ Actuarial gain (loss)	Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Changes in fair value on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	
Saldo per 1 Januari 2019	2.408.765	-	3.444.330	7.279.888	45.257	57.708	140.000	22.872.502	36.248.450	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	3.065.173	3.065.173	Net income for the year
Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi	-	-	-	(933)	-	-	-	933	-	Transfer of surplus revaluation of premises and equipment to retained earning arising from sale of revalued premises and equipment
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	-	236.075	84.537	18.941	-	-	339.553	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2019	2.408.765	-	3.444.330	7.515.030	129.794	76.649	140.000	25.938.608	39.653.176	Balance as of December 31, 2019
Saldo awal 1 Januari 2020	2.408.765	-	3.444.330	7.515.030	129.794	76.649	140.000	25.938.608	39.653.176	Beginning balance as of January 1, 2020
Perubahan dalam impelementasi awal PSAK 71	-	-	-	-	-	31.327	-	(1.984.353)	(1.953.026)	Changes in initial adoption of PSAK 71
Saldo awal yang disajikan kembali	2.408.765	-	3.444.330	7.515.030	129.794	107.976	140.000	23.954.255	37.700.150	Restated beginning balance
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	3.075.192	3.075.192	Net income for the year
Agio saham	-	-	(3.623)	-	-	-	-	-	(3.623)	Additional paid-in capital
Saham yang dibeli kembali	-	(610)	-	-	-	-	-	-	(610)	Treasury stock
Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi	-	-	-	(1.398)	-	-	-	1.398	-	Transfer of surplus revaluation of premises and equipment to retained earning arising from sale of revalued premises and equipment
Selisih kurs penerapan awal PSAK 71	-	-	-	-	-	-	-	(86)	(86)	Currency differences arising from initial adoption of PSAK 71
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	-	23.715	(151.116)	2.001.498	-	-	1.874.097	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2020	2.408.765	(610)	3.440.707	7.537.347	(21.322)	2.109.474	140.000	27.030.759	42.645.120	Balance as of December 31, 2020

***) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA**

***) PRESENTED UNDER COST METHOD**

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR IV: INFORMASI LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
PARENT ENTITY ONLY
SCHEDULE IV: PARENT ENTITY'S STATEMENT OF CASH FLOWS *)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

	2020 Rp Juta/ Rp Million	2019 Rp Juta/ Rp Million	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	13.447.840	15.105.275	Interest, loan commissions and fees received
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	(6.378.821)	(7.655.256)	Interest, prizes, fund commissions and fees paid
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	2.538.236	1.270.567	Other operating revenues received
Pembayaran beban operasional lainnya	(4.211.907)	(3.865.758)	Other operating expenses paid
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih	211.998	266.818	Gain on foreign exchange transactions - net
Penerimaan pendapatan non operasional - bersih	102.360	2.840	Non-operating revenues received - net
Pembayaran beban pajak	(916.751)	(979.793)	Tax expense paid
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	4.792.955	4.144.693	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan aset/liabilitas operasi			Changes in operating assets/liabilities
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(17.234)	143.800	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek (diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	4.039.327	(2.074.768)	Securities (measured at fair value through profit or loss)
Kredit	15.717.442	3.199.527	Loans
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(5.577.147)	1.334.654	Securities purchased with agreement to resell
Aset lain-lain	(364.045)	(867.928)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera	44.459	(90.326)	Liabilities payable immediately
Simpanan	13.667.689	(8.065.798)	Deposits
Simpanan dari bank lain	(2.132.252)	3.060.306	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	(736)	1.308	Acceptances payable
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(2.392.157)	4.910.465	Securities sold with agreement to repurchase
Liabilitas lain-lain	30.253	(263.909)	Other liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	27.808.554	5.432.024	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Pelepasan (perolehan) aset tak berwujud	45.743	(29.927)	Proceeds from disposal (acquisition) of intangible assets
Penerimaan dividen	35.740	24.393	Dividends received
Hasil penjualan aset tetap	880	(19)	Proceeds from sale of premises and equipment
Perolehan aset tetap	(129.397)	(30.908)	Acquisitions of premises and equipment
Pembelian investasi dalam bentuk saham	(1.420.269)	-	Purchases of investments in shares of stock
Efek-efek (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	(26.537.849)	(3.901.682)	Securities (other than those measured at fair value through profit or loss)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(28.005.152)	(3.938.143)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Pembelian saham treasuri	(4.233)	-	Treasury Stocks
Pembayaran liabilitas sewa	(67.882)	-	Lease liability payment
Pelunasan pinjaman yang diterima	(832.950)	-	Borrowing repayments
Pelunasan obligasi subordinasi yang diterbitkan	-	(2.000.000)	Redemption of subordinated bond
Penerimaan pinjaman yang diterima	-	402.438	Borrowings received
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(905.065)	(1.597.562)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.101.663)	(103.681)	**NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	14.088.062	14.341.272	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
Pengaruh perubahan kurs valuta asing	159.514	(149.529)	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	13.145.913	14.088.062	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			**SUPPLEMENTAL DISCLOSURES**
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents at end of year:
Kas	1.855.967	1.317.625	Cash on hand
Giro pada Bank Indonesia	2.145.949	8.629.958	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.020.583	796.631	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.123.414	3.343.848	Placement with Bank Indonesia and other bank
Jumlah	13.145.913	14.088.062	Total

***) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA**

***) PRESENTED UNDER COST METHOD**

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR V: INFORMASI INVESTASI DALAM ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
31 DESEMBER 2020

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
PARENT ENTITY ONLY
SCHEDULE V: PARENT ENTITY'S LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES
DECEMBER 31, 2020

	Persentase Pemilkan/ Percentage of Ownership		
	2020	2019	
	%	%	
Entitas Anak			**Subsidiaries**
Lembaga Pembiayaan			**Financing**
PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI)	51,49	51,49	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI)
Bank Syariah			**Sharia Banking**
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB)	69,93	53,70	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB)
Entitas Asosiasi			**Associate**
Sekuritas			**Securities**
PT Panin Sekuritas Tbk	29,00	29,00	PT Panin Sekuritas Tbk
Lembaga Pembiayaan			**Financing**
PT Verena Multi Finance Tbk (VMF)	25,06	25,06	PT Verena Multi Finance Tbk (VMF)

Seluruh entitas anak dan entitas asosiasi berdomisili di Jakarta

All subsidiaries and associate are domiciled in Jakarta

Investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi dalam informasi keuangan tersendiri entitas induk disajikan dengan metode biaya

Investment in subsidiaries and associate in financial information of the parent entity only are presented using the cost method

LAPORAN TAHUNAN 2020

ANNUAL REPORT

Sustainable Profit

PaninBank

Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Tel. : +62 21 2700545, 5735555
Fax. : +62 21 2700340
E-mail : panin@panin.co.id
Situs : www.panin.co.id